

MENGOPTIMALKAN POTENSI DI TENGAH SITUASI YANG TAK PASTI

OPTIMIZING POTENTIAL IN THE MIDST OF UNCERTAINTY

LAPORAN TAHUNAN 2020
ANNUAL REPORT



SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Disclaimers and Limitations of Liability

Selamat datang di Laporan Tahunan 2020 PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dengan tema "Mengoptimalkan Potensi di Tengah Situasi yang Tak Pasti". Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam berdasarkan fakta dan perkembangan bisnis PT Jaminan Kredit Indonesia sepanjang tahun 2020 serta masa depan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Laporan Tahunan 2020 ini diterbitkan sesuai Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perseroan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam Laporan Tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang serta lingkungan bisnis dimana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Pernyataan yang terdapat di Laporan Tahunan ini bukan menjadi jaminan kinerja di masa yang akan datang, mengingat kinerja aktual di masa depan dapat berbeda dengan pernyataan pada Laporan Tahunan ini karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di luar kendali Perseroan.

Laporan tahunan ini memuat kata "Jamkrindo" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Jaminan Kredit Indonesia yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau "IDR" merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau "USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Laporan ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan ini dapat dilihat dan diunduh di website resmi Jamkrindo yaitu www.jamkrindo.co.id.

Welcome to the 2020 Annual Report of PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) with the theme "Optimizing Potential In The Midst of Uncertainty". The theme was chosen based on in-depth analysis and study based on the facts and business development of PT Jaminan Kredit Indonesia throughout 2020 as well as the future sustainability of the Company's business.

The Annual Report 2020 is published in accordance with the Regulation of the Minister of SOEs PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

This Annual Report contains statements of financial condition, operating results, projections, plans, strategies, policies, and objectives of the Company, which are classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws and regulations, except historical matters. Such statements have the prospect of risks, uncertainties, and may result in actual developments materially different from those reported.

The prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions and the business environment in which the Company conducts business activities. The statement contained in this Annual Report is not a guarantee of future performance, considering that actual performance in the future may differ from the statements in this Annual Report as it may be influenced by several factors beyond the Company's control.

This annual report contains the words "Jamkrindo" and "Company" which are defined as PT Jaminan Kredit Indonesia which conducts business activities in the field of credit guarantee. The denomination of "Rupiah", "Rp" or "IDR" refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while "US Dollar" or "USD" refers to the official currency of the United States. All financial information is presented in Rupiah.

This report is presented in two languages, namely Bahasa Indonesia and English using typefaces and font sizes that are easy to read and print with good quality. This Annual Report can be viewed and downloaded on Jamkrindo's official website, www.jamkrindo.co.id.

PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Table and Graphic Notifications

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.

The tables and graphs in this Annual Report present numerical data with writing standards following Indonesian rules. Numerical exposure in text uses standard Indonesian and English rules in context.



PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

Merosotnya perekonomian akibat pandemi COVID-19 merupakan tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo di tahun 2020. Kinerja sektor UMKM juga mengalami penurunan akibat kontraksi ekonomi yang terjadi sepanjang tahun 2020. Hal ini juga berdampak pada peningkatan risiko usaha bagi Perusahaan.

Menghadapi tantangan tersebut, Jamkrindo berupaya untuk mengelola tantangan yang ada dengan melakukan sejumlah strategi efisiensi dan strategi keuangan yang tepat. Upaya yang dilakukan Perusahaan sepanjang tahun 2020 bukan hanya sekedar untuk bertahan di tengah kondisi yang sulit, tapi juga untuk memastikan kesiapan Perusahaan tatkala pandemi ini telah berakhir.

Di tahun 2020, Perusahaan juga memperkuat sinergi dengan anggota IFG (Indonesia Financial Group) untuk memastikan Perusahaan dapat meraih pertumbuhan yang berkelanjutan di masa-masa mendatang.

The economic downturn due to the COVID-19 pandemic is the main challenge for Jamkrindo in 2020. The MSME sector performance also decreased due to economic contraction that occurred throughout 2020. This also has an impact on the increased business risk for the Company.

Facing these challenges, Jamkrindo strives to manage existing challenges by carrying out a number of efficiency strategies and appropriate financial strategies. The Company's efforts throughout 2020 are not only to survive in the midst of difficult conditions, but also to ensure the Company's readiness when this pandemic has ended.

In 2020, the Company also strengthens synergy with IFG (Indonesia Financial Group) members to ensure the Company can achieve sustainable growth in the future.

KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

2019



TUMBUH CERDAS DI TENGAH PERUBAHAN

Grow Smart Amid Changes

Sepanjang tahun 2019 Perum Jamkrindo mampu tampil dengan kinerja operasional dan keuangan yang sehat dan prima. Perolehan kinerja keuangan ditandai Pendapatan Penjaminan 2019 sebesar Rp2,10 triliun dan meningkat 68,59% dari tahun sebelumnya. Laba Tahun Berjalan pada 2019 sebesar Rp625,78 miliar meningkat 57,41% jika dibanding tahun sebelumnya. Raihan kinerja positif mencerminkan suatu gambaran pertumbuhan yang cerdas di tengah perubahan di era penuh ketidakpastian dan tuntutan *Disruptive Innovation*. Dengan bekal raihan yang prima, insan Jamkrindo yakin mampu bersaing melalui serangkaian adaptasi dan inovasi produk dan layanan sehingga selalu mampu mencapai ekspektasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan bekal pertumbuhan yang cerdas diharapkan akan mampu membangun *internal confidence* dan secara agregat mampu membangun suatu kedayatahan sistemik, suatu parameter yang sangat fundamental dibutuhkan oleh sebuah perusahaan saat ini. Dengan misi “Meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan”. Dengan demikian Perum Jamkrindo tumbuh cerdas di tengah perubahan serta mampu meraih keunggulan daya saing berkelanjutan.

Throughout 2019 Perum Jamkrindo was able to perform with sound and excellent operational and financial performance. Financial performance acquisition in 2019 marked by Guarantee Income of IDR2.10 trillion and an increase of 68.59% from the previous year. The Current Year Income in 2019 of IDR625.78 billion, an increase of 57.41% compared to the previous year. This positive performance reflects a picture of smart growth amid changes in an era of uncertainty and the demands of Disruptive Innovation. With excellent achievements, Jamkrindo’s personnel are confident of being able to compete through a series of adaptations and innovations in products and services so that they are always able to meet the expectations of all stakeholders. With smart growth capital, it is expected to build internal confidence and, in the aggregate, build a systemic resilience, a fundamental parameter needed by a company nowadays. With the mission “Increasing financial accessibility of Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives through the provision of guarantees that are innovative, competitive with the services that are professional, effective, and efficient in a sustainable manner.” Thus Perum Jamkrindo is growing smart amid changes and able to achieve sustainable competitive advantage.

2018



BERSINERGI MENGUATKAN EKONOMI NEGERI

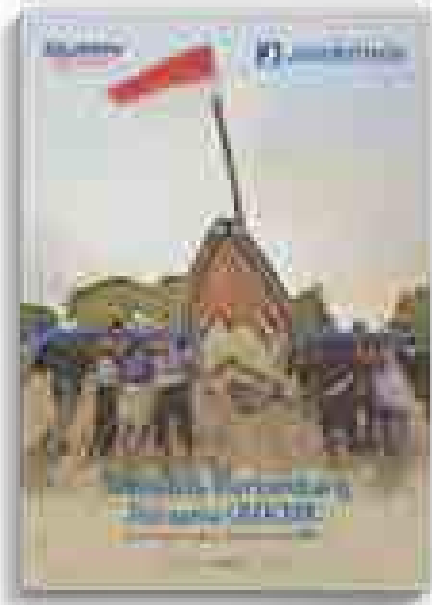
Synergy to Empower the Nation's Economy

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia memberikan peluang kepada Jamkrindo untuk merambah ke segmen pasar baru yang berada di bawah koridor sinergi BUMN. Hal ini menjadikan potensi pasar yang dapat digarap oleh Jamkrindo menjadi semakin besar. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Jamkrindo mengambil langkah yang cepat untuk melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perusahaan agar pengembangan usaha yang dilakukan memiliki payung hukum yang jelas. Perluasan pasar ini juga memberikan peluang bagi Jamkrindo untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi bangsa dengan melakukan sinergi bersama BUMN lainnya. Tahun 2018, Jamkrindo juga terus bersinergi dalam memberikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi) agar dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan, sebagai upaya mendukung penguatan ekonomi negeri.

The issuance of Government Regulation (PP) Number 35 concerning the Public Corporation of Indonesian Credit Guarantee (Perum Jamkrindo) provides an opportunity for Jamkrindo to penetrate into new market segments that are under the corridor of SOEs synergy. This makes the market potential that can be worked on by Jamkrindo to be even greater. To optimize this potential, Jamkrindo took a quick step to make adjustments to the Company’s Articles of Association so that the business development carried out had a clear legal basis. The expansion of this market also provides an opportunity for Jamkrindo to make a greater contribution to the development of the nation’s economy through synergizing with other SOEs. In 2018, Jamkrindo also continues to synergize in providing support for Micro, Small, and Medium Enterprises as well as Cooperatives (MSMEs and Cooperatives) to enjoy bank credit, even though they cannot fulfill some of the requirements set by banks. This is conducted in an effort to support the country’s economic strengthening.



2017



TUMBUH & BERKEMBANG BERSAMA UMKMK *Grow and Develop Together with SMEs*

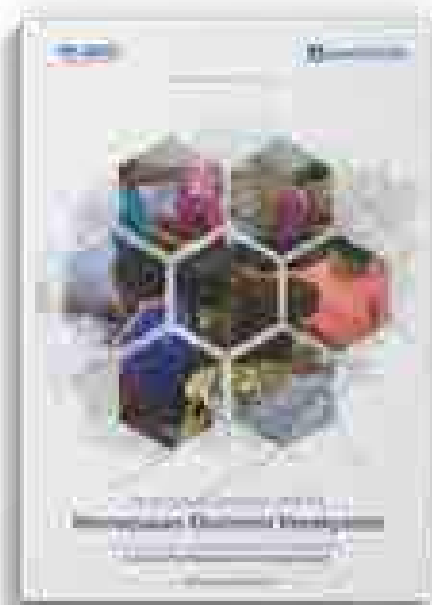
Perum Jamkrindo mengemban misi untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dengan adanya penjaminan, maka UMKM dan Koperasi tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Perum Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk penjaminan bagi UMKM dan Koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Perum Jamkrindo ingin terus tumbuh dan berkembang bersama UMKM dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Perum Jamkrindo has a mission to support Government policies and programs in the field of economy and national development, especially on Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM and Koperasi). With the existence of guarantee, MSMEs and Cooperatives can still enjoy banking credit, even though some of the requirements set by banks cannot be met.

Perum Jamkrindo continuously strives to improve the quality of service and product guarantee for MSMEs and Cooperatives to encourage the growth of people based economy. Perum Jamkrindo wants to grow and develop together with UMKM and contribute to national development.

2016



KERJA NYATA BERSAMA UMKMK, MEMAJUKAN EKONOMI KERAKYATAN

Concrete Work Together with MSMEs & Cooperatives, to Driving The People Based Economy Forward

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hadir dan terfokus pada kegiatan penjaminan kredit untuk mendukung pengembangan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang berperan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penjaminan perlu diberikan karena banyak UMKMK yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal. Walau mempunyai prospek usaha yang bagus, namun banyak di antara mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Dengan adanya penjaminan, maka UMKMK tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Kerja nyata itu berbuah manis. Sejalan dengan UMKMK yang terus berkembang dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, kinerja Perum Jamkrindo pun mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is present and focus on credit guarantee activities to support the development of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprise (MSMEs & Cooperatives) activities, which play an important role in driving the people's economy. Guarantee is a necessity to be given because many MSMEs & Cooperatives are having difficulty getting additional capital. Despite having good business prospects, many of them are unable to meet the requirements set by the bank.

With the guarantee, MSMEs & Cooperatives can still utilize banking credit, even though it cannot meet some of the requirements set by banks. Concrete work generates satisfaction outcome. In line with MSMEs & Cooperatives continuous growth and driving the people based economy, Perum Jamkrindo performance also recorded positive performance from year to year.

TRANSFORMASI JAMKRINDO

Jamkrindo Transformation



Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk

Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit

1970 - 1981



Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT

Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Sapi Perah Credit, Padi Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT

1981 - 2000



Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah

Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product

2000 - 2008



Dengan cikal bakal di tahun 1970, Jamkrindo telah melalui perjalanan panjang hingga akhirnya menjadi bagian pilar dari **Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan**.

1970 became Jamkrindo's forerunner in passing a long journey to become part of pillar from the state-owned Insurance and Guarantee Holding company.



Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skem konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan Surety Bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN. *Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.*

2008 - 2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skem konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan Surety Bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN. *Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.*

2020

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skem konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan Surety Bond dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020 - Sekarang
2020 - Present

LAYANAN PENJAMINAN DALAM RANGKA PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM NASIONAL

Guarantee Services in order to Strengthen National Cooperatives and MSMEs

Jamkrindo didirikan dengan tujuan utama untuk memberikan Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM), serta Koperasi.

Jamkrindo was established with the main objective to provide guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), as well as cooperatives.

Pemerintah Indonesia memiliki semangat yang tinggi untuk mendorong koperasi dan UMKM sebagai bagian dari pilar perekonomian nasional. Untuk itu, Pemerintah Indonesia mendirikan Jamkrindo yang memberikan Penjaminan bagi UMKM dan Koperasi. Di samping itu, Jamkrindo juga memberikan Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

The Government of Indonesia has a high spirit to encourage cooperatives and MSMEs as part of the pillars of the national economy. Therefore, the Government of Indonesia established Jamkrindo to provide guarantees for MSMEs and cooperatives. In addition, Jamkrindo also provides guarantees for SOEs, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees.

Kegiatan usaha Penjaminan Kredit yang diberikan Jamkrindo adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Credit Guarantee business activities provided by Jamkrindo is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the Guarantee Receiver, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.





Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

Dengan layanan Penjaminan yang diberikan, Jamkrindo diharapkan dapat memperkokoh perekonomian nasional, khususnya bagi penguatan perekonomian di sektor UMKM dan koperasi.

With the guarantee services provided, Jamkrindo is expected to strengthen the national economy, especially for strengthening of the economy in MSME and cooperative sectors.



DAFTAR ISI

Table of Contents

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB <i>Disclaimers and Limitations of Liability</i>	2
PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK <i>Table and Graphic Notifications</i>	2
PENJELASAN TEMA <i>Theme Explanation</i>	3
KESINAMBUNGAN TEMA <i>Theme Continuity</i>	4
TRANSFORMASI JAMKRINDO <i>Jamkrindo Transformation</i>	6
LAYANAN PENJAMINAN DALAM RANGKA PENGUATAN KOPERASI DAN UMKM NASIONAL <i>Guarantee Services in order to Strengthen National Cooperatives and MSMEs</i>	8
DAFTAR ISI <i>Table of Contents</i>	10



01 IKHTISAR DATA KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Financial and Operational Data Highlights

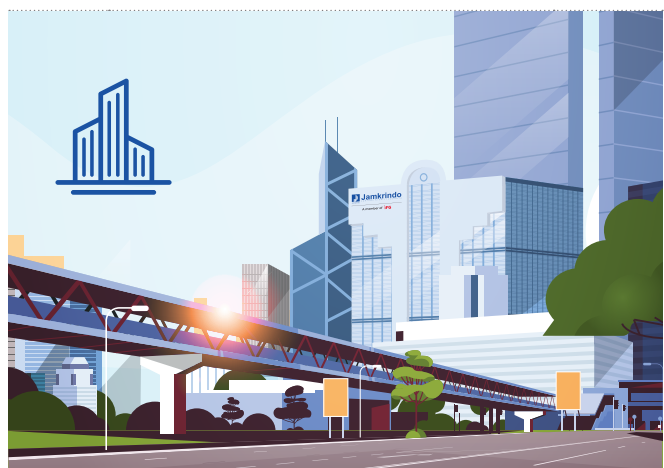
IKHTISAR KEUANGAN PENTING TAHUN 2016-2020 <i>Key Financial Highlights 2016-2020</i>	16
IKHTISAR OPERASIONAL <i>Operational Highlights</i>	19
IKHTISAR SAHAM <i>Share Highlights</i>	20
IKHTISAR SURAT UTANG <i>Debt Securities Highlights</i>	21
PERISTIWA PENTING <i>Significant Events</i>	22



02 LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners' Report</i>	28
LAPORAN DIREKSI <i>Board of Directors' Report</i>	38
SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT JAMKRINDO <i>Statement of Board of Commissioners on Responsibility for 2020 Annual Report of PT Jamkrindo</i>	50
SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2020 PT JAMKRINDO <i>Statement of Board of Directors on Responsibility for 2020 Annual Report of PT Jamkrindo</i>	51




03 PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO <i>General Information About Jamkrindo</i>	54
RIWAYAT SINGKAT JAMKRINDO <i>Brief History of Jamkrindo</i>	56



BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA <i>Line of Business and Products and Services</i>	60	
KOMPETENSI INTI <i>Core Competence</i>	68	
VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN <i>Vision, Mission and Corporate Culture</i>	69	
MAKNA BRANDING LOGO <i>The Meaning Behind Logo Branding</i>	71	
STRUKTUR ORGANISASI <i>Organizational Structure</i>	72	
PROFIL DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners Profile</i>	74	
PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH <i>Profile of Sharia Supervisory Board</i>	82	
PROFIL DIREKSI <i>Board Of Directors Profile</i>	84	
PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF <i>Profile Of Executive Officers</i>	90	
DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM <i>Employee Demographics and Human Resources Competency Development</i>	95	
PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL <i>Education and/or Training of The Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretaries, and Internal Audit Units</i>	104	
KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM <i>Composition of Shareholders</i>	108	
STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA <i>Group Structure and Business Group</i>	112	
DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/ JOINT VENTURE (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV) <i>List of Subsidiaries and Associate Entities/Joint Venture Entities (Jv)/Special Purpose Vehicle (Spv)</i>	113	
KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM DAN PENERBITAN EFEK LAINNYA <i>Chronological Issuance and Listing of Other Securities</i>	115	
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG <i>Supporting Institutions and Professions</i>	115	
PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI <i>Awards and Certifications</i>	118	
KEANGGOTAAN ASOSIASI <i>Association Membership</i>	121	
DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG / KANTOR PERWAKILAN <i>Address List of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices</i>	122	
INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN <i>Information on the Company's Website</i>	127	
TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI <i>Economic and Industrial Review</i>	130	
TINJAUAN EKONOMI GLOBAL <i>Global Economic Review</i>	130	
ANALISIS EKONOMI NASIONAL <i>National Economic Analysis</i>	132	
ANALISIS INDUSTRI KEUANGAN DAN PENJAMINAN KREDIT <i>Financial Industry Analysis and Credit Guarantee</i>	134	
TINJAUAN OPERASIONAL <i>Operational Review</i>	137	
STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA <i>Business Development Strategy</i>	137	
ASPEK PEMASARAN <i>Marketing Aspects</i>	142	
TINJAUAN PER SEGMENT USAHA <i>Review by Business Segment</i>	145	
PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN <i>Guarantee Fee</i>	146	
PENDAPATAN INVESTASI <i>Investment Income</i>	159	
KINERJA PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (ENTITAS ANAK) <i>Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Subsidiaries)</i>	162	
TINJAUAN KEUANGAN <i>Financial Review</i>	165	
LAPORAN POSISI KEUANGAN <i>Statements of Financial Position</i>	166	
LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN <i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	179	
LAPORAN ARUS KAS <i>Statements of Cash Flows</i>	186	

RASIO KEUANGAN UTAMA <i>Key Financial Ratios</i>	189
KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG <i>The Company's Ability to Pay Debts and Collectibility of Receivables</i>	189
STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL <i>Capital Structure and Capital Structure Policies</i>	192
IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL <i>Material Commitments for Capital Expenditures</i>	193
INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU <i>Investment In Capital Expenditures Realized in the Financial Year</i>	193
INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN <i>Material Information and Facts that Occur after The Date of The Accountant's Report</i>	194
PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI, SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN <i>Comparison of Targets And Realizations, as Well as Projections for the Next Year</i>	196
KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN <i>Policies and Dividend Distribution</i>	197
KONTRIBUSI KEPADA NEGARA <i>Contribution to the Country</i>	198
PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN <i>Share Ownership Program by Employees and/or Management</i>	198
REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM <i>Realization of the Use of Funds Resulting from the Public Offering</i>	199
INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTUKRISASI UTANG/MODAL <i>Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation of Business, Acquisition, Debt/Capital Restructuring</i>	199
INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI <i>Information Regarding Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties</i>	199
PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH TERHADAP PERUSAHAAN <i>Changes in Laws and Regulations Affecting the Company</i>	202
PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUTANSI <i>Changes in Accounting Policy</i>	203
INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA <i>Information Regarding Business Continuity</i>	204
PROSPEK USAHA <i>Business Prospects</i>	205



05 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN <i>Development of Implementation of Good Corporate Governance in the Scope of the Corporate</i>	208
PRINSIP TATA KELOLA DAN KOMITMEN PENERAPANNYA OLEH JAMKRINDO <i>Governance Principles and Their Application Commitments by Jamkrindo</i>	210
PETA JALAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK <i>Roadmap of Implementation of Good Corporate Governance</i>	217
STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA <i>Governance Structure and Process</i>	222
HASIL TATA KELOLA: EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Governance Results: Evaluation and Monitoring of Corporate Governance Implementation</i>	228
RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2021 <i>Corporate Governance Implementation Development Plan for 2021</i>	255
STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN <i>Organ Structure of Corporate Governance</i>	256
PEMANGSAH SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMANGSAH SAHAM (RUPS) <i>Shareholders and General Meetings of Shareholders (GMS)</i>	256
DEWAN KOMISARIS <i>Board of Commissioners</i>	268
KOMISARIS INDEPENDEN <i>Independent Commissioner</i>	290
DIREKSI <i>Board of Directors</i>	293
TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>Transparency of Information Related to The Board of Supervisors and Board of Directors</i>	309
ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS <i>Supporting Organs of The Board of Commissioners</i>	354



ORGAN PENDUKUNG DIREKSI <i>Supporting Organs of The Board Of Directors</i>	379	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA <i>Corporate Social Responsibility Related to Human Rights Compliance</i>	502
AKUNTAN PUBLIK <i>Public Accountant</i>	414	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL <i>Corporate Social Responsibility for Fair Operation</i>	505
MANAJEMEN RISIKO <i>Risk Management</i>	418	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP <i>Corporate Social Responsibility to Environment</i>	508
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY <i>Corporate Social Responsibility</i>	427	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA <i>Corporate Social Responsibility Related Employment, and Occupational Health, and Safety</i>	516
PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM <i>Legal Cases</i>	428	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA PELANGGAN <i>Corporate Social Responsibility in the Scope of Responsibility Towards Products and Goods as Well as Consumers</i>	556
AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN <i>Access to Company Information and Data</i>	432	TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN <i>Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development</i>	563
TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI <i>Information Technology Governance</i>	440		
KODE ETIK <i>Code of Conduct</i>	459		
KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI <i>Gratification Control Policies</i>	473		
KEBIJAKAN ANTI KORUPSI <i>Anti-Corruption Policies</i>	474		
WHISTLEBLOWING SYSTEM <i>Whistleblowing System</i>	475		
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA <i>State Administrators' Wealth Report</i>	481		
DEWAN PENGAWAS SYARIAH <i>Sharia Supervisory Board</i>	483		
TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE <i>Transparency of Bad Governance Practice</i>	486		



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SEBUAH PENDEKATAN <i>Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: An Approach</i>	490
KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP JAMKRINDO <i>Corporate Social Responsibility Policy and Governance in Jamkrindo</i>	493



REFERENSI SILANG ARA <i>ARA's Cross Reference</i>	576
-------------------------------------------------------------	-----

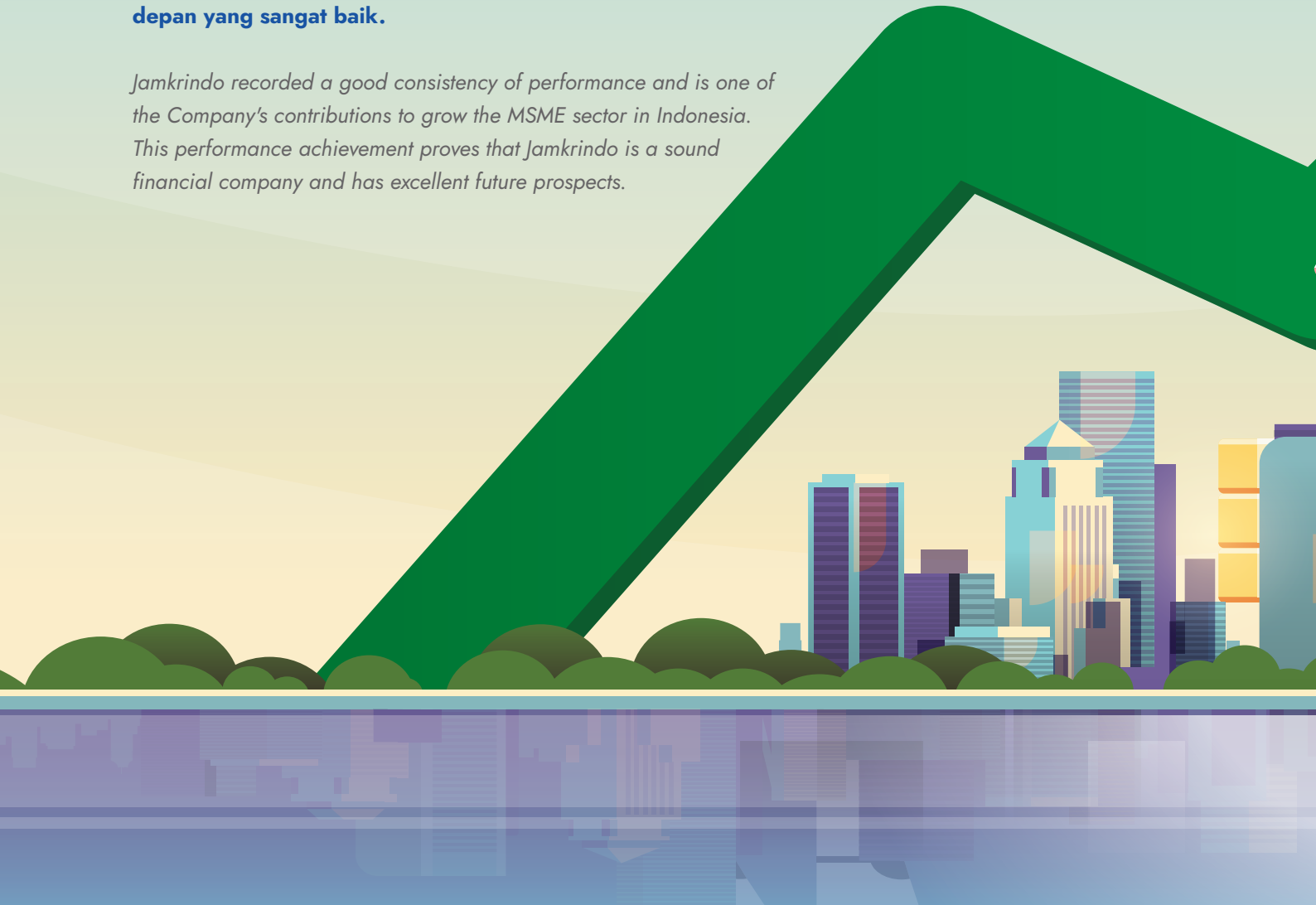


IKHTISAR DATA KEUANGAN DAN OPERASIONAL

Financial and Operational Data Highlights

Konsistensi kinerja yang dibukukan Jamkrindo merupakan salah satu wujud kontribusi Perusahaan terhadap pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia. Pencapaian kinerja tersebut sekaligus membuktikan bahwa Jamkrindo merupakan perusahaan keuangan yang sehat dan memiliki prospek ke depan yang sangat baik.

Jamkrindo recorded a good consistency of performance and is one of the Company's contributions to grow the MSME sector in Indonesia. This performance achievement proves that Jamkrindo is a sound financial company and has excellent future prospects.





IKHTISAR KEUANGAN PENTING TAHUN 2018-2020

Key Financial Highlights 2018-2020

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Position

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Description	2020	2019*	2018
Total Aset Total Assets	19.122.829	16.770.270	15.146.126
Total Liabilitas Total Liabilities	10.266.950	8.092.195	6.729.540
Total Ekuitas Total Equity	8.855.879	8.678.075	8.416.586

*disajikan kembali | *restated

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Statements of Profit or Loss and Comprehensive Income

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Description	2020	2019*	2018
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	2.633.393	2.152.072	1.248.710
Beban Klaim Claim Expenses	1.830.400	1.737.959	723.274
Penjaminan Bersih Net Guarantee	802.993	414.113	525.437
Komisi - Bersih Commission - Net	(27.195)	(48.138)	-
Pendapatan Investasi Bersih Investment Income - Net	799.211	782.810	684.108
Beban Usaha Operating Expenses	(903.670)	(991.759)	(693.236)
Pendapatan Lain-lain Bersih Other Income - Net	51.130	24.612	(8.025)
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	722.469	181.638	508.284
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(118.307)	(139.147)	(117.274)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	604.162	42.491	391.010
(Beban)/Manfaat Pajak Penghasilan (Expense)/Income Tax Benefit	(148.029)	156.420	397.543
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	456.133	198.911	397.544
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	89.480	102.334	(135.957)
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income For The Current Year	545.613	301.245	261.586

*disajikan kembali | *restated



Uraian Description	2020	2019*	2018
Laba Komprehensif Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income Attributed To:			-
Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner	545.612	301.247	-
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	1	(2)	-

*disajikan kembali | *restated

Laporan Arus Kas

Statements of Cash Flows

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Description	2020	2019*	2018
Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Operasi Cash Flow From Operating Activities	528.040	9.666	491.688
Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Investasi Cash Flow From Investment Activities	(115.549)	(116.668)	360.876
Arus Kas Bersih Diperoleh Untuk Aktivitas Pendanaan Cash Flow From Financing Activities	(400.000)	(39.754)	(80.185)
Kenaikan/Penurunan (Bersih) Kas Dan Setara Kas Increase /Decreased (Net) In Cash and Cash Equivalents	12.491	(146.756)	772.379
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Equivalents at The Beginning of Year	88.614	235.370	5.417.929
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Equivalents at The End of Year	101.105	88.614	6.190.307

*disajikan kembali | *restated

Rasio Keuangan

Financial Ratios

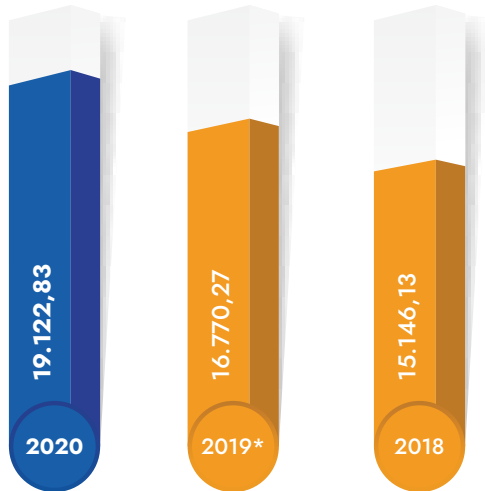
Uraian Description	2020	2019*	2018
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
• Current Ratio	219,19%	205,18%	450,89%
Rasio Solvabilitas Solvency Ratio			
• Debt to Equity Ratio	186,26%	207,47%	43,78%
Rasio Rentabilitas Rentability Ratio			
• Net Profit Margin	16,14%	8,60%	24%
• Profit Margin on Sales	21,05%	6,19%	25,10%
• Return on Assets	4,03%	1,14%	3,29%
• Return on Equity	5,20%	2,33%	3,50%

*disajikan kembali | *restated

Aset

Assets

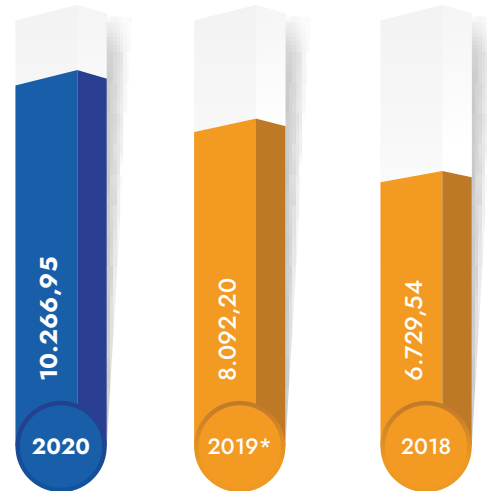
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Liabilitas

Liabilities

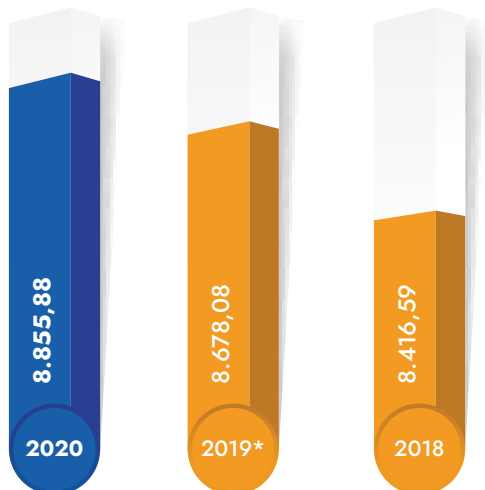
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Ekuitas

Equity

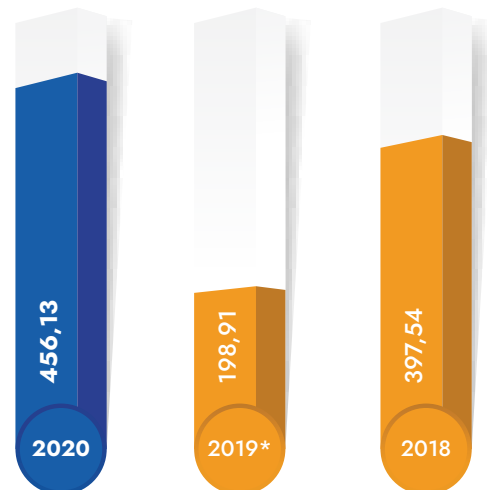
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Laba Tahun Berjalan

Current Year Profit

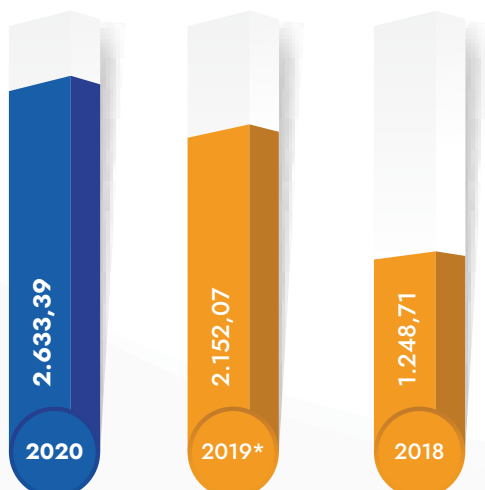
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Pendapatan Penjaminan

Guarantee Income

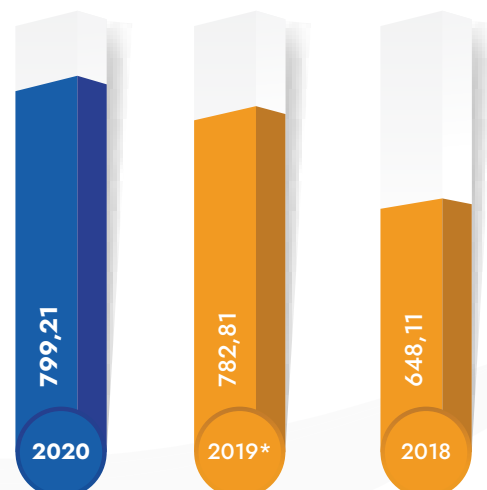
dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah



Pendapatan Investasi Bersih

Investment Income - Net

dalam miliar Rupiah
in billion Rupiah





IKHTISAR OPERASIONAL

Operational Highlights

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan

Guarantee Fee

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Jumlah Kredit Total Loans	2020	2019*	2018
KUR	1.957.907	1.518.547	744.684
Non KUR	868.617	795.064	897.218

*disajikan kembali | *restated

Pendapatan Investasi

Investment Income

dalam juta Rupiah, kecuali dinyatakan lain | in million Rupiah, unless stated others

Uraian Descriptions	2020	2019*	2018
Pendapatan Bunga Interest Income			
Bunga Deposito Time Deposit Interest	382.815	486.672	379.488
Bunga Obligasi Bond Interest	199.733	170.800	166.592
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	180.236	87.419	106.616
Dividen Dividend	6.067	8.360	6.855
Pendapatan Capital Gain Capital Gain Interest	14.078	37.628	23.738

*disajikan kembali | *restated

IKHTISAR SAHAM

Share Highlights



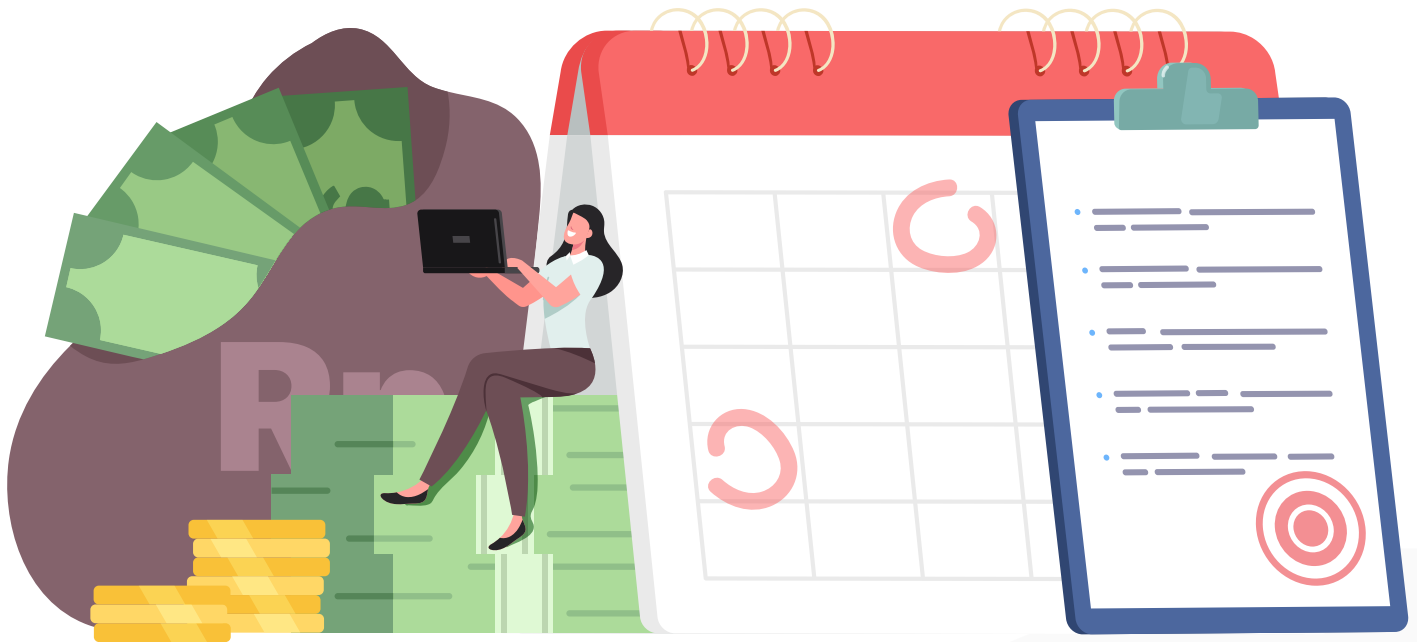
Hingga tanggal 31 Desember 2020, Jamkrindo belum menerbitkan sahamnya kepada publik sehingga pada Laporan Tahunan ini tidak ada pengungkapan mengenai informasi Kapitalisasi Pasar, Harga tertinggi, terendah dan penutupan saham berdasarkan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Volume perdagangan saham.

As of December 31, 2020, Jamkrindo has not issued its shares to the public so that in this Annual Report there is no disclosure on Market Capitalization information, Share price, highest, lowest and closing based on Indonesia Stock Exchange (IDX), and Stock trading volume.



IKHTISAR SURAT UTANG

Debt Securities Highlights



Hingga tanggal 31 Desember 2020, Jamkrindo tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa di mana efek lainnya dicatatkan dan peringkat efek.

As of December 31, 2020, Jamkrindo has not issued any securities. Thus there is no information regarding the name of other securities, the year of issuance of other securities, the interest rate/other securities returns, and the maturity date of other securities; the value of other securities offerings; the name of the exchange in which other securities are listed; and effect ratings.

PERISTIWA PENTING

Significant Events



Penutupan Perdagangan BEI tahun 2019 dan pembukaan BEI tahun 2020 (IDX)

IDX Trading Closing in 2019 and IDX opening in 2020 (IDX)



Jakarta, Januari 2020

Jakarta, January 2020



Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrindo

General Meeting of Shareholders of PT Jamkrindo



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Live Berita Satu TV (Kesiapan Perusahaan Menghadapi COVID-19)

Live on Berita Satu TV (Company's Readiness to Deal with COVID-19)



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Sosialisasi Value BUMN AKHLAK

Socialization of Value of SOEs AKHLAK



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan Penjamin terkait Penjaminan KMK PEN

Signing of Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Askrindo with Guarantors related to KMK PEN Guarantee



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



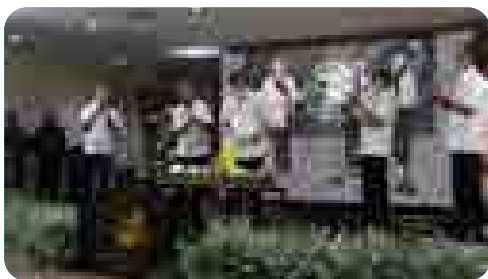
Peluncuran Logo BUMN dan Slogan BUMN

Launch of SOEs Logo and Slogan



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Seremoni HUT ke-50 Tahun PT Jamkrindo

50th Anniversary Ceremony of PT Jamkrindo



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Webinar Jamkrindo Talk

Webinar Jamkrindo Talk



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kemenkop dan KBUMN

Signing of Joint Agreement with the Ministry of Cooperatives and the Ministry of SOEs



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Ceremonial Penandatanganan PKS Penjaminan Program PEN dengan BPD Kalsel

Ceremonial Signing of Cooperation Agreement for PEN Program Guarantee with Local Development Bank in South Kalimantan




Jakarta, September 2020

Jakarta, September 2020



Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)


Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)

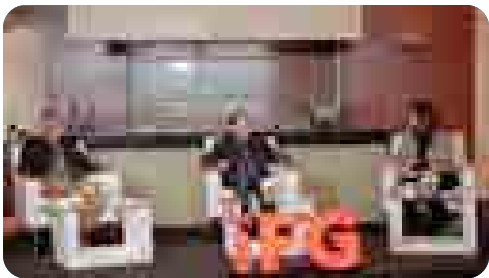
 Jakarta, September 2020
Jakarta, September 2020



Webinar Penjaminan KMK PEN untuk Pemulihan Ekonomi Tedampak COVID-19


Webinar on KMK PEN Guarantee for Economic Recovery Impacted by COVID-19

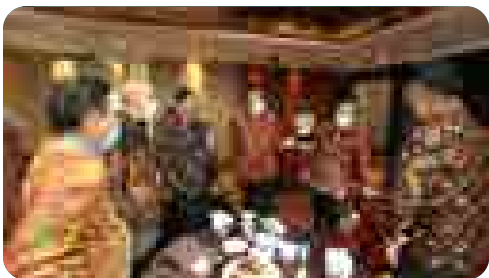
 Jakarta, Oktober 2020
Jakarta, October 2020



Ngopi Bareng Indonesia Financial Group (IFG)


Ngopi Bareng with Indonesia Financial Group (IFG)

 Jakarta, Oktober 2020
Jakarta, October 2020



Penandatanganan Komitmen AKHLAK bersama PT BPUI


Signing of AKHLAK Commitment with PT BPUI

 Jakarta, November 2020
Jakarta, November 2020

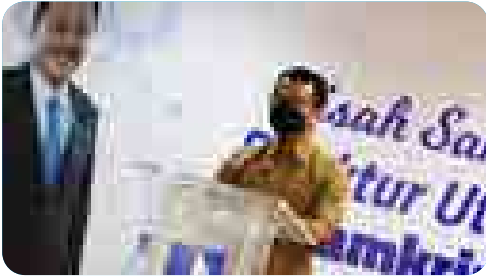


Live Streaming Peluncuran IFG

Live Streaming of IFG Launch

 Jakarta, November 2020
Jakarta, November 2020





Program Pengenalan Direksi

Orientation Program for Directors



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Webinar Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2020

Webinar Jamkrindo MSMEs Appreciation Awards 2020



Jakarta, Desember 2020

Jakarta, December 2020



Kunjungan Kerja komisi VI DPR RI

Working Visit of Commission VI DPR RI



Banjarmasin, Desember 2020

Banjarmasin, December 2020



LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

Sepanjang tahun 2020, Direksi telah mengambil sejumlah inisiatif strategis untuk menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi Perusahaan. Dalam pelaksanaan inisiatif strategis tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan secara aktif untuk memastikan Perusahaan dapat meraih pertumbuhan berkelanjutan.

Throughout 2020, the Board of Directors has taken a number of strategic initiatives to face various challenges of the Company. In its implementation, the Board of Commissioners also actively supervises to ensure the Company can achieve sustainable growth.





LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners' Report



Sri Mulyanto

Komisaris Utama / Independen

President Commissioner / Independent



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Pertama-tama, izinkan kami untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan-Nya kepada kita semua. Di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang akibat pandemi COVID-19, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) masih dapat membukukan kinerja yang baik dan dapat menjalankan amanat Pemegang Saham.

Bersama ini, kami sampaikan pokok-pokok laporan pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap operasional Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020, sebagai pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas amanah yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan lainnya dan juga merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Kondisi Lingkungan Eksternal Perusahaan

Kondisi perekonomian tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat berat. Bukan hanya di Indonesia, namun seluruh dunia merasakan hal yang sama. Merebaknya pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah membuat kinerja perekonomian dunia mengalami kontraksi, terlebih pada semester pertama tahun 2020, ekonomi global mengalami kontraksi yang sangat dalam. Kendati kinerja perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan pada semester kedua, namun secara umum pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 masih mengalami *negative growth*, yaitu -3,5%. Beberapa negara bahkan telah masuk ke jurang resesi ekonomi.

Ekonomi Indonesia juga menghadapi tantangan yang sama. Kendati Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah dalam menangani pandemi ini, namun ekonomi Indonesia tetap mengalami kontraksi sebesar 2,07% atau jauh menurun dibandingkan kinerja ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 5,02%.

Hampir seluruh sektor industri terdampak oleh pandemi COVID-19. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit perbankan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *outstanding* kredit yang disalurkan bank sepanjang tahun 2020 mencapai sebesar Rp5.481,56 triliun atau turun -2,41% (yoy) dibandingkan kinerja kredit tahun 2019.

First of all, let us to offer praise and gratitude to God Almighty for His abundance of favors and gifts that have been given to us. In the midst of challenging economic and business conditions due to the COVID-19 pandemic, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) can still record good performance and be able to carry out shareholders' mandates.

Hereby, we submit a report on the implementation of supervisory duties carried out by the Board of Commissioners on the Company's operations for the financial year ended December 31, 2020, as the responsibility of the Board of Commissioners for the mandate given by shareholders and other stakeholders and is also one form of implementation of the principles of Good Corporate Governance.

External Conditions of the Company

Economic conditions in 2020 face considerable challenges. Not only in Indonesia, but also around the world. The outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has infected the world economy to contract, especially in the first half of 2020. Although global economic performance began to show improvement in the second half, in generally, global economic growth in 2020 still experienced negative growth, namely -3.5%. Some countries have even gone into the abyss of an economic recession.

Indonesia's economy also faces similar challenges. Indonesia's economy contracted by 2.07%, although the Government has taken a number of measures to deal with this pandemic. This condition is much lower than the economic performance in the previous year of 5.02%.

All industrial sectors are almost affected by the COVID-19 pandemic. This is reflected in the decrease in bank lending compared to the previous year. Based on data from the Otoritas Jasa Keuangan (OJK), outstanding credit disbursed by banks throughout 2020 reached IDR5,481.56 trillion or decreased -2.41% (yoy) compared to credit performance in 2019.

Selain itu, tingkat risiko kredit perbankan juga mengalami peningkatan yang tercermin dari naiknya NPL bank menjadi 3,06% dari tahun sebelumnya 2,53%. Menyikapi hal tersebut, OJK menerbitkan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam hal ini OJK menimbang perkembangan penyebaran COVID-19 berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Untuk memperkuat stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan dan juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, percepatan reformasi pasar uang melalui Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, pengembangan ekonomi keuangan syariah dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi, serta penguatan kebijakan internasional.

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Tahun 2020 Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dewan Komisaris memastikan bahwa Perusahaan telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan telah sesuai dengan visi dan misi Perusahaan dan aspirasi Pemegang Saham dengan tetap memperhatikan seluruh pemangku kepentingan. Tahun 2020, Perusahaan telah bergabung dengan *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan sesuai arahan dari Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Pengendali Perusahaan. Dewan Komisaris meyakini, pembentukan *holding* ini akan memberikan manfaat yang besar bagi Perusahaan, khususnya dalam fokus bisnis dan menciptakan efisiensi, sehingga dapat meningkatkan daya saing Perusahaan di masa yang akan datang.

Dewan Komisaris juga turut mengawasi proses bergabungnya Perusahaan ke dalam *Holding* dan telah memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk memperlancar proses tersebut.

Pengawasan Terhadap Implementasi Strategi

Peran dan fungsi pengawasan merupakan tugas utama yang diemban Dewan Komisaris, khususnya dalam memberikan

In addition, the level of banking credit risk also increased as reflected by the increase in bank NPL to 3.06% from 2.53% in the previous year. In response to this condition, OJK issued OJK Regulation No.11/POJK.03/2020 on National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy on the Impact of Coronavirus Disease 2019. In this case, OJK considers the progress of the spread of COVID-19 which directly or indirectly impacts the performance and capacity of debtors including MSME debtors, thus potentially disrupting the banking performance and financial system stability that can affect economic growth.

To strengthen stability and support national economic recovery, Bank Indonesia encourages lending and financing from banks and also accelerates the digitization of payment systems through the implementation of the 2025 Indonesia Payment System Blueprint (BSPI), accelerated money market reform through the Money Market Development Blueprint (BPPU) 2025, sharia financial economic development and MSMEs as a new source of economic growth, and strengthening international policy.

Implementation of the Board of Commissioners Duties

In 2020 the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities to supervise the Company's management which conducted by the Board of Directors. The Board of Commissioners ensures that the Company has been managed in accordance with the prevailing laws and regulations and principles of Good Corporate Governance.

The Board of Commissioners has also ensured that the Company's management is in accordance with the Company's vision and mission and the aspirations of shareholders while considering to all stakeholders. In 2020, the Company has joined the Holding of SOEs Insurance and Guarantee according to the direction of the Ministry of SOEs as the Controlling Shareholder of the Company. Board of Commissioners believes that the establishment of this holding will provide great benefits for the Company, especially in focusing on business and creating efficiency, so as to improve the Company's competitiveness in the future.

The Board of Commissioners also supervises the process of joining the Company into the Holding and has provided input and advice to the Board of Directors to accelerate the process.

Supervision on Strategy Implementation

The Board of Commissioners has the main task in the role and supervisory function of the Company, especially in providing input



masukannya yang sejalan dengan aspirasi Pemegang Saham dan seluruh Pemangku Kepentingan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dibangun melalui kesamaan pandangan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sebelumnya telah disampaikan Direksi dan mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Dewan Komisaris melakukan pemantauan dan *review* terhadap setiap inisiatif strategis yang dijalankan Direksi dan menilai kesesuaiannya dengan rencana Perusahaan.

Dewan Komisaris memastikan bahwa sepanjang tahun 2020, strategi dan rencana bisnis yang tertuang dalam RKAP 2020 telah dijalankan dengan baik oleh Direksi dan jajarannya.

Mekanisme dan Frekuensi Pengawasan

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris berpegang pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap menghormati hak dan wewenang Direksi dalam pengelolaan Perusahaan. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris menggunakan beberapa mekanisme secara langsung maupun tidak langsung.

Mekanisme tidak langsung dilakukan dengan memeriksa laporan Perusahaan, dimana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan Perusahaan. Organ Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit juga secara berkala melakukan pertemuan dengan Satuan Pengawasan Intern untuk melakukan *review* terhadap laporan kinerja Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat memberikan penugasan kepada Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan *review* maupun pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kinerja dan operasional Perusahaan.

Mekanisme langsung dilakukan Dewan Komisaris dengan melakukan rapat bersama Direksi, untuk meminta penjelasan Direksi terkait hal-hal yang menjadi perhatian Dewan Komisaris. Dalam rapat bersama tersebut, Dewan Komisaris juga melakukan *review* terhadap kinerja Perusahaan pada setiap periode.

Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris dapat menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

in line with the aspirations of shareholders and all stakeholders. In carrying out the supervisory function, the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is built through the common view to achieve the Company's Vision and Mission.

In carrying out the supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) which has previously been submitted by the Board of Directors and obtained approval from shareholders. The Board of Commissioners conducts monitoring and review of every strategic initiative carried out by the Board of Directors and assesses its suitability to the Company's plan.

The Board of Commissioners ensures that throughout 2020, the strategies and business plans contained in the 2020 RKAP have been executed properly by the Board of Directors and the Company's management.

Mechanism and Frequency of Supervision

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the prevailing laws and regulations while respecting the rights and authority of the Board of Directors in managing the Company. Supervision conducted by the Board of Commissioners using several mechanisms directly or indirectly.

The indirectly mechanism is carried out by examining the Company's report, which in accordance with the prevailing laws and regulations, the Board of Commissioners has authority to conduct an examination of the Company's report. The Board of Commissioners' Organ, namely the Audit Committee also periodically conducts meetings with the Internal Audit Unit to conduct a review of the Company's performance report. In addition, the Board of Commissioners may also assign the committees under the Board of Commissioners to conduct reviews and supervision on matters related to the Company's performance and operations.

The directly mechanism is carried out by the Board of Commissioners by conducting a meeting with the Board of Directors, to ask for the Board of Directors explanation related to matters of concern to the Board of Commissioners. In the joint meeting, the Board of Commissioners also conducted a review of the Company's performance at each period.

In the forum, the Board of Commissioners may request an explanation from the Board of Directors regarding the achievement of the Company's performance and its various obstacles. The Board of Commissioners may express its views and provide advice to the Board of Directors on the matter.

Sepanjang 2020, Dewan Komisaris melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat gabungan dengan Direksi. Dewan Komisaris juga melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali kunjungan.

Nasihat dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dapat memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi tanpa harus terlibat dalam aktivitas operasional Perusahaan. Nasihat dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris dilandaskan atas tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan visi dan misi Perusahaan.

Sepanjang tahun 2020 terdapat sejumlah nasihat dan rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi, antara lain:

1. Penerapan protokol kesehatan di lingkungan operasional Perusahaan
2. Peningkatan kualitas manajemen risiko seiring dengan meningkatnya risiko Perusahaan akibat pandemi COVID-19
3. Penambahan modal pada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah sebagai langkah penguatan segmen syariah
4. Optimalisasi kinerja investasi Perusahaan
5. Penguatan sinergi dengan anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan
6. Peningkatan kerjasama BUMN

Penilaian Kinerja Direksi

Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan utama bagi Jamkrindo. Operasional Perusahaan secara umum mengalami gangguan akibat pandemi COVID-19, karena Perusahaan juga harus mengedepankan kesehatan dan keselamatan karyawan, namun dengan tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan.

Di tengah kondisi tersebut, Direksi telah mengambil sejumlah inisiatif strategis. Direksi telah menetapkan aturan terkait aturan kerja karyawan di masa pandemi yang ditujukan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan karyawan yang merupakan aset utama Perusahaan. Demikian juga halnya dengan pelayanan kepada pelanggan yang dapat tetap dijalankan dengan baik tanpa adanya penurunan kualitas layanan.

Selain itu, Direksi telah melakukan berbagai terobosan untuk menunjang pertumbuhan kinerja Perusahaan, termasuk melakukan berbagai inovasi baik terkait produk maupun layanan yang diberikan Perusahaan.

Throughout 2020, the Board of Commissioners held 12 (twelve) joint meetings with the Board of Directors. The Board of Commissioners also conducts field visits to get a more accurate/clear picture and information regarding the field or matters that need attention. During 2020, the Board of Commissioners has conducted 6 (six) visits.

Board of Commissioners Advice and Recommendations

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners may provide advice and recommendations to the Board of Directors without having to engage in the Company's operational activities. The advice and recommendations provided by the Board of Commissioners are based on the same objective, namely to realize the Company's vision and mission.

Throughout 2020 there are a number of advices and recommendations given by the Board of Commissioners to Board of Directors, including:

1. *Implementation of health protocols within the Company's operations*
2. *Improving the quality of risk management in line with the increase in the Company's risk due to COVID-19*
3. *Increase in Capital of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah as a measure of strengthening sharia segment*
4. *Optimization of the Company's investment performance*
5. *Strengthening synergy with holding members of SOEs Insurance and Guarantee*
6. *Increase cooperation of SOEs*

Board of Directors Performance Assessment

The COVID-19 pandemic is a major challenge for Jamkrindo. In general, the Company's operations are disrupted due to the COVID-19 pandemic, because the Company must also prioritize the health and safety of employees, while still providing optimal service to customers.

In the midst of these conditions, the Board of Directors has taken a number of strategic initiatives. The Board of Directors has established regulations related to employee work rules during the pandemic aimed at protecting the health and safety of employees who are the Company's main assets. Similarly, the service to customers can still be operated properly without any decrease in the quality of service.

In addition, the Board of Directors has made various breakthroughs to support the growth of the Company's performance, including making various innovations related to the Company's products and services.



Dari aspek keuangan, tahun 2020 Perusahaan juga berhasil melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP 2020. Perusahaan berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan menjadi Rp2.827 miliar dari Rp2.314 miliar di tahun 2019. Demikian juga halnya dengan pendapatan investasi yang tumbuh menjadi Rp799 miliar dari Rp783 miliar di tahun 2019. Hal ini merupakan capaian yang sangat baik mengingat kondisi pasar modal yang diliputi ketidakpastian di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19.

Jamkrindo juga berhasil membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp456 miliar. Pencapaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dimana Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp199 miliar.

Atas pencapaian yang baik tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajaran manajemen. Dewan Komisaris juga mendorong Direksi dan jajarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja Perusahaan di tahun-tahun mendatang.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Kondisi ekonomi dan bisnis tahun 2021 diprediksi akan kembali mengalami pertumbuhan yang positif. Proses pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 juga diprediksi akan berjalan dengan cepat, sehingga roda ekonomi dan iklim investasi akan kembali menggeliat.

Direksi telah menyusun RKAP 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Direksi telah menetapkan sejumlah target yang hendak dicapai di tahun 2021 berikut dengan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, target-target yang ditetapkan Direksi pada RKAP 2021 merupakan target yang realistik dan sangat mungkin untuk direalisasikan. Demikian juga dengan strategi yang akan dijalankan juga sejalan dengan rencana jangka menengah dan panjang Perusahaan. Untuk itu, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung dan siap memberikan *support* untuk tercapainya target-target tersebut.

Namun demikian, Dewan Komisaris tetap mengingatkan Direksi untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek pengembangan SDM dan Teknologi Informasi. Dewan Komisaris menilai, keberadaan SDM yang andal akan menjadi kunci keberhasilan Perusahaan untuk mewujudkan target-targetnya, termasuk target jangka panjang. Demikian juga halnya dengan Teknologi Informasi yang semakin dibutuhkan, baik sebagai *supporting* bagi operasional Perusahaan juga sebagai potensi usaha baru bagi Perusahaan.

From the financial aspect, in 2020, the Company also managed to exceed the target set in the 2020 RKAP. The Company managed to record the growth of Guarantee Fee to IDR2,827 billion from IDR2,314 billion in 2019. However, investment income recorded by the Company in 2020 increased to IDR799 billion from the previous year of IDR783 billion. This increase is a good achievement consider to capital market conditions that suffered a decrease due to the COVID-19 pandemic.

Jamkrindo also managed to record a profit for the year of IDR456 billion. This achievement has increased significantly than the previous year, which is the Company recorded profit for the year of IDR199 billion..

For this good achievement, the Board of Commissioners gives high appreciation to the Board of Directors and the entire management. The Board of Commissioners also encourages the Board of Directors and its management to maintain and improve the Company's performance in the coming years.

Opinions on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Economic and business conditions in 2021 are predicted to experience positive growth. The process of economic recovery from the impacts of COVID-19 also predicted to take place quickly, so that the economy and investment climate will be stretched again.

The Board of Directors has drafted RKAP 2021 and has received approval from shareholders. The Board of Directors has set a number of targets to be achieved in 2021 along with strategic measures to be implemented.

The Board of Commissioners considers that the targets set by the Board of Directors in RKAP 2021 are realistic targets and very likely to be realized, and in line with the Company's medium and long-term plans. Therefore, the Board of Commissioners fully supports the Board of Directors' steps in achieving these targets.

Nevertheless, the Board of Commissioners reminds the Board of Directors to give more attention to aspects of human resources development and Information Technology. The Board of Commissioners considers that the existence of reliable human resources will be the key to the Company's success in realizing its targets, including long-term targets. Similarly, Information Technology is also needed to support the Company's operations and new business potential for the Company.

Selain itu, Dewan Komisaris juga menyarankan Direksi untuk mengoptimalkan sinergi dengan anggota *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan lainnya, baik dalam pengembangan usaha maupun upaya untuk menciptakan *operation excellence* yang ditunjang dengan efisiensi yang baik.

Pandangan terhadap Penerapan Good Corporate Governance

Jamkrindo telah menerapkan prinsip dan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada seluruh jenjang organisasi. Pelaksanaan GCG berpedoman pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran. Penerapan GCG di seluruh jenjang organisasi Perusahaan telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dewan Komisaris menilai penerapan prinsip GCG di Perusahaan telah berjalan dengan baik dan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Organ GCG baik yang berada di bawah Dewan Komisaris maupun di bawah Direksi telah menjalankan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan telah menjalin kerjasama yang baik.

Tahun 2020, Perusahaan telah melengkapi infrastruktur tata kelolanya dengan menerapkan sertifikasi SNI ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Hal ini akan semakin memperkuat aspek *governance* di lingkungan Perusahaan dan merupakan langkah terobosan dalam upaya menciptakan organisasi yang bersih yang terbebas dari praktik suap dan korupsi.

Peningkatan kualitas penerapan GCG di Jamkrindo juga terlihat dari hasil *assessment* penerapan GCG dengan mengacu pada Keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), dimana Perusahaan meraih peningkatan skor yang cukup baik, yaitu dari 95,716 di tahun 2019 menjadi 95,797 di tahun 2020 dengan predikat "SANGAT BAIK".

Demikian juga halnya untuk penilaian berdasarkan ketentuan OJK sesuai Surat Edaran No.54/SEOJK.05/2017 dengan capaian skor sebesar 92,47 (predikat Sangat Baik), meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan capaian skor sebesar 91,68 (predikat Sangat Baik).

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi kepada Direksi dan seluruh jajarannya yang telah bekerja secara optimal dalam menerapkan GCG dalam mengelola Perusahaan selama tahun 2020. Saran Dewan Komisaris agar penerapan GCG yang sangat baik tersebut tetap dipertahankan dan senantiasa dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi hasil *assessment* GCG tahun 2020.

In addition, the Board of Commissioners also advised the Board of Directors to optimize synergy with the Holding members of SOEs Insurance and Guarantees, both in business development and efforts to create operational excellence supported by good efficiency.

Assessment on Good Corporate Governance Implementation

Jamkrindo has implemented the principles and practices of Good Corporate Governance (GCG) at all levels of the organization. GCG implementation is guided by the values of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. GCG implementation at all levels of the Company's organization has been adjusted to the prevailing regulations.

The Board of Commissioners considers the implementation of GCG principles in the Company has been carrying out well and shows continuous improvement. GCG organs both under the Board of Commissioners and Board of Directors have performed their functions, duties and responsibilities well and have established good cooperation.

In 2020, the Company has completed its governance infrastructure by implementing SNI ISO 37001 Anti-Bribery Management System certification. This infrastructure will strengthen the governance aspects within the Company and become a breakthrough in efforts to create organization that is clean and free from bribery and corruption practices.

The quality improvement of GCG implementation in Jamkrindo is also seen from the assessment results of GCG implementation by referring to the Decree of the Ministry of State-Owned Enterprises Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG), in which the Company received an increase in the score from 95.716 in 2019 to 95.797 in 2020 with the predicate "VERY GOOD".

Similarly, for assessment based on OJK provisions in accordance with Circular Letter No.54/SEOJK.05/2017, the Company has a score of 92.47 (Excellent predicate), increasing compared to 2019 with a score of 91.68 (Excellent predicate).

The Board of Commissioners gives high appreciation to the Board of Directors and all its levels who have worked optimally in implementing GCG in the Company during 2020. The Board of Commissioners expects the GCG implementation can be maintained properly and continue to be improved in accordance with the recommendations of GCG assessment results in 2020.



Namun demikian, Dewan Komisaris terus mengingatkan Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG, baik itu menyangkut organ, struktur maupun mekanisme pelaksanaannya. Salah satu perhatian Dewan Komisaris adalah tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit.

Pandangan dan Peran Dewan Komisaris Dalam Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

Perusahaan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pencegahan terjadinya *fraud* di Perusahaan. Keberadaan WBS merupakan bagian dari komitmen Perusahaan untuk menjadikan prinsip GCG sebagai landasan dari setiap aspek operasional perusahaan sehari-hari.

WBS memungkinkan mekanisme pelaporan yang menjamin kerahasiaan pelapor. Di lingkup Perusahaan, WBS telah dikelola dengan cukup baik. Mekanisme WBS juga memungkinkan prosedur pelaporan tindak kecurangan dalam Perusahaan, termasuk di dalamnya *Fraud*, *Money Laundering*, diskriminasi dan penyimpangan lainnya, terhadap seluruh jenjang organisasi, termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris secara aktif terlibat dan mengawasi efektivitas pelaksanaan WBS di Perusahaan.

Namun demikian, agar keberadaan WBS dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk meningkatkan upaya sosialisasi WBS mengingat hingga saat ini jumlah laporan yang masuk melalui mekanisme WBS masih sangat terbatas.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam mengawasi dan mengelola Perusahaan didukung oleh Komite Audit, Komite Investasi dan Manajemen Risiko dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris memberikan apresiasi atas dukungan Komite dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris sepanjang tahun 2020.

Komite Audit telah memastikan terselenggaranya pengendalian internal dan secara efektif membantu Dewan Komisaris dalam pengawasan atas pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi tata kelola perusahaan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugasnya, Komite Audit telah mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris dan rapat dengan mengundang Direktorat Keuangan dan Perencanaan Strategis, dan Satuan Pengawasan Intern (SPI) serta Divisi terkait.

Nevertheless, the Board of Commissioners continues to remind the Board of Directors to continuously improve the quality in implementing GCG principles, whether it concerns organs, structures or mechanisms of implementation. One of the Board of Commissioners concerns is the follow-up to the audit findings.

Assessment and Role of the Board of Commissioners in Whistleblowing System Management (WBS)

The Company already has a whistleblowing system (WBS) as a fraud prevention mechanism in the Company. The existence of WBS is part of the Company's commitment to make GCG principles as the basis of the company's daily operations.

WBS reporting mechanism will guarantee the confidentiality of the whistleblower. At the Company, WBS has been managed quite well. WBS mechanism is a secure reporting procedure for investigating fraud in the Company, including Fraud, Money Laundering, discrimination and other irregularities, against all levels of the organization, including the Board of Directors and Board of Commissioners. The Board of Commissioners is actively involved and oversees the effectiveness of WBS implementation in the Company.

However, in order for WBS to function properly, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to improve WBS socialization, considering the number of reports entered through the WBS mechanism is still very limited to date.

Performance Assessment for Committees Under the Board of Commissioners

The implementation of the Board of Commissioners duties and responsibilities in overseeing and managing the Company is supported by the Audit Committee, investment and risk management committee and nomination and remuneration committee. The Board of Commissioners appreciates the Committee's support in improving the effectiveness of the implementation of the Board of Commissioners duties and functions throughout 2020.

The Audit Committee has ensured the implementation of internal controls and effectively assists the Board of Commissioners in monitoring the implementation of internal and external audit functions, implementation of corporate governance and compliance with applicable laws and regulations. In carrying out its duties, the Audit Committee has held meetings with the Board of Commissioners and meetings by inviting the Directorate of Finance and Strategic Planning, and the Internal Audit Unit (SPI) and related Divisions.

Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan pemantauan atas strategi investasi yang diterapkan Perusahaan dengan pertimbangan risiko yang terukur dan terkontrol dengan baik. Selain itu, Komite Investasi dan Manajemen Risiko juga telah berkoordinasi dengan Divisi Manajemen Risiko untuk terus memantau tingkat maturitas risiko Perusahaan.

Komite Nominasi dan Remunerasi telah melakukan review terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan dan melakukan kajian terhadap calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan Anak Perusahaan.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Pada tahun 2020, komposisi anggota Dewan Komisaris Jamkrindo tidak mengalami perubahan, yaitu:

Komisaris Utama /Independen	Sri Mulyanto
Komisaris	Ari Wahyuni
Komisaris	Diah Natalisa
Komisaris	Noor Ida Khomsiyati
Komisaris Independen	M. Muchlas Rowi

Namun, pada 18 Januari 2021, berdasarkan keputusan RUPS Luar Biasa Pemegang Saham memberhentikan Sdri. Diah Natalisa sebagai Komisaris Perusahaan dan mengangkat Sdri. Hernita Alius sebagai Komisaris Independen Perusahaan serta pada tanggal 12 April 2021, Pemegang Saham memberhentikan Sdri. Noor Ida Khomsiyati sebagai Komisaris Perusahaann dan mengangkat Sdri. Desty Arlaini sebagai Komisaris, sehingga komposisi Dewan Komisaris Perusahaan menjadi:

Komisaris Utama /Independen	Sri Mulyanto
Komisaris	Ari Wahyuni
Komisaris	Desty Arlaini
Komisaris Independen	M. Muchlas Rowi
Komisaris Independen	Hernita Alius

Atas nama Jamkrindo kami memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Sdri. Diah Natalisa atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

The Investment and Risk Management Committee has been monitoring the Investment Strategy implemented by the Company with measurable and well-controlled risk considerations. In addition, the Investment and Risk Management Committee has also coordinated with the Risk Management Division to continuously monitor the Company's risk maturity level.

The Nomination and Remuneration Committee has conducted a review of the Company's remuneration policy and conducted a review of prospective members of the Board of Commissioners and Directors of the Company and Subsidiaries.

Changes in the Board of Commissioners' Composition

In 2020, the composition of jamkrindo's Board of Commissioners has not changed, namely:

<i>President Commissioner /Independent</i>	<i>Sri Mulyanto</i>
<i>Commissioner</i>	<i>Ari Wahyuni</i>
<i>Commissioner</i>	<i>Diah Natalisa</i>
<i>Commissioner</i>	<i>Noor Ida Khomsiyati</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>M. Muchlas Rowi</i>

However, on January 18, 2021, based on the Extraordinary GMS resolution, the Shareholders dismissed Mrs. Diah Natalisa as Commissioner of the Company and appointed Mrs. Hernita Alius as Independent Commissioner of the Company and on April 12, 2021, the Shareholders dismissed Mrs. Noor Ida Khomsiyati as Commissioner of the Company and appointed Mrs. Desty Arlaini as Commissioner, so that the composition of the Company's Board of Commissioners became:

<i>President Commissioner /Independent</i>	<i>Sri Mulyanto</i>
<i>Commissioner</i>	<i>Ari Wahyuni</i>
<i>Commissioner</i>	<i>Desty Arlaini</i>
<i>Commissioner</i>	<i>M. Muchlas Rowi</i>
<i>Independent Commissioner</i>	<i>Hernita Alius</i>

On behalf of Jamkrindo we give appreciation and gratitude to Mrs. Diah Natalisa for the dedication and contribution made during her tenure as a member of the Company's Board of Commissioners.



Apresiasi

Tahun 2020 yang penuh tantangan telah dapat dilalui dengan capaian kinerja yang baik. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada Direksi dan jajarannya serta seluruh karyawan Jamkrindo atas kerja keras dan dedikasinya sehingga mampu mewujudkan kinerja yang baik tersebut.

Dewan Komisaris juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemegang Saham atas kepercayaan dan dukungannya sehingga Dewan Komisaris dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja, Dewan Komisaris juga mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik. Jamkrindo berkomitmen untuk terus memberikan nilai dan manfaat yang berkelanjutan kepada pelanggan, pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia.

Appreciation

The challenging year 2020 has been passed with good performance achievements. The Board of Commissioners gives appreciation to the Board of Directors and its managements and all employees of Jamkrindo for their hard work and dedication in order to realize such good performance.

The Board of Commissioners also expressed its gratitude to the Shareholders for their trust and support so that the Board of Commissioners can carry out their duties and responsibilities properly. To all customers and partners, the Board of Commissioners also thank you for the trust and cooperation that has been established very well. Jamkrindo is committed to continuously provide sustainable value and benefits to customers, stakeholders and the people of Indonesia.

Jakarta, 26 November 2021 / Jakarta, November 26, 2021
Atas Nama Dewan Komisaris / On behalf of the Board of Commissioners

Sri Mulyanto

Komisaris Utama/Independen
President Director/Independent

LAPORAN DIREKSI

Board of Directors' Report



Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director



Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (Persero) dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan dengan capaian kinerja yang baik. Selanjutnya, ijinkan saya mewakili jajaran Direksi Jamkrindo untuk menyampaikan laporan atas pengelolaan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 beserta Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Praise and gratitude to God Almighty for His abundance of favors and gifts that have been given to all of us so that PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) (Persero) can pass the challenging year 2020 with good performance achievements. Furthermore, allow me to represent Jamkrindo's Board of Directors to submit the Company's management report for the financial year ended December 31, 2020 along with the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner who obtained a fair opinion without exception.

Kondisi Perekonomian dan Faktor Eksternal yang Berpengaruh Terhadap Perseroan

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merebak sepanjang tahun 2020 di seluruh dunia telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian global, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dunia melemah bahkan turun sangat dalam, karena pandemi COVID-19 telah melumpuhkan seluruh sektor usaha. Berdasarkan data yang dirilis Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF), di tahun 2020 dunia menghadapi resesi ekonomi setelah perekonomian global mengalami kontraksi sebesar 3,5%.

Economic Conditions and External Factors Affecting the Company

The Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pandemic that has spread throughout 2020 around the world and had a major impact on the global economy, including in Indonesia. Global economic growth has declined considerably due to the COVID-19 pandemic that has crippled the entire business sector. Based on data released by International Monetary Fund (IMF), in 2020 the world faces an economic recession after the global economy contracted by 3.5%.

Kondisi perekonomian Indonesia juga mengalami hal yang sama. Tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi 2,07%. Bahkan, pada kuartal 2/2020, ekonomi Indonesia sempat mengalami kontraksi 5,32%. Pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar untuk mengatasi pandemi ini. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelamatkan korban dan disaat yang bersamaan juga melakukan upaya pencegahan penyebaran yang lebih luas.

Indonesia's economic condition is similar. In 2020, Indonesia's economy contracted by 2.07%. In fact, in the second quarter of 2020, Indonesia's economy contracted by 5.32%. The government is very concerned to addressing this pandemic. Various efforts were made to save the victims and at the same time also made efforts to prevent the wider spread of Corona.

Salah satu langkah besar yang diambil Pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Bank Indonesia (BI) juga telah mengeluarkan kebijakan yang akomodatif dengan menurunkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate. Sepanjang tahun 2020, BI tercatat 5 (lima) kali menurunkan tingkat suku bunga BI 7 days repo rate dari 5,00% menjadi 3,75% secara bertahap.

To overcome this pandemic, the Government issued a Replacement Government Regulation Law No. 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) and/or In Order to Deal with Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability (Perppu 1/2020) which was later refined into Law No. 2 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the COVID-19 Pandemic. Bank Indonesia (BI) has also issued an accommodative policy by lowering the BI 7 days repo rate. Throughout 2020, BI recorded 5 (five) times lowering the BI 7 days repo rate from 5.00% to 3.75% gradually.

Pemerintah sendiri tidak tinggal diam untuk membantu UMKM di pandemi COVID-19. Berbagai paket kebijakan diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu UMKM. Salah satunya adalah program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang memberikan fasilitas kredit modal kerja hingga 10 miliar kepada UMKM dimana Jamkrindo ditunjuk menjadi salah satu penjamin kredit program PEN tersebut. Dengan penunjukan sebagai salah satu penjamin program PEN, Jamkrindo optimis bahwa target perusahaan di tahun 2020 ini dapat tercapai.

Terlepas dari menurunnya kinerja ekonomi tahun 2020, Pemerintah berhasil mencatat sejumlah prestasi. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah mampu menjaga tingkat inflasi pada level yang sangat rendah, yaitu sebesar 1,68%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,72%. Tingkat inflasi tahun 2020 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Selain itu, Indonesia juga masih berhasil mencatat surplus dalam neraca perdagangan. Sepanjang tahun 2020 Indonesia masih mencatatkan surplus 21,74 miliar dolar AS. Pencapaian tersebut didukung oleh total nilai ekspor yang sebesar 163,31 miliar Dolar AS dan total nilai impor di sepanjang tahun 2020 yang sebesar 141,5 miliar Dolar AS. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga mampu menjaga kestabilan nilai tukar, khususnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Tantangan dan Kebijakan Strategis Jamkrindo Tahun 2020

Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo di tahun 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan, tapi juga berdampak pada operasional Perusahaan. Manajemen Jamkrindo sangat menyadari bahwa COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya. Karena itu, kesehatan dan keselamatan karyawan tetap menjadi prioritas utama bagi Jamkrindo.

Namun demikian, Perusahaan menyadari, di tengah kondisi yang menantang tersebut, pelayanan kepada pelanggan harus tetap dijalankan dengan baik. Karena itu, Jamkrindo melakukan pembenahan sarana prasarana kantor serta proses kerja agar dapat tetap memberikan pelayanan yang optimal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jamkrindo menerapkan berbagai kebijakan, antara lain dengan penerapan sistem rotasi bekerja dari rumah dan bekerja di kantor. Otomasi proses kerja juga ditingkatkan untuk mendukung proses bekerja dari rumah sepanjang masa pandemi sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat tetap berjalan baik. Otomasi dilakukan baik dimulai dari sistem absensi, akses terhadap sistem informasi kantor, pelaporan dan evaluasi kinerja. Kegiatan-

The Government also launched various policy packages to help MSMEs during the COVID-19 pandemic. One of them is the National Economic Recovery (PEN) program which provides working capital loan facilities up to 10 billion to MSMEs where Jamkrindo is appointed as one of the credit guarantors for PEN program. With such appointment, Jamkrindo optimist that the Company's target in 2020 can be achieved.

Despite the economic performance in 2020 decreased, the Government managed to record a number of achievements. Throughout 2020, the Government was able to maintain the inflation rate at a very low level of 1.68%, lower than the previous year of 2.72%. The inflation rate in 2020 is the lowest in history.

In addition, Indonesia still managed to record a surplus in the trade balance. Throughout 2020 Indonesia still recorded a surplus of USD 21.74 billion. The achievement was supported by the total export value of USD163.31 billion and the total import value throughout 2020 of USD141.5 billion. In addition, the Government and Bank Indonesia (BI) are also able to maintain exchange rate stability, especially the rupiah against the US dollar.

Jamkrindo's Strategic Challenges and Policies in 2020

The COVID-19 pandemic is Jamkrindo's main challenge in 2020 which has an impact on the Company's financial and operational performance. Jamkrindo's management is well aware that COVID-19 is a very dangerous virus. Therefore, the health and safety of employees is a top priority for Jamkrindo.

However, the Company realizes, in the midst of such challenging conditions, service to customers must still be carried out properly. Therefore, Jamkrindo improved office infrastructure and work processes in order to provide optimal services while implementing strict health protocols. Jamkrindo implements various policies, among others by implementing rotation system to work from home and work from office. Automation of the work process is also improved to support the process of working from home throughout the pandemic so that the company's operational activities can continue to run well. Automation is carried out starting from attendance system, access to office information system, reporting and performance evaluation. The company's activities are optimized using technology to reduce face-to-face activities



kegiatan perusahaan dioptimalkan menggunakan teknologi untuk mengurangi kegiatan tatap muka sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dilingkungan kantor sekaligus sebagai langkah efisiensi seperti rapat maupun pelatihan.

Tahun 2020, Jamkrindo juga melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2020. Hal ini disebabkan berbagai asumsi, strategi dan target yang ditetapkan pada RKAP 2020 sudah tidak lagi sesuai pasca terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, Perusahaan juga menerapkan berbagai upaya efisiensi, antara lain dengan melakukan:

1. Otomasi proses bisnis (antara lain sertifikat elektronik)
2. Efisiensi biaya agen
3. Efisiensi Biaya Adm & Umum (konsultan, representasi)
4. Menyusun prioritas proyek pengembangan
5. Efisiensi Sistik:
 - Realisasi RFI yang lebih kecil dari RKAP Awal dan negosiasi nominal kontrak kerjasama.
 - Pemanfaatan aplikasi video conference (cloudx, zoom, google-meet).

Pandemi COVID-19 juga memberikan tantangan lain bagi Jamkrindo, antara lain potensi tingkat klaim penjaminan meningkat akibat kenaikan NPL, tingkat persaingan tinggi dalam industri penjaminan, ketidakpastian stabilitas kebijakan program KUR dan Sistem Resi Gudang, daya tawar perbankan yang masih tinggi dalam industri penjaminan dan disrupsi yang senantiasa terjadi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Jamkrindo melakukan tuning dan konsolidasi bisnis untuk menjaga kinerja yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan adalah berfokus pada pengelolaan portofolio secara prudent (investasi risiko rendah) untuk meningkatkan profitabilitas dan menjaga kesehatan finansial dan operasi, meningkatkan integrasi dengan induk dan berkolaborasi dengan sesama anak perusahaan dalam holding asuransi dan penjaminan, serta memperkuat konsolidasi internal. Dari segi SDM, dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas SDM seperti *employee self service*, program kamus kompetensi, *talent management*, *online learning*, serta *digital mindset transformation*.

Pengembangan model bisnis juga dilakukan dengan memperkuat produk non program guna meningkatkan *positioning* perusahaan. Juga dilakukan *technology integration* dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses melalui penggunaan teknologi informasi.

as a measure to prevent the spread of COVID-19 in the office environment as well as efficiency measures such as meetings and training.

In 2020, Jamkrindo also made adjustments to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) 2020. This is because various assumptions, strategies and targets set in RKAP 2020 are no longer appropriate. In addition, the Company also implements various efficiency efforts, among others by:

1. *Automation of business processes (including electronic certificates)*
2. *Agent cost efficiency*
3. *Administrative & General Cost Efficiency (consultant, representation)*
4. *Develop priorities for development projects*
5. *Sistik Efficiency:*
 - *Realization of RFI which is smaller than initial RKAP and negotiation for nominal cooperation contract.*
 - *Utilization of video conference applications (cloudx, zoom, google-meet).*

The COVID-19 pandemic also presents other challenges for Jamkrindo, including the potential for guarantee claims to increase due to the increase in NPL, high level of competition in the guarantee industry, uncertainty in the stability of KUR program policy and Warehouse Receipt System, high banking bargaining power in the guarantee industry, and the ongoing disruption.

To face these challenges, Jamkrindo tuning and consolidating its business to maintain sustainable performance. The strategy focuses on prudent portfolio management (low risk investment) to improve profitability and maintain financial and operating health, enhance integration with parents and collaborate with fellow subsidiaries in insurance and guarantee holdings, and strengthen internal consolidation. In terms of human resources, various strategies are carried out to improve the quality of human resources such as employee self service, competency dictionary programs, talent management, online learning, and digital mindset transformation.

Business model development is also carried out by strengthening non-program products to improve the company's positioning. Technology integration is also carried out by improving the effectiveness and efficiency of processes through the use of information technology.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, Jamkrindo tetap fokus pada upaya meningkatkan pertumbuhan Perusahaan. Sesuai dengan tema RKAP tahun Buku 2020 yaitu "Technology-based & Knowledge-driven Organization" maka Jamkrindo menetapkan 12 (dua belas) inisiatif strategi yang dilaksanakan dalam tahun 2020. Inisiatif strategi Jamkrindo dijabarkan sebagai berikut:

1. Memperkuat Portofolio Produk Existing, Baru, dan Sinergi dengan BUMN Berorientasi Pada Profitabilitas
2. Memperkuat Portofolio Usaha dan Investasi
3. Memperkuat & Mengembangkan Jejaring Kemitraan
4. Meningkatkan Preferensi Pelanggan Terhadap Produk Jamkrindo
5. Meningkatkan Loyalitas Pelanggan & Mitra Melalui *Customer Relationship*
6. Meningkatkan Kualitas dan Cakupan Layanan Pelanggan Berbasis TI
7. Meningkatkan Efektivitas & Standardisasi Proses Kerja
8. Meningkatkan Efisiensi Proses Internal dan dengan Mitra Berbasis Otomatisasi
9. Meningkatkan Kinerja Bisnis Melalui Pemanfaatan *Machine Learning*
10. Mengoptimalkan Pemingkatan dan Pembinaan UMKM-K untuk Peningkatan *Market Share*
11. Memperkuat Pengelolaan Pengetahuan Organisasi
12. Meningkatkan Internalisasi Budaya Inovasi.

Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat penting dalam perjalanan Jamkrindo. Di tahun ini, Perusahaan mengalami perubahan badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan tersebut sejalan dengan terbentuknya *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan (Indonesia Financial Group/IFG) dimana PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia telah ditunjuk sebagai Kepala *Holding* yang membawahi 9 (sembilan) perusahaan lainnya, termasuk Jamkrindo.

Perubahan badan hukum dan bergabungnya Jamkrindo dalam IFG diharapkan akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan kinerja Jamkrindo ke depan. Perubahan bentuk badan hukum memberikan dampak manfaat baik bagi internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemanfaatan Perusahaan di sisi *stakeholders* maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang diperoleh perusahaan dengan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat berperan sebagai anak perusahaan dalam skema *holding* industri sejenis (*holding* Perasuransian dan Penjaminan)
2. Perusahaan dapat memperluas akses permodalan dalam rangka memperoleh pendanaan
3. Mekanisme pengambilan keputusan tertinggi ada pada RUPS

Amidst the various challenges faced, Jamkrindo remains focused on improving the Company's growth. In accordance with the theme of RKAP in 2020 namely "Technology-based & Knowledge-driven Organization", Jamkrindo set 12 (twelve) strategic initiatives implemented in 2020. Jamkrindo's strategy initiatives are described as follows:

1. *Strengthen existing, new, and synergy product portfolios with profitability-oriented SOEs*
2. *Strengthening Business Portfolio and Investment*
3. *Strengthening & Developing Partnership Networks*
4. *Increase Customer Preference for Jamkrindo Products*
5. *Increase Customer & Partner Loyalty Through Customer Relationship*
6. *Improving IT-Based Customer Quality and Coverage Area*
7. *Improving Effectiveness & Standardization of Work Process*
8. *Improving Internal Process Efficiency with Automation-Based Partners*
9. *Improving Business Performance Through Machine Learning Utilization*
10. *Optimizing the Rating and Development of MSMEs-K for Market Share Improvement*
11. *Strengthening Organizational Knowledge Management*
12. *Improving The Internalization of Innovation Culture.*

Holding SOE's Insurance and Guarantee

The year 2020 will be a very important year in Jamkrindo's journey. This year, the Company experienced a change of legal entity from a Public Corporate (Perum) to a Limited Liability Company (PT). The change is in line with the establishment of Indonesia Financial Group (IFG) as an insurance and guarantee holding for SOE's in which PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia was appointed as Head of Holding which oversees 9 (nine) other companies, including Jamkrindo.

Changes in legal entities and the joining of Jamkrindo in IFG are expected to contribute positively to jamkrindo's performance growth in the future. Changes in the form of legal entities provide benefits both for the internal company and external parties of the company. This is expected to encourage the benefit of the Company on the side of stakeholders and the public. The benefits obtained by the company with the change of legal entity form to PT are as follows:

1. *The Company may act as a subsidiary in similar industrial holding schemes (Insurance and Guarantee holding)*
2. *The Company may expand access to capital in order to obtain funding*
3. *The highest decision-making mechanism is at the GMS*



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 4. Perusahaan memungkinkan karyawan sebagai aset perusahaan juga menjadi pemegang saham/pemilik perusahaan 5. Perusahaan dapat mengundang investor sebagai pemilik modal, dalam rangka kerja sama permodalan dan transfer teknologi 6. Perusahaan dapat menerbitkan Efek Konversi (MCB) untuk menjadi salah satu sumber penguatan modal perusahaan 7. Perusahaan dapat menjual sebagian dari modal 8. Perusahaan dapat mengeluarkan lebih dari 1 klasifikasi saham 9. Valuasi nilai perusahaan meningkat 10. Modal saham perusahaan yang dimiliki investor dapat digunakan. | <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>The Company allows employees as assets of the company as well as shareholders/owners of the company</i> 5. <i>The Company may invite investors as owners of capital, in the framework of capital cooperation and technology transfer</i> 6. <i>The Company may issue Conversion Securities (MCB) to be one of the sources of capital strengthening of the company</i> 7. <i>The Company may sell a portion of its capital</i> 8. <i>The Company may issue more than 1 classification of shares</i> 9. <i>Increase the Valuation Value of the Company</i> 10. <i>The share capital of the investor-owned company can be used</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sedangkan, bergabungnya Jamkrindo dalam *Holding* BUMN Perasuransi dan Penjaminan akan memberikan nilai tambah dari sisi pengembangan bisnis melalui kolaborasi antar anggota *Holding* , baik dari sisi pengembangan produk sampai dengan pengelolaan jalur distribusi perusahaan. Optimalisasi struktur organisasi melalui *Shared Services* dan sentralisasi juga dapat menjawab tantangan dari sisi standarisasi pelayanan internal dan perbaikan komposisi marjin dengan adanya nilai tambah dari efisiensi.

By joining Jamkrindo in SOE's Insurance and Guarantee Holding will provide added value from the business development side through collaboration between Holding members, both in terms of product development to the management of the company's distribution channels. Optimization of organizational structure through Shared Services and centralization can also answer challenges in terms of internal service standardization and margin composition improvement with the added value of efficiency.

Specialization dapat dilakukan oleh Jamkrindo karena berdasarkan pembagian bisnis *existing*, Jamkrindo tidak memiliki irisan dengan entitas-entitas lainnya, sehingga memiliki potensi untuk melakukan *specialization* pada segmen Penjaminan. Dengan melakukan *specialization*, keuntungan yang dapat diperoleh adalah:

Specialization can be done by Jamkrindo because based on the existing business division, Jamkrindo does not have a wedge with other entities, so it has the potential to specialize in the Guarantee segment. By doing specialization, the advantages that can be obtained are:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus upaya pada satu segmen 2. Pengembangan keahlian pada satu bidang 3. <i>Research & Development</i> produk yang kuat 4. Otonomi dalam pengembangan bisnis & strategi 5. <i>Value Proposition</i> jelas bagi konsumen | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Focus effort on one segment</i> 2. <i>Development of expertise in one area</i> 3. <i>Strong product research & development</i> 4. <i>Autonomy in business development & strategy</i> 5. <i>Value Proposition is clear to consumers</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Kinerja Jamkrindo Tahun 2020

Jamkrindo Performance in 2020

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sepanjang tahun 2020, Jamkrindo masih dapat membukukan kinerja yang positif. Kendati laba bersih yang diperoleh Perusahaan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, namun Jamkrindo masih mampu mencatat sejumlah pertumbuhan pada beberapa aspek. Selain itu, kinerja Perusahaan tahun 2020 secara umum juga berada di atas target yang ditetapkan dalam RKAP tahun 2020.

In the midst of various challenges faced throughout 2020, Jamkrindo can still record a positive performance. Although the company's net profit decreased compared to 2019, Jamkrindo was still able to record some growth in several aspects. In addition, the Company's performance in 2020 in general also exceeded the target set in the 2020 RKAP.

Realisasi volume penjaminan Perusahaan konsisten mengalami peningkatan selama 4 (empat) tahun terakhir. Hingga akhir tahun 2020, volume penjaminan yang dibukukan Jamkrindo mencapai sebesar Rp188.536 miliar, dimana pencapaian tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam RKAP yaitu sebesar Rp170.515 miliar.

Realization of the Company's guarantee volume has continued to increase over the last 4 (four) years. By the end of 2020, Jamkrindo's guarantee volume reached IDR188,536 billion, which exceeded the target set in RKAP of IDR170,515 billion.

Tahun 2020 juga berhasil membukukan Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp2.633 miliar, meningkat 23,37% dari tahun sebelumnya Rp2.152 miliar. Pencapaian tersebut mencapai 120,94% dari target RKAP. Target pendapatan IJP dalam RKAP dan RJPP cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, ditahun 2018 mengalami penurunan target pendapatan IJP dalam RKAP serta realisasinya dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan sistem pencatatan IJP *accrual* tahunan pada tahun-tahun sebelumnya, menjadi IJP *accrual* bulanan mulai pada tahun 2018 untuk penjaminan KUR.

Selain itu, tahun 2020 Jamkrindo juga berhasil membukukan pendapatan investasi sebesar Rp799 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya Rp783 miliar. Pencapaian tersebut juga melampaui target RKAP dengan pencapaian 152,44% dari target RKAP. Trend pendapatan investasi sejak tahun 2016 hingga tahun 2019 terus meningkat, seiring dengan jumlah ekuitas yang meningkat juga, namun tahun 2020 iklim investasi mengalami gangguan seiring merebaknya pandemi COVID-19.

Dengan kinerja tersebut, tahun 2020 Jamkrindo berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp722 miliar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya Rp182 miliar, namun pencapaian tersebut setara dengan 164,81% dari target RKAP. Pendapatan laba sebelum pajak Perusahaan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 cenderung fluktuatif. Pendapatan laba sebelum pajak mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun pada tahun 2018 tercatat mengalami penurunan hal ini dikarenakan dampak dari perubahan pencatatan IJP *accrual* apabila diberlakukan pencatatan IJP yang sama maka tahun 2018 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Laba bersih yang dibukukan Jamkrindo tahun 2020 mencapai Rp456 miliar, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya Rp199 miliar.

Tahun 2020, Jamkrindo juga berhasil mencatat pertumbuhan aset yang cukup baik, yaitu meningkat 14,10% menjadi Rp19.123 miliar dari Rp16.770 miliar di tahun 2019. Demikian juga dengan ekuitas Perusahaan yang meningkat menjadi Rp8.856 miliar dari Rp8.678 miliar di tahun 2019.

Prospek Usaha

Kondisi perekonomian di tahun 2021 diyakini akan kembali mengalami pertumbuhan yang positif. Proses pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 diyakini akan berjalan dengan relatif cepat. IMF memprediksi ekonomi global akan mengalami pertumbuhan sebesar 6% di tahun 2021 dan 4,4% di tahun 2022. Senada dengan IMF, Bank Indonesia juga cukup optimis dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021.

In 2020 the Company also managed to record Guarantee Fee (IJP) of IDR2,633 billion, an increase of 23.37% from the previous year of IDR2,152 billion. This achievement reached 120.94% of the RKAP target. IJP's target in RKAP and RJPP tends to increase from year to year. However, in 2018, IJP's target in RKAP and its realization decreased compared to the previous year. This is due to the change of the accrual IJP recording system, where in previous years IJP recording was done on an annual basis but starting in 2018 the recording of IJP accrual became monthly for KUR guarantee.

In addition, in 2020 Jamkrindo also managed to record investment income of IDR799 billion, increase compared to the previous year of IDR783 billion. The achievement exceeded the RKAP target with the achievement of 152.44% of the RKAP target. From 2016 to 2019, the trend of investment income continues to increase in line with the increase in equity, but in 2020 the investment climate is disrupted in line with the outbreak of the COVID-19 pandemic.

With this performance, Jamkrindo managed to book a income before tax of IDR722 billion in 2020, higher than the previous year of IDR182 billion, but the achievement was equivalent to 164.81% of the RKAP target. The Company's income before tax from 2016 to 2020 are likely to be volatile. Income before tax fluctuate from year to year, but in 2018 income before tax recorded a decrease due to the impact of changes in the recording of IJP accrual. If the same IJP recording system is implemented, income before tax in 2018 will increase compared to the previous year.

Jamkrindo's net income in 2020 reached IDR456 billion, higher than the previous year of IDR199 billion.

In 2020, Jamkrindo also managed to record good asset growth, increasing 14.10% to IDR19,123 billion from IDR16,770 billion in 2019. Similarly, the Company's equity increased to IDR8,856 billion from IDR8,678 billion in 2019.

Business Prospects

Economic conditions in 2021 are believed to return to positive growth. The process of economic recovery due to the impact of COVID-19 pandemic is believed to be running relatively quickly. The IMF predicts the global economy will grow by 6% in 2021 and 4.4% in 2022. In line with the IMF, Bank Indonesia is also quite optimistic with Indonesia's economic growth prospects in 2021.



BI memprediksi ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kisaran 4,3%-5,3% di tahun 2021 dengan tingkat inflasi yang terjaga di level yang cukup rendah.

BI predicts that Indonesia's economy will grow in the range of 4.3%-5.3% in 2021 with inflation maintained at a fairly low level.

Sektor UMKM diyakini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Berbagai stimulus yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM akan mulai menunjukkan hasil yang positif di tahun 2021. Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun. Peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM.

The MSME sector is believed to make a major contribution to Indonesia's economic growth in 2021. Various stimulus provided by the government to the MSME sector will begin to show positive results in 2021. In addition, the Government also decided to increase the allocation of KUR 2021 funding from IDR253 trillion to IDR285 trillion. This increase in funds is a response to the enthusiasm of MSMEs towards low-interest of KUR and become a hope for the MSMEs recovery.

Berlandaskan pada data tersebut, prospek usaha Jamkrindo ke depan masih cukup besar. Menilik data dari pemerintah, terdapat 74% dari UMKM yang belum mengakses fasilitas kredit dari perbankan. Sehingga bila dibandingkan dengan data BPS dimana jumlah UMKM mencapai 64 juta, maka *market share* penjaminan masih sangat besar. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa prospek usaha bisnis penjaminan kedepannya masih sangat menjanjikan.

Based on existing data, Jamkrindo's business prospects in the future are still quite large. Government data shows that there are 74% of MSMEs who have not accessed bank loan facilities so the market share of guarantees is still very large, when compared to the number of MSMEs that reached 64 million. From these data, the Company believes the prospect of guarantee business is still very promising.

Untuk RKAP 2021 Jamkrindo menetapkan tema "*Tuning & Consolidating Business to Maintain Sustainable Performance*". Agar perusahaan dapat menjaga sustainability Perusahaan, fokus pada penguatan fondasi operasional dan portofolio bisnis, seperti integrasi proses dengan induk, kolaborasi dan penyelarasan bisnis dengan *holding* lainnya, serta memperkuat konsolidasi internal. Disamping itu, fokus pada pengelolaan portofolio secara prudent untuk mempertahankan profitabilitas dan menjaga kesehatan finansial dan operasional.

For RKAP 2021, Jamkrindo set the theme "Tuning & Consolidating Business to Maintain Sustainable Performance" so that the company can maintain the Company's sustainability, focus on strengthening the operational foundation and business portfolio, such as process integration with parent, collaboration and business alignment with other holdings, as well as strengthening internal consolidation. In addition, the Company also focuses on prudent portfolio management to maintain profitability and financial and operational health.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Implementation of Corporate Governance

Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap aktivitas operasionalnya. Perusahaan terus memperbaiki dan menyempurnakan struktur, organ dan mekanisme tata kelola yang berlaku di Perusahaan.

Jamkrindo continuously strives to improve the quality of the implementation of good corporate governance (GCG) principles in every operational activity. The Company continues to improve the applicable structure, organs and governance mechanisms in the Company.

Penerapan prinsip GCG di Jamkrindo mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang penjabarannya dituangkan dalam peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG).

The application of GCG principles in Jamkrindo refers to Law No. 28 of 1999 on Good State Governance, Free of Corruption, Collusion, and Nepotism whose description is set forth in the Minister of SOEs Regulation Number: PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 011 on Implementation of Good Corporate Governance (GCG) Practices in SOEs that has been amended through the Minister of SOEs Regulation Number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 and the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of Good Corporate Governance (GCG).

Perusahaan telah menerapkan tata kelola yang baik, mengkoordinir seluruh tenaga kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam menerapkan *Code of Conduct (CoC)* seluruh Karyawan serta penyusunan *Board Manual* antara Dewas dan Direksi.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG, tahun 2020 Perusahaan menindaklanjuti *Area of Improvement* atas *Assessment* laporan GCG Jamkrindo tahun 2020 baik penilaian berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 serta Surat Edaran OJK Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017.

Kenaikan *scoring* atas penerapan hasil penilaian *Self Assesment* laporan GCG Perum Jamkrindo tahun 2020 baik penilaian berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Peraturan OJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 serta Surat Edaran OJK Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tanggal 12 Oktober 2017. Adapun untuk target skor GCG Perusahaan tahun 2019 adalah 93 dengan realiasi 95,804. Untuk tahun 2020 target skor GCG perusahaan adalah 96. Untuk tahun 2020 penilaian belum dilakukan karena menunggu arahan dari *holding* (induk perusahaan).

Tahun 2020 Jamkrindo juga mensahkan Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No.9/Per-Dir/4/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Jamkrindo. Peraturan ini adalah dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Jamkrindo serta untuk mengelola Risiko penyuapan yang memiliki tingkat risiko diatas rendah (*insignificant* dan *minor*), maka diperlukan pedoman untuk Unit Kerja melakukan Uji Kelayakan (*Due Diligence*) sehingga risiko penyuapan dapat dimitigasi dengan baik. Pedoman penerapan Uji Kelayakan (*Due Diligence*) merupakan bagian dari penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang disusun sebagai bagian dari implementasi SNI 37001:2016, dan menjadi standar bagi seluruh Unit Kerja di PT Jamkrindo dalam penerapan sistem manajemen anti penyuapan, sehingga dapat memberikan panduan serta keseragaman bagi organisasi, dan berdampak pada peningkatan pelayanan bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan PT Jamkrindo.

The Company has implemented good governance, coordinated the entire employees to sign the Integrity Pact in implementing the Code of Conduct (CoC) for all Employees as well as prepared the Board Manual between Board of Commissioners and Board of Directors.

As part of efforts to improve the quality of GCG implementation, in 2020 the Company followed up the Area of Improvement on the Assessment of Jamkrindo GCG report in 2020, either assessments based on the Minister of SOEs Regulation Number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Minister of SOEs Regulation Number: PER-01/MBU /2011 on Implementation of Good Corporate Governance and OJK Regulation Number: 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 and OJK Circular Letter Number: 54/SEOJK.05/2017 dated October 12, 2017.

The result of Perum Jamkrindo GCG self assessment report in 2020 obtained a good score. This score tends to increase from year to year. The assessment was conducted based on the Minister of SOEs Regulation Number: PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 concerning Amendments to the Minister of SOEs Regulation Number: PER-01/MBU /2011 on Implementation of Good Corporate Governance and OJK Regulation Number: 3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 and OJK Circular Letter Number: 54/SEOJK.05/2017 dated October 12, 2017. The company's GCG score target in 2019 is 93 with a realization of 95,804. For 2020 the company's GCG score target is 96. For 2020, the assessment has not been conducted because it awaits direction from the holding company.

*In 2020 Jamkrindo also approved the Board of Directors Regulation of PT Jaminan Kredit Indonesia No.9/Per-Dir/4/VI/2020 dated June 4, 2020 concerning Guidelines for Anti-Bribery Management System of PT Jamkrindo. This regulation is made in order to the implementation of Anti-Bribery Management System (SMAP) of PT Jamkrindo and to manage bribery risks that have a level of risk above low (*insignificant* and *minor*). The Work Unit requires these guidelines to conduct *Due Diligence* so that the risk of bribery can be properly mitigated. *Due Diligence* is part of the implementation of anti-bribery management system that was prepared as part of the implementation of SNI 37001:2016, and became the standard for all Work Units at PT Jamkrindo in implementing anti-bribery management system so as to improve services for the community and all stakeholders of PT Jamkrindo.*



Dalam hal ini, Perusahaan telah menetapkan prosedur Uji Kelayakan yang mencakup penilaian yang diperlukan guna mendapatkan informasi yang memadai untuk menilai risiko Penyuapan. Perusahaan memastikan prosedur ini diperbaharui pada frekuensi yang ditentukan sehingga bilamana ada perubahan dan informasi baru, maka perubahan dan informasi baru tersebut dapat diperhitungkan dengan benar. Dalam pelaksanaannya, Jamkrindo telah menyelesaikan pelaksanaan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi PT SAI Global Indonesia dan telah memperoleh sertifikat.

Di tahun 2020, Jamkrindo mendapatkan apresiasi terkait penerapan GCG melalui beberapa penghargaan, yaitu:

- The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2020 Businessnews, 29 Juli 2020.
- Top GRC Awards 2020 #Star4 dalam ajang Top Governance, Risk & Compliance 2020 yang diselenggarakan oleh Top Business, 7 Oktober 2020.

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai salah satu perusahaan penjaminan di Indonesia dan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, Jamkrindo turut menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN.

Pada hakikatnya PKBL merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau CSR itu sendiri. Program PKBL Jamkrindo merupakan komitmen perusahaan dalam tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Terdapat 2 (dua) ruang lingkup pelaksanaan PKBL yaitu Program Kemitraan untuk meningkatkan mitra binaan UMKM menjadi mandiri dan tangguh serta yang kedua yaitu Bina Lingkungan adalah kegiatan bantuan langsung kepada masyarakat.

Pelaksanaan penyaluran PKBL tahun 2020 dapat menyalurkan Program Kemitraan sebesar Rp4.372.000.000 kepada 152 mitra binaan yang tersebar di seluruh wilayah kerja Jamkrindo, sedangkan untuk Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan sebesar Rp11.889.627.391.

Terdapat pencapaian yang diperoleh Jamkrindo dalam yaitu Jamkrindo mendapatkan *Top Corporate Social Responsibility PKBL of the Year 2020* sebagai perusahaan yang dinilai telah

In this case, the Company has established Due Diligence procedures that include assessments necessary to obtain sufficient information to assess the bribery risks. The Company ensures that this procedure is updated at a specified frequency so that whenever there are changes and new information, then the changes and new information can be taken into account correctly. In its implementation, Jamkrindo has completed the implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification conducted by PT SAI Global Indonesia Certification Body and has obtained a certificate.

In 2020, Jamkrindo received appreciation related to the implementation of GCG through several awards, namely:

- *The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020 in GRC & performance excellence award 2020 Businessnews, July 29, 2020.*
- *Top GRC Awards 2020 #Star4 in the Top Governance, Risk & Compliance 2020 award organized by Top Business, October 7, 2020.*

Corporate Social Responsibility Program

As one of the guarantee companies in Indonesia and in order to support sustainable development, Jamkrindo also runs the Partnership and Community Development Program (PKBL) in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation, as stipulated in SOE Minister Regulation No. 02/MBU/04/2020 dated 02 April 2020 regarding the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for SOEs.

In essence, PKBL is part of the implementation of Social and Environmental Responsibility or CSR. PKBL Jamkrindo program is the company's commitment in social responsibility to the community. There are 2 (two) scopes of implementation of PKBL, namely Partnership Program to improve MSME partners to be independent and resilient, and the second is Community Development for direct assistance activities to the community.

PKBL in 2020 has distributed funds for the Partnership Program amounting to IDR4,372,000,000 to 152 partners spread throughout jamkrindo operating area, while the Community Development Program has distributed funds amounting to IDR11,889,627,391.

In 2020, Jamkrindo was awarded PKBL's Top Corporate Social Responsibility of The Year 2020 as a company that contributes and actively engages in creating and developing MSMEs in

berkontribusi dan melibatkan diri secara aktif menciptakan dan menumbuhkan kembangkan UMKM di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 25 perusahaan BUMN terpilih berdasarkan survei, yang dinilai berhasil menggulirkan program PKBL Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta *Tempo Country Contributor Award 2020 the Most Appreciation Corporate Social Responsibility*.

Perubahan Komposisi Direksi

Tahun 2020, komposisi Direksi Perusahaan mengalami perubahan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan pada 26 Oktober 2020. Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Randi Anto sebagai Direktur Utama Perusahaan dan mengangkat Sdr. Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur Utama. Dengan keputusan tersebut, komposisi Direksi Jamkrindo berubah menjadi:

Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan	Amin Mas'udi
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajen Risiko	I Rusdonobanu

Pada tanggal 22 Maret 2021, komposisi Direksi Jamkrindo kembali mengalami perubahan sesuai dengan keputusan RUPS yang dilaksanakan pada 22 Maret 2021, dimana Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdr. Amin Mas'udi sebagai Direktur Bisnis Penjaminan dan mengangkat Sdr. Suwarsito sebagai Direktur Bisnis Penjaminan.

Dengan demikian, komposisi Direksi Perusahaan pada saat ini adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan	Suwarsito
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajen Risiko	I Rusdonobanu

Indonesia. This award was given to 25 selected state-owned companies based on the survey has successfully channeled the PKBL Entrepreneurship and Small and Medium Micro Enterprises (MSMEs) program. In addition, the Company also received Tempo Country Contributor Award 2020 The Most Appreciation Corporate Social Responsibility.

Changes in the Board of Directors' Composition

In 2020, the composition of the Company's Board of Directors has changed in accordance with the General Meeting of Shareholders (GMS) resolution conducted on October 26, 2020. The Shareholders honorably dismissed Mr. Randi Anto as President Director of the Company and appointed Mr. Putrama Wahyu Setyawan as President Director. With this decision, the composition of Jamkrindo's Board of Directors changed to:

<i>President Director</i>	<i>Putrama Wahyu Setyawan</i>
<i>Director of Business of Guarantee</i>	<i>Amin Mas'udi</i>
<i>Director of Operations and Network</i>	<i>Kadar Wisnuwarman</i>
<i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	<i>Sulis Usdoko</i>
<i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	<i>I Rusdonobanu</i>

On March 22, 2021, the composition of Jamkrindo's Board of Directors changed again in accordance with the GMS Resolution held on March 22, 2021, where the Shareholders honorably dismissed Mr. Amin Mas'udi as Director of Business of Guarantee and appointed Mr. Suwarsito as Director of Business of Guarantee.

Thus, the composition of the Company's Board of Directors at this time is as follows:

<i>President Director</i>	<i>Putrama Wahyu Setyawan</i>
<i>Director of Business of Guarantee</i>	<i>Suwarsito</i>
<i>Director of Operations and Network</i>	<i>Kadar Wisnuwarman</i>
<i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	<i>Sulis Usdoko</i>
<i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	<i>I Rusdonobanu</i>



Atas nama Perusahaan, kami mengucapkan terima kasih kepada Sdr. Randi Anto dan Sdr. Amin Mas'udi atas dedikasi dan kontribusi yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan.

Penutup

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan. Direksi memberikan apresiasi kepada seluruh karyawan yang telah bekerja dengan penuh dedikasi tinggi, sehingga Perusahaan mampu melewati tantangan tersebut dengan capaian kinerja yang positif. Direksi juga memberikan apresiasi kepada Dewan Komisaris atas kerjasama, nasihat dan rekomendasi yang diberikan, sehingga Direksi mampu melakukan pengelolaan Perusahaan dengan baik.

Tak lupa, atas nama Jamkrindo, Direksi juga memberikan apresiasi kepada seluruh pelanggan dan mitra kerja atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik dan kepercayaan yang telah diberikan pada Perusahaan. Kami senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan kualitas kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Kepada Pemegang Saham, Direksi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami optimis, Perusahaan dapat terus melaju menghadapi berbagai tantangan dengan meraih berbagai peluang positif untuk pertumbuhan kinerja yang optimal.

On behalf of the Company, we would like to thank Mr. Randi Anto and Mr. Amin Mas'udi for their dedication and contribution during their time as members of the Company's Board of Directors.

Closing

2020 has been a challenging year. The Board of Directors gives appreciation to all employees who have worked with great dedication, so that the Company is able to pass the challenge with positive performance achievements. The Board of Directors also gives appreciation to the Board of Commissioners for cooperation, advice and recommendations provided, so that the Board of Directors is able to manage the Company well.

On behalf of Jamkrindo, the Board of Directors also gives appreciation to all customers and partners for cooperation that has been well established and the trust that has been given to the Company. We continuously strive to improve the quality of cooperation that benefits both parties.

To Shareholders, the Board of Directors would like to thank you for the trust that has been given. We are optimistic that the Company can continue to face various challenges by achieving positive opportunities for optimal performance growth.

Jakarta, 26 November 2021 / Jakarta, November 26, 2021

Atas Nama Direksi / On behalf of the Board of Directors

Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama / President Director

Surat Pernyataan Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Jamkrindo

Statement of Board of Commissioners on Responsibility for 2020 Annual Report of PT Jamkrindo

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jamkrindo tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all the information contained in the 2020 Annual Report of PT Jamkrindo has been disclosed completely and we are fully responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 26 November 2021
Jakarta, November 26, 2021

Dewan Komisaris *Board of Commissioners*



Sri Mulyanto
Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent



Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner



Desty Arlaini
Komisaris
Commissioner



Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020 PT Jamkrindo

Statement of Board of Directors on Responsibility for 2020 Annual Report of PT Jamkrindo

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Jamkrindo tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all the information contained in the 2020 Annual Report of PT Jamkrindo has been disclosed completely and we are fully responsible for the truthfulness of the content of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 26 November 2021

Jakarta, November 26, 2021

Direksi

Board of Directors

Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama
President Director

Suwarsito

Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee

Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
*Director of Human Resources Management,
General Affairs and Compliance*

I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management



PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh mitra. Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan Perusahaan adalah dengan terus memperbaiki dan menyempurnakan organisasi, produk dan layanan yang diberikan. Perubahan badan hukum yang dilakukan Perusahaan tahun 2020 juga merupakan wujud komitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

Jamkrindo continuously strives to improve service to all partners. One of the measures taken by the Company is to continuously improve the organization, products and services provided. The change of legal entity made by the Company in 2020 is also a form of commitment to improve service to all customers.

 **Jamkrindo**
Jamkrindo Kredit Industri

A member of **iFG**



INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO

General Information About Jamkrindo



Nama Perusahaan Company Name

PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat menjadi **PT Jamkrindo**
*PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to **PT Jamkrindo***



Bentuk dan Status Badan Usaha Form and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT)
Limited Liability Company



Tanggal Pendirian Date of Establishment

1 Juli 1970
July 1, 1970



Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No.25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jamkrindo tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 No. AHU-0066418.AH.01.11.Tahun 2020
Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020, and was last amended by Deed of Decree of the Shareholders of PT Jamkrindo (Persero) regarding Amendment to Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta and received the Establishment Ratification of a Limited Liability Company from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, No. AHU-0066418. AH.01.11. of 2020



Bidang Usaha Line of Business

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (UMKMK), Guarantee for BUMN, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.



Jaringan Usaha Business Network

9 (sembilan) Kantor Wilayah, 56 (lima puluh enam) Kantor Cabang dan 16 (enam belas) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia
9 (nine) Regional Offices, 56 (fifty six) Branch Offices dan 16 (sixteen) Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia



Kepemilikan Ownership

Saham Seri A Dwiwarna
Pemerintah Republik Indonesia (0,0000001787%)
*Series A Dwiwarna Shares
The Government of Republik Indonesia (0.0000001787%)*

Saham Seri B
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
(99,9999998213%)
*Series B Shares
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
(99.9999998213%)*



Karyawan Tetap Permanent Employee

965 orang di tahun 2020 / *965 people in 2020*



Alamat Address

Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

Telp. : +62 21 6540335

Fax. : +62 21 6540344, 6540348

Email : contact@jamkrindo.co.id

Website : www.jamkrindo.co.id



@pt_jamkrindo



@pt_jamkrindo



Jamkrindo



PT Jamkrindo

RIWAYAT SINGKAT JAMKRINDO

Brief History of Jamkrindo



Selayang Pandang Sejarah PT Jamkrindo

Berangkat dari kondisi riil perkembangan koperasi yang masih cukup tertinggal dibandingkan dengan dua pelaku ekonomi lainnya (BUMN dan Swasta), Pemerintah mendirikan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) pada tahun 1970 yang dalam perkembangannya diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No.51 tanggal 23 Desember 1981, yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.27 tanggal 31 Mei 1985.

History of PT Jamkrindo at a Glance

Starting from the real condition in which the development of cooperative was still behind compared to two other economic actors (SOE's and Private), the Government established Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) in 1970 which in its development was changed to Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) through Government Regulation No.51 dated December 23, 1981, which is renewed by Government Regulation No.27 dated May 31, 1985.



Seiring berjalannya waktu dan terkait dengan keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan Penjaminan Kredit, Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK, menjadi tidak hanya terbatas hanya pada koperasi, tetapi juga meliputi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui Peraturan Pemerintah No.95 tanggal 7 November Tahun 2000 dan sekaligus merubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha (SPU).

Selanjutnya pada bulan Mei 2008, melalui Peraturan Pemerintah No.41 tanggal 19 Mei 2008 Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha kembali diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). Perubahan nama perusahaan tersebut terkait dengan perubahan bisnis perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKMK melalui pola bagi hasil, tetapi hanya terfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKMK. Pada tahun 2008 juga, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.2 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan, mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Dengan regulasi dimaksud maka Perum Jamkrindo wajib memiliki ijin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan No.KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Perum Jamkrindo sebagai perusahaan Penjaminan Kredit.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00011484.AH..01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) merubah status badan hukum PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jamkrindo dan resmi menjadi anak perusahaan dari holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan.

Along with its success in carrying out the functions and duties of PKK Perum in developing cooperatives through Credit Guarantee activities, the Government expanded the range of PKK Perum services, becoming not only limited to cooperatives, but also includes Micro, Small and Medium Enterprises through Government Regulation No.95 dated November 7, 2000 and at the same time changed the name of PKK Perum to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Furthermore, in May 2008, through Government Regulation No.41 dated May 19, 2008, the name of Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) was changed again become Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo). The change of company name is related to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit sharing patterns, but focuses on the MSME and Cooperative credit guarantee business. In 2008 also, the Government issued Presidential Regulation No.2 dated January 26, 2008 concerning the Guarantee Institution. To implement the Presidential Regulation, the Government in this case the Ministry of Finance, issued Regulation of the Minister of Finance No.222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008 concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. With the regulation, Perum Jamkrindo is required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued Decree No.KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009 which stipulates Perum Jamkrindo's business license as a Credit Guarantee company.

President of the Republic of Indonesia Joko Widodo officially changed the legal entity of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia or Perum Jamkrindo become a Limited Liability Company through Government Regulation No.11 of 2020 dated February 14, 2020 concerning the Change of Legal Entity Form from Public Corporation (PERUM) of Jaminan Kredit Indonesia into a Limited Liability Company (Persero) that has been enacted on February 17, 2020. This decision was strengthened by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH..01.01 Year 2020 concerning Ratification of establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the Company PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of SOE Building, Jakarta on February 24, 2020.

Then based on Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) changed the status of legal entity PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to PT Jamkrindo and officially became a subsidiary of the holding of Insurance and Guarantee.

Adapun, perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak Perusahaan Pasar Modal dan Jasa Keuangan:
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak di bidang manajemen investasi
 - PT Bahana Sekuritas, bergerak dibidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek,
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasehat keuangan (advisory)
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), bergerak dibidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.
2. Anak Perusahaan Asuransi
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum,
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank.
 - PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak dibidang asuransi sosial
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak di bidang asuransi umum

Perubahan Nama Perusahaan

Kronologi proses perubahan nama PT Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985.
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000.
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008.
- Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17

Meanwhile, the companies that are members of the BUMN Holding Insurance and Guarantee are as follows:

1. Capital Market and Financial Services Subsidiaries:
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), is engaged in investment management
 - PT Bahana Sekuritas, is engaged in securities underwriting and securities trading brokerage
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), is engaged in investment and financial advisory services (advisory)
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), is engaged in building ownership, management, and rental.
2. Insurance Subsidiary
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") which carries out business in the field of credit insurance and general insurance services
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks or non-banks.
 - PT Asuransi Jasa Raharja ("Jasa Raharja") is engaged in social insurance
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") is engaged in general insurance

The Change of Company's Name

The chronology of the name change process of PT Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- The company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No.51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No.27 of 1985.
- The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No.95 of 2000.
- The company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No.41 of 2008.
- In order to change the form of Perum Jamkrindo legal entity from Public Corporation (PERUM) to Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No.11/2020 which has been enacted on February 17, 2020. To



Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No.25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero).

comply with the provisions of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company signed the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) namely Deed No.25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Year 2020 Concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero).

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari holding Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.
- *Based on Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Deed of Amendment to the Articles of Association No.2 dated April 9, 2020 which was ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02 Year 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding under the name of PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.*

1970 - 1981

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk

Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit

1981 - 2000

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT

Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Sapi Perah Credit, Padi Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT

2000 - 2008

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah

Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product

2020 - Sekarang

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2008 - 2020

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

BIDANG USAHA SERTA PRODUK DAN JASA

Line of Business and Products and Services

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Penerima Jaminan

Berdasarkan Akta No.2, tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan Usaha yang Dijalankan dan Kesesuaiannya dengan Anggaran Dasar Perusahaan

Dalam upaya mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha untuk mendukung pembiayaan. Berikut disampaikan pelaksanaan kegiatan usaha dan kebijakan pengembangan usaha yang telah dilakukan.

Business Activities Based on Articles of Association: Guarantee Recipients

Based on Deed No.2, dated April 9, 2020 concerning Amendments to the Articles of Association in article 3 mentioned the Company's purpose and objective is to carry out business activities guarantees for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantees for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and other Guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

Business Activities Carried Out and Its Conformity to the Articles of Association of the Company

In an effort to achieve these aims and objectives, the Company can conduct several business activities and business development policies to support financing. The following is the implementation of business activities and business development policies that have been carried out.

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/has not been performed	Keterangan Description
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat. Penjaminan Program PEN <i>Available on General Credit Guarantee products, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee, PEN Program Guarantee</i>
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya <i>Loan guarantees channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit to its members</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK <i>Available on the KKLK Multipurpose Credit Guarantee product</i>
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan <i>Credit guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs</i>	✓	Penyaluran program kemitraan <i>Distribution of partnership programs</i>



No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/has not been performed	Keterangan Description
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	x	Belum / Tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of purchase of goods in installments made to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO <i>Available on OTO Credit Guarantee products</i>
6	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of trade transactions carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang <i>Available on Goods Distribution Guarantee products</i>
7	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa <i>surety bond</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Surety Bond, <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa <i>Available on Surety Bond products, Surety Bond Co-Guarantee, Guarantee of Construction Loans and Procurement of Goods/Services.</i>
8	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi <i>Co-Guarantee</i> <i>Available on Counter Guarantee Bank Credit Guarantee and Co-Guarantee Counter Guarantee Bank Credit Guarantee products</i>
9	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	x	Belum / Tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
10	Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives;</i>	x	Belum / Tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
11	Penjaminan kepabeanan (<i>Custom Bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Customs guarantees (Custom bonds) carried out for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond</i>
12	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Excise guarantees carried out on Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond products</i>
13	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro Business, Small Business, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on General Credit guarantee products, and Micro Credit Guarantees</i>

No.	Kegiatan Activities	Telah/Belum Dijalankan Has/has not been performed	Keterangan Description
14	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on Micro Credit Guarantee products</i>
15	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan BUMN lain <i>Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises</i>	✓	Terdapat dalam produk Surety Bond, Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan Invoice <i>Available in Surety Bond products, KUR Collateral Guarantee, Invoice Financing Guarantee</i>
16	Penjaminan sistem resi gudang <i>Credit Guarantee Based on Warehouse Receipt</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Subsidi Resi Gudang <i>Available on the Warehouse Receipt Credit Guarantee Subsidy product</i>
17	Penjaminan Kredit Berbasis Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Based Credit Guarantee</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Skema Subsidi Resi Gudang dan Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Available in the product Warehouse Receipt Subsidy Guarantee Scheme and Warehouse Receipt Credit Guarantee</i>
18	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan <i>Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purposes and objectives of the Company</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Arrum <i>Available on Multipurpose Credit Guarantee products, Arrum Credit Guarantee</i>
19	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan <i>Provision of management consulting services related to Guarantee business activities</i>	✓	Dilakukan oleh korporasi <i>Operated by the corporation</i>
20	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Ranking, management consulting, management services, assistance/empowerment, as well as other services for Micro Businesses, Small Businesses, and Medium Enterprises, and Cooperatives and</i>	✓	Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM <i>Operated by the Risk Management Division and PUKM</i>
21	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. <i>Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions in accordance with their authority.</i>	✓	Penjaminan Bersama KUR <i>KUR Collateral Guarantee</i>

✓ = Sudah dijalankan | ✗ = Belum/tidak dijalankan
✓ = Has been performed | ✗ = Has not been performed

Kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (co-guarantee) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf r dan huruf s. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

The company's main business activities mentioned above can be performed in the form of co-guarantee except the main business activities as referred to in paragraph 2 letter r and letter s. In addition to the main business activities as referred to in paragraph 2, the Company may carry out business activities in order to optimize the utilization of the Company's resources.

Produk Usaha Penjaminan

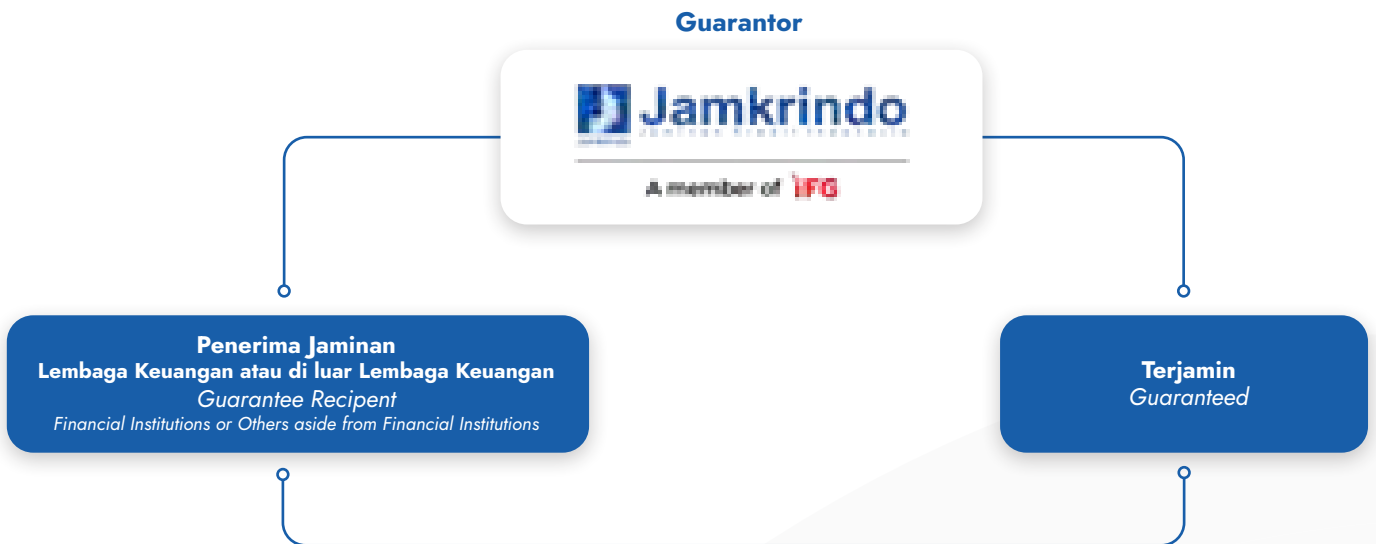
Penjaminan Kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin.

Guarantee Business Products

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit giving business entity called the Guarantee Receiver, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut: *The types of guarantee business products include the following:*

No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
1	Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee of People's Business Credit</i>	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. <i>Venture Capital Credit/Financing and/or investment to MSMEs in a productive and feasible, but not yet bankable business field which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help develop productive businesses.</i>
2	Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>KPR Sejahtera Guarantee-Housing Financing Liquidity Facility</i>	Kegiatan penjaminan terhadap penyaluran kredit kepemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. <i>Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed installments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.</i>
3	Penjamin Sistem Resi Gudang <i>Guarantee on the Warehouse Receipt System</i>	Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang <i>Guarantee activities that protect the rights of Warehouse Receipts and/or Guarantee Rights Recipients in the event of failure, incompetence and/or bankruptcy of warehouse managers in carrying out their obligations and maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i>
4	Penjaminan Kredit Umum <i>Guarantee on General Credit</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) <i>Guarantee on credit/financing provided by the Recipient of the Other Financial Institution Guarantee (Non-Bank) to the Guaranteed for the purposes of additional Working Capital and/or Investment in the context of guaranteed business development and improvement, in which the guarantee process is carried out on a case-by-case basis</i>
5	Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin, Pengusaha mikro dan Kecil, untuk keperluan modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin, dengan jumlah <i>plafond</i> kredit atau pembiayaan disesuaikan ketentuan kredit mikro yang berlaku di Penerima Jaminan yang proses penjaminan dilakukan secara otomatis Bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>) <i>Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).</i>



No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
6	<p>Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa <i>Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan Bowheer (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. <i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bowheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.</i></p>
7	<p>Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan lainnya (Non Bank) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/ instansi Pemerintah) baik yang penyalurnya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. <i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.</i></p>
8	<p>Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan case by case). <i>Credit guarantees for credit/financing of distribution which is given provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case basis)</i></p>
9	<p>Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi Bank <i>Guarantee on Guarantee/Counter Guarantee Bank</i></p>	<p>Penjaminan yang diberikan Penjamin (Perum Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi. <i>A guarantee given by the Guarantor (Perum Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligees when the Guaranteed has defaulted</i></p>
10	<p><i>Surety Bond</i></p>	<p>Suatu perjanjian 3 (tiga) pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut <i>A 3-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligees's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligees to settle the Guaranteed's obligations</i></p>

No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
11	Payment Bond	<p>Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan.</p> <p><i>Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the Guaranteed's payment to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver</i></p>
12	Customs Bond	<p>Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada Obligee (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya.</p> <p><i>Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations.</i></p>
13	Penjaminan Keagenan Kargo Cargo Agency Guarantee	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/Obligee (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/Principal (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/Obligee.</p> <p><i>A guarantee that is given to the Recipient of Guarantee/Obligee (The Transportation Service Provider) for guaranteed obligations/principal (Cargo Agent) in making payment of freight costs to the Recipient of Guarantee/Obligee.</i></p>
14	Penjaminan Invoice Financing Guarantee of Invoice Financing	<p>Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada invoice yang diterbitkan oleh penerima jaminan.</p> <p><i>Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients.</i></p>
15	Penjaminan Supply Chain Financing Guarantee of Supply Chain Financing	<p>Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari PERUSAHAAN INTI tertentu berupa KMK pre Financing, KMK Post Financing dan KMK Distributor.</p> <p><i>Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain CORE COMPANIES in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor</i></p>
16	Penjaminan Kemaritiman/Jaring Maritime/Fisheries Guarantee	<p>Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan</p> <p><i>Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries</i></p>
17	Penjaminan Pembiayaan Otomotif Automotive Financing Guarantee	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna</p> <p><i>Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose</i></p>
18	Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt	<p>Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-Undang No.9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya</p> <p><i>The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks / Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No.9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments</i></p>



No.	Kegiatan Activities	Keterangan Description
19	<p>Penjaminan Kredit Resi Gudang Warehouse Receipt Credit Guarantee</p>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan. Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-Undang No.9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/ CMA</i>)</p> <p><i>Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No.9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management (CMA)</i></p>
20	<p>Penjaminan Fintech Fintech Guarantee</p>	<p>Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer landing</i>) kepada borrower</p> <p><i>Guarantee on information technology-based money lending services that are channeled by lenders through the organizer (peer to peer landing) to the borrower</i></p>
21	<p>Penjaminan KPR Guarantee of Home Ownership Loans</p>	<p>Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (Non Bank) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko</p> <p><i>Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse</i></p>
22	<p>Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG) Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)</p>	<p>Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank.</p> <p><i>Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.</i></p>
23	<p>Penjaminan Program PEN PEN Program Guarantee</p>	<p>Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional</p> <p><i>Guarantees provided in the context of implementing Government Regulations concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or facing threats that endanger the National Economy and or Financial System Stability and National Economic Rescue</i></p>

KOMPETENSI INTI

Core Competence

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada *customer*.

Core competencies have a great potential in strengthening competitive advantage. However, strong competitive advantage can still be hampered by dynamic factors in market competition, such as lack of customer loyalty and lack of customer relationships. At present and in the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamics of market competition factors related to the moral hazard potential of the customer.

Kriteria Identifikasi <i>Identification Criteria</i>	<i>Accessibility</i>	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi <i>Holding</i> . <i>Market expansion through the collaboration of SOEs and increased efficiency through the collaboration of Holding.</i>
	Unik/Langka <i>Unique/Rare</i>	Satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penjaminan khusus untuk UMKM. <i>The only state-owned enterprise engaged in special guarantees for MSMEs.</i>
	<i>Value Creation</i>	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota <i>Holding</i> BUMN Perasuransian dan Penjaminan untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan. <i>Optimizing reputation and trusted image as a member of SOE's Holding in Insurance and Guarantee to form brand preference in the eyes of customers.</i>
Risiko <i>Risk</i>	1. Target bisnis tidak tercapai	1. <i>Business target not achieved</i>
	2. Penularan COVID-19 pada SDM Perusahaan	2. <i>Transmission of COVID-19 in the Company's Human Resources</i>
	3. Ketidaksesuaian data pada sistem ICPR	3. <i>Data discrepancies in ICPR systems</i>
	4. Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA	4. <i>Settlement of claims not in accordance with SLA</i>
	5. Kehilangan aset Perusahaan	5. <i>Loss of Company assets</i>
	6. Rasio klaim penjaminan yang tinggi	6. <i>High guarantee claim ratio</i>
	7. Subrogasi tidak tertagih	7. <i>Uncollectible subrogation</i>
	8. Bisnis penjaminan terhambat	8. <i>Guarantee business is hampered</i>
	9. Terhambatnya pembayaran klaim	9. <i>Claims payments are hampered</i>
	10. Kesalahan pelaporan perpajakan.	10. <i>Tax reporting errors.</i>
Kendala <i>Obstacles</i>	1. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan hambatan pada kinerja Perusahaan.	
	2. Adanya kesulitan meningkatkan pendapatan subrogasi karena adanya kesulitan pada mitra bank dalam proses penagihan.	
	3. Persaingan usaha yang semakin ketat.	

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Kapasitas penjaminan terhadap UMKM sangat besar | 1. <i>The guarantee capacity of MSMEs is very large</i> |
| 2. Jamkrindo lebih memahami UMKM | 2. <i>Jamkrindo better understands MSMEs</i> |
| 3. Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKM <ul style="list-style-type: none"> • Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit • Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (<i>customized product</i>) | 3. <i>Having good expertise and reputation in the field of MSMEs credit guarantee.</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Speed of payment of credit guarantee claims.</i> • <i>Serving products according to the needs of partners (customized products).</i> |
| 4. Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah | 4. <i>Having large capital and great support from the Government</i> |
| 5. Sistem informasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja. | 5. <i>Information systems that are integrated internally and externally with partners.</i> |
| 6. Penguatan model bisnis dengan bergabung dalam <i>Holding</i> Perasuransian dan Penjaminan. | 6. <i>Strengthening the business model by joining to the Insurance and Guarantee Holding</i> |



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No: S-286/MBU/05/2019 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Visi dan Misi Jamkrindo sebagai berikut:

In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No.S-286/MBU/05/2019 concerning Approval and Endorsement of the Company's Long-Term Plan, thus Jamkrindo's Vision and Mission are as follows:



Visi
Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

To become a Leading Guarantee Company that Supports the National Economic Development.



Misi
Mission

Meningkatkan **Aksesibilitas** finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang **Inovatif, Kompetitif** dengan pelayanan **Profesional, Efektif** dan **Efisien** secara **Berkelanjutan**.

*Improving MSMEs' and Cooperatives' Financial **Accessibilities** through the provision of Guarantee, which is **Innovative, Competitive** with a **Professional, Effective, and Efficient** Services **Sustainably**.*

Budaya Perusahaan

Sesuai dengan arahan Menteri BUMN kepada seluruh Perusahaan BUMN, maka budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 5 (lima) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya **"AKHLAK"**.

Corporate Culture

In accordance with the direction of the Minister of SOEs to all state-owned enterprises, so Jamkrindo's corporate culture consists of 5 (five) items of cultural values embraced by the Company, namely the culture of **"AKHLAK"**.



Amanah Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given



Kompeten Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continually learn and develop capabilities



Harmonis Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Care to each other and respect differences



Loyal Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Prioritise our dedication for nation and country



Adaptif Adaptive

Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continually innovate to respond and make change



Kolaboratif Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis
Build strategic alliance



MAKNA BRANDING LOGO

The Meaning Behind Logo Branding



A member of **IFG**

Logo Perusahaan terdiri dari akronim nama Perusahaan dan ikon grafis berbentuk bujur sangkar.
The Company logo consists of an acronym of the Company name and a square graphic icon.

Logo Perusahaan dibangun dari 2 (dua) warna, yaitu Biru dan Putih.
The Company logo is designed using 2 (two) colors, namely Blue and White.

Ikon Grafis The Graphic Icon

Ikon grafis pada logo membentuk konfigurasi huruf "J" yang tegas dan bersudut, yang melambangkan ketegasan Perusahaan, orientasi yang fokus pada tujuan, serta konsistensi pada visi.
The graphic icon on the logo forms a strict and angular "J" letter configuration, which symbolizes firmness, an orientation that focuses on goals, and consistency in vision.

Huruf "J" tersebut membentuk sebuah kunci berwarna putih, yang bermakna dasar dari motto Perusahaan yaitu "kunci Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) menuju sukses". Huruf "J" pada logo terbentuk dari 3 (tiga) garis tegas berwarna putih, yang melambangkan kesatuan dari inti pelayanan Perusahaan, yaitu Jaminan terhadap UMKMK.
The letter "J" forms a white key, which means the basis of the Company's motto is "the key to Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs) towards success". The letter "J" in the logo is formed from 3 (three) white lines, which symbolize the unity of the core of the Company's service, namely the guarantee for micro, small, and medium enterprises, and cooperatives.

Akromin Perusahaan The Company's Acronym

Akronim Perusahaan yaitu "JAMKRINDO" merupakan singkatan dari Jaminan Kredit Indonesia. Akronim ini terucap sangat familiar, dengan tujuan membangun "Brand Awareness" dan identitas melalui pengucapannya, yang secara psikologis akan terekam dalam otak manusia dan memungkinkan adanya pengucapan berulang-ulang.
The Company's acronym, "JAMKRINDO" stands for 'Jaminan Kredit Indonesia' (Indonesian Credit Guarantee). This acronym sounds very familiar, which is appropriate with the aim of building "Brand Awareness" and identity through its pronunciation. The expectation of using this acronym is that it psychologically will be recorded in the human brain and allow for repeated pronunciation.

Pemilihan huruf yang tegas, jelas, kokoh, namun sederhana dan dinamis didasari pada visi Perusahaan, yang melambangkan kepemimpinan dengan ketangguhan dan ketegasan. Jenis **bold** atau cetak tebal bertujuan untuk memperkuat makna simbolisasi nama Perusahaan dan konotasi yang relevan terhadap core bisnis Perusahaan.
The choice of letters that are firm, clear, sturdy, yet simple and dynamic is based on the Company's vision, which symbolizes leadership with toughness and firmness. Bold type lettering aims to strengthen the meaning of the company name and the connotations relevant to the core business of the Company.

Warna Biru Blue Color

Warna Biru melambangkan konsentrasi, ketenangan, bekerja sama, dapat menerima segala masukan, peka, cerdas dan bersatu, hal ini sejalan dengan bidang usaha Perusahaan yaitu pelayanan dan kemitraan.
Blue symbolizes concentration, calmness, cooperation, the ability to receive all input, sensitivity, smart, and unity; this is in line with the Company's business sector, namely service and partnership.

Warna Putih White Color

Putih merupakan lambang kesucian, kebersihan, dan ketepatan dari Perusahaan untuk mewujudkan visinya.
The color White is symbol of hilness, cleanliness, and accuracy of the Company to realize its vision.

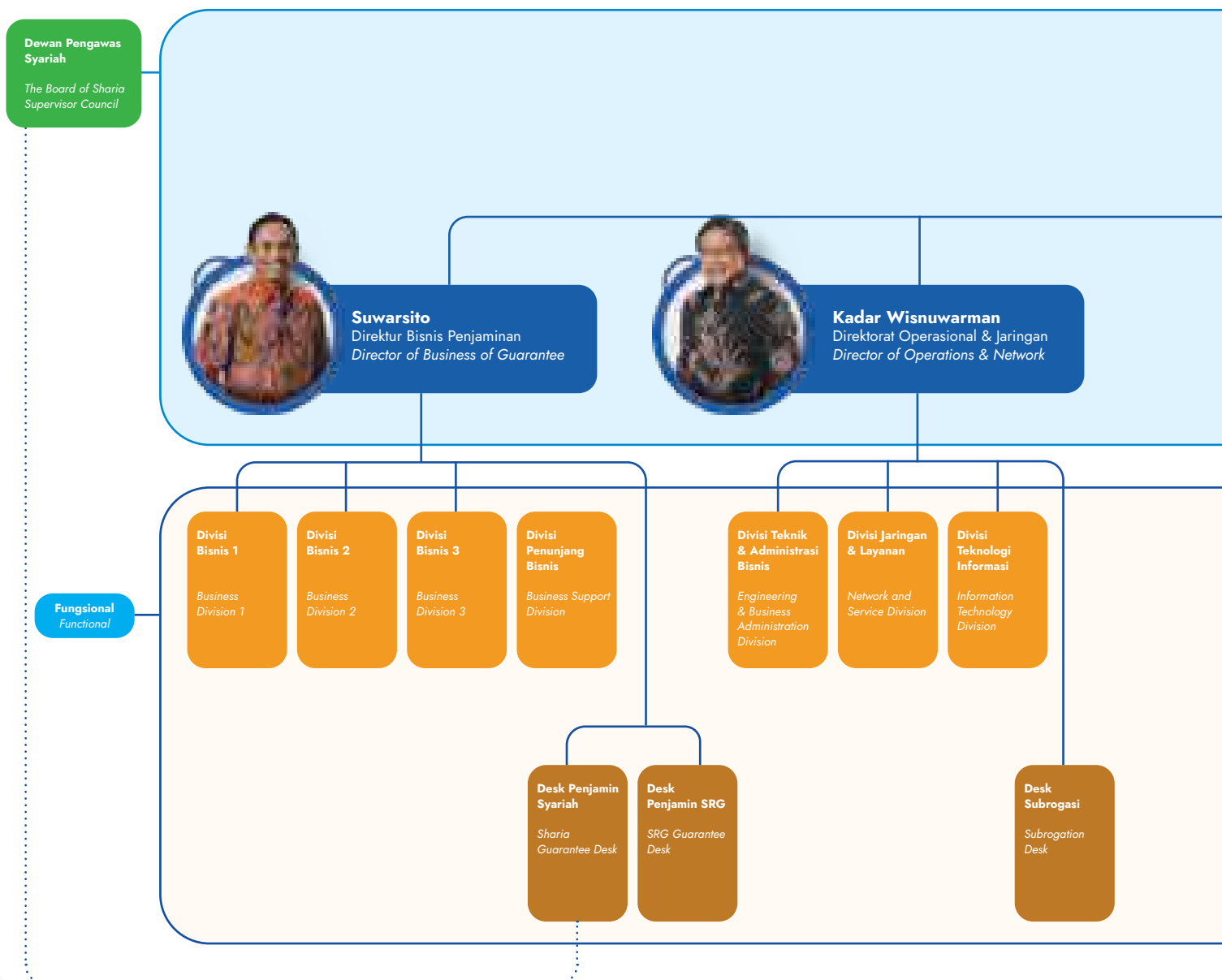
Komposisi kedua warna tersebut memberikan nuansa ketenangan dan kematangan jasa pelayanan yang terbentuk karena keteguhan memegang budaya Perusahaan
The composition of the colors provides a nuance of calm and maturity in the service that is formed because of the firmness in holding on to the Company's culture.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Setiap organisasi selalu menghadapi dinamika perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan tersebut diperlukan pengelolaan organisasi yang efektif. Struktur Organisasi PT Jamkrindo telah ditetapkan dalam Ketetapan Direksi No.01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Every organization always faces the dynamics of environmental change, both internally and externally. To deal with the dynamics of environmental change, effective organization management is required. The Organizational Structure of PT Jamkrindo has been stipulated in the Board of Directors Decree No.01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018.





Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director



Sulis Usdoko
Direktur MSDM,
Umum, & Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs
and Compliance



I. Rusdonobanu
Direktorat Keuangan,
Investasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment
and Risk Management

**Sekretaris
Perusahaan**
Corporate
Secretary

**Satuan
Pengawasan
Intern**
Internal Control
Unit

**Divisi
Perencanaan
Strategis**
Strategic Planning
Division

**Divisi
Manajemen
Sumber Daya
Manusia(MSDM)**
HRM Division

Divisi Umum
General Affairs
Division

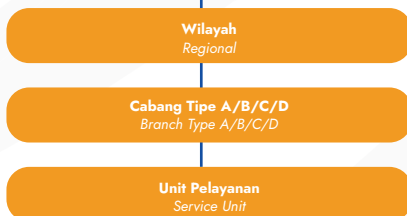
**Divisi
Hukum dan
Kepatuhan**
Legal and
Compliance
Division

**Divisi
Keuangan dan
Investasi**
Finance and
Investment
Division

**Divisi
Akuntansi**
Accounting
Division

**Divisi
Manajemen
Risiko (PUKM)**
Risk Management
(PUKM) Division

Divisi Klaim
Claim Division



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Profile



1 Sri Mulyanto
Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

2 Muhammad Muchlas Rowi
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si *)
Komisaris Independen
Independent Commissioner

4 Diah Natalisa **)
Komisaris
Commissioner

5 Noor Ida Khomsiyati *)**
Komisaris
Commissioner

6 Ari Wahyuni
Komisaris
Commissioner

7 Desty Arlaini **)**
Komisaris
Commissioner

*) Hernita Alius menjabat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 18 Januari 2021.

***) Diah Natalisa tidak lagi menjabat Komisaris terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021.

****) Noor Ida Khomsiyati berakhir masa jabatan sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 12 April 2021.

*****) Desty Arlaini menjabat sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021.

*) Hernita Alius served as Independent Commissioner on January 18, 2021.

***) Diah Natalisa has not served as Commissioner since February 21, 2020.

****) Noor Ida Khomsiyati's term as Commissioner ends on April 12, 2021.

*****) Desty Arlaini has served as Commissioner since June 2, 2021.



Sri Mulyanto

Komisaris Utama/Independen

President Commissioner/Independent

Periode Jabatan: 27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2022, Periode Pertama
Term of Office: October 27, 2017 – October 26, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Klaten
8 Oktober / October 8

1958

62 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993)
(S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Education

Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States (1993)
Bachelor of Economics of Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Ketua Dewan Pengawas/Independen diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Sri Mulyanto diubah dari Ketua Dewan Pengawas/Independen menjadi Komisaris Utama/Independen.

Appointment History

The position of Chairman of the Supervisory Board/Independent has been carried out since October 27, 2017, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017, concerning Dismissal and Appointment of Chairman of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Chairman of the Supervisory Board/President Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Sri Mulyanto's position was changed from Chairman of the Supervisory Board/Independent to President Commissioner/Independent.

Riwayat Profesi

Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementerian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian BUMN (2002).

Professional History

Director of General Affairs and HR of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy for Services Business III, the Ministry of SOEs (2010), Assistant Deputy for Insurance Business Affairs, the Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Services Business Affairs, the Ministry of SOEs (2002).

Rangkap Jabatan

Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Sri Mulyanto does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Sri Mulyanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Sri Mulyanto does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders. serta dengan pemegang saham utama.



Muhammad Muchlas Rowi

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan: 17 Oktober 2019 – 16 Oktober 2024, Periode Pertama
Term of Office: October 17, 2019 – October 16, 2024, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Garut
31 Agustus / August 31

1972

48 Tahun
Years Old

Pendidikan

- (S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998)
- (S2) Magister Manajemen di STIE IBMT Surabaya (2019)

Education

- Bachelor of Philosophy of Gadjah Mada University (1998)
- Master of Management of STIE IBMT Surabaya (2019)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen diemban sejak 17 Oktober 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen/Komisaris Independen ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Muchlas Rowi diubah dari Anggota Dewan Pengawas Independen menjadi Komisaris Independen.

Appointment History

The position of Member of the Independent Supervisory Board has been carried out since October 17, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as the Independent Supervisory Board/Independent Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Muchlas Rowi's position was changed from Member of the Independent Supervisory Board/Independent to Independent Commissioner.

Riwayat Profesi

Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Institut Bisnis Muhammadiyah (2019 - sekarang), Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018 - sekarang), General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016 - 2018), Pimpinan Umum Monday Media Group (2015 - sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014 - sekarang).

Professional History

Treasurer of Daily Development Board of Muhammadiyah Business Institute (2019 - present), Rosbuck Milk & Coffee's owner (2018 - present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016 - 2018), Managing Director of Monday Media Group (2015 - present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014 - present).

Rangkap Jabatan

Pimpinan Umum Monday Media Group (2015 - sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014 - sekarang).

Concurrent Position

Managing Director of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014 - present).

Hubungan Afiliasi

Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Muhammad Muchlas Rowi does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan: 18 Januari 2021 – 17 Januari 2026, Periode Pertama

Term of Office: January 18, 2021 – January 17, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta
13 Oktober / October 13

1959

63 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006)

(S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004)

(S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1986)

(DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akutansi Negara (1981)

Education

Master of Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006)

Master of Management, Bhayangkara University (2004)

Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Krisnadwipayana University (1986)

Diploma III from The State Accounting College (1981)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Komisaris Independen diemban sejak 18 Januari 2021 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Jamkrindo, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No.SK-19/MBU/01/2021 dan No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama, sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan.

Appointment History

The position of the Independent Commissioner has been carried out since January 18, 2021, through the resolution of shareholders of PT Jamkrindo, the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the capital owner of PT Jamkrindo No.SK-19/MBU/01/2021 and No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is his first period as the Independent Commissioner, previously he had never served in the Supervisory Board /Board of Commissioners of the Company.

Riwayat Profesi

Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000 - 2006), Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006 - 2009), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009 - 2012), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012 - 2016), Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016 - 2017), dan Direktur PT Indobagus Investama (2018).

Professional History

Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Tax Inspection and Investigation Office (2000 - 2006), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Medium Tax Office (2006 - 2009), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Tax Office, Cilandak (2009 - 2012), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Tax Office, Pasar Minggu (2012 - 2016), Head of Jakarta Tax Office, Cilandak (2016-2017), and Director of PT Indobagus Investama (2018).

Rangkap Jabatan

Hernita Alius tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Hernita Alius does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Hernita Alius tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

Affiliate Relationships

Hernita Alius does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Diah Natalisa

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 3 Mei 2017 – 2 Mei 2021, Periode Pertama
Term of Office: May 3, 2017 – May 2, 2021, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Palembang
15 November / November 15

1963

57 Tahun
Years Old

Pendidikan

Profesor dan (S3) Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (1999)
(S2) Magister Manajemen, University of Kentucky (1992)
(S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya (1987).

Education

Professor and Doctor of Economics from Airlangga University (1999)
Master of Management from University of Kentucky (1992)
Bachelor of Economics majoring in Management from Sriwijaya University (1987).

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Mei 2015 melalui Keputusan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Diah Natalisa diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-19/MBU/01/2021 dan Keputusan Direktur Utama PT BPUI (Persero) No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris karena masa jabatannya yang habis di tahun 2021.

Appointment History

Served as a Member of the Supervisory Board since May 3, 2015 through the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as Member of the Supervisory Board/Board of Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-19/MBU/01/2021 and the President Director of PT BPUI (Persero) Decree No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 dated January 18, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa no longer serves as Board of Commissioners due to her expired term in 2021.

Riwayat Profesi

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016 - sekarang), Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI (2008 - 2016), Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (2005 - 2008).

Professional History

Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016 - present), Coordinator of KOPERTIS Region II of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia (2008 - 2016), Chairman of the Master of Management Study Program of Sriwijaya University (2005 - 2008).

Rangkap Jabatan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016 - sekarang)

Concurrent Position

Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016 - present)

Hubungan Afiliasi

Diah Natalisa tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Diah Natalisa memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian PANRB.

Affiliate Relationships

Diah Natalisa does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Diah Natalisa has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of PANRB.



Noor Ida Khomsiyati

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 12 April 2016 – 11 April 2021, Periode Pertama

Term of Office: April 12, 2016 – April 11, 2021, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domisile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pati
8 Mei / May 8

1971

49 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006)

(S1) Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995)

Education

Master of HR Management of Bhayangkara University, (2006)

Bachelor of Law of Diponegoro University, Semarang (1995)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Noor Ida Khomsiyati diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.

Appointment History

The position of Member of the Supervisory Board has been carried out since April 12, 2016, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-76/MBU/4/2016 dated April 12, 2016, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board/Board of Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Noor Ida Khomsiyati's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.

Riwayat Profesi

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014 - sekarang), Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012 - 2014), Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2013 - 2015), Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010 - 2012), Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN (2006 - 2010).

Professional History

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014 - present), Head Division of Service and Legal Assistance 1 of the Ministry of SOEs (2012 - 2014), Member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) (2013 - 2015); Subdivision Head of Services and Legal Assistance II C of the Ministry of SOEs (2010 - 2012), Subdivision Head of Legal Services of the Ministry of SOEs (2006 - 2010).

Rangkap Jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014 - sekarang)

Concurrent Position

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014 - present)

Hubungan Afiliasi

Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Noor Ida Khomsiyati memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.

Affiliate Relationships

Noor Ida Khomsiyati does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Noor Ida Khomsiyati has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.



Ari Wahyuni

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 3 Januari 2019 – 2 Januari 2024, Periode Pertama

Term of Office: January 3, 2019 – January 2, 2024, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, West Java, Indonesia

Surabaya

9 November / November 9

1966

54 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master of Public Management Carnigie - Mellon University (1994)

(S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponegoro (1990)

Education

Master of Public Management Carnigie- Mellon University (1994)

Bachelor of Law (civil affairs) Diponogoro University (1990)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Komisaris diemban sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Ari Wahyuni diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.

Appointment History

The position of Member of the Board of Commissioners has been carried out since January 3, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Ari Wahyuni's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.

Riwayat Profesi

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 - sekarang), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013 - September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013 - 2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009 - 2013), Dewan Komisaris PT PANN (2010 - 2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008 - 2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2004 - 2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundangan-Undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM (1990 - 2000).

Professional History

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present), Director of Investment Management System of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013 - September 2018), PERURI Supervisory Board (2013 - 2018), Secretary of the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009 - 2013), Board of Commissioners Member of PT PANN (2010 - 2013), Head of BPPK General Finance Education and Training Center (2008 - 2009), Division Head of Investment Policy Supervision, Investment Management and Research Bureau of BAPEPAM (2004 - 2006), Division Head of Legislation, Legislation, and Legal Assistance Bureau of BAPPEPAM (1990 - 2000).

Rangkap Jabatan

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 - sekarang)

Concurrent Position

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present)

Hubungan Afiliasi

Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Ari Wahyuni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian Keuangan.

Affiliate Relationships

Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Ari Wahyuni has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of Finance.



Desty Arlaini

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 2 Juni 2021 – 1 Juni 2026, Periode Pertama

Term of Office: June 2, 2021 – June 1, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Palembang

4 Desember / December 4

1976

44 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2006)

(S1) Sarjana jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2000)

(D3) Ahli Madya jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997)

Education

Master of Management Science, University of Indonesia (2006)

Bachelor of Economics majoring in Accounting, YAI College (2000)

Associate of Accounting, State College of Accounting (1997)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Komisaris diemban sejak 2 Juni 2021 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Pemilik Modal No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia ini merupakan periode pertama.

Appointment History

The position as Commissioner has been carried out since June 2, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-182/MBU/06/2021 and President Director Decree of PT BPUI (Persero) No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 dated June 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment of PT Jaminan Kredit Indonesia Board of Commissioners Member This position is his first period as Commissioner.

Riwayat Profesi

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021 - sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021 - sekarang), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020 - 2021), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020), Koordinator Kementerian BUMN (2020 - 2021), Pengendali Kelompok Kementerian BUMN (2020), Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (2020 - 2021), Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (2018 - 2020), Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (2018 - 2019), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Ia Kementerian BUMN (2017 - 2020), Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013 - 2018), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011 - 2014), Anggota Komite PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009 - 2011).

Professional History

Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021 - present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021 - present), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2020 - 2021), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2022), Coordinator of the Ministry of SOEs (2020 - 2021), Controlling Group of The Ministry of SOEs (2020), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara VI (2020 - 2021), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (2018 - 2020), Assistant Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2018 - 2019), Head of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2017-2020), Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013 - 2018), Secretary of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011 - 2014), Committee Member of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009 - 2011).

Rangkap Jabatan

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021 - sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021 - sekarang)

Concurrent Position

Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021 - present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021 - present)

Hubungan Afiliasi

Desty Arlaini tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Desty Arlaini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama seri A melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.

Affiliate Relationships

Desty Arlaini does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors Desty Arlaini has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Profile Of Sharia Supervisory Board



Prof. Dr. Hasanudin, AF, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 – sekarang, Periode Ketiga

Term of Office: July 1, 2016 – present, 3rd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Majalengka
18 Juli / July 18

1945

75 Tahun
Years Old

Pendidikan

- (S3) Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994)
- (S2) Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989)
- (S1) Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974)

Education

- Doctor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994)
- Master of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989)
- Bachelor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 19 Oktober 2006 untuk periode hingga 50 Juni 2013, diangkat lagi untuk periode 1 Juli 2013 - 30 Juni 2016, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Appointment History

The position of Chairman of the Sharia Supervisory Board has been carried out since October 19, 2006 for the period of June 5, 2013, re-appointed again for the period of July 1, 2013 to June 30, 2016, and re-appointed again in 2016 through the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Riwayat Profesi

Anggota BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) (2004 – 2007), Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta (2002 – 2006), Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI DKI Jakarta.

Professional History

Member of BPKN (National Consumer Protection Agency) (2004 - 2007), Dean of the Faculty of Sharia UIN Jakarta (2002 - 2006), Lecturer in Ulema Cadre Education (PKU) of Indonesia Council of Ulema (MUI) DKI Jakarta.

Rangkap Jabatan

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asei Syariah, Anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syariah Kementerian Kesehatan RI, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000 - sekarang), Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat (2010 - sekarang).

Concurrent Position

Chairman of the Victoria Syariah Bank Supervisory Board (1998 - present), Chair of the Asuransi Asei Syariah's Supervisory Board, Member of the Health and Sharia Advisory Council of the Indonesian Ministry of Health, Member of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulema (2000 - present), Chairperson of the Central Commission of Indonesian Council of Ulema's Fatwa (2010 - present).

Hubungan Afiliasi

Hasanudin tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Komisaris, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Hasanudin does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Member of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 - sekarang, Periode Ketiga

Term of Office: July 1, 2016 - present, 3rd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Poso
12 Februari / February 12

1964

56 Tahun
Years Old

Pendidikan

Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung (1989)

Education

Bachelor of Agriculture from Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 19 Oktober 2006 untuk periode hingga 5 Juni 2013, diangkat lagi untuk periode 1 Juli 2013 - 30 Juni 2016, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Appointment History

The position of Member of the Sharia Supervisory Board has been carried out since October 19, 2006 for the period of June 5, 2013, re-appointed again for the period of July 1, 2013 to June 30, 2016, and re-appointed again in 2016 through the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Riwayat Profesi

Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008 - 2012), Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (2008 - 2014), Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (2008 - 2015), Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara-Unit Syariah (2010 - 2017), Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2015 - 2017), Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2005 - 2016).

Professional History

Member of the Bank Indonesia Sharia Banking Committee (2008 - 2012), Indonesian Waqf Agency Deputy Public Relations (2008 - 2014), Expert Staff of ICDIF-LPPI Directors (2008 - 2015), Sharia Supervisory Board of the Bank Tabungan Negara - Sharia Unit (2010 - 2017), Member of the Financial Services Authority Sharia Financial Services Development Committee (2015 - 2017), PT Central Asia Raya Sharia Supervisory Board (2005 - 2016).

Rangkap Jabatan

Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Panin Daichi Life (2015 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Reasuransi Nasional Indonesia (2013 - sekarang).

Concurrent Position

Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - Now), Chairman of the Panin Daichi Life Sharia Supervisory Board (2015 - Now), Chairman of PT Reasuransi Nasional Indonesia Sharia Supervisory Board (2013 - Now).

Hubungan Afiliasi

Muhammad Syakir Sula tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Komisaris, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Muhammad Syakir Sula does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.

PROFIL DIREKSI

Board Of Directors Profile



1 **Putrama Wahyu Setyawan**
Direktur Utama
President Director

2 **Suwarsito**
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee

3 **Kadar Wisnuwarman**
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

4 **Sulis Usdoko**
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

5 **I. Rusdonobanu**
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management



Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan: 26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2025, Periode Pertama

Term of Office: October 26, 2020 – October 25, 2025, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Yogyakarta

28 November / November 28

1969

51 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1994)

(S2) Akuntansi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1996)

Education

Bachelor of Forestry from Gadjah Mada University (1994)

Master of Management Accounting from Gadjah Mada University (1996)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur Utama diemban sejak 26 Oktober 2020 melalui Keputusan Menteri Negara Bumn selaku Pemegang Saham Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 dan 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.

Appointment History

The position of President Director has been carried out since October 26, 2020 through the Decree of the Minister of SOEs as the shareownership of Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 and No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2021, concerning Dismissal and Appointment of President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.

Riwayat Profesi

Wakil Direktur BNI pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Maret 2016. Sebelumnya Menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2011 - 2014), Kepala Badan Usaha Milik Negara & Pemerintah Divisi Institusi (2014 - 2015), Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2015 - 2016), dan Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Professional History

Vice Director of BNI at the General Meeting of Shareholders (GMS) on March 10, 2016. Previously Served as Head of Corporate Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2011 - 2014), Head of State-Owned Enterprises & Government, Institutional Division (2014 - 2015), Head of Commercial Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2015 - 2016), and Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Rangkap Jabatan

Putrama Wahyu Setyawan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Putrama Wahyu Setyawan does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Putrama Wahyu Setyawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Putrama Wahyu Setyawan does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Suwarsito

Direktur Bisnis Penjaminan

Director of Business of Guarantee

Periode Jabatan: 22 Maret 2021 – 21 Maret 2026, Periode Pertama

Term of Office: March 22, 2021 – March 21, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Sragen
28 Februari / February 28

1972

48 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ekonomi (1996)

(S2) Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar (2007)

Education

Bachelor of Economics from Diponegoro University, Semarang (1996)

Master of Management from Hasanuddin University, Makassar (2007)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 22 Maret 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No.SK-94/MBU/03/2021 dan No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia, dan dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Senin, 22 Maret 2021.

Appointment History

The position of Director has been carried out since March 22, 2021 through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-94/MBU/03/2021 and No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 concerning Dismissal and Appointment of Member of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia and was reading at the General Meeting of Shareholders on Monday, March 22, 2021.

Riwayat Profesi

Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 1977. Beberapa jabatan yang pernah diemban adalah Kepala Divisi Bisnis PT Jamkrindo (2018-2021), Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-Agustus 2016), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Jakarta (2013-2016), Kepala Divisi Umum PT Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Bandung (Januari 2012-Desember 2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Pekanbaru (2011-2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin (2010-2011).

Professional History

He has had a career in Jamkrindo since 1977 with several positions that have been held including Head of Business Division of PT Jamkrindo (2018-2021), Head of Bank Guarantee Business Division (2016-2018), Head of Regional Office III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-August 2016), Head of Jakarta Branch Office of PT Jamkrindo (2013-2016), Head of General Division of PT Jamkrindo (2012-2013), Head of Bandung Branch Office of PT Jamkrindo (January 2012-December 2012), Head of Pekanbaru Branch Office of PT Jamkrindo (2011-2012), Head of Banjarmasin Branch Office of PT Jamkrindo (2010-2011).

Rangkap Jabatan

Suwarsito tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

Concurrent Position

Suwarsito does not have a concurrent position at other companies/ institutions.

Hubungan Afiliasi

Suwarsito tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Suwarsito does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan

Director of Operations and Network

Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama

Term of Office: November 21, 2017 – November 20, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Cibubur, Jawa Barat, Indonesia

Cibubur, West Jawa, Indonesia

Malang
31 Oktober / October 31

1971

49 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002)

(S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996)

Education

Master of Management, Hasanuddin University (2002)

Bachelor of Management, Universitas Airlangga (1996)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Appointment History

The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director.

Riwayat Profesi

Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013 - 2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012 - 2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011 - 2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010 - 2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006 - 2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004 - 2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003 - 2004).

Professional History

Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013 - 2014), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claims and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012 - 2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011 - 2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010 - 2011), Section Head of Guarantee of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006 - 2010), Section Head of Operations of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004 - 2006), Section Head of Operations of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Section Head of Operations of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003 - 2004).

Rangkap Jabatan

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Kadar Wisnuwarman does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Kadar Wisnuwarman does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan

Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama

Term of Office: September 7, 2017 – September 6, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

Bekasi, West Java, Indonesia

Semarang
5 September / September 5

1960

60 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003)

(S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985)

Education

Master of Management Economics, Universitas Brawijaya (2003)

Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Appointment History

The position of Director has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served in the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

Riwayat Profesi

Direktur Bidang Collection Management, Asset Management, Legal dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015 - 2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011 - 2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008 - 2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1, dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997 - 2010), Staf hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986 - 1995).

Professional History

Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Credit Documents, Bank BTN (2015 - 2017), Head of Third Party Funds Retail and Services Division, BTN Bank (2011 - 2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008 - 2011), Head of Branch Office Class 1, and Head of Main Branch Offices, BTN Bank (1997 - 2010), Staff to Head of Section, Bank BTN (1986 - 1995).

Rangkap Jabatan

Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

Concurrent Position

Sulis Usdoko does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Sulis Usdoko tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Sulis Usdoko does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Director of Finance, Investment and Risk Management

Periode Jabatan: 15 Januari 2018 – 14 Januari 2023, Periode Kedua

Term of Office: January 15, 2018 – January 14, 2023, 2nd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia

East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Balikpapan
25 Februari / February 25

1959

61 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master Of Science Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995)

(S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988)

(D3) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981)

Education

Master of Science, Majoring in Economics, Northeastern University Boston, USA (1995)

Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, University of Pancasila (1988)

Diploma of Accounting of STAN Jakarta (1981)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, untuk periode kedua.

Appointment History

The position of Director has been carried out since January 15, 2013 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 concerning Dismissal, Change of Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors perum Jamkrindo, j.o Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 concerning Changes in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Indonesian Public Corporation (Perum) Credit Guarantee. This position is his first period as Director. Then reappointed based on the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, for the second period.

Riwayat Profesi

Plt. Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017 - 21 November 2017), Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010 - sekarang). Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008 - 2011), Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007 - 2011), Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 - 2009), Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006 - 2010), Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006), Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002 - 2006).

Professional History

Act. President Director of Perum Jamkrindo (September 7, 2017 - November 21, 2017), Assistant Deputy for Services Business II, the Ministry of SOEs (2010 - present) Member of the Board of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008 - 2011), Member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007 - 2011), Member of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 - 2009), Assistant Deputy of Plantation Business II, the Ministry of SOEs (2006 - 2010), Head of Plantation Business Division IIA, the Ministry of SOEs (2006), Acting Head of Agriculture Production Facility Business Division of the Ministry of SOEs (2002 - 2006).

Rangkap Jabatan

I. Rusdonobanu tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

I. Rusdonobanu does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

I. Rusdonobanu tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

I. Rusdonobanu does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

Profile Of Executive Officers



Abdul Bari

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat Sejak 3 Februari 2017
Served since February 3, 2017

45
Tahun
Years Old

Subang
29 Agustus / August 29
1975

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Sekretaris Perusahaan (3 Februari 2017 – Sekarang)
Plt. Sekretaris Perusahaan (1 Agustus 2016 – 2 Februari 2017)
Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (22 April 2016 – 31 Juli 2016)
Corporate Secretary (February 3, 2017 – Present)
Act. Corporate Secretary (August 1, 2016 – February 2, 2017)
Main Structure of Directorate of Operations and Network (April 22, 2016 – July 31, 2016)

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S3 Manajemen SDM, Universitas Negeri Jakarta tahun 2014
Doctorate of Hr Management, State University of Jakarta in 2014

42
Tahun
Years Old

Sawit Seberang
22 September / September 22
1978

Andry Septianto

Kepala Satuan Pengawas Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat Sejak 1 Desember 2020
Served since December 1, 2020



Domisili/Domicile

Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Medan, North Sumatera, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

M.M, Manajemen, Universitas Gadjah Mada, 2004
Master of Management, Gadjah Mada University, 2004

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Pj. Kepala Satuan Pengawasan Intern (1 Desember 2020 – Sekarang)
Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern (5 Oktober 2020 – 30 November 2020)
Pemimpin Cabang Bandung (31 Agustus 2018 – 4 Oktober 2020)
Kepala Kantor Cabang Kupang (3 Februari 2017 – 30 Agustus 2018)
Act. Head of Internal Audit Unit (December 1, 2020 – Present)
Deputy Head of Internal Audit Unit (October 5, 2020 – November 30, 2020)
Head of Bandung Branch Office (August 31, 2018 – 4 October 2020)
Head of Kupang Branch Office (February 3, 2017 – August 30, 2018)

Alia Nur Fitri

Kepala Divisi Perencanaan Strategis
Head of Strategic Planning Division

Menjabat Sejak 19 September 2017
Served since September 19, 2017

49
Tahun
Years Old

Malang
29 November / November 29
1971



Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Perencanaan Strategis (31 Agustus 2018 – Sekarang)
Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan (19 September 2017 – 30 Agustus 2018)
Kepala Divisi Manajemen Risiko (3 Februari 2017 – 18 September 2017)
Plh. Kepala Divisi Manajemen Risiko (30 Agustus 2016 – 2 Februari 2017)
Head of Strategic Planning Division (August 31, 2018 – Present)
Head of Planning and Development Division (September 19, 2017 – August 30, 2018)
Head of Risk Management Division (February 3, 2017 – September 18, 2017)
Act. Head of Risk Management Division (August 30, 2016 – February 2, 2017)

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S2 Manajemen Universitas Gadjah Mada, 1997
Master of Management, Gadjah Mada University, 1997

46
Tahun
Years Old

Banjarnegara
5 Oktober / October 5
1974

Wakhyu Hidayattulloh

Kepala Divisi Bisnis 1
Head of Business Division 1

Menjabat Sejak 22 Maret 2021
Served since March 22, 2021



Domisili/Domicile

Ciamis, Jawa Barat, Indonesia
Ciamis, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, Manajemen Bisnis STIE Dewantara, 2011
Bachelor of Business Management of STIE Dewantara, 2011

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Bisnis 1 (22 Maret 2021 – sekarang)
Pemimpin Wilayah V Semarang (31 Agustus 2018 – 21 Maret 2021)
Kepala Kantor Wilayah II Palembang (1 Agustus 2016 – 30 Agustus 2018)
Head of Business Division 1 (March 22, 2021 – Present)
Head of Regional V Semarang (August 31, 2018 – March 21, 2021)
Head of Regional Office II, Palembang (August 1, 2016 – August 30, 2018)



M. Kisworo

Kepala Divisi Bisnis 2 & Plh Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang

Head of Business Division 2 & Plh Warehouse Receipt System Guarantee Desk

Menjabat Sejak 22 Maret 2021
Served since March 22, 2021

46
Tahun
Years Old

Pekalongan

24 Februari / Februari 24

1974

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Bisnis 2 (22 Maret 2021 - sekarang)

Kepala Divisi Bisnis 3 (31 Agustus 2018 - 21 Maret 2021)

Kepala Divisi Bisnis Suretyship dan Penjaminan Non Bank (19 September 2017 - 30 Agustus 2018)

Pranata Madya Direktorat SDM dan Umum (13 Oktober 2014 - 7 Maret 2017)

Head of Business Division 2 (March 22, 2021 - Present)

Head of Business Division 3 (August 31, 2018 - March 21, 2021)

Head of Suretyship and Non-Bank Guarantee Business Division (September 19, 2017 - August 30, 2018)

Pranata Madya Direktorat SDM dan Umum (October 13, 2014 - March 7, 2017)

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, M.M, Manajemen, Universitas Sumatera Utara, 2010

S.E, M.M, Management, University of North Sumatra, 2010

38
Tahun
Years Old

Medan

30 Oktober / October 30

1982

Abdillah Putera

Pj. Kepala Divisi Bisnis 3

Act. Head of Business Division 3

Menjabat Sejak 22 Maret 2021

Served since March 22, 2021



Domisili/Domicile

Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Medan, North Sumatra, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, Ekonomi Pembangunan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2005

Bachelor of Development Economics, Muhammadiyah University of North Sumatra, 2005

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Pj. Kepala Divisi Bisnis 3 (22 Maret 2021 - Sekarang)

Pemimpin Cabang Medan (31 Agustus 2018 - 21 Maret 2021)

Kepala Kantor Cabang Medan (3 Februari 2017 - 30 Agustus 2018)

Act. Head of Business Division 3 (March 22, 2021 - Present)

Head of Medan Branch Office (August 31, 2018 - March 21, 2021)

Head of Medan Branch Office (February 3, 2017 - August 30, 2018)

Etyk Turniyatun

Pj. Kepala Divisi Penunjang Bisnis

Act. Head of Business Support Division

Menjabat Sejak 22 Maret 2021

Served since March 22, 2021

50
Tahun
Years Old

Solo

24 April / April 24

1970



Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Pj. Kepala Divisi Penunjang Bisnis (22 Maret 2021 - sekarang)

Pemimpin Cabang Makassar (2 Mei 2020 - 21 Maret 2021)

Plt. Pemimpin Cabang Makassar (2 Mei 2019 - 1 Mei 2020)

Pemimpin Cabang Gorontalo (31 Agustus 2018 - 1 Mei 2019)

Act. Head of Business Support Division (March 22, 2021 - Present)

Head of Makassar Branch Office (May 2, 2020 - March 21, 2021)

Act. Head of Makassar Branch Office (May 2, 2019 - May 1, 2020)

Head of Gorontalo Branch Office (August 31, 2018 - May 1, 2019)

Domisili/Domicile

Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

Makassar, South Sulawesi, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.H, Hukum, Universitas Slamet Riyadi, 1992

Bachelor of Law, Slamet Riyadi University, 1992

46
Tahun
Years Old

Bandung

11 Mei / May 11

1974

Yanti Rachmawati

Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah

Head of Sharia Assurance Business Desk

Menjabat Sejak 31 Agustus 2018

Served since August 31, 2018



Domisili/Domicile

Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bandung, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

M.M, Manajemen, Universitas Padjadjaran, 2012

Master of Management, Padjadjaran University, 2012

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Desk Bisnis Penjaminan Syariah (31 Agustus 2018 - Sekarang)

Kepala Kantor Wilayah IV Bandung (22 April 2016 - 30 Agustus 2018)

Kepala Kantor Cabang Bandung (11 Februari 2015 - 21 April 2016)

Head of Sharia Assurance Business Desk (August 31, 2018 - Present)

Head of Regional Office IV, Bandung (April 22, 2016 - August 30, 2018)

Head of Bandung Branch Office (February 11, 2015 - April 21, 2016)



Henry Nur Irianto

Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang
Head of Warehouse Receipt System Assurance Desk

Menjabat Sejak 2 Mei 2019 - 31 Januari 2021
Served since May 2, 2019 - January 31, 2021

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang (2 Mei 2019 – sekarang)
Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (8 Maret 2017 – 1 Mei 2019)
Kepala Divisi Klaim & Subrogasi (10 Desember 2015 – 7 Maret 2017)
Head of Warehouse Receipt System Assurance Desk (May 2, 2019 – Present)
Head of Network and Services Division (March 8, 2017 – May 1, 2019)
Head of Claims & Subrogation Division (December 10, 2015 – March 7, 2017)

54
Tahun
Years Old

Magelang
9 Januari / January 9
1966

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

M.M, Manajemen Keuangan, STM Labora, 1999
Master of Financial Management, STM Labora, 1999

47
Tahun
Years Old

Jombang
17 Maret / March 17
1973

Mahfudh Sudyono

Kepala Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis
Head of Engineering and Business Administration Division

Menjabat Sejak 10 Desember 2015
Served since December 10, 2015

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Teknik & Administrasi Bisnis (31 Agustus 2018 – Sekarang)
Kepala Divisi Teknik & Administrasi Penjaminan (10 Desember 2015 – 30 Agustus 2018)
Head of Engineering & Business Administration Division (August 31, 2018 – present)
Head of Engineering & Administration of Guarantee Division (December 10, 2015 – August 30, 2018)

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia
Bogor, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, Manajemen, Universitas Brawijaya, 1998
Bachelor of Management, Brawijaya University, 1998



Lusy Susanti

Kepala Divisi Jaringan dan Layanan
Head of Network and Services Division

Menjabat Sejak 22 Maret 2021
Served since March 22, 2021

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (22 Maret 2021 – sekarang)
Kepala Divisi Umum (2 Mei 2019 – 21 Maret 2021)
Kepala Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang (31 Agustus 2018 – 1 Mei 2019)
Head of Network and Services Division (March 22, 2021 – Present)
Head of General Division (May 2, 2019 – March 21, 2021)
Head of Warehouse Receipt System Guarantee Desk (August 31, 2018 – May 1, 2019)

43
Tahun
Years Old

Batusangkar
8 Januari / January 8
1977

Domisili/Domicile

Pekanbaru, Riau, Indonesia
Pekanbaru, Riau, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, Akuntansi, Universitas Andalas, 1999
Bachelor of Accounting, Andalas University, 1999

43
Tahun
Years Old

Jakarta
2 Februari / February 2
1977

Hadi Ariwibowo

Kepala Divisi Teknologi Informasi
Head of Information Technology Division

Menjabat Sejak 10 Desember 2015
Served since December 10, 2015

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Teknologi Informasi (10 Desember 2015 – Sekarang)
Pranata Utama TI (10 Maret 2014 – 9 Desember 2015)
Head of Information Technology Division (December 10, 2015 – Present)
IT Main Officer (March 10, 2014 – December 9, 2015)

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.T, Teknik Sipil, Universitas Indonesia, 2002
Bachelor of Civil Engineering, University of Indonesia, 2002





48
Tahun
Years Old

Ponorogo
10 Januari / January 10
1972

Domisili/Domicile
Bandung, Jawa Barat, Indonesia
Bandung, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

M.M, Manajemen Keuangan, Universitas Andalas, 2002
Master of Financial Management, Andalas University, 2002

Achmad Muhlison

Kepala Desk Subrogasi
Head of Subrogation Desk

Menjabat Sejak 31 Agustus 2018
Served since August 31, 2018



Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Desk Subrogasi (31 Agustus 2018 – Sekarang)
Kepala Kantor Wilayah VIII Banjarmasin (8 Maret 2017 – 30 Agustus 2018)
Kepala Divisi Jaringan dan Layanan (3 Februari 2017 – 7 Maret 2017)
Kepala Kantor Wilayah VII Denpasar (22 April 2016 – 2 Februari 2017)
Head of Subrogation Desk (August 31, 2018 – Present)
Head of Regional Office VIII, Banjarmasin (March 8, 2017 – August 30, 2018)
Head of Network and Services Division (February 3, 2017 – March 7, 2017)
Head of Regional Office VII, Denpasar (April 22, 2016 – February 2, 2017)

Siti Maesaroh

Pj. Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia
Act. Head of Human Resources Management Division
Menjabat Sejak 22 Maret 2021
Served since March 22, 2021



49
Tahun
Years Old

Magelang
26 Mei / May 26
1971

Domisili/Domicile
Depok, Jawa Barat, Indonesia
Depok, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

M.M, Magister Manajemen,
Universitas Negeri Jakarta, 2019
Master of Management,
State University of Jakarta, 2019

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Pj. Kepala Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (22 Maret 2021 – sekarang)
Kepala Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM Divisi MSDM (1 Oktober 2018 – 21 Maret 2021)
Kepala Bagian Operasional dan Pengelolaan SDM Divisi MSDM (13 Maret 2017 – 30 September 2018)
Act. Head of Human Resources Management Division (March 22, 2021 – Present)
Division Head of HR Policy and Development in MSDM Division (October 1, 2018 – March 21, 2021)
Division Head of Operations and Human Resources Management in MSDM Division (March 13, 2017 – September 30, 2018)

46
Tahun
Years Old

Pati
10 Maret / March 10
1974

Domisili/Domicile
Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Semarang, Central Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, Akuntansi, Universitas Diponegoro tahun 2002
Bachelor of Accounting, Diponegoro University in 2002

Sugiyono

Kepala Divisi Umum
Head of General Division

Menjabat Sejak 22 Maret 2021
Served since March 22, 2021



Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Umum (22 Maret 2021 – sekarang)
Pemimpin Wilayah VII Denpasar (1 Januari 2020 – 21 Maret 2021)
Plt. Pemimpin Wilayah VII Denpasar (31 Agustus 2018 – 31 Desember 2019)
Kepala Kantor Cabang Denpasar (22 April 2016 – 30 Agustus 2018)
Head of General Division (March 22, 2021 – Present)
Head of Regional Office VII, Denpasar (January 1, 2020 – March 21, 2021)
Act. Head of Regional Office VII, Denpasar (August 31, 2018 – December 31, 2019)
Head of Denpasar Branch Office (April 22, 2016 – August 30, 2018)

M. Natsir Rahmadi

Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
Head of Legal and Compliance Division

Menjabat Sejak 1 Agustus 2016
Served since August 1, 2016

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan (1 Agustus 2016 – Sekarang)
Sekretaris Perusahaan (10 Desember 2015 – 31 Juli 2016)
Head of Legal and Compliance Division (August 1, 2016 – Present)
Corporate Secretary (December 10, 2015 – July 31, 2016)

48
Tahun
Years Old

Pasuruan
25 Mei / May 25
1972

Domisili/Domicile
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.H, Hukum, Universitas Brawijaya, 1999
Bachelor of Law, Brawijaya University, 1999



54
Tahun
Years Old

Probolinggo
6 Juni / June 6
1966

Aribowo

Kepala Divisi Keuangan dan Investasi
Head of Finance and Investment Division

Menjabat Sejak 1 Agustus 2016
Served since August 1, 2016



Domisili/Domicile

Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia
Sidoarjo, East Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

Drs. AK. M.M, Manajemen, Universitas Andalas, 2002
Drs. AK. M.M, Management, Andalas University, 2002

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Keuangan dan Investasi (1 Agustus 2016 – Sekarang)
Kepala Kantor Wilayah II Palembang (22 April 2016 – 31 Juli 2016)
Kepala Kantor Wilayah I Jakarta (10 Desember 2015 – 21 April 2016)
Head of Finance and Investment Division (August 1, 2016 – present)
Head of Regional Office II, Palembang (April 22, 2016 – July 31, 2016)
Head of Regional Office I, Jakarta (December 10, 2015 – April 21, 2016)

Diana Mayawati

Kepala Divisi Akuntansi
Head of Accounting Division

Menjabat Sejak 10 Desember 2015
Served since December 10, 2015

45
Tahun
Years Old

Jakarta
19 Oktober / October 19
1975



Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Akuntansi (31 Agustus 2018 – Sekarang)
Kepala Divisi Akuntansi & PKBL (24 Maret 2017 – 30 Agustus 2018)
Plt. Kepala Divisi Akuntansi & PKBL (10 Desember 2015 – 23 Maret 2017)
Head of Accounting Division (August 31, 2018 – Present)
Head of Accounting & PKBL Division (March 24, 2017 – August 30, 2018)
Act. Head of Accounting & PKBL Division (December 10, 2015 – March 23, 2017)

Domisili/Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, Akuntansi, Universitas Trisakti, 1998
Bachelor of Accounting, Trisakti University, 1998

Ceriandri Widuri

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM)

Head of Risk Management and Rating Division of Micro Enterprises, Small Businesses, Medium Enterprises, Management Consulting (PUKM)

Menjabat Sejak 31 Agustus 2018
Served since August 31, 2018

48
Tahun
Years Old

Semarang
13 Maret / March 13
1972

Domisili/Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, MBA, Manajemen Strategic, Universitas Gadjah Mada, 2009
S.E, MBA, Strategic Management, Gadjah Mada University, 2009

Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) (31 Agustus 2018 – sekarang)
Kepala Divisi Manajemen Risiko (19 September 2017 – 30 Agustus 2018)
Kepala Divisi Penjaminan Syariah (10 Maret 2014 – 18 September 2017)
Head of Risk Management and Rating Division of Micro Enterprises, Small Businesses, Medium Enterprises, Management Consulting (PUKM) (August 31, 2018 – present)
Head of Risk Management Division (September 19, 2017 – August 30, 2018)
Head of Sharia Assurance Division (March 10, 2014 – September 18, 2017)



Alexandry

Kepala Divisi Klaim
Head of Claims Division

Menjabat Sejak 31 Agustus 2018
Served since August 31, 2018

43
Tahun
Years Old

Tanjung Raja
3 Oktober / October 3
1977



Sekilas Jabatan di Jamkrindo/Positions in Jamkrindo

Kepala Divisi Klaim (1 Januari 2020 – Sekarang)
Plt. Kepala Divisi Klaim (31 Agustus 2018 – 31 Desember 2019)
Plt. Kepala Kantor Wilayah VII Denpasar (3 Februari 2017 – 30 Agustus 2018)
Plt. Kepala Kantor Cabang DKI Jakarta (22 April 2016 – 2 Februari 2017)
Head of Claims Division (January 1, 2020 – Present)
Act. Head of Claims Division (August 31, 2018 – December 31, 2019)
Act. Head of Regional Office VII, Denpasar (February 3, 2017 – August 30, 2018)
Act. Head of DKI Jakarta Branch Office (April 22, 2016 – February 2, 2017)

Domisili/Domicile

Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Palembang, South Sumatera, Indonesia

Pendidikan Terakhir/Education

S.E, S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah, 2001
Bachelor of Accounting, Muhammadiyah University, 2001



DEMOGRAFI KARYAWAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Employee Demographics and Human Resources Competency Development

“1.743 karyawan organik dan non organik yang berkarya di Jamkrindo mendedikasikan dirinya kepada dunia UMKM dan Koperasi melalui 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia.”

“1,743 organic and non-organic employees working at Jamkrindo dedicate themselves to the world of MSMEs and Cooperatives through 9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia.”

Demografi Karyawan

Jamkrindo memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Per akhir tahun 2020, Jamkrindo memiliki 1.743 karyawan mengalami kenaikan sebesar 0,40% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yaitu 1.736 orang. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan karyawan pegawai tidak tetap di tahun 2020.

Profil demografi karyawan Jamkrindo dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Employee Demographics

Jamkrindo has employees with a superior work culture which is the most valuable asset in providing credit guarantee products and services. By the end of 2020, Jamkrindo has 1,743 employees increased by 0.40% compared to the number of employees as of December 31, 2019 of 1,736 people. The increase was mainly due to the addition of non-permanent employees in 2020.

The demographic profile of Jamkrindo employees can be seen in the following tables and charts.

Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang)

Employee Demographics by Employment Status (People)

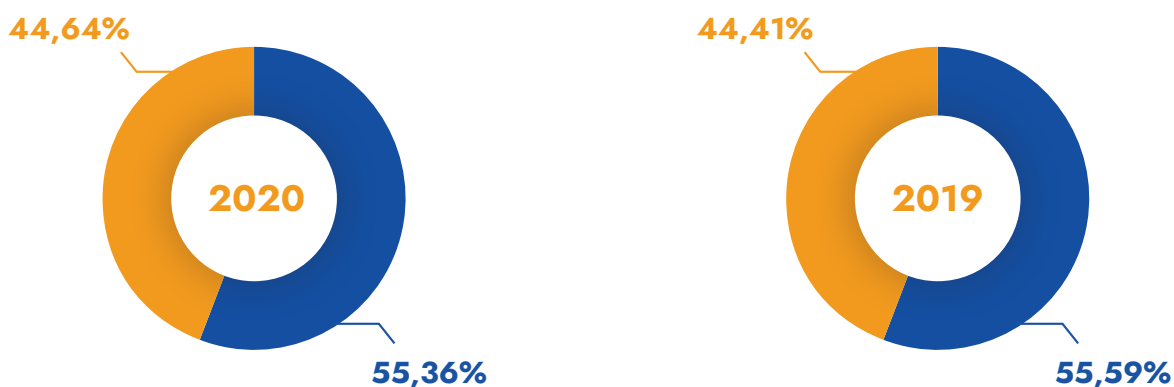
Status Kepegawaian Employment Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Tetap Permanent										
• Permanen (PKWTT) Permanent (PKWTT)	586	372	958	54,96%	588	369	957	55,13%	1	0,10%
• Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assigned to a Subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	4	1	5	0,29%	5	1	6	0,35%	(1)	-16,67%
• Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,11%	1	1	2	0,12%	-	-
Sub Jumlah Tetap Sub Total Permanent	591	374	965	55,36%	594	371	965	55,59%	-	-
Tidak Tetap Non Permanent										
• Kontrak Contract	501	195	696	39,93%	432	168	600	34,56%	96	16%
• Magang Bersertifikasi Certified Apprentice	16	32	48	2,75%	37	76	113	6,51%	(65)	-57,52%
• Prohire Prohire	8	3	11	0,63%	7	2	9	0,52%	2	22,22%

Status Kepegawaian Employment Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage	L	P	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
• KKWT KKWT	6	17	23	1,32%	11	38	49	2,82%	(26)	53,06%
Sub Jumlah Tidak Tetap Sub Total Non Permanent	531	247	778	44,64%	509	262	771	44,41%	7	0,91%
Jumlah Total	1.122	621	1.743	100,00%	1.103	633	1.736	100,00%	7	0,40%

L = Laki-Laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Composition of Number of Employees Based on Employment Status



● Karyawan Tidak Tetap / Non-Permanent Employee

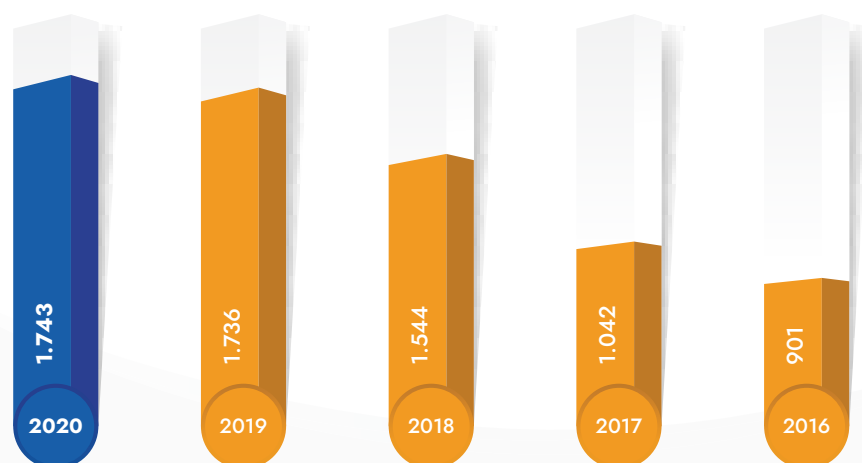
● Karyawan Tetap / Permanent Employee

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap khususnya karyawan dengan status Permanen (PKWTT). Penambahan jumlah karyawan Jamkrindo diperoleh dari kenaikan jumlah karyawan tidak tetap, terutama karyawan kontrak.

Based on employment status, the composition of Jamkrindo employees is dominated by permanent employees, especially employees with Permanent status (PKWTT). The increase in the number of Jamkrindo employees is obtained from the increase in the number of non-permanent employees, especially contract employees.

Pergerakan Jumlah Karyawan dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2016-2020

Movement of Number of Employees in the Last 5 (Five) Years 2016-2020



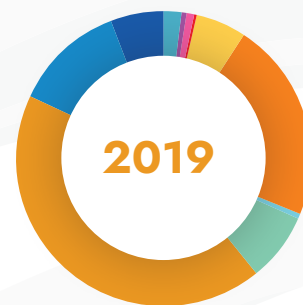
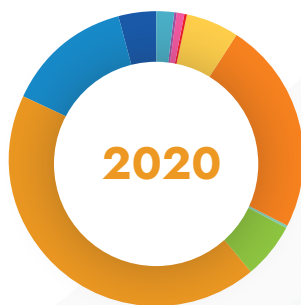


Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi (orang)

Demographic of Permanent Employees by Organization Level (people)

Level Organisasi Organization Level	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Kepala Divisi Division Head	12	7	19	1,97%	13	7	20	2,07%	(1)	5,00%
Pejabat Pranata Utama First Class Officer	3	1	4	0,41%	4	1	5	0,52%	(1)	-20,00%
Kepala Kantor Wilayah Head of Regional Office	9	-	9	0,93%	9	-	9	0,93%	-	-
Wakil Kepala Kantor Wilayah Deputy Head of Regional Office	1	-	1	0,10%	1	-	1	0,10%	-	-
Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	49	7	56	5,80%	49	7	56	5,80%	-	-
Kepala Bagian Unit Head	165	60	225	23,32%	153	57	210	21,76%	15	7,14%
Pejabat Pranata Madya Middle Officer	3	1	4	0,41%	3	2	5	0,52%	(1)	-20,00%
Kepala Seksi Section Head	25	33	58	6,01%	29	44	73	7,56%	(15)	-20,55%
Pranata Muda Junior Officer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Staf Staff	231	186	417	43,21%	238	174	412	42,69%	5	1,21%
Pelaksana Operator	78	56	134	13,89%	74	44	118	12,23%	16	13,56%
Calon Karyawan Prospective Employee	15	23	38	3,94%	21	35	56	5,80%	(18)	-32,14%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



1,97% Kepala Divisi
Division Head

0,41% Pejabat Pranata Utama
First Class Officer

0,93% Kepala Kantor Wilayah
Head of Regional Office

0,10% Wakil Kepala Kantor Wilayah
Deputy Head of Regional Office

5,80% Kepala Kantor Cabang
Head of Branch Office

23,32% Kepala Bagian
Unit Head

0,41% Pejabat Pranata Madya
Middle Officer

6,01% Kepala Seksi
Section Head

0,00% Pranata Muda
Kepala Divisi

43,21% Staf
Staff

13,89% Pelaksana
Operator

3,94% Calon Karyawan
Prospective Employee

2,07% Kepala Divisi
Division Head

0,52% Pejabat Pranata Utama
First Class Officer

0,93% Kepala Kantor Wilayah
Head of Regional Office

0,10% Wakil Kepala Kantor Wilayah
Deputy Head of Regional Office

5,80% Kepala Kantor Cabang
Head of Branch Office

21,76% Kepala Bagian
Unit Head

0,52% Pejabat Pranata Madya
Middle Officer

7,56% Kepala Seksi
Section Head

0,00% Pranata Muda
Kepala Divisi

42,69% Staf
Staff

12,23% Pelaksana
Operator

5,80% Calon Karyawan
Prospective Employee

Berdasarkan level organisasi, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh level Staf. Penambahan terbesar didapatkan dari Kepala Bagian serta Pelaksana, sedangkan terdapat pengurangan Kepala Seksi dan Calon Karyawan Tetap

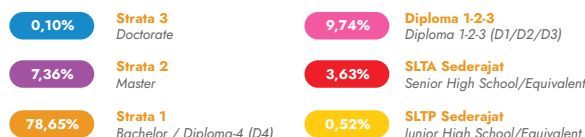
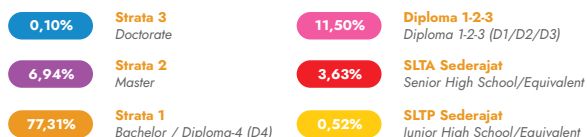
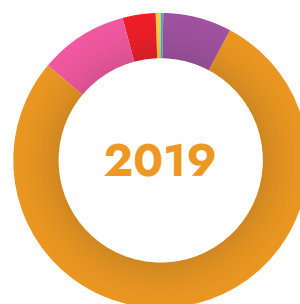
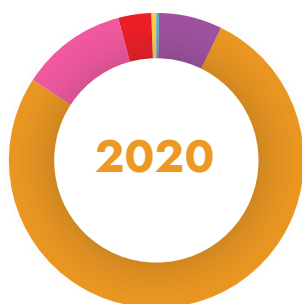
Based on the organizational level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by staff level. The largest additions were obtained from Unit Head and Operator, while there was a reduction in Section Head and prospective permanent employees.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

Demographic of Permanent Employees by Education Level (people)

Jenjang Pendidikan Education Level	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Strata-3 (S3) Doctorate	1	-	1	0,10%	1	-	1	0,10%	-	-
Strata-2 (S2) Master	46	21	67	6,94%	49	22	71	7,36%	(4)	-5,63%
Strata-1 (S1) / Diploma-4 (D4) Bachelor / Diploma-4 (D4)	462	284	746	77,31%	464	295	759	78,65%	(13)	-1,71%
Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3)	52	59	111	11,50%	50	44	94	9,74%	17	18,09%
SLTA Sederajat Senior High School/Equivalent	25	10	35	3,63%	25	10	35	3,63%	-	-
SLTP Sederajat Junior High School/Equivalent	5	-	5	0,52%	5	-	5	0,52%	-	-
SD Elementary School	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma 4 (D4). Penambahan didapatkan dari Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), sedangkan terdapat pengurangan pada karyawan dengan latar belakang pendidikan Strata-2 (S2) dan Strata-1 (S1) / Diploma-4 (D4).

Based on the education level, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by employees with a bachelor's degree /Diploma 4 (D4) background. The addition is obtained from Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), while there is a reduction in employees with an educational background of Master (S2) and Bachelor (S1) / Diploma-4 (D4).

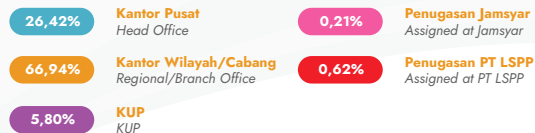
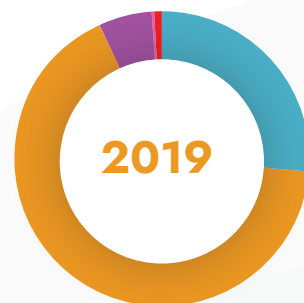
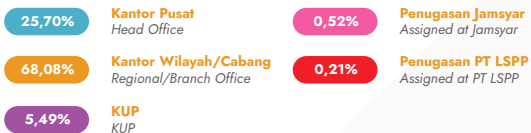
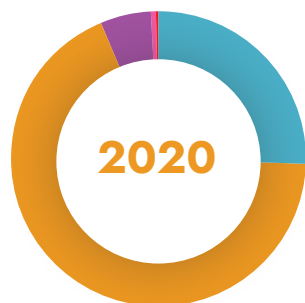


Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja (orang)

Demographic of Permanent Employees by Placement/Operating Area (people)

Penempatan/Wilayah Kerja Placement/Operating Area	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Kantor Pusat Head Office	142	106	248	25,70%	145	110	255	26,42%	(7)	-2,75%
Kantor Wilayah/Cabang Regional/Branch Office	411	246	657	68,08%	408	238	646	66,94%	11	1,70%
KUP KUP	33	20	53	5,49%	35	21	56	5,80%	(3)	-5,36%
Penugasan Jamsyar Assigned at Jamsyar	4	1	5	0,52%	5	1	2	0,21%	(1)	-16,67%
Penugasan PT LSPP Assigned at PT LSPP	1	1	2	0,21%	1	1	6	0,62%	-	-
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan penempatan/wilayah kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang bertugas di Kantor Wilayah/Cabang.

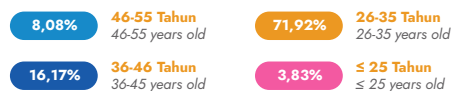
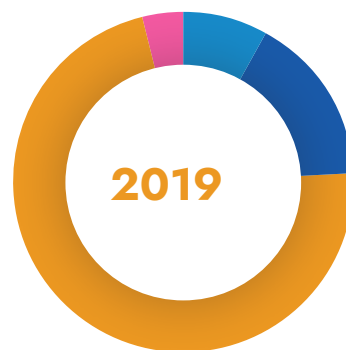
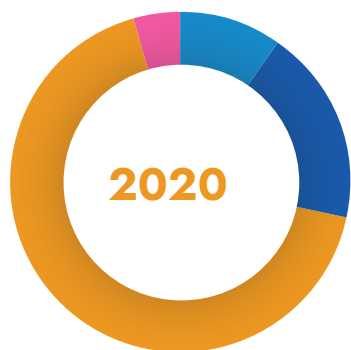
Based on the placement/operating area, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who serve in the Regional/Branch Office.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia (orang)

Demographic of Permanent Employees by Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
≥ 56 tahun ≥ 56 years old	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46-55 tahun 46-55 years old	62	25	87	10,05%	56	22	78	8,08%	9	11,54%
36-45 tahun 36-45 years old	115	66	181	18,75%	96	60	156	16,17%	25	16,03%
26-35 tahun 26-35 years old	402	252	654	67,77%	429	265	694	71,92%	(40)	-5,76%
≤ 25 tahun ≤ 25 years old	12	31	43	4,45%	13	24	37	3,83%	6	16,22%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



Berdasarkan kelompok usia, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang berada dalam kelompok usia 26-35%.

Based on the age range, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees who are in the 26-35% age group.

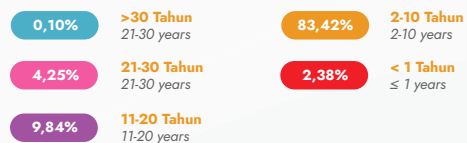
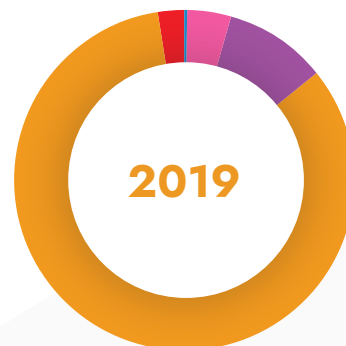
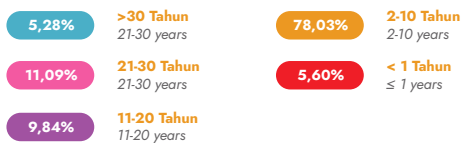
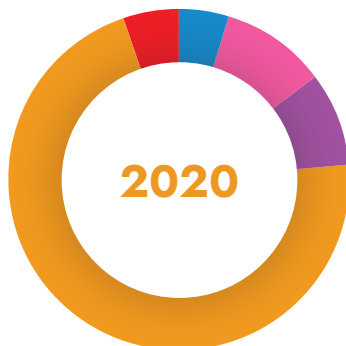


Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja (orang)

Demographic of Permanent Employees by Serving Period (people)

Masa Kerja Serving Period	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	L/M	P/F	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
≥ 30 tahun ≥ 30 years	-	-	-	-	1	-	1	0,10%	(1)	-100,00%
21-30 tahun 21-30 years	34	17	51	5,28%	28	13	41	4,25%	10	24,39%
11-20 tahun 11-20 years	63	44	107	11,09%	53	42	95	9,84%	12	12,63%
2-10 tahun 2-10 years	472	281	753	78,03%	502	303	805	83,42%	(52)	-6,46%
≤ 1 tahun ≤ 1 years	22	32	54	5,60%	10	13	23	2,38%	31	134,78%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	-	-

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female



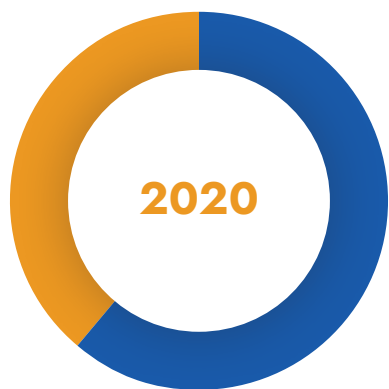
Berdasarkan masa kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun. Terdapat penambahan karyawan tetap Jamkrindo dengan masa kerja 11-20 tahun dan 21-30 tahun, sedangkan karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun mengalami penurunan.

Based on the serving period, the composition of Jamkrindo's permanent employees is dominated by permanent employees with a serving period of 2-10 years. There are additional permanent employees of Jamkrindo with a serving period of 11-20 years and 21-30 years, while permanent employees with a serving period of 2-10 years was decreased.

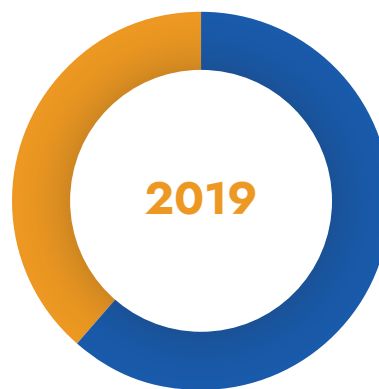
Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin (orang)

Demographic of Permanent Employees by Gender (people)

Gender Gender	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage	Jumlah Total	Persentase Percentage
Laki-laki Male	591	61,24%	594	61,55%	(3)	-0,5%
Perempuan emale	374	38,76%	371	38,45%	3	0,8%
Jumlah Total	965	100,00%	965	100,00%	-	-



61,24% Laki-laki Male 38,76% Perempuan Female



61,55% Laki-laki Male 38,45% Perempuan Female

Sebagian besar karyawan tetap Jamkrindo adalah karyawan laki-laki.

Most of Jamkrindo's permanent employees are male employees.



Pengembangan Kompetensi

Pengelolaan SDM yang profesional menjadi salah satu fokus utama Jamkrindo dalam menghadirkan produk dan layanan jasa penjaminan kredit yang berkualitas. Perencanaan dan strategi pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Jamkrindo untuk menjamin SDM yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan dan strategi pengembangan SDM adalah:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan.
3. Menghindari terjadinya miss management dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan, serta pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (vertikal atau horisontal) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Realisasi biaya pengembangan kompetensi karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp19,11 miliar, turun 0,48% atau sebesar Rp1,10 miliar dibandingkan tahun 2019, atau mencatat pencapaian 89,79% dibandingkan anggaran tahun 2020.

Besaran biaya pengembangan kompetensi karyawan secara total dapat dilihat pada tabel berikut.

Competency Development

Professional HR management is one of Jamkrindo's main focuses in providing quality credit guarantee products and services. HR development planning and strategy is the main function implemented by Jamkrindo to ensure the right human resources to occupy various positions and jobs at the right time.

The objectives of HR planning and development strategies are:

1. To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company.
2. To ensure the availability of current and future labor so that every work can be completed.
3. To avoid the occurrence of mismanagement and overlap in the execution of duties.
4. To facilitate coordination, integration, and synchronization to increase work productivity
5. To avoid employee shortages or excess
6. To become a guideline in establishing programs for recruitment, selection, development, compensation, integration, maintenance, and discipline, as well as the dismissal of employees.
7. To become a guideline in carrying out mutations (vertical or horizontal) and employee retirement.
8. To become the basis for employee appraisal.

Competency Development Costs

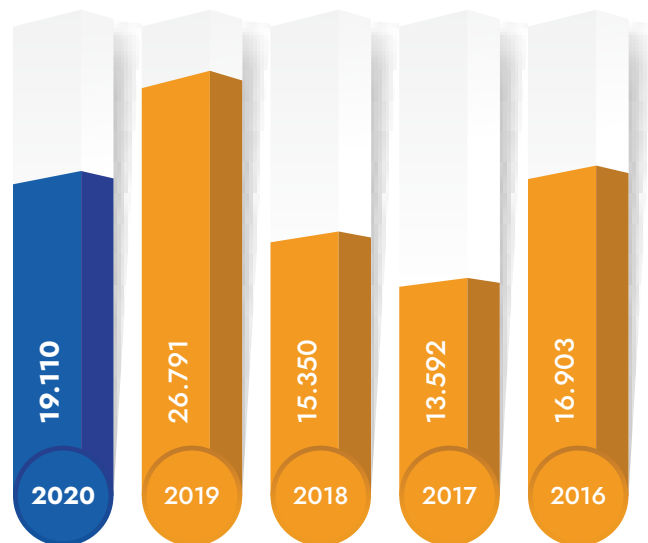
The realization of employee competency development costs in 2020 was recorded at IDR19.11 million, decreased 0.48% or IDR1.10 million compared to 2019, or recorded an achievement of 89.79% compared to the 2020 budget.

Total cost of developing employee competency can be seen in the following table.

	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Anggaran 2020 (%) Realization 2020 To Budget 2020 (%)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) Realization 2020 To Realization 2019 (%)
	(1)	(2)	(3)	(1:2)	((1-3)/3)
Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Costs	19.110	21.284	28.042	89,79%	-31,85%

Biaya Pengembangan Kompetensi dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2016-2020 (Rp-juta)

Competency Development Costs in the Last 5 (Five) Years 2016-2020 (IDR-million)



“Uraian tentang pengembangan SDM sebagai salah satu pemangku kepentingan Jamkrindo dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bagian pembahasan aspek Tanggung Jawab Perusahaan atas Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.”

“The description of human resources development as one of Jamkrindo’s stakeholders can be seen in the chapter Corporate Social Responsibility in the aspect of Corporate Responsibility for Employment, Health and Safety.”

PENDIDIKAN DAN/ATAU PELATIHAN DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, KOMITE-KOMITE, SEKRETARIS PERUSAHAAN, DAN UNIT AUDIT INTERNAL

Education and/or Training of The Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretaries, and Internal Audit Units

Berikut informasi tentang program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Komite Investasi dan Risiko Usaha, Sekretaris Perusahaan, dan Audit Internal, di sepanjang tahun 2020.

The following information about competency improvement programs of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, Investment and Business Risk Committee, Corporate Secretary, and Internal Audit, throughout 2020.



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris/Board of Commissioners				
Sri Mulyanto Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
		Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, , Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	
Noor Ida Khomsiyati Komisaris Commissioners	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Webinar Force Majeure dalam Kepailitan & PKPU Force Majeure Webinar in Bankruptcy & PKPU	Online Training, 13 Mei 2020 May 13, 2020	SNP Law Firm, BenihBaik.com
		Investigasi Forensik Forensic Investigation	Online Training, 26 – 27 Oktober 2020 October 26 – 27, 2020	Visi Integritas
		Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 26 – 27 Maret 2021	Pertamina Training & Consulting
Diah Natalisa Komisaris Commissioners	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
		In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report	Online Training, 16 – 17 Desember 2020 December 16 – 17, 2020	
Ari Wahyuni Komisaris Commissioners	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
		Understanding How to Prevent Corruption in New Reality	Online Training, 15 Juli 2021 July 15, 2021	
Muhammad Muchlas Rowi Komisaris Independen Independent Commissioner	Kompetensi Teknis Technical Competencies	In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report	Online Training, 16 – 17 Desember 2020 December 16 – 17, 2020	Indonesian Institute for Corporate Directorship
		Investigasi Forensik Forensic Investigation	Online Training, 26 – 27 Oktober 2020 October 26 – 27, 2020	Visi Integritas

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Direksi/Board of Directors				
Randi Anto Direktur Utama President Director	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Strategi Cerdas Pengendalian Manajemen Risiko di Era Pandemi COVID-19 Smart Strategy to Control Risk Management in the COVID-19 Pandemic Era	Online Training, 26 Agustus 2020 August 26, 2020	Eddy Sinulangga (Professional Banker, Financial and Banking Consultant & Assesor)
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Risk Management Refreshment Program	Online Training, 26 Agustus 2020 August 26, 2020	IBI-BCC
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sertifikasi Certification	Machine Learning	Online Training, 19 Februari – 25 Maret 2020 February 19 – March 25, 2020	Berkeley School of Information
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Global Business and Politics	Online Training, Agustus – Oktober 2020 August – October 2020	Yale School of Management Executive Education
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	12th Global Peter Drucker Forum	Online Training, 28 – 31 Oktober 2020 October 28 – 31, 2020	Global Peter Drucker Forum 2020
Komite Audit Audit Committee				
Tidak terdapat pelatihan dan pendidikan yang diikuti Komite Audit di tahun 2020. Komite Nominasi dan Remunerasi There is no training and education attended by the Audit Committee in 2020.				
Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee				
Tidak terdapat pelatihan dan pendidikan yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2020. There is no training and education attended by the Nomination and Remuneration Committee in 2020.				
Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee				
Tidak terdapat pelatihan dan pendidikan yang diikuti Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2020. There is no training and education attended by the Investment and Business Risk Committee in 2020.				
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary				
Abdul Bari Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Dynamic Business Presentation untuk L1	Jakarta, 9 – 10 Januari 2020 January 9 – 10, 2020	PT Jamkrindo
	Pembekalan Jabatan Executive Briefing	Jamkrindo Executive Development Program Phase 1 Batch 1	Jakarta, 13 – 17 Januari 2020 January 13 – 17, 2020	PT Jamkrindo
	Pembekalan Jabatan Executive Briefing	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 1	Ruang Pelatihan Lt 8, 24 – 26 Februari 2020 24 – 26 February, 2020	PT Jamkrindo
	Pembekalan Jabatan Executive Briefing	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 2	Ruang Pelatihan Lt 8, 2 – 4 Maret 2020 March 2 – 4, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Webinar Digital Leadership Adapting to the New Normal	Online Training, 25 April 2020 April 25, 2020	Mahir Academy oleh Rumah Perubahan
	Leadership Leadership	Business Presentation Mentoring	Online Training, 18 Mei 2020 May 18, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul Digital Mindset Transformation	Online Training, 20 Mei 2020 May 20, 2020	PT Jamkrindo



Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Abdul Bari Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 1 Solving Problem with Machine Learning	Online Training, 27 Mei 2020 May 27, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 2 Measuring and Formulating Model Performance	Online Training, 3 Juni 2020 June 3, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 3 Deep Learning for Business	Online Training, 12 Juni 2020 June 12, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 4 Model Productionalization	Online Training, 19 Juni 2020 June 19, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	New Financial Startegy for The New Normal World	Online Training, 20 Juni 2020 June 20, 2020	Mahir Academy
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 5 Justifying an Organizational ML Approach	Online Training, 26 Juni 2020 June 26, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	12th Global Peter Drucker Forum 2020	Online Training, 28 – 31 Oktober 2020 October 28 – 31, 2020	Global Peter Drucker Forum 2020
Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit				
Mohamad Adhy Prayitno Kepala Satuan Pengawas Intern (Periode 2018 - 2020) Internal Audit Unit Head (Period 2018 - 2020)	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Dynamic Business Presentation untuk L1 Dynamic Business Presentation for L1	9 – 10 Januari 2020 January 9 – 10, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19 Credit Restructuring as a Result of COVID-19	21 April 2020 April 21, 2020	InfoBank Institute
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Financial Distress Assets : Menguji Daya Tahan Industri di Tengah Badai Pandemi Financial Distress Assets : Testing Industrial Durability in the Midst of Pandemic Storms	6 Mei 2020 May 6, 2020	InfoBank Institute
Fungsi Manajemen Risiko Risk Management Unit				
Ceriandri Widuri Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Pemeringkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) Head of Risk Management and Rating Division of Micro Enterprises, Small Businesses, Medium Enterprises, Management Consulting (PUKM)	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Dynamic Business Presentation untuk L1 Dynamic Business Presentation untuk L1	Jakarta, 9 – 10 Januari 2020 January 9 – 10, 2020	PT Jamkrindo
	Pembekalan Jabatan Executive Briefing	Jamkrindo Executive Development Program Phase 1 Batch 1	Jakarta, 13 – 17 Januari 2020 January 13 – 17, 2020	PT Jamkrindo
	Pembekalan Jabatan Executive Briefing	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 1	Ruang Pelatihan Lt 8, 24 – 26 Februari 2020 24 – 26 February, 2020	PT Jamkrindo
	Pembekalan Jabatan Executive Briefing	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 2	Ruang Pelatihan Lt 8, 2 – 4 Maret 2020 March 2 – 4, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19 Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19	Online Training, 21 April 2020 April 21, 2020	InfoBank Institute
	Leadership Leadership	Webinar Digital Leadership Adapting to the New Normal	Online Training, 25 April 2020 April 25, 2020	PT Jamkrindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Ceriandri Widuri Kepala Divisi Manajemen Risiko dan Peningkatan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Konsultasi Manajemen (PUKM) Head of Risk Management and Rating Division of Micro Enterprises, Small Businesses, Medium Enterprises, Management Consulting (PUKM)	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Business Presentation Mentoring	Online Training, 20 Mei 2020 May 20, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Business Presentation Mentoring	Online Training, 26 Mei 2020 May 26, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul Digital Mindset Transformation	Online Training, 20 Mei 2020 May 20, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 1 Solving Problem with Machine Learning	Online Training, 27 Mei 2020 May 27, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 2 Measuring and Formulating Model Performance	Online Training, 3 Juni 2020 June 3, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 3 Deep Learning for Business	Online Training, 12 Juni 2020 June 12, 2020	PT Jamkrindo
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 4 Model Productionalization	Online Training, 19 Juni 2020 June 19, 2020	PT Jamkrindo
Kompetensi Teknis Technical Competencies	Machine Learning – Modul 5 Justifying an Organizational ML Approach	Online Training, 26 Juni 2020 June 26, 2020	PT Jamkrindo	

*) Tidak lagi menjabat Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 1 Desember 2020.

*) Tidak lagi menjabat Kepala Satuan Pengawasan Intern sejak 1 Desember 2020.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Composition of Shareholders

Rincian Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian No.25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris, di Jakarta Pusat, dan sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, terdapat pengalihan seluruh saham Seri B milik Negara Republik Indonesia kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia sebanyak 7.638.732 saham.

Berikut rincian pemegang saham Jamkrindo:

- Saham Seri A sebanyak 1 (satu) lembar milik Negara Republik Indonesia
- Saham Seri B sebanyak 7.638.732 saham milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

Details of Shareholders

Based on Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020 and last amended by Deed of Statement of Decision of The Shareholders of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia on Amendments to articles of association No.2 dated April 9, 2020 made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary, in Central Jakarta, and in connection with the establishment of Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Company's Share Capital (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, there is a transfer of all series B shares owned by the Republic of Indonesia to PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to be used as an additional capital investment of the Republic of Indonesia as much as 7,638,732 shares.

The details of Jamkrindo's shareholders are as follows:

- Series A shares as much as 1 (one) share owned by the Republic of Indonesia
- Series B shares amounted to 7,638,732 shares owned by the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia.

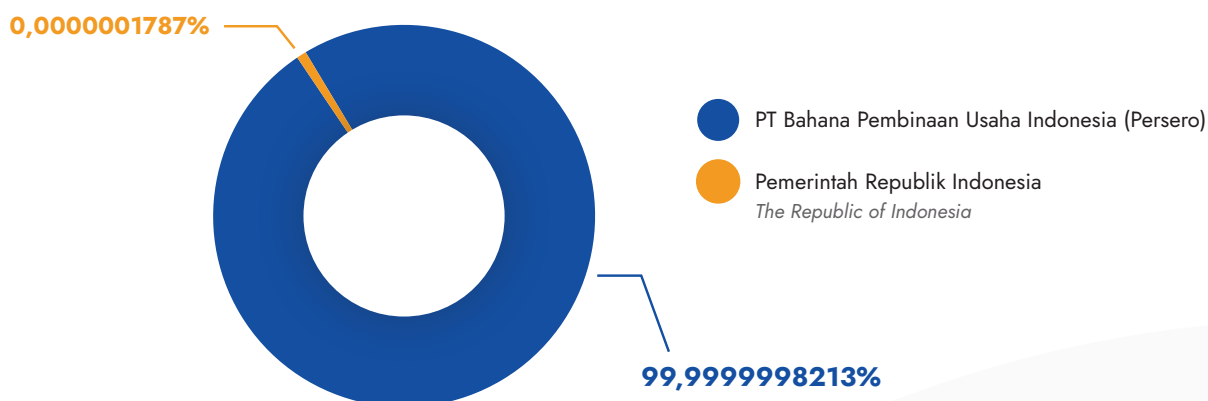
Kepemilikan Saham pada PT Jamkrindo Per 31 Desember 2020

Jamkrindo's Ownership as of December 31, 2020

Pemilik Modal Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Sheet)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Paid-Up and Issued Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.365.160	0,0000001787%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	7.638.732	7.638.732.000.000	99,9999998213%
Jumlah Total	7.638.733	7.638.733.365.160	100%

Komposisi Pemegang Saham Jamkrindo per 31 Desember 2020

Composition of Jamkrindo Shareholders as of December 31, 2020



Informasi Tentang Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Kelompok Pemegang Saham Masing-masing di Bawah 5 (lima) Persen

Hingga 31 Desember 2020, Jamkrindo tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, atau *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan Program Kepemilikan Saham Manajemen, atau *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan saham sesuai dengan penjelasan di atas. Sehingga, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

Information About Share Ownership by Management and Shareholder Groups Less Than 5 (Five) Percent Each

As of December 31, 2020, Jamkrindo does not have an *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) policy and a *Management Stock Ownership Program* (MSOP). The Company also does not conduct an *Initial Public Offering of Shares* that allows the public ownership of the Company's shares. All shareholdings are in accordance with the above explanation. Thus, no company officials or employees own shares of the Company.

Informasi Tentang Pemegang Saham Utama/Pengendali Hingga Entitas Pemilik Akhir

Information About Major/Controlling Shareholders up to Ultimate Owner Entities

Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,0000001787% dan sisanya sebanyak 99,9999998213% kepemilikan tidak langsung melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner entity of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0.0000001787% and the remaining 99.9999998213% indirect ownership through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Seperti telah dijelaskan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2 Tanggal 9 April 2020, Jamkrindo resmi menjadi anak usaha dari holding Asuransi dan Penjaminan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Dengan demikian, BPUI bertindak sebagai entitas induk Jamkrindo.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan demikian, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham Pemerintah Indonesia bertindak sebagai pemegang saham utama/pengendali sekaligus entitas pemilik akhir Jamkrindo.

As described above, based on Government Regulation No.20 of 2020 dated March 16, 2020 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia and Amendment to the Deed of Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, Jamkrindo officially became a subsidiary of the Holding insurance and guarantee of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI). Thus, BPUI acts as the parent entity of Jamkrindo.

In accordance with Government Regulation No.41 of 2003 concerning The Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Corporation (Persero), Public Corporation (PERUM) and Service Corporation (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and State Gazette of the Republic of Indonesia; the power of the Main Shareholder/Controlling Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). Thus, the Ministry of SOEs as the power of shareholders of the Government of Indonesia acts as the main/controlling shareholder as well as the ultimate owner entity of Jamkrindo.

Entitas Induk

Parent Entity

Nama Name	:	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
Bentuk dan Status Badan Usaha Form and Status of Business Entity	:	Perseroan Terbatas (PT); Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT); State-Owned Enterprises (SOEs)
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	:	Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional. Government Regulation No.18 of 1973 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia for The Company's Establishment in the National Private Business Development Sector as amended by Government Regulation No.15 of 2020 concerning Amendments to Government Regulation No.18 of 1973 concerning Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia for The Company's Establishment in the National Private Business Development Sector.
Tanggal Pendirian Date of Establishment	:	17 April 1973 April 17, 1973
Bidang Usaha Line of Business	:	Keuangan dan Investasi serta Konsultasi Manajemen Finance and Investment and Management Consulting
Kepemilikan Ownership	:	Pemerintah Republik Indonesia 100,00% The Government of Republic Indonesia 100.00%
Penyertaan Modal Negara State Equity Participation	:	Rp67.163.537.000.000,- yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal Rp1.000.000,-; dan, • 67.163.536 saham seri B, masing-masing dengan nominal Rp1.000.000 atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 67.163.536.000.000,-. IDR67.163.537.000.000,- which consists of: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (one) series A Dwiwarna shares, with a par value of IDR1,000,000,-; and • 67,163,536 series B shares, each with a par value of IDR1,000,000 or in total with a par value of IDR67,163,536,000,000,-.



Entitas Induk

Parent Entity

Alamat : Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor / Graha CIMB Niaga Building, 18th Floor
Address Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

Telepon : +62 21 2505080
Telephone

Fax : +62 21 2505070
Fax

Email : cs@ifg.id

Situs Web : https://ifg.id
Website

Manajemen : Dewan Komisaris
Management Board of Commissioners

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen <i>President Commissioner concurrently Independent Commissioner</i>	Fauzi Ichsan
Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Hotbonar Sinaga
Komisaris <i>Commissioners</i>	Masyita Crystallin Ph.D
Komisaris <i>Commissioners</i>	Meirijal Nur
Komisaris <i>Commissioners</i>	Nasrudin
Komisaris <i>Commissioners</i>	Sumiyati

Manajemen : Direksi
Management Board of Directors

Direktur Utama <i>President Director</i>	Robertus Billitea
Wakil Direktur Utama <i>Vice President Director</i>	Hexana Tri Sasongko
Direktur Keuangan dan Umum <i>Director of Finance and General Affairs</i>	Rizal Ariansyah
Direktur Bisnis <i>Director of Business</i>	Pantro Pander Silitonga
Direktur Teknik <i>Technical Director</i>	Rianto Ahmadi

Kinerja Keuangan <i>Financial Performance</i>	2020*) (Rp-juta) (IDR-million)
Aset <i>Assets</i>	88.104.945
Liabilitas <i>Liabilities</i>	42.557.739
Ekuitas <i>Equity</i>	45.547.206
Pendapatan <i>Income</i>	7.808.372
Labas Bersih <i>Net Income</i>	2.179.452

*) Tidak diaudit
*) Unaudited

Pemegang Saham Utama/Pengendali sekaligus Entitas Pemilik Akhir
Main/Controlling Shareholders as well as the Ultimate Owner Entities

Pemerintah Republik Indonesia
Government of the Republic of Indonesia

Istana Negara
Jl. Medan Merdeka Utara No.3
RT.2/RW.3, Kel. Gambir
Kec. Gambir, Kota Jakarta Pusat
DKI Jakarta 10110, Indonesia

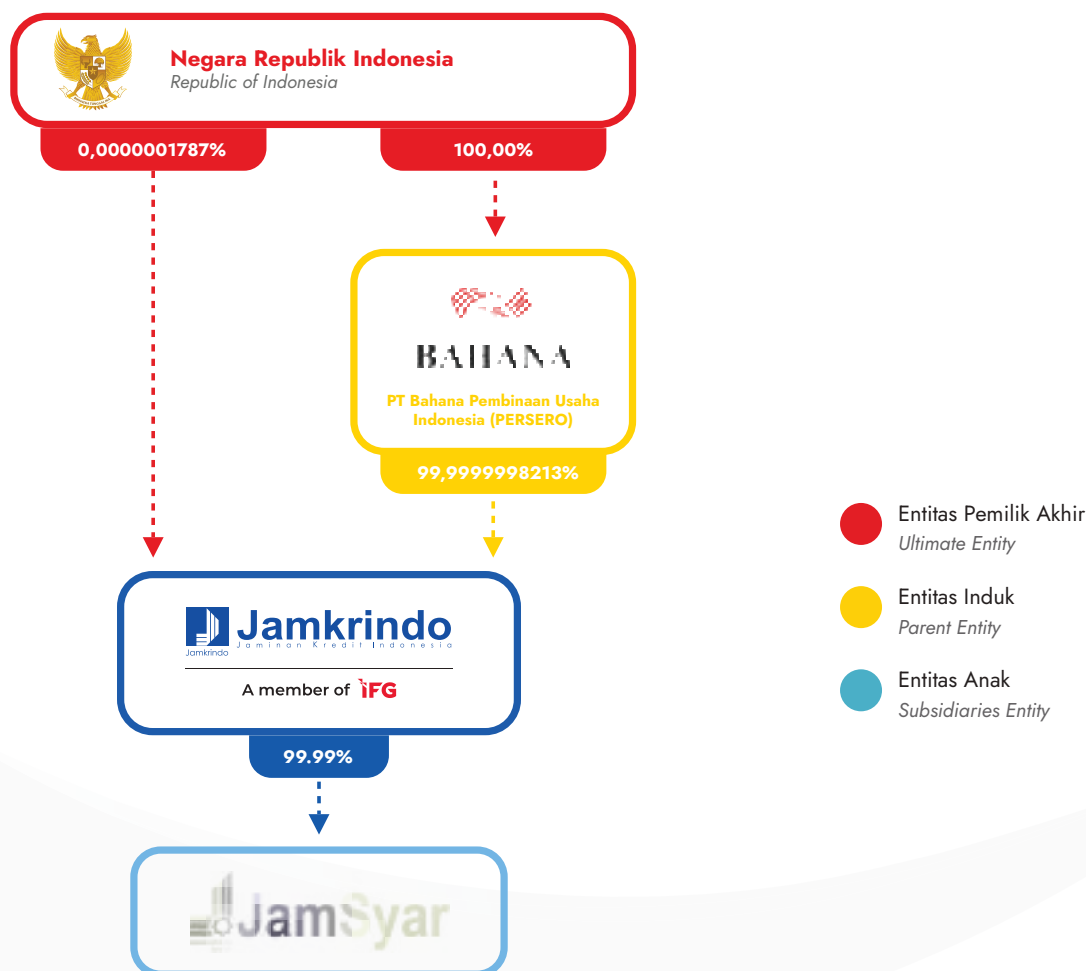
Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia
Office of the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia
Jl. Veteran No.17-18
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 3845627
www.setneg.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Ministry of State-Owned Enterprises (SOE)

Kantor Kementerian BUMN
Office of the Ministry of SOEs
Jl. Medan Merdeka Selatan No.13
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Telp. +62 21 29935678
Fax. +62 21 29935740
www.bumn.go.id

STRUKTUR GRUP DAN KELOMPOK USAHA

Group Structure and Business Group





DAFTAR ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI/JOINT VENTURE (JV)/SPECIAL PURPOSE VEHICLE (SPV)

List of Subsidiaries and Associate Entities/Joint Venture Entities (Jv)/Special Purpose Vehicle (Spv)

Entitas Anak Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Share Ownership (%)		Jumlah Aset (Rp-juta) Total Assets (IDR-million)		Status Operasi Operation Status
					2020	2019	2020	2019	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Business	Jakarta	2014	2014	99,99%	99,99%	1.573.879	1.184.644	Beroperasi Operating



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No.68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No.S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif".

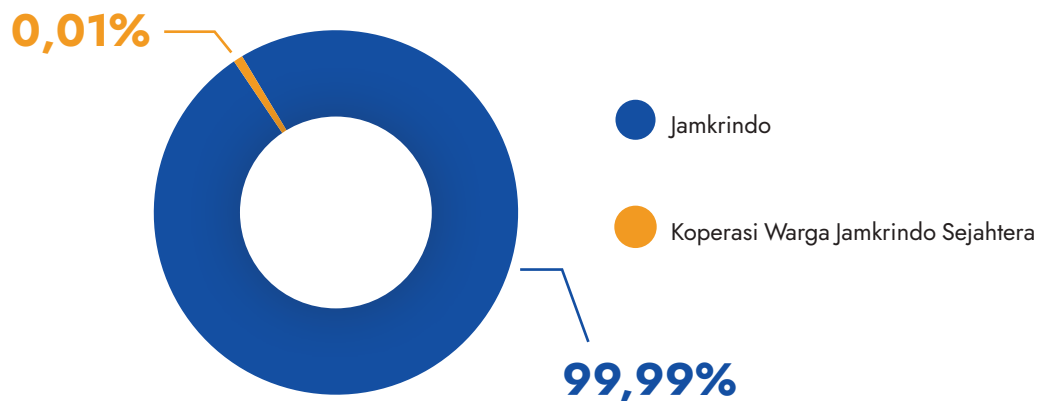
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014 and obtained an operational permit on November 7, 2014. Jamsyar was formed through Notarial Deed No.68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014 which was registered with the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights No.AHU-26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, It received an operation permit from the Financial Services Authority (FSA) through the FSA letter No.KEP-134/d.05/2014 November 7, 2014 concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No.S-34/nB.223/2015 January 15, 2015 concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

Perusahaan memiliki 99,99% saham Jamsyar, sementara sisanya sebesar 0,01% dimiliki oleh Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

The Company owns 99.99% of Jamsyar shares, while the remaining 0.01% is owned by Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera.

Kepemilikan Jamsyar

Ownership of Jamsyar



Ikhtisar Keuangan Jamsyar Jamsyar Financial Highlights	2020	2019
Pendapatan Income	308.528	227.507
Beban Usaha Operating Expenses	70.497	55.433
Laba Bersih Net Income	45.137	17.204
Laba Komprehensif Comprehensive Income	50.460	22.937
Aset Asset	1.573.879	1.184.644
Liabilitas Liabilities	920.686	656.911
Ekuitas Equity	653.193	527.733

Manajemen Kunci Jamsyar per 31 Desember 2020

Jamsyar Key Management as of December 31, 2020

Dewan Komisaris/Board of Commissioners	
Komisaris Utama/President Commissioner	Aribowo
Komisaris Independen/Independent Commissioner	Wildan
Komisaris/Commissioner	Muhammad Syakir Sula
Direksi/Board of Directors	
Direktur Utama /President Director	Gatot Suprabowo
Direktur/Director	Endang Sri Winarni Achmad Sonhadji
Dewan Pengawas Syariah/DSharia Supervisory Board	
Ketua Dewan Pengawas Syariah/Chairman of Sharia Supervisory Board	Prof. Dr. Hasanuddin AF
Anggota Dewan pengawas Syariah/Member of Sharia Supervisory Board	Abdul Aziem, SH., M.Pd



KRONOLOGIS PENERBITAN SAHAM DAN PENERBITAN EFEK LAINNYA

Chronological Issuance and Listing of Other Securities

Hingga tanggal 31 Desember 2020 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perusahaan tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan tidak memperdagangkan sahamnya di bursa saham manapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (*corporate action*), dan nama bursa dimana saham Perusahaan dicatatkan.

Perusahaan juga tidak menerbitkan efek apapun. Dengan demikian tidak terdapat informasi terkait nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalance efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya, nilai penawaran efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, dan peringkat efek.

As of December 31, 2019 and the date of submission of this data/information, The Company does not conduct an Initial Public Offering and does not trade its shares on any stock exchange. Therefore, there is no information related to the year of shares issuance, number of shares, nominal value of shares, share offering price for each corporate action, number of shares listed after each corporate action, and the name of the stock exchange on which Company shares are listed.

The Company also does not issue any securities. Therefore, there is no information regarding the name of other securities, the year of other securities issuance, the interest rate/reward of other securities, and other securities maturity dates; value of other securities; name of the exchange in which other securities are listed; and securities ratings.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG

Supporting Institutions and Professions

Pemeringkat Perusahaan / Rating Companies

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Lantai 17 Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270
Telp. +62 21 7278 2380
Faks. +62 21 7278 2370
Situs Web : www.pefindo.com
Bentuk Jasa: Pemeringkat Efek
Jasa Lainnya: -
Periode Penugasan: 04 Desember 2020
Biaya di Tahun 2020: Rp140.000.000,00

PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Panin Tower Lantai 17 Senayan City
Jl. Asia Afrika Lot. 19 Jakarta 10270
Telp. +62 21 7278 2380
Faks. +62 21 7278 2370
Website : www.pefindo.com
Form of Service: Rating Effect
Other Services: -
Assignment Period: December 04, 2020
Cost in 2020: IDR140,000,000.00

Akuntan Publik / Public Accountant

KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower 18th Floor Lot F & G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang
Jakarta Selatan 12310
Telp. +62 21 75930431; 75930432
Faks. +62 21 75930430
Situs Web: www.hgkfirm.com
Bentuk Jasa: Akuntan Publik – Rekonsiliasi Data Akuntansi PT Jamkrindo;
Pendampingan General Audit Laporan Keuangan Tahun 2020
Jasa Lainnya: -
Periode Penugasan: 1 Desember 2020
Biaya di Tahun 2020: Rp420.200.000,00

KAP Hertanto, Grace, Karunawan

Palma Tower 18th Floor Lot F & G
Jl. RA Kartini II-S Kav. 06 TB Simatupang
Jakarta Selatan 12310
Telp. +62 21 75930431; 75930432
Faks. +62 21 75930430
Website: www.hgkfirm.com
Form of Services: Public Accountant – Reconciliation of Accounting Data of PT Jamkrindo; Assistance of General Audit of Financial Statements in 2020
Other Services: -
Assignment Period: December 1, 2020
Cost in 2020: IDR420,200,000,00

Akuntan Publik / Public Accountant

KAP Husni Mucharam Rasidi

The Royale Palace Blok C18
Jl. Prof Dr. Soepomo No.178A, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 8351868
Faks. +62 21 8351978
Surel: info@kaphwr.id
Situs Web: https.kaphmr.id

Bentuk Jasa, Periode Penugasan dan Biaya di Tahun 2020:

- Bentuk Jasa: Akuntan Publik – Assesment Penerapan PSAK 71 & 73 Periode Penugasan: 12 Februari s.d. 18 Maret 2020
Biaya: Rp236.865.300,00
- Bentuk Jasa: Akuntan Publik – Penyusunan Modul Perhitungan CKPN dan Sewa Sesuai PSAK 71 & 73
Periode Penugasan: 12 Februari s.d. 12 Mei 2020
Biaya: Rp190.154.900,00
- Bentuk Jasa: Rekonsiliasi Data Operasional Dengan Akuntansi atas IJP dan Turunannya periode tahun 2020
Periode Penugasan: 08 April s.d. 22 April 2020
Biaya: Rp396.000.000,00
- Bentuk Jasa: Assesment PSAK 71
Periode Penugasan: 08 April 2020 s.d 12 Mei 2020
Biaya: Rp342.100.000,00

KAP Husni Mucharam Rasidi

The Royale Palace Blok C18
Jl. Prof Dr. Soepomo No.178A, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 8351868
Facs. +62 21 8351978
Email: info@kaphwr.id
Website: https.kaphmr.id

Form of Service, Assignment Period and Cost in 2020:

- Form of Services: Public Accountant – Assessment of PSAK 71 & 73 Implementation
Assignment Period: February 12 to March 18, 2020
Cost: IDR236,865,300.00
- Form of Services: Public Accountant – Preparation of CKPN Calculation Module and Lease According to PSAK 71 & 73
Assignment Period: February 12 to May 12, 2020
Cost: IDR190,154,900.00
- Form of Service: Reconciliation of Operational Data with Accounting for IJP and Its Derivatives for the period 2020
Assignment Period: April 08 to April 22, 2020
Cost: IDR396,000,000.00
- Form of Service: Assessment PSAK 71
Assignment Period: April 08, 2020 to 12 May 2020
Cost: IDR342,100,000.00

KAP Husni Wibawa & Rekan

The Royale Palace Blok C18
Jl. Prof Dr. Soepomo No.178A, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 8351868
Faks. +62 21 8351978
Surel: info@kaphwr.id
Situs Web: https.kaphmr.id

Bentuk Jasa, Periode Penugasan dan Biaya di Tahun 2020:

- Bentuk Jasa: Akuntan Publik – Pemuktahiran Manual dan Kebijakan Akuntansi
Periode Penugasan: 26 Oktober 2020
Biaya: Rp399.300.000,00
- Bentuk Jasa: Akuntan Publik – Penyusunan User Requirement Sistem Informasi Terintegrasi PT Jamkrindo berdasarkan ERP dan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap
Periode Penugasan: 30 Desember 2020
Biaya: Rp242.000.000,00

KAP Husni Wibawa & Rekan

The Royale Palace Blok C18
Jl. Prof Dr. Soepomo No.178A, Tebet
Jakarta Selatan 12870
Telp. +62 21 8351868
Facs. +62 21 8351978
Email: info@kaphwr.id
Website: https.kaphmr.id

Form of Service, Assignment Period and Cost in 2020:

- Form of Service: Public Accountant – Manual Update and Accounting Policy
Assignment Period: October 26, 2020
Cost: IDR399.300.000,00
- Form of Services: Public Accountant – Preparation of User Requirement of Integrated Information System of PT Jamkrindo based on ERP and Fixed Asset Management Informasi System
Assignment Period: December 30, 2020
Cost: IDR242.000.000,00

KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC)

WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta, 12920
Telp. +62 21 50992901; 31192901
Faks. +62 21 52905555; 52905050
Surel: id_contactus@pwc.com
Situs Web: www.pwc.com/id

Bentuk Jasa: Akuntan Publik – General Audit tahun buku 2020*

Jasa Lainnya: -
Periode Penugasan: 31 Maret 2021
Biaya di Tahun 2020: Rp2.719.200.000

KAP Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PWC)

WTC 3 Jl. Jend. Sudirman Kav.29-31 Jakarta, 12920
Telp. +62 21 50992901; 31192901
Facs. +62 21 52905555; 52905050
Email: id_contactus@pwc.com
Website: www.pwc.com/id

Form of Service: Public Accountant – General Audit for financial year 2020*

Other Services: -
Assignment Period: March 31, 2021
Cost in 2020: IDR2,719,200,000.00



Konsultan Hukum / Legal Consultant

Suyanto Simalango Patria And Parterns Law Firm

South Quarter, Tower A, Lantai 11 Unit B
Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan 12430
Telp. +62 21 58903993; 58903993
Faks. +62 21 22544367
Surel: info@jusufind.com
Situs Web: www.jusufind.com
Bentuk Jasa: Konsultan Hukum -
Periode Penugasan: 12 Maret 2020 s.d. 12 Maret 2021
Biaya di Tahun 2020: Rp660.000.000,00 (Rp55.000.000/bulan)

Suyanto Simalango Patria And Parterns Law Firm

South Quarter, Tower A, Lantai 11 Unit B
Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Jakarta Selatan 12430
Telp. +62 21 58903993; 58903993
Facs. +62 21 22544367
Email: info@jusufind.com
Website: www.jusufind.com
Form of Services: Legal Consultant -
Assignment Period: March 12, 2020 to March 12, 2021
Cost in 2020: IDR660,000,000.00 (IDR55,000,000/month)

Rahmad Irwan And Partners

Gandaria 8 Office Tower Lantai 15 Unit D
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240
Telp. +62 21 29303560, 29303570, 29303580
Faks: +62 21 29303581
Surel: rinp@rinpartners.com
Situs Web: www.rinpartners.com
Bentuk Jasa: Konsultan Hukum – Retainer Lawyer
Periode Penugasan: 16 April 2019 s.d. 16 April 2020 ; 16 April 2020 s.d. 16 April 2021 (perpanjangan)
Biaya di Tahun 2020: Rp420.000.000,00 (Rp35.000.000,00 per bulan)

Rahmad Irwan And Partners

Gandaria 8 Office Tower Lantai 15 Unit D
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12240
Telp. +62 21 29303560, 29303570, 29303580
Facs: +62 21 29303581
Email: rinp@rinpartners.com
Website: www.rinpartners.com
Form of Service: Legal Consultant – Retainer Lawyer
Assignment Period: April 16, 2019 to April 16, 2020; 16 April 2020 to 16 April 2021 (renewal)
Cost in 2020: IDR420,000,000.00 (IDR35,000,000.00 per month)

Jusuf Inradewa And Partners

Menara BCA Lt. 50 Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Telp. +62 21 58903993; 58903993
Faks. +62 21 22544367
Surel: info@jusufind.com
Situs Web: www.jusufind.com
Bentuk Jasa: Konsultan Hukum - Kajian Hukum atas Aspek Hukum proses Phase Out Unit Usaha Syariah (UUS)
Periode Penugasan: 17 s.d. 27 Desember 2020
Biaya di Tahun 2020: Rp80.000.000,00

Jusuf Inradewa And Partners

Menara BCA Lt. 50 Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310
Telp. +62 21 58903993; 58903993
Facs. +62 21 22544367
Email: info@jusufind.com
Website: www.jusufind.com
Form of Services: Legal Consultant - Legal Review of Legal Aspects of Sharia Business Unit Phase Out Process (UUS)
Assignment Period: 17 to 27 December 2020
Cost in 2020: IDR80,000,000.00

Notaris / Notary

Notaris & PPAT Aryadi, SH., M.Kn

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D.01 Komp Pasal Onderdil Smart ampera
Telp. +6221 22270778
Faks. +6221 22250344 ext 158
Surel: mega_aryadi@yahoo.co.id
Bentuk Jasa: Notaris & PPAT – Perihal Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Arsip
Periode Penugasan: 6 Januari 2021
Biaya di Tahun 2020: Rp750.000,00

Notaris & PPAT Aryadi, SH., M.Kn

Jl. Daan Mogot Km. 19 Blok D.01 Komp Pasal Onderdil Smart ampera
Telp. +6221 22270778
Facs. +6221 22250344 ext 158
Email: mega_aryadi@yahoo.co.id
Form of Services: Notary & PPAT – Regarding The Rental Agreement for Warehouse Archive
Assignment Period: January 6, 2021
Cost in 2020: IDR750,000.00

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards And Certifications



31 Mei / May

European Award for Best Practices 2020
European Award for Best Practices 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Gold Category Best Practices
Gold Category Best Practices

Acara/Event
BUMN Marketeers Awards 2019
BUMN Marketeers Awards 2019

oleh/by
European Society Quality Research
European Society Quality Research

09 Juli / July

Emerging Stated Owned Enterprise
Emerging Stated Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Terbaik II
Best II

Acara/Event
9th Anugerah BUMN 2022
9th BUMN Award 2022

oleh/by
BUMNTrack
BUMNTrack



01 Juli / July

Rekor MURI
Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Perusahaan dengan Pergantian Badan Hukum Terbanyak
Companies with the Most Legal Entity Changing

Acara/Event
Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by
MURI
MURI

01 Juli / July

Rekor MURI
Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Perusahaan dengan Proses Perubahan Badan Hukum Tercepat
Companies with the Fastest Legal Entity Change Process

Acara/Event
Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by
MURI
MURI





29 Juli / July

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Acara/Event

GRC & Performance Excellence Award 2020
GRC & Performance Excellence Award 2020

oleh/by

Businessnews
Businessnews

16 September / September

The Most Promising Company in Strategic Marketing
The Most Promising Company in Strategic Marketing

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Bronze Winner
Bronze Winner

Acara/Event

BUMN Marketers Award 2020
BUMN Marketers Award 2020

oleh/by

BUMN Marketers Club
BUMN Marketers Club



23 September / September

Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020
Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Gold Winner
Gold Winner

Acara/Event

BUMN Brand Award 2020
BUMN Brand Award 2020

oleh/by

RRI dan Economics
RRI dan Economics

07 Oktober / October

Top GRC Awards 2020 #Star4
Top GRC Awards 2020 #Star4

Deskripsi Penghargaan/Award Description

#Star4
#Star4

Acara/Event

Top Governance, Risk & Compliance 2020
Top Governance, Risk & Compliance 2020

oleh/by

Top Business
Top Business



03 November / November

The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise
The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019
Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019

Acara/Event

11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020
11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020

oleh/by

Infobank
Infobank

05 November / November

Corporate Communication Terbaik
The Best Corporate Communication

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Corporate Communication Terbaik
The Best Corporate Communication

Acara/Event
BUMN Branding & Marketing Award 2020
BUMN Branding & Marketing Award 2020

oleh/by
BUMNTrack
BUMNTrack



25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020
The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020

Acara/Event
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by
Businessnews
Businessnews



25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Acara/Event
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by
Businessnews
Businessnews



08 Desember / December

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Deskripsi Penghargaan/Award Description

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Acara/Event
Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)

oleh/by
Tempo Country Contributor Award 2020
Tempo Country Contributor Award 2020



2020

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia
Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Acara/Event
TOP CSR PKBL of The Year 2020
TOP CSR PKBL of The Year 2020

oleh/by
Trans Co Indonesia dan Info Brand
Trans Co Indonesia dan Info Brand





Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2020

Certification that Applies in 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Date of Certification Issued</i>	Jenis Sertifikat <i>Certificate Type</i>	Deskripsi Sertifikasi <i>Certificate Description</i>	Dikeluarkan Oleh <i>Issued by</i>	Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period Until</i>
2 Mei 2018 <i>May 2, 2018</i>	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 <i>2015 Quality Management Certification</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan standard bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu Perusahaan <i>Quality Management System Certification with international standard that aims to guarantee the products or services produced by a Company</i>	Sucofindo	1 Mei 2021 <i>May 1, 2021</i>
5 Agustus 2020 <i>August 5, 2020</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 <i>2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification</i>	Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. <i>Certification to take preventive measures to prevent, detect, or address bribery occurring in an enterprise environment</i>	PT SAI Global Indonesia	4 Agustus 2023 <i>August 4, 2023</i>
21 Desember 2020 <i>December 21, 2020</i>	Sertifikasi Pemeringkatan AA+ dari Pefindo <i>AA+ Rating Certification from Pefindo</i>	Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit <i>Certification of Companies for Credit Risk</i>	PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO)	1 Desember 2021 <i>December 1, 2021</i>

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Association Membership

Untuk memperkuat bisnisnya, Jamkrindo telah tergabung dalam keanggotaan organisasi, yaitu ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia).

To strengthen its business, Jamkrindo has joined the membership of the organization, namely ASIPPINDO (Association of Indonesian Guarantee Companies).

DAFTAR ALAMAT ENTITAS ANAK DAN KANTOR CABANG / KANTOR PERWAKILAN

Address List of Subsidiaries and Branch Offices/Representative Offices



	Kanwil I Medan		Kanwil VI Surabaya
	Kanwil II Palembang		Kanwil VII Denpasar
	Kanwil III Jakarta		Kanwil VIII Banjarmasin
	Kanwil IV Bandung		Kanwil IX Makassar
	Kanwil V Semarang		KC (Kantor Cabang)



ENTITAS ANAK

Subsidiaries

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Gedung Jamsyar

Jamsyar Building

Gedung Jamsyar
Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4
Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat 10510

KONTAK

Contact

+62 21 6540386

+62 21 6540389

info@jamkrindosyariah.com

www.jamkrindosyariah.com

Kantor Pusat PT Jamkrindo

PT Jamkrindo Head Office

Gedung Jamkrindo

Jamkrindo Building

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Indonesia

KONTAK

Contact

+62 21 6540335

+62 21 6540344, 6540348

contact@jamkrindo.com

www.jamkrindo.com

Kantor Wilayah / Regional Office

Kantor Wilayah Regional Office	Alamat Address
I Medan	Jl. Bukit Barisan No.03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No.4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp (021) 6540335 Fax (021) 6540387
IV Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No.722 Gedebage, Bandung. Telp : (022) 7815088 Fax: (022) 7800891
V Semarang	Jl. Pamularsih No.68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024)7614138
VI Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar-80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus / Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta Jakarta Special Branch Office	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12920

Kantor Cabang / Branch Offices

Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address	
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No.40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827 / 4155767 Fax: (061) 4156775	
	2 Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No.150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp: 0761-854311, 854870 Fax: 0761-848801	
	3 Aceh	Jl. Syah Kuala No.10 A-B Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 23126; Telp: (0651) 8016790 Fax: (0651) 8011094	
	4 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No.47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165	
	5 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No.6 Telp: (0771) 316919	
	6 Batam	Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No.9, Batam Center Telp: (0778) 7495993	
	7 Balige	Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax : (0632) 21501/ (0632) 21722	
	8 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak no.188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398	
	9 Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No.23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115	
	II	10 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani RT. 004 / RW. 001 No.28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
		11 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
		12 Pangkal Pinang	Jl. A. Yani No.11 H Pangkal Pinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816



Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address	
III	13 Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610 Telp: (021) 6540409	
	15 Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468	
	16 Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No.34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax : (0254) 228999/ (0254) 229247	
	17 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322	
	18 Bandung	Jl. Soekarno Hatta KM 12 No.722 Gedebage, Bandung Telp: (022) 7816267	
IV	19 Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No.10 B RT. 004 RW. 005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850	
	20 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 No.55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002	
	21 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No.90 RT.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868	
	22 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No.199 A Ruko No.6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Telp: (0265) 314169	
	23 Semarang	Jl. Pamularsih No.68 A Semarang; Telp: (024) 7614136 / 7610129 Fax: (024) 7614138	
	24 Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288 / 5012323 Fax: (0274) 5012545	
	25 Solo	Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030	
	V	26 Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprpto No.21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
		27 Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No.12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
		28 Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No.38, Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan – 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
29 Surabaya		Jl. Diponegoro No.171. Surabaya; Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592	
30 Kediri		Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881	
VI	31 Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No.116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804	
	32 Malang	Jl. Letjend S. Parman No.56 Blok A-4 Malang; Telp: (0341) 4377377 Fax: (0341) 4378177	
	33 Madiun	Jl. Thamrin No.38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249	
	34 Denpasar	Jl. Hang Tuah No.76 Denpasar Telp: (0361) 286854	
	35 Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No.179, Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572	
VII	36 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No.82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp: 0371-2629239	
	37 Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT. 20, RW. 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088	
	38 Samarinda	Jl. A Yani No.37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578	
	39 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435	
VIII	40 Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No.6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax : (0536) 4264269/(0536) 3242394	
	41 Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT. 04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494	
	42 Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033	

Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
	43 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.140 Telp: (0411)873031
	44 Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No.222 Gorontalo Telp: 0435-828003
	45 Mamuju	Jl. Marthadinata No.11 Telp : (0426)2324878
	46 Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	47 Ternate	Jl. Inpres No.7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp: (0921)3122739
	48 Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura Ruko Pasifik Permai Blok H No.17 Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara Telp: (0967)524424
	49 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi,Manokwari Papua Barat Telp: (0986)214184
IX	50 Palu	Jl. Dewi Sartika No.58 C Palu - Sulteng 94121 Telp: (0451) 4131812
	51 Kendari	Jl. La Ode Hadi No.56 B Kendari – 93118 Telp: (0401)3196780
	52 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No.43 Manado Telp: (62-431) 865194/865198
	53 Bitung	Jl. Sam ratulangi No.1 Bitung, Sulawesi Utara Telp: (0438) 35939
	54 Pare-pare	Jl. Andi mappatola No.30 c parepare, Sulawesi Selatan Telp: 0421-2914592
	55 Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No.90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	56 Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong - Papua Barat Telp: (0951)329081

Kantor Unit Pelayanan (KUP) / Service Unit Offices (KUP)

Kanwil Regional Office	KUP KUP	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl. Jendral Sudirman No.391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No.04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No.81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No.366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatra Selatan Telp: 0733 3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No.28, Warung Jambu, Bogor Telp: (0251) 7564211
	6 Cibinong	Ruko Clbinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No.29 Cibinong Kab Bogor Telp: (021) 29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A No.7 Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi
	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No.572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah; Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10 Cilacap	Jl Jend. Sudirman No.17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.360 b. Surabaya; Telp: (031) 87858114 Fax: (031) 87858114
	12 Pamekasan	Jl Jokotole No.26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp: 0324 - 3510118
	13 Jember	Jl. Gajah Mada No.187 Jember Telp: 0331 - 4431044
	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
VIII	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec.Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No.29 B Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kaba Watampone Provinsi Sulsel Telp: 0481 2921375



INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

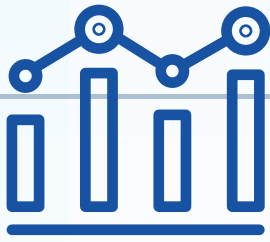
Information on the Company's Website

Perusahaan memiliki situs web resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs Web ini berisi informasi seputar korporasi Perusahaan. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perusahaan kepada khalayak luas.

The company has an official website with the address www.jamkrindo.co.id. This Website contains information about the Company. This website is a portal that can be accessed openly, with the aim of providing comprehensive information about the Company to a broad audience.

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Ketersediaan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu <i>Shareholder information up to the individual final owner</i>	✓	Telah disediakan pada situs web Jamkrindo dengan alamat www.jamkrindo.co.id <i>It has been provided on Jamkrindo's website with the address www.jamkrindo.co.id</i>
Isi Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	✓	Telah disediakan pada situs web Jamkrindo dengan alamat www.jamkrindo.co.id <i>It has been provided on Jamkrindo's website with the address www.jamkrindo.co.id</i>
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan <i>The information of the General Meeting of Shareholders (GMS) shall at least include the agenda materials discussed in the GMS, the summary of the minutes of GMS, and important date information, namely date of GMS announcement, date of GMS summons, date of GMS implementation, date of release of the summary of the minutes of GMS</i>	✓	Telah disediakan pada situs web Jamkrindo dengan alamat www.jamkrindo.co.id <i>It has been provided on Jamkrindo's website with the address www.jamkrindo.co.id</i>
Laporan Keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) <i>Separate annual financial statements (last 5 years)</i>	✓	Telah disediakan pada situs web Jamkrindo dengan alamat www.jamkrindo.co.id <i>It has been provided on Jamkrindo's website with the address www.jamkrindo.co.id</i>
Profil Dewan Komisaris dan Direksi <i>Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	✓	Telah disediakan pada situs web Jamkrindo dengan alamat www.jamkrindo.co.id <i>It has been provided on Jamkrindo's website with the address www.jamkrindo.co.id</i>
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite - komite, dan Unit Audit Internal <i>Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit</i>	✓	Telah disediakan pada situs web Jamkrindo dengan alamat www.jamkrindo.co.id <i>It has been provided on Jamkrindo's website with the address www.jamkrindo.co.id</i>

✓ = tersedia pada situs web Jamkrindo | ✗ = belum tersedia pada situs web Jamkrindo
✓ = available on Jamkrindo website | ✗ = not yet available on Jamkrindo website

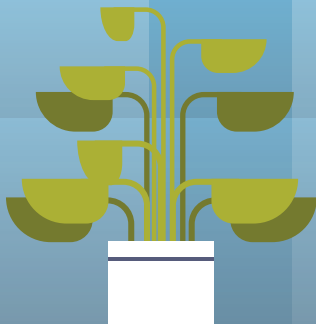


ANALISIS PEMBAHASAN DAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pelanggan. Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan Perusahaan adalah dengan terus memperbaiki dan menyempurnakan organisasi, produk dan layanan yang diberikan. Perubahan badan hukum yang dilakukan Perusahaan tahun 2020 juga merupakan wujud komitmen untuk mewujudkan hal tersebut.

Jamkrindo continuously strives to improve service to all customers. One of the measures taken by the Company is to continuously improve the organization, products and services provided. The change of legal entity made by the Company in 2020 is also a form of commitment to improve service to all customers.





TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Economic and Industrial Review

TINJAUAN EKONOMI GLOBAL

Global Economic Review



Ekonomi global di tahun 2020 dihadapkan tantangan yang sangat berat. Berawal dari krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19, ekonomi global kemudian mengalami resesi. Hal ini disebabkan sebagian besar negara di dunia menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat tersebut berakibat pada penurunan tajam aktivitas ekonomi global baik dari sisi konsumsi, produksi, perdagangan barang dan jasa, maupun investasi.

Ketidakpastian penanganan pandemi dan ekspektasi dampak negatifnya pada kinerja ekonomi menimbulkan tekanan pada stabilitas sistem keuangan global. Investor menjadi lebih berhati-hati dan mengalihkan investasinya kepada aset-aset keuangan yang lebih aman. Ini mendorong terjadinya aliran modal keluar dari negara berkembang dan menimbulkan gejolak nilai tukar serta tekanan pada cadangan devisa.

Tahun 2020, The Federal Reserve kembali menurunkan suku bunga *Federal Fund Rate* sebesar 100 bps hingga menjadi 0,09%. Selain itu, The Fed juga melakukan injeksi likuiditas ke pasar uang dan melakukan pembelian surat berharga di sektor keuangan dan korporasi.

The global economy in 2020 is faced with very severe challenges. Starting from the health crisis of the COVID-19 pandemic, the global economy then went into recession. This is because most countries in the world implement policies restricting people's mobility to reduce the spread of COVID-19. Restrictions on public activity resulted in a sharp decline in global economic activity in terms of consumption, production, trade in goods and services, and investment.

Uncertainty over the handling of the pandemic and expectations of its negative impact on economic performance are putting pressure on the stability of the global financial system. Investors become more cautious and transfer their investments to safer financial assets. This encourages capital outflows from developing countries and causes exchange rate fluctuations and pressure on foreign exchange reserves.

In 2020, the Federal Reserve will again lower the Federal Fund Rate by 100 bps to 0.09%. In addition, the Fed also injected liquidity into the money market and made purchases of securities in the financial and corporate sectors.



Langkah serupa juga dilakukan oleh Bank Sentral di beberapa negara Eropa. Hal tersebut membuat pasar keuangan global kembali menjadi relatif stabil hingga akhir tahun 2020.

Similar measures were taken by the Central Bank in several European countries. This makes global financial markets relatively stable until the end of 2020.

Dalam laporan *World Economic Outlook* yang dirilis pada Januari 2021, IMF memprediksi perekonomian global tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 3,5%. Sebagian besar negara di dunia mengalami pertumbuhan negatif dan masuk ke jurang resesi ekonomi, termasuk Amerika Serikat dan Jepang, juga mengalami resesi ekonomi.

In its World Economic Outlook report released in January 2021, the IMF predicts that the global economy will contract by 3.5%. Most countries in the world experience negative growth and go into the abyss of economic recession, including the United States and Japan, also experiencing economic recession.

Tabel Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020 (dalam %)

Table of Economic Growth in 2020 (in %)

Negara Country	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
China	-6,80	3,20	4,90	6,50
European Union	-2,69	-13,82	-4,09	-4,64
India	3,01	-24,38	-7,35	0,41
Indonesia	2,97	-5,32	-3,49	-2,19
Japan	-2,05	-10,29	-5,78	-1,37
Malaysia	0,73	-17,11	-2,62	-3,45
Singapore	0,00	-13,30	-5,80	-2,40
South Korea	1,37	-2,72	-1,13	-1,22
Thailand	-2,07	-12,09	-6,40	-4,15
United Kingdom	-2,21	-21,36	-8,48	-7,34
United States	0,55	-9,04	-2,62	-1,88
Vietnam	3,68	0,39	2,69	4,48

Sumber: CEIC (diolah) | Source : CEIC (processed)

Memasuki tahun 2021, proses pemulihan ekonomi global diprediksi akan berlangsung lebih cepat. Beberapa perusahaan vaksin juga telah memproduksi dan mendistribusikan vaksin COVID-19 ke berbagai negara. Karena itu, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global akan kembali tumbuh positif di tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 5,2%.

Entering 2021, the global economic recovery process is predicted to take place faster. Several vaccine companies have also produced and distributed COVID-19 vaccines to various countries. Therefore, the IMF predicts that global economic growth will return to positive growth in 2021 with growth of 5.2%.

ANALISIS EKONOMI NASIONAL *National Economic Analysis*

Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan utama bagi perekonomian Indonesia di tahun 2020. Bahkan, penyebaran COVID-19 di Indonesia juga sangat masif dan mengakibatkan korban meninggal mencapai lebih dari 33 ribu jiwa. Ekonomi nasional mengalami kontraksi sejak kuartal II/2020 yaitu 5,32%.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk mencegah dampak yang lebih buruk dari pandemi ini, baik untuk kesehatan masyarakat maupun untuk menyelamatkan perekonomian nasional.

Salah satu langkah besar yang diambil Pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020) yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Penerbitan Perppu tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya COVID-19, baik dari aspek keselamatan jiwa, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat.

Penerbitan Perppu 1/2020 merupakan wujud kehadiran negara dalam rangka menangani permasalahan pandemi COVID-19. Melalui Perppu 1/2020 Pemerintah dapat menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang bersifat *extraordinary* di bidang keuangan negara maupun tindakan antisipatif *forward-looking* terhadap ancaman memburuknya perekonomian dan ancaman stabilitas sistem keuangan seiring dengan ketidakpastian dan belum berakhirnya penyebaran COVID-19.

Pemerintah juga menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2020, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang merupakan rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat Penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para Pelaku Usaha dalam menjalankan bisnisnya. Dalam melaksanakan program PEN, pemerintah pusat memfokuskan kebijakannya pada para pelaku usaha termasuk UMKM serta masyarakat. Kedua unsur tersebut dinilai berperan penting dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia.

The COVID-19 pandemic is also a major challenge for Indonesia's economy in 2020. In fact, the spread of COVID-19 in Indonesia is also massive and has claimed more than 33 thousand lives. The national economy contracted since the second quarter of 2020 at 5.32%.

To deal with these conditions, the Government has taken a number of measures to prevent the worse impact of this pandemic, both for public health and to save the national economy.

One of the big measures taken by the Government is to issue a Replacement Government Regulation Law Number 1 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Coronavirus Disease Pandemic 2019 (COVID-19) and/or in order to Deal with Threats That Endanger the National Economy and/or Financial System Stability (Perppu 1/2020) which is then passed into Law No. 2 of 2020 on State Financial Policy and Financial System Stability for Handling of COVID-19 Pandemic.

The issuance of perppu is intended to provide protection for people lives who are threatened by the spread of COVID-19, both in terms of life safety, as well as social life and economic life of the community.

The issuance of Perppu 1/2020 is a manifestation of the country's presence in order to deal with the COVID-19 pandemic issue. Through Perppu 1/2020, the Government can establish extraordinary policies and measures in the field of state finance as well as forward-looking anticipatory measures against the threat of economic deterioration and threats of financial system stability in line with uncertainty and never-ending spread of COVID-19.

The Government also issued PP No. 23 of 2020 concerning National Economic Recovery (PEN) program which is a series of activities for national economic recovery that is part of the state's financial policy implemented by the Government to accelerate the handling of Coronavirus Disease 2019 pandemic (COVID19) and/or deal with threats that endanger the national economy and/or financial system stability and to save the national economy.

PEN program aims to protect, maintain, and improve the economic capabilities of businesses in conducting their business. In implementing the PEN program, the central government focuses its policies on businesses including MSMEs and communities. Both elements are considered to play an important role in accelerating Indonesia's economic recovery.



Sejalan dengan langkah yang diambil Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah juga membuat berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, salah satunya adalah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Walau kebijakan ini kurang populer jika dilihat dari kaca mata ekonomi, namun kebijakan tersebut diyakini dapat menurunkan angka penyebaran COVID-19.

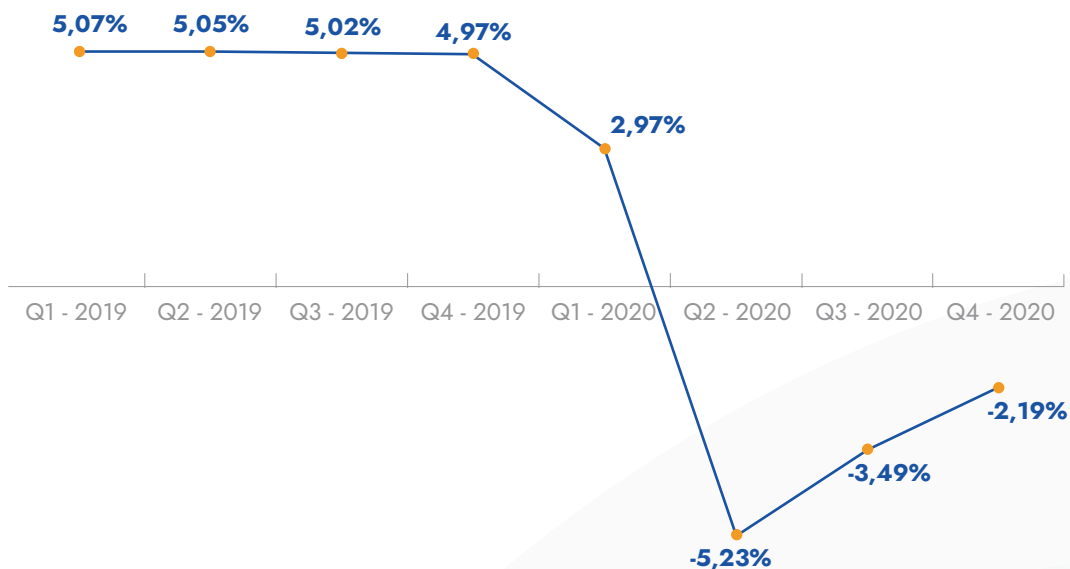
Melalui berbagai kebijakan tersebut, kinerja ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan kendati masih mengalami kontraksi. Hingga akhirnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 terealisasi sebesar -2,07%, turun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 5,02%.

In line with the steps taken by the Central Government, the Local Government also made various policies to break the chain of spread of COVID-19, one of which is by imposing a large-scale social restriction (PSBB) policy. Although this policy is less popular in the economic world, it is believed to reduce the number of spread of COVID-19.

Through these policies, Indonesia's economic performance began to show improvement despite the contraction. In the end, Indonesia's economic growth in 2020 was realized at -2.07%, decreased from 5.02% the previous year.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartalan (2019 - 2020)

Indonesia Quarterly Economic Growth Chart (2019 - 2020)



Sumber: BPS (diolah) | Source : BPS (processed)

Terlepas dari menurunnya kinerja ekonomi tahun 2020, Pemerintah berhasil mencatat sejumlah prestasi. Sepanjang tahun 2020, Pemerintah mampu menjaga tingkat inflasi pada level yang sangat rendah, yaitu sebesar 1,68%, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,72%. Tingkat inflasi tahun 2020 merupakan yang terendah sepanjang sejarah.

Selain itu, Indonesia juga masih berhasil mencatat surplus dalam neraca perdagangan. Sepanjang tahun 2020 Indonesia masih mencatatkan surplus 21,74 miliar dolar AS. Pencapaian tersebut didukung oleh total nilai ekspor yang sebesar 163,31 miliar Dolar AS dan total nilai impor di sepanjang tahun 2020 yang sebesar 141,5 miliar Dolar AS. Selain itu, Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga mampu menjaga kestabilan nilai tukar, khususnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Despite the decline in economic performance in 2020, the Government managed to record a number of achievements. Throughout 2020, the Government was able to maintain the inflation rate at a very low level of 1.68%, lower than the previous year of 2.72%. The inflation rate in 2020 is the lowest in history.

In addition, Indonesia still managed to record a surplus in the trade balance. Throughout 2020 Indonesia still recorded a surplus of USD21.74 billion. The achievement was supported by the total export value of USD163.31 billion and the total import value throughout 2020 of USD141.5 billion. In addition, the Government and Bank Indonesia (BI) are also able to maintain exchange rate stability, especially the rupiah against the US dollar.

ANALISIS INDUSTRI KEUANGAN DAN PENJAMINAN KREDIT

Financial Industry Analysis and Credit Guarantee

Kinerja industri perbankan sepanjang tahun 2020 turut terpengaruh dampak dari perlambatan ekonomi yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Kredit perbankan mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya. *Outstanding* kredit yang disalurkan bank sepanjang tahun 2020 mencapai sebesar Rp5.481,56 triliun atau turun -2,41% (yoy) dibandingkan kinerja kredit tahun 2019 yang tumbuh sebesar 6,08% (yoy).

Perlambatan ekonomi yang terjadi akibat pandemi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi turunnya penyaluran kredit pada tahun 2020. Pembatasan kegiatan membuat pelaku usaha cenderung menahan ekspansi bisnis dan investasinya. Untuk mendorong pertumbuhan kredit, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari sisi fiskal maupun moneter. Dari sisi moneter, Bank Indonesia telah memangkas bunga acuan BI7DRR sebesar 125 bps menjadi 3,75% dan melakukan injeksi likuiditas (*Quantitative Easing*) dalam jumlah besar mencapai Rp726,57 triliun atau 4,7% dari PDB.

Selain itu, dalam rangka memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, Bank Indonesia juga telah melakukan pembelian SBN dari pasar perdana melalui mekanisme pendanaan dan berbagi beban (*burden sharing*) dengan Pemerintah guna mendukung pembiayaan APBN 2020. Di sisi lain, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka menstabilkan nilai tukar Rupiah dari dampak volatilitas pasar keuangan global pada awal COVID-19 dengan melakukan intervensi nilai tukar dalam jumlah besar. Kebijakan makroprudensial juga dilonggarkan untuk mendukung ketersediaan likuiditas dan juga menjaga stabilitas sistem keuangan.

Untuk memperkuat stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan dari perbankan dan juga mempercepat digitalisasi sistem pembayaran melalui implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, percepatan reformasi pasar uang melalui Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, pengembangan ekonomi keuangan syariah dan UMKM sebagai sumber pertumbuhan baru ekonomi, serta penguatan kebijakan internasional.

Berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM tahun 2020 mencapai Rp1.021.493 miliar, mengalami penurunan 2,21% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.044.576 miliar.

The banking industry performance in 2020 was also affected by the economic slowdown caused by the COVID-19 pandemic. Banking lending contracted compared to the previous year. Outstanding loan disbursed by banks throughout 2020 reached IDR5,481.56 trillion, down -2.41% (yoy) compared to 6.08% (yoy) growth in 2019.

*The economic slowdown due to the pandemic is a major factor in decreasing lending in 2020. Restrictions on activities make businesses tend to withstand business expansion and investment. To boost credit growth, the government has issued various policies both fiscally and monetarily. From the monetary side, Bank Indonesia has cut the benchmark BI-7 Days Rate by 125 bps to 3.75% and conducted a large liquidity injection (*Quantitative Easing*) amounting to IDR726.57 trillion or 4.7% of GDP.*

In addition, in order to strengthen coordination between fiscal and monetary policy, Bank Indonesia has also purchased SBN from the primary market through a burden sharing and funding mechanism with the Government to support State Budget financing in 2020. On the other hand, Bank Indonesia has also issued a policy in order to stabilize the Rupiah exchange rate from the impact of global financial market volatility at the beginning of COVID-19 by intervening in large amounts of exchange rates. Macroprudential policy is also loosened to support liquidity availability and also maintain financial system stability.

To strengthen stability and support national economic recovery, Bank Indonesia encourages lending and financing from banks and also accelerates the digitization of payment systems through the implementation of the 2025 Indonesia Payment System Blueprint (BSPI), accelerated money market reform through the Money Market Development Blueprint (BPPU) 2025, sharia financial economic development and MSMEs as a new source of economic growth, and strengthening international policy.

Based on Indonesian Banking Statistics data released by the Financial Services Authority (OJK), loans disbursed by banks to MSMEs in 2020 reached IDR1,021,493 billion, a decrease of 2.21% from the previous year of IDR1,044,576 billion.



Penyaluran

Secara umum dapat dikatakan bahwa pertumbuhan industri penjaminan kredit akan sangat tergantung pada pertumbuhan penyaluran kredit oleh Lembaga Keuangan. Selain itu, bisnis penjaminan kredit juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan dari lembaga keuangan dalam hal memenuhi kebutuhan untuk melakukan pengalihan risiko (*shifting risk*), serta kemampuan dari perusahaan penjaminan itu sendiri dalam menawarkan benefit produk pada tingkat harga yang efisien.

Berdasarkan data OJK, jumlah perusahaan penjaminan per posisi 2020 adalah sebanyak 20 perusahaan, dengan gambaran posisi keuangan sebagaimana dalam tabel berikut:

Distribution

In general, it can be said that the growth of the credit guarantee industry will depend heavily on the growth of lending by financial institutions. In addition, the credit guarantee business is also influenced by policy factors from financial institutions to meet the needs of shifting risk, as well as the ability of guarantee companies in offering product benefits at an efficient price level.

Based on OJK data, the number of guarantee companies per position in 2020 is as many as 20 companies, with an overview of financial positions as in the following table:

Keterangan Information	Jumlah Industri (Unit) Number of Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR billion)
Perusahaan BUMN <i>State-Owned Enterprises</i>	1	18.442	8.010	10.432
Perusahaan Penjaminan Daerah <i>Local Guarantee Company</i>	18	3.068	1.175	1.893
Perusahaan Penjaminan Swasta <i>Private Guarantee Company</i>	1	604	430	174
JUMLAH TOTAL	20	22.114	9.615	12.499

Sumber : OJK | Source : FSA

Sedangkan kinerja operasional perusahaan penjaminan selama tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

While the operational performance of the guarantee company during 2019 and 2020 is as follows:

Keterangan Information	2020	2019	dalam miliar Rupiah in billion Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	%
Outstanding penjaminan - usaha produktif <i>Outstanding guarantee - productive business</i>	153.800	132.890	20.910	15,73%
Outstanding penjaminan - usaha non produktif <i>Outstanding guarantee - non-productive business</i>	100.874	105.109	(4.235)	(4,03%)
Total Outstanding Penjaminan <i>Total Outstanding Guarantee</i>	254.674	238.000	16.674	7,01%
Gearing ratio - usaha produktif (kali) <i>Gearing ratio - productive business (times)</i>	12	10	2	20,00%

Keterangan Information	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Selisih Difference	%
Gearing ratio - usaha non produktif (kali) <i>Gearing ratio - non productive business (times)</i>	8	8	0	0,00%
Gearing ratio total (kali) <i>Gearing ratio total (times)</i>	20	17	3	17,65%
Imbal jasa penjaminan <i>Guarantee Fee</i>	2.892	2.205	687	31,16%
Klaim dibayar <i>Guarantee Fee</i>	7.047	1.877	5.170	275,44%
Jumlah terjamin (ribu orang) <i>Total Guaranteed (thousand people)</i>	15.434	13.460	1.974	14,67%

Sumber : OJK | Source : OJK

Tahun 2020, di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang tengah menurun, industri penjaminan masih dapat membukukan pertumbuhan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan data yang dirilis OJK, total *outstanding* penjaminan mencapai Rp254.674 miliar, meningkat 7,01% dari tahun sebelumnya Rp238.000 miliar.

In 2020, amidst declining economic and business conditions, the guarantee industry can still record good performance growth. Based on data released by OJK, total outstanding guarantee reached IDR254,674 billion, an increase of 7.01% from the previous year of IDR238,000 billion.





TINJAUAN OPERASIONAL

Operational Review



STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA

Business Development Strategy

Pada tahun 2020, Perusahaan lebih fokus pengembangan dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses melalui teknologi informasi/otomasi dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif serta memanfaatkan pengetahuan sebagai faktor pendorong yang mendukung keputusan bisnis, sesuai dengan tema RKAP Perusahaan tahun 2020 yaitu, *Strengthen Capability Towards Technology-based & Knowledge-driven Organization*. Lebih lanjut, pencapaian perusahaan berdasarkan arahan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Portofolio Produk Eksisting, Baru, dan Kolaborasi BUMN Berorientasi pada Profitabilitas

PT Jamkrindo ikut terlibat dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Penjaminan Kredit Modal Kerja PEN untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Program ini dijalankan pemerintah sebagai stimulus untuk menggerakkan perekonomian yang terdampak pandemi COVID-19. Selain itu, Perusahaan menjalin kerja sama kolaborasi dengan BUMN, Himbara, Himpara dan Non bank lainnya, telah terdapat penandatanganan MoU Kolaborasi BUMN antara Jamkrindo dan BUMN lainnya dalam rangka kolaborasi BUMN. Kemudian terdapat realisasi Perjanjian Kerja sama dengan PT Amarta Mikro Fintek tentang Penjaminan Pembiayaan Modal Kerja (kelompok) yang merupakan Penjaminan Kredit Mikro melalui lembaga *fintech* yaitu PT Amarta.

Rencana perusahaan untuk menutup Unit Usaha Syariah (Desk Penjaminan Syariah) sudah mendekati tahapan akhir dimana tahapan untuk pembuatan kajian sudah dilakukan pada tahun 2019, konfirmasi kepada Penerima Jaminan sudah dilakukan. Pada saat ini sedang dilakukan *cleansing data*, proses *phase out* direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2020.

2. Memperkuat Portofolio Usaha dan Investasi

Perusahaan akan melakukan penyertaan modal kepada anak perusahaan "PT Jamkrindo Syariah" terkait dengan penutupan Unit Usaha Syariah. Divisi Keuangan & Investasi telah melakukan koordinasi dengan Divisi Bisnis untuk dilakukan analisa optimalisasi resiprokal deposito baik secara *on desk* atau *on the spot*, sehingga selain mendapatkan bunga deposito, perusahaan juga mendapatkan imbal jasa penjaminan. Perusahaan juga melakukan rekomposisi portofolio dengan fokus pada instrumen investasi pendapatan tetap.

In 2020, the Company is more focused on development by improving the efficiency and effectiveness of processes through information technology/automation and the creation of a conducive work environment and utilizing knowledge as a driving factor that supports business decisions, in accordance with the theme of the Company's RKAP in 2020 namely, Strengthen Capability Towards Technology-based & Knowledge-driven Organization. Furthermore, the Company's achievements based on the strategy directions are as follows:

1. *Strengthen existing and new portfolios, and SOEs Synergies with profitability-oriented product*

PT Jamkrindo is involved in the National Economic Recovery (PEN) program through PEN Working Capital Loan Guarantee for micro, small, and medium enterprises. This program is run by the government as a stimulus to encourage the economy affected by the COVID-19 pandemic. In addition, the Company establishes collaboration with BUMN, Himbara, Himpara and other non-banks, there have been signatories of the MoU of SOE Collaboration between Jamkrindo and other SOEs in order to SOEs Synergy. Then there is the realization of cooperation agreement with PT Amarta Mikro Fintek on Working Capital Financing Guarantee (group) which is a Micro Credit Guarantee through fintech institutions namely PT Amarta.

The Company's plan to close the Sharia Business Unit (Sharia Assurance Desk) is nearing the final stage where the stage for making study has been conducted in 2019, confirmation to the Guarantee Recipient has been done. Currently cleansing data is being conducted, and the phase out process is planned to be implemented by the end of 2020.

2. *Strengthening Business Portfolio and Investment*

The Company will invest capital in its subsidiary "PT Jamkrindo Syariah" in connection with the closure of sharia business units. The Finance & Investment Division has been coordinating with Business Division to analyze the optimization of reciprocal deposits either on desk or on the spot, so that in addition to obtaining deposit interest, the Company also gets guarantee services return. The Company also re-compositions the portfolio with focus on fixed income investment instruments.

3. Memperkuat dan Mengembangkan Jejaring Kemitraan untuk Penetrasi dan Perluasan Pasar

Meningkatkan jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dikerjasamakan dengan mitra dalam penyaluran KUR maupun KPRS. Adapun PKS KUR yang telah ditandatangani selama triwulan I tahun 2020 yaitu PKS dengan Bukopin, PT BRI Agroniaga, PT BPD Jatim.

Rencana kerja sama dengan PT Pegadaian untuk Penjaminan produk Pinjaman Modal Produktif (*Invoice Financing*). Kemudian adanya rencana pembaharuan PKS Penjaminan Pinjaman Perorangan dan Pensiunan dengan KSP Nusantara (KOPNUS). Sedangkan untuk mengakomodir permintaan pasar atas produk penjaminan yang belum tersedia, saat ini Jamkrindo sedang mengembangkan *market place guarantee*. Penguasaan pasar *suretyship* dilakukan dengan memperkuat jaringan *channel* penjualan penjaminan *suretyship* yang tersebar dengan skema SaKa-SaKi (Satu Kabupaten, Satu Kaki), dengan langkah kegiatan melakukan analisa permohonan *channel* penjualan baru dan perpanjangan.

4. Meningkatkan Preferensi Pelanggan Terhadap Produk Jamkrindo

Perusahaan terus berusaha meningkatkan preferensi mitra melalui pelaksanaan survey kepuasan pelanggan. Selain hal tersebut, untuk dapat meningkatkan *awareness* masyarakat mengenai Perusahaan, maka Perusahaan selalu terbuka untuk melakukan komunikasi pemasaran melalui konten media sosial yang dimiliki PT Jamkrindo, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube serta situs web PT Jamkrindo. Untuk mengenalkan perusahaan kepada mitra maupun masyarakat, perusahaan mengikuti beberapa award bergengsi seperti anugerah BUMN, Governance, Risk & Compliance Award dan CEO & Corporate Award, selain itu juga perusahaan mendapatkan penghargaan dari MURI sebagai perusahaan yang melakukan perubahan badan hukum tercepat serta penghargaan dari Iconomics untuk Direktur Utama sebagai The Best CEO 2020.

5. Meningkatkan Efektivitas dan Standardisasi Proses Kerja

Secara terus menerus prosedur/SOP dan kebijakan Perusahaan dilakukan penyempurnaan sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam mendukung proses bisnis perusahaan. Pada tahun 2019, perusahaan telah menyelesaikan 18 kebijakan dan prosedur/SOP baru maupun perubahan, antara lain tentang bisnis penjaminan, kebijakan investasi, *business continuity management* (BCM), penerapan manajemen risiko, manual akuntansi, dan master plan teknologi informasi. Selain itu Perusahaan juga terus memperkuat pengelolaan layanan klaim dengan *time accuracy in claim process* 12 hari kerja serta telah mereview kembali pembaharuan PKS dan penyempurnaan ketentuan internal terkait klaim.

3. *Strengthening and Developing Partnership Networks for Market Penetration and Expansion*

Increasing the number of Cooperation Agreements (MCC) that are cooperated with partners in the distribution of KUR and KPRS. The KUR Cooperation Agreements that has been signed during the first quarter of 2020 is the MCC with Bukopin, PT BRI Agroniaga, PT BPD Jatim.

Cooperation plan with PT Pegadaian for Guarantee of Productive Capital Loan (Invoice Financing) products. Then there is the plan to renew the MCC Guarantee of Individual and Pensioner Loans with KSP Nusantara (KOPNUS). As for accommodating market demand for guarantee products that are not yet available, Jamkrindo is currently developing a market place guarantee. The mastery of the suretyship market is carried out by strengthening the network of suretyship guarantee sales channels spread with the SaKa-SaKi scheme (One District, One Foot), by conducting an analysis activity on new sales channel applications and extensions.

4. *Increase Customer Preference for Jamkrindo Products*

The Company continuously strives to improve partner preferences through the implementation of customer satisfaction surveys. In addition, in order to increase public awareness about the Company, the Company is always open to conduct marketing communications through social media content owned by PT Jamkrindo, such as Instagram, Facebook, Twitter, and Youtube as well as PT Jamkrindo's web.

To introduce the Company to partners and public, the Company participated in several prestigious awards such as SOEs award, Governance, Risk & Compliance Award and CEO & Corporate Award, in addition the Company also received an award from MURI as the Company with the fastest legal entity change as well as an award from Iconomics for President Director as The Best CEO 2020.

5. *Improving The Effectiveness and Standardization of Work Processes*

The Company's continuously improves procedures/SOPs and policies so that it can be more effective and efficient in supporting the Company's business processes. In 2019, the Company has completed 18 new policies and procedures/SOPs as well as changes, among others, about the guarantee business, investment policy, Business Continuity Management (BCM), the application of risk management, accounting manuals, and information technology master plans. In addition, the Company also continues to strengthen the management of claims services with time accuracy in claim process 12 working days and has reviewed the renewal of MCC and improvement of internal provisions related to claims.



6. Meningkatkan Efisiensi Proses Internal dan Eksternal dengan Berbasis IT & Otomasi
Perusahaan juga telah mengembangkan dashboard kinerja perusahaan dan unit kerja untuk fungsi bisnis, antara lain Divisi Penunjang Bisnis telah membuat Aplikasi Sistem Informasi Performa Penjaminan (SIPP) dan Divisi Klaim telah membuat aplikasi *Claim Monitoring Service* (CMS). Dalam penagihan piutang IJP, piutang reasuransi, pengajuan reasuransi, dan piutang *co-guarantee*, Divisi Teknologi Informasi dan Divisi Teknik Administrasi Bisnis telah mengembangkan aplikasi monitoring piutang IJP KUR Gen 2. Selain itu, sedang dilakukan pengembangan terhadap aplikasi pengelolaan mitigasi risiko bisnis penjaminan.
7. Meningkatkan Kinerja Bisnis Melalui Pemanfaatan *Machine Learning*
Pada sasaran strategis meningkatkan kinerja bisnis melalui pemanfaatan *machine learning* perusahaan memiliki program untuk mengembangkan *machine learning* dengan pendekatan DWHBI untuk prediksi IJP, Klaim, Subrogasi. Pada tahun 2020 juga perusahaan mengenalkan *machine learning* kepada seluruh karyawan melalui program *Training of the Trainers* (TOT).
8. Mengoptimalkan Peningkatan dan Pembinaan UMKMK untuk peningkatan *Market Share*
Dalam upaya meningkatkan peran pendampingan dan konsultasi manajemen terhadap UMKM, Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melakukan pendampingan bagi UMKM Terjamin dan Calon Terjamin untuk menjadi UMKM Binaan pada masing-masing Kantor Wilayah/Kantor Cabang. Sehubungan dengan terjadinya pandemi virus COVID-19, maka untuk melaksanakan kegiatan seminar UMKM melalui media online (webinar). Webinar pertama telah dilakukan di Kanwil V Semarang dengan tema menyusun laporan keuangan serta sosialisasi UMKM layak pada tanggal 18 Juni 2020.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah melakukan pelatihan dan sosialisasi UMKM berkerja sama dengan BNP2TKI dan Kemenkop juga pelatihan di Banyuwangi dan Mataram untuk meningkatkan jumlah UMKM binaan dan UMKM berperingkat.
9. Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas SDM
Guna memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sehingga meningkatkan produktivitas Perusahaan, maka Divisi MSDM telah melakukan penyusunan *HR Strategic Plan*. Divisi MSDM juga telah melakukan asesmen pejabat dan pengembangan karyawan secara terus menerus serta melakukan rekrutmen karyawan melalui Program Perekrutan Bersama BUMN dan juga melakukan rekrutmen tenaga kontrak *entry level hire* dari Program Magang Mahasiswa
6. *Improving Internal and External Process Efficiency with IT-Based & Automation*
The Company has also developed the Company's performance dashboard and work units for business functions, among others Business Support Division has created Guarantee Performance Information System Application (SIPP) and Claims Division has created Claim Monitoring Service (CMS) application. In the collection of IJP receivables, reinsurance receivables, reinsurance filings, and co-guarantee receivables, Information Technology Division and Business Administration Engineering Division have developed the IJP KUR Gen 2 receivables monitoring application. In addition, the Company also develops the risk mitigation management application for guarantee business.
7. *Improving Business Performance Through Machine Learning Utilization*
On strategic goals, the Company has an effort in improving business performance through machine learning utilization program by developing machine learning with DWHBI approach to IJP prediction, Claims, Subrogation. In 2020, the company also introduced machine learning to all employees through the Training of the Trainers (TOT) program.
8. *Optimizing the Rating and Development of MSMEs for market share improvement*
In an effort to increase the role of mentoring and consulting management to MSMEs, Risk Management and PUKM Division conduct assistance for MSMEs Guaranteed and Guaranteed Candidates to become Target MSMEs in each Regional/Branch Offices. In connection with the COVID-19 virus pandemic, so MSME seminar activities is conducted through online media (webinars). The first webinar was held at Kanwil V Semarang with the theme of preparing financial statements and socialization of eligible MSMEs on June 18, 2020.

Risk Management and PUKM Division has conducted training and socialization of MSMEs in collaboration with BNP2TKI and Ministry of Cooperatives as well as training in Banyuwangi and Mataram to increase the number of MSMEs partners and ranking.
9. *Improving Human Resources Competency and Productivity*
In order to strengthen existing Human Resources (HR) so as to increase the productivity of the Company, HR Management Division has conducted the preparation of HR Strategic Plan. HR Management division has also conducted official assessment and continuous employee development as well as employees recruitment through the SOEs Joint Recruitment Program and also recruited contract personnel for entry level hire from the Certified Student Internship Program to occupy

Bersertifikat untuk dapat menempati di unit kerja yang membutuhkan. Divisi MSDM telah melakukan Pendidikan dan pelatihan baik dengan pihak internal maupun eksternal untuk meningkatkan kompetensi SDM.

10. **Memperkuat Pengelolaan Pengetahuan Organisasi**
PT Jamkrindo mengembangkan *Knowledge Management (KM)* sebagai pusat informasi dan pengelolaan pengetahuan organisasi sehingga memudahkan karyawan dalam melakukan *sharing knowledge*. Saat ini, dalam proses penyempurnaan KM telah dilakukan audit KM oleh KM Plus. Selain itu, Divisi MSDM sedang dalam proses penyusunan konsep taksonomi pengetahuan perusahaan sehingga memudahkan dalam melakukan manajemen pengetahuan perusahaan. Beberapa konsep yang sedang disusun oleh Divisi MSDM guna dapat memperkuat pengelolaan pengetahuan organisasi, antara lain konsep dokumentasi *tacit knowledge* terkait *best practice* dan *lesson learned* yang dapat meningkatkan pengetahuan karyawan, konsep pengembangan *Collaborative Knowledge Sharing* sehingga dapat terselenggara secara konsisten.
11. **Meningkatkan Internalisasi Budaya Inovasi**
Dalam hal meningkatkan internalisasi budaya inovasi pada setiap karyawan, maka telah diselenggarakan lomba inovasi dan *lesson learned* yang diikuti oleh setiap Unit Kerja pada saat HUT PT Jamkrindo. Selain itu, sedang dalam penyusunan konsep Kebijakan Manajemen Inovasi oleh Divisi MSDM dan pembentukan *Tim Task Force* yang membidangi manajemen inovasi.
12. **Meningkatkan Budaya Sadar Risiko & Penerapan Prinsip Tariff (GCG)**
Perusahaan telah melakukan kerja sama dengan mitra dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan. Perumusan strategi untuk mendukung sasaran tersebut yaitu melakukan kerja sama dengan Dukcapil, Infobank dan Pefindo Biro Kredit. Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah membuat video edukasi manajemen risiko untuk meningkatkan pemahaman karyawan terhadap *risk awareness* agar lebih atraktif dan mudah dipahami. Selain itu divisi ini telah melakukan sosialisasi Manajemen Risiko bagi seluruh *Risk Owner* agar dapat meningkatkan kesadaran para *Risk Owner* terhadap fungsi dan peranan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan proses bisnis di Perusahaan.

the position in the relevant work unit. HR Management Division has conducted education and training with either internal and external parties to improve human resources competencies.

10. **Strengthening Organizational Knowledge Management**
PT Jamkrindo develops Knowledge Management (KM) as an information center and knowledge management organization so as to facilitate employees in sharing knowledge. Currently, KM Plus has conducted KM audit in process to improving KM. In addition, HR Management Division is in process to drafting the concept of corporate knowledge taxonomy, making it easier to manage the Company's knowledge. To strengthen the management of organizational knowledge, HR Management Division prepares some concepts among others, the documentation concept of tacit knowledge related to best practice and lesson learned that can improve employee knowledge, the development concept of collaborative knowledge sharing so that it can be held consistently.
11. **Improving The Internalization of Innovation Culture**
In terms to improve the internalization of innovation culture in every employee, there has been an innovation competition and lesson learned which is followed by each Work Unit at the anniversary of PT Jamkrindo. In addition, HR Management Division is preparing the concept of Innovation Management Policies and establish a Task Force Team to manage innovation.
12. **Improving Risk Aware Culture & Implementation of Tariff Principles (GCG)**
The Company has formulated strategy to strengthen the Company's risk management by cooperating with partners, among other with Dukcapil, Infobank and Pefindo Credit Bureau. The Risk Management and PUKM Division have created risk management education videos to improve employees' understanding of risk awareness to make it more attractive and easy to understand. In addition, this division has conducted Risk Management socialization for all Risk Owners in order to raise the Risk Owner awareness to the Risk Management functions and roles in implementing the Company's business processes.

Indonesia Financial Group

Tahun 2020, Perusahaan bergabung dalam *Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG)*. Hal ini mendorong Perusahaan untuk fokus kepada aspek komersial untuk meningkatkan laba perusahaan, dengan tetap memprioritaskan layanan kepada UMKM-K sesuai misi pendirian perusahaan. Fokus ini mendorong Perusahaan untuk bersikap

Indonesia Financial Group

In 2020, the Company joined the Holding of BUMN Insurance and Guarantee, Indonesia Financial Group (IFG). This encourages the Company to focus on commercial aspects to improve the company's profit, while prioritizing services to MSMEs in accordance with the company's founding mission. This focus encourages the Company to be professional, integrity and ethical in conducting



profesional, integritas dan beretika dalam melakukan operasional perusahaan, hal ini mencakup peningkatan kinerja dan tata kelola.

Dengan kapasitas penjaminan yang masih cukup besar, Perusahaan dapat melakukan penjaminan produk-produk kredit perbankan dan proyek infrastruktur yang lebih besar lagi, namun dengan besarnya penjaminan berpotensi tingkat klaim penjaminan meningkat sehingga perlu memperkuat analisis penjaminan untuk menghadapi ancaman tersebut. Selain itu, Perusahaan perlu meningkatkan kompetensi SDM terkait dalam meningkatkan produk kredit dan penjaminan, analisis risiko produk penjaminan, pengelolaan dan pembinaan UMKMK, pengelolaan investasi, pemasaran, kreativitas, inovasi, *business acumen*, dan pelayanan.

Holding berpotensi menjembatani bentuk pengaturan *playing field* yang disesuaikan dengan peraturan terkait, kondisi sektoral, azas mitigasi risiko, penetapan *investment guidelines* dan *pricing committee*. *Holding* BUMN Perasuransian dan Penjaminan ke depannya dapat memberikan *guidelines* mengenai *playing field* antar sesama anggota *Holding* terkait dengan penetrasi produk ke depannya, terutama terkait dengan isu *pricing war* di lini bisnis asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan pribadi, asuransi umum syariah, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan dan asuransi kredit. Sedangkan untuk *spreading risk* tercipta di lini bisnis reasuransi jiwa dan reasuransi umum.

Pembentukan *Holding* BUMN Perasuransi dan Penjaminan akan memberikan nilai tambah dari sisi pengembangan bisnis melalui kolaborasi antar anggota *Holding* , baik dari sisi pengembangan produk sampai dengan pengelolaan jalur distribusi perusahaan. Optimalisasi struktur organisasi melalui *Shared Services* dan sentralisasi juga dapat menjawab tantangan dari sisi standarisasi pelayanan internal dan perbaikan komposisi margin dengan adanya nilai tambah dari efisiensi.

Specialization dapat dilakukan oleh PT Jamkrindo karena berdasarkan pembagian bisnis *existing*, PT Jamkrindo tidak memiliki irisan dengan entitas-entitas lainnya, sehingga memiliki potensi untuk melakukan *specialization* pada segmen Penjaminan. Dengan melakukan *specialization*, keuntungan yang dapat diperoleh adalah:

- Fokus upaya pada satu segmen
- Pengembangan keahlian pada satu bidang
- *Research & Development* produk yang kuat
- Otonomi dalam pengembangan bisnis & strategi
- *Value Proposition* jelas bagi konsumen

the company's operations, this includes improving performance and governance.

With a large guarantee capacity, the Company can guarantee banking loan products and even larger infrastructure projects. But the amount of guarantee can potentially increase the level of guarantee claims, so a strong guarantee analysis is needed to deal with the threat. In addition, the Company needs to improve the competence of human resources to improve credit and guarantee products, risk analysis of guarantee products, management and coaching of MSMEs, investment management, marketing, creativity, innovation, business accrued, and services.

Holding has the potential to bridge the form of *playing field* arrangements that are adjusted to related regulations, sectoral conditions, risk mitigation principles, *investment guidelines* and *pricing committees*. *Holding* of SOEs Insurance and Guarantee in the future can provide *guidelines* on *playing field* among fellow *Holding* members related to product penetration in the future, especially related to the issue of *pricing war* in the business line of motor vehicle insurance, fire insurance, personal accident insurance, sharia general insurance, health insurance, education insurance and credit insurance. As for *spreading risk* created in the business line of life reinsurance and general reinsurance.

The establishment of *Holding* of SOEs Insurance and Guarantee will provide added value in terms of business development through collaboration between *Holding* members, both in terms of product development and management of the company's distribution channels. Optimization of organizational structure through *Shared Services* and centralization can also answer challenges in terms of internal service standardization and margin composition improvement with the added value of efficiency.

Specialization can be done by PT Jamkrindo because based on the existing business division, PT Jamkrindo does not have a slice with other entities, so it has the potential to specialize in the Guarantee segment. By doing *specialization*, the advantages that can be obtained are:

- Focus effort on one segment
- Development of expertise in one area
- Strong product research & development
- Autonomy in business development & strategy
- *Value Proposition* is clear to consumers

Pembentukan *Holding* diharapkan dapat menciptakan kolaborasi dan efisiensi bagi seluruh anggota dan induk. Berikut adalah potensi kolaborasi dan efisiensi yang dapat terjadi setelah terbentuknya *Holding* :

- Peningkatan Bunga Deposito
- Efisiensi Biaya Transaksi
- Efisiensi dari *Integrated Marketing Program*
- Efisiensi Pengadaan
- Efisiensi dengan *Shared Services*
- Efisiensi Beban Depresiasi dan Sewa
- Efisiensi Beban Klaim

The establishment of Holding is expected to create collaboration and efficiency for all members and parents. Here are the potential collaborations and efficiencies that can occur after the formation of holding:

- *Increased Deposit Interest*
- *Efficiency in Transaction Fee*
- *Efficiency of Integrated Marketing Program*
- *Efficiency of Procurement*
- *Efficiency with Shared Services*
- *Depreciation and Efficiency of Rental Expense*
- *Efficiency of Claims Expenses*

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspects

Jamkrindo turut menunjang program Pemerintah dibidang pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kegiatan usaha penjaminan atas kredit yang diberikan lembaga keuangan atau bukan keuangan, penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, bantuan konsultasi manajemen, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 2 tanggal 9 April 2020.

Jamkrindo also supports government programs in the development sector of Small, Medium Enterprises and Cooperatives through business activities in loan guarantees provided by financial or non-financial institutions, guarantees for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, management consulting assistance, and other guarantees as well as optimize the Utilization of The Company's resources based on good corporate governance principles as stipulated in the Company's Articles of Association Number 2, dated 09 April 2020.

Untuk itu, tahun 2020, di tengah kondisi krisis akibat pandemi COVID-19, Jamkrindo terus meningkatkan kegiatan pemasaran dengan menerapkan strategi sebagai berikut:

Therefore, in 2020, in the midst of the COVID-19 pandemic crisis, Jamkrindo continues to increase marketing activities by implementing the following strategies:

Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Kebijakan Policies
Memperkuat portofolio produk <i> existing </i> , baru, dan kolaborasi <i> Holding </i> dan BUMN berorientasi pada profitabilitas <i> Strengthen existing and new portfolios, and SOEs Synergies with profitability-oriented product </i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kelompok produk dengan profitabilitas tinggi didorong untuk bertumbuh <i> Product groups with high profitability are encouraged to grow </i> • Kelompok produk dengan profitabilitas rendah dapat dipertahankan bila secara teknikal dapat diperbaiki <i> Product groups with low profitability can be maintained when technically corrected </i> • Kolaborasi BUMN dilakukan pada produk dengan profitabilitas tinggi pada sektor industri yang potensial <i> Collaboration of SOEs is conducted on products with high profitability in the potential sector </i> • Pengembangan produk mengikuti strategi bisnis <i> Holding </i> dan regulasi yang berlaku <i> Product development follows Holding's business strategy and applicable regulations </i> • Penyelenggaraan bisnis penjaminan memperhatikan prinsip risiko/<i> prudent </i> <i> The guarantee business implementation takes into account the principle of risk/prudent. </i>



Inisiatif Strategis Strategic Initiatives	Kebijakan Policies
Memperkuat portofolio usaha dan investasi <i>Strengthening Business Portfolio and Investment</i>	<ul style="list-style-type: none"> Diversifikasi usaha harus terkait dengan bisnis inti perusahaan dan strategi bisnis Holding <i>Business diversification should be related to the Company's core business and Holding's business strategy</i> Pengelolaan portofolio usaha dan investasi memperhatikan prinsip prudent dan efektif <i>Business and investment portfolio management takes into account prudent and effective principles</i> Laba dari anak perusahaan digunakan sepenuhnya untuk memperkuat permodalan perusahaan tersebut sehingga dapat mendukung peningkatan kapasitas penjaminan <i>Profits from subsidiaries are used entirely to strengthen the Company's capital in order to support the increase in guarantee capacity</i>
Memperkuat & mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar <i>Strengthening and Developing Partnership Networks for Market Penetration and Expansion</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jejaring tidak dengan membuka unit kerja baru (milik Jamkrindo) <i>Network development by not opening new work units (owned by Jamkrindo)</i> Pengembangan jejaring menekankan kepada upaya anorganik <i>Network development emphasizes inorganic efforts</i> Pengembangan jejaring dengan memanfaatkan potensi Holding <i>Network development by leveraging the potential of Holding</i>
Meningkatkan preferensi pelanggan terhadap produk Jamkrindo <i>Increase Customer Preference for Jamkrindo Products</i>	<ul style="list-style-type: none"> Upaya peningkatan <i>brand preference</i> ditujukan kepada berbagai <i>stakeholder</i> secara berimbang dengan memperhatikan ketepatan media yang digunakan <i>Efforts to improve brand preference are aimed at various stakeholders in a balanced manner by considering the accuracy of media use</i> Upaya peningkatan <i>brand preference</i> dengan memanfaatkan kekuatan <i>branding Holding</i> <i>Efforts to increase brand preference by harnessing the power of Holding branding</i>
Meningkatkan loyalitas pelanggan & mitra melalui CRM <i>Increase customer & partner loyalty through CRM</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan hubungan ditujukan kepada penerima jaminan dan terjamin secara seimbang <i>Relationship management is aimed at guarantee recipients and guaranteed in a balanced manner</i> Pengelolaan hubungan dilakukan dengan memperhatikan prinsip etika dan kepatuhan <i>Relationship management is carried out with due regard to ethical and compliance principles</i>
Meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pelanggan berbasis TI <i>Improve the quality and coverage of IT-based customer service</i>	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan aplikasi berdasarkan prinsip <i>business case</i> (manfaat) yang dapat dipertanggungjawabkan <i>Application development based on the responsible business case (benefit) principles</i> Peningkatan kapabilitas IT bersama Holding <i>Improved IT capabilities with Holding</i>

Pangsa Pasar

Berdasarkan data OJK, pada bulan Desember 2020 tercatat sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yang bergerak di bidang industri penjaminan yang terdiri dari 1 (satu) Perusahaan BUMN yaitu PT Jamkrindo, 18 (delapan belas) Perusahaan Penjaminan Daerah, dan 1 (satu) Perusahaan Penjaminan Swasta.

Berikut adalah gambaran total aset, liabilitas, dan ekuitas industri penjaminan konvensional serta posisi Jamkrindo di industri.

Market Share

Based on data from OJK, in December 2020 there were 20 (twenty) companies engaged in the guarantee industry consisting of 1 (one) state-owned company, namely PT Jamkrindo, 18 (eighteen) Local Guarantee Companies, and 1 (one) Private Guarantee Company.

The following are total assets, liabilities, and equity of the conventional guarantee industry as well as Jamkrindo's position in the industry.

Keterangan Description	Jumlah Industri (Unit) Number of Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR billion)
Perusahaan BUMN State-Owned Enterprises	1	18.442	8.010	10.432
Perusahaan Penjaminan Daerah Local Guarantee Company	18	3.068	1.175	1.893

Keterangan Description	Jumlah Industri (Unit) Number of Industries (Unit)	Aset (miliar Rp) Assets (IDR billion)	Liabilitas (miliar Rp) Liabilities (IDR billion)	Ekuitas (miliar Rp) Equity (IDR billion)
Perusahaan Penjaminan Swasta Private Guarantee Company	1	604	430	174
Jumlah Total	20	22.114	9.615	12.499

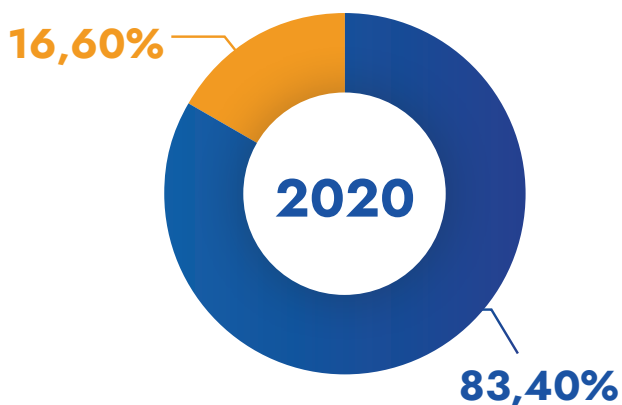
Sumber : OJK (diolah) | Source : OJK

Dari data sebagaimana tersebut di atas, Jamkrindo merupakan pemain dengan penguasaan aset, liabilitas dan ekuitas terbesar di industri penjaminan di Indonesia.

From the data above, Jamkrindo is the player with the largest assets, liabilities, and equity in the guarantee industry in Indonesia.

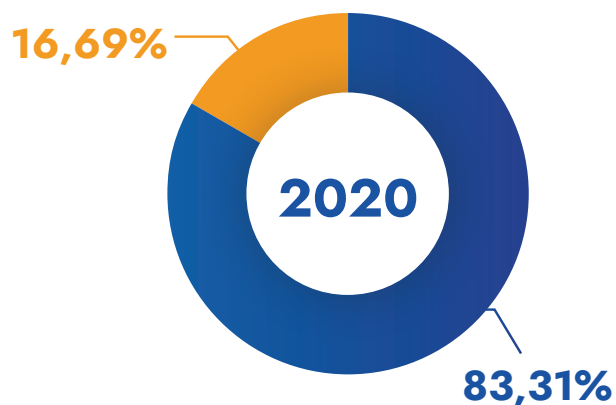
Aset

Asset



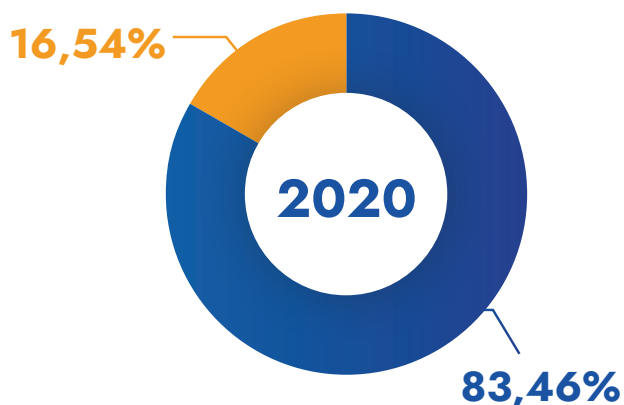
Liabilitas

Liabilities



Ekuitas

Equity



● Jamkrindo

● Pemain Lain
Other Companies

TINJAUAN PER SEGMENT USAHA

Review by Business Segment

Hingga akhir tahun 2020, di dalam laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan Perusahaan belum menerapkan PSAK No.5 tentang Segmen, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Perusahaan memiliki segmen operasi tunggal. Pembahasan segmen usaha dalam laporan ini dipisahkan berdasarkan sumber pendapatan Perusahaan yang terbagi dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu pendapatan imbal jasa penjaminan, pendapatan investasi dan pendapatan lain-lain.

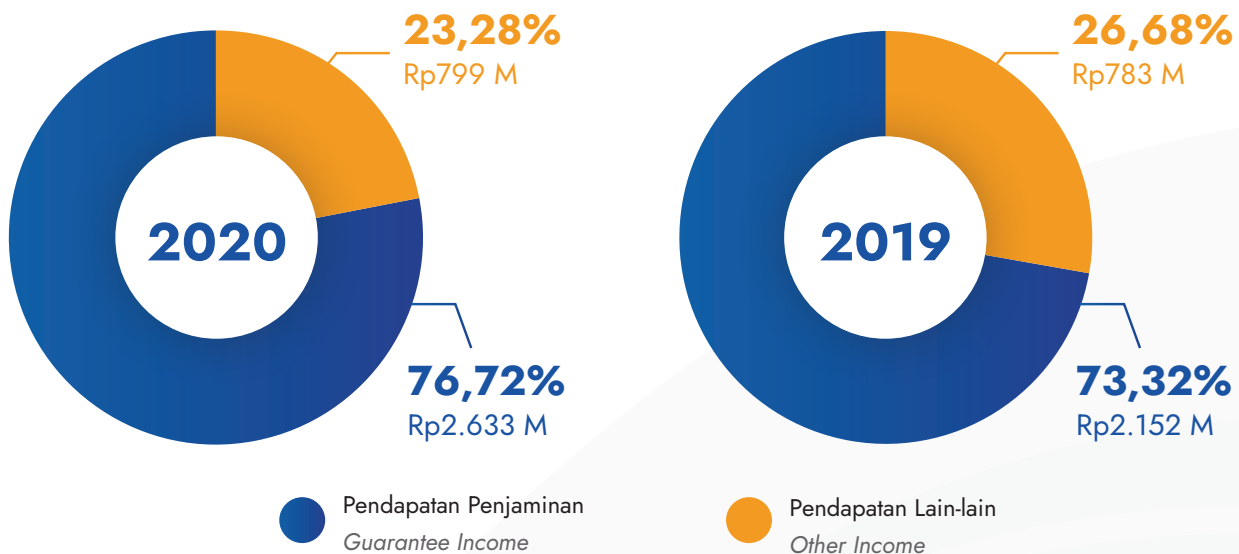
By the end of 2020, the Company's Financial Statements that have been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner Public Accounting Firm have not implemented PSAK No.5 on Segments, therefore it can be said that the Company has a single operating segment. The discussion of business segments in this report is separated based on the Company's revenue sources divided into 3 (three) large groups, namely guarantee fee, investment income and other income.

Komposisi pendapatan tahun 2020 dan 2019 dapat digambarkan sebagai berikut:

The composition of incomes in 2020 and 2019 can be described as follows:

Grafik Komposisi Pendapatan Jamkrindo 2019-2020

Jamkrindo Income Composition Chart 2019-2020



Komposisi pendapatan Perusahaan tahun 2020 masih didominasi oleh pendapatan penjaminan dengan pendapatan sebesar Rp2.633 miliar atau dengan kontribusi mencapai 76,72%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.152 miliar. Sedangkan kontribusi dari pendapatan investasi adalah sebesar 23,28% atau setara dengan Rp799 miliar. Kontribusi pendapatan investasi tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

The composition of the Company's income in 2020 is still dominated by guarantee income of IDR2,633 billion or with a contribution of 76.72%, increasing compared to the previous year of IDR2,152 billion. While the contribution of investment income is 23.28% or equivalent to IDR799 billion. The contribution of investment income in 2020 increased compared to the previous year.

PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN Guarantee Fee

Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Jamkrindo memberikan layanan penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi.

In accordance with Law Number 1 of 2016 on Guarantees, Jamkrindo provides credit or financing guarantee services provided by financial institutions to Micro Enterprises, Small Businesses, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives.

Jamkrindo telah menjalankan kegiatan penjaminan kredit baik berupa KUR maupun non KUR, yang disalurkan oleh perbankan (penjaminan bank), baik bank konvensional maupun bank syariah dan lembaga non bank (penjaminan non bank) yang diproses secara *case by case* maupun *conditional automatic cover*. Atas layanan tersebut, Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang tarifnya ditetapkan dengan pertimbangan paling sedikit:

Jamkrindo has been carrying out credit guarantee activities in the form of KUR and non KUR, which are channeled by banks (bank guarantees), both conventional banks and sharia banks and non-bank institutions (non-bank guarantees) that are processed on a case by case basis or conditional automatic cover. For these services, the Company obtains Guarantee Services (IJP) whose rates are determined with the least consideration:

1. Risiko yang dijamin, yang paling sedikit dihitung berdasarkan:
 - a. Rasio Klaim;
 - b. Jenis Kredit atau Pembiayaan;
 - c. Cakupan penjaminan; dan
 - d. Jangka waktu penjaminan;
2. Biaya administrasi umum, operasional, dan pemasaran
3. Keuntungan.

1. *Guaranteed risk, the least calculated based on:*
 - a. *Claim Ratio;*
 - b. *Type of Credit or Financing;*
 - c. *Coverage of guarantee; and*
 - d. *Guarantee period;*
2. *General administration, operational, and marketing costs*
3. *Advantages.*

Berikut adalah gambaran jumlah kredit yang dijamin oleh Jamkrindo pada tahun 2019 serta RKAP dan realisasi tahun 2020:

The following amounts of credit are guaranteed by Jamkrindo in 2019 as well as RKAP and realization in 2020:

Tabel Jumlah Kredit yang Dijamin Tahun 2019 - 2020

Table of Guaranteed Credits for 2019 - 2020

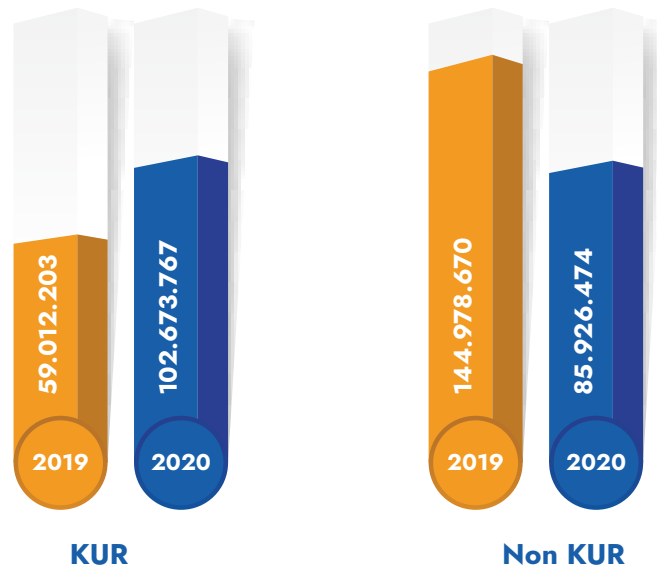
dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2020 2020 RKAP	Persentase Percentage	
	2020	2019		Capaian RKAP 2020 Achievements of RKAP 2020	Pertumbuhan/ Penurunan Increase/ Decrease
KUR KUR	102.673.767	59.012.203	95.000.000	108,08%	73,99%
Non KUR Non KUR	85.926.474	144.978.670	90.515.411	94,93%	(40,73%)
Total Kredit Total Credits	188.600.240	203.990.873	170.515.411	110,61%	(7,54%)



Jumlah Kredit yang Dijamin Tahun 2019 - 2020 (Rp-juta)

Number of Guaranteed Credits for 2019 - 2020 (IDR-million)



Total kredit yang dijamin Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp188.600 miliar, turun 7,54% dari tahun sebelumnya Rp203.991 miliar. Namun demikian, pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada RKAP 2020 sebesar Rp170.515 miliar atau dengan pencapaian sebesar 110,61%.

Total loans guaranteed by the Company in 2020 reached IDR188,600 billion, decreased 7.54% from the previous year of IDR203,991 billion. However, this achievement exceeded the target set in RKAP 2020 of IDR170,515 billion or reached 110.61%.

Penurunan penjaminan kredit tersebut utamanya disebabkan turunnya penjaminan untuk produk Non KUR dari Rp144.979 miliar di tahun 2019 menjadi Rp59.012 miliar di tahun 2020.

The decrease in credit guarantee was mainly due to the decrease in guarantees for Non KUR products from IDR144,979 billion in 2019 to IDR59,012 billion in 2020.

Dari kredit yang dijamin di tahun 2020 Perusahaan memperoleh IJP sebesar Rp3.200 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 26,51% dibandingkan tahun sebelumnya Rp2.529 miliar. Pencapaian tersebut setara dengan 116,91% dari target RKAP yang ditetapkan sebesar Rp2.737 miliar.

From the credit guaranteed in 2020 the Company obtained IJP of IDR3,200 billion. This amount increased by 26.51% compared to the previous year of IDR2,529 billion. The achievement is equivalent to 116.91% of the RKAP target set at IDR2,737 billion.

Tabel Imbal Jasa Penjaminan Tahun 2019 - 2020

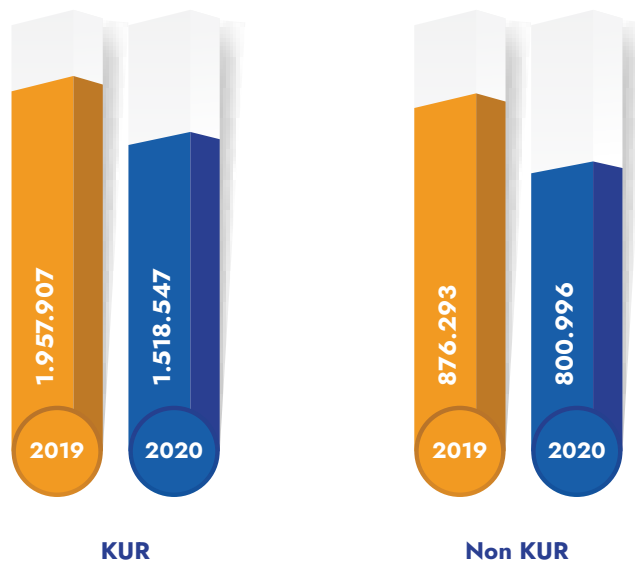
Table of Guarantee Fee for Years 2019 - 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2020 2020 RKAP	Persentase Percentage	
	2020	2019		Capaian RKAP 2020 Achievements of RKAP 2020	Pertumbuhan/ Penurunan Increase/ Decrease
KUR KUR	1.957.907	1.518.547	1.679.551	116,57%	28,93%
Non KUR Non KUR	868.617	795.064	1.057.551	82,13%	9,25%
Total Imbalan Jasa Penjaminan Total Guarantee Fee	2.826.524	2.313.611	2.737.025	103,27%	22,17%

Grafik Imbal Jasa Penjaminan Bruto 2019 - 2020 (Rp-juta)

Gross Guarantee Fee Chart 2019 - 2020 (IDR-million)



Penjaminan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program prioritas pemerintah dalam mendukung UMKM berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha, dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dilaksanakannya program KUR antara lain adalah untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Karena perannya yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional, pemerintah terus mendorong penyaluran KUR. Hal ini dapat dilihat dari plafond KUR yang terus ditingkatkan oleh pemerintah.

Tahun 2020 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp102.670 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp59.012 miliar yang diberikan kepada 3.426.288 debitur.

KUR Guarantee

Kredit Usaha Rakyat (KUR) is the government's priority program in supporting MSMEs in the form of policies to provide working capital loan/financing and/or investment to individual debtors, business entities, and/or business groups that are productive and viable, but do not yet have additional collateral or additional collateral is not enough. The objectives of KUR program include improving and expanding to financing access to productive businesses, improving the competitiveness capacity of micro, small and medium enterprises (MSMEs) and encouraging economic growth and absorption of labor.

The government continues to encourage the distribution of KUR because of its very important role in supporting the national economy. This can be seen from the allocation of KUR funds that continues to be improved by the government.

In 2020 the realization of KUR distribution reached IDR102,670 billion, increasing compared to the previous year of IDR59,012 billion given to 3,426,288 debtor.



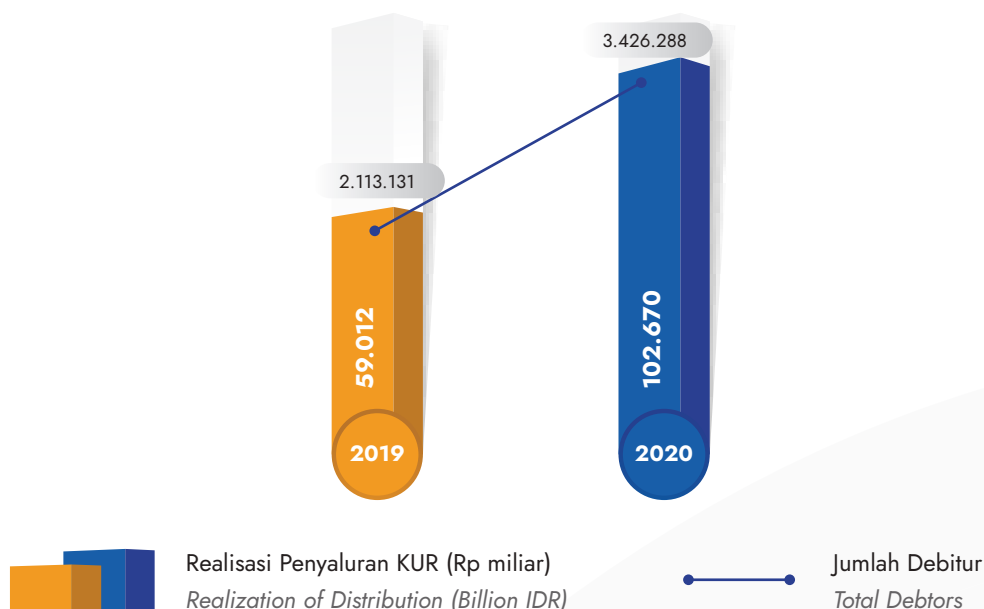
Tabel Realisasi Penyaluran KUR 2019 – 2020

KUR Distribution Realization Table 2019 – 2020

Uraian Description	2020	2019	dalam miliar Rupiah in billion Rupiah	
			Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp IDR	%
Realisasi Penyaluran (miliar Rupiah/plafond) Realization of Distribution (billion Rupiah/Allocation of Funds)	102.670	59.012	43.658	73,98%
Jumlah Debitur Total Debtors	3.426.288	2.113.131	1.380.124	29,18%

Grafik Realisasi Penyaluran KUR 2019 - 2020

Graph of KUR Distribution Realization 2019 - 2020



Jamkrindo memberikan layanan penjaminan KUR dengan dana PMN yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sesuai dengan Inpres No.6 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor: 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat. Program Penjaminan KUR tersebut bekerja sama dengan beberapa bank pelaksana yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN serta Bank BPD, Multifinance dan Koperasi yang mendapat penugasan untuk penyaluran KUR.

Penjaminan KUR diperuntukkan bagi UMKM untuk jenis KUR Mikro (maksimal Rp25 juta), KUR Kecil/Khusus (maksimal sebesar Rp500 juta), KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ("TKI") ditetapkan maksimal sebesar Rp25 juta dengan sistem penjaminan secara *conditional automatic cover* (CAC), dengan Imbal Jasa Penjaminan ("IJP") yang ditanggung oleh pemerintah.

Jamkrindo provides KUR guarantee services with PMN funds implemented since 2007 in accordance with Presidential Decree No.6 of 2007 and Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs of the Republic of Indonesia Number: 170 of 2015 concerning the Executing Bank and the KUR Guarantor Company. The KUR Guarantee Program cooperates with several bank operators, namely Bank Mandiri, BRI, BNI, and BTN as well as Bank BPD, Multifinance and Cooperatives who are assigned to kur distribution.

KUR guarantee is intended for MSMEs with various types of KUR, among others KUR Micro (maximum IDR25 million), KUR Small/Special (maximum of IDR500 million), KUR Placement of Indonesian Workers ("TKI") is set a maximum of IDR25 million with a conditional automatic cover guarantee system (CAC), with guarantee fees ("IJP") borne by the government.

Pendapatan IJP atas penjaminan KUR dicatat sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Nomor 22/PMK.05/2010 tanggal 12 Februari 2010 tentang Perubahan kedua atas PMK Nomor 135/OMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR, tarif IJP disesuaikan menjadi 3,25% X plafond kredit/pembiayaan X 70% atau sebesar 2,275%.

Tantangan Penjaminan KUR

Pandemi COVID-19 telah membuat kondisi perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Hal tersebut juga berdampak pada bisnis di sektor UMKM yang juga mengalami penurunan. Dampaknya, pelaku UMKM tidak dapat membayarkan angsuran kepada bank penyalur KUR dikarenakan usahanya tidak berjalan dengan baik sehingga menyebabkan meningkatnya nilai kredit bermasalah (NPL) karena krisis ekonomi akibat *pandemic* COVID-19.

Dengan naiknya tingkat NPL pada bank penyalur KUR, maka angka permohonan klaim kepada perusahaan penjamin KUR juga mengalami kenaikan.

Strategi Penjaminan KUR

Menghadapi tantangan di tahun 2020, strategi yang dijalankan Perusahaan di segmen Penjaminan KUR antara lain:

1. Tetap melakukan koordinasi dengan *stakeholder* dan regulator yang menaungi Program KUR
2. Mendukung program pemerintah terkait program penyelamatan debitur KUR
3. Melakukan pembaharuan kerja sama sesuai dengan Permenko yang diterbitkan oleh regulator KUR guna menyelamatkan debitur KUR yang terdampak *pandemic* COVID-19
4. Bersama dengan bank penyalur KUR melakukan sosialisasi kebijakan KUR baik secara online maupun offline tetapi tetap mengutamakan protokol kesehatan yang berlaku

Sesuai anjuran Pemerintah, tahun 2020 Perusahaan tidak melakukan penyesuaian tarif IJP, kecuali untuk jenis KUR baru yaitu KUR Super Mikro yang dirancang untuk masyarakat dengan tarif Imbal Jasa Penjaminan sebesar 2%.

IJP's revenue on KUR guarantee is recorded in accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee Facilities and Number 22/PMK.05/2010 dated February 12, 2010 concerning the second amendment to PMK No. 135/OMK.05/2008 concerning KUR guarantee facilities, IJP rate adjusted to 3.25% X loan/financing limit X 70% or 2.275%.

KUR Guarantee Challenges

The COVID-19 pandemic has caused economic conditions in Indonesia to deteriorate. It also has an impact on businesses in the MSME sector which is also experiencing a decline. MSME actors cannot pay installments to KUR channel banks because their businesses are not running well, resulting in an increase in the value of non-performing loans (NPLs) due to the economic crisis caused by the COVID-19 pandemic.

With the increase in NPL rate at KUR channel banks, the number of claims requests to KUR guarantor companies also increased.

KUR Guarantee Strategies

Facing challenges in 2020, the Company's strategy in the KUR Guarantee segment includes:

1. *Continue to coordinate with stakeholders and regulators who oversee the KUR Program*
2. *Support government programs related to saving KUR debtors*
3. *Renew cooperation in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives as a KUR regulator to save KUR debtors affected by the COVID-19 pandemic*
4. *Socialize KUR policy together with bank whose channeling KUR both online and offline but still prioritize the prevailing health protocol*

As advised by the Government, in 2020 the Company does not make adjustments to IJP tariffs, except for the new type of KUR, KUR Super Micro designed for public with a guarantee service rate of 2%.



Kinerja Penjaminan KUR

Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pada tahun 2020 berhasil mencapai volume penjaminan sebesar Rp102.674 miliar atau 47% dari total *outstanding* penjaminan di industri.

KUR Guarantee Performance

Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) that has the task and authority to conduct business activities in the field of development of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs). In 2020, the Company managed to achieve a guarantee volume of IDR102.674 billion or 47% of the total outstanding guarantee in the industry.

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP KUR Tahun 2019 - 2020

Table of Guarantee Value and IJP KUR for 2019 - 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization		RKAP Tahun 2020 2020 RKAP	Persentase Percentage	
	2020	2019		Capaian RKAP 2020 Achievements of RKAP 2020	Pertumbuhan/ Penurunan Increase/ Decrease
Penjaminan KUR KUR Guarantee	102.673.767	59.012.203	95.000.000	128,34%	73,99%
IJP KUR IJP KUR	3.096.491	1.696.651	1.617.375	191,45%	82,51%

Realisasi penjaminan KUR tahun 2020 adalah sebesar Rp102.674 miliar atau mencapai 128,34% dari anggaran dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp95.000 miliar. Dibandingkan tahun 2019, realisasi penjaminan KUR meningkat 73,99% dimana tahun 2019 penjaminan KUR adalah sebesar Rp59.012 miliar. Sedangkan pendapatan IJP KUR adalah sebesar Rp3.096 miliar atau 191,45% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp1.617 miliar. Pendapatan IJP KUR tahun 2020 juga meningkat 82,51% dari tahun sebelumnya Rp1.697 miliar.

The realization of KUR guarantee in 2020 amounted to IDR102,674 billion or reached 128.34% of the budget in RKAP 2020 amounting to IDR95,000 billion. Compared to 2019, the realization of KUR guarantee increased by 73.99% where in 2019 KUR guarantee was IDR59,012 billion. Meanwhile, IJP KUR's income was IDR3,096 billion or 191.45% of the target set in RKAP 2020 of IDR1,617 billion. IJP KUR's income in 2020 also increased 82,51% from the previous year of IDR1,697 billion.

Tabel Laba Rugi Penjaminan KUR 2019 - 2020

Profit and Loss Table of KUR Guarantee in 2019 - 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net-Guarantee Fee	1.827.359	1.497.240	330.119	22,05%
Beban Klaim Claim Expenses	1.633.616	1.095.449	538.167	49,13%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	193.743	401.791	(208.048)	(51,78%)
Pendapatan Investasi Investment Income	652.796	573.897	78.899	13,75%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Rp	%
Beban Usaha Operating Expenses	(617.809)	(675.125)	(57.316)	(8,49%)
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	2.133	(134.779)	136.912	101,58%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	230.863	165.785	65.078	39,25%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(75.631)	17.273	(92.904)	(537,86%)
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	155.232	183.058	(27.826)	(15,20%)

Tahun 2020, dari penjaminan KUR Perusahaan memperoleh Imbal Jasa Penjaminan Bersih sebesar Rp1.827 miliar, meningkat Rp303 miliar atau 22,05% dari tahun 2019 sebesar Rp1.497 miliar. Beban klaim yang dibukukan Perusahaan juga mengalami peningkatan menjadi Rp1.634 miliar atau meningkat 49,13% dari tahun sebelumnya Rp1.095 miliar, sehingga Perusahaan membukukan penjaminan bersih sebesar Rp194 miliar, turun 51,78% dari tahun 2019 sebesar Rp402 miliar.

In 2020, the Company's KUR guarantee obtained a Net Guarantee Fee of IDR1,827 billion, an increase of IDR303 billion or 22.05% from 2019 of IDR1,497 billion. The company's claim expenses also increased to IDR1,634 billion or increased 49.13% from the previous year of IDR1,095 billion, resulting in the Company posting a net guarantee of IDR194 billion, a decrease of 51.78% from 2019 of IDR402 billion.

Di tahun 2020, Perusahaan mampu menekan beban usaha menjadi Rp618 miliar atau turun 8,49% dari tahun sebelumnya Rp675 miliar. Namun demikian, tahun 2020 Perusahaan membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp2 miliar, melonjak signifikan dimana tahun sebelumnya Perusahaan membukukan beban lain-lain sebesar Rp135 miliar, sehingga laba sebelum pajak yang dibukukan Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp231 miliar, naik 101,58% dari tahun sebelumnya Rp534 miliar.

In 2020, the Company was able to reduce operating expenses to IDR618 billion or decreased 8.49% from the previous year of IDR675 billion. However, in 2020 the Company recorded other income of Rp2 billion, a significant increase where the previous year the Company recorded other expenses of Rp135 billion,, resulting in the Company's income before tax in 2020 reaching IDR231 billion, increased 101.58% from the previous year of IDR534 billion.

Setelah membukukan pajak kini sebesar Rp76 miliar, pada tahun 2020 Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan dari penjaminan KUR sebesar Rp155 miliar, turun 15,20% dari tahun sebelumnya Rp183 miliar.

After posting a tax of IDR76 billion, in 2020 the Company managed to book a current year income from KUR guarantee of IDR155 billion, decreased 15.20% from the previous year of IDR183 billion.

Penjaminan Non KUR

Selain produk penjaminan KUR, Jamkrindo juga memiliki beragam produk lainnya diluar KUR seperti penjaminan distribusi barang, FLPP, keagenan kargo, konstruksi, kontra bank garansi, KPR, kredit mikro, kredit otomotif, kredit umum, *surety bond*, *payment bond*, pembiayaan *invoice*, kredit super mikro, keagenan kargo, Resi Gudang, *Capital management Guarantee* (CMG) dan lain-lain.

Non KUR Guarantee

In addition to KUR guarantee products, Jamkrindo also has a variety of other products outside KUR such as goods distribution guarantees, FLPP, cargo agency, construction, counter-bank guarantees, mortgages, microcredit, automotive credit, general credit, surety bonds, payment bonds, invoice financing, super micro credit, Warehouse Receipt, Capital management Guarantee (CMG) and others.

Beberapa produk yang berkontribusi besar bagi kinerja produksi penjaminan Non-KUR antara lain penjaminan FLPP, Kredit Multiguna, kredit mikro dan *surety bond*.

Some products that contribute greatly to the performance of Non-KUR guarantee production include the FLPP guarantee, Multipurpose Credit, Micro-credit, and surety bonds.



Tantangan Penjaminan Non KUR

Di tengah merebaknya pandemi COVID-19 di tahun 2020, bisnis Penjaminan Non-KUR menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

1. Pencapaian Produksi sesuai target yang di tetapkan
2. Kompetitor yang semakin bertambah
3. Peningkatan Penjaminan dalam rangka sinergi BUMN
4. Peningkatan Kerja sama dengan mitra eksisting
5. Semakin tingginya NPL mitra kerja

Strategi Penjaminan Non KUR

Untuk menghadapi tantangan usaha di tahun 2020, Perusahaan menerapkan strategi berikut di segmen Penjaminan Non KUR, yaitu:

1. Melakukan pendekatan ke mitra dan gali potensi bisnis
2. Memperluas pangsa pasar produk *Suretyship*
3. Memperluas kerja sama penjaminan dalam rangka sinergi BUMN
4. Melakukan *cross selling* dengan mitra eksisting
5. Melakukan peninjauan kerja sama baru dgn mitra kerja non bank dan *fintech*

Kinerja Penjaminan Non KUR

Non KUR Guarantee Challenges

In the midst of the COVID-19 pandemic in 2020, the Non-KUR Guarantee business faces a number of challenges, including:

1. Production achievement in accordance with the target set
2. Competition is getting tighter
3. Improvement of Guarantee in the framework of synergy of SOEs
4. Improved Cooperation with existing partners
5. NPL partners are getting higher

Non KUR Guarantee Strategies

To face business challenges in 2020, the Company implemented the following strategies in the Non KUR Guarantee segment, namely:

1. Approach partners and explore business potential
2. Expand market share for *Suretyship* products
3. Expanding guarantee cooperation in order to Synergy of SOEs
4. Cross selling with existing partners
5. Exploring new cooperation with non-bank and fintech partners

Non KUR Guarantee Performance

Tabel Penjaminan Kredit Non KUR Tahun 2019 - 2020

Table of Non KUR Credit Guarantee 2019 - 2020

Uraian Description	RKAP Tahun 2020 RKAP Year 2020	Realisasi Realization		Ach %	YoY
		2020	2019		
		dalam juta Rupiah in million Rupiah			
Distribusi Barang Distribution of Goods	105.274	84.000	193.500	79,79%	56,59%
Kredit Mikro Micro Credit	4.949.005	5.596.027	6.442.258	113,07%	(13,14%)
Kredit Multiguna Multipurpose Credit	672.095	634.717	518.041	94,44%	22,52%
Kredit OTO OTO Credit	9.500	9.500	593.259	100,00%	(98,40%)
Kredit Super Mikro Super Micro Credit	5.070.308	11.426.158	10.610.166	225,35%	7,69%
Kredit Umum General Credit	-	1.379	11.159	0,00%	87,64%
Pembiayaan Invoice Invoice Financing	34.961	34.427	77.168	98,47%	(55,39%)
TOTAL NONBANK TOTAL NONBANK	10.841.143	17.786.207	18.445.551	164,06%	(3,57%)

Uraian Description	RKAP Tahun 2020 RKAP Year 2020	Realisasi Realization		Ach %	YoY
		2020	2019		
Customs Bond Customs Bond	21.071	25.396	249.020	120,53%	(89,80%)
Keagenan Kargo Cargo Agency	-	-	53.485	0,00%	(100,00%)
Kontra Bank Garansi Counter Bank Guarantee	3.240.821	4.353.021	5.090.899	134,32%	(14,49%)
Payment Bond Payment Bond	42.368	134.051	386.620	316,40%	(65,33%)
Surety Bond Surety Bond	2.902.344	3.452.670	6.272.645	118,96%	(44,96%)
TOTAL SURETY TOTAL SURETY	6.206.604	7.965.138	12.052.669	128,33%	(31,91%)
GRAND TOTAL GRAND TOTAL	17.047.747	25.751.345	30.498.219	151,05%	(15,56%)

Pada tahun 2020, Divisi Bisnis 3 mencatat nilai penjaminan Non KUR adalah sebesar Rp17.048 miliar, turun 15,56% dari tahun sebelumnya Rp30.498 miliar namun dari RKAP 2020 realisasi tersebut melampaui dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 151,1%. Komponen penjaminan terbesar tahun 2020 berasal dari penjaminan kredit super mikro yaitu sebesar Rp5.070 miliar atau setara dengan 29,74% dari total penjaminan Divisi Bisnis 3 Tahun 2020.

In 2020, Business Division 3 recorded the non-KUR guarantee value was IDR17,048 billion, decreased by 15.56% from the previous year of IDR30,498 billion but from RKAP 2020 the realization exceeded the target set at 151.1%. The largest guarantee component in 2020 comes from super micro credit guarantee of IDR5,070 billion or equivalent to 29.74% of the total guarantee of Business Division 3 in 2020.

Tabel Laba Rugi Penjaminan Non KUR Tahun 2019 - 2020

Profit and Loss Table of Non KUR Guarantee in 2019 - 2020

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp	%
			dalam juta Rupiah in million Rupiah	
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net-Guarantee Fee	806.034	654.832	151.202	23,09%
Beban Klaim Claim Expenses	196.784	642.510	(445.726)	(69,37%)
Penjaminan Bersih Net Guarantee	609.250	12.323	596.927	4.844,01%
Pendapatan Investasi Investment Income	146.415	208.913	(62.498)	(29,92%)
Beban Usaha Operating Expenses	(285.861)	(148.198)	137.663	92,89%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	48.997	(9.045)	58.042	641,70%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	491.606	15.853	475.753	3.001,03%



Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp	%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	(190.705)	(0)	190.705	100,00%
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	300.906	15.853	285.053	1.798,10%

Di tengah kondisi industri perbankan yang mengalami tekanan, kinerja penjaminan KUR justru mengalami peningkatan. Perusahaan membukukan Imbal Jasa Penjaminan Bersih sebesar Rp806 miliar, meningkat 23,09% dari tahun sebelumnya Rp654 miliar. Hal tersebut membuat laba bersih segmen Non-KUR meningkat signifikan menjadi Rp301 miliar dari tahun sebelumnya Rp16 miliar.

In the midst of the banking industry that was under pressure, the performance of the KUR guarantee actually increased. The company posted a Net Guarantee Fee of IDR806 billion, an increase of 23.09% from the previous year of IDR654 billion. This made the Non-KUR segment's net profit increase significantly to IDR301 billion from IDR16 billion in the previous year.

Penjaminan PEN

PEN adalah Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

PEN Guarantee

PEN is a guarantee given in order to implement the Government Regulation on Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State's financial policy for handling the Coronavirus Disease pandemic 2019 (COVID-19) and/or face threats that endanger the national economy and/or financial system stability as well as national economic rescue.

Tahun 2020 realisasi penyaluran PEN mencapai Rp8.622 miliar, yang diberikan kepada 553.469 debitur.

In 2020 the realization of PEN distribution reached IDR8,622 billion, which was given to 553,469 debtors.

Tabel Realisasi Penyaluran PEN 2020

Table for Realization of PEN Distribution in 2020

Uraian Description	2020
Realisasi Penyaluran (miliar Rupiah/plafond) (konvensional+syariah) Realization of Distribution (billion Rupiah/limit) (conventional+sharia)	Rp8,621,674,159,368
Jumlah Debitur Total Debtors	553.469

Jamkrindo memberikan layanan penjaminan PEN berdasarkan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.08/2020 Tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Milik Penjaminan Yang Ditunjuk Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional
2. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.08/2020 Tentang Penugasan Kepada PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) Untuk Melaksanakan Penjaminan Pemerintah Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Penjaminan PEN diperuntukkan kepada Para Pelaku Usaha UMKM dalam menjalankan usahanya.

Pendapatan IJP atas penjaminan PEN dicatat sesuai dasar surat:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-582/MK.08/2020 Tanggal 08 Juli 2020 Perihal Penetapan Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 7,65% (tujuh koma enam puluh lima perseratus) per tahun.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.08/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Penyesuaian Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 6,11% (enam koma sebelas perseratus) per tahun.

Tantangan Penjaminan PEN

1. Masih rendahnya partisipasi kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), dikarenakan masih proses persiapan internal (kesiapan kebijakan, sistem, SDM dan sosialisasi)
2. Bank mengaitkan sumber dana penyaluran kredit UKM program penjaminan PEN dengan program penempatan dana pemerintah
3. Masih relatif rendahnya usulan pagu/plafon dari Bank pelaksana program PEN

Strategi Penjaminan PEN

1. Campur tangan pemerintah (Kementerian Keuangan) dalam menunjukan bank penyalur pen serta penetapan plafond/pagu sehingga maksimal penyerapan program penjaminan pen
2. Percepatan Pengembangan system EJAMKU agar dapat mengakomodir penjaminan Suplesi, Perpanjangan dan Resyrukturisasi (SPR)
3. Percepatan pengembangan syatem EJAMKU untuk mengakomodir koreksi penjaminan setelah penagihan IJP kepada pemerintah

Jamkrindo provides PEN guarantee services based on:

1. Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 71/PMK.08/2020 concerning Procedures for Government Guarantee through Designated Guarantee-Owned Enterprises in order to the implementation of the National Economic Recovery Program
2. Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 304/KMK.08/2020 concerning Assignment to PT Jaminan Kredit Indonesia (PT Jamkrindo) to Implement Government Guarantees in order to the implementation of the National Economic Recovery Program.

PEN Guarantee is intended for MSME BusinessEs in conducting their business.

IJP's revenue on PEN guarantee is recorded by letter:

1. Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-582/MK.08/2020 dated July 08, 2020 concerning Determination of Guarantee Service Rates for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, IJP tariff of 7.65% (seven point sixty-five hundredths) per year.
2. Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-80/MK.08/2021 dated 04 February 2021 concerning Tariff Adjustment of Guaranteed Services for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, IJP tariff of 6.11% (six point eleven hundredths) per year.

PEN Guarantee Challenge

1. Participation of the National Private Public Bank (BUSN) group are still low, due to the process of internal preparation (policy readiness, system, human resources and socialization)
2. The Bank associates the fund source of SME credit disbursement for PEN guarantee program with government fund placement program
3. Proposed funding limit from Bank as PEN distributors is still relatively low

PEN Guarantee Strategies

1. Government intervention (Ministry of Finance) in the appointment of Bank as PEN distributors well as the determination of funding limit so can maximize the absorption of PEN guarantee program
2. Acceleration of EJAMKU system development in order to accommodate the Supplement, Extension and Restructuring (SPR) Guarantee
3. Acceleration of EJAMKU system development to accommodate guarantee correction after IJP billing to the government



4. Penjaminan kepada debitur yang sama oleh 2 penjamin atas fasilitas penjaminan yang berbeda karena kebutuhan perbankan untuk berbagi risiko kepada 2 penjamin

4. Guarantee to the same debtor by 2 guarantors for the different guarantee facility because of the needs of banking to share risk to 2 guarantors

Tahun 2020, terjadi perubahan premi berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.08/2021 Tanggal 04 Februari 2021 Perihal Penyesuaian Tarif Imbal Jasa Penjaminan atas Penjaminan Pemerintah Dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, tarif IJP sebesar 6,11% (enam koma sebelas perseratus) per tahun. Besaran Tarif IJP berlaku untuk Sertifikat Penjaminan yang diterbitkan sejak tanggal 1 Februari 2021.

In 2020, premium changes occurred based on the Letter of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number S-80/MK.08/2021 dated February 04, 2021 concerning Tariff Adjustment of Guaranteed Services for Government Guarantees in the National Economic Recovery Program, IJP tariff of 6.11% (six point eleven hundredths) per year. The amount of IJP Tariff will apply to Guarantee Certificates issued since February 1, 2021.

Kinerja Penjaminan PEN

Jamkrindo yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM). Pada tahun 2020 berhasil mencapai volume penjaminan sebesar Rp8,622 miliar.

PEN Guarantee Performances

Jamkrindo which is a State-Owned Enterprise (SOE) that has duties and authorities to conduct business activities in the development of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs). In 2020, the guarantee volume reached IDR8,622 billion.

Tabel Nilai Penjaminan dan IJP PEN Tahun 2020

Table of Guarantee Value and PEN Guaranteed Service Credit in 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Realisasi Realization	RKAP Tahun 2020 RKAP Year 2020	Persentase Capaian RKAP 2020 Percentage of RKAP Achievements 2020
	2020		
Penjaminan PEN (konvensional+syariah) PEN Guarantee (conventional+sharia)	Rp8,621,674	Rp8,000,000	108%
IJP PEN (Cash Basis) PEN Guaranteed Service Credit	Rp1,182,986	Rp700,000	169%

Realisasi penjaminan PEN tahun 2020 adalah sebesar Rp8.622 miliar atau mencapai 108% dari anggaran dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp8 miliar. Sedangkan pendapatan IJP PEN adalah sebesar Rp1,183 miliar atau 169% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp700 miliar.

The realization of PEN guarantee in 2020 is IDR8,622 billion or reaches 108% of the budget in RKAP 2020 which is IDR8 billion. Meanwhile, IJP PEN's revenue is IDR1.183 billion or 169% of the target set in RKAP 2020 which is IDR700 billion.

Kontribusi Imbalan Jasa Penjaminan Terhadap Laba (Rugi) Konsolidasi 2020

Contribution of Guarantee Fee to Consolidated Profit (Loss) in 2020

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Konsolidasi Consolidation	Eksisting Existing	KUR	Persentase Kontribusi Percentage Contribution	
				Eksisting Existing	KUR
Imbal Jasa Penjaminan Bersih <i>Net - Guarantee Fee</i>	2.633.393	806.034	1.827.359	30,61%	69,39%
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	1.830.400	196.784	1.633.616	10,75%	89,25%
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	802.993	609.250	193.743	75,87%	24,13%
Pendapatan Investasi <i>Investment Income</i>	799.211	146.415	652.796	18,32%	81,68%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(903.670)	(285.861)	(617.809)	31,63%	68,37%
Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i>	51.130	48.997	2.133	95,83%	4,17%
Laba Sebelum Pajak <i>Income Before Tax</i>	722.469	491.606	230.863	68,05%	31,95%
Beban Pajak Penghasilan <i>Income Tax Expenses</i>	(266.366)	(190.705)	(75.631)	71,60%	28,39%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Income</i>	456.133	300.901	155.232	65,97%	34,03%

Hingga akhir tahun 2020, Penjaminan KUR memberikan kontribusi yang besar terhadap imbal jasa penjaminan Perusahaan. Namun demikian, penjaminan non KUR menjadi kontributor utama terhadap laba Perusahaan yaitu sebesar Rp301 miliar, sedangkan laba yang diperoleh dari penjaminan KUR adalah sebesar Rp155 miliar.

Until the end of 2020, the KUR Guarantee has made a large contribution to the Company's guarantee fees. However, non-KUR guarantees were the main contributor to the Company's profit, amounting to IDR301 billion, while the profit from KUR guarantees was IDR155 billion.



PENDAPATAN INVESTASI

Investment Income

Perusahaan melakukan investasi pada instrumen-instrumen keuangan yang tersedia di pasar, baik pasar modal maupun perbankan. Investasi yang dilakukan dalam bentuk surat berharga terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang dimiliki hingga jatuh tempo dan yang tersedia di jual.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori aset keuangan lainnya.

Tantangan yang Dihadapi

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena hampir sepanjang tahun terdampak oleh *pandemic* COVID-19. Banyaknya perusahaan yang terdampak COVID masih bisa diimbangi dengan kebijakan dan insentif yang dikeluarkan oleh Pemerintah bersama BI dan OJK untuk menghindari dampak buruk COVID terhadap risiko likuiditas dan risiko solvabilitas perusahaan. Pandemi berdampak juga terhadap penurunan suku bunga acuan (7DDR) dari level 5.00% pada awal tahun 2020 hingga turun signifikan menjadi 3.75% pada akhir tahun 2020. Kinerja IHSG pun demikian bila dibandingkan dengan akhir 2019 di posisi 6.299,54, IHSG pada akhir 2020 terkoreksi 5,09%.

Strategi Investasi

Untuk mengoptimalkan pendapatan investasi, tahun 2020 Jamkrindo menerapkan strategi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pemenuhan alokasi portofolio investasi sesuai ketentuan POJK, sampai dengan saat ini sudah dilakukan rutin setiap bulannya, terutama difokuskan pada pemenuhan SBN/Obligasi Negara/Obligasi Infrastruktur sesuai POJK yang berlaku;
2. Memilih produk investasi yang sesuai dengan ketentuan target RKAP tahun berjalan;
3. Menindaklanjuti proses *maintenance* dengan pihak *counterpart software* (SIM);

The Company invests in financial instruments available in the market, both capital and banking markets. Investments made in the form of securities are divided into 2 (two) categories, namely those owned until maturity and available for sale.

Investments held to maturity are non-derivative financial assets with fixed or predetermined payments and maturities have been determined where the Company has a positive intention and ability to own such financial assets until maturity, and is not determined at fair value through profit or loss statements or available for sale.

Financial assets available for sale are non-derivative financial assets that are designated as available for sale or that are not classified into any of the other financial asset categories.

Challenges Faced

2020 is a challenging year because most of the year is affected by the COVID-19 pandemic. The number of companies affected by COVID can still be balanced with policies and incentives issued by the Government together with BI and OJK to avoid the adverse impact of COVID on the Company's liquidity risk and solvency risk. The pandemic also impacted the reduction of 7 Days Reverse Repo Rate (7DDR) from 5,00% at the beginning of 2020 to 3,75% by the end of 2020. The performance of JCI was similar when compared to the end of 2019 at 6,299.54, JCI at the end of 2020 corrected 5.09%.

Investment Strategies

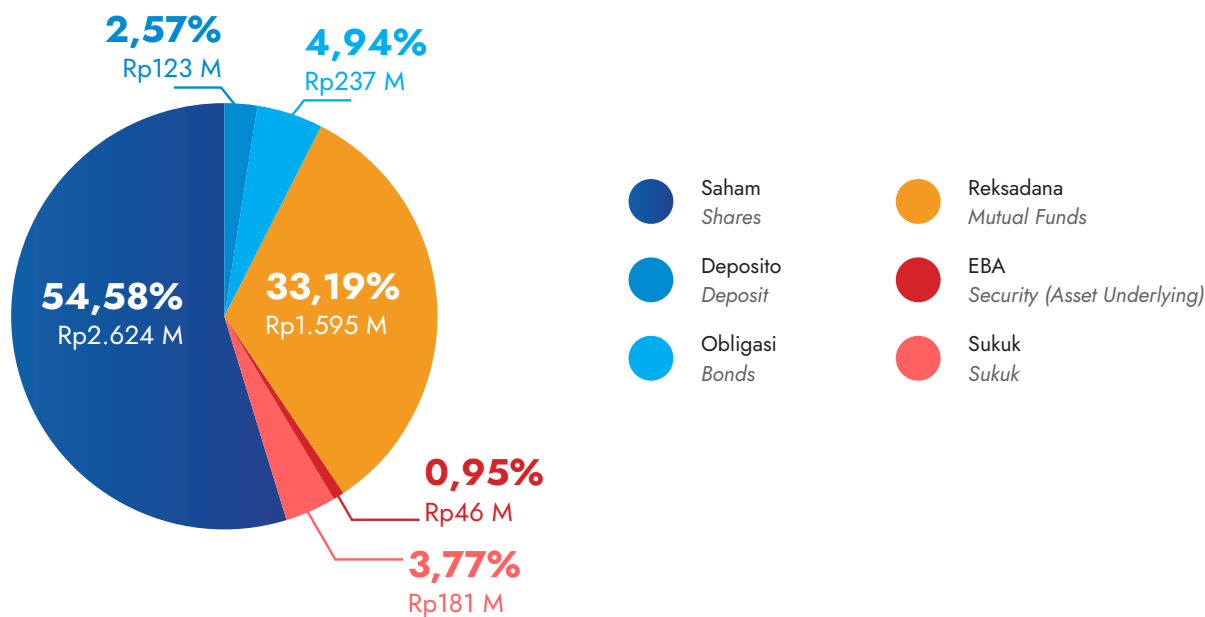
To optimize investment income, in 2020 Jamkrindo implemented the following strategies:

1. *Preparation and fulfillment of investment portfolio allocation in accordance with the POJK provisions, that has been conducted routinely in every month, mainly focused on the fulfillment of SBN/Government Bonds/Infrastructure Bonds in accordance with the applicable POJK;*
2. *Choosing investment products in accordance with the provisions of the current year's RKAP target;*
3. *Follow up the maintenance process with the counterpart software (SIM);*

- Melakukan penyederhanaan (penggabungan) bilyet deposito;
- Berkoordinasi dengan Divisi Bisnis untuk dilakukan analisa optimalisasi resiprokal deposito baik secara *on desk* atau *on the spot*.

- Simplifying (merging) bilyet deposits;*
- Coordinate with the Business Division to analyze the optimization of deposit receipts either on desk or on the spot.*

Kinerja Investasi



Investment Performance

Perusahaan melakukan investasi pada surat berharga dengan jenis yang cukup beragam. Hal tersebut merupakan bagian dari penyebaran risiko yang dijalankan Perusahaan. Namun demikian, Perusahaan juga fokus untuk memperoleh hasil investasi yang optimal.

The Company invests in securities of various types. This is part of the company's spread of risk. Nevertheless, the Company is also focused on obtaining optimal investment returns.

Tahun 2020, investasi dalam surat berharga yang dilakukan Perusahaan utamanya masih berupa produk Obligasi, yaitu mencapai 54,58% dari total surat berharga yang dimiliki Perusahaan atau setara dengan Rp2.624 miliar. Selain itu, Jamkrindo juga memiliki portofolio dalam bentuk Reksadana dalam jumlah yang cukup besar, yaitu Rp1.595 miliar atau setara dengan 33,19% dari surat berharga Perusahaan.

In 2020, the Company invested in bonds, reaching 54.58% of the Company's securities or equivalent to IDR2,624 billion. In addition, Jamkrindo also has a portfolio in the form of mutual funds in large amounts, namely IDR1,595 billion or equivalent to 33.19% of the Company's securities.



Pendapatan Investasi - Bersih

Investment Income - Net

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp	%
Bunga Deposito Time Deposit Interest	382.815	486.672	(103.857)	-21,34%
Bunga Obligasi Bond Interest	199.733	170.800	28.933	16,94%
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	180.236	87.419	92.470	105,78%
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	15.704	10.958	4.746	43,31%
Pendapatan Capital Gain Saham Capital Gain Share Interest	6.067	8.360	(2.293)	-27,43%
Dividen Dividend	6.067	8.360	(23.550)	-62,59%
Efek Beragunan Aset (EBA) Security (Assets Underlying)	4.929	4.715	561	11,90%
Jumlah Pendapatan Investasi Total Investment Incomes	803.562	806.552	(2.990)	-0,37%
Beban Investasi Investment Expenses	(4.351)	(23.742)	19.391	-81,67%
Jumlah Pendapatan Investasi Bersih Total Investment Incomes-Net	799.211	782.810	16.401	2,10%

Pendapatan investasi yang dibukukan Jamkrindo tahun 2020 mencapai Rp799 miliar, naik 2,10% dari tahun sebelumnya Rp783 miliar. Penurunan pendapatan investasi tersebut utamanya disebabkan penurunan pendapatan dari bunga deposito yang mengalami penurunan 21,34% menjadi Rp383 miliar dari Rp487 miliar di tahun 2019.

Jamkrindo's investment income in 2020 reached IDR799 billion, increased 2.10% from the previous year of IDR783 billion. The decrease in investment income was mainly due to a decrease in income from deposit interest which decreased by 21.34% to IDR383 billion from IDR487 billion in 2019.

Namun demikian, tahun 2020 Perusahaan dapat menekan beban investasi menjadi Rp4 miliar dari tahun sebelumnya Rp24 miliar atau turun 81,67%, sehingga pendapatan investasi bersih yang dibukukan Perusahaan di tahun 2020 mencapai Rp799 miliar, naik 2,10% dari tahun sebelumnya Rp783 miliar.

However, in 2020 the Company can reduce its investment expenses to IDR4 billion from the previous year of IDR24 billion or decreased 81.67%, so that the Company recorded net investment income in 2020 reaches IDR799 billion, increased 2.10% from the previous year of IDR783 billion.

KINERJA PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH (ENTITAS ANAK)

Performance of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Subsidiaries)

Sejalan dengan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamkrindo Syariah) terus menunjukkan pertumbuhan kinerja yang baik. Tahun 2020, di tengah kondisi ekonomi dan bisnis yang sangat menantang, Jamkrindo Syariah masih dapat membukukan pertumbuhan kinerja yang baik.

In line with the growth of sharia financial industry in Indonesia, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamkrindo Syariah) continues to show good performance growth. In 2020, in the midst of challenging economic and business conditions, Jamkrindo Syariah can still record good performance growth.

Laporan Posisi Keuangan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Financial Position Statements of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Aset

Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/Decrease	
			Rp IDR	%
Aset Asset				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	443.899	502.748	(58.849)	(11,71%)
Surat Berharga Marketable Securities	171.320	163.652	7.668	4,69%
Piutang Penjaminan Ulang Reguarantee Receivables	36.684	41.329	(4.645)	(11,24%)
Piutang Lain-Lain Other Receivables	41.151	7.130	34.021	477,15%
Beban Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	77.669	69.029	8.640	12,52%
Aset tetap Fixed assets	59.552	3.020	56.532	1.871,92%
Aset Tidak Berwujud Intangible Assets	215	146	69	47,26%
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	15.499	15.041	458	3,05%
Aset Lain-lain Other Assets	419.433	143.932	275.501	191,41%
Jumlah Aset Total Assets	1.573.879	1.184.644	389.235	32,86%

Aset Jamkrindo Syariah pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 32,86% atau Rp389 miliar, yaitu dari Rp1.185 miliar di tahun 2019 menjadi Rp1.574 miliar di tahun 2020. Pertumbuhan aset tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah aset lain-

Jamkrindo Syariah's assets in 2020 increased by 32.86% or IDR389 billion, from IDR1,185 billion in 2019 to IDR1,574 billion in 2020. The growth of these assets was mainly due to the increase in the number of other assets of Jamkrindo Syariah by 191.41% to IDR419



lain Jamkrindo Syariah sebesar 191,41% menjadi Rp419 miliar dari Rp144 miliar di tahun 2019. Selain itu, peningkatan aset Jamkrindo Syariah juga dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah beban dibayar di muka menjadi Rp77,7 miliar dari Rp69 miliar di tahun 2019.

billion from IDR144 billion in 2019. In addition, the increase in the number of Jamkrindo Syariah assets was also influenced by the increase in the amount of prepaid expenses to IDR77.7 billion from IDR69 billion in 2019.

Liabilitas

Liabilities

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
			dalam juta Rupiah in million Rupiah	
Liabilitas Liabilities				
Utang Klaim Claim Payable	963	1.329	(366)	(27,54%)
Utang Pajak Tax Payable	5.595	641	4.954	772,85%
Utang Penjaminan Ulang Co-Guarantee Payable	43.899	11.290	32.609	288,83%
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Income	710.670	448.827	261.843	58,34%
Cadangan Klaim Claims Reserve	32.978	15.397	17.581	114,18%
Utang Lain-Lain Other Payable	33.676	23.941	9.735	40,66%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Employee Benefits Liabilities	1.716	465	1.251	269,03%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	829.496	501.889	327.607	65,27%

Jumlah liabilitas Jamkrindo Syariah tahun 2020 tercatat sebesar Rp829 miliar, meningkat 65,27% lebih besar dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu Rp502 miliar. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pendapatan ditangguhkan menjadi Rp711 miliar dari Rp449 miliar di tahun 2019.

In 2020, Jamkrindo Syariah's liabilities are recorded at IDR829 billion, an increase of 65.27% greater than the previous year of IDR502 billion. The increase is due to the increase in the amount of deferred income to IDR711 billion from IDR449 billion in 2019.

Ekuitas

Equity

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
			dalam juta Rupiah in million Rupiah	
Ekuitas Equity				
Penyertaan Modal Investment	550.000	475.000	75.000	15,79%
Cadangan-cadangan Reserves	81.401	44.825	36.576	81,60%
Komponen Ekuitas Lainnya Other Equity Component	7.409	1.338	6.071	453,74%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Saldo Laba Tahun Lalu <i>Retained Earnings at the Previous Year</i>	8.192	0	8.192	100%
Saldo Laba <i>Retained Earnings</i>	40.572	36.563	4.009	10,96%
Total Ekuitas <i>Total Equity</i>	687.574	557.725	129.849	23,28%

Pada tahun 2020, ekuitas Jamkrindo Syariah mengalami peningkatan sebesar 23,28% atau Rp130 miliar, menjadi Rp688 miliar dari Rp558 miliar di tahun 2019. Pertumbuhan jumlah ekuitas tersebut disebabkan oleh meningkatnya penyertaan modal PT Jamkrindo di Jamkrindo Syariah yaitu dari Rp475 miliar di tahun 2019 menjadi Rp550 miliar di tahun 2020.

In 2020, Jamkrindo Syariah Equity increased by 23.28% or IDR130 billion, becoming IDR688 billion of IDR558 billion in 2019. The increase in equity is more due to the increasing capital investment of PT Jamkrindo in Jamkrindo Syariah, namely from IDR475 billion in 2019 to IDR550 billion in 2020.

Laporan Laba (Rugi)

Statements of Profit (Loss)

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Laba Rugi <i>Profit (Loss)</i>				
Imbal Jasa Penjaminan Bersih <i>Net - Guarantee Fee</i>	172.509	110.679	61.830	55,86%
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	(101.995)	(57.821)	44.174	76,40%
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	70.514	52.859	17.655	33,40%
Pendapatan Investasi Bruto <i>Gross Investment Income</i>	56.850	44.872	11.978	26,69%
Beban Usaha <i>Operating Expenses</i>	(65.788)	(55.384)	10.404	18,79%
Pendapatan (Beban) Lain-lain <i>Other Income (Expenses)</i>	(1.861)	1.691	(3.552)	(210,05%)
Laba Sebelum Pajak <i>Income Before Tax</i>	59.715	44.037	15.678	35,60%
Pajak Kini <i>Current Income Tax</i>	(15.514)	(8.414)	7.100	84,38%
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan <i>Tax Benefit (Deferred) Income Tax</i>	4.564	954	3.610	378,41%
Jumlah Beban Pajak Penhasilan <i>Total Income Tax Expenses</i>	(10.951)	(7.461)	3.490	46,78%
Laba Tahun Berjalan <i>Current Year Income</i>	48.765	36.576	12.189	33,33%



Tahun 2020 Jamkrindo Syariah berhasil membukukan imbal jasa penjaminan bersih sebesar Rp173 miliar, naik 55,86% dari tahun sebelumnya Rp111 miliar. Namun demikian, beban klaim yang dibukukan Jamkrindo Syariah juga meningkat 76,40% menjadi Rp102 miliar dari Rp58 miliar di tahun 2019. Demikian juga halnya dengan beban usaha Jamkrindo Syariah yang naik 18,79% menjadi Rp66 miliar.

Dengan kinerja tersebut, tahun 2020, Jamkrindo Syariah membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp49 miliar, meningkat 33,33% dari tahun sebelumnya Rp37 miliar. Realisasi laba tahun berjalan tahun 2020 mencapai 110,66% dari target dalam RKAP 2020.

In 2020 Jamkrindo Syariah managed to record a net guarantee fee of IDR173 billion, up 55.86% from the previous year of IDR111 billion. Nevertheless, the claim expenses recorded by Jamkrindo Syariah also increased by 76.40% to IDR102 billion from IDR58 billion in 2019. Similarly, Jamkrindo Syariah's operating expenses increased 18.79% to IDR66 billion.

With this performance, in 2020, Jamkrindo Syariah posted a current year income of IDR49 billion, an increase of 33.33% from the previous year of IDR37 billion. The realization of current year income in 2020 reached 110.66% of the RKAP target in 2020.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Review



Pembahasan tinjauan keuangan berikut berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan dengan opini wajar tanpa pengecualian dan telah disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dan revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020.

The following financial review discussions are based on the Company's Consolidated Financial Statements for the year ended December 31, 2020 and have been audited by the Public Accounting Firm Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partner with a fair opinion without exception and has been adjusted to the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia and revisions issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants which are considered relevant to its operations and affect the financial statements dated December 31, 2020.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

Statements of Financial Position

Aset

Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Aset				
<i>Assets</i>				
Kas dan kas di bank <i>Cash and cash in the bank</i>	101.105	88.614	12.491	14,10%
Deposito wajib dan berjangka <i>Mandatory and time deposits</i>	6.496.349	6.178.594	317.755	5,14%
Efek-efek <i>Marketable securities</i>	4.632.456	4.503.996	128.460	2,85%
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih <i>Guarantee fee receivable - net</i>	2.584.461	1.480.972	1.103.489	74,51%
Piutang penjaminan ulang - bersih <i>Re-guarantee receivables - net</i>	492.611	354.845	137.766	38,82%
Piutang hasil investasi <i>Receivables on investment</i>	39.211	66.050	(26.839)	(40,63%)
Biaya dibayar dimuka <i>Prepaid expenses</i>	16.578	32.807	(16.229)	(49,47%)
Aset tetap - bersih <i>Fixed assets - net</i>	320.934	206.586	114.348	55,35%
Aset tak berwujud - bersih <i>Intangible assets - net</i>	38.633	40.141	(1.508)	(3,76%)
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya <i>Restricted bank deposits</i>	1.192.039	716.072	475.967	66,47%
Penjaminan ulang dibayar dimuka <i>Re-guarantee paid in advance</i>	967.283	983.254	(15.971)	(1,62%)
Aset pengembalian <i>Return assets</i>	456.203	331.036	125.167	37,81%
Biaya akuisisi tangguhan <i>Deferred acquisition cost</i>	314.721	348.962	(34.241)	(9,81%)
Aset penjaminan ulang <i>Asset re-guarantee</i>	308.457	238.616	69.841	29,27%
Aset pajak tangguhan <i>Deferred tax assets</i>	1.151.643	1.174.212	(22.569)	(1,92%)
Aset lain-lain <i>Other Asset</i>	10.145	25.513	(15.368)	(60,24%)
Jumlah Aset <i>Total Assets</i>	19.122.829	16.770.270	2.352.559	14,03%

Jumlah aset Perusahaan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp19.123 miliar, meningkat 14,03% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.770 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah piutang IJP sebesar Rp1.103 miliar dan deposito di bank yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp476 miliar.

Total the Company's assets at the end of 2020 stood at IDR19,123 billion, an increase of 14.03% compared to the previous year of IDR16,770 billion. The increase was mainly due to the increase in the amount of Guarantee Receivables amounting to IDR1,103 billion and restricted deposit in Banks amounting to IDR476 billion.



Kas dan Setara Kas

Cash and Cash Equivalents

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kas Cash	1.575	1.337	238	17,80%
Giro Current Account				
Pihak Berelasi Related Parties	69.300	57.655	11.645	20,20%
Pihak Ketiga Third Parties	30.263	29.622	641	2,16%
Jumlah Giro Total Current Accounts	101.105	88.614	12.286	14,08%

Pada 31 Desember 2020, jumlah kas dan setara kas Jamkrindo tercatat sebesar Rp101 miliar, jumlah tersebut meningkat 14,08% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp89 miliar. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya jumlah giro sebesar Rp12 miliar, khususnya giro pada pihak berelasi.

As of December 31, 2020, Jamkrindo's cash and cash equivalents amounted to IDR101 billion, the amount increased 14.08% compared to the previous year of IDR89 billion. The increase is caused by an increase in the amount of current accounts amounting to IDR12 billion, especially current accounts on related parties.

Deposito Wajib dan Berjangka

Statutory and Time Deposits

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Deposito Time Deposits				
Pihak Berelasi Related Parties	5.436.008	4.836.870	599.138	12,39%
Pihak Ketiga Third Parties	1.061.448	1.341.724	(280.276)	(20,89%)
Jumlah Deposito Total Time Deposits	6.496.349	6.178.594	318.862	5,16%

Jumlah deposito wajib dan berjangka Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp6.496 miliar, jumlah tersebut meningkat 5,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.179 miliar. Peningkatan tersebut terutama berasal dari deposito pihak berelasi yang di tahun 2020 meningkat 12,39% menjadi Rp5.436 miliar.

Total Jamkrindo's statutory and time deposits in 2020 recorded to IDR6,496 billion, this amount was increased by 5.16% compared the previous year of IDR6,179 billion. This increase is mainly come from Deposit in related parties in 2020 that increase 12.39% to IDR5,436 billion.

Efek-Efek

Marketable Securities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Nilai wajar melalui laba rugi: <i>Fair value through profit or loss:</i>				
Reksadana <i>Mutual Funds</i>	1.594.897	-	1.594.897	100,00%
Efek beragun aset <i>Asset backed securities</i>	45.820	-	45.820	100,00%
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: <i>Fair value through other comprehensive income</i>				
Obligasi <i>Bonds</i>	1.768.379	1.478.073	290.306	19,64%
Saham <i>Shares</i>	237.291	266.523	(29.232)	(10,97%)
Reksadana <i>Mutual Funds</i>	-	684.577	(684.577)	(100,00%)
Efek beragun aset <i>Asset backed securities</i>	-	29.570	(29.570)	(100,00%)
Biaya perolehan diamortisasi: <i>Measured as amortised cost:</i>				
Obligasi <i>Bonds</i>	1.021.355	953.008	68.347	7,17%
Reksadana <i>Mutual Funds</i>	-	1.054.851	(1.054.851)	(100,00%)
Efek beragun aset <i>Asset backed securities</i>	-	37.394	(37.394)	(100,00%)
Jumlah Efek-efek <i>Total marketable securities</i>	4.632.456	4.503.996	128.460	2,85%

Jumlah efek-efek yang dimiliki Perusahaan pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp4.632 miliar, meningkat 2,85% dari tahun sebelumnya Rp4.504 miliar. Surat berharga yang dimiliki Perusahaan terdiri dari berbagai instrumen, yaitu reksadana, obligasi, sukuk, EBA, saham dan deposito. Tahun 2020, portofolio surat berharga Perusahaan utamanya berupa obligasi dan reksadana.

The amount of securities owned by the Company at the end of 2020 amounted to IDR4,632 billion, an increase of 2.85% from the previous year of IDR4,504 billion. The Company's securities consist of various instruments, namely mutual funds, bonds, sukuk, Asset backed securities, shares and deposits. In 2020, the Company's securities portfolio will primarily be in the form of bonds and mutual funds.



Piutang Imbal Jasa Penjaminan

Guarantee Receivables

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Berdasarkan pihak By parties				
Pihak Berelasi Related Parties	3.574.629	2.478.758	1.095.871	44,21%
Pihak Ketiga Third Parties	117.210	58.644	58.566	99,87%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(1.107.378)	(1.056.430)	50.948	4,82%
Jumlah Piutang Jasa Penjaminan Total Guarantee Receivables	2.584.461	1.480.972	1.103.489	74,51%

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah piutang imbal jasa penjaminan Jamkrindo tercatat sebesar Rp2.584 miliar, meningkat 74,51% dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp1.481 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya piutang IJP pihak berelasi.

As of December 31, 2020, Jamkrindo's Guarantee Receivables stood at IDR2,584 billion, an increase of 74.51% compared to IDR1,481 billion at December 31, 2019. The increase was mainly due to the increase in KUR Guarantee Receivables-Net.

Piutang Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan tagihan Perusahaan atas jasa kegiatan penjaminan produk KUR dan PEN. Dimana terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu Piutang Subsidi IJP dan Piutang IJP Subsidi Bunga.

Guaranteed Service Credit Receivables (IJP) People's Business Credit (KUR) and the National Economic Recovery Program (PEN) are the Company's bills for services guarantee activities of KUR products and PEN, where divided into 2 (two) categories, namely IJP Receivables Subsidies and IJP Receivables Interest Subsidies.

Piutang Subsidi IJP KUR merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah atas jasa kegiatan penjaminan KUR yang telah diberikan kepada terjamin sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008. IJP KUR dibayar oleh Pemerintah IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan April dan Oktober.

KUR IJP Receivables Subsidies is the Company's bill to the Government for services guarantee activities of KUR that have been provided to the guaranteed in accordance with Regulation of the Minister of Finance No.135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008. KUR IJP is paid by the Government annually with billing periods in April and October.

Piutang IJP KUR Subsidi Bunga merupakan tagihan Perusahaan kepada Penerima Jaminan atas jasa kegiatan penjaminan KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 8 Tahun 2015 tanggal 19 Oktober 2015. Imbal Jasa Penjaminan termasuk dalam Subsidi Bunga yang dibayarkan Pemerintah yang nilainya hasil dari kesepakatan antara Penjamin dan Penerima Jaminan.

KUR IJP Receivables Interest Subsidies represent the Company's bill to Guarantee Recipients for the services of KUR guarantee activities in accordance with the Regulation of the Coordinating Minister for the Economy Number 8 of 2015 dated October 19, 2015. Guaranteed Service Fees are included in Interest Subsidies paid by the Government, the value of which results from agreement between the Guarantor and the Recipient of the Guarantee.

Piutang IJP PEN Subsidi IJP merupakan tagihan Perusahaan kepada Pemerintah atas jasa kegiatan penjaminan PEN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang ditunjuk dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Imbal Jasa Penjaminan dibayarkan Pemerintah per tahun secara bulanan.

PEN IJP Receivables Subsidies is the Company's bill to the Government for services guarantee activities of PEN in accordance with Regulation of the Minister of Finance No.71/PMK.08/2020 concerning Government Guarantee Procedures through Guarantee Business Entities appointed in order to the National Economic Recovery Program. Guaranteed Service Payments are paid by the Government annually with a monthly basis.

Piutang Penjaminan Ulang

Reguarantee Receivables

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Berdasarkan Pihak: By parties:				
PT Igna Asia Reinsurance Brokers	541.360	397.585	143.775	36,16%
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72.705	72.705	-	0,00%
PT Reasuransi Nasional Indonesia	32.394	7.650	24.744	323,45%
PT Heksa Eka Life	30.490	44.620	(14.130)	(31,67%)
PT Freed Dinamika Indonesia	2.652	1.472	1.180	80,16%
PT BRI Insurance	6.992	12.554	(5.562)	(44,30%)
PT Asuransi Jiwasraya	2.226	1.107	1.119	101,08%
PT Central Asia Raya	-	25	(25)	(100,00%)
Jumlah Piutang Penjaminan Ulang Total Reguarantee Receivables	492.611	354.845	137.766	38,82%

Jumlah piutang penjaminan ulang Jamkrindo pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp493 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp138 miliar atau 38,82% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp355 miliar. Peningkatan terbesar berasal dari piutang reasuransi PT Igna Asia Reinsurance Brokers yang meningkat 36,16% menjadi Rp541 miliar.

Jamkrindo's reguarantee receivables as of December 31, 2020 amounted to IDR493 billion, an increase of IDR138 billion or 38.82% compared to the position on December 31, 2019 of IDR355 billion. The largest increase came from reinsurance receivables of PT Igna Asia Reinsurance Brokers was increased 36.16% to IDR541 billion.

Perusahaan bekerja sama dengan mitra *Co-Guarantee* untuk kredit multiguna dan mikro untuk mengalihkan risiko klaim yang diakibatkan meninggalnya terjamin. Untuk menghindari tertunggaknya pembayaran Piutang dari mitra *Co-Guarantee*, sejak tahun 2011 telah ditambahkan ketentuan baru dalam perjanjian kerja sama dengan mitra *Co-Guarantee* yaitu perusahaan akan memotong pembayaran premi *Co-Guarantee* maksimal sebesar 55% dari premi *Co-Guarantee* sebesar 45% dari IJP/IJK yang menjadi hak mitra *Co-Guarantee* apabila saldo Piutang *Co-Guarantee* di atas kewajaran, yang dihitung 3 kali dari rata-rata pengajuan pembayaran klaim dalam 1 tahun terakhir atau dengan perhitungan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan mitra *Co-Guarantee*.

The company cooperates with Co-Guarantee partners for a multipurpose and micro credit to transfer the risk of claims resulting from the death of the assured. To avoid the payment of delinquent receivables from Co-Guarantee partners, since 2011 has been added a new provision in the agreement of cooperation with Co-Guarantee partners that the company will cutoff the premium Co-Guarantee a maximum of 50% of the premium Co-Guarantee for 60% of the IJP/IJK the Guarantee Co-partner right when the balance in the Accounts Receivable Co-Guarantee fairness, which is calculated 3 times of the average filing claims payments in the last 1 year or with other calculations agreed by the company and partner Co-Guarantee.

Pada 31 Desember 2019 perusahaan mencadangkan kerugian penurunan nilai Piutang sebesar Rp196 miliar.

As of December 31, 2019, the company provided an impairment loss of Receivables amounting to IDR196 billion.

Piutang Re-Asuransi kepada Perusahaan Re-asuransi adalah penggantian pembayaran klaim yang ditagihkan kepada mitra Re-Asuransi atas pembayaran klaim yang telah dibayarkan oleh Perusahaan. Perusahaan bekerja sama dengan mitra Re-asuransi untuk semua jenis kredit untuk mengalihkan sebagian risiko klaim.

Re-Insurance Receivable to Company Indonesian National Re-insurance is reimbursement payments charged to the partners claim for payment of Re-Insurance claims paid by the Company. Re-insurance companies collaborate with partners for all types of credit to shift some of the risk of claims.



Dalam kerja sama dengan re-asuransi digunakan metode *treaty*, merupakan perjanjian pertanggungan ulang otomatis secara tahunan antara Perusahaan Penjamin dan Re-asuransi dengan kondisi yang disepakati bersama dalam negosiasi *treaty*.

In cooperation with the insurance partner treaty methods is being used. Treaty method is an annually automatic re-guarantee agreement and re-insurance partner with the condition agreed concerning treaty negotiation.

Piutang Hasil Investasi

Investment Income Receivables

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Obligasi Bonds	27.333	15.705	11.628	74,04%
Deposito Berjangka Time Deposits	8.677	12.594	(3.917)	(31,10%)
Sukuk Sukuk	2.689	1.674	1.015	60,63%
Efek Beragun Aset Asset backed securities	512	508	4	0,79%
Reksadana Mutual funds	-	35.569	(35.569)	(100,00%)
Jumlah Piutang Hasil Investasi Total Investment Income Receivables	39.211	66.050	(26.839)	(40,63%)

Jumlah piutang hasil investasi Jamkrindo tahun 2020 adalah sebesar Rp39 miliar, turun 40,63% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66 miliar. Penurunan tersebut utamanya berasal dari piutang hasil investasi reksadana yang turun dari Rp36 miliar menjadi nol.

Total Jamkrindo's Investment Income Receivables in 2020 amounted to IDR39 billion, a decrease of 40.63% compared to the previous year of IDR66 billion. The decline was mainly due to receivables from mutual fund investments, which fell from IDR36 billion to zero.

Aset Tetap

Fixed Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Biaya Perolehan Acquisition Cost				
Kepemilikan langsung Direct ownership				
Tanah Land	88.706	53.213	35.493	66,70%
Bangunan Kantor Buildings	143.491	78.458	65.033	82,89%
Perumahan Dinas Houses	8.500	6.778	1.722	25,41%
Inventaris Kantor Office Equipment	140.145	114.976	25.169	21,89%
Inventaris Rumah Dinas Houses Equipment	4.291	3.556	735	20,67%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kendaraan Bermotor Vehicles	43.891	43.751	140	0,32%
Aset dalam penyelesaian Assets in progress	4.425	20.467	(16.042)	(78,38%)
Aset Hak Guna Right of Use Assets				
Bangunan Kantor Buildings	51.693	-	51.693	100,00%
Kendaraan Bermotor Vehicles	32.497	-	32.497	100,00%
Peralatan Kantor Office Equipment	159	-	159	100,00%
Jumlah Biaya Perolehan Total Cost of Acquisition	517.798	-	517.798	100,00%
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation				
Bangunan Kantor Buildings	(35.154)	(32.009)	(3.145)	9,83%
Perumahan Dinas Houses	(2.487)	(2.148)	(339)	15,78%
Inventaris Kantor Office Equipment	(90.833)	(73.105)	(17.728)	24,25%
Inventaris Rumah Dinas Houses Equipment	(2.785)	(2.280)	(505)	22,15%
Kendaraan Bermotor Vehicles	(39.249)	(35.071)	(4.178)	11,91%
Aset Hak Guna Right of Use Assets				
Bangunan Kantor Buildings	(13.219)	-	(13.219)	100,00%
Kendaraan Bermotor Vehicles	(13.107)	-	(13.107)	100,00%
Peralatan Kantor Office Equipment	(30)	-	(30)	100,00%
Jumlah Akumulasi Penyusutan Total Accumulated Depreciation	(196.864)	(144.613)	(52.251)	36,13%
Jumlah Aset Tetap – Bersih Total Fixed Assets – Net	320.934	206.586	114.348	55,35%

Jumlah aset tetap Perusahaan pada akhir tahun 2020 tercatat sebesar Rp321 miliar, meningkat 55,35% dari tahun sebelumnya Rp207 miliar. Peningkatan jumlah aset tetap tersebut disebabkan investasi yang dilakukan Perusahaan dalam bentuk tanah, bangunan kantor, perumahan dinas, inventaris kantor, inventaris rumah dinas dan kendaraan bermotor, sebesar Rp517 miliar di tahun 2020.

Total the Company's fixed assets at the end of 2020 stood at IDR321 billion, an increase of 55.35% from the previous year of IDR207 billion. The increase in the number of fixed assets is due to investments made by the Company in the form of land, buildings, houses, office equipment, houses equipment and vehicles, amounting to IDR517 billion in 2020.



Aset Tak Berwujud

Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai buku aset tak berwujud yang merupakan perangkat lunak sebesar Rp39 miliar, turun sebesar Rp1 miliar atau 3,76% dibandingkan tahun sebelumnya Rp40 miliar.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat aset tak berwujud yang dijaminkan.

Intangible Assets

As of December 31, 2020, the book value of intangible assets, which are software, amounted to IDR39 billion, a decrease of IDR1 billion or 3.76% compared to the previous year of IDR40 billion.

As of December 31, 2020 and 2019 there were no intangible assets pledged as collateral.

Deposito di Bank yang Dibatasi Penggunaannya

Restricted Deposit in Banks

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000	300.000	200.000	66,67%
PT Bank Syariah Mandiri	167.639	67.639	100.000	147,84%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	159.000	158.500	500	0,32%
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	100.000	-	100.000	100,00%
Berbagai Bank Pembangunan Daerah Various Regional Development Banks	85.200	65.850	19.350	29,38%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75.140	75.140	-	0,00%
PT Bank Tabungan Negara Syariah	73.094	46.943	26.151	55,71%
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk	30.000	-	30.000	100,00%
PT Bank Negara Indonesia Syariah	2.000	2.000	-	0,00%
Jumlah Deposito di Bank Yang Dibatasi Penggunaannya Total Restricted deposit in Banks	1.192.039	716.072	475.967	66,47%

Jumlah Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.192 miliar, meningkat 66,47% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp716 miliar.

Total Restricted deposit in Banks in 2020 recorded by IDR1,192 billion, an increase of 66.47% compared to the previous year of IDR716 billion.

Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka

Prepaid Re-Guarantee

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat	105.517	33.680	71.837	213,29%
Konsumtif Consumptive	750.314	867.367	(117.053)	(13,50%)
Produktif Productive	65.098	77.150	(12.052)	(15,62%)
PEN	42.471	-	42.471	100,00%
Suretyship	3.883	5.057	(1.174)	(23,22%)
Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka Prepaid Re-Guarantee	967.283	983.254	(15.971)	(1,62%)

Jumlah penjaminan ulang dibayar dimuka tahun 2020 tercatat sebesar Rp967 miliar, turun 1,62% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp983 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan turunnya jumlah penjaminan ulang dibayar dimuka untuk kredit konsumtif yang turun sebesar Rp117 miliar menjadi Rp750 miliar.

Total Prepaid Re-Guarantee in 2020 recorded by IDR967 billion, a decrease of 1.62% compared to the previous year of IDR983 billion. This decrease was mainly due to total prepaid re-guarantee for consumptive credit was decreased by UDR117 billion to IDR 750 billion.

Aset Lain-lain

Other Assets

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Klaim Dalam Proses Claim in Process	59.682	67.148	(7.466)	(11,12%)
Pinjaman bagi hasil Loans	17.124	17.578	(454)	(2,58%)
Obligasi premium Premium Bonds	6.696	-	6.696	100,00%
Aset Lainnya Other Assets	2.955	26.646	(23.691)	(88,91%)
Jumlah Aset Lain-lain Total Other Assets	10.145	25.513	(15.368)	(60,24%)

Pada akhir tahun 2020, jumlah aset lain-lain Jamkrindo tercatat sebesar Rp10 miliar, turun 60,24% dari tahun sebelumnya Rp26 miliar. Penurunan tersebut utamanya disebabkan turunnya jumlah aset lainnya dari Rp27 miliar di tahun 2019 menjadi Rp3 miliar di tahun 2020.

At the end of 2020, Jamkrindo's other assets stood at IDR10 billion, a decrease of 60.24% from the previous year of IDR26 billion. The decrease was mainly due to the decrease in the number of other assets from IDR27 billion in 2019 to IDR3 billion in 2020.

Liabilitas

Liabilities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Utang Klaim Claim Payable	4.247	14.125	(9.878)	(69,93%)
Utang Penjaminan Ulang Co-Guarantee Payable	246.645	125.596	121.049	96,38%
Akrua dan utang lain-lain Accruals and Other Payables	1.034.001	510.739	523.262	102,45%
Utang Pajak Tax Payable	143.075	29.942	113.133	377,84%
Liabilitas kontrak jaminan keuangan Liabilities for Financial Guarantee Contracts	7.826.367	6.666.285	1.160.082	17,40%
Pendapatan komisi ditangguhkan Deferred Commission Income	142.930	130.528	12.402	9,50%
Estimasi liabilitas klaim Estimated Claim Liabilities	151.957	138.776	13.181	9,50%



Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Imbal jasa kafalah ditanggihkan <i>Unearned Kafalah Fees</i>	632.799	423.100	209.699	49,56%
Liabilitas imbalan kerja <i>Employee Benefits Liabilities</i>	84.929	53.104	31.825	59,93%
Jumlah Liabilitas <i>Total Liabilities</i>	10.266.950	8.092.195	2.174.755	26,87%

Jumlah liabilitas Jamkrindo pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.267 miliar, meningkat 26,87% atau Rp2.175 miliar dibandingkan tahun sebelumnya Rp8.092 miliar. Peningkatan jumlah liabilitas tersebut utamanya disebabkan peningkatan jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan sebesar Rp1.160 miliar, yaitu dari Rp6.666 miliar di tahun 2019 menjadi Rp7.826 miliar di tahun 2020.

Total Jamkrindo's liabilities as of December 31, 2020 amounted to IDR10,267 billion, an increase of 26,87% or IDR2,175 billion compared to the previous year of IDR8,092 billion. The increase in the number of liabilities was primarily due to an increase in the amount of Liabilities for Financial Guarantee Contracts of IDR1,160 billion, namely from IDR6,666 billion in 2019 to IDR7,826 billion in 2020.

Utang Klaim

Jumlah utang klaim Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp4 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp10 miliar atau 69,93% dibandingkan tahun sebelumnya Rp14 miliar.

Claim Payable

Total the company's claim payable in 2020 was recorded at IDR4 billion, decreasing by IDR10 billion or 69.93% compared to the previous year of IDR14 billion.

Utang klaim merupakan utang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Utang klaim yang tercatat adalah Utang yang telah disetujui namun belum dibayar. Utang klaim dinyatakan sebesar persentase penjaminan atas baki debit pinjaman yang disetujui.

Claims payable is payable to the lender Bank guaranteed by the Company. Recorded claims payable are debts that have been approved but not yet paid. Claims payable are stated at the percentage of underwriting the loans approved discharge tray.

Utang Penjaminan Ulang

Reguarantee Payable

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	206.687	51.556	155.131	300,90%
Pihak Ketiga <i>Third Parties</i>	39.958	74.040	(34.082)	(46,03%)
Jumlah Utang Penjaminan Ulang Total <i>Total Reguarantee Payable</i>	246.645	125.596	121.049	96,38%

Akrual dan Utang Lain-lain

Utang penjaminan ulang Perusahaan pada 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp247 miliar, naik 96,38% dari tahun sebelumnya Rp126 miliar. Kenaikan tersebut utamanya disebabkan peningkatannya utang pihak berelasi yaitu sebesar Rp155 miliar menjadi Rp207 miliar.

Utang *co-guarantee* dan re-asuransi merupakan utang premi yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan risiko klaim.

Accruals and Other Payables

The Company's Re-guarantee Payable at December 31, 2020 stood at IDR247 billion, an increase of 96.38% from the previous year of IDR126 billion. The increase was mainly due to the increase in Payable with related parties by IDR155 billion to IDR207 billion.

Re-guarantee and re-insurance payables are an insurance premium payable that must be paid by the company to transfer the risk of claim.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
IJP Belum Teridentifikasi Unidentified IJP	595.123	69.680	525.443	754,08%
Beban Pegawai Employee expenses	181.787	177.830	3.957	2,23%
IJP Belum Terbit Sertifikat Unpublished IJP certificate	70.808	97.038	(26.230)	(27,03%)
Beban Operasional Operational expenses	44.997	18.515	26.482	143,03%
Liabilitas Sewa Lease liabilities	39.778	-	39.778	100,00%
Beban Administrasi dan Umum General and administrative expenses	24.322	59.192	(34.870)	(58,91%)
Fee Bank Bank fees	23.357	19.770	3.587	18,14%
Lainnya Others	53.829	68.714	(14.885)	(21,66%)
Jumlah Akrual dan Utang Lain-lain Total Accruals and Other Payables	1.034.001	510.739	523.262	102,45%

Jumlah akrual dan utang lain-lain Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.034 miliar, meningkat 102,45% dari tahun sebelumnya sebesar Rp511 miliar. Peningkatan jumlah akrual dan utang lain-lain tersebut utamanya disebabkan meningkatkan jumlah IJP belum teridentifikasi dari Rp70 miliar di tahun 2019 menjadi Rp595 miliar di tahun 2020.

Jamkrindo's total accruals and other payables in 2020 was recorded at IDR1,034 billion, an increase of 102.45% from the previous year of IDR511 billion. The increase in accruals and other payables was mainly due to an increase in the number of unidentified IJP from IDR70 billion in 2019 to IDR595 billion in 2020.



Utang Pajak

Tax Payable

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Entitas Induk Parent Company	143.702	(152.333)	296.035	194,33%
Entitas Anak Subsidiary	4.327	(4.087)	8.414	205,87%
Jumlah Utang Pajak Total Tax Payable	148.029	(156.420)	304.449	194,64%

Jumlah utang pajak Perusahaan tahun 2020 meningkat signifikan menjadi Rp148 miliar dimana pada tahun 2019 Perusahaan mencatat kelebihan pajak sebesar Rp152 miliar. Peningkatan utang pajak tersebut disebabkan meningkatnya utang pajak entitas induk yaitu sebesar Rp296 miliar menjadi Rp144 miliar di tahun 2020, sedangkan utang pajak entitas anak meningkat Rp8 miliar di tahun 2020.

Total the Company's tax payable in 2020 increased significantly to IDR148 billion where in 2019, the Company recorded a tax overpayment of IDR152 billion. The increase in tax payable was due to the increase in the tax payable of parent entity by IDR296 billion to IDR144 billion in 2020, while the tax payable of subsidiaries increased IDR8 billion in 2020.

Liabilitas Kontrak Jaminan Keuangan

Liabilities for Financial Guarantee Contracts

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat	4.907.747	3.509.642	1.398.105	39,84%
Konsumtif Consumptive	2.309.634	2.537.665	(228.031)	(8,99%)
Produktif Productive	488.112	535.408	(47.296)	(8,83%)
PEN	38.047	-	38.047	100,00%
Suretyship	82.827	83.570	(743)	(0,89%)
Penjaminan Ulang Dibayar Dimuka Prepaid re-guarantee	7.827.367	6.666.285	1.161.082	17,42%

Jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp7.827 miliar, meningkat 17,42% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.666 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan meningkatnya jumlah liabilitas kontrak jaminan keuangan KUR sebesar Rp1.398 miliar menjadi Rp4.908 miliar.

Total Liabilities for Financial Guarantee Contracts in 2020 recorded of IDR7,827 billion, an increase of 17.42% compared to the previous year of IDR6,666 billion. This increase was mainly due to total liabilities for KUR financial guarantee contracts of IDR1,398 billion to IDR4,908 billion.

Liabilitas Imbalan Kerja

Jumlah liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp85 miliar, meningkat sebesar Rp32 miliar atau 59,93% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp27 miliar. Peningkatan tersebut terutama dari komponen liabilitas imbalan kerja dalam bentuk program pensiun manfaat pasti.

Perusahaan telah menyelenggarakan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya. Aset program manfaat pasti dikelola oleh PT Asuransi Jiwasraya yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan RI. Program tersebut memberikan manfaat JHT dan THT yang akan dibayarkan kepada karyawan yang berhak pada saat karyawan pensiun atau berhenti, sesuai dengan peraturan dana pensiun yang bersangkutan.

Employed Benefits Liabilities

The amount of employment benefit liabilities as of December 31, 2020 amounted to IDR85 billion, an increase of IDR32 billion or 59.93% compared to the position of 31 December 2019 of IDR27 billion. The increase is mainly from the component of employment benefit liabilities in the form of defined benefit plans.

The company have carried out defined benefit plan (JHT) and THT and also defined contribution program (DPLK) for all permanent employees. This defined benefit asset program managed by PT Asuransi Jiwasraya which the founding have got endorsement from The Finance Minister RI. The program give JHT and THT benefit which will be paid to employees at the time of employees pension or desist, as according to regulation of the pension fund.

Ekuitas

Equity

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
			Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk Equity attributable to equity holders of the parent entity	
Modal Saham: Share capital:				
Seri A Dwiwarna - nilai nominal Rp 1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham Series A Dwiwarna - nominal value IDR1,365,160 (full amount) par value per share				
Seri B - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham Series B - nominal value IDR1,000,000 (full amount) par value per share				
Modal dasar: Authorised capital:				
Seri A Dwiwarna - 1 saham Series A Dwiwarna - 1 share				
Seri B - 30.000.000 saham Series B - 30,000,000 shares				
Modal ditempatkan dan disetor penuh: Issued and fully paid:				
Seri A Dwiwarna - 1 saham Series A Dwiwarna - 1 share				
Seri B - 7.638.732 saham Series B - 7,638,732 shares	7.638.733	-	7.638.733	0,00%



Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Penyertaan modal negara <i>The Government's share capital</i>	-	7.638.733	(7.638.733)	-100,00%
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja <i>Remeasurement of post-employment benefits</i>	(27.494)	(13.928)	(13.566)	97,40%
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak <i>Unrealised losses on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax</i>	(73.352)	(230.860)	157.508	-68,23%
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya <i>Appropriated retained earnings</i>	861.844	1.085.206	(223.362)	-20,58%
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya <i>Unappropriated retained earnings</i>	456.133	198.910	257.223	129,32%
	8.855.864	8.678.061	177.803	2,05%
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interest</i>	15	14	1	7,14%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	8.855.879	8.678.075	177.804	2,05%

Jumlah ekuitas Jamkrindo tahun 2020 meningkat 2,05% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari Rp8.678 miliar di tahun 2019 menjadi Rp8.855 miliar di tahun 2020. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp178 miliar menjadi Rp8.856 miliar di tahun 2020.

Total Jamkrindo's equity in 2020 increased by 2.05% compared to the previous year, from IDRR8,678 billion in 2019 to IDR8.855 billion in 2020. The increase was due to an increase in Unappropriated retained earnings of IDR178 billion to IDR8,856 billion in 2020.



LAPORAN LABA (RUGI) DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
PENDAPATAN PENJAMINAN <i>GUARANTEE INCOME</i>				
Imbal jasa penjaminan <i>Gross guarantee fees</i>	2.826.524	2.313.611	512.913	22,17%
Imbal jasa kafalah <i>Gross kafalah fees</i>	500.292	331.501	168.791	50,92%
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan <i>Increase in unearned kafalah fees</i>	(140.126)	(88.315)	(51.811)	58,67%
Premi penjaminan ulang <i>Re-guarantee premiums</i>	(553.297)	(404.725)	(148.572)	36,71%
Imbal jasa penjaminan bersih <i>Net guarantee income</i>	2.633.393	2.152.072	481.321	22,37%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
BEBAN PENJAMINAN <i>GUARANTEE EXPENSES</i>				
Beban klaim <i>Claim expenses</i>				
Beban klaim <i>Claim expenses</i>	2.180.243	2.204.814	(24.571)	(1,11%)
Klaim penjaminan ulang <i>Re-guarantee claims</i>	(372.871)	(408.432)	35.561	(8,71%)
Beban ujarah <i>Ujrah expenses</i>	32.224	25.427	6.797	26,73%
Biaya kafalah lainnya <i>Other kafalah expenses</i>	216	0	216	100,00%
Kenaikan cadangan klaim <i>Increase in claim reserves</i>	527.290	435.083	92.207	21,19%
Pendapatan subrogasi - bersih <i>Subrogation income - net</i>	(518.767)	(504.806)	(13.961)	2,77%
Pendapatan ujarah penjaminan ulang <i>Re-guarantee ujrah income</i>	(17.935)	(14.127)	(3.808)	26,96%
Jumlah beban klaim <i>Total Claim expenses</i>	1.830.400	1.737.959	92.441	5,32%
Penjaminan bersih <i>Net guarantee</i>	802.993	414.113	388.880	93,91%
Komisi - bersih <i>Commission - net</i>	(27.195)	(48.138)	20.943	(43,51%)
Pendapatan investasi - bersih <i>Investment income - net</i>	799.211	782.810	16.401	2,10%
Beban usaha <i>Operating expenses</i>	(903.670)	(991.759)	88.089	(8,88%)
Pendapatan lain-lain <i>Others income</i>	51.130	24.612	26.518	107,74%
LABA SEBELUM PAJAK <i>PROFIT BEFORE TAX</i>	722.469	181.638	540.831	297,75%
Beban pajak final <i>Final tax expense</i>	(118.307)	(139.147)	20.840	(14,98%)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN <i>PROFIT BEFORE INCOME TAX</i>	604.162	42.491	561.671	1321,86%
(Beban)/manfaat pajak penghasilan <i>Income tax (expense)/benefit</i>	(148.029)	156.420	(304.449)	(194,64%)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN <i>NET PROFIT FOR THE YEAR</i>	456.133	198.911	257.222	129,32%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN <i>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</i>				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali imbalan kerja <i>Items that will not be reclassified to profit or loss: Remeasurement of post employment benefit</i>	(20.251)	3.184	(23.435)	(736,02%)
Efek pajak terkait <i>Related tax effect</i>	6.685	(796)	7.481	(939,82%)
	(13.566)	2.388	(15.954)	(668,09%)



Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kerugian yang belum terealisasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual <i>Unrealised losses on financial assets available for sale</i>	(12.737)	(31.022)	18.285	(58,94%)
Efek pajak terkait <i>Related tax effect</i>	0	0	-	0,00%
	(12.737)	(31.022)	18.285	(58,94%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan yang belum terealisasi aset keuangan yang tersedia untuk dijual <i>Items that will be Reclassified to profit or loss: Unrealised gains financial assets available for sale</i>	133.520	128.483	5.037	3,92%
Efek pajak terkait <i>Related tax effect</i>	(17.737)	2.485	(20.222)	(813,76%)
	115.783	130.968	(15.185)	(11,59%)
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak <i>Other comprehensive income for the year, net of tax</i>	89.480	102.334	(12.854)	(12,56%)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN <i>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR</i>	545.613	301.245	244.368	81,12%
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA: <i>INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:</i>				
Pemilik entitas induk <i>Owner of the parent entity</i>	456.312	198.913	257.399	129,40%
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interest</i>	1	(2)	3	(150,00%)
	456.313	198.911	257.402	129,41%
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA: <i>COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</i>				
Pemilik entitas induk <i>Owner of the parent entity</i>	545.612	301.247	244.365	81,12%
Kepentingan non-pengendali <i>Non-controlling interest</i>	1	(2)	3	(150,00%)
	545.613	301.245	244.368	81,12%

Imbal Jasa (Pendapatan) Penjaminan ("IJP") Bersih**Net Guarantee Fee ("IJP")**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Imbal jasa penjaminan <i>Gross guarantee fees</i>	2.826.524	2.313.611	512.913	22,17%
Imbal jasa kafalah <i>Gross kafalah fees</i>	500.292	331.501	168.791	50,92%
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan <i>Increase in unearned kafalah fees</i>	(140.126)	(88.315)	(51.811)	58,67%

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Premi penjaminan ulang <i>Re-guarantee premiums</i>	(553.297)	(404.725)	(148.572)	36,71%
Imbal jasa penjaminan bersih <i>Net guarantee income</i>	2.633.393	2.152.072	481.321	22,37%

Tahun 2020 Jamkrindo membukukan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Bersih sebesar Rp2.633 miliar, naik 22,37% dibandingkan IJP Bersih tahun sebelumnya sebesar Rp2.152 miliar. Peningkatan IJP Bersih tersebut sejalan dengan peningkatan IJP Perusahaan, khususnya IJP KUR yang meningkat 28,93%. Tahun 2020 Perusahaan juga mencatat IJP dari Program PEN sebesar Rp124 miliar.

In 2020 Jamkrindo booked net guarantee income amounted to IDR2,633 billion, an increase 22.37% compared to net guarantee income in the previous year of IDR2,152 billion. The increase in net guarantee income was according to the Company's guarantee income, especially in KUR guarantee income was increased by 28.93%. In 2020, the Company recorded also guarantee income from PEN Program amounted to IDR124 billion.

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat <i>Kredit Usaha Rakyat</i>	1.957.907	1.518.547	439.360	28,93%
Kredit Konsumtif <i>Consumptive credit</i>	380.628	401.352	(20.724)	(5,16%)
Kredit Produktif <i>Productive Credit</i>	303.335	301.709	1.626	0,54%
PEN	123.965	0	123.965	100,00%
Suretyship	68.365	97.935	(29.570)	(30,19%)
Restitusi IJP <i>Guarantee restitution</i>	(7.676)	(5.932)	1.744	29,40%
Jumlah Imbal Jasa Penjaminan <i>Total Guarantee Fee</i>	2.826.524	2.313.611	512.913	22,17%

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka waktu kredit. Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan, IJP dibayar sekaligus di muka. Sedangkan Tarif IJP Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tanggal 24 September 2008 tentang fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat dan Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2014 tanggal 1 Oktober 2014 mengatur IJP KUR dibayarkan per tahun oleh pemerintah dengan periode penagihan pada bulan April dan Oktober.

Guarantee Fee (IJP) is the premium received by the company in order to secure credit activities. The amount of IJP is measure from IJP rate, credit limit, and credit period. For existing credits, the amount of IJP rate is determined by considering such as: product of guarantee, guarantee risk, and guarantee period. IJP is paid in advance. Meanwhile Rates of KUR Guarantee Fee is regulated in Minister of Finance Regulation Number 135/PMK.05/2008 dated September 24, 2008 concerning KUR Guarantee facility and Ministry of Finance Regulation No.190/PMK.05/2014 dated October 1, 2014 regulated IJP KUR paid once a year by the government with billing period in April and October.

**Beban Klaim****Claim Expenses**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Kredit Usaha Rakyat Kredit Usaha Rakyat	1.203.536	1.229.433	(25.897)	(2,11%)
Konsumtif Consumptive	485.183	587.463	(102.280)	(17,41%)
Produktif Productive	362.865	311.007	51.858	16,67%
Suretyship Suretyship	128.659	76.911	51.748	67,28%
Jumlah Beban Klaim Total Claim Expenses	2.180.243	2.204.814	(24.571)	(1,11%)

Jumlah beban Klaim Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.180 miliar, turun 1,11% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp2.205 miliar. Penurunan beban klaim tersebut utamanya disebabkan meningkatnya beban klaim kredit konsumtif sebesar Rp102 miliar dan kredit usaha rakyat sebesar Rp26 miliar.

Total the Company's Claim Expenses in 2020 was recorded at IDR2,180 billion, a decrease of 1.11% compared to 2019 of IDR2,205 billion. The decrease in claim expenses was mainly due to the increasing Claim Expense - in consumptive credit amounting to IDR102 billion and kredit usaha rakyat of IDR26 billion.

Beban klaim adalah beban yang timbul sebagai akibat macetnya kredit akibat risiko yang ditanggung Perusahaan. Jumlah klaim yang dapat dibayarkan oleh Perusahaan kepada Penerima Jaminan terdiri dari hutang pokok, hutang bunga dan denda yang tidak dapat dipenuhi oleh terjamin pada saat kredit jatuh tempo dan kredit tidak dapat diperpanjang lagi atau sebelum kredit jatuh tempo sesuai kesepakatan yang ada.

Claim expenses are expenses incurred as a result of credit loss due to the risks covered by the company. The number of claims that can be paid by the company to the Recipient of Guarantee include of principal payable, interest payable and penalties that can not be met by the Guaranteed at the time of loan maturity and the credit can not be extended again or before the due credit according to existing agreements.

Pendapatan Investasi - Bersih**Investment Income - Net**

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Bunga Deposito Time Deposit Interest	382.815	486.672	(103.857)	(21,34%)
Bunga Obligasi Bond Interest	199.733	170.800	28.933	16,94%
Pendapatan Reksadana Mutual Fund Income	180.236	87.419	92.817	106,17%
Pendapatan Sukuk Sukuk Income	15.704	10.958	4.746	43,31%
Dividen Dividend	6.067	8.360	(2.293)	(27,43%)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Pendapatan Capital Gain Capital Gain Interest	14.078	37.628	(23.550)	(62,59%)
Efek Beragunan Aset Security (Assets Underlying)	4.929	4.715	214	4,54%
	803.562	806.552	(2.990)	(0,37%)
Beban Investasi Investment Expense	(4.351)	(23.742)	19.391	(81,67%)
	799.211	782.810	16.401	2,10%

Tahun 2020 Perusahaan membukukan pendapatan investasi bersih sebesar Rp799 miliar, meningkat 2,10% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp783 miliar. Peningkatan tersebut utamanya diperoleh dari peningkatan bunga obligasi dan pendapatan reksadana yang masing-masing meningkat 16,94% dan 106,17%. Namun demikian, pendapatan *capital gain* saham tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp38 miliar di tahun 2019 menjadi Rp14 miliar di tahun 2020.

In 2020 the Company posted a net investment income of IDR799 billion, increased by 2.10% compared to the previous year of IDR783 billion. The increase was mainly derived from the increase in bond interest and mutual fund income which increased by 16.94% and 106.17%, respectively. In addition, Capital Gain Share Interest income also decreased significantly, namely from IDR38 billion in 2019 to IDR14 billion in 2020.

Beban Usaha

Operating Expenses

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Beban Operasional Operating Expenses	181.062	188.919	(7.857)	(4,16%)
Beban Sumber Daya Manusia Human Resources Expenses	450.652	438.636	12.016	2,74%
Beban Administrasi Kantor dan Umum General and Administrative Expenses	161.348	141.205	20.143	14,27%
Beban Sistem, Teknologi dan Pengembangan Usaha Technology, System and Development Expenses	26.222	41.054	(14.832)	(36,13%)
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	819.283	809.813	9.470	1,17%

Jumlah beban usaha Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp819 miliar, meningkat 1,17% dari tahun sebelumnya Rp810 miliar. Peningkatan beban usaha tersebut disebabkan meningkatnya beban sumber daya manusia dan beban administrasi dan umum masing-masing sebesar Rp12 miliar dan Rp20 miliar. Di tahun 2020, Perusahaan berhasil melakukan efisiensi operasional yang ditunjukkan dengan penurunan beban operasional sebesar 4,16% menjadi Rp181 miliar dari Rp189 miliar di tahun 2019.

Total Jamkrindo's operating expenses in 2020 amounted to IDR819 billion, an increase of 1.17% from the previous year of IDR810 billion. The increase in operating expenses was due to increased Human Resources Expenses and General and Administrative Expenses of IDR12 billion and IDR20 billion, respectively. In 2020, the Company managed to perform operational efficiency indicated by a decrease in operating expenses by 4.16% IDR181 billion from IDR189 billion in 2019.



Pendapatan (Beban) Lain - Bersih

Other Income (Expenses) - Net

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Pendapatan non-operasional Non-operational Income	44.334	14.566	29.768	204,37%
Pendapatan Jasa Giro Interest Income	4.550	5.117	(567)	(11,08%)
Pendapatan Jasa Administrasi Penjaminan Administration guarantee income	2.178	4.925	(2.747)	(55,78%)
Pendapatan Gedung Building income	57	0	57	0,00%
Pendapatan Administrasi BUM Administration expenses BUM	11	4	7	175,00%
	51.130	24.612	29.768	204,37%

Tahun 2020, Jamkrindo membukukan pendapatan lain-lain sebesar Rp51 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp30 miliar atau 204,37% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yaitu sebesar Rp25 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan peningkatan pendapatan non-operasional menjadi Rp44 miliar dari Rp15 miliar di tahun 2019.

In 2020, Jamkrindo posted other incomes of IDR51 billion, an increase of IDR30 billion or 204.37% compared to the same period in 2019 of IDR25 billion. The increase was mainly due to the increase in non-operational income to IDR44 billion from IDR15 billion in 2019.

Laba Sebelum Pajak

Pada tahun 2020, Perusahaan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp722 miliar, naik signifikan dibandingkan laba sebelum pajak tahun sebelumnya sebesar Rp182 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan penjaminan bersih Perusahaan tahun 2020.

Income Before Tax

In 2020, the Company posted an income before tax of IDR722 billion, significantly increase compared to income before tax in the previous year of IDR182 billion. The decrease was primarily due to the Increase in the Company's net guarantee in 2020.

Beban Pajak Penghasilan Bersih

Beban pajak penghasilan bersih Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp118 miliar dari tahun sebelumnya Rp139 miliar.

Income Tax Expenses-Net

The Company's net income tax expense in 2020 was recorded at IDR118 billion from the previous year of IDR139 billion.

Laba Tahun Berjalan

Tahun 2020, Perusahaan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp456 miliar, meningkat 129,32% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp199 miliar.

Current Year Income

In 2020, the Company posted a current year income of IDR456 billion, an increase 129.32% compared to 2019 of IDR199 billion.

Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain

Tahun 2020, Perusahaan membukukan pendapatan komprehensif sebesar Rp89 miliar, turun 12,56% dari tahun sebelumnya Rp102 miliar.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan Perusahaan tahun 2020 tercatat sebesar Rp546 miliar, naik dibandingkan tahun sebelumnya Rp301 miliar.

Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2020 adalah sebesar Rp456 miliar, naik sebesar Rp257 miliar atau 129,40% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp199 miliar. Sedangkan laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non pengendali adalah sebesar Rp1.000.000, meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar -Rp2 juta.

Other Comprehensive Income (Expense)

In 2020, the Company posted comprehensive income of IDR89 billion, a decrease of 12.56% from the previous year of IDR102 billion.

Comprehensive Income The Year

The Company's comprehensive income the year 2020 was recorded at IDR546 billion, increased from IDR301 billion in the previous year.

Comprehensive income the year attributable to Equity Holders of The Parent Entity in 2020 amounted to IDR456 billion, increased by IDR257 billion or 129.40% compared to 2019 of IDR199 billion. Meanwhile, comprehensive income the year attributable to Non-controlling Interest amounted to IDR1,000,000, an increase compared to -IDR2 million in 2019.

LAPORAN ARUS KAS

Statements of Cash Flows

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi Cash Flow From Operating Activities	299.192	(220.746)	519.938	(235,54%)
Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi Cash Flow From Investment Activities	113.299	(280.031)	393.330	(140,46%)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan Cash Flow From Financing Activities	(400.000)	(39.754)	360.246	906,19%
Kenaikan/(Penurunan) Saldo Kas Dan Setara Kas Increase/Decreased (Net) In Cash and Cash Equivalents	12.491	(479.091)	491.582	102,61%
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Equivalents at The Beginning of Year	88.614	567.705	(479.091)	(84,39%)
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Equivalents at The End of Year	101.105	88.614	12.491	14,10%

Jumlah kas dan setara kas Perusahaan pada akhir tahun tercatat sebesar Rp101 miliar, meningkat 14,10% atau sebesar Rp12 miliar dibandingkan posisi pada awal tahun sebesar Rp89 miliar. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh peningkatan arus kas dari aktivitas operasi.

The Company's cash and cash equivalents at the end of year stood at IDR101 billion, an increase of 14,10% or IDR12 billion compared to the position at the beginning of year of IDR89 billion. The increase was primarily attributable to increased in cash flow from operating activities.



Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Cash Flow From Operating Activities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Penerimaan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Receipt from Guarantee Fee	2.803.781	2.811.560	(7.779)	(0,28%)
Penerimaan Klaim dari Mitra Co-Guarantee Payment to Co-Guarantee Partners	504.954	597.229	(92.275)	(15,45%)
Penerimaan dari Aktivitas Operasi Lainnya Receipt from Other Operating Activities	601.528	137.055	464.473	338,90%
Pembayaran IJP Co-guarantee Payment of Fee	(485.850)	(550.507)	(64.657)	(11,74%)
Pembayaran Klaim Payment of Claims	(1.982.871)	(1.980.739)	(2.132)	0,11%
Pembayaran Biaya Payment of Expenses	(448.844)	(671.060)	222.216	(33,11%)
Pembayaran kepada karyawan Payment to employee	(437.366)	(433.870)	(3.496)	0,81%
Pembayaran pajak penghasilan Payment of income tax	(256.140)	(130.414)	(125.726)	96,41%
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi Net cash provided from operating activities	299.192	(220.746)	519.938	(235,54%)

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat pendapatan kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp299 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp520 miliar dibandingkan tahun 2019, yang mencatat penggunaan kas bersih sebesar Rp221 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena peningkatan penerimaan aktivitas operasi lainnya yang meningkat menjadi Rp602 miliar dari Rp137 miliar di tahun 2019.

In 2020, the Company recorded net cash income used for operating activities of IDR299 billion, an increase of IDR520 billion compared to 2019, which recorded a net cash use of IDR221 billion. The increase was mainly due to the increase in Receipt from Other Operating Activities amounted to IDR602 billion from IDR137 billion in 2019.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flow from Investment Activities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Penerimaan Hasil Investasi <i>Receipt from Return of Investment</i>	911.311	863.116	48.195	5,58%
Penempatan Investasi yang Diperkenankan <i>Placement of Allowed Investment</i>	(912.436)	(1.196.913)	(284.477)	(23,77%)
Pembelian Aset Tetap <i>Acquisition of Fixed Assets</i>	114.424	115.206	(782)	(0,68%)
Arus kas bersih yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas investasi <i>Net cash provided from investing activities</i>	113.299	(280.031)	393.330	140,46%

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat penerimaan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp113 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp393 miliar dibandingkan tahun 2019, yang mencatat pengeluaran bersih sebesar Rp280 miliar. Peningkatan tersebut terutama karena adanya peningkatan penerimaan investasi sebesar Rp48 miliar atau 5,58%.

In 2020, the Company recorded net cash receipts from investment activities amounting to IDR113 billion, an increase of IDR393 billion compared to 2019, which recorded net cash receipts of IDR280 billion. The increase was mainly due to the increase in investment activity of IDR48 billion or 5.58%.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flow from Financing Activities

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
			Rp IDR	%
Dividen Penerimaan (Pembayaran) Deviden <i>Dividend</i>	(400.000)	(39.754)	360.246	906,19%
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan <i>Net cash provided from financing activities</i>	(400.000)	(39.754)	360.246	906,19%

Pada tahun 2020, Perusahaan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp400 miliar yang digunakan untuk pembayaran dividen, meningkat sebesar Rp360 miliar dari tahun sebelumnya Rp40 miliar.

In 2020, the Company recorded net cash used for funding activities amounting to IDR400 billion used for dividend payments, an increase of IDR360 billion from the previous year of IDR40 billion.



RASIO KEUANGAN UTAMA

Key Financial Ratios

Uraian Description	2020	2019
Margin Keuntungan Profit Margin	21,05%	6,19%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income (BOPO)	24,80%	67,74%
Rasio Laba terhadap Ekuitas Return on Equity (ROE)	5,20%	2,33%
Rasio Utang terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio (DER)	186,26%	207,24%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Net Profit Margin	16,14%	8,60%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset Return on Asset (ROA)	4,03%	1,14%
Rasio Lancar Current Ratio	219,19%	205,18%



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

The Company's Ability to Pay Debts and Collectibility of Receivables

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Perusahaan.

The Company's ability to pay debts is reflected in the Company's liquidity and solvency.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek

Sesuai dengan POJK No.2/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Lembaga Usaha Penjamin Pasal 43 ayat (2), rasio likuiditas penjamin ditetapkan paling rendah 120% (seratus dua puluh per seratus).

Ability to Pay Short-Term Debt

Based on POJK No.2/POJK.05/2017, dated January 11, 2017, concerning the Execution of Guarantor Business Institutions, the guarantor's liquidity ratio is set at a minimum of 120% (one hundred twenty per hundred).

Rasio lancar menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Sekalipun mengalami penurunan, terlihat bahwa pada posisi 31 Desember 2020 Perusahaan masih dalam kondisi likuid dengan tingkat likuiditas yang masih berada jauh di atas ambang batas minimal yang ditetapkan dalam Peraturan OJK sebagaimana tersebut di atas.

The current ratio illustrates the Company's ability to pay current liabilities or debt that are due immediately when billed as a whole. Even though it has decreased, it could be seen that as of December 31, 2020, the Company was still in a liquid condition with a liquidity level that was still far above the minimum threshold stipulated in the OJK Regulations as mentioned above.

Selain menggunakan rasio lancar, Perusahaan menggunakan rasio *cash flow to debt* untuk mengukur tingkat risiko likuiditasnya yaitu dengan membandingkan jumlah kas dan setara kas dengan jumlah liabilitas dikurangi dengan pendapatan ditangguhkan. Risiko likuiditas perusahaan pada posisi 31 Desember 2020 sejumlah 219,19% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 205,18%.

In addition to using the current ratio, the Company uses cash flow to debt ratio to measure the level of liquidity risk by comparing the amount of cash and cash equivalents with the number of liabilities minus deferred income. The Company's liquidity risk as of December 31, 2020, was 219.19% increased compared to 2019, which amounted to 205.18%.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang

Dalam mengukur tingkat solvabilitas Perusahaan digunakan rasio hutang terhadap modal (*debt to equity ratio*) yang menunjukkan kemampuan Perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa penjaminan, rasio tersebut dapat dilihat dari tingkat kesehatan Perusahaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 rasio DER PT Jamkrindo adalah sebesar 186,26%, menunjukkan bahwa kemampuan Perusahaan memenuhi kewajibannya cukup baik, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, angka DER Perusahaan mencapai 207,24%.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Dalam industri penjaminan istilah kolektibilitas piutang diartikan sebagai aging piutang yaitu umur piutang yang belum dilakukan pembayaran. Berikut data umur dan saldo piutang Kredit Program Pemerintah (KUR dan PEN) per Desember 2020 beserta pembayaran piutang selama tahun 2020:

Ability to Pay Long-Term Debt

In measuring the Company's solvency level, the debt to equity ratio is used that shows the ability of the Company to pay all of its obligations both short and long term. As a SOEs engaged in guarantee services, the ratio can be seen from the Company's soundness level as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number: PER-10/MBU/2014 dated July 25, 2014, concerning Indicators of Soundness Level Assessment of Financial Services State-Owned Enterprises in the Field of Insurance and Guarantee Services Business.

As of December 31, 2020, the DER ratio of PT Jamkrindo was 186.26%, indicating that the Company's ability to meet its obligations was quite good, decrease compared to 2019, the Company's DER reached 207.24%.

Collectibility of Receivables

In the guarantee industry, the term collectibility of receivables is interpreted as the aging of trade receivables namely the age of receivables that have not been paid. The following data on the aging of trade receivables and balance of Government Program Credit Receivables (KUR and PEN) as of December 2020 along with receivables payments during 2020:

Umur Piutang Aging of Trade Receivables	Outstanding Piutang Outstanding Receivables			Pembayaran Piutang Receivable Payment		
	KUR Gen 1 KUR Gen 1	KUR Gen 2 KUR Gen 2	PEN PEN	KUR Gen 1 KUR Gen 1	KUR Gen 2 KUR Gen 2	PEN PEN
>120	99,060,267,764					
>108	119,009,582,145					
>96	244,770,412,230					
>84	1,066,126,537,652					
>60		16,869,406,569		8,941,509,896	1,453,494,235,315	386,848,045,208
>48		73,324,232,527				
>36		127,958,929,542				
>24		198,190,516,448				
>12		556,057,584,967				
0 - 12		1,944,125,043,609	935,798,302			
Total	1,528,966,799,791	2,916,525,713,661	935,798,302	8,941,509,896	1,453,494,235,315	386,848,045,208



Adapun data umur dan saldo piutang Mitra Mitigasi Risiko per Desember 2020 beserta pembayaran piutang selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Data on the aging of trade receivables and balance of Risk Mitigation Partners Receivables as of December 2020 along with receivables payments during 2020 are as follows:

1. Umur Piutang

1. Aging of Trade Receivables

Kriteria Umur Piutang Aging of Trade Receivables	PT Heksa Solution Insurance	PT Asuransi Jiwasraya	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	PT BRI Insurance	PT Reasuransi Nasional Indonesia	PT Reasuransi Indonesia Utama
>120 Bulan >120 Months	4,350,000,00					
>96 Bulan >96 Months	371,494,640.50					
>84 Bulan >84 Months	1,422,479,125.00					
>72 Bulan >72 Months	6,186,652,473.90					
>60 Bulan >60 Months	10,351,836,452.62					
>48 Bulan >48 Months	14,350,779,218.59			336,164,556.12		
>36 Bulan >36 Months	10,261,284,137.68	52,903,385.00		741,613,915.05		
>24 Bulan >24 Months	2,103,890,045.28	121,905,298.40		389,945,863.41		44,715,918,878.58
>12 Bulan >12 Months	344,807,243.96	682,689,517.32		124,791,860.76	103,165,141,721.32	27,151,523,956.86
	1,720,763,582.01	2,035,892,894.14	6,579,997,471.46	12,442,591,218.99	183,999,371,579.03	41,060,474,879.58
Total	47,118,336,919.53	2,893,391,094.86	6,579,997,471.46	14,035,107,414.33	287,164,513,300.34	112,927,917,715.01

2. Pembayaran Piutang Selama Tahun 2020

2. Receivables Payment in 2020

No.	Mitra Mitigasi Risiko Risk Mitigation Partner	Penggantian Pembayaran Klaim Claim Reimbursement
1	PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH	21,122,420,691
2	PT HEKSA SOLUTION INSURANCE	14,538,284,116
3	PT ASURANSI JIWASRAYA	433,309,034
4	PT ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA	463,006,447
5	PT BRI INSURANCE	9,541,860,161
6	PT REASURANSI NASIONAL INDONESIA	84,106,972,305
7	PT REASURANSI INDONESIA UTAMA	35,125,694,158
	Jumlah Total	165,331,546,911



STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Capital Structure Policies

Rincian Struktur Modal

Struktur modal Perusahaan per 31 Desember 2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Capital Structure Details

The Company's capital structure as of December 31, 2020 can be described in the following table:

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020		2019		Pertumbuhan (Penurunan) Increase/ Decrease	
	Rp IDR	%	Rp IDR	%	Rp IDR	%
Liabilitas Liabilities	10.266.950	53,69%	8.092.195	48,25%	2.174.755	26,87%
Ekuitas Equity	8.855.879	46,31%	8.678.075	51,75%	177.804	2,05%
Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer dan Ekuitas Total Liabilities, Temporal Syirkah Fund and Equity	19.122.829	100%	16.770.270	100%	2.352.559	14,03%
Rasio DER DER Ratio		186,26%		207,18%		(10,12%)

Komposisi struktur modal Perusahaan tahun 2020 adalah 45,53% berasal dari liabilitas dan 53,69% berupa ekuitas, komposisi ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.

The Company's capital structure composition in 2020 is 45.53% derived from liabilities and 53.69% in the form of equity, this composition is relatively the same as the previous year.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Permodalan

Perusahaan memiliki kebijakan untuk menitikberatkan penggunaan ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan dalam mengelola sumber pembiayaan. Penggunaan ekuitas harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna menjaga kemampuan perusahaan dalam menjalankan operasional usahanya. Oleh sebab itu, Perusahaan juga membentuk cadangan-cadangan yang bersumber dari laba ditahan. Sampai dengan tahun 2020, struktur modal Jamkrindo masih didominasi oleh ekuitas.

Management Policy on Capital Structure

The Company has a policy to emphasize the use of equity owned by the Company in managing financing sources. The use of equity must be implemented effectively and efficiently in order to maintain the company's ability to carry out its business operations. Therefore, the Company also establishes reserves derived from retained earnings. Until 2020, Jamkrindo's capital structure is still dominated by equity.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebutuhan permodalan Perusahaan senantiasa direncanakan, dibahas dan dipantau secara rutin pada rapat Komite Permodalan dengan didukung oleh analisis data yang lengkap dan memadai. Dasar penetapan kebijakan atas struktur modal Perusahaan senantiasa berlandaskan pada beberapa pertimbangan, di antaranya estimasi ekonomi, potensi pertumbuhan bisnis, risk appetite, dan target rasio permodalan.

Basic Management Policy on Capital Structure

The Company's capital needs are always planned, discussed and monitored regularly at meetings of the Capital Committee supported by a complete and adequate data analysis. The policy basis for establishing the Company's capital structure is always based on several considerations, including economic estimation, business growth potential, risk appetite, and capital ratio targets.



Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbal hasil bagi Pemegang Saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Management policy on capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain business continuity so that it can still provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and maintain an optimal capital structure to reduce capital costs.

Perusahaan mematuhi peraturan pajak yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015, dimana rasio maksimum untuk Debt to Equity (DER) yang diperbolehkan untuk tujuan pajak adalah 4:1. Pada tahun 2020, DER yang dimiliki oleh Perusahaan adalah 1,86. Dengan kondisi tersebut, rasio hutang terhadap modal Perusahaan masih berada pada kategori yang baik.

The Company complies with the prevailing tax regulation, namely Regulation of the Minister of Finance No.169/PMK.010/2015, where the maximum ratio for Debt to Equity (DER) allowed for tax purposes is 4:1. By 2020, der owned by the Company is 1.86. With these conditions, the Company's debt-to-capital ratio is still in the good category.



IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Material Commitments for Capital Expenditures

Sepanjang tahun 2020, Jamkrindo tidak melakukan ikatan dengan pihak manapun terkait investasi barang modal.

Throughout 2020, Jamkrindo does not have commitment with any party related to capital expenditures.



INVESTASI BARANG MODAL YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Investment In Capital Expenditures Realized in the Financial Year

Jenis Investasi <i>Types of Investment</i>	Tujuan Investasi <i>Objective</i>	Nilai Investasi (Rp Juta) <i>Value (IDR Million)</i>
Tanah <i>Land</i>		35.493
Bangunan Kantor <i>Buildings</i>		12.143
Perumahan Dinas <i>Houses</i>		231
Inventaris Kantor <i>Office Inventory</i>		25.169
Inventaris Rumah Dinas <i>Houses Equipment</i>		735
Kendaraan Bermotor <i>Vehicles</i>		140
Aset dalam penyelesaian <i>Aset dalam penyelesaian</i>		8.339
Jumlah Investasi <i>Total Capital</i>		82.250

Jumlah investasi barang modal yang dikeluarkan Perusahaan di tahun 2020 mencapai Rp82 miliar, yang digunakan untuk pembelian aset tetap dalam bentuk tanah, bangunan kantor, inventaris kantor, kendaraan bermotor, inventaris rumah dinas dan aset TI. Investasi barang modal tersebut utamanya ditujukan untuk penunjang operasional Perusahaan dan sekaligus sebagai investasi Perusahaan.

Total the Company's capital expenditures in 2020 reached IDR82 billion, which is used for the purchase of fixed assets in the form of land, buildings, office inventory, vehicles, houses equipment and IT assets. The investment of capital expenditures is primarily intended to support the Company's operations and at the same time as the Company's investment.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts that Occur After the Date of the Accountant's Report

Terdapat beberapa informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan yang dilaporkan sebagai berikut:

There is some material information and facts in subsequent events which is reported as follows:

1. Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Perusahaan menilai pada umumnya, peraturan pelaksana tersebut tidak akan memiliki dampak buruk terhadap bisnis dan operasional Perusahaan.

Pada saat laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

1. Omnibus Law

In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Omnibus Law. The Company assessed that generally there is no potential adverse impact of the Law to the Company's business and operation.

As at the authorisation date of this consolidated financial statement, the Company is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Omnibus Law, as well as the impact on the Company's consolidated financial statements.

2. Perubahan anggaran dasar

Pada 10 Februari 2021, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Notaris Hadijah, S.H No. 13 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2021 melalui surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0175918. Berikut adalah perubahan atas modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham:

2. The amendment of articles of association

On February 10, 2021, there was an amendment to the Company's Articles of Association, notarized by Notarial Deed No. 13 by Hadijah, S.H. regarding the change in authorised capital, issued and fully paid capital, and share ownership. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.03-0175918 dated 19 March 2021. Below are the changes of authorised capital, issued and fully paid capital and shareholder ownership:

	2021	2020	
Modal Ditempatkan dan Disetor (Rp juta) Issued and fully paid capital (IDR million)	10,638,733	7,638,733	
10 Februari 2021 February 10, 2021			
Pemegang saham Shareholders	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh (Rp juta) Total issued and fully paid shares (IDR million)	Persentase kepemilikan (%) Percentage of ownership	Jumlah Total
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia	10,638,732	99,99%	10.638.732
Pemerintah Republik Indonesia The Government of the Republic of Indonesia	1	0,01%	1
	10,638,733	100,00%	10,638,733



3. Perubahan Susunan Dewan Direksi

Pada tanggal 22 Maret 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Direksi Perseroan berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No.SK-93/MBU/03/2021 – No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jamkrindo. Dan telah memenuhi uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No.S-3020/NB.111/2021.

3. Changes of Board of Directors

On March 22, 2021, there are changes in the composition of the Company's Board of Directors based on Decree of the Ministry of State Owned Enterprises No. 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the PT Jamkrindo. And has met the fit and proper test by the Financial Services Authority with No. S-3020/NB.111/2021.

	18 Januari 2021 January 18, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020
Dewan Direksi <i>Board of Directors</i>		
Direktur Utama <i>President Director</i>	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan <i>Business Guarantee Director</i>	Suwarsito	Amin Mas'udi
Direktur Operasional dan Jaringan <i>Operational and Network Director</i>	Kadar Wisnuwarman	Kadar Wisnuwarman
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Umum dan Kepatuhan <i>Director of Human Resources Management, General affair and Compliance</i>	Sulis Usdoko	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Finance, Investment and Risk Management Director</i>	I. Rusdonobanu	I. Rusdonobanu

Pada tanggal 18 Januari 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. SK-19/MBU/01/2021 - No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jamkrindo.

On January 18, 2021, there was a change in the composition of the Company's Board of Commissioners based on the Decree of the Ministry of SOEs No. SK-19/MBU/01/2021 - No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo.

Berdasarkan salinan keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

Based on the copy of the decision above, the composition of the Company's Board of Commissioners is as follows:

	18 Januari 2021 January 18, 2021	31 Desember 2020 December 31, 2020
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>		
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Sri Mulyanto	Sri Mulyanto
Komisaris <i>Commissioner</i>	Hernita Alius	Diah Natalisa
Komisaris <i>Commissioner</i>	Noor Ida Khomsiyati	Noor Ida Khomsiyati
Komisaris <i>Commissioner</i>	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni
Komisaris <i>Commissioner</i>	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi



PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI, SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Comparison of Targets And Realizations, as Well as Projections for the Next Year

Perbandingan Target dan Realisasi

Comparison of Targets and Realizations

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Target RKAP 2020 2020 RKAP Target	Realisasi 2020 2020 Realization	Pencapaian RKAP Achievements of RKAP
Imbal Jasa Penjaminan Bersih Net Guarantee Revenues	2.177.498	2.633.393	120,94%
Beban Klaim Claim Expenses	(1.182.858)	(2.180.243)	184,32%
Penjaminan Bersih Net Guarantee	994.641	802.993	80,73%
Pendapatan Investasi Investment Income	524.272	799.211	152,44%
Beban Usaha Operating Expenses	(821.201)	(903.670)	110,04%
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(259.349)	51.130	119,71%
Laba Sebelum Pajak Income Before Tax	438.364	722.469	164,81%
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	327.881	456.133	139,12%

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan bisnis tahun 2020 yang terdampak oleh pandemi COVID-19 Perusahaan melakukan revisi terhadap RKAP tahun 2020. Secara umum, Perusahaan dapat mencapai target-target yang ditetapkan dalam RKAP Revisi 2020 tersebut.

Taking into account the economic and business conditions in 2020 affected by the COVID-19 pandemic, the Company revised the RKAP in 2020. In general, the Company can achieve the targets set in the Revised RKAP 2020.

Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan Bersih yang dibukukan Perusahaan tahun 2020 mencapai 120,94% dari target yang ditetapkan. Pendapatan investasi mencapai 152,44% dari target dan laba tahun berjalan mencapai 164,81% dari target RKAP Revisi 2020.

Net Guarantee Revenues recorded by the Company in 2020 reached 120.94% of the target set. Investment income reached 152.44% of the target and current year income reached 164.81% of the revised RKAP target in 2020.

Proyeksi Satu Tahun ke Depan

Projections for the Next Year

Memasuki tahun 2021, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target yang dituangkan dalam RKAP 2021 yang telah mendapat persetujuan dari Pemegang Saham. Adapun beberapa target utama Perusahaan antara lain:

Entering 2021, the Company has set a number of targets set out in the 2021 RKAP that have been approved by Shareholders. The Company's main targets include:



dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	Target RKAP 2021 RKAP Target 2021
Pendapatan Penjaminan Guarantee Income	3.685.142
Beban Klaim Claim Expenses	2.074.698
Penjaminan Bersih Net Guarantee	1.410.766
Pendapatan Investasi Investment Income	752.793
Beban Usaha Operating Expenses	1.045.937
Pendapatan (Beban) Lain-lain Other Income (Expenses)	(291.248)
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	826.374
Laba Tahun Berjalan Current Year Income	575.029



KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Policies and Dividend Distribution

Kebijakan Dividen

Dasar kebijakan pembagian dividen Perusahaan berlandaskan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pembagian dividen dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan.

Perusahaan berusaha untuk memperhatikan hak para pemegang saham tanpa mengabaikan kondisi keuangan Perusahaan. Keputusan pembagian dividen Perusahaan dikaitkan dengan, antara lain laba bersih yang didapat pada tahun fiskal dan kewajiban Perusahaan untuk mengalokasikan dana cadangan sesuai dengan aturan yang berlaku serta kondisi keuangan Perusahaan. Selain itu, Perusahaan juga mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ke depan dan rencana ekspansi dalam keputusan pembagian dividen.

Dividend Policy

The policy basis for the Company's dividend distributions is based on Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, where dividend distribution is carried out in accordance with the Annual GMS resolutions.

The Company strives to consider the rights of its shareholders without neglecting the Company's financial condition. The decision to distribute dividends of the Company is related to, among others, net profit obtained in the fiscal year and the Company's obligation to allocate reserve funds in accordance with applicable rules and financial conditions of the Company. In addition, the Company also considers the future growth rate and expansion plans in dividend distribution decisions.

Kronologis Pembagian Dividen

Berikut ini adalah ringkasan pembayaran dividen untuk periode tahun buku 2019 dan 2018:

Chronological Dividend Distribution

The following is a summary of dividend payments for the period of financial year 2019 and 2018:

Uraian Description	Tahun Buku 2019 Financial Year of 2019	Tahun Buku 2018 Financial Year of 2018
Laba Bersih (Rp penuh) Net Income (full IDR)	625.778.145.622	397.543.371.999
Jumlah Dividen (Rp penuh) Total Dividend (full IDR)	400.000.000.000	39.754.000.000
Payout Ratio (%) Payout Ratio (%)	64%	10%
Tanggal Pengumuman Date of Announcement	10 Agustus 2020	29 Mei 2019
Tanggal Pembayaran Date of Payment	18 Agustus 2020	27 Juni 2019

KONTRIBUSI KEPADA NEGARA Contribution to the Country

Selain memberikan dividen, Jamkrindo juga memberikan kontribusi kepada Negara dalam bentuk pajak. Tahun 2020, Jamkrindo telah memenuhi seluruh kewajiban pajaknya dengan rincian sebagai berikut:

In addition to providing dividends, Jamkrindo also contributes to the State in the form of taxes. In 2020, Jamkrindo has fulfilled all of its tax obligations with the following details:

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Jenis Pajak Types of Tax	2020	2019
PPh Pasal 29/Corporate income tax Article 29	132.345	19.896
PPh Pasal 21/Corporate income tax Article 21	8.589	7.164
PPh Pasal 23/Corporate income tax Article 23	334	453
PPh Pasal 4 ayat 2/Corporate income tax Article 4 (2)	146	541
PPh Pasal 22/Corporate income tax Article 22	23	41
PPh Pasal 26/Corporate income tax Article 26	-	36
Total	143.075	29.942

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN Share Ownership Program by Employees and/or Management

Hingga akhir tahun 2020, Jamkrindo tidak melaksanakan program kepemilikan saham oleh manajemen dan/atau karyawan (ESOP/MSOP). Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait *stock option* yang dimiliki pekerja dan manajemen, baik jumlah saham dan harga *exercise*, jangka waktu, persyaratan pekerja dan/atau manajemen yang berhak.

By the end of 2020, Jamkrindo does not implement a share ownership program by management and/or employees (ESOP/MSOP). As such, this Annual Report does not present information regarding *stock options* owned by employees and management, either the number of shares and exercise price, term, employee requirements and/or entitled management.



REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Realization of the Use of Funds Resulting from the Public Offering

Jamkrindo adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara. Sampai dengan akhir tahun 2020, Perum Jamkrindo belum melaksanakan Penawaran Saham Umum di bursa efek manapun. Dengan demikian Laporan Tahunan ini tidak menyajikan informasi terkait dengan total perolehan dana, rencana penggunaan dana, rincian penggunaan dana, saldo dana dan tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dari kegiatan Penawaran Saham Umum Perusahaan

Jamkrindo is a State-Owned Enterprise (SOE) whose 100% shares are owned by the State. Until the end of 2020, Jamkrindo has not conducted a Public Offering at any stock exchange. As such, this Annual Report does not present information related to the total acquisition of funds, the plan of use of funds, details of the use of funds, the balance of funds and the approval date of the General Meeting of Shareholders of the Company's Public Offering activities



INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, RESTUKRISASI UTANG/MODAL

Material Information on Investment, Expansion, Divestment, Merger/Consolidation of Business, Acquisition, Debt/Capital Restructuring

Tidak terdapat informasi dan fakta material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan pada tahun 2020.

There is no material information and facts regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring conducted by the Company in 2020.



INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Information Regarding Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Containing Conflicts of Interest

Selama tahun 2020, Jamkrindo tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

During 2020, Jamkrindo does not conduct material transactions containing conflicts of interest.

Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transactions with Affiliated Parties

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

The Business Group conducts transactions with related parties as defined in PSAK 7 (Revised 2010), "Disclosure of Related Parties".

Nama dan Sifat Hubungan Berelasi

Names and Nature of Related Relationships

Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relationships</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transactions</i>
Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan <i>The Government of Republic Indonesia through the Ministry of Finance</i>	Pemegang Saham <i>Controlling Shareholder</i>	Piutang IJP KUR ; Pendapatan IJP KUR <i>IJP KUR Receivables; IJP KUR Revenue</i>
Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>	Manajemen Kunci <i>Key Management</i>	Gaji dan Tunjangan Dewas <i>Salaries and Allowances</i>

Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relationships</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transactions</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Syariah Mandiri	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Negara Indonesia Syariah	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Bank Tabungan Negara Syariah	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Giro, Deposito, Efek-Efek <i>Bank Account, Deposit, Securities</i>
PT Reasuransi Internasional Indonesia	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
Perum Pegadaian (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
Perum Perumahan Nasional (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Angkasa Pura II (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Utama Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Perkebunan Nusantara X (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Danareksa (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>



Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Hubungan <i>Nature of Relationships</i>	Sifat Transaksi <i>Nature of Transactions</i>
PT Waskita Beton Precast Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Pembangunan Perumahan Presisi Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Berelasi dengan Pemerintah <i>Related with The Government</i>	Efek-Efek <i>Securities</i>

Saldo Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Balance Sheets with Affiliated Parties

Uraian <i>Description</i>	2020	2019
Aset <i>Assets</i>		
Jumlah aset dengan pihak berelasi <i>Total assets with related parties</i>	14.230.127	11.708.781
Persentase terhadap jumlah aset <i>Percentage of total assets</i>	74,41%	69,82%
Liabilitas <i>Liabilities</i>		
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi <i>Total liabilities with related parties</i>	210.744	63.569
Persentase terhadap jumlah liabilitas <i>Percentage of total liabilities</i>	2,05%	0,79%
Pendapatan <i>Income</i>		
Jumlah Pendapatan IJP Bruto <i>Total Gross Guarantee Income</i>	2.385.804	1.722.115
Persentase terhadap jumlah Pendapatan IJP Bruto <i>Percentage of Total Gross Guarantee Income</i>	84,41%	68,65%
Jumlah Pendapatan Kafalah Bruto <i>Total Gross Kafalah Income</i>	186.815	1.565
Persentase terhadap jumlah Pendapatan Kafalah Bruto <i>Percentage of Total Gross Kafalah Income</i>	37,34%	0,47%
Jumlah beban penjaminan ulang <i>Total Re-guarantee Expenses</i>	358.295	262.741
Persentase terhadap jumlah beban penjaminan ulang <i>Percentage of Total Re-guarantee Expenses</i>	94,17%	92,27%
Jumlah premi penjaminan ulang bruto <i>Total Gross Re-guarantee Premiums</i>	63.270	-
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang bruto <i>Percentage of Total Gross Re-guarantee Premiums</i>	36,61%	0,00%

Uraian Description	2020	2019
Jumlah klaim bruto Total Gross Claim	1.640.160	1.523.175
Persentase terhadap jumlah klaim bruto Percentage of Total Gross Claim	75,23%	69,08%
Jumlah beban komisi Total Commission fee expense	8.214	6.475
Persentase terhadap jumlah beban komisi Percentage of Total Commission fee expense	19,27%	21,54%
Jumlah Pendapatan ujah Total Ujrah Income	1.520	1.118
Persentase terhadap jumlah Pendapatan ujah Percentage of Total Ujrah Income	4,72%	4,40%
Jumlah Pendapatan subrogasi Total Subrogation Income	434.605	411.129
Persentase terhadap jumlah Pendapatan subrogasi Percentage of Total Subrogation Income	83,78%	81,44%
Jumlah Pendapatan investasi Total Investment Income	655.473	639.955
Persentase terhadap jumlah Pendapatan investasi Percentage of Total Investment Income	82,02%	81,75%
Jumlah beban investasi Total Investment Expenses	(4.351)	(23.742)
Persentase terhadap jumlah beban investasi Percentage of Total Investment Expenses	100,00%	100,00%

Kewajaran dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga.

Fairness and Reason for The Transaction

Management believes transactions with related parties are conducted under the same conditions and requirements as third parties.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERDAMPAK TERHADAP PERUSAHAAN

Changes in Laws and Regulations Affecting the Company

Tahun 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). PP tersebut sekaligus sebagai penanda berdirinya holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, dimana BPUI yang berubah nama menjadi Indonesia Financial Group (IFG) ditunjuk sebagai induk holding.

In 2020, the Government issued Government Regulation (PP) Number 20 Year 2020 regarding increasing the capital participation of the Republic of Indonesia in PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). This PP is also a marker in establishment of BUMN Holding in Insurance and Guarantee, where is BPUI changed his name become Indonesia Financial Group (IFG) and was appointed as holding parent.

Dengan terbitnya PP tersebut, maka status PT Jamkrindo menjadi entitas anak dari IFG.

With this PP, then status of PT Jamkrindo become subsidiary of IFG.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUTANSI

Changes in Accounting Policy

Pada tanggal 1 Januari 2020, Jamkrindo dan Entitas Anak menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) dan interpretasi standar akuntansi keuangan (ISAK) baru dan revisi yang efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi Jamkrindo dan Entitas Anak telah dibuat seperti yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

1. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan yang mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti:
 - a. Klasifikasi dan Pengukuran
 - b. Penurunan Nilai
 - c. Akuntansi Lindung Nilai
2. PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan menetapkan prinsip yang diterapkan Perusahaan untuk melaporkan informasi yang berguna kepada Pengguna Laporan Keuangan tentang sifat, jumlah, waktu dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.
PSAK 72 menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini, yaitu:
 - a. PSAK 23: Pendapatan
 - b. PSAK 34: Kontrak Konstruksi
 - c. ISAK 10: Program Loyalitas Pelanggan
 - d. ISAK 21: Perjanjian Konstruksi Real Estate
 - e. ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan, dan
 - f. PSAK 44: Akuntansi Aktivitas Pengembangan *Real Estate*
3. PSAK 73 tentang Sewa menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sewa. PSAK 73 menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan sewa yang ada saat ini, yaitu:
 - a. PSAK 30: Sewa
 - b. ISAK 8: Penentuan siapakah suatu perjanjian mengandung suatu sewa
 - c. ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif
 - d. ISAK 24: Evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan suatu bentuk legal sewa, dan
 - e. ISAK 25: Hak atas Tanah

On January 1, 2020, Jamkrindo and its Subsidiaries implemented a Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Statements of Financial Accounting Standards (ISAK) that have been revised and effective since that date. Changes to the accounting policies of Jamkrindo and its Subsidiaries have been made as required, in accordance with the transition provisions in each standard and interpretation.

1. *SFAS 71 on Financial Instruments governing changes in requirements related to financial instruments such as:*
 - a. *Classification and Measurement*
 - b. *Impairment*
 - c. *Accounting for Hedging*
2. *SFAS 72 on Revenue from Contracts with Customers establish the Company's principles to report useful information to Users of Financial Statements about the nature, amount, time and uncertainty of income and cash flows arising from contracts with customers.*

SFAS 72 replaces all standards related to current revenue recognition, namely:

- a. *SFAS 23: Revenue*
 - b. *SFAS 34: Construction Contracts*
 - c. *ISFAS 10: Customer Loyalty Program*
 - d. *ISFAS 21: Real Estate Construction Agreement*
 - e. *ISFAS 27: Transfer of Assets from Customers, and*
 - f. *SFAS 44: Accounting for Real Estate Development Activities*
3. *SFAS 73 on Lease establishes the principle of recognition, measurement, presentation and disclosure of leases. SFAS 73 replaces all standards related to the recognition of existing leases, namely:*
 - a. *SFAS 30: Lease*
 - b. *ISFAS 8: Determining who an agreement contains a lease*
 - c. *ISFAS 23: Lease Operations-Incentives*
 - d. *ISFAS 24: Evaluation of the substance of several transactions involving a legal form of lease, and*
 - e. *ISFAS 25: Land Rights*

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA Information Regarding Business Continuity

Dilihat dari aspek bisnis, selama 5 (lima) tahun terakhir Jamkrindo menuntut segenap komponen perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan tepat, serta melakukan perluasan dan penguatan lini usaha dari tingkat pusat sampai ke wilayah pasar potensial yang menjangkau seluruh Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah total karyawan sebanyak 965 per 30 Desember 2020.

Hingga saat ini, Jamkrindo tercatat telah melakukan pengembangan jaringan pelayanan yang cukup signifikan, yaitu telah terjadi pengembangan Divisi di Kantor Pusat dari yang sebelumnya 19 divisi menjadi 17 divisi dan 3 desk pada tahun 2018 melalui Ketetapan Direksi Nomor: 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi. Jamkrindo juga melakukan penambahan Kantor Wilayah dari 3 Kanwil pada 2014 menjadi 9 Kanwil hingga Agustus 2020, serta 35 Kantor Cabang pada 2014 menjadi 56 Kantor Cabang hingga 2020.

Dengan jumlah total karyawan sebanyak 938 orang di seluruh Indonesia, per Agustus 2020, maka diharapkan dapat menjangkau UMKM di seluruh Indonesia. Jamkrindo saat ini memiliki 18 produk penjaminan untuk memenuhi pasar, yaitu Penjaminan KUR, Penjaminan Kredit Konstruksi, Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Distribusi Barang, Penjaminan Pembiayaan Super Mikro, Penjaminan Sistem Resi Gudang, Penjaminan Pembiayaan OTO, Penjaminan FLPP, Penjaminan KPR, Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Supply Chain, Surety Bond, Custom Bond, Penjaminan Keagenan, Payment Bond, Penjaminan Kredit Umum dan Penjaminan CMG.

Selain itu, terkait dengan bergabungnya Jamkrindo kedalam Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan, Perusahaan juga dapat melakukan kolaborasi pada level pengembangan bisnis dan pengembangan produk. Holding juga diharapkan akan mempertajam inovasi dari sisi otomatisasi bisnis penjaminan dan memperkuat model bisnis serta jangkauan bisnis yang ada, termasuk peningkatan model operasional penjaminan di Jamkrindo.

When viewed from the business aspect for the last 5 (five) years, Jamkrindo demands all components of the company to optimize performance so that it can provide fast and precise services, as well as expand and strengthen the business line from the central level to potential market areas that reach all of Indonesia in a sustainable manner with a total number of 965 employees as of December 30, 2020.

Until this time, Jamkrindo is recorded to have developed a significant service network, namely there has been Division development at Head Office from the previous 19 divisions to 17 divisions and 3 desks in 2018 through Board of Directors Decree Number: 01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018 concerning Organizational Structure. Jamkrindo also added Regional Offices from 3 Regional Offices in 2014 to 9 Regional Offices until August 2020, as well as 35 Branch Offices in 2014 to 56 Branch Offices until 2020.

With a total number of employees as many as 938 people throughout Indonesia, as of August 2020, it is expected to reach MSMEs throughout Indonesia. Currently, Jamkrindo has 18 guarantee products to meet the market, namely KUR Guarantee, Construction Credit Guarantee, Counter Bank Guarantee, Micro Credit Guarantee, Goods Distribution Guarantee, Super Micro Financing Guarantee, Warehouse Receipt System Guarantee, OTO Financing Guarantee, FLPP Guarantee, Mortgage Guarantee, Multipurpose Credit Guarantee, Supply Chain Guarantee, Surety Bond, Custom Bond, Agency Guarantee, Payment Bond, General Credit Guarantee and CMG Guarantee.

In addition, related to the merger of SOEs Insurance and Guarantee into SOEs Holding, the Company also collaborates on the level of business development and product development. Holding is also expected to sharpen innovations in terms of guarantee business automation and strengthen existing business models and coverages, including improving the guarantee operational model at Jamkrindo.



PROSPEK USAHA

Business Prospects

Prospek usaha Jamkrindo ke depan masih cukup besar. Menilik data dari pemerintah, terdapat 74% dari UMKM yang belum mengakses fasilitas kredit dari perbankan. Sehingga bila dibandingkan dengan data BPS dimana jumlah UMKM mencapai 64 juta, maka *market share* penjaminan masih sangat besar. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa prospek usaha bisnis penjaminan kedepannya masih sangat menjanjikan. Selain itu, Perusahaan juga berpeluang dalam melakukan perluasan pasar maupun efisiensi melalui Kolaborasi *Holding* dan BUMN; kerja sama *co-guarantee* antara lembaga penjaminan berkapasitas besar dengan lembaga penjaminan daerah; pemanfaatan TI untuk proses *back-end*, *front-end* maupun model bisnis baru; serta adanya kebutuhan pembinaan UMKM dalam hal keterampilan dan pengelolaan pemasaran.

Jamkrindo's business prospects in the future are still quite large. Looking at data from the government, there are 74% of MSMEs who have not accessed credit facilities from banks. So when compared with BPS data, where the number of MSMEs reaches 64 million, the market share of guarantee is still very large. From these data can be concluded that the business prospects of guarantee business in the future are still very promising. In addition, the Company also has opportunity to expand the market and efficiency through Collaboration Holding and SOEs; co-guarantee cooperation between large capacity guarantee agencies and regional guarantee agencies; IT utilization for back-end, front-end and new business models; and there is the needs for MSMEs coaching in terms of marketing skills and management.



TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

*Good Corporate
Governance*

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten merupakan salah satu modal utama Perusahaan agar dapat melalui berbagai tantangan usaha. Untuk itu, Perusahaan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan Jamkrindo.

Implementation of the principles of Good Corporate Governance and consistently is one of the main capital of the Company in order to pass various business challenges. Therefore, the Company is committed to continuously improve the quality of GCG implementation in Jamkrindo.





PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK DI LINGKUP PERUSAHAAN

Development of Implementation of Good Corporate Governance in the Scope of the Corporate

Prinsip Umum

Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ dalam entitas usaha, baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang-undangan dan etika berusaha. Perusahaan senantiasa berupaya untuk mengimplementasikan praktik terbaik dari prinsip GCG secara konsisten dan menyeluruh, yang tentunya berlandaskan pada hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Bagi Jamkrindo, GCG menjadi salah satu pilar utama konsep pembangunan berkelanjutan, atau *sustainability development*, yang diharapkan mampu membentuk fondasi iklim investasi yang sehat. Lebih jauh, GCG telah menjadi salah satu faktor fundamental bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan yang berkelanjutan hingga masa mendatang.

Di Indonesia GCG didasarkan pada prinsip metode pengambilan keputusan dan pengelolaan aktivitas entitas usaha yang akuntabel, yang kemudian berelasi langsung terhadap pengelolaan organisasi yang berkelanjutan dan iklim investasi yang sehat.

General Principle

Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism created as an effort to regulate relations between organs in business entities; both internal and external relations based on legislation and business ethics. The Company always strives to implement the best practices of GCG principles consistently and comprehensively, based on relationships with all stakeholders.

For Jamkrindo, GCG is one of the main pillars of the concept of sustainability development, which is expected to form the foundation of a healthy investment climate. Furthermore, GCG has become one of the fundamental factors for investors in assessing the company's sustainable performance in the future.

In Indonesia, GCG is based on the principles of accountable decision-making methods and management of business entity activities, which are related to sustainable organizational management and a healthy investment climate.

Pendekatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Approach

Kepatuhan/Compliance

Terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
To the prevailing laws and regulations

Etika Berusaha/Business Ethics

Sebagai cermin perilaku dunia usaha yang sehat
As a reflection of healthy business behavior



Iklim Investasi yang Baik dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Good Investment Climate and Sustainable Growth

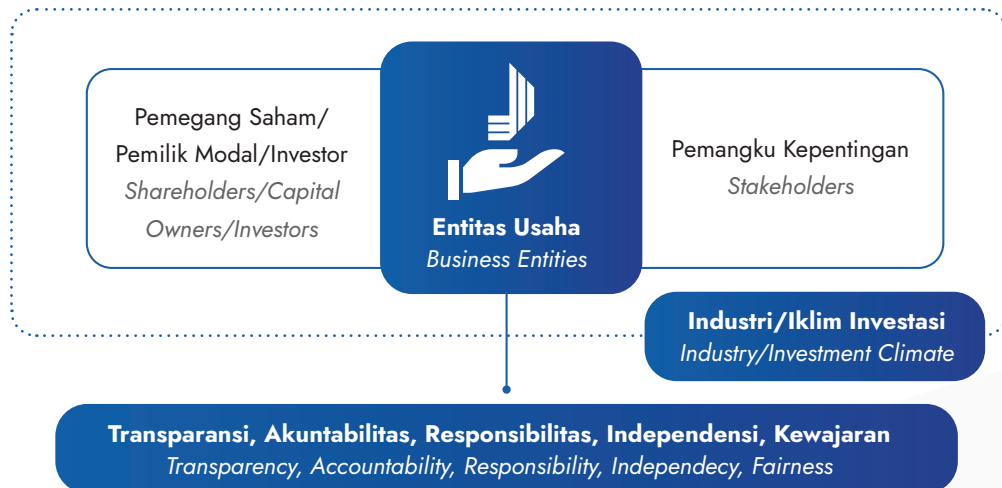


Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, prinsip GCG turut mengalami perkembangan yang mencakup sistem pengawasan dan pengendalian yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, mendukung integritas dalam pelaporan keuangan, pengelolaan risiko yang layak, serta hubungan pemangku kepentingan dan Perusahaan yang berlandaskan etika. Di lingkungan Perusahaan, evaluasi secara berkala dilakukan atas penerapan GCG untuk memastikan terwujudnya prinsip GCG secara komprehensif.

In line with the development of the business world, the principles of GCG have also developed which include a supervisory and control system that supports work ethics and responsible decision making, supports integrity in financial reporting, proper risk management, and ethically based stakeholder and company relationships. Within the Company, periodic evaluations are conducted on the implementation of GCG to ensure the implementation of the GCG principles in a comprehensive manner.

Harmonisasi Entitas Usaha dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Harmonization of Business Entities with Shareholders and Stakeholders



Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada budaya Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, proaktif terhadap perubahan lingkungan usaha, bersikap jujur, berpikir positif dan berdedikasi tinggi, bekerja tekun dan disiplin dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi Perusahaan. Nilai-nilai budaya Jamkrindo ini telah diimplementasikan di seluruh jajaran Jamkrindo yang juga merupakan kode etik Jamkrindo sehingga manajemen dan karyawan memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam berfikir dan bertindak sehingga membawa Jamkrindo mencapai tujuan.

The Company is committed to implementing GCG principles based on a corporate culture that is oriented towards customer satisfaction, proactive in changing the business environment, being honest, positive thinking and highly dedicated, working diligently and disciplined by prioritizing the interests of the Company, always improving professionalism to achieve value-added for the Company. Jamkrindo's cultural values have been implemented in all levels of Jamkrindo which are also Jamkrindo's code of ethics so that management and employees have clear and measurable references in thinking and acting to bring Jamkrindo to achieve its goals.

▶ PRINSIP TATA KELOLA DAN KOMITMEN PENERAPANNYA OLEH JAMKRINDO

Governance Principles and Their Application Commitments by Jamkrindo



Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Praktik GCG dikembangkan Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implemetasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Jamkrindo, di mana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif. Dalam mengimplementasikan GCG, Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi, mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Basis of Good Corporate Governance Implementation

GCG practices were developed by Jamkrindo as a commitment to continue to innovate to improve the implementation of GCG in the organizational sphere within Jamkrindo, where this gives the Company the confidence to face every challenge ahead and become a business entity with competitive competence. In implementing GCG, Jamkrindo refers to several laws and regulations, especially Law No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN) and Law No.47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law provides a comprehensive foundation for the management aspects of the organization; starting from the rights and obligations of shareholders, duties, and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relationship with internal and external stakeholders.



Sebagai entitas usaha dimana Pemerintah Indonesia menjadi Pemegang Saham, penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Pedoman GCG Perusahaan, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG di lingkup Jamkrindo adalah:

1. Mengoptimalkan nilai Perusahaan bagi Pemangku Kepentingan.
2. Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.
3. Meningkatkan kepatuhan organ Perusahaan dan jajaran dibawahnya agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan.
4. Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif.
5. Mengoptimalkan nilai Perusahaan agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
6. Mendorong agar organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.
7. Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
8. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
9. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

As a business entity in which the Government of Indonesia is the shareholder, the implementation of GCG in the scope of the Company also refers to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning Stipulation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated 6 July 2012, which states that GCG is the principles that underlie a process and mechanism for managing a company based on legislation and business ethics. The implementation of GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness is a solid foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG that refers to best practices will increase the trust of Shareholders and stakeholders which will lead the Company to significant and sustainable progress.

Based on the Company's GCG Guidelines, the objectives of implementing GCG principles within Jamkrindo are:

1. *Optimize the Company's value for Stakeholders.*
2. *Improve the management of the Company professionally, efficiently, and effectively and empower the function and increase the independence of the Company's Organs.*
3. *Improve compliance of the Company's organs and staff in making decisions and actions to be based on high ethics, compliance with laws and regulations, and awareness of the Company's social responsibility to stakeholders and the environment.*
4. *Realize a healthy, reliable, trustworthy, and competitive Company.*
5. *Optimize the Company's value in order to have strong competitiveness, so that the Company is able to maintain its existence and sustainability to achieve the Company's goals and objectives.*
6. *Encourage the Company's organs in making decisions and actions to be based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of the Company's social responsibility to stakeholders and environmental sustainability around the Company.*
7. *Improve the Company's contribution in the national economy.*
8. *Improve the climate conducive to develop the national investment.*
9. *Encourage the Company to be managed professionally, efficiently and effectively and empower the function and increase the independence of the Company's Organs.*

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Principles of Implementing Good Corporate Governance

Transparansi
Transparency

Akuntabilitas
Accountability

Responsibilitas
Responsibility

Independensi
Independence

Kewajaran
Fairness

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi. Hal ini tercantum dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perusahaan yang telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No. 01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), dengan rincian sebagai berikut:

The principle of GCG implementation used by the Company refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012 and the General Guidelines for GCG from the National Committee on Governance Policy (KNKG) through the principles of GCG commonly known as TARIF, namely transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in all Company Organs, including Shareholders, Board of Commissioners and Directors. This is stated in the Company's Good Corporate Governance Guidelines that have been updated through the Joint Decision of the Board of Directors and Board of Commissioners No. 01/SKB/1/XII/2020 - KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 on Guidelines for Good Corporate Governance, with the following details:

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Principles of Good Corporate Governance</i>				
	Transparansi <i>Transparency</i>	Akuntabilitas <i>Accountability</i>	Pertanggungjawaban <i>Responsibility</i>	Kemandirian <i>Independence</i>	Kewajaran <i>Fairness</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	<ol style="list-style-type: none"> Pengungkapan yang jelas mengenai rencana transaksi luar biasa antara lain <i>merger</i>, akuisisi, penjualan aset Perusahaan dalam jumlah yang substansional <i>Clear disclosure of planned extraordinary transactions, including mergers, acquisitions, sales of Company assets in substantial amounts.</i> Keterbukaan dalam penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris <i>Disclosure in figuring out the income of the Board of Directors and the Board of Commissioners</i> 	Pemegang Saham mempunyai tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam proses pengelolaan Perusahaan dan memastikan bahwa semua pengelolaan Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan <i>Shareholders have the responsibility to watch the implementation of GCG principles in the Company's management process and ensure that all Company management follows the laws and regulations</i>	Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional Perusahaan yang menjadi tanggung jawab direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku <i>Shareholders are not allowed to interfere with the Company's operational activities which are the responsibility of the board of directors following the applicable laws and regulations</i>	Melakukan prosedur yang lazim dalam menetapkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehingga secara objektif didapatkan orang yang tepat sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan <i>Conduct the usual procedures in deciding the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners so that objectively the right person is obtained according to the qualifications required by the Company</i>	Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perusahaan dari Direksi dan atau Dewan Komisaris <i>Shareholders are entitled to obtain information relating to the interests of the Company from the Board of Directors and or the Board of Commissioners</i>



Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Pertanggungjawaban Responsibility	Kemandirian Independence	Kewajaran Fairness
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	<p>1. Dibuat risalah rapat Dewan Komisaris yang menunjukkan adanya dinamika rapat dalam proses pengambilan keputusan</p> <p><i>Minutes of the Board of Commissioners' meeting was made showing the dynamics of the meeting in the decision-making process</i></p>	<p>1. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan strategi Perusahaan dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas serta pemberian nasehat kepada Direksi dalam rangka pengelolaan Perusahaan secara efektif</p> <p><i>The Board of Commissioners is responsible for supervising the implementation of the Company's strategy and requires the implementation of accountability and providing advice to the Board of Directors to manage the Company effectively</i></p>	<p>1. Dewan Komisaris harus mempunyai komitmen untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas jabatannya</p> <p><i>The Board of Commissioners must commit to follow the laws and regulations related to the duties of their position.</i></p> <p>2. Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham</p> <p><i>The Board of Commissioners is responsible for performing its duties to the Shareholders</i></p>	<p>1. Memberikan pertimbangan yang objektif dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi Perusahaan yang mungkin mengandung potensi terjadinya benturan kepentingan</p> <p><i>Provide objective considerations in solving problems faced by the Company that may have potential conflicts of interest</i></p>	<p>Dewan Komisaris dalam menjalankan jabatannya akan selalu menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholders</p> <p><i>The Board of Commissioners in conducting their positions will always apply the Company's business ethics to fulfil the interests of stakeholders</i></p>
	<p>2. Kehadiran setiap anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan</p> <p><i>The attendance of each member of the Board of Commissioners and the implementation of the meeting of the Board of Commissioners are reported in the Company's Annual Report</i></p> <p>3. Remunerasi Dewan Komisaris dilaporkan pada Laporan Tahunan Perusahaan</p> <p><i>The remuneration of the Board of Commissioners is reported in the Company's Annual Report</i></p>	<p>2. Pemberdayaan fungsi Dewan Komisaris</p> <p><i>Empowerment of the functions of the Board of Commissioners</i></p>	<p>3. Dewan Komisaris turut bertanggung jawab terhadap kebenaran laporan keuangan yang diajukan direksi kepada Pemegang Saham</p> <p><i>The Board of Commissioners is also responsible for the correctness of the financial statements given by the Board of Directors to the Shareholders</i></p>	<p>2. Dewan Komisaris tidak berwenang membuat keputusan manajemen pengelolaan Perusahaan sehari-hari seperti keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau penandatanganan kerja sama atau kontrak-kontrak yang bersifat rutin</p> <p><i>The Board of Commissioners is not authorized to make management decisions on the day-to-day management of the Company, such as decisions about the appointment and dismissal of employees or the signing of routine collaborations or contracts.</i></p>	

Organ GCG GCG Organ	Prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik Principles of Good Corporate Governance				
	Transparansi Transparency	Akuntabilitas Accountability	Pertanggungjawaban Responsibility	Kemandirian Independence	Kewajaran Fairness
Direksi Directors	<p>1. Menyediakan Laporan Kegiatan dan Keuangan Perusahaan sebagai alat bantu untuk mengungkapkan transaksi keuangan dan kinerja Perusahaan kepada stakeholder secara transparan <i>Providing Company Activity and Financial Reports as a tool to disclose financial transactions and Company performance to stakeholders in a transparent manner</i></p> <p>2. Mengungkapkan informasi dan Laporan Keuangan Perusahaan diantaranya disajikan melalui website Perusahaan <i>Disclosing information and the Company's Financial Statements, including those presented through the Company's website.</i></p>	<p>1. Direksi harus mampu menempatkan urutan prioritas dalam upaya pemenuhan kepentingan stakeholder <i>The Board of Directors must be able to place a priority order to fulfil the interests of stakeholders.</i></p> <p>2. Direksi membangun dan menetapkan Sistem Pengendalian Internal yang efektif sehingga dapat mengamankan aset Perusahaan <i>The Board of Directors builds and sets up an effective Internal Control System to secure the Company's assets.</i></p>	<p>1. Direksi harus mempunyai komitmen untuk mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan operasional Perusahaan <i>The Board of Directors must commit to follow the laws and regulations related to the Company's operations</i></p> <p>2. Direksi bertanggung jawab terhadap materi yang disajikan pada Laporan Keuangan <i>The Board of Directors is responsible for the material presented in the Financial Statements.</i></p>	<p>Komposisi Direksi harus memungkinkan direksi dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lainnya <i>The composition of the Board of Directors must enable the Board of Directors to act independently in the sense that they do not have interests that can interfere with their ability to perform their duties independently and critically concerning one another</i></p>	<p>1. Penerapan sistem reward dan punishment yang memadai agar setiap karyawan memperoleh rasa keadilan dikaitkan dengan keberhasilan dalam pencapaian kinerja <i>The application of an adequate reward and punishment system so that every employee gets a sense of justice is associated with success in achieving performance</i></p> <p>2. Menerapkan etika bisnis Perusahaan dalam rangka pemenuhan kepentingan stakeholder <i>Implementing the Company's business ethics to fulfil stakeholder interests</i></p>
	<p>3. Mengungkapkan gaji dan penghasilan lain direksi pada Laporan Tahunan <i>Disclosing salaries and other income of directors in the Annual Report</i></p>	<p>3. Direksi memberdayakan peran dan fungsi SPI sebagai mitra strategis manajemen. <i>The Board of Directors empowers the role and function of SPI as a strategic management partner</i></p> <p>4. Direksi harus memastikan bahwa SPI memiliki akses terhadap informasi mengenai Perusahaan yang perlu untuk dapat melaksanakan tugasnya <i>The Board of Directors must ensure that SPI has access to information on the Company that is necessary to be able to perform its duties</i></p>	<p>3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengungkapan informasi Laporan Keuangan pada media publikasi nasional sehingga dapat diakses oleh stakeholder <i>The Board of Directors is responsible for disclosing Financial Report information in national publication media so that stakeholders can access it</i></p>		



Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2003.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
 - b. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.
3. Peraturan Menteri BUMN
 - a. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
 - b. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Legal Foundation

The implementation of GCG within the Company refers to several regulations/laws that apply in Indonesia, including:

1. Law of the Republic of Indonesia
 - a. Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (BUMN).
 - b. Law of the Republic of Indonesia No.47 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
 - c. Law of the Republic of Indonesia No.1 of 2016 concerning Guarantee.
 - d. Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption.
 - e. Law of the Republic of Indonesia No.28 of 1999 concerning State Administrators that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism.
 - f. Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by the Law of the Republic of Indonesia No. 25 of 2003.
 - g. Law of the Republic of Indonesia No.14 of 2008 concerning Information Disclosure.
 - h. Law of the Republic of Indonesia No.11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
2. Government Regulation
 - a. Government Regulation No.35 of 2018 concerning Indonesian Credit Guarantee Public Companies (Perum).
 - b. Government Regulation No.38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation no. 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Property.
 - c. Government Regulation No.45 of 2005 concerning the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of BUMN.
3. Regulation of the Minister of SOEs
 - a. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, and amendment No.PER-09/MBU/2012 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.
 - b. SOE Minister Regulation No.PER-01/MBU/06/2017 concerning the Second Amendment to the SOE Ministerial Regulation No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara
 - d. Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
 - e. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
 - f. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
 - g. Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
 - h. Peraturan Menteri BUMN No.PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara
 - i. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.
4. Keputusan Menteri BUMN
 - a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.
 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - a. Peraturan OJK No.3/POJK.05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin.
 6. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana tercantum pada Akta Pendirian Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia No. 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat No.AHU-AHU.0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020; serta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No. 2 tanggal 9 April 2020 yang telah disetujui Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat No.AHU-AH.0028854.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020.
 7. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).
- c. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises*
 - d. *SOE Minister Regulation No.PER-02/MBU/06/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises*
 - e. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Determining the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.*
 - f. *Regulation of the Minister of SOEs No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Commissioners of State-Owned Enterprises.*
 - g. *SOE Minister Regulation No.PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013, on Guidelines for Compilation of Information Technology Management for SOEs.*
 - h. *SOE Minister Regulation No. PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervision Board of State-Owned Enterprises*
 - i. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-05 MBU/2006 concerning the Audit Committee for SOEs.*
4. *Decree of the Minister of SOEs*
 - a. *Decree of the Secretary of the State Minister for SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN.*
 5. *Regulation of the Financial Services Authority (OJK)*
 - a. *OJK Regulation No.3/POJK.05/2017 dated January 11, 2017 on Good Corporate Governance for Guarantor Institutions.*
 6. *The Company's Articles of Association as stated in the Deed of Establishment of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia No. 25 dated February 24, 2020 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on letter No. AH-AHU.0011484.AH.01.01 of 2020 dated February 24, 2020; as well as the Deed of Decision of PT Jaminan Kredit Indonesia Shareholders on Amendments to articles of association No. 2 dated April 9, 2020 which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on letter No.AHU-AH.0028854.AH.01.02 of 2020 dated April 9, 2020.*
 7. *General Guidelines of GCG Indonesia by the National Committee on Governance Policy (KNKG).*

PETA JALAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Roadmap of Implementation of Good Corporate Governance



Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Jamkrindo

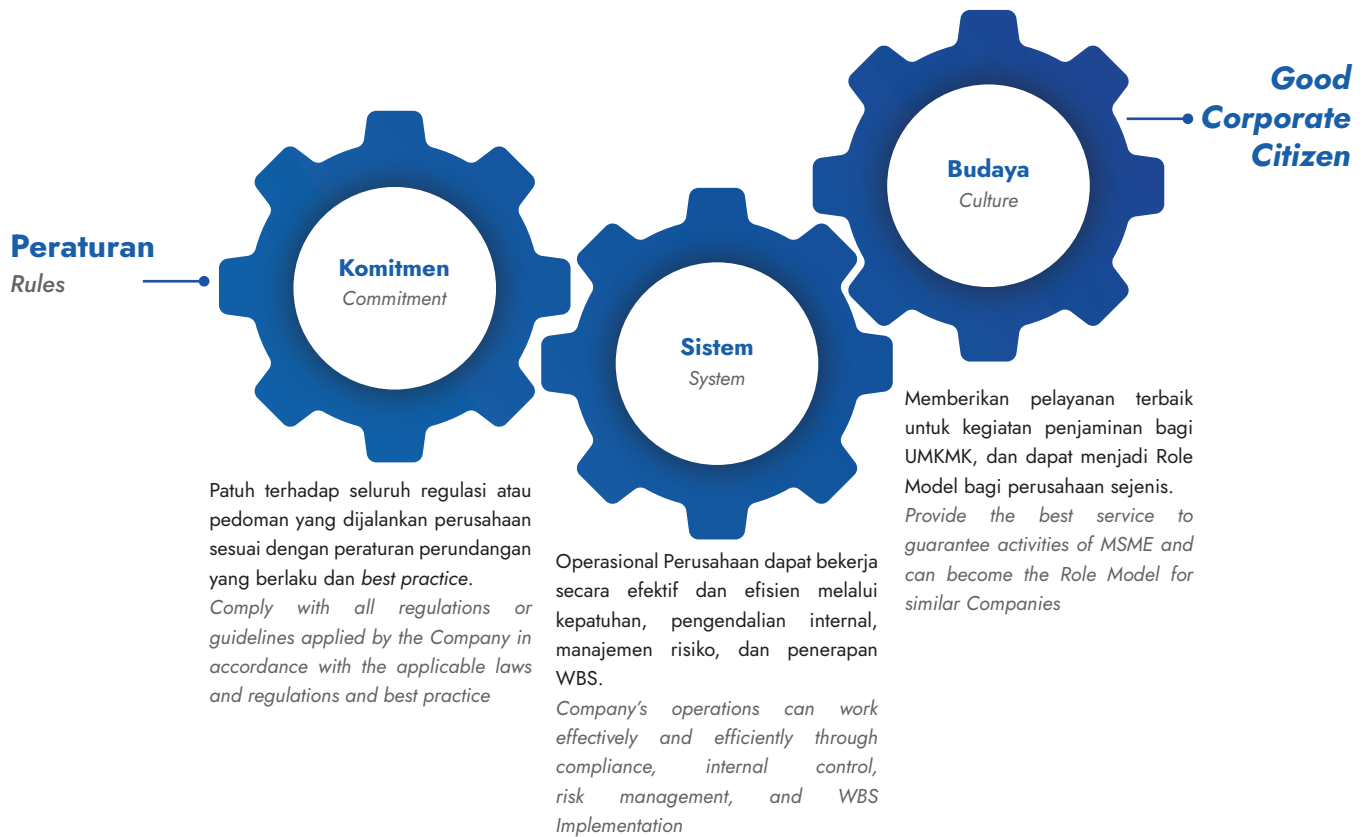
Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

Improving the Quality of Jamkrindo's GCG Implementation

The GCG process is a method or mechanism carried out by the company and management in implementing GCG principles to carry out their functions and duties following the applicable laws and regulations. The commitments, GCG structure, systems, and procedures that have been prepared by the Company aim to create added value for stakeholders through effective and efficient professional management of the company.

Jamkrindo has a Roadmap in implementing GCG principles to achieve Good Corporate Citizen with the following mechanism:



1. **Komitmen**
Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.
2. **Sistem**
Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

1. **Commitment**
In implementing these GCG principles, all Jamkrindo personnel is committed to following all applicable laws and regulations, as well as those applicable. Support from management plays a key role in deciding the direction and goals of GCG implementation at Jamkrindo. In practice, the Management of Jamkrindo is an example for employees to continue to be committed to the implementation of sustainable GCG. Jamkrindo will apply GCG principles in every business process and improve GCG supporting tools.
2. **System**
In supporting the commitment of sustainable GCG at Jamkrindo, a company operational system is needed that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system, and good risk management as well as the implementation of an effective violation reporting system.

3. Budaya

Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Jamkrindo dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

3. Culture

Jamkrindo's cultural values are the basis for Jamkrindo's personnel to work more clearly and structured. In the context of implementing Jamkrindo's GCG, all Jamkrindo personnel is committed to implementing corporate cultural values that are in line with GCG principles.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta *benchmark* bagi perusahaan sejenis lainnya sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

The purpose of Jamkrindo's GCG implementation is to become a Guarantee Company that provides value to stakeholders through effective and efficient management of the Company by creating cultural values to increase the level of trust, build the Company's image (*brand image*), and good corporate reputation and benchmarks for other similar companies as described below:

Menuju Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Penciptaan Nilai-nilai Budaya

Towards Good Corporate Governance and Creation of Cultural Values



Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Track Record of Development of Good Corporate Governance Implementation





Perkembangan Penerapan GCG di Tahun 2020

Praktik GCG terus menerus ditingkatkan di Jamkrindo, melalui monitoring dari SPI dan Divisi MSDM atas implementasi *Code of Conduct* (CoC). Apabila ditemukan benturan kepentingan atau penyalahgunaan jabatan yang menimbulkan tindakan *fraud* di lingkungan Perusahaan, maka akan diselesaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selama tahun 2020, pemantauan atas penerapan praktik GCG pada Jamkrindo diantaranya:

1. Penyampaian Laporan Hasil Pelaksanaan *Assessment* atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2020 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. B.1092/EKT/DIRUT/SPI/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 tentang Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Jamkrindo Tahun 2020
2. Penyampaian Laporan Pelaksanaan *Whistleblowing System* kepada Direktur Utama telah disampaikan secara periodik maupun situasional sesuai dengan pelaporan WBS yang diterima oleh Tim WBS Perusahaan
3. *Assessment* penerapan GCG untuk periode tahun ukur 2020 dilakukan secara *Assessment* oleh PT Cita Negeri Amanah dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG di lingkungan Jamkrindo. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 784/SPT/1/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020

Di tahun 2020, Perusahaan mengembangkan GCG melalui sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) yang didalamnya memberikan panduan tentang pengelolaan anti suap sebagai implementasi dari kebijakan anti korupsi di lingkup Perusahaan.

Di samping itu, untuk mendorong penerapan GCG, di tahun 2020 Perusahaan juga melakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Sosialisasi Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) pada unit Kerja;
- Sosialisasi program anti gratifikasi pada unit Kerja;
- Pelatihan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan).

Penghargaan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Tahun 2020

Di tahun 2020, Jamkrindo mendapatkan apresiasi terkait penerapan GCG melalui beberapa penghargaan, yaitu:

- The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020 dalam ajang GRC & Performance Excellence Award 2020 Businessnews, 29 Juli 2020.
- Top GRC Awards 2020 #Star4 dalam ajang Top Governance, Risk & Compliance 2020 yang diselenggarakan oleh Top Business, 7 Oktober 2020

Development of GCG Implementation in 2020

GCG practices are continuously improved at Jamkrindo, through monitoring from SPI and the HR Division on the implementation of the Code of Conduct (CoC). If a conflict of interest or abuse of position is found that causes fraud within the Company, it will be resolved and followed up under applicable regulations. During 2020, watching of the implementation of GCG practices at Jamkrindo included:

1. *Submission of the Report on the Implementation of the Assessment on the Implementation of Good Corporate Governance in 2020 to the Chief Executive of the Insurance Supervisory Board, Pension Funds, Financing Institutions, and Other Financial Services Institutions of the Financial Services Authority through Letter No.B.1092/EKT/DIRUT/SPI/V/2021 dated May 28, 2021 concerning Submission of Good Corporate Governance Report of PT Jamkrindo in 2020*
2. *Submission of Whistleblowing System Implementation Report to the President Director has been submitted periodically and situationally in accordance with WBS reporting received by the Company's WBS Team*
3. *Assessment of GCG implementation for 2020 is conducted by PT Cita Negeri Amanah to provide recommendations for continuous improvement of GCG implementation within Jamkrindo. The assessment process is conducted based on the Assignment Letter No. 784/SPT/1/XII/2020 dated December 29, 2020*

In 2020, the Company developed GCG through ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification which guides on anti-bribery management as an implementation of anti-corruption policies within the Company.

In addition, to encourage the implementation of GCG, in 2020 the Company also conducts several activities including:

- *Socialization of Whistleblowing System (WBS) Policy in Work units;*
- *Socialization of anti-gratification programs in work units;*
- *SMAP (Anti-Bribery Management System) training.*

Award for Implementation of Good Corporate Governance in 2020

In 2020, Jamkrindo received appreciation regarding the implementation of GCG through several awards, namely:

- *The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020 at the GRC & Performance Excellence Award 2020 Businessnews, 29 July 2020.*
- *Top GRC Awards 2020 #Star4 in the Top Governance, Risk & Compliance 2020 event organized by Top Business, 7 October 2020*

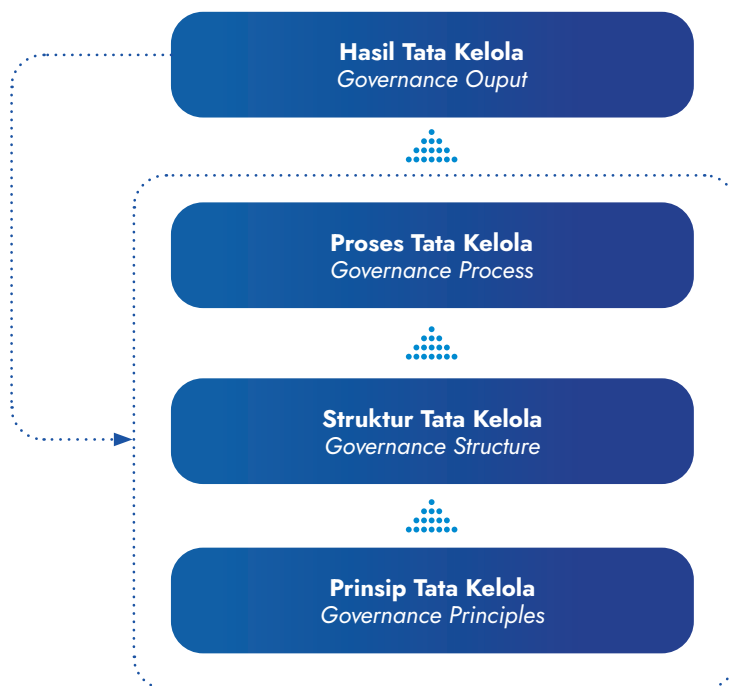


STRUKTUR DAN PROSES TATA KELOLA

Governance Structure and Process

Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* sebagaimana telah dijelaskan di atas, diterapkan di lingkup Perusahaan melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

The Governance Principles, as described above, are implemented within the Company through 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and the Governance Process. These 2 aspects are continuous with each other, which in the end will reflect the expected Governance Outcomes.



Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

The Governance Structure is an organ or device owned by the Company, either an organ or device formed due to compliance with applicable laws and regulations, as well as an organ or device formed due to internal needs to improve the implementation of GCG. Meanwhile, the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the overall management of the Company. The Governance process includes the rules and regulations that apply to the Company, Permanent Procedures, Charter, documents, until the rules are enforced that regulate the relationship between organs or devices.

Struktur Tata Kelola: Organ-organ GCG

Struktur Tata Kelola Perusahaan memiliki beberapa aspek utama yang berperan dalam menunjang penguatan kontrol dan pengelolaan Perusahaan sesuai dengan tujuan penerapan Prinsip Tata Kelola. Sesuai Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, infrastruktur keorganisasian sebuah Perseroan Terbatas mencakup kepentingan Pemegang Saham yang dituangkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); Direksi dengan tugasnya mengelola; serta Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan. Sistem kepengurusan Perseroan Terbatas menganut model 2 (dua) badan atau *two tier system*, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi dengan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas sesuai fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam peraturan dan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

Perusahaan memiliki ketiga organ utama tersebut, baik RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dewan Komisaris dan Direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai inti serta budaya Perusahaan. Di samping itu, terdapat organ-organ pendukung mencakup Audit Internal dan Sekretaris Perusahaan.

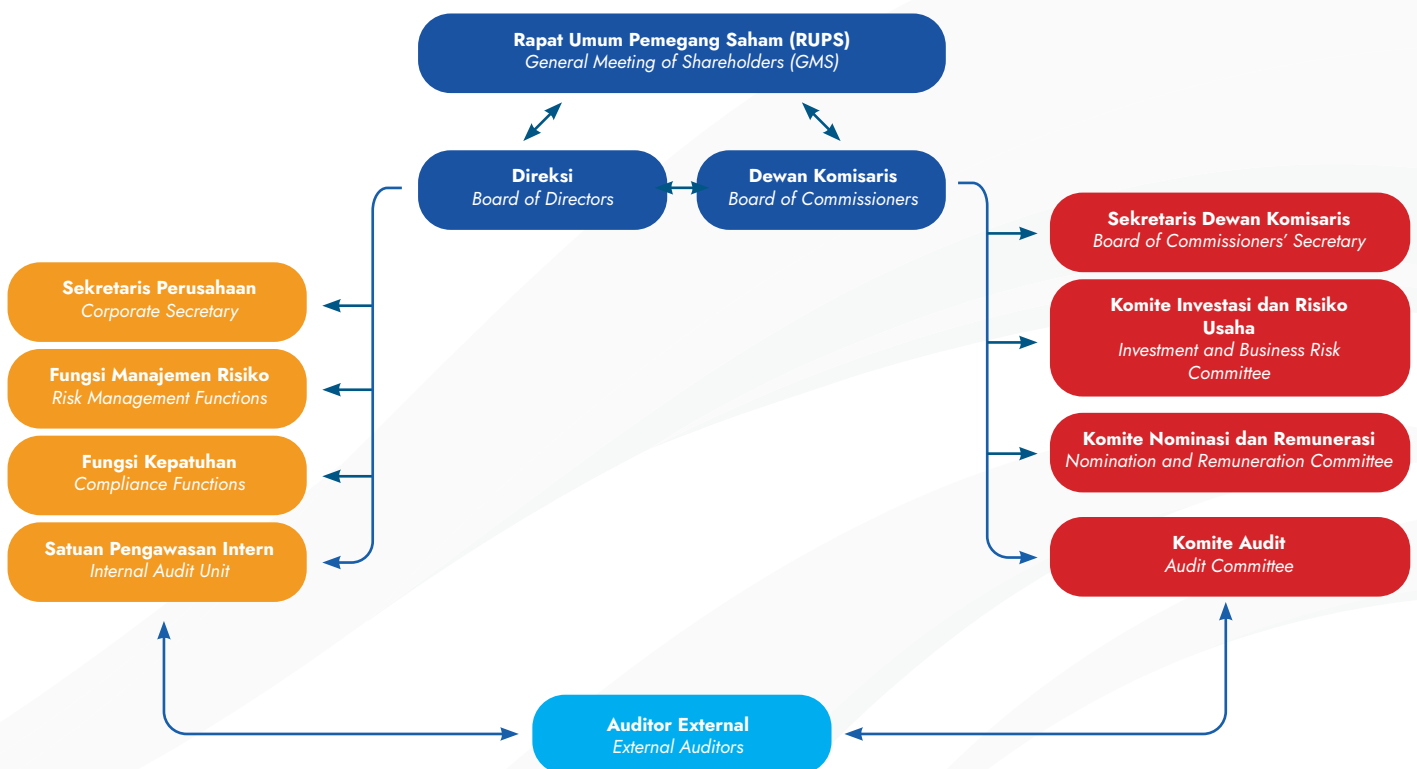
Governance Structure: GCG Organs

The Corporate Governance structure has several main aspects that play a role in supporting the strengthening of control and management of the Company following the objectives of implementing the Governance Principles. According to Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the organizational infrastructure of a Limited Liability Company includes the interests of Shareholders as outlined in the General Meeting of Shareholders (GMS); The Board of Directors with the task of managing; and the Board of Commissioners whose function is to supervise. The management system of a Limited Liability Company adheres to a 2 (two) body model or a two-tier system, namely the Board of Commissioners and the Board of Directors with clear authority and responsibility according to their respective functions as mandated in the rules and regulations as well as the Articles of Association.

The company has these three main organs, namely the GMS, the Board of Commissioners, and the Board of Directors. The Board of Commissioners and the Board of Directors have the responsibility to maintain long-term business continuity. The Board of Commissioners and the Board of Directors must have the same perception of the vision, mission, and core values and culture of the Company. In addition, there are supporting organs including Internal Audit and Corporate Secretary.

Struktur Organ GCG Jamkrindo

Jamkrindo's GCG Organ Structure



● Organ Utama (Main Organ)
 ● Organ Pendukung (Dewan Komisaris) (Supporting Organ (Board of Commissioners))
 ● Organ Pendukung (Direksi) (Supporting Organ (Board of Directors))
 ● Organ Eksternal (Auditor Independen) (External Organ (Independent Auditor))

Dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Pemegang Saham dapat melakukan pengambilan keputusan penting berkaitan dengan investasi yang telah ditanamkan di Perusahaan. Keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan Perusahaan. Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan. Dengan kedudukan yang setara, Pemegang Saham akan mempertimbangkan dengan seksama keputusannya demi kepentingan jangka panjang Perusahaan. Setelah keputusan diambil, maka RUPS akan menyerahkan segala kewenangan pengawasan dan pelaksanaan keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.

In the General Meeting of Shareholders (GMS) forum, Shareholders can make important decisions related to investments that have been invested in the Company. Decisions taken at the GMS are based on the interests of the Company. Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights under the Articles of Association and the Laws and Regulations. With equal standing, Shareholders will carefully consider their decisions in the long-term interest of the Company. After the decision is taken, the GMS will delegate all supervisory authority and implementation of the decision to the Board of Commissioners and the Board of Directors. This is following the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.

Pengelolaan Perusahaan dan pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris kemudian melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perusahaan serta keputusan RUPS tersebut dilaksanakan secara optimal dan dicapai maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar dalam menjaga keberlangsungan Perusahaan, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut.

The management of the Company and the implementation of each decision of the GMS is carried out by the Board of Directors. The Board of Commissioners then supervises and provides advice to ensure that the objectives of the Company and the resolutions of the GMS are carried out optimally and achieved optimally. With such great duties and responsibilities in maintaining the sustainability of the Company, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee while the Board of Directors is assisted by work units related to the governance mechanism.

Proses dan Mekanisme GCG: Pedoman dan Perangkat Kebijakan

GCG Process and Mechanism: Policy Guidelines and Tools Perangkat

Agar Struktur Tata Kelola di atas dapat berjalan dengan baik dan memiliki batasan tanggung jawab masing-masing, diperlukan Proses Tata Kelola atau Mekanisme Tata Kelola seperti peraturan dan perundang-undangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dan serangkaian aturan internal, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan organisasi Perusahaan berbasis pengelolaan yang akuntabel.

For the above Governance Structure to work well and have their respective limits of responsibility, a Governance Process or Governance Mechanism is needed such as the rules and regulations as described previously, and a series of internal rules, which is expected to create an accountable management-based corporate organizational environment.



Secara rinci, aspek perangkat kebijakan GCG yang telah tercatat dan disahkan oleh pihak-pihak yang berwenang sebagai bentuk ketaatan hukum dan komitmen dalam pelaksanaan GCG, meliputi:

In detail, aspects of GCG policy instruments that have been recorded and ratified by the competent authorities as a form of legal compliance and commitment in implementing GCG, include:

Perangkat Kebijakan <i>Policy Instruments</i>	Penetapan dan/atau Pembaruan <i>Assignments and/or Updates</i>
Anggaran Dasar Perusahaan <i>Company's articles of association</i>	Akta Pendirian Jamkrindo mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No.02 tanggal 9 April 2020. <i>The Deed of Establishment of Jamkrindo was changed with the issuance of the Deed of Decision statement of the Shareholders of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia on amendments to the Articles of Association No. 02 dated April 9, 2020.</i>
Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Guidelines for Good Corporate Governance</i>	Telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) <i>Updated through Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.01/SKB/1/XII/2020 – KEP-08/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for Implementation of Good Corporate Governance</i>
Pedoman Perilaku <i>Code of Conduct</i>	Telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.02/SKB/1/XII/2020 – KEP-09/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct) <i>Updated through Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.02/SKB/1/XII/2020 – KEP-09/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Code of Conduct</i>
Buku Panduan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Handbook</i>	Telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.03/SKB/1/XII/2020 – KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual) <i>Updated through Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.03/SKB/1/XII/2020 – KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for Board of Commissioners and Board of Directors (Board Manual)</i>
Piagam Komite Audit <i>Audit Committee Charter</i>	Telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.04/SKB/1/XII/2020—KEP-10/DK-JAMKRINDO/XII/2020 Tanggal 30 Desember 2020 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter). <i>Updated through Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.04/SKB/1/XII/2020 – KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Internal Audit Charter</i>
Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee Charter</i>	Telah disahkan oleh Dewan Komisaris melalui KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2020 tanggal 17 April 2020 jo. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 tgl 22 Juli 2020 <i>Has been ratified by the Board of Commissioners through KEP-01/DK-JAMKRINDO/IV/2020 dated April 17 2020 jo. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 dated July 22, 2020</i>
Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha <i>Investment and Business Risk Committee Charter</i>	Telah diperbarui melalui pengesahan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Maret 2021 <i>Has been updated through ratification by the Board of Commissioners on March 30, 2021</i>
Piagam Audit Internal <i>Internal Audit Charter</i>	Telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.04/SKB/1/XII/2020 – KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) <i>Updated through Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.04/SKB/1/XII/2020 – KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Internal Audit Charter</i>
Kode Etik Satuan Pengawas Intern <i>Internal Audit Unit Code of Ethics</i>	Telah diperbarui melalui Peraturan Direksi No.30/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kode Etik Satuan Pengawasan Intern (SPI) Sebagai Auditor Internal <i>Updated through Board of Directors Regulation No.30/Per-Dir/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Code of Ethics of Internal Audit Unit (SPI) as Internal Auditor</i>
Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko <i>Risk Management Implementation Reporting Guidelines</i>	Disahkan melalui Peraturan Direksi No. 53/Per-Dir/5/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko <i>Ratified through Board of Directors Regulation No. 53/Per-Dir/5/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Risk Management Policy Guidelines</i>
Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Policy Guidelines for Procurement of Goods and Services</i>	Diperbaharui serta disahkan melalui Perdri PBJ No.03/Per-Dir/4/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Updated and ratified through Perdri PBJ No. 03/Per-Dir/4/III/2020 dated March 11, 2020, about Policy Guidelines for the Procurement of Goods and Services</i>

Perangkat Kebijakan <i>Policy Instruments</i>	Penetapan dan/atau Pembaruan <i>Assignments and/or Updates</i>
Pedoman Kebijakan Gratifikasi <i>Gratuity Policy Guidelines</i>	Telah diperbarui melalui Peraturan Direksi No.18/Per-Dir/4/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kebijakan Gratifikasi. <i>Updated through Board of Directors Regulation No.18/Per-Dir/4/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Gratification Policy Guidelines.</i>
Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) <i>Guidelines for Management of Whistleblowing System</i>	Telah diperbarui melalui Peraturan Direksi No.31/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) <i>Updated through Board of Directors Regulation No.31/Per-Dir/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Whistleblowing System Guidelines</i>
Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara <i>Guidelines for Submission of State Administrators Wealth Reports</i>	Diperbaharui serta disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia No.24/Per-Dir/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 <i>Updated and ratified through the Regulation of the Board of Directors of Public Company (Perum) Indonesian Credit Guarantee No.24/Per-Dir/VI/2017 dated June 14, 2017</i>

Sosialisasi Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Dissemination of Good Corporate Governance Policy*

Terkait dengan usaha penerapan GCG, termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, maka salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip GCG melalui sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System*. WBS adalah bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah praktik penyimpangan dan kecurangan serta memperkuat penerapan praktik GCG. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pelapor dalam melaporkan terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan perusahaan.

Concerning efforts to implement GCG, including eradicating corruption, bribery, and other fraudulent practices, one of the most effective ways to prevent and combat practices that are contrary to GCG principles is through the Whistleblowing System. WBS is part of the internal control system in preventing irregularities and fraud practices as well as strengthening the implementation of GCG practices. This system is expected to increase the participation of whistle-blowers in reporting violations that can harm the company.

Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi No.04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS), SPI telah melakukan sosialisasi WBS terhadap auditee bersamaan dengan pelaksanaan audit umum.

Since the issuance of the Board of Directors Regulation No.04/Per-Dir/IV/2018 dated April 10, 2018, about Guidelines for the Management of the Whistleblowing System (WBS) Violation Reporting System, SPI has disseminated WBS to auditees along with the general audit.

Pedoman WBS tersebut disosialisasikan kepada Karyawan, yaitu:

The WBS Guidelines are socialized to Employees, namely:

Tanggal Sosialisasi <i>Socialization Date</i>	Lokasi <i>Location</i>	Tim Pelaksana <i>Implementing Team</i>	Rekap Sosialisasi <i>Recap of Socialization</i>
23 Februari 2020 <i>February 23, 2020</i>	KC Purwakarta <i>Purwakarta Branch Office</i>	Kabag Wilayah 2 dan SPI <i>Head of Region 2 and SPI</i>	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi <i>Board of Directors Regulation on Gratification</i>
	KC Bengkulu <i>Bengkulu Branch Office</i>	Kabag Wilayah 3 dan SPI <i>Head of Region 3 and SPI</i>	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi <i>Board of Directors Regulation on Gratification</i>
	KC Tasikmalaya <i>Tasikmalaya Branch Office</i>	Kabag Korporasi & TI dan SPI <i>Kabag Korporasi & TI dan SPI</i>	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi <i>Board of Directors Regulation on Gratification</i>
	Kanwil I Medan <i>Regional Office I Medan</i>	Kabag Wilayah 1 dan SPI <i>Head of Region 1 and SPI</i>	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi <i>Board of Directors Regulation on Gratification</i>
9 s.d 16 Maret 2020 <i>March 9 to 16, 2020</i>	KC Cirebon <i>Cirebon Branch Office</i>	Kabag Wilayah 2 dan SPI <i>Head of Region 2 and SPI</i>	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi <i>Board of Directors Regulation on Gratification</i>



Tanggal Sosialisasi Socialization Date	Lokasi Location	Tim Pelaksana Implementing Team	Rekap Sosialisasi Recap of Socialization
	KC Balikpapan Balikpapan Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi Board of Directors Regulation on Gratification
9 s.d 17 Maret 2020 March 9 to 17, 2020	KC Mamuju Mamuju Branch Office	Kabag Wilayah 1 dan SPI Head of Region 1 and SPI	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi Board of Directors Regulation on Gratification
9 s.d 18 Maret 2020 March 9 to 18, 2020	Kanwil VI Surabaya Regional Office VI Surabaya	Kabag Wilayah 3 dan SPI Head of Region 3 and SPI	1. WBS 2. Peraturan Direksi tentang Gratifikasi Board of Directors Regulation on Gratification
4 September 2020 September 4, 2020	KC Parepare Parepare Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
9 September 2020 September 9, 2020	KC Samarinda Samarinda Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
10 September 2020 September 10, 2020	KC Bandung Bandung Branch Office	Kabag Wilayah 2 dan SPI Head of Region 2 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
16 September 2020 September 16, 2020	Kanwil VIII Banjarmasin Regional Office VIII Banjarmasin	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
21 September 2020 September 21, 2020	Kanwil V Semarang Regional Office V Semarang	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
22 September 2020 September 22, 2020	Kanwil II Palembang dan KC Palembang Regional Office II Palembang and Palembang Branch Office	Kabag Wilayah 1 dan SPI Head of Region 1 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
23 September 2020 September 23, 2020	KC Kupang Kupang Branch Office	Kabag Wilayah 3 dan SPI Head of Region 3 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
24 September 2020 September 24, 2020	Kanwil VII Denpasar Regional Office VII Denpasar	Kabag Wilayah 3 dan SPI Head of Region 3 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
	Kanwil IV Bandung Regional Office IV Bandung	Kabag Wilayah 2 dan SPI Head of Region 2 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
2 Oktober 2020 October 2, 2020	KC Balige Balige Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
22 Oktober 2020 October 22, 2020	Kanwil V Semarang Regional Office V Semarang	Kabag Wilayah 1 dan SPI Head of Region 1 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
22 Oktober 2020 October 22, 2020	Kanwil III Jakarta Regional Office III Jakarta	Kabag Wilayah 1 dan SPI Head of Region 1 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
26 Oktober 2020 October 26, 2020	Kanwil IX Makassar Regional Office IX Makassar	Kabag Wilayah 3 dan SPI Head of Region 3 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
18 November 2020 November 18, 2020	KC Gorontalo Gorontalo Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
27 November 2020 November 27, 2020	KCK Jakarta Jakarta Special Branch Office	Kabag Wilayah 2 dan SPI Head of Region 2 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
30 November 2020 November 30, 2020	KC Jakarta Jakarta Branch Office	Kabag Wilayah 1 dan SPI Head of Region 1 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
1 Desember 2020 December 1, 2020	KC Surabaya Surabaya Branch Office	Kabag Wilayah 3 dan SPI Head of Region 3 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
4 Desember 2020 December 4, 2020	KC Medan Medan Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
7 Desember 2020 December 7, 2020	KC Pekanbaru Pekanbaru Branch Office	Kabag PSKA dan SPI Head of PSKA and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
21 Desember 2020 December 21, 2020	KC Denpasar Denpasar Branch Office	Kabag Wilayah 1 dan SPI Head of Region 1 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
22 Desember 2020 December 22, 2020	KC Batam Batam Branch Office	Kabag Korporasi & TI dan SPI Head of Corporate & IT and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS
22 Desember 2020 December 22, 2020	KC Jambi Jambi Branch Office	Kabag Wilayah 2 dan SPI Head of Region 2 and SPI	Peraturan Direksi tentang WBS Board of Directors Regulation on WBS



HASIL TATA KELOLA: EVALUASI DAN PEMANTAUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Governance Results: Evaluation and Monitoring of Corporate Governance Implementation

Sebagai wujud komitmen penerapan prinsip GCG, Jamkrindo melaksanakan *assessment* atau penilaian atas penerapan GCG di lingkup Perusahaan. *Assessment* dilakukan dengan 2 (dua) model, yaitu melalui *self assessment* atau evaluasi yang dilakukan oleh tim internal Perusahaan, dan *assessment* atau penilaian yang dilakukan oleh pihak independen. Tujuan pelaksanaan penilaian (*assessment*) atas penerapan GCG pada Jamkrindo mengacu pada Surat Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012, adalah:

1. Mengukur kualitas penerapan GCG perusahaan melalui evaluasi tingkat pemenuhan kriteria GCG dengan kondisi nyata yang diterapkan pada Jamkrindo, melalui pemberian skor/nilai atas penerapan GCG dan kategori kualitas penerapannya.
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG perusahaan, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria GCG dengan penerapan pada Jamkrindo.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG pada Jamkrindo dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan kebijakan *corporate governance* di lingkungan perusahaan.

Hasil *assessment* diharapkan dapat menjadi landasan untuk peningkatan dan perbaikan penerapan praktik GCG di Jamkrindo. Selanjutnya penerapan praktik GCG tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mendorong pengelolaan Perusahaan secara transparan, profesional, dan efisien sehingga dapat meningkatkan nilai Perusahaan dalam bentuk trend kinerja Perusahaan yang tinggi (*high performance*), dan citra Perusahaan yang baik (*good corporate image*), serta kepercayaan *stakeholders* (pengguna jasa, karyawan, dan masyarakat secara keseluruhan) terhadap Jamkrindo.

Dasar pelaksanaan penilaian/evaluasi atas penerapan GCG pada Jamkrindo mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 dan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

As a form of commitment to implementing GCG principles, Jamkrindo assesses the implementation of GCG within the Company. The assessment is conducted using 2 (two) models, namely through a self-assessment or evaluation conducted by the Company's internal team, and an assessment conducted by an independent party. The purpose of the assessment on the implementation of GCG at Jamkrindo refers to the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, are:

1. *Measuring the quality of the company's GCG implementation through evaluating the level of fulfilment of the GCG criteria with the real conditions applied to Jamkrindo, by giving a score/value for the implementation of GCG and the category of the quality of its implementation.*
2. *Find the strengths and weaknesses of the company's GCG implementation and propose recommendations for improvement to reduce the gap between the GCG criteria and the implementation of Jamkrindo.*
3. *Monitor the consistency of GCG implementation at Jamkrindo and obtain input for the improvement and development of corporate governance policies within the company.*

The results of the assessment are expected to be the basis for improving and improving the implementation of GCG practices at Jamkrindo. Furthermore, the implementation of GCG practices is also expected to provide benefits to encourage the management of the Company in a transparent, professional, and efficient manner so that it can increase the value of the Company in the form of a trend of high Company performance, and a good corporate image, and the trust of stakeholders (service users, employees, and society as a whole) to Jamkrindo.

The basis for the implementation of the assessment/evaluation of the implementation of GCG at Jamkrindo refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, and the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012, concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

6 (enam) Aspek Assessment GCG (Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012)

6 (six) Aspects of GCG Assessment (Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012)



Hasil penilaian melalui metode ini menggunakan predikat dengan rentang skor sebagai berikut.

The results of the assessment through this method use predicates with a range of scores as follows.



Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2020

Measurement and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for Fiscal Year 2020

Penilaian juga dilakukan pada tahun buku 2020 dengan tujuan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan atas penerapan GCG Perusahaan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja No.04/SPK/UMU/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.

An assessment was also conducted in the 2020 fiscal year to provide recommendations for continuous improvement of the Company's GCG implementation. The assessment process is conducted based on Work Order No.04/SPK/UMU/II/2021 dated February 15, 2021.

Jenis Penilaian Rating Type	: Assessment
Penilai Assessor	: PT Cita Negeri Amanah
Metode Penilaian Assessment Method	: Indikator/Parameter Penilaian atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicators/Parameters of Assessment on the Implementation of GCG SK16/S.MBU/2012
Tahun Buku Penerapan Fiscal Year of Application	: 1 Januari - 31 Desember 2020 January 1 - December 31, 2020
Periode Pengukuran Measurement Period	: Februari - April 2021 February - April 2021
Waktu Terbit Laporan Measurement Period	: 29 April 2021 April 29, 2021

Hasil penilaian penerapan GCG tahun 2020 mencapai total skor sebesar 96,810 dengan kualifikasi "Sangat Baik", yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

The results of the assessment of the implementation of GCG in 2020 reached a total score of 96.810 with the qualification "Very Good", which can be seen in the following table.

Aspek Aspect	Bobot Weight	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
		Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)	
		1	2 (2/1 x 100)	3	(3/1 x 100)	
I Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>	7,000	6,863	98,043	6,848	97,825	0,218
II Pemegang Saham dan RUPS <i>Shareholders and GMS</i>	9,000	8,926	99,175	8,944	99,374	(0,199)
III Dewan Pengawas/Dewan Komisaris <i>Supervisory Board/Board of Commissioners</i>	35,000	33,963	97,037	33,289	95,111	1,926
IV Direksi <i>Directors</i>	35,000	34,110	97,457	33,293	95,123	2,334
V Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>	9,000	8,573	95,256	8,431	93,679	1,577
VI Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>	5,000	4,375	87,500	5,00	100,00	(12,500)
Skor Keseluruhan <i>Overall Score</i>	100,000	96,810	96,810	95,804	95,804	1,006
Peringkat Kualitas Penerapan GCG <i>GCG Implementation Quality Rating</i>		"Sangat Baik" "Very Good"		"Sangat Baik" "Very Good"		

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment Assessment Implementation Quality Classification	
Nilai di atas 85 Score above 85	: Sangat Baik Very Good
75 < Nilai ≤ 85 75 < Score ≤ 85	: Baik Good
60 < Nilai ≤ 75 60 < Score ≤ 75	: Cukup Baik Moderate
50 < Nilai ≤ 60 50 < Score ≤ 60	: Kurang Baik Poor
Nilai ≤ 50 Score ≤ 50	: Tidak Baik Bad

Hasil Area of Improvement (AOI) atau rekomendasi atas self assessment penerapan GCG yang dilakukan untuk tahun 2020, serta ada atau tidak adanya kesamaan dengan hasil self assessment untuk tahun buku 2019 dan assessment untuk tahun buku 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

The results of the Area of Improvement (AOI) or recommendations for the self-assessment of GCG implementation carried out for 2020, and whether or not there are similarities with the results of the self-assessment for the 2019 financial year and the assessment for the 2018 financial year can be seen in the table below.



No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>			
1	<p>Praktiknya, Perusahaan telah memiliki Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>) yang disahkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.02/SKB/1/2020–KEP-09/DK-K/JAMKRINDO/XII/2020 tentang Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>). Namun, Pedoman Perilaku tersebut belum memuat Lembar Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p><i>In practice, the Company already has a Code of Conduct which is ratified based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No.02/SKB/1/2020–KEP-09/DK-K/JAMKRINDO/XII/2020 concerning the Code of Conduct (Code of Conduct). However, the Code of Conduct does not yet contain the Statement of Commitment Sheet for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i></p>	x	x	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.4. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku,, dimana seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris menandatangani komitmen untuk mematuhi Pedoman Perilaku.</p> <p>Direkomendasikan menambahkan Lembar Pernyataan Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris ke dalam Pedoman Perilaku (<i>Code of Conduct</i>).</p> <p><i>To fulfil the suitability test of parameter No.4. The company creates a conducive situation to implement the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code) and the Code of Conduct, where all members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners sign a commitment to follow the Code of Conduct.</i></p> <p><i>It is recommended to add the Statement of Commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners to the Code of Conduct.</i></p>
2	<p>Praktiknya, berdasarkan Silabus <i>Distance Learning</i> Pengangkatan Calon Karyawan PT Jamkrindo pada tahun 2020, belum terdapat materi terkait Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya yang masuk ke dalam Silabus <i>Distance Learning</i> tersebut.</p> <p><i>In practice, based on the Distance Learning Syllabus for the Appointment of Prospective Employees of PT Jamkrindo in 2020, there is no material related to the Code of Conduct and technical regulations/implementation guidelines that are included in the Distance Learning Syllabus.</i></p>	x	x	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.4. Perusahaan menciptakan situasi kondusif untuk melaksanakan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>GCG Code</i>) dan Pedoman Perilaku, dimana Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya termasuk menjadi materi dalam proses <i>introduction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.</p> <p>Direkomendasikan menambahkan materi terkait Pedoman Perilaku dan peraturan teknis/pedoman pelaksanaannya dalam proses <i>introduction</i> (pengenalan) bagi karyawan baru.</p> <p><i>To fulfil the suitability test of parameter No. 4. The Company creates a conducive situation to implement the Guidelines for Good Corporate Governance (GCG Code) and the Code of Conduct, where the Code of Conduct and technical regulations/implementation guidelines are included in the induction process for new employees.</i></p> <p><i>It is recommended to add material related to the Code of Conduct and technical regulations/guidelines for its implementation in the induction process for new employees.</i></p>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>			
1	<p>Dalam hal pengangkatan Suwarsito sebagai Direktur Bisnis dan Penjaminan menggantikan Amin Mas'udi meninggal pada 7 November 2020, diterbitkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-94/MBU/03/2021 dan Nomor 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia pada tanggal 22 Maret 2021.</p> <p>Dimana selama lebih dari 30 hari pengganti Direktur Bisnis dan Penjaminan dijabat oleh Pejabat Pelaksana Tugas. Pada masa itu Direksi dan Dewan Komisaris telah memenuhi wewenang dan tugasnya melalui surat maupun telaah proses Talent BOD untuk mengajukan pejabat penggantinya.</p> <p><i>If Suwarsito's appointment as Director of Business and Guarantee to replace Amin Mas'udi who passed away on November 7, 2020, the Decree of the Minister of SOEs Number SK-94/MBU/03/2021 and Number 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/ 2021 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Guarantee Kredit Indonesia on March 22, 2021.</i></p> <p><i>Where for more than 30 days the replacement for the Director of Business and Guarantee is held by the Acting Officer. At that time the Board of Directors and the Board of Commissioners had fulfilled their authority and duties through letters as well as a review of the BOD Talent process to propose a replacement officer.</i></p>	x	x	<p>Memenuhi uji kesesuaian parameter No.48 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi dimana perlu ditingkatkan tertib administrasi dalam dokumentasi terkait evidensi:</p> <p>1. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu</p> <p><i>Meets the parameter suitability test No.48 The Board of Commissioners/Supervisory Board approves the draft RKAP submitted by the Board of Directors where it is necessary to improve administrative order in the documentation related to evidence:</i></p> <p><i>1. Responses to the draft RKAP by the Board of Commissioners/Supervisory Board are given within a period</i></p>



No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
III	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas <i>Board of Commissioners/Supervisory Board</i>			
1	<p>Selain tidak ditentukan ada pedoman dalam <i>Board Manual</i> tahun 2012, terdapat kurang tertib administrasi dalam dokumentasi Dewan Komisaris terkait evidensi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP dan disampaikan kepada RUPS/Pemilik Modal untuk bahan pertimbangan keputusan RUPS/Pemilik Modal.</p> <p><i>In addition to the absence of guidelines in the 2012 Board Manual, there is a lack of administrative order in the documentation of the Board of Commissioners regarding the evidence that the Board of Commissioners/Supervisory Board provides opinions and suggestions on the draft RKAP and is submitted to the GMS/Capital Owners for consideration of the decisions of the GMS/Capital Owners.</i></p>	x	✓	<p>Memenuhi uji kesesuaian parameter No.48 Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan persetujuan atas rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi dimana perlu ditingkatkan tertib administrasi dalam dokumentasi terkait evidensi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggapan atas rancangan RKAP oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diberikan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam <i>Board Manual</i>. 2. Terdapat simpulan bahwa rancangan RKAP selaras dan/atau tidak selaras dengan RJPP. 3. Kualitas yang memadai atas tanggapan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas terhadap rancangan RKAP. <p><i>Board Manual</i> telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Tentang Pedoman Kerja (<i>Board Manual</i>) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 03/SKB/1/XII/2020–KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan <i>Board Manual</i> tahun 2012.</p> <p><i>Meets the parameter suitability test No.48 The Board of Commissioners/Supervisory Board approves the draft RKAP submitted by the Board of Directors where it is necessary to improve administrative order in the documentation related to evidence:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Responses to the draft RKAP by the Board of Commissioners/Supervisory Board are given within the timeframe as stipulated in the <i>Board Manual</i>. 2. There is a conclusion that the draft RKAP is in line with and/or not in line with the RJPP. 3. Adequate quality of response from the Board of Commissioners/Supervisory Board to the draft RKAP. <p><i>The Board Manual has been updated through the Joint Decree on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 03/SKB/1/XII/2020–KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated 30 December 2020 replacing the 2012 Board Manual</i></p>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
2	<p>Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris tahun 2020 dan RKAT tahun 2020 telah menjalankan kaidah <i>Board Manual</i> tahun 2020, karena masa berlaku <i>Board Manual</i> tahun 2020 adalah mulai 1 Januari 2021, maka asesmen tahun 2020 dinilai pedoman yang dipergunakan adalah <i>Board Manual</i> tahun 2012.</p> <p><i>The 2020 Board of Commissioners Supervisory Task Report and 2020 RKAT have implemented the 2020 Board Manual rules, because the 2020 Board Manual is valid starting January 1, 2021, the 2020 assessment is considered the guideline used is the 2012 Board Manual.</i></p>	x	✓	<p>Memenuhi uji kesesuaian parameter No.52 Dewan Kornisaris/Dewan Pengawas memberikan arahan tentang manajemen risiko perusahaan dimana terdapat kebijakan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya namun tidak dituangkan dalam <i>Board Manual</i> 2012 .</p> <p>Tindak lanjut ini akan menjadi peningkatan skor pada asesmen tahun 2019.</p> <p><i>Board Manual</i> telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Tentang Pedoman Kerja (<i>Board Manual</i>) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 03/ SKB/1/ XII/2020—KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan <i>Board Manual</i> tahun 2012.</p> <p><i>Meets the parameter suitability test No. 52 The Board of Commissioners/Supervisory Board provides direction on the company's risk management where there is a policy of the Board of Commissioners/ Supervisory Board regarding supervision and providing advice on the company's risk management policy and its implementation but it is not stated in the 2012 Board Manual.</i></p> <p><i>This follow-up will be an increase in the score in the 2019 assessment.</i></p> <p><i>The Board Manual has been updated through the Joint Decree on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 03/ SKB/1/XII/2020 – KEP-07/DK-JAMKRINDO/ XII/2020 dated 30 December 2020 replacing the 2012 Board Manual.</i></p>



No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
3	<p>Terdapat kekurangan tertib administrasi dalam dokumentasi Dewan Komisaris terkait evidensi: Penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. Meski tidak terdapat pedoman di <i>Board Manual</i> tahun 2012.</p> <p><i>There is a lack of administrative order in the documentation of the Board of Commissioners regarding evidence: Assessment of the performance of the Board of Directors is based on a review of the criteria, targets, and key performance indicators included in the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement. Although there are no guidelines in the 2012 Board Manual.</i></p>	✘	✔	<p>Memenuhi uji kesesuaian parameter No.67. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menilai Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemegang Saham/Pemilik Modal dimana perlu diperhatikan administrasi dokumen terkait penilaian kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing.</p> <p><i>Board Manual</i> telah diperbarui melalui Keputusan Bersama Tentang Pedoman Kerja (<i>Board Manual</i>) Dewan Komisaris dan Direksi Nomor 03/ SKB/1/ XII/2020—KEP-07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan <i>Board Manual</i> tahun 2012.</p> <p><i>Meets the parameter suitability test No.67. The Board of Commissioners/Supervisory Board assesses the Board of Directors and reports the results of the assessment to Shareholders/Capital Owners where it is necessary to pay attention to administrative documents related to the Board of Directors' performance assessment based on a review of the criteria, targets and key performance indicators included in the Board of Directors Management Contract individually with the realization of each achievement.</i></p> <p><i>The Board Manual has been updated through the Joint Decree on the Board Manual of the Board of Commissioners and the Board of Directors Number 03/SKB/1/XII/2020—KEP-07/DK-JAMKRINDO XII/2020 dated 30 December 2020 replacing the 2012 Board Manual.</i></p>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
IV	Direksi <i>Directors</i>			
1	<p>Praktiknya, berdasarkan konfirmasi, masih terdapat jabatan yang kosong dalam organisasi Perusahaan di tahun 2020.</p> <p><i>In practice, based on confirmation, there are still vacant positions in the Company's organization in 2020.</i></p>	✓	✗	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.87. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standard operasional baku (SOP) untuk proses bisnis inti (<i>core business</i>) perusahaan dimana terdapat SOP untuk seluruh proses bisnis inti perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan perusahaan.</p> <p>Direkomendasikan melakukan tertib administrasi dalam dokumentasi terutama pada bagian SOP untuk proses bisnis inti Perusahaan sebagai panduan melaksanakan kegiatan Perusahaan.</p> <p><i>To fulfill the suitability test of parameter No.87. The Board of Directors establishes operational policies and standard operating standards (SOP) for the company's core business processes in which there are SOPs for all core business processes of the company as a guide for carrying out company activities.</i></p> <p><i>It is recommended to carry out orderly administration in the documentation, especially in the SOP section for the Company's core business processes as a guide for carrying out Company activities.</i></p>
2	<p>Praktiknya, berdasarkan konfirmasi, masih terdapat jabatan yang kosong dalam organisasi Perusahaan di tahun 2020.</p> <p><i>In practice, based on the confirmation, there are still vacant positions in the Company's organization in 2020.</i></p>	✗	✓	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.91. Direksi menempatkan karyawan pada semua tingkatan jabatan sesuai dengan spesifikasi jabatan dan memiliki rencana suksesi untuk seluruh jabatan dalam perusahaan, dimana terdapat penempatan karyawan pada setiap level jabatan dalam organisasi perusahaan. Tidak terdapat jabatan yang kosong.</p> <p>Direkomendasikan mengisi lowongan jabatan pada setiap level jabatan dalam organisasi Perusahaan yang masih kosong.</p> <p><i>To fulfill the suitability test of parameter No.91. The Board of Directors places employees at all levels of office by job specifications and has a succession plan for all positions within the company, where there is the placement of employees at every level of position in the company's organization. There are no vacant positions.</i></p> <p><i>It is recommended to fill vacancies at every level in the Company's organization that are still vacant.</i></p>



No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
3	<p>Praktiknya, Perusahaan belum memiliki kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>). Adapun isi dari kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) tersebut meliputi:</p> <p><i>In practice, the Company does not yet have a regulatory policy for subsidiaries (subsidiary governance). The contents of the regulatory policy for subsidiaries (subsidiary governance) include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris, diantaranya memuat: <i>Guidelines for the appointment and dismissal of the Board of Directors and the Board of Commissioners, including:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Penjaringan atau nominasi calon Direksi <i>Selection or nomination of candidates for the Board of Directors;</i> b. Penilaian/pengujian atas kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) bagi calon Direksi dan Dewan Komisaris <i>Assessment/testing of the fit and proper test for candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners;</i> c. Proses penetapan calon Direksi dan Dewan Komisaris terpilih <i>The process of determining the selected candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners.</i> 2. Sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (kolegial), yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. <i>Performance appraisal system/guidelines for the Board of Directors (collegial and individual) and the Board of Commissioners (collegial), which contain at least the main performance indicators and success criteria.</i> 	x	✓	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.104. Direksi menerapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan/atau perusahaan patungan, di mana Direksi menetapkan kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>) dan perusahaan patungan antara lain mencakup: pengangkatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi, penetapan target kinerja dan penilaian kinerja serta insentif bagi Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi. Direkomendasikan menyusun kebijakan pengaturan untuk anak perusahaan (<i>subsidiary governance</i>).</p> <p><i>To fulfill the suitability test of parameter No. 104. The Board of Directors implements regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and/or joint ventures, in which the Board of Directors establishes regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance) and joint ventures including the appointment of the Board of Commissioners/ Supervisory Board and Directors, setting targets performance and performance appraisal as well as incentives for the Board of Commissioners/ Supervisory Board and Board of Directors. It is recommended to develop regulatory policies for subsidiaries (subsidiary governance).</i></p>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
	<p>3. Pedoman gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas diantaranya memuat tentang: <i>Guidelines for salary/honorarium, allowances, and facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners/ Supervisory Board include the following:</i></p> <p>a. Formula perhitungan gaji/honorarium <i>Salary/honorarium calculation formula</i></p> <p>b. Formula perhitungan gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tersebut memperhatikan pendapatan, aktiva, tingkat inflasi, serta mempertimbangkan sektor industri sejenis yang terukur (<i>benchmark</i>), kondisi persaingan usaha (<i>competitiveness</i>) atau kompleksitas usaha, dan kelangkaan Sumber Daya Manusia. <i>The formula for calculating the salary/honorarium, allowances, and facilities takes into account income, assets, inflation rate, and considers the measured industrial sector (benchmark), conditions of business competition (competitiveness), or business complexity, and scarcity of Human Resources.</i></p>			
4	<p>Praktiknya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan <i>Desk Subrogasi</i>, dimana terdapat hasil pemeriksaan bahwa masih belum sesuai tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK. <i>In practice, based on the Subrogation Desk Examination Result Report, where there are examination results that there is still no appropriate follow-up on the recommendations of the BPK findings.</i></p>	✓	✗	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.108. Direksi menindak-lanjuti hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK), dimana terdapat monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI dan auditor eksternal (KAP dan BPK). Direkomendasikan menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.108. The Board of Directors follows up on the results of the SPI examination and external auditors (KAP and BPK), where there is the monitoring of follow-up on the results of the SPI examination and external auditors (KAP and BPK). It is recommended to complete the follow-up on the recommendations of BPK's findings.</i></p>



No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
5	<p>Praktiknya, penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian kepada Pemegang Saham dengan cc Dewan Komisaris.</p> <p><i>In practice, the submission of the Quarterly Management Report is submitted to the Board of Commissioners simultaneously with the submission to Shareholders with the cc of the Board of Commissioners.</i></p>	✓	✓	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.121. Direksi melaporkan informasi-informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, dimana Direksi menyampaikan laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta laporan tahunan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham.</p> <p>Direkomendasikan menyampaikan laporan manajemen triwulanan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang saham.</p> <p><i>To fulfill the suitability test of parameter No.121. The Board of Directors reports relevant information to the Shareholders and the Board of Commissioners/ Supervisory Board, where the Board of Directors submits quarterly and annual management reports as well as annual reports to the Board of Commissioners/ Supervisory Board before submission to Shareholders. It is recommended to submit quarterly management reports to the Board of Commissioners before submission to shareholders.</i></p>
6	<p>Praktiknya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Desk Subrogasi, dimana terdapat hasil pemeriksaan bahwa masih belum sesuai tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK.</p> <p><i>In practice, based on the Subrogation Desk Examination Result Report, where there are examination results that there is still no appropriate follow-up on the recommendations of the BPK findings.</i></p>	✓	✗	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.130 SPI melaksanakan pengawasan intern untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, dimana SPI memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal dan eksternal, antara lain sebagai penanggung jawab Fungsi Audit Internal memiliki pedoman untuk memantau tindak-lanjut hasil rekomendasi hasil pengawasan intern dan pengawasan ekstern (BPK, KAP, dll).</p> <p>Direkomendasikan menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK</p> <p><i>To fulfill the suitability test of parameter No.130 SPI carries out internal supervision to provide added value and improve company operations, where SPI monitors the follow-up to recommendations from internal and external supervision, among others, as the person in charge of the Internal Audit Function, has guidelines for monitoring the follow-up to recommendations from internal and external supervision (BPK, KAP, etc.). It is recommended to complete the follow-up on the recommendations of BPK's findings</i></p>

No	Hasil Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Self Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi Self Assessment / Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
7	<p>Praktiknya, penyampaian Laporan Manajemen Triwulanan disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan penyampaian kepada Pemegang Saham dengan cc Dewan Komisaris.</p> <p><i>In practice, the submission of the Quarterly Management Report is submitted to the Board of Commissioners simultaneously with the submission to Shareholders with the cc of the Board of Commissioners.</i></p>	✓	✓	<p>Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.132. Sekretaris perusahaan menjalankan fungsinya, dimana Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan disampaikan kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tepat waktu.</p> <p>Direkomendasikan menyampaikan laporan manajemen triwulanan kepada Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada Pemegang saham.</p> <p><i>To fulfill the suitability test of parameter No.132. The Corporate Secretary carries out his functions, whereby the Quarterly and Annual Management Reports are submitted to the Board of Commissioners/ Supervisory Board on time.</i></p> <p><i>It is recommended to submit quarterly management reports to the Board of Commissioners before submission to shareholders.</i></p>
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>			
1	<p>Perusahaan telah menyediakan laman perihal Tata Kelola perusahaan, antara lain: yang dapat diakses di: http://www.jamkrindo.co.id/gcg Namun informasi disampaikan sangat sederhana satu paragraf tidak memuat sesuai parameter No.139 Website perusahaan mempublikasikan kebijakan dan informasi penting perusahaan, salah satu uji kesesuaian terdapat kebijakan yang dipublikasikan, antara lain: Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, dan Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan.</p> <p><i>The company has provided a page regarding corporate governance, among others: which can be accessed at: http://www.jamkrindo.co.id/gcg. 139 The company's website publishes important company policies and information, one of the conformity tests includes published policies, including Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance (GCG Code), Boards Manual, and Code of Conduct, and the Company's Gratification Control Program.</i></p>	✘	✓	<p>Informasi terkait Pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG Code), Boards Manual, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan tercantum pada situs https://www.jamkrindo.co.id/gcg.</p> <p><i>Information related to Good Corporate Governance Guidelines (GCG Code), Board Manual, Code of Conduct, and Company Gratification Control Program is listed on https://www.jamkrindo.co.id/gcg website.</i></p>



No	Hasil Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2020 <i>Results of the Recommendation for the Implementation of GCG for the</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Self Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Included in the Self-Assessment Recommendation for the Implementation of GCG for the 2019 Financial Year</i>	Terdapat Dalam Rekomendasi <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 <i>Included in the Recommendations for Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 Financial Year</i>	Rencana Tindak Lanjut (Jika Merupakan Rekomendasi <i>Self Assessment</i> / <i>Assessment</i> Penerapan GCG Tahun Buku 2018 dan 2019) <i>Follow Up Plan (If It Is a Recommendation for Self Assessment / Assessment of the Implementation of GCG for the 2018 and 2019 Financial Years)</i>
VI	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>			
1	Perusahaan selayaknya terdapat bidang/area di perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain. <i>Companies should have areas within the company, including products, processes, support functions, organizational performance, or strategies to become best practices or benchmark goals for other companies.</i>	✘	✔	Untuk memenuhi uji kesesuaian parameter No.152 Perusahaan memiliki bidang/area yang menjadi <i>best practices</i> di Industrinya atau menjadi tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain (baik bagi BUMN maupun perusahaan swasta). Bidang/area tersebut dapat terdiri dari produk, proses fungsi pendukung, kinerja organisasi dan strategi, dimana dengan pencapaian kinerja perusahaan terbaik di sektor usaha BUMN atau di industrinya. Direkomendasikan meningkatkan kinerja bidang/area di Perusahaan, antara lain produk, proses, fungsi, pendukung, kinerja organisasi, atau strategi menjadi <i>best practices</i> atau tujuan <i>benchmark</i> bagi perusahaan lain. <i>To fulfill the suitability test of parameter No.152 Companies have fields/areas that become best practices in their industry or become benchmark goals for other companies (both BUMN and private companies). These fields/areas can consist of products, processes of supporting functions, organizational performance, and strategies, where the achievement of the best company performance in the BUMN business sector or the industry. It is recommended to improve the performance of areas/areas in the Company, including products, processes, functions, supports, organizational performance, or strategies to become best practices or benchmark goals for other companies</i>

✔ = Terdapat dalam rekomendasi *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2019 dan/atau dan *Assessment* untuk tahun buku 2018

✘ = Tidak terdapat dalam rekomendasi *Self Assessment* penerapan GCG tahun buku 2019 dan/atau dan *Assessment* untuk tahun buku 2018

✔ = *It is contained in the Self Assessment recommendations for the implementation of GCG for the 2019 financial year and/or and the Assessment for the 2018 financial year*

✘ = *Not included in the Self-Assessment recommendation for the implementation of GCG for the 2019 financial year and/or the Assessment for the 2018 financial year*

Beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. **Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,863 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 98,043%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen

Several points of recommendation that become Areas of Improvement of GCG implementation in the Company, as attached in the table above, although several points need to be considered or followed up further, in general, it can be concluded that the implementation of GCG in the Company has been implemented or is running well, as described below:

1. **Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 6.863 out of a weight of 7.000 or equivalent to the percentage of achievement of 98.043%. This shows that the commitment to sustainably

penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 6,848 atau 97,825% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 0,218 poin.

2. **Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,926 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 99,175%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,944 atau 99,374% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 0,199 poin.
3. **Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 33,963 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 97,037%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,289 atau 95,111% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 1,926 poin.
4. **Aspek Direksi**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 34,110 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 97,457%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,293 atau 95,123% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 2,334 poin.
5. **Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 8,573 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan persentase pencapaian sebesar 95,256%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,431 atau 93,679% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat kenaikan sebesar 1,577 poin.
6. **Aspek Lainnya**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 4,375 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan persentase pencapaian

implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 6.848 or 97.825% of the total weight of 7.000, there was an increase of 0.218 points.

2. **Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 8.926 out of a weight of 9.000 or equivalent to the percentage of achievement of 99.175%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 8.944 or 99.374% of the total weight of 7.000, there was a decrease of 0.199 points.
3. **Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 33.963 out of a weight of 35.000 or equivalent to an achievement percentage of 97.037%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 33.289 or 95.111% of the total weight of 7.000, there was an increase of 1.926 points.
4. **Aspects of the Board of Directors**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 34.110 out of a weight of 35.000 or equivalent to the percentage of achievement of 97.457%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 33.293 or 95.123% of the total weight of 7.000, there was an increase of 2.334 points.
5. **Aspects of Information Disclosure and Transparency**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 8.573 out of a weight of 9.000 or equivalent to the percentage of achievement of 95.256%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 8.431 or 93.679% of the total weight of 7.000, there was an increase of 1.577 points.
6. **Other Aspects**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 4.375 out of a weight of 5.000 or equivalent to an achievement percentage

sebesar 87,500%. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 5,00 atau 100,00% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 12,500 poin.

of 87.500%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 5.00 or 100.00% of the total weight of 7.000, there was a decrease of 12.500 points.

Pengukuran dan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun Buku 2019

Measurement and Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance for Fiscal Year 2019

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG di tahun buku 2019 dilakukan melalui metode *Self Assessment* oleh Tim Internal Jamkrindo, yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Tugas No.767/SPT/1/XII/2019 tanggal 3 Desember 2019. Tim Pelaksana *Self Assessment* Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Jamkrindo tahun 2019 beranggotakan antara lain:

The implementation of the GCG implementation assessment in the 2015 fiscal year was conducted through the *Self-Assessment* method by the Jamkrindo Internal Team, which was formed based on Assignment Order No.767/SPT/1/XII/2019 dated December 3, 2019. The Implementation Team for the *Self-Assessment* of the Implementation of *Good Corporate Governance* (GCG) of Jamkrindo in 2019 consists of:

Jabatan Tim Team Position	Nama Name	Jabatan Position
Ketua Chairman	M. Adhy Prayitno	Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit
Wakil Ketua Vice-Chairman	Abdul Bari	Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary
Koordinator 1 Coordinator 1	Dadang Ary Aviyanto	Plt. Wakil Kepala Satuan Pengawasan Intern Act. Deputy Head of Internal Audit Unit
Koordinator 2 Coordinator 2	Siti Maesaroh	Kepala Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM Head of HR Policy and Development
Anggota Member	Dodi Rinto Wibowo	Kepala Bagian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Head of Budget Planning and Control
	Anggit Murdiwibowo	Kepala Bagian Kesekretariatan Head of Secretarial Department
	Harjanto	Plt. Kepala Bagian Sistem Manajemen dan Pengembangan Organisasi Act. Head of Management System and Organizational Development
	Imron Wahidin	Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Bidang Non Penjaminan Act. Head of Non-Guarantee Compliance Section
	Anna Dwiyanti	Kepala Seksi Pengadaan Jasa dan Konsultan Head of Service Procurement and Consultant Section
	Asep Ginanjar Cahya Gumilar	Kepala Seksi Administrasi Pelaporan dan Penganggaran Audit Head of Audit Reporting and Budgeting Administration Section
	Andik Sugiarto	Staf Bagian Audit Wilayah III Audit Staff Regional III
	Emmerisa br. Sembiring	Staf Bagian Audit Wilayah II Audit Staff Regional II
	Michael Ranap Simanjuntak	Staf Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi Corporate Audit and Information Technology Staff
	Pressi Hapsari Fadlilah	Staf Bagian Kesekretariatan Secretarial Staff
Sistiana Kurnia Widyasari	Staf Bagian Kebijakan dan Pengembangan SDM HR Policy and Development Department Staff	
Justan	Staf Bagian Perencanaan dan Pengendalian Anggaran Budget Planning and Control Department Staff	
Hapsa Lumaela	Staf Bagian Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Business Planning and Development Staff	
Sinatria Gaza Lovendra	Pro Hire	

Jenis Penilaian Rating Type	:	Self Assessment/Evaluasi Self-Assessment/Evaluation
Penilai Assessor	:	Tim Pelaksana Self Assessment Penerapan GCG Jamkrindo Self-Assessment Team for the Implementation of Jamkrindo's GCG Implementation
Metode Penilaian Assessment Method	:	Indikator/Parameter Penilaian Atas Penerapan GCG SK16/S.MBU/2012 Indicators/Parameters of Assessment of the Implementation of GCG SK16/S.MBU/2012
Tahun Buku Penerapan Fiscal Year of Application	:	1 Januari – 31 Desember 2019 January 1 – December 31 2019
Waktu Pengukuran Measurement Time	:	Januari s.d Juni 2020 January to June 2020
Waktu Terbit Laporan Publish Time	:	24 Juli 2020 July 24, 2020

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Jamkrindo memperoleh skor capaian sebesar 95,804 dari skor maksimal 100 dengan kualifikasi "SANGAT BAIK", dengan rincian sebagai berikut:

Based on the results of the assessment, Jamkrindo obtained an achievement score of 95.804 out of a maximum score of one hundred with the qualification "VERY GOOD", with the following details:

Aspek Aspect		Bobot Weight	Nilai Score	Pencapaian (%) Achievement (%)
1		2	3	(4=3/2 x 100)
I	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance	7,000	6,848	97,825
II	Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,000	8,944	99,374
III	Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Supervisory Board/Board of Commissioners	35,000	33,289	95,111
IV	Direksi Directors	35,000	33,293	95,123
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	8,431	93,679
VI	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	5,00	100,00
Skor Keseluruhan Overall Score		100,000	95,804	95,804
Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Rating		"SANGAT BAIK" "VERY GOOD"		

Klasifikasi Kualitas Penerapan Assessment
Assessment Implementation Quality Classification

Nilai di atas 85 Score above 85	:	Sangat Baik Very Good
75 < Nilai ≤ 85 75 < Score ≤ 85	:	Baik Good
60 < Nilai ≤ 75 60 < Score ≤ 75	:	Cukup Baik Moderate
50 < Nilai ≤ 60 50 < Score ≤ 60	:	Kurang Baik Poor
Nilai ≤ 50 Score ≤ 50	:	Tidak Baik Bad

Berdasarkan hasil *Self Assessment* GCG tahun buku 2019, Jamkrindo memperoleh sebesar 95,804 dengan predikat sangat baik dan terdapat usulan perbaikan yang dimana sampai saat ini 40 usulan perbaikan. Berikut rincian *Area of Improvement* pada tahun 2019 pada masing-masing aspek beserta progresnya.

Based on the results of the GCG Self-Assessment for the 2019 fiscal year, Jamkrindo received a score of 95.804 with a very good predicate and there are suggestions for improvement of which to date forty proposals for improvement. The following are the details of the *Area of Improvement* in 2019 in each aspect and their progress.

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status <i>Status</i>	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
I	Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan <i>Commitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance</i>			
1	Agar ketentuan terkait gratifikasi disosialisasikan kepada seluruh Insan Jamkrindo, selain itu Perusahaan agar menampilkan informasi program Pengendalian Gratifikasi pada halaman pertama website perusahaan sehingga mudah ditemukan oleh stakeholders. <i>For the provisions related to gratification to be issued to all employees of the Company, in addition, the Company should display information on the Gratification Control program on the first page of the company's website so that stakeholders easily find it.</i>	✓	2019	Telah dilakukan sosialisasi budaya kepatuhan terhadap gratifikasi melalui memorandum No. B.396/INT/MRP/ DLT/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020 perihal Sosialisasi Kebijakan Strategi Anti Faud dan Pengelolaan Budaya Kepatuhan Terhadap Gratifikasi. Halaman situs web Perusahaan telah dilakukan pengkinian dengan menampilkan informasi program <i>The socialization of gratification compliance culture has been conducted through memorandum No.B.396/INT/MRP/ DLT/VI/2020 dated June 18, 2020 concerning Socialization of Anti Faud Strategy Policy and Management of Gratification Compliance Culture. The Company's website page has been updated by displaying program information</i>
2	Agar website Perusahaan menampilkan informasi link saluran pengaduan WBS secara lebih jelas, yaitu dengan memasang icon pada halaman awal website sehingga mudah diakses. <i>For the Company's website to display information on the WBS complaint channel link more clearly, by installing an icon on the website's home page so that it is easily accessible.</i>	✓	2019	Telah terlampir pada menu halaman utama situs web Perusahaan pada bagian info dengan alamat www.jamkrindo.co.id/sistem-pelaporan-pelanggaran-whistleblowing-system . <i>It has been attached to the main page menu of the Company's website with www.jamkrindo.co.id/sistem-pelaporan-pelanggaran-whistleblowing-system address.</i>
II	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal <i>Shareholders and GMS/Capital Owners</i>			
1	Agar pemegang saham lebih memperhatikan tenggat waktu dalam jangka waktu penetapan anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris. <i>For shareholders to pay more attention to the deadlines for the appointment of members of the Supervisory Board/Board of Commissioners.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
2	Agar meningkatkan kualitas sistem penilaian kinerja Direksi dengan memberikan ukuran kinerja untuk masing-masing Direksi secara individual. <i>To improve the quality of the Board of Directors' performance appraisal system by providing performance measures for each of the Directors individually.</i>	✓	2020	Tahun 2020 Goal Setting KPI Direksi telah dibuat secara individual sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komite No.001/BAK/SPO/VI/2020 tentang Komite Penetapan Goal Setting KPI Unit Kerja Tahun 2020. Dokumen dimaksud telah disampaikan Divisi Perencanaan Strategis dalam memorandum No.B.153/INT/PRS/STF/IX/2020. <i>In 2020, Goal Setting for Board of Director's KPI has been made individually as stated in the Minutes of Committee No.001/BAK/SPO/VI/2020 concerning Committee for KPI's Setting Determination for Working Unit in 2020. The document has been submitted by Strategic Planning Division in memorandum No.B.153/INT/PRS/STF/IX/2020.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
3	Agar Rencana Kerja Dewan Pengawas atas proses persetujuan RJPP dituangkan dalam RKAT pada tahun sebelum RJPP dirilis. <i>So that the Work Plan of the Supervisory Board on the RJPP approval process is stated in the RKAT in the year before the RJPP is released.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
III	Dewan Pengawas/Dewan Komisaris <i>Supervisory Board/Board of Commissioners</i>			
1	Agar dilakukan improvement terhadap Board Manual sehingga mencakup aturan mengenai jangka waktu pemberian tanggapan Dewan Pengawas atas rancangan RKAP yang diusulkan oleh Direksi. <i>To make improvements to the Board Manual so that it includes rules about the period for the Supervisory Board to respond to the draft RKAP proposed by the Board of Directors.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>
2	Agar dilakukan improvement terhadap Board Manual sehingga mencakup kebijakan spesifik pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan manajemen risiko perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>To make improvements to the Board Manual so that it includes specific policies for supervision and providing advice on company risk management policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Governance Good Companies (GCG) in BUMN.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>
3	Agar dilakukan improvement terhadap Board Manual sehingga telah secara spesifik mencakup kebijakan sistem teknologi informasi perusahaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>To make improvements to the Board Manual so that it specifically covers the company's information technology system policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs Number: SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.</i>	✓	2018	Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i>



No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
4	<p>Agar dilakukan <i>improvement</i> terhadap <i>Board Manual</i> sehingga telah secara spesifik mencakup kebijakan pengadaan dan pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN</p> <p><i>To make improvements to the Board Manual so that it specifically covers procurement policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN</i></p>	✓	2018	<p>Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan.</p> <p><i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i></p>
5	<p>Agar dilakukan <i>improvement</i> terhadap <i>Board Manual</i> sehingga mencakup kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.</p> <p><i>To make improvements to the Board Manual so that it includes quality and service policies and their implementation as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in SOEs.</i></p>	✓	2018	<p>Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan.</p> <p><i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i></p>
6	<p>Agar dilakukan <i>improvement</i> terhadap <i>Board Manual</i> sehingga mencakup aturan yang jelas dan spesifik mengenai pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Pengawas atas kepatuhan perusahaan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar serta kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.</p> <p><i>To make improvements to the Board Manual so that it includes clear and specific rules about supervision and providing advice to the Supervisory Board on the company's compliance in conducting the applicable laws and regulations and the articles of association as well as the company's compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties.</i></p>	✓	2018	<p>Telah dilakukan pembaruan dalam harmonisasi Kebijakan Perusahaan.</p> <p><i>An update has been made in harmonization of the Company's Policy.</i></p>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
7	<p>Agar Laporan Manajemen Triwulanan ditandatangani juga oleh Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama <i>So that the Quarterly Management Report is also signed by the Chairman of the Supervisory Board/President Commissioner</i></p>	x	2020	<p>Tindak lanjut yang disampaikan adalah AD/ART No.2 tanggal 9 April 2020 pada Pasal 19 Ayat 6 di mana "Laporan Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi" Sedangkan assessment GCG pada tahun 2019 mengacu pada SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang indikator/parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan GCG pada BUMN Aspek III "Dewan Komisaris/Dewan Pengawas" indikator 17 parameter 59 point 4 dijelaskan bahwa "Komisaris utama/Ketua Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Triwulanan I s.d Triwulanan III, serta seluruh anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas menandatangani Laporan Manajemen Tahunan, setelah dievaluasi/dibahas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Direksi." <i>The follow-up submitted is AD/ART No.2 dated April 9, 2020 in Article 19 Paragraph 6 where "Quarterly Report as referred to in paragraph 5 of this Article is signed by all members of the Board of Directors" While the GCG assessment in 2019 refers to SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning indicators/parameters of assessment and evaluation of GCG implementation in SOEs Aspect III "Board of Commissioners/Board of Trustees" indicator 17 parameter 59 point 4 explained that "The President Commissioner/Chairman of the Board of Trustees signed the Quarterly Management Report I to Quarterly III, and all members of the Board of Commissioners/Board of Trustees signed the Annual Management Report, after being evaluated/discussed by the Board of Commissioners/Board of Trustees and Board of Directors."</i></p>
8	<p>Dewan Pengawas melakukan penilaian kinerja Direksi secara individual dan Dewan Pengawas menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individual kepada RUPS dalam Laporan Kegiatan dan Keuangan yang disampaikan kepada Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada BUMN. <i>The Supervisory Board evaluates the performance of the Board of Directors individually and the Supervisory Board gives the results of the performance assessment of the Board of Directors collegially and individually to the GMS in the Activity and Financial Report sent to the Shareholders as referred to in the Decree of the Secretary of the Minister of SOE No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/ Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in BUMN.</i></p>	✓	2020	<p>Pada tahun 2020 penilaian Kinerja Direksi secara Individu telah disusun. <i>In 2020 the Performance assessment of the Board of Directors individually has been prepared.</i></p>
9	<p>Menindaklanjuti AOI tahun 2018 yang belum ditindaklanjuti. <i>Following up on the 2018 AOI which has not been followed up.</i></p>	x	2020	<p>AOI Tahun 2018 telah selesai ditindaklanjuti. <i>AOI Year 2018 has been completed followed up.</i></p>



No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
10	Agar dilakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat. <i>To evaluate the performance achievement of each member of the Board of Commissioners as outlined in the Minutes of Meeting.</i>	x	2019	Belum dilakukan evaluasi pencapaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris yang dituangkan dalam Risalah Rapat <i>Has no evaluation of performance achievements of each member of the Board of Commissioners as set forth in the Minutes of Meeting</i>
11	Agar Board Manual ataupun Pedoman pengelolaan rapat Dewas mengatur atas evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan Pembahasan/telaah atas usulan Direksi dan arahan/keputusan RUPS terkait dengan usulan Direksi. <i>For the Board Manual or the Board of Directors meeting management guidelines to regulate the follow-up evaluation of the results of the earlier meeting and discussion/review of the Board of Directors' proposals and the GMS's direction/decision related to the Board of Directors' proposal.</i>	✓	2020	Tertuang pada Dewan Komisaris dan Direksi No.03/SKB/1/XII/2020–KEP07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 menggantikan Board Manual tahun 2012. <i>Stated on Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No.03/SKB/1/XII/2020–KEP07/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 replacing the Board Manual in 2012.</i>
12	Agar Sekretaris Dewan Pengawas selalu menyampaikan risalah rapat keseluruhan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat selesai dilaksanakan. <i>So that the Secretary of the Supervisory Board always sends the minutes of the entire meeting of the Supervisory Board no later than 7 days after the meeting is over.</i>	x	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
13	Sekretariat Dewan Pengawas agar menyampaikan bahan-bahan rapat paling lambat 3 hari sebelum diadakannya rapat serta mendokumentasikan penyerahan dokumen tersebut. <i>Secretariat of the Board of Trustees shall deliver the meeting materials at least 3 days prior to the meeting and document the submission of such documents.</i>	✓	2018	Sampel dokumentasi penyampaian bahan rapat 3 hari sebelum rapat dimulai. <i>Sample documentation of meeting materials delivered 3 days before the meeting starts.</i>
IV	Direksi <i>Directors</i>			
1	Memperbarui SOP KUR sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) terbaru. <i>Updating the KUR SOP following the latest Coordinating Minister for Economic Affairs (Permenko) Regulation.</i>	✓	2020	Perusahaan telah mengeluarkan Surat Edaran No.22/SE/2/VI/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Kredit Usaha Rakyat PT Jaminan Kredit Indonesia per tanggal 22 Juni 2020. <i>The Company has issued Circular Letter No.22/SE/2/VI/2020 concerning Implementation Instructions (Juklak) of People's Business Credit of PT Jaminan Kredit Indonesia as of June 22, 2020.</i>
2	Mengisi posisi Kepala Bagian yang kosong dan Menyusun database yang menyebutkan siapa saja karyawan yang dapat mengambil alih pekerjaan-pekerjaan utama apabila karyawan-karyawan berhenti, pensiun, meninggal dengan tak terduga. <i>Filling the vacant Head of Division positions and compiling a database that mentions which employees can take over the main jobs if employees quit, retire, die unexpectedly.</i>	✓	2021	Telah ditindaklanjuti melalui memorandum Divisi MSDM No.B.97/INT/SDM/KPS/1/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Perusahaan memiliki database karyawan melalui aplikasi Integrated Talent Management System. <i>It has been followed up through the memorandum of HR Management Division No.B.97/INT/SDM/KPS/1/2021 dated January 19, 2021 and the Company has a database of employees through the Integrated Talent Management System application.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
3	Agar Master Plan TI tahun 2019 s.d 2023 dan kebijakan pengelolaan data, prosedur pengelolaan data, dan pelaporan IT untuk disahkan menjadi ketentuan Perusahaan <i>So that the IT Master Plan for 2019 up to 2023 and data management policies, data management procedures, and IT reporting to be ratified as Company regulations</i>	✓	2019	Peraturan Direksi No.23/Per-Dir/3/XII/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Master Plan Teknologi Informasi 2019-2023. <i>Board of Directors Regulation No.23/Per-Dir/3/XII/2019 dated December 12, 2019 concerning Information Technology Master Plan 2019-2023.</i> Surat Edaran No.33/SE/3/X/2020 tanggal 05 Oktober 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Information Technology Disaster Recovery Plan. <i>Circular Letter No.33/SE/3/X/2020 dated October 5, 2020 concerning Instructions for Implementation of Information Technology Disaster Recovery Plan.</i>
4	Agar pada tahun 2020 kebijakan/program Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan menjalankan program reward dan punishment sesuai ketentuan yang ada. <i>So that in 2020 the education and training policies/ programs are implemented under the work plan that has been set and run the reward and punishment program by existing regulations.</i>	✓	2020	Daftar pelatihan yang telah direalisasikan selama tahun 2020 sedangkan reward & punishment telah diterapkan melalui penilaian kinerja KPI Individu. <i>The list of trainings that have been realized during 2020 while reward & punishment has been applied through the assessment of individual KPI performance.</i>
5	Agar Perusahaan Menyusun kebijakan terkait anak perusahaan yang mencakup hal-hal tersebut di atas. <i>For the Company to develop policies related to subsidiaries that include the matters mentioned above.</i>	✗	-	Belum ada Tindak Lanjut <i>No Follow Up Yet</i>
6	Agar Perusahaan menerapkan standar akuntansi terkait dengan perkembangan terbaru lingkungan perusahaan, antara lain diberlakukannya PSAK 71, 72 dan 73. <i>For the Company to apply accounting standards related to the latest developments in the corporate environment, among others, the enactment of PSAK 71, 72, and 73.</i>	✓	2019	Telah dilakukan penyesuaian PSAK 71, 72 dan 73 melalui Peraturan Direksi No. 21/Per-Dir/5/XI/2019. <i>Adjustments have been made to PSAK 71, 72 and 73 through Board of Directors Regulation No. 21/Per-Dir/5/XI/2019.</i>
7	Agar aplikasi SIMR dilakukan perbaikan sehingga risiko per unit kerja dapat teridentifikasi dan ditampilkan pada laporan triwulanan <i>For the SIMR application to be improved so that the risks per work unit can be found and displayed in quarterly reports.</i>	✓	2020	Telah dilakukan pengembangan pada Aplikasi SIMR terintegrasi yang telah disosialisasikan melalui memorandum Divisi PUKM No.B.700/INT/MRP/PRK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Undangan Sosialisasi Aplikasi SIMR Terintegrasi. <i>Development has been carried out on integrated SIMR Application that has been socialized through the memorandum of PUKM Division No.B.700/INT/MRP/PRK/X/2020 dated October 20, 2020 concerning Invitation for Socialization of Integrated SIMR Application.</i>
8	Agar Perusahaan menyelesaikan tindak lanjut dari rekomendasi SPI dan auditor eksternal (BPK dan BPKP) yang masih belum terselesaikan. <i>For the Company to complete the follow-up to the recommendations of SPI and external auditors (BPK and BPKP) which are still unresolved.</i>	✗	2019	TL BPK PDDT 2018 progres sebesar 83,78% atau baru ditindaklanjuti 31 dari 37 rekomendasi. <i>Follow-up BPK PDDT 2018 progress of 83.78% or just followed up 31 out of 37 recommendations.</i>
9	Agar Perusahaan lebih mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK mengingat apabila tidak dipatuhi berpotensi terhadap pembekuan usaha Perusahaan. <i>For the Company to comply more with the provisions set by the OJK, considering that if it is not followed, it has the potential to freeze the Company's business.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>



No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
10	Agar Perusahaan segera menindaklanjuti rekomendasi atas laporan survei kepuasan pelanggan yang belum ditindaklanjuti. <i>So that the Company immediately follows up on recommendations on customer satisfaction survey reports that have not been followed up.</i>	x	-	Dalam proses pembahasan komite. <i>In the process of discussion of the committee.</i>
11	Agar pembayaran dan penyampaian dokumen kewajiban perpajakan (SPT Tahunan maupun bulanan) tepat waktu <i>So that the payment and submission of tax obligation documents (Annual SPT and monthly) on time</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
12	Agar penyaluran pinjaman kemitraan dilakukan lebih prudent dan diupayakan penagihan atas pinjaman bermasalah tersebut. <i>So that the distribution of partnership loans is conducted more prudently, and efforts are made to collect the non-performing loans.</i>	✓	2019	Bagian PKBL kantor pusat sudah mengirimkan memo ke cabang-cabang untuk melakukan penagihan kepada Mitra Binaan yang menunggak. <i>The PKBL section in the head office has sent memos to the branches to collect to the delinquent Partners.</i>
13	Agar laporan manajemen disampaikan kepada Dewan Pengawas/Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum disampaikan kepada Menteri BUMN selaku pemegang saham. <i>For the management report to be sent to the Supervisory Board/Board of Commissioners first before being sent to the Minister of BUMN as the shareholder.</i>	x	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
14	Agar dalam jadwal RKAP telah menjadwalkan agenda secara khusus seperti pembahasan laporan triwulanan maupun tahunan. <i>So that the RKAP schedule has specifically scheduled an agenda such as the discussion of quarterly and annual reports.</i>	x	2019	Bagian PKBL kantor pusat telah mengirimkan memo ke cabang-cabang untuk melakukan penagihan kepada Mitra Binaan yang menunggak. <i>PKBL unit at the head office has sent memos to branches to collect to the delinquent Partners.</i>
15	Agar dilakukan perbaikan atas piagam audit yang ada sehingga sesuai dengan standar ataupun best practice yang berlaku <i>To make improvements to the existing audit charter so that it is under applicable standards or best practices</i>	✓	2020	Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.04/SKB/1/XII/2020–KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Piagam Audit Internal (<i>Internal Audit Charter</i>) <i>Joint Decree of the Board of Directors and Board of Commissioners No.04/SKB/1/XII/2020-KEP-10/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Internal Audit Charter</i>
16	Agar dilakukan pelatihan berkelanjutan terhadap personil SPI dan dilakukan pembaharuan atas kebijakan audit yang ada. Kebijakan audit tersebut nantinya akan menjadi landasan untuk dijalankannya program jaminan kualitas audit yang efektif. <i>To conduct continuous training for SPI personnel and update existing audit policies. The audit policy will later become the basis for the implementation of an effective audit quality assurance program.</i>	✓	2020	Pelatihan berkelanjutan telah dilakukan oleh personil SPI pada tanggal 10 s.d 11 Desember 2020 tentang Integrated Risk-Based Internal Auditing dan Piagam Audit telah dilakukan perbaikan melalui harmonisasi Kebijakan Perusahaan. <i>Continuous training has been conducted by SPI personnel on December 10 to 11, 2020 on Integrated Risk-Based Internal Auditing and Audit Charter has been improved through harmonization of Company Policy.</i>

No	Rekomendasi Assessment Penerapan GCG Tahun Buku 2019 <i>Recommendations for Assessment of GCG Implementation for Fiscal Year 2019</i>	Tindak Lanjut Per 31 Desember 2020 <i>Follow Up as of December 31, 2020</i>		
		Status Status	Periode Tindak Lanjut <i>Follow-up Period</i>	Bentuk Tindak Lanjut <i>Follow-up Form</i>
17	Agar perencanaan tahunan mendatang dilakukan berbasis risiko dan dikomunikasikan secara formal kepada Dewan Pengawas cq Komite Audit. <i>So that the next annual planning is conducted on a risk basis and formally communicated to the Supervisory Board cq the Audit Committee.</i>	✓	2020	Memorandum SPI ke Sekretaris Perusahaan No.B.84/INT/SPI/STF/II/2020 tanggal 16 Februari 2020 tentang Penyampaian Perencanaan Kerja Audit Tahunan (PKAT) 2020 Kepada Dewan Pengawas Perum Jamkrindo <i>Memorandum of SPI to Corporate Secretary No.B.84/INT/SPI/STF/II/2020 dated February 16, 2020 concerning Submission of Annual Audit Work Planning (PKAT) 2020 to the Supervisory Board of Jamkrindo</i>
18	Agar Sekretaris Perusahaan juga melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru. <i>So that the Corporate Secretary also conducts a review of the new laws and regulations.</i>	✘	-	Belum ada tindak lanjut <i>No Follow Up Yet</i>
V	Pengungkapan Informasi dan Transparansi <i>Information Disclosure and Transparency</i>			
1	Agar Perusahaan mempublikasikan <i>Board Manual</i> dan Pedoman Perilaku di <i>website</i> . <i>For the Company to publish the Board Manual and Code of Conduct on the website.</i>	✓	2020	Situs web Perusahaan telah mempublikasikan berbagai dokumen tata kelola perusahaan, termasuk Board Manual, Pedoman Perilaku, dan Program Pengendalian Gratifikasi Perusahaan <i>The Company's website has published various corporate governance documents, including the Board Manual, Code of Conduct, and the Company's Gratification Control Program</i>
2	Agar Perusahaan mencantumkan (1) Pembentukan Pusat Pengaduan Konsumen; (2) Program peningkatan layanan kepada konsumen; (3) Biaya yang telah dikeluarkan pada laporan tahunan <i>For the Company to include (1) the establishment of a Consumer Complaint Centre; (2) Program to improve services to consumers; (3) Expenses that have been incurred in the annual report</i>	✓	2018	Situs web Perusahaan telah mempublikasikan berbagai dokumen yang memuat pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik khususnya tentang program peningkatan layanan kepada konsumen serta biaya yang telah dikeluarkan. <i>The Company's website has published various documents containing disclosures of Good Corporate Governance practices in particular regarding service improvement programs to consumers as well as costs incurred.</i>
3	Agar Perusahaan memenuhi poin-poin dalam penilaian ARA sehingga dapat memenangkan penghargaan tersebut. <i>So that the Company fulfils the points in the ARA assessment so that it can win the award.</i>	✓	2019	Preventif. <i>Preventive.</i>
V	Aspek Lainnya <i>Other Aspects</i>			
Nihil / Null				



Beberapa butir rekomendasi yang menjadi *Area of Improvement* (AOI) penerapan GCG di Perusahaan, sebagaimana yang terlampir pada tabel di atas, meskipun ada beberapa butir yang perlu diperhatikan atau ditindaklanjuti lebih lanjut, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, penerapan GCG di Perusahaan telah diterapkan atau berjalan dengan baik, sebagaimana uraian di bawah ini:

1. **Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Secara Berkelanjutan**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada aspek ini, skor yang dicapai adalah 6,848 dari bobot sebesar 7,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 97,825%. Hal ini memperlihatkan bahwa komitmen penerapan GCG secara berkelanjutan di Perusahaan telah berjalan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 6,924 atau 98,913% dari bobot keseluruhan sebesar 7,000, terdapat penurunan sebesar 0,076 poin.
2. **Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pemegang Saham dan RUPS, skor yang dicapai adalah 8,944 atau 99,374% dari bobot keseluruhan 9,000. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pemegang Saham dan RUPS telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya yaitu 8,957 atau 99,519% terdapat penurunan sebesar 0,013 poin.
3. **Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, skor yang dicapai adalah 33,289 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 95,111%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,351 atau 95,289%, terdapat penurunan sebesar 0,062 poin.
4. **Aspek Direksi**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Direksi, skor yang dicapai adalah 33,293 dari bobot sebesar 35,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 95,123%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Direksi telah berjalan dengan "Sangat Baik". Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 33,355 atau 95,300%, terdapat penurunan sebesar 0,062 poin.
5. **Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi**
Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi, skor yang dicapai adalah 8,431 dari bobot sebesar 9,000 atau setara dengan prosentase pencapaian sebesar 93,679%. Hal ini

Several points of recommendation that become Areas of Improvement (AOI) for the implementation of GCG in the Company, as attached in the table above, although several points need to be considered or followed up further, in general, it can be concluded that the implementation of GCG in the Company has been implemented or running well, as described below:

1. **Commitment to the Sustainable Implementation of Good Corporate Governance**
Based on the results of the assessment that has been conducted on this aspect, the score achieved is 6.848 out of a weight of 7.000 or equivalent to the percentage of achievement of 97.825%. This shows that the commitment to sustainably implementing GCG in the Company has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 6.924 or 98.913% of the total weight of 7,000, there was a decrease of 0.076 points.
2. **Aspects of Shareholders and GMS/Capital Owners**
Based on the results of the assessment conducted on the Shareholders and GMS Aspects, the score achieved was 8.944 or 99.374% of the total weight of 9,000. This means that in general, the implementation of GCG for the Aspects of Shareholders and the GMS has been running "Very Good". When compared to the previous year's score of 8.957 or 99.519%, there was a decrease of 0.013 points.
3. **Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board**
Based on the results of the assessment conducted on the Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board, the score achieved was 33,289 out of a weight of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 95.111%. This means that in general, the implementation of GCG for the Aspects of the Board of Commissioners/Supervisory Board has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 33,351 or 95.289%, there was a decrease of 0.062 points
4. **Aspects of the Board of Directors**
Based on the results of the assessment that has been conducted on the Board of Directors Aspect, the score achieved is 33,293 out of a weight of 35,000 or equivalent to the percentage of achievement of 95.123%. This means that in general, the implementation of GCG for the Board of Directors Aspect has been running "Very Good". When compared to the previous year's score, which was 33,355 or 95.300%, there was a decrease of 0.062 points.
5. **Aspects of Information Disclosure and Transparency**
Based on the results of the assessment that has been conducted on the Aspect of Information Disclosure and Transparency, the score achieved is 8,431 out of a weight of 9,000 or equivalent to the percentage of achievement of

berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 8,743 atau 97,267% terdapat penurunan sebesar 0,323 poin.

6. Aspek Lainnya

Berdasarkan hasil *assessment* yang telah dilakukan pada Aspek Lainnya, skor yang dicapai adalah 5,000 dari bobot sebesar 5,000 atau setara dengan presentase pencapaian sebesar 100,00%. Hal ini berarti bahwa secara umum penerapan GCG untuk Aspek Lainnya telah berjalan dengan “Sangat Baik”. Bila dibandingkan dengan skor tahun sebelumnya, yaitu 4,475 atau 87,500% maka terdapat kenaikan sebesar 0,625 poin.

93.679%. This means that in general, the implementation of GCG for Aspects of Information Disclosure and Transparency has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score, which was 8.743 or 97.267%, there was a decrease of 0.323 points.

6. Other Aspects

Based on the results of the assessment that has been conducted on Other Aspects, the score achieved is 5,000 out of a weight of 5,000 or equivalent to an achievement percentage of 100.00%. This means that in general, the implementation of GCG for Other Aspects has been running “Very Good”. When compared to the previous year’s score, which was 4,475 or 87,500%, there was an increase of 0.625 points.

Tren Perkembangan Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sejak dilakukan *Assessment* GCG pada tahun 2015 tercatat perkembangan hasil atau skor *assessment* GCG selalu menunjukkan peningkatan. Hal ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai rekomendasi yang muncul. *Assessment* juga dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik (*best practice*) dalam penerapan GCG, sehingga area-area yang memerlukan perbaikan/penyempurnaan dapat diidentifikasi. Hasil *assessment* menjadi masukan yang sangat penting bagi Perusahaan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

Sekilas riwayat proses penilaian penerapan GCG Perusahaan adalah sebagai berikut:

Development Trends in the Assessment of Good Corporate Governance Implementation

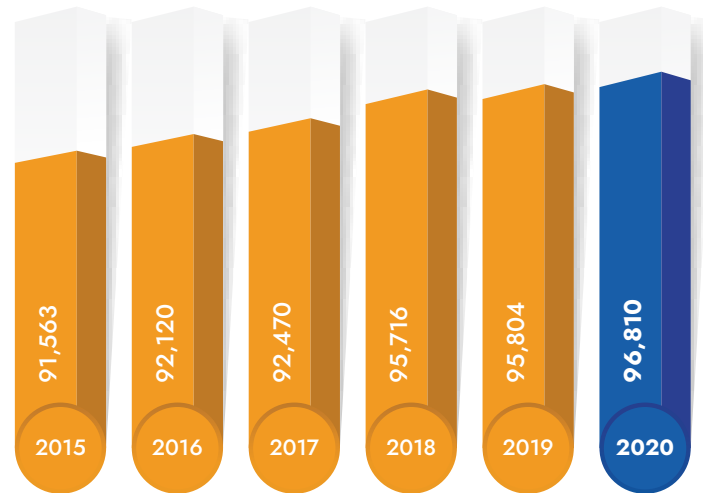
Since the GCG Assessment was carried out in 2015, the progress of the GCG assessment results or scores has always shown improvement. This reflects the Company’s commitment to implementing GCG principles according to the recommendations that appear. The assessment is also linked to applicable regulations and best practices in the implementation of GCG so that areas that require improvement/improvement can be identified. The results of the assessment become a very important input for the Company in making decisions in the future.

A brief history of the Company’s GCG implementation assessment process is as follows:

Pengukuran GCG GCG Measurement	Tahun Buku Fiscal year	Assessor Assessor	Skor (%) Score (%)	Kategori Category
Assessment	2020	PT Cita Negeri Amanah	96,810	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2019	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment team	95,804	Sangat Baik Very Good
Assessment	2018	PT Citra Negeri Amanah	95,716	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2017	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment team	92,470	Sangat Baik Very Good
Assessment	2016	Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali Public accounting firm	92,120	Sangat Baik Very Good
Self Assessment	2015	Tim Self Assessment Jamkrindo Jamkrindo Self-Assessment team	91,563	Sangat Baik Very Good

Tren Perkembangan Skor Assessment GCG Jamkrindo, 2015-2020

Jamkrindo's GCG Assessment Score Development Trends, 2015-2020



RENCANA PENGEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TAHUN 2021

Corporate Governance Implementation Development Plan for 2021

Jamkrindo berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan peningkatan penerapan GCG. Di tahun 2021, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, Jamkrindo telah menyusun rencana pengembangan GCG melalui review dan self assessment GCG yang akan dilakukan oleh internal Perusahaan.

Jamkrindo is committed to continuously evaluate and improve the implementation of GCG. In 2021, as in previous years, Jamkrindo has drawn up GCG development plan through a review and self assessment of GCG to be conducted by the Company's internal.

STRUKTUR ORGAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Organ Structure of Corporate Governance

PEMEGANG SAHAM DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Shareholders and General Meetings of Shareholders (GMS)

Pemegang Saham dan Informasi Terkait Entitas Induk dan Entitas Pemilik Akhir

Jamkrindo merupakan entitas usaha yang awalnya berbentuk Lembaga, kemudian dalam perkembangannya berubah menjadi Perusahaan Umum. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00011484. AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan perseroan PT. Jaminan Kredit Indonesia (Persero), di tahun 2020 Jamkrindo melakukan perubahan status hukum, dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Perubahan ini juga berdampak terhadap struktur kepemilikan. Berikut disampaikan struktur kepemilikan Jamkrindo hingga entitas pemilik akhir.

Shareholders and Information Regarding the Parent Entity and the End Owner Entity

Jamkrindo is a business entity that was originally in the form of an institution, later in its development it turned into a Public Company. In accordance with the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-00011484. AH.01.01 Year 2020 concerning Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), in 2020 Jamkrindo changed its legal status, from a Public Corporate (Perum) to a Limited Liability Company (PT).

These changes also impact the ownership structure. The following is conveyed the ownership structure of Jamkrindo to the ultimate owner entity.



Pemerintah Republik Indonesia merupakan entitas pemilik akhir dari Jamkrindo dengan kepemilikan sebesar 100%, yang terdiri dari kepemilikan langsung sebesar 0,0000001787% melalui 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna dan sisanya sebanyak 99,999998213% kepemilikan tidak langsung saham seri B melalui holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

The Government of the Republic of Indonesia is the ultimate owner entity of Jamkrindo with 100% ownership, consisting of direct ownership of 0.0000001787% through 1 (one) share of Seri A Dwiwarna and the remaining 99.999998213% indirect ownership of series B shares through the holding of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).



Hak, Kewajiban dan Wewenang Pemegang Saham

Menurut Anggaran Dasar Perusahaan, Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini dan hanya dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah hak untuk menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
- Persetujuan perubahan Permodalan.
- Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
- Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen Perusahaan.
- Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
- Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Persetujuan penggunaan laba.
- Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengusulan agenda Rapat Umum Pemegang Saham.
- Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Kecuali Hak-hak istimewa sebagaimana di atas, Pemegang Saham Seri B mempunyai hak yang sama dengan memperhatikan hak tentang penggunaan laba.

RUPS dan Jenis-jenisnya

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perusahaan dibatasi oleh Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rights, Obligations and Authorities of Shareholders

According to the Company's Articles of Association, Seri A Dwiwarna Shares are shares that grant their holders the privileges stipulated in this Articles of Association and are only owned exclusively by State of the Republic of Indonesia as Series A Dwiwarna Shareholders. The rights of Series A Dwiwarna Shareholders are the right to approve in the General Meeting of Shareholders (GMS) by mechanism of the use of in accordance with the provisions in Articles of Association and laws and regulations, on the following matters:

- Approval of amendments to Articles of Association.
- Approval of capital changes.
- Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.
- Agreements related to mergers, mergers, takeovers, separations and dissolutions.
- Requests and access to Company data and documents.
- Approval of remuneration of members of the Board of Directors and Board of Commissioners
- Approval of the transfer of assets based on Articles of Association requires approval of the General Meeting of Shareholders.
- Approval on participation and reduction of the percentage of capital investment in other companies based on Articles of Association needs approval of the General Meeting of Shareholders.
- Consent to the use of profits.
- Approval of long-term investments and financing based on Articles of Association needs approval of the General Meeting of Shareholders.
- Proposal of the agenda of General Meeting of Shareholders.
- Proposal of prospective members of the Board of Directors and prospective members of the Board of Commissioners.

Except for the privileges as above, Series B Shareholders have the same rights as regard to the right to use profits..

GMS and Types of GMS

The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights following the Articles of Association and the laws and regulations. The authority of the GMS as the highest organ of the Company is limited by law as stated in Article 75 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka pelaksanaan RUPS adalah hal yang esensial. Sebagai organ GCG yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

By prioritizing the principles of GCG in the framework of the main mechanism for the protection and implementation of the rights of shareholders, the implementation of the GMS is essential. As a GCG organ that serves as a forum for shareholders to make decisions, the GMS has an authority that is not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, the GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions, and authorities of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

Based on the Company's Articles of Association and Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS and Other GMS or Extraordinary GMS.

Jenis-jenis RUPS

Types of GMS

RUPS Tahunan

Annual GMS

yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
which is held to discuss the Company's annual reports and calculations and is conducted no later than 6 (six) months after the fiscal year.

RUPS Lainnya/Luar Biasa

Other/Extraordinary GMS

yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.
which can be held at any time if considered necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners, or Shareholders to decide things that are not done at the Annual GMS.

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

In addition to the two GMS mentioned above, shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely decision making by shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as the GMS Resolutions, provided that all shareholders give written approval of the proposal to be decided on Circular Decisions. This is under Article 91 of Law no.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap pengelolaan Perusahaan.

Both the Annual GMS and the Other GMS have the highest authority in the Corporate Governance structure as well as a forum for shareholders to exercise their rights and authority over the management of the Company.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2020

Di sepanjang tahun 2020, Jamkrindo menyelenggarakan RUPS dan keputusan pemegang saham, yaitu:

1. Rapat Pembahasan Bersama mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan Tahun Buku 2020 Perum Jamkrindo, yang dilaksanakan pada 15 Januari 2020.
2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada 30 Juni 2020.
3. Keputusan Sirkuler tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.
4. Keputusan Sirkuler tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.
5. Keputusan Sirkuler tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Penetapan Revisi RKAP Tahun 2020.

Berikut disampaikan penyelenggaraan masing-masing PB/RUPS di tahun 2020.

» RPB Tanggal 15 Januari 2020

GMS in 2020

Throughout 2020, Jamkrindo held GMS and shareholder decisions, namely:

1. Joint Discussion Meeting regarding the Ratification of the Company's Work Plan and Budget for the 2020 Financial Year of Perum Jamkrindo, which was held on January 15, 2020.
2. The 2019 Financial Year Annual GMS was held on 30 June 2020.
3. Circular Decision dated February 21, 2020 concerning Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)
4. Circular Decision dated October 26, 2020 concerning Dismissal and Appointment of President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia
5. Circular Decision dated November 16, 2020 concerning Approval of the 2020 RKAP Revision.

The following is the implementation of each Joint Discussion/GMS in 2020.

» Joint Discussion Meeting (RPB) dated January 15, 2020

Penyelenggaraan RPB Tanggal 15 Januari 2020

Implementation of Joint Discussion Meeting on January 15, 2020

Hari/Tanggal Day/Date	:	Rabu, 15 Januari 2020 Wednesday, January 15, 2020
Waktu Time	:	Pk. 14.30 s.d selesai 14.30 until finished
Tempat Place	:	Kantor Kementerian BUMN
		Pemilik Modal / Shareholders · Chairiah (Plt. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultasi Kementerian BUMN) beserta tim Chairiah (Act. Deputy for Financial Services Business, Survey services and Consultation of the Ministry of SOEs) and team
Pihak-pihak yang Hadir Attendees	:	Dewan Komisaris / Board of Commissioners Ketua Dewan Pengawas Sri mulyanto, serta Anggota Dewan Pengawas Muchlas Rowi, Noor Ida, dan Diah Natalisa. Anggota Dewan Pengawas Ari Wahyuni tidak dapat menghadiri RPB disebabkan adanya agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Chairman of the Board of Supervisory Sri Mulyanto, as well as Members of the Board of Supervisory Muchlas Rowi, Noor Ida, and Diah Natalisa. Member of the Board of Supervisory Ari Wahyuni was unable to attend the RPB due to another agenda that could not be abandoned.
		Direksi / Board of Director Seluruh Direksi yang menjabat hadir pada RPB ini. All directors are present at this RPB.

Hasil Keputusan RPB ini telah dituangkan melalui Surat Menteri BUMN No.S-63/MBU/01/2020 tanggal 23 Januari 2020. Hasil keputusan RPB dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

Joint Discussion Meeting Resolutions has been determined through the Minister of SOEs Letter No.S-63/MBU/01/2020 dated January 23, 2020. The results of Joint Discussion Meeting Resolutions and its follow-up by management are as follows:

Hasil Keputusan RPB Tanggal 15 Januari 2020 <i>Joint Discussion Meeting Resolutions dated January 15, 2020</i>	Realisasi oleh Manajemen <i>Realization by Management</i>
<p>Pengesahan RKAP Tahun 2020 Perum Jamkrindo untuk Laba/Rugi, Posisi Keuangan, Belanja Modal (Capital Expenditure), dan Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Ratification of Perum Jamkrindo's RKAP Year 2020 for Profit/Loss, Financial Position, Capital Expenditure, and Corporate Soundness Level</i></p>	<p>Perusahaan melakukan revisi RKAP tahun 2020 yang disahkan pada bulan November 2020 <i>The Company revised the RKAP in 2020 which was approved in November 2020.</i></p>
<p>Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2020 Perum Jamkrindo <i>Ratification of Perum Jamkrindo's Work Plan and Budget of Partnership and Community Development Program (RKA-PKBL) Year 2020</i></p>	<p>RKA-PKBL yang telah disahkan menjadi target acuan pelaksanaan, dengan realisasi yang tertuang dalam Laporan Keuangan PKBL teraudit yang telah rilis pada tanggal 23 November 2021 <i>RKA-PKBL that has been ratified as a reference target in the implementation with the realization contained in the audited PKBL Financial Statements that have been released on November 23, 2021</i></p>
<p>Persetujuan dan pengesahan kontrak manajemen (Key Performance Indicators) antara Direksi dan Dewan Pengawas dengan Pemilik Modal tahun 2020 yang mengacu pada Surat Menteri BUMN No.S-574/MBU/08/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal untuk Penyusunan RKAP Tahun 2020. <i>Approval and ratification of management contracts (Key Performance Indicators) between the Board of Directors and Board of Trustees with Capital Owners in 2020 which refers to the Minister of SOEs Letter No.S-574/MBU/08/2019 dated August 30, 2019 concerning Aspirations of Shareholders/Capital Owners for the 2020 RKAP Preparation.</i></p>	<p>Perusahaan melakukan revisi RKAP tahun 2020 yang disahkan pada bulan November 2020 <i>The Company revised the RKAP in 2020 which was approved in November 2020.</i></p>
<p>Persetujuan dan pengesahan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2018 antara Dewan Pengawas Perum Jamkrindo dengan Pemilik Modal Perum Jamkrindo yang telah mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN. <i>Approval and ratification of Key Performance Indicators (KPIs) in 2018 between Perum Jamkrindo's Board of Trustees and The Capital Owner of Perum Jamkrindo which has been referring to the Minister of SOEs Regulation No.PER-01/MBU/2011 PER-09/MBU/2012 on Implementation of Good Corporate Governance in SOEs.</i></p>	
<p>Arahan Pemilik Modal kepada Direksi dan Dewan Pengawas dalam melaksanakan RKAP Tahun 2020 <i>Direction of Capital Owners to the Board of Directors and Board of Trustees in implementing the 2020 RKAP</i></p>	<p>Telah dijalankan oleh Direksi dan Dewan Pengawas <i>Has been conducted by the Board of Directors and Board of Trustees</i></p>

» RUPS Tahunan Tahun Buku 2019

» Annual GMS for Financial Year 2019

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun 2019

2019 Annual GMS

Hari/Tanggal <i>Day/Date</i>	: Selasa, 30 Juni 2020 <i>Tuesday, June 30 2020</i>
Waktu <i>Time</i>	: Pk. 09.15 s.d 10.10 WIB
Tempat <i>Place</i>	: Video Conference
Pihak-pihak yang Hadir <i>Attendees</i>	: <ul style="list-style-type: none"> Pemegang Saham / Shareholders <ul style="list-style-type: none"> Negara Republik Indonesia c/q Menteri BUMN selaku pemegang saham seri A Dwiwarna yang diwakili oleh Anindita Eka Wibisono (Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya). <i>Republic of Indonesia c/q Minister of SOEs as shareholder of series A Dwiwarna represented by Anindita Eka Wibisono (Plt Asisten Deputi Bidang Asuransi dan Jasa Lainnya).</i> PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku pemegang saham seri B yang diwakili oleh Robertus Billitea (Direktur Utama). <i>PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as shareholder of series B represented by Robertus Billitea (President Director).</i>

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Seluruh Dewan Komisaris yang menjabat hadir dalam RUPS melalui video conference, yaitu:

All Board of Commissioners attended the GMS through video conference, namely:

1. Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, Sri Mulyanto
President Commissioner concurrently Independent Commissioner, Sri Mulyanto
2. Komisaris, Noor Ida Khomsiyati
Commissioner, Noor Ida Khomsiyati
3. Komisaris, Diah Natalisa
Commissioner, Diah Natalisa
4. Komisaris, Ari Wahyuni
Commissioner, Ari Wahyuni
5. Komisaris Independen, Muhammad Muchlas Rowi
Independent Commissioner, Muhammad Muchlas Rowi

Direksi / Board of Director

Seluruh Direksi yang menjabat hadir dalam RUPS melalui video conference, yaitu:

All Board of Directors attended the GMS through video conference, namely:

1. Direktur Utama, Randi Anto
President Director, Randi Anto
2. Direktur Bisnis Penjaminan, Amin Mas'udi
Director of Business of Guarantee, Amin Mas'udi
3. Direktur Operasional dan Jaringan, Kadar Wisnuwarman
Director of Operations and Network, Kadar Wisnuwarman
4. Direktur MSDM Umum dan Kepatuhan, Sulis Usdoko
Director of HR Management, General Affairs & Compliance, Sulis Usdoko
5. Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko, I Rusdonobanu
Director of Finance, Investment and Risk Management, I Rusdonobanu

Hasil Keputusan RUPS ini telah dituangkan melalui Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 No. 06 tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat di hadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, notaris di Jakarta.

The results of this GMS resolution have been stated in the Deed of Minutes of the 2019 Annual GMS No. 06 dated July 15, 2020 made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, notary in Jakarta.

Hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dan tindak lanjutnya oleh manajemen adalah sebagai berikut:

The resolutions of the 2019 Financial Year Annual GMS and their follow-up actions by management are as follows:

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020
Results of the Decision of the Annual GMS for Financial Year 2020

Realisasi oleh Manajemen
Realization by Management

Agenda 1:

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas selama Tahun Buku 2019.

Approval of Annual Report and Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for financial year 2019 as well as the Supervisory Report by Board of Trustees during financial year 2019.

Hasil Keputusan/Resolution:

Menyetujui Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, Karunawan sebagaimana dimuat dalam laporannya No.00012/2.1000/AU.1/08/0912-2/1/11/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*vol/edig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan Perusahaan.

Approved the Company's Annual Report including the Supervisory Report by Board of Trustees for the Financial Year ended December 31, 2019 and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2019 which have been audited by Hartanto Public Accounting Firm, Grace, Karunawan as contained in his report No.00012/2.1000/AU.1/08/0912-2/1/11/2020 dated February 10, 2020 with opinion "reasonable, in all material matters", as well as providing full repayment and release of responsibility (voledig acquit et de charge) to the Company's Board of Directors and Board of Trustees for management and supervision actions that have been carried out in the Financial Year ended on December 31, 2019 as long as such action is not a criminal act and is reflected in the Company's Report Books.

Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Para Pemegang Saham telah diaktakan dalam akta RUPS ini.

Approval of the Company's Annual Report including the Supervisory Report by Board of Trustees for the Financial Year ended on December 31, 2019 and ratifying the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2019 by Shareholders has been stated in this GMS deed.

Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020
Results of the Decision of the Annual GMS for Financial Year 2020

Realisasi oleh Manajemen
Realization by Management

Agenda 2:

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan Tahun Buku 2019.

Approval and Ratification of Financial Statements of The Company's Partnership and Community Development Program for Financial Year 2019.

Hasil Keputusan/Resolution:

Menyetujui Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Tahun Buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hartanto, Grace, Karunawan sesuai dengan Laporan No.00004/2-1 000/PKBL/08/0912/1/11/2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut.

*Approved the Annual Report of Partnership and Community Development Program (PKBL) for Financial Year 2019, and ratified the PKBL Financial Statements for the Financial Year ended December 31, 2019 which have been audited by Hartanto Public Accounting Firm, Grace, Karunawan as contained in his report No.00004/2-1 000/PKBL/08/0912/1/11/2020 dated February 10, 2020 with opinion "reasonable, in all material matters"; as well as providing full repayment and release of responsibility (*voledig acquit et de charge*) to the Company's Board of Directors and Board of Trustees for PKBL management and supervision actions that have been carried out in the Financial Year ended on December 31, 2019 as long as such action is not a criminal act and is reflected in the Company's Report Books.*

Agenda 3:

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2019.

Determination of The Use of Consolidated Net Profit of the Company in Financial Year 2019.

Hasil Keputusan/Resolution:

Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2019 sebesar Rp625.778.145.622,- sebagai berikut:

Determining the Use of the Company's Net Profit for financial year 2019 amounting to IDR625,778,145,622,- as follows:

1. Sebesar Rp400.000.000.000,- dibagikan sebagai dividen
IDR400,000,000,000.000,- distributed as dividends
2. Sisanya sebesar Rp225.778.145.622,- ditetapkan sebagai Cadangan Perusahaan.
IDR225,778,145,622,- designated as the Company's Reserves

Agenda 4:

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya) untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Tahun Buku 2020 serta Tantiem untuk Tahun Buku 2019 bagi Direksi dan Dewan Pengawas atas Kinerja Tahun Buku 2019.

Determination of remuneration (salary/honorarium along with other facilities and allowances) for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners in Financial Year 2020 and Tantiem for Financial Year 2019 for Board of Directors and Board of Trustees for their Performance in 2019.

Hasil Keputusan/Resolution:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Agreed to give authority and power to Shareholders of Series B to determine the amount of Salary/Honorarium along with other Facilities and Allowances in 2020 for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and Tantiem for the performance in 2019 for members of the Board of Directors and Board of Trustees.

Persetujuan Laporan Tahunan Pelaksanaan PKBL Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan PKBL untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 oleh Para Pemegang Saham telah diaktakan dalam akta RUPS ini.

Approval of the Annual Report of PKBL for Financial Year 2019 and the PKBL Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2019 by the Shareholders has been stated in this GMS deed.

Perusahaan telah membayarkan dividen kepada pemegang saham pada tanggal 18 Agustus 2020 sebesar Rp400 miliar sesuai dengan keputusan RUPS.

The Company has paid dividends to shareholders on August 18, 2020 amounting to IDR400 billion in accordance with the GMS resolutions.

Berdasarkan surat dari Pemegang Saham Seri B No.337/DIRUT/BPUI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2020 telah ditetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas. Perusahaan telah membayarkan seluruh hak Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris tepat waktu.

Based on the Letter of Shareholders of Series B No.337/DIRUT/BPUI/VIII/2020 dated August 6, 2020 concerning Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2020 has been determined the amount of Salary/Honorarium along with other Facilities and Allowances in 2020 for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and Tantiem for the performance of financial year 2019 for members of the Board of Directors and Board of Trustees. The Company has paid all rights of the Board of Directors and Board of Trustees/Board of Commissioners on timely manner.



Hasil Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 Results of the Decision of the Annual GMS for Financial Year 2020

Realisasi oleh Manajemen Realization by Management

Agenda 5:

Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.

Determination of Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Company's Partnership and Community Development Program for Financial Year 2020.

Hasil Keputusan/Resolution:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan besaran imbalan jasa audit serta persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. KAP yang diusulkan untuk mendapatkan penetapan RUPST harus merupakan KAP yang memiliki dukungan kuat dari *global network* bereputasi, baik dalam hal metodologi, pengalaman, kompetensi personal dan review mutu.

Agreed to give authority and power to Shareholders of Series B to determine the Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's Financial Statements for the financial year ended December 31, 2020 and the amount of audit service rewards and other designation requirements reasonable for the KAP. KAP which was proposed to obtain the AGMS determination must have strong support from reputable global network, both in terms of methodology, experience, personnel competence and quality reviews.

Berdasarkan surat dari Pemegang Saham Seri A No. 1154/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Persetujuan Penetapan KAP untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasi PT BPUI (Persero) beserta entitas anak tahun buku 2020, telah ditetapkan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (PWC) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diperkuat melalui Surat Perjanjian Kerjasama No.03/PK/UMU/II/2021, EL202102150018/MJW/MJW/DAR tanggal 15 Februari 2021 tentang Pekerjaan Jasa Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jaminan Kredit Indonesia dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2020. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020 telah dirilis pada tanggal 22 November 2021

Based on a letter from Series A Shareholders No. 1154/MBU/12/2020 dated December 15, 2020 concerning approval of KAP determination for Audit of Consolidated Financial Statements of PT BPUI (Persero) and subsidiaries for financial year 2020, the Company determined KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners (PWC) to audit the Company's Financial Statements for the financial year ended On December 31, 2020, which has been strengthened through Cooperation Agreement Letter No.03/PK/UMU/II/2021, EL202102150018/MJW/MJW/DAR dated February 15, 2021 concerning General Audit Service Work on Consolidated Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiaries for Financial Year 2020. The Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Community Development Partnership Program for Financial Year 2020 have been released on November 22, 2021

» Keputusan Sirkuler di Luar RUPS tanggal 21 Februari 2020 Pemegang saham mengeluarkan Keputusan Sirkuler melalui Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia. Melalui Keputusan Sirkuler ini, pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menetapkan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan nama nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia untuk pertama kali:

Sdr. Randi Anto	sebagai	Direktur Utama
Sdr. Amin Mas'udi	sebagai	Direktur Bisnis Penjaminan
Sdr. Kadar Wisnuwarman	sebagai	Direktur Operasional dan Jaringan
Sdr. Sulis Usdoko	sebagai	Direktur Manajemen SDM, Umum, dan Kepatuhan

» *Circular Decision behind GMS dated February 21, 2020 The Shareholders issued Circular Decision through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning Appointment of Members of Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero). With this Circular Decision, the Shareholders decide the following matters:*

1. *Determine the Board of Director Members of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia under the name below as Member of the Company's Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) for the first period:*

<i>Mr. Randi Anto</i>	<i>as</i>	<i>President Director</i>
<i>Mr. Amin Mas'udi</i>	<i>as</i>	<i>Director of Business of Guarantee</i>
<i>Mr. Kadar Wisnuwarman</i>	<i>as</i>	<i>Director of Operations and Network</i>
<i>Mr. Sulis Usdoko</i>	<i>as</i>	<i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>

Sdr. I. Rusdonobanu sebagai Direktur Keuangan, Investasi, dan Manajemen Risiko

Mr. I. Rusdonobanu as Director of Finance, Investment and Risk Management

2. Menetapkan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia dengan nama nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia untuk pertama kali:

Sdr. Sri Mulyanto sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Mr. Sri Mulyanto as President Commissioner concurrently Independent Commissioner

Sdri. Noor Ida Khomsiyati sebagai Komisaris

Mrs. Noor Ida Khomsiyati as Commissioner

Sdri. Diah Natalisa sebagai Komisaris

Mrs. Diah Natalisa as Commissioner

Sdri. Ari Wahyuni sebagai Komisaris

Mrs. Ari Wahyuni as Commissioner

Sdr. Muhammad Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen

Mr. Muhammad Muchlas Rowi as Independent Commissioner

3. Penetapan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir III.1 dan butir III.2 mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan akta pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia dihadapan notaris, dengan tidak mengurangi kewenangan pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Masa jabatan Anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud butir III.1 dan masa jabatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud III.2 Keputusan ini meneruskan sisa masa jabatannya sebagai Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
5. Bagi Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagaimana dimaksud III.1 dan butir III.2. Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan direksi dan Dewan Komisaris BUMN, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.

2. Determine the Supervisory Board Members of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia under the name below as Member of the Company's Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) for the first period:

3. The appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to point III.1 and point III.2 shall become effective as of the signing of the deed of establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia made before a notary public, without prejudice to the authority of shareholders to dismiss at any time.
4. The term of office for Board of Director Members as referred to point III.1 and the term of office for Board of Commissioner Members as referred to point III.2 with a term of office continuing the remaining term of office as Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
5. For members of the Board of Directors and Board of Commissioners as referred to point III.1 and point III.2. who are still holding other positions which are prohibited by laws and regulations from serving concurrently with the position of the Board of Directors and Board of Commissioners of SOE's, they must resign or be terminated from their position.
6. Authorize the Board of Directors of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia with the right of substitution to re-state this decision in a notarial deed made before a notary public or authorized official. This decision has been implemented, in which the position of the Board of Commissioners and Directors have followed shareholders' decisions.

Keputusan ini telah dilaksanakan, di mana jabatan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengikuti keputusan pemegang saham.

This decision has been implemented, where the positions of the Board of Commissioners and the Board of Directors have followed the decision of the shareholders.



- » Keputusan Sirkuler di Luar RUPS tanggal 26 Oktober 2020 Pemegang saham mengeluarkan Keputusan Sirkuler melalui Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A No.SK-347/MBU/10/2020 dan 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia. Melalui Keputusan Sirkuler ini, pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:
1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Randi Anto sebagai Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
 2. Mengangkat Sdr. Putrama Wahyu Setyawan sebagai Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.
 3. Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini baru dapat melaksanakan tugasnya sebagai Direktur Utama setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 4. Bagi Direktur Utama yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Direksi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
 5. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Praper Test*) atas calon Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
 6. Memberi kuasa kepada Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
 7. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani.
- Keputusan ini telah dilaksanakan. Per 31 Desember 2020, Direktur Utama Perusahaan dijabat oleh Sdr. Putrama Wahyu Setyawan.
- » *Circular Decision behind GMS dated October 26, 2020*
The Shareholders issued Circular Decision through the Decree of the Minister of SOEs as Shareholders of Series A No.SK-347/MBU/10/2020 and 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2020 concerning Dismissal and Appointment of President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia. With this Circular Decision, the Shareholders decide the following matters:
1. *Dismiss with respect Mr. Randi Anto as President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017, with thankful for the contribution of energy and thoughts given during his tenure.*
 2. *Appoint Mr. Putrama Wahyu Setyawan as President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia*
 3. *The President Director who is appointed as referred to in the Second Dictum of this Decision will hold his duties as President Director after get approval from Financial Services Authority.*
 4. *For President Director who is appointed as referred to in the Second Dictum of this Decision who is still holding other positions which are prohibited by laws and regulations from serving concurrently with the position of the Board of Directors of a SOE's subsidiary, he must resign or be terminated from his position.*
 5. *Ask the Board of Directors to submit a written application to the Financial Services Authority for Fit and Proper Test implementation to the prospective President Director as referred to the Second Dictum.*
 6. *Authorize the Board of Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia with the right of substitution to declare this decision in a notarial deed made before a notary public or authorized official.*
 7. *This decision shall become effective on the date specified, i.e. the date when the last Shareholder signs.*
- This decision has been implemented. As of December 31, 2020, the Company's President Director is held by Sdr. Putrama Wahyu Setyawan.*
- » Keputusan Sirkuler di Luar RUPS tanggal 16 November 2020 Pemegang saham mengeluarkan Keputusan Sirkuler melalui Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A No.S-1007/MBU/11/2020 dan Keputusan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku
- » *Circular Decision behind GMS dated November 16, 2020*
The Shareholders issued Circular Decision through the Decree of the Minister of SOEs as Shareholders of Series A No.S-1007/MBU/11/2020 and Decision of the President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Pemegang Saham seri B No.011/BPUI/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Penetapan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Jaminan Kredit Indonesia. Melalui Keputusan Sirkuler ini, pemegang saham memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengesahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ("RKAP") PT Jaminan Kredit Indonesia tahun 2020, dengan pokok-pokok sebagai berikut:
 - a. Proyeksi Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
 - b. Proyeksi Laporan Laba Rugi Tahun Berjalan Konsolidasian
 - c. Arus Kas
 - d. Belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*).
 - e. Menyetujui *Key Performance Indicators* (KPI) Perusahaan Tahun 2020
 - f. Menyetujui Tingkat Kesehatan Perusahaan pada Revisi RKAP 2020.
2. Sehubungan dengan penetapan revisi RKAP tahun 2020 tersebut, Dewan Komisaris dan Direksi agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Target-target RKAP Tahun 2020 tersebut di atas agar dirinci ke dalam target bulanan dan di-cascade kepada seluruh unit dan/atau jajaran perusahaan serta dilaporkan realisasinya setiap bulan.
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan restrukturisasi secara menyeluruh terhadap *Class of Business* (COB) yang belum memberikan undewriting positif.
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk memastikan setiap imbal jasa penjaminan yang diterima untuk masing-masing produk telah dilakukan mitigasi risiko secara wajar melalui estimasi beban klaim, pembentukan pencadangan dan melakukan reasuransi untuk meminimalisir kerugian di masa mendatang.
 - d. Setiap Belanja Modal yang direalisasikan harus mampu mendukung peningkatan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu diperlukan percepatan dan penentuan skala prioritas Belanja Modal yang akan direalisasikan.
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris diminta untuk memperkuat proses bisnis internal melalui perbaikan sistem teknologi dan informasi untuk mendorong peningkatan kinerja Perusahaan.
 - f. Direksi dan Dewan Komisaris agar mengoptimalkan program pembinaan dan peningkatan kompetensi pegawai Perusahaan dalam rangka menyiapkan *engine of growth* Perusahaan di masa mendatang.

as Shareholders of series B No.011/BPUI/11/2020 dated November 16, 2020 concerning Approval of the 2020 RKAP Revision of PT Jaminan Kredit Indonesia. With this Circular Decision, the Shareholders decide the following matters:

1. Ratified the Revision of the Company's Work Plan and Budget ("RKAP") of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2020, with the following points:
 - a. Projected Consolidated Financial Position Statements
 - b. Projected Consolidated Current Year Profit and Loss Statement
 - c. Cash Flow
 - d. Capital Expenditure (*Capex*)
 - e. Approved the Company's Key Performance Indicators (KPIs) in 2020
 - f. Approved the Company's Soundness Level in the 2020 RKAP Revision.
2. In connection with the determination of the 2020 RKAP Revision, the Board of Commissioners and Board of Directors considering the following matters:
 - a. Detailed the 2020 RKAP targets into monthly targets and cascaded to all units and/or levels and make monthly report.
 - b. Conduct comprehensive restructuring to the *Class of Business* (COB) that has not provided positive undewriting
 - c. The Board of Directors and Board of Commissioners are required to ensure that every guarantee received for each product has been reasonably mitigated through estimated claim expenses, reserve formation and reinsurance to minimize future losses.
 - d. Every realized Capital Expenditure must be able to increase the Company's productivity. Therefore, it is necessary to accelerate and determine the priority scale of capital expenditures that will be realized.
 - e. Strengthen internal business processes through the improvement of technology and information systems to encourage improvement of the Company's performance.
 - f. Optimize the development program and improve the competence of the Company's employees in order to prepare the Company's engine of growth in the future.



- g. Perusahaan agar segera menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2020 - 2024 dengan mendasarkan pada revisi RKAP tahun 2020 sebagai dasar/tahun awal pelaksanaan RJPP.
- h. Arahan pada RUPS RKAP PT Jaminan Kredit Indonesia Tahun 2020 merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Manajemen telah melakukan Revisi RKAP tahun 2020 dan telah menggunakan dokumen Revisi RKAP tahun 2020 ini sebagai bagian dari target yang harus dicapai di akhir tahun 2020.

- g. Immediately develop the Company's Long-Term Plan (RJPP) year 2020 - 2024 based on the 2020 RKAP Revision for RJPP implementation at the beginning of year.
- h. The directive at the RKAP GMS of PT Jaminan Kredit Indonesia in 2020 is an integral part of this decision.

Management has revised the RKAP in 2020 and has used the 2020 RKAP Revision document as part of the target to be achieved by the end of 2020.

Hasil Keputusan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Tahun 2019 dan Realisasinya oleh Manajemen

Di tahun 2019, saat Jamkrindo masih berstatus Perum, Jamkrindo menyelenggarakan Rapat Pembahasan Bersama (RPB) sebanyak 2 (dua) kali yang dilaksanakan pada 25 Januari 2019 dan 29 Mei 2019. Hasil keputusan dan realisasinya oleh manajemen di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Resolution of Joint Discussion Meeting (RPB) in 2019 and The Realization by Management

In 2019, when Jamkrindo was still have status as Perum, Jamkrindo held 2 (two) Joint Discussion Meeting (RPB) on January 25, 2019 and May 29, 2019. The Resolution of Joint Discussion Meeting (RPB) in 2019 and its Realization by Management in 2020 are as follows:

No	Hasil Keputusan RPB Tahun 2019 2019 RPB Decision Results	Realisasi oleh Manajemen Realization by Management
RPB Tanggal 25 Januari 2019 RPB January 25, 2019		
1	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2019 Jamkrindo Approval of the Company's Work Plan and Budget for the 2019 Financial Year Jamkrindo	Tertuang dalam Surat Kementerian BUMN S-61/MBU/01/2019 tanggal 25 Januari 2019 perihal Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Jamkrindo Tahun 2019. It is stated in the SOE Ministry Letter S-61/MBU/01/2019 dated January 25, 2019, on the Ratification of the 2019 Jamkrindo Company Work Plan and Budget.
RPB Tanggal 29 Mei 2019 RPB May 29, 2019		
2	Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 Audited Jamkrindo Ratification of the Financial Statements for the 2018 Audited Jamkrindo	Tertuang dalam surat Menteri BUMN No.S-373/MBU/05/2019 tanggal 29 Mei 2019 perihal Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan dan konsolidasian Perum Jaminan Kredit Indonesia tahun buku 2018 It is stated in the letter of the Minister of BUMN No.S-373/MBU/05/2019 dated May 29, 2019, on the Approval of the Annual Report and ratification of the Financial Statements and the consolidation of the Indonesian Credit Guarantee Corporation for the 2018 fiscal year

DEWAN KOMISARIS Board of Commissioners

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk memberikan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No.PER-02/MBU/02/2015 sebagaimana telah diubah dengan No.PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Board of Commissioners is appointed by the Shareholders to provide supervision and advice over the Company's management that conducted by the Board of Directors. The legal basis of appointment for the Board of Commissioners is stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 as amended by No.PER-10/MBU/10/2020 concerning Amendments to the Minister of SOEs Regulation No.PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Maksud dari *Board Manual* ialah sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Dokumen ini juga mengatur tata hubungan antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham yang dikuasakan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Board of Commissioners' Charter

The Board Manual is to be a document that becomes a reference for the Board of Supervisors and the Board of Directors in carrying out their duties, authorities, responsibilities, rights, and obligations. This document also regulates the relationship between the Board of Supervisors, Board of Directors, and Owners of Equity authorized by the Minister of State-Owned Enterprises.

Ruang lingkup *Board Manual* adalah mengatur dan menjelaskan pelaksanaan hubungan kerja antar organ Dewan Komisaris dan organ Direksi di lingkungan Perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan/atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris merupakan organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan.

The scope of the Board Manual is to regulate and describe the implementation of work relations between the organs of the Supervisory Board and the organs of the Board of Directors in the Company by referring to the provisions contained in the Company's Articles of Association and/or the provisions contained in the applicable laws and regulations. The Supervisory Board is the organ of the Company whose duty is to supervise and provide advice to the Directors in carrying out the management activities of the Company.

Dalam tata laksana hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi meliputi, di antaranya:

In the management of the Company, the work relations between the Supervisory Board and Directors include, among others:

1. **Pertemuan Formal**
Pertemuan Formal adalah Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi yang diselenggarakan oleh masing-masing organ. Pertemuan formal tersebut diselenggarakan atas undangan Dewan Komisaris atau Direksi.
2. **Pertemuan Informal**
Pertemuan informal adalah pertemuan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi di luar forum rapat-rapat formal. Pertemuan ini dapat dihadiri pula oleh anggota atau anggota-anggota dari organ lainnya, atau anggota kedua organ secara lengkap, untuk membicarakan atau mendiskusikan suatu permasalahan dalam suasana informal.

1. **Formal Meeting**
Formal Meetings are Board of Commissioner's Meetings and Board of Director's Meetings organized by each organ. The formal meeting is held at the invitation of the Board of Commissioners or Board of Directors.
2. **Informal Meetings**
Informal meetings are meetings of Board of Commissioners members and Board of Directors members outside of formal meetings. This meeting may also be attended by members or members of other organs, or members of both organs in completely, to discuss an issue with informal atmosphere.



Sesuai sifatnya yang informal, pertemuan bukan untuk menghasilkan keputusan, melainkan untuk menyelaraskan pendapat melalui pengungkapan pandangan secara informal, serta mengupayakan kesamaan pandangan/pemahaman yang tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak

3. Komunikasi Formal

Pelaporan adalah bentuk komunikasi formal tertulis yang terjadi antar organ yang berkaitan dengan pemenuhan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan/atau kelaziman berdasarkan praktik-praktik terbaik (*best practices*) dalam perusahaan, berupa penyampaian laporan dan atau pertukaran data, informasi dan analisis pendukungnya

4. Komunikasi Informal

Komunikasi Informal adalah komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi, antara anggota atau anggota-anggota organ satu dengan yang lainnya, di luar dari ketentuan komunikasi formal yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi informal dapat saja dilakukan oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi, namun tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi informal tersebut menggunakan surat/nota pribadi secara tertulis (*hardcopy*).

5. Laporan Berkala

Pelaporan berkala adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris, yang memuat pelaksanaan RKAP dalam kurun waktu tertentu yang selanjutnya disampaikan kepada Pemegang Saham. Laporan berkala yang disampaikan ini terdiri dari Laporan realisasi RKAP Triwulanan dan Laporan realisasi RKAP Tahunan. Direksi berkewajiban untuk menyiapkan pada waktunya RJPP, RKAP, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan Perusahaan serta menyampaikan kepada Dewan Komisaris kemudian kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan

6. Pelaporan Khusus

Pelaporan khusus adalah penyampaian laporan dari Direksi kepada Dewan Komisaris, di luar penyampaian laporan berkala RKAP Triwulanan dan Tahunan, atas permintaan Dewan Komisaris atau inisiatif Direksi, yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Perusahaan. Antara lain terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen kinerja, penerapan manajemen risiko maupun sistem teknologi informasi yang digunakan.

In accordance with its nature, the informal meeting is not to make decisions, but rather to align opinions through informal disclosure of views, as well as to seek common views/understandings that have no binding power for both parties.

3. Formal Communication

Reporting is a form of written formal communication that occurs between organs, to meet the provisions stipulated in the Articles of Association and/or prevalence regulation based on best practices in the company, in the form of submission of reports and or exchange of data, information and its supporting analysis.

4. Informal Communication

*Informal Communication is communication between the Board of Commissioners and Board of Directors, between members or members of another organs, outside of the formal communication provisions stipulated in the Articles of Association and applicable laws and regulations. Informal communication may be conducted by each Board of Commissioners and Board of Directors, but cannot be used as a formal policy before going through mechanisms or accountable correspondence. The informal communication uses a personal letter/memorandum in writing (*hardcopy*).*

5. Periodic Reports

Periodic reporting is the submission of report from the Board of Directors to Board of Commissioners, which contains the implementation of RKAP within a certain period of time which is then submitted to Shareholders. This periodic report consists of quarterly RKAP realization report and Annual RKAP realization report. The Board of Directors is obliged to prepare RJPP, RKAP, including other plans related to the implementation of the Company's business and activities and submit to Board of Commissioners then to Shareholders for ratification in timely manner.

6. Special Reporting

Special reporting is the submission of report from the Board of Directors to Board of Commissioners, in addition to the submission of the periodic quarterly and annual RKAP report, at the Board of Commissioners request or Board of Directors initiative, related to the implementation of the Company's activities. Among others related to the implementation of performance management systems, the application of risk management and information technology systems usage.

7. Surat Menyurat/Memorandum

Surat-menyurat/Memorandum adalah korespondensi antar organ yang bersifat formal, berkenaan dengan pelaksanaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi masing-masing organ. Surat/Memorandum dapat bersifat penyampaian informasi, permintaan dan pendapat dan nasehat, permintaan tanggapan tertulis yang khusus, dan permintaan persetujuan dari Direksi kepada Dewan Komisaris.

8. Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Resmi Perusahaan

Setiap kegiatan perusahaan pada tingkat korporat yang bersifat formal seremonial yang relevan dan signifikan di lingkungan Direksi dan di lingkungan Dewan Komisaris, diinformasikan kepada segenap pihak yang terkait dengan Direksi dan Dewan Komisaris.

Termasuk di dalam kegiatan formal seremonial ini adalah acara kunjungan resmi ke wilayah kerja Perusahaan, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendamping pejabat instansi lainnya.

9. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, DPS, dan/atau karyawan Perusahaan.

7. Correspondence/Memorandum

Correspondence/Memorandum is correspondence between formal organs, relating to the implementation and smoothness of the main duties and functions of each organ. Letter/Memorandum may be the submission of information, requests and opinions and advice, requests for special written responses, and requests for approval from the Board of Directors to Board of Commissioners.

8. Notice of Implementation of Official Activities of the Company

Any corporate activities that have formal ceremonial in relevant and significant with the Board of Directors and Board of Commissioners duties are informed to all parties related to the Board of Directors and Board of Commissioners.

Included in this formal ceremonial activity is an official visit to the Company's work area, both as a duty and as a companion to other agency officials.

9. Conflict of Interest

Conflict of Interest is a situation where there is a conflict between the Company's Economic Interests and the personal economic interests of shareholders, Board of Directors' members, Board of Commissioners' members, Sharia Supervisory Board, and/or employees of the Company.

Kriteria Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 PER-10/MBU/10/2020, persyaratan formal dan materil anggota Dewan Komisaris terdiri dari:

Board of Commissioners' Criteria

The provisions in the Minister of SOEs Regulation No.PER-10/MBU/10/2020 states that formal and material requirements of the members of the Board of Commissioners consist of:

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Formal Formal	1. Orang perseorangan <i>Individuals</i>
	2. Cakap melaksanakan perbuatan hukum <i>The ability to carry out legal actions</i>
	3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan <i>Has never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to nomination</i>
	4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit <i>Has never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board that was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt</i>
	5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan <i>Has never been convicted of a criminal offence that harms the state's finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to the nomination</i>
Materil Material	1. Integritas <i>Possesses Integrity</i>
	2. Dedikasi <i>Dedicated</i>
	3. Memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen <i>Understands the Company management issues related to one of the management functions</i>
	4. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha dimana yang bersangkutan dicalonkan <i>Has adequate knowledge in the business field in which the relevant person is nominated</i>
	5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya <i>Can provide sufficient time to carry out their duties</i>

Persyaratan Requirements	Uraian Description
<p>Persyaratan lainnya Other Requirements</p>	<p>Persyaratan lain anggota Dewan Komisaris, yaitu: <i>Other requirements for Board of Commissioner' members are:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II <i>He/she is not a member of a Political Party and/or a legislative candidate and/or legislative member. Legislative candidates or legislative members consisting of candidates/members of the House of Representative, Regional Representative Council, Level I Regional People's Representative Assembly, and Level II Regional People's Representative Assembly</i> 2. Bukan calon Kepala/Wakil Kepala Daerah dan/atau Kepala/Wakil Kepala Daerah <i>He/she is not a candidate for Regional Head/Deputy Regional Head</i> 3. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN yang bersangkutan selama 2 (dua) periode berturut-turut <i>He/she is not serving as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in the relevant SOEs for 2 (two) consecutive periods</i> 4. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris/dewan Pengawas), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter <i>He/she is physically and mentally healthy (is not suffering from an illness that can hinder the implementation of duties as a member of the Board of Commissioners/Supervisory board), as evidenced by a health certificate from a doctor</i> 5. Bagi bakal calon dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain, harus berdasarkan surat usulan dan instansi yang bersangkutan <i>For prospective candidates from the Technical Ministry or other Government Agencies, it must be based on the proposal letter and the relevant agency</i> 6. Bagi bakal calon anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang berasal dari penyelenggaraan negara harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) selama 2 (dua) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Bukti Laporan LHKPN kepada institusi yang berwenang <i>For prospective members of the Board of Commissioners/Board of Trustees from the state officials must report the State Officials Wealth Reports (LHKPN) for the last 2 (two) years with the Evidence of LHKPN Report to authorized institutions</i>

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan yang tetuang dalam Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH No. 25 Tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris No. 02 tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Jaminan Kredit Indonesia (PT JAMKRINDO), Pasal 14 Ayat 11 disebutkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Namun, anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 12.

Susunan dan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2020

Melalui Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana Jamkrindo berubah

Terms of Tenure

Based on the Company's Articles of Association contained in the Notarial Deed of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH, MH No. 25 dated February 24, 2020 as amended by Notarial Deed No. 02 dated April 9, 2020 concerning Amendment to the Articles of Association of PT Jaminan Kredit Indonesia (PT JAMKRINDO), Article 14 Paragraph 11 states that the term of office of members of the Board of Commissioners is determined 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. However, members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time based on the General Meeting of Shareholders' decision by stating the reasons as mentioned in Article 12.

Composition of the Board of Commissioners in 2020

Through Government Regulation No.11 of 2020 dated February 17, 2020 concerning the Change in the Form of a Public Corporate Legal Entity (PERUM), Jaminan Kredit Indonesia to become a Limited Liability Company (Persero) in which Jamkrindo changed its

status hukumnya dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020, PT Jamkrindo (Persero) berubah status menjadi PT Jamkrindo dan merupakan salah satu anak usaha dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) terhitung sejak 17 Maret 2020, serta berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, menetapkan anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sebagai anggota Dewan Komisaris PT Jamkrindo untuk pertama kalinya. Untuk selanjutnya penyebutan Dewan Pengawas berubah menjadi Dewan Komisaris.

legal status from a Public Corporate (Perum) to a Limited Liability Company (PT), and Government Regulation No.20 of 2020, PT Jamkrindo (Persero) changed its status to PT Jamkrindo and is one of the subsidiaries of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) since March 17, 2020, and based on the Minister of SOEs Decree No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), appointed members of Perum Jamkrindo Board of Trustees as members of PT Jamkrindo Board of Commissioners for the first time. Furthermore, the mention of Board of Trustees is changed to Board of Commissioners.

Kronologi Perubahan Jabatan dan Perubahan Susunan Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris Tahun 2020

Chronology of Changes in Position and Composition of the Board of Trustees/Board of Commissioners in 2020

Periode 1 Januari - 21 Februari 2020 Period of January 1 - February 21, 2020	Periode 21 Februari – 31 Desember 2020 Period of February 21 – December 31, 2020	Keterangan Information
Sri Mulyanto Ketua Dewan Pengawas merangkap Dewan Pengawas Independen <i>Chairman of the Board of Trustees concurrent independent Board of Trustees</i>	Sri Mulyanto Komisaris Utama/ Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>	Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, jabatan Sri Mulyanto diubah dari Ketua Dewan Pengawas/Independen menjadi Komisaris Utama/Independen. <i>In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020, Sri Mulyanto's position was changed from Chairman of the Supervisory Board/Independent to President Commissioner/Independent.</i>
Ari Wahyuni Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Board of Trustees</i>	Ari Wahyuni Komisaris <i>Commissioner</i>	Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, jabatan Ari Wahyuni diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. <i>In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020, Ari Wahyuni's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.</i>
Diah Natalisa Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Board of Trustees</i>	Diah Natalisa Komisaris <i>Commissioner</i>	Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, jabatan Diah Natalisa diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. <i>In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020, Diah Natalisa's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.</i>
Noor Ida Khomsiyati Anggota Dewan Pengawas <i>Member of Board of Trustees</i>	Noor Ida Khomsiyati Komisaris <i>Commissioner</i>	Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, jabatan Noor Ida Khomsiyati diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. <i>In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020, Noor Ida Khomsiyati's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.</i>
M. Muchlas Rowi Anggota Dewan Pengawas Independen <i>Member of Independent Board of Trustees</i>	M. Muchlas Rowi Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020, jabatan Muchlas Rowi diubah dari Anggota Dewan Pengawas Independen menjadi Komisaris Independen. <i>In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020, Muchlas Rowi's position was changed from Member of the Independent Supervisory Board/Independent to Independent Commissioner.</i>

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris di akhir tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of Board of Commissioners at the end of 2020 can be seen below.

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2020

Composition of Jamkrindo Board of Commissioners as of December 31, 2020

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Terms of Office	Periode Jabatan Period
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/ Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	27 Oktober 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>October 27, 2017 to GMS in 2022</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>October 17, 2019 to GMS in 2024</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>
Diah Natalisa	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-88/ MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	3 Mei 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2021 <i>May 3, 2017 to GMS in 2021</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Noor Ida Khomsiyati	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri No.SK-76/ MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-76/MBU/4/2016 dated April 12, 2016 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	12 April 2016 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2021 <i>April 12, 2016 to GMS in 2021</i>	Ke-1 <i>1st</i>
Ari Wahyuni	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-02/ MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>January 3, 2019 to GMS in 2024</i>	Ke-1 <i>1st</i>

Sesuai keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Para Pemegang Saham Perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan keanggotaan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Januari 2021, Para Pemegang Saham menetapkan pemberhentian Diah Natalisa sebagai Komisaris karena masa jabatannya yang telah habis, dan mengangkat Hernita Alius sebagai Komisaris Independen.
- Pada tanggal 2 Juni 2021, Para Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Noor Ida Khomsiyati dari jabatannya sebagai Komisaris dengan alasan masa tugasnya yang berakhir pada 12 April 2021, sekaligus mengangkat Desty Arlaini sebagai Komisaris yang baru.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Jamkrindo hingga disahkannya laporan tahunan tanggal 26 November 2021 dapat disampaikan sebagai berikut.

In accordance with the decision of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as the Company's Shareholders decided to change the membership of Board of Commissioners, as follows:

- On January 18, 2021, the Shareholders determined to dismiss Diah Natalisa as Commissioner due to her terms ended and appointed Hernita Alius as Independent Commissioner.
- On June 2, 2021, the Shareholders determined to dismiss Noor Ida Khomsiyati as Commissioner due to her terms ended on April 12, 2021, as well as appointed Desty Arlaini as a new Commissioner.

Thus, Jamkrindo's Board of Commissioners composition until the ratification of this Annual Report on November 26, 2021 can be delivered as follows.

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo 26 November 2021

Composition of Jamkrindo Board of Commissioners As of November 26, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/ Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	27 Oktober 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>October 27, 2017 to GMS in 2022</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>October 17, 2019 to GMS in 2024</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>
Hernita Alius	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-19/MBU/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 tanggal 21 Februari 2021 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-19/MBU/01/2021 and Decree of BPUI as Shareholder of Series B No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/ 2021 dated February 21, 2021</i>	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 <i>January 18, 2021 to GMS in 2026</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ari Wahyuni	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN No.SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 January 3, 2019 to GMS in 2024	Ke-1 1 st
Desty Arlaini	Komisaris Commissioner	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-182/MBU/06/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-182/MBU/06/2021 and Decree of BPUI as Shareholder of Series B No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 dated June 2, 2021	2 Juni 2021 s.d 1 RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 June 2, 2021 to GMS in 2026	Ke-1 1 st

Profil singkat masing-masing Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each Board of Commissioners can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Company Profile chapter.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris

Assessment of Fit and Proper Test for the Board of Commissioners

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.31/SEOJK.05/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, anggota Dewan Komisaris sebagai Pihak Utama wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan. Berikut disampaikan status Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Dewan Komisaris Perusahaan.

In accordance with Circular Letter of the Financial Services Authority (OJK) No.31/SEOJK.05/2016 dated August 30, 2016 concerning Fit and Proper Test ("FPT") for Primary Parties of Non-Bank Financial Services Institutions, members of the Board of Commissioners as Primary Party shall be participated on Fit and Proper Test. The following is conveyed the status of Fit and Proper Test Assessment of the Company's Board of Commissioners.

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Status Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Fit and Proper Test Information
Sri Mulyanto Komisaris Utama/Independen President Commissioner/Independent	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui keputusan No.KEP-110/KDK.05/2017 tanggal 29 Desember 2017 Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-110/KDK.05/2017 dated December 29, 2017
M. Muchlas Rowi Komisaris Independen Independent Commissioner	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui keputusan No.KEP-9/KDK.05/2020 tanggal 6 Mei 2020 Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-9/KDK.05/2020 dated May 6, 2020
Diah Natalisa *) Komisaris Commissioner	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui keputusan No.KEP-83/KDK.05/2017 tanggal 2 Oktober 2017 Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-83/KDK.05/2017 dated October 2, 2017

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Status <i>Status</i>	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan <i>Fit and Proper Test Information</i>
Hernita Alius **) Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Lulus <i>Pass</i>	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui keputusan No.KEP-17/KDK.05/2021 tanggal 20 April 2021 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-17/KDK.05/2021 dated April 20, 2021</i>
Noor Ida Khomsiyati ***) Komisaris <i>Commissioner</i>	Lulus <i>Pass</i>	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui keputusan No.KEP-456/NB.11/2016 tanggal 15 Juni 2016 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-456/NB.11/2016 dated June 15, 2016</i>
Ari Wahyuni Komisaris <i>Commissioner</i>	Lulus <i>Pass</i>	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui keputusan No.KEP-66/KBK.05/2019 tanggal 6 Agustus 2019 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-66/KDK.05/2019 dated August 6, 2019</i>
Desty Arlaini *****) Komisaris <i>Commissioner</i>	Proses <i>Process</i>	Dalam proses pengajuan kepada OJK. <i>In process of submitting to OJK</i>

*) Diah Natalisa tidak lagi menjabat Komisaris terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021.

**) Hernita Alius menjabat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 18 Januari 2021.

***) Noor Ida Khomsiyati berakhir masa jabatan sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 12 April 2021.

*****) Desty Arlaini menjabat sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021.

*) Diah Natalisa has not served as Commissioner since February 21, 2020.

**) Hernita Alius served as Independent Commissioner on January 18, 2021.

***) Noor Ida Khomsiyati's term as Commissioner ends on April 12, 2021.

*****) Desty Arlaini has served as Commissioner since June 2, 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas untuk:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi.
2. Memberi nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan Perusahaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau bidang teknis operasional. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Memberikan pendapat dan saran kepada Pemegang Saham mengenai RJPP dan RKAP yang diusulkan Direksi.
2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perusahaan.
3. Melaporkan dengan segera kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Berkala dan Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan.

Board of Commissioners' Duties and Responsibilities

The Supervisory Board is the organ of the Company tasked with:

1. Supervising the Company's management carried out by the Board of Directors.
2. Providing advice to the Board of Directors in carrying out management activities of the Company.

The supervision activities carried out by the Supervisory Board in order to assess the Company is conducted by comparing the actual situation with the pre-determined conditions, both in terms of financial and/or operational. To carry out the tasks referred to above, the Supervisory Board is obliged to do the following:

1. Provide opinions and suggestions to the shareholders regarding the Company's Long Term Plan and Work Plan and Budget proposed by the Directors.
2. Follow the development of the Company's activities, and give opinions and suggestions to the Minister regarding any issues considered important for the management of the Company.
3. Immediately report to the shareholders any symptoms of declining Company performance.
4. Conduct research and review the Periodic Reports and Annual Reports prepared by the Board of Directors and sign the Annual Report.



- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Memantau dan memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.</p> <p>6. Mengadakan rapat secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan.</p> <p>7. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Pemegang Saham.</p> <p>8. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham.</p> | <p>5. Monitor and ensure that the principles of GCG have been implemented effectively and sustainably.</p> <p>6. Hold regular meetings, at least once every month.</p> <p>7. Perform other supervisory duties determined by Shareholders.</p> <p>8. Responsible for their duties implementation to Shareholders.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pembagian Lingkup Tugas Antar Dewan Komisaris

Segregation of Duties Between Commissioners

Pembagian tugas Dewan Komisaris mengacu pada Keputusan Dewan Pengawas Perum Jamkrindo No.KEP-06/DP-JAMKRINDO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Pembagian Tugas Dewan Pengawas Perum Jamkrindo, maka pembagian tugas Dewan Komisaris PT Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Segregation of the Board of Commissioners duties refers to Perum Jamkrindo Board of Trustees Decision No.KEP-06/DP-JAMKRINDO/X/2019 dated October 21, 2019 concerning Segregation of Perum Jamkrindo Board of Trustees Duties. Segregation of PT Jamkrindo Board of Commissioners is as follows:

Nama Name	Tugas Duties
Sri Mulyanto Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>	Melakukan koordinasi dengan segenap anggota Komisaris maupun perangkat Dewan Komisaris berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris serta khususnya dalam bidang keuangan, dan bisnis penjaminan. <i>Coordinate with all members of the Board of Commissioners and the Board of Commissioner Organs related to the duties and authorities of the Board of Commissioners as well as specifically in the field of finance and guarantee business.</i>
M. Muchlas Rowi Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Jaringan, dan Teknologi Informasi. <i>Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioner, especially in the field of Network and Information Technology.</i>
Diah Natalisa Komisaris <i>Commissioner</i>	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Operasional, dan layanan. <i>Handling activities related to the Board of Commissioners' duties and authorities, especially in operations, and services sectors.</i>
Noor Ida Khomsiyati Komisaris <i>Commissioner</i>	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang MSDM, Hukum dan Kepatuhan. <i>Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioner especially in the field of HRM, Legal and Compliance.</i>
Ari Wahyuni Komisaris <i>Commissioner</i>	Menangani kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris khususnya di bidang Investasi, dan Manajemen Risiko. <i>Handling activities related to the duties and authorities of the Board of Commissioner, especially in the field of Investment and Risk Management.</i>

Program Pengembangan Kompetensi

Competency Development Program

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihat dalam pengelolaan bisnis Perusahaan.

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. Competency development for the Board of Commissioners is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory and advisory tasks in managing the Company's business.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Komisaris di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency improvement activities participated by the Board of Commissioners throughout 2020 can be seen in the Company Profile Chapter in this annual report.

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Tahun 2020

Brief Report on the Implementation of Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners in 2020

Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan kunjungan ke lapangan guna mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih akurat/jelas mengenai bidang atau hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan 6 (enam) kali kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners conducts field visits to obtain more accurate/clear information regarding the field or matters that need attention. During 2020, the Board of Commissioners has conducted 6 (six) visits, with the following details:

No.	Tanggal Kunjungan Date of Visit	Tempat Tujuan Destination	Perihal Subject	Peserta Participants
1	26 Juni 2020 June 26, 2020	Kantor Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch Office	Monitoring dan Evaluasi Dampak COVID-19 terhadap Kinerja Unit Kerja PT Jamkrindo Monitor and Evaluate the Impact of COVID-19 on the performance of PT Jamkrindo's work unit	Sri Mulyanto
2	17 Juli 2020 July 17, 2020	Kantor Cabang Pangkal Pinang Pangkal Pinang Branch Office	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Pangkal Pinang Monitor and Evaluate on the performance of Pangkal Pinang Branch Office	Diah Natalisa
3	5-6 Agustus 2020 August 5-6, 2020	Kantor Cabang Purwakarta dan Cirebon Purwakarta and Cirebon Branch Offices	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Purwakarta dan Cirebon Monitor and Evaluate on the performance of Purwakarta and Cirebon Branch Offices	M. Muchias Rowi Safari Mirza
4	7-8 Agustus 2020 August 7-8, 2020	Kantor Cabang Yogyakarta Yogyakarta Branch Office	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Cabang Yogyakarta Monitor and Evaluate on the performance of Yogyakarta Branch Office	M Muchlas Rowi
5	13 November 2020 November 13, 2020	Kantor Wilayah IV Bandung dan Kantor Cabang Bandung Regional Office IV Bandung and Bandung Branch Office	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Kantor Wilayah IV Bandung dan Kantor Cabang Regional Office VII Denpasar dan Denpasar Branch Office	Noor Ida Khomsiyati M Muchlas Rowi Doddy HP
6	16-17 November 2020 November 16-17, 2020	Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Denpasar Regional Office VII Denpasar and Denpasar Branch Office	Monitoring Evaluasi Kinerja Kantor Kantor Wilayah VII Denpasar dan Kantor Cabang Denpasar Monitor and Evaluate on the performance of Regional Office VII Denpasar and Denpasar Branch Office	M Muchlas Rowi Safari Mirza

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 15 Akta Notaris No.2 tanggal 9 April 2020, Dewan Komisaris memiliki tugas pokok, yakni melakukan pengawasan dan memberikan nasihat. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki 14 kewajiban sebagaimana dijabarkan dalam pasal 15 ayat 2 huruf b Akta Notaris No. 2 tanggal 9 April 2020. Pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dapat tergambar dari surat-surat Dewan Komisaris, baik yang ditujukan kepada Direksi, Menteri BUMN selaku Pemilik Modal/Pemegang Saham, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebagai Pemegang Saham/Holding dan maupun pihak lain.

In accordance with Company Articles of Association Article 15 Notary Deed No.2 dated April 9, 2020, the Board of Commissioners has main task, namely to supervise and provide advice. In carrying out these duties, the Board of Commissioners has 14 obligations as described in article 15 paragraph 2 letter b notarial deed No.2 dated April 9, 2020. The implementation of the Board of Commissioners duties and obligations can be illustrated from the Board of Commissioners letter, both addressed to the Board of Directors, the Minister of SOEs as the Owner of Capital/Shareholders, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as a Shareholder/Holding and other parties.



Berikut adalah surat-surat Dewan Komisaris selama tahun 2020 yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris:

The following are the Board of Commissioners letters during 2020 related to the implementation of the Board of Commissioners duties and obligations:

No.	Jenis Surat Type of Letters	Jumlah Total
1	Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) <i>Board of Commissioners Response/Opinion/Advice on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and The Company's Long-Term Plan (RJPP)</i>	4
2	Tanggapan/Pendapat/Saran Dewan Komisaris terkait pemantauan kinerja Direksi dan pelaporan kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham, serta penelaahan usulan remunerasi Direksi <i>Board of Commissioners Response/Opinion/Advice related to monitoring the Board of Directors performance and reporting to the Capital Owners/Shareholders, as well as the Board of Directors' review on proposed remuneration</i>	6
3	Penyampaian laporan berkala tugas pengawasan Dewan Komisaris <i>Submission of periodic reports on the Board of Commissioners supervisory duties</i>	4
4	Proses pengusulan dan penunjukan auditor eksternal <i>The process in proposing and appointing of external auditors</i>	1
5	Tanggapan/Pendapat/Saran terkait transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham <i>Responses/Opinions/Suggestions related to the Board of Directors transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or Shareholders</i>	4
6	Penjaringan dan Pengusulan Bakal Calon Direksi serta Penunjukan Pelaksana Tugas Direksi di Perusahaan dan Anak Perusahaan <i>Selection and Proposal of Prospective Directors and Appointment of Acting Directors in Companies and Subsidiaries</i>	4
7	Tanggapan/Pendapat/Saran terkait permasalahan Penting di Perusahaan <i>Responses/Opinions/Suggestions on Significant Issues in the Company</i>	17
8	Peretujuan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Cuti Direksi <i>Approval of Overseas Travel and Board of Directors Leave</i>	2
9	Tindak lanjut penerapan Good Corporate Governance <i>Follow-up on the implementation of Good Corporate Governance</i>	1
10	Pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas dan Kunjungan Lapangan <i>Implementation of Official Travel Activities and Field Trips</i>	6
11	Keputusan Dewan komisaris <i>Board of Commissioners' Decision</i>	10
12	Hal-hal lain <i>Other things</i>	1

Rencana Program Kerja Dewan Komisaris 2021

Dewan Komisaris secara rutin menyusun rencana program pengawasan sebagai acuan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris di tahun yang akan datang yang telah disahkan pada tanggal 14 Oktober 2020. Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2021 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) aspek strategis, yaitu aspek Pengawasan & Pemberian Nasihat, aspek Pelaporan, dan aspek Dinamis. Di dalam masing-masing aspek tersebut dirumuskan aktivitas/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2021. Seluruh aspek dan masing-masing aktivitas/kegiatan di dalamnya dirumuskan dengan pendekatan pemenuhan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan ketentuan perundangan-undangan lainnya yang berlaku.

Board of Commissioners Work Program Plan in 2021

The Board of Commissioners routinely prepares a supervisory program plan as a reference for the implementation of the Board of Commissioners duties in the coming year that has been approved on October 14, 2020. The Board of Commissioners Work in 2021 is directed to achieve 3 (three) strategic aspects, namely Supervision & Advising aspect, Reporting aspect, and Dynamic aspect. In each of these aspects, activities will be formulated by the Board of Commissioners in 2021. All aspects and each of these activities are formulated with the approach of fulfilling the Board of Commissioners duties and obligations that have been stipulated in the Articles of Association and other applicable laws and regulations.

1. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat

Sebagaimana diuraikan di atas, tugas Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat. Adapun pokok-pokok kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021, yaitu:

a. Rapat Internal Dewan Komisaris.

Kegiatan ini merupakan rapat rutin bulanan (minimal dua kali dalam sebulan) yang dilaksanakan secara internal Dewan Komisaris dan dihadiri oleh organ pendukung (Komite-Komite, Sekretaris Dewan Komisaris, dan Staf Dewan Komisaris) dengan agenda utamanya adalah pembahasan kinerja bulanan perusahaan baik kinerja keuangan maupun operasional. Apabila diperlukan, rapat internal Dewan Komisaris juga dapat dilakukan setiap minggu dengan agenda yang diajukan oleh Komite. Dalam rapat internal Dewan Komisaris dapat juga membahas dan memutuskan hal-hal terkait dengan kewenangan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar.

b. Rapat Dewan Komisaris Dengan Direksi.

Kegiatan ini pada dasarnya merupakan rapat Dewan Komisaris, yang dalam pelaksanaannya dapat mengundang Direksi guna meminta penjelasan atas masalah kinerja perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap penting. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) dilaksanakan rutin setiap bulan (minimal satu kali dalam sebulan).

Selain itu, Dewan Komisaris juga dapat menyelenggarakan Rapat tematik atas permasalahan/isu strategis tertentu dengan mengundang Direktur Teknis dan/atau Divisi terkait guna memperoleh penjelasan dan pembahasan lebih detail serta spesifik dari agenda rapat yang diajukan.

c. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2021

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RKAP Tahun 2021 dilakukan dalam rangka memperoleh pengesahan dari Pemegang Saham (Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Pemegang Saham Seri B) atas usulan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2021 yang sebelumnya telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat biasanya pada bulan pertama pada tahun buku berjalan.

d. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2020 (Audited)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kinerja perusahaan Tahun Buku 2020 (Audited) dilakukan dalam rangka memperoleh pengesahan dari Pemegang Saham (Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia

1. Supervision and Advising Aspects

As outlined above, the Board of Commissioners duties are to carry out supervision and advising. The main activities that will be implemented in 2021 are:

a. Board of Commissioner's Meeting.

This activity is a regularly meeting (at least twice a month) held internally by Board of Commissioners and attended by supporting organs (Committees, Secretaries of the Board of Commissioners, and Staff of the Board of Commissioners) with the main agenda is the discussion of the Company's monthly performance both financial and operational performances. Internal meetings may be conducted weekly with the agenda submitted by the Committee. In the internal meeting, Board of Commissioners can also discuss and decide matters related to the Board of Commissioners authorities as stipulated in the Articles of Association.

b. Board of Commissioners Meeting with Board of Directors.

Basically, this activity is Board of Commissioners meeting which in its implementation can invite the Board of Directors to ask for an explanation of the Company's performance issues and other important matters. The Board of Commissioners Meeting with Board of Directors (Radirkom) is held regularly every month (at least once a month).

In addition, Board of Commissioners may also hold thematic Meetings on certain strategic issues by inviting technical directors and/or related divisions to obtain more detailed and specific explanations and discussions from the proposed meeting agenda.

c. General Meeting of Shareholders (GMS) RKAP Year 2021

The General Meeting of Shareholders (GMS) of RKAP year 2021 was conducted to obtain ratification from Shareholders (Minister of SOEs as Shareholders of Series A Dwiwarna and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Series B Shareholders) on the proposal of the Company's Work Plan and Budget for Fiscal Year 2021 which had previously been discussed together with Board of Commissioners. Meeting is usually held in the first month of the current financial year.

d. General Meeting of Shareholders (GMS) of Company Performance for Fiscal Year 2020 (Audited)

The General Meeting of Shareholders (GMS) of the Company's performance for Fiscal Year 2020 (Audited) was conducted to obtain ratification from Shareholders (Minister of SOEs as Shareholders of Series A Dwiwarna and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as Series B



selaku Pemegang Saham Seri B) atas hasil kinerja perusahaan tahun buku 2020 yang telah diaudit oleh auditor eksternal independen dan juga telah dibahas bersama dengan Dewan Komisaris. Pelaksanaan rapat biasanya pada semester pertama pada tahun buku berikutnya.

Adapun rapat pembahasan bersama antara Dewan Komisaris, organ pendukung Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun untuk mendapatkan penjelasan dan klarifikasi sebagai dasar bagi Dewan Komisaris menyusun tanggapan untuk disampaikan kepada Pemegang Saham.

- e. Pemberian Saran dan Nasihat kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan.

Pemberian saran dan nasihat atau masukan kepada Direksi disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Pemberian saran dan masukan tersebut didokumentasikan dalam risalah rapat dan/ atau surat tersendiri yang memuat hal-hal terkait dengan permasalahan-permasalahan strategis, antara lain:

- 1) Pencapaian kinerja keuangan dan operasional

Dewan Komisaris melakukan telaah atas laporan berkala dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi. Monitoring capaian kinerja juga rutin dilakukan setiap bulan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Kinerja keuangan dan operasional dilakukan pada perusahaan, anak perusahaan, dan kantor cabang.

- 2) Pencapaian kinerja cabang

Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja di daerah (kantor wilayah, kantor cabang, dan kantor unit pelayanan) dilakukan secara berkala baik melalui laporan manajemen triwulan dan tahunan maupun per bulan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan kinerja cabang juga bisa dilakukan dengan melakukan kunjungan kerja pada unit-unit kerja yang telah diagendakan dan/atau dipandang perlu untuk dievaluasi dan didiskusikan secara langsung

- 3) Pemenuhan kepatuhan (*compliance*)

Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam; menjalankan peraturan perundangan yang berlaku dan perjanjian dengan pihak ketiga, menjalankan perusahaan sesuai RKAP dan/atau RJPP.

- 4) Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan Investasi

Guna optimalisasi kinerja investasi perusahaan maka Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan portofolio

Shareholders) on the Company's performance results in fiscal year 2020 which has been audited by independent external auditors and has also been discussed together with Board of Commissioners. Meeting is usually held in the first semester of the following financial year.

The joint discussion meeting between Board of Commissioners, supporting organs under Board of Commissioners and Board of Directors is conducted at least 1 (one) time a year to obtain explanations and clarifications as basis of response to be submitted by Board of Commissioners to shareholders.

- e. *Advising Board of Directors in the Company's Management.*

The provision of advice and suggest or input to Board of Directors is submitted in the Board of Commissioners Meeting with Board of Directors. The suggestions and inputs are documented in the minutes of meeting and/ or separate letters containing matters related to strategic issues, among others:

- 1) *Achievement of financial and operational performances*

The Board of Commissioners review a periodic and annual reports submitted by the Board of Directors. Monitoring performance achievements is also routinely conducted every month in the Board of Commissioners meetings and Board of Directors. Financial and operational performances are carried out at companies, subsidiaries, and branch offices.

- 2) *Achievement of branch performance*

Monitoring and evaluation for work units performance in the region (regional offices, branch offices, and service unit offices) is carried out periodically through management reports in quarterly and annual as well as monthly in Board of Commissioners meetings and Board of Directors. Supervision of branch performance can also be conducted by work visits on work units that have been scheduled and/or deemed necessary to be evaluated and directly discussed.

- 3) *Compliance*

The Board of Commissioners oversees and monitors the compliance of Board of Directors in; implement the applicable laws and regulations and agreements with third parties, run the company in accordance with the RKAP and/or RJPP.

- 4) *Policy and Implementation of Investment Management*

To optimize the Company's investment performance, Board of Commissioners supervises investment portfolio management policies and evaluates

investasi dan mengevaluasi secara berkala capaian kinerja investasi serta memberi saran dan nasehat perbaikan secara spesifik yang diperlukan berkenaan dengan pengawasan terhadap kinerja investasi. Pengawasan kinerja investasi perusahaan atau tindakan pengurusan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

- 5) Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) Sesuai dengan Akta Notaris No.2 Tahun 2020, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan pemberian saran/masukan/arahan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan yang antara lain tertuang dalam surat dan/atau risalah rapat. Berikut hal-hal yang terkait pelaksanaan GCG di Perusahaan, antara lain:

- 1) Penyusunan RJPP dan RKAP.

Dewan Komisaris menjalankan mekanisme untuk memberikan persetujuan atau tanggapan atas rancangan RKAP dan RJPP yang disampaikan oleh Direksi serta menyampaikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Pemegang Saham.

- 2) Perubahan Lingkungan Bisnis dan Permasalahannya yang Berdampak pada Usaha dan Kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi lingkungan bisnis dan permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha perusahaan dan kinerja perusahaan. Jika isu perubahan lingkungan bisnis dan permasalahannya berdampak signifikan, maka Dewan Komisaris akan memberikan respon dan melakukan telaah visi dan misi dikaitkan dengan perubahan lingkungan bisnis tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat permasalahan/tantangan (ancaman dan peluang) yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kinerja perusahaan yang tidak direspon oleh Dewan Komisaris.

- 3) Respon/Tindak Lanjut atas Saran, Permasalahan atau Keluhan dari Stakeholder.

Dewan Komisaris menjalankan mekanisme untuk merespon/menindaklanjuti saran, permasalahan atau keluhan dari stakeholder, termasuk monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan dari Pemegang Saham, serta menyampaikan kepada Direksi tentang saran penyelesaian.

investment performance achievements periodically and provides specific improvement advice and input as needed with regard to monitoring investment performance. Supervision of the Company's investment performance or corporate management actions in accordance with the principles of good corporate governance.

- 5) *Implementation of Good Corporate Governance (GCG) In accordance with Notarial Deed No.2 of 2020, the Board of Commissioners is tasked with supervising and providing advice/input/direction on management policy and the Company's management, among others contained in the letter and/or the minutes of meeting. The following matters related to the implementation of GCG in the Company, among others:*

- 1) *Preparation of RJPP and RKAP.*

The Board of Commissioners implements a mechanism to provide approval or response to the draft of RKAP and RJPP submitted by the Board of Directors and submit opinions and suggestions in writing to shareholders.

- 2) *Changes in the Business Environment and Its Problems That Affected the Company's Business and Performance.*

The Board of Commissioners identifies and collects information on the business environment and its problems that are affected the company's business and performance. If it has a significant impact, then the Board of Commissioners will respond and review the vision and mission associated with the change in the business environment. Thus, there are no problems/challenges (threats and opportunities) that occur and have a significant impact on the company's performance that is not responded by the Board of Commissioners.

- 3) *Response/Follow-up on Suggestions, Issues or Complaints from Stakeholders.*

The Board of Commissioners implements mechanisms to respond/follow up on suggestions, issues or complaints from stakeholders, including monitoring and evaluation of follow-up or direction from shareholders, as well as conveying to the Board of Directors regarding settlement suggestions.



- 4) Kebijakan Manajemen Risiko.
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko perusahaan yang meliputi:
 1. Rencana kerja unit manajemen risiko;
 2. Hasil analisis risiko atas rancangan RKAP dan strategi penanganannya;
 3. Laporan pelaksanaan manajemen risiko berkala yang disampaikan Direksi.
 - 5) Kebijakan Sistem Teknologi Informasi Perusahaan dan pelaksanaannya.
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan.
 - 6) Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Karir dan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan pengelolaan SDM, khususnya manajemen pengembangan SDM dan karir di perusahaan, sistem dan prosedur promosi, mutasi dan promosi, mutasi dan demosi, di perusahaan dan pelaksanaannya. Termasuk tanggapan Dewan Komisaris atas usulan Direksi berkenaan dengan pemilihan calon Anggota Direksi (perusahaan) kepada Pemegang Saham, dan pemilihan calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan.
 - 7) Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) dan Pelaksanaan.
Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap Kebijakan Akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK) dan pelaksanaan.
 - 8) Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa serta Pelaksanaannya.
Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan pemberian nasehat terhadap kebijakan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaannya.
 - 9) Kebijakan Mutu dan Pelayanan.
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan mutu dan pelayanan perusahaan.
- 4) Risk Management Policies.
The Board of Commissioners provides guidance on improving the quality of policies and implementation of the company's risk management which includes:
 1. *Work plan of risk management unit;*
 2. *The results of risk analysis on the draft RKAP and its handling strategies;*
 3. *Periodic risk management implementation report submitted by the Board of Directors.*
 - 5) *Policy of the Company's Information Technology System and its implementation.*
The Board of Commissioners provides guidance on the policy and implementation of information technology systems used by the Company.
 - 6) *Policy and Implementation of Career Development and Human Resource Management (MSDM)*
The Board of Commissioners provides guidance on HR management policies, particularly HR development management and careers in the Company, systems and procedures of promotions, mutations and promotions, mutations and demotions in the company and its implementation. Including the Board of Commissioners response to Board of Directors proposal in relation to the Board of Directors succession (companies) to shareholders, and the succession of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries/Joint Ventures in accordance with the policies and defined selection criteria.
 - 7) *Accounting Policy and preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) and its Implementation.*
The Board of Commissioners supervises and advises on Accounting Policy and the preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting standards in Indonesia (SAK) and its implementation.
 - 8) *Policy of Goods and Services Procurement and its Implementation.*
The Board of Commissioners supervises and advises regarding the policy of goods and services procurement and its implementation.
 - 9) *Quality and Service Policies.*
The Board of Commissioners provides guidance on the Company's quality and service policies.

- 10) Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
Dewan Komisaris menjalankan pengawasan dan memberikan nasehat atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan perjanjian dengan pihak ketiga. Apabila terdapat pelanggaran oleh Direksi, Dewan Komisaris melakukan tindakan sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Pemegang Saham.
- 11) Transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham.
Dewan Komisaris membahas transaksi atau tindakan Direksi dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau Pemegang Saham, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
- 12) Efektivitas pelaksanaan telaah pengaduan yang berkaitan dengan BUMN.
Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan telaah pengaduan yang berkaitan dengan BUMN yang diterima oleh Dewan Komisaris.
- 13) Kebijakan dan pelaksanaan Pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
Dewan Komisaris memberikan arahan tentang kebijakan dan pengelolaan anak perusahaan. Komite melakukan evaluasi terhadap arah pengelolaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan, serta membantu Dewan Komisaris dalam memberikan saran dan masukan perbaikan kepada Direksi.
- 14) Pemantauan kinerja Direksi dan Pelaporan kepada Pemegang Saham.
Dewan Komisaris menjalankan pemantauan kinerja Direksi berdasarkan telaahan kriteria, target dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara individu dengan realisasi pencapaian masing-masing. Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi secara kolegal dan individu dalam laporan tugas pengawasan secara semesteran dan tahunan.
- 15) Penerapan Prinsip Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*).
Dewan Komisaris melaksanakan pemantauan

- 10) *Compliance with Laws and Covenants with Third Parties.*
The Board of Commissioners supervises and advises regarding compliance with laws and regulations and covenants with third parties. If there is a violation by the Board of Directors, then Board of Commissioners will act in accordance with its authority and submitting reports to Shareholders.
- 11) *Board of Directors' transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or Shareholders.*
The Board of Commissioners discusses the Board of Directors' transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or Shareholders, as stipulated in the Company's Articles of Association.
- 12) *Effectiveness of the implementation of complaints related to SOEs.*
The Board of Commissioners supervises the effectiveness of the implementation of complaints related to SOEs received by the Board of Commissioners.
- 13) *Policy and implementation in Management of Subsidiaries/Joint Venture.*
The Board of Commissioners provides guidance on the policies in management of subsidiaries. The Committee evaluates the management direction and performance of subsidiaries related to the Company's business development vision, as well as assisting the Board of Commissioners in providing suggestions and inputs on improvements to the Board of Directors.
- 14) *Monitoring the Board of Directors Performance and Reporting to Shareholders.*
The Board of Commissioners monitors the Board of Directors performance based on reviews on the main criteria, targets and performance indicators which covered in the Management Contract of the Board of Directors individually with the realization of their respective achievements. The Board of Commissioners submits the assessment results of the Board of Directors Performance collegially and individually in the supervisory report on semesterly and annually.
- 15) *Implementation of Good Corporate Governance Principles.*
The Board of Commissioners conducts monitoring and provides guidance on



serta memberikan arahan tentang penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik terhadap:

1. Laporan hasil assessment/review atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, GCG kode, dan kebijakan/kententuan teknis lainnya, serta memantau tindaklanjut area of improvement hasil assessment GCG oleh Direksi;
 2. Laporan GCG yang diungkapkan dalam laporan tahunan.
- 16) Penelaahan usulan Remunerasi Direksi.

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham setiap tahun pada saat Pengesahan Laporan Tahunan. Usulan remunerasi Direksi perlu ditanggapi oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan penilaian kinerja Direksi.

- 17) Pengukuran dan Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris.

Pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara tahunan melalui mekanisme self assessment. Pada saat pengesahan RKAP perusahaan, Dewan Komisaris mengajukan usulan *Key Performance Indicators* untuk mendapat persetujuan dari Pemegang Saham dan dijadikan salah satu dasar penilaian kinerja Dewan Komisaris. Pada saat pengesahan Laporan Tahunan perusahaan, Dewan Komisaris menyampaikan hasil pengukuran dan penilaian atas pencapaian *Key Performance Indicators* tersebut kepada Pemegang Saham di dalam Laporan Tugas Pengawasan.

- f. Evaluasi Kinerja Auditor Eksternal
Kegiatan ini merupakan salah satu program Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara khusus dengan bantuan Komite Audit guna mengevaluasi kinerja auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik/KAP). Kegiatan ini dilakukan guna memastikan bahwa perusahaan mendapatkan mitra audit yang independen, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.
- g. Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Internal
Kegiatan ini juga merupakan program Dewan Komisaris yang dilaksanakan secara khusus dengan bantuan Komite Audit guna mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal dalam pengurusan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan guna

the implementation of Good Corporate Governance principles towards:

1. *Report on the assessment results/reviews of the implementation of Good Corporate Governance, GCG code, and other policies/technical requirements, as well as monitor the follow-up area of improvement of GCG assessment results by the Board of Directors;*
2. *GCG report disclosed in the annual report.*

- 16) *Review on the proposed of Board of Directors' Remuneration.*

Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners shall be determined by Shareholders annually at the time of the Annual Report ratification. The proposed of the Board of Directors' remuneration needs to be responded to by the Board of Commissioners in accordance with the applicable provisions and Board of Directors performance assessment.

- 17) *Measurement and Assessment of the Board of Commissioners Performance.*

Measurement and assessment of the Board of Commissioners Performance is conducted annually through a self assessment mechanism. At the time of ratification of the Company's RKAP, the Board of Commissioners submitted a proposal for Key Performance Indicators to obtain approval from shareholders and serve as one of the basis for Board of Commissioners performance assessment. At the time of the Company's Annual Report ratification, the Board of Commissioners submits the results of measurement and assessment for the achievement of key performance indicators to shareholders in the Supervisory Report.

- f. *External Auditor Performance Evaluation*

This activity is one of the Board of Commissioners programs that is implemented specifically with the Audit Committee assistance to evaluate the performance of external auditors (Public Accounting Firm/KAP). This activity is carried out to ensure that the Company obtains an independent, credible and accountable audit partner.

- g. *Evaluation of Internal Control System*

This activity is also Board of Commissioners programs that is implemented specifically with the Audit Committee assistance to evaluate the effectiveness of the implementation of Internal Control System in the Company's management. This activity is carried out to ensure that the Company carried out its operational

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya sesuai dengan SOP dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Pengawasan Terhadap Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan dan Pelaksanaannya
Kegiatan ini dilaksanakan tidak secara langsung kepada entitas anak perusahaan/perusahaan patungan, melainkan melalui komunikasi dengan Direksi perusahaan induk khususnya dalam forum rapat bulanan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan kelangsungan usaha anak perusahaan/perusahaan patungan.

activities in accordance with SOP and applicable laws and regulations.

- h. *Supervision of Subsidiaries/Joint Ventures and its Implementation*
This activity is carried out not directly to subsidiaries/joint ventures, but through communication with the Board of Directors of the parent company, especially in monthly meeting forum. This activity is intended to ensure the business continuity of the subsidiaries/joint ventures.

2. Aspek Pelaporan

Aspek pelaporan meliputi kegiatan Dewan Komisaris dalam menyusun rencana kerja dan menyampaikan laporan berkala selama tahun 2021 sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku, yaitu:

- a. Memberikan Tanggapan atau Pendapat Terhadap Hal-Hal yang Memerlukan Persetujuan/Rekomendasi/Keputusan/Tanggapan Dewan Komisaris seperti yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan lainnya, antara lain:
- 1) Pengusulan auditor eksternal;
 - 2) Perubahan Struktur Organisasi;
 - 3) Usulan Bakal Calon Direksi;
 - 4) Ijin Cuti Direksi;
 - 5) Perubahan Susunan Organ Dewan Komisaris;
 - 6) Laporan Keuangan dan Kegiatan Perusahaan, baik triwulanan dan tahunan;
 - 7) Rencana Penyertaan Modal Perusahaan;
 - 8) Penjualan Aset Perusahaan;
 - 9) dan Lainnya.
- b. Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan (Triwulanan) Tahun 2021.
- c. Menyusun Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2021 (Triwulanan).
- d. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2022.
- e. Menyusun Indikator Pencapaian Kinerja (IPK) Dewan Komisaris Tahun 2022.

3. Aspek Dinamis

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2021 adalah:

- a. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/atau Cabang.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan fact finding serta mengevaluasi dan diskusi dengan Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Cabang, Kepala Kantor Unit Pelayanan, pejabat lainnya dan

2. Reporting Aspects

Reporting aspects include the Board of Commissioners activities in drawing up work plans and delivering periodic reports during 2021 in accordance with the Articles of Association and other applicable laws and regulations, namely:

- a. *Providing Responses or Opinions on Matters Requiring Approval/Recommendations/Decisions/Responses from the Board of Commissioners as stipulated in the Articles of Association or other regulations, among others:*
- 1) *Proposal of external auditors;*
 - 2) *Organizational Structure Changes;*
 - 3) *Proposed Prospective Directors;*
 - 4) *Board of Directors Leave Permit;*
 - 5) *Changes in the Board of Commissioners Composition;*
 - 6) *Financial Statements and Activities of the Company, both quarterly and annually;*
 - 7) *The Company's Capital Participation Plan;*
 - 8) *Sale of the Company Assets;*
 - 9) *and Others.*
- b. *Preparing Periodic Supervisory Duties Reports in 2021 (Quarterly).*
- c. *Prepare Periodic Report on Evaluation results of the Company's Performance in 2021 (Quarterly).*
- d. *Preparing Board of Commissioners' Work Plan and Budget in 2022.*
- e. *Develop Board of Commissioners' Performance Achievement Indicators in 2022.*

3. Dynamic Aspects

Activities that will be carried out by the Board of Commissioners in 2021 are:

- a. *Monitoring and Performance Evaluation of Regional and/or Branch Offices.*
This activity aims to improve information and fact finding and evaluate and discuss with the Board of Directors, Head of Regional Office, Head of Branch Office, Head of Service Unit Office, other officials and employees



karyawan perusahaan mengenai segala tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Kantor Wilayah dan/atau Kantor Cabang dan/atau Kantor Unit Pelayanan serta permasalahan yang dihadapi. Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja dipergunakan Dewan Komisaris untuk didiskusikan dalam rapat Dewan Komisaris serta apabila diperlukan disampaikan kepada Direksi guna ditindaklanjuti.

- b. Seminar/Workshop/Pelatihan/Studi Banding
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi anggota Dewan Komisaris dan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sehingga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat.

of the company regarding all actions that have been and will be carried out by the Regional Office and/or Branch Office and/or Service Unit Office as well as the challenges faced. The report of the results of monitoring and performance evaluation is used by the Board of Commissioners to be discussed in the Board of Commissioners meetings and if necessary submitted to the Board of Directors for follow-up.

- b. Seminar/Workshop/Training/Comparative Studies
This activity aims to improve the knowledge, insight, and competence of members of the Board of Commissioners and Committees under the Board of Commissioners so that it is expected to be a consideration for Board of Commissioners in carrying out the functions of supervision and providing advice.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya

- » Penilaian Kinerja Komite Audit
Evaluasi terhadap kinerja Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan secara self-assessment dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit untuk periode berikutnya. Masing-masing kegiatan/aktivitas Program Kerja dalam lingkup Komite Audit dirumuskan kuantitasnya dan diberikan bobot, kemudian dijadikan tolok ukur capaian kinerja Komite Audit secara keseluruhan.

Performance Assessment for Supporting Organs of the Board of Commissioners and the Assessment Basis

- » Assessment on Audit Committee Performance
Evaluation of the Audit Committee performance, both individually and collectively, is conducted by self-assessment basis using the evaluation system method established by the Board of Trustees/Board of Commissioners, as material assessment of the working period extension for members of the Audit Committee in the next period. Each work program activity within the scope of Audit Committee is formulated in quantity and given weight, then used as a benchmark for the

Indikator Indicator	Rumusan Formula	Target 1 Tahun 1 Year Target	Bobot Weight	Real Real	Skor Score
Aspek Pengawasan & Pengarahan Supervision & Direction Aspects			60%		63,00
Menyelenggarakan Rapat Komite Organize Committee Meetings	Jumlah rapat Komite Number of Committee meetings	12 kali / times	15%	12 kali / times	15,00
Mengikuti Rapat Dewas/Dekom Attending Board of Trustees/Board of Commissioners Meetings	Jumlah rapat Dewas Number of Board of Trustees meetings	12 kali / times	15%	25 kali / times	18,00
Evaluasi terhadap Auditor Eksternal Evaluation to External Auditors	Jumlah rapat/surat/laporan Number of meetings/letters/reports	1 kali / times	15%	1 kali / times	15,00
Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal Evaluation to Internal Control System	Jumlah rapat/surat/laporan Number of meetings/letters/reports	2 kali / times	15%	2 kali / times	15,00
Aspek Pelaporan Reporting Aspects			30%		30,00
Menyusun program kerja tahunan Develop an annual work program	Jumlah Program Kerja Komite Number of Committee Work Programs	1 kali / times	5%	1 kali / times	5,00

Indikator <i>Indicator</i>	Rumusan <i>Formula</i>	Target 1 Tahun <i>1 Year Target</i>	Bobot <i>Weight</i>	Real <i>Real</i>	Skor <i>Score</i>
Membantu menyusun laporan/pendapat/saran kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham <i>Assisting in preparing reports/opinions/suggestions to Capital Owners/Shareholders</i>	Jumlah surat Tanggapan Dewas/Dekom <i>Number of Board of Trustees/Board of Commissioners Response letters</i>	4 kali / times	10%	4 kali / times	10,00
Membantu Dewas/Dekom menyusun laporan tugas pengawasan <i>Assisting Board of Trustees/Board of Commissioners to compile a supervisory reports</i>	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan <i>Number of Supervisory Reports</i>	4 kali / times	10%	3 kali / times	10,00
Membantu Dewas menyusun balasan/tanggapan surat Direksi <i>Assisting Board of Trustees in drafting the reply/response letter to the Board of Directors</i>	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan <i>% number of letters responded to in accordance with the provisions</i>	100%	5%	100%	5,00
Aspek Dinamis/Lain-lain <i>Dynamic Aspects/Miscellaneous</i>			10%		7,5
Mengikuti kegiatan kunjungan Dewas/Dekom <i>Accompanying Board of Trustees/Board of Commissioners in visiting activities</i>	Jumlah kunjungan yang diikuti <i>Number of visits</i>	2 kegiatan / Activities	5%	1 kegiatan / Activities	2,50
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan <i>Participate in competency and knowledge improvement activities</i>	Jumlah pelatihan/seminar/workshop/ yang diikuti <i>Number of trainings/seminars/workshops</i>	1 kegiatan / Activities	5%	1 kegiatan / Activities	5,00
Jumlah Bobot <i>Total Weights</i>			100%		100,50

» Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi baru dibentuk oleh Dewan Komisaris pada 7 April 2020. Di tahun 2020, komite ini masih dalam tahapan membentuk fondasi dan pedoman serta berbagai inisiatif untuk dapat menjadi landasan bagi tata kelola nominasi dan remunerasi di tahun-tahun berikutnya.

» Penilaian Kinerja Komite Investasi dan Risiko Usaha

Evaluasi terhadap kinerja Komite Investasi dan Risiko Usaha, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan secara self-assessment dengan menggunakan metoda evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha untuk periode berikutnya. Masing-masing kegiatan/aktivitas Program Kerja dalam lingkup Komite Investasi dan Risiko Usaha dirumuskan kuantitasnya dan diberikan bobot, kemudian dijadikan tolok ukur capaian kinerja Komite Investasi dan Risiko Usaha secara keseluruhan.

overall achievement of the audit committee's performance.

» *Assessment on Nomination and Remuneration Committee Performance*

Nomination and Remuneration Committee was formed by the Board of Commissioners on April 7, 2020. In 2020, this committee is still in the base stage and create guidelines as well as various initiatives to be the foundation for nomination and remuneration governance in the following years.

» *Assessment on Investment and Business Risk Committee Performance*

Evaluation of the Investment and Business Risk Committee performance, both individually and collectively, is conducted by self-assessment basis using the evaluation system method established by Board of Commissioners, as material assessment of the working period extension for members of the Investment and Business Risk Committee in the next period. Each work program activity within the scope of Investment and Business Risk Committee is formulated in quantity and given weight, then used as a benchmark for the overall achievement of the Investment and Business Risk committee's performance.



Pengukuran Kinerja Komite Investasi dan Risiko Usaha Periode s.d. Triwulan IV Tahun 2020

Measurement of Investment and Business Risk Committee Performance period up to Quarter IV 2020

Indikator Indicator	Rumusan Formula	Target 1 Tahun 1 Year Target	Bobot Weight	Real Real	Skor Score
Aspek Pengawasan & Pengarahan <i>Supervision & Direction Aspects</i>			60%		60,00
Menyelenggarakan Rapat Internal Komite <i>Organize Internal Committee Meetings</i>	Jumlah rapat Komite <i>Number of Committee meetings</i>	12 kali / <i>times</i>	15%	12 kali / <i>times</i>	15,00
Mengikuti Rapat Internal dengan Dewas Mengikuti Rapat Dewas/Dekom <i>Attending Internal Meetings with Board of Trustees, Attending Board of Trustees/Board of Commissioners Meetings</i>					
Mengikuti Rapat Dewas dengan Direksi Teknis <i>Attending Board of Trustees Meetings with Technical Directors</i>					
Aspek Pelaporan <i>Reporting Aspects</i>			30%		30,00
Menyusun program kerja tahunan Komite (RKA Komite) <i>Develop the Committee's annual work program</i>	Jumlah Program Kerja Komite <i>Number of Committee Work Programs</i>	1 kali / <i>times</i>	15%	1 kali / <i>times</i>	5,00
Menyusun laporan triwulanan dan laporan taun pelaksanaan tugas Komite <i>Preparing quarterly and annual reports on the implementation of the Committee's duties</i>	Jumlah Laporan Tugas Pengawasan <i>Number of Supervisory Reports</i>	4 kali / <i>times</i>	10%	4 kali / <i>times</i>	10
Membantu Dewan menyusun balasan/tanggapan surat Direksi <i>Assisting Board of Trustees in drafting the reply/response letter to the Board of Directors</i>	% jumlah surat yang ditanggapi sesuai ketentuan <i>% number of letters responded to in accordance with the provisions</i>	100%	5%	100%	5
Aspek Dinamis/Lain-lain <i>Dynamic Aspects/Miscellaneous</i>			30%		30,00
Kunjungan kerja ke Kantor Cabang/Perwakilan dalam rangka pengumpulan data dan evaluasi kinerja serta penerapan manajemen risiko <i>Work visit to Branch Office/Representative in order to collect data and evaluate performance and implementation of risk management</i>	Jumlah kunjungan/laporan <i>Number of visits/reports</i>	2 kali / <i>times</i>	5%	4 kegiatan	5
Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi dan pengetahuan <i>Participate in competency and knowledge improvement activities</i>	Jumlah pelatihan/seminar/workshop yang diikuti <i>Number of trainings/seminars/workshops</i>	1 kegiatan / <i>Activities</i>	5%	0 kegiatan / <i>Activities</i>	0
Jumlah Bobot <i>Total Weights</i>			100%		95

KOMISARIS INDEPENDEN *Independent Commissioner*

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, agar dapat menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan OJK No.3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, kriteria Komisaris Independen adalah berkewarganegaraan Indonesia; dan berdomisili di Indonesia.

Komisaris Independen Lembaga Penjamin, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, atau pemegang saham Lembaga Penjamin, dalam Lembaga Penjamin yang sama
2. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah atau menduduki jabatan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Penjamin yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Lembaga Penjamin tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir
3. memahami peraturan perundang-undangan di bidang Penjaminan, Penjaminan Syariah, Penjaminan Ulang, dan/atau Penjaminan Ulang Syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. memiliki pengetahuan yang baik mengenai kondisi keuangan Lembaga Penjamin tempat Komisaris Independen dimaksud menjabat

Komisaris Independen Jamkrindo dan Pernyataan Independensinya

Di tahun 2020, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, Pemegang Saham menetapkan Sri Mulyanto sebagai Komisaris Utama/Independen, dan M. Muchlas Rowi sebagai Komisaris Independen.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with members of the Board of Commissioners and Board of Directors and/or controlling shareholders and is free from business relationships or other relationships that may affect his ability to act independently in accordance with GCG principles, in order to create an objective and independent climate.

Criteria of Independent Board of Commissioners Members

In accordance with the regulation of the financial service authority (POJK) No.3/POJK.05/2017 concerning Good Corporate Governance for the Guarantee Institution, the criteria of Independent Commissioners are Indonesian citizenship and domiciled in Indonesia.

The Independent Commissioner of the Guarantee Institution must meet the following requirements:

1. *has no affiliation with members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board, or shareholders of the Guarantee Institution, within the same Guarantee Institution;*
2. *has never become a member of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board, a member of the Sharia Supervisory Board, or taken a position of 1 (one) level below the Board of Directors in the same Guarantee Institution or other business entity that has affiliation with the Guarantee Institution in the Company within a period of the last 6 (six) month;*
3. *understand the regulations in the field of Guarantees, Sharia Guarantees, Re-Guarantees, and/or Sharia Re-Guarantee, and other relevant rules and regulations; and*
4. *has a good knowledge of the finances of the Guarantee Institution where the Independent Commissioner performs his/her duties.*

Independent Commissioner of Jamkrindo and its Statement of Independence

In 2020, based on the Minister of SOEs Decree No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero), the Shareholders appointed Sri Mulyanto as President/Independent Commissioner, and M. Muchlas Rowi as Independent Commissioner.



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Assessment of Fit and Proper	Masa Jabatan Terms of Office	Periode Jabatan Period
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/ Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 jo. No. SK- 51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017 jo. No.SK-51/ MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No.KEP-110/KDK.05/2017 tanggal 29 Desember 2017 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-110/ KDK.05/2017 dated December 29, 2017</i>	27 Oktober 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>October 27, 2017 to GMS in 2022</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No.SK- 51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020</i>	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No.KEP-9/KDK.05/2020 tanggal 6 Mei 2020 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-9/ KDK.05/2020 dated May 6, 2020</i>	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>October 17, 2019 to GMS in 2024</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) <i>1st (previously had never served as a Board of Commissioners/Board of Trustees)</i>

Surat Pernyataan Independensi Sri Mulyanto *Sri Mulyanto Independence Statement*



Surat Pernyataan Independensi M. Muchlas Rowi
M. Muchlas Rowi Independence Statement



Pada tanggal 18 Januari 2021, Para Pemegang Saham memutuskan untuk mengangkat Hernita Alius sebagai Komisaris Independen berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-19/MBU/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 tanggal 21 Februari 2021 untuk masa jabatan 18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026.

On January 18, 2021, the Shareholders decided to appoint Hernita Alius as Independent Commissioner based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-19/MBU/01/2021 and BPUI's Decree as Shareholder No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/2021 dated February 21, 2021 for the term of office from January 18, 2021 to GMS to be held in 2026.



DIREKSI

Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Board of Directors is the Company's organ responsible for the management of the Company for the interest of the Company and its purposes, and to represent the Company inside or outside the court in accordance with the Articles of Association.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi ditetapkan dan diperbarui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 03/SKB/1/XII/2020 – KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (Board Manual), yang secara garis besar mengatur tentang hari, jam kerja, cuti, dan izin Direksi serta ketentuan penyelenggaraan dan pengambilan keputusan rapat, kode etik, dan peningkatan kompetensi Direksi.

Board of Directors' Charter

The guidelines and work procedures of the Board of Directors are established and updated through Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 03/SKB/1/XII/2020 – KEP-07/DK-Jamkrindo/XII/2020 dated 30 December 2020 regarding the Board Manual, which outlines the days, hours of work, leave, and permission from the Board of Directors as well as provisions for organizing and making meeting decisions, code of ethics, and improving the competence of the Board of Directors.

Kriteria Direksi

Penetapan pedoman kualifikasi Direksi Perusahaan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Perusahaan bersandar pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Direksi Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Board of Directors' Criteria

The establishment of the Company's Director's qualification guidelines refers to the prevailing laws and regulations. In this case, the Company relies on the Minister of SOEs Regulation No.PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures for Appointment, and Dismissal of State Owned Enterprises Board of Directors.

Berdasarkan aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai persyaratan formal, materiil dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh seorang Direksi yang mencakup:

Based on these rules, there are provisions concerning formal, material and other requirements that must be met by a Director which includes:

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Formal	<ol style="list-style-type: none"> Cakap melaksanakan perbuatan hukum <i>Has ability to carry out legal actions</i> Tidak pernah dinyatakan pailit <i>Has never been declared bankrupt</i> Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; dan <i>Has never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners that was found guilty of causing a Company to be declared bankrupt</i> Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara <i>Has never been convicted of a criminal offense that is detrimental to the country's finances</i>
Materil	<ol style="list-style-type: none"> Keahlian. <i>Skill.</i> Pengalaman. <i>Experience.</i> Kemampuan untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional. <i>Has ability to act in good faith, honesty, and professionally.</i> Kemampuan bertindak untuk kepentingan Perusahaan, terjamin, dan/atau penerima jaminan. <i>Has ability to act for the Company's interests, applicant, and/or beneficiary.</i>

Persyaratan Requirements	Uraian Description
Materil	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mendahulukan kepentingan Perusahaan, Terjamin dan/atau penerima jaminan daripada kepentingan pribadi. <i>Prioritize the Company's interests, applicant, and/or beneficiary rather than the personal interest.</i> 6. Kemampuan mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan, Terjamin, dan/atau Penerima Jaminan. <i>Has ability to make decisions based on independent and objective assessments for the Company's interests, applicant, and/or beneficiary.</i> 7. Kemampuan menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan. <i>Has ability to avoid abuse of authority to obtain improper personal gain or cause the Company Loss.</i> 8. Serta persyaratan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <i>As well as other requirements based on the legislation.</i>
Persyaratan lainnya Other Requirements	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menjabat anggota Direksi pada BUMN, BUMD, serta Badan usaha milik swasta. <i>Not serving as a member of the Board of Directors in SOE's, LOE's, as well as private enterprises.</i> 2. Tidak menjabat anggota Dewan Komisaris pada BUMN. <i>Not serving as a member of the Board of Commissioners in SOE's.</i> 3. Tidak menjabat jabatan structural dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah. <i>Not serving as structural and other functional positions in central and/or local government agencies/institutions.</i> 4. Tidak menjabat jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislative dan/atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. <i>Not serving in other positions under the laws and regulations, the management of political parties and/or candidates/legislative members and/or candidates for regional head/deputy head of the region.</i> 5. Tidak menjabat jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. <i>Not serving in other positions that may cause conflicts of interest.</i>

Ketentuan Masa Jabatan

Masa Jabatan Anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Terms of Tenure

The Term of Office for Members of the Board of Directors shall be determined 5 (five) years and may be reappointed for 1 (one) term of office.

Susunan dan Komposisi Direksi Tahun 2020

Di tahun 2020 tidak terjadi pergantian keanggotaan Direksi. Susunan dan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Composition of the Board of Directors in 2020

In 2020 there will be no change of the Board of Directors member. The composition of the Board of Directors throughout 2020 is as follows:

Meskipun di tahun 2020 Jamkrindo merubah status hukumnya dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT), tidak terdapat perubahan nomenklatur jabatan Direksi. Namun demikian, terdapat pergantian susunan Direksi, dengan kronologi sebagai berikut.

Although in 2020 Jamkrindo changed its legal status from a Public Corporate (Perum) to a Limited Liability Company (PT), there was no change in the Board of Directors nomenclature. However, there is a change in the Board of Directors composition, with the following chronology.

Kronologi Perubahan Jabatan dan Perubahan Susunan Dewan Komisaris Tahun 2020

Chronology of Changes in Position and Composition of the Board of Directors in 2020

Periode 1 Januari - 26 Oktober 2020 Period of January 1 - October 26, 2020	Periode 26 Oktober – 7 November 2020 Period of October 26 – November 7, 2020	Periode 7 November - 31 Desember 2020 Period of November 7 – December 31, 2020	Keterangan Information
Randi Anto Direktur Utama President Director			Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama sejak keputusan Para Pemegang Saham tanggal 26 Oktober 2020 sesuai keputusan pemegang saham Randi Anto has no longer to serve as President Director since the shareholders' decision on October 26, 2020 under shareholder's decision
Amin Mas'udi Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	Amin Mas'udi Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee		Amin Mas'udi meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020. Amin Mas'udi died on November 7, 2020.
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HR Management, General Affairs & Compliance	Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HR Management, General Affairs & Compliance	Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HR Management, General Affairs & Compliance	
Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan merangkap Direktur Bisnis Penjaminan Director of Operations and Network Concurrently Director of Business of Guarantee	Kadar Wisnuwarman ditunjuk untuk merangkap Direktur Bisnis Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jamkrindo No. 52/SKD/4/X/2020 tanggal 2 November 2020. Kadar Wisnuwarman was appointed to concurrently Director of Business of Guarantee based on Decree of the Board of Directors of PT Jamkrindo No. 52/SKD/4/X/2020 dated November 2, 2020.
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	
	Putrama Wahyu Setyawan Direktur Utama President Director	Putrama Wahyu Setyawan Direktur Utama President Director	Melalui keputusan Para Pemegang Saham tanggal 26 Oktober 2020, Putrama Wahyu Setyawan diangkat menjadi Direktur Utama. Through the Shareholders decision on October 26, 2020, Putrama Wahyu Setyawan was appointed as President Director.

Dengan demikian, susunan Direksi di akhir tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of the Board of Directors at the end of 2020 can be seen below.

Susunan Direksi Jamkrindo per 31 Desember 2020

Jamkrindo Board of Directors as of December 31, 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-347/MBU/10/2020 dan Keputusan Direksi BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Jamkrindo Shareholder No. SK-347/MBU/10/2020 and 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2020	26 Oktober 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 October 26, 2020 to GMS in 2025	Ke-1 1 st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017</i>	7 September 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>September 7, 2017 to GMS in 2022</i>	Ke-1 1 st
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan merangkap Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Operations and Network concurrently Director of Business of Guarantee</i>	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017</i>	21 November 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>November 21, 2020 to GMS in 2022</i>	Ke-1 1 st
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	Periode Ke-2: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-22/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 <i>2nd Period: Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-22/MBU/01/2018 dated January 15, 2018</i> Periode Ke-1: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-44/MBU/2014 <i>1st Period: Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 j.o Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-44/MBU/2014</i>	15 Januari 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 <i>January 15, 2018 to GMS in 2023</i>	Ke-2 2 nd

Sesuai keputusan Pemegang Saham tanggal 22 Maret 2021, Suwarsito diangkat sebagai Direktur Bisnis Penjaminan menggantikan Amin Mas'udi yang meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020. Dengan demikian, susunan Direksi Jamkrindo hingga disahkannya laporan tahunan tanggal 26 November 2021 dapat disampaikan sebagai berikut.

In accordance with the shareholders' decision on March 22, 2021, Suwarsito was appointed as Director of Business of Guarantee replacing Amin Mas'udi who died on November 7, 2020. Thus, the composition of Jamkrindo Board of Directors until the ratification of this annual report on November 26, 2021 can be delivered as follows.

Susunan Direksi Jamkrindo per 26 November 2021

Jamkrindo Board of Directors as of November 26, 2021

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Utama <i>President Director</i>	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-347/MBU/10/2020 dan Keputusan Direksi BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 <i>Decree of the Minister of SOEs as a Shareholder of Series A No.SK-347/MBU/10/2020 and Decision of the Board of Directors of BPUI as a Shareholder of Series B No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2020</i>	26 Oktober 2020 s.d 25 Oktober 2025 <i>October 26, 2020 to October 25, 2025</i>	Ke-1 1 st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Suwarnito	Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business of Guarantee</i>	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-94/MBU/03/2021 dan Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder of Series A No.SK-94/MBU/03/2021 and BPUI's Decree as Shareholder of Series B No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 dated March 22, 2021</i>	22 Maret 2021 s.d 21 Maret 2026 <i>March 22, 2021 to March 21, 2026</i>	Ke-1 1 st
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017</i>	7 September 2017 s.d 6 September 2022 <i>September 7, 2017 to September 7, 2022</i>	Ke-1 1 st
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan <i>Director of Operations and Network</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-249/MBU/11/201 tanggal 21 November 2017 <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-249/MBU/11/201 dated November 21, 2017</i>	21 November 2017 s.d 20 November 2022 <i>November 21, 2017 to November 20, 2022</i>	Ke-1 1 st
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	Periode Ke-2: Keputusan Menteri BUMN No.SK-22/MBU/01/2018 tanggal 15 Januari 2018 <i>2nd Period: Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-22/MBU/01/2018 dated January 15, 2018</i> Periode Ke-1: Keputusan Menteri BUMN No.SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 j.o Keputusan Menteri BUMN No.SK-44/MBU/2014 <i>1st Period: Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 j.o Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.SK-44/MBU/2014</i>	15 Januari 2018 s.d 14 Januari 2023 <i>January 15, 2018 to January 14, 2023</i>	Ke-2 2 nd

Profil singkat masing-masing anggota Direksi dapat dilihat pada bagian Profil Direksi, dalam bab Profil Perusahaan.

A brief profile of each Board of Directors can be seen in the Board of Directors Profile section, in the Company Profile chapter.

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi

Assessment of Fit and Proper Test for the Board of Directors

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 tanggal 27 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, pengangkatan Direksi Perusahaan wajib diikuti dengan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berikut disampaikan status Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Direksi Perusahaan.

In accordance with OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 dated July 27, 2016 concerning Fit and Proper Test for Main Candidates of Financial Services Institutions, the appointment of the Company's Board of Directors shall be followed by an Assessment of Fit and Proper Test by the Financial Services Authority (OJK). The following is conveyed the status of Fit and Proper Test Assessment of the Company's Board of Directors.

Direksi Board of Directors	Status Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Information on Fit and Proper Test
Putrama Wahyu Setyawan Direktur Utama <i>President Director</i>	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No. KEP-33/KDK.05/2017 tanggal 15 Juli 2021 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No. KEP-33/KDK.05/2017 dated July 15, 2021</i>
Amin Mas'udi *) Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business of Guarantee</i>	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No.KEP-109/KDK.05/2017 tanggal 29 Desember 2017 <i>Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-109/KDK.05/2017 dated December 29, 2017</i>

Direksi Board of Directors	Status Status	Keterangan Uji Kemampuan dan Kepatutan Information on Fit and Proper Test
Suwarsito Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	Proses In Process	Dalam proses pengajuan kepada OJK. in process of submitting to OJK
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HR Management, General Affairs & Compliance	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No.KEP-19/KDK.05/2018 tanggal 7 Maret 2018 Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-19/KDK.05/2018 dated March 7, 2018
Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	Lulus Pass	Telah memperoleh Surat Keputusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK melalui Keputusan No.KEP-25/KDK.05/2018 tanggal 13 April 2018 Has obtained a Decision Letter on Fit and Proper Assessment from OJK through decision No.KEP-25/KDK.05/2018 dated April 13, 2018
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	-	Pada saat pengangkatan I. Rusdonobanu sebagai Direktur, belum terdapat kebijakan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK. When I. Rusdonobanu was appointed as Director, there was no policy on Fit and Proper Test by OJK.

*] Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya digantikan oleh Suwarsito pada 22 Maret 2021.

*] Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. He was replaced by Suwarsito on March 22, 2021.

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan

Kebijakan Kepengurusan Perusahaan ditetapkan oleh Direksi. Dalam melaksanakan Kepengurusan Perusahaan, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk atas nama Direksi serta mewakili Perusahaan, dengan syarat semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi. Jika Direktur Utama berhalangan karena sebab apapun, maka ditetapkan salah seorang Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi dengan urutan sebagai berikut:

- Salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara anggota Direksi yang ada berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- Dalam hal sebagaimana dimaksud pada butir (b) tidak dilakukan, salah seorang Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direktur berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi
- Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang. Direktur sebagaimana dimaksud pada butir (c) yang tertua dalam usia yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

Corporate Management Policies

The Company's Management Policy is established by the Board of Directors. In carrying out the Management of the Company, the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company, provided that all the actions of the President Director are approved by the Board of Directors Meeting. If the President Director is absent for any reason, then a Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors in the following order:

- One of the Directors appointed by the President Director is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.
- In the event that the President Director does not appoint anyone, one of the Directors appointed by and among the members of the Board of Directors is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors.
- In the case of (b) cannot be carried out, one of the Directors who has served the longest as a member of the Director is authorized to act for and on behalf of the Directors
- In the case of a Director who has served the longest as a member of the Board of Directors are more than 1 (one) person, the Director as referred to in point (c) with the oldest in the age is authorized to act for and on behalf of the Board of Directors

Tugas dan Tanggung Jawab

Mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo No.25 tanggal 24 Februari 2020, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

Duties and Responsibilities

Referring to the Articles of Association of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo No.25 dated February 24, 2020, the Board of Directors duties and responsibilities are as follows:

Tugas Pokok Main Duties

1. Melaksanakan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan dan bertindak selaku Pimpinan dalam pengurusan tersebut
Carrying out the Company's management for the Company's interest and objective and acting as a Leader in the management
2. Mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan
Represent the Company inside and outside of court
3. Memelihara dan mengurus kekayaan Perusahaan
Maintaining and managing the Company's wealth

Tanggung Jawab Responsibilities

1. Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dan pengelolaan Perusahaan, serta melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Perusahaan dan mewakili Jamkrindo di dalam dan di luar pengadilan
The Board of Directors is responsible for the implementation of the Company's regulations and management, as well as taking legal action for and on behalf of the Company and representing Jamkrindo inside and outside of court
2. Secara bersama-sama atau individual, bertanggung jawab segala kerugian yang timbul pada kekayaan Perusahaan akibat tindakan Direksi yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan
Collectively or individually, responsible for any losses arising from the Company's wealth due to the Board of Directors actions who violate or neglect their duties and/or obligations as stipulated in the Company's Regulations and Laws and Regulations
3. Memastikan agar informasi mengenai Perusahaan diberikan kepada Dewan Komisaris secara tepat waktu dan lengkap
Ensure that information about the Company is provided to the Board of Commissioners in a timely and complete manner
4. Tanggung jawab lain sesuai ketentuan Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Other responsibilities in accordance with the Company's provisions and applicable laws and regulations

Pembagian Lingkup Tugas antar Direksi

Tugas dan wewenang masing-masing Direksi telah diatur dalam Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/1/VIII/2018 tentang Deskripsi Pekerjaan Direksi Perum Jaminan Kredit Indonesia. Dalam menjalankan kegiatannya, anggota Direksi Perusahaan memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

Segregation of Duties Between Directors

The duties and authorities of each Board of Directors have been stipulated in the Board of Directors Regulation No. 12/Per-Dir/1/VIII/2018 concerning Job Description for the Board of Directors of Perum Jaminan Kredit Indonesia. In carrying out its activities, members of the Company's Board of Directors have the following duties and authorities:

Direksi Board of Directors	Lingkup Tugas Duties
Putrama Wahyu Setyawan Direktur Utama President Director	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) secara keseluruhan. <i>Management of the Company's Long Term Plan (RJPP) as a whole.</i> b. Tata Kelola Teknologi Informasi Korporasi. <i>Governance of Corporate Information Technology.</i> c. Penerapan Manajemen Risiko Korporasi dan Direktorat Utama. <i>Implementation of Corporate Risk Management and Main Directorate</i> d. Penerapan GCG <i>GCG implementation</i> e. Tata Laksana Korporasi dan Direktorat Utama. <i>Corporate Management and Main Directorate.</i> f. Pengawasan Internal Korporasi dan Direktorat Utama. <i>Corporate Internal Supervision and Main Directorate.</i>

Direksi <i>Board of Directors</i>	Lingkup Tugas <i>Duties</i>
<p>Putrama Wahyu Setyawan Direktur Utama <i>President Director</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> g. Pengelolaan proses bisnis Korporasi. <i>Management of corporate business processes.</i> h. Performance Management Korporasi. <i>Corporate Performance Management.</i> i. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di bawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. <i>Competency development of employees under his authority at least one level below him to meet the specified competency standards.</i> j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas Korporasi dan Direktorat Utama secara berkala. <i>Preparation and submission of the report of duties for Corporate and the Main Directorate periodically.</i>
<p>Amin Mas'udi Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business of Guarantee</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan RJPP dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Bisnis Penjaminan. <i>RJPP Management and Work Plan and Budget (RKA) for the Directorate of Business of Guarantee.</i> b. MoU dan PKS/SP3 Korporasi. <i>MoU and Corporate Agreement/SP3.</i> c. Kebijakan terkait Bisnis Penjaminan. <i>Policy related to Business of Guarantee.</i> d. Pemasaran <i>Marketing</i> e. Portofolio bisnis penjaminan. <i>Business of Guarantee portfolio.</i> f. Penjualan Bisnis Penjaminan Bank Nasional. <i>Sale of National Bank Guarantee Business.</i> g. Hubungan kelembagaan <i>Institutional relations</i> h. Pengelolaan sarana dan sistem informasi yang terhubung secara online pada ruang lingkup Bisnis Penjaminan. <i>Management of online information facilities and systems within the Business of Guarantee.</i> i. Pelaksanaan proses dan pengendalian Penjaminan. <i>Guarantee process and control.</i> j. Tata Laksana Direktorat Bisnis Penjaminan. <i>Governance of Directorate of Business of Guarantee.</i> k. Performance Management Direktorat Bisnis Penjaminan. <i>Performance Management of Directorate of Business of Guarantee.</i>
<p>Amin Mas'udi Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business of Guarantee</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Manajemen Risiko Direktorat Bisnis Penjaminan. <i>Risk Management of Directorate of Business of Guarantee.</i> b. Penerapan GCG pada Direktorat Bisnis Penjaminan. <i>Implementation of GCG at the Directorate of Business of Guarantee.</i> c. Pengawasan Internal Direktorat Bisnis Penjaminan. <i>Internal Supervision of Directorate of Business of Guarantee.</i> d. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di bawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. <i>Competency development of employees under his authority at least one level below him to meet the specified competency standards.</i> e. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala. <i>Preparation and submission of periodically report of duties.</i>
<p>Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan <i>Director of Operations and Network</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan RJPP dan RKA Direktorat Operasional dan Jaringan. <i>RJPP Management and Work Plan and Budget (RKA) for the Directorate of Operations and Network.</i> b. Penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (Information Technology Strategic Plan)/Master Plan Teknologi Informasi Perusahaan serta pengelolaannya. <i>Preparation of Information Technology Strategic Plan /Master Plan of Corporate Technology and its management.</i> c. Teknik dan administrasi bisnis. <i>Engineering and business administration.</i> d. Jaringan dan layanan. <i>Networks and services.</i> e. Pengelolaan suborgasi. <i>Suborgation management.</i>



Direksi Board of Directors	Lingkup Tugas Duties
<p>Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan <i>Director of Operations and Network</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> f. Tata Laksana Direktorat Operasional dan Jaringan. <i>Management of Directorates of Operations and Networks.</i> g. Performance Management Direktorat Operasional dan Jaringan. <i>Performance Management of Directorate of Operations and Network</i> h. Manajemen Risiko Direktorat Operasional dan Jaringan. <i>Risk Management of Directorate of Operations and Networks.</i> i. Penerapan GCG pada Direktorat Operasional dan Jaringan. <i>Implementation of GCG at the Directorate of Operations and Networks.</i> j. Pengawasan Internal Direktorat Operasional dan Jaringan. <i>Internal Supervision of Directorate of Operations and Networks.</i> k. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di bawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. <i>Competency development of employees under his authority at least one level below him to meet the specified competency standards.</i> l. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala. <i>Preparation and submission of periodically report of duties.</i>
<p>Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan RJPP dan RKA Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan. <i>RJPP Management and Work Plan and Budget (RKA) for the Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance</i> b. Siklus manajemen SDM. <i>HR management cycle.</i> c. Siklus manajemen umum. <i>General management cycle.</i> d. Hukum. <i>Legal.</i> e. Tata Laksana Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan. <i>Management of Directorates of HR Management, General Affairs and Compliance.</i> f. Performance Management Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan. <i>Performance Management of Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance.</i> g. Manajemen Risiko Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan. <i>Risk Management of Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance.</i> h. Penerapan GCG pada Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan. <i>Implementation of GCG at the Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance.</i> i. Pengawasan Internal Direktorat MSDM, Umum dan Kepatuhan. <i>Internal Supervision of Directorate of HR Management, General Affairs and Compliance.</i> j. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di bawah kewenangannya minimal satu tingkat di bawahnya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan. <i>Competency development of employees under his authority at least one level below him to meet the specified competency standards.</i> k. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala. <i>Preparation and submission of periodically report of duties.</i>
<p>I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan RJPP dan RKA Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. <i>RJPP Management and Work Plan and Budget (RKA) for the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.</i> b. Manajemen investasi dan pengelolaan keuangan Korporasi. <i>Corporate Investment and financial management.</i> c. Manajemen akuntansi yang meliputi: pengelola perencanaan dan pengendalian anggaran RKAP Korporasi, Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Akuntansi, serta Laporan & Sistem Informasi Manajemen. <i>Accounting management which includes: management of Corporate planning and budget control of RKAP, Accounting Supervision and Control Policy, Report and Management Information System.</i> d. Manajemen risiko korporasi dan penjaminan. <i>Corporate risk management and underwriting.</i> e. Pengelolaan PUMK yang meliputi: (1) database pelaku UMKM, (2) model dan sistem pemeringkatan UMKM, serta (3) pemberdayaan UMKM. <i>PUMK management which includes: (1) database of MSMEs, (2) models and rating systems of MSMEs, and (3) empowerment of MSMEs.</i> f. Pelaksanaan manajemen klaim secara nasional. <i>Implementation of national claims management.</i> g. Tata laksana Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. <i>Management of Directorates of Finance, Investment and Risk Management</i>

Direksi <i>Board of Directors</i>	Lingkup Tugas <i>Duties</i>
<p>I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i></p>	<p>h. Performance management, manajemen risiko, penerapan GCG, dan pengawasan internal Direktorat Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko. <i>Performance management, risk management, GCG implementation, and internal supervision of the Directorate of Finance, Investment and Risk Management.</i></p> <p>i. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada dibawah kewenangannya minimal satu tingkat dibawahnya sehingga memenuhi standart kompetensi yang ditentukan. <i>Competency development of employees under his authority at least one level below him to meet the specified competency standards.</i></p> <p>j. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala. <i>Preparation and submission of periodically report of duties.</i></p>

*) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya digantikan oleh Suwarsito pada 22 Maret 2021.

*) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. He was replaced by Suwarsito on March 22, 2021.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Direksi merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan bisnis Perusahaan oleh Direksi.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Direksi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi Berikut Dasar Penilaiannya

Jamkrindo menerapkan Performance Management System (PMS) sebagai tata aturan mengenai pengelolaan pengukuran kinerja baik untuk Perusahaan, unit kerja maupun individu. Dalam pelaksanaan PMS tersebut, pengukuran kinerja Perusahaan, unit kerja maupun individu Karyawan menggunakan pola Key Performance Indicator (KPI). Terkait dengan penyusunan KPI dilakukan dengan pola sebagai berikut:

1. KPI Korporasi
KPI Korporasi mengikuti ketentuan dan strategi yang diambil oleh Korporasi.
2. KPI Unit Kerja dan Individu Karyawan
KPI unit kerja (Direktorat/Divisi/Desk/Kantor Wilayah/Kantor Cabang Khusus/Kantor Cabang) dan individu karyawan menggunakan perspektif-perspektif yang disesuaikan dengan perspektif pada KPI Korporasi. Dengan demikian proses distribusi (*cascading*) KPI Korporasi menjadi KPI Unit Kerja dan Individu karyawan membutuhkan pemetaan (*mapping*) KPI Korporasi.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Board of Directors' competence is an effort to update knowledge to support the implementation of duties in the Company's business management by the Board of Directors.

Competency improvement activities participated by the Board of Directors throughout 2020 can be seen in the Company Profile Chapter in this annual report.

Performance Assessment for Supporting Organs of the Board of Directors and the Assessment Basis

Jamkrindo implements Performance Management System (PMS) as a rule on performance measurement management for companies, work units and individuals. In the implementation of PMS, performance measurement for the Company, work units and individual Employees using Key Performance Indicator (KPI) patterns. Related to the preparation of KPIs are carried out with the following patterns:

1. Corporate KPIs
Corporate KPIs follow the terms and strategies taken by Corporation.
2. KPI Work Unit and Individual Employees
KPI work units (Directorate/Division/Desk/Regional Office/Special Branch Office/Branch Office) and individual employees using perspectives tailored to the perspective on Corporate KPI. Thus the process of distribution (*cascading*) of Corporate KPIs into KPIs Work Units and Individual employees require mapping of Corporate KPIs.



KPI ini berlaku untuk seluruh unit kerja dan setiap individu karyawan terdiri dari beberapa perspektif penilaian berdasarkan kebijakan dan strategi Perusahaan. Keseluruhan perspektif penilaian memiliki bobot persentase yang berbeda-beda disesuaikan dengan domain dan ruang lingkup setiap unit kerja. Adapun untuk total bobot seluruh komponen KPI yang akan dinilai berjumlah 100% dan nilai maksimal per komponen KPI adalah 130%.

These KPIs apply to the entire work unit and each individual employee consists of several assessment perspectives based on the Company's policies and strategies. All assessment perspective has different percentage weights tailored to the domain and scope of each work unit. For total of all KPI components weight to be assessed amounts to 100% and the maximum value per KPI component is 130%.

» Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

» Corporate Secretary Performance Assessment

Perspektif <i>Perspective</i>	Komponen/Sasaran Kerja <i>Components/Goals</i>	Indikator Kinerja <i>Performance Indicators</i>		Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievements</i>	Nilai <i>Value</i>
		Bobot <i>Weight</i>	Target KPI/ Ukuran <i>KPI Target/Size</i>			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d) x c
Financial	<i>Yield on Investment</i>	2	5,35%	6,60	123,36	2,47
	<i>Net Profit Margin</i>	2	13,12%	13,71	100,46	2,01
	Penerimaan Subrogasi <i>Subrogation Acceptance</i>	3	(9,60%)	5,02	252,29	3,90
	BOPO	3	32,50%	24,80	121,23	3,64
	Kontribusi Volume Syariah <i>Sharia Volume Contribution</i>	2	15%	18,22	121,47	2,43
Customer	<i>Time Accuracy in Claim Process</i>	3	80%	86,91	108,64	3,26
	Implementasi Klaim Online <i>Online Claims Implementation</i>	2	2	3	150	2,60
	Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i>	2	84	85,02	101,21	2,02
Internal Business Process	Inovasi Produk <i>Product Innovation</i>	2	3	3	100	2
	<i>Underwriting Yield</i>	2	38,84%	37,77	97,25	1,94
	Rasio Klaim <i>Claim Ratio</i>	2	61,91%	56,41	108,88	2,18
	Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) <i>Enterprise Resources Planning (ERP) Implementation</i>	2	100%	100	100	2
	Penerapan GCG <i>GCG implementation</i>	8	96	95,80	99,79	7,98
	Efektivitas Penyaluran dan Kolektibilitas PKBL <i>Effectiveness of Distribution and Collectibility of PKBL</i>	2			117,67	2,35
	Tindak lanjut temuan audit <i>Follow-up audit findings</i>	7	100%	100	100	7
Pemeriksaan Program Kerja Pemeriksaan Tahun 2020 <i>Audit Work Program in 2020</i>	8	36	40	111,11	8,89	

Perspektif Perspective	Komponen/Sasaran Kerja Components/Goals	Indikator Kinerja Performance Indicators		Realisasi Realization	Capaian Achievements	Nilai Value
		Bobot Weight	Target KPI/ Ukuran KPI Target/Size			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d) x c
	Usulan belanja modal tak berwujud: Penyusunan aplikasi Audit Management System (AMS) <i>Proposed intangible capital expenditure: Preparation of Audit Management System (AMS) application</i>	10	Desember	November	108,33	10,83
	Penyusunan aplikasi Monitoring Tindak Lanjut <i>Preparation of Follow-up Monitoring application</i>	8	Desember	November	108,33	8,67
Internal Business Process	Implementasi Fraud Control Plan <i>Implementation of Fraud Control Plan</i>	8	95%	84,50	88,95	7,12
	Pembuatan dashboard kinerja layanan fungsi SPI dan Tindak Lanjut (TL) GCG, KPKU <i>Creation of performance dashboard for SPI function services and Follow-up (TL) GCG, KPKU</i>	8			97,92	7,83
	Melakukan Surveillance Audit ISO <i>Conducting ISO Surveillance Audit</i>	8	November	Agustus	127,27	10,18
People Development	Pemenuhan Talent Perusahaan <i>Corporate Talent Fulfillment</i>	3	20%	27,59	137,95	3,90
	Produktifitas Pegawai <i>Employee Productivity</i>	3	360.000.000	390.000.000	108,33	3,23
	Nilai KPI <i>KPI values</i>	100				108,45
	Poin Penambah/Pengurang Nilai KPI <i>Points Enhancer/Reducer of KPI Value</i>					0

Hasil pengukuran kinerja Satuan Pengawas Intern (SPI) tahun 2020 sangat baik, hal ini terlihat dari pencapaian nilai KPI yang melebihi target yaitu 108,45%. Adapun program kerja strategis atau KPI yang telah mencapai target ataupun melebihi target adalah tindak lanjut temuan audit, pelaksanaan Program Kerja Pemeriksaan Tahun 2020, penyusunan aplikasi Audit Management System (AMS), penyusunan aplikasi Monitoring Tindak Lanjut, dan melakukan Surveillance Audit ISO.

The performance measurement result for Internal Audit Unit (SPI) in 2020 is very good, this can be seen from the achievement of KPI value that exceeds the target of 108.45%. The strategic work programs or KPIs that have reached the target or exceeded the target are follow-up audit findings, implementation of Audit Work Program in 2020, preparation of Audit Management System (AMS) applications, preparation of Follow-up Monitoring applications, and conducting ISO Audit Surveillance.

Namun, pada program kerja implementasi Fraud Control Plan dan pembuatan dashboard kinerja layanan fungsi SPI dan Tindak Lanjut (TL) GCG, KPKU masih belum mencapai target, namun tidak terlalu berdampak signifikan terhadap total nilai keseluruhan KPI yang masih diatas target.

However, the implementation of fraud control plan and the creation of performance dashboard for SPI function services and Follow-up (TL) GCG, KPKU still has not reached the target, but does not have a significant impact on total value of KPIs that are still above the target.



» Penilaian Kinerja Fungsi Manajemen Risiko

» Performance Assessment of Risk Management Functions

Perspektif Perspective	Komponen/Sasaran Kerja Components/Goals	Indikator Kinerja Performance Indicators		Realisasi Realization	Capaian Achievements	Nilai Value
		Bobot Weight	Target KPI/ Ukuran KPI Target/Size			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d) x c
Financial	Yield on Investment	2	5,35%	6,60	123,36	2,47
	Net Profit Margin	2	13,12%	13,18	100,46	2,01
	Penerimaan Subrogasi Subrogation Acceptance	2	(9,60%)	5,02	252,29	2,60
	BOPO	3	32,50%	25,60	121,23	3,64
	Kontribusi Volume Syariah Sharia Volume Contribution	2	15%	18,22	121,47	2,43
Customer	Time Accuracy in Claim Process	2	80%	86,91	108,64	2,17
	Implementasi Klaim Online Online Claims Implementation	2	2	3	150	2,60
	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	2	84	85,02	101,21	2,02
Internal Business Process	Inovasi Produk Product Innovation	2	3	3	100	2
	Underwriting Yield	2	38,84%	37,77	97,25	1,94
	Rasio Klaim Claim Ratio	2	61,91%	56,41	108,88	2,18
	Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) Enterprise Resources Planning (ERP) Implementation	2	100%	100	100	2
	Penerapan GCG GCG implementation	2	96	95,80	99,79	2
	Efektivitas Penyaluran dan Kolektibilitas PKBL Effectiveness of Distribution and Collectibility of PKBL	2			117,67	2,35
	Tindak lanjut temuan audit Follow-up audit findings	2	100%	100	100	2
	Tingkat kematangan Risk Management Level of Risk Management Maturity	8			100,13	8,01
	Belanja Modal Tak Berwujud: Pengembangan integrasi SIMR, BIA dan LEM Intangible Capital Expenditure: Development of SIMR, BIA and LEM integration	10	November	Oktober	109,09	10,91
	Evaluasi dan penyempurnaan aplikasi UMKM Layak modul perencanaan dan evaluasi usaha UMKM Evaluation and improvement of eligible MSME applications, planning modules and evaluation of MSMEs	8	Oktober		78,34	6,27

Perspektif <i>Perspective</i>	Komponen/Sasaran Kerja <i>Components/Goals</i>	Indikator Kinerja <i>Performance Indicators</i>		Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievements</i>	Nilai <i>Value</i>
		Bobot <i>Weight</i>	Target KPI/ Ukuran <i>KPI Target/Size</i>			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d) x c
Internal Business Process	Sistem Manajemen Anti Suap <i>Anti-Bribery Management System</i>	8	Agustus <i>August</i>	Agustus <i>August</i>	100	8
	Memberikan pelatihan bagi UMKM <i>Providing training for MSMEs</i>	8	450	539	119,78	9,58
	Meningkatkan jumlah UMKM binaan dan UMKM berperingkat <i>Increase the number of MSMEs partner and ranked MSMEs</i>	8	880	1.142	129,77	10,38
	Mengembangkan dashboard kinerja layanan untuk fungsi MR & PUKM <i>Develop service performance dashboard for MR & PUKM functions</i>	7	Desember <i>December</i>	November <i>November</i>	108,33	7,58
	Tindak lanjut GCG, KPKU, Audit <i>Follow-up of GCG, KPKU, Audit</i>	8	100%	83,33	83,33	,6,67
People Development	Pemenuhan Talent Perusahaan <i>Corporate Talent Fulfillment</i>	2	20%	27,59	137,95	2,60
	Produktifitas Pegawai <i>Employee Productivity</i>	2	360.000.000	390.000.00	108,33	2,17
Nilai KPI <i>KPI values</i>		100				106,58
Poin Penambah/Pengurang Nilai KPI <i>Points Enhancer/Reducer of KPI Value</i>						0

Program kerja strategis yang menjadi domain Divisi Manajemen Risiko dan PUKM periode tahun 2020 dapat tercapai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, seperti tingkat kematangan Risk Management dan Sistem Manajemen Anti Suap. Bahkan untuk program kerja pengembangan integrasi SIMR, BIA dan LEM; memberikan pelatihan bagi UMKM; meningkatkan jumlah UMKM binaan dan UMKM berperingkat; serta mengembangkan dashboard kinerja layanan untuk fungsi MR & PUKM dapat tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Sedangkan, untuk program kerja evaluasi dan penyempurnaan aplikasi UMKM Layak modul perencanaan dan evaluasi usaha UMKM; dan tindak lanjut GCG, KPKU, Audit masih berada dibawah target, namun tidak berdampak signifikan terhadap total nilai keseluruhan KPI yang masih diatas target yaitu sebesar 106,58%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencapaian kinerja Divisi Manajemen Risiko dan PUKM adalah baik.

Strategic work programs that become the domain from Risk Management Division and PUKM for period of 2020 can be achieved under set time targets, such as maturity level of Risk Management and Anti-Bribery Management System. Even for SIMR, BIA and LEM integration development work programs; provide training for MSMEs; increase the number of target MSMEs and ranked MSMEs; and develop Service performance dashboard for MR & PUKM function can be achieved beyond the set target.

Meanwhile, for Evaluation and improvement of eligible MSME applications, planning modules and evaluation of MSMEs; and follow-up GCG, KPKU, Audit is still below the target, but does not have a significant impact on total value of KPI that is still above the target of 106.58%. Thus it can be said that the performance achievement of Risk Management Division and PUKM is good.

» Penilaian Kinerja Fungsi Kepatuhan

» Performance Assessment of Compliance Function

Perspektif <i>Perspective</i>	Komponen/Sasaran Kerja <i>Components/Goals</i>	Indikator Kinerja <i>Performance Indicators</i>		Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievements</i>	Nilai <i>Value</i>
		Bobot <i>Weight</i>	Target KPI/ Ukuran <i>KPI Target/Size</i>			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d) x c
Financial	Yield on Investment	2	5,35%	6,60	123,36	2,47
	Net Profit Margin	2	13,12%	13,18	100,46	2,01
	Penerimaan Subrogasi <i>Subrogation Acceptance</i>	2	(9,60%)	5,02	252,29	2,60
	BOPO	2	32,50%	25,60	121,23	2,42
	Kontribusi Volume Syariah <i>Sharia Volume Contribution</i>	2	15%	18,22	121,47	2,43
Customer	Time Accuracy in Claim Process	2	80%	86,91	108,64	2,17
	Implementasi Klaim Online <i>Online Claims Implementation</i>	2	2	3	100	2
	Indeks Kepuasan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Index</i>	2	84	85,02	101,21	2,02
Internal Business Process	Inovasi Produk <i>Product Innovation</i>	2	3	3	100	2
	Underwriting Yield	2	38,84%	37,77	97,25	1,94
	Rasio Klaim <i>Claim Ratio</i>	2	61,91%	56,41%	108,88	2,18
	Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) <i>Enterprise Resources Planning (ERP) Implementation</i>	2	100%	100	100	2
	Penerapan GCG <i>GCG implementation</i>	3	96	95,80	99,79	2,99
	Efektivitas Penyaluran dan Kolektibilitas PKBL <i>Effectiveness of Distribution and Collectibility of PKBL</i>	2			117,67	2,35
	Tindak lanjut temuan audit <i>Follow-up audit findings</i>	2	100%	100	100	2
	Menerbitkan ketentuan peraturan perusahaan yang sudah diharmonisasi <i>Issuing harmonized company regulatory provisions</i>	10	Desember <i>December</i>	Desember <i>December</i>	100	10
	Sistem Manajemen Anti Suap <i>Anti-Bribery Management System</i>	10	Agustus <i>August</i>	Agustus <i>August</i>	100	10
	Belanja Modal Tak Berwujud: Pembuatan otomatisasi proses pembuatan PKS/sistem proses PKS terintegrasi <i>Intangible Capital Expenditure: Automation process of creating a Cooperation Agreement/integrated Cooperation Agreement process system</i>	10	Desember <i>December</i>	September <i>September</i>	125	12,50

Perspektif <i>Perspective</i>	Komponen/Sasaran Kerja <i>Components/Goals</i>	Indikator Kinerja <i>Performance Indicators</i>		Realisasi <i>Realization</i>	Capaian <i>Achievements</i>	Nilai <i>Value</i>
		Bobot <i>Weight</i>	Target KPI/ Ukuran <i>KPI Target/Size</i>			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (e/d) x c
Internal Business Process	Kampanye Perdir Gratifikasi <i>Campaign for Board of Directors Regulation on Gratification</i>	8			116,67	9,33
	Pembuatan Aplikasi Klinik Hukum <i>Develop of Legal Clinic Application</i>	10	November November	September September	118,18	11,82
	Pembuatan dashboard kinerja layanan untuk fungsi Hukum <i>Creation of service performance dashboards for Legal functions</i>	8	Desember December	Desember December	91,67	7,33
	Tindak lanjut GCG, KPKU, Audit <i>Follow-up of GCG, KPKU, Audit</i>	8	100%	100	100	8
People Development	Pemenuhan Talent Perusahaan <i>Corporate Talent Fulfillment</i>	2	20%	27,59	137,95	2,60
	Produktifitas Pegawai <i>Employee Productivity</i>	3	360.000.000	390.000.000	108,33	3,25
	Nilai KPI <i>KPI values</i>	100				109,01
	Poin Penambah/Pengurang Nilai KPI <i>Points Enhancer/Reducer of KPI Value</i>					0

Berdasarkan hasil dari masing-masing KPI, pencapaian kinerja Divisi Hukum dan Kepatuhan periode tahun 2020 terlihat baik. Dapat dilihat bahwa total nilai KPI melebihi target yaitu sebesar 109,01%. Secara keseluruhan, program-program kerja strategis yang menjadi domain Divisi Hukum dan Kepatuhan dapat dicapai sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, seperti menerbitkan ketentuan Perusahaan yang sudah diharmonisasi, sistem manajemen anti suap, serta tindak lanjut GCG, KPKU, dan Audit. Bahkan untuk program kerja pembuatan otomasi proses pembuatan PKS/sistem proses PKS terintegrasi, kampanye Peraturan Direksi tentang Gratifikasi, dan pembuatan aplikasi Klinik Hukum dapat tercapai melebihi target.

Untuk program kerja pembuatan dashboard kinerja layanan untuk fungsi hukum masih berada dibawah target, namun tidak terlalu berdampak signifikan terhadap total nilai keseluruhan KPI yang masih di atas target.

Based on the results of each KPI, the performance achievement of Legal and Compliance Division for the period 2020 looks good. It can be seen that total KPI value exceeds the target of 109.01%. Overall, strategic work programs that are domain for Legal and Compliance Division can be achieved in accordance with the set time targets, such as Issuing harmonized company regulatory provisions, anti-bribery management systems, as well as follow-up of GCG, KPKU, and Audit. Even for Automation process of creating a Cooperation Agreement/integrated Cooperation Agreement process system, Campaign for Board of Directors Regulation on Gratification, and Develop of Legal Clinic Application can be achieved beyond the target.

For Creation of service performance dashboards for Legal functions is still below the target, but does not significantly impact to total value of KPI that is still above the target.



TRANSPARANSI INFORMASI TENTANG DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Transparency of Information Related to The Board of Supervisors and Board of Directors



HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Working Relationship of the Board of Commissioners and Board of Directors

Terciptanya hubungan kerja yang baik diantara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi salah satu hal penting bagi Perusahaan agar masing-masing organ dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai fungsinya. Oleh karena itu, terdapat pembagian tugas dan fungsi Dewan Komisaris dan Direksi dalam hal pengambilan keputusan.

The creation of a good working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is one of the important things for the Company so that each organ can work effectively and efficiently in accordance with its functions. Therefore, there is a Segregation of duties and functions of the Board of Commissioners and Board of Directors in terms of decision making.

Board Manual Perusahaan mengatur secara khusus hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi. Secara khusus, Board Manual menguraikan perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, meliputi:

The Company's Board Manual specifically regulates the working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors. In particular, the Board Manual outlines the actions of Board of Directors that must obtain written approval from the Board of Commissioners, including:

- Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh RUPS.
- Menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati.
- Melepaskan aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun.
- Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan Keputusan.
- Collaborate with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, asset leases, Operate Cooperation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOwT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with a certain value or period of time stipulated by the GMS.
- Write-off of uncollectible loans and dead stock.
- Fixed assets disposal with economic value in general industries up to 5 (five) years.
- Establish an organizational structure at 1 (one) level under the Board of Directors.
- Within 30 (thirty) days of receipt of the application or explanation and complete documents from the Board of Directors, the Board of Commissioners shall provide a Decision.

Di samping itu, Board Manual juga menguraikan batasan perbuatan yang dapat dilakukan oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris dan persetujuan dari RUPS yaitu:

In addition, the Board Manual also outlines the limitations of actions of the Board of Directors after receive a written response from the Board of Commissioners and approval from the GMS, namely:

- Melakukan penyertaan modal dan pengurangan persentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
- Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.
- Conducting capital participation and reduction of the percentage of capital participation in other Companies that must be approved by the Shareholders of series A Dwiwarna.
- Establish subsidiaries and/or joint ventures.
- Release capital investments in subsidiaries and/or joint ventures.
- Merger, takeover, separation, and winding-up of subsidiaries and/or joint ventures.

- Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalist), kecuali pemberian penjaminan yang merupakan pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.
- Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, KSO, Bangun Guna Serah (BOT), Bangun Milik Serah (BOWT), Bangun Serah Guna (BTO) dan kerjasama lainnya dengan nilai atau jangka waktu melebihi penetapan RUPS.
- Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan.
- Melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap Perusahaan dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya lebih dari 5 (lima) tahun yang harus disetujui oleh Pemegang Saham seri A Dwiwarna.
- Menetapkan *blue print* organisasi Perusahaan.
- Menetapkan dan mengubah logo Perusahaan.
- Melakukan tindakan-tindakan lain dan tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
- Membentuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan yang dapat berdampak bagi Perusahaan.
- Pembebanan biaya Perusahaan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perusahaan.
- Pengusulan wakil Perusahaan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan RUPS.
- Melakukan investasi dan pembiayaan jangka panjang.
- Melakukan penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perusahaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pendirian anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan yang dilakukan dalam rangka mengikuti tender dan/atau untuk melaksanakan proyek-proyek yang diperoleh sepanjang diperlukan, tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan/data tambahan dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.
- *Binding the Company as an obligor (borg or avalist), except the provision of guarantees is conducted as the Company's business activities.*
- *Conduct collaboration with business entities or other parties in the form of license cooperation, management contracts, asset leases, Operate Cooperation (KSO), Build Operate Transfer (BOT), Build Own Transfer (BOWT), Build Transfer Operate (BTO) and other cooperation with a value or period of time exceeding the GMS resolutions.*
- *Written-off uncollectible loans can not be collected..*
- *The Company's fixed assets disposal with an economic value in general industries up to 5 (five) years that must be approved by the Shareholders of series A Dwiwarna.*
- *Determine the Company's organization blue print.*
- *Determine and change the Company's logo.*
- *Perform other actions and actions that have not been specified in the RKAP.*
- *Establish foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company and has an impact to the Company.*
- *The expense for foundations, organizations and/or associations either directly or indirectly related to the Company are recognized as the Company's fixed and routine.*
- *Proposal of the Company's representative to become a prospective member of the Board of Directors and Board of Commissioners for significant and/or strategic subsidiaries and/or joint ventures determined by the GMS.*
- *Put long-term investments and financing.*
- *Issue the Company's bonds and other bonds that are not contrary to the laws and regulations.*
- *Establishment of subsidiaries and/or joint ventures does not require approval of the GMS as long as to follow tenders and/or to carry out projects if deemed necessary.*
- *If within 30 (thirty) days of receipt of the application or additional explanation/data from the Board of Directors, and the Board of Commissioners does not provide a written response, then the GMS may decide without a written response from the Board of Commissioners.*



KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Diversity of Composition of the Board of Commissioners and Directors

Dunia usaha, khususnya pada bidang penjaminan selalu mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Terlebih bisnis ini merupakan salah satu sektor penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dengan target pasar Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi. Atas dasar tersebut, dibutuhkan beragam kompetensi dan keahlian serta pengalaman di level manajemen Perusahaan khususnya pada Dewan Komisaris maupun Direksi Perusahaan agar senantiasa dapat menjawab tantangan dunia usaha dengan kebijakan-kebijakan strategisnya.

Perusahaan menilai bahwa keberagaman komposisi sangat diperlukan, meskipun regulasi dan Peraturan Perundang-undangan terkait belum mengatur hal tersebut. Keberagaman Komposisi pada Dewan Komisaris dan Direksi yang terdiri dari kualifikasi akademik, keahlian, pengalaman serta *gender* dapat memberikan berbagai macam sudut pandang terkait strategi pengelolaan Perusahaan agar menjadi lebih baik dan berkualitas.

Oleh karena itu, pelaksanaan tata kelola perusahaan dirancang untuk dapat menciptakan iklim yang mendorong adanya partisipasi konkret seluruh pemangku kepentingan serta adanya keberagaman dalam susunan komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi. Keberagaman ini diwujudkan melalui pembentukan komposisi Dewan Komisaris maupun Direksi yang memenuhi berbagai aspek yang diperlukan baik dari segi kualifikasi akademis, keterampilan, usia serta atas dasar prinsip anti diskriminasi. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Perusahaan belum memiliki kebijakan yang secara spesifik mengatur keberagaman susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam Pedoman GCG yang dimiliki Perusahaan, disebutkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dipilih oleh Pemegang Saham melalui mekanisme yang diatur oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham, dengan fokus utama memiliki latar belakang pengalaman/pengetahuan di bidang penjaminan.

The business world, especially in the guarantee sector, is always experiencing a fairly dynamic development. Moreover, this business is one of the important sectors in driving the growth of the national economy with the target market of Small and Medium Enterprises and Cooperatives. On this basis, it requires a variety of competencies and expertise as well as experience at the level of the Company's management, especially the Board of Commissioners and Directors of the Company so that they can always answer the challenges of the business world with their strategic policies.

The Company considers that the diversity of compositions is very necessary, even though it has not been regulated in the regulations and related laws. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors which is meant here refers to the diversity in academic qualifications, expertise, experience, and gender, which can provide a variety of perspectives related to the Company's management strategy to become better in quality.

Therefore, the implementation of corporate governance is designed to create a climate that encourages concrete participation of all stakeholders and the diversity in the composition of the Board of Commissioners and Directors. This diversity is realized through the formation of a composition of the Board of Commissioners and Board of Directors that meet the various aspects needed both in terms of academic qualifications, skills, age, and on the basis of anti-discrimination principles. The following is the diversity of the composition of each member of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Diversity Policy of the Board of Commissioners and Board of Directors

The Company has not yet specifically policy that regulates the composition diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors. In the Company's GCG Guidelines, it is stated that the Board of Commissioners and Board of Directors are selected by the Shareholders through a mechanism regulated by the Minister of SOEs as the main shareholders, with requirement have a background of experience / knowledge in the guarantee sector.

Transparansi Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency on the Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors

Berikut disampaikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2020

The following is conveyed by the diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Warga Negara Nationality	Kualifikasi Akademik Academic Qualifications	Usia Age	Gender Gender
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>					
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/Independent</i>	Indonesia	Magister Kebijakan Ekonomi <i>Master of Economic Policy</i>	62	Laki-laki <i>Male</i>
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Indonesia	Magister Manajemen <i>Master of Management</i>	48	Laki-laki <i>Male</i>
Diah Natalisa	Komisaris <i>Commissioner</i>	Indonesia	Profesor dan Doktor Ilmu Ekonomi <i>Professor and Doctor of Economics</i>	49	Perempuan <i>Female</i>
Noor Ida Khomsiyati	Komisaris <i>Commissioner</i>	Indonesia	Magister Manajemen <i>Master of Management</i>	49	Perempuan <i>Female</i>
Ari Wahyuni	Komisaris <i>Commissioner</i>	Indonesia	Magister Manajemen <i>Master of Management</i>	54	Perempuan <i>Female</i>
Direksi <i>Board of Directors</i>					
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Utama <i>President Director</i>	Indonesia	Magister Manajemen bidang Akuntansi <i>Master of Management in Accounting</i>	51	Laki-laki <i>Male</i>
Amin Mas'udi*	Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business of Guarantee</i>	Indonesia	Magister Ekonomi Agribisnis <i>Master of Agribusiness Economics</i>	48	Laki-laki <i>Male</i>
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	Indonesia	Magister Ekonomi Manajemen <i>Master of Management Economics</i>	60	Laki-laki <i>Male</i>
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan <i>Director of Operations and Network</i>	Indonesia	Magister Manajemen <i>Master of Management</i>	49	Laki-laki <i>Male</i>
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	Indonesia	Magister Sains <i>Master of Science</i>	61	Laki-laki <i>Male</i>

*) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya digantikan oleh Suwarsito pada 22 Maret 2021.

*) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. He was replaced by Suwarsito on March 22, 2021.



HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment of GCG Implementation for Aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sebagaimana telah disampaikan di awal bab ini, Jamkrindo melakukan penilaian penerapan GCG mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana metode penilaian menggunakan Surat Sekretaris Kementerian BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.

Tentang hasil penilaian penerapan GCG, baik secara keseluruhan atau khusus untuk aspek Dewan Komisaris dan Direksi, dapat dilihat pada bagian "Hasil Tata Kelola: Evaluasi dan Pemantauan Penerapan Tata Kelola Perusahaan" dalam bab ini.

As stated at the beginning of this chapter, Jamkrindo conducted an assessment of the implementation of GCG referring to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, where the assessment method uses the Letter of the Secretary of the Ministry of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The assessment results of GCG implementation, either in its entirety or specifically for aspects of the Board of Commissioners and Board of Directors, can be seen in the section "Governance Results: Evaluation and Monitoring of Corporate Governance Implementation" in this chapter.



PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Assessment on the Performance of the Board of Commissioners and Board of Directors

Sebagai entitas usaha dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi pemegang saham, penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada berbagai perangkat penilaian dari Kementerian BUMN yang terangkum dalam Kontrak Manajemen atau Key Performance Indicator.

As a business entity in which the Government of the Republic of Indonesia becomes a shareholder, assessment on the performance of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors refers to various assessment devices from the Ministry of SOEs summarized in the Management Contract or Key Performance Indicator.

Penilaian terhadap Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian Dewan Komisaris mengacu kepada Key Performance Indicators (KPI) tahun 2020 yang telah disahkan melalui Keputusan Sirkuler Menteri BUMN selaku Pemegang Saham seri A No.S-1007/MBU/11/2020 dan Keputusan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Pemegang Saham seri B No.011/BPUI/11/2020 tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Penetapan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Jaminan Kredit Indonesia. Pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegiat dilakukan berdasarkan capaian Key Performance Indicators (KPI) yang mencakup aspek-aspek berikut:

1. Aspek Pengawasan dan Pengarahan, bobot 60%;
2. Aspek Pelaporan, bobot 30%;
3. Aspek Dinamis, bobot 10%.

Assessment on The Performance of The Board of Commissioners

The assessment for Board of Commissioners refers to the Key Performance Indicators (KPI) in 2020 that have been approved through Circular Decree of the Minister of SOEs as a Shareholder of series A No.S-1007/MBU/11/2020 and Decision of the President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as a Shareholder of series B No.011/BPUI/11/2020 dated November 16, 2020 concerning Approval of RKAP Revision PT Jaminan Kredit Indonesia for 2020. The collegial measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioner is carried out based on the achievements of Key Performance Indicators which cover the following aspects:

1. The Monitoring and Guidance Aspects, with a value of 60%;
2. The Reporting Aspects, with a valued of 30%;
3. The Dynamic Aspect, with a value of 10%.

Sedangkan pengukuran dan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual dilakukan dengan memperhatikan ketentuan unsur-unsur penilaian, adalah sebagai berikut:

1. Realisasi capaian total skor KPI Dewan Komisaris, bobot 60%; dan
2. Realisasi persentase kehadiran Dewan Komisaris (individual) dalam rapat, bobot 40%. Perhitungan bobot per jenis rapat, yaitu:
 - a. Rapat Gabungan, bobot 50%;
 - b. Rapat dengan Direktur Teknis, bobot 20%;
 - c. Rapat dengan Komite, bobot $15\% \times 2 = 30\%$.

Pengukuran kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara *self-assessment* untuk dievaluasi sebagai masukan dalam rangka meningkatkan kinerja Dewan Komisaris saat melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan kepada Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham, dalam bentuk Laporan Triwulanan Perkembangan Realisasi KPI dan Laporan Tahunan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

The individual measurement and assessment of the performance of the Board of Commissioner are carried out by taking into account the provisions of the evaluation elements, as follows:

1. The realization of the total score of the KPI Board of Commissioner with a value of 60%; and
2. The Realization of the percentage of attendance of the Board of Commissioners in the meeting valued at 40%. The calculation of the value per type of meeting are:
 - a. The Joint Meeting is valued at 50%;
 - b. The Meeting with Technical Director is valued at 20%
 - c. The Meeting with the Committee is valued at $15\% \times 2 = 30\%$.

The Performance Assessment of the Board of Commissioners is conducted by self-assessment basis to be evaluated as input in order to improve the Board of Commissioners performance when carrying out supervisory duties and providing advice to the Board of Directors. Furthermore, the results are submitted to the Ministry of SOEs as Shareholders, in the form of Quarterly Report on the Development of KPI Realization and Annual Report of supervisory duties of the Board of Commissioners.

Realisasi Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020

Realisasi Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2020

No.		KPI		Bobot Weight	Realisasi s.d TW IV Realisasi s.d TW IV		Bobot Weight
		Jumlah Total	Satuan Unit		Jumlah Total	Satuan Unit	
1	ASPEK PENGAWASAN DAN PENGARAHAN ASPECTS OF SUPERVISION AND DIRECTION			60			60
1	Rapat Internal Dewan Komisaris Internal Meeting of Board of Commissioners	24	Rapat Meeting	10,00	24	Rapat Meeting	10,00
2	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors	12	Rapat Meeting	10,00	12	Rapat Meeting	10,00
3	Rapat Dewan Komisaris dan Direktur Tertentu (isu strategis) Meeting of certain Board of Commissioners and Directors (strategic issues)	12	Rapat Meeting	7,50	12	Rapat Meeting	7,50
4	Rapat Pembahasan bersama (RPB) RKAP Tahun 2020 Joint Discussion Meeting (RPB) on RKAP year 2020	1	Rapat Meeting	7,50	1	Rapat Meeting	7,50
5	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan Tahun 2019 (Audited) Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) Approval of The Company's Annual Report and Financial Statements for 2019 (Audited)	1	Rapat Meeting	7,50	1	Rapat Meeting	7,50
6	Pemberian Saran dan Masukan kepada Direksi dalam Pengurusan Perusahaan Giving Advice and Input to the Board of Directors in The Company's Management	12	Dokumen Document	10,00	12	Dokumen Document	10,00
7	Evaluasi terhadap Auditor Eksternal Evaluation of External Auditors	1	Rapat Meeting	2,50	1	Rapat Meeting	2,50



No.		KPI		Bobot Weight	Realisasi s.d TW IV Realisasi s.d TW IV		Bobot Weight
		Jumlah Total	Satuan Unit		Jumlah Total	Satuan Unit	
8	Evaluasi terhadap Sistem Pengendalian Internal <i>Evaluation of Internal Control System</i>	1	Rapat Meeting	2,50	1	Rapat Meeting	2,50
9	Pengawasan terhadap Kinerja Anak Perusahaan <i>Supervision of Subsidiaries' Performance</i>	1	Rapat Meeting	2,50	1	Rapat Meeting	2,50
	Sub Jumlah I <i>Sub Total I</i>			60,00			60,00
II	ASPEK PELAPORAN <i>REPORTING ASPECTS</i>			30			30
1	Memberikan Tanggapan / Pendapat terhadap Hal-hal yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Rekomendasi Dewan Komisaris Sesuai Ketentuan dalam Anggaran Dasar atau Peraturan Lainnya <i>Providing Responses/Opinions on Matters Requiring Approval and/or Recommendations of the Board of Commissioners in Accordance with the Provisions in the Articles of Association or Other Regulations</i>	4	Dokumen Document	10,00	4	Dokumen Document	10,00
2	Menyusun Laporan Berkala Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (Triwulanan) Tahun 2020 <i>Preparing Periodic Report on Supervisory Duties of the Board of Commissioners (Quarterly) year 2020</i>	4	Dokumen Document	5,00	4	Dokumen Document	5,00
3	Menyusun Tanggapan atas Laporan Berkala Hasil Evaluasi atas Kinerja Perusahaan Tahun 2020 (Triwulanan) <i>Preparing Responses to Periodic Reports of Evaluation Results for The Company's Performance in 2020 (Quarterly)</i>	4	Dokumen Document	5,00	4	Dokumen Document	5,00
4	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris Tahun 2021 <i>Preparing the Working Plan and Budget of the Board of Commissioners in 2021</i>	1	Dokumen Document	5,00	1	Dokumen Document	5,00
5	Menyusun dan Mengusulkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2021 <i>Preparing and Proposing Indicators for Achievement of Performance of the Board of Commissioners in 2021</i>	1	Dokumen Document	5,00	1	Dokumen Document	5,00
	Sub Jumlah II <i>Sub Total II</i>			30,00			30,00
III	ASPEK DINAMIS <i>DYNAMIC ASPECTS</i>			10			10
1	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kantor Wilayah dan/atau Cabang <i>Monitoring and Evaluation of Regional and/or Branch Office Performance</i>	6	Kegiatan Activities	5,00	6	Kegiatan Activities	5,00
2	Seminar/Workshop dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris <i>Seminar/Workshop in order to Improve the Competence of Members of the Board of Commissioners and Organs of the Board of Commissioners</i>	4	Kegiatan Activities	5,00	4	Kegiatan Activities	5,00
	Sub Jumlah III <i>Sub Total III</i>			10,00			10,00
	Jumlah <i>Total</i>			100,00			100,00

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Penilaian atau evaluasi kinerja Direksi melekat pada *Key Performance Indicator* (KPI) Perusahaan, yang mengacu kepada Surat Kementerian BUMN No.S-08/S.MBU/2013 tanggal 16 Januari 2013 perihal Penyampaian Pedoman Penentuan KPI dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun yang melakukan penilaian adalah setiap unit kerja sesuai perpektif atau Indikator Kinerja.

Indikator untuk mengukur kinerja Direksi yang melekat pada penilaian KPI Perusahaan, terdiri dari 5 (Lima) Perspektif (Keuangan, Fokus Pelanggan dan Pasar, Efektivitas Produk dan Proses, Fokus Tenaga Kerja, Kepemimpinan, Tata Kelola dan Tanggung jawab Kemasyarakatan). Selain penilaian KPI, terdapat juga penilaian *Agent of Development* (AOD) dengan lingkup penilaian peningkatan kerja sama penjaminan Mekaar dengan PNM dan Peningkatan *Volume* Penjaminan Produk Kreasi Pegadaian, Pemingkatan dan Pendampingan UMKM & BUMDes, Peningkatan *Volume* Penjaminan di Wilayah Indonesia Timur, Penjaminan Pembiayaan Produktif Non Program, Penyerapan *Plafond* Penjaminan KUR.

Assessment on the Performance of the Board of Directors

The performance assessment or evaluation of the Board of Directors is integrated to the Company's *Key Performance Indicator* (KPI), which refers to the Ministry of SOEs Letter No.S-08/S.MBU/2013 dated January 16, 2013, concerning Submission of Guidelines for Determining KPIs and Assessment Criteria for Superior Performance in State-Owned Enterprises (SOEs). The assessors are each work unit in accordance with the perspective or Performance Indicator.

The indicators to measure the performance of the Board of Directors Integrated to the Company's KPI assessment consist of 5 (Five) Perspectives (Finance, Customer and Market Focus, Product and Process Effectiveness, Workforce Focus, Leadership, Governance, and Social Responsibility). In addition to KPI's assessment, there is also an *Agent of Development* (AOD) assessment with the scope of increasing Mekaar guarantee cooperation with PT PNM and Increasing the Volume of Guarantee for Produk Kreasi Pegadaian, Ranking and Assistance to MSMEs & Village-Owned Enterprises, Increasing Guarantee Volume in Eastern Indonesia, Guaranteed Non-Programming Financing, and Absorption of KUR Guarantee Limits.

Realisasi Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2020

Realization of Key Performance Indicator (KPI) of the Board of Directors in 2020

No.	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci Key Perspective/Performance Indicators	Satuan Unit	Formula Formula	RKAP REV 2020 RKAP REV 2020		Desember 2020 December 2020	
				Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Nilai Score
A	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Financial Economic and Social Value for Indonesia Financial			47,00			49,12
	Financial Financial			31,00			31,72
1	Net Profit Margin	%	Laba Setelah Pajak (EAT) Pendapatan IJP Bruto Earnings After Tax (EAT) Gross Guarantee Income	5,00	13,12%	13,71%	5,02
2	Penerimaan Subrogasi Subrogation Income	%	Kenaikan Penerimaan Subrogasi Increase in Subrogation Income	5,00	-9,60	5,02%	6,00
3	BOPO Operating Expenses to Operating Income	%	Biaya Usaha Pendapatan Usaha (IJP Bruto) Operating Expenses Gross Guarantee Income	6,00	32,50%	24,80%	7,20
4	Yield On Investment	%	Hasil Investasi Rata-rata Total Investasi Investment Returns Average of Total Investment	6,00	5,35%	6,60%	7,20



No.	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci Key Perspective/Performance Indicators	Satuan Unit	Formula Formula	RKAP REV 2020 RKAP REV 2020		Desember 2020 December 2020	
				Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Nilai Score
5	Time Accuracy in Claim Process	%	Klaim yang berhasil diputuskan dalam waktu 12 hari Claims made within 12 days	6,00	80,00%	86,91%	6,30
6	Penerapan GCG GCG Implementation	Skor Score	Hasil Assesment GCG (Internal)* GCG Assessment Results (Internal)*	3,00	96,00	0,00	0,00
Sosial Social				16,00		17,40	
7	Pemenuhan Target PKBL Fulfillment of PKBL Target	Skor Score	Penyaluran PKBL PKBL Distribution	6,00	86%	101,20%	6,30
8	Sinergi BUMN Synergy of SOEs	%	Peningkatan Volume Penjaminan Kredit dengan Bank BUMN Increasing the Volume of Credit Guarantee with State-Owned Banks	3,00	-9,1%	-5,8%	3,15
			Peningkatan Volume Penjaminan produk Kreasi Pegadaian Increase in Guarantee Volume of Pawnshop Creation Products	3,00	-40,4%	-37,5%	3,15
9	Penugasan Pemerintah Government Assignment	Rp IDR	IJP Bruto Penjaminan PEN Gross Guarantee Fee of PEN	4,00	Rp116,34 miliar IDR116.34 billion	Rp203,8 miliar IDR203.4 billion	4,80
B Business Model Innovation				19,00		19,47	
1	Inovasi Produk Product Innovation	Jumlah Amount	Penambahan Produk Baru (Inovasi Produk) New Product Additions (Product Innovation)	5,00	3	3	5,00
2	Implementasi Klaim Online Online Claims Implementation	Jumlah Amount	Implementasi Klaim Online Online Claims Implementation	8,00	2	3	8,40
3	Indeks Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction Index	Skor Score	Hasil Survey Independen Independent Survey Results	6,00	84	85,02	6,07
C Technology Leadership				13,00		13,14	
1	Implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) Enterprise Resources Planning (ERP) Implementation	%	Implementasi ERP Bidang Keuangan ERP Implementation in Finance Sector	4,00	100%	100%	4,00
2	Underwriting Yield	Jumlah Amount	Penjaminan Bersih Pendapatan IJP Bruto Net Guarantee Gross Guarantee Fee	4,00	38,84%	37,77%	3,89

No.	Perspektif/Indikator Kinerja Kunci Key Perspective/Performance Indicators	Satuan Unit	Formula Formula	RKAP REV 2020 RKAP REV 2020		Desember 2020 December 2020	
				Bobot Weight	Target Target	Realisasi Realization	Nilai Score
3	Claim Ratio	Jumlah Amount	Penjaminan Bersih Pendapatan IJP Bruto Net Guarantee Gross Guarantee Fee	4,00	61,91%	56,41%	5,25
D Peningkatan Investasi Increased Investment				6,00			6,15
1	Kontribusi Volume Syariah Sharia Volume Contribution	%	Kontribusi Volume Syariah Sesuai Target RKAP Sharia Volume Contribution in accordance with RKAP Target	3,00	15,00%	20,16%	3,15
2	Tindak Lanjut Temuan Audit Tindak Lanjut Temuan Audit	%	Progress Penyelesaian Completion Progress	3,00	100,00%	100,00%	3,00
E Pengembangan Talenta Talent Development				15,00			15,45
1	Pemenuhan Talent Perusahaan Corporate Talent Fulfillment	%	Pemenuhan Talent Perusahaan BOD - 1 BoD-1 Corporate Talent Fulfillment	5,00	20%	27,59%	5,25
2	Produktifitas Pegawai Employee Productivity	Rp Miliar IDR Billion	Net Profit Jumlah SDM Net Profit Total Employees	4,00	Rp0,36 Miliar IDR0.36 Billion	Rp0,39 Miliar IDR0.39 Billion	4,20
3	Pengesahan pembentukan Klaster/SubKlaster BUMN Institute Persetujuan untuk Program Ratification of establishment of clusters/sub-clusters of BUMN Institute Approvals for the Program	Waktu Time	Terselenggaranya soft launching IFG Corfu Soft launching of IFG Corfu	3,00	Desember 2020 December 2020	Desember 2020 December 2020	3,00
4	Pengembangan Talenta Suksesi Direksi dan Pengembangan Top Talent Muda (≤40 Tahun) Talent Development for Succession of Directors and Development of Young Top Talent (≤40 Years old)	Waktu Time	Terlaksananya program pengembangan talenta BOD dan talenta millennial Implementation of BOD talent development program and millennial talent	3,00	Desember 2020 December 2020	Desember 2020 December 2020	3,00
TOTAL BOBOT Total Weight				100,00			97,19

TATA KELOLA REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remuneration Governance for the Board of Commissioners and Board of Directors

Prosedur dan Mekanisme Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedures and Mechanisms for Proposal and Determination of Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Determination of remuneration for the Company's Board of Commissioners and Directors refers to the Ministry of SOE Regulation No.PER-01/MBU/05/2019, dated May 31, 2019, concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for determining the Income of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris, dengan membahas pertimbangan usulan, hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya. Dewan Komisaris dan Direksi mengusulkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS, dengan tetap memperhatikan Peraturan Menteri dan kemampuan Perusahaan, untuk kemudian ditetapkan dalam RUPS.

Remuneration of the Company's Board of Commissioners and Directors is proposed at the Board of Commissioners Meeting, with a discussion to consider the proposals, and the results of surveys with similar industries and other sectors. The Board of Commissioners and Board of Directors propose to shareholders through the GMS, while still paying attention to the Minister's Regulation and the Company's ability, then will be stipulated in the GMS.

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diusulkan dalam Rapat Dewan Komisaris

Remuneration of the Board of Commissioners and Directors of the Company is proposed at the Board of Commissioners Meeting

Faktor perhitungan atas usulan besaran remunerasi:

- Pertimbangan usulan yang ada
- Hasil survei dengan industri sejenis dan sektor lainnya
- Kemampuan Perusahaan

The calculating factor for the proposed amount of remuneration:

- *Consideration of existing proposals*
- *Survey Results with Similar Industries and Other Sectors*
- *Company's Capability*

Hasil usulan remunerasi dalam Rapat Dewan Komisaris diusulkan dalam RUPS

The results of the remuneration proposal at the Board of Commissioners Meeting are proposed in the GMS

RUPS menetapkan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi

The GMS stipulates the amount of remuneration for the Board of Commissioners and Directors

Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan dengan basis formula yang ditetapkan oleh Pemegang Saham serta telah melalui kajian oleh Dewan Komisaris melalui pendalaman yang dilakukan oleh Pemegang Saham. Keputusan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS Tahunan.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/05/2019, komponen penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari:

- Remunerasi Dewan Komisaris
 1. Honorarium
 2. Tunjangan
 3. Fasilitas
 4. Tantiem/Insentif Kinerja
 5. Pajak atas Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban masing-masing anggota Dewan Komisaris
- Remunerasi Direksi
 1. Gaji
 2. Tunjangan
 3. Fasilitas
 4. Tantiem/Insentif Kinerja
 5. Pajak atas Gaji, Tunjangan dan Fasilitas bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban Perusahaan. Sedangkan pajak atas Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi ditanggung dan menjadi beban masing-masing Direksi

Remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors is based on a formula determined by the Shareholders and has been through a review by the Board of Commissioners through deepening discussion conducted by the Shareholders. The decision on the determination of remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors shall be determined through the Annual GMS.

Remuneration Structure for the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Minister of Regulation No.PER-01/MBU/05/2019, the income component for the Board of Commissioners and Board of Directors consists of:

- *Remuneration of the Board of Commissioners*
 1. *Honorarium*
 2. *Allowances*
 3. *Facilities*
 4. *Tantiem/Performance Incentives*
 5. *Taxes on Honorariums, Allowances and Facilities for the Board of Commissioners are borne and become the Company's burden. While the tax on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners is borne and becomes the burden of each member of the Board of Commissioners*
- *Remuneration of the Board of Directors*
 1. *Salary*
 2. *Allowances*
 3. *Facilities*
 4. *Tantiem/Performance Incentives.*
 5. *Taxes on Salary, Allowances and Facilities for the Board of Directors are borne and become the Company's burden. While the tax on Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors is borne and becomes the burden of each member of the Board of Directors*



Struktur remunerasi dan komponennya bagi Dewan Komisaris dan Direksi disampaikan sebagai berikut:

The structure of remuneration and its components for the Board of Commissioners and Board of Directors are presented as follows:

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris <i>Remuneration Structure of the Board of Commissioners</i>	Struktur Remunerasi Direksi <i>Remuneration Structure of the Board of Directors</i>
<p>Honorarium Dewan Komisaris <i>Honorarium of the Board of Commissioners</i></p> <p>Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p><i>Is a fixed income in the form of money received every month because of its position as a member of the Company's Board of Commissioners, with the following provisions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » Perhitungan gaji Komisaris Utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama <i>Calculation of President Commissioner's salary of 45% of the President Director salaries</i> » Perhitungan gaji Komisaris sebesar 90% dari gaji Komisaris Utama <i>Calculation of Commissioner's salary of 90% of the President Commissioner salaries</i> 	<p>Gaji Direksi <i>Salary of the Board of Directors</i></p> <p>Adalah penghasilan tetap berupa uang yang diterima setiap bulan karena kedudukannya sebagai anggota Direksi Perusahaan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p><i>Is a fixed income in the form of money received every month because of its position as a member of the Company's Board of Directors, with the following provisions:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Seri A. <i>The President Director's salary shall be determined using internal guidelines set by the Minister of SOEs as the power of Shareholders of Series A.</i> » Perhitungan gaji Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari gaji Direktur Utama <i>Calculation of HR Director's salary amounting to 90% of the President Director salaries</i> » Perhitungan gaji Direktur lainnya sebesar 85% dari gaji Direktur Utama <i>Calculation of other Director's salary amounting to 85% of the President Director salaries</i>
<p>Tunjangan Dewan Komisaris <i>Allowances of the Board of Commissioners</i></p> <p>Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Komisaris selain Honorarium, yang dapat berupa:</p> <p><i>Is an income in the form of cash or that can be valued with cash which will be received at a certain time by members of the Board of Commissioners aside from Honorarium, which can be in the form of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. <i>Holiday Allowance, granted at maximum 1 (one) time of the fixed monthly income in each year.</i> » Tunjangan Transportasi, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya sebesar 20% dari perhitungan gaji. <i>Transportation Allowance, granted 1 (one) time in each month amounting to 20% of the salary calculation.</i> » Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari honorarium per tahun. <i>Pension Insurance Allowance, to be granted according to premium paid by the Company at the maximum of 25% of the annual honorarium.</i> 	<p>Tunjangan Direksi <i>Allowances of the Board of Directors</i></p> <p>Adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Direksi selain Gaji, yang dapat berupa:</p> <p><i>Is an income in the form of cash or that can be valued with cash which will be received at a certain time by members of the Board of Directors aside from Honorarium, which can be in the form of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> » Tunjangan Hari Raya, diberikan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap per bulan di setiap tahunnya. <i>Holiday Allowance, granted at maximum 1 (one) time of the fixed monthly income in each year.</i> » Tunjangan Perumahan, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya. <i>Housing Allowance, granted 1 (one) time every month.</i> » Tunjangan Operasional, diberikan 1 (satu) kali setiap bulannya. <i>Operational Allowance, granted 1 (one) time every month.</i> » Asuransi Purna Jabatan, diberikan dengan ketentuan premi yang ditanggung Perusahaan paling banyak 25% dari gaji per tahun. <i>Pension Insurance Allowance, to be granted according to premium paid by the Company at the maximum of 25% of the annual honorarium.</i>

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris *Remuneration Structure of the Board of Commissioners*

Fasilitas Dewan Komisaris

Facilities of the Board of Commissioners

Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

Is income in the form of facilities and/or benefit and/or guarantee used/ applied by members of the Board of Commissioners for the purpose of carrying out duties, authorizations, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:

- » Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/ penggantian biaya pengobatan.
Health facilities, which are given in the forms of health insurance or reimbursement of medical expenses.
- » Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
Legal Assistance facilities, which are given if required, in the event of any action/conduct for and on behalf of his/her position that is related to the Company.

Tantiem/Insentif Kinerja Dewan Komisaris

Tantiem/Performance Incentives of the Board of Commissioners

- » Tantiem adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Dewan Komisaris berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian *Key Performance Indicators* melebihi 100%.

Tantiem is income in the form of appreciation granted to the Board of Commissioners if the Company obtains profit and does not experience accumulated loss. The Company may provide Tantiem to members of the Board of Commissioners based on the GMS Resolution in the Annual Report ratification if the Realization of Key Performance Indicators Achievement exceeds 100%.

- » Insentif Kinerja adalah Penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris.
Performance Incentive is income in the form of appreciation granted to the Board of Commissioners
- » Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
Calculation of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Commissioners is as follows:
 - ✓ Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama sebesar 45% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama.
Calculation of Tantiem/Performance Incentive of The President Commissioner of 45% of Tantiem/Performance Incentive of the President Director.
 - ✓ Perhitungan Komisaris lainnya sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama.
Calculation of other Commissioners amounted to 90% of the Tantiem/Performance Incentives of the President Commissioner.

Struktur Remunerasi Direksi *Remuneration Structure of the Board of Directors*

Fasilitas Direksi

Facilities of the Board of Directors

Adalah penghasilan berupa sarana dan/atau kemanfaatan dan/atau penjaminan yang digunakan/dimanfaatkan oleh anggota Direksi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang dapat berupa:

Is income in the form of facilities and/or benefit and/or guarantee used/ applied by members of the Board of Directors for the purpose of carrying out duties, authorizations, obligations and responsibilities based on laws and regulations, which can be in the form of:

- » Fasilitas Kendaraan, diberikan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan dan operasional dengan spesifikasi dan standar sesuai Faktor Jabatan.
Transportation facility, granted for 1 (one) unit official vehicle including maintenance and operational cost with specification and standard according to the positional factor.
- » Fasilitas Kesehatan, diberikan dalam bentuk kepesertaan asuransi/ penggantian biaya pengobatan.
Health facilities, which are given in the forms of health insurance or reimbursement of medical expenses.
- » Fasilitas Bantuan Hukum, diberikan jika diperlukan, dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan Perusahaan.
Legal Assistance facilities, which are given if required, in the event of any action/conduct for and on behalf of his/her position that is related to the Company.

Tantiem/Insentif Kinerja Direksi

Tantiem/Performance Incentives of the Board of Directors

- » Tantiem, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi BUMN apabila memperoleh laba dan tidak mengalami akumulasi kerugian. Tantiem dapat diberikan sebagai tambahan berupa Penghargaan Jangka Panjang (Long Term Incentive/LTI). Perusahaan dapat memberikan Tantiem kepada anggota Direksi berdasarkan penetapan RUPS dalam pengesahan Laporan Tahunan apabila Realisasi Pencapaian *Key Performance Indicators* melebihi 100%.

Tantiem is income in the form of appreciation granted to the Board of Directors if the Company obtains profit and does not experience accumulated loss. Tantiem can be granted in addition to the Long Term Incentive (LTI). The Company may provide Tantiem to members of the Board of Directors based on the GMS Resolution in the Annual Report ratification if the Realization of Key Performance Indicators Achievement exceeds 100%.

- » Insentif Kinerja, yaitu penghasilan yang merupakan penghargaan yang diberikan kepada anggota Direksi apabila terjadi peningkatan kinerja walaupun masih mengalami kerugian atau akumulasi kerugian.
Performance Incentive is income in the form of appreciation granted to the Board of Directors if the Company experience work performance even though still experiencing loss or accumulated loss.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris <i>Remuneration Structure of the Board of Commissioners</i>	Struktur Remunerasi Direksi <i>Remuneration Structure of the Board of Directors</i>
<ul style="list-style-type: none"> Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll) <i>Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll)</i> 	<p>» Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi adalah sebagai berikut: <i>Calculation of Tantiem/Performance Incentives for the Board of Directors is as follows:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Seri A. <i>Tantiem/ Performance Incentive of the President Director is determined by using internal guidelines set by the Minister of SOEs as the power of Shareholders of Series A.</i> ✓ Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia sebesar 90% dari Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama. <i>Calculation of Tantiem/Performance Incentive of Human Resources Director of 90% of Tantiem/Performance Incentive of President Director.</i> ✓ Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja Direktur lainnya sebesar 85% Tantiem/Insentif Kinerja gaji Direktur Utama. <i>Calculation of Tantiem/Other Director Performance Incentives of 85% Tantiem/Performance Incentives of The President Director's salary.</i> <p>Tidak ada komponen lainnya (komponen yang dimaksud, seperti bonus non kinerja, opsi saham, dll) <i>No other components (components in question, such as non-performance bonuses, stock options, etc.)</i></p>

Kebijakan Dasar Terkait Indikator dan Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Penyusunan struktur dan besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan dan perundang-Undangan yang berlaku
- Kinerja Perusahaan
- Prestasi kerja Dewan Komisaris dan Direksi
- Remunerasi yang berlaku dalam industri sesuai dengan kegiatan usaha Perusahaan yang mempunyai jenis dan skala usaha yang sama dengan Perusahaan
- Regulasi lain yang terkait dengan remunerasi, misalnya Upah Minimum dan Undang-Undang Ketenagakerjaan

Basic Policy Regarding Indicator and Determination of Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

The establishment of remuneration structure and amount of the Board of Commissioners and Board of Directors must take into consideration of the following matters:

- Applicable laws and regulations
- Company Performance
- Work Achievement of the Board of Commissioners and Board of Directors
- Applicable Remuneration in the Industry according to Company's business activities having the same type and scale as the Company's business
- Other regulations related to remuneration, for instance Minimum Wages and Labor Law

Perhitungan Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi (Sesuai Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/05/2019)

Remuneration Amount of Board of Commissioners and Board of Directors
(In accordance with the Minister of SOEs Regulation No.PER-01/MBU/05/2019)

Direktur Utama <i>President Director</i>	100% (ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali) <i>90% of The President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentive</i>
Direktur bidang Sumber Daya Manusia <i>Director of HR</i>	Sebesar 90% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama <i>90% of The President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentive</i>

Direktur Lainnya <i>Other Directors</i>	:	Sebesar 85% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama <i>85% of The President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentive</i>
Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	:	Sebesar 45% dari Gaji/Tantiem/Insentif Kinerja Direktur Utama <i>45% of The President Director's Salary/Tantiem/Performance Incentive</i>
Komisaris Lainnya <i>Other Commissioner</i>	:	Sebesar 90% dari Honorarium/Tantiem/Insentif Kinerja Komisaris Utama <i>90% of The President Commissioner's Salary/Tantiem/Performance Incentive</i>

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020, Para Pemegang Saham menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan besaran Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan lainnya Tahun 2020 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Tantiem atas kinerja Tahun Buku 2019 bagi anggota Direksi dan Dewan Pengawas.

Based on the Annual GMS resolutions for Fiscal Year 2019 held on June 30, 2020, the Shareholders agreed to authorize and power to Shareholders of Series B to determine the amount of Salary/Honorarium along with other Facilities and Allowances in 2020 for members of the Board of Directors and Board of Commissioners and Tantiem for the performance of Fiscal Year 2019 for members of the Board of Directors and Board of Trustees.

Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tersebut, melalui Surat Direktur Utama BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.337/DIRUT/BPUI/VIII/2020 tanggal 6 Agustus 2020 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Jamkrindo, Pemegang Saham memutuskan gaji Direktur Utama sebesar Rp22.466.000.000,- yang akan menjadi acuan bagi perhitungan remunerasi Direksi lainnya serta Dewan Komisaris.

Following up on the GMS resolutions, through the Letter of the President Director of BPUI as Shareholders of Series B No.337/DIRUT/BPUI/VIII/2020 dated August 6, 2020 concerning Determination of Income for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Jamkrindo, the Shareholders decided the President Director's salary of IDR2,466,000,000,- which will be a reference for the calculation of remuneration of other Directors and Board of Commissioners.

Transparansi Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Transparent Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

Informasi jumlah nominal remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut

Information on details of remuneration nominal for The Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2020

Total Remuneration of the Board of Commissioners in 2020

Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	Periode Menjabat <i>Term of Office</i>	Perhitungan per Bulan <i>Monthly calculation</i>		Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan <i>Amount of Honorarium and Allowance per Month</i>	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun <i>Amount of Honorarium and Allowance for a year</i>	Tunjangan Hari Raya Keagamaan <i>Religious Holiday Allowance</i>	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 <i>Total Remuneration in 2020</i>
		Honorarium <i>Honorarium</i>	Tunjangan Transportasi <i>Transport Allowance</i>				
		(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)	(Rp/IDR)
Sri Mulyanto	Januari - Desember <i>January - December</i>	72.000.000	14.400.000	86.400.000	1.036.800.000	72.000.000	1.108.800.000
Noor Ida Khomsiyati	Januari - Desember <i>January - December</i>	64.800.000	12.960.000	77.760.000	933.120.000	64.800.000	997.920.000
Ari Wahyuni	Januari - Desember <i>January - December</i>	64.800.000	12.960.000	77.760.000	933.120.000	64.800.000	997.920.000
M. Muchlas Rowi	Januari - Desember <i>January - December</i>	64.800.000	12.960.000	77.760.000	933.120.000	64.800.000	997.920.000



Dewan Komisaris Board of Commissioners	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly calculation		Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Amount of Honorarium and Allowance per Month	Jumlah Honorarium dan Tunjangan Selama 1 Tahun Amount of Honorarium and Allowance for a year	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 Total Remuneration in 2020
		Honorarium Honorarium (Rp/IDR)	Tunjangan Transportasi Transport Allowance (Rp/IDR)				
Diah Natalisa	Januari - Desember January - December	64.800.000	12.960.000	77.760.000	933.120.000	64.800.000	997.920.000
Sub Jumlah (Rp) Sub Total (IDR)							5.100.480.000
Fasilitas Kesehatan (at cost) (Rp) Health facilities (at cost) (IDR)							859.327.616
Jumlah (Rp) Total (IDR)							

Jumlah Remunerasi Direksi Tahun 2020

Total Remuneration of the Board of Directors in 2020

Dewan Komisaris Board of Directors	Periode Menjabat Term of Office	Perhitungan per Bulan Monthly calculation		Jumlah Gaji dan Tunjangan per Bulan Amount of Salaries and Allowances per Month	Jumlah Gaji dan Tunjangan Selama 1 Tahun Amount of Salaries and Allowances for a year	Tantiem Tantiem	Tunjangan Hari Raya Keagamaan Religious Holiday Allowance	Asuransi Purna Jabatan Pension Insurance	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 Total Remuneration in 2020
		Gaji Salary (Rp/IDR)	Tunjangan Perumahan Housing Allowance (Rp/IDR)						
Putrama Wahyu Setyawan	November - Desember November - December	160.000.000	27.500.000	187.500.000	375.000.000	-		80.000.000	455.000.000
Kadar Wisnuwarman	Januari - Desember January - December	136.000.000	27.500.000	163.500.000	1.962.000.000	-		408.000.000	2.370.000.000
Sulis Usdoko	Januari - Desember January - December	144.000.000	27.500.000	171.500.000	2.058.000.000	-		432.000.000	2.490.000.000
I. Rusdonobanu	Januari - Desember January - December	136.000.000	27.500.000	163.500.000	1.962.000.000	-		408.000.000	2.370.000.000
Randi Anto	Januari - Oktober January - October	160.000.000	27.500.000	187.500.000	1.875.000.000			480.000.000	2.355.000.000
Amin Mas'udi	Januari - November January - November	136.000.000	27.500.000	163.500.000	1.798.500.000	-		408.000.000	2.206.500.000
Sub Jumlah (Rp) Sub Total (IDR)									12.246.500.000
Fasilitas Kendaraan (Rp) Transportation facility (IDR)									2.836.244.892
Fasilitas Kesehatan (at cost) (Rp) Health facilities (at cost) (IDR)									1.877.760.000
Jumlah (Rp) Total (IDR)									16.960.504.892

Jumlah remunerasi yang diberikan Jamkrindo kepada Dewan Komisaris dan Direksi di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Total remuneration of Jamkrindo's Board of Commissioners and Board of Directors in 2020 is as follows:

Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020

Total remuneration of Jamkrindo's Board of Commissioners and Board of Directors in 2020

	Jumlah (Rp) Total (IDR)
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris <i>Total remuneration of Board of Commissioners</i>	5.959.807.616
Jumlah Remunerasi Direksi <i>Total remuneration of Board of Directors</i>	16.960.504.892
Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2020 <i>Total remuneration of Board of Commissioners and Board of Directors in 2020</i>	22.920.312.508

Rasio Gaji

Salary Ratio

Informasi mengenai rasio gaji Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information on salary ratio of Board of Commissioners, Board of Directors, and Company employees is as follows:

Perbandingan Comparison	2020	2019	2018
Direktur Utama terhadap Direktur <i>President Director to Director</i>	1 : 1,1	1 : 1,1	1 : 1,1
Direktur Utama terhadap Komisaris Utama <i>President Director to President Commissioner</i>	1 : 2,1	1 : 2,1	1 : 2,2
Direktur Utama terhadap Komisaris <i>President Director to Commissioner</i>	1 : 2,4	1 : 2,4	1 : 2,4
Direktur Utama terhadap Karyawan tertinggi <i>President Director to Highest Employee</i>	1 : 3,1	1 : 5,5	1 : 5,6
Direktur Utama terhadap Karyawan terendah <i>President Director to Lowest Employee</i>	1 : 41,3	1 : 45,8	1 : 41,06
Karyawan tertinggi terhadap Karyawan terendah <i>Highest Employee to Lowest Employee</i>	1 : 13,2	1 : 8,2	1 : 7,32
Karyawan terendah terhadap Upah Minimum Regional <i>Lowest Employee to Regional Minimum Wages</i>	1 : 0,1	1 : 1,04	1 : 1,15

Yang dimaksud Karyawan tertinggi pada tabel di atas adalah Karyawan yang menduduki jabatan dengan penghasilan tetap (THP), sementara Karyawan terendah adalah Karyawan pelaksana dengan penghasilan (THP). Untuk perhitungan Upah Minimu Regional menggunakan wilayah DKI Jakarta.

The highest employee in the table above is the Employee who occupies a position with fixed income (THP), while the lowest Employee is the Staff who becomes operator with fixed income (THP). For the calculation of Regional Minimum Wage using DKI Jakarta area.



RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Meeting

Rapat Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat rutin sekali dalam setiap bulan, yaitu Rapat Internal Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Komite Audit, dan Komite Investasi dan Risiko Usaha serta Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi. Namun dalam hal dipandang penting, Dewan Komisaris juga melakukan rapat-rapat insidental, baik dengan komite-komite maupun dengan Direksi.

Di sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris menggelar 12 (dua belas) kali Rapat Internal Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali Rapat dengan Direksi. Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Dewan Komisaris dalam rapat.

Selain Rapat Rutin Bulanan (Internal dan mengundang Direksi) dan RPB/RUPS, selama tahun 2020 Dewan Komisaris juga telah menyelenggarakan 40 (empat puluh) kali Rapat Lain yang bersifat teknis (secara internal maupun dengan Direktur) serta dilaksanakan dalam rangka membahas permasalahan perusahaan secara spesifik dan lebih mendalam, antara lain:

Board of Commissioners Meeting

Board of Commissioners hold regular meetings once every month, which is Board of Commissioner's Internal Meeting. This meeting is attended by Audit Committee and Business Risk and Investment Committee. Board of Commissioners also holds a meeting with Directors. If deemed necessary/important, the Board of Commissioners also conducted incidental meetings, both with committees and with Directors.

Throughout 2020, Board of Commissioners held 12 (twelve) Board of Commissioner's Internal Meetings and 12 (twelve) meetings with Directors. The following is the minutes of the meeting and the level of attendance of the Board of Commissioners in the meeting.

In addition to the Monthly Regular Meeting (Internal and inviting the Board of Directors) and RPB /GMS, during 2020 the Board of Commissioners has also held 40 other meetings of a technical nature (internally and with the Director) and conducted in order to discuss the company's issues in a specific and more in-depth manner, among others:

Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris

Minutes of Internal Meeting of the Board of Commissioners

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
29 Januari 2020 January 29, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Desember 2019 (<i>unaudited</i>) <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in December 2019 (unaudited)</i> Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana Investasi oleh Perum Jamkrindo Tahun 2012 sampai dengan 2018 (BPKP) <i>Follow-up of The Audit Report of Certain Objectives for The Placement of Divestment Funds by Perum Jamkrindo year 2012 to 2018 (BPKP)</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Diah Natalisa Ari Wahyuni M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
26 Februari 2020 February 26, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Januari 2020 <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in January 2020</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Diah Natalisa Ari Wahyuni M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
7 April 2020 April 7, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Februari 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in February 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
6 Mei 2020 May 6, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in March 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
4 Juni 2020 June 4, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in April 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
23 Juni 2020 June 23, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Mei 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in May 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
22 Juli 2020 July 22, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Penyampaian Hasil Revisi RKAP 2020 Jamkrindo</i> <i>Submission of Revised Results of Jamkrindo's RKAP 2020</i> 2. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juni 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in June 2020</i> 3. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
27 Agustus 2020 August 27, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juli 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in July 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
18 September 2020 September 18, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Agustus 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in July 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
2 November 2020 November 2, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan September 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in September 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
30 November 2020 November 30, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Oktober 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in October 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>
21 Desember 2020 December 21, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan November 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in November 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Sri Mulyanto · Noor Ida Khomsiyati · Diah Natalisa · Ari Wahyuni · M Muchlas Rowi 	Seluruh Dewan Komisaris menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners attend the meeting</i>

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Internal Dewan Komisaris

Recapitulation and Attendance Level of Commissioners at the Board of Commissioners' Internal Meeting

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Wajib Rapat Total of Meeting Required	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Jumlah Ketidakhadiran Total Absences	% Kehadiran % Attendance
Sri Mulyanto Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/Independent</i>	12	12	-	100,00%
M. Muchlas Rowi Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Ari Wahyuni Komisaris <i>Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Noor Ida Khomsiyati Komisaris <i>Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Diah Natalisa Komisaris <i>Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Rata-Rata <i>Average</i>				100,00%

Risalah Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi

Minutes of Board of Commissioners' Meeting with Directors

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
29 Januari 2020 January 29, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Desember 2019 (unaudited)</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in December 2019 (unaudited)</i> 2. <i>Tindak Lanjut dari Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Penempatan Dana Investasi oleh Perum Jamkrindo Tahun 2012 sampai dengan 2018 (BPKP)</i> <i>Follow-up of The Audit Report of Certain Objectives for The Placement of Divestment Funds by Perum Jamkrindo year 2012 to 2018 (BPKP)</i> 3. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Randi Anto • Amin Masudi • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
26 Februari 2020 February 26, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Perum Jamkrindo Bulan Januari 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in January 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Randi Anto • Amin Masudi • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
7 April 2020 April 7, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Februari 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in February 2020;</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Randi Anto • Amin Masudi • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
6 Mei 2020 May 6, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Maret 2020 <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in March 2020</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Diah Natalisa Ari Wahyuni M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Randi Anto Amin Masudi Kadar Wisnuwarman Sulis Usdoko I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
4 Juni 2020 June 4, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan April 2020 <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in April 2020</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Diah Natalisa Ari Wahyuni M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Randi Anto Amin Masudi Kadar Wisnuwarman Sulis Usdoko I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
23 Juni 2020 June 23, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Mei 2020 <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in May 2020</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Diah Natalisa Ari Wahyuni M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Randi Anto Amin Masudi Kadar Wisnuwarman Sulis Usdoko I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
22 Juli 2020 July 22, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Hasil Revisi RKAP 2020 Jamkrindo <i>Submission of Revised Results of Jamkrindo's RKAP 2020</i> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juni 2020 <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in June 2020</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Diah Natalisa Ari Wahyuni M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Randi Anto Amin Masudi Kadar Wisnuwarman Sulis Usdoko I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
27 Agustus 2020 August 27, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Juli 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in July 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi Direksi: <i>Board of Directors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Randi Anto • Amin Masudi • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
18 September 2020 September 18, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Agustus 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in July 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi Direksi: <i>Board of Directors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Randi Anto • Amin Masudi • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
27 Oktober 2020 October 27, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan September 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in September 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi Direksi: <i>Board of Directors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Putrama W. S. • Amin Masudi • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>
30 November 2020 November 30, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan Oktober 2020</i> <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in October 2020</i> 2. <i>Lain-lain</i> <i>Others</i> 	Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Diah Natalisa • Ari Wahyuni • M Muchlas Rowi Direksi: <i>Board of Directors:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Putrama W. S. • Kadar Wisnuwarman • Sulis Usdoko • I Rusdonobanu 	Seluruh Dewan Komisaris dan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Commissioners and Board of Directors attend the meeting</i>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
22 Desember 2020 December 22, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja PT Jamkrindo Bulan November 2020 <i>Monitoring and Evaluation of Performance Achievement of Perum Jamkrindo in November 2020</i> Lain-lain <i>Others</i> 	<p>Dewan Komisaris: <i>Board of Commissioners:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Ari Wahyuni M Muchlas Rowi <p>Direksi: <i>Board of Directors:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Putrama W. S Kadar Wisnuwarman Sulis Usdoko I Rusdonobanu 	Komisaris Diah Natalisa tidak dapat menghadiri rapat disebabkan adanya penugasan lain <i>Commissioner Diah Natalisa was unable to attend the meeting due to other assignments</i>

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Recapitulation and Attendance Level of Commissioners and Directors at Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors

	Jumlah Wajib Rapat Total of Meeting Required	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Jumlah Ketidakhadiran Total Absences	% Kehadiran % Attendance
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>				
Sri Mulyanto Komisaris Utama/Independen <i>President Commissioner/Independent</i>	12	12	-	100,00%
M. Muchlas Rowi Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Ari Wahyuni Komisaris <i>Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Noor Ida Khomsiyati Komisaris <i>Commissioner</i>	12	12	-	100,00%
Diah Natalisa Komisaris <i>Commissioner</i>	12	10	2	83,00%
Direksi <i>Board of Director</i>				
Putrama Wahyu Setyawan Direktur Utama <i>President Director</i>	3	3	-	100,00%
Amin Mas'udi ** Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Business of Guarantee</i>	10	10	-	100,00%

	Jumlah Wajib Rapat <i>Total of Meeting Required</i>	Jumlah Kehadiran <i>Total Attendances</i>	Jumlah Ketidakhadiran <i>Total Absences</i>	% Kehadiran <i>% Attendance</i>
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	12	12	-	100,00%
Kadar Wisnuwarman Direktur Operasional dan Jaringan <i>Director of Operations and Network</i>	12	12	-	100,00%
I. Rusdonobanu Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	12	12	-	100,00%
Randi Anto * Direktur Utama <i>President Director</i>	9	9	-	100,00%
Rata-Rata <i>Average</i>				98,45%

*) Pada tanggal 26 Oktober 2020, Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama. Posisinya digantikan oleh Putrama Wahyu Setyawan.

**) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya untuk sementara di tahun 2020 dirangkap oleh Kadar Wisnuwarman.

*) On October 26, 2020, Randi Anto has no longer serves as President Director. He was replaced by Putrama Wahyu Setyawan

**) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. His position in 2020 is concurrently by Kadar Wisnuwarman for a while.

Rapat Direksi

Sebagaimana diatur dalam peraturan Direksi No.49/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Rapat Direksi Jamkrindo, ketentuan mengenai Rapat Direksi Jamkrindo adalah sebagai berikut:

- Jadwal Rapat
 - Direksi menyelenggarakan rapat sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit sekali dalam setiap bulan disesuaikan dengan rencana yang ditetapkan dalam Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
 - Rapat Direksi dapat diadakan di luar jadwal rutin jika dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi, dan/atau permintaan tertulis seorang atau lebih Dewan Komisaris dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
 - Rapat yang bersifat segera dan strategis dengan agenda hal-hal yang memerlukan pengambilan keputusan level Direksi.
- Tempat Pelaksanaan
Dilaksanakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan Direksi.
- Pimpinan Rapat
 - Rapat dipimpin oleh Direktur Utama.
 - Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh Direktur Utama.

Board of Directors Meeting

As stipulated in the Board of Directors Regulation No.49/Per-Dir/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines of Meeting Management for Jamkrindo's Board of Directors, the provisions regarding the Board of Directors Meeting of Jamkrindo are as follows:

- Meeting Schedule
 - Board of Directors holds meetings as needed, at least once a month in accordance with the defined plan in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).
 - Board of Director's meeting may be held outside of regular schedule if deemed necessary by one or more members of the Board of Directors, and/or written requests of one or more Board of Commissioners by stating the meeting material.
 - Board of Directors meeting is an immediate and strategic meeting, with an agenda that requires decision-making at Board of Directors level.
- Meeting Venue
Board of Director's Meeting may be held in the company's domicile or at the Company's operational business location or elsewhere in the territory of the Republic of Indonesia as determined by Board of Directors.
- Meeting Chairman
 - Board of Director's Meeting is chaired by President Director.
 - In the event that the President Director is Absent or unable to attend, Board of Director's meeting shall be chaired by an Acting President Director/ Director specifically appointed or authorized by President Director.



- c. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh dan diantara Anggota Direksi yang ada.
- d. Dalam hal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (c) tidak dilakukan, maka salah seorang Direksi yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perusahaan.
- e. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai Anggota Direksi lebih dari satu orang. Maka Direktur yang tertua dalam usia yang berwenang memimpin Rapat Direksi.

- c. *In the event that President Director does not make the appointment, then one of the Directors will be appointed by and among the existing Members of the Board of Directors.*
- d. *In the event that the appointment as referred to paragraph (c) is not made, then one of the Longest-serving Directors will be appointed as a chairman of Board of Directors' meeting;*
- e. *In the event that the longest-serving Directors are more than one person. Then the oldest Director by age will act as the Chairman of Board of Directors' meeting.*

Direksi mengadakan rapat rutin setiap sekali dalam setiap bulan, sebagaimana ketentuannya telah diatur dalam penjelasan di atas. Di sepanjang 2020, Direksi melaksanakan 27 kali Rapat Direksi. Di samping itu, Direksi menghadiri 12 kali Rapat dengan Dewan Komisaris. Tentang risalah Rapat Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada bagian pembahasan Rapat Dewan Komisaris.

Board of Directors holds regular meetings once a month, as stipulated in the above explanation. In 2020, Board of Directors held 27 Meetings. In addition, Board of Directors also attended 12 Meetings with Board of Commissioners. The minutes of Meeting for the Board of Commissioners and Board of Directors can be seen in the Board of Commissioners Meeting discussion.

Berikut disampaikan risalah rapat dan tingkat kehadiran Direksi dalam rapat.

The following is the minutes of meeting and Board of Director's attendance level in the meeting.

Risalah Rapat Direksi

Minutes of Director's Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Rabu, 8 Januari 2020 Wednesday, January 8, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Komite Penjaminan Jaminan Pembayaran Medium Term Note (MTN) PT Perikanan Nusantara (Persero) <i>Medium Term Note (MTN) Payment Guarantee Committee of PT Perikanan Nusantara Persero)</i> Komite Penjaminan Jaminan Pembayaran Medium Term Note (MTN) (PT Terregra Asia Energy) <i>Medium Term Note (MTN) Payment Guarantee Committee of PT Terregra Asia Energy</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Direksi <i>Board of Directors</i> Sekper <i>Corporate Secretary</i> Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis <i>Engineering and Business Administration Division</i> Divisi Klaim <i>Claims Division</i> Desk Subrogasi <i>Subrogation Desk</i> Divisi Manajemen Risiko dan PUKM <i>Risk Management and PUKM Division</i> Divisi Hukum dan Kepatuhan <i>Legal and Compliance Division</i> Project Management Officer <i>Project Management Officer</i> 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Kamis, 16 Januari 2020 Thursday, January 16, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pemaparan Rencana Kerjasama Penjaminan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non Subsidi Bank BTN <i>Presentation of Cooperation Plan for Home Ownership Loan Guarantee (KPR) Non-Subsidized Bank BTN</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Penunjang Bisnis 4. Divisi Manajemen Risiko & PUKM 5. Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis 6. Divisi Klaim 7. Desk Subrogasi 8. Divisi Hukum dan Kepatuhan 9. Project Management Officer <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Business Support Division 4. Risk Management and PUKM Division 5. Engineering and Business Administration Division 6. Claims Division 7. Subrogation Desk 8. Legal and Compliance Division 9. Project Management Officer 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>
Kamis, 30 Januari 2020. Thursday, January 30, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Asset and Liability Committee (ALCO) Desember 2019 <i>Asset and Liability Committee (ALCO) December 2019</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Perencanaan Strategis 4. Divisi Akuntansi 5. Divisi Bisnis 1 6. Divisi Bisnis 2 7. Divisi Bisnis 3 8. Desk Bisnis Penjaminan Syariah 9. Desk Penjaminan Sistem Resi Gudang 10. Divisi Klaim 11. Divisi Manajemen Risiko dan PUKM 12. Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis 13. Divisi Jaringan dan Layanan 14. Desk Subrogasi 15. Financial Advisor <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Strategic Planning Division 4. Accounting Division 5. Business Division 1 6. Business Division 2 7. Business Division 3 8. Sharia Assurance Business Desk 9. Warehouse Receipt System Guarantees Desk 10. Claims Division 11. Risk Management and PUKM Division 12. Engineering and Business Administration Division 13. Network and Services Division 14. Subrogation Desk 15. Financial Advisor 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Jumat, 14 Februari 2020 Friday, February 14, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Profil Risiko Korporat Tahun 2019 Corporate Risk Profile 2019	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekper Kepala SPI Seluruh Kepala Divisi Seluruh Kepala Desk <ol style="list-style-type: none"> Board of Directors Corporate Secretary Head of Internal Audit Unit All Division Heads All Desk Heads 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting
Senin, 17 Februari 2020 Monday, February 17, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Klaim dalam proses dan Klaim Kupra Claims in process and Kupra Claims	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Kadiv.Bisnis 1 Kadiv.Bisnis 2 Kadiv.Bisnis 3 SPI Kadiv.MR (Manajemen Resiko) Kadiv.Hukum & Kepatuhan Project Management Officer <ol style="list-style-type: none"> Board of Directors Head of Business Division 1 Head of Business Division 2 Head of Business Division 3 Internal Audit Unit Head of Risk Management Division Head of Legal & Compliance Division Project Management Officer 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting
Kamis, 5 Maret 2020 Thursday, March 5, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pembahasan Alternatif Penggantian Dokumen Klaim KUR Discussion on Alternative Replacement of KUR Claim Documents	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekper Kadiv. Klaim Kadiv. Bisnis 1 Kadiv MR & PUKM Kadiv. Hukum & Kepatuhan Kepala SPI Project Management Officer <ol style="list-style-type: none"> Board of Directors Corporate Secretary Head of Claims Division Head of Business Division 1 Head of Risk Management & PUKM Division Head of Legal & Compliance Division Head of Internal Audit Unit Project Management Officer 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting
Senin, 9 Maret 2020 Monday, March 9, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pembahasan SDM HR Discussion	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Kadiv. MSDM <ol style="list-style-type: none"> Board of Directors Head of HR Division 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Senin, 16 Maret 2020 Monday, March 16, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Komite Penilaian Kinerja Unit Kerja Committee for Performance Assessment of Work Units	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekretaris Perusahaan Div. Jaringan & Layanan Div. MSDM PMO Div. Perencanaan Strategis 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting
Jumat, 17 April 2020 Friday, April 17, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Updang Pelaksanaan WFH PSBB PT Jamkrindo 13-17 April 2020 Update on WFH implementation of PSBB PT Jamkrindo for April 13-17, 2020	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekretaris Perusahaan Div. MR PUKM Div. Jaringan & Layanan Div. MSDM Div. Teknologi Informasi 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting
Selasa, 28 April 2020 Tuesday, April 28, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pembahasan Penjaminan KUR Pasca Kepres No.12 tahun 2020 dalam Kaitan Menjawab Surat Direksi PT BRI (Persero) Tbk Discussion of KUR Guarantee after Presidential Decree No.12 of 2020 in Relation to Answering The Letter of The Board of Directors of PT BRI (Persero) Tbk	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekper Kadiv. Klaim Kadiv. Bisnis 1 Kadiv. Hukum & Kepatuhan Kadiv. Teknik Administrasi Bisnis 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
<p>Senin, 4 Mei 2020 Monday, May 4, 2020</p>	<p>Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building</p>	<p>Asset and Liability Commie (ALCO) Maret 2020 Asset and Liability Commie (ALCO) March 2020</p>	<p>1. Direksi 2. Sekretaris Perusahaan 3. Kadir. Perencanaan Strategis 4. Kadir. Akuntansi 5. Kadir. Bisnis 1 6. Kadir. Bisnis 2 7. Kadir. Bisnis 3 8. Kadesk. Penjaminan Bisnis Syariah 9. Kadesk. SRG 10. Kadir. Klaim 11. Kadir. Manajemen Risiko dan PUKM 12. Kadir. Teknik dan Administrasi Bisnis 13. Kadir. Jaringan dan Layanan 14. Kadesk. Subrogasi 15. Financial Advisor 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Strategic Planning Division 4. Head of Accounting Division 5. Head of Business Division 1 6. Head of Business Division 2 7. Head of Business Division 3 8. Head of Sharia Assurance Business Desk 9. Head of SRG Desk 10. Head of Claims Division 11. Head of Risk Management and PUKM Division 12. Head of Engineering and Business Administration Division 13. Head of Network and Services Division 14. Head of Subrogation Desk 15. Financial Advisor</p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting</p>
<p>Rabu, 6 Mei 2020 Wednesday, May 6, 2020</p>	<p>Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building</p>	<p>Laporan Permasalahan Unit Kerja Selindo dan Alternaf Solusi Problem Report on Selindo Work Unit and Alternaf Solution</p>	<p>1. Direksi 2. Sekretaris Perusahaan 3. Kadir. Manajemen Risiko & PUKM 4. Kadir. Jaringan & Layanan 5. Kadir. MSDM 6. Kadir. Umum 7. Kadir. Teknologi Informasi 8. Kadir. Keuangan 9. Perwakilan Kadir. Bisnis 10. Change Management Officer (CMO) 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Risk Management and PUKM Division 4. Head of Network and Services Division 5. Head of HR Division 6. Head of General Affair Division 7. Head of Information Technology Division 8. Head of Finance Division 9. Representative of Business Division Head 10. Change Management Officer (CMO)</p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting</p>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
<p>Jumat, 14 Mei 2020 Friday, May 14, 2020</p>	<p>Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building</p>	<p>Komite Penjaminan Pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang disalurkan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Exim Bank <i>Export Special Assignment Financing Guarantee Committee (PKE) distributed by Expor Indonesia Financing Institution (LPEI)/Exim Bank</i></p>	<p>1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv Penunjang Bisnis 4. Kadiv Klaim 5. Kadiv Teknik Administrasi Bisnis 6. Kadiv Manajemen Risiko & PUKM 7. Kepala Desk Subrogasi 8. Change Management Officer 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business Support Division 4. Head of Claims Division 5. Head of Engineering and Business Administration Division 6. Head of Risk Management and PUKM Division 7. Head of Subrogation Desk 8. Change Management Officer</p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>
<p>Kamis, 4 Juni 2020 Thursday, June 4, 2020</p>	<p>Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building</p>	<p>Komite Perjanjian Kerjasama Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/Jasa BPD Sulteng <i>Cooperation Agreement Committee with BPD Sulteng related to Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/Services</i></p>	<p>1. Direksi 2. Sekper 3. Kadiv Penunjang Bisnis 4. Kadiv Bisnis 2 5. Kadiv Bisnis 3 6. Kadiv Manajemen Risiko & PUKM 7. Kadiv Teknik Administrasi Bisnis Penjaminan 8. Kadiv Klaim 9. Kepala Desk Subrogasi 10. Change Management Officer 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business Support Division 4. Head of Business Division 2 5. Head of Business Division 3 6. Head of Risk Management and PUKM Division 7. Head of Engineering and Gurantee Business Administration Division 8. Head of Claims Division 9. Head of Subrogation Desk 10. Change Management Officer</p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
<p>Jumat, 11 Juni 2020 Friday, June 11, 2020</p>	<p>Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building</p>	<p>Pembahasan Rencana Kerjasama Penjaminan Kredit dengan Broker BRISMA <i>Discussion of Credit Guarantee Cooperation Plan with BRISMA Broker</i></p>	<p>1. Direksi 2. Sekper 3. Kadir Bisnis 2 4. Kadir Penunjang Bisnis 5. Kadir Teknik Administrasi Bisnis 6. Kadir Klaim 7. Kadir. Hukum dan Kepatuhan 8. Kadir. Manajemen Risiko & PUKM 9. Kepala Desk Subrogasi 10. Financial Advisor 11. Change Management Officer 1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Business Division 2 4. Head of Business Support Division 5. Head of Engineering and Business Administration Division 6. Head of Claims Division 7. Head of Legal and Compliance 8. Head of Risk Management and PUKM Division 9. Head of Subrogation Desk 10. Financial Advisor 11. Change Management Officer</p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
<p>Senin, 6 Juli 2020 Monday, July 6, 2020</p>	<p>Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building</p>	<p>Pembahasan Revisi RKAP 2020 PT Jamkrindo Discussion of the 2020 RKAP Revision of PT Jamkrindo</p>	<p>1. Direksi 2. Sekper 3. Kepala SPI 4. Kadiv Bisnis 1 5. Kadiv Bisnis 2 6. Kadiv Bisnis 3 7. Kadiv Penunjang Bisnis 8. Kadiv Teknik Administrasi Bisnis 9. Kadiv Klaim 10. Kadiv Jaringan & Layanan 11. Kadiv Teknologi Informasi 12. Kadiv Perencanaan Strategis 13. Kadiv Keuangan & Investasi 14. Kadiv Akuntansi 15. Kadiv. Umum 16. Kadiv MSDM 17. Kadiv. Hukum & Kepatuhan 18. Kadiv. MR & PUKM 19. Kepala Desk SRG 20. Kepala Desk Syariah 21. Kepala Desk Subrogasi 22. Financial Advisor 23. Change Management Advisor</p> <p>1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Head of Internal Audit Unit 4. Head of Business Division 1 5. Head of Business Division 2 6. Head of Business Division 3 7. Head of Business Support Division 8. Head of Engineering and Business Administration Division 9. Head of Claims Division 10. Head of Network and Services Division 11. Head of Information Technology Division 12. Head of Strategic Planning Division 13. Head of Finance & Investment Division 14. Head of Accounting 15. Head of General Affair Division 16. Head of HR Division 17. Head of Legal & Compliance Division 18. Head of Risk Management and PUKM Division 19. Head of SRG Desk 20. Head of Sharia Desk 21. Head of Subrogation Desk 22. Financial Advisor 23. Change Management Advisor</p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting</p>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Kamis, 30 Juli 2020 <i>Thursday, July 30, 2020</i>	Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i>	Komite Klaim Sinergi BUMN a.n PT Primissima <i>Committee on The Claim of SOEs Synergy on behalf of PT Primissima</i>	1. Direksi 2. Sekper 3. Kadir Bisnis 3 4. Kadir Hukum & Kepatuhan 5. Kadir MR & PUKM 6. Kantor Cabang Khusus Jakarta 7. Financial Advisor 8. Change Management Advisor 1. <i>Board of Directors</i> 2. <i>Corporate Secretary</i> 3. <i>Head of Business Division 3</i> 4. <i>Head of Legal & Compliance Division</i> 5. <i>Head of Risk Management and PUKM Division</i> 6. <i>Jakarta Special Branch Office</i> 7. <i>Financial Advisor</i> 8. <i>Change Management Advisor</i>	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>
Kamis, 6 Agustus 2020 <i>Thursday, August 6, 2020</i>	Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i>	Rapat Direksi terkait Culture AKHLAK dan Employee Engagement <i>Board of Directors Meeting related to Culture AKHLAK and Employee Engagement</i>	1. Direksi 2. Sekper/Kepala SPI/ Kepala Divisi/ Kepala Desk 3. Financial Advisor 4. Project Management Officer 1. <i>Board of Directors</i> 2. <i>Corporate Secretary/ Head of Internal Audit Unit/ Head of Division/ Head of Desk</i> 3. <i>Financial Advisor</i> 4. <i>Project Management Officer</i>	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>
Jumat, 28 Agustus 2020 <i>Friday, August 28, 2020</i>	Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i>	Rapat Pembahasan SOP Pemblokiran dan Pembukaan Blokir Klaim atas Penjaminan yang IJP nya di bayar Pemerintah <i>Discussion Meeting of SOP Blocking and Unblocking Claims on IJP Guarantees paid by the Government</i>	1. Direksi 2. Sekper 3. SPI 4. Kadir Penunjang Bisnis 5. Kadir Teknologi Informasi 6. Kadir Hukum & Kepatuhan 7. Kadir MR dan PUKM 8. Kadir Teknik dan Administrasi Bisnis 9. Financial Advisor 10. Change Management Advisor 1. <i>Board of Directors</i> 2. <i>Corporate Secretary</i> 3. <i>Internal Audit Unit</i> 4. <i>Head of Business Support Division</i> 5. <i>Head of Information Technology Division</i> 6. <i>Head of Legal & Compliance Division</i> 7. <i>Head of Risk Management and PUKM Division</i> 8. <i>Head of Engineering and Business Administration Division</i> 9. <i>Financial Advisor</i> 10. <i>Change Management Advisor</i>	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Selasa, 22 September 2020 Tuesday, September 22, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pemaparan Rencana Kerjasama Penjaminan Kupedes Rakyat Bank BRI <i>Presentation of The Cooperation Plan of Bank BRI People's Kupedes Guarantee</i>	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekper Kadiv Bisnis 2 Kadiv Penunjang Bisnis Kadiv Klaim Kadiv Hukum & Kepatuhan Kadiv MR dan PUKM Kadiv Teknik dan Administrasi Bisnis Desk Subrogasi Financial Advisor Change Management Advisor 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>
Kamis, 8 Oktober 2020 Thursday, October 8, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	<ol style="list-style-type: none"> Komite Keputusan Permohonan Penambahan Limit KBG PT Bank Mandiri (Persero), Tbk <i>Decision Committee for The Addition of Kbg Limit of PT Bank Mandiri (Persero), Tbk</i> Komite Usulan Tarif IJP khusus Restrukturisasi untuk Produk Super Mikro Mekaar dan Mekaar Plus akibat Dampak dari COVID-19 <i>Committee on Proposed IJP Tariffs specifically restructuring for Super Micro Mekaar and Mekaar Plus Products due to the Impact of COVID-19</i> Komite Usulan Perubahan Coverage Penjaminan Pembiayaan Piutang (Invoice Financing) PT Investree Radhika Jaya <i>Committee on Proposed Changes in Coverage of Receivables Financing (Invoice Financing) of PT Investree Radhika Jaya</i> Komite Usulan Rencana Kerjasama Penjaminan antara Jamkrindo, LPDB, dan Perinus <i>Committee for The Proposed Guarantee Cooperation Plan between Jamkrindo, LPDB, and Perinus</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Direksi Sekper Kadiv Bisnis 3 Kadiv Klaim Kadiv Teknik Administrasi Bisnis Penjaminan Kadiv MR & PUKM Kadiv Penunjang Bisnis KaDesk Subrogasi Financial Advisor Change Management Advisor Board of Directors Corporate Secretary Head of Business Division 3 Head of Claims Division Head of Engineering and Guarantee Business Administration Division Head of Risk Management and PUKM Division Head of Business Support Division Head of Subrogation Desk Financial Advisor Change Management Advisor 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i>



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Kamis, 15 Oktober 2020 <i>Thursday, October 15, 2020</i>	Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i>	<p>Presentasi Anak Perusahaan Holding Perasuransian dan Penjaminan: <i>Presentation of Subsidiaries of Insurance and Guarantee Holding:</i></p> <p>a. PT Grahaniaga Tatautama : Properti Management dan Marketing Agent untuk Aset yang Idle <i>PT Grahaniaga Tatautama: Property Management and Marketing Agent for Idle Assets</i></p> <p>b. PT Bahana Kapital Investa: Jasa Konsultan Keuangan <i>PT Bahana Kapital Investa: Financial Consulting Services</i></p> <p>c. PT Bahana Sekuritas : Investasi Retail <i>PT Bahana Sekuritas : Retail Investment</i></p>	<p>1. Direksi 2. Sekretaris Perusahaan 3. Kepala Divisi Umum 4. Kepala Divisi Keuangan dan Investasi 5. Financial Advisor 6. Change Management Advisor</p> <p>1. <i>Board of Directors</i> 2. <i>Corporate Secretary</i> 3. <i>Head of General Affair Division</i> 4. <i>Head of Finance & Investment Division</i> 5. <i>Financial Advisor</i> 6. <i>Change Management Advisor</i></p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Selasa, 10 November 2021 Tuesday, November 10, 2021	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pembahasan Phase Out Syariah Sharia Phase Out Discussion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi PT Jamkrindo 2. Direktur Operasional PT Penj.Jamkrindo Syariah 3. Sekper 4. Kepala SPI 5. Kadiv Keuangan & Investasi 6. Kadiv Klaim 7. Kadiv Teknik Administrasi & Bisnis Penjaminan 8. Kadiv TI 9. Kadiv Akuntansi 10. Kadiv Perencanaan Strategis 11. Kadiv Jaringan & Layanan 12. Kadiv MSDM 13. Kadiv Umum 14. Kadiv MR & PUKM 15. Kadiv Hukum & Kepatuhan 16. KaDesk Penj. Syariah 17. KaDesk Subrogasi 18. Kadiv Penunjang Bisnis PT Penj. Jamkrindo Syariah 19. Financial Advisor 20. Change Management Advisor <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors of PT Jamkrindo 2. Director of Operations of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 3. Corporate Secretary 4. Head of Internal Audit Unit 5. Head of Finance & Investment Division 6. Head of Claims Division 7. Head of Administration Engineering and Guarantee Business Division 8. Head of Information Technology Division 9. Head of Accounting 10. Head of Strategic Planning Division 11. Head of Network and Services Division 12. Head of HR Division 13. Head of General Affair Division 14. Head of Risk Management and PUKM Division 15. Head of Legal & Compliance Division 16. Head of Sharia Guarantee Desk 17. Head of Subrogation Desk 18. Head of Business Support Division of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 19. Financial Advisor 20. Change Management Advisor 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting



Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
Selasa, 1 Desember 2020 Tuesday, December 1, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Update Progress Persiapan Phase Out Syariah Update on Progress of Sharia Phase Out Preparation	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi PT Jamkrindo 2. Direktur Operasional PT Penj.Jamkrindo Syariah 3. Sekper 4. Kepala SPI 5. Kadiv Keuangan & Investasi 6. Kadiv Klaim 7. Kadiv Teknik Administrasi & Bisnis Penjaminan 8. Kadiv TI 9. Kadiv Akuntansi 10. Kadiv Perencanaan Strategis 11. Kadiv Jaringan & Layanan 12. Kadiv MSDM 13. Kadiv Umum 14. Kadiv MR & PUKM 15. Kadiv Hukum & Kepatuhan 16. KaDesk Penj. Syariah 17. KaDesk Subrogasi 18. Kadiv Penunjang Bisnis PT Penj. Jamkrindo Syariah 19. Financial Advisor 20. Change Management Advisor <ol style="list-style-type: none"> 1. Board of Directors of PT Jamkrindo 2. Director of Operations of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 3. Corporate Secretary 4. Head of Internal Audit Unit 5. Head of Finance & Investment Division 6. Head of Claims Division 7. Head of Administration Engineering and Guarantee Business Division 8. Head of Information Technology Division 9. Head of Accounting 10. Head of Strategic Planning Division 11. Head of Network and Services Division 12. Head of HR Division 13. Head of General Affair Division 14. Head of Risk Management and PUKM Division 15. Head of Legal & Compliance Division 16. Head of Sharia Guarantee Desk 17. Head of Subrogation Desk 18. Head of Business Support Division of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah 19. Financial Advisor 20. Change Management Advisor 	Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat All Board of Director attend the meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
<p>Selasa, 15 Desember 2020 <i>Tuesday, December 15, 2020</i></p>	<p>Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i></p>	<p>Pembahasan Evaluasi Kinerja KPI Unit Kerja Per November 2020 <i>Discussion on Performance Evaluation of Work Unit KPIs as of November 2020</i></p>	<p>1. Direksi PT Jamkrindo 2. Sekretaris Perusahaan 3. Kepala SPI 4. Kepala Divisi 5. Kepala Desk 6. Project Management Office <i>1. Board of Directors of PT Jamkrindo 2. Corporate Secretary 3. Head of Internal Audit Unit 4. Head of Division 5. Head of Desk 6. Project Management Officer</i></p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>
<p>Kamis, 17 Desember 2021 <i>Thursday, December 17, 2021</i></p>	<p>Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i></p>	<p>Update progres Enterprise Resource Planning (ERP) <i>Updates on Enterprise Resource Planning (ERP) progress</i></p>	<p>1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Penunjang Bisnis 4. Divisi Bisnis 1 5. Divisi Bisnis 2 6. Divisi Bisnis 3 7. Desk Syariah 8. Desk SRG 9. Divisi Akuntansi 10. Divisi Keuangan 11. Divisi TI 12. Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis 13. Divisi Klaim 14. Divisi Subrogasi 15. Project Management Officer <i>1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Business Support Division 4. Business Division 1 5. Business Division 2 6. Business Division 3 7. Sharia Desk 8. SRG Desk 9. Accounting Division 10. Finance Division 11. IT Division 12. Engineering and Business Administration Division 13. Claims Division 14. Subrogation Division 15. Project Management Officer</i></p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>
<p>Rabu, 30 Desember 2020 <i>Wednesday, December 30, 2020</i></p>	<p>Gedung Jamkrindo <i>Jamkrindo Building</i></p>	<p>Komite Perpanjangan Program Reasuransi KUR PT Jamkrindo 2021 <i>KUR Reinsurance Program Extension Committee of PT Jamkrindo 2021</i></p>	<p>1. Direksi 2. Sekper 3. Divisi Bisnis 1 4. Divisi MR & PUKM 5. Divisi TI 6. Divisi Klaim 7. Divisi Akuntansi <i>1. Board of Directors 2. Corporate Secretary 3. Business Division 1 4. Risk Management and PUKM Division 5. IT Division 6. Claims Division 7. Accounting Division</i></p>	<p>Seluruh Dewan Direksi menghadiri rapat <i>All Board of Director attend the meeting</i></p>



Rekapitulasi dan Tingkat Direksi dalam Rapat Direksi

Recapitulation and Attendance Level of Directors at the Board of Directors' Meeting

Direksi Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Total of Meeting Required	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Jumlah Ketidakhadiran Total Absences	% Kehadiran % Attendance
Putrama Wahyu Setyawan*				
Direktur Utama President Director	5	5	-	100,00%
Amin Mas'udi **				
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Business of Guarantee	22	22	-	100,00%
Sulis Usdoko				
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HR Management, General Affairs & Compliance	27	27	-	100,00%
Kadar Wisnuwarman				
Direktur Operasional dan Jaringan Director of Operations and Network	27	27	-	100,00%
I. Rusdonobanu				
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko Director of Finance, Investment and Risk Management	27	27	-	100,00%
Randi Anto *				
Direktur Utama President Director	22	22	-	100,00%
Rata-Rata Average				100,00%

*) Pada tanggal 26 Oktober 2020, Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama. Posisinya digantikan oleh Putrama Wahyu Setyawan.

**) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya untuk sementara di tahun 2020 dirangkap oleh Kadar Wisnuwarman.

*) On October 26, 2020, Randi Anto no longer serves as President Director. He was replaced by Putrama Wahyu Setyawan

**) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. His position in 2020 is concurrently by Kadar Wisnuwarman for a while.



PENGUNGKAPAN HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN/ATAU PENGENDALI

Disclosure of Affiliated Relationships Between Board of Directors, Board of Commissioners, and Majority and/or Controlling Shareholders

Informasi tentang Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali

Per 31 Desember 2020, Pemerintah Republik Indonesia merupakan Pemegang Saham utama sekaligus Pemegang Saham pengendali dengan total kepemilikan saham sebesar 100,00%, yaitu kepemilikan langsung berupa saham Seri A sebesar 0,0000001787% dan melalui PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) sebagai entitas induk holding Perusahaan sebesar 99,9999998213%. Pemerintah Republik Indonesia sekaligus menjadi entitas pemilik akhir Perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Persero (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara BUMN, dan Undang-undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara beserta Lembaran Negara Republik Indonesia; kuasa Pemegang Saham Utama/Pengendali Perusahaan adalah Kementerian BUMN.

Transparansi Hubungan Usaha dan Hubungan Afiliasi Antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham

Di bawah ini disajikan hubungan usaha dan hubungan afiliasi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham. Bentuk hubungan usaha termasuk diantaranya hutang-piutang, kerja sama bisnis, dsbnya; sementara bentuk hubungan afiliasi mencakup hubungan istimewa terutama yang disebabkan hubungan pertalian darah seperti suami/istri/anak/orang tua/saudara kandung/ipar, dsbnya.

Information on Main Shareholders and Controlling Shareholders

As of December 31, 2019, the Government of the Republic of Indonesia is still the the Company's main and controlling shareholder with total shareholding of 100.00%, namely direct ownership of Series A Shares of 0,0000001787% and through PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) as the Company's holding parent entity of 99.9999998213%. The Government of the Republic of Indonesia is also the ultimate owner entity of the Company.

In accordance with Government Regulation No. 41 of 2003 concerning The Delegation of Position, Duties and Authority of the Minister of Finance to Limited Corporation (Persero), Public Corporation (PERUM) and Service Corporation (PERJAN) to the Minister of State-Owned Enterprises and Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and State Gazette of the Republic of Indonesia; the power of the Main Shareholder/Controlling Company is the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs).

Transparency of Business and Affiliations Relationships Between The Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders

Below are presented business and affiliations relationships between the Board of Commissioners, Board of Directors, and Shareholders. Forms of business relationships include receivables, business cooperation, and so on; while the form of affiliate relationship includes special relationships mainly caused by blood relations such as husband/wife/child/parents/siblings/brother-in-law, and so on.



	Hubungan Afiliasi dengan Affiliate Relationships With		
	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Utama/Pengendali Majority Shareholders / Controllers
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>			
Sri Mulyanto	x	x	x
Noor Ida Khomsiyati	x	x	✓
Diah Natalisa	x	x	✓
Ari Wahyuni (Komisaris)	x	x	✓
M. Muchlas Rowi	x	x	x
Direksi <i>Board of Director</i>			
Putrama Wahyu Setyawan	x	x	x
Randi Anto*	x	x	x
Amin Mas'udi*	x	x	x
Kadar Wisnuwarman	x	x	x
Sulis Usdoko	x	x	x
I. Rusdonobanu	x	x	x

✓ = ada / x = tidak ada
✓ = has relationship / x = has no relationship

*) Pada tanggal 26 Oktober 2020, Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama. Posisinya digantikan oleh Putrama Wahyu Setyawan.

**) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya untuk sementara di tahun 2020 dirangkap oleh Kadar Wisnuwarman.

*) On October 26, 2020, Randi Anto has no longer serves as President Director. He was replaced by Putrama Wahyu Setyawan

**) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. His position in 2020 is concurrently by Kadar Wisnuwarman for a while.

Adanya hubungan afiliasi antara sebagian Dewan Komisaris dengan Pemerintah Indonesia selaku Pemegang Saham Utama/Pengendali muncul dari jabatan yang diemban dalam Kementerian, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Having an affiliate relationship between some of the Board of Commissioners and the Government of Indonesia as the Main/Controlling Shareholder arises from the position held in the Ministry, as described below.

Transparansi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi

Transparency of Concurrent Positions of the Board of Commissioners and Board of Directors

Hubungan kepengurusan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada perusahaan lain di luar Jamkrindo periode tahun 2020 sebagai berikut.

The management relationship of members of the Board of Commissioners and Board of Directors in other companies outside Jamkrindo for the period 2020 is as follows,

	Kepengurusan pada Perusahaan Lain/Jabatan Lainnya Management in Other Companies/Other Positions		
	Sebagai Anggota Dewan Komisaris As Board of Commissioners	Sebagai Anggota Direksi As Board of Directors	Jabatan Lainnya Other Positions
Dewan Komisaris Board of Commissioner			
Sri Mulyanto	x	x	x
Noor Ida Khomsiyati	x	x	✓
Diah Natalisa	x	x	✓
Ari Wahyuni	x	x	✓
M. Muchlas Rowi	✓	x	✓
Direksi Board of Director			
Putrama Wahyu Setyawan	x	x	x
Randi Anto*	x	x	x
Amin Mas'udi*	x	x	x
Kadar Wisnuwarman	x	x	x
Sulis Usdoko	x	x	x
I. Rusdonobanu	x	x	x

✓ = ada / x = tidak ada
✓ = has relationship / x = has no relationship

*) Pada tanggal 26 Oktober 2020, Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama. Posisinya digantikan oleh Putrama Wahyu Setyawan.

**) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya untuk sementara di tahun 2020 dirangkap oleh Kadar Wisnuwarman.

*) On October 26, 2020, Randi Anto has no longer serves as President Director. He was replaced by Putrama Wahyu Setyawan

**) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. His position in 2020 is concurrently by Kadar Wisnuwarman for a while.

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi di luar Perusahaan adalah sebagai berikut: *The concurrent positions of the Board of Commissioners and Board of Directors outside the Company are as follows:*

Nama dan Jabatan Name and Position	Jabatan pada Perusahaan Lain Position in Other Company
Diah Natalisa Komisaris / Commissioner	Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016-sekarang) Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016-present)
Noor Ida Khomsiyati Komisaris / Commissioner	Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN Republik Indonesia (2014-sekarang) Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present)
Ari Wahyuni Komisaris / Commissioner	Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2018-sekarang) Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2018 - present)
M. Muchlas Rowi Komisaris Independen / Independent Commissioner	<ul style="list-style-type: none"> Pimpinan Umum Monday Media Group (2015-sekarang) Managing Director of Monday Media Group (2015-present) Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang) Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014-present)



Rangkap jabatan yang dimiliki oleh Dewan Komisaris, baik rangkap jabatan sebagai Komisaris di perusahaan lain, maupun jabatan pada institusi negara, tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

The concurrent positions held by the Board of Commissioners, either as Commissioners in other companies, as well as positions in state institutions, do not violate the applicable laws and regulations.

Transparansi Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan dan perusahaan lainnya senantiasa diungkapkan secara berkala melalui daftar kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut disampaikan transparansi kepemilikan saham Perusahaan oleh Dewan Komisaris dan Direksi, dan kepemilikan saham perusahaan lain di atas 5% oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang dapat menimbulkan potensi benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Transparency of Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

Share ownership of members of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company and other companies are regularly disclosed through a share ownership register of members of Board of Commissioners and Board of Directors. The following is transparent information on Company's shares ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors, and shares ownership by the Company's Board of Commissioners and Board of Directors in other companies which are more than 5% and may potentially cause conflict interest in decision making.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2021

Share Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2020

	Kepemilikan Saham Share Ownership	
	Jamkrindo	Perusahaan Lain > 5% Other Company > 5%
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioner</i>		
Sri Mulyanto	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Diah Natalisa	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Noor Ida Khomsiyati	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Ari Wahyuni	Nihil / Nil	Nihil / Nil
M. Muchlas Rowi	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Direksi <i>Board of Director</i>		
Putrama Wahyu Setyawan*	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Randi Anto*	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Amin Mas'udi*	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Kadar Wisnuwarman	Nihil / Nil	Nihil / Nil
Sulis Usdoko	Nihil / Nil	Nihil / Nil
I. Rusdonobanu	Nihil / Nil	Nihil / Nil

*) Pada tanggal 26 Oktober 2020, Randi Anto tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama. Posisinya digantikan oleh Putrama Wahyu Setyawan.

**) Amin Mas'udi tidak lagi menjabat sejak 7 November 2020. Posisinya untuk sementara di tahun 2020 dirangkap oleh Kadar Wisnuwarman.

*) On October 26, 2020, Randi Anto has no longer serves as President Director. He was replaced by Putrama Wahyu Setyawan

**) Amin Mas'udi has not served as a Board of Directors since November 7, 2020. His position in 2020 is concurrently by Kadar Wisnuwarman for a while.



ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Supporting Organs of The Board of Commissioners

Keberadaan Komite-komite di bawah Dewan Komisaris sebagai organ pendukung dalam Tata Kelola Perusahaan merupakan wujud implementasi ketentuan dan *best practices* terkait pelaksanaan prinsip GCG sehingga dapat mendorong efektifitas fungsi pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris.

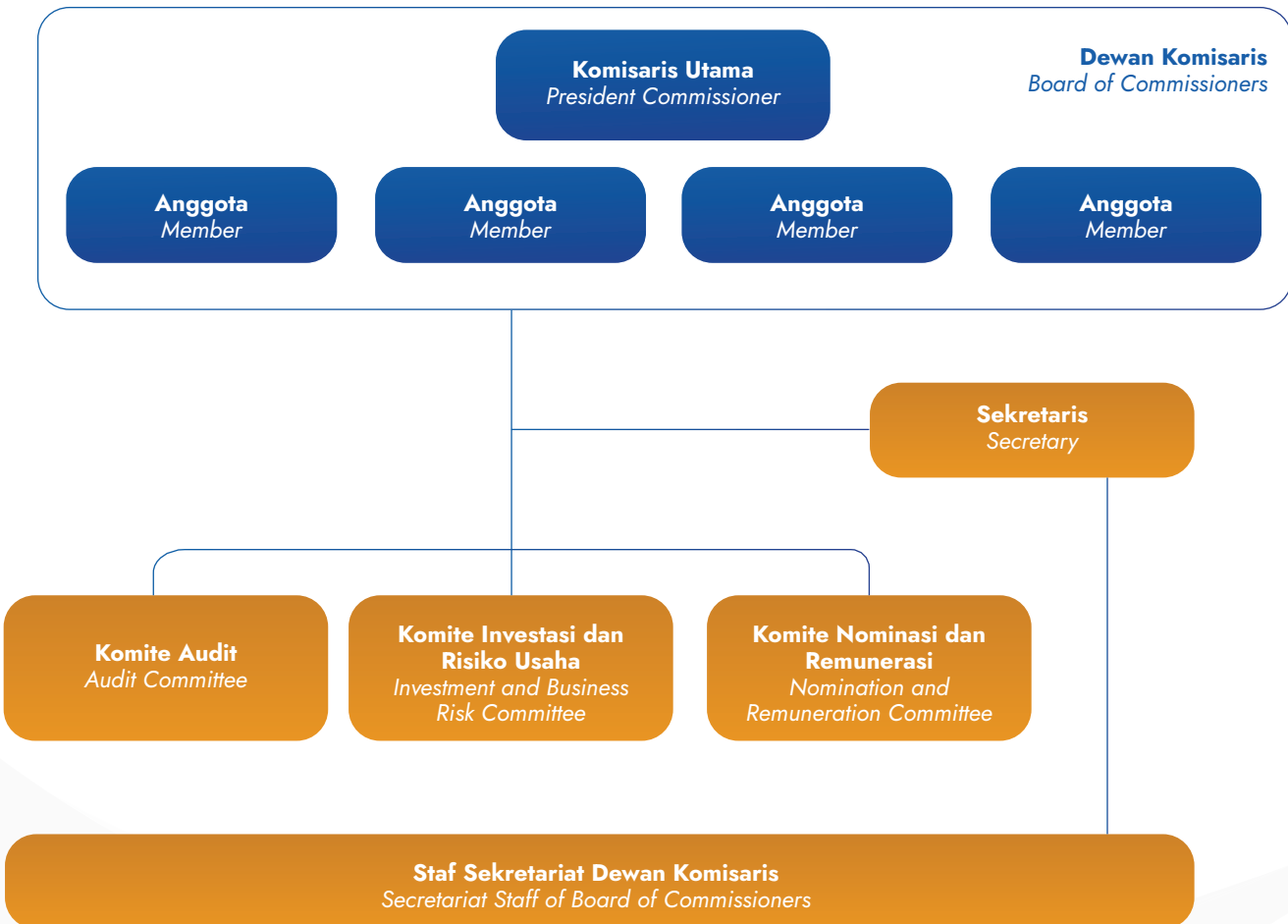
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan, pemberian saran serta rekomendasi, Dewan Komisaris perusahaan dibantu oleh 2 (dua) komite dan 1 (satu) organ pendukung, yaitu: Komite Audit serta Komite Investasi dan Risiko Usaha, serta Sekretaris Dewan Komisaris. Keberadaan organ-organ pendukung Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta bertujuan untuk menyempurnakan implementasi prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan operasional Perusahaan.

The existence of committees under the Board of Commissioners as supporting organs in Corporate Governance is a manifestation of the provisions and best practices related to the implementation of GCG principles so as to encourage the effectiveness of supervisory and advisory functions of the Board of Commissioners.

In carrying out the duties and responsibilities of supervision, giving advice and recommendations, the Company's Board of Commissioners is assisted by 2 (two) committees and 1 (one) supporting organ, namely: Audit Committee, Investment and Business Risk Committee, and Secretary of Board of Commissioners. The existence of supporting organs of the Board of Commissioners has been in accordance with the prevailing provisions and aims to improve the implementation of GCG principles in the Company's operational activities.

Struktur Organisasi Dewan Komisaris PT Jamkrindo

Organizational Structure of Board of Commissioners of PT Jamkrindo





SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Secretary of Board of Commissioners

Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang berfungsi melaksanakan kegiatan protokoler dan kesekretariatan Perusahaan.

To assist the implementation of its duties, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of Board of Commissioners who conducts the Company's Protocol and Secretariat activities.

Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Pelaksanaan kegiatan tugas Sekretaris Dewan Komisaris mengacu pada Permen BUMN No.PER-12/MBU/2012 Pasal 4, yang meliputi:

- i. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris
- ii. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar Perusahaan
- iii. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya
- iv. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris
- v. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris
- vi. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris

The Duties of Secretary of Board of Commissioners

The implementation of the duties of the Secretary of Board of Commissioners refers to the Minister of SOEs Regulation No.PER-12/MBU/2012 Article 4, which includes:

- i. Preparation of meetings, which include the briefing sheet for Board of Commissioners;*
- ii. Minutes writing of the Board of Commissioners meeting in accordance with the provisions of the Company's articles of association;*
- iii. Administration of the Board of Commissioners documents regarding incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;*
- iv. Arrangement of the Draft of the Work Plan and Budget of the Board of Commissioners;*
- v. Arrangement the Draft of the Board of Commissioners Reports;*
- vi. Execution of other duties from the Board of Commissioners*

Selain melaksanakan tugas di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lain berupa:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundangundangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta
3. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain

In addition to carrying out the above tasks, the Secretary of Board of Commissioners, as the head of the Secretariat, carries out other duties in the form of:

- 1. Ensuring that the Board of Commissioners complies with laws and regulations and applies the principles of GCG;*
- 2. Providing information needed by the Board of Commissioners periodically and/or at any time when requested;*
- 3. Coordinating Committee members, if needed, in order to facilitate the Board of Commissioners duties;*
- 4. Acting as a Liaison Officer of the Board of Commissioners with other parties.*

Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2017 tanggal 1 November 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia sebagaimana diperbaharui melalui Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrindo No.KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Kembali Sekretaris Dewan Komisaris PT Jamkrindo, Pejabat Sekretaris Dewan Komisaris dipercayakan kepada Alvin Nur Widjajanti.

The Secretary of Board of Commissioners

The Secretary of Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. Based on the Board of Trustees Decree No.KEP-05/DK-JAMKRINDO/X/2017 dated November 1, 2017 concerning Dismissal and Appointment of the Secretary of Board of Trustees at Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia as updated through the Decision of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo No.KEP-05/DK JAMKRINDO/X/2020 dated October 27, 2020 concerning Reappointment of the Secretary of Board of Commissioners of PT Jamkrindo, The Secretary of Board of Commissioners was entrusted to Alvin Nur Widjajanti.

Alvin Nur Widjajanti

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of Board of Commissioners

27 Oktober 2020 - 26 Oktober 2021, Periode ke-2
October 27, 2020 - October 26, 2021, 2nd Period

61
Tahun
Years Old

Jakarta
5 November / November 5
1959

Domisili / Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan / Education

Sarjana (S1) Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta (1995)
Pasca Sarjana (S2) Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1997)
Bachelor of Engineering majoring in Civil Engineering from Trisakti University, Jakarta (1995)
Master of Management, Gadjah Mada University, Yogyakarta (1997)

Riwayat Jabatan / Professional History

Telah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris pada beberapa BUMN, di antaranya PT Taman Wisata Candi BP dan RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Sejak 2015 menjabat sebagai Kepala Subbidang Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan I, Kementerian BUMN
He has served as Secretary of Board of Commissioners in several SOEs, including PT Taman Wisata Candi BP and RB (2003-2013), PT Perikanan Nusantara (2008-2013), PT Asuransi Jiwasraya (2013-2017). Since 2015 he has served as the Head of the Financial Services Subdivision, Survey Services, and Consultant I, Ministry of SOEs

Kebijakan Remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Seketaris Dewan Komisaris terdiri dari:

- Honorarium maksimal sebesar 15% dari Gaji Direktur Utama Perusahaan.
- Fasilitas.
- Tunjangan.
- Tantiem.

Berikut disampaikan transparansi remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2020.

Remuneration Policy for Secretary of Board of Commissioners

Under the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/ Board of Supervisor of State-Owned Enterprises, the revenue component for the Board of Commissioner's Secretary consists of:

- Honorarium maximum of 15% of the Company's President Director Salaries.
- Facilities.
- Allowances.
- Tantiem.

The following is transparency of remuneration for the Board of Commissioner's Secretary in 2020.

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Remuneration for Secretary of Board of Commissioners

Nama Name	Honorarium per Bulan Monthly Honorarium (Rp/IDR)	Tunjangan Transporatsi Transport Allowance (Rp/IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowance per Month (Rp/IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowance for a Year (Rp/IDR)	Tantiem Tantiem (Rp/IDR)	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 Total Remuneration in 2020 (Rp/IDR)
Alvin Nur Widjajanti	24.000.000	1.300.000	25.300.000	303.600.000	-	303.600.000



KOMITE AUDIT

Audit Committee

Pembentukan Komite Audit serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN; dan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan BUMN.

Komite Audit senantiasa menjalankan tugasnya secara independen dalam membantu Dewan Komisaris memantau kinerja Unit Audit Internal serta Auditor Eksternal yang ditunjuk. Oleh karena itu, Komite Audit diberikan kewenangan untuk membangun hubungan dengan kedua institusi tersebut dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Hasil pengawasan berupa temuan maupun rekomendasi dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris dalam hal pengambilan keputusan.

Struktur, Keanggotaan, Integritas dan Keahlian, dan Independensi Komite Audit

Struktur, keanggotaan, dan tugas Komite Audit Jamkrindo diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Komite Audit dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris, dan jumlah anggota Komite Audit yang berasal dari luar Dewan Komisaris adalah sebanyak 2 (dua) orang. Anggota Komite Audit memiliki integritas yang baik dan mempunyai pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan. Selain itu, anggota Komite Audit Jamkrindo mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan serta memahami industri bisnis Jamkrindo. Anggota Komite Audit juga tidak mempunyai potensi benturan kepentingan dengan Jamkrindo.

Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

The establishment of Audit Committee and the implementation of its duties and responsibilities are based on Government Regulation No.45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of SOEs; and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/Board of Trustees of SOEs.

The Audit Committee always carries out its duties independently in helping the Supervisory Board monitor the performance of the Internal Audit Unit and the appointed External Auditors. Therefore, the Audit Committee is given the authority to build relationships with the two institutions and submit reports to the Supervisory Board. The results of supervision, in the form of findings and recommendations, can be taken into consideration by the Supervisory Board in terms of decision making.

Structure, Membership, Integrity, Expertise, and Independence of the Audit Committee

The structure, membership, and duties of the Audit Committee of Perum Jamkrindo are regulated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

The Audit Committee is chaired by a chairman who is a member of the Board of Commissioner, and the number of members of the Audit Committee from outside the Board of Commissioners is as many as 2 (two) people. The Audit Committee members have good integrity and have sufficient work experience in the field of supervision/inspection. In addition, the Audit Committee member of Jamkrindo must have an accounting or financial education background and understands Jamkrindo's line of business. The Audit Committee members also must not have a potential conflict of interest with Jamkrindo.

Term of Office

The term of office of an Audit Committee member who is not a member of the Company's Supervisory Board is 3 (three) years and can be extended 1 (one) time for 2 (two) years of office, without reducing the rights of the Supervisory Board to terminate it at any time.

Susunan dan Profil Anggota Komite Audit

Composition and Profile of Audit Committee Members

Di tahun 2020 terdapat perubahan susunan Komite Audit, dengan kronologi sebagai berikut.

In 2020 there is a change in the composition of Audit Committee, with the following chronology.

Kronologi Perubahan Susunan Komite Audit Tahun 2020

Chronology of Changes in The Composition of Audit Committee in 2020

Periode 1 Januari - 1 Oktober 2020 Period of January 1, - October 1, 2020	Periode 1 Oktober - 31 Desember 2020 Period of October 1 - December 31, 2020	Keterangan Description
Sri Mulyanto Ketua Chairman	Sri Mulyanto Ketua Chairman	-
Noor Ida Khomsiyati Anggota Member	Noor Ida Khomsiyati Anggota Member	-
Dody Heriawan Priatmoko Anggota Member	Dody Heriawan Priatmoko Anggota Member	Pada 27 Oktober 2020, masa tugas Dody Heriawan Priatmoko dalam Komite Audit Perusahaan diperpanjang. On October 27, 2020, Dody Heriawan Priatmoko's tenure in the Company's Audit Committee was extended.
	Fahrul Ismaeni Anggota Member	Fahrul Ismaeni diangkat menjadi Anggota Komite Audit pada tanggal 1 Oktober 2020 Fahrul Ismaeni was appointed as a Member of the Audit Committee on October 1, 2020

Dengan demikian, susunan Komite Audit di akhir tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Thus, the composition of Audit Committee at the end of 2020 can be seen below.

Susunan Komite Audit Jamkrindo per 31 Desember 2020

Composition of Jamkrindo Audit Committee As of December 31, 2020

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Terms of Office	Periode Jabatan Period
Ketua/Komisaris Utama/Independent Chairman/President Commissioner / Independent	Sri Mulyanto	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-02/DP-JAMKRINDO/1/2018 tanggal 31 Januari 2018 Jo. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Board of Trustees Decree No.KEP-02/DP-JAMKRINDO/1/2018 dated January 31, 2018 Jo. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 dated September 5, 2018	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following his term as Board of Commissioners	
Anggota/Komisaris Member/ Commissioners	Noor Ida Khomsiyati	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 Board of Trustees Decree No.KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 dated September 5, 2018	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following her term as Board of Commissioners	

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Terms of Office	Periode Jabatan Period
Anggota Member	Dody Heriawan Priatmoko	Surat Keputusan Dewan Komisaris KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 <i>Board of Commissioners Decree No. KEP-06/DK-JAMKRINDO/X/2020 dated October 27, 2020</i>	27 Oktober 2020 - 26 Oktober 2020 <i>October 27, 2020 - October 26, 2022</i>	Ke-2 <i>2nd</i>
Anggota Member	Fahrul Ismaeni	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP-04/DK-JAMKRINDO/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020 <i>Board of Commissioners Decree No. KEP-04/DK-JAMKRINDO/X/2020 dated October 1, 2020</i>	1 Oktober 2020 - 30 September 2023 <i>October 1, 2020 - September 30, 2023</i>	Ke-1 <i>1st</i>

Sri Mulyanto

Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Profil Ketua Komite Audit Sri Mulyanto dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of The Chairman of Audit Committee Sri Mulyanto can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Chapter of Company Profile.

Noor Ida Khomsiyati

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Profil anggota Komite Audit Noor Ida Khomsiyati dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of The Member of Audit Committee Noor Ida Khomsiyati can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Chapter of Company Profile.

Dody Heriawan Priatmoko

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

27 Oktober 2020 - 26 Oktober 2022, Periode ke-2
October 27, 2020 - October 26, 2022, 2nd Period

38
Tahun
Years Old

Pemalang
15 April / April 15
1982

Domisili / Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan / Education

Sarjana (S1) Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Diponegoro, Semarang (2004)
Bachelor of Economics majoring in Accounting from Diponegoro University, Semarang (2004)

Riwayat Jabatan / Professional History

Pernah bekerja di Grup Astra (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) dan sejak tahun 2009 menjadi pegawai Kementerian BUMN, di mana sejak tahun 2015 hingga kini menjabat Kepala Subbidang Pendayagunaan Portofolio Kepemilikan Negara Minoritas I pada Kedeputusan Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, serta Ketua Pokja 3 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kementerian BUMN (2017-sekarang). Beberapa pengalaman penugasan di BUMN yaitu Staf Sekretariat Dewan Pengawas (2011-2014) dan Sekretaris Dewan Pengawas (2014-2017) di Perum Perhutani.

He worked in the Astra Group (2004-2008), PT Unilever Indonesia Tbk (2008-2009) and since 2009 has been an employee of the Ministry of SOEs, where he has served as Head of The Utilization Subdivision of Minority I State Ownership Portfolio in the Deputy for Business Restructuring and Development, as well as a Chairperson of the Working Group 3 of Procurement Service Units (ULP) of the Ministry of SOEs (2017-present). Some of the assignment which has been taken in SOEs are as a Supervisory Board Secretariat Staff (2011-2014) and as a Secretary of the Supervisory Board (2014-2017) at Perum Perhutani.

Sertifikasi / Certification

CA (Chartered Accountant) (2004)

Fahrul Ismaeni

Anggota Komite Audit

Member of Audit Committee

1 Oktober 2020 - 30 September 2023, Periode ke-1
October 1, 2020 - September 30, 2023, 1st Period

40
Tahun
Years Old

Surabaya
22 Mei / May 22
1980

Domisili / Domicile

Tangerang, Banten, Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia

Pendidikan / Education

Sarjana (S1) Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia (2003)
Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Bung Karno, Jakarta (2012)
Magister (S2) Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2006)
Bachelor of Financial Management from University of Indonesia (2003)
Bachelor of Law from Bung Karno University, Jakarta (2012)
Master of Business Law, University of Indonesia, (2006)

Riwayat Jabatan / Professional History

Tahun 2014-2020 pernah menjabat sebagai Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite GCG, dan Komite Audit PT Wijaya Karya (Persero). Sedangkan tahun 2012-2013 menjadi Komite Risiko Bisnis dan GCG PT Angkasa Pura I. Sejak Februari 2020, Fahrul juga menjabat sebagai Human Resource Manager Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
He served as Nomination and Remuneration Committee, GCG Committee, and Audit Committee of PT Wijaya Karya (Persero) in 2014-2020. Meanwhile, in 2012-2013 became the Business Risk Committee and GCG of PT Angkasa Pura I. Since February 2020, Fahrul also served as Human Resource Manager of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia.

Sertifikasi / Certification

Certification in Audit Committee Practices, Certified Legal Auditor, Certified Liquidator Indonesia, dan Certified Government Procurement Expert.

Piagam Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit berpedoman pada Piagam Komite Audit yang telah diperbarui melalui pengesahan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Desember 2020. Piagam ini mengatur beberapa hal, diantaranya adalah:

- Latar belakang pembentukan Komite Audit, visi dan misi serta maksud dan tujuan Komite Audit.
- Pembentukan, organisasi dan masa jabatan Komite Audit, mencakup hal-hal tentang pembentukan, organisasi, struktur organisasi, keanggotaan dan persyaratan keanggotaan, ketentuan masa jabatan, dan evaluasi Komite Audit.
- Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Audit, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, kode etik kerahasiaan, serta pertanggungjawaban Komite Audit.
- Rapat, pelaporan dan anggaran Komite Audit, mencakup hal-hal tentang rapat, pelaporan, dan anggaran Komite Audit.

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit Perusahaan bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris dalam memastikan efektivitas Sistem Pengendalian Intern dan efektivitas pelaksanaan Tugas Auditor Eksternal dan Auditor Internal.

Audit Committee Charter

In carrying out its duties, the Audit Committee is guided to Audit Committee Charter which has been updated through ratification by the Board of Commissioners on December 30, 2020. This Charter regulates several things, including:

- Background of the establishment of Audit Committee, vision and mission as well as the purposes and objectives of Audit Committee.
- The establishment, organization and tenure of Audit Committee, includes matters concerning the establishment, organization, organizational structure, membership and membership requirements, terms of office, and evaluation of Audit Committee.
- The duties, responsibilities and authorities of Audit Committee, include matters concerning duties and responsibilities, authorities and working mechanism, code of confidentiality, and accountability of Audit Committee.
- Meetings, reporting and budgets of Audit Committee, covering matters concerning meetings, reporting, and budgets of Audit Committee.

Audit Committee Functions, Duties, and Responsibilities

The Company's Audit Committee works collectively and serves to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties. In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. To assist the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the Internal Control System and the effectiveness of the implementation of the duties of the External Auditor and Internal Auditor.

- | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal. 3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan Sistem Pengendalian Manajemen serta pelaksanaannya. 4. Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Jamkrindo. 5. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Pemegang Saham. 6. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya. | <ol style="list-style-type: none"> 2. To assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and External Auditors. 3. To provide recommendations regarding the improvement of the Management Control System and its implementation. 4. To ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the Company. 5. To provide recommendations regarding the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the Equity Owner. 6. To identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and the duties of other Board of Commissioners. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Audit merupakan upaya peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Audit di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Rapat Komite Audit

Komite Audit telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Di sepanjang tahun 2020, Komite Audit menyelenggarakan 12 kali rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Audit seperti yang terlihat di bawah ini.

Risalah Rapat Komite Audit

Minutes of Audit Committee Meeting

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Audit Committees' competence is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in the Company's business management especially in providing input to the Board of Commissioners.

Competency improvement activities participated by the Audit Committee throughout 2020 can be seen in the Company Profile Chapter in this annual report.

Audit Committee Meeting

The Audit Committee has held meetings aimed at assisting the duties of the Board of Commissioners in overseeing the management of the Company. The Audit Committee held 12 meetings in 2020, with the minutes of meeting and the presence of members of the Audit Committee as seen below.

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
15 Januari 2020 January 15, 2020	Hasil audit khusus SPI pada Kantor Cabang Mamuju SPI special audit results at Mamuju Branch Office	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat All Audit Committee attend the meeting.
12 Februari 2020 February 12, 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final (LHPLF) Perum Jamkrindo Tahun 2019 oleh OJK. Report of Final Direct Examination (LHPLF) of Perum Jamkrindo year 2019 by OJK.	<ul style="list-style-type: none"> • Sri Mulyanto • Noor Ida Khomsiyati • Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat All Audit Committee attend the meeting.

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Dewan Komisaris dan Direksi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
11 Maret 2020 March 11, 2020	Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Evaluasi Pengendalian Internal Perusahaan Tahun Buku 2019 <i>Report of Examination of Public Accounting Firm (KAP) on Evaluation of Internal Control of the Company in Financial Year 2019</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
22 April 2020 April 22, 2020	Tanggapan atas Laporan Tahunan Perum Jamkrindo Tahun Buku 2019 (Audited). <i>Response to Annual Report of Perum Jamkrindo For Financial Year 2019 (Audited).</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
18 Mei 2020 May 18, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan I Tahun 2020. <i>Board of Commissioners' Response to The Report of Activities and Finance Quarter I - 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
10 Juni 2020 June 10, 2020	Revisi RKAP Tahun 2020. <i>Revised RKAP Year 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
17 Juli 2020 July 17, 2020	Tindak Lanjut Hasil Assessment Penerapan GCG Jamkrindo Tahun 2019. <i>Follow-up assessment results of GCG Jamkrindo Year 2019.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
12 Agustus 2020 August 12, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan II Tahun 2020. <i>Board of Commissioners' Response to The Report of Activities and Finance Quarter II - 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
9 September 2020 September 9, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Usulan Revisi RKAP Tahun 2020. <i>Board of Commissioners' Response to the Proposed Revision of RKAP year 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP Fahrul Ismaeni 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
14 Oktober 2020 October 14, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Penambahan Modal kepada PT Jamkrindo Syariah (anak perusahaan). <i>Board of Commissioners' response to the Request for Capital Increase Approval to PT Jamkrindo Syariah (a subsidiary).</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP Fahrul Ismaeni 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
11 November 2020 November 11, 2020	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Kegiatan dan Keuangan Triwulan III 2020 dan Tanggapan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021. <i>Board of Commissioners' Response to The Report of Activities and Finance Quarter III - 2020 and Response to the Company's Work Plan and Budget (RKAP) year 2021.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP Fahrul Ismaeni 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>
8 Desember 2020 December 8, 2020	Hasil Pemeriksaan SPI pada Desk Subrogasi. <i>SPI Inspection Results on Subrogation Desk.</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Dody HP Fahrul Ismaeni 	Seluruh Komite Audit menghadiri rapat <i>All Audit Committee attend the meeting.</i>



Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Audit dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of Audit Committee at the Meeting

Komite Audit Audit Committee	Jumlah Wajib Rapat Total of Meeting Required	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Jumlah Ketidakhadiran Total Absences	% Kehadiran % Attendance
Sri Mulyanto	12	12	-	100,00%
Nood Ida Khomsiyati	12	12	-	100,00%
Dody Heriawan Priatmoko	12	12	-	100,00%
Fahrul Ismaeni	3	3	-	100,00%
Rata-Rata Average				100,00%

Evaluasi dan Penilaian Komite Audit oleh Dewan Komisaris

Dalam Piagam Komite Audit, dijelaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara self-assessment dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Audit untuk tahun berikutnya, dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

» Indikator Umum

- Kehadiran dalam rapat Komite.
- Penguasaan materi yang akan dibahas.
- Kesiediaan menyediakan waktu dan upaya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Komite Audit.
- Kesiediaan berpartisipasi dalam kegiatan di luar kantor seperti kunjungan ke unit bisnis.
- Kualitas dan saran yang diberikan dalam rapat-rapat.
- Kemampuan menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki guna peningkatan efektivitas Komite.
- Secara efektif menganalisis data yang tersedia dalam rangka memastikan informasi yang akurat dan menanyakan hal-hal yang diperlukan dalam rangka memastikan informasi yang diperoleh.
- Secara efektif dan pro-aktif melakukan tindak lanjut terhadap area-area yang penting dan memerlukan perhatian.
- Secara efektif mampu bekerja sama dengan rekan sekerja di Komite, dengan organ pendukung Dewan Komisaris lainnya, dan dengan mitra kerja yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Komite.
- Kemampuan berperilaku untuk mendorong terciptanya rasa saling percaya dan menghormati diantara sesama anggota Komite.
- Kemampuan untuk secara aktif melakukan pembelajaran berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan, serta selalu mengikuti perkembangan industri dan pasar yang relevan.

Evaluation and Performance Assessment of Audit Committee by the Board of Commissioners

In Audit Committee Charter was explained the performance evaluation of members of Audit Committee, both individually and collectively, is conducted annually with self-assessment basis using the evaluation method in system established by the Board of Commissioners, as an assessment material for the extension of working period for members of Audit Committee for the following year, using indicators as follows:

» General Indicators

- Attendance at Committee meetings.
- Mastery of the discussion material.
- Willingness to provide time and effort in fulfilling her/his duties and responsibilities as member of Audit Committee.
- Willingness to participate in outside of office activities such as visits to business units.
- Quality and advice given in meetings.
- Ability to apply knowledge and experience to improve the effectiveness of the Committee.
- Effectively analyze the available data in order to ensure accurate information and ask for the necessary information in order to ensure the information obtained.
- Effectively and pro-actively follow up on areas that are important and require attention.
- Able to cooperate with colleagues in the Committee, with other supporting organs of the Board of Commissioners, and with partners directly or indirectly related to the Committee.
- Able to behave to encourage mutual trust and respect among fellow Committee members.
- Active to conduct continuous learning to improve knowledge and capabilities, and always update with relevant industry and market developments.

- Kemampuan berkomunikasi dengan sesama anggota Komite di lingkungan Dewan Komisaris.
- Kemampuan memahami Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan yang dituangkan dalam RKAP dan RJPP, serta mampu memberikan input yang berkualitas.
- Kemampuan memenuhi ketentuan dalam standar etika Perusahaan, mewakili dan menjaga citra Perusahaan.
- Kemampuan menunjukkan integritas yang tinggi dan menjaga kerahasiaan.
- Kemampuan menunjukkan keinginan untuk memperbaiki manajemen Perusahaan.
- Kesiapan untuk menerima tugas khusus yang diberikan oleh Dewan Komisaris dan memberikan laporan penugasan secara lengkap dan tepat waktu.
- Kontribusi dalam pembuatan risalah rapat, laporan triwulan, laporan tahunan, dan penyusunan laporan yang berkualitas kepada Dewan Komisaris.
- Kemampuan memberikan masukan dalam penyusunan Program Kerja Komite secara lengkap dan tepat waktu.
- » Indikator Khusus
 - Kualitas dalam melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dipublikasikan, proyeksi, dan informasi keuangan lain, termasuk proses penyiapannya.
 - Kontribusi dalam melakukan review terhadap hasil pemeriksaan auditor independen.
 - Melakukan seleksi calon auditor independen sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyampaikan rekomendasi dengan dasar yang memadai.
 - Tingkat review yang dilakukan atas audit planning dan kecukupan program audit yang dibuat oleh auditor independen.
 - Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh auditor independen dengan cermat dan berkualitas.
 - Kontribusi dalam melakukan review terhadap hasil pemeriksaan internal auditor.
 - Review yang dilakukan terhadap internal audit charter dan pedoman pelaksanaan audit (SOP audit).
 - Evaluasi yang dilakukan terhadap kebijakan dan rencana kerja tahunan internal auditor (Satuan Pengawasan Internal).
 - Evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan audit oleh auditor internal.
 - Membahas temuan audit dan permasalahan lain yang ditemukan oleh internal auditor dengan cermat dan berkualitas.
 - Evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas fungsi internal audit secara keseluruhan.
 - Penelaahan yang dilakukan terhadap desain dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur pengendalian intern dalam rangka memastikan keberadaan sistem pengendalian internal yang efektif.
 - Masukan yang diberikan kepada fungsi internal audit.
- *Able to communicate with fellow Committee members within the Board of Commissioners.*
- *Able to understand the Company's Vision, Mission and Strategic Plan as outlined in RKAP and RJPP, as well as being able to provide quality inputs.*
- *Able to comply with the provisions in the Company's code of conducts, representing and maintaining the Company's image.*
- *Having high integrity and maintain confidentiality.*
- *Have desire to improve the management of the Company.*
- *Willingness to accept special duties given by the Board of Commissioners and provide duty report completely and timely manner.*
- *Contributions in the creation of minutes of meetings, quarterly reports, annual reports, and preparation of quality reports to the Board of Commissioners.*
- *Able to provide input in the preparation of the Committee Work Program completely and timely manner.*
- » *Special Indicators*
 - *Having quality in conducting the financial information review to be published, projections, and other financial information, including the preparation process.*
 - *Contribute in conducting a review to the results of independent auditor examination.*
 - *Conduct selection of independent auditor candidates in accordance with applicable regulations and submit recommendations on an adequate basis.*
 - *The level of review conducted on audit planning and adequacy of audit programs made by independent auditors.*
 - *Discuss audit findings and other issues found by independent auditors carefully and in quality.*
 - *Contribute in conducting a review to the results of internal auditor examination.*
 - *Review of internal audit charter and audit implementation guidelines (SOP audit).*
 - *Evaluation of the policies and annual work plans of internal auditor (Internal Audit Unit).*
 - *Evaluation conducted to the audit implementation by internal auditors.*
 - *Discuss audit findings and other issues found by internal auditors carefully and in quality.*
 - *Evaluation to assess the effectiveness of internal audit function comprehensively.*
 - *Study conducted on the design and implementation of internal control policies and procedures in order to ensure the existence of an effective internal control system.*
 - *Input given to internal audit functions.*



- Saran/rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris mengenai pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pengawasan Internal.
- Review yang dilakukan terhadap laporan (representasi) manajemen mengenai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Review yang dilakukan terhadap laporan atau opini penasihat hukum Perusahaan terkait peraturan perundang-undangan dan kepatuhan Perusahaan.
- Review yang dilakukan atas temuan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator (OJK) dan auditor eksternal lain (BPK, BPKP).
- Kontribusi dalam mengidentifikasi aktivitas Perusahaan yang memiliki risiko tinggi dan analisis terhadap upaya mitigasi yang diperlukan.
- Pelaporan yang dilakukan kepada Dewan Komisaris terkait risiko audit serta pengendalian internal di Perusahaan.

- *Suggestions/recommendations given to the Board of Commissioners regarding appointment and dismissal of Head of Internal Audit Unit.*
- *Review on management's report (representation) regarding compliance with laws and regulations.*
- *Review conducted on the report or opinion of the Company's legal advisors regarding the Company's laws and regulations and compliance.*
- *Review conducted on the findings or results of examinations conducted by regulators (OJK) and other external auditors (BPK, BPKP).*
- *Contribute to identifying high-risk Company activities and analysis of necessary mitigation efforts.*
- *Reporting conducted to the Board of Commissioners related to audit risks as well as internal controls in the Company.*

Tentang realisasi penilaian kinerja Komite Audit di tahun 2020 telah disampaikan pada pembahasan Dewan Komisaris dalam bab ini, pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya".

The realization of Audit Committee's performance assessment in 2020 has been presented in the discussion of Board of Commissioners in this chapter, in the section "Performance Assessment of Supporting Organs and Committees under the Board of Commissioners and Basis of Assessment".

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Komite Audit adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Remuneration Policy for Audit Committee

Under the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/Board of Supervisor of State-Owned Enterprises, the revenue component for Audit Committee is 20% of the Company's President Director Salaries.

Berikut disampaikan transparansi remunerasi Komite Audit selain Dewan Komisaris tahun 2020.

The following is transparency of remuneration for Audit Committee in 2020.

Remunerasi Komite Audit non Dewan Komisaris

Remuneration for Audit Committees originating from non-Board of Commissioners

Nama Name	Periode Menjabat Term of Office	Honorarium per Bulan Monthly Honorarium (Rp/IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowance per Month (Rp/IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowance for a year (Rp/IDR)	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 Total Remuneration in 2020 (Rp/IDR)
Dody Heriawan Priatmoko	Januari - Desember January - December	32.000.000	32.000.000	384.000.000	384.000.000
Fahrul Ismaeni	Oktober - Desember October - December	32.000.000	32.000.000	96.000.000	96.000.000

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris terkait dengan kebijakan nominasi dan remunerasi di lingkup Jamkrindo. Komite ini baru dibentuk pada 7 April 2020.

Nomination and Remuneration Committee was formed by the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners to related to nomination and remuneration policies within Jamkrindo.. This committee was newly formed April 7, 2020.

Susunan dan Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition and Profile of Nomination and Remuneration Committee Members

Pada pembentukan awal, sesuai Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-01/DK-JAMKRINDO/I/2020 tanggal 17 April 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yaitu:

In the initial establishment, in accordance with the Board of Trustees Decree No.KEP-01/DK-JAMKRINDO/I/2020 dated April 17, 2020, the Nomination and Remuneration Committee consists of 3 (three) people, namely:

- Komisaris Utama/Independen Sri Mulyanto sebagai Ketua
- Komisaris Noor Ida Khomsiyati sebagai anggota.
- Komisaris Ari Wahyuni sebagai anggota.

- *President Commissioner/Independent Sri Mulyanto as Chairman*
- *Commissioner Noor Ida Khomsiyati as member.*
- *Commissioner Ari Wahyuni as member.*

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020, posisi Komisaris Ari Wahyuni sebagai anggota digantikan oleh Komisaris Independen M. Muchlas Rowi.

Based on the Board of Trustees Decree No.KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 dated July 22, 2020, the position of Commissioner Ari Wahyuni as member was replaced by Independent Commissioner M. Muchlas Rowi.

Susunan dan komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Composition of the Nomination and Remuneration Committee members during 2020 is as follows:

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Jamkrindo Tahun 2020

Composition of Jamkrindo Nomination and Remuneration Committee in 2020

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ketua/Komisaris Utama/Independen Chairman/President Commissioner / Independent	Sri Mulyanto	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-02/DP-JAMKRINDO/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 jo. KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 <i>Board of Trustees Decree No. KEP-01/DK-JAMKRINDO/I/2020 dated April 17, 2020 jo. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 dated July 22, 2020</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>Following his term as Board of Commissioners</i>	
Anggota/Komisaris Secretary/ Commissioner	Noor Ida Khomsiyati	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-07/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 <i>Board of Trustees Decree No. KEP-01/DK-JAMKRINDO/I/2020 April 17, 2020 jo. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 dated July 22, 2020</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>Following her term as Board of Commissioners</i>	

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Anggota/Komisaris Independen Member/Independent Commissioner	M. Muchlas Rowi	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 tanggal 22 Juli 2020 Board of Trustees Decree No. KEP-03/DK-JAMKRINDO/VII/2020 dated July 22, 2020	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris Following his term as Board of Commissioners	

Profil seluruh Komite Nominasi dan Remunerasi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris dalam bab Profil Perusahaan.

Profiles for the entire Nomination and Remuneration Committee can be found in the Board of Commissioners Profile section in the Company Profile chapter.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman pada Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah diperbarui melalui pengesahan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 17 April 2020. Piagam ini mengatur beberapa hal, diantaranya adalah:

- Visi dan misi pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Struktur organisasi dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Persyaratan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Wewenang, hak dan kewajiban Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Masa jabatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- Lainnya

Nomination and Remuneration Committee Charter

In carrying out its duties, the Nomination and Remuneration Committee is guided by the Nomination and Remuneration Committee Charter which has been updated through ratification by the Board of Commissioners on April 17, 2020. This Charter regulates several things, including:

- Vision and mission of the establishment of Nomination and Remuneration Committee.
- Organizational structure and membership of the Nomination and Remuneration Committee.
- Nomination and Remuneration Committee membership requirements.
- Responsibility of the Nomination and Remuneration Committee.
- Authority, rights and obligations of the Nomination and remuneration Committee.
- Nomination and Remuneration Committee Meeting.
- Tenure of Nomination and Remuneration Committee Members.
- Other

Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
- a. Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan nominasi dan remunerasi bagi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai secara menyeluruh
 - b. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi
 1. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan,

Nomination and Remuneration Committee Functions, Duties, and Responsibilities

The Company's Nomination and Remuneration Committee works collectively and have functions to assist the Board of Commissioners in carrying out its duties. In carrying out its functions, the Nomination and Remuneration Committee has the following duties and responsibilities:

- a. Evaluate and prepare and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the nomination and remuneration system/policy for Commissioners, Directors, Executive Officers, and Employees.
- b. Nomination and Remuneration Committee Authorities
 1. Based on a written assignment letter from Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee may access records or information regarding

dana, asset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.

- Untuk melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.

employees, funds, assets, and other sources belonging to the company related to its duties. The Committee shall report the assignment results to the Board of Commissioners in writing.

- To carry out its duties, the Nomination and Remuneration Committee may cooperate with Human Resources Management Division and other related Divisions.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Nominasi dan Remunerasi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Nomination and Remuneration Committees' competence is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in the Company's business management especially in providing input to the Board of Commissioners.

Competency improvement activities participated by the Nomination and Remuneration Committee throughout 2020 can be seen in the Company Profile Chapter in this annual report.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam hal pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi. Di sepanjang tahun 2020, Komite Nominasi dan Remunerasi menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi seperti yang terlihat di bawah ini.

Nomination and Remuneration Committee Meeting

The Nomination and Remuneration Committee has held meetings aimed at assisting the duties of the Board of Commissioners in pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi. The Nomination and Remuneration Committee held 4 (four) meetings in 2020, with the minutes of meeting and the presence of members of the Nomination and Remuneration Committee as seen below.

Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

Minutes of Nomination and Remuneration Committee Meeting

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Komite Nominasi dan Remunerasi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
29 April 2020 April 29, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Penyampaian Usulan Top Talent Submissions for Top Talent Proposals	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Ari Wahyuni 	Seluruh Komite Nominasi dan Remunerasi menghadiri rapat All of Nomination and Remuneration Committee members attended the meeting.
22 Juli 2020 July 22, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi pada Dewan Komisaris Dismissal and Appointment of Members of the Nomination and Remuneration Committee to the Board of Commissioners	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Ari Wahyuni Muhammad Muchlas Rowi 	Seluruh Komite Nominasi dan Remunerasi menghadiri rapat All of Nomination and Remuneration Committee members attended the meeting.

Tanggal Date	Tempat Place	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Komite Nominasi dan Remunerasi yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
9 November 2020 November 9, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Penyampaian Update Data Talent BOD-1 Submissions for BOD-1 Talent Data Updates	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Muhammad Muchlas Rowi 	Seluruh Komite Nominasi dan Remunerasi menghadiri rapat All of Nomination and Remuneration Committee members attended the meeting.
15 Desember 2020 December 15, 2020	Gedung Jamkrindo Jamkrindo Building	Penyampaian Update Data Asesmen Talent BOD-1 Submissions for BOD-1 Talent Assessment Data Updates	<ul style="list-style-type: none"> Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyati Muhammad Muchlas Rowi 	Seluruh Komite Nominasi dan Remunerasi menghadiri rapat All of Nomination and Remuneration Committee members attended the meeting.

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of Nomination and Remuneration Committee at the Meeting

Komite Nominasi dan Remunerasi Nomination and Remuneration Committee	Jumlah Wajib Rapat Total of Meeting Required	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Jumlah Ketidakhadiran Total Absences	% Kehadiran % Attendance
Sri Mulyanto	4	4	-	100,00%
Noor Ida Khomsiyati	4	4	-	100,00%
Ari Wahyuni *	2	2	-	100,00%
M. Muchlas Rowi *	3	3	-	100,00%
Rata-Rata Average				100,00%

*) Ari Wahyuni tidak lagi menjabat sejak 22 Juli 2020. Posisinya digantikan oleh M. Muchlas Rowi.

*) Ari Wahyuni has no longer to serve since July 22, 2020. She was replaced by M. Muchlas Rowi.

Evaluasi dan Penilaian Komite Nominasi dan Remunerasi oleh Dewan Komisaris

Tentang realisasi penilaian kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi di tahun 2020 telah disampaikan pada pembahasan Dewan Komisaris dalam bab ini, pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya".

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Tidak terdapat Komite Nominasi dan Remunerasi yang berasal dari luar Dewan Komisaris.

Evaluation and Performance Assessment of Nomination and Remuneration Committee by the Board of Commissioners

The realization of Nomination and Remuneration Committee's performance assessment in 2020 has been presented in the discussion of Board of Commissioners in this chapter, in the section "Performance Assessment of Supporting Organs and Committees under the Board of Commissioners and Basis of Assessment".

Remuneration Policy for Nomination and Remuneration Committee

Under the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/ Board of Supervisor of State-Owned Enterprises, the revenue component for Nomination and Remuneration Committee is 20% of the Company's President Director Salaries.

The following is transparency of remuneration for Nomination and Remuneration Committee in 2020.

Tata Kelola Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris

1. Pengangkatan

Mekanisme pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 yaitu dengan terlebih dahulu menominasikan beberapa calon yang berasal dari berbagai sumber seperti mantan Direksi BUMN, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Pejabat Struktural maupun Fungsional serta dari sumber lain.

Mekanisme pengangkatan selanjutnya adalah melakukan penjangkauan dengan Menteri BUMN, Sekretaris, Deputi Teknis, dan/atau Deputi yang bertindak sebagai penanggung jawab. Setelah didapatkan kandidat calon Dewan Komisaris, selanjutnya Deputi melakukan pengadministrasian terhadap masing-masing kandidat. Setelah pengadministrasian dirampungkan, Deputi melakukan penilaian serta evaluasi terhadap seluruh kandidat calon anggota Dewan Komisaris dengan mengacu kepada kualifikasi yang sudah ditetapkan. Rekomendasi yang diberikan setelah hasil penilaian dan evaluasi berupa pernyataan kualitatif yaitu, "Disarankan" atau "Tidak Disarankan".

Bagi kandidat calon yang mendapatkan kriteria "Disarankan" dapat diusulkan untuk kemudian ditetapkan menjadi anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Dalam aturan ini, anggota Dewan Komisaris dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. Untuk itu, terdapat ketentuan bahwa kandidat terpilih diwajibkan menandatangani surat pengunduran diri dari jabatan sebelumnya semenjak ditetapkan sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan. Jika dalam waktu yang telah ditetapkan anggota Dewan Komisaris tidak melaksanakan ketentuan tersebut, secara otomatis masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada saat itu.

2. Pemberhentian

Dalam ketentuan ini, Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan berbagai alasan baik atas permintaan pribadi maupun alasan-alasan lain terkait seperti pelanggaran ketentuan kebijakan internal dan hukum, serta tidak terpenuhinya tugas dan tanggung jawab yang telah dimanatkan. Dewan Komisaris Perusahaan juga dapat diberhentikan oleh Menteri BUMN dalam rangka restrukturisasi atau memasuki masa usia pensiun Aparatur Sipil Negara.

Mekanisme pemberhentian diawali dengan pelaksanaan evaluasi terhadap anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan oleh Deputi Teknis berkoordinasi dengan Sekretaris. Setelah melakukan evaluasi, Deputi Teknis mengajukan usulan kepada Menteri BUMN guna mendapatkan penetapan. Penyampaian usulan pemberhentian disertai

Governance of Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners

1. Appointment

The mechanism of appointment of the Board of Commissioners, based on the Decree of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/02/2015, is by first nominating several candidates from various sources such as former members of the Board of Directors, Board of Commissioners, or Supervisory Board of an SOE, or Structural or Functional Officials of an SOE, and from other sources.

The next appointment mechanism is to conduct a screening with the Minister of SOEs, and the Secretary, Technical Deputy, and/or Deputy in charge. After obtaining the candidate for the Board of Commissioners, the Deputy then administers each candidate. After the administration has been completed, the Deputy assesses and evaluates all candidates for the Board of Commissioners members using the predetermined qualifications as its reference. Recommendations given after the results of assessment and evaluation contain qualitative statements, such as "Recommended" or "Not Recommended". For candidates who has gotten the "Recommended" criteria, they can be proposed to become members of the Company's Board of Commissioners. In this mechanism, members of the Board of Commissioners must cease any concurrent positions that he or she has. For this reason, there is a stipulated provision that the candidate must sign a resignation letter from the previous position once he or she is chosen as a member of the Company's Board of Commissioners. If within the stipulated period the member of the Board of Commissioners does not implement the provision, then the candidate will be terminated from the position immediately.

2. Dismissal

In the same provision it is stated that the Board of Commissioners may be dismissed at any time for various reasons such as based on personal request and other related reasons such as violations of provisions of internal and legal policy, as well as for failure to carry out the assigned tasks and responsibilities. The Company's Board of Commissioners can also be dismissed by the Minister of SOEs in the context of restructuring or entering the retirement age of the State Civil Apparatus.

The dismissal mechanism begins with the evaluation of members of the Board of Commissioners who are dismissed by the Technical Deputy in coordination with the Secretary. After conducting an evaluation, the Technical Deputy submits a proposal to the Minister of SOEs to acquire decision. Submission of proposal for termination is accompanied by an

dengan penjelasan alasan pemberhentian dan konsep surat Menteri tentang pemberhentian.

Selain mendapatkan usulan dari Deputi Teknis dan Sekretaris sebagaimana yang dijabarkan sebelumnya, proses pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga dapat dilakukan langsung oleh Menteri BUMN berdasarkan hasil evaluasinya sendiri. Menteri BUMN juga dapat menerima masukan dari Deputi Teknis dan Sekretaris terkait kebijakan pemberhentian yang dilakukan.

explanation of the reasons for the dismissal and the Minister of SOEs' letter concept regarding dismissal.

In addition to getting proposals from the Technical Deputy and Secretary as outlined earlier, the dismissal process of members of the Board of Commissioners can also be carried out directly by the Minister of SOEs based on the results of his/her own assessment. The Minister of SOEs can also receive input from the Technical Deputy and the Secretary regarding the dismissal policy that was carried out.

Kebijakan Mengenai Rencana Suksesi Direksi

Suksesi Direksi menjadi momentum membangun tradisi alih generasi dan role model bagi Jamkrindo, selain sebagai tantangan bagi Direksi terpilih dan segenap karyawan untuk menjawabnya dengan prestasi dan kinerja terbaik. Untuk memastikan Perusahaan dikelola oleh manajemen yang memiliki keahlian dan kompetensi yang semestinya, Perusahaan melakukan proses suksesi Direksi dimana penetapan calon Direksi Jamkrindo ditetapkan berdasarkan pemenuhan Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-03/MBU/02/2015. Adapun proses pemilihan Direksi dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Eselon I terkait dan Sekretaris Kementerian.

Policies Regarding Directors' Succession Plans

The Board of Directors' succession became a momentum to build a tradition of generation transition and role models for Jamkrindo, in addition to being a challenge for elected Directors and all employees to respond to the succession with the best achievements and performance. To ensure that the Company is managed by a management team with the right expertise and competency, the Company carries out a succession process of Directors of which the establishment of the Board of Directors of Jamkrindo is decided based on the fulfillment of Minister of State Enterprises Regulation No.PER-03/MBU/02/2015. The process of selecting the Board of Directors is carried out by the Evaluation Team put together by the Minister based on proposals from related Echelon I officials and the Secretary of the Ministry.

Proses penyeleksian oleh Tim Evaluasi, adalah sebagai berikut:

The selection process by the Evaluation Team is as follows:



Tim Evaluasi memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk menentukan calon terbaik. Sedangkan pembobotan dalam penilaian terhadap persyaratan materil calon Direksi, adalah sebagai berikut:

1. Integritas dan moral diberikan bobot penilaian sebesar 35% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berbuat tidak jujur), diberikan bobot sebesar 10%.
 - b. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan cidera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati pada tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%.
 - c. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dikategorikan dapat memberikan keuntungan secara melawan hukum kepada yang bersangkutan dan/atau pihak lain sebelum pencalonan (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 10%.
 - d. Tidak pernah terlibat dalam perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengurusan perusahaan yang sehat (berperilaku tidak baik) diberikan bobot sebesar 5%.
2. Kompetensi teknis/keahlian diberikan bobot penilaian sebesar 55% dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan di bidang usaha BUMN yang bersangkutan diberikan bobot 5%.
 - b. Pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan diberikan bobot 10%.
 - c. Pengalaman dalam pengelolaan BUMN/ Perusahaan/ Lembaga diberikan bobot 10%.
 - d. Kemampuan memimpin dan bekerja sama diberikan bobot 10%.
 - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN diberikan bobot 20%.
3. Psikologis diberikan bobot penilaian sebesar 10%

The Evaluation Team provides recommendations to the Minister of SOEs to determine the best candidates. The weighting in evaluating the material requirements of prospective Directors is as follows:

1. *The aspects of Moral and Integrity are given an assessment weight of 35% with the following details:*
 - a. *Have never been involved in an act of engineering and deviant practices at the candidate's place of work before the nomination (which includes dishonest acts). This item is given a weigh of 10%;*
 - b. *Has never been involved in an act of Default that can be categorized as not fulfilling a commitment agreed upon at the candidate's place of work before the nomination (which includes bad behavior). This item is given a weight of 10%;*
 - c. *Has never been involved in an act categorized as being able to provide unlawful benefits to the person concerned and/or other parties before the nomination (which includes bad behavior). This item is given a weight of 10%;*
 - d. *Has never been involved in an act that could be categorized as a violation of the provisions relating to the principles of management of a healthy company (which includes bad behavior). This item is given a weight of 5%;*
2. *Technical expertise/competencies are given an assessment weight of 55% with the following details:*
 - a. *Knowledge in the line of business of the relevant SOE is given a weight of 5%.*
 - b. *An understanding of management and corporate governance is given a weight of 10%.*
 - c. *Experience in SOEs/Companies/Institutions management is given a weight of 10%.*
 - d. *The ability to lead and work together is given a weight of 10%.*
 - e. *The ability to formulate and implement strategic policies in the context of SOE development is given a weight of 20%.*
3. *The psychological aspect is given an assessment weight of 10%.*

Saat ini, terdapat anggota Direksi yang berasal dari kalangan internal Perusahaan yakni Direktur Bisnis Penjaminan yang merupakan mantan Kepala Divisi di lingkungan Perusahaan, dan Direktur Operasional & Jaringan yang merupakan mantan Direktur Utama pada Anak Perusahaan.

At present, there are members of the Board of Directors who are from the Company's internal circle, namely the Director of Guarantee Business, who is the former Head of the Division within the Company, and the Director of Operations & Network who is the former President Director of the Subsidiaries

KOMITE INVESTASI DAN RISIKO USAHA

Investment and Business Risk Committee

Pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha merupakan tindak lanjut atas Surat Menteri Negara BUMN No. S-328/MBU.4/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal Laporan Hasil Assessment Penerapan GCG Jamkrindo Tahun 2010, dengan memperhatikan kondisi bahwa:

1. Jamkrindo mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penjaminan kredit bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Koperasi, yang menghadapi risiko tinggi, terutama risiko pembayaran klaim (tagihan ganti rugi dari pihak perbankan selaku pemberi kredit) akibat kredit macet.
2. Jamkrindo mengelola dana dalam jumlah yang relatif besar yang pengelolaannya perlu diselenggarakan dengan baik melalui penempatan pada berbagai instrument investasi keuangan dengan memperhatikan keamanan dan optimalisasi pendapatan.

The establishment of Investment and Business Risk Committee is follow-up to the Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. S-328/MBU.4/2011 dated October 25, 2011 concerning Report of GCG Jamkrindo Assessment Results in 2010, taking into account the condition that:

1. *Jamkrindo has the main duties of carrying out credit guarantee activities for Micro Enterprises, Small Businesses, Medium Enterprises, and Cooperatives which are equipped with high risk, especially the risk of claim payments (compensation bills from the banks as the lender) due to bad credit.*
2. *Jamkrindo manages relatively large amounts of funds whose management needs to be carried out properly through allocations in various financial investment instruments by paying attention to security and revenue optimization.*

Susunan dan Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha

Di tahun 2020 tidak terdapat perubahan susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha. Dengan demikian, susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha di akhir tahun 2020 dapat dilihat di bawah ini.

Composition and Profile of Investment and Business Risk Committee Members

In 2020 there is no change in the composition of Investment and Business Risk Committee. Thus, the composition of Investment and Business Risk Committee at the end of 2020 can be seen below.

Susunan Komite Investasi dan Risiko Usaha Jamkrindo per 31 Desember 2020

Composition of Jamkrindo Investment and Business Risk Committee As of December 31, 2020

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Ketua/Komisaris Chairman/ Commissioner	Ari Wahyuni	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-02/DP-JAMKRINDO/I/2019 tgl 9 Januari 2019 jo. KEP-07/DP-JAMKRINDO/X/2019 tgl 21 Oktober 2019 <i>Board of Trustees Decree No.KEP-02/DP-JAMKRINDO/I/2019 dated January 9, 2019 jo. KEP-07/DPJAMKRINDO/X/2019 dated October 21, 2019</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>Following her term as Board of Commissioners</i>	
Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	Diah Natalisa	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-01/DPJAMKRINDO/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 jo. KEP-08/DP-JAMKRINDO/IX/2018 tanggal 5 September 2018 <i>Board of Trustees Decree KEP-01/DPJAMKRINDO/I/2018 dated January 31, 2018 jo. KEP-08/DP-JAMKRINDO/IX/2018 dated September 5, 2018</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>Following her term as Board of Commissioners</i>	

Jabatan Position	Nama Name	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Anggota/Komisaris Member/ Commissioner	M. Muchlas Rowi	Surat Keputusan Dewan Pengawas KEP-07/DP-JAMKRINDO/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 <i>Board of Trustees Decree KEP-07/DP-JAMKRINDO/X/2019 dated October 21, 2019</i>	Mengikuti masa jabatan sebagai Dewan Komisaris <i>Following his term as Board of Commissioners</i>	
Anggota Member	Safari Mirza	Surat Keputusan Dewan Pengawas No.KEP-04/DP-JAMKRINDO/X/2019 tanggal 8 Mei 2019 <i>Board of Trustees Decree No. KEP-04/DP- JAMKRINDO/X/2019 dated May 8, 2019</i>	8 Mei 2019-7 Mei 2022 <i>May 8, 2019- May 7, 2022</i>	Periode ke-1 <i>1st period</i>

Di bawah ini disajikan profil dari para anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Below is presented the profile of the Investment and Business Risk Committee members.

Ari Wahyuni

Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha
Chairman of Investment and Business Risk Committee

Profil Ketua Komite Investasi dan Risiko Usaha Ari Wahyuni dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of The Chairman of Investment and Business Risk Committee Ari Wahyuni can be seen in the Board of Commissioners Profile section, in the Chapter of Company Profile.

Diah Natalisa

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha
Member of Investment and Business Risk Committee

Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha Diah Natalisa dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of The Member of Investment and Business Risk Committee Diah Natalisa can be seen in the Board of Commissioners Profile section

M. Muchlas Rowi

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha
Member of Investment and Business Risk Committee

Profil Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha M. Muchlas Rowi dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris, dalam bab Profil Perusahaan.

Profile of The Member of Investment and Business Risk Committee M. Muchlas Rowi can be seen in the Board of Commissioners Profile section

Safari Mirza

Anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha
Member of Investment and Business Risk Committee

8 Mei 2019 – 7 Mei 2022. Periode ke-1
May 8, 2019- May 7, 2022. 1st Period

54
Tahun
Years Old

Jakarta
30 Mei / May 30
1966

Domisili / Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pendidikan / Education

Diploma III di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1987
Diploma IV Program Akuntan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1994
*Diploma III at the State College of Accounting (STAN) in 1987
Diploma IV Accountant Program at the State College of Accounting (STAN) in 1994*

Riwayat Jabatan / Professional History

Lama berkarir dan menjadi PNS di Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan posisi terakhir sebagai Auditor Muda pada BPKP Provinsi Maluku Utara
Has long career and become a civil servant in the Audit Board of Finance and Development (BPKP) with the last position as a Young Auditor in BPKP North Maluku Province



Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Investasi dan Risiko Usaha berpedoman pada Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha yang telah diperbarui melalui pengesahan oleh Dewan Komisaris pada tanggal 30 Maret 2021. Piagam ini mengatur beberapa hal, diantaranya adalah:

- Latar belakang serta maksud dan tujuan pembentukan Komite Investasi dan Risiko Usaha.
- Dasar pembentukan dan organisasi Komite Investasi dan Risiko Usaha, mencakup hal-hal tentang dasar pembentukan, struktur organisasi, keanggotaan dan persyaratan keanggotaan, ketentuan masa jabatan, dan evaluasi Komite Investasi dan Risiko Usaha.
- Tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Investasi dan Risiko Usaha, meliputi hal-hal tentang tugas dan tanggung jawab, wewenang dan mekanisme kerja, serta pertanggungjawaban Komite Investasi dan Risiko Usaha.
- Rapat, pelaporan dan anggaran Komite Investasi dan Risiko Usaha, mencakup hal-hal tentang rapat, pelaporan, dan anggaran Komite Investasi dan Risiko Usaha.

Tugas Komite Investasi dan Risiko Usaha

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Investasi dan Risiko Usaha Jamkrindo memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. melakukan pemantauan terhadap transaksi, pengelolaan, kebijakan dan pedoman keuangan dan investasi
2. melakukan *review* terhadap kinerja investasi, penerapan manajemen risiko, dan struktur permodalan
3. memberikan masukan mengenai hal-hal yang perlu mendapat perhatian kepada Dewan Komisaris dalam rangka memberi nasihat kepada Direksi terkait dengan pengelolaan investasi dan risiko usaha
4. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan yang diselarasakan dengan rencana kerja tahunan pengelolaan risiko dan investasi yang diselenggarakan Direksi
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang terkait dengan pemantauan risiko usaha dan investasi
6. melaporkan hasil-hasil kerja Komite kepada Dewan Komisaris.

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Komite Investasi dan Risiko Usaha merupakan upaya peningkatan pengetahuan untuk mendukung

Investment and Business Risk Committee Charter

In carrying out its duties, the Investment and Business Risk Committee is guided by the Investment and Business Risk Committee Charter which has been updated through ratification by the Board of Commissioners on March 30, 2021. This Charter regulates several things, including:

- *Background and purpose and objective of the establishment of Investment and Business Risk Committee.*
- *The basis of establishment and organization of Investment and Business Risk Committee, covering matters concerning the basis of establishment, organizational structure, membership and membership requirements, terms of office, and evaluation of Investment and Business Risk Committee.*
- *Duties, responsibilities and authorities of the Investment and Business Risk Committee, including matters of duties and responsibilities, authorities and working mechanism, as well as accountability of the Investment and Business Risk Committee.*
- *Meetings, reporting and budgets of the Investment and Business Risk Committee, covering matters concerning meetings, reporting, and budgets of the Investment and Business Risk Committee.*

Investment and Business Risk Committee Duties

In carrying out its functions, the Investment and Business Risk Committee of Jamkrindo has the following duties and responsibilities:

1. *Monitoring transactions, management, policies and guidelines on finance and investment*
2. *Reviewing investment performance, implementing risk management, and capital structure*
3. *Providing input on matters that need attention to the Board of Commissioner in order to provide advice to the Board of Directors related to the management of investment and business risks*
4. *Drafting an annual work plan and budget that is aligned with the annual risk management and investment work plan organized by the Board of Directors;*
5. *Executing other duties assigned by the Board of Commissioner related to monitoring business and investment risks;*
6. *Reporting the work of the Committee to the Board of Commissioner.*

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Investment and Business Risk Committees' competence is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory duties in

pelaksanaan tugas pengawasan dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam memberikan masukan bagi Dewan Komisaris.

the Company's business management especially in providing input to the Board of Commissioners.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Komite Investasi dan Risiko Usaha di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Competency improvement activities participated by the Investment and Business Risk Committee throughout 2020 can be seen in the Company Profile Chapter in this annual report.

Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Investment and Business Risk Committee Meeting

Komite Investasi dan Risiko Usaha menyelenggarakan rapat yang ditujukan untuk membantu tugas Dewan Komisaris dalam mengawasi pengelolaan Perusahaan. Di sepanjang tahun 2020, Komite Investasi dan Risiko Usaha menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat, dengan risalah rapat dan kehadiran anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha seperti yang terlihat di bawah ini.

The Investment and Business Risk Committee has held meetings aimed at assisting the duties of the Board of Commissioners in overseeing the Company's management. The Investment and Business Risk Committee held 12 (twelve) meetings in 2020, with the minutes of meeting and the presence of members of the Investment and Business Risk Committee as seen below.

Risalah Rapat Komite Investasi dan Risiko Usaha

Minutes of Investment and Business Risk Committee Meeting

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Komite Investasi dan Risiko Usaha yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
15 Januari 2020 January 15, 2020	Income Statement Consolidation Analysis dalam penentuan RKAP 2020 berdasarkan Prognosis Desember 2019, Evaluasi dan Analisis Kinerja manajemen Per Desember 2019. <i>Income Statement Consolidation Analysis in RKAP 2020 determination based on Prognosis December 2019, Evaluation and Analysis of Management Performance As of December 2019.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
12 Februari 2020 February 12, 2020	Evaluasi dan Analisis Laporan kinerja Investasi Tahun 2019. <i>Evaluation and Analysis of Investment Performance Report 2019.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
11 Maret 2020 March 11, 2020	Evaluasi dan Analisis Laporan kinerja Investasi Periode Januari Tahun 2020. <i>Evaluation and Analysis of Investment Performance Report for January 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
16 April 2020 April 16, 2020	Analisis atas kesesuaian / sinkronisasi peraturan otorisasi investasi, Evaluasi dan Analisis Laporan Kinerja Manajemen bulan Maret 2020, Evaluasi Kinerja Investasi Februari 2020. <i>Analysis of the suitability/synchronization of investment authorization regulations, Evaluation and Analysis of Management Performance Report in March 2020, Investment Performance Evaluation February 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
18 Mei 2020 May 18, 2020	Monitoring Klaim Triwulan I – 2020, Dampak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 Tgl 11 Mei 2020 Tentang Program PEN <i>Monitoring claims quarter I – 2020, Impact of Government Regulation No. 23 of 2020 dated May 11, 2020 on PEN Program</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>

Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agendas	Peserta Rapat Meeting Participants	Komite Investasi dan Risiko Usaha yang Tidak Hadir, dan Alasan Ketidakhadiran Absentees, and its Reasons
10 Juni 2020 June 10, 2020	Evaluasi dan Analisis Laporan Kinerja Manajemen bulan Mei 2020, Analisis Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Bunga (SSB), Evaluasi Kinerja Investasi Maret 2020 <i>Evaluation and Analysis of Management Performance Report in May 2020, Analysis of Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) and Interest Difference Subsidy (SSB), Investment Performance Evaluation in March 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
17 Juli 2020 July 17, 2020	Analisis Revisi RKAP 2020, Evaluasi Kinerja Investasi April - Mei 2020. <i>Revised Analysis of RKAP 2020, Investment Performance Evaluation April - May 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
12 Agustus 2020 August 12, 2020	Kinerja Profitabilitas Perusahaan (Pendemi COVID-19) per Juli 2020, Indikator dan Parameter Tugas Dewan Komisaris, Evaluasi Kinerja Investasi Juni 2020 <i>Company Profitability Performance (COVID-19 Pandemic) as of July 2020, Indicators and Parameters of Duties of the Board of Commissioners, Investment Performance Evaluation June 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
9 September 2020 September 9, 2020	Kinerja Nett Cash flow from operation per Agustus 2020 (Korporat dan Jamsyar), Revisi RKAP 2020 dan RKAP 2020 pada Investasi, Evaluasi Kinerja Investasi Juli 2020. <i>Performance of Nett Cash flow from operation as of August 2020 (Corporate and Jamsyar), Revised RKAP 2020 and RKAP 2020 on Investment, Investment Performance Evaluation July 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
14 Oktober 2020 October 14, 2020	Analisis atas usulan Revisi Investasi 2020, Evaluasi Kinerja manajemen September 2020, Evaluasi Kinerja Investasi Agustus 2020 <i>Analysis of proposed Investment Revision 2020, Management Performance Evaluation September 2020, Investment Performance Evaluation August 2020</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
11 November 2020 November 11, 2020	Analisis Kinerja Manajemen sd Oktober 2020, Evaluasi Kinerja Investasi September 2020. <i>Management Performance Analysis until October 2020, Investment Performance Evaluation September 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>
12 Desember 2020 December 12, 2020	Analisis Kinerja Manajemen sd November 2020, Co-Guarantee - Co-Insurance - Re-Insurance - Loss Limit, Evaluasi Kinerja Investasi Oktober 2020. <i>Management Performance Analysis until November 2020, Co-Guarantee - Co Insurance - Re-Insurance - Loss Limit, Investment Performance Evaluation October 2020.</i>	<ul style="list-style-type: none"> · Ari Wahyuni · Diah Natalisa · M Muchlas Rowi · Safari Mirza 	Seluruh Komite Investasi dan Risiko Usaha menghadiri rapat <i>All members of Investment and Business Risk Committee attend the meeting.</i>

Rekapitulasi dan Tingkat Kehadiran Komite Investasi dan Risiko Usaha dalam Rapat

Recapitulation and Attendance Level of Investment and Business Risk Committee at the Meeting

Komite Investasi dan Risiko Usaha Investment and Business Risk Committee	Jumlah Wajib Rapat Total of Meeting Required	Jumlah Kehadiran Total Attendances	Jumlah Ketidakhadiran Total Absences	% Kehadiran % Attendance
Ari Wahyuni	12	12	-	100,00%
Diah Natalisa	12	12	-	100,00%
M. Muchlas Rowi	12	12	-	100,00%
Safari Mirza	12	12	-	100,00%
Rata-Rata Average				100,00%

Evaluasi dan Penilaian Komite Investasi dan Risiko Usaha oleh Dewan Komisaris

Dalam Piagam Komite Investasi dan Risiko Usaha, dijelaskan bahwa evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap 1 (satu) tahun secara self-assessment dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan penilaian perpanjangan masa kerja anggota Komite Investasi dan Risiko Usaha untuk tahun berikutnya.

Tentang realisasi penilaian kinerja Komite Investasi dan Risiko Usaha di tahun 2020 telah disampaikan pada pembahasan Dewan Komisaris dalam bab ini, pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung dan Komite di Bawah Dewan Komisaris Berikut Dasar Penilaiannya".

Kebijakan Remunerasi bagi Komite Investasi dan Risiko Usaha

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, komponen penghasilan Komite Investasi dan Risiko Usaha adalah sebesar 20% dari gaji Direktur Utama Perusahaan.

Berikut disampaikan transparansi remunerasi Komite Investasi dan Risiko Usaha selain Dewan Komisaris tahun 2020.

Remunerasi Komite Investasi dan Risiko Usaha non Dewan Komisaris

Remuneration for Investment and Business Risk Committees originating from non-Board of Commissioners

Nama Name	Periode Menjabat Term of Office	Honorarium per Bulan Monthly Honorarium (Rp/IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan per Bulan Total Honorarium and Allowance per Month (Rp/IDR)	Jumlah Honorarium dan Tunjangan 1 Tahun Total Honorarium and Allowance for a year (Rp/IDR)	Jumlah Remunerasi Tahun 2020 Total Remuneration in 2020 (Rp/IDR)
Safari Mirza	Januari - Desember January - December	32.000.000	32.000.000	384.000.000	384.000.000

Evaluation and Performance Assessment of Investment and Business Risk Committee by the Board of Commissioners

In Investment and Business Risk Committee Charter was explained the performance evaluation of members of Investment and Business Risk Committee, both individually and collectively, is conducted annually with self-assessment basis using the evaluation method in system established by the Board of Commissioners, as an assessment material for the extension of working period for members of Investment and Business Risk Committee Committee for the following year.

The realization of Investment and Business Risk Committee's performance assessment in 2020 has been presented in the discussion of Board of Commissioners in this chapter, in the section "Performance Assessment of Supporting Organs and Committees under the Board of Commissioners and Basis of Assessment".

Remuneration Policy for Investment and Business Risk Committee

Under the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for Board of Commissioners/ Board of Supervisor of State-Owned Enterprises, the revenue component for Investment and Business Risk Committee is 20% of the Company's President Director Salaries.

The following is transparency of remuneration for Investment and Business Risk Committee in 2020.

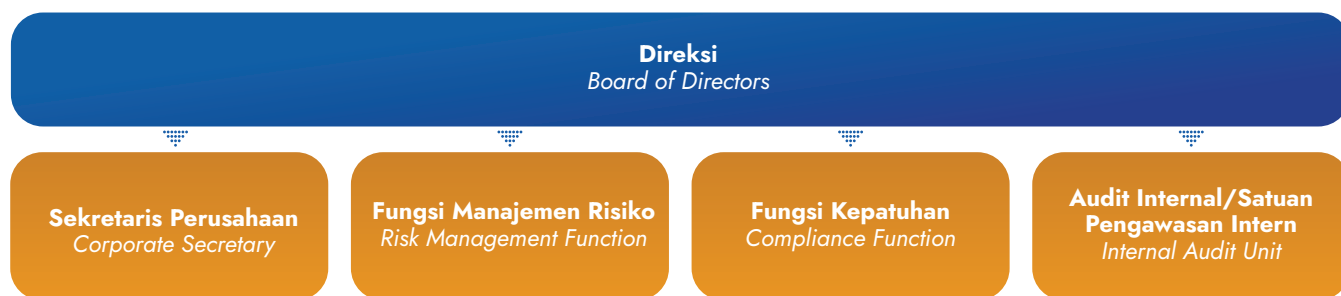


ORGAN PENDUKUNG DIREKSI

Supporting Organs of The Board Of Directors

Dalam menjalankan peran pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, Direksi dibantu oleh beberapa unit satuan kerja yang bekerja di luar struktur internal Direktorat. Satuan kerja ini dibentuk melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun satuan kerja yang dibentuk dalam rangka memberikan pandangan bagi Direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan.

In carrying out the management role of the Company, the Board of Directors is assisted by several work units that work outside the internal structure of Directorate. This work unit was formed through compliance with applicable laws and regulations, as well as a work unit formed in order to provide recommendations for Board of Directors in carrying out the Company's management.



SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary

Perusahaan memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan yang bertugas melaksanakan kegiatan komunikasi Perusahaan, termasuk penyusunan strategi serta protokoler dan kesekretariatan Perusahaan. Fungsi Sekretaris Perusahaan berada langsung di bawah Direksi.

The Company has a Corporate Secretary function in charge of carrying out the Company's communication activities, including the formulation of strategies and the Company's protocol and secretariat. The structure of the Corporate Secretary is directly under the Directors.

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Official

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.No.91/Kep-Dir/VIII/2016 tentang pengangkatan pejabat, Pejabat Sekretaris Perusahaan dipercayakan kepada Abdul Bari.

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Board of Directors. Based on Directors Decree No. 91/Kep-Dir/VIII/2016 concerning the Appointment of Officials, the position of Corporate Secretary Official is entrusted to Abdul Bari.

Abdul Bari

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Menjabat Sejak: 1 Agustus 2016
Served since: August 1, 2016

45
Tahun
Years Old

Subang
20 September / September 20
1975

Pendidikan / Education

S3 Manajemen SDM Universitas Negeri Jakarta, 2014
Doctorate of Human Resources Management, State University of Jakarta, 2014

Domisili / Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Riwayat Jabatan / Professional History

Pranata Utama Direktorat Operasional dan Jaringan (2016), Pejabat Pranata Utama Direktorat Utama (2015-2016); Pranata Madya Sekretaris Perusahaan (2015)
Main Institution Officer of the Directorate of Operations and Networks (2016), Main Institution Officer of the President Directorate (2015-2016), Middle Institution officer of the Corporate Secretary (2015)

Sertifikasi / Certification

Certified Professional In Human Resources Management (CPHRM) Tahun 2015
Completed DISC Trainer Certification Tahun 2014
Sertifikasi Training of Trainer Tahun 2014
Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ahli Asuransi Kesehatan/AAK) Tahun 2008
Sertifikasi Asuransi Jiwa (AAJ) Tahun 2007
Sertifikasi Keahlian Asuransi (Ajun Ahli Asuransi Kesehatan/AAAK) Tahun 2006
Sertifikasi K3 (Kesehatan Keselamatan Kerja) Tahun 2002
Certified Professional In Human Resources Management (CPHRM) in 2015
Completed DISC Trainer Certification in 2014
Training of Trainer Certification in 2014
Insurance Expertise Certification (Health Insurance Expert / AAK) in 2008
Life Insurance Certification (AAJ) in 2007
Insurance Expertise Certification (Associate Level Health Insurance Specialist / AAAK) in 2006
K3 Certification (Occupational Health and Safety) in 2002

Struktur Organisasi dan Kedudukan Sekretaris Perusahaan

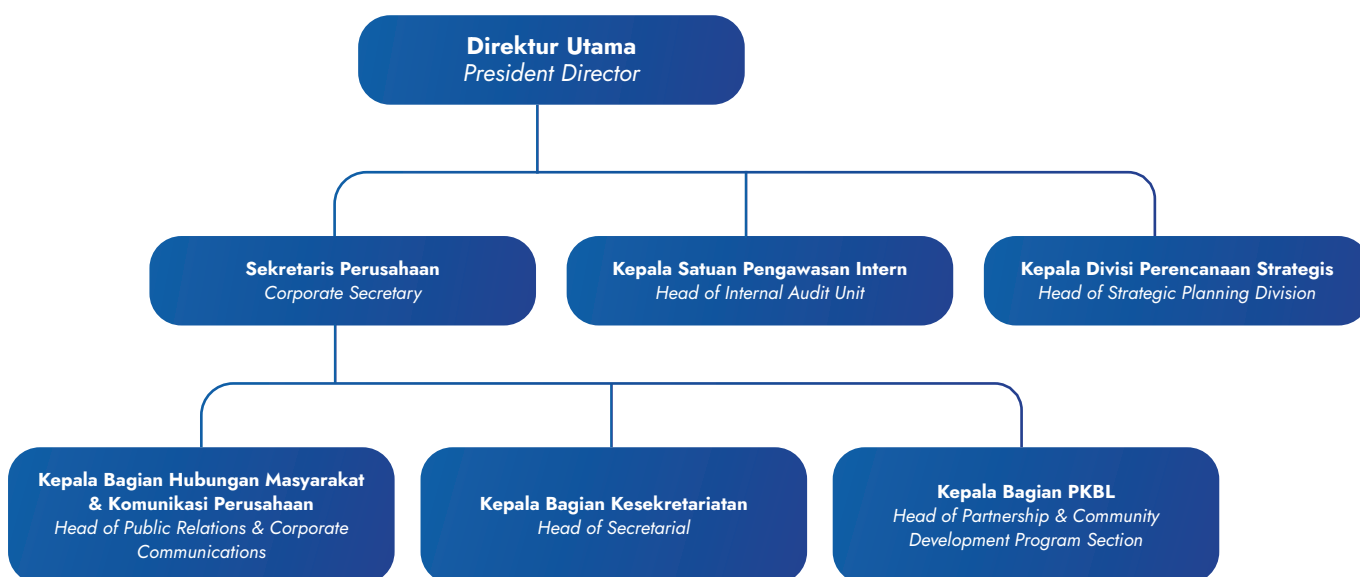
Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Sekretaris Perusahaan, berikut disampaikan struktur organisasi Sekretaris Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Lampiran Uraian Jabatan pada Peraturan Direksi No. 12/Per-Dir/VIII/2018 tentang Deskripsi Pekerjaan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Organizational Structure and Position of Corporate Secretary

To describe the Corporate Secretary functions, the following is conveyed the Corporate Secretary organizational structure that has been ratified based on the Attachment of Department Description to Board of Directors Regulation No. 12/Per-Dir/VIII/2018 concerning Work Description of Public Companies (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan Jamkrindo

Organizational Structure of Jamkrindo Corporate Secretary



Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan Sekretaris Perusahaan sebanyak 29 orang, dengan rincian, sebagai berikut:

By the end of 2020, the number of Corporate Secretary employees as much as 29 people, with details, as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (people)
Kepala Sekretaris Perusahaan Head of Corporate Secretary	1
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat & Komunikasi Perusahaan Head of Public Relations & Corporate Communications	1
Kepala Bagian Kesekretariatan & Hubungan Internal Head of Secretarial & Internal Relations	1
Kepala Bagian Program Kemitraan & Bina Lingkungan Head of Partnership & Community Development Program	1
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Head of Public Relations Section	1
Staf Staff	12
Outsourcing	12
Jumlah Total	29



Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Duties and Responsibilities

Pelaksanaan kegiatan Sekretaris Perusahaan yang meliputi beberapa aspek di bawah ini:

- Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance).
- Mengembangkan kerangka GCG untuk mendukung peningkatan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas proses administrasi dokumen Perusahaan.
- Mengembangkan strategi hubungan kelembagaan dengan stakeholder guna menunjang aktivitas Perusahaan.
- Pengelolaan Hubungan Masyarakat untuk mendukung tujuan Perusahaan.
- Membina identitas dan citra/reputasi Perusahaan untuk menunjang peningkatan nilai Perusahaan.
- Menjaga reputasi Perusahaan melalui pengelolaan komunikasi Perusahaan yang efektif.
- Penerapan manajemen risiko dan pengawasan serta pengendalian internal
- Optimalisasi penyaluran PKBL dan pemberdayaan UMKM melalui program kemitraan dalam rangka mendukung SDG's.
- Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan prinsip creating shared value.
- Melaksanakan program pembangunan berkelanjutan meliputi pelaksanaan 4 (empat) pilar pembangunan
- Manajemen Tata Kelola Dokumen Penting Perusahaan yang meliputi: administrasi/tata kelola Perusahaan terkait dengan berbagai dokumen penting (Keputusan Direksi (KepDir), Surat Edaran (SE), Perjanjian Kerja Sama (PKS), Memorandum of Understanding (MoU), Surat Keputusan (SK) Direksi/Dewan Komisaris, serta Surat Menyurat Perusahaan/Korporasi.
- Melakukan pengelolaan media komunikasi Perusahaan.
- Melakukan aktivitas yang mendukung tujuan korporasi antara lain kegiatan/event Perusahaan seperti seminar, pameran, FGD, Workshop, Rakernas, dll.
- Melakukan pengembangan kompetensi karyawan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan bisnis.
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Sekretaris Perusahaan.
- Harmonisasi dan pengelolaan kegiatan pelayanan internal Dewan Komisaris dan Direksi.
- Melakukan Pengelolaan dan Manajemen Keprotokolan Direksi dan Dewan Komisaris.
- Pelaksanaan tugas-tugas lainnya dalam lingkup bidang dan penugasan secara khusus untuk kebutuhan Perusahaan.

Implementation of the Corporate Secretary's activities covers the following aspects:

- *Implementing Good Corporate Governance.*
- *Develop GCG framework to support improved effectiveness, efficiency and accountability of the Company's document administration process.*
- *Develop institutional relationship strategies with stakeholders to support the Company's activities.*
- *Public Relations Management to support the Company's objectives.*
- *Fostering the Company's identity and image/reputation to support the improvement of the Company's value.*
- *Maintain the Company's reputation through effective management of Corporate communications.*
- *Implementation of risk management and internal supervision and control*
- *Optimization of PKBL distribution and empowerment of MSMEs through partnership programs in order to support SDG's.*
- *Achievement of sustainable development goals with the principle of creating shared value.*
- *Implementing sustainable development programs including the implementation of 4 (four) pillars of development*
- *Management of Corporate Important Document Governance which includes: administration/the Company's governance related to various important documents (Board of Director's Decision (KepDir), Circular Letter (SE), Cooperation Agreement (MCC), Memorandum of Understanding (MoU), Decree (SK) of the Board of Directors/Board of Commissioners, and Corporate Correspondence.*
- *Managing the Company's communication media.*
- *Conduct activities that support corporate objectives such as corporate activities/events such as seminars, exhibitions, FGD, Workshops, Rakernas, etc.*
- *Develop employee competencies in accordance with the dynamics and the business needs.*
- *Preparation of Corporate Secretary's Work Plan and Budget (RKA).*
- *Harmonization and management of internal service activities of the Board of Commissioners and Board of Directors.*
- *Managing the Protocol of the Board of Directors and Board of Commissioners.*
- *Implementation of other tasks within the scope of the field and assignments specifically for the Company's needs.*

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Sekretaris Perusahaan merupakan upaya peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Pejabat Sekretaris Perusahaan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan Divisi Sekretaris Perusahaan di tahun 2020.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Corporate Secretary competence is an effort to update knowledge to support the implementation of Corporate Secretary duties.

Competency improvement activities participated by the Corporate Secretary Throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. The following is conveyed competency improvement followed by employees of the Corporate Secretary Division in 2020.

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Time	Penyelenggara Organizer
Agustinus Handoko KKWT Prohire	Mitigasi Risiko Kredit dan Restrukturisasi melalui Penjaminan <i>Credit Risk Mitigation and Restructuring through Guarantee</i>	Online Training 16 Juni 2020 <i>June 16, 2020</i>	LPPi
	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch II" <i>"Read Financial Statements Quickly" Batch II"</i>	Online Training 24 April 2020 <i>April 24, 2020</i>	PT Jamkrindo
Anggit Murdiwibowo Kepala Bagian Kesekretariatan <i>Head of Secretarial Department</i>	Boot Camp Training of The Trainers Modul 1 (Angkatan 2) <i>Boot Camp Training of The Trainers Modul 1 (Batch 2)</i>	Hotel Royal Padjadjaran 29 Januari – 2 Februari 2020 <i>January 29 - February 2, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch III <i>Read Financial Statements Quickly Batch III</i>	Online Training 13 Mei 2020 <i>May 13, 2020</i>	PT Jamkrindo
	ToT 2 Program Basic Finon	Online Training 18 - 19 Mei 2020 <i>May 18 - 19, 2020</i>	PT Jamkrindo
Erna Nova Kepala Seksi Bina Lingkungan <i>Head of Community Development Section</i>	Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch III <i>Read Financial Statements Quickly Batch III</i>	Online Training 13 Mei 2020 <i>May 13, 2020</i>	PT Jamkrindo
Lulu Drusyita Kepala Seksi Humas <i>Head of Public Relations Section</i>	Hari Mutu Sharing Knowledge "Penawaran Paket Ibadah Umroh" <i>Hari Mutu Sharing Knowledge "Umroh Package Offer"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 17 Januari 2020 <i>January 17, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Management Information System for non-IT Background	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo



Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Time	Penyelenggara Organizer
	IELTS Preparation Class	Ruang Pelatihan Lt 8 8 Januari 2020 January 8, 2020	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Getting to Know the World More"	Ruang Pelatihan Lt 8 9 Januari 2020 January 9, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 15 Januari 2020 January 15, 2020	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 January 16, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 22 Januari 2020 January 22, 2020	PT Jamkrindo
Anggrenei Staf Bagian Kesekretariatan Head of Public Relations Section	English Club (Fun Class) "The importance of reading for our careers"	Ruang Pelatihan Lt 8 23 Januari 2020 January 23, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 29 Januari 2020 January 29, 2020	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Banking and insurance industries in the world expectations"	Ruang Pelatihan Lt 8 30 Januari 2020 January 30, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 5 Februari 2020 February 5, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 12 Februari 2020 February 12, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 19 Februari 2020 February 19, 2020	PT Jamkrindo
Anggrenei Staf Bagian Kesekretariatan Secretarial Staff	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 4 Maret 2020 March 4, 2020	PT Jamkrindo
	Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch III Read Financial Statements Quickly Batch III	Online Training 13 Mei 2020 May 13, 2020	PT Jamkrindo
Pressi Hapsari Fadlilah Staf Bagian Kesekretariatan Secretarial Staff	Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch II Read Financial Statements Quickly Batch II	Online Training 24 April 2020 April 24, 2020	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 January 16, 2020	PT Jamkrindo
Rudiman Staf Bagian Kesekretariatan Secretarial Staff	English Club (Fun Class) "The importance of reading for our careers"	Ruang Pelatihan Lt 8 23 Januari 2020 January 23, 2020	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Banking and insurance industries in the world expectations"	Ruang Pelatihan Lt 8 30 Januari 2020 January 30, 2020	PT Jamkrindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Time	Penyelenggara Organizer
Endar Muktar Jaelani Staf Bagian Keseekretariatan dan Pelayanan Internal <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>Management Information System for non-IT Background</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo
Andini Sefriyani Staf Bagian Keseekretariatan dan Pelayanan Internal <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo
Andini Sefriyani Staf Bagian Keseekretariatan dan Pelayanan Internal <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>Hari Mutu Sharing Knowledge "Penawaran Paket Ibadah Umroh" Hari Mutu Sharing Knowledge " Umroh Package Offer "</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 17 Januari 2020 <i>January 17, 2020</i>	PT Jamkrindo
Andini Sefriyani Staf Bagian Keseekretariatan dan Pelayanan Internal <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>English Club (Fun Class) "Banking and insurance industries in the world expectations"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 30 Januari 2020 <i>January 30, 2020</i>	PT Jamkrindo
Andini Sefriyani Staf Bagian Keseekretariatan dan Pelayanan Internal <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch II Read Financial Statements Quickly Batch II</i>	Online Training 24 April 2020 <i>April 24, 2020</i>	PT Jamkrindo
Ananda Widhia Putri KKWT Prohire	<i>English Club (Fun Class) " The importance of reading for our careers"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 13 Januari 2020 <i>January 13, 2020</i>	PT Jamkrindo
Ananda Widhia Putri KKWT Prohire	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo
Ananda Widhia Putri KKWT Prohire	<i>English Club (Fun Class) "Getting to Know the World More"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 9 Januari 2020 <i>January 9, 2020</i>	PT Jamkrindo
Anzil Firdausi Nuzula Staf Bagian Humas dan Komunikasi Perusahaan <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo
Anzil Firdausi Nuzula Staf Bagian Humas dan Komunikasi Perusahaan <i>Secretarial Staff and Internal Services</i>	<i>English Club (Fun Class) "Banking and insurance industries in the world expectations"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 30 Januari 2020 <i>January 30, 2020</i>	PT Jamkrindo
Rully Arieffandy Staf Bagian Humas dan Komunikasi Perusahaan <i>Public Relations Staff and Corporate Communications</i>	<i>English Club (Fun Class) " The importance of reading for our careers"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 13 Januari 2020 <i>January 13, 2020</i>	PT Jamkrindo
Rully Arieffandy Staf Bagian Humas dan Komunikasi Perusahaan <i>Public Relations Staff and Corporate Communications</i>	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo
Rully Arieffandy Staf Bagian Humas dan Komunikasi Perusahaan <i>Public Relations Staff and Corporate Communications</i>	<i>Hari Mutu Sharing Knowledge "Penawaran Paket Ibadah Umroh" Hari Mutu Sharing Knowledge " Umroh Package Offer "</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 13 Maret 2020 <i>March 13, 2020</i>	PT Jamkrindo
Fara Prastika (KKWT)	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo
Fara Prastika (KKWT)	<i>English Club (Fun Class) "Getting to Know the World More"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 9 Januari 2020 <i>January 9, 2020</i>	PT Jamkrindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Time	Penyelenggara Organizer
Maqrufiaji (KKWT)	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 January 16, 2020	PT Jamkrindo
	<i>English Club (Fun Class) "Getting to Know the World More"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 9 Januari 2020 January 9, 2020	PT Jamkrindo

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2020

Di sepanjang tahun 2020 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pemangku kepentingan, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan peraturan khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri penjaminan, antara lain dengan memastikan kepatuhan atas peraturan baru yang dikeluarkan oleh OJK, stakeholder dan Regulator.
2. Membangun GCG Awareness untuk Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk menginformasikan adanya kebijakan baru dan isu mengenai GCG.
3. Menyelenggarakan dan mendokumentasikan Rapat Umum Pemegang Saham. Di sepanjang tahun 2020, Jamkrindo menyelenggarakan RUPS dan keputusan pemegang saham, yaitu Rapat Pembahasan Bersama (RPB) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Jamkrindo Tahun 2020 pada tanggal 15 Januari 2020, RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2020 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun 2019, Keputusan Sirkuler tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, Keputusan Sirkuler tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia, dan Keputusan Sirkuler tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Penetapan Revisi RKAP Tahun 2020 PT Jaminan Kredit Indonesia.
4. Mengundang, menyelenggarakan dan menghadiri Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi, Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris. Pada tahun 2020 telah terselenggara masing-masing sebanyak 31 kali Rapat Direksi, 52 kali Rapat Dewan Komisaris, serta 12 Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris;
5. Melakukan review secara periodik terhadap Kebijakan Pokok Perusahaan, Anggaran Dasar Perusahaan, Pedoman dan Tata Perusahaan.
6. Melaksanakan kegiatan pengurusan perijinan, pengamanan dan pengawalan/protokol Direksi dan Dewan Komisaris di kantor/tempat dinas, perjalanan/acara.

Brief Report of Corporate Secretary Duties Implementation in 2020

Throughout 2020 the Corporate Secretary has carried out functions and duties related to stakeholders, including:

1. Follow the development of regulations, especially the prevailing laws and regulations in the guarantee industry, among others by ensuring compliance with new regulations issued by ojk, stakeholders and regulators.
2. Establish GCG Awareness for the Board of Directors and Board of Commissioners, including informing the existence of new policies and issues concerning GCG.
3. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders. Throughout 2020, Jamkrindo held GMS and shareholders' decisions, namely the Joint Discussion Meeting (RPB) regarding ratification of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) Perum Jamkrindo Year 2020 on January 15, 2020, the Annual GMS of Fiscal Year 2019 held on June 30, 2020 concerning Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statements of 2019, Circular Decision dated February 21, 2020 concerning Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, Circular Decision dated October 26, 2020 concerning Dismissal and Appointment of The President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia, and Circular Decision dated November 16, 2020 concerning Approval of the Determination of Revised RKAP Year 2020 PT Jaminan Kredit Indonesia.
4. Invite, organize and attend the Board of Commissioners' Meetings, Board of Directors' Meetings, Joint Meeting of the Board of Directors and Commissioners. In 2020, the Company organized 31 Board of Directors' Meetings, 52 Board of Commissioners' Meetings, and 12 Joint Meetings of Directors and Commissioners;
5. Review the Company's Basic Policy, Articles of Association, Guidelines and Corporate Governance periodically.
6. Carrying out licensing, security and escort/protocol management activities of the Board of Directors and Board of Commissioners in offices, trips/events.

7. Mengadministrasikan dan mendistribusikan seluruh surat masuk yang ditujukan kepada Perusahaan atau kepada Unit Kerja terkait untuk ditindak lanjuti.
 8. Sebagai penghubung antara Perusahaan dengan para pemegang saham, regulator maupun para pemangku kepentingan lainnya.
 9. Sekretaris Perusahaan telah menyusun laporan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan mengenai pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan kepada Direksi Utama melalui memorandum.
 10. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 11. Melakukan keterbukaan informasi kepada pegawai internal melalui Majalah Jamkrindo. Selama tahun 2020, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan 12 edisi Majalah Jamkrindo.
 12. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020 serta menyampaikannya kepada Regulator terkait. Selain itu juga memonitor penyampaian Laporan Tahunan Tahun Buku 2020 milik Entitas Anak kepada Regulator.
 13. Pengurusan Uji Kemampuan dan Kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru.
 14. Dokumentasi data legalitas Perusahaan, antara lain Akta RUPS, Akta Perubahan Anggaran Dasar, Akta Perubahan Susunan Pengurus, Tanda Domisili Perusahaan, dan dokumen legalitas lainnya.
 15. Menjalin komunikasi dengan Kementerian BUMN, OJK, Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Sekretaris Negara, Kementerian Koperasi dan UMKM dan pemangku kepentingan lainnya
 16. Memonitor pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Selama tahun 2020 sebanyak 98 dari total 98 orang atau sebesar 100% telah memenuhi kewajiban pelaporannya.
 17. Menyusun dan menerbitkan 20 Surat Keputusan Direksi terkait Pelaksanaan Kegiatan Operasional Perusahaan.
 18. Pelaporan hasil monitoring pemberitaan media secara harian kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi setiap pagi di hari kerja.
 19. Mengkoordinasikan penyelenggaraan acara korporasi, baik acara internal maupun eksternal, misalnya Peringatan Ulang Tahun Perusahaan secara virtual, dan acara korporasi lainnya yang dilakukan secara virtual.
 20. Berpartisipasi aktif dalam rapat dengar pendapat dan kunjungan kerja dengan DPR-RI.
 21. Melakukan penyaluran Program Kemitraan, Bina Lingkungan, Corporate Social Responsibility (CSR) dan Sponsorship serta memonitor kredibilitasnya.
7. Administer and distribute all incoming letters addressed to the Company or to the relevant Work Unit for follow-up.
 8. As a liaison between the Company and its shareholders, regulators and other stakeholders.
 9. The Corporate Secretary has compiled periodic reports at least 1 (one) time in 1 (one) month regarding the implementation of the Corporate Secretary's functions to the Main Board of Directors through a memorandum.
 10. Transparency of Public information in accordance with the prevailing laws and regulations.
 11. Information transparency to internal employees through Jamkrindo Magazine. During 2020, the Corporate Secretary has published 12 editions of Jamkrindo Magazine.
 12. Prepare the Annual Report and Sustainability Report for Fiscal Year 2020 and submit it to the relevant Regulator. In addition, it also monitors the submission of the Annual Report of subsidiaries for the Financial Year 2020 to Regulator.
 13. Management of Fit and Proper Test for new members of Board of Directors and Board of Commissioners.
 14. Documentation of the Company's legality data, among others, the GMS Deed, Deed of Amendment to the Articles of Association, Deed of Change of Management Structure, Company Domicile Sign, and other legality documents.
 15. Establish communication with the Ministry of SOEs, OJK, Bank Indonesia (BI), Ministry of Finance, Secretary of State, Ministry of Cooperatives and MSMEs and other stakeholders
 16. Monitor the implementation of the State Official's Wealth Report (LHKPN) to the Corruption Eradication Commission (KPK). During 2020, 98 Officials of Jamkrindo or 100% have fulfilled their reporting obligations.
 17. Compiling and publishing 20 Decision Letter of the Board of Directors related to the Implementation of The Company's Operational Activities.
 18. Reporting the results of daily monitoring of media coverage to Board of Commissioners Members and Board of Directors Members every morning on weekdays.
 19. Coordinate the implementation of corporate events, both internal and external events, such as the Company's Birthday Commemorations virtually, and other corporate events conducted virtually.
 20. Actively participate in hearing meetings and working visits with DPR-RI.
 21. Channeling Partnership, Community Development, Corporate Social Responsibility (CSR) and Sponsorship Programs and monitoring their credibility.



Evaluasi dan Penilaian Kinerja Sekretaris Perusahaan

Jamkrindo menerapkan Performance Management System (PMS) sebagai tata aturan mengenai pengelolaan pengukuran kinerja baik untuk Perusahaan, unit kerja maupun individu. Dalam pelaksanaan PMS tersebut, pengukuran kinerja Perusahaan, unit kerja maupun individu Karyawan menggunakan pola Key Performance Indicator (KPI).

Tentang rincian penilaian kinerja Sekretaris Perusahaan tahun 2020 mencakup metode penilaian dan realisasi hasil KPI dapat dilihat pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi Berikut Dasar Penilaiannya" dalam bab ini.

Evaluation and Performance Assessment of Corporate Secretary

Jamkrindo implements Performance Management System (PMS) as a rule on performance measurement management for the Company, work units and individuals. In PMS implementation, performance measurement for the Company, work units and individual Employees using Key Performance Indicator (KPI) patterns.

The details of performance assessment for Corporate Secretary in 2020 includes the method of assessment and realization of KPI results can be seen in the section "Performance Assessment of Supporting Organs of Board of Directors and Basis of Assessment" in this chapter.

FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Risk Management Function

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Risk Management is a system used to strengthen aspects of accountability of the Board of Directors that supports the decision-making process and the development of the Company's performance. Commitments in the application of Risk Management, as an integral part of the Company's management system as a whole, are stated in Risk Management Policies and Procedures that are drafted according to the Company's content and capabilities. Corporate Risk Management is implemented in accordance with the conditions and requirements of the Company by using ISO 31000: 2009 or SNI ISO 31000: 2011.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM

Profile of the Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division

Berdasarkan Keputusan Direksi No.51/SKD/4/V/III/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Perum Jamkrindo, Ceriandri Widuri dipercaya untuk menjabat Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM.

Based on the Board of Directors Decree No.51/SKD/4/V/III/2018 dated August 31, 2018 concerning the Appointment and Mutation of Perum Jamkrindo Officials, Ceriandri Widuri is trusted to serve as Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division.

Ceriandri Widuri

Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM
Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division

Menjabat Sejak: 19 September 2017
Served since: September 19, 2017

48
Tahun
Years Old

Semarang
13 Maret / Maret 13
1972

Domisili / Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan / Education

Sarjana (S1) Manajemen Universitas Diponegoro (1995)
Magister (S2) Manajemen Strategik Universitas Gadjah Mada (2009)
Bachelor of Management, Diponegoro University (1995)
Master of Strategic Management, Gajah Mada University (2009)

Riwayat Jabatan / Professional History

Beberapa jabatan yang pernah diemban di lingkup Jamkrindo adalah Kepala Divisi Manajemen Risiko (2017-2018), Kepala Divisi Penjaminan Syariah (2012-2017), Kepala Kantor Cabang Banjarmasin (2011-2012), Kepala Bagian Penjaminan Syariah I (2010-2011), Kepala Bagian Divisi Penjaminan Syariah (2006-2010), Kepala Bagian Wilayah I Divisi Pengendalian (2006), Kepala Bagian Penjaminan Divisi Penjaminan & Pemasaran (2005-2006), Kepala Bagian Penjaminan Divisi Penjaminan & Pembiayaan (2005-2005).

Some of the positions that have been held in Jamkrindo are Head of Risk Management Division (2017-2018), Head of Sharia Guarantee Division (2012-2017), Head of Banjarmasin Branch Office (2011-2012), Head of Sharia Guarantee Section I (2010-2011), Head of Sharia Guarantee Division (2006-2010), Head of Region I Control Division (2006), Head of Guarantee Division, Guarantee & Marketing Unit (2005-2006), Head of Guarantee Division, Guarantee & Financing Unit (2005-2005).

Sertifikasi / Certification

Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2014) Perpanjangan CRGP No.0059/B-5/CRGP/X/2017/P-1 tanggal 10 Oktober 2017, dan Serifikasi MR pada Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
Certified Risk Governance Professional (CRGP) (2014) Extension of CRGP No.0059/B-5/CRGP/X/2017/P-1 dated October 10, 2017, and MR Certification on Banking Professional Certification Institute (LSPP)

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM

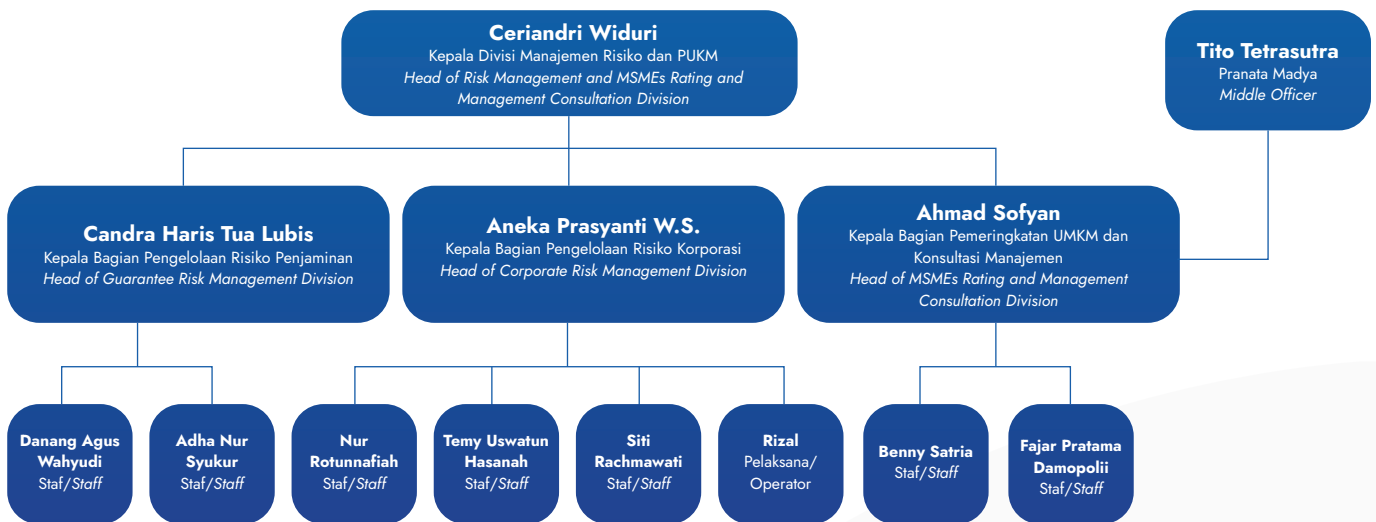
Organizational Structure and Position of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division

Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM, berikut disampaikan struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM yang telah disahkan berdasarkan Ketetapan Direksi No.01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perum Jamkrindo.

To describe the functions contained in the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division, the following organizational structure of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division has been ratified based on the Board of Directors Decree No.01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018 concerning the Organizational Structure of Perum Jamkrindo.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko Jamkrindo

Organizational Structure of Jamkrindo Risk Management Division



Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan Satuan Kerja Manajemen Risiko sebanyak 13 orang, dengan rincian, sebagai berikut:

By the end of 2020, the number of Risk Management Division employees as many as 13 people, with details, as follows:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (people)
Kepala Satuan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division	1
Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan Head of Guarantee Risk Management Division	1
Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Korporasi Head of Corporate Risk Management Division	1
Kepala Bagian Pemeringkatan UMKM dan Konsultasi Manajemen Head of MSMEs Rating and Management Consultation Division	1
Pranata Madya Middle Officer	1
Staf/Pelaksana Staff/Operator	8
Jumlah Total	13

Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM

Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penerapan manajemen risiko korporasi dan penjaminan
 - a. Melakukan penerapan manajemen risiko
 - b. Melakukan penyusunan kebijakan manajemen risiko
 - c. Melakukan pelaksanaan *risk assessment*
 - d. Melakukan identifikasi risiko dan penanganan risiko (mitigasi) secara korporasi dan penjaminan
 - e. Melakukan *monitoring* atas penerapan manajemen risiko
2. Mengelola *Business Continuity Management*
 - a. Melakukan penerapan *Business Continuity Management*
 - b. Melakukan pelaksanaan *Business Continuity Management maturity assessment*
 - c. Melakukan uji coba *Business Continuity Plan*
3. Mengelola kerja sama dengan Lembaga penyedia data
4. Mengelola database pelaku UMKM
5. Mengelola model dan system pemeringkatan UMKM
6. Mengelola pemberdayaan UMKM

Sertifikasi Profesi Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan pengelolaan risiko, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan Satuan Kerja Manajemen Risiko hingga akhir tahun 2020.

Duties of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division

Duties of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division is as follows:

1. *Managing the implementation of corporate risk management and guarantees*
 - a. *Implementing risk management*
 - b. *Drafting risk management policies*
 - c. *Conducting risk assessment*
 - d. *Identify risks and handling of risks (mitigation) corporately and guarantee*
 - e. *Monitoring the implementation of risk management*
2. *Managing Business Continuity Management*
 - a. *Implementing Business Continuity Management*
 - b. *Conducting Business Continuity Management maturity assessment*
 - c. *Conduct a Trial of Business Continuity Plan*
3. *Managing cooperation with data providers*
4. *Manage the UMKM actors database*
5. *Managing MSME rating models and systems*
6. *Managing the empowerment of MSMEs*

Professional Certification of Risk Management Division

Professional certification is an important aspect for auditors to understand the development of risk management, especially related to regulatory compliance and industry development. The following is submitted professional certification owned by employees of the Risk Management Division until the end of 2020.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko Types of Risk Management Profession Certification
Ceriandri Widuri	Manajemen Risiko Perbankan - 3 Banking Risk Management - 3
Aneka Prasyanti	Manajemen Risiko Perbankan - 2 Banking Risk Management - 2
Ahmad Sopyan	Manajemen Risiko Perbankan - 2 Banking Risk Management - 2
Tito Tetrasuta	Manajemen Risiko Perbankan - 2 Banking Risk Management - 2

Jumlah karyawan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 4 (empat) orang atau 30,77% dari jumlah keseluruhan karyawan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

Risk Management Division employees that have professional certification as many as 4 (four) people or 30.77% of the total number of Risk Management Division employees. The Company is committed to increasing the level of professional certification for employees, both for employees who already have professional certification and who do not have one.



Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan upaya peningkatan pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan risiko di lingkup Perusahaan.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan Satuan Kerja Manajemen Risiko di tahun 2020.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Risk Management Division competence is an effort to update knowledge to support the implementation of risk management within the Company.

Competency improvement activities participated by the Risk Management Division Throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. The following is conveyed competency improvement followed by employees of the Risk Management Division in 2020.

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Time	Penyelenggara Organizer
Iwan Hermanto Kepala Bagian Pemeriksaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Konsultasi Manajemen (PUKM) Head of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division	Boot Camp Training of The Trainers Modul 1 (Angkatan 2) Boot Camp Training of The Trainers Modul 1 (Batch 2)	Hotel Royal Padjadjaran 29 Januari – 2 Februari 2020 January 29 - February 2, 2020	PT Jamkrindo
	Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch I Read Financial Statements Quickly Batch I	Online Training 23 April 2020 April 23, 2020	PT Jamkrindo
	ToT Program Basic Finon	Online Training 18 - 19 Mei 2020 May 18 - 19, 2020	PT Jamkrindo
Doni Nugroho Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan Head of Guarantee Risk Management Division	Hari Mutu Sharing Knowledge "Penawaran Paket Ibadah Umroh" Hari Mutu Sharing Knowledge "Umroh Package Offer"	Ruang Pelatihan Lt 8 17 Januari 2020 January 17, 2020	PT Jamkrindo
	Management Information System For Non IT Background	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 February 13 - 14, 2020	PT Jamkrindo
	Hari Mutu Sharing Knowledge "Investasi Reksadana" Hari Mutu Sharing Knowledge " Mutual Fund Investment "	Ruang Pelatihan Lt 8 13 Maret 2020 March 13, 2020	PT Jamkrindo
Aneka Prasyanti Wahyu Sejati Kepala Bagian Pengelolaan Risiko Korporasi Head of Corporate Risk Management Division	Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19 Credit Restructuring as a Result of COVID-19	Online Training 21 April 2020 April 21, 2020	InfoBank Institute
	Management Information System For Non IT Background	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 February 13 - 14, 2020	PT Jamkrindo
	Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19 Credit Restructuring as a Result of COVID-19	Online Training 21 April 2020 April 21, 2020	InfoBank Institute

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Time	Penyelenggara Organizer
Benny Satria Staf Bagian Konsultasi Manajemen Management Consulting Staff	<i>Management Information System For Non IT Background</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo
	<i>Internet of Things</i>	Online Training 23 April 2020 <i>April 23, 2020</i>	Inixindo
Adha Nur Syukur Staf Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan Staff of Guarantee Risk Management Division	<i>Cara Cepat Baca Laporan Keuangan Batch III</i> <i>Read Financial Statements Quickly Batch III</i>	Online Training 13 Mei 2020 <i>May 13, 2020</i>	PT Jamkrindo
	<i>Management Information System For Non IT Background</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo
	<i>Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19</i> <i>Credit Restructuring as a Result of COVID-19</i>	Online Training 21 April 2020 <i>April 21, 2020</i>	InfoBank Institute
Woro Sulisty Wulandari Staf Bagian Pengelolaan Risiko Penjaminan Staff of Guarantee Risk Management Division	<i>Management Information System For Non IT Background</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo
	<i>Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19</i> <i>Credit Restructuring as a Result of COVID-19</i>	Online Training 21 April 2020 <i>April 21, 2020</i>	InfoBank Institute
Temy Uswatun Hasanah Staf Bagian Kebijakan dan Metodologi Risiko Staff of Risk Policy and Methodology Division	<i>Management Information System For Non IT Background</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo
Tito Tetrasuta Pejabat Fungsional Divisi Manajemen Risiko dan PUKM Functional Officer of Risk Management and Management Consultation Division	<i>English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo
	<i>English Club (Fun Class) " The importance of reading for our careers"</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 23 Januari 2020 <i>January 23, 2020</i>	PT Jamkrindo
	<i>Management Information System For Non IT Background</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 13 - 14 Februari 2020 <i>February 13 - 14, 2020</i>	PT Jamkrindo

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM Tahun 2020

Brief Report of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division Duties Implementation in 2020

Pelaksanaan Program Kegiatan Divisi Manajemen Risiko dan PUKM di sepanjang tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:

The implementation of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division Activity Program throughout 2020 can be delivered as follows:

1. Mengukur tingkat kematangan Manajemen Risiko dan Business Continuity Management (BCM) di Perusahaan. Untuk mencapai sasaran tersebut Divisi Manajemen Risiko dan PUKM menyusun strategi dengan melakukan *risk maturity assessment* dan *BCM maturity assessment*.

1. Measuring the maturity level of Risk Management and Business Continuity Management (BCM) in the Company. To achieve these goals, the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division develop strategies by conducting *risk maturity assessment* and *BCM maturity assessment*.



Telah selesai dan dilaporkan hasil risk maturity dan BCM maturity kepada Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko dengan nilai risk maturity sebesar 3,72 (*Managed*) dan BCM maturity sebesar 3,74 (*Mature*).

2. Menumbuhkan kesiapan SDM dalam menghadapi kondisi darurat

Sasaran uji coba *BC Plan* di Kantor Pusat dan seluruh Kantor Wilayah.

Langkah-langkah kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut adalah:

- a. Melakukan pengadaan tenaga pendamping atau konsultan Manajemen Risiko
- b. Melakukan sosialisasi dalam menghadapi kondisi darurat

Dapat dilaporkan bahwa saat ini telah terdapat pemenang untuk vendor pengadaan konsultan uji coba *BC Plan* yaitu PT RMG (*Risk Management Guard*). Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran tersebut yang seharusnya menjadi program kerja tahun 2020 namun dilakukan penjadwalan ulang sampai dengan berakhirnya pandemi COVID-19 atau setelah diijinkan melakukan perkumpulan orang dalam jumlah besar.

Dalam upaya meningkatkan kepercayaan *stakeholder* terhadap *safeguard* Perusahaan dari risiko kesehatan dan keselamatan terkait penyebaran COVID-19 pada kluster Perkantoran, maka Perusahaan telah mengikuti audit labelling *safeguard* SIBV di gedung kantor pusat PT Jamkrindo yang dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia dan mendapatkan sertifikat labeling *safeguard* SIBV.

3. Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) dengan Aplikasi *Business Impact Analysis* (BIA) dan pembuatan *Loss Event Management* (LEM).

Implementasi melalui penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengembangan aplikasi SIMR dan mengintegrasikan aplikasi BIA dan LEM.

Saat ini aplikasi telah running dan telah dilaksanakan *Go Live* serta *Training* kepada seluruh Koordinator *Risk Owner* pada Unit Kerja Selindo.

4. Pengembangan wawasan dan kompetensi SDM

Strategi yang dilakukan yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia Divisi Manajemen Risiko dan PUKM, melalui upaya-upaya:

- a. Mengikutsertakan pelatihan/sertifikasi/seminar/kursus Manajemen Risiko dan PUKM serta pengetahuan lainnya yang dapat menunjang pengelolaan Manajemen Risiko dan PUKM bagi seluruh karyawan pada Divisi Manajemen Risiko dan PUKM baik secara offline maupun online dengan menyesuaikan kondisi pandemi

Completed and reported the results of risk maturity and BCM maturity to the Director of Finance, Investment and Risk Management with a risk maturity value of 3.72 (Managed) and BCM maturity of 3.74 (Mature).

2. *Fostering human resources readiness to deal with emergencies*

BC Plan trial targets at head office and all regional offices.

The measures required to achieve these goals are:

- a. *Procurement of assistance personnel or risk management consultants*
- b. *Socializing in deal with emergencies*

It can be reported that there is currently a winner for the vendor of BC Plan trial consultant procurement namely PT RMG (Risk Management Guard). The activities needed to achieve this goal are supposed to be a work program in 2020 but rescheduled until the end of the COVID-19 pandemic or after being allowed to conduct large numbers of gatherings.

In an effort to increase stakeholder confidence in the Company's safeguard from health and safety risks related to the spread of COVID-19 in Office clusters, the Company has followed the SIBV labelling safeguard audit at PT Jamkrindo's head office building implemented by PT Surveyor Indonesia and obtained a certificate of SIBV labeling safeguard.

3. *Integration of Risk Management Information System (SIMR) Application with Business Impact Analysis (BIA) Application and Loss Event Management (LEM) creation.*

Implementation through the preparation of SIMR's Framework of Reference (KAK) application development and integrating BIA and LEM applications.

Currently the application has been running and has been implemented Go Live and Training to all Risk Owner Coordinators in Selindo Unit.

4. *Development of HR insights and competencies*

Strategy of capacity building and quality of Human Resources Division of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation, through the efforts of:

- a. *Participated in training/certification/seminar/course Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation and other knowledge that can support the management of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation for all employees in the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division both offline and online by adjusting pandemic conditions*

- b. Melakukan benchmarking pada perusahaan yang telah menjalankan implementasi manajemen risiko sesuai *best practice*.

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah melakukan pengajuan atas pelatihan-pelatihan yang relevan dan telah diralisasikan/ditindaklanjuti oleh Divisi MSDM. Kegiatan *benchmark* terkait Manajemen Risiko Terintegrasi telah dilaksanakan secara virtual bekerja sama dengan PT Telkom dan mengajak serta Unit Kerja terkait lainnya, diantaranya Satuan Pengawas Intern, Divisi Hukum dan Kepatuhan, Divisi TI dan PT Jamkrindo Syariah.

5. Monitoring profil risiko perusahaan berjalan efektif Strategi Divisi Manajemen Risiko dan PUKM untuk mencapai sasaran tersebut adalah tersedianya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR) terbaru yang dapat berjalan dengan efektif.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- a. Pelaksanaan proses Manajemen Risiko diseluruh Unit Kerja secara tepat waktu dengan menggunakan aplikasi SIMR.
- b. Terdapat informasi risiko penjaminan perusahaan
- c. Melakukan *maintenance* aplikasi SIMR

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah menyampaikan buku Profil Risiko Triwulan III Tahun 2020 kepada Seluruh Direksi, Divisi/Desk, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang Selindo.

6. Kesadaran seluruh Insan Jamkrindo terhadap pelaksanaan manajemen risiko

Sasaran tersebut dilakukan melalui komitmen yang kuat dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan.

Divisi Manajemen Risiko dan PUKM akan melakukan pengkinian data (*updating*) *charter/piagam* komitmen pelaksanaan Manajemen Risiko pada tingkat Kepala Divisi/ Kantor Wilayah/Cabang/KUP setiap ada perubahan komposisi pejabat pada struktur organisasi.

7. Terdapat kerja sama dengan mitra dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan

Perumusan strategi untuk mendukung sasaran tersebut yaitu melakukan kerja sama dengan Dukcapil, Infobank dan Pefindo Biro Kredit.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu :

- a. Melakukan perpanjangan PKS dengan Dukcapil dan Pefindo Biro Kredit
- b. Memanfaatkan data Infobank atau lembaga sejenis

8. Meningkatkan kompetensi SDM Pendamping UMKM Strategi Divisi Manajemen Risiko dan PUKM untuk mencapai sasaran tersebut adalah

dengan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi kepada PIC Pendamping UMKM.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendukung

- b. *Benchmarking companies that have implemented risk management in accordance with best practice.*

It can be reported that the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have submitted relevant trainings and have been realized/acted upon by the HR Division. Benchmark activities related to Integrated Risk Management have been implemented virtually in collaboration with PT. Telkom and invite and other related Work Units, including Internal Supervisory Unit, Legal and Compliance Division, IT Division and PT. Jamkrindo Syariah.

5. *Monitoring the company's risk profile runs effectively Strategy of the Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division to achieve these goals is with provide the newest Risk Management Information System (SIMR) application that can run effectively.*

The measures are:

- a. *Implementation of risk management process throughout the Work Unit in a timely manner by using SIMR application.*
- b. *There is information regarding the risk of company guarantee*
- c. *Maintenance of SIMR application*

Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have submitted the Third Quarter 2020 Risk Profile report to all Directors, Divisions/Units, Regional Offices and Selindo Branch Offices.

6. *Awareness of all Jamkrindo's employee to the risk management implementation*

The targets are carried out through a strong commitment in implementing risk management in the Company.

Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division will update the data (updating) charter/ charter commitment of the Risk Management implementation at the Head of Division/Regional Office/Branch/KUP when there is a change in the officials composition on the organizational structure.

7. *There is cooperation with partners in order to the Company's risk management*

Formulation of strategies to support the target is by cooperating with Dukcapil, Infobank and Pefindo Credit Bureau.

The steps that can be done are:

- a. *Extending MCC with Dukcapil and Pefindo Credit Bureau*
- b. *Utilizing infobank data or similar institutions*

8. *Improving HR competencies for MSME Mentor Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division strategies to achieve this goal is by increasing the knowledge and competence to the PIC who accompanying MSMEs.*

The measures taken to support these strategy, Risk Management

The measures taken to support these strategy, Risk Management



strategi tersebut, Divisi Manajemen risiko & PUKM akan mengikutsertakan PIC Pendamping UMKM di Kantor Wilayah/ Kantor Cabang pada pelatihan/sertifikasi Pendamping UMKM dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Divisi Manajemen Risiko & PUKM saat ini sedang melakukan pelatihan dan sertifikasi Pendamping UMKM bagi PIC PIC Pendamping UMKM di Kantor Wilayah/Kantor Cabang sebanyak 30 orang karyawan melalui media online (webinar) oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Penyelenggara Sertifikasi (Lembaga Perkoperasian Indonesia).

9. Penyempurnaan aplikasi Pemingkatan UMKM
Strategi Divisi Manajemen Risiko dan PUKM untuk mencapai sasaran tersebut adalah dengan melakukan pengembangan sistem pada aplikasi Pemingkatan UMKM secara lebih lanjut.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- a. Pengembangan sistem pada aplikasi Pemingkatan UMKM.
- b. Penyempurnaan metodologi skoring dan rating UMKM.
- c. Melakukan benchmarking dengan Lembaga Keuangan Bank/Non Bank serta Asosiasi UMKM terkait pemanfaatan sistem skoring/ rating UMKM.

Saat ini Divisi Manajemen Risiko & PUKM telah melakukan perbaikan aplikasi UMKMLayak bersama vendor yang telah ditunjuk "PT Masa Depan Siber" selama 3 bulan serta jaminan pemeliharaan selama 1 tahun. Status perbaikan aplikasi tersebut masih "on going" karena pihak vendor meminta perpanjangan waktu dalam proses perbaikan dan penyempurnaan aplikasi.

10. Meningkatkan peran pendampingan dan konsultasi manajemen terhadap UMKM

Strategi Divisi Manajemen Risiko dan PUKM untuk mencapai sasaran tersebut adalah melakukan pendampingan bagi UMKM Terjamin dan Calon Terjamin untuk menjadi UMKM Binaan pada masing-masing Kantor Wilayah/Kantor Cabang. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan kunjungan langsung (*on site visit*) dan pendampingan kepada UMKM Binaan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah/Kantor Cabang.

Sehubungan dengan terjadinya pandemi virus COVID-19, Divisi Manajemen Risiko & PUKM telah melaksanakan kegiatan seminar UMKM melalui media *online* (*webinar*)

Webinar pertama telah dilakukan di kanwil V Semarang dengan tema menyusun laporan keuangan serta sosialisasi UMKM layak pada tanggal 18 Juni 2020.

and MSMEs Rating and Management Consultation Division provide training/certification to the PIC who accompanying MSMEs at the Regional Office/Branch Office. This Training/ certification in collaboration with the National Professional Certification Agency (BNSP).

Currently, Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division is conducting training and certification of MSMEs Companion for PIC who accompanying MSMEs in regional offices/branch offices as many as 30 employees through online media (webinars) by the National Professional Certification Agency (BNSP) through the Certification Organization (Indonesian Cooperatives Organization).

9. *Improvement of MSME Rating application*
Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division strategies to achieve this goal is by developing the MSME Rating application system.

The measures taken are:

- a. *System development in MSME Rating application.*
- b. *Improvement of MSME scoring methodology and rating.*
- c. *Benchmarking with Bank/Non-Bank Financial Institutions and MSME Associations related to the utilization of MSME's scoring/rating system.*

Currently, Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division has made improvements to the application of MSMEsLayak with vendors who have been appointed "PT Future Cyber" for 3 months as well as maintenance guarantees for 1 year. Status for the improvement of this application is still "on going" because the vendor requested a time extension in the process of repairing and improving the application.

10. *Improving the role of mentoring and management consultation on MSMEs*

Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division strategies to achieve this goal is to provide assistance for Guaranteed MSMEs and Guaranteed Candidates to become partner of MSMEs in each Regional Office/Branch Office.

The measures taken are to make a direct visit (on site visit) and assistance to MSMEs Partner located in the working area of Regional Office/Branch Office.

In connection with the COVID-19 virus pandemic, Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division has conducted MSME seminars through online media (webinars)

The first webinar was held at Kanwil V Semarang with the theme "Preparing financial statements and socialization of MSMEs" on June 18, 2020.

Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi PIC Pendamping UMKM dalam mendampingi UMKM Binaan yang berada di wilayah kerja Kantor Wilayah/Kantor Cabang, saat ini sedang mempersiapkan modul pelatihan UMKM yang akan digunakan PIC Pendamping UMKM dalam memberikan pelatihan dan pendampingan pada saat melakukan kunjungan langsung (*on site visit*).

11. Meningkatkan jumlah UMKM binaan dan UMKM berperingkat Strategi Divisi Manajemen Risiko dan PUKM untuk mencapai sasaran tersebut adalah melakukan collecting data UMKM.

Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

- Melakukan kegiatan pelatihan/seminar/workshop UMKM yang secara bersamaan dilakukan collecting data UMKM.
- Melakukan kerja sama dengan Asosiasi pendamping UMKM dan Komunitas-komunitas UMKM untuk kegiatan *collecting data* UMKM.

Dapat dilaporkan bahwa Divisi Manajemen Risiko dan PUKM telah melakukan pelatihan dan sosialisasi UMKM berkerja sama dengan BNP2TKI dan Kemenkop serta melakukan pelatihan di Banyuwangi dan Mataram.

Selanjutnya selama masa *pandemic*, Divisi MR dan PUKM telah melakukan kegiatan sosialisasi dan *collecting data* melalui (*webinar*) bersama mitra *stakeholder*, mitra UMKM ataupun internal Jamkrindo.

Kemudian, Divisi Manajemen Risiko & PUKM telah melakukan perpanjangan *Memorandum of Standing (MoU)* dengan Asosiasi BDS Indonesia terkait kegiatan Pendataan UMKM, Konsultasi Manajemen dan Pendampingan UMKM.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dan PUKM

Jamkrindo menerapkan Performance Management System (PMS) sebagai tata aturan mengenai pengelolaan pengukuran kinerja baik untuk Perusahaan, unit kerja maupun individu. Dalam pelaksanaan PMS tersebut, pengukuran kinerja Perusahaan, unit kerja maupun individu Karyawan menggunakan pola Key Performance Indicator (KPI).

Tentang rincian penilaian kinerja Divisi Manajemen Risiko dan PUKM tahun 2020 mencakup metode penilaian dan realisasi hasil KPI dapat dilihat pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi Berikut Dasar Penilaiannya" dalam bab ini.

In addition, to improve the knowledge and competence for PIC who accompanying MSMEs in assisting MSMEs Partner located in the working area of Regional Office/Branch Office, is currently preparing a training module for MSMEs that will be used by PIC who accompanying MSMEs in providing training and mentoring when making a direct visit (on site visit).

11. *Increase the number of target MSMEs and MSMEs ranked Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division strategies to achieve this goal is to collect MSME data.*

The steps are:

- Conducting training activities/seminars/workshops for MSMEs along with collecting data of MSMEs.*
- Cooperating with the Associated of MSMEs Companion and Communities for MSME data collecting activities.*

It can be reported that Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division has conducted training and socialization of MSMEs in collaboration with BNP2TKI and the Ministry of Cooperatives in Banyuwangi and Mataram.

Furthermore, during the pandemic period, Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division have conducted socialization and collecting data through (webinars) with stakeholder partners, MSME partners or Jamkrindo internals.

Then, Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division has extended the Memorandum Of Standing (MoU) with the Indonesian BDS Association related to MSMEs Data Collection, Management Consultation and MSMEs Assistance.

Evaluation and Performance Assessment of Risk Management and MSMEs Rating and Management Consultation Division

Jamkrindo implements Performance Management System (PMS) as a rule on performance measurement management for the Company, work units and individuals. In PMS implementation, performance measurement for the Company, work units and individual Employees using Key Performance Indicator (KPI) patterns.

The details of performance assessment for Risk Management Division in 2020 includes the method of assessment and realization of KPI results can be seen in the section "Performance Assessment of Supporting Organs of Board of Directors and Basis of Assessment" in this chapter.



FUNGSI KEPATUHAN

Compliance Function

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah Perusahaan yang bersifat preventif, untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan otoritas yang berwenang dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap komitmen yang dibuat Perusahaan kepada Regulator atau pihak yang berwenang. Dalam rangka penerapan praktik terbaik GCG, pelaksanaan fungsi kepatuhan wajib didukung oleh seluruh Insan Jamkrindo sehingga kepatuhan diharapkan menjadi budaya Perusahaan yang diimplementasikan menjadi standar perilaku setiap Insan Jamkrindo.

The Compliance Function is a series of preventive actions or measures taken by the Company to ensure that the policies, terms, and procedures as well as the business activities carried out by the Company are in accordance with the terms of the competent authority and the applicable laws and regulations, and to ensure the Company's compliance with the commitments made by the Company to the Regulator or the authorities. In implementing GCG best practices, the implementation of the compliance function must be supported by all Jamkrindo's employees, therefore compliance is expected to become a corporate culture that is implemented as a standard of behavior for every Jamkrindo's Employee.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Keputusan Direksi No.91/Kep-Dir/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, M. Natsir Rahmadi dipercaya untuk menjabat Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan.

Profile of the Head of Compliance

Based on the Decree of the Board of Directors No.91/Kep-Dir/VIII/2016 dated August 1, 2016 regarding Appointment of the Officials of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, M. Natsir Rahmadi was entrusted to serve as the Head of Legal and Compliance.

M. Natsir Rahmadi

Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan
Head of Legal and Compliance

Menjabat Sejak: 1 Agustus 2016
Served Since: August 1, 2016

48
Tahun
Years Old

Pasuruan
25 Mei / May 25
1972

Domisili / Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Pendidikan / Education

Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Brawijaya (1999)
Bachelor in Law from Brawijaya University (1999)

Riwayat Jabatan / Professional History

Berkarir di Jamkrindo sejak tahun 2003. Jabatan yang pernah dipercayakan adalah Sekretaris Perusahaan (2015-2016), Plt. Sekretaris Perusahaan (2014-2015), Kepala Bagian Hukum dan Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan (2014), Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Hukum dan Kepatuhan (2012-2014), dan Kepala Seksi Administrasi & Keuangan KAC Papua (2011-2012).

His career at Jamkrindo has started since 2003. The positions that have been entrusted are Corporate Secretary (2015-2016), Plt. Corporate Secretary (2014-2015), Head of Legal and Compliance of Legal and Compliance Division (2014), Head of Compliance of Legal and Compliance Division (2012-2014), and Head of Administration & Finance Division of KAC Papua (2011-2012).

Sertifikasi / Certification

Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, Sertifikasi Manajemen Risiko Level I, Sertifikasi Manajemen Risiko Level II, dan Sertifikasi Manajemen Risiko Level III
ISO 37001:2016 Certification: Anti-Bribery Management System, Risk Management Level I Certification, Risk Management Level II Certification, and Risk Management Level III Certification

Struktur Organisasi dan Kedudukan Divisi Hukum dan Kepatuhan

Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam Satuan Kerja Kepatuhan, berikut disampaikan struktur organisasi Satuan Kerja Kepatuhan yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.01/KD/I/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Organizational Structure and Position of the Legal and Compliance Division

In order to describe the functions contained in the Compliance Unit, the following is the organizational structure of the Compliance Unit which has been ratified based on the Decree of the Board of Directors No.01/KD/I/V/2018 dated May 30, 2018 concerning the Organizational Structure of Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan Jamkrindo

Organizational Structure of the Jamkrindo Compliance Division



Hingga akhir tahun 2020, jumlah karyawan Satuan Kerja Kepatuhan sebanyak 5 (lima) orang, dengan rincian, sebagai berikut:

As of the end of 2020, the number of employees of the Compliance Unit is 5 (five) people, with the following details:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (people)
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Head of Compliance Unit	1
Kepala Bagian Kepatuhan Head of Compliance Division	1
Staf Kepatuhan Compliance Staff	3
Jumlah Total	5

Tugas Divisi Hukum dan Kepatuhan

Tugas Divisi Hukum dan Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bagian kepatuhan
2. Pengelolaan Kegiatan Kepatuhan Perusahaan
3. Pengusulan Dewan Pengawas Syariah
4. Pengelolaan *Board Manual*
5. Pelaksanaan tugas sesuai Tata Laksana yang berlaku
6. Pengembangan kompetensi karyawan yang berada di bawah kewenangannya sehingga memenuhi standar kompetensi yang ditentukan
7. Penerapan manajemen risiko
8. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG)
9. Pengawasan dan Pengendalian Internal Control

Duties of the Legal and Compliance Division

The duties of the Legal and Compliance Division are as follows:

1. Preparing the Work Plan and Budget (RKA) for the compliance division
2. Managing the Company Compliance Activities
3. Proposing for Sharia Supervisory Board
4. Managing Manual Board
5. Carrying out duties in accordance with the applicable Procedures
6. Carrying out competency development of employees under their authority so that they meet the specified competency standards
7. Implementing risk management
8. Implementing good corporate governance (GCG)
9. Carrying out internal supervision and control

10. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas bagian kepatuhan secara berkala
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain dalam lingkup bidang tugasnya.

10. *Preparing and submitting reports on the implementation of the duties of the compliance department on a regular basis;*
11. *Carrying out other tasks within the scope of their duties.*

Pengembangan Kompetensi

Competency Development Program

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Satuan Kerja Kepatuhan merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan risiko di lingkup Perusahaan.

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Compliance Unit competence is an effort to update knowledge to support the implementation of risk management within the Company.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan Divisi Hukum dan Kepatuhan di tahun 2020.

Competency improvement activities participated by the Legal and Compliance Head throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report. The following is conveyed competency improvement followed by employees of the Legal and Compliance Division in 2020.

Nama dan Jabatan <i>Name and Position</i>	Pelatihan dan Pendidikan <i>Training and Education</i>	Tempat dan Waktu <i>Place and Time</i>	Penyelenggara <i>Organizer</i>
M.Natsir Rahmadi Kepala Divisi Hukum dan Kepatuhan <i>Head of Legal and Compliance Unit</i>			
Arry Andru Palapi Kepala Bagian Kepatuhan <i>Head of Compliance Division</i>	Awareness Training ISO 37001:2016 SMAP Internal Audit Training ISO 37001:2016 SMAP	Via Zoom Meeting 27 Mei 2020 s.d 2 Juni 2020 <i>May 27, 2020 to June 2, 2020</i>	Cevral Consulting
Imron Wahidin Staf <i>Staff</i>			
Anggi Putra Staf <i>Staff</i>			
Gabby Chikita Putri Staf <i>Staff</i>			

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2020

Brief Report of Compliance Unit Duties Implementation in 2020

Berikut disampaikan pelaksanaan tugas yang telah dilakukan Satuan Kerja Kepatuhan di sepanjang tahun 2020:

The following is the implementation of the duties carried out by the Compliance Unit throughout 2020:

1. Di tengah dampak pandemi COVID-19 yang secara ekonomi dan sosial memberi dampak yang luas kepada dunia usaha dan hubungan sosial antar pelaku usaha dan masyarakat, tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan dinamika bagi Perusahaan sebagai akibat dari serangkaian aksi korporasi Perusahaan diantaranya melalui perubahan Anggaran Dasar Perusahaan; dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan bergabungnya Perusahaan

1. *In the midst of the COVID-19 pandemic which economically and socially had a broad impact on the business world and social relations among business actors and the community, 2020 was a year full of dynamic challenges for the Company as a result of a series of corporate actions, including the changes to the Budget Company Basis; from a Public Company (Perum) to a Limited Liability Company (PT) and the merger of an SOE Insurance and Guarantee Company*

Asuransi dan Penjaminan BUMN ke dalam *Holding* Asuransi dan Penjaminan dengan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPU) sebagai Induk *Holding* .

Serangkaian aksi korporasi Perusahaan yang terjadi selama kurun waktu tahun 2020 merupakan bagian dari kebijakan konsolidasi dan penataan ulang BUMN sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Atas serangkaian aksi korporasi dan perubahan status badan hukum Perusahaan di tahun 2020, maka berdasarkan tugas Satuan Kerja Kepatuhan dapat disampaikan bahwa:

- a. Perubahan statuta Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- b. Perubahan statuta Perusahaan telah dilaporkan ke OJK selaku regulator
- c. Perusahaan memastikan telah melakukann kebijakjan agara peraturan Perusahaan yang menjadi pedoman internal bagi Insan Jamkrindo dalam penyelenggraan kegiatan usaha penjaminan tetap sesuai (*comply*) dengan perubahan statuta Perusahaan. Implementasinya diwujudkan melalui inisiatif startetgis penyusunan program kerja Harmonisasi dan Penyesuaian pedoman Internal Perusahaan. Kecukupan peraturan Perusahaan yang tetap sesuai (*comply*) dimaksud merupakan bagian dari penerapan GCG sekaligus upaya untuk meningkatkan *Corporate Value* Perusahaan di mata *stakeholder* .

Sebagai kepatuhan atas kebijakan Pemerintah, selama tahun 2020 Jamkrindo juga telah melakukan kegiatan Sertifikasi ISO SNI 37001 :2016 *Anti Bribery System* (Sistem Manajemen Anti Penyuapan). Langkah Perusahaan untuk mengikuti Sertifikasi ISO 37001 : 2016 di tahun 2020 sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Komitmen Perusahaan untuk secara patuh menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan merupakan perwujudan dari dukungan Perusahaan untuk menciptakan ltransparansi ingkungan usaha sehat, bebas dari praktika Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dapat mengancam kelangsungan usaha Perusahaan dan dapat menyebabkan biaya tinggi dalam penyelenggraan kegiatan usaha.

2. Sebagaimana amanat dari Kementerian BUMN, dimana terdapat Surat Kementerian BUMN No.S-35/MBU/01/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Bagian Kepatuhan sebagai Leader dalam hal pelaksanaan SMAP ini telah menginisiasi unit kerja untuk melakukan kebijakan anti penyuapan diantaranya Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Internal, Divisi MSDM, Divisi Umum, Divisi Hukum dan Kepatuhan, Divisi

into an Insurance and Guarantee Holding with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPU) as the Holding Parent.

The Company's series of corporate actions during the period of 2020 were part of the policy of consolidation and restructuring of SOEs in the Non-Bank Financial Institutions (IKNB). Due to a series of corporate actions and changes to the Company's legal entity status in 2020, based on the duties of the Compliance Unit, it can be stated that:

- a. *Changes to the Company's statutes are in accordance with the terms of the applicable laws and regulations;*
- b. *Changes to the Company's statutes have been reported to the OJK as the regulator;*
- c. *The Company ensures that it has implemented a policy so that the Company regulations which serve as internal guidelines for Jamkrindo's Employee in the implementation of the credit guarantee business activities remain in compliance with the changes in the Company's statutes. Its implementation is realized through strategic initiatives in the preparation of work programs for Harmonization and Adjustment of the Company's Internal Guidelines. The adequacy of the Company's regulations that remain complied is part of the implementation of GCG as well as an effort to reveal the Company's Corporate Value in the eyes of stakeholders.*

As a compliance with Government policies, throughout 2020 Jamkrindo has also carried out ISO SNI 37001:2016 Anti Bribery System Certification activities (Anti-Bribery Management System). The Company's steps to follow ISO 37001: 2016 Certification in 2020 are in line with Presidential Regulation (Perpres) No. 54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention. The Company's commitment to obediently implementing the Anti-Bribery Management System is a manifestation of the Company's support to create a transparent and healthy business environment, free from the practice of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) which can threaten the continuity of the Company's business and can cause high costs in the implementation of business activities.

2. *As mandated by the Ministry of SOEs, where there is a Letter of the Ministry of SOEs No.S-35/MBU/01/2020 dated January 10, 2020 regarding the Implementation of the Anti-Bribery Management System in SOEs as the Implementation of Presidential Regulation No.54 of 2018 concerning the National Strategy for Corruption Prevention. The Compliance Division as a Leader in the implementation of SMAP has initiated work units to carry out anti-bribery policies including the Corporate Secretary, Internal Supervisory Unit, HC Division, General Division, Legal and Compliance Division,*



Keuangan dan Investasi dan Desk Subrogasi. *Output* dari kegiatan tersebut menghasilkan Sertifikat ISO 3700 : 2016 *Anti Bribery Management System* dari SAI Global tanggal 04 Agustus 2020 dan Apresiasi dari Kementerian BUMN sebagaimana surat No.S-307/S.MBU/09/2020 tanggal 16 September 2020 perihal Ucapan Terimakasih dan Apresiasi atas Perolehan Sertifikat ISO 37001:2016 . Untuk peraturan internal perusahaan terkait anti penyuapan bagian kepatuhan telah menerbitkan Peraturan Direksi No.07/Per-Dir/4/VI/2020 tentang Pedoman Penerapan Uji Kelayakan (*Due Diligence*), Peraturan Direksi No.08/Per-Dir/4/VI/2020 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis dan Peraturan Direksi No.09/Per-Dir/4/VI/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

3. Melakukan *Campaign* Budaya Kepatuhan terhadap Anti Gratifikasi, dimana Perusahaan telah memiliki Peraturan Direksi No.18/Per-Dir/4/XII/2020 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT Jamkrindo dan telah membentuk Unit Gratifikasi Perusahaan (UPG) tahun 2019.

Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, dengan suap yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang pengkategorian gratifikasi yang terkait kedinasan, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi.

Melakukan implementasi dan Melaporkan kepada KPK sebagai Regulator terhadap Penerimaan Gratifikasi yang diterima oleh Insan Jamkrindo tahun 2020 dan juga bagian kepatuhan menyampaikan kepada Insan Jamkrindo untuk melakukan pengisian surat pernyataan komitmen terhadap anti gratifikasi yang mana penyelewengan dari komitmen tersebut dapat dikenakan sanksi yang berlaku pada Perusahaan.

Finance and Investment Division and the Subrogation Desk. The output of these activities resulted in an ISO 3700: 2016 Anti Bribery Management System Certificate from SAI Global on August 4, 2020 and an Appreciation from the Ministry of SOEs as stated in letter No.S-307/S.MBU/09/2020 dated September 16, 2020 regarding Acknowledgment and Appreciation for Obtaining ISO 37001:2016 Certificate. For the Company's internal regulations related to anti-bribery, the compliance section has issued Board of Directors Regulation No.07/Per-Dir/4/VI/2020 concerning Guidelines for the Implementation of Due Diligence, Board of Directors Regulation No. 08/Per-Dir/4/VI/2020 concerning Guidelines for Postponing Business Transactions and Board of Directors Regulation No.09/Per-Dir/4/VI/2020 regarding Guidelines for Anti-Bribery Management System.

3. *Conducting a Compliance Culture Campaign against Anti-Gratification, where the Company already has Board of Directors Regulation No.18/Per-Dir/4/XII/2020 concerning Guidelines for PT Jamkrindo's Gratification Control and has established a Corporate Gratification Unit (UPG) in 2019.*

One of the Company's commitments in minimizing conflicts of interest as well as abuse of authority and position is that the Company seeks to implement gratification control from other parties. The importance of controlling gratification in the implementation of the Code of Conduct as described above is related to the definitive limitation between gratification or gifts in any form given by other parties, with bribes which are closely related to abuse of authority and position. The Company's Gratification Control Policy has clearly defined the categorization of gratuities related to service, gratuities that must be reported and gratuities that are not required to be reported. Through this policy, the Company not only strives for the implementation of GCG principles based on sound corporate management, but also provides a foundation for every Jamkrindo employee not to abuse their authority and position, as well as prevents Jamkrindo employees from the tendency of corruption.

Implementing and Reporting to the KPK as a Regulator on Gratification Acceptance received by Jamkrindo employees in 2020 and also the compliance section submits to Jamkrindo Personnel to fill out a statement of commitment to anti-gratification in which deviation from the commitment may be subject to sanctions applicable to the Company

4. Pelaksanaan Kuesioner *Self Assessment* Kepatuhan sasaran kepada pimpinan unit kerja selindo Perusahaan. Tujuannya melihat tingkat patuh dan ketidakpatuhan unit kerja pada peraturan-peraturan yang berlaku di perusahaan.
5. Melakukan *reminder* kewajiban Perusahaan atas Pelaporan Kepada Regulator, hal ini dilakukan rutin oleh bagian kepatuhan terhadap apa-apa saja kewajiban Pelaporan yang harus dilakukan oleh Perusahaan. Tujuan sebagai kepatuhan perusahaan terhadap *Regulator*, terhindar dari sanksi. Dan reputasi perusahaan terjaga.
6. Melakukan reminder Perjanjian Kerja sama yang akan jatuh tempo kepada unit kerja bisnis, dimana melakukan reminder setiap 6 (Enam) bulan, 3 (tiga) bulan dan 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja sama tersebut berakhir.
7. Memberikan *Compliance Review* Perjanjian Kerja sama dan Peraturan Perusahaan .
*diberikan apabila unit kerja terkait akan membuat suatu Perjanjian Kerja sama dan Peraturan Perusahaan dalam tahap *Legal Drafting*.
8. Memberikan *Compliance Checklist* Perjanjian Kerja sama dan Peraturan Perusahaan.
*diberikan pada saat pengajuan Finalisasi suatu Perjanjian Kerja sama dan Peraturan Perusahaan.
9. Melakukan reminder pemenuhan tindaklanjut Rekomendasi Auditor Eksternal dan Internal).
10. Melakukan *reminder* notulen rapat direksi dan rapat gabungan Direksi-Dewan Komisaris.
11. Melakukan reminder atas Sosialisasi dan Implementasi Peraturan-peraturan yang telah disetujui oleh Direksi.

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Divisi Hukum dan Kepatuhan

Jamkrindo menerapkan Performance Management System (PMS) sebagai tata aturan mengenai pengelolaan pengukuran kinerja baik untuk Perusahaan, unit kerja maupun individu. Dalam pelaksanaan PMS tersebut, pengukuran kinerja Perusahaan, unit kerja maupun individu Karyawan menggunakan pola Key Performance Indicator (KPI).

Tentang rincian penilaian kinerja Divisi Hukum dan Kepatuhan tahun 2020 mencakup metode penilaian dan realisasi hasil KPI dapat dilihat pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi Berikut Dasar Penilaiannya" dalam bab ini.

Performance Evaluation and Assessment for Legal and Compliance Division

Jamkrindo implements Performance Management System (PMS) as a rule on performance measurement management for the Company, work units and individuals. In PMS implementation, performance measurement for the Company, work units and individual Employees using Key Performance Indicator (KPI) patterns.

The details of performance assessment for Legal and Compliance Division in 2020 includes the method of assessment and realization of KPI results can be seen in the section "Performance Assessment of Supporting Organs of Board of Directors and Basis of Assessment" in this chapter.



AUDIT INTERNAL/SATUAN PENGAWASAN INTERN

Internal Audit Unit

Audit Internal merupakan proses pengawasan atas pengelolaan operasional dan bisnis Perusahaan yang dilakukan secara internal. Fungsi Audit Internal di Jamkrindo dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. SPI bertugas melakukan assurance dan consulting yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan memperbaiki operasional Perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Pihak yang Mengangkat/Memberhentikan Kepala Satuan Pengawasan Intern

Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas.

Profil Kepala Satuan Pengawasan Intern

Berdasarkan Keputusan Direksi No.81/SKD/4/XI/2018 tanggal 12 November 2018 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Pengawasan Intern Perum Jamkrindo, Mohamad Adhy Prayitno dipercaya untuk menjabat Kepala SPI dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Mohamad Adhy Prayitno

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Menjabat Sejak: 12 November 2018
Served Since: November 12, 2018

58
Tahun
Years Old

Jakarta
16 April / April 16
1962

Domisili / Domicile

Sleman, Yogyakarta, Indonesia
Sleman, Yogyakarta, Indonesia

Pendidikan / Education

S2 Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, 2003
Master of Management, Gadjah Mada University, 2003

Riwayat Jabatan / Professional History

Professional Auditor Audit Internal Perum Jamkrindo periode (2018), Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang (2016-2018), Wakil Inspektur pada Kantor Inspeksi Pekanbaru PT BRI (Persero) Tbk (2013-2016), Wakil Pemimpin Wilayah Bisnis pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Wilayah Jayapura (2011-2013), Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Jelambar (2009-2011), Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pangkal Pinang (2006-2009), Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Rantau Prapat (2003-2006), Pemimpin Cabang pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Maumere (2001-2003).

Professional Auditor of Perum Jamkrindo's Internal Audit period (2018), Deputy Head of Business Region at PT BRI (Persero), Tbk Malang Branch Office (2016-2018), Deputy Inspector at PT. BRI (Persero), Tbk Inspection Office in Pekanbaru (2013-2016), Deputy Head of Business Region of PT BRI (Persero), Tbk Jayapura Regional Office (2011-2013), Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Jelambar Branch Office (2009-2011), Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Pangkal Pinang Branch Office (2006-2009), Branch Manager at PT BRI (Persero), Tbk Rantau Prapat Branch Office (2003-2006), Branch Manager at PT BRI (Persero) Tbk Maumere Branch Office (2001-2003).

Sertifikasi / Certification

Qualified Internal Audit (QIA) 2015

Internal Audit is a process of monitoring the Company's operational and business management which is carried out internally. The Internal Audit function at Jamkrindo is carried out by the Internal Audit Unit (SPI) led by a Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. SPI is tasked with conducting independent and objective assurance and consulting, with the aim of increasing added value and improving the Company's operations, through a systematic approach by evaluating and improving the adequacy and effectiveness of the internal control system, risk management, and corporate governance.

The Party Appointing/Dismissing the Head of Internal Audit Unit

The Head of SPI is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The President Director may dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Commissioners if the Head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the applicable regulations and or fails or is incompetent to carry out his duties.

Internal Audit Unit Profile

Based on the Board of Directors Decree No.81/SKD/4/XI/2018 dated November 12, 2018 concerning Appointment of the Head of Internal Audit Unit of Perum Jamkrindo, Mohamad Adhy Prayitno is trusted to serve as Head of Internal Audit Unit and has obtained approval from the Board of Commissioners.

Struktur Organisasi dan Kedudukan Satuan Pengawasan Intern

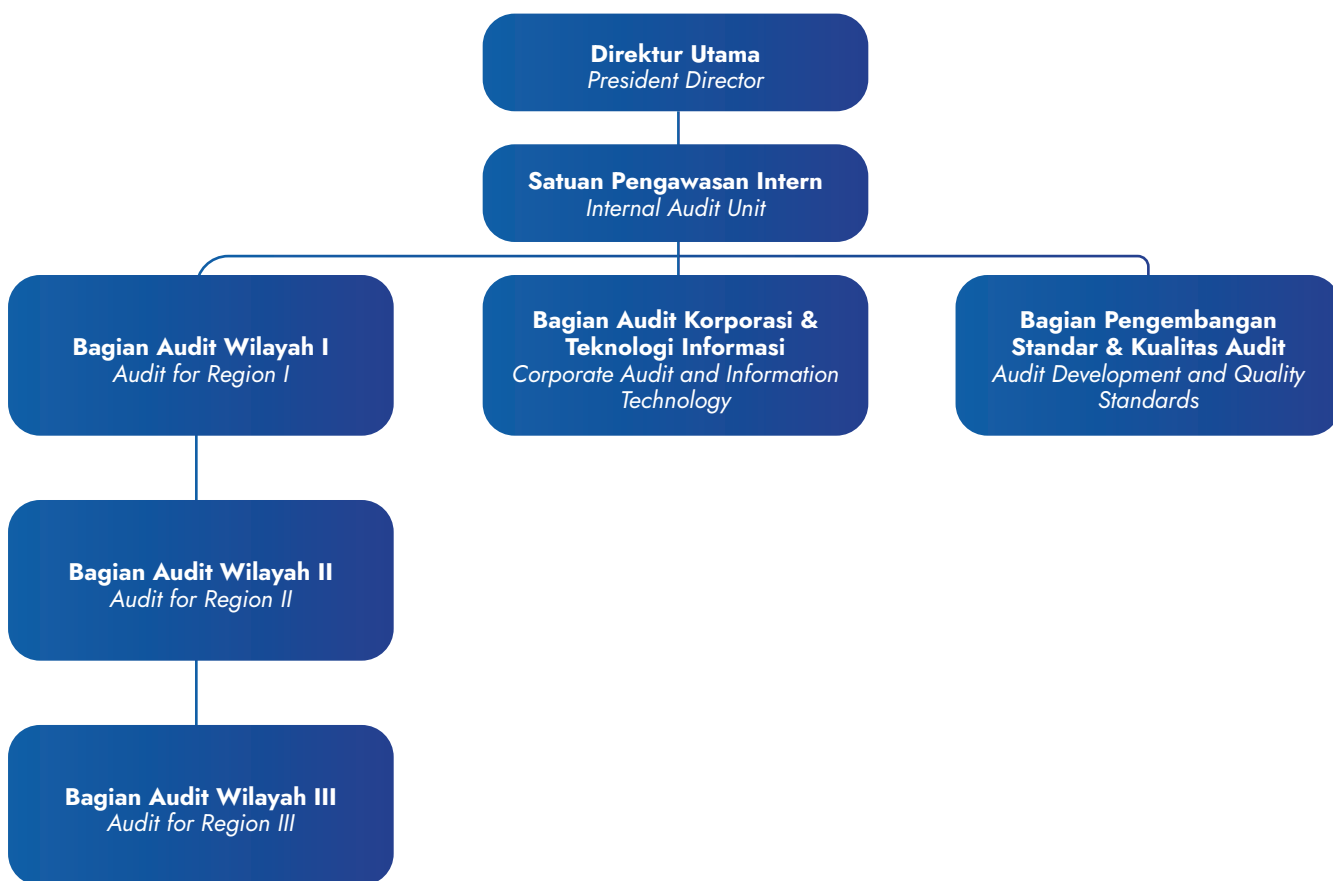
Satuan Pengawasan Intern (SPI) Jamkrindo dipimpin oleh seorang Kepala SPI yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris. Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala SPI setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris, jika Kepala SPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku dan atau gagal atau tidak cakap menjalankan tugas. Untuk dapat menggambarkan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam SPI, berikut disampaikan struktur organisasi SPI yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi No.01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018.

Organizational Structure and Position of the Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (SPI) of Jamkrindo is led by the Head of SPI who is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. The President Director may dismiss the Head of SPI after obtaining approval from the Board of Commissioners if the Head of SPI does not meet the requirements as an Internal Auditor as stipulated in the applicable regulations and or fails or is incompetent to carry out their duties. In order to describe the functions contained in the SPI, the following is presented the organizational structure of the SPI which has been ratified based on the Decree of the Board of Directors No.01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern (SPI) Jamkrindo

Organizational Structure of the Jamkrindo Internal Audit Unit (SPI)



Mengingat tugas pengawasan yang diemban SPI memegang peranan yang sangat penting, maka jumlah dan kualitas personil SPI diupayakan memadai sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugasnya. Pada periode 2020, jumlah karyawan SPI adalah 21 orang, dengan rincian, sebagai berikut:

Considering that the supervisory duty carried out by SPI plays a very important role, the number and quality of SPI personnel are strived to be adequate so as to support the implementation of their duties. In the 2020 period, the number of SPI employees is 21 people, with the following details:

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (people)
Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Unit	1
Kepala Bagian Audit Wilayah I Head of Audit for Region I	1
Kepala Bagian Audit Wilayah II Head of Audit for Region II	1
Kepala Bagian Audit Wilayah III Head of Audit for Region III	1
Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi Head of Corporate Audit and Information Technology	1
Kepala Bagian Pengembangan dan Standar Kualitas Audit Head of Audit Development and Quality Standards	1
Staf Staff	15
Jumlah Total	21

Piagam SPI (Internal Audit Charter)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) mempunyai Audit Charter yang ditetapkan pada Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris No.04/SKB/1/XII/2020-KEP-10/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) PT Jaminan Kredit Indonesia. Tak hanya itu, SPI juga memiliki Pedoman Audit Internal yang ditetapkan pada Peraturan Direksi No.60/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Audit Internal PT Jaminan Kredit Indonesia.

Di samping itu, Internal Audit Charter merupakan pemenuhan compliance perusahaan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN dan Undang-Undang RI No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Visi dan Misi SPI



Menjadi **strategic business partner** yang **independen, objektif, profesional, terpercaya, tanggap** melalui kegiatan **assurance** dan **consulting** serta dapat memberikan **nilai tambah** bagi Perusahaan.

To become a **strategic business partner** that is **independent, objective, professional, reliable, responsive** through **assurance and consulting** activities and able to provide **added value** to the Company..

Internal Audit Charter

Internal Audit Unit (SPI) has audit charter stipulated in the Joint Decree of Board of Directors and Board of Commissioners No.04/SKB/1/XII/2020-KEP-10/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Internal Audit Charter of PT Jaminan Kredit Indonesia. SPI also has Internal Audit Guidelines stipulated in Board of Directors Regulation No.60/Per-Dir/1/XII/2020 December 30, 2020 on Internal Audit Policy of PT Jaminan Kredit Indonesia.

In addition, the Internal Audit Charter is the fulfillment of the Company's compliance in implementing the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs and the Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises.

SPI's Vision and Mission



1. Aktif melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas Perusahaan meliputi proses pengendalian manajemen, operasional, dan pengelolaan risiko dalam peningkatan kinerja Perusahaan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas kegiatan Perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG.
To actively supervise all Company activities including management control, operational and risk management processes in improving the Company's performance through increasing the efficiency and effectiveness of the Company's activities based on GCG principles.
2. Meningkatkan peran pemeriksaan intern dan kualitas hasil pengawasan melalui peningkatan kompetensi Auditor Internal dan pemanfaatan sistem informasi.
To increase the role of internal audit and quality of supervision results by increasing the competence of Internal Auditors and utilizing information systems.
3. Mengupayakan pelayanan konsultasi untuk meningkatkan nilai-nilai Perusahaan dan sistem pendukungnya, memberikan jaminan bahwa seluruh aktivitas Perusahaan sudah dilakukan sesuai dengan peraturan, *business best practice*, dan prosedur serta kebijakan yang ditetapkan.
To make consulting services improve the values of the Company and its support system, provide assurance that all Company activities have been carried out in accordance with regulations, business best practices, and established procedures and policies.
4. Memberikan nilai tambah yang berfokus pada proses bisnis dan pelanggan, proaktif, antusias dan terpercaya, dapat berkomunikasi secara efektif, mampu menemukan akar permasalahan, dan dapat memanfaatkan secara optimal sistem teknologi informasi.
To provide added value that focuses on business processes and customers, to be proactive, enthusiastic and reliable, as well as to be able to communicate effectively, find the root of the problem, and make optimal use of information technology systems.

Tugas Satuan Pengawasan Intern (SPI) terkait dengan Pemeriksaan Internal Perusahaan

Dalam menjalankan Pemeriksaan Internal pada Perusahaan, SPI Jamkrindo bertugas:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjalankan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit.
2. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan anggarannya.
3. Melaksanakan pemeriksaan rutin sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan pemeriksaan lainnya atas tugas sesuai arahan dan persetujuan Direktur Utama.
4. Melakukan review dan evaluasi penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan organisasi yang berlaku serta memberikan kontribusi pada peningkatan proses manajemen risiko dengan membantu Perusahaan mengidentifikasi besaran risiko yang signifikan.
5. Melakukan koordinasi kegiatan SPI dengan kegiatan unit kerja lainnya di lingkungan Perusahaan dan mengevaluasi kecukupan indikator pengukuran kinerja yang digunakan.
6. Menyusun dan menyempurnakan standar kerja audit internal dan pedoman audit internal dan mengkoordinir penyusunan laporan kegiatan SPI.
7. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada pihak-pihak terkait.

Duties of the Internal Audit Unit (SPI) related to the Company's Internal Audit

In carrying out the Internal Audit of the Company, Jamkrindo's SPI is assigned on:

1. Assisting the duties of the President Director and the Board of Commissioners in supervising by carrying out planning, implementation, and monitoring audit results operationally.
2. Coordinating and integrating the preparation of the Annual Audit Work Program (PKPT) and its budget.
3. Carrying out routine inspections in accordance with the Annual Audit Work Program (PKPT) and other inspections on assignments according to the direction and approval of the President Director.
4. Reviewing and evaluating the implementation of GCG in the assessment presentation in accordance with applicable organizational regulations/policies and contributing to the improvement of the risk management process by helping the Company identify significant risks.
5. Coordinating SPI activities with other work unit activities within the Company and evaluating the adequacy of the performance measurement indicators used.
6. Developing and improving internal audit work standards and internal audit guidelines and coordinating the preparation of SPI activity reports.
7. Submitting the Inspection Result Report (LHP) to related parties.



8. Melakukan *monitoring* dan pelaksanaan atas tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal serta memberikan jasa konsultasi yang objektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya terkait dengan fungsi pengawasan.
9. Berkoordinasi dengan pihak eksternal berdasarkan penugasan dari Direktur Utama dalam kaitan dengan tugas-tugas pengawasan.
10. Meningkatkan kompetensi pemeriksaan intern melalui pendidikan dan pelatihan.

8. *Monitoring and implementing follow-up on the results of internal and external audits as well as providing objective consulting services to management and other work units related to the supervisory function.*
9. *Coordinating with external parties based on assignments from the President Director in relation to supervisory duties.*
10. *Improving the competence of internal audit through education and training.*

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, SPI bertanggung jawab untuk:

To carry out these main duties, SPI is responsible for:

1. Menyelenggarakan program kerja pengawasan atas pelaksanaan semua kebijakan dan keputusan Direksi serta program kerja Perusahaan.
2. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada bidang Pengawasan Intern Perusahaan yang berkaitan dengan pemeriksaan kegiatan operasional dan administrasi & keuangan.
3. Melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran laporan atau informasi mengenai segala hal yang dapat menyebabkan kerugian Perusahaan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama mengenai hasil pemeriksaan, berikut saran perbaikannya.
5. Menilai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, dengan melakukan penilaian dan pemantauan atas semua sistem, prosedur, ketentuan dan operasional Perusahaan untuk mendorong efektivitas dan ketaatan dalam pelaksanaannya serta memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai pengendalian/pengelolaan risiko usaha.
6. Menilai sistem pengendalian intern perusahaan.
7. Menilai kewajaran laporan keuangan dan menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional/non operasional perusahaan.
8. Memberikan pendapat, usulan dan saran perbaikan atas kegiatan operasional/non operasional.
9. Memotivasi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh setiap unit kerja dan wajib melakukan penilaian dan pemantauan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut oleh semua Organ Perusahaan.
10. Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas hasil pemeriksaan SPI maupun auditor eksternal dan melaporkan hasil pantauan tersebut kepada Direktur Utama.
11. Menjadi mitra kerja auditor eksternal dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan ataupun pemeriksaan lainnya.

1. *Organizing a supervisory work program on the implementation of all policies and decisions of the Board of Directors as well as the Company's work program.*
2. *Coordinating and controlling the implementation of activities in the field of Internal Control of the Company related to the audit of operational and administrative & financial activities.*
3. *Conducting research and testing on the veracity of reports or information regarding all matters that may cause losses to the Company.*
4. *Preparing and submitting a report to the President Director regarding the results of the inspection, along with suggestions for improvement.*
5. *Assessing compliance with existing regulations, by assessing and monitoring all systems, procedures, terms and operations of the Company to encourage effectiveness and compliance in their implementation as well as providing recommendations for the Board of Directors regarding business risk control/management.*
6. *Assessing the Company's internal control system.*
7. *Assessing the fairness of the financial statements and assessing the efficiency and effectiveness of the Company's operational/non-operational activities.*
8. *Providing opinions, proposals and suggestions for improvement of operational/non-operational activities.*
9. *Motivating the implementation of GCG principles by each work unit as well as evaluating and monitoring the implementation of these principles by all Company Organs.*
10. *Monitoring the implementation of follow-up audit results on the results of the SPI examination and external auditors and reporting the results of the monitoring to the President Director.*
11. *Becoming a partner of the external auditor in the audit of the company's financial statements or other audits.*

Partisipasi Dalam Perhimpunan Profesi Auditor Internal

SPI Jamkrindo aktif sebagai anggota pada Forum Komunikasi Satuan Pengawas Intern (FKSPI) Asuransi Negara dan Jasa Keuangan (Asgara Jaskeu Plus). Keikutsertaan SPI dalam forum tersebut berguna untuk sharing pengetahuan dan informasi mengenai kegiatan pemeriksaan intern sesama BUMN.

Sertifikasi Profesi Satuan Pengawasan Intern

Sertifikasi profesi menjadi sebuah aspek penting bagi auditor untuk memahami perkembangan audit, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan serta perkembangan industri. Berikut disampaikan sertifikasi profesi yang dimiliki karyawan SPI hingga akhir tahun 2020.

Participation in the Professional Association of Internal Auditors

Jamkrindo's SPI is active as a member of the Communication Forum for the Internal Supervisory Unit (FKSPI) of State Insurance and Financial Services (Asgara Jaskeu Plus). SPI's participation in the forum is useful for sharing knowledge and information regarding internal audit activities among SOEs.

Internal Audit Unit Professional Certification

Professional certification is an important aspect for auditors to understand audit developments, particularly related to regulatory compliance and industry developments. Following are the professional certifications held by SPI employees as of the end of 2020.

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Sertifikasi Profesi Audit Internal Internal Audit Unit Professional Certification
Andry Septianto (Kepala SPI / Head of Internal Audit Unit)	
Aditya Putra Darmawan (Kabag Audit Wilayah 1/Head of Audit unit for Region 1)	
Karinu Aji Wira Kusuma (Kabag PSKA/Head of PSKA unit)	
Rachmat Firdaus (Kabag Audit Korporasi & TI/Head of Corporate Audit & IT)	
Asep Ginanjar Cahya Gumilar (Kasie PSKA/Head of PSKA Section)	
Andreas Theodoros Mokodaser (Staf Audit Wilayah 2/Audit Staff for Region 2)	
Arif Syachroni (Staf Audit Wilayah 3/Audit Staff for Region 3)	
Andik Sugiarto (Staf Audit Wilayah 3/Audit Staff for Region 3)	
Laila Wijayanti (Staf Audit Wilayah 1/Audit Staff for Region 1)	Qualified Internal Auditor (QIA)
Rinjani Yusni Maharjanti (Staf Audit Korporasi & TI/Staff of Corporate Audit & IT)	
Aldhy Haryono Fachrial (Staf Audit Wilayah 3/Audit Staff for Region 3)	
Muhammad Ilham (Staf Audit Wilayah 2)/Audit Staff for Region 2	
Muhammad Leonard Gustav Qhadafi (Staf Audit Wilayah 2/Audit Staff for Region 2)	
Andi Aldino Chandra (Staf Audit Korporasi & TI/Staff of Corporate Audit & IT)	
Emmerisa br. Sembiring (Staf PSKA/PSKA Staff)	
Michael Ranap Simanjuntak (Staf Audit Korporasi & TI/Staff of Corporate Audit & IT)	
Faisal Arief Sentosa (Staf Audit Wilayah 1/Audit Staff for Region 1)	

Jumlah karyawan SPI yang memiliki sertifikasi profesi sebanyak 17 (tujuh belas) orang atau 89,47% dari jumlah keseluruhan karyawan SPI. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan level sertifikasi profesi bagi karyawan SPI, baik bagi karyawan yang telah memiliki sertifikasi profesi maupun yang belum memiliki.

The number of SPI employees who have professional certification is 17 (seventeen) people or 89.47% of the total number of SPI employees. The Company is committed to increasing the level of professional certification for SPI employees, both for employees who already have professional certifications and those who do not.



Pengembangan Sumber Daya Auditor

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi SPI merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas audit internal.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Kepala SPI di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini. Berikut disampaikan peningkatan kompetensi yang diikuti karyawan SPI di tahun 2020.

Auditor Competency Development

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human capital by conducting competency development programs for all employees. SPI competency development is an effort to update knowledge to support the implementation of internal audit tasks.

The competency development activities participated by the Head of SPI throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter in this annual report. The following are the competency development programs participated by the SPI employees in 2020.

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
	Dynamic Business Presentation untuk L1 <i>Dynamic Business Presentation for L1</i>	Jakarta 9 – 10 Januari 2020 <i>January 9 - 10, 2020</i>	PT Jamkrindo
Dadang Ary Aviyanto Plt. Wakil Kepala Satuan Pengawas Intern <i>Plt. Deputy Head of Internal Audit Unit</i>	Business Leader Development Program - PRASMUL	Jakarta 23 – 24 Januari 2020 <i>January 23 - 24, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Business Leaders Development Program Pengembangan L1 - PRASMUL <i>Business Leaders Development Program L1 - PRASMUL</i>	Prasetya Mulya 19 – 21 Februari 2020 <i>February 19 - 21, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Presentasi Usulan Project - BLDP <i>Project Proposal Presentation - BLDP</i>	Online Training 3 Juni 2020 <i>June 3, 2020</i>	PT Jamkrindo
Karinu Aji Wira Kusuma Kepala Bagian Audit Wilayah II <i>Head of Audit Division for Region II</i>	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 untuk Kepala Bagian (Batch IV) <i>MR Level 2 Debriefing & Certification for Division Heads (Batch IV)</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 6 – 7 Februari 2020 <i>February 6 - 7, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Ujian Sertifikasi MR Level 2 (Batch IV) <i>MR Level 2 Certification Test (Batch IV)</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 8 Februari 2020 <i>February 8, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Management Information System for non-IT Background	Ruang Pelatihan Lt 8 14 Februari 2020 <i>February 14, 2020</i>	PT Jamkrindo
Irmatati Kepala Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi <i>Head of Corporation and Information Technology</i>	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 <i>MR Level 2 Debriefing and Certification</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 5 - 6 Maret 2020 <i>Maret 5 - 6, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Ujian Sertifikasi MR Level 2 <i>MR Level 2 Certification Test</i>	Ruang Serbaguna 7 Maret 2020 <i>March 7, 2020</i>	PT Jamkrindo
	Invesgasi Forensik <i>Forensic Investigation</i>	Online Training 26 – 27 Oktober 2020 <i>October 26 - 27, 2020</i>	Visi Integritas
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 8 Januari 2020 <i>January 8, 2020</i>	PT Jamkrindo
Laurdes Sinurat Staf Bagian Audit Wilayah I <i>Audit Division Staff for Region I</i>	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 15 Januari 2020 <i>January 15, 2020</i>	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 <i>January 16, 2020</i>	PT Jamkrindo

Nama dan Jabatan Name and Position	Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Tempat dan Waktu Place and Date	Penyelenggara Organizer
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 5 Februari 2020 February 5, 2020	PT Jamkrindo
Laurdes Sinurat Staf Bagian Audit Wilayah I Audit Division Staff for Region I	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 12 Februari 2020 February 12, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 19 Februari 2020 February 19, 2020	PT Jamkrindo
	Internet of Things	Online Training 23 April 2020 April 23, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 15 Januari 2020 January 15, 2020	PT Jamkrindo
	English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"	Ruang Pelatihan Lt 8 16 Januari 2020 January 16, 2020	PT Jamkrindo
Andreas Theodorus Mokodaser Staf Bagian Audit Wilayah II Audit Division Staff for Region II	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 22 Januari 2020 January 22, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 29 Januari 2020 January 29, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 5 Februari 2020 February 5, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 12 Februari 2020 February 12, 2020	PT Jamkrindo
	IELTS PREPARATION CLASS	Ruang Pelatihan Lt 8 19 Februari 2020 February 19, 2020	PT Jamkrindo
Aldhy Haryono Fachrial Staf Bagian Audit Wilayah II Audit Division Staff for Region II	Forensic Accounting vs Invesgave Auditing	Online Training 11 – 13 Mei 2020 May 11 - 13, 2020	Ikatan Akuntan Indonesia
Andi Aldino Chandra Staf Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi Corporation and Information Technology Staff	Internet of Things	Online Training 23 April 2020 April 23, 2020	Inixindo
Rinjani Yusni Maharjanti Staf Bagian Audit Korporasi dan Teknologi Informasi Corporation and Information Technology Staff	Management Information System For Non-IT Background	Ruang Serbaguna Lt 10 13 – 14 Februari 2020 February 13 - 14, 2020	PT Jamkrindo

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas SPI Tahun 2020

Brief Report on Internal Audit Duties Implementation in 2020

Sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan SPI Tahun 2020, sampai dengan bulan Desember 2020 telah menyelesaikan/sedang melaksanakan pemeriksaan terhadap:

- 22 Kantor Cabang (KC) yaitu:

In accordance with the SPI Annual Inspection Work Program in 2020, until December 2020 has completed/is carrying out checks on:

- 22 Branch Offices (KC) are:

No	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Audit Implementation
1	Tasikmalaya	17 s.d 24 Februari 2020 February 17 to 24, 2020
2	Purwakarta	17 s.d 24 Februari 2020 February 17 to 24, 2020
3	Bengkulu	17 s.d 24 Februari 2020 February 17 to 24, 2020
4	Cirebon	9 s.d 16 Maret 2020 March 9 to 16, 2020
5	Balikpapan	9 s.d 16 Maret 2020 March 9 to 16, 2020
6	Mamuju	9 s.d 17Maret 2020 March 9 to 17, 2020
7	Parepare	26 Agustus s.d 3 September 2020 August 26 to September 3, 2020
8	Kupang	27 Agustus s.d 8 September 2020 August 27 to September 8, 2020
9	Samarinda	27 Agustus s.d 8 September 2020 August 27 to September 8, 2020
10	Palembang	28 Agustus s.d 9 September 2020 August 28 to September 9, 2020
11	Bandung	28 Agustus s.d 9 September 2020 August 28 to September 9, 2020
12	Balige	24 September s.d 2 Oktober 2020 September 24 to October 2, 2020
13	Pekanbaru	29 September s.d 19 Oktober 2020 September 29 to October 19, 2020
14	Cabang Khusus	26 Oktober s.d 13 November 2020 October 26 to November 13, 2020
15	Medan	26 Oktober s.d 18 November 2020 October 26 to November 18, 2020
16	Jakarta	26 Oktober s.d 18 November 2020 October 26 to November 18, 2020
17	Surabaya	26 Oktober s.d 18 November 2020 October 26 to November 18, 2020
18	Jambi	3 s.d 14 Desember 2020 December 3 to 14, 2020
19	Denpasar	3 s.d 15 Desember 2020 December 3 to 15, 2020
20	Manado	3 s.d 15 November 2020 November 3 to 15, 2020
21	Batam	3 s.d 16 Desember 2020 December 3 to 16, 2020
22	Gorontalo	4 s.d 13 November 2020 November 4 to 13, 2020

- 9 (sembilan) Kantor Wilayah (KW) yaitu:

- 9 (nine) Regional Offices (KW) are:

No	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Audit Implementation
1	Kanwil I / Regional Office I (Medan)	17 s.d 26 Februari 2020 February 17 to 26, 2020
2	Kanwil VI / Regional Office VI (Surabaya)	9 s.d 18 Maret 2020 March 9 to 18, 2020
3	Kanwil II / Regional Office II (Palembang)	23 Juli s.d 14 Agustus 2020 July 23 to August 14, 2020
4	Kanwil IV / Regional Office IV (Bandung)	
5	Kanwil VII / Regional Office VII (Denpasar)	24 Juli s.d 14 Agustus 2020 July 24 to August 14, 2020
6	Kanwil VIII / Regional Office VIII (Banjarmasin)	
7	Kanwil V / Regional Office V (Semarang)	22 September s.d 12 Oktober 2020 September 22 to October 12, 2020
8	Kanwil IX / Regional Office IX (Makassar)	
9	Kanwil III / Regional Office III (Jakarta)	23 September s.d 13 Oktober 2020 September 23 to October 13, 2020

- 8 (delapan) Divisi dan 1 (satu) Desk yaitu:

- 8 (eight) Divisions and 1 (one) Desk are:

No	Kantor Cabang Branch Offices	Pelaksanaan Audit Audit Implementation
1	Divisi Jaringan dan Layanan Network and Services division	
2	Divisi Bisnis 3 Business Division 3	30 Maret s.d 17 April 2020 March 30 to April 17, 2020
3	Divisi Akuntansi Accounting Division	
4	Divisi Teknik dan Administrasi Bisnis Engineering and Business Administration Division	
5	Desk Subrogasi Subrogation Desk	6 s.d 20 Mei 2020 May 6 to 20, 2020
6	Divisi Bisnis 1 Business Division 1	
7	Divisi Bisnis 2 Business Division 2	8 s.d 26 Juni 2020 June 8 to 26, 2020
8	Divisi Keuangan dan Investasi Finance and Investment Division	
9	Divisi Umum General Division	3 s.d 23 Desember 2020 December 3 to 23, 2020



a. Hasil Temuan Auditor Eksternal

a. External Auditor's Findings

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal

Number of External Auditor Findings

Posisi Position	Auditor Eksternal External Auditor					
	BPK		OJK		KAP	
	PDDT	Kerugian Negara State Losses	2019	2020	2019	2020
Total Temuan Total Findings	16	3	11	29	6	
Total Rekomendasi Total Recommendations	37	4	15	39	6	
Rekomendasi yang Telah Diselesaikan Recommendations that have been implemented	27	4	15	39	6	On Progress
Dalam Proses Penyelesaian In the process	72,97%	100%	100%	100%	100%	

b. Hasil Temuan SPI

b. SPI Audit Findings

Jumlah Temuan Hasil Pemeriksaan SPI

Number of SPI Audit Findings

Unit Kerja Work Unit	2020			2019		
	Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Follow-Up Solution		Jumlah Rekomendasi Total Recommendations	Penyelesaian Tindak Lanjut Follow-Up Solution	
Divisi Division	78	67	85,90%	220	202	91,82%
Kantor Cabang Branch Office	551	541	98,19%	1951	1951	100%
Kantor Wilayah Regional Office	305	305	100%	258	258	100%
Jumlah Total	934	913	97,75%	2411	2411	99,26%

Evaluasi dan Penilaian Kinerja Satuan Pengawasan Intern

Performance Evaluation and Assessment the Internal Audit Unit

Jamkrindo menerapkan Performance Management System (PMS) sebagai tata aturan mengenai pengelolaan pengukuran kinerja baik untuk Perusahaan, unit kerja maupun individu. Dalam pelaksanaan PMS tersebut, pengukuran kinerja Perusahaan, unit kerja maupun individu Karyawan menggunakan pola Key Performance Indicator (KPI).

Jamkrindo implements Performance Management System (PMS) as a rule on performance measurement management for the Company, work units and individuals. In PMS implementation, performance measurement for the Company, work units and individual Employees using Key Performance Indicator (KPI) patterns.

Tentang rincian penilaian kinerja SPI tahun 2020 mencakup metode penilaian dan realisasi hasil KPI dapat dilihat pada bagian "Penilaian Kinerja Organ Pendukung Direksi Berikut Dasar Penilaiannya" dalam bab ini.

The details of performance assessment for Internal Audit Unit in 2020 includes the method of assessment and realization of KPI results can be seen in the section "Performance Assessment of Supporting Organs of Board of Directors and Basis of Assessment" in this chapter.

AKUNTAN PUBLIK *Public Accountant*

Akuntan Publik, atau proses audit yang dilakukan pihak eksternal melakukan audit finansial untuk memberikan pendapat yang independen dan objektif mengenai kewajaran, ketaatazasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntan Publik harus terbebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam Perusahaan, serta Perusahaan wajib menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan dalam proses audit eksternal sehingga memungkinkan Akuntan Publik memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

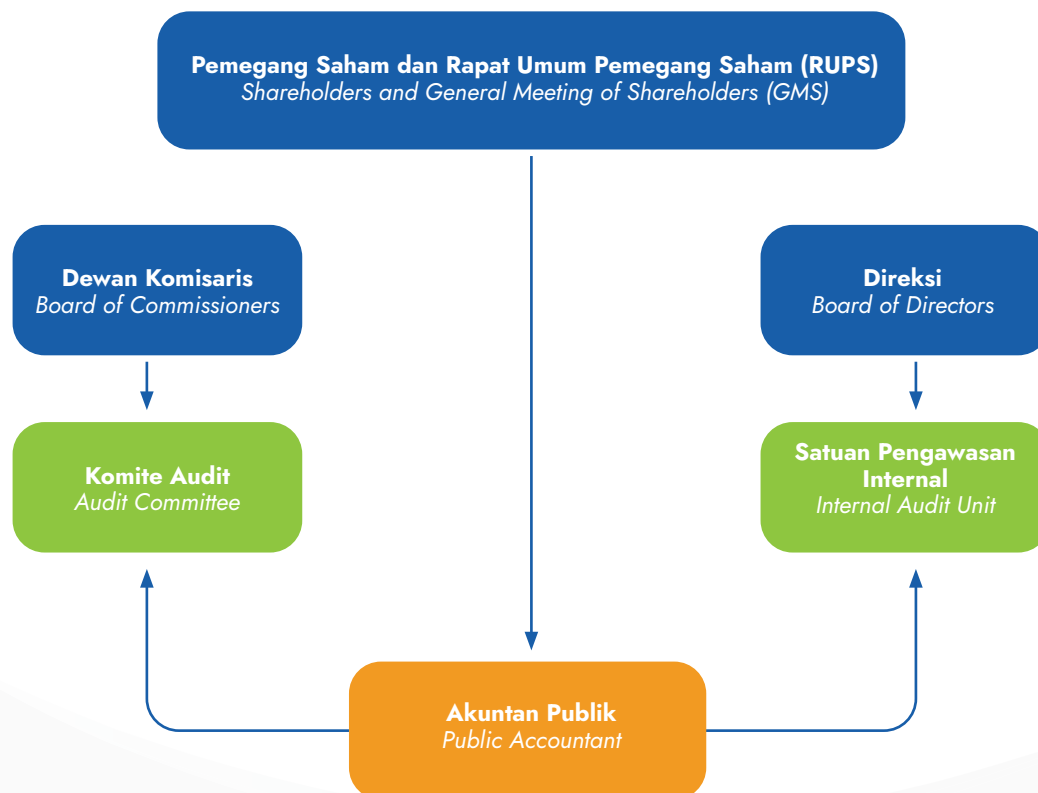
Kantor Akuntan Publik yang memeriksa laporan keuangan Perusahaan ditetapkan melalui RUPS berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Untuk menjamin independensi dan kualitas hasil pemeriksaan, auditor eksternal yang ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan dengan setiap level pejabat Perusahaan.

Skema sederhana tentang hubungan organ internal GCG dan Akuntan Publik sebagai organ eksternal dapat dilihat di bawah ini.

A Public Accountant, or an external party who carries out an audit process, conducts a financial audit to provide an independent and objective opinion regarding the fairness, compliance and conformity of the Company's financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK) and applicable laws and regulations. Public Accountants must be free from the influence of the Board of Commissioners, Board of Directors and interested parties in the Company, and the Company is required to provide all accounting records and supporting data needed in the external audit process so as to enable the Public Accountant to provide their opinion on the fairness, compliance and conformity of the Company financial statements with Indonesian Financial Accounting Standards.

The Public Accounting Firm that examines the Company's financial statements is determined through the GMS based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. To ensure the independence and quality of the audit results, the appointed external auditor must not have a conflict of interest with any level of the Company's officials.

A simple schematic of the relationship between GCG internal organs and Public Accountants as external organs can be seen below.





Pemegang Saham melalui RUPS memiliki kewenangan untuk menetapkan Auditor Eksternal yang akan melaksanakan audit atas laporan keuangan Perusahaan. Dalam melaksanakan fungsi audit independen, Auditor Eksternal melakukan hubungan dengan Satuan Pengawasan Internal (SPI) yang berada di bawah Direksi, serta Komite Audit yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Penunjukan Auditor Publik mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik; dan usulan Dewan Komisaris yang disahkan dalam RUPS. Berdasarkan PP 20/2015 tersebut, Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dimana Auditor Publik dapat memberikan kembali jasa audit setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa audit pada perusahaan yang sama.

Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Manajemen bertanggung jawab terhadap penyajian Laporan Keuangan Perusahaan dan patuh terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Prosedur Audit Eksternal dan Standar Audit

- Audit atas Laporan Keuangan Perusahaan dilakukan sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik yang mencakup seluruh prosedur audit yang dipandang perlu sesuai dengan keadaan.
- Audit meliputi pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern, serta pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. Audit juga akan meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian atas penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI.
- Sebagai bagian dari proses audit, Kantor Akuntan Publik (KAP) juga melakukan tanya jawab kepada manajemen mengenai pernyataan manajemen yang disajikan dalam Laporan Keuangan.
- Audit mengandung risiko inheren bahwa jika terdapat kekeliruan dan ketidakberesan yang material. Jika terdapat hal tersebut, KAP akan menyampaikan kepada manajemen. Manajemen menyetujui kertas kerja pemeriksaan KAP atas Perusahaan untuk di-review oleh badan atau otoritas terkait.
- Audit dilaksanakan berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Jika terdapat bantuan keuangan Pemerintah RI, maka audit dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan (BPK) RI.

Shareholders through the GMS have the authority to determine the External Auditor who will carry out an audit of the Company's financial statements. In carrying out the independent audit function, the External Auditor maintains a relationship with the Internal Audit Unit (SPI) under the Board of Directors, and the Audit Committee under the Board of Commissioners.

Appointment of Public Auditor refers to the Government Regulation no. 20 of 2015 concerning the Practice of Public Accountants; and proposals from the Board of Commissioners which were approved in the GMS. Based on the PP 20/2015, the Public Accountant is limited to a maximum of 5 (five) consecutive fiscal years, in which the Public Auditor can provide audit services again after 2 (two) consecutive fiscal years of not providing audit services to the same company.

Compliance with Indonesian Financial Accounting Standards

Management is responsible for the presentation of the Company's Financial Statements and complies with the applicable Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia set by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).

External Audit Procedures and Auditing Standards

- *Audit of the Company's Financial Statements is carried out in accordance with the professional standards of a Public Accountant which includes all audit procedures deemed necessary in accordance with the circumstances.*
- *Audit includes test and evaluation of the internal control system, as well as examining, on a test basis, the evidence supporting the amounts and disclosures in the Financial Statements. The audit will also include an assessment of the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as an assessment of the overall presentation of the Financial Statements in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by IAI.*
- *As part of the audit process, the Public Accounting Firm (KAP) also conducts questions and answers to management regarding management statements presented in the Financial Statements.*
- *Audit involves an inherent risk that there will be material errors and irregularities. If this is the case, the KAP will report it to management. Management approves KAP audit work papers on the Company to be reviewed by the relevant agency or authority.*
- *Audit is conducted based on the Professional Standards of Public Accountants issued by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI). If there is financial assistance from the Government of Indonesia, the audit is carried out based on the State Financial Audit Standards (SPKN) issued by the Indonesian Financial Supervisory Agency (BPK).*

Mekanisme Penunjukan Hingga Penetapan Akuntan Publik

The Mechanism for The Appointment of Public Accounting Firm

Penyampaian arahan dan penugasan dari Dewan Pengawas kepada Komite Audit
Submission of guidance and assignment from the Board of Supervisor Council to the Audit Committee



Tindak lanjut Komite Audit: Melakukan evaluasi atas pelaksanaan audit internal dan eksternal. Menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas.
The follow-up by the Audit Committee: Evaluate the implementation of internal and external audits. Submit the report to the Board of Supervisor Council.



Dewan Pengawas melakukan telaah atas rekomendasi Komite Audit, melakukan pembahasan dengan organ Dewan Pengawas dan calon auditor eksternal/Akuntan Publik
The Board of Supervisor Council reviews the Audit Committee recommendations, conducts discussion with the organs of the Board of Supervisor Council and prospective external auditors/Public Accounting Firm.



Dewan Pengawas menyampaikan surat rekomendasi kepada RPB.
The Board of Supervisor Council submits a recommendation letter to the RPB



Penetapan Kantor Akuntan Publik oleh RPB
The Public Accounting Firm is determined by Joint Discussion Meeting (RPB)

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan tahun buku 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 2020, pemegang saham menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan besaran imbalan jasa audit serta persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut. Menindaklanjuti keputusan RUPS tersebut, berdasarkan keputusan Menteri BUMN No. S-1154/MBU/12/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Persetujuan Penetapan KAP untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) beserta Entitas Anak Perusahaan Tahun Buku 2020, dan Surat Direktur Keuangan dan Umum Pemegang Saham Seri B, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 837/DIRKEU/BPUI/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberitahuan Pemenang Tender Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), pemegang saham menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan untuk melaksanakan audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020. Sementara akuntan yang akan melaksanakan

Based on the Annual GMS resolution for financial year 2019 held on June 30, 2020, shareholders agreed to delegate authority and power to Series B Shareholders, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) to determine the Public Accounting Firm (KAP) that will audit the Company's Financial Statements for financial year ended December 31, 2020 and the amount of audit service rewards and other appointment requirements that are reasonable for the Public Accounting Firm (KAP). For following up on the GMS resolution, based on the Minister of SOEs Decree No. S-1154/MBU/12/2020 dated December 15, 2020 concerning approval of KAP Determination for the Implementation of Audit of Consolidated Financial Statements of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and its Subsidiaries for Financial Year 2020, and Director of Finance Letter and General Shareholders series B, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) No. 837/DIRKEU/BPUI/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Notification of Winners of Tender Services of Public Accounting Firm (KAP), shareholders approved the appointment of Public Accounting Firm (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners to carry out an independent audit of the Company's Financial Report for Financial Year 2020. Meanwhile, the accountant who will carry out an independent audit of the Company's Financial

audit independen Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2020 adalah Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA. Audit laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2020 oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan baru periode pertama, demikian pula dengan akuntan Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA.

Statements for Financial Year 2020 is Drs.M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA. Audit of the Company's financial statements for financial year 2020 by KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis and Partners has been conducted in the first period, as well as accountant Drs.M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA.

Akuntan Publik Tahun 2020

Public Accountant in 2020

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan
Akuntan Publik Public Accountant	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA
Tahun Audit Audit Year	Tahun Buku 2020 Fiscal Year 2020
Periode Penugasan Assignment Period	15 Februari 2021 sd 31 Maret 2021 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak February 15, 2021 to March 31, 2021 and may be extended as agreed by both parties
Jasa Service	Audit Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Jaminan Kredit Indonesia dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2020 General Audit of Consolidated Financial Statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and subsidiaries for Financial Year 2020
Jasa Lainnya Other Services	-
Biaya Fee	Rp2.719.200.000.000,- (termasuk PPN 10%) IDR2,719,200,000,000.- (including VAT 10%)

Daftar Akuntan Publik

List of Public Accountants

Guna kepentingan transparansi, berikut disajikan Auditor Publik Laporan Keuangan Perusahaan 6 (enam) tahun berturut-turut, untuk tahun buku 2015 hingga 2020 seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

For transparency, the following table is the list of Public Accountants of the Company's Financial Statements for 6 (six) consecutive years, for the 2015 to 2020 fiscal year.

Tahun Buku Financial Year	Akuntan Accountant	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Opini Opinion	Biaya Jasa Audit (Rp-ribu) Audit Fee (IDR-thousand)
2020	Drs. M. Jusuf Wibisana, M. Ec., CPA (STTD.AP-49/NB.122/2018)	Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. Izin: STTD.KAP-04/PM.22/2018 License number: STTD.KAP-04/PM.22/2018	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Presenting fairly, in all material respects	2.719.200
2019	Bambang Karunawan, SE, Ak, CPA (STTD.AP-413/PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/PM.22/2017 License number: STTD.KAP-00006/PM.22/2017	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Presenting fairly, in all material respects	458.850
2018	Bambang Karunawan, SE, Ak, CPA (STTD.AP-413/PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/PM.22/2017 License number: STTD.KAP-00006/PM.22/2017	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Presenting fairly, in all material respects	424.500
2017	Drs. Hertanto, MS., Ak., CPA., CPMA., CA (STTD.AP-411/PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/PM.22/2017 License number: STTD.KAP-00006/PM.22/2017	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Presenting fairly, in all material respects	386.000
2016	Drs. Hertanto, MS., Ak., CPA., CPMA., CA (STTD.AP-411/PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/PM.22/2017 License number: STTD.KAP-00006/PM.22/2017	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Presenting fairly, in all material respects	387.612
2015	Drs. Hertanto, MS., Ak., CPA., CPMA., CA (STTD.AP-411/PM.22/2018)	Hertanto, Grace, Karunawan No. Izin: STTD.KAP-00006/PM.22/2017 License number: STTD.KAP-00006/PM.22/2017	Menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material Presenting fairly, in all material respects	389.565

MANAJEMEN RISIKO

Risk Management

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukan potensi tersebut ke dalam bagian sistem Manajemen Risiko Jamkrindo. Sesuai dengan peraturan Direksi Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya *problem* eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/*downtime* & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and engineering*), pihak external, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan *Risk and Control Self Assessment* (RC SA). RC SA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *bottom up*, dimana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

Risk Management is a system used to strengthen the accountability aspect of the Board of Directors in supporting the decision-making process and developing the Company's performance. Commitment in implementing Risk Management, as an integral part of the Company's overall management system, is stated in Risk Management Policies and Procedures that are built according to the context and capabilities of the Company. The Company's Risk Management is implemented in accordance with the conditions and needs of the Company using ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

In minimizing the impact of losses arising from operational activities, the Company also includes this potential into the Jamkrindo Risk Management system. In accordance with the regulations of the Board of Directors of Jamkrindo, operational risk is the risk that is caused, by inadequate and/or malfunctioning internal processes, human errors, system failures, or external problems that affect the Company's operations.

*Operational risk can be caused by several factors, namely system/*downtime* & technology failure, human error, equipment (*mechanical and engineering*), external parties, fraud, failure of internal processes, organization & HC, Counterpart, HSE (*Health, Safety and Health*). and Environment), and Information Technology.*

In order to implement Operational Risk Management, Jamkrindo already has guidelines for carrying out Risk and Control Self Assessment (RC SA). The RC SA is implemented with a bottom-up approach, where identification and risk assessment are carried out by the Head of Section at the Head Office Work Unit, Branch Offices and Sub-Branch Offices. The determination of the implementation level for the identification and risk assessment is based on the consideration that the level is the lowest official in the work unit, so that they know the technical problems and the relationship between these technical problems and the achievement of the Company's goals.

Blue-Print Manajemen Risiko Jamkrindo

Untuk melakukan implementasi manajemen risiko terintegrasi, Jamkrindo telah menyusun *Blue-Print* Manajemen Risiko Terintegrasi sebagai cetak biru arsitektur pengembangan *Enterprise Risk Management (ERM)*.

Secara umum, *Blue-Print* ERM Jamkrindo terdiri dari 4 komponen utama yaitu infrastruktur, kapabilitas, integrasi, dan budaya. Keempat komponen tersebut memiliki berbagai elemen sebagai bagian utamanya, secara lebih lengkap model *Blue-Print* ERM Jamkrindo digambarkan dalam model di bawah ini.

Jamkrindo Risk Management Blue-Print

To implement integrated risk management, Jamkrindo has prepared an *Integrated Risk Management Blue-Print* as a blueprint for the development of *Enterprise Risk Management (ERM)* architecture.

In general, Jamkrindo's *ERM Blue-Print* consists of 4 main components, namely infrastructure, capability, integration, and culture. The four components have various elements as their main parts. The Jamkrindo *ERM Blue-Print* model is elaborated in the model below.

Model Blue-Print Manajemen Risiko Terintegrasi Jamkrindo

Jamkrindo's Integrated Risk Management Blue-Print Model



Road Map Manajemen Risiko

Untuk mencapai kondisi penerapan manajemen risiko seperti yang telah dituangkan dalam *blue print* Manajemen Risiko, Jamkrindo telah menyusun road map implementasi pengembangan manajemen risiko sampai tahun 2024, dengan *milestone* pencapaian *Blue-Print* manajemen risiko yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

Risk Management Road Map

To achieve the conditions of risk management implementation as stated in the *Risk Management blue print*, Jamkrindo has prepared a road map for the implementation of risk management development until 2024, with the milestones of achieving the integrated risk management *Blue-Print* as follows:

2020

- *Membangun Loss Event Database*
- *Mengintegrasikan aplikasi SIMR, BIA dan LEM*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Sosialisasi Manajemen Risiko*
- *BCM Maturity Assessment*
- *Uji Coba BC Plan*
- *Building a Loss Event Database*
- *Integrating SIMR, BIA and LEM applications*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Risk Management Socialization*
- *BCM Maturity Assessment*
- *Trial of BC Plan*

2021

- *Pemutakhiran Panduan Tata kelola Manajemen Risiko (RM Policy, RM Manual, RM Procedure)*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Sosialisasi Manajemen Risiko*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Integrasi Aplikasi SIMR dan Aplikasi Operasional*
- *Apresiasi Penerapan MR pada Unit Kerja*
- *Update on Risk Management Governance Guidelines (RM Policy, RM Manual, RM Procedure)*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Risk Management Socialization*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Integration of SIMR Applications and Operational Applications*
- *Appreciation of the Risk Management Implementation in the Work Units*

2022

- *Pengembangan/pemutakhiran aplikasi SIMR*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Sosialisasi Manajemen Risiko*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Uji Coba BC Plan*
- *Integrasi lanjutan Aplikasi SIMR dan Aplikasi Operasional/Akuntansi*
- *Forum/Workshop Manajemen Risiko*
- *Apresiasi Penerapan MR pada Unit Kerja*
- *Development / updating of the SIMR application*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Risk Management Socialization*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Trial of BC Plan*
- *Advanced integration of SIMR Applications and Operational / Accounting Applications*
- *Risk Management Forum / Workshop*
- *Appreciation of the RM Implementation in the Work Units*

2023

- *Penyusunan Pedoman GRC*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Sosialisasi Manajemen Risiko*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Inisiasi Program Integrasi GRC*
- *Forum/Workshop Manajemen Risiko*
- *Apresiasi Penerapan MR pada Unit Kerja*
- *Preparation of GRC Guidelines*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Risk Management Socialization*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Initiation of the GRC Integration Program*
- *Risk Management Forum / Workshop*
- *Appreciation of the MR Implementation in the Work Units*

2024

- *Menyusun rancangan infrastruktur GRC*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Sosialisasi Manajemen Risiko*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Uji Coba BC Plan*
- *Program lanjutan integrasi GRC*
- *Forum/Workshop Manajemen Risiko*
- *Apresiasi Penerapan MR pada Unit Kerja*
- *Preparing GRC infrastructure designs*
- *Risk Maturity Assessment*
- *Risk Management Socialization*
- *BCM Maturity Assessment*
- *GRC Awareness*
- *Trial of BC Plan*
- *Advanced GRC integration program*
- *Risk Management Forum / Workshop*
- *Appreciation of the MR Implementation in the Work Units*



Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidental. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidental adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidental berupa pemberian opini untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapusbukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kegiatan insidental berupa pemberian opini sesuai Surat Edaran Direksi No.12/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Jamkrindo yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapus bukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko
Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang

Risk Management Implementation

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. Risk Management activities carried out periodically are risk management processes which consist of 4 stages of the process, namely risk identification, risk assessment, risk management and risk monitoring and evaluation.

At the initial stage, the process carried out is Identification and assessment of Inherent Risk. Based on the results of risk identification and risk assessment, an evaluation is carried out to improve the risk management process.

Incidental Risk Management Activities are the implementation of risk management carried out at certain stages in accordance with those stipulated in the SOP for risk-based business processes and the provision of opinions related to matters that must be consulted with the Risk Management Division.

Incidental activities in the form of providing opinions on matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the company, manufacture of new products and/or activities, transactions with a certain value, write-off policies for company receivables, preparation of SOPs, RJP, RKAP, implementation of the use of new applications/software, determination of new banks for the placement of deposits and investments, and other policies of a strategic nature.

Incidental activities in the form of giving opinions according to the Circular of the Board of Directors No.12/SE/5/IV/2019 dated April 18, 2019 regarding the Jamkrindo Risk Management Opinion SOP, namely for strategic matters and have a significant impact on the company's sustainability, product manufacturing and/or new activities, transactions with a certain value, policies for writing off the company's accounts receivable, making SOPs, RJPP, RKAP, implementing the use of new applications/software, determining new banks for placement of deposits and investments, and other strategic policies.

Risk Management Equipment

For the implementation of integrated risk management, several equipment are needed to support the implementation of risk management. In this regard, Jamkrindo has compiled the following equipment:

1. Board of Directors Regulation on the Implementation of Risk Management
The Board of Directors' Regulation on the Implementation of Risk Management is a regulation that states the implementation of risk management and the necessary supporting tools. In this

pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

2. Organisasi Manajemen Risiko Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko dan PUKM. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat ad hoc, yaitu Komite Manajemen Risiko Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko dan PUKM.
4. Kebijakan Manajemen Risiko Jamkrindo merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko dan PUKM.
5. SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Jamkrindo. SOP Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No.13/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Jamkrindo.
6. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No.40/SE/5/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Jamkrindo. Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah :
 - Penetapan Konteks dan Kriteria
 - Identifikasi Risiko
 - Analisis Risiko
 - Evaluasi Risiko

regulation, a statement regarding risk management is attached which is a statement from the Board of Directors and all Jamkrindo Officials regarding the company's risk management policies. The statement is a written form of the commitment of the Board of Directors and Jamkrindo Officers in implementing risk management in every stage of the activity.

2. *The Board of Directors has established an organizational structure of Jamkrindo's Risk Management which includes the Risk Management Division and PUKM. In addition to the structural organization, there is also an ad hoc structure, namely the Jamkrindo Risk Management Committee. The Risk Management Committee (KMR) is a committee consisting of the Board of Directors and the Head of Division related to the management of the Company's Risk Management. The role of the Risk Management Committee is to conduct periodic assessments and provide recommendations for business risks, types and impacts on the Company's activities, determine the Company's risk appetite and risk tolerance, and provide reports on the implementation of the Company's Risk Management to the Board of Commissioners.*
3. *In addition, for the smooth implementation of the risk management process, in each work unit a Person in Charge (PIC) is appointed to be assigned on coordinating the implementation of the risk management process in each work unit. In carrying out its duties, the Risk Management PIC coordinates and consults with the Risk Management Division and PUKM.*
4. *Jamkrindo's Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of integrated Risk Management in the Company and guidelines for formulating supporting policies at the corporate and Work Unit levels. The Risk Management Policy is then cascading down into SOPs contained in the Risk Management Division and PUKM.*
5. *Risk Management SOP is an SOP that is intended to provide technical guidance in the implementation of the risk management process at Jamkrindo. The Risk Management SOP is issued by the Circular Letter of the Board of Directors No. 13/SE/5/IV/2019 dated April 18, 2019 regarding the Standard Operating Procedure (SOP) of Jamkrindo's Risk Management.*
6. *Instructions for the Implementation of Risk Management were issued in a Circular Letter of the Board of Directors No.40/SE/5/XI/2018 dated December 21, 2018. The Technical Guidelines contain an explanation of the technical guidelines for the implementation of Risk Management in Jamkrindo. The technical guidelines for the implementation of Risk Management in outline are:*
 - *Setting Context and Criteria*
 - *Risk Identification*
 - *Risk Analysis*
 - *Risk Evaluation*



- Penanganan Risiko
 - Monitoring Risiko
 - Komunikasi dan Konsultasi Risiko
 - Pencatatan dan Pelaporan Risiko
 - Toleransi Risiko
7. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam risk register dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sebagai second opinion dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.
8. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk data base yang terstruktur.
- Risk Management
 - Risk Monitoring
 - Risk Communication and Consultation
 - Risk Recording and Reporting
 - Risk Tolerance
7. *SOP for Risk-Based Business Process is an SOP for a business process that is prepared by considering the risks involved in the process. The SOP is intended to ensure that the risks listed in the risk register and the necessary risk control have been considered in the implementation of business processes, while for new types of risks, it is ensured that an opinion has been obtained from the Risk Management Division and PUKM as a second opinion in the consideration of decision making. Given that the types of activities that exist at Jamkrindo are quite diverse, the preparation of risk-based business process SOPs is carried out in stages by each business process owner.*
8. *An Integrated Risk Management Support System has existed since 2011, the company has started to build a Risk Management Information System Application. The application serves to simplify the process of identification, risk assessment, and follow-up on risk management. With the application, risk data can be stored in a structured database*

Jenis dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2020

Types and Management of Risks in 2020

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Some of the relatively significant risks in 2020 are as follows:

No	Risiko Risk	Kategori Category	Risk Map Risk Map	Penyebab Cause	Mitigasi Mitigation
1	Target bisnis tidak tercapai <i>Business target is not achieved</i>	Strategik <i>Strategic</i>	Ekstrem <i>Extreme</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya epidemi/wabah penyakit, <i>Epidemic/disease outbreak</i> b. Kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, <i>Error in strategic decision making</i> c. Ketidakakuratan dalam penyusunan perencanaan strategi Perusahaan RKAC <i>Inaccuracies in the preparation of the RKAC Company's strategic planning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan strategi bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar, <i>Prepare business strategies which are adapted to market conditions</i> b. Komunikasi intens dengan mitra melalui telepon/email/media komunikasi lainnya, <i>Carry out intense communication with partners via telephone/email/other communication media</i> c. Penyesuaian terhadap target RKAC tahun 2020, <i>Adjust to 2020 RKAC targets</i> d. Untuk keperluan <i>On The Spot</i> (OTS) hendaknya memperhatikan kondisi wilayah domisili Terjamin/Penerima Jaminan yang akan dikunjungi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan <i>Pay attention to the condition of the domicile of the Guaranteed / Guarantee Beneficiary to be visited and still pay attention to health protocol for the purposes On The Spot (OTS)</i> e. Mengoptimalkan Penjaminan program PEN <i>Optimize PEN program guarantee</i>

No	Risiko Risk	Kategori Category	Risk Map Risk Map	Penyebab Cause	Mitigasi Mitigation
2	Penularan COVID-19 pada SDM Perusahaan COVID-19 Transmission on Company HC	Operasional Operational	High	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya awareness SDM dalam melaksanakan protokol kesehatan <i>Lack of HC awareness in implementing health protocols</i> b. Rendahnya imunitas karyawan <i>Employee low immunity</i> c. Karyawan tidak jujur dalam mendeklarasikan kondisi kesehatan dan interaksi fisik <i>Employees are dishonest in declaring health conditions and physical interaction</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Program sosialisasi protokol kesehatan di kantor dan sekitar kantor (poster, virtual meeting, sosmed, dst) <i>Carry out socialization about Health Protocol in the office and around the office (posters, virtual meetings, social media, etc.)</i> b. Penerapan protocol kesehatan secara massif & penambahan fasilitas sarana/prasarana perusahaan untuk mendukung protocol kesehatan <i>Implement health protocols & add company facilities/infrastructure to support health protocols</i> c. Penyemprotan secara berkala di lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan rapid/swab test secara berkala <i>Carry out periodic spraying in the work environment and periodic rapid health checks/swab tests</i> d. Gerakan Jamkrindo Peduli COVID-19 dengan bantuan untuk keluarga karyawan dan insan dilingkungan perusahaan yang terpapar COVID-19 <i>Carry out Jamkrindo Peduli COVID-19 with assistance for the families of employees and people in the company environment who are exposed to COVID-19</i>
3	Ketidaksesuaian Data Pada Sistem ICPR <i>Incompatibility Data On ICPR system</i>	Operasional Operational	High	Perbedaan Data Integrasi <i>Data Difference Integration</i>	Dilakukan Perbaikan Sistem Integrasi dan Rekonsiliasi antara Kantor Pusat dengan Cabang Unit Kerja <i>Improve Integration and Reconciliation system between Head Office and Branch Work</i>
4	Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA <i>Solution Claim is not according to SLA</i>	Operasional Operational	High	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan mapping wilayah <i>Change in area mapping</i> b. Dokumen tidak lengkap, <i>Incompleteness of the document</i> c. Pengajuan klaim online yang telah kadaluarsa dapat masuk ke sistem klaim online <i>Online claims that have expired can be entered into the online claim system</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Penerima Jaminan untuk pemenuhan kelengkapan berkas, <i>Coordinate with Guarantee Recipient to fulfill the completeness of the file</i> b. Usulan penyempurnaan sistem klaim online. <i>Propose improvements to the online claim system.</i>
5	Kehilangan aset perusahaan <i>Loss of company assets</i>	Operasional Operational	High	Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana <i>Poor maintenance of the facilities and infrastructure</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Inventaris aset perusahaan <i>Company asset inventory</i> b. Penumpukan barang inventaris yang sudah habis nilai bukunya <i>Accumulation of inventory items that have run out of their book value</i>
6	Rasio Klaim Penjaminan tinggi <i>High guarantee Claim Ratio</i>	Operasional Operational	Medium	Tingginya klaim dari mitra Penerima Jaminan <i>The high claims of the guarantee Recipient</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan batas maksimum rasio klaim untuk setiap Penerima Jaminan <i>Set maximum limit claim ratio for each Guarantee Beneficiary</i> b. Dilakukan bandling produk <i>Carry out product banding</i> c. Selektif dalam pemilihan mitra <i>Be selective in partner selection</i> d. Mengoptimalkan Penjaminan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) <i>Optimize the Guarantee for the PEN (National Economic Recovery) program</i> e. Melakukan perbaikan TC pada PKS <i>Perform TC repair on VFD</i>



No	Risiko Risk	Kategori Category	Risk Map Risk Map	Penyebab Cause	Mitigasi Mitigation
7	Subrogasi tidak tertagih <i>Subrogation is not collectible</i>	Penjaminan <i>Guarantee</i>	Medium	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerima Jaminan tidak melimpahkan subrogasi <i>The guarantee recipient does not delegate subrogation</i> b. Agunan tidak marketable <i>Collateral is not marketable</i> c. Terjamin tidak diketahui keberadaannya <i>Guaranteed to be not known whereabouts</i> d. Terjamin tidak membayar kewajiban finansialnya <i>Guaranteed not to pay financial kewajiban</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi bersama Penerima Jaminan dalam penagihan subrogasi <i>Coordinate with the Guarantee Beneficiary in terms of subrogation collection</i> b. Melakukan sosialisasi rekonsiliasi data terkait penjaminan, klaim dan penagihan subrogasi kepada Penerima Jaminan <i>Conduct socialization of data reconciliation related to guarantees, claims and subrogation collections to Guarantee Beneficiaries</i> c. Membantu melakukan penjualan agunan secara daring <i>Assist in selling collateral online</i> d. Menggunakan jasa pihak ketiga (collecting fee) atas penagihan subrogasi yang berhasil dilakukan oleh Penerima Jaminan <i>Use the services of a third party (collecting fee) for subrogation collection that has been successfully carried out by the Guarantee Recipient</i>
8	Bisnis penjaminan terhambat <i>Business guarantee is blocked</i>	Operasional <i>Operational</i>	Medium	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya pandemi/wabah penyakit, <i>Emergence of pandemic/disease outbreak</i> b. Proses Perpanjangan PKS membutuhkan waktu yang lama, <i>The MCC Extension process is long</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Komunikasi dengan mitra melalui telepon/ email/media komunikasi lainnya <i>Communicate with partners by telephone/ email/other communication media</i> b. Menyampaikan tentang kebijakan restrukturisasi sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 <i>Deliver the restructuring policy in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020</i> c. Pembuatan sistem reminder jangka waktu PKS dengan mitra <i>Make a reminder system for the PKS period with partners</i> d. Monitoring penyusunan PKS sesuai SLA <i>Monitor the preparation of MCC according to SLA</i>
9	Terhambatnya pembayaran klaim <i>Claims Payment delay</i>	Operasional <i>Operational</i>	Medium	<ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen tidak lengkap <i>Incompleteness of the document</i> b. Pengajuan klaim belum dilakukan secara online oleh mitra <i>The partner has not done the claim submission online</i> 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan <i>Reconcile with Guarantee Beneficiary</i> b. Melakukan koordinasi dengan Penerima Jaminan untuk pemenuhan kelengkapan berkas <i>Coordinate with the Guarantee Beneficiary to fulfill the completeness of the files</i> c. Mensosialisasikan kepada mitra agar dalam proses pengajuan klaim juga melalui sistem Online <i>Carry our socialization for partners so that the claim submission process is also through the Online system</i> d. Komunikasi dengan mitra melalui telepon/ email/ media komunikasi lainnya <i>Communicate with partners via telephone/ email/other communication media</i>
10	Kesalahan Pelaporan Perpajakan <i>Tax Reporting Error</i>	Operasional <i>Operational</i>	Medium	Ketidaktahuan Ketentuan Serta Alur yang Berkaitan dengan Perpajakan <i>Ignorance of Terms and Flows Related to Taxation</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan Atas Kesalahan Pelaporan Pajak <i>Change On Tax reporting Error</i> b. Mengisi rekapan transaksi pemotongan pajak <i>Fill in the tax deduction transaction summary</i>

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Berdasarkan hasil *risk maturity assessment* tahun 2020 rekomendasi dan saran atas implementasi manajemen risiko sebagai berikut:

1. **Pengkayaan *Risk Register* yang dimiliki Perusahaan**
Proses identifikasi dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kembali ke setiap Unit Kerja terkait atas risiko-risiko yang diidentifikasinya, khususnya risiko-risiko yang mendapat prioritas untuk dikelola. Proses identifikasi risiko juga dapat dikaitkan dengan aktivitas masing-masing unit kerja yang terdapat pada aplikasi BIA dan SIMR.
2. **Pembentukan Budaya melalui Sosialisasi Manajemen Risiko dalam lingkup yang lebih luas**
Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah penciptaan budaya manajemen risiko diseluruh tingkatan organisasi. Setiap Karyawan adalah pengelola risiko (*Every employee is risk manager*), wajib menjaga keamanan aset perusahaan dengan cara mengetahui risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas dan produk/layanan yang menjadi tanggung jawabnya; manajemen risiko merupakan bagian dari sistem manajemen dan melekat pada setiap aktivitas sehari-hari perusahaan.
Adanya penyebaran COVID-19 di Indonesia, menyebabkan perusahaan merencanakan ulang sosialisasi manajemen risiko ke Unit Kerja di beberapa Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Namun demikian sosialisasi agar dapat tetap berjalan dengan menggunakan sarana *video conference/teleconference* (*zoom, google meets, dan lain-lain*) agar pegawai tetap mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait dengan manajemen risiko perusahaan dan manfaatnya bagi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari
3. **Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko untuk Personil di Unit Kerja Pengelola Risiko**
Untuk meningkatkan pengetahuan dan mempercepat pengembangan kerangka kerja manajemen risiko, perlu dilakukan peningkatan kompetensi manajemen risiko Personil di Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melalui training sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Business Continuity Management (BCM)* yang ada di Indonesia.
Industri penjaminan merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM dan mikro di Indonesia. Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan risiko yang dikoordinir oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di perusahaan.

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System

Based on the results of the 2020 *risk maturity assessment*, recommendations and suggestions for the implementation of risk management are as follows:

1. **Enrichment of the Company's Risk Register**
The identification process can be carried out by reconfirming to each related Work Unit the identified risks, especially the risks that are prioritized to be managed. The risk identification process can also be linked to the activities of each work unit contained in the BIA and SIMR applications.
2. **Formation of Culture through Risk Management Socialization in a wider scope**
The main objective of implementing risk management is to create a risk management culture at all levels of the organization. Every employee is a risk manager that must maintain the security of company assets by knowing the risks inherent in each activity and product/service for which he is responsible; Risk management is part of the management system and is embedded in the daily activity of the Company.
The spread of the COVID-19 in Indonesia has caused the company to re-plan the socialization of risk management to Work Units in several Branch Offices and Regional Offices. However, the socialization can continue to run by using video conference/teleconference facilities (Zoom, Google Meets, etc.) so that employees can still get information and knowledge related to the company's risk management and its benefits for the company's daily operational activities.
3. **Increasing Risk Management Competence for Employee in the Risk Management Unit**
To increase knowledge and accelerate the development of risk management frameworks, it is necessary to increase the competence of risk management employee in the Risk Management Division and PUKM through Risk Management and/or Business Continuity Management (BCM) certification training in Indonesia.
The guarantee industry is an industry that is growing very rapidly in line with government support for the development of MSMEs and micro-enterprises in Indonesia. These developments need to be followed by increased risk management capabilities coordinated by the Risk Management Division and PUKM which are expected to be the driving force for change in the company.



Banyaknya personil-personil yang memiliki sertifikasi bidang Manajemen Risiko seperti halnya di beberapa BUMN (Jasa Raharja, Askrindo, Sucofindo, dan lain-lain) menjadi salah satu faktor sukses penerapan manajemen risiko dan BCM di perusahaan.

The large number of employees who have certification in the field of Risk Management, as is the case in several SOEs (Jasa Raharja, Askrindo, Sucofindo, and others), is one of the success factors in implementing risk management and BCM in the company.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi sebuah wadah bagi Perusahaan dalam membangun hubungan yang tumbuh bersama dengan pemangku kepentingan, baik dari internal seperti manajemen dan karyawan maupun dari eksternal seperti masyarakat sekitar lokasi usaha dan konsumen. Terkait pelaksanaan CSR, Perusahaan membaginya ke dalam 7 (tujuh) aspek, sesuai ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial.

Corporate Social Responsibility (CSR) is a platform for the Company to build relationships that grow together with stakeholders, both from internal such as management and employees and from external parties such as the community around the business area and consumers. The Company divides the implementation of CSR into 7 (seven) aspects, according to ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Corporate Social Responsibility Governance

Tanggung Jawab atas Operasi yang Adil
Responsibility for Fair Operation

Komitmen atas Hak Asasi Manusia
Commitment to Human Rights

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup
Social Responsibility to the Environment

Tanggung Jawab Sosial pada Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Social Responsibility for Employment, Occupational Health and Safety

Tanggung Jawab atas Produk dan Terhadap Konsumen
Responsibility for Products and Consumers

Tanggung Jawab Sosial pada Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Corporate Social Responsibility on Social Development

Selengkapnya tentang pelaksanaan CSR oleh Perusahaan dapat dilihat pada bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini. Di samping itu, Perusahaan telah menyusun Laporan Keberlanjutan yang dapat diunduh pada situs web Perusahaan.

More details about the implementation of CSR by the Company can be found in the Corporate Social Responsibility chapter in this Annual Report. In addition, the Company has compiled a Sustainability Report which can be downloaded on the Company's website.

PERKARA PENTING DAN PERMASALAHAN HUKUM

Legal Cases

Permasalahan Hukum

Permasalahan dan/atau perkara hukum yang dihadapi Perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan Direksi di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Legal Cases

The legal issues and/or cases faced by the Company, its subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors throughout 2020 are as follows:

Permasalahan Hukum <i>Legal Cases</i>	2020		2019	
	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>	Perdata <i>Civil</i>	Pidana <i>Criminal</i>
Jamkrindo				
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	3	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In process</i>	-	-	1	-
Jumlah <i>Total</i>	3	-	1	-
Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors</i>				
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In process</i>	-	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	-	-	-	-
Entitas Anak <i>Subsidiaries</i>				
Selesai dan Telah memiliki kekuatan hukum tetap <i>Completed and has permanent legal force</i>	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian <i>In process</i>	-	-	-	-
Jumlah <i>Total</i>	-	-	-	-

Rincian permasalahan hukum yang dihadapi Perusahaan dan/atau Dewan Komisaris dan Direksi serta entitas anak di tahun 2020 atau telah dinyatakan selesai di tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Details of the legal issues faced by the Company and/or the Board of Commissioners and Board of Directors and the subsidiaries in 2020 or have been declared completed in 2020 are as follows.



PERKARA No.283/Pdt.G/2019/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang
CASE No. 283/Pdt.G/2019/PN.TNG at Tangerang District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Penggugat: PT Ihyamulik Bengkang Turan
2. Tergugat: PERUM LPPNPI (AIRNAV)
3. Turut Tergugat I: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
4. Turut Tergugat II: PERUM JAMKRINDO

POKOK PERKARA:

Penggugat mengklaim bahwa Tergugat melakukan PMH karena telah melakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena pekerjaan Penggugat tidak selesai sesuai jadwal karena kesalahan Tergugat yang meminta merubah gambar tower.

STATUS PERKARA:

Pada Tingkat Pertama Gugatan Ditolak dan Penggugat menyatakan Banding dan sampai dengan saat ini belum memberikan Memori Banding.

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

menghukum Tergugat melakukan Addendum kontrak dengan Penggugat menghukum Tergugat membayar ganti rugi Materiil sebesar Rp2.424.790.030,-, imateriil Rp23.081.416.460,-

TINDAK LANJUT:

Menunggu Penggugat menyampaikan Memori Banding.

PARTIES:

1. Plaintiff: PT Ihyamulik Bengkang Turan
2. Defendant : PERUM LPPNPI (AIRNAV)
3. Co-Defendant I : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
4. Co-Defendant II : PERUM JAMKRINDO

CASE:

The Plaintiff claimed that the Defendant made act against law because they had unilaterally terminated the contract because the Plaintiff's work was not completed according to the schedule due to the Defendant's error in asking to change the tower image.

CASE STATUS:

In the first instance the lawsuit was rejected and the plaintiff declared an appeal and so far has not provided a memorandum of appeal.

RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF THE CLAIMS:

Punishing the Defendant, carrying out an Addendum to the contract with the Plaintiff, punishing the Defendant, paying material compensation of Rp2.424.790.030

FOLLOW-UP:

Waiting for the Plaintiff to submit a Memorandum of Appeal.

PERKARA No.671/Pdt.Bth/2020/PN.TNG di Pengadilan Negeri Tangerang
CASE No. 671/Pdt.Bth/2020/PN.TNG at Tangerang District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Pelawan: Ny. Devi Jesika Pratiwi
2. Terlawan I : Jamkrindo Banjarmasin
3. Terlawan II : KPKNL Banjarmasin
4. Terlawan III : PT Ihyamulik Bengkang Turan
5. Terlawan IV : PERUM LPPNPI (AIRNAV)
6. Terlawan V : Bank BRI Cabang Martapura

POKOK PERKARA:

Pelawan dalam hal ini Ny. Devi Jesika Pratiwi selaku pemilik Sertifikat Hak Milik No.576/Komet menyerahkan SHM tersebut untuk Terlawan III dijadikan jaminan dengan pengikatan Hak Tanggungan oleh Terlawan I sehubungan dengan Jaminan Kontra Bank Garansi yang diterbitkan Terlawan I atas Bank Garansi Terlawan V.

Pelawan beranggapan bahwa dalam hal tidak dipenuhinya kewajiban Terlawan III kepada Terlawan IV dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dicairkannya klaim bank garansi kepada Terlawan V dan selanjutnya dicairkannya klaim kontra bank garansi oleh Tergugat I merupakan tanggung jawab dari Tergugat III dan tidak seharusnya tanah milik Pelawan dilakukan eksekusi lelang untuk pelunasan kewajiban Tergugat III.

STATUS PERKARA:

Tingkat Pertama dengan agenda Putusan

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

menghukum Terlawan I, Terlawan II untuk menghentikan dan/atau membatalkan pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap sebidang tanah milik Pelawan, dan mengembalikan SHM milik kepunyaan Pelawan kepada Pelawan.

TINDAK LANJUT:

Menghadiri Sidang dengan agenda Putusan.

PARTIES:

1. Opponent: Mrs. Devi Jesika Pratiwi
2. Opponent I: Jamkrindo Banjarmasin
3. Opponent II: KPKNL Banjarmasin
4. Opponent III : PT Ihyamulik Bengkang Turan
5. Opponent IV: PERUM LPPNPI (AIRNAV)
6. Opponent V : Bank BRI Martapura Branch

CASE:

The opponent in this case Mrs. Devi Jesika Pratiwi as the owner of Certificate of Ownership No. 576/Komet handed over the SHM to Defendant III as collateral by binding the Mortgage Rights by Defendant I in connection with the Counter Bank Guarantee issued by Defendant I on Bank Guarantee Against V The Opponent assumes that if the Defendant III's obligations to Defendant IV are not fulfilled in carrying out his work so that the bank guarantee claim is disbursed to Defendant V and subsequently the disbursement of the counter-bank guarantee claim by Defendant I is the responsibility of Defendant III and the land belonging to the Opponent should not be executed for settlement of the obligations of Defendant III.

CASE STATUS:

First Level with Resolution agenda

RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF THE CLAIMS:

To punish Opponent I, Opponent II to stop and/or cancel the auction of the execution of mortgage rights on a plot of land belonging to the Pelawan, and to return the SHM belonging to the Pelawan to the Pelawan.

FOLLOW-UP:

Attending the Session with the Resoluton agenda .

PERKARA No.52/Pdt.G/2020/PN.Jap di Pengadilan Negeri Jayapura
CASE No. 52/Pdt.G/2020/PN.Jap at Jayapura District Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Penggugat I : PT. Sasana Agung Eglisea
2. Penggugat II : Frederik Eri Linggi,SH
3. Penggugat III : Sely Rantelino,SH
4. Tergugat I : PT Bank Pembangunan Daerah Papua
5. Tergugat II : PT Jamkrindo qq Pimpinan Cabang Jayapura

POKOK PERKARA:

Dengan mendasarkan pada penolakan klaim atas nama PENGGUGAT I oleh TERGUGAT II tersebut, maka PARA PENGGUGAT dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada TERGUGAT II dengan alasan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak membayarkan asuransi kredit PENGGUGAT I yang telah diperjanjikan sebelumnya antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II mengingat PENGGUGAT I telah mengalami kerugian karena adanya kebakaran dan pembatalan kontrak oleh pemberi kerja. Oleh karena itu kerugian PENGGUGAT I akibat penagihan bunga dan kredit modal kerja oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT I secara melawan hukum sebesar Rp2.492.347.613,- dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

STATUS PERKARA:

Tingkat Pertama Gugatan Ditolak

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

menghukum Tergugat I membayar kerugian karena kebakaran sebesar Rp2.699.000.000,- serta mengembalikan agunan milik penggugat yang ada pada Tergugat I dan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar karena penagihan bunga dan kredit modal kerja secara melawan hukum sebesar Rp2.492.347.613,-

TINDAK LANJUT:

Telah diterimanya Salinan Putusan Perkara No.52/Pdt.G/2020/PN.Jap.

PARTIES:

1. Plaintiff I : PT. Sasana Agung Eglisea
2. Plaintiff II : Frederik Eri Linggi,SH
3. Plaintiff III : Sely Rantelino,SH
4. Defendant I : PT Bank Pembangunan Daerah Papua
5. Defendant II : PT Jamkrindo qq Jayapura Branch Manager

CASE:

Based on the rejection of the claim on behalf of ACCUSED I by ACCUSED II, the Plaintiffs hereby file a lawsuit against the law against ACCUSED II on the grounds that ACCUSED II has committed an unlawful act by not paying the credit insurance of ACCUSED I which had been previously agreed between ACCUSED I with ACCUSED II considering that Plaintiff I had suffered losses due to fire and the cancellation of the contract by the employer. Therefore, the loss of Plaintiff I due to the collection of interest and working capital credit by ACCUSED I to ACCUSED I was unlawfully amounting to Rp2,492,347,613,- charged to ACCUSED I and ACCUSED II.

CASE STATUS:

First Degree Lawsuit Denied

THE RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF THE CLAIMS:

Sentencing Defendant I to pay losses due to fire amounting to IDR2,699,000,000,- and returning the plaintiff's collateral that was in Defendant I and Sentencing Defendant I and Defendant II to pay for illegally collecting interest and working capital credits amounting to IDR2,492,347,613, -

FOLLOW-UP:

The copy of the Decision on Case No. has been received. 52/Pdt.G/2020/PN.Jap.

PERKARA No.72/Pdt.G/2020/PN.Ptk di Pengadilan Pontianak
CASE No. 72/Pdt.G/2020/PN.Ptk at Pontianak Court

PIHAK YANG BERPERKARA:

1. Penggugat I : PT BPD Kalimantan Barat
2. Tergugat : PT Jamkrindo

POKOK PERKARA:

Penggugat mengklaim bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi karena telah melakukan penolakan atas klaim Penjaminan Kredit Konstruksi An. PT Pratama Godean Jaya kepada Penggugat.

STATUS PERKARA:

Sudah Putus pada tanggal 10 Februari 2021 yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima

RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN NILAI NOMINAL TUNTUTAN/GUGATAN:

menghukum Tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp19.967.612.851,26 serta membayar Dwangsom sebesar Rp10.000.000,- per harinya setelah perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap

TINDAK LANJUT:

Telah diterima Salinan Putusan Perkara No.72/Pdt.G/2020/PN.Ptk

PARTIES:

1. Plaintiff I : PT BPD Kalimantan Barat
2. Defendant : PT Jamkrindo

CASE:

The Plaintiff claims that the Defendant has committed a Default due to the rejection of An's Construction Credit Guarantee claim. PT Pratama Godean Jaya to the Plaintiff.

CASE STATUS:

Declared on February 10, 2021 which declared the Plaintiff's Claim to be Unacceptable.

RISKS FACED BY THE COMPANY AND THE NOMINAL VALUE OF THE CLAIM/CLAIMS:

sentenced the Defendant to pay material losses amounting to IDR19,967,612,851.26 and pay Dwangsom in the amount of IDR 10,000,000 per day after the aquo case has permanent legal force

FOLLOW UP:

A copy of the Decision on Case No. has been received. 72/Pdt.G/2020/PN.Ptk



Sanksi Administrasi

Di tahun 2020 Perusahaan mendapatkan 1 (satu) sanksi administrasi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat OJK No. S-85/NB.222/2020 tanggal 13 Juli 2020 tentang sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya atas Pelanggaran Pasal 61 ayat (2) Peraturan OJK No. 2/POJK.05/2017. Sanksi ini disebabkan karena keterlambatan melaporkan kepada OJK bahwa Perusahaan telah melakukan pengumuman hasil neraca dan perhitungan laba rugi singkat pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Lembaga Penjaminan.

Selain sanksi di atas, tidak terdapat sanksi administrasi baik terhadap Dewan Komisaris, Direksi maupun entitas anak.

Administrative Sanctions

In 2020 the Company obtained 1 (one) written administrative sanction from Financial Services Authority (OJK) with OJK Letter No. S-85/NB.222/2020 dated July 13, 2020 concerning the first written warning sanction that ends by itself for Violation of Article 61 paragraph (2) of OJK Regulation No. 2/POJK.05/2017. This sanction is due to the delay in reporting to the OJK that the Company has conducted announcement of balance sheet results and short profit and loss calculation in daily newspapers in Indonesia that have National circulation.

In addition to the above sanctions, there are no administrative sanctions against either Board of Commissioners, Board of Directors or subsidiaries.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Access to Company Information and Data

Dalam menyampaikan dan penyebaran informasi serta berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan Jamkrindo menggunakan berbagai media yang ada, yaitu media internet, cetak dan kegiatan atau event.

In conveying and disseminating information as well as communicating with interested parties, Jamkrindo uses various existing media, namely internet, print media and activities or events.

Dalam prosesnya, akses terhadap informasi Perusahaan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

In the process, access to Company information is divided into 2 (two), namely:

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Type
1	Komunikasi Internal Internal Communication	<p>a. Surat Edaran / Circular Letter Jamkrindo Menggunakan Surat Edaran Untuk Mengkomunikasikan Kebijakan Dan Peraturan Terbaru Di Dalam Internal Perusahaan. Informasi Yang Disebarkan Umumnya Berisi Tentang Sosialisasi Kebijakan Direksi <i>Jamkrindo Uses Circulars to Communicate the Latest Internal Policies and Regulations In thw Company. Disseminated Information Generally Contains Dissemination of the Board of Directors' Policy</i></p> <p>b. ICPR (Integrated Corporate Performance Reporting) Jamkrindo Juga Menggunakan Sarana Teknologi Informasi Yang Berbasis Web yaitu ICPR Yang Telah Diterapkan di Lingkungan Jamkrindo <i>Jamkrindo also uses web-based information technology facilities, namely ICPR, which has been implemented in the Jamkrindo environment</i></p> <p>c. E-mail Jamkrindo juga telah memiliki e-mail system sendiri untuk mengelola komunikasi internal perusahaan antar unit kerja <i>Jamkrindo also has its own e-mail system to manage the Company's internal communications among work units</i></p> <p>d. Evaluasi dan Action Plan Triwulan / Quarterly Evaluation and Action Plan Untuk sarana komunikasi antara Direksi dengan Kepala Divisi dan Pimpinan Kantor Cabang atau Kantor Anak Cabang dalam menyampaikan target dan rencana bisnis Perusahaan, Jamkrindo secara rutin tiga bulan atau triwulanan menyelenggarakan rapat evaluasi dan action plan. Dalam rapat evaluasi dan action plan ini, Direksi Jamkrindo melakukan evaluasi terhadap kinerja triwulanan berjalan dan membahas serta mengkomunikasikan rencana bisnis Jamkrindo untuk triwulan-an kedepan kepada para Kepala Divisi, Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Anak Cabang untuk meneruskan target dan rencana bisnis tahunan yang telah ditetapkan dalam RKAP tahun berjalan <i>As a means of communication between the Board of Directors and the Head of Division and Head of Branch Offices or Sub-Branch Offices in conveying the Company's targets and business plans, Jamkrindo regularly organizes three-month or quarterly evaluation and action plan meetings.</i> <i>In this evaluation and action plan meeting, the Board of Directors of Jamkrindo evaluates the current quarterly performance and discusses and communicates Jamkrindo's business plan for the next quarter to Division Heads, Branch Office Heads and Sub-Branch Head Offices to continue the targets and annual business plans that have been set in the current year's RKAP</i></p>

No.	Akses Informasi Information Access	Jenis Type
2	Komunikasi Eksternal External Communication	<p>a. <i>Alamat Perusahaan / Company Address</i> Gedung Jamkrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta Pusat Telepon: +62216540335 Faksimili : +62 21 6540344/48</p> <p>b. <i>Website</i> Untuk memudahkan mitra kerja, masyarakat yang berkepentingan lainnya atau stakeholders dalam mendapatkan informasi Jamkrindo menyediakan akses dengan memanfaatkan dukungan teknologi informasi yang handal melalui website www.jamkrindo.com <i>To make it easier for work partners, other interested communities or stakeholders in obtaining information, Jamkrindo provides access to take advantage of reliable information technology support through the website www.jamkrindo.com</i></p> <p>c. <i>Press Release</i> Jamkrindo juga pada saat diperlukan melakukan publikasi dari setiap kegiatan perusahaan yang dilakukan melalui press release <i>Jamkrindo also, when necessary, publishes every company activity carried out through press releases</i></p> <p>d. <i>Public Expose</i> Sekali dalam setahun perusahaan wajib menyelenggarakan <i>public expose</i> atau paparan publik mengenai kinerja perusahaan <i>Once a year the company is obliged to hold a public expose or public exposure regarding the company's performance</i></p> <p>e. <i>Iklan / Advertisement</i> Iklan digunakan sebagai alat untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan menggunakan media untuk menyebarluaskan iklan di masyarakat, antara lain adalah surat kabar, majalah, dan media lainnya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan <i>target audiences</i> agar iklan dapat berfungsi dengan efektif <i>Advertising is used as a tool to manage the image and increase awareness of Jamkrindo and its products, by using media to disseminate advertisements in the community, including newspapers, magazines, and other media, by first analyzing the media and target audiences so that advertisements can function effectively.</i></p> <p>f. <i>Pameran / Exhibition</i> Jamkrindo juga selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pameran untuk mengelola citra dan meningkatkan awareness terhadap Jamkrindo beserta produk-produknya, dengan terlebih dahulu menganalisis media dan <i>target audiences</i> agar iklan dapat berfungsi dengan efektif <i>Jamkrindo also always participates in every exhibition activity to manage the image and increase awareness of Jamkrindo and its products, by first analyzing the media and target audiences so that advertisements can function effectively.</i></p>

Korespondensi dan Laporan Berkala

Informasi keuangan dan non keuangan dari Perusahaan telah disusun dan dilaporkan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi dilaporkan sesuai target waktu, tersajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Perusahaan. Informasi dipaparkan melalui laporan berupa:

- Laporan Triwulan.
- Penjelasan dan klarifikasi atas pemberitaan di media massa.
- Keterbukaan informasi melalui *public expose*.
- Laporan administrasi kepada Pemegang Saham.
- Laporan Tahunan.

Correspondence and Periodic Reports

Financial and non-financial information from the Company has been compiled and reported transparently to shareholders, stakeholders and other institutions as required. Information is reported according to the target time, presented in a complete and accurate, current, complete and adequate manner in accordance with the procedures, types and scopes as stipulated in the provisions concerning Transparency of the Company's Financial Condition. Information is presented through reports in the form of:

- *Quarterly Report.*
- *Explanation and clarification of the news in the mass media.*
- *Information disclosure through public expose.*
- *Administrative reports to Shareholders.*
- *Annual report.*

Di bawah ini disajikan korespondensi Perusahaan dengan Kementerian BUMN selama tahun 2020.

The following table presents the Company's correspondence with the Ministry of SOEs during 2020.

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
Korespondensi dengan Kementerian BUMN Correspondence with the Ministry of SOEs		
Surat Penyampaian Submission Letter	13 Januari 2020 January 13, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Penegasan Saldo Setoran Modal per 31 Desember 2019 Affirmation of Capital Deposit Balance as of December 31, 2019 Laporan Hasil Tindak Lanjut Rapat Pembahasan RKAP Tahun 2020 Report of Follow-up Results of RKAP Discussion Meeting in 2020
Surat Pemberitahuan Notice	14 Januari 2020 January 14, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Undangan RPB Pembahasan RKAP Tahun 2020 Perum Jamkrindo (Menteri BUMN) Invitation of Joint Discussion Meeting on RKAP Year 2020 Perum Jamkrindo (Minister of SOEs) Undangan RPB Pembahasan RKAP Tahun 2020 Perum Jamkrindo (Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis BUMN) Invitation of Joint Discussion Meeting on RKAP Year 2020 Perum Jamkrindo (Deputy for Business Infrastructure of SOEs) Undangan RPB Pembahasan RKAP Tahun 2020 Perum Jamkrindo (Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survey dan Konsultan II) Invitation of Joint Discussion Meeting on RKAP Year 2020 Perum Jamkrindo (Assistant Deputy for Financial Services, Survey Services and Consultants II)
Surat Penyampaian Submission Letter	23 Januari 2020 January 23, 2020	Penyampaian Opini Kantor Akuntan Publik terkait Permodalan Perum Jamkrindo Posisi 31 Desember 2019 Submission of Public Accounting Firm Opinion related to Perum Jamkrindo Capital for Position December 31, 2019
Surat Penyampaian Submission Letter	28 Januari 2020 January 28, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Proposal Bantuan Sosial Sembako Masyarakat Lanjut Usia dan Fakir Miskin Desa Jatiroto, Kab. Lumajang Proposal for Social Assistance for Elderly and Poor People in Jatiroto Village, Lumajang District Laporan Investasi Perum Jamkrindo Per 31 Desember 2019 Perum Jamkrindo Investment Report As of December 31, 2019 Penyampaian Persetujuan PKBL Insidental Perum Jamkrindo Periode Januari-Februari 2020 Submission of Approval on Incidental PKBL Perum Jamkrindo Period January-February 2020
Surat Pemberitahuan Notice	29 Januari 2020 January 29, 2020	Laporan Kegiatan dan Keuangan (Unaudited) Tahun 2019 2019 Financial and Activity Report (Unaudited)
Surat Penyampaian Submission Letter	30 Januari 2020 January 30, 2020	Penjelasan GearinRatio Perusahaan Explanation of The Company's Gearing Ratio
Surat Penyampaian Submission Letter	31 Januari 2020 January 31, 2020	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN Perum Jamkrindo Tahun 2016 pada Triwulan IV Tahun 2019 Report on Realization of Additional Use of PT Jamkrindo's PMN Funds in 2016 in Q2/2019
Surat Penyampaian Submission Letter	6 Februari 2020 February 6, 2020	Penyampaian Implementasi Sistem Manajemen Anti Suap di BUMN sebagai Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi di Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Submission of Implementation of Anti-Bribery Management System in SOEs as Implementation of Presidential Regulation No. 54 of 2018 concerning National Strategy to Prevent Corruption in Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia
Surat Pemberitahuan Notice	12 Februari 2020 February 12, 2020	Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kerja Kantor Cabang Cirebon Invitation to Monitoring and Evaluation Meeting of Cirebon Branch Office
Surat Penyampaian Submission Letter	28 Februari 2020 February 28, 2020	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun Buku 2019 Perum Jamkrindo Submission of Perum Jamkrindo Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 (Audited)



Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
Surat Penyampaian Submission Letter	31 Maret 2020 March 31, 2020	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN PT Jamkrindo Tahun 2016 pada Triwulan I Tahun 2020 Report on Realization of Additional Use of PT Jamkrindo's PMN Funds in 2016 in Q1/2020
Surat Penyampaian Submission Letter	30 Juni 2020 June 30, 2020	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN PT Jamkrindo Tahun 2016 pada Triwulan II Tahun 2020 Report on Realization of Additional Use of PT Jamkrindo's PMN Funds in 2016 in Q2/2020
Surat Pemberitahuan Notice	7 Juli 2020 July 7, 2020	Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penjaminan KMK PEN Invitation to Sign Cooperation Agreement for KMK PEN Guarantee
Surat Penyampaian Submission Letter	11 Agustus 2020 August 11, 2020	Laporan Pelaksanaan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan PT Jamkrindo Report on Implementation of SNI ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	28 Agustus 2020 August 28, 2020	Penyampaian Data Konsultan PT Jamkrindo Submission of Consultant Data of PT Jamkrindo
Surat Penyampaian Submission Letter	3 September 2020 September 3, 2020	Penyampaian Revisi Rencana Kerja Anggaran Perusahaan PT Jamkrindo Tahun Buku 2020 Submission of Revised Corporate Budget Work Plan of PT Jamkrindo For Fiscal Year 2020
Surat Penyampaian Submission Letter	16 Oktober 2020 October 16, 2020	Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana PMN PT Jamkrindo Tahun 2016 pada Triwulan III Tahun 2020 Realization Report on Additional Use of PT Jamkrindo PMN Funds in 2016 in Q3/2020
Surat Pemberitahuan Notice	21 Oktober 2020 October 21, 2020	Pemenuhan Permintaan Data Data Request Fulfillment
Surat Pemberitahuan Notice	28 Desember 2020 December 28, 2020	Undangan Konsinyering PMN PEN PMN PEN Meeting Invitation
Korespondensi dengan OJK Correspondence with OJK		
Surat Pemberitahuan Notice	24 Januari 2020 January 24, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitahuan Perjanjian Kerja Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Penyusunan Neraca Penutup dan Pembuka Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Notice of Work Agreement of Public Accountant and/or Public Accounting Firm for The Preparation of Closing Balance sheet and Opening of Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia Pemohonan Untuk Memperoleh Persetujuan Menjadi Anggota Dewas Independen Supervisory Board Application to Obtain Approval to Become a Member of the Independent Supervisory Board
Surat Penyampaian Submission Letter	11 Februari 2020 February 11, 2020	Penyampaian Data Subrogasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia Posisi 31 Desember 2019 Submission of Subrogation Data of Public Corporate (Perum) of Jaminan Kredit Indonesia at Position December 31, 2019
Surat Penyampaian Submission Letter	28 Februari 2020 February 28, 2020	Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian Audited Tahun Buku 2019 Perum Jamkrindo Submission of Perum Jamkrindo Consolidated Financial Statements for Fiscal Year 2019 (Audited)
Surat Pemberitahuan Notice	28 Maret 2020 March 28, 2020	Progress Tindak Lanjut atas LHPLF Perum Jamkrindo Tahun 2019 Progress of Follow-up on LHPLF Response of PT Jamkrindo year 2019
Surat Pemberitahuan Notice	11 Mei 2020 May 11, 2020	Pemberitahuan Pelaporan Perubahan Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Notice on Reporting changes in shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia
Surat Pemberitahuan Notice	13 Mei 2020 May 13, 2020	Progress Tindak Lanjut atas LHPLF Perum Jamkrindo Tahun 2019 Progress of Follow-up on LHPLF Response of PT Jamkrindo year 2019

Bentuk Korespondensi Form of Correspondence	Tanggal Date	Perihal Subject
Surat Pemberitahuan Notice	29 Juni 2020 June 29, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Progress Tindak Lanjut atas Tanggapan LHPLF PT Jamkrindo Tahun 2019 <i>Progress of Follow-up on LHPLF Response of PT Jamkrindo year 2019</i> Penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Perum Jamkrindo Tahun 2019 <i>Submission of Perum Jamkrindo's Good Corporate Governance Report Year 2019</i>
Surat Pemberitahuan Notice	30 Juni 2020 June 30, 2020	<ul style="list-style-type: none"> Penjelasan dan Konfirmasi atas Pelanggaran Batasan Investasi Reksa Dana PT Jamkrindo <i>Explanation and Confirmation of Violation of Mutual Fund Investment Restrictions of PT Jamkrindo</i> Laporan Hasil Evaluasi Komite Audit PT Jamkrindo terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit Informasi Keuangan Historis Tahunan <i>Evaluation Report of PT Jamkrindo's Audit Committee on the Implementation of Annual Historical Financial Information Audit Services</i>
Surat Penyampaian Submission Letter	10 Juli 2020 July 10, 2020	Penjelasan Tambahan atas Pelanggaran Batasan Investasi Reksa Dana PT Jamkrindo <i>Additional Explanation for Violation of Mutual Fund Investment Restrictions of PT Jamkrindo</i>
Surat Pemberitahuan Notice	28 Juli 2020 July 28, 2020	Progress Tindak Lanjut atas Tanggapan LHPLF PT Jamkrindo Tahun 2019 <i>Progress of Follow-up on LHPLF Response of PT Jamkrindo year 2019</i>
Surat Pemberitahuan Notice	4 Agustus 2020 August 4, 2020	Permintaan Sharing Session Mengenai Aktuaria dan Tenaga Ahli Aktuaria di Industri Asuransi dan Penjaminan <i>Request Sharing Session On Actuarial and Actuarial Experts in Insurance and Guarantee Industry</i>
Surat Penyampaian Submission Letter	26 Oktober 2020 October 26, 2020	Penyampaian Tingkat Kesehatan Unit Usaha Syariah PT Jamkrindo <i>Delivery of Soundness Level of Sharia Business Unit of PT Jamkrindo</i>
Surat Penyampaian Submission Letter	5 November 2020 November 5, 2020	Penyampaian Laporan Progress Penutupan Unit Usaha Syariah PT Jamkrindo <i>Submission of Progress Report on The Closing of Sharia Business Unit of PT Jamkrindo</i>
Surat Pemberitahuan Notice	20 November 2020 November 20, 2020	Progress Tindak Lanjut atas Tanggapan LHPLF PT Jamkrindo Tahun 2020 <i>Progress of Follow-up on LHPLF Response of PT Jamkrindo year 2020</i>
Surat Pemberitahuan Notice	25 November 2020 November 25, 2020	Progress Tindak Lanjut atas Tanggapan LHPLF PT Jamkrindo Tahun 2020 <i>Progress of Follow-up on LHPLF Response of PT Jamkrindo year 2020</i>
Surat Pemberitahuan Notice	14 Desember 2020 December 14, 2020	Progress Tindak Lanjut atas Tanggapan Exit Meeting Pemeriksaan OJK PT Jamkrindo Tahun 2020 <i>Progress of Follow-up on OJK Inspection Exit Meeting Response of PT Jamkrindo year 2020</i>
Surat Pemberitahuan Notice	16 Desember 2020 December 16, 2020	Progress Tindak Lanjut atas Tanggapan Exit Meeting Pemeriksaan OJK PT Jamkrindo Tahun 2020 <i>Progress of Follow-up on OJK Inspection Exit Meeting Response of PT Jamkrindo year 2020</i>

Situs Web

Keberadaan situs web memiliki peran yang signifikan atas tata kelola keterbukaan informasi. Pengungkapan dan ketersediaan informasi pada situs web Perusahaan akan memberikan manfaat kepada publik dan pemangku kepentingan, dimana hal ini akan memungkinkan penyampaian informasi tidak terbatas yang dapat dilakukan secara cepat, tepat, murah.

Perusahaan telah memiliki situs web elektronik resmi dengan alamat www.jamkrindo.co.id. Situs web ini menyediakan konten seputar informasi Perusahaan yang komprehensif dan berguna bagi akses informasi kepada publik dan pemangku kepentingan.

Website

Website has a significant role in the information disclosure governance. Disclosure and availability of information on the Company's website will provide benefits for the public and stakeholders, where this will allow the delivery of unlimited information that can be done quickly, accurately, cheaply.

The company has an official electronic website on www.jamkrindo.co.id. This website provides comprehensive and useful content about Company information for access to information for the public and stakeholders.



Hubungan Media

Untuk dapat menyampaikan informasi secara komprehensif, Perusahaan melakukan hubungan media melalui Rilis Media kepada sejumlah media baik nasional maupun lokal. Di bawah ini disajikan Rilis Media yang dilakukan di sepanjang tahun 2020.

Media Relations

In order to convey information comprehensively, the Company conducts media relations through Media Releases to several media, both national and local. Below are the Media Releases carried out throughout 2020.

Rilis Media Tahun 2020

Media Release in 2020

Tanggal Rilis Release Date	Risalah Minutes
3 Januari 2020 January 3, 2020	Perum Jamkrindo Turut Bantu Korban Banjir Jakarta dan Lebak Perum Jamkrindo Helps Jakarta and Lebak Flood Victims
24 Januari 2020 January 24, 2020	Jamkrindo Lakukan Pemberdayaan Berkelanjutan di Geopark Ciletuh Jamkrindo Conducts Sustainable Empowerment in Ciletuh Geopark
9 Februari 2020 February 9, 2020	Sambut HUT ke-50, Jamkrindo Santuni Dua Panti Yatim di Yogyakarta Welcoming the 50th Anniversary, Jamkrindo Assists Two Orphanages in Yogyakarta
14 Februari 2020 February 14, 2020	Jamkrindo Edukasi Gaya Hidup Hijau di Sekolah-sekolah Kawasan Geopark Ciletuh Jamkrindo Educates Green Lifestyle in Schools of Ciletuh Geopark Area
20 Februari 2020 February 20, 2020	Sepanjang 2019 Laba Jamkrindo Tumbuh 51 Persen Throughout 2019 Jamkrindo's Profit Grows 51 Percent
4 Maret 2020 March 4, 2020	Jamkrindo Sabet Predikat Good Performance di Ajang BPEA 2020 Jamkrindo Achieves Good Performance Predicate at BPEA 2020
9 Maret 2020 March 9, 2020	Jamkrindo Peduli Berikan Dua Mobil Ambulance di Karawang Jamkrindo Peduli Gives Two Ambulance Cars in Karawang
12 Maret 2020 March 12, 2020	Jamkrindo Peroleh Penghargaan Bidang SDM dari UNJ Jamkrindo obtained HR award from UNJ
14 Maret 2020 March 14, 2020	Jamkrindo Sosialisasikan Program KUR Bagi Pelaku UMKM di Kudus Jamkrindo Socializes KUR Program for MSMEs in Kudus
18 Maret 2020 March 18, 2020	Jamkrindo Pastikan Layanan Penjaminan Tetap Beroperasi Jamkrindo Ensures Guarantee Service Still Operations
20 Maret 2020 March 20, 2020	Jamkrindo Bagikan Ribuan Masker ke Masyarakat untuk Cegah Corona Jamkrindo Distributes Thousands of Masks to The Community to Prevent Corona
13 April 2020 April 13, 2020	Jamkrindo Sesuaikan Jam Operasional Saat PSBB Jamkrindo Adjusts Operating Hours During PSBB
29 April 2020 April 29, 2020	Sinergi BUMN, Jamkrindo Salurkan Bantuan APD di Jabar Synergy of SOEs, Jamkrindo Distributes PPE Assistance in West Java
18 Mei 2020 May 18, 2020	Jamkrindo Peduli Serahkan Bantuan APD ke RSUD Depok Jamkrindo Peduli Submits PPE Assistance to Depok Hospital
19 Mei 2020 May 19, 2020	Karyawan Jamkrindo Sukses Kumpulkan Donasi 2,9 M untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 Jamkrindo Employees Successfully Collect 2.9 M Donation for People Affected by COVID-19
2 Maret 2020 March 2, 2020	Jamkrindo Lakukan Pemberdayaan Berkelanjutan di Geopark Ciletuh Jamkrindo Conducts Sustainable Empowerment in Ciletuh Geopark
12 Juni 2020 June 12, 2020	Aksi Cepat Jamkrindo Hadapi 'New Normal' di Tengah Pandemi COVID-19 Jamkrindo's Quick Action Faces 'New Normal' amid COVID-19 Pandemic
20 Juni 2020 June 20, 2020	Jamkrindo Konsisten Fasilitasi Pelatihan untuk Masyarakat Ciletuh di Era New Normal Jamkrindo Consistently Facilitates Training for Ciletuh People in the New Normal Era
26 Juni 2020 June 26, 2020	Jamkrindo Konsisten Dampingi UMKM untuk Tumbuh dan Berkembang Jamkrindo Consistently Accompanies MSMEs to Grow and Develop
1 Juli 2020 July 1, 2020	HUT ke-50, Jamkrindo Komitmen Tingkatkan Dukungan bagi UMKM 50th Anniversary, Jamkrindo Commits to Increase Support for MSMEs

Tanggal Rilis Release Date	Risalah Minutes
7 Juli 2020 July 7, 2020	Jamkrindo Jamin Kredit Modal Kerja UMKM <i>Jamkrindo Guarantees Working Capital Loan for MSMEs</i>
10 Juli 2020 July 10, 2020	PT Jamkrindo Raih Penghargaan di Anugerah BUMN 2020 <i>PT Jamkrindo Wins Award at BUMN Awards 2020</i>
25 Juli 2020 July 25, 2020	Dirut Jamkrindo Menerima Penghargaan CEO Terbaik <i>Jamkrindo's CEO Receives Best CEO Award</i>
27 Juli 2020 July 27, 2020	PT Jamkrindo Syariah Teken MoU Penjaminan Pembiayaan Program PEN <i>PT Jamkrindo Syariah Signs MoU of PEN Financing Guarantee Program</i>
29 Juli 2020 July 29, 2020	Jamkrindo raih dua penghargaan GRC Award 2020 <i>Jamkrindo wins two GRC Award 2020</i>
30 Juli 2020 July 30, 2020	Perubahan Nama Perusahaan Menjadi PT Jamkrindo <i>Company Name Change to PT Jamkrindo</i>
31 Juli 2020 July 31, 2020	Jamkrindo Salurkan Hewan Kurban untuk Masyarakat Terdampak COVID-19 <i>Jamkrindo Distributes Sacrificial Animals to People Affected by COVID-19</i>
10 Agustus 2020 August 10, 2020	Jamkrindo Perkuat Dukungan Terhadap Produktivitas UMKM dan Koperasi <i>Jamkrindo Strengthens Support for MSME and Cooperative Productivity</i>
14 Agustus 2020 August 14, 2020	Jamkrindo Kolaborasi Pemulihan Ekonomi Bersama Kemenkop UKM dan Kementerian BUMN <i>Jamkrindo Collaborates on Economic Recovery with the Ministry of Cooperatives and SME and the Ministry of SOEs</i>
15 Agustus 2020 August 15, 2020	Jamkrindo Hadirkan Semangat Kebangsaan di Geopark Ciletuh <i>Jamkrindo Presents National Spirit in Ciletuh Geopark</i>
25 Agustus 2020 August 25, 2020	Jamkrindo Gencar Sosialisasikan Penjaminan Kredit Modal Kerja <i>Jamkrindo Encourages Socialization of Working Capital Loan Guarantee</i>
28 Agustus 2020 August 28, 2020	Jamkrindo Peduli Beri Bantuan Masker N95 ke RSCM <i>Jamkrindo Peduli Gives N95 Mask Assistance to RSCM</i>
31 Agustus 2020 August 31, 2020	UKM Mitra Binaan Jamkrindo Perluas Jaringan Pemasaran Secara Digital <i>UKM Partners Jamkrindo Expand Digital Marketing Network</i>
15 September 2020 September 15, 2020	Jamkrindo Kerjasama dengan Bank Kalsel untuk Jamin Kredit Modal Kerja <i>Jamkrindo Collaborates with Bank Kalsel to Guarantee Working Capital Loan</i>
16 September 2020 September 16, 2020	Jamkrindo Raih Penghargaan Kategori Pemasaran Terbaik di BUMN Marketeers Award 2020 <i>Jamkrindo Wins Best Marketing Category Award at BUMN Marketeers Award 2020</i>
21 September 2020 September 21, 2020	Jamkrindo Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang Cicurug <i>Jamkrindo Distributes Aid for Victims of Banjir Bandang Cicurug</i>
9 Oktober 2020 October 9, 2020	Jamkrindo Jamin 236.227 Debitur PEN <i>Jamkrindo Guarantees 236,227 PEN Debtors</i>
14 Oktober 2020 October 14, 2020	Jamkrindo Serahkan Mesin Pengolah Mangga dan Sarana Budidaya Hidroponik <i>Jamkrindo Submits Mango Processing Machine and Hydroponic Cultivation Facilities</i>
16 Oktober 2020 October 16, 2020	Jamkrindo Kerja Sama dengan 26 Bank Sukseskan Program Penjaminan PEN <i>Jamkrindo Collaborates with 26 Banks to Succeed PEN Guarantee Program</i>
26 Oktober 2020 October 26, 2020	Putrama Wahyu Setyawan Ditunjuk Menjadi Direktur Utama PT Jamkrindo <i>Putrama Wahyu Setyawan Appointed To Be President Director of PT Jamkrindo</i>
24 November 2020 November 24, 2020	PT Jamkrindo Bantu Program PKBL untuk UMKM Berbasis Masjid <i>PT Jamkrindo Assists PKBL Program for Mosque-Based MSMEs</i>
23 Desember 2020 December 23, 2020	Jamkrindo Gelar UMKM Appreciation Awards 2020 <i>Jamkrindo Holds UMKM Appreciation Awards 2020</i>
18 Desember 2020 December 18, 2020	Peduli Pendidikan, Jamkrindo Serahkan Bantuan Perpustakaan Digital <i>Care for Education, Jamkrindo Submits Digital Library Assistance</i>
24 Desember 2020 December 24, 2020	PKBL Jamkrindo Dapat Penghargaan <i>PKBL Jamkrindo Gets Award</i>
24 Desember 2020 December 24, 2020	PT Jamkrindo Bantu Program PKBL untuk UMKM Berbasis Masjid <i>PT Jamkrindo Assists PKBL Program for Mosque-Based MSMEs</i>

Aktivitas Hubungan Media Tahun 2020

Media Relations Activities 2020

Tanggal Date	Bentuk Hubungan Media Forms of Media Relations
29 Februari 2020 February 29, 2020	Press Conference Pemaparan Laporan Keuangan Konsolidasian Audited 2019- Perum Jamkrindo Press Conference Presentation of Audited Consolidated Financial Statements 2019- Perum Jamkrindo
24 Agustus 2020 August 24, 2020	Jamkrindo Talk : Program Penjaminan Kredit Modal Kerja, menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil & Menengah Jamkrindo Talk : Working Capital Loan Guarantee Program, saving Micro, Small & Medium Enterprises
7 Oktober 2020 October 7, 2020	Jamkrindo Talk : Penjaminan KMK PEN Untuk Pemulihan Ekonomi Terdampak COVID-19 Jamkrindo Talk : KMK PEN Guarantee for Economic Recovery Affected by COVID-19

Akses Publik dan Konsumen

Public and Consumer Access

Kepada publik dan konsumen, Perusahaan memberikan keterbukaan akses melalui jalur informasi yang telah disediakan seperti yang tertera di bawah ini.

The Company provides open access for the public and consumers through the information channels as listed below.

Situs Web / Website	www.jamkrindo.co.id
Media Sosial / Social Media	Twitter : @pt_jamkrindo Instagram : @pt_jamkrindo Facebook : Jamkrindo YouTube : PT Jamkrindo

Ragam Media Kepada Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Variety of Media To Shareholders and Stakeholders

Di bawah ini tabel yang menggambarkan ragam media komunikasi yang digunakan Perusahaan untuk menyampaikan data dan informasi terkait aktivitas operasional, proses usaha dan capaian-capaian kinerja yang telah diraih Perusahaan.

Below is a table that describes the various communication media used by the Company to convey data and information related to operational activities, business processes and performance achievements that have been achieved by the Company.

Kepada For	Bentuk-bentuk Media Forms of Media
Regulator Regulators	Surat dan email Letter and email
Pemegang Saham Shareholders	Surat dan email Letter and email
Lembaga Publik Public Institutions	Surat dan email Letter and email
Konsumen Consumers	Surat dan email Letter and email
Karyawan Employees	Memorandum dan email Memorandum and email
Perusahaan Sejenis Lainnya Other Similar Companies	Surat dan email Letter and email
Mitra Kerja dan Rekanan Business Partners	Surat dan email Letter and email
Organisasi Profesi Professional Organizations	Surat dan email Letter and email
Masyarakat/Umum Community/Public	Surat dan email Letter and email

* Situs Web Perusahaan tidak termasuk dalam ragam media di atas, karena sifatnya yang terbuka, tidak terbatas dan dapat diakses oleh siapa saja.

* The Company's Website is not included in the above variety of media because it is open, unrestricted and able to be accessed by anyone.

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

Information Technology Governance

Perkembangan kebutuhan bisnis dan organisasi mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi diri dalam menyiapkan teknologi yang dibutuhkan untuk dapat mendukung pengembangan dan perluasan bisnis, serta memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pemangku kepentingan melalui layanan berbasis teknologi informasi. Dalam era globalisasi, keandalan teknologi informasi merupakan salah satu unsur penting yang mendukung proses bisnis dan layanan yang prima. Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan Perusahaan menyediakan produk dan jasa kepada para pemangku kepentingan, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usaha ke depannya.

The development of business and organizational needs requires the Company to organize and improve in preparing the technology needed to be able to support business development and expansion, as well as provide the best service for stakeholders through information technology-based services. In the era of globalization, the reliability of information technology is one of the important elements that support excellent business processes and services. Technology is the main key that enables the Company to provide products and services for stakeholders, measure and track business performance, and make appropriate management decisions for future business continuity.

Visi dan Misi Penerapan Teknologi Informasi Jamkrindo

Vision and Mission of Jamkrindo Information Technology Implementation



“To Synergize, To Strengthen People & To Strengthen Process”
bagi transformasi Perusahaan menuju Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.
“To Synergize, To Strengthen People & To Strengthen Process” for the Company’s transformation into a Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development.



1. Menyediakan Solusi Bisnis yang terintegrasi, efisien dan efektif untuk mendukung transformasi Perusahaan.
Providing integrated, efficient and effective Business Solutions to support the Company’s transformation.
2. Menyediakan infrastruktur TI yang aman dan andal sesuai dengan perkembangan bisnis.
Providing a secure and reliable IT infrastructure in accordance with business developments.
3. Meningkatkan kematangan atau kapabilitas IT Governance sesuai dengan kebutuhan kepatuhan regulasi dan kemenangan persaingan.
Increasing the maturity or capability of IT Governance in accordance with the needs of regulatory compliance and winning the competition.

Penerapan Sistem Teknologi Informasi di Lingkup Jamkrindo

Implementation of Information Technology Systems in the Jamkrindo Environment

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perusahaan, khususnya dukungan dalam penyediaan infrastruktur kegiatan operasional penjaminan kredit perusahaan, maka Perusahaan melaksanakan beberapa inovasi di bidang teknologi informasi sebagai berikut.

In order to support the Company’s business activities, especially in providing infrastructure for the company’s credit guarantee operations, the Company has implemented several innovations in the field of information technology as follows.

1. **System Integration**
Merupakan *System Integration* adalah proses menghubungkan berbagai sistem komputasi dan aplikasi perangkat lunak secara fisik atau fungsional, agar dapat bertindak sebagai satu kesatuan sistem yang terkoordinasi

1. **System Integration**
System Integration is the process of physically or functionally connecting various computing systems and software applications so that they can act as a unified coordinated system.



a. *Enterprise Resource Planning*

ERP adalah aplikasi sistem informasi manajemen terintegrasi untuk bisnis/organisasi yang mencakup multi fungsionalitas.

Implementasi ERP modul *Financial Management* (Akuntansi) ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas kinerja keuangan dan memperkuat kendali dan efisiensi operasional di Jamkrindo khususnya dalam proses pencatatan akuntansi.

Saat ini sedang dilaksanakan kegiatan implementasi dengan modul berikut ini:

- » Modul Konfigurasi Akun (*GL Journal Entries*).
- » Modul Accounting.
- » Modul *Banking dan Bank Statement Processing*.
- » Modul *Payment Processing*.
- » Modul Laporan Keuangan.
- » Modul Laporan *Self Service dan Dashboard*.
- » Modul Konsolidasi-Eliminasi dan Integrasi.
- » Modul *Fix Asset*.
- » Modul *Cash Flow Direct Method*.
- » Modul Laporan Keuangan.

b. *Enterprise Service Bus*

Enterprise Service Bus merupakan suatu model arsitektur yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan komunikasi antara program aplikasi dalam *Service Oriented Architecture* (SOA).

Enterprise Service Bus juga dapat dipandang sebagai layer yang menghubungkan antara *front-end application* dengan *back-end application*.

Projek Implementasi *Enterprise Service Bus* yang dimulai sejak 2019 saat ini dikembangkan menggunakan platform *Redhat Fuse* dengan menggunakan metode kolaborasi antara tenaga *insource* dan *outsorce*. Sehingga diharapkan *transfer knowledge* dan pengerjaan dapat dengan cepat dilakukan.

Dikarenakan memiliki keuntungan sebagai sebuah *software* yang terletak diantara aplikasi atau yang lebih dikenal dengan adaptor/broker, maka keberadaannya harus dibangun berdasarkan standar dan fleksibel sehingga dapat digunakan untuk fitur penghubung aplikasi-aplikasi lain yang luas seperti aplikasi layanan *online host to host*.

Selain itu, dengan arsitektur aplikasi berbasis *microservice* ke depan, fungsi *Enterprise Service Bus* ini menjadi *support* dalam hal integrasi *enterprise* sehingga memberikan solusi integrasi yang lebih cepat.

a. *Enterprise Resource Planning*

ERP is an integrated management information system application for business/organization that includes multiple functionalities.

The ERP implementation of the Financial Management (Accounting) module aims to increase the visibility of financial performance and strengthen operational control and efficiency at Jamkrindo, especially in the accounting recording process.

Currently, implementation activities are being carried out with the following modules:

- » *Account Configuration Module (GL Journal Entries).*
- » *Accounting module.*
- » *Banking and Bank Statement Processing module.*
- » *Payment Processing Module.*
- » *Financial Statements Module.*
- » *Self Service Report and Dashboard Module.*
- » *Consolidation-Elimination and Integration Module.*
- » *Fixed Assets module.*
- » *Cash Flow Direct Method module.*
- » *Financial Statements Module.*

b. *Enterprise Service Bus*

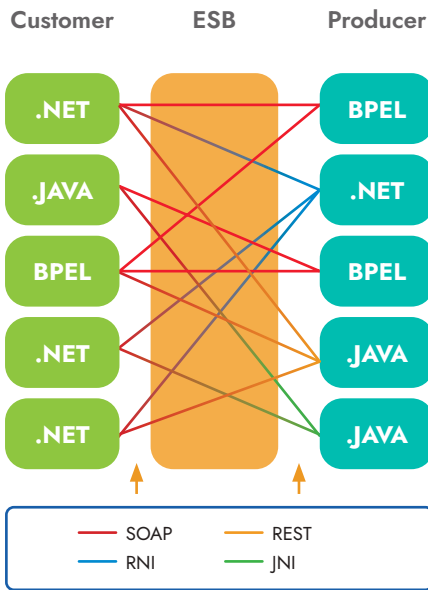
Enterprise Service Bus is an architectural model used to design and implement communication between application programs in Service Oriented Architecture (SOA).

Enterprise Service Bus can also be viewed as a layer that connects front-end applications with back-end applications.

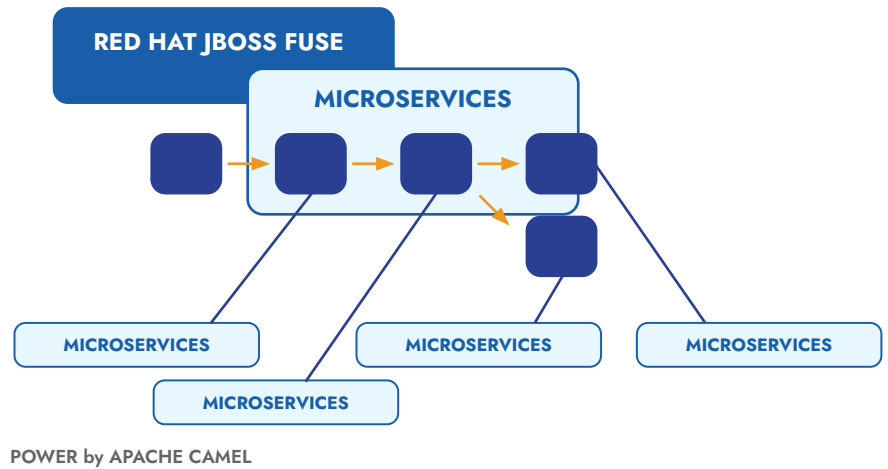
The Enterprise Service Bus Implementation Project which started in 2019 is currently being developed using the Redhat Fuse platform using a collaboration method between insource and outsource personnel. Therefore, the transfer of knowledge and work is expected to be done quickly.

Since it has the advantage of being a software that is located between applications or usually known as an adapter/broker, its existence must be built on a standard and flexible basis so that it can be used for connecting features of other broad applications such as host to host online service applications.

In addition, with future microservice-based application architectures, the Enterprise Service Bus function will support enterprise integration, thus providing faster integration solutions.



Composing Microservices with Fuse



c. Holding

Pada saat ini telah dibentuk holding perasuransian dan penjaminan dimana diketuai oleh BPUI, tujuan *holding* ini adalah

- » Meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
- » Memperkuat daya saing nasional melalui peningkatan permodalan, standar pelayanan, kompetensi SDM dan jangkauan distribusi.
- » Mengoptimalkan sinergi grup melalui kolaborasi, inovasi, efisiensi dan solusi terintegrasi.
- » Memperkuat fungsi investasi dengan tata kelola perusahaan dan risiko yang transparan.

Terdapat beberapa agenda peningkatan kapabilitas IT di dalam *holding* ini, antara lain integrasi laporan penjaminan PEN.

d. Pefindo Biro Kredit

PEFINDO Biro Kredit merupakan pelopor biro kredit swasta di Indonesia. PEFINDO Biro Kredit adalah Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.15/1/PBI/2013 tanggal 18 Februari 2013, atau dikenal juga sebagai Biro Kredit Swasta. PEFINDO Biro Kredit memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan pada 22 Desember 2015 dan mulai beroperasi secara komersial sejak 27 Maret 2017 melalui peluncuran produk *credit score & report*. PEFINDO Biro Kredit didirikan atas prakarsa PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), perusahaan pemeringkat efek (*credit rating agency*) terdepan di Indonesia yang memiliki pengalaman lebih dari

c. Holding

An insurance and guarantee holding has been established which is chaired by BPUI with the purposes as follows:

- » To improve national financial stability and inclusion in order to accelerate economic development and improve social welfare.
- » To strengthen national competitiveness by increasing capital, service standards, HC competencies and distribution coverage.
- » To optimize group synergy through collaboration, innovation, efficiency and integrated solutions.
- » To strengthen the investment function with transparent corporate governance and risk.

There are several IT capability improvement agendas within this holding, including the integration of PEN guarantee reports.

d. Pefindo Credit Bureau

PEFINDO Credit Bureau is the pioneer of private credit bureaus in Indonesia. PEFINDO Biro Kredit is the Credit Information Management Agency (LPIP)—as per Bank Indonesia Regulation No.15/1/PBI/2013 dated February 18, 2013—also known as the Private Credit Bureau. PEFINDO Biro Kredit obtained an operational license from the Financial Services Authority on December 22, 2015 and started its commercial operations on March 27, 2017 through the launch of the credit score & report product. PEFINDO Credit Bureau was established on the initiative of PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), the leading credit rating agency in Indonesia with more than 20 years of experience in rating and managing



20 tahun dalam pemeringkatan serta pengelolaan data sensitif dan rahasia. Susunan pemegang saham PEFINDO Biro Kredit saat ini adalah PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Consumer Information Consulting, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PEFINDO Biro Kredit menghimpun data kredit dari lembaga keuangan dan data non-kredit dari beberapa instansi publik beserta lembaga yang telah bekerja sama untuk menjadi sumber data. Data tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk informasi yang komprehensif dan bernilai tambah.

Pemanfaatan Pefindo Biro Kredit telah berperan dalam mendukung skoring calon terjamin, dengan menambah informasi kredibilitas calon terjamin. Dalam hal ini telah terdapat fasilitas proses integrasi data UMKM dari Pefindo kredit dengan aplikasi PUMK terkait data perkreditan score dan report informatif (informasi calon terjamin, pefindo score, fasilitas kredit, agunan, surat berharga, dsb).

sensitive and confidential data. The current shareholder composition of PEFINDO Credit Bureau includes PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO), PT Pegadaian (Persero), PT TASPEN (Persero), PT Sigma Cipta Caraka (Telkomsigma), PT Consumer Information Consulting, Indonesian Financial Services Association (APPI).

In carrying out its business activities, PEFINDO Credit Bureau collects credit data from financial institutions and non-credit data from several public agencies and institutions that have collaborated to become data sources. The data is then processed and presented in the form of comprehensive and value-added information.

Utilization of Pefindo Credit Bureau has played a role in supporting guaranteed candidate scoring, in this case there is an MSME data integration process facility from Pefindo credit with PUMK application related to credit score data and informative reports (guaranteed candidate information, pefindo score, credit facilities, collateral, securities etc.).





e. Dukcapil

Ditjen Dukcapil merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Ditjen Dukcapil berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dengan Dukcapil memiliki manfaat yang sangat strategis terutama dalam mendukung proses *Know Your Customer*. Kerjasama ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap keaslian identitas calon terjamin

Saat ini pengelolaan verifikasi data telah berjalan dalam melakukan pengumpulan informasi terkait calon terjamin.

f. SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) merupakan suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sesuai dengan hasil evaluasi program KUR tahun 2014 yang dirasa masih kurang tepat sasaran, maka perlu disusun suatu aplikasi untuk mendorong ketepatan sasaran KUR. SIKP sendiri merupakan sistem informasi database untuk calon debitur dan debitur KUR. SIKP dikembangkan oleh Direktorat Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. SIKP merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan KUR Mikro.

e. Dukcapil

The Directorate General of Dukcapil is the implementing element of the Ministry of Home Affairs in the field of population and civil registration. The Directorate General of Dukcapil is under and responsible to the Minister.

The Directorate General of Population and Civil Registration is assign to carry out the formulation and implementation of policies in the field of population and civil registration in accordance with the terms of laws and regulations.

Cooperation with Dukcapil has very strategic benefits, especially in supporting the Know Your Customer process. This collaboration serves to check the authenticity of the guaranteed candidate's identity

Currently, data verification management has been running in collecting information related to guaranteed candidates.

f. SIKP

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) is an application system built to facilitate the implementation of Program Credit, especially People's Business Credit (KUR). In accordance with the results of the evaluation of the KUR program in 2014 which was seen to be still not on target, it was necessary to develop an application to encourage the accuracy of KUR targets. SIKP itself is a database information system for prospective debtors and KUR debtors. SIKP was developed by the Directorate of Treasury System of the Ministry of Finance. SIKP is an important part in the process of implementing Micro KUR.



Tujuan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif. SIKP juga didorong untuk dapat menjadi alat pemercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program. Proses penyusunan aplikasi SIKP telah dimulai sejak arahan dalam Rapat Koordinasi KUR pada bulan Desember 2014. Sesuai arahan dalam Rakor tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menjadi pioner dalam penyusunan aplikasi tersebut. Perencanaan, proses penyusunan, hingga pentahapan penggunaan aplikasi SIKP ini merupakan hasil koordinasi dari Komite Kebijakan KUR yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Fungsi dari adanya kerja sama dengan sistem informasi kredit Program ini adalah Legitimasi Terjamin KUR.

The purpose of SIKP is to become a reliable database for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and can be used as a reference for Banks for effective lending. SIKP is also encouraged to be a tool for accelerating the process of paying bills for program credit subsidies. The process of preparing the SIKP application has been started since the direction at the KUR Coordination Meeting in December 2014. In accordance with the directions in the Coordination Meeting, the Directorate General of Treasury, Ministry of Finance became a pioneer in the preparation of the application. The planning, preparation process, to the phasing of the use of the SIKP application are the results of coordination from the KUR Policy Committee led by the Deputy for Macroeconomics and Finance Coordination, Coordinating Ministry for Economic Affairs.

The function of the collaboration with the credit information system of this program is the Guaranteed Legitimacy of KUR.

2. Automation

Automation adalah penggunaan Teknologi Informasi untuk optimisasi produksi dan untuk melakukan tugas-tugas dasar manusia yang repetitive dan terstruktur. Otomasi dapat membuat pekerjaan lebih cepat, lebih baik secara kuantitas dan/atau kualitas dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja manusia.

a. Online Credit Guarantee

Jamkrindo telah mengembangkan aplikasi penjaminan online dengan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan mitra, hingga saat ini tercatat lebih dari 27 Mitra *online* dari perbankan, 23 Mitra *online* non-perbankan dan 3 Mitra Lembaga Keuangan

b. Aplikasi Penjaminan Terpadu

Aplikasi Penjaminan Terpadu dikembangkan untuk mengatasi kekurangan yang ada pada aplikasi penjaminan yang telah ada. Aplikasi-aplikasi yang sebelumnya terpisah digabung menjadi satu dan terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain. Sistem yang lebih dinamis dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan proses bisnis perusahaan.

Terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi pendukung lain yang dijembatani oleh teknologi *Enterprise Service Bus*. Pada pengembangan Tahap 1 ini dikembangkan beberapa fitur antara lain:

- » Master Data
- » Pengelolaan IJP
- » Penerbitan Sertifikat
- » *End of Day*
- » Kewenangan *Maker Checker Signer*

g. Automation

Automation is the use of Information Technology for production optimization and for performing repetitive and structured basic human tasks. Automation can make work faster, better in quantity and/or quality compared to the use of human labor.

a. Online Credit Guarantee

Jamkrindo has developed an online guarantee application with various methods to meet partner needs. There are more than 27 online banking partners, 23 non-banking online partners and 3 financial institution partners.

b. Integrated Guarantee Application

The Integrated Guarantee Application was developed to overcome the shortcomings in the existing guarantee application. Previously separate applications were merged into one and integrated with other applications. A more dynamic system is needed in order to meet the needs of the company's business processes.

It is integrated with other supporting applications bridged by Enterprise Service Bus technology. In the Phase 1 development, several features were developed, including:

- » *Master Data*
- » *IJP management*
- » *Issuance of Certificates*
- » *End of Day*
- » *Authorized Checker Signer Maker.*

Tahap 2 selanjutnya akan dikembangkan beberapa fitur antara lain:

- » Pengajuan dan Approval Klaim.
- » Banding Klaim.
- » Berkas Klaim.
- » Subrogasi.
- » Optimalisasi dan Standarisasi Penjaminan Online.

In the Phase 2, several features will be further developed, including:

- » *Submission and Approval of Claims.*
- » *Claim Appeal.*
- » *Claim File.*
- » *Subrogation.*
- » *Optimization and Standardization of Online Guarantee.*



c. **Fitur Validasi Tarif**

Merupakan fitur peringatan dini (EWS) yang membandingkan antara IJP yang diinput ke dalam aplikasi dengan data dasar Tarif yang berdasarkan PKS/SOP/ Petunjuk Teknis, untuk mendukung kebijakan atas resiko kekurangan pembayaran IJP sebagaimana diatur dalam Memorandum No.B.01/INT/DIRUT/STF/XII perihal: Kebijakan Atas resiko Operasional Kekurangan Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (IJP) dan Kelebihan Pembayaran Klaim.

c. *Tariff Validation Feature*

This is an early warning feature (EWS) that compares the IJP entered into the application with the basic tariff data based on PKS/SOP/Technical Instructions, to support the policy on the risk of underpayment of IJP as regulated in Memorandum No.B.01/INT/DIRUT/ STF/XII regarding: Policy on Operational risk Underpayment of Guarantee Fee (IJP) and Overpayment of Claims.

d. **Fitur Blacklist**

Penambahan fitur pengecekan atas calon terjamin Suretyship yang telah klaim dan belum lunas subrogasinya dimana pengajuan tidak dapat dilanjutkan dalam fase persetujuan oleh checker-signer.

d. *Blacklist Feature*

Addition of checking feature for Suretyship guaranteed candidates who have claimed and have not paid their subrogation where the submission cannot be continued in the approval phase by the checker-signer.

e. **Aplikasi Koreksi**

Aplikasi yang berfungsi untuk memudahkan Kantor Cabang melakukan koreksi data secara mandiri.

Ruang lingkup fitur koreksi meliputi:

- a. Koreksi data Penjaminan (Approval Kantor Cabang, kecuali KUR dilakukan oleh Kantor Cabang dan Divisi Bisnis 1).
- b. Koreksi data Klaim (Approval Kanwil).
- c. Koreksi data Subrogasi (Approval Kantor Cabang).

e. *Correction Application*

This is an application that serves to make it easier for Branch Offices to make data corrections independently.

The scope of correction features includes:

- a. *Guarantee data correction (Branch Office approval, except KUR is carried out by the Branch Office and Business Division 1).*
- b. *Claim data correction (Kanwil Approval).*
- c. *Subrogation data correction (Branch Office Approval).*

- d. Koreksi data Feebase dan Agen (*Approval Kantor Cabang*).

Beberapa koreksi yang belum dapat diakomodasi oleh fitur koreksi adalah :

- a. Koreksi nilai *coverage*.
- b. Koreksi nomor rekening terjamin.
- c. Koreksi kantor cabang penerima jaminan.
- d. Untuk keterbatasan ini, proses koreksi harus dilakukan oleh Divisi TI dengan persetujuan Divisi/Desk pengelola bisnis.

3. *Internet of things*

Internet of Things, atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus.

a. *Mobile Apps Suretyship*

Merupakan aplikasi *Suretyship self-service* yang dapat diakses melalui *mobile* maupun web. Aplikasi telah diluncurkan pada bulan Juli 2019 untuk *platform* web dan *mobile*.

Calon terjamin dapat melakukan input secara mandiri dan dari Jamkrindo yang berwenang untuk melakukan approval. Untuk kebutuhan Administrasi dokumen dapat dilakukan melalui aplikasi (*online*) maupun di luar aplikasi (*offline*).

Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.jamkrindo.suretyshiponline>

- d. *Feebase and Agent data correction (Branch Office approval)*.

Some corrections that cannot be accommodated by the correction feature are:

- a. *Coverage value correction.*
- b. *Guaranteed account number correction.*
- c. *Correction of the guarantee beneficiary branch office.*
- d. *For this limitation, the correction process must be carried out by the IT Division with the approval of the business management Division/Desk.*

3. *Internet of things*

Internet of Things, or also known by the abbreviation of IoT, is a concept that aims to expand the benefits of continuously connected internet connectivity.

a. *Mobile Apps Suretyship*

It is a self-service Suretyship application that can be accessed via mobile or web. The app was launched in July 2019 for web and mobile platforms.

Candidates are guaranteed to be able to input independently and Jamkrindo is authorized to give approval. For document administration needs, it can be done through the application (online) or outside the application (offline).

Link: <https://play.google.com/store/apps/details?id=id.co.jamkrindo.suretyshiponline>





b. Snapjam

Aplikasi *Snapjam* (e-office) yang dapat diakses melalui web dan mobile application yang bertujuan untuk meningkatkan layanan korespondensi surat-menyurat bagi setiap unit kerja secara elektronis dan paperless. Sejak bulan April 2019, *Snapjam* (eOffice) telah diimplementasikan di seluruh Indonesia. Aplikasi pengelolaan persuratan ini dapat diakses via *Web Apps* dan *Mobile Apps* (tersedia versi Android dan IOS). Dengan terimplementasinya *Snapjam* maka proses korespondensi surat-menyurat dapat lebih cepat dan efisien karena dapat dilakukan dimana saja (dapat diakses publik). Untuk menjaga keamanan informasi di dalamnya maka *Snapjam* diperkuat dengan enkripsi SSL RSA 256 bit.

b. Snapjam

Snapjam application (e-office) which can be accessed via web and mobile application aims to improve correspondence services for each work unit electronically and paperless. Since April 2019, *Snapjam* (eOffice) has been implemented throughout Indonesia. This mail management application can be accessed via *Web Apps* and *Mobile Apps* (available for Android and IOS). With the implementation of *Snapjam*, the correspondence process can be faster and more efficient because it can be done anywhere (accessible to the public). To maintain the security of the information in it, *Snapjam* is reinforced with 256-bit RSA SSL encryption.



c. *Employee Self Service*

Employee Self Service (ESS) merupakan aplikasi pengelolaan layanan operasional Karyawan Jamkrindo yang dapat diakses melalui mobile application (Android/IOS). Manfaat aplikasi ini antara lain: Pengajuan Cuti, Informasi Slip gaji, manfaat kesehatan, perjalan dinas dan lembur.

c. *Employee Self Service*

Employee Self Service (ESS) is a Jamkrindo Employee operational service management application that can be accessed via the mobile application (Android/IOS). The benefits of this application include: Application for Leave, Salary Slip Information, health benefits, official travel and overtime.



d. *Aplikasi Pengelola Acara*

Aplikasi Pengelola Acara merupakan aplikasi mobile dan web (khusus admin) untuk digunakan khususnya dalam event-event korporat. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur antara lain unduh materi kegiatan, keterangan pengisi acara, dan absensi kegiatan yang dapat dipantau langsung secara online.

d. *Event Manager Application*

The Event Manager application is a mobile and web application (administrative only) to be used especially in corporate events. This application has several features, including downloading activity materials, information on performers, and activity attendance that can be monitored directly online.



e. *Jamkrindo Mobile*

Merupakan aplikasi mobile yang berisi data performa perusahaan yang dikomparasikan dengan acuan RKAP tahun berjalan serta dapat dipantau secara langsung

f. *Cyber Security*

Cyber security adalah praktik melindungi sistem, jaringan, dan program dari serangan digital. Serangan siber biasanya ditujukan untuk mengakses, mengubah, atau menghancurkan informasi sensitif dan memeras uang dari pengguna atau mengganggu proses bisnis normal.

1) *PAM (Privilege Access Management)*

Privileged Access Management adalah controller yang mengatur dan menjamin kerahasiaan password akses serta mengawasi aktivitas user yang memiliki *privileged access*.

Solusi *Privileged Access Management* adalah untuk mengatur dan menjamin kerahasiaan password akses, mengawasi aktivitas user yang memiliki *privileged access*, dan mampu menganalisis ancaman yang berpotensi menyerang keamanan informasi penting perusahaan yang dapat diakses melalui user yang memiliki hak akses tersebut.

2) *NAC (Network Access Control)*

Network Access Control (NAC)/Kendali Akses Jaringan adalah pendekatan keamanan jaringan komputer yang untuk menyatukan kerja endpoint teknologi keamanan (seperti *antivirus* dan *firewall*), identifikasi user atau sistem, dan pelaksanaan keamanan jaringan.

e. *Jamkrindo Mobile*

It is a mobile application that contains company performance data that is compared with the current year's RKAP reference and can be monitored directly

f. *Cyber Security*

Cyber security is a practice of protecting systems, networks, and programs from digital attacks. Cyber attacks are usually aimed at accessing, altering or destroying sensitive information and extorting money from users or disrupting normal business processes.

1) *PAM (Privilege Access Management)*

Privileged Access Management is a controller that manages and guarantees the confidentiality of access passwords and monitors the activities of users who have privileged access.

The Privileged Access Management solution is to manage and guarantee the confidentiality of access passwords, monitor the activities of users who have privileged access, and to analyze threats that have the potential to attack the security of important company information that can be accessed through users who have these access rights.

2) *NAC (Network Access Control)*

Network Access Control (NAC) is a computer network security approach that integrates the work of endpoint security technologies (such as antivirus and firewalls), identification of users or systems, and implementation of network security.



NAC berfungsi Untuk mendukung Penerapan Standar Keamanan Network Sistem Teknologi Informasi Komputer (TIK) berbasis ISO 27001:2013 di lingkungan Jamkrindo serta merupakan salah satu solusi dalam menghadapi ancaman TIK yang mampu dikelola dengan baik menjadi salah satu strategi untuk mendukung bisnis dalam memberikan layanan yang terbaik kepada pengguna internal, agen dan mitra, yaitu layanan yang handal, mudah dan aman.

3) NGFW (*Next Generation Firewall*)

Next-generation firewall (NGFW) adalah bagian dari teknologi *firewall* generasi ketiga yang diimplementasikan dalam perangkat keras atau perangkat lunak. NGFW mampu mendeteksi dan memblokir serangan dengan memberlakukan kebijakan keamanan di tingkat aplikasi, port dan protocol.

NGFW dapat memblokir malware sebelum memasuki jaringan, sesuatu yang sebelumnya tidak dapat dilakukan dengan *firewall* biasa. NGFW menjadi alternatif rendah biaya bagi perusahaan yang berusaha meningkatkan keamanan perangkat dasar melalui penggunaan layanan inspeksi, dan sistem perlindungan.

4) Anti Virus & *Malware*

Antivirus adalah sebuah jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mengamankan, mendeteksi, dan menghapus virus komputer dari sistem komputer. Antivirus disebut juga perangkat lunak perlindungan virus. Program ini dapat menentukan apakah sebuah sistem komputer telah terinfeksi dengan sebuah virus atau tidak. Umumnya, perangkat lunak ini berjalan di latar belakang dan melakukan pemindaian terhadap semua berkas yang diakses (dibuka, dimodifikasi, atau ketika disimpan).

Malware atau *Malicious Software* adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup, membahayakan hingga merusak sebuah sistem. Ia berbentuk program atau *script* yang dapat mengeksploitasi file-file penting dalam komputer. Jamkrindo mengimplementasikan antivirus dengan versi *full support* dan secara bertahap akan dilakukan instalasi di seluruh unit kerja yang dimiliki

NAC functions to support the application of ISO 27001:2013-based Computer Information Technology (ICT) Network Security Standards in the Jamkrindo environment and is one of the solutions in dealing with ICT threats that can be managed properly as a strategy to support businesses in providing the best service to their customers. internal users, agents and partners, namely reliable, easy and secure services.

3) NGFW (*Next Generation Firewall*)

Next-generation firewall (NGFW) is a subset of third-generation firewall technology that is implemented in hardware or software. NGFW is able to detect and block attacks by enforcing security policies at the application, port and protocol level.

NGFW can block malware before it enters the network, which is something that was previously impossible done with regular firewalls. NGFW is a low-cost alternative for companies seeking to improve basic device security through the use of inspection services, and protection systems.

4) Anti Virus & *Malware*

Antivirus is a type of software used to secure, detect, and remove computer viruses from computer systems. Antivirus is also known as virus protection software. This program can determine whether a computer system has been infected with a virus or not. Generally, this software runs in the background and performs a scan of all files that are accessed (opened, modified, or when they were saved).

Malware or Malicious Software is a software designed to infiltrate, harm or damage a system. It is in the form of a program or script that can exploit important files on the computer.

Jamkrindo implements an antivirus with a full support version and will gradually be installed in all the work units.

5) ISO 27001:2013 (SMKI)

Standar ISO 27001:2013 merupakan salah satu standar dalam Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System (ISMS)*, yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi dalam usaha mereka untuk mengevaluasi, mengimplementasikan dan memelihara keamanan informasi di organisasi berdasarkan "*best practise*" dalam pengamanan informasi.

Sejak tahun 2019, Jamkrindo telah mengikuti sertifikasi ISO 27001:2013 dengan nomor sertifikat IS 705223 dengan Ruang lingkup sertifikasi: Pengelolaan Pemantauan (*Monitoring*) Aplikasi Penjaminan oleh Divisi Teknologi Informasi Jamkrindo.

g. *Cloud Computing*

Cloud Computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer ('komputasi') dan pengembangan berbasis Internet ('awan'). Sedangkan Awan (*cloud*) adalah metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan didiagram jaringan komputer. Awan (*cloud*) dalam *Cloud Computing* juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya.

1) *Hybrid Cloud Multi Data Center*

Pengertian hybrid cloud adalah campuran dari *public cloud* dengan *private cloud*. Aktivitas yang rahasia tidak akan dilakukan dengan *public cloud* sedangkan kegiatan rahasia yang dilakukan oleh perusahaan akan diubah menjadi *private cloud*. *Hybrid cloud* ini akan mengelola *private cloud* dan juga *public cloud* secara bersama menggunakan *tools* pada lingkungan *cloud* yang berbeda.

Manfaat dari *hybrid cloud* yaitu: Manfaat yang pertama adalah dengan *hybrid cloud* ini pengambil keputusan IT akan memiliki kontrol yang lebih besar terhadap komponen *private* dibandingkan dengan publik yang dikemas sebelumnya. semua hal yang diinginkan termasuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas untuk kebutuhan yang berbeda.

Manfaat lainnya adalah dengan menggunakan *hybrid cloud* ini akan memiliki infrastruktur komputasi lokal yang mana bisa mendukung beban kerja rata-rata untuk bisnis Anda, sekaligus bisa mempertahankan kemampuan dalam memanfaatkan *public cloud* jika menemui keterbatasan sumber daya yang beban kerjanya melebihi dari kapasitas komputasi perusahaan.

5) ISO 27001:2013 (SMKI)

The ISO 27001:2013 standard is one of the standards in the Information Security Management System (ISMS), which provides a general description of what an organization must do in their efforts to evaluate, implement and maintain information security in the organization based on "*best practice*" in information security.

Since 2019, Jamkrindo has participated in ISO 27001:2013 certification with certificate number IS 705223 with the scope of certification: Monitoring Management of Assurance Applications by the Jamkrindo Information Technology Division.

g. *Cloud Computing*

Cloud Computing is a combination of the use of computer technology ('computing') and Internet-based development ('cloud'). While the cloud is a metaphor for the internet, as the cloud is often depicted in computer network diagrams. The cloud in *Cloud Computing* is also an abstraction of the complex infrastructure it hides.

1) *Hybrid Cloud Multi Data Center*

The definition of hybrid cloud is a mixture of public cloud and private cloud. Confidential activities will not be carried out with the public cloud while confidential activities carried out by the company will be converted into a private cloud. This hybrid cloud will manage the private cloud as well as the public cloud together using tools in different cloud environments.

The benefits of a hybrid cloud are: The first benefit is that with this hybrid cloud IT decision makers will have greater control over the private component compared to the pre-packaged public. everything one could want including increased efficiency and flexibility for different needs.

Another benefit is that using this hybrid cloud will have a local computing infrastructure that can support the average workload for your business, while being able to maintain the ability to take advantage of the public cloud if you encounter limited resources whose workload exceeds the company's computing capacity.



h. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence adalah kemampuan sistem untuk menafsirkan data eksternal dengan benar, untuk belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut guna mencapai tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel.

1) *Microstrategy Business Intelligence*

Merupakan aplikasi untuk membantu mentransformasi dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Visualisasi data dapat ditampilkan dalam bentuk tabel maupun *chart/grafik*.

Salah satu fitur dalam *business intelligence* adalah user dapat melakukan kustomasi atas data yang ditampilkan, baik *field, filter*, maupun tampilannya. *Business Intelligence* di Jamkrindo menggunakan aplikasi *Microstrategy*.

Untuk laporan-laporan yang membutuhkan kondisi maupun *field-field* tertentu yang belum terdapat di DWH, dapat dilakukan secara mandiri oleh user menggunakan fitur *visual insight* pada aplikasi *Microstrategy*.

i. *Big data*

Big Data adalah istilah umum untuk segala himpunan data (*data set*) dalam jumlah yang sangat besar, rumit dan tak terstruktur sehingga menjadikannya sukar ditangani apabila hanya menggunakan tool manajemen database biasa atau aplikasi pemroses data tradisional. *Big Data* juga dapat diartikan sebagai pertumbuhan data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertumbuhannya dan memiliki data yang bervariasi sehingga menyebabkan tantangan baru dalam pengolahan sejumlah data besar yang heterogen dan mengetahui bagaimana cara memahami semua data tersebut.

1) *Platform MPG*

Market Place Guarantee (MPG)/UMKM Layak merupakan sebuah *platform digital* yang dibuat dengan tujuan mengakomodir kebutuhan UMKM, yaitu kebutuhan untuk mengakses pembiayaan dan kebutuhan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. MPG adalah *tool/platform* yang digunakan bertujuan untuk:

- 1) Agar tersedianya sarana dan prasana untuk mendukung optimalisasi pasar dan mitra penjaminan
- 2) Agar tersedianya *database* UMKM yang komprehensif

h. *Artificial Intelligence*

Artificial Intelligence is the ability of a system to correctly interpret external data, to learn from that data, and to use that learning to achieve specific goals and tasks through flexible adaptation.

1) *Microstrategy Business Intelligence*

It is an application to help transform raw data into useful and meaningful information for business analysis purposes. Data visualization can be displayed in the form of tables or charts/graphs.

One of the features in *business intelligence* is that users can customize the displayed data, including fields, filters, and appearance. *Business Intelligence* at Jamkrindo uses the *Microstrategy* application.

For reports that require certain conditions or fields that are not yet available in DWH, the user can do this independently using the *visual insight* feature in the *Microstrategy* application.

i. *Big data*

Big Data is a general term for any data set in a very large, complex and unstructured number that makes it difficult to handle if we only use ordinary database management tools or traditional data processing applications.

Big Data can also be interpreted as the exponential growth of data and information with the speed in which it is added and has varied data, causing new challenges in processing heterogeneous large amounts of data and knowing how to understand all of that data.

1) *Platform MPG*

Market Place Guarantee (MPG)/MSME Eligible is a digital platform created with the aim of accommodating the needs of MSMEs, namely the need to access financing and the need to attend trainings.

MPG is a tool/platform that is used to:

- 1) Provide facilities and infrastructure to support market optimization and guarantee partners
- 2) Provide a comprehensive MSME database

- 3) Tersedianya informasi profil UMKM yang akurat
- 4) Membantu UMKM dalam mengakses layanan keuangan

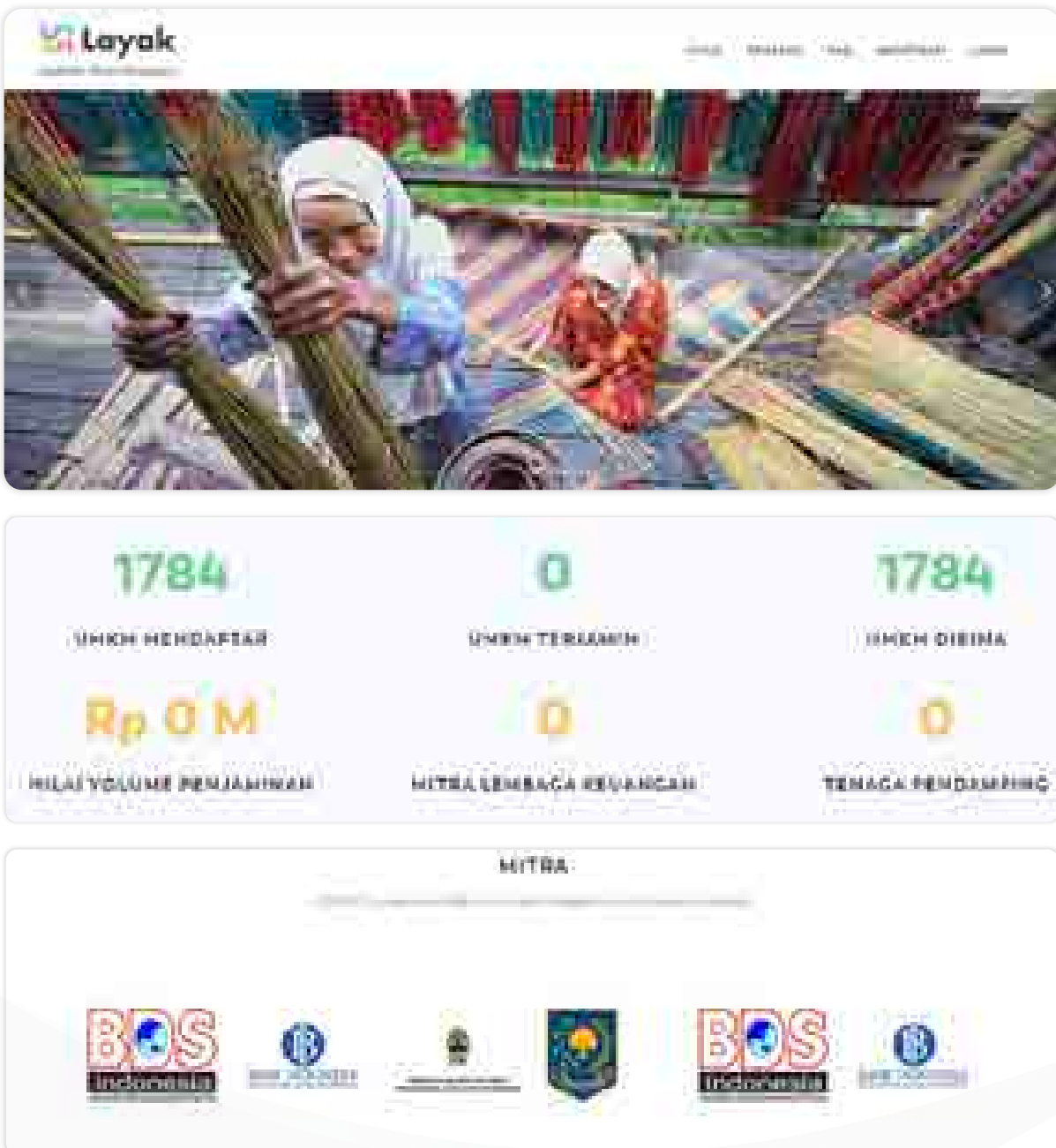
Saat ini UMKM Layak telah dapat diakses dan telah bekerjasama dengan beberapa pihak untuk membantu mendukung optimalisasi pasar dan mitra penjaminan.

Ke depan akan dikembangkan sebagai database UMKM, baik terjamin maupun calon terjamin yang layak. Termasuk dengan melakukan sinergi dengan platform UMKM lainnya, seperti perijinan, jasa konsultasi. Diharapkan dengan adanya sinergi platform lain tersebut, konsep data sharing dapat berjalan.

- 3) Provide accurate MSME profile information
- 4) Help MSMEs in accessing financial services

Currently, MSMEs are eligible to be accessed and have collaborated with several parties to help support market optimization and guarantee partners.

In the future, it will be developed as a database of MSMEs, both guaranteed and eligible candidates. This includes synergizing with other MSME platforms, such as licensing and consulting services. With the synergy of these other platforms, the concept of data sharing is expected to be able to work.



Investasi Teknologi Informasi

Di sepanjang tahun 2020 Perusahaan mengeluarkan biaya investasi TI sebesar Rp26.222 juta, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp38.701 juta. Penurunan ini disebabkan adanya penundaan pengadaan terkait proses bisnis non kritis/prioritas selama pandemi COVID-19.

Rencana Pengembangan TI Jamkrindo

Sesuai dengan dinamika yang ada, rencana pengembangan TI Jamkrindo tertuang dalam RJPP Perusahaan periode 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

Information Technology Investment

Throughout 2020, the Company incurred IT investment costs of Rp. 26,222 million, a decrease from the previous year which was Rp. 38,701 million. This decrease was due to procurement delays related to non-critical/priority business processes during the COVID-19 pandemic.

Jamkrindo IT Development Plan

In accordance with the existing dynamics, Jamkrindo IT development plan is contained in the Company's RJPP for the 2020-2024 period as can be seen below.

Program Kerja Jangka Panjang Periode Tahun 2020-2024 Divisi Teknologi Informasi

2020-2024 Long-Term Work Program of Information Technology Division

No.	Kode IS Code IS	Program Kerja Work Program	Output	Tahun Year				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	IS-01	Mengembangkan konsolidasi dan kolaborasi dengan anggota Holding dengan meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis perusahaan. <i>Develop consolidation and collaboration with Holding members by increasing the efficiency and performance of the Company's business.</i>	Efisiensi biaya kerja sama dengan anggota holding lainnya <i>Cost efficiency Cooperation with other holding members</i>					
2	IS-01	Mengembangkan kolaborasi BUMN dengan BANK & non BANK guna meningkatkan volume penjaminan (dengan cara: Sosialisasi, Penyusunan MOU/PKS dan meningkatkan kerja sama melalui anak perusahaan atau mitra strategis BUMN) <i>Develop SOE collaboration with BANK & non-BANK in order to increase the volume of guarantee (by means of: Socialization, Prepare MOU/PKS and increase cooperation through subsidiaries or strategic SOE partners)</i>	Peningkatan PKS dengan perusahaan BUMN diperolehnya kenaikan proporsi kolaborasi BUMN sebesar 12% menjadi 24% sampai 2024 <i>An increase in PKS with SOE companies An increase in the proportion of SOE collaborations by 12% to 24% until 2024</i>					
3	IS-06	Mensosialisasikan dan mengimplementasikan suretyship online <i>Promote and implement online suretyship</i>	Terimplementasikannya suretyship online <i>Online suretyship has been implemented</i>					
4	IS-06	Meningkatkan kinerja IT dengan berkolaborasi dengan Holding <i>Improve IT performance by collaborating with Holding.</i>	Terimplementasinya kolaborasi kapabilitas IT Holding <i>IT Holding capability collaboration has been implemented</i>					
5	IS-06	Mengembangkan layanan penjaminan B2C secara online berbasis mobile apps dan web <i>Develop online B2C guarantee services based on mobile apps and web</i>	Tersedianya mobile apps penjaminan <i>Availability of guarantee mobile apps</i>					
6	IS-06	Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Terpadu <i>Develop Integrated Guarantee Information System</i>	Tersedianya Sistem Informasi Penjaminan Terpadu <i>Availability of an Integrated Guarantee Information System</i>					

No.	Kode IS Code IS	Program Kerja Work Program	Output	Tahun Year				
				2020	2021	2022	2023	2024
7	IS-06	Mengembangkan sistem/aplikasi CRM (Customer Relationship Management) <i>Develop a CRM (Customer Relationship Management) system/application</i>	Tersedianya sistem CRM yang dapat melakukan <i>profiling</i> pelanggan dan memberikan perhatian atas kebutuhan pelanggan <i>Availability of a CRM system that can perform customer profiling and pay attention to customer needs</i>					
8	IS-07	Memetakan dan menyempurnakan proses bisnis secara menyeluruh (kantor pusat dan unit kerja) <i>Map and refine overall business processes (head office and work units)</i>	Tersusunnya proses bisnis yang lebih efektif dan efisien untuk seluruh proses di kantor pusat dan unit kerja <i>Establishment of more effective and efficient business processes for all processes at the head office and work units</i>					
9	IS-07	Menyempurnakan prosedur/SOP & kebijakan, prosedur analisis terjamin prosedur terkait subrogasi prosedur layanan klaim prosedur manajemen risiko prosedur anggaran dll. <i>Improve procedures/SOPs & policies, a.l: guaranteed analysis procedures, procedures related to subrogation, service procedures, claims, risk management procedures, budget procedures, etc.</i>	Tersusunnya dan tersosialisasikannya prosedur/SOP yang lebih efektif dan efisien <i>More effective and efficient procedures/SOPs have been established and socialized</i>					
10	IS-07	Melakukan surveillance sertifikasi ISO 27001 <i>Carry out ISO 27001 certification surveillance</i>	Sertifikasi ISO 27001 <i>ISO 27001 Certification</i>					
11	IS-07	Meningkatkan tingkat kematangan tata kelola TI (Cobit 4.1) <i>Increase the maturity level of IT governance (Cobit 4.1)</i>	Nilai tata kelola TI yang lebih baik <i>Improved IT governance value</i>					
12	IS-07	Meningkatkan kualitas katalog layanan TI <i>Improve the quality of the IT service catalog</i>	Katalog layanan TI yang lebih sesuai dengan kebutuhan <i>More tailored IT service catalog</i>					
13	IS-07	Optimalisasi penagihan IJP Program Pemerintah <i>Optimize Government Program IJP collection</i>	Diterimanya IJP Program Pemerintah dengan koreksi 10% dari nilai tagihan <i>Government IJP Program with a 10% correction of the invoice value has been received</i>					
14	IS-07	Integrasi proses bisnis, operasional dan keuangan <i>Integrate business, operational and financial processes</i>	Implementasi integrasi <i>Integration implementation</i>					
15	IS-08	Memperluas, standarisasi, simplifikasi digital channeling (e-SP, e-IJP, e-klaim, e-subro) dengan mitra bank maupun non bank <i>Expand, standardize, simplify digital channeling (e-SP, e-IJP, e-claim, e-subro) with bank and non-bank partners</i>	Tercapainya efisiensi SDM, waktu dan biaya, reduksi human error, dan pertumbuhan volume bisnis <i>HC, time and cost efficiency, reduction of human error, and growth of business volume have been achieved</i>					
16	IS-08	Melakukan integrasi secara online dengan Sistem Informasi Program Pemerintah (a.l. SIKP) <i>Perform online integration with the Government Program Information System (a.l. SIKP)</i>	Terbaruinya debitur di aplikasi perusahaan dan data penagihan IJP <i>Debtors in the company application and IJP billing data have been updated</i>					
17	IS-08	Mengembangkan aplikasi terintegrasi antara penjaminan dengan akuntansi (a.l: sistem informasi anggaran) <i>Develop an integrated application between guarantee and accounting (a.l: budget information system)</i>	Tercapainya efisiensi SDM, waktu, dan biaya, reduksi human error, validitas data <i>HC, time and cost efficiency, reduction of human error, data validity</i>					



No.	Kode IS Code IS	Program Kerja Work Program	Output	Tahun Year				
				2020	2021	2022	2023	2024
18	IS-08	Mengembangkan dashboard kinerja perusahaan dan unit kerja (untuk fungsi bisnis) <i>Develop company and work unit performance dashboards (for business functions)</i>	Terimplementasikannya dashboard kinerja untuk fungsi bisnis <i>Performance dashboard for business functions has been implemented</i>					
19	IS-08	Mengembangkan dashboard kinerja perusahaan dan unit kerja (untuk fungsi pendukung, mis: SDM, MR, Umum, dll.) <i>Develop company and work unit performance dashboards (for support functions, eg HC, MR, General, etc.)</i>	Terimplementasikannya dashboard kinerja untuk fungsi pendukung <i>Performance dashboard for supporting functions has been implemented</i>					
20	IS-08	Mengembangkan otomasi proses pembuatan PKS <i>Develop automation of the PKS manufacturing process</i>	Terimplementasikannya sistem proses PKS terintegrasi <i>Integrated PKS process system has been implemented</i>					
21	IS-08	Menyempurnakan klaim online KUR dan Non-KUR <i>Improve KUR and Non-KUR online claims</i>	Tersedianya data klaim yg akurat dan tepat jumlah (menampilkan berapa lama pengajuan klaim dll.) <i>Availability of accurate claim data (showing how long it takes to submit a claim, etc.)</i>					
22	IS-08	Mengembangkan aplikasi skoring bisnis, reasuransi, dan channel penjualan penjaminan <i>Develop business scoring applications, reinsurance, and insurance sales channels</i>	Terbangunnya aplikasi skoring untuk bisnis, reas, dan channel penjualan penjaminan <i>Scoring application for business, reas, and guarantee sales channels have been established</i>					
23	IS-08	Mengimplementasikan dan menyempurnakan aplikasi Market place Guarantee <i>Implement and improve the Market place Guarantee application</i>	Terimplementasikannya aplikasi market place guarantee <i>Market place guarantee application has been Implemented</i>					
24	IS-08	Mengembangkan aplikasi piutang IJP, piutang reasuransi, pengajuan reas, dan piutang co-guarantee receivables <i>Develop applications for IJP receivables, reinsurance receivables, reas submissions, and co-guarantee receivables</i>	Mengefisienkan perolehan data piutang dan aging piutang terbaru <i>Streamline the acquisition of the latest accounts receivable and aging data</i>					
25	IS-08	Mengembangkan portal UMKMK Consultancy <i>Develop the MSMEK Consultancy portal</i>	Tersedianya dan terimplementasikannya portal UMKMK Consultancy <i>MSMEK Consultancy portal is available and has been implemented</i>					
26	IS-08	Mengembangkan sistem Learning Center Penjaminan <i>Develop a Learning Center Guarantee system</i>	Tersedianya dan terimplementasikannya sistem Learning Center Penjaminan <i>Learning Center Guarantee system is available and has been implemented</i>					
27	IS-08	Mengembangkan portal UMKMK Center of Excellence (layanan terintegrasi untuk UMKMK, incl. Learning Management System, Data Center, Konsultasi, MPG, dll.) <i>Develop the MSMEK Center of Excellence portal (integrated services for MSMEK, including Learning Management System, Data Center, Consultancy, MPG, etc.)</i>	Tersedianya dan terimplementasikannya portal UMKMK Center of Excellence <i>MSMEK Center of Excellence portal is available and has bee implemented</i>					

No.	Kode IS Code IS	Program Kerja Work Program	Output	Tahun Year				
				2020	2021	2022	2023	2024
28	IS-08	Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan infrastruktur penunjang bisnis perusahaan <i>Increase the capacity and availability of the company's business support infrastructure</i>	Meningkatkan ketersediaan layanan dan kepuasan pelanggan Melakukan review atas resource yang telah digunakan serta menyiapkan penambahan resource antara lain server dan interkoneksi untuk mendukung pertumbuhan bisnis. <i>Improve service availability and customer satisfaction Review the resources that have been used and prepare additional resources, including servers and interconnections to support business growth.</i>					
29	IS-09	Melakukan pembenahan data governance blueprint <i>Implement the data governance blueprint</i>	Tersusunnya prosedur tata kelola data untuk mendukung tersusunnya database yang terintegrasi dan konsisten <i>Data governance procedures to support the establishment of an integrated and consistent database have been prepared</i>					
30	IS-09	Mengembangkan machine learning dengan pendekatan DWHBI untuk prediksi IJP, Klaim, Subrogasi <i>Develop machine learning with DWHBI approach for IJP prediction, Claim, Subrogation</i>	Perhitungan tarif IJP oleh sistem sebagai pendukung pengambilan keputusan Prediksi tren IJP, klaim, dan subrogasi secara otomatis <i>Calculation of IJP rates by the system to support decision making Predicts IJP trends, claims, and subrogations automatically</i>					
31	IS-09	Mengembangkan machine learning untuk penguatan analisis terjamin <i>Develop machine learning for guaranteed analysis reinforcement</i>	Terjamin yang lebih berkualitas Turunnya rasio klaim <i>More guaranteed Lower claims ratio</i>					
32	IS-09	Mengembangkan machine learning dengan pendekatan DWHBI untuk pemetaan produk-pasar <i>Develop machine learning with DWHBI approach for product-market mapping</i>	Pemetaan produk dan pasar yang lebih cepat dan akurat <i>Faster and more accurate product and market mapping</i>					
33	IS-09	Mengembangkan machine learning dengan pendekatan DWHBI untuk penguatan aktivitas pemasaran <i>Develop machine learning with DWHBI approach to strengthen marketing activities</i>	Aktivitas pemasaran yang lebih tepat sasaran <i>More targeted marketing activities</i>					
34	IS-09	Mengembangkan big data analytics <i>Develop big data analytics</i>	Terimplementasikannya big data analytics <i>Big data analytics have been implemented</i>					



KODE ETIK

Code of Conduct

Kode Etik atau *Code of Conduct* adalah sekumpulan komitmen yang terdiri dari budaya Perusahaan serta Standar Etika Perusahaan yang membentuk dan mengarahkan tingkah laku agar sesuai dengan budaya dan nilai-nilai Perusahaan. *Code of Conduct* berlaku untuk seluruh individu yang bertindak atas nama Perusahaan dan entitas anak, serta menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan transaksi bisnis dengan Perusahaan.

The Code of Conduct is a set of commitments consisting of the Company's culture and the Company's Ethical Standards that shape and direct behavior in accordance with the Company's culture and values. The Code of Conduct applies to all individuals acting on behalf of the Company and subsidiaries, as well as being a reference for all stakeholders who conduct business transactions with the Company.

Tujuan penerapan Kode Etik dilakukan untuk:

1. Sebagai pedoman yang berisi panduan dalam melaksanakan standar etika usaha dan panduan perilaku bagi seluruh Insan Jamkrindo yang harus dipatuhi dalam berinteraksi sehari-hari dengan semua pihak.
2. Sebagai landasan etis dalam berfikir dan mengambil keputusan yang terkait dengan Jamkrindo.
3. Sebagai sarana untuk menciptakan dan mendukung lingkungan kerja yang sehat, positif dan menampilkan perilaku-perilaku etis dari seluruh Insan Jamkrindo.
4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kepekaan Perusahaan dan Insan Jamkrindo terhadap nilai-nilai etika bisnis dengan mengembangkan diskusi-diskusi atau pengembangan wacana mengenai etika.

The purpose of implementing the Code of Ethics is:

1. *As a guideline for implementing business ethics standards and behavioral guidelines for all Jamkrindo Company Staff that must be adhered to in daily interactions with all parties.*
2. *As an ethical foundation in thinking and making decisions related to Jamkrindo.*
3. *As a means to create and support a healthy, positive work environment and display ethical behaviors of all Jamkrindo's Staff.*
4. *As a means to increase the sensitivity of the Company and the employees of Jamkrindo to the values of business ethics by developing discussions or developing a discourse on ethics.*

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai Landasan Utama

Penerapan kode etik yang dimiliki Perusahaan merupakan sebuah upaya untuk dapat mensinergikan seluruh organ Perusahaan untuk dapat bersama-sama mengemban visi, misi dan budaya Perusahaan. Sebagai tujuan akan perjalanan Perusahaan di masa yang akan datang, visi berperan penting dalam menempatkan seluruh Insan Jamkrindo untuk dapat mewujudkan visi tersebut melalui misi yang telah ditetapkan, serta internalisasi budaya perusahaan hingga mampu membentuk perilaku setiap Insan Jamkrindo.

Vision, Mission, and Corporate Culture as the Main Platform

The implementation of the Company's code of conduct is an effort to synergize all of the Company's organs to be able to jointly carry out the Company's vision, mission, and culture. As the future of Corporate goal, the vision plays an important role in reminding all employees of Jamkrindo to be able to realize this vision through a predetermined mission, as well as internalizing the corporate culture so as to be able to shape the behavior of every Jamkrindo employees.



Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian nasional.

To Become the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development.


Misi
Mission

Meningkatkan **aksesibilitas** finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang **inovatif, kompetitif** dengan pelayanan **profesional, efektif** dan **efisien** secara **berkelanjutan**.

*Improving MSMEs' and Cooperatives' Financial **Accessibilities** through the provision of Guarantee, which is **Innovative, Competitive** with a **Professional, Effective, and Efficient** Services **Sustainably**.*



Amanah
Trusted

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Uphold the trust given



Kompeten
Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continually learn and develop capabilities



Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan
Care to each other and respect differences



Loyal
Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara
Prioritise our dedication for nation and country



Adaptif
Adaptive

Terus berinovasi dan antusias menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continually innovate to respond and make change



Kolaboratif
Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis
Build strategic alliance



Sebagai bentuk upaya internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan Perusahaan, pada tanggal 10 Agustus 2020 Perusahaan telah membentuk Tim Budaya yang dituangkan dalam Surat Perintah Tugas No.069/SPT/4/VIII/2020. Tim budaya tersebut terdiri dari Tim Executive, Tim Khusus dan Tim Implementasi. Peran dan tanggung jawab dari tim budaya adalah sebagai berikut:

Peran dan tanggung jawab Executive, antara lain:

1. Mendemonstrasikan komitmen dan leadership pada implementasi *core values* AKHLAK sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
2. Menetapkan Kebijakan dan strategi budaya AKHLAK
3. Memberikan dukungan penuh dalam setiap tahapan dan pelaksanaan kerangka kerja budaya AKHLAK
4. Memberikan arahan dan pengawasan untuk menjamin implementasi *culture* AKHLAK yang efektif sesuai dengan target yang ditetapkan
5. Menetapkan Ketua, Wakil Ketua (Ketua Alternatif), Anggota Executive, dan Tim yang dibentuk terkait dengan implementasi *core values* AKHLAK
6. Memastikan bahwa kebijakan dan tujuan *culture* AKHLAK yang tersedia sejalan dengan tujuan strategis Perusahaan dan bisnis Perusahaan
7. Mengkomunikasikan pentingnya *culture* AKHLAK yang efektif sesuai dengan kebutuhan Perusahaan
8. Mengarahkan dan mendukung Karyawan untuk berkontribusi pada implementasi Kebijakan *culture* AKHLAK yang efektif

Peran dan tanggung jawab Team Khusus, antara lain:

1. Merumuskan implementasi *core values* AKHLAK melalui program *Employee Engagement*
2. Berkoordinasi dengan *counterpart expertise* budaya dan *Employee Engagement*
3. Mengkomunikasikan program-program implementasi budaya AKHLAK kepada *executive*
4. Memastikan pelaksanaan program implementasi berjalan sesuai program kerja
5. Evaluasi, *mentoring* dan pelaporan program implementasi kepada *executive*

Peran dan tanggung jawab Tim Implementasi, antara lain:

1. Leader
 - a. Memberikan *awareness* bagi tim tentang *core value* AKHLAK
 - b. Memastikan *core values* AKHLAK menjadi perilaku tim
 - c. Memberikan *coaching/mentoring/feedback* terhadap perilaku yang belum sesuai dengan *core values* AKHLAK
 - d. Memastikan tim telah melakukan pengisian dashboard perilaku AKHLAK sebagai wujud implementasi *core values* AKHLAK
 - e. Evaluasi dan *monitoring*
 - f. Menjadi *role model core values* AKHLAK

As an effort to internalize AKHLAK culture within the Company's on August 10, 2020, the Company has formed a Cultural Team as stated in the Letter of Assignment No.069/SPT/4/VIII/2020. The cultural team consists of the Executive Team, Special Team and Implementation Team. The roles and responsibilities of the cultural team are as follows:

Executive roles and responsibilities include:

1. *Demonstrate commitment and leadership on the implementation of AKHLAK core values in accordance with their roles and responsibilities.*
2. *Establishing AKHLAK Culture Policies and Strategies*
3. *Provide full support in every stage and implementation of AKHLAK culture framework*
4. *Provide direction and supervision to ensure the implementation of an effective AKHLAK culture in accordance with the defined targets*
5. *Establishing the Chairman, Vice Chairman (Alternative Chairman), Executive Members, and Teams formed related to the implementation of AKHLAK core values*
6. *Ensure that the policies and objectives of AKHLAK culture are available and in line with the Company's strategic objectives and business*
7. *Communicate the importance of effective AKHLAK culture in accordance with the Company's needs*
8. *Directing and supporting Employees to contribute to the implementation of effective AKHLAK culture policy*

Special Teams roles and responsibilities, among others:

1. *Formulating the implementation of AKHLAK core values through employee engagement program*
2. *Coordinate with cultural expertise counterparts and Employee Engagement*
3. *Communicate programs for the implementation of AKHLAK culture to executives*
4. *Ensure the implementation program runs in accordance with the work program*
5. *Evaluation, mentoring and reporting of implementation programs to executives*

Implementation Team roles and responsibilities include:

1. Leader
 - a. *Provide awareness for the team about AKHLAK core value*
 - b. *Ensuring AKHLAK core values become team behavior*
 - c. *Provide coaching/mentoring/feedback on behavior that is not in accordance with AKHLAK core values*
 - d. *Ensure that the team has filled out the AKHLAK behavior dashboard as a form of implementation of AKHLAK core values*
 - e. *Evaluation and monitoring*
 - f. *Become a role model of AKHLAK core values*

2. PIC
 - a. Memimpin koordinasi antara unit kerjanya dengan tim khusus
 - b. Menjadi motor/penggerak perubahan perilaku yang sesuai dengan *core values* AKHLAK.

3. Captain
 - a. Memberikan motivasi agar karyawan lain berpartisipasi dan mengimplementasikan perilaku AKHLAK menjadi perilaku baru dan *belief (personal value)* yang melekat pada diri masing-masing karyawan;
 - b. Memberikan contoh perubahan perilaku AKHLAK kepada seluruh Insan Jamkrindo di Unit Kerja masing-masing;
 - c. Berkoordinasi dan memberikan *feedback* kepada tim khusus terkait implementasi Culture AKHLAK di unit kerja masing-masing;
 - d. Memberikan laporan baik lisan maupun tulisan kepada Divisi MSDM terkait implementasi perilaku AKHLAK di masing-masing Unit Kerja dan usulan koreksinya untuk perbaikan baik pada tingkat unit kerja maupun pada tingkat korporasi.

2. PIC
 - a. *Lead coordination between work unit and special team*
 - b. *Become motor/driver of change with behavior in accordance with AKHLAK core values.*

3. Captain
 - a. *Provide motivation for other employees to participate and implement AKHLAK behavior into new behaviors and beliefs (personal values) inherent in each employee;*
 - b. *Provide role model of changes in moral behavior to all Jamkrindo's Employees in their respective Work Units;*
 - c. *Coordinate and give feedback to the special team related to the implementation of AKHLAK Culture in their respective work units;*
 - d. *Provide reports either oral and written to HR Division related to the implementation of AKHLAK behavior in each Work Unit and its proposed corrections for improvement both at the work unit and corporate level.*

Tim Budaya telah melaksanakan program-program sebagai upaya Internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan perusahaan. Program-program tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

The Cultural Team has implemented programs as an effort to internalize AKHLAK culture within the corporate. These programs are as follows:

No	Tanggal Date	Program Program	Kegiatan Activities
1	06/08/2020	Internalisasi Budaya AKHLAK di Kantor Pusat untuk Level Kepala Divisi <i>Internalization of AKHLAK Culture at Head Office for Division Head Level</i>	Sosialisasi kepada Kepala Divisi, Kepala Desk, Sekper, SPI di Jamkrindo pada saat Rapat Direksi melalui zoom meeting <i>Socialization to Head of Division, Head of Desk, Corporate Secretary, Internal Audit Unit in Jamkrindo during the Board of Directors Meeting through zoom meeting</i>
2	13/08/2020	Internalisasi Budaya AKHLAK untuk Level Pimpinan Wilayah dan Pemimpin Cabang <i>Internalization of AKHLAK Culture for Regional Head and Branch Head Level</i>	Sosialisasi kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan Pemimpin Cabang yang dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting. Pada pelaksanaan Sosialisasi diadakan Post Test melalui Quizizz guna meningkatkan awareness dan mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap core values AKHLAK. <i>Socialization to all Regional Heads and Branch Heads conducted through Zoom Meeting application. At the socialization was held post test through Quizizz to increase awareness and know the level of understanding of participants regarding AKHLAK core values.</i>
3	14/08/2020 s.d 14/09/2020	Internalisasi Budaya AKHLAK di Seluruh Unit Kerja <i>Internalization of AKHLAK Culture in all work units</i>	Setelah dilakukan Internalisasi budaya AKHLAK kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja, maka masing-masing pimpinan Unit Kerja melakukan Sosialisasi budaya AKHLAK di masing-masing Unit Kerjanya. <i>After internalizing the AKHLAK culture to all Work Unit Heads, then each Work Unit Head conducts socialization of AKHLAK culture in each of its Work Units.</i>



No	Tanggal Date	Program Program	Kegiatan Activities
4	01/09/2020 s.d Sekarang 01/09/2020 to date	Internalisasi Budaya AKHLAK Melalui Media Sosial <i>Internalization of AKHLAK Culture Through Social Media</i>	<p>Membuat konten-konten menarik dan interaktif mengenai Core Values AKHLAK melalui Sosial Media Jamkrindo sebagai platform untuk meningkatkan awareness bagi Karyawan. <i>Create interesting and interactive content regarding AKHLAK Core Values through Jamkrindo Social Media as a platform to increase awareness for Employees.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Quiz mengenai AKHLAK yang dibuat melalui Instagram PT Jamkrindo <i>Quiz regarding AKHLAK made through Instagram PT Jamkrindo</i> Konten yang berisikan penjelasan mengenai nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang dibuat melalui Instagram PT Jamkrindo <i>Content explanation regarding AKHLAK values (Trust, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, and Collaborative) created through Instagram PT Jamkrindo</i> Vlog oleh karyawan yang diupload melalui Youtube <i>Vlogs by employees uploaded via Youtube</i>
5	30/09/2020	Implementasi Budaya AKHLAK melalui pendekatan Sense of Urgency dan Transaksional Burke Litwin Model oleh Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan <i>Implementation of AKHLAK Culture through Sense Of Urgency approach and Model Transactional of Burke Litwin by Director of HR Management, General Affairs & Compliance</i>	<p>Sosialisasi mengenai metode implementasi Budaya AKHLAK melalui pendekatan Sense of Urgency dan Transaksional Burke Litwin Model oleh Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan kepada Kepala Divisi dan Training of The Trainers <i>Socialization on the method of implementation of AKHLAK Culture through Sense Of Urgency approach and Model Transactional of Burke Litwin by Director of HR Management, General Affairs & Compliance to Head of Division and Training of The Trainers</i></p>
6	10/11/2020 s.d. 16/11/2020	Implementasi AKHLAK Core Values Amanah melalui Employee Engagement Self Affirmation Quotes. <i>Implementation of AKHLAK Core Values Amanah through Employee Engagement Self Affirmation Quotes.</i>	<p>Sebagai bentuk komitmen afirmasi kontribusi kinerja karyawan kepada Perusahaan, maka setiap karyawan membuat quote afirmasi diri yang dicetak pada kertas foto dan diletakan pada masing-masing meja kerja karyawan menggunakan papan akrilik <i>As an affirmation commitment of employee performance contribution to the Company, each employee makes a self-affirmation quote printed on photo paper and placed on each employee's work desk using acrylic board</i></p>
7	12/11/2020	Cross CEO Talks Implementasi Core Values Amanah dan Kompeten di PT Jamkrindo <i>Cross CEO Talks Implementation of Core Values Trust and Competent at PT Jamkrindo</i>	<p>Sosialisasi Implementasi Core Values Amanah dan Kompeten yang disampaikan oleh Bapak Dedi Sunardi (Direktur Utama PT Askrindo) kepada seluruh Karyawan/ti PT Jamkrindo <i>Socialization of Implementation of Core Values Trust and Competent delivered by Mr. Dedi Sunardi (President Director of PT Askrindo) to all Employees of PT Jamkrindo</i></p>
8	20/11/2020	Cross CEO Talks Implementasi Core Values Amanah dan Kompeten di PT Jasa Raharja <i>Cross CEO Talks Implementation of Core Values Trust and Competent at PT Jasa Raharja</i>	<p>Sosialisasi Implementasi Core Values Amanah dan Kompeten yang disampaikan oleh Bapak Putrama Wahyu Setyawan (Direktur Utama PT Jamkrindo) kepada seluruh Karyawan/ti PT Jasa Raharja <i>Socialization of Implementation of Core Values Trust and Competent delivered by Mr. Putrama Wahyu (President Director of PT Jamkrindo) to all Employees of PT Jasa Raharja</i></p>

No	Tanggal Date	Program Program	Kegiatan Activities
9	28/11/2020	Internalisasi budaya AKHLAK IFG “Embrace Millennials Power to Transform” Internalization of IFG AKHLAK Culture “Embrace Millennials Power to Transform”	Sosialisasi Budaya AKHLAK yang diselenggarakan oleh segenap IFG Group melalui ILM Consulting kepada seluruh karyawan millennial di lingkungan Indonesia Financial Group (IFG) Socialization of AKHLAK Culture organized by all IFG Group through ILM Consulting to all millennial employees in Indonesia Financial Group (IFG)
10	10/12/2020	Cross Director of Human Capital Talk terkait Harmonis dan Loyal Cross Director of Human Capital Talk on Harmonious and Loyal	Pelaksanaan Cross Director of Human Capital Talk terkait Harmonis dan Loyal oleh Ibu Linggarsari Suharso (Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasa Indonesia) dan Bapak Sulis Usdoko (Direktur MSDM, Umum, dan Kepatuhan PT Jamkrindo) kepada seluruh Karyawan/ti PT Jamkrindo dan PT Asuransi Jasa Indonesia Implementation of Cross Director of Human Capital Talk related to Harmonious and Loyal by Mrs. Linggarsari Suharso (Director of Human Resources & General of PT Asuransi Jasa Indonesia) and Mr. Sulis Usdoko (Director of HR Management, General Affair, and Compliance of PT Jamkrindo) to all Employees of PT Jamkrindo and PT Asuransi Jasa Indonesia

Pedoman Perilaku Jamkrindo

Perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Jamkrindo No.93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, tanggal 13 Desember 2012 tentang Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), yang diperbarui melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggung jawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).
4. Memperlakukan semua pemangku kepentingan sebagai mitra.
5. Selalu berusaha meningkatkan kualitas jasa dan proses kerja dalam rangka mencapai prestasi terbaik.

Jamkrindo's Code of Conduct

The Company is committed to implementing Good Corporate Governance by adhering to the principles of transparency, fairness, accountability, and independence so that it can support Government policies in the development of Small and Medium Micro Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). This was stated in the Joint Decree of the Directors and Supervisory Board of Jamkrindo No.93/Kep-Dir/XII/2012-KEP-07/DP JAMKRINDO/XII/2012, December 13, 2012, concerning the Code of Conduct, updated through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020.

Company behavior standards are transparency and disclosure of information on independence, accountability, and fairness. The application of business ethics standards is the way the Company does business in order to realize its commitment to:

1. *Put customer satisfaction as a top priority.*
2. *Applying Ethical Standards in all business activities based on the Good Corporate Governance principles.*
3. *Always provide high quality services and proportionally to micro, small, medium enterprises and cooperatives (MSMEs and cooperatives).*
4. *Treat all stakeholders as partners.*
5. *Always improve the quality of services and work processes in order to achieve the best achievements.*

Isi Pedoman Perilaku atau *Code of Conduct* Perusahaan antara lain adalah: *The contents of the Company's Code of Conduct include:*

Etika Perusahaan Corporate Ethics	
Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan <i>Corporate Ethics with Stakeholders</i>	
1. Perusahaan harus memperlakukan pemangku kepentingan secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.	<i>The Company shall treat stakeholders properly and fairly by fulfilling the rights of stakeholders in accordance with applicable provisions.</i>
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan.	<i>The company is obliged to improve performance and maintain a positive image in order to increase the value for stakeholders.</i>
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.	<i>The Company must ensure the provision of non-misleading information to stakeholders.</i>
4. Perusahaan harus memastikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada pemangku kepentingan.	<i>The company must ensure the information provided is not misleading to stakeholders.</i>
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.	<i>The company must serve and strive to anticipate the stakeholder needs properly.</i>
Etika Perusahaan dengan Karyawan <i>Corporate Ethics with Employees</i>	
1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.	<i>The Company must prioritize the health and safety of its employees, and improve the quality and welfare of the employees with the fulfillment of employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance.</i>
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.	<i>The company provides equal employment opportunities to all employees regardless of their background, ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special conditions which are protected by laws and regulations.</i>
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.	<i>The Company provides equal opportunities for employee self-development.</i>
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.	<i>The Company gives awards based on employee competency and performance.</i>
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.	<i>The Company creates a conducive and productive work environment, communication and work relations with superiors, subordinates, and colleagues.</i>
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.	<i>The Company must respect human dignity without regard to differences in ethnic background, religion, gender, age, or any disabilities or other special circumstances that are protected by legislation.</i>
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<i>The Company must uphold the general principles of humanity, rights, and obligations based on applicable laws and regulations.</i>
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.	<i>The Company allows employees to carry out their outdoor activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.</i>
Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa <i>Corporate Ethics with Goods and Services Providers</i>	
1. Perusahaan berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerja sama yang berimbang.	<i>The Company strives to conduct mutually beneficial business practices with partners based on balanced agreements.</i>
2. Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan hasil kerja sama.	<i>The Company builds intensive communication with partners to find the best solution in order to improve the results of cooperation.</i>
3. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<i>The Company shall maintain a conducive relationship with partners in accordance with applicable laws and regulations.</i>
4. Perusahaan harus menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan.	<i>Companies should avoid abuse of partnership relationships.</i>

Etika Perusahaan Corporate Ethics

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa Corporate Ethics with Goods and Services Providers

1.	Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (supplier) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.	The Company treats all suppliers of goods or services, which include the procurement processes, in accordance with business principles that are sound, open, impartial based on applicable regulations.
2.	Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.	The Company must conduct procurement processes in a transparent and accountable manner based on applicable regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency, and economics.
3.	Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.	The Company uses a provider of goods and services based on written documents.
4.	Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.	The Company must maintain the confidentiality of information and documents for the procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations.
5.	Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.	The company does not commit corruption, collusion, and nepotism in the procurement of goods and services.

Etika Perusahaan dengan Pesaing Corporate Ethics with Competitors

1.	Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.	The Company must carry out healthy business competition by prioritizing product excellence and service quality.
2.	Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.	The Company shall avoid misleading behavior and/or dishonest conduct.
3.	Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepakatan yang bersifat anti kompetisi.	The Company opposes agreements or agreements that are anti-competition.
4.	Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.	The Company does not conduct cooperation without acceptable and reasonable reasons.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah Corporate Ethics with the Government

1.	Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundangundangan yang berlaku.	The Company must comply with the prevailing laws and regulations.
2.	Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.	The Company must establish good relations and communication with the Government.
3.	Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku.	The Company must support Government programs in accordance with the applicable laws and regulations.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat Corporate Ethics with the Community

1.	Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.	The Company maintains a clean and healthy environment.
2.	Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak azasi manusia.	The Company supports social, cultural, traditional, religious and human rights activities.
3.	Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.	The Company participates in the economic empowerment of the surrounding community.
4.	Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).	The Company optimizes the distribution of corporate social responsibility programs to the community (through the Partnership and Community Development Program).
5.	Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.	The Company does not take actions that lead to discrimination of the community based on ethnicity, religion, and race.

Etika Perusahaan dengan Media Massa Corporate Ethics with Mass Media

1.	Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.	The Company must provide relevant information.
2.	Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.	The Company makes mass media a partner in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefits.
3.	Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.	The Company receives and follows up proportionally against constructive criticisms conveyed through mass media.



Standar Perilaku Insan Jamkrindo Standards of Behavior of Jamkrindo Individuals

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

Personal Responsibility and Professionalism

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seluruh Insan Jamkrindo wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian. | All Company Personnel must comply with all Company provisions regarding staffing. |
| 2. | Seluruh Insan Jamkrindo wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya. | All Company Personnel must understand and comply with all provisions whether issued by the Company or the regulator in accordance with their duties and responsibilities. |
| 3. | Seluruh Insan Jamkrindo harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. | All Company Personnel must be dedicated, loyal, enterprising and meticulous in their work and always strive to improve their knowledge and ability to carry out their duties well. |
| 4. | Seluruh Insan Jamkrindo harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan. | All Company Personnel must put the Company's interests above personal or group interests. |

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

Creation of a Conducive Work Environment

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seluruh Insan Jamkrindo harus bersikap santun dalam berkomunikasi. | All Company Personnel must be polite in communicating. |
| 2. | Seluruh Insan Jamkrindo harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja. | All Company Personnel must uphold ethical values in work relationships with superiors, subordinates, and co-workers. |
| 3. | Seluruh Insan Jamkrindo harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan. | All Company Personnel must avoid actions and utterances that contain elements of harassment, humiliation, ridicule, slander, and humiliation |
| 4. | Seluruh Insan Jamkrindo dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status. | All Company Personnel are prohibited from carrying out verbal, visual and physical sexual abuse and acts of abuse including harassment of privacy and status. |
| 5. | Seluruh Insan Jamkrindo dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor) :
a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkoba atau obat-obatan terlarang.
b. Mengonsumsi minuman beralkohol.
c. Melakukan semua bentuk perjudian,
d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal. | All Company Personnel are prohibited (both in the office and outside the office) to:
a. Use, own, distribute or sell narcotics or illegal drugs.
b. Consume alcoholic beverages.
c. Do all forms of gambling,
d. Do all forms of crime. |
| 6. | Seluruh Insan Jamkrindo wajib memelihara lingkungan yang sehat. | All Company Personnel must maintain a healthy environment |
| 7. | Seluruh Insan Jamkrindo agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama. | All Company Personnel must make efficient and effective use of telephones and avoid using telephones for personal use in excess and respond to telephone calls at the first chance they get |

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

Avoiding All Conflicts of Interest and Their Potentials that Trigger Unhealthy and Dishonest Behavior

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Seluruh Insan Jamkrindo menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan. | All Company employees use their labor, thought and work capabilities for the benefit of the Company. Work or activities outside office hours can be carried out as long as they do not utilize the name and interests of the Company. |
| 2. | Seluruh Insan Jamkrindo yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan. | All Company Personnel who have been inactive or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property, Company data and information, and conducting activities on behalf of the Company. |
| 3. | Seluruh Insan Jamkrindo tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan. | All Company Personnel may not invest Company funds in personal or group names. |
| 4. | Seluruh Insan Jamkrindo tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain. | All Company Personnel may not invest in Company funds by promising personal benefits with other parties. |
| 5. | Seluruh Insan Jamkrindo tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya. | All Company Personnel may not accept bribes or payments of any kind from parties who have a direct or indirect relationship with their positions or duties. |

Standar Perilaku Insan Jamkrindo

Standards of Behavior of Jamkrindo Individuals

6.	Seluruh Insan Jamkrindo tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.	<i>All Company Personnel may not accept and give gifts of any kind that are reasonably suspected to influence sound business decisions.</i>
7.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.	<i>All Company Personnel are prohibited from providing goods and services that directly or indirectly sell goods, rights or services to the Company.</i>
8.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang melakukan mark up harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.	<i>All Company Personnel are prohibited from marking up sales or purchase prices for personal or other parties' interests.</i>
9.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.	<i>All Company Personnel are prohibited from using their positions to give preferential treatment to other parties.</i>
Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan <i>Safeguard the Company's Assets, Wealth and Information</i>		
1.	Seluruh Insan Jamkrindo menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.	<i>All Company Personnel use Company assets only for the benefit of the Company and are not permitted for personal or group interests.</i>
2.	Seluruh Insan Jamkrindo harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.	<i>All Company Personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement, and misuse of assets in accordance with their respective authorities.</i>
3.	Seluruh Insan Jamkrindo wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.	<i>All Company Personnel must maintain data and information along with their devices in accordance with their authority so that they are not misused, damaged, stolen or not accessed by other irresponsible parties</i>
4.	Seluruh Insan Jamkrindo tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.	<i>All Company Personnel are not permitted to use the Company's name, logo, copyright, and various accessories for personal gain.</i>
5.	Seluruh Insan Jamkrindo wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.	<i>All Company Personnel must maintain Company internal information that is confidential and does not use it for personal interest, the interests of family, friends, or any groups.</i>
6.	Seluruh Insan Jamkrindo wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.	<i>All Company Personnel must write and provide reports and data correctly and honestly to interested parties in accordance with applicable laws and regulations.</i>
Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan <i>Compliance with Laws and Regulations</i>		
1.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.	<i>All Employees of the Company are prohibited from conducting insider trading activities to obtain personal benefits and acting as brokers, seekers or other intermediaries for personal or group interests in transactions conducted by the Company.</i>
2.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (money laundering).	<i>All Company Personnel are prohibited from engaging in investments and/or practices of money laundering.</i>
3.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang membuat kesepahaman, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Jamkrindo untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat : a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan, b. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya, c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan, d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.	<i>All Company Personnel are prohibited from making a notion, engagement, a direct or indirect statement indicating that the Company has an attachment to any political party. The Company gives freedom to all Company Personnel to channel their political aspirations with the following conditions:</i> a. <i>It is not on behalf of the Company,</i> b. <i>They do not use Company assets in their political activities,</i> c. <i>They do not make any contribution on behalf of the Company,</i> d. <i>If an employee holds a position in a Political Party and will soon become a candidate/member of the legislature, he/she is considered resigning from the Company.</i>
4.	Seluruh Insan Jamkrindo dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).	<i>All Company Personnel are prohibited from carrying out acts of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN).</i>



Internalisasi dan Penegakan Code of Conduct

Internalisasi *Code of Conduct* memiliki tujuan untuk menciptakan kesepahaman dan komitmen bersama dari segenap jajaran di internal Perusahaan untuk dapat menaati dan menjalankan secara baik pedoman perilaku yang tertuang di dalamnya. Internalisasi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara menyeluruh dengan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi segenap Insan Jamkrindo dalam memperoleh informasi tersebut.

Mekanisme penegakan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dilakukan dengan cara seluruh Insan Jamkrindo wajib menandatangani surat Pernyataan Komitmen untuk Mematuhi Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan seluruh Insan Jamkrindo wajib mengerti, memahami dan menerapkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).

1. Saluran pengaduan
 - a. Apabila ditemui adanya pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan, setiap Insan Perusahaan berkewajiban untuk segera melaporkan secara tertulis dengan menyebutkan identitas pelapor kepada Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Permasalahan perilaku Dewan Komisaris dan Direksi, penanganannya dilakukan oleh Menteri.
 - c. Permasalahan perilaku pegawai, penanganannya dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku.
 - d. Pelanggaran Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) dalam hubungannya dengan masyarakat, penanganannya tetap mengacu kepada ketentuan kepegawaian yang berlaku dalam Perusahaan.
 - e. Divisi yang menangani bidang Sumber Daya Manusia (SDM) berkewajiban untuk merespon dengan segera setiap pertanyaan, pemberitahuan, dan laporan yang diterimanya secara proporsional.
2. Mekanisme Penanganan atas Laporan Pelanggaran Pedoman Perilaku
 - a. Atasan langsung atau unit kerja yang ditunjuk untuk mengelola penanganan atas laporan pelanggaran berdasarkan laporan yang diterima melakukan identifikasi permasalahan analisis, mengumpulkan informasi tambahan yang relevan serta merahasiakan identitas pelapor.
 - b. Hasil analisis tersebut apabila di pandang perlu dapat dilaporkan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Internalization and Enforcement of the Code of Conduct

The internalization of the Code of Conduct has the aim of creating mutual understanding and commitment from all levels of the Company to be able to adhere to and carry out well the behavioral guidelines contained in it. The internalization was carried out through dissemination activities carried out thoroughly by providing the widest possible access for all Company personnel to obtain this information.

The enforcement of the Code of Conduct is carried out by means that all Company personnel is required to sign a Statement of Commitment to Comply with the Code of Conduct, and all Company personnel must understand, comprehend, and apply the Code of Conduct.

1. Complaint Channel
 - a. *If there is a violation of the Code of Conduct in the Company, every Company Personnel is obliged to immediately report in writing by stating the identity of the whistleblowers to the HR Division.*
 - b. *For behavior problem of the Supervisory Board and the Board of Directors, the handling is carried out by the Minister.*
 - c. *For problems with employee behavior, the handling is carried out by direct supervisor in stages according to the applicable mechanism.*
 - d. *For violation of the Code of Conduct in its relationship with the community, its handling still refers to the applicable staffing provisions in the Company.*
 - e. *The Human Resources (HR) Division is obliged to respond immediately to any questions, notifications, and reports received proportionally.*
2. Handling Mechanisms for Behavioral Guidelines Violation Reports
 - a. *The direct supervisor or work unit appointed to manage the handling of reports of violations identify problems of analysis, collect additional relevant information based on reports received, and keep the identity of the whistleblowers confidential.*
 - b. *The results of the analysis, if needed, can be reported to the Board of Directors for further processing according to the applicable mechanism.*

3. Penyebarluasan Etika Perusahaan

Upaya sosialisasi dan penyebarluasan Etika Perusahaan secara merata kepada seluruh elemen Perusahaan dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain:

- Pemberian sosialisasi, training dan seminar bagi karyawan
- Pemasangan *banner* maupun spanduk
- Rapat evaluasi kinerja
- Sosialisasi saat proses perekrutan

3. Dissemination of Company Ethics

The efforts to evenly disseminate Company Ethics to all elements of the Company are carried out through various strategies, including:

- Providing information, training, and seminars for employees
- Installation of banners
- Performance evaluation meeting
- Dissemination during the recruitment process

Draft Form Pernyataan Kepatuhan oleh Insan Jamkrindo

Draft Form of Compliance Statement by Jamkrindo's Personnel

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN UNTUK MEMATUHI PEDOMAN PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Status Karyawan :

Menyatakan bahwa, saya :

- Telah menerima Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
- Telah memahami isi dari Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
- Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen Insan Jamkrindo dalam Pedoman Perilaku (Code of Conduct);
- Siap menerima konsekuensi dan sanksi dari Perusahaan apabila melakukan pelanggaran Pedoman Perilaku (Code of Conduct) ini;
- Akan segera mengkonsultasikan dan/atau melaporkan kepada Divisi yang membidangi bagian Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pejabat yang telah ditunjuk untuk memonitor penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) sesuai mekanisme yang telah ditetapkan, apabila menemui permasalahan dan/atau pelanggaran dalam melaksanakan Pedoman Perilaku (Code of Conduct).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari manapun.

Tempat, Tanggal Bulan
Tahun

(Nama / Tanda Tangan)



Sosialisasi *Code of Conduct* dilakukan dengan tujuan agar seluruh Insan Jamkrindo memahami dan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam lingkungan kerja sehari-hari guna menghindari perilaku menyimpang. Kegiatan sosialisasi Kode Etik dan prinsip GCG di tahun 2020 dilakukan di beberapa kantor cabang, yaitu:

The socialization of Code of Conduct is carried out with the aim that all Company personnel understand and may apply GCG principles within their daily work to avoid deviant behavior. The socialization of the Code of Conducts and GCG principles in 2020 was conducted in several branch offices, namely: Enforcement and Sanctions for Violating

No	Kantor Cabang Branch Offices	Tanggal Pelaksanaan Date of Implementation
1.	Semarang	
2.	Padang	
3.	Serang	
4.	Mamuju	
5.	Gorontalo	
6.	Jambi	
7.	Lampung	
8.	Kendari	
9.	Pontianak	
10.	Kupang	
11.	Medan	
12.	Ternate	
13.	Banjarmasin	
14.	Palangkaraya	
15.	Yogyakarta	
16.	Manado	
17.	Denpasar	
18.	Makassar	
19.	Palembang	
20.	Bandung	
21.	Jayapura	

30 Desember 2020 / December 30, 2020

4. Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Etika Perusahaan
Adanya sanksi terhadap pelanggaran etika Perusahaan berfungsi untuk menjamin tegaknya aturan yang dibuat demi terciptanya kedisiplinan dan profesionalisme bagi seluruh Insan Jamkrindo. penegakan dan pemberian sanksi atas tindakan pelanggaran yang dilakukan berlaku secara menyeluruh tanpa terkecuali. Adapun sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.
5. Sanksi Administrasi
Setiap karyawan wajib:
 - » mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah bagi Pegawai BUMN;

4. *Company Ethics*
The sanctions for violations of the Company's ethics serve to ensure the establishment of rules that are made in order to create discipline and professionalism for all Company Personnel. The enforcement and sanctions for violations committed in full without exception. The sanctions given are in the form of warning letters.
5. *Administrative Sanctions*
Every employee must:
 - » *comply with all provisions and regulations stipulated by the Government for SOEs Employees;*

- » mentaati semua peraturan perusahaan, baik berupa perintah maupun larangan secara tertulis atau secara lisan dalam batas pengertian yang layak dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan; dan
- » menunaikan tugas dan kewajiban dengan sebaikbaiknya sesuai dengan penugasan oleh Direksi dan atasan masing-masing pegawai dengan mementingkan kepentingan Perusahaan.

- » *obey all Company regulations, either in the form of written or oral orders or prohibitions within the limits of proper understanding and not contrary to the norms of decency; and*
- » *fulfill the duties and obligations as best as possible in accordance with the assignment by the Board of Directors and the superiors of each employee with an emphasis on the interests of the Company.*

Pemberian sanksi administrasi bagi karyawan Jamkrindo mengacu pada Peraturan Direksi Nomor: 19/ Per-Dir/III/2006 tentang Disiplin Pegawai. Sanksi administrasi diberikan bagi karyawan yang melakukan pelanggaran disiplin.

The provision of administrative sanctions for Jamkrindo's employees refers to the Directors' Regulation Number: 19/Per-Dir/III/2006 concerning Employee Discipline. Administrative sanctions are given to employees who commit indisiplinary actions.

Sebagai realisasi penegakan Pedoman Perilaku, berikut rincian sanksi yang dikenakan terkait penegakan Kode Etik selama 3 (tiga) tahun terakhir:

As a realization of the enforcement of the Code of Conduct, the following are the details of sanctions imposed regarding the enforcement of the Code of Ethics for the past 3 (three) years:

Jenis Sanksi <i>Types of Sanctions</i>	2020	2019	2018
Teguran <i>Oral Reprimand</i>	5	1	1
Peringatan 1 <i>First Warning Letter</i>	6	6	3
Peringatan 2 <i>Second Warning Letter</i>	1	-	2
Peringatan 3 <i>Third Warning Letter</i>	-	-	-
Pengunduran Diri <i>Resignation</i>	-	-	1
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) <i>Termination</i>	-	-	-

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Gratification Control Policies



Salah satu bentuk komitmen Perusahaan dalam meminimalisir benturan kepentingan serta penyalahgunaan wewenang dan jabatan, Perusahaan mengupayakan penerapan pengendalian gratifikasi dari pihak lain. Pengelolaan Budaya Kepatuhan Terhadap Gratifikasi telah ditetapkan melalui Peraturan Direksi No.18/Per-Dir/4/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

One form of the Company's commitment in minimizing conflicts of interest, as well as abuse of authority and position, the Company implement supervision of gratuities from other parties. The Corporate Gratification Policy Guidelines have been approved by the Board of Directors Circular No.18/Per-Dir/4/XII/2020 dated December 30, 2020, concerning Gratification Control Policies at Jamkrindo.

Pentingnya pengendalian gratifikasi dalam pelaksanaan Kode Etik seperti yang telah dijelaskan di atas berhubungan dengan pembatasan secara definitif antara gratifikasi atau hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pihak lain, dengan suap yang erat hubungannya dengan penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan telah mendefinisikan secara jelas tentang pengkategorian gratifikasi yang terkait kedinasan, gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

The importance of controlling gratuities in the implementation of the Code of Ethics as agreed above is related to the definitive agreement between gratuities or gifts of any kind given by other parties, with a purpose to bribe, and is related to the abuse of authority and position. The Company Gratification Control Policy has clearly agreed on gratuities classified as bribery, and the granting is allowed insofar as they are not in contradiction with the applicable regulations, rules, and agreements.

Melalui kebijakan tersebut, Perusahaan tidak hanya mengupayakan penerapan prinsip GCG berbasis pengelolaan korporasi yang sehat, namun kebijakan tersebut juga memberikan landasan bagi setiap insan Jamkrindo untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dan menjauhkan perilaku insan Jamkrindo dari kecenderungan praktik korupsi.

Through this policy, the Company does not only strive for the adoption of GCG principles based on sound management, but also provide a foundation for every employee of the Jamkrindo to not to abuse their authority and leadership and to avoid practice of corruption of Jamkrindo's employees.

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Anti-Corruption Policies

Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, kickback atau pun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para pegawai secara individu dapat dikenai denda dan/atau hukuman penjara.

Undang-undang anti korupsi ini, termasuk Peraturan Praktik Korupsi menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana. Tujuan Kebijakan ini adalah untuk memastikan agar semua pegawai, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang anti korupsi terkait.

Kebijakan ini mencakup hal-hal berikut ini:

1. Suap, Kickback atau Pembayaran Korup Lain
2. Pembayaran Fasilitasi
3. Hubungan dengan Pihak Ketiga

Kementerian BUMN telah meluncurkan roadmap BUMN Bersih sebagai aksi anti korupsi dilingkungan kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku di Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara.

Di tahun 2020, Perusahaan mendapatkan sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) yang didalamnya tercantum ruang lingkup penerapan Anti-Bribery Management System berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dengan nomor sertifikat ABMS40006. Sertifikasi ini penting karena memberikan standarisasi tentang pelaksanaan Anti Suap di lingkup Jamkrindo. Dengan model sertifikasi, pelaksanaan Anti Suap di lingkup Jamkrindo dilakukan audit secara berkala untuk memperbarui sertifikasi.

The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payments or even accepting bribes, kickbacks, or other forms of corrupt payments is a criminal offense that can make the Company and individual employees subject to fines and/or prison sentences.

This anti-corruption law, including the Regulations on the Practice of Corruption, makes payments, offers, or the acts of giving of anything of value to Company officials, with the aim of influencing the actions or decisions of officials, as a criminal offense. The purpose of this Policy is to ensure that all employees, officials and directors, and all subsidiaries and Company affiliates comply with the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws.

This policy includes the following:

1. Bribes, Kickbacks or Other Corrupt Payments
2. Facilitation Payments
3. Relations with Third Parties

The Ministry of SOEs has launched a Clean SOEs roadmap as an anti-corruption action within the state-owned ministry and state-owned enterprises, and that also applies at Jamkrindo as one of the state-owned enterprises.

In 2020, the Company obtained ISO 37001 Anti-Bribery Management System (SMAP) certification in which the scope of implementation of Anti-Bribery Management System is listed based on SNI ISO 37001:2016 with certificate number ABMS40006. This certification is important because it provides standardization on the implementation of Anti-Bribery in Jamkrindo. With the certification model, the implementation of Anti-Bribery in Jamkrindo is audited periodically to update the certification.



WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing System

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai Tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan dan niat baik untuk kepentingan perusahaan. Sejak diterbitkannya Peraturan Direksi *Whistleblowing System* (WBS) No.04/Per-Dir/IV/2018 tanggal 10 April 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) yang telah diperbarui melalui Peraturan Direksi No. 31/Per-Dir/1/XII/2020 tentang *Whistleblowing System*, SPI melakukan sosialisasi WBS terhadap audit bersamaan dengan pelaksanaan general audit. Adapun tujuan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yaitu:

1. Menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif.
2. Menciptakan iklim yang kondusif dengan memperkuat lingkungan pengawasan dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perusahaan dalam rangka menjaga serta melindungi aset/kepentingan Perusahaan.
3. Mempermudah manajemen untuk menangani secara cepat dan efektif dalam penyelesaian laporan-laporan pelanggaran secara internal maupun eksternal melalui jalur hukum (bila dianggap perlu), melindungi kerahasiaan identitas pelapor serta tetap menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi tersebut.
4. Membangun suatu kebijakan dan infrastruktur untuk perlindungan pelapor dari balasan pihak-pihak internal maupun eksternal.
5. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat satu pelanggaran dan mengurangi potensi kerugian bagi perusahaan.
6. Memberikan masukan untuk melihat lebih jauh area kritis dan proses kerja yang memiliki kelemahan pengendalian internal serta untuk merancang Tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman.
8. Meningkatkan budaya kepatuhan bagi semua insan Jamkrindo.
9. Meningkatkan reputasi Perusahaan.
10. Sebagai salah satu upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di Perusahaan.

Whistleblowing System is a system that can be used as a media for whistleblower witnesses to convey information about indicated violations occurring within a company based on responsible evidence and good intentions for the Company's benefit. Since the issuance of the Regulation of the Board of Directors Whistleblowing System (WBS) No.04/Per-Dir/IV/2018 dated April 10, 2018 concerning Guidelines for Management of Whistleblowing System (WBS) SPI violations reporting system conducted WBS socialization of auditee in conjunction with the implementation of general audit. The objectives of whistleblowing system are:

1. *To ensure the implementation of an effective violation complaint resolution mechanism.*
2. *To create a conducive climate by strengthening the supervision and encouraging reporting on matters that can lead to financial and non-financial losses, which include matters that can damage the Company's image in order to protect and safeguard the Company's assets/interests.*
3. *To facilitate the top management to deal quickly and effectively in resolving violation reports internally and externally through legal channels (if deemed necessary), protect the confidentiality of the identity of the whistleblowers, and maintain the confidentiality and security of the information.*
4. *To build a policy and infrastructure for the protection of whistleblowers from replies from internal and external parties.*
5. *To ensure the availability of an early warning system mechanism for potential problems due to a violation and to reduce the potential loss for the Company.*
6. *To provide input to have an in-depth look at further critical areas and work processes that have weaknesses in internal controls and to design corrective actions as needed.*
7. *To ensure the availability of ways of delivering important and critical information to the Company to those who must immediately handle it safely.*
8. *To improve the culture of compliance for all employees of Jamkrindo.*
9. *To improve the reputation of the Company.*
10. *To become one of the efforts in disclosing various problems that are not in accordance with the applicable ethical standards in the Company.*

Komitmen Jamkrindo dan Karyawan

Seluruh karyawan Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan WBS dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Jamkrindo juga memiliki komitmen membuat kebijakan untuk melindungi pelapor. Dalam kebijakan WBS menyatakan secara jelas bahwa seorang pelapor pelanggaran akan mendapatkan perlindungan dari perusahaan terhadap perlakuan yang merugikan. Sistem pelaporan pelanggaran berada dibawah Direksi, khususnya Direktur Utama. Dewan Komisaris ikut melakukan pengawasan atas kecukupan dan efektivitas atas pelaksanaan sistem tersebut.

Lingkup WBS Jamkrindo

Lingkup Pengaduan Pelanggaran yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS adalah:

- tindakan kecurangan (*Fraud*)
- penyalahgunaan Jabatan/Wewenang untuk kepentingan pribadi/diluar kepentingan Perusahaan
- penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi
- penyelewengan dan/atau penyalahgunaan aset Perusahaan
- benturan Kepentingan;
- pelanggaran peraturan dan Kode Etik Perusahaan
- perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan

Sarana Pelaporan WBS

Perusahaan menyediakan sarana pelaporan untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran melalui media dibawah ini:

- Surat Tertulis ; PO BOX 107123 JKP 10610
- SMS dan Whatsapp : 08111717123
- Email : wbs@jamkrindo.co.id

Mekanisme Penyampaian Laporan Pelanggaran

- Pelapor menyampaikan laporan pengaduan pelanggaran melalui sarana WBS yang telah disediakan oleh Perusahaan.
- Setiap laporan pelanggaran yang masuk WBS akan diverifikasi dan diidentifikasi lebih lanjut yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal yang cukup dan memadai.
- Setiap laporan yang masuk WBS akan dilaporkan secara periodik kepada Direktur Utama, dari hasil laporan tersebut Direktur Utama menetapkan rekomendasi tindakan (langkah-langkah) lebih lanjut.
- Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlukan audit khusus dan atau Investigasi lebih lanjut, akan dilakukan oleh Divisi yang membidangi Fungsi Satuan Pengawasan Intern.

Jamkrindo and Employees' Commitment

All Jamkrindo employees are committed to practicing WBS in order to implement the violation reporting system. Employees are also required to actively participate in reporting if they find any violations. Jamkrindo also has a commitment to make policies to protect whistleblowers. WBS policy states clearly that a whistleblower will get protection from the company against adverse treatment. Violation reporting system is under the Board of Directors, especially the President Director. The Board of Commissioners supervises the adequacy and effectiveness of the implementation of the system.

Scope of WBS in Jamkrindo

The scope of violation complaints that will be followed up by Whistleblowing System/WBS are:

- fraud
- Abuse of Position/Authority for personal interests/outside the Company's interests
- Receipt and/or grant the Gratification
- Misappropriation and/or misuse of the Company's assets
- Conflict of interest
- Violation of the Company's rules and Code of Conduct
- Acts in violation of the laws and regulations

WBS Reporting Facilities

The Company facilitates a reporting to submit complaints of violations through the following media:

- Written Letter; PO BOX 107123 JKP 10610
- SMS and Whatsapp : 08111717123
- Email : wbs@jamkrindo.co.id

Mechanism for Submitting Violation Reports

- Whistleblower submits a report of violation complaint through the Company's WBS facilities.
- Any reports of violations entered by WBS will be verified and further identified to gather sufficient preliminary evidence.
- Any report entered by WBS will be reported periodically to President Director, President Director will recommend further actions (measures) for the reporting results.
- If the recommendation as referred to paragraph (3) is required for a special audit and or further investigation, it will be carried out by Internal Audit Division.



- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 5. Dalam melakukan investigasi dan/atau audit khusus, Divisi yang membidangi Fungsi Satuan Pengawasan Intern dapat dibantu oleh Unit Kerja lainnya. 6. Dalam melakukan investigasi Divisi yang membidangi Fungsi Satuan Pengawasan Intern menerapkan Prinsip Pelaksanaan Investigasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Investigasi bertujuan untuk mengumpulkan semua bukti yang ada, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah laporan pelanggaran tersebut benar adanya. b. Rekam jejak investigasi (audit trail) harus terdokumentasi sehingga dapat ditinjau ulang terkait dengan sasaran yang ingin dicapai dan juga keputusan-keputusan penting yang diambil selama proses berlangsung. 7. Pengelola WBS memastikan semua laporan pelanggaran ditangani dengan baik, serta memastikan laporan pelanggaran sudah ditindak lanjuti. 8. Laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya disampaikan kepada Direktur Utama. 9. Pengelola WBS mendokumentasikan seluruh proses pengelolaan pelanggaran tersebut secara rapi, aman dan rahasia. 10. Pengelola WBS membuat laporan tindak lanjut atas laporan pengaduan. 11. Pengelola WBS membuat catatan penerimaan dan status Pengaduan Pelanggaran memuat sekurangnya: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor registrasi; b. tanggal penerimaan; c. pihak penerima; d. deskripsi singkat; dan e. status penyelesaian yang disertai penjelasan. | <ol style="list-style-type: none"> 5. <i>In conducting special investigations and/or audits, Internal Audit Division may be assisted by other Work Units.</i> 6. <i>In conducting investigations, Internal Audit Division applies the following Investigative Principles:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Investigation aims to gather all available evidence to verify the veracity of report.</i> b. <i>Investigation track record (audit trail) must be documented so it can be reviewed regarding the goals as well as important decisions taken during the process.</i> 7. <i>WBS manager ensures all violations reports are handled properly, as well as ensures that violations reports are followed up.</i> 8. <i>Reports of violations committed by Employees, Directors, Board of Commissioners and Supporting Organs are submitted to President Director.</i> 9. <i>WBS managers document the entire process of managing such violations in a neat, safe and confidential manner.</i> 10. <i>WBS managers create follow-up reports on complaint reports.</i> 11. <i>WBS Manager create a record of receipt and status of Violation Complaint contains at least:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>registration number;</i> b. <i>date of receipt;</i> c. <i>receiver;</i> d. <i>a brief description; and</i> e. <i>settlement status with explanation.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mekanisme Penanganan/Tindak Lanjut Pengaduan

- a. Pelanggaran yang diduga mengandung unsur melawan hukum, tindak pidana atau pelanggaran perdata ditindaklanjuti oleh Divisi yang membidangi Fungsi Hukum dan Kepatuhan untuk dapat diteruskan kepada pihak yang berwenang menangani sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- b. Pelanggaran selain huruf a diatas, diproses mengacu pada Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang Sanksi dan Pelanggaran. Divisi yang membidangi Fungsi Manajemen SDM bertanggungjawab melaksanakan tindaklanjut atas putusan Terlapor.
- c. Apabila informasi yang disampaikan tidak terbukti setelah dilakukan pemeriksaan maka laporan tersebut dianggap selesai.

The Mechanism for Complaints Handling

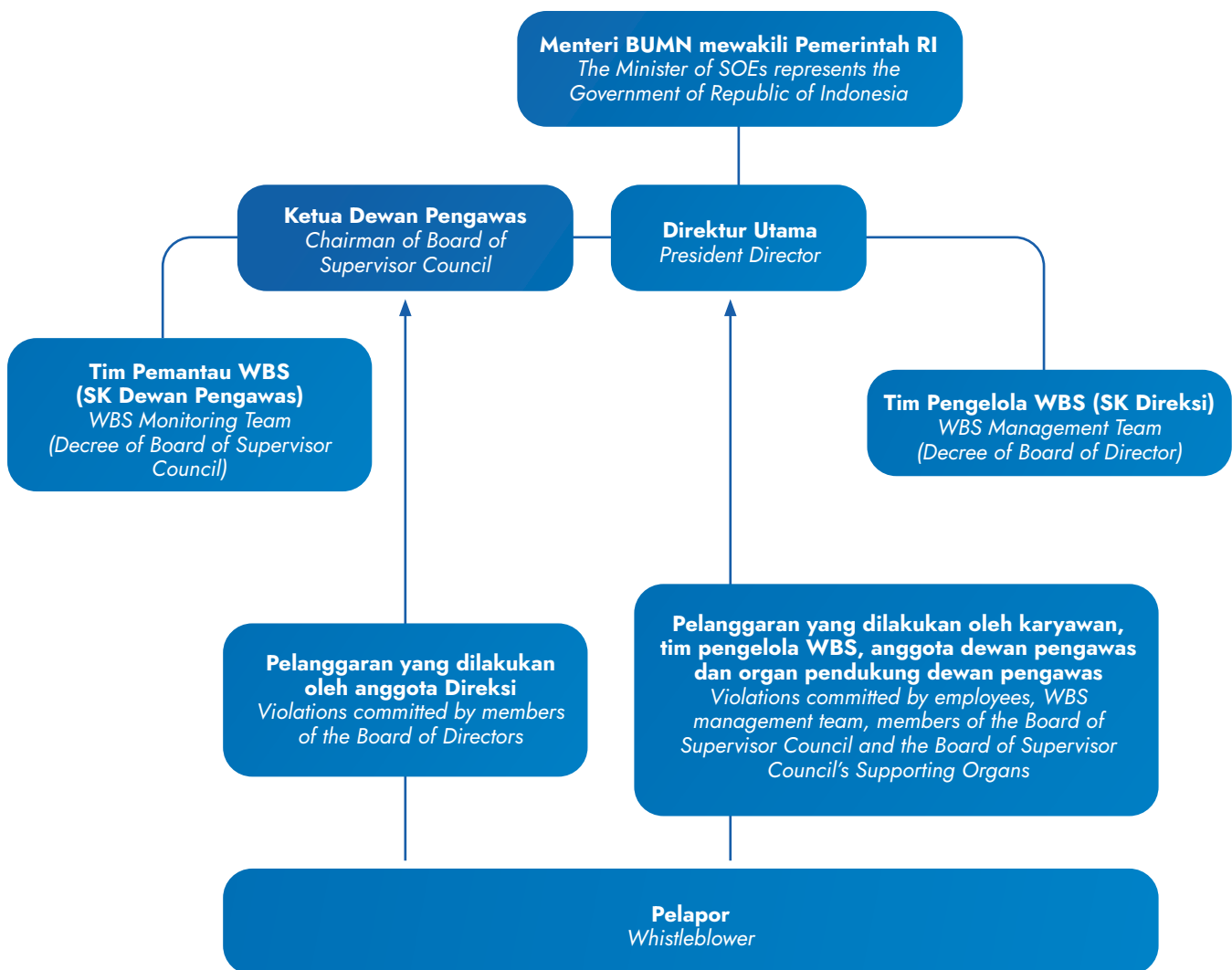
- a. *Violations that are against the law, criminal acts or civil violations are followed up by Legal and Compliance Division to be forwarded to authorities in accordance with the prevailing laws and regulations.*
- b. *Violations other than letter a above, processed refers to the Company's Regulations governing Sanctions and Violations. HR Management Division is responsible for following up on the Reported verdict.*
- c. *If the report is not proven after examination, then the report is considered complete.*

d. Divisi yang membidangi Fungsi Hukum dan Kepatuhan atau Divisi yang membidangi Fungsi Manajemen SDM mengirimkan status pelaksanaan tindak lanjut kepada Unit Kerja Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS sekurang kurangnya sebulan satu kali sehingga putusan pelaksanaan selesai.

d. Legal and Compliance Division or HR Management Division sends follow-up status to WBS Work Unit at least once a month until the verdict is completed.

Bagan Mekanisme Pengaduan dan Tindak Lanjut

Complaints and Follow-up Mechanism Chart





Pihak yang Mengelola Pengaduan

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran, Perusahaan membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam Perusahaan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas aktivitas usaha Penjaminan Perusahaan. Unit Kerja Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS Kepala Divisi yang membidangi Satuan Pengawasan Intern Perusahaan yang bersifat ex-officio. Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran/WBS meliputi;

- memproses tindak lanjut pelaporan pelanggaran yang masuk dalam WBS;
- menyampaikan laporan kegiatan WBS secara periodik kepada Direktur Utama.
- melakukan verifikasi terhadap substansi laporan pelanggaran, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna memastikan terjadinya pelanggaran.
- melakukan pemantauan atas pemberian perlindungan terhadap Pelapor dengan Unit Kerja terkait.
- melakukan pemantauan terhadap penanganan penyelesaian laporan yang masuk.
- melaksanakan program perlindungan pelapor sesuai dengan kebijakan Perusahaan, terutama aspek kerahasiaan dan jaminan keamanan pelapor.
- mengusulkan tindak lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran.

Perlindungan Bagi Pelapor

Perusahaan memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dengan tidak menyampaikan identitas pelapor ke pihak manapun baik internal maupun eksternal. Perusahaan akan merahasiakan informasi yang dilaporkan dan hanya akan menggunakan informasi tersebut sebagai sumber informasi awal dalam proses Investigasi tanpa mengungkapkan identitas pelapor. Pihak yang melanggar prinsip kerahasiaan tersebut akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Khusus untuk pelapor internal, Perusahaan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pelapor tetapi dapat diperluas hingga ke anggota keluarga dari tekanan, penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik.

Complaints Manager

In improving the effectiveness of WBS implementation, the Company forms a unit or function in charge to managing the Company's Violation Reporting System that is adjusted to the characteristics and complexity of the Company's Guarantee business. The Management of Violation Reporting System/WBS is chaired by Internal Audit Division of the Company which is ex-officio. Violation Reporting System/WBS manager duties and responsibilities include;

- following-up WBS reporting violations;*
- periodically reporting WBS activity to President Director.*
- verify the substance of report, to find and collect the necessary evidence to ensure the occurrence of violations.*
- monitoring the provision of protection to whistleblowers with related Work Units.*
- monitoring the handling of incoming report completion.*
- conduct whistleblower protection program in accordance with the Company's policy, especially the whistleblower confidentiality and security guarantee aspects.*
- propose follow-up on the report of violation complaints.*

Whistleblower Protection

The Company protects the confidentiality of whistleblower identity by not conveying the whistleblower identity to any party either internally or externally. The Company will keep the reported information confidential and will only use that information as an initial source of information in Investigation process without disclosing the whistleblower identity. Parties who violate the principle of confidentiality will be sanctioned in accordance with applicable regulations.

Especially for internal whistleblowers, the Company not only provides protection to whistleblowers but can be extended to family members from pressure, deferral of promotion, dismissal, lawsuits, property, to physical actions.

Pelaporan Pelanggaran Tahun 2020 dan Tindak Lanjut *Reporting violations in 2020 and Follow-up*

Berikut disampaikan jumlah pelaporan yang masuk dan tindak lanjutnya. *The following is the amount of incoming reporting and follow-up.*

Media Penyampaian <i>Submission Media</i>	2020	2019
Surat <i>Letter</i>	-	-
Email <i>Email</i>	5	1
Situs Web <i>Website</i>	-	-
SMS <i>SMS</i>	-	-
Lain-lain <i>Others</i>	-	-
Jumlah <i>Total</i>	5	1

Status Laporan <i>Report Status</i>	2020	2019
Laporan Dalam Proses <i>In-Progress</i>	3	-
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti <i>Completed</i>		
» Laporan Tidak Terbukti <i>Unproven</i>	-	-
» Laporan Selesai dengan Tindak Lanjut <i>Completed with Follow Up</i>	2	1
Jumlah <i>Total</i>	5	1

Di tahun 2020, terdapat 5 (lima) pelaporan pelanggaran yang masuk melalui mekanisme WBS Perusahaan, khususnya melalui saluran surat elektronik. Hingga disampaikannya laporan tahunan ini, sebanyak 2 (dua) pelaporan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih dalam proses tindak lanjut.

In 2020, there are 5 (five) violations reporting through the Company's WBS mechanism, especially through electronic mail channels. Until the delivery of this annual report, 2 (two) reporting has been completed, while the rest are still in the process of follow-up.



LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

State Administrators' Wealth Report

Prinsip Dasar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Sebagai BUMN yang dimiliki oleh Negara melalui Pemerintah Indonesia, Perusahaan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang mengikat. Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh semangat pemberantasan korupsi dan tindakan penyimpangan internal adalah kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

LHKPN merupakan daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No.KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN. Selain itu, Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan Harta Kekayaannya sebelum dan setelah memangku jabatan serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999 pasal 2 (7) beserta penjelasannya, diuraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pemeriksaan LHKPN yang disampaikan kepada KPK bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mantaati asas-asas umum penyelenggara negara yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya. Setiap Penyelenggara Negara dituntut untuk melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan KPK untuk diisi secara jujur, benar dan lengkap, agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, serta menilai atas seluruh jumlah, jenis dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan, secara benar, cepat, tepat, akurat dan bertanggung jawab.

Basic Principles of State Officials Wealth Reports

As an SOE owned by the State through the Government of Indonesia, the Company must comply with the prevailing laws and regulations. One form of legislation that is based on the spirit of eradicating corruption and internal deviations is the obligation of the State Officials Wealth Reports (LHKPN).

LHKPN is a list of all State Officials' Assets as outlined in the LHKPN form stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as stipulated in KPK Decree No.KEP 07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Inspection, and Announcement of State Officials Wealth Reports. Law No.30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirms the authority of the Corruption Eradication Commission to implement measures or efforts to prevent corruption, among others, through registration and examination of State Officials Wealth Reports. In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism, mandate that each state officials must report and announce his Assets before and after assuming office and are willing to have his wealth examined before and after taking office. In Law No.28/1999 Article 2 (7) and its explanation, it is described that the Board of Commissioners, Directors and other structural officials in State-Owned Enterprises (BUMN) and Regional-Owned Enterprises (BUMD) are included in officials with strategic functions.

The LHKPN examination submitted to the KPK aims to realize State Officials who adhere to the general principles, free from the practices of corruption, collusion, and nepotism, as well as other despicable acts. Each State Officials is required to report its wealth through the LHKPN form provided by the KPK to be filled honestly, correctly, and completely, so that the Corruption Eradication Commission can analyze, evaluate, and assess the total amount, type and value of reported Assets, correctly, quickly, precisely, accurately and responsibly.

Dasar Hukum dan Peraturan dalam Menerapkan LHKPN di Perusahaan

Dalam menerapkan LHKPN, Perusahaan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan cara pandang penerapan LHKPN di lingkungan Perusahaan. Dasar hukum tersebut yaitu:

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, dan perubahannya.
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

Legal and Regulatory Bases in Implementing LHKPN in the Company

In implementing LHKPN, the Company considers a number of legal and regulatory bases as the basis for applying LHKPN within the Company. The legal bases are:

1. Law No.28 of 1999 concerning State Officials who are Clean and Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.
2. Law No.30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
3. Regulation of the Minister State-Owned Enterprises No.PER-01/BUMN/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises, and its amendment.
4. Decree of Secretary of Minister of SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 concerning Indicators/Parameters for Evaluating and Assessing GCG Implementation.

Transparansi LHKPN Pejabat Perusahaan Tahun 2020

Di bawah ini disampaikan transparansi penyampaian LHKPN pejabat Perusahaan di tahun 2020.

Transparency of State Officials Wealth Report in 2020

Below is the transparency of the submission of State Officials Wealth Report of Company officials in 2020.

Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Jamkrindo Tahun 2020

Disclosure of Submission of State Officials Wealth Report of Officials of Jamkrindo in 2020

Pejabat Officials	Jumlah Wajib Laport Total of Mandatory Report	Jumlah yang Telah Melaporkan Total of Officials who have Reported	
		Jumlah Total	%
Dewan Komisaris Board of Commissioners	5	5	100%
Direksi Board of Directors	4	4	100%
Manajer atau Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi Manager or Officer with the Position One Level Below the Board of Directors	89	89	100%
Jumlah Total	98	98	100%

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Sharia Supervisory Board

Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap Penjaminan Syariah yang diberikan Perusahaan, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan mengenai syariah, Perusahaan telah membentuk dan mengangkat Dewan Pengawas Syariah berdasarkan Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.

To optimize the supervisory function of the Sharia Guarantee provided by the Company, and to fulfill the regulatory requirements regarding sharia, the Company has established and appointed a Sharia Supervisory Board based on Decree of the Board of Directors No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 24, 2016, concerning Appointment of Sharia Supervisory Board of Perum Jamkrindo.

Pedoman Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah berpedoman pada Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 dan Keputusan Direksi No.124/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Selain melegalisir pengangkatan Dewan Pengawas Syariah, keputusan Direksi tersebut mencakup uraian tentang tugas dan tanggung jawab.

Guidelines of Duties Implementation

The implementation duties of the Sharia Supervisory Board are based on the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016, and the Board of Directors Decree No. 124/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016, concerning Appointment of Sharia Supervisory Board of Perum Jamkrindo. In addition to legalizing the appointment of the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors' decision includes a description of the duties and responsibilities.

Susunan Dewan Pengawas Syariah

Composition of Sharia Supervisory Board

Susunan Dewan Pengawas Syariah Jamkrindo Tahun 2020

Composition of Jamkrindo Sharia Supervisory Board in 2020

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Terms of Office	Periode Jabatan Period
Hasanudin	Ketua Chairman	Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016	1 Juli 2016 - sekarang July 1, 2016 - present	Ke-3 3 ^d
Muhammad Syakir Sula	Anggota Member	Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 Board of Directors Decree No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016	1 Juli 2016 - sekarang July 1, 2016 - present	Ke-3 3 ^d

*Profil singkat masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Pengawas Syariah, dalam bab Profil Perusahaan

*Brief profile of each member of the Sharia Supervisory Board can be seen in the Sharia Supervisory Board Profile section, in the Company Profile chapter

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

The duties and responsibilities of the Company's Sharia Supervisory Board are as follows:

- Melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atas semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan.

- Supervise and ensure compliance of all Company's products, operations, and policies with sharia principles.

- Memberikan nasehat, saran atau pendapat kepada Direksi mengenai kesesuaian semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - Memastikan semua produk, operasional dan kebijakan Perusahaan telah sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).
 - Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan yang berkaitan dengan produk syariah pada Perusahaan kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, serta memberikan tembusan kepada Direksi.
 - Menghadiri pertemuan yang disepakati antara Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai jadwal yang telah disepakati bersama, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan di luar jadwal yang sudah ditentukan apabila diminta oleh Direksi.
 - Memberikan dukungan secara maksimal demi tercapainya kemajuan Perusahaan khususnya Unit Kerja Penjaminan Syariah.
- *Provide advice, suggestions, or opinions to the Board of Directors regarding the suitability of all Company's products, operations and policies with sharia principles.*
 - *Ensure that all Company's products, operations, and policies are in accordance with the fatwas of the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulema (MUI DSN).*
 - *Report business activities and developments relating to the Company's sharia products to the National Sharia Board of the Indonesian Council of Ulema (MUI DSN), at least once in 1 (one) year, and provide copies to the Directors.*
 - *Attend an agreed meeting between the Sharia Supervisory Board and the Board of Directors at least once in 1 (one) month according to the agreed upon schedule, and at any time if needed outside the specified schedule if requested by the Board of Directors.*
 - *Provide maximum support for the achievement of the Company's progress, especially the Sharia Guarantee Unit.*

Program Pengembangan Kompetensi

Jamkrindo memiliki komitmen dalam menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengadakan program pengembangan kompetensi bagi seluruh karyawan. Pengembangan kompetensi Dewan Pengawas Syariah merupakan upaya pengkinian pengetahuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan penasihat dalam pengelolaan bisnis Perusahaan khususnya dalam prinsip-prinsip Syariah.

Tentang kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti Dewan Pengawas Syariah di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan dalam laporan tahunan ini.

Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2020

Sehubungan dengan adanya rencana phase out (penutupan) Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan pada tahun 2020, UUS Jamkrindo tidak memiliki target bisnis dan tidak memiliki produk penjaminan syariah baru. Maka selama tahun 2020 Dewan Pengawas Syariah tidak dapat melakukan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kegiatan penjaminan syariah, akad penjaminan syariah, dan praktik pemasaran penjaminan syariah yang dilakukan oleh UUS Jamkrindo.

Competency Development Program

Jamkrindo is committed to creating superior and competitive human resources by conducting competency development programs for all employees. The development of the Sharia Supervisory Board competence is an effort to update knowledge to support the implementation of supervisory and advisory duties in the management of the Company's business, especially in sharia principles.

Competency improvement activities participated by the Sharia Supervisory Board Throughout 2020 can be seen in the Company Profile chapter of this annual report.

Duties Implementation Report 2020

In connection with the planned phase out of the Company's Sharia Business Unit (UUS) in 2020, UUS Jamkrindo has no business targets and does not have a new sharia guarantee product. Therefore, during 2020 the Sharia Supervisory Board cannot supervise and provide advice on sharia guarantee activities, sharia guarantee agreements, and sharia guarantee marketing practices conducted by Jamkrindo Law.

Dewan Pengawas Syariah telah menghadiri rapat (zoom meeting) pembahasan phase out UUS bersama Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Direksi PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dan Tim Pendamping UUS PT Jamkrindo pada tanggal 10 November 2020.

The Sharia Supervisory Board has attended a zoom meeting discussing phase out of the UUS with the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, Directors of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and The Legal Assistance Team of PT Jamkrindo on November 10, 2020.

Dewan Pengawas Syariah memberikan dukungan terhadap proses phase out dimaksud dengan memperhatikan kesesuaian terhadap POJK No.1/POJK.05/2017 Pasal 30.

Sharia Supervisory Board provides support to the phase out process by taking into account the conformity of POJK No.1/POJK.05/2017 Article 30.

Remunerasi

Remuneration

Kepada Dewan Pengawas Syariah Perusahaan memberikan remunerasi sebagai berikut:

To Sharia Supervisory Board the Company provides the following remuneration:

Uraian <i>Description</i>	Ketua DPS <i>Chairman of Sharia Supervisory Board</i>	Anggota DPS <i>Member of Sharia Supervisory Board</i>
Honorarium <i>Honorarium</i>	Rp12.650.000,-	Rp11.385.000,-
Tunjangan <i>Allowance</i>	-	-

TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE

Transparency of Bad Governance Practice

Laporan atas Aktivitas Perusahaan yang Mencemari Lingkungan

Perusahaan menyadari bahwa kegiatan bisnis yang dijalankan tidak terlepas dari interaksi secara langsung atau pun tidak langsung dengan masyarakat sekitar area proyek serta lingkungan. Oleh karena itu, praktik *bad corporate governance* senantiasa mengancam dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Report on the Activities of Companies that Pollute the Environment

The Company realizes that the business activities that it carries out cannot be separated from direct or indirect interactions with the community around the project area and the environment. Therefore, corporate governance bad practices are always threatening in the Company's operational activities.

Pengungkapan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Perusahaan senantiasa mematuhi ketentuan pajak yang berlaku sebagai bentuk kontribusi nyata serta menjadi kewajiban terhadap negara. Hal ini sejalan dengan semangat Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan melalui optimalisasi penerimaan pajak.

Disclosure of Tax Obligation Fulfillment

The Company always complies with the prevailing tax provisions as a form of tangible contribution as well as being an obligation to the state. This is in line with the Government's spirit to improve development through the optimization of tax receipts.

Total kewajiban pajak Jamkrindo di tahun 2020 sebesar Rp95.267.645.431,-.

Jamkrindo's total tax liabilities in 2020 amounted to IDR95,267,645,431,-.

Ketidaksesuaian Penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan Peraturan yang Berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik PricewaterhouseCoopers (PwC) dan Hertanto, Grace, Karunawan (HGK). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perusahaan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Discrepancy in Presentation of Annual Report and Financial Statements with Applicable Regulations and Financial Accounting Standards (SAK)

All presentations of information in this Annual Report, particularly regarding financial performance and other matters, refer to the Financial Statements for the years ended December 31, 2020 and December 31, 2019 that have been audited by the Public Accounting Firms PricewaterhouseCoopers (PwC) and Hertanto, Grace, Karunawan (HGK). The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI).



Kasus Terkait dengan Buruh dan Karyawan

Selama tahun 2020 tidak terdapat adanya kasus terkait dengan buruh dan karyawan.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Teraudit Perusahaan tahun 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja Wibisana Rintis dan Rekan (PwC) belum mengadopsi PSAK No. 5 tentang Segmen Operasi.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan digital Perusahaan baik yang disampaikan kepada Pemegang Saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perusahaan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perusahaan.

Cases Related to Labors and Employees

During 2020 there will be no cases related to labors and employees.

Disclosure of Operating Segments in Financial Statements

The Company's Audited Financial Statements for 2020 which have been audited by The Public Accounting Firms Tanudiredja Wibisana Rintis and Partner (PwC) have not adopted PSAK No. 5 on Operating Segments.

Conformity of Annual Report Book and Digital Annual Report

The Company's digital Annual Report, both submitted to shareholders, stakeholders, and uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk berpartisipasi untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

The implementation of social and environmental responsibility programs and partnership and development programs are part of the Company's efforts to participate in realizing the Sustainable Development Goals in Indonesia.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: SEBUAH PENDEKATAN

Corporate Social Responsibility and Sustainable Development: An Approach

Konsep *Sustainability Development*, atau Pembangunan Berkelanjutan yang telah berkembang di berbagai negara muncul sebagai bagian dari keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara *people, profit* dan *planet*. Konsep ini hanya dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari seluruh pihak, khususnya entitas usaha yang tak dapat dipungkiri bersandar pada orientasi keuntungan dan cenderung mengabaikan dampak jangka panjang atas kegiatan yang dilakukan.

The concept of Sustainable Development that grew in many countries arose as part of requirement from many parties for a balance between people, profit and planet. This concept can only be actualized through strong commitment from all parties, especially from business entities who undeniable are profit oriented and tend to disregard the long term impact resulting from activities carried out.

Di Indonesia, regulator telah mendorong upaya harmonisasi ini melalui Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yang mewajibkan entitas usaha untuk memiliki kebijakan dan program terkait komitmennya membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan.

In Indonesia, the regulator encourages the efforts taken in order to achieve this harmonization through Corporate Social Responsibility (CSR), which obligates business entities to have policy and programs related to their commitment to develop sustainable relationship with the stakeholders.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company

Pasal 74 ayat (1) / Article 74 paragraph (1):

“Perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

“Company carrying business activity related to natural resources is obligated to carry out Social and Environment Responsibility which shall be budgeted and calculated as Company’s expense and the implementation must be subject to proprietary and fairness.”

Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Law No.25 of 2007 on Capital Investment

Pasal 15 (b) / Article 15 (b):

“Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat”.

“Each investor is obligated to carry out corporate social responsibility. “Corporate social responsibility” means the responsibility attached to each investing company in order to establish relationship that is harmonious, balanced, inline with the environment, value, norm, and culture of the local community.”

Organisasi Internasional untuk Standarisasi (*International Organization for Standardization/ISO*), sebuah badan penetap standar industrial dan komersial dunia telah merilis ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial (*Guidance on Social Responsibility*). Walaupun tidak bersifat wajib dan hanya sekedar himbuan, ISO ini memberikan pola dan modul yang berlaku

International Organization for Standardization (ISO), an organization establishing industrial and commercial standard worldwide, has released ISO 26000 regarding Guidance on Social Responsibility. Even though it is not compulsory and it is only an appeal, ISO provides pattern and module that prevail internationally, on how CSR can be developed in an organizational

secara internasional tentang bagaimana CSR dapat dikembangkan dalam dimensi sebuah organisasi. Di Indonesia, ISO 26000 telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada tahun 2012.

dimension. In Indonesia, ISO 26000 has been ratified by the Government in 2010 and thereafter made into National Standard (SNI) on 2012.

Subyek Inti Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdasarkan ISO 26000

The Main Subjects of Corporate Social Responsibility Based on ISO 26000



Sekilas penjelasan ke-7 subyek inti tersebut adalah sebagai berikut. *A brief explanation of the 7 main subjects is as follows:*

<p>Tata Kelola Organisasi <i>Organizational Governance</i></p>	<p>Proses, sistem, struktur, atau mekanisme lain yang memungkinkan perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip dan praktik-praktik tanggung jawab sosial. <i>Processes, systems, structures or other mechanisms that enable companies to apply social responsibility principles and practices.</i></p>
<p>Hak Asasi Manusia <i>Human Rights</i></p>	<p>Prinsip spesifik: HAM adalah hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Kemanusiaan yang adil dan beradab. <i>Specific principle: Human rights are inherent, irrevocable, universal, inseparable and interdependent rights associated with fair and civilized humanity.</i> Isu: <i>due diligence</i> (analisa dampak keputusan dan kegiatan); situasi berisiko; menghindari persekongkolan; penanganan keluhan; hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; prinsip dan hak dasar di tempat kerja. <i>Issues: due diligence (analysis of the impact of decisions and activities); risky situation; avoid conspiracy; customer complaint; civil and political rights; economic, social and cultural rights; basic principles and rights at work.</i></p>
<p>Praktik Ketenagakerjaan <i>Employment Practices</i></p>	<p>Prinsip spesifik: Pekerja bukanlah komoditas/tidak diperlakukan sebagai faktor produksi; berhak mendapat nafkah dari pekerjaan yang dipilihnya; berhak atas kondisi kerja yang adil dan baik. <i>Specific principle: Employees are not commodities/are not treated as factors of production; has the right to earn a living from the work they choose; entitled to fair and good working conditions.</i> Isu: Pekerjaan dan hubungan kerja; kondisi kerja dan perlindungan sosial; dialog sosial; kesehatan dan keselamatan kerja; pengembangan SDM dan pelatihan di tempat kerja. <i>Issues: work and employment relations; working conditions and social protection; social dialogue; Occupational Health and Safety; HR development and training in the workplace.</i></p>
<p>Lingkungan <i>Environment</i></p>	<p>Prinsip spesifik: Prinsip tanggung jawab lingkungan; prinsip kehati-hatian; manajemen risiko lingkungan; pencemar membayar. <i>Specific principles: the principle of environmental responsibility; the precautionary principle; environmental risk management; polluter pays.</i> Isu: Pencegahan pencemaran; penggunaan sumber daya berkelanjutan; mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan pemulihan habitat alami. <i>Issues: pollution prevention; sustainable use of resources; mitigation and adaptation to climate change; environmental protection, biodiversity and restoration of natural habitats.</i></p>
<p>Prosedur Operasi yang Wajar <i>Fair Operating Procedure</i></p>	<p>Prinsip spesifik: Perilaku etis. <i>Specific principle: ethical behavior.</i> Isu: Anti korupsi, keterlibatan dalam politik yang bertanggung jawab; persaingan yang adil (<i>fair</i>); mendorong tanggung jawab sosial di rantai nilai; menghargai hak kepemilikan. <i>Issues: anti-corruption, involvement in responsible politics; fair competition; encourage social responsibility in the value chain; respect ownership rights.</i></p>
<p>Isu Pelanggan <i>Consumer Issue</i></p>	<p>Prinsip spesifik: Terpenuhinya kebutuhan dasar, standar hidup layak, produk dan jasa esensial, keselamatan, informasi; menentukan pilihan; didengarkan; kompensasi kerugian; edukasi; lingkungan yang sehat; privasi; prinsip kehati-hatian. <i>Specific principles: Fulfillment of basic needs, decent living standards, essential products and services, safety, information; make a choice; to be listened; loss compensation; education; healthy environment; privacy; prudent principle.</i> Isu: Perlindungan kesehatan dan keselamatan konsumen; konsumsi berkelanjutan; layanan, dukungan serta penyelesaian keluhan dan perselisihan konsumen; perlindungan data dan privasi konsumen; akses ke pelayanan dasar; pendidikan dan kesadaran. <i>Issues: consumer health and safety protection; sustainable consumption; service, support and resolution of consumer complaints and disputes; data protection and consumer privacy; access to basic.</i></p>
<p>Pelibatan dan Pengembangan Komunitas/ Masyarakat <i>Community Engagement and Development</i></p>	<p>Prinsip spesifik: Perusahaan adalah bagian tak terpisahkan dari komunitas; komunitas berhak mengambil keputusan sendiri terkait komunitasnya; menghargai karakteristik komunitas; kerja sama. <i>Specific principle: the Company is an inseparable part of the community; the community has the right to make their own decisions regarding their community; respecting community characteristics; collaboration.</i> Isu: Pelibatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan; penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan; pengembangan dan akses ke teknologi; kemakmuran dan penciptaan pendapatan; kesehatan; investasi sosial. <i>Issue: Community's involvement; education and culture; job creation and skills development; development and access to technology; prosperity and income creation; health; social investment.</i></p>

Sumber: Pedoman KADIN Tentang Tanggung-Jawab Sosial Perusahaan untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, 2015.
Source: KADIN Guidelines on Corporate Social Responsibility to Support Sustainable Development, 2015.



KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI LINGKUP JAMKRINDO

Corporate Social Responsibility Policy and Governance in Jamkrindo



Prinsip, Kebijakan dan Komitmen Penerapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Sebagai perusahaan dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi entitas pemilik akhir, Jamkrindo memiliki peran untuk mewujudkan Tanggung Jawab Sosial ke dalam seluruh lapisan, khususnya terkait peran BUMN sebagai *Agen of Development* atau Agen Pembangunan. Kepada karyawan dan/atau pekerja sebagai pemangku kepentingan internal, Perusahaan wajib memperhatikan kesejahteraan dan lingkungan kerja yang dapat memberikan landasan bagi perkembangan diri setiap karyawan. Kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan eksternal, Perusahaan melakukan berbagai aktivitas pengembangan sosial kemasyarakatan khususnya melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Hal tersebut sesuai dengan visi Perusahaan “Menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional”, Jamkrindo memiliki kewajiban moral untuk dapat mewujudkan keseimbangan antara pengelolaan usaha berbasis laba, kepentingan pemegang saham dan perekonomian nasional, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan.

Principles, Policies and Commitments for Implementing Corporate Social Responsibility

As a company in which the Government of the Republic of Indonesia becomes the ultimate owner entity, Jamkrindo has a role in realizing Social Responsibility in all layers specifically related to the role of SOEs as Agents of Development. To employees and/or workers as internal stakeholders, the Company must pay attention to the welfare and work environment which can provide a foundation for the development of each employee. To the community as external stakeholders, the Company carries out various social development activities specifically through the implementation of the Partnership and Community Development Program.

This is in accordance with the Company's vision of “Becoming the Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development”, Jamkrindo has a moral obligation to realize a balance between profit-based business management, the interests of shareholders and the national economy, to relationships with stakeholders.

Pengelolaan usaha yang sehat, penerapan tata kelola organisasi yang baik yang didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga pertumbuhan Jamkrindo bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Jamkrindo untuk dapat menjemput visi yang dicita-citakan.

Healthy business management, the application of good organizational governance based on compliance and accountability, the development of competencies in Human Resources (HR) and the fulfillment of their rights, and the growth of Perum Jamkrindo and the Indonesian people, will certainly strengthen the position of Perum Jamkrindo to achieve the aspired vision.

Aspek lain dari Tanggung Jawab Sosial yang dilakukan Perusahaan adalah pertanggungjawaban pengelolaan operasional usaha kepada pemegang saham. Pentingnya pengelolaan usaha berbasis prinsip korporasi yang sehat menjadi salah satu kewajiban Perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya. Prinsip korporasi yang sehat tentunya harus dilandasi pada pengelolaan usaha dengan tujuan mencari laba, dan pengelolaan organisasi yang memiliki kaidah-kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yang akan berujung pada akuntabilitas Perusahaan.

Another aspect of Corporate Social Responsibility carried out by the Company is the responsibility for managing business operations to shareholders. The importance of business management based on sound corporate principles is one of the Company's obligations to be able to account for its performance. The principle of a healthy corporation must be based on business management with the aim of making a profit; and management of organizations that have the principles of Good Corporate Governance, which will lead to the accountability of the Company.

Prinsip Korporasi yang Sehat

Principles of Soundness Corporations



Dengan memenuhi kewajiban terhadap aspek Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Jamkrindo berupaya untuk memenuhi hak dan harapan pemegang saham dan para pemangku kepentingan, serta memastikan bahwa kepentingan mereka atas hubungan yang ada dengan Perusahaan dapat terpenuhi sehingga Perusahaan dan pemangku kepentingan dapat tumbuh bersama. Dalam pencapaian tujuan bersama demi menjaga keselarasan antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan, Perusahaan menciptakan kondisi yang memungkinkan pemangku kepentingan berpartisipasi melalui berbagai inisiasi yang telah dan yang akan dilakukan oleh Perusahaan untuk menciptakan keberlanjutan yang dapat saling menopang antara Perusahaan dan pemangku kepentingan.

By fulfilling obligations towards the aspects of Corporate Social Responsibility, Jamkrindo strives to fulfill the rights and expectations of shareholders and stakeholders and to ensure that their interests in the existing relationships with the Company can be fulfilled so that the Company and stakeholders can grow together. In achieving the common goal of maintaining harmony between the Company and stakeholders, the Company creates conditions that enable stakeholders to participate through various initiatives that have been and will be carried out by the Company to create sustainability that can support each other.

Keseimbangan dalam Pembangunan Berkelanjutan

Balance in Sustainable Development



Uji Tuntas/Due Dilligence Terhadap Dampak Sosial, Ekonomi dan Lingkungan dari Kegiatan Perusahaan

Pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan program harus dibuat sesuai dengan pemetaan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan atas kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Jamkrindo, yang kemudian dituangkan dalam rencana kebutuhan nyata pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan kemampuan Perusahaan.

Uji tuntas kegiatan operasional Perusahaan dan dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan maupun sosial dipetakan berdasarkan tingkatan materialitas serta risiko negatif yang mungkin timbul. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan memetakan subjek maupun isu penting yang memengaruhi Perusahaan dan pembangunan berkelanjutan. Subjek maupun isu prioritas dirumuskan untuk kemudian dirancang sebagai program yang dapat memastikan keberlanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Dalam aspek ekonomi, sebagai entitas usaha, Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kinerja ekonomi yang berkelanjutan, bersih dari praktik korupsi serta memiliki manfaat bagi pemangku kepentingan yang lain. Pada aspek lingkungan, Perusahaan senantiasa melaksanakan kaji risiko lingkungan hidup, untuk menentukan risiko lingkungan dari kegiatan operasional dan langkah pengendaliannya. Sementara pada aspek sosial, perhatian Perusahaan tidak hanya pada pemangku kepentingan internal, melainkan juga eksternal.

Due Diligence Against Social, Economic and Environmental Impacts of Company Activities

The implementation of the Corporate Social Responsibility program is also carried out from planning to evaluation. Program planning must be made in accordance with the mapping of social, economic and environmental impacts on Jamkrindo's operations and business activities, which are then outlined in the plans of the real needs of stakeholders by taking into account the Company's capabilities.

Due diligence of the Company's operational activities and their impact on the economy, environment and social are mapped based on materiality levels and negative risks that may arise. Based on this, the Company maps important subjects and issues affecting the Company and sustainable development. Priority subjects and issues are formulated to be designed as programs that can ensure sustainability for stakeholders.

In economic aspects, as a business entity, the Company has a responsibility to ensure sustainable economic performance, clean from corruption practices and have benefits for other stakeholders. On environmental aspects, the Company always conducts environmental risk assessments, to determine the environmental risks of its operational activities and control measures. While on the social aspect, the Company's attention is not only on internal stakeholders, but also externally.

Di samping itu, Jamkrindo berupaya untuk merumuskan kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan sesuai dengan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Skala atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang telah dirumuskan melalui Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

In addition, Jamkrindo strives to formulate operations and business activities conducted in accordance with the 17 (seventeen) Sustainable Development Goals (SDGs) that have been formulated by Indonesia through Presidential Regulation No.59 of 2017 on Implementing the Achievement of Sustainable Development Goals.



Beberapa contoh program yang telah dijalankan seperti bantuan yang diberikan kepada masyarakat kecil dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah sejalan dengan TPB No. 1 Tanpa Kemiskinan dan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera; program bantuan peningkatan gizi dan dukungan terhadap pendidikan masyarakat telah sejalan dengan TPB No. 2 Tanpa Kelaparan dan TPB 4 Pendidikan Berkualitas; komposisi kesetaraan gender di tempat kerja (TPB No. 5); efisiensi material dan pemakaian material daur ulang (TPB No. 12); maupun kolaborasi dengan Pemerintah serta pihak ketiga lainnya dalam mendorong keberlanjutan telah sejalan dengan TPB No. 17.

Some examples of programs that have been run such as assistance provided to small communities in deal with the COVID-19 pandemic have been in line with Goal SDGs No. 1 No Poverty and Goal SDGs No. 3 Good Health and Well Being; nutrition improvement assistance programs and support for community education have been in line with Goal SDGs No. 2 Zero Hunger and Goal SDGs No. 4 Quality Education; composition of gender equality in the workplace (Goal SDGs No. 5); material efficiency and use of recycled materials (Goal SDGs No. 12); and collaboration with the Government and other third parties in promoting sustainability has been in line with Goal SDGs No. 17.

Pemangku Kepentingan Signifikan yang Terdampak atau Berpengaruh atas Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Significant Stakeholders Affected by or Affecting the Company's Activities

Pemangku kepentingan yang berpengaruh atau terdampak dari kegiatan Perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

The significant stakeholders affected by or affecting the Company's activities are as follow:

Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i>	Definisi <i>Definition</i>	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan <i>Impact on Company's Activities</i>
Karyawan <i>Employee</i>	Karyawan Tetap, Calon Karyawan, <i>Prohire</i> dan Karyawan Kontrak Waktu Tertentu (KKWT). <i>Permanent Employee, Prospective Employee, Prohire, and Fixed-term Employee.</i>	Kesinambungan Perusahaan berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan dalam jangka panjang. <i>The sustainability of the company affects the welfare of employees in the long term.</i>



Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders</i>	Definisi <i>Definition</i>	Pengaruh/Dampak dari Kegiatan Perusahaan <i>Impact on Company's Activities</i>
Masyarakat <i>Employee</i>	Masyarakat umum, baik pengguna produk Perusahaan maupun non-pelanggan. <i>Communities who are using the Company's products or not.</i>	Kegiatan bisnis Perusahaan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas masyarakat baik melalui produk dan layanan yang diberikan maupun kegiatan PKBL yang bersentuhan langsung dalam membantu kebutuhan masyarakat. <i>The Company's business activities have an impact on improving the quality of the community both through the products and services provided and Partnership and Community Development activities which directly helping the community's needs.</i>
Pelanggan <i>Consumer</i>	Pengguna produk dan layanan jasa Perusahaan. <i>People who use Jamkrindo products.</i>	Kualitas layanan yang diberikan terhadap pelanggan akan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dalam menggunakan layanan Jamkrindo. <i>The quality of services provided to consumers will influence consumer loyalty in using the services of Jamkrindo.</i>
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir. <i>The government of Indonesia as the ultimate owner entity.</i>	Kinerja keuangan Perusahaan akan berdampak terhadap besarnya setoran pajak serta dividen yang diserahkan kepada Pemerintah Indonesia. <i>The financial performance of the Company will have an impact on the amount of tax payments and dividend submitted to the Government of Indonesia.</i>
Regulator <i>Regulator</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan regulasi dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. <i>Financial Services Authority (OJK) as a state institution established under the law to regulate and supervise all activities in the financial services sector.</i>	Pengawasan oleh OJK berpengaruh pada penciptaan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan pelanggan dan masyarakat <i>Supervision by OJK has an effect on the creation of activities in the financial services sector that are held regularly, fairly, transparently, and accountable, and able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner, and is able to protect the interests of customers and the public.</i>
Media Massa <i>Mass Media</i>	Media yang menyiarkan informasi Perusahaan baik cetak, elektronik maupun digital. <i>The media that broadcasts the Company's information in print, electronic, and online.</i>	Kegiatan yang dilakukan Perusahaan di media massa akan berpengaruh terhadap literasi inklusi keuangan. <i>Activities carried out by the Company in the mass media will influence financial inclusion literacy.</i>

Lingkup dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Baik yang Kewajiban maupun yang Melebihi Kewajiban

Dasar pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berlandaskan pada kewajiban pemenuhan beberapa aspek hukum, diantaranya:

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (pasal 15 (b)) yang berisi, "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat".

Scope and Programs of Corporate Social Responsibility, Either Constitute The Obligation or Beyond the Obligation

The basis for implementing the Corporate Social Responsibility program is based on the obligation to meet several legal aspects, including:

1. Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety.
2. Law No.32 of 1998 concerning the Development and Guidance of Small Businesses.
3. Law No.20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.
4. Law No.25 of 2007 concerning Investment (Article 15 (b)) which contains, "Every investor is obliged to carry out corporate social responsibility. "Corporate social responsibility" is the responsibility inherent in every investment company to continue to create a harmonious and balanced relationship in accordance with the environment, values, norms, and culture of the local community".

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.</p> <p>6. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.</p> <p>7. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p> <p>8. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.</p> <p>9. Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>10. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>11. Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>12. Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.</p> <p>13. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.</p> <p>14. Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>15. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>16. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>17. ISO 26000
Telah diratifikasi oleh Pemerintah pada tahun 2010 dan dijadikan Standar Nasional (SNI) pada 2012, dengan 7 (tujuh) subyek inti yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tata kelola organisasi yang baik b. Penegakan hak asasi manusia c. Praktek ketenagakerjaan yang manusiawi dan berkeadilan d. Dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan e. Prosedur operasi yang wajar f. Tanggung jawab terhadap konsumen g. Pelibatan dalam pengembangan masyarakat | <p>5. Law No.1 of 1970 concerning Occupational Safety.</p> <p>6. Law No.8 of 1999 on Consumer Protection.</p> <p>7. Law No.28 of 1999 concerning Clean State Administrators that are Free of Corruption, Collusion, and Nepotism.</p> <p>8. Law No.13 of 2003 concerning Employment.</p> <p>9. Law No.20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.</p> <p>10. Law No.40 of 2007 on Limited Liability Company.</p> <p>11. Law No.32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment.</p> <p>12. Government Regulation No.50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System.</p> <p>13. Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 59 Year 2017 Concerning the Implementation of Achieving Sustainable Development Goals.</p> <p>14. Regulation of the State Minister of SOEs No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011, and its amendment No.PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.</p> <p>15. Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/04/2020 on Third Amendment to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership Program and Environmental Development Program of State-Owned Enterprises.</p> <p>16. Circular of the State Minister of SOEs No.SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012, concerning the Establishment of Accounting Guidelines for the Partnership Program and the State-Owned Enterprises' Community Development Program.</p> <p>17. ISO 26000
This has been ratified by the Government in 2010 and made the National Standard (SNI) in 2012, with 7 (seven) core subjects, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Good organizational governance b. Enforcement of human rights c. Humanitarian and fair employment practices d. Impact of company activities on the environment e. Reasonable operating procedure f. Responsibility to consumers g. Engagement in community development |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Gambaran tentang kewajiban yang diemban Perusahaan dalam implementasi TJSJL adalah sebagai berikut.

Illustration regarding the obligation carried out by the Company in implementing TJSJL is as follows.



Sebagai entitas usaha yang berdomisili di Indonesia
As one of business entities domiciled in Indonesia

Sebagai entitas usaha yang bergerak pada industri penjaminan di Indonesia
As one of business entities served in Indonesian banking industry

Sebagai entitas usaha dengan Pemerintah Republik Indonesia sebagai entitas pemilik akhir
As one of business entities with Shares Ownership by The Papua Local Government

Jamkrindo wajib mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait Perseroan Terbatas yang berdomisili di Indonesia, seperti GCG, ketenagakerjaan, K3, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, dsbnya.

Jamkrindo is obliged to comply with laws and regulations related to Limited Liability Company having a domicile in Indonesia, such as GCG, employment, OHS, consumer protection, environmental, etc.

Jamkrindo terikat pada peraturan dan perundang-undangan terkait industri penjaminan.

Jamkrindo is bound by laws and regulations related to Banking Industry.

Jamkrindo wajib mengembangkan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) serta program Literasi Keuangan.

Jamkrindo is obliged to develop Partnership and Community Development Program (PKBL) as well as Financial Literacy program.

Masing-masing kewajiban dan kepatuhan di atas akan dibahas lebih lanjut pada bab ini.

Each of the above obligations and compliance will be discussed further in this chapter.

Sesuai arahan dari pemegang saham, Kementerian BUMN, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. 02/MBU/04/2020 tanggal 02 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN, Jamkrindo melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Berdasarkan peraturan tersebut, Jamkrindo berkewajiban untuk menyalurkan dana dari pemerintah dan menyelenggarakan PKBL yang merupakan sebagian dari keseluruhan komitmen Jamkrindo terhadap pembangunan keberlanjutan.

According to the guidance of the shareholders, the Ministry of SOEs, which is contained in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs, as last amended by SOE Minister Regulation No. 02/MBU/04/2020 dated 02 April 2020 regarding the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No: PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for SOEs, Jamkrindo implements the Corporate Social Responsibility program through the Partnership and Community Development Program (PKBL) unit. Based on these regulations, Jamkrindo is obliged to channel funds from the government and hold a Partnership and Community Development Program which is part of the overall commitment of Perum Jamkrindo's sustainability development.

Mengacu pada sejumlah peraturan dan perundang-undangan tersebut, Jamkrindo menyusun kebijakan dan program CSR baik secara konsep maupun sasaran implementasi secara tertulis, yaitu:

Referring to a number of such regulations and legislation, Jamkrindo develops CSR policies and programs both conceptually and in writing implementation goals, namely:

1. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No.02/SKB/1/XII/2020 - Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Perilaku (Code of Conduct), yang salah satunya poinnya memuat tentang dukungan Jamkrindo akan kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi), serta menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.

1. *Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors No.02/SKB/1/XII/2020 - Kep-09/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Code of Conduct, one of which contains jamkrindo's support for Government policy in the field of development of Small and Medium Enterprises (MSMEs and Cooperatives), as well as placing customer satisfaction as a top priority.*

2. Surat Edaran Direksi No. 113/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia.

2. *Board of Directors Circular Letter No. 113/SE/1/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Accounting Policy and Standard Operating Procedure of Partnership Program and Community Development Program of PT Jaminan Kredit Indonesia.*

Organisasi, Penanggung Jawab dan Pengelola

Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program TJSJ di lingkup Perusahaan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Divisi/Unit dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program yang mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, seperti yang tergambar di bawah ini.

Organization, Person in Charge and Management

To be able to implement the entire TJSJ program within the Company, the overall implementation of this program is divided into several Divisions / Units with responsibilities in accordance with the category of programs referring to ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines, as illustrated below.

Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial <i>Social Responsibility Governance</i>		Divisi Sekretaris Perusahaan, Bagian PKBL <i>Corporate Secretary Division, PKBL Section</i>
Hak Asasi Manusia <i>Human Rights</i>		Divisi MSDM <i>HR Management Division</i>
Operasi yang Adil <i>Fair Operations</i>		Divisi Sekretaris Perusahaan, Bagian PKBL <i>Corporate Secretary Division, PKBL Section</i>
Lingkungan Hidup <i>Environmental</i>		Divisi Umum <i>General Affair Division</i>
Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Employment, Health, and Safety</i>		Divisi MSDM dan Divisi Umum <i>HR Management Division and General Affair Division</i>
Tanggung Jawab Produk dan Perlindungan Konsumen <i>Product Responsibility and Consumer Protection</i>		Divisi jaringan dan Layanan <i>Network and Services Division</i>
Pelibatan dan Pengembangan Komunitas/Masyarakat <i>Community Engagement and Development</i>		Divisi MR dan Pemingkatan UMKM <i>Risk Management Division and MSME rating</i>

Pembiayaan dan Anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Terhadap program dan kegiatan CSR di sepanjang tahun 2020, berikut disampaikan pembiayaan dan anggaran yang ditetapkan Perusahaan di awal tahun 2020, dan realisasinya di akhir tahun 2020 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya.

Corporate Social Responsibility Financing and Budget

Regarding CSR programs and activities throughout 2020, the following are the financing and budgeting set by the Company in early 2020, and their realization at the end of 2020.



Uraian Descriptions	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Penyerapan Anggaran 2020 (%) Budget Absorption 2020 (%)	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) Realization 2020 To Realization 2019 (%)
	1	2	(1:2)	3	(1:3)
Biaya Lingkungan Hidup <i>Environmental Costs</i>	946	1.056	89,54%	842	112,35%
Biaya Ketenagakerjaan dan K3 <i>Employment and OHS Costs</i>	227.356	207.489	109,57%	228.455	99,52%
Biaya Tanggung Jawab Produk dan Pelanggan <i>Product and Customer Responsibility Costs</i>	359	600	59,85%	295	121,69%
Biaya Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Social and Community Development Costs</i>					
Program Kemitraan <i>Partnership Program</i>	4.372	4.208	103,90%	5.132	85,19%
Program Bina Lingkungan <i>Community Development Program</i>	11.890	11.761	101,10%	5.302	224,25%
Jumlah Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan <i>Total Social and Community Development</i>	16.262	15.969	101,83%	10.434	155,86%

Masing-masing aspek dijabarkan secara lebih rinci di bawah ini. *Each aspect is described in more detail below.*

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA

Corporate Social Responsibility Related to Human Rights Compliance



Rumusan, Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat, tidak dapat dicabut, universal, tak terpisahkan dan saling bergantung, yang terkait dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial, HAM mencakup hal-hak terkait analisa dampak keputusan dan kegiatan, situasi berisiko terkait HAM, menghindari persekongkolan, penanganan keluhan, diskriminasi dan kelompok marjinal, hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial dan budaya; serta prinsip dan hak dasar di tempat kerja.

Jamkrindo memandang HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai entitas usaha yang memiliki pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan HAM yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di negara Indonesia, Jamkrindo mengimplementasikan HAM dalam bentuk perlakuan tanpa membedakan Suku, Agama, dan Ras (SARA) baik kepada pegawai, pelanggan, maupun pemangku kepentingan lainnya. Jamkrindo berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan hukum dan prinsip-prinsip HAM.

Formulation, Commitments and Corporate Social Responsibility Policies towards Human Rights Compliance

Human Rights (HAM) are inherent, irrevocable, universal, inseparable and interdependent rights associated with the Second Precepts of the Pancasila, namely Fair and Civilized Humanity. In ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines, Human Rights includes rights related to the analysis of the impact of decisions and activities, risk situations related to human rights, avoiding collusion, handling complaints, discrimination and marginalized groups, civil and political rights; economic, social and cultural rights; and basic principles and rights at work.

Jamkrindo considers human rights as a set of rights inherent in the nature and existence of human beings as a creature of God Almighty and is His gift that must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and everyone for the honor and protection of human dignity. As a business entity that has accountability in implementing the human rights based on the applicable law in Indonesia, Jamkrindo implements human rights in the form of treatment without discriminating between Ethnicity, Religion, and Race (SARA) to employees, customers, and other stakeholders. Jamkrindo is committed to complying with all legal provisions and human rights principles.



Pemetaan Risiko dan Dampak Hak Asasi Manusia dalam Kegiatan Operasi dan Bisnis Perusahaan

Jamkrindo berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM di lingkup operasi dan bisnisnya. Ruang lingkup tanggung jawab sosial terkait pelaksanaan HAM di lingkungan Jamkrindo di antaranya meliputi penegakkan prinsip keberagaman dan kesetaraan bagi seluruh pegawai, kebebasan berserikat, pelaksanaan sistem remunerasi dan kesejahteraan pegawai, komitmen atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pemastian mutu produk dan layanan yang diberikan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan latar belakang SARA, serta hal terkait lainnya.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Dalam pemenuhan HAM pada lingkup operasi dan bisnisnya, Jamkrindo menekankan pentingnya hak-hak karyawan, terutama hak terkait HAM seperti kehidupan yang layak, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta pemenuhan hak dasar hidup seperti kelahiran. Jamkrindo telah memiliki sejumlah Prosedur Tetap yang mengatur berbagai pemenuhan HAM karyawan, dan akan terus mengevaluasi dan mengembangkan penerapan Prosedur Tetap sejalan dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks. Selain itu Jamkrindo menekankan perihala tanggung jawab sosial terkait HAM pada sasaran dengan melaksanakan seluruh kebijakan yang terkait dengan ruang lingkup HAM tersebut.

Penerapan Inisiatif Hak Asasi Manusia: Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Kegiatan-kegiatan dalam tanggung jawab sosial perusahaan terkait HAM meliputi:

- » Kewajiban Menunaikan Ibadah Sesuai dengan Agama dan Keyakinannya Masing-masing
Menjalankan kegiatan keagamaan merupakan hak asasi manusia yang sangat mendasar. Oleh karena itu Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan kebijakan menunaikan/ menjalankan kewajiban beragama. Jamkrindo senantiasa memberikan waktu yang secukupnya kepada Pegawai untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama atau kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, Jamkrindo memberikan izin untuk melaksanakan perjalanan suci masing-masing umat beragama.

Mapping the Risks and Impacts of Human Rights in Corporate's Operations and Business Activities

Jamkrindo is committed to always uphold human rights in its operations and business. The scope of social responsibility related to the implementation of human rights in jamkrindo includes the enforcement of the principles of diversity and equality for all employees, freedom of association, implementation of remuneration and employee welfare system, commitment to the Collective Labor Agreement (PKB), assurance of the quality of products and services provided to all stakeholders without discriminating against SARA background, and other related matters.

Target and Objective of Programs and Activities

In compliance with human rights in its operational and business scope, Jamkrindo emphasizes the importance of employees' rights, mainly related to human rights, such as decent life, right to associate and to assemble, as well as the compliance of basic life such as birth. Jamkrindo already had a numbers of Permanent Procedures that regulates various compliance to the employees' human rights, and constantly monitors and develops the implementation of Permanent Procedure, in-line with human life requirement that are becoming more and more complex. In addition, Jamkrindo emphasizes the social responsibility related to human rights on target by implementing all policies related to the scope of human rights.

Implementation of the Human Rights Initiative: Programs and Activities

Activities in corporate social responsibility related to human rights include:

- » *The Obligation to Perform Worship In Accordance with Their Respective Religions and Beliefs
Carrying out religious activities is a very basic human right. Therefore, Jamkrindo has implemented policy activities to fulfill/carry out religious obligations. Jamkrindo always provides sufficient time for employees to carry out worship required by their respective religions or beliefs. In addition, Jamkrindo gives permission to carry out the sacred journey of each religious community.*

- » Cuti Kerja, Cuti Melahirkan, dan Izin Tidak Masuk Kerja Cuti merupakan bagian dari HAM pegawai. Jamkrindo memberikan cuti kerja, cuti melahirkan dan izin tidak masuk kerja sesuai dengan pengajuan surat permohonan dari pegawai kepada atasan masing-masing Divisi.
- » Pemenuhan HAM untuk Seluruh Pelanggan Jamkrindo selalu memastikan mutu produk dan standar layanan yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan Prosedur Tetap yang telah dirumuskan. Jamkrindo tidak membedakan mutu produk dan standar layanan yang diberikan kepada pelanggan, baik karena latar belakang SARA maupun gender. Seluruh pelanggan memiliki hak dan kewajiban yang sama, yang telah diatur dalam peraturan dan perundang-undangan serta Prosedur Tetap Perusahaan

- » *Leave, Maternity leave, and Leave of Absence*
Leave is part of employee human rights. Jamkrindo provides leave of absence in accordance with the submission of a letter of application from employees to to their respective superiors.
- » *Fulfillment of Human Rights for All Customers*
Jamkrindo always ensures the quality of products and service standards provided to customers in accordance with the permanent procedures that have been formulated. Jamkrindo does not discriminate on the quality of products and service standards provided to customers, both because of SARA's background and gender. All customers have the same rights and obligations, which have been regulated in the laws and regulations as well as the Company's permanent procedures.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Hak Asasi Manusia

Di tahun 2020 tidak terdapat penghargaan dan sertifikasi bagi Perusahaan dalam bidang HAM.

Human Rights Awards and Certifications

In 2020 there will be no awards and certifications for the Company in human rights.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN UNTUK OPERASI YANG ADIL

Corporate Social Responsibility for Fair Operation

Rumusan, Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Operasi yang Adil

Operasi yang adil menegaskan pentingnya pengelolaan Perusahaan sesuai dengan etika bisnis dan etika usaha yang berlaku. Perusahaan memiliki Pedoman Standar Etika Perusahaan (*Code of Conduct*) sebagai komitmen dalam penerapan standar etika usaha yang merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan terhadap operasi yang adil, diantaranya:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan pemangku kepentingan dengan baik.

Pemetaan Risiko dan Dampak Operasi yang Adil dalam Kegiatan Operasi dan Bisnis Perusahaan

Operasi yang adil terutama menekankan pada pentingnya pengelolaan Perusahaan yang transparan, wajar, dan setara, yang memiliki risiko *fraud*. Pemenuhan aspek operasi yang adil melibatkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, meliputi:

- » Pemegang saham dan kepentingannya terhadap pengelolaan Perusahaan yang transparan dan akuntabel.
- » Karyawan yang berkepentingan terhadap Prosedur Tetap yang wajar, adil, dan dengan mekanisme kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
- » Mitra kerja dan pemasok yang memiliki kepentingan terhadap proses kemitraan yang bersandar pada transparansi dan keadilan.
- » Pelanggan dengan kepentingan atas pengelolaan penjaminan kredit yang akuntabel.
- » Regulator yang memiliki kepentingan atas industri penjaminan kredit yang stabil.

Formulation, Commitments and Corporate Social Responsibility Policies towards Fair Operation

Fair operations emphasize the importance of the corporate management in accordance with the prevailing business ethics. The Company already had the Company's Code of Conduct as commitment in the application of business ethics standards which is the way the Company does business in order to realize the Company's commitment to fair operation, including:

1. *Put customer satisfaction as a first priority.*
2. *Applying Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance.*
3. *Always proportionally in the framework of providing high quality services to micro, small, medium enterprises and cooperatives (MSMEs and cooperatives).*
4. *Treat all stakeholders as partners.*
5. *The Company must serve and strive to anticipate the needs of stakeholders well.*

Mapping the Risks and Impacts of Fair Operations in The Company's Operations and Business Activities

Fair operation primarily emphasizes the importance of transparent, fair and equitable management of banks that are at risk of fraud. Fulfillment of aspects of fair operation involves the interests of various stakeholders, including:

- » *Shareholders and their interest in transparent and accountable management of the Bank.*
- » *Employees who are interested in Fixed Procedures that are reasonable, fair, and with accountable working mechanisms.*
- » *Partners and suppliers who have an interest in the partnership process that relies on transparency and fairness.*
- » *Customers with an interest in the accountable management of Third Party Funds.*
- » *Regulators who have an interest in a stable banking industry.*

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Sebagai entitas usaha yang bergerak di sektor keuangan, Jamkrindo memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan operasi yang adil, yang dilandasi pada transparansi dan akuntabilitas. Jamkrindo akan terus melaksanakan kepatuhan disektor keuangan, sembari terus meningkatkan penerapan GCG dengan mengacu pada praktik terbaik.

Penerapan Inisiatif Operasi yang Adil: Program dan Kegiatan yang Dilakukan

Jamkrindo memiliki Tata Kelola Organisasi yang telah menyesuaikan dengan iklim dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris dalam pengelolaan dan pengawasan dijalankan dengan kelengkapan organ pendukung yang dapat memberikan kinerja yang optimal. Jamkrindo juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai forum bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis bagi kinerja keberlanjutan Perusahaan.

Anggaran Dasar, Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Kode Etik, hingga prosedur dan kebijakan lainnya disusun untuk menciptakan operasi yang adil dalam praktik operasi dan bisnis Perusahaan. Jamkrindo berkeyakinan, penerapan GCG yang dilakukan akan terus memperkuat kinerja dan melindungi seluruh insan Jamkrindo dari kemungkinan praktik pengelolaan bisnis yang tidak sehat. Di samping itu, penerapan prinsip GCG seperti yang telah disampaikan dalam keseluruhan bagian Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam laporan tahunan ini akan memperkuat aspek fundamental yang akan berimbas pada nilai positif bagi keberlanjutan Jamkrindo.

Target and Objective of Programs and Activities

As a business entity engaged in the financial sector, Jamkrindo has a high commitment to carry out fair operations, which are based on transparency and accountability. Jamkrindo will continue to implement compliance in the financial sector, while continuously improving the implementation of GCG by referring to best practices.

Implementation of Fair Operations Initiatives: Programs and Activities

Jamkrindo has Organizational Governance that has adapted to the climate and applicable laws and regulations. The duties and authorities of the Board of Directors and Board of Commissioners in managing and supervising the Company are carried out with the completeness of supporting organs that can optimize performance. Jamkrindo also held a General Meeting of Shareholders (GMS) as a forum for shareholders to make strategic decisions for the Company's sustainability performance.

Articles of Association, Good Corporate Governance Guidelines, Code of Conduct, and other procedures and policies are drawn up to create fair operations in the Company's operational practices. Jamkrindo believes, GCG implementation carried out will continue to strengthen the performance and protect all Jamkrindo's employees from unfair business management practices. In addition, the implementation of GCG principles will also strengthen fundamental aspects that will add positive value to Jamkrindo's sustainability.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Operasi yang Adil *Awards and Certifications related to Fair Operations*

Penghargaan Bidang Operasi yang Adil 2020

Fair Operation Award 2020

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Deskripsi Penghargaan <i>Award Description</i>	The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
Pemberi Penghargaan <i>Awardees</i>	Businessnews
Acara/Kegiatan <i>Events/Activities</i>	GRC & Performance Excellence Award 2020
Tanggal Diberikan <i>Date Given</i>	29 Juli 2020 <i>July 29, 2020</i>

Top GRC Awards 2020 #Star4

Deskripsi Penghargaan <i>Award Description</i>	#Star4
Pemberi Penghargaan <i>Awardees</i>	Top Business
Acara/Kegiatan <i>Events/Activities</i>	Top Governance, Risk & Compliance 2020
Tanggal Diberikan <i>Date Given</i>	7 Oktober 2020 <i>October 7, 2020</i>

Sertifikasi Bidang Operasi yang Adil 2020

Fair Operation Certification 2020

Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 *ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification*

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. <i>Certification to take preventive measures to prevent, detect, or overcome bribery occurring within the Company.</i>
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi <i>Issued by</i>	PT SAI Global Indonesia
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Certification Release Date</i>	5 Agustus 2020 <i>August 5, 2020</i>
Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period</i>	4 Agustus 2023 <i>August 4, 2023</i>

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

Corporate Social Responsibility to Environment



Rumusan, Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Lingkungan Hidup

Kepedulian terhadap lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara entitas usaha, masyarakat dan pemerintah, termasuk korporasi seperti Jamkrindo. Walaupun bidang usaha Perusahaan adalah penjaminan kredit, Jamkrindo berkomitmen untuk peduli terhadap lingkungan. Perusahaan memiliki kebijakan untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjaga keaneka ragam hayati.

Kepedulian terhadap lingkungan antara lain diwujudkan melalui Program Bina Lingkungan, seperti pembuatan MCK, penyediaan sarana air bersih, saluran air, pengadaan gerobak dan tong sampah, maupun pelestarian alam dengan melakukan kegiatan penanaman pohon. Selain itu, kepedulian lingkungan juga dilakukan Jamkrindo melalui kebijakan yang berkaitan dengan operasional sehari-hari, antara lain penggunaan kertas, energi, air, pengurangan emisi kendaraan operasional, dan penanganan limbah.

Formulation, Commitments and Corporate Social Responsibility Policies towards Environment

Concern for the environment is a shared responsibility between business entities, the public, and the government; this includes SOEs such as Jamkrindo. Although the Company's business sector is credit guarantee, Jamkrindo is committed to caring for the environment. The Company has the policy to preserve the environment to maintain biodiversity.

Concern for the environment, among others, was realized through the Community Development Program, such as the making of public toilets, provision of clean water facilities, water channels, procurement of trash carts and cans, as well as nature conservation by carrying out tree planting activities. In addition, environmental awareness is also carried out by Jamkrindo through policies relating to daily operations, including paper use, energy, water, reduction of operational vehicle emissions, and waste handling.



Efektivitas dan efisiensi penggunaan energi dan material merupakan salah satu fokus kegiatan Perusahaan terhadap tanggung jawab sosial Perusahaan dalam menjaga kualitas lingkungan. Hal ini juga merupakan bentuk pengimplementasian kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan Lingkungan tersebut merupakan pedoman bagi Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang semakin ramah lingkungan.

Pemetaan Risiko dan Dampak Lingkungan dalam Kegiatan Operasi dan Bisnis Perusahaan

Perusahaan bergerak di bidang penjaminan kredit, sehingga tidak terdapat kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan. Namun demikian, dengan kantor cabang dan kegiatan operasi yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, kegiatan perkantoran Perusahaan berkontribusi terhadap potensi pemakaian sumber daya alam yang berlebihan, seperti energi listrik, air, kertas, maupun limbah perkantoran.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Sebagai pelaku usaha yang memiliki kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, Jamkrindo mendorong program lingkungan melalui efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan operasi perkantoran, seperti air, listrik dan bahan bakar minyak. Di samping, Jamkrindo terus terlibat dalam kegiatan bersama masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Penerapan Inisiatif: Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan

- » Pelestarian Lingkungan Hayati
Jamkrindo mendorong beberapa program pelestarian lingkungan seperti kegiatan kampanye sampah anti plastik di Ciletuh berkolaborasi dengan masyarakat setempat untuk mendukung kawasan Geopark Cilteuh menjadi kawasan hijau dan pelestarian alam. Selain kegiatan tersebut, Jamkrindo juga melaksanakan program penghijauan di kawasan pesisir Pantai Palangpang dengan melakukan penanaman pohon. Jamkrindo juga peduli terhadap sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program pengadaan sumber air bersih di Desa Cidadap, Kab. Sukabumi dan Provinsi Banten.

The effectiveness and efficiency of energy and material use are some of the focuses of the Company's activities towards corporate social responsibility in maintaining environmental quality. This is also a form of implementing the Company's compliance with Law No.32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. The Environmental Policy is a guideline for the Company in carrying out operational activities that are increasingly environmentally friendly.

Mapping the Risks and Impacts of Fair Operations in The Company's Operations and Business Activities

The Company is engaged in credit guarantee, so there are no operations and business activities conducted by the Company that directly impact the environmental damage. However, with branch offices and operating activities spread across various regions in Indonesia, the Company's office activities contribute to the potential for excessive use of natural resources, such as electrical energy, water, paper, and office waste.

Target and Objective of Programs and Activities

As a business actor that has branch offices spread across various regions in Indonesia, Jamkrindo encourages environmental programs through the effectiveness and efficiency of the use of natural resources in office operations, such as water, electricity and fuel oil. In addition, Jamkrindo continues to engage in joint community activities in environmental conservation.

Implementation of Initiatives: Programs and Activities Conducted Regarding Corporate Social Responsibility to the Environment

- » *Environmental Conservation*
Jamkrindo encourages several environmental conservation programs such as anti-plastic waste campaigns in Ciletuh in collaboration with local communities to support the Cilteuh Geopark area into a green area and nature conservation. In addition to these activities, Jamkrindo also carry out greening programs in the coastal area of Palangpang Beach by planting trees. Jamkrindo also cares to good quality water resources and can be utilized by the community through the program of procurement of clean water resources in Cidadap, Sukabumi and Banten Provinces.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang asri, Jamkrindo melaksanakan kegiatan pelatihan hidroponik di Desa Cikidang, Kab. Sukabumi untuk mendorong perekonomian daerah tersebut serta menciptakan pemberdayaan masyarakat sekitar dalam pemanfaatan lahan kosong/pekarangan sebagai sumber ketahanan pangan dan pendapatan keluarga.

In an effort to create a beautiful environment, Jamkrindo conducted hydroponic training activities in Cikidang Village, Sukabumi District to boost the economy of the area and create empowerment of the surrounding community in the use of vacant land/yard as a source of food security and family income.

» **Penggunaan Material dan Energi dalam Operasional dan Usaha**

- **Penggunaan Kertas**
Dalam penggunaan kertas, Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan dengan cara lebih banyak menggunakan surat elektronik atau email dalam menyampaikan informasi. Penghematan kertas juga dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat, atau jika memungkinkan mencetak naskah dalam kertas bolak-balik.
Pengecekan naskah secara paripurna sebelum dicetak agar terhindarkan dari kesalahan juga mendapat perhatian. Dengan demikian, pencetakan ulang yang memboroskan kertas bisa dihindarkan. Penghematan penggunaan kertas penting dilakukan karena Jamkrindo menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagai bahan baku kertas.

» **The Use of Materials and Energy in Operations and Businesses**

- **Use of Paper**
In the use of paper, Jamkrindo has a savings policy by using more e-mail in delivering information. Paper saving is also done through the use of used paper for letter draftings, or if possible print the manuscript on the back and the front side of the paper.

Paper saving is also done by checking the full text before printing so that printing mistakes can be avoided. With this, the act of reprinting that wastes paper can be avoided. The savings in the use of paper are important because Jamkrindo realizes that paper making is identical to the cutting and utilization of trees as paper raw material.

Pada tahun 2020, jumlah penggunaan kertas Jamkrindo mencapai 1.185 rim, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang membutuhkan kertas sebanyak 1.150 rim. Meningkatnya penggunaan kertas di tahun 2020 ini seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan di tahun 2020. Dengan penggunaan sebanyak itu, rasio penggunaan kertas tahun 2020 adalah 3,96 rim per karyawan, turun dibanding rasio penggunaan kertas tahun 2019 yakni 4,26 rim per karyawan. Adapun limbah kertas diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dalam operasional sehari-hari, Perusahaan tidak menggunakan kertas hasil daur ulang tersebut.

In 2020, the number of paper used for Jamkrindo's operations reached 1,185 reams or an increase if compared to 2019 which required 1,150 reams of paper. This increase in line with the increasing number of employees in 2020. With that much use, the ratio of paper used in 2020 is 3.96 reams per employee; this was a decrease when compared to the ratio of paper use in 2019, which was 4.26 reams per employee. The paper waste is handed over to third parties for recycling. In daily operations, the Company does not use recycled paper.

Penggunaan Kertas Paper Usage	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Volume (rim) Volume (ream)	1.185	1.150	35	3,04%
Rasio penggunaan kertas (rim/karyawan) Paper usage ratio (ream/employee)	3,96 (299 karyawan) employee	4,26 (277 karyawan) employee	(0,30)	(7,04%)



Jumlah Material Kertas dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (rim)

Amount of Paper Use in Operational and Business Activities 2016-2020 (ream)



- Penggunaan Energi Listrik

Perusahaan menggunakan listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional. Untuk penggunaan energi listrik, Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan, di antaranya, dengan mengganti lampu perkantoran dengan lampu hemat energi, serta melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur. Perusahaan juga memastikan bahwa semua alat elektronik telah dimatikan saat karyawan usai bekerja dan keluar dari ruangan. Penghematan penggunaan listrik penting dilakukan karena Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan energi listrik di Indonesia masih terbatas.

Total penggunaan energi listrik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.604,95 kWh, menurun jika dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 2.608,38 kWh. Penurunan penggunaan listrik tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem kerja karyawan pada kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *work from home* (WFH)/ *work form office* (WFO). Dengan penggunaan listrik sebesar itu, rasio per karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar 4,36 kWh, turun dibanding rasio tahun 2019, yakni 6,57 kWh per karyawan.

- Use of Electric Energy

The Company uses electricity sourced from the National Electricity Company (PLN) as an energy source for the Company's operational activities. For the use of electrical energy, Jamkrindo has an energy saving policy, among others, by replacing office lights with energy saving lamps, as well as making efficient working hours by reducing overtime. The Company also ensures that all electronic devices have been turned off when employees finish working and leave the room. Savings in electricity use is important because Jamkrindo realizes that the availability of electricity in Indonesia is still limited.

The total electricity usage in 2020 was recorded at 1,604.95 kWh, or a decrease when compared to 2019 usage of 2,608.38 kWh. The decrease was due to changes in the employee's work system in the condition of the COVID-19 pandemic, namely to work from home (WFH)/work form office (WFO). With that much electricity usage, the ratio per employee in 2020 was 4.36 kWh, a decrease from the 2019 ratio of 6.57 kWh per employee.

Penggunaan Energi Listrik Use of Electric Energy	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Volume (kWh) Volume (kWh)	1.604,95	2.608,38	(1003,43)	-38,47% ▼
Rasio konsumsi energi listrik (kWh/pengguna Gedung*) The Ratio of Electricity Usage per Employee (kWh/building users)	3,60 Kwh/ Karyawan employee	5,49 Kwh/ Karyawan employee	(1,89) Kwh/ Karyawan employee	-34,42% ▼

*catatan : pengguna gedung terdiri dari karyawan, manajemen building, dan pengguna gedung lainnya

*note: building users consist of employees, building management, and other building users

Penggunaan Volume Energi Listrik dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (kWh)

Use of Electrical Energy in Operational and Business Activities 2016-2020 (kWh)



- Penggunaan Air

Air merupakan salah satu elemen alam yang bermetamorfosa melalui proses alami. Penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari, terutama air yang bersumber dari tanah di wilayah perkotaan, berdampak langsung terhadap kualitas tanah dan air di wilayah tersebut

Untuk penggunaan air, Jamkrindo memanfaatkan air dari PDAM dan tidak menggunakan air tanah. Pada tahun 2020, volume penggunaan air tercatat sebesar 10.448,20 meter kubik, turun dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 14.059,70 meter kubik. Penurunan penggunaan air tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem kerja karyawan di kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *work from home* (WFH)/*work form office* (WFO).

- Use of Water

Water is one of the natural elements that metamorphoses through natural processes. The use of water in everyday life, especially water sourced from land in urban areas, has a direct impact on the quality of land and water in the region.

For water use, Jamkrindo uses water from PDAM and does not use groundwater. In 2020, the volume of water use was recorded at 10,448.20 cubic meters, a decrease from 14,059.70 cubic meters in 2019. This decrease was due to changes in the employee's work system in the condition of the COVID-19 pandemic, namely to work from home (WFH)/work form office (WFO).



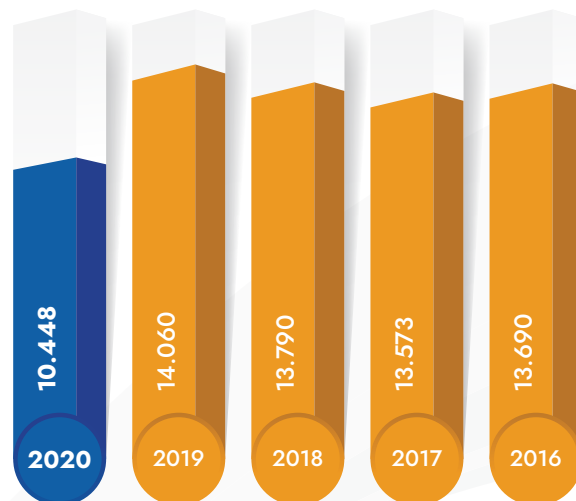
Upaya Jamkrindo untuk menghemat penggunaan air adalah melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur, serta secara rutin melakukan pengecekan instalasi air dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan kebocoran. Adapun rasio penggunaan air per karyawan pada tahun 2020 adalah 23,42 meter kubik per karyawan, turun dibanding rasio tahun 2019, yang tercatat sebesar 29,60 meter kubik per karyawan.

The efforts of Jamkrindo to conserve water use are to make working hours efficient by reducing overtime, and routinely checking water installations and making repairs if damage causing leaks is found. The ratio of water use per employee in 2020 was 23.42 cubic meters, a decrease from the ratio in 2019, which was recorded at 29.60 cubic meters per employee.

Konsumsi Air Water Consumption	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah Total	Persentase Percentage
Volume (m ³) Volume (m ³)	10.448,20	14.059,70	(3611,50)	(25,68%)
Rasio penggunaan air per karyawan (m ³ /karyawan) Ratio of Water Consumption per Employee (m ³ /employee)	23,42 m ³ /karyawan employee	29,60 m ³ /karyawan employee	(6,18) m ³ /karyawan employee	(20,87%)

Penggunaan Volume Air dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (m³)

Water Consumption in Operational and Business Activities 2016-2020 (m³)



» Penanganan Emisi

Kepedulian Jamkrindo terhadap lingkungan juga ditunjukkan dengan upaya mengurangi emisi udara melalui peremajaan mobil operasional. Pada tahun 2017, Kantor Pusat melakukan peremajaan mobil sebanyak 2 (dua) buah dari total mobil operasional sebanyak 17 buah. Sementara pada tahun 2018 - 2020 tidak dilakukan pengadaan mobil operasional baru, melainkan sesuai kebutuhan dilakukan pengadaan mobil dengan metode sewa dengan memperhatikan tahun mobil dengan keluaran terbaru.

» Emission Management

Jamkrindo's concern for the environment is also shown by its efforts to reduce air emissions through the rejuvenation of operational cars. In 2017, the Head Office rejuvenated 2 (two) cars from a total of 17 operational cars. While in 2018-2020, the Company does not conduct the procurement of new operational cars, but the Company conducts the procurement of cars with the rental method as needed by considering to the year of the car with the latest model.

Pengurangan emisi udara juga dilakukan Jamkrindo dengan melakukan penyewaan mobil keluaran terbaru dari pihak ketiga untuk Direksi dan Kepala Divisi, serta melakukan penyewaan mobil sesuai dengan keperluan (insidental).

Upaya pengurangan emisi lain yang dilakukan Jamkrindo berkaitan dengan emisi bahan perusak ozon (BPO). Dalam hal ini, Perusahaan berkomitmen untuk mengganti refrigeran (zat pendingin) AC yang ramah lingkungan.

Pengurangan emisi bahan perusak ozon patut didukung karena menipisnya lapisan ozon menyebabkan meningkatnya radiasi ultraviolet matahari, terutama UV-B yang mampu mencapai permukaan bumi. Kondisi tersebut memiliki berbagai dampak pada kesehatan tubuh manusia.

» **Penanganan Limbah**

Dalam operasional sehari-hari, Jamkrindo menghasilkan limbah berupa sampah dan limbah dari WC. Untuk penanganan sampah, Perusahaan menyediakan cukup tempat sampah, selanjutnya sampah tersebut dibuang ke tempat pembuangan akhir bekerjasama dengan dinas kebersihan. Adapun limbah dari WC, akan dilakukan penyedotan melalui kerja sama dengan pihak ketiga atau dinas kebersihan.

Di samping itu, Gedung Jamkrindo telah dilengkapi dengan sistem pengolahan air limbah yang terletak di lantai B1 dan B2, dan mesin-mesin pengolahan tersebut dikelola dengan perawatan rutin oleh Badan Pengelola Gedung dan kerja sama pihak ketiga dengan menggunakan jasa service Sewage Treatment Plan (STP). Mesin tersebut berfungsi untuk mengolah air kotor yang dihasilkan oleh gedung Jamkrindo menjadi air dengan kadar racun dan limbah yang layak untuk dibuang di saluran air kotor kota Jakarta.

» **Jamkrindo Go Green Lifestyle**

Berdasarkan memorandum Divisi MSDM No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 tanggal 5 Februari 2020, perihal Program "Jamkrindo Go Green Lifestyle", maka Jamkrindo melaksanakan kegiatan "Jamkrindo Go Green Lifestyle" yang mana di dalamnya terdapat upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan, seperti di antaranya:

1. Mengurangi Penggunaan Air dalam Kemasan Plastik
2. Meniadakan Penyediaan Air Minum Kemasan Plastik Dan Hanya Menyediakan Air Minum Isi Ulang
3. Memberikan Fasilitas Berupa Tumbler Sebagai Wadah Air Minum Di Kantor

Air emission reduction is also carried out by Jamkrindo by leasing the latest car from third parties for Directors and Head of Divisions, as well as car rental according to necessity (incidental).

Other emission reduction efforts carried out by Jamkrindo is related to emissions of ozone-depleting substances (ODS). In this case, the Company is committed to replacing air-conditioning refrigerants to those that are environmentally friendly.

Reduction of ozone-depleting substances emissions should be supported because the depletion of the ozone layer causes increased the sun's ultraviolet radiation, especially UV-B that can reach the surface of the earth. This condition has various effects on the health of the human body.

» **Waste Management**

In its daily operations, Jamkrindo produces waste in the form of garbage and waste from toilets. For waste management, the Company provides enough rubbish bins; the waste is then disposed to the final disposal site in collaboration with the sanitation department. As for the waste from the toilet, desludging is carried out through cooperation with third parties or the sanitation service.

In addition, Jamkrindo Building has been equipped with wastewater treatment system located on the B1 and B2 floors, and the processing machines are managed with regular maintenance by the Building Management Agency and third-party cooperation using sewage treatment plan (STP) services. The machine serves to process dirty water produced by jamkrindo building into water with toxic and waste levels that are eligible to be disposed of in the dirty waterways of Jakarta.

» **Jamkrindo Go Green Lifestyle**

Based on the memorandum of MSDM Division No. B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 dated February 5, 2020, regarding the Jamkrindo Go Green Lifestyle Program, Jamkrindo carried out "Jamkrindo Go Green Lifestyle" activities in which there are efforts to maintain environmental sustainability, such as:

1. *Reduce The Use of Water in Plastic Packaging*
2. *Eliminating The Provision of Plastic Bottled Drinking Water And Only Providing Refillable Drinking Water*
3. *Provide Facilities In the Form of Tumblers As Containers of Drinking Water In the Office*



Kepatuhan

Upaya dan kesungguhan Jamkrindo untuk kepedulian lingkungan, termasuk melalui berbagai kebijakan yang berkaitan dengan operasional keseharian, membuahkan hasil dengan tidak adanya denda moneter maupun sanksi lain sepanjang tahun 2020. Hal itu tak lepas dari kepatuhan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan lainnya selama menjalankan usaha.

Pengaduan Masalah Lingkungan

Meskipun rantai pasokan dan model bisnis Perusahaan tidak berhubungan langsung dengan lingkungan, Jamkrindo membuka saluran untuk pengaduan terkait potensi adanya pelanggaran lingkungan yang dilakukan, yang dapat disampaikan melalui email contact@jamkrindo.co.id. Pada tahun 2020, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan terkait masalah lingkungan dari area sekitar Gedung Jamkrindo..

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Lingkungan

Di tahun 2020 Perusahaan belum mendapatkan penghargaan dan sertifikasi terkait lingkungan.

Biaya dan/atau Investasi Tanggung Jawab Sosial Aspek Lingkungan

Pada tahun 2020 Jamkrindo telah mengeluarkan biaya dan investasi dalam bidang lingkungan sebesar Rp945,69 juta, dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Descriptions	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Penyerapan Anggaran 2020 (%) Budget Absorption 2020 (%)	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) Realization 2020 To Realization 2019 (%)
	1	2	(1:2)	3	(1:3)
Biaya Perawatan Lift Elevator Maintenance Fee	130,75	151,80	86,13% ▼	118,54	110,30% ▲
Biaya Perawatan Taman Garden Maintenance Fee	296,87	310,99	95,46% ▼	263,45	112,69% ▲
Biaya Sewage Treatment Plan Sewage Treatment Plan Fee	105,60	124,20	85,02% ▼	102,74	102,78% ▲
Biaya Sistem Pendingin Gedung Building Cooling System Cost	412,48	469,20	87,91% ▼	357,00	115,54% ▲
Jumlah Total	945,69	1056,19	89,54% ▼	841,73	112,35% ▲

Compliance

Jamkrindo's efforts and seriousness for environmental concern, including through various policies related to daily operations, resulted in zero sanctions in which the Company did not find any monetary fines or other sanctions throughout 2020. That is due to the Company's compliance with other environmental laws and regulations during the business.

Complaints on Environmental Issues

Although the Company's supply chain and business model are not directly related to the environment, Jamkrindo opens channels for complaints regarding potential environmental violations committed, which can be conveyed via email contact@jamkrindo.co.id. In 2020, the Company did not find any complaints related to environmental issues from the area around Jamkrindo Building.

Environmental Awards and Certifications

In 2020 the Company has not received environmentally related awards and certifications.

Costs and/or Investment of Corporate Social Responsibility for Environmental Aspects

In 2020 Jamkrindo has incurred costs and investments in the environmental sector of IDR945.69 million, with details as follows.



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Corporate Social Responsibility Related Employment, and Occupational Health, and Safety



Rumusan, Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perusahaan memandang pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama dari seluruh dimensi operasional dan bisnis yang dijalankan. Kehadiran Jamkrindo di bidang penjaminan kredit tidak sekedar mencari profit. Lebih dari itu, Perusahaan memiliki tekad yang kuat agar keberadaannya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi para pemangku kepentingan, termasuk bagi karyawan, manajemen, dan masyarakat di sekitar wilayah perusahaan beroperasi. Dalam hal ini, Jamkrindo meyakini bahwa semakin besar manfaat sosial dan kemasyarakatan yang diberikan oleh Perusahaan, maka hal itu akan berdampak positif pada keberlanjutan usaha di masa-masa mendatang.

Formulation, Commitments and Corporate Social Responsibility Policies towards Employment, and Occupational Health, and Safety

The Company considers the importance of Human Resources (HR) as the main foundation of all operational and business dimensions. The presence of Jamkrindo in the field of credit guarantee is not just for profit. More than that, the Company is determined that its existence will bring the greatest benefit to stakeholders, which includes its employees, management, and the communities around the Company's area of operation. In this case, Jamkrindo believes that the greater the social and community benefits provided by the Company, the more positive the impact on the sustainability of the business in the future.



Pemetaan Risiko dan Dampak Ketenagakerjaan dan K3 dalam Kegiatan Perusahaan

Sebagai salah satu pemangku kepentingan yang bertalian erat dengan kegiatan operasi dan bisnis yang dilakukan Perusahaan, Jamkrindo memperhitungkan risiko yang dapat terjadi kepada karyawan, baik risiko usaha yang dihadapi Perusahaan yang akan berdampak terhadap kesejahteraan karyawan, risiko aktualisasi diri dari karyawan saat bekerja dalam proses bisnis dan Prosedur Tetap yang diterapkan Perusahaan, hingga risiko K3 terkait kecelakaan kerja.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

SDM merupakan salah satu pilar terpenting dalam mendukung pencapaian strategi bisnis yang telah ditetapkan Jamkrindo. Oleh karena itu, Perusahaan secara serius menempatkan SDM sebagai mitra strategis dalam menjalankan kegiatan usaha. Strategi pengelolaan SDM diarahkan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki dalam merespon tantangan dan menyesuaikan diri terhadap tuntutan industri serta perkembangan usaha Perusahaan dalam mencapai pertumbuhan kinerja yang berkelanjutan.

Di setiap tahunnya, Jamkrindo melakukan evaluasi dan perbaikan serta peningkatan pengelolaan SDM secara menyeluruh mulai dari penetapan kebijakan strategis, pengembangan organisasi, rekrutmen tenaga kerja, pelatihan dan pengembangan kompetensi, pengembangan karir, penerapan sistem remunerasi berbasis penilaian kinerja, hingga program pensiun.

Jamkrindo juga mengevaluasi efektivitas organisasi secara berkelanjutan dengan memperhatikan pedoman organisasi yang ditetapkan sebagai upaya dalam menunjang implementasi strategi bisnis, merespons perubahan serta perkembangan pasar. Perusahaan telah melakukan peninjauan secara terstruktur dan komprehensif terhadap beberapa organisasi unit bisnis sesuai kebutuhan usaha.

Penerapan Inisiatif: Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

- Pernyataan Persamaan Hak
Jamkrindo memperlakukan setiap karyawan dengan adil dan objektif. Setiap karyawan memiliki hak asasi yang sama dan mengemban kewajiban sesuai dengan level jabatan. Hak dan kewajiban karyawan tertera dalam Peraturan Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan.

Mapping the Risks and Impacts of Employment and OHS in the Company Activities

As one of the stakeholders closely related to the company's operations and business activities, Jamkrindo takes into account the risks that can occur to employees, either business risks faced by the Company that will impact on employee welfare, the risk of self-actualization of employees while working in business processes and Permanent Procedures implemented by the Company, to OHS risks related to work accidents

Target and Objective of Programs and Activities

Human Resources (HR) as one of the most important elements in supporting the achievement of business strategy defined by Jamkrindo. Therefore, the Company seriously places HR as a strategic partner in carrying out business activities. HR management strategy is directed by exerting all the capabilities at its disposal in responding to challenges and adjusting to the industry demands and the company's business development in achieving sustainable performance growth.

Every year, Jamkrindo evaluates and improves the overall management of human resources ranging from strategic policy setting, organizational development, employee recruitment, training and competency development, career development, implementation of performance assessment-based remuneration systems, to pension programs.

Jamkrindo also evaluates the effectiveness of the organization on an ongoing basis by considering to the organizational guidelines set as an effort to support the implementation of business strategies, respond to changes and market developments. The Company has conducted a structured and comprehensive review of several business unit organizations according to business needs.

Implementation of Initiatives: Programs and Activities Conducted Related to Corporate Social Responsibility for Employment, Health and Safety

- Equal Rights Statement
Jamkrindo treats every employee fairly and objectively. Each employee has the same basic rights and has obligations in accordance with the level of office. The rights and obligations of employees are stated in the Company's Regulations and have been disseminated to all employees.

Jamkrindo berkomitmen dengan mewujudkan kesejahteraan karyawan baik selama aktif di Jamkrindo maupun di masa pensiun. Sebagai wujud komitmen tersebut, Jamkrindo menyusun standar minimum upah karyawan dengan mengacu pada Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah disesuaikan dengan wilayah kerja di mana Jamkrindo melakukan kegiatan usahanya.

- **Perencanaan dan Strategi Pengembangan SDM**
Sebagai aset utama, Perusahaan berkomitmen untuk mengembangkan SDM secara berkesinambungan. Jamkrindo menyadari, kesuksesan dan keberlanjutan bisnis Perusahaan sangat ditentukan oleh ketersediaan SDM, baik dari sisi pengelolaan internal maupun memenuhi kebutuhan pasar. Perencanaan dan strategi pengembangan SDM merupakan fungsi utama yang dilaksanakan Jamkrindo untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai posisi, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat.

Tujuan perencanaan dan strategi pengembangan SDM adalah:

1. Menentukan kualitas dan kuantitas karyawan yang akan mengisi semua jabatan dalam Perusahaan.
2. Menjamin tersedianya tenaga kerja masa kini maupun masa depan, sehingga setiap pekerjaan dapat terselesaikan.
3. Menghindari terjadinya miss management dan tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.
4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga diharapkan produktivitas kerja meningkat.
5. Menghindari kekurangan atau kelebihan karyawan.
6. Menjadi pedoman dalam menetapkan program rekrutmen, seleksi, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan kedisiplinan, serta pemberhentian karyawan.
7. Menjadi pedoman dalam melaksanakan mutasi (*vertical* atau *horizontal*) dan pensiun karyawan.
8. Menjadi dasar dalam melakukan penilaian pegawai.

Perusahaan terus berupaya menerapkan strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi yang diawali dengan telah tersusunnya direktori kompetensi dan kebutuhan jabatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja Perusahaan pada RKAP 2020 dan RJPP 2020-2024. Upaya ini bertujuan untuk menempatkan posisi seorang karyawan pada tempat atau jabatan yang sesuai dengan kualitas kemampuannya.

Dalam rangka pengelolaan SDM yang lebih profesional, Perusahaan telah melakukan perubahan-perubahan kebijakan pengelolaan SDM sesuai praktik-praktik terbaik

Jamkrindo is committed to realizing employee welfare both during active in Jamkrindo and in retirement. As a form of such commitment, Jamkrindo compiled a minimum standard of employee wages by referring to the Regional Minimum Wage (UMR) set by the government in accordance with the working area in which Jamkrindo conducts its business activities.

- **HR Development Planning and Strategy**
As a major asset, the Company is committed to developing HR on an ongoing basis. Jamkrindo realizes that the success and sustainability of the Company's business are largely determined by the availability of HR, be it in terms of internal management and meeting market needs. HR planning and development strategies are the main functions carried out by Jamkrindo to ensure the distribution of the workforce on the right job and at the right time to occupy various positions.

The objectives of HR planning and development strategies are:

1. *To determine the quality and quantity of employees who will fill all positions in the Company.*
2. *To ensure the availability of current and future labor, so that every work can be completed.*
3. *To avoid the occurrence of mismanagement and overlap in the execution of tasks.*
4. *To facilitate coordination, integration, and synchronization to increase work productivity*
5. *To avoid employee shortages or excess*
6. *To become a guideline in establishing programs for recruitment, selection, development, compensation, integration, maintenance, discipline, as well as the dismissal of employees.*
7. *To become a guideline in carrying out mutations (vertical or horizontal) and employee retirement.*
8. *To become the basis for evaluating employees.*

The company continues to implement a competency-based HR development strategy which begins with the compilation of directories of competencies and job requirements as stated in the Company's work plan for the 2020 RKAP and 2020-2024 RJPP. This activity is aimed to distribute the position of an employee in a place or position that is in accordance with the quality of his ability.

In the framework of more professional management of human resources, the Company has made changes to HR management policies in accordance with best practices. In



(best practice). Pada tahun 2020, strategi utama bidang SDM adalah peningkatan produktivitas karyawan melalui peningkatan kompetensi, penyempurnaan sistem penilaian kinerja, sistem penggajian, peningkatan kedisiplinan dan peningkatan engagement karyawan.

Berikut program-program strategis bidang SDM untuk peningkatan produktivitas tersebut di atas:

1. Mengembangkan Smart Organization

Salah satu program kerja Divisi MSDM di Tahun 2020 yaitu mengembangkan Smart Organization. Tujuan dari program ini adalah untuk menumbuhkan budaya inovasi dan menciptakan smart worker ditengah-tengah Perusahaan. Berikut adalah program-program yang dilaksanakan dalam rangka mengembangkan smart organization:

2020, the main strategy in the HR sector was to increase employee productivity through increasing competence, improving the performance appraisal system, payroll system, improving discipline, and increasing employee engagement.

The followings are the HR division strategic programs to increase the productivity mentioned above:

1. Developing Smart Organization

One of the work programs of HR Management Division in 2020, namely developing Smart Organization. The purpose of this program is to foster a culture of innovation and create smart workers amidst the Company. The following programs are implemented in order to develop smart organizations:

No.	Program	Kegiatan yang dilaksanakan Activities
1	Mengembangkan Program ToT (Analisa Kredit, Finon (Laporan Keuangan Tingkat Dasar), Penjaminan, Suretyship, Legal for non Legal, Klaim, Machine Learning, Managing People) <i>Developing ToT (Credit Analysis, Finon (Basic Financial Report), Guarantee, Suretyship, Legal for non Legal, Claims, Machine Learning, Managing People)</i>	<ul style="list-style-type: none"> ToT Analisa Kredit Batch 2 ToT Penjaminan Modul 2 ToT Machine Learning Angkatan 1 dan Angkatan 2 ToT Managing People ToT Credit Analysis Batch 2 ToT Guarantee Module 2 ToT Machine Learning Class Batch 1 and 2 ToT Managing People
2	Pembekalan dan Sertifikasi keahlian sesuai POJK dan lainnya: MR, Penjaminan, Auditor dan MSDM, Pendamping UMKM, Investasi, Hukum <i>Training and Certification of expertise under POJK and others: MR, Guarantee, Auditor and HR Management, MSME Mentoring, Investment, Legal</i>	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi MR Modul 1&2 (Lanjutan Program 2019) <i>MR Module 1&2 Certification (Continuous Program 2019)</i> Pembekalan sertifikasi penjaminan untuk karyawan di bagian Operasional melalui program mentoring Analisa Kredit dan Finon oleh ToT Angkatan (Lanjutan Program 2019) <i>Training on guarantee certification for employees in Operations through Credit Analysis and Finon mentoring program by ToT in each batch (Continuous Program 2019)</i>
3	Melakukan Leadership Development Program ke seluruh level jabatan <i>Conduct leadership development programs to all levels of positions</i>	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengembangan L1: Jamkrindo Executive Development Program (DDI) dan Business Leader Development Program (Prasetiya Mulya), Business Presentation, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 <i>Jamkrindo Executive Development Program (DDI) and Business Leader Development Program (Prasetiya Mulya), Business Presentation, Level 3 Risk Management Certification</i> Program Pengembangan L2: Branch Manager Development Program, Business Presentation, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 <i>Branch Manager Development Program, Business Presentation, Level 3 Risk Management Certification</i> Program Pengembangan L3: Managing People, Business Presentation, Sertifikasi Manajemen Risiko Level 2 <i>Managing People, Business Presentation, Level 2 Risk Management Certification</i> Program Pengembangan L4: Selling Skill: Sales Mastery, Business Presentation, Sertifikasi Pendampingan UMKM <i>Selling Skill: Sales Mastery, Business Presentation, MSME Mentoring Certification</i>

No.	Program	Kegiatan yang dilaksanakan Activities
4	<p>Pengembangan KM Lanjutan: <i>Advanced KM Development:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jamkrindo Search Engine <i>Jamkrindo Search Engine</i> Mengembangkan Community of Practice (CoP) <i>Developing Community of Practice (CoP)</i> Meningkatkan Eksternalisasi Tacit Knowledge (Best Practice & Lesson Learned) <i>Improved Externalization of Tacit Knowledge (Best Practice & Lesson Learned)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Case Study Analisa Penjaminan ToT Angkatan 1 <i>Case Study of Guarantee Analysis for ToT batch 1</i> Case Study Analisa Penjaminan ToT Angkatan 2 <i>Case Study of Guarantee Analysis for ToT batch 2</i> Peningkatan Eksternalisasi Tacit Knowledge dengan Sharing Knowledge dan Studi Kasus sebanyak 1239 orang. <i>Improved Externalization of Tacit Knowledge with Sharing Knowledge and Case Studies of 1239 people.</i>
5	<p>Mengembangkan Culture Inovasi: <i>Developing Culture of Innovation:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Kebijakan Manajemen Inovasi <i>Developing Innovation Management Policy</i> Internal Problem Solving Competition Kompetisi Proses Bisnis Efektif dan Efisien (Continuous Improvement Program) <i>Effective and Efficient Business Process Competition (Continuous Improvement Program)</i> Keikutsertaan pada MAKE Award (Kompetisi KM) <i>Participation in MAKE Award (KM Competition)</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Kompetisi Millenial Innovation Summit yang Diadakan oleh Kementerian BUMN <i>Millenial Innovation Summit Competition Held by the Ministry of SOEs</i> Ide Inovasi Bisnis Model melalui Machine Learning untuk Level L1, L2, L3, dan ODP <i>Business Model Innovation Ideas through Machine Learning for L1, L2, L3, and ODP Levels</i> Project Assignment Proses Bisnis ODP <i>Project Assignment of Business Process ODP</i> Kompetisi Perbaikan Proses Bisnis dan Problem Solving PMMB <i>Business Process Improvement Competition and PMMB Problem Solving</i>
6	<p>Melaksanakan Program Pelatihan Reguler <i>Implementing Regular Training Programs</i></p>	<p>Jumlah Pelatihan In Class (Tatap Muka) sebanyak 29 Pelatihan, Jumlah Distance Learning sebanyak 179 Pelatihan <i>Number of In Class (Face-to-Face) Training as many as 29 Trainings, Total Distance Learning as many as 179 Training</i></p>

2. Harmonisasi Kebijakan – Kebijakan Bidang SDM
Harmonisasi Kebijakan – Kebijakan SDM dilakukan terkait dengan :
- Perubahan Badan Hukum Perusahaan.
 - Perkembangan Perusahaan.
 - Holding Perusahaan.
- Berikut adalah peraturan bidang SDM yang telah dilakukan harmonisasi:

2. *Harmonization of Policies – HR Policies*
Harmonization of HR Policies are related to:
- Changes in Corporate Legal Entity.*
 - The Company's Development.*
 - Holding company.*
- Harmonization of HR Policies are as follow:*

No.	Ketentuan Policies	Perihal Subject
1	Perdir <i>Board of Director's Regulations</i>	Pedoman Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia <i>Human Resource Management Policy Guidelines</i>
2	Perdir <i>Board of Director's Regulations</i>	Sanksi Pelanggaran Peraturan Perusahaan <i>Sanctions Violations of Company Regulations</i>
3	Surat Edaran <i>Circular Letter</i>	Rekrutmen Karyawan <i>Employee Recruitment</i>
4	Surat Edaran <i>Circular Letter</i>	Talent Management
5	Surat Edaran <i>Circular Letter</i>	Pengembangan dan Pelatihan Karyawan (termasuk kamus kompetensi) <i>Employee Development and Training (including competency dictionary)</i>
6	Surat Edaran <i>Circular Letter</i>	Pelayanan Karyawan <i>Employee Service</i>
7	Surat Edaran <i>Circular Letter</i>	Ketentuan Pejabat Penjabat (Pj), Plt dan Plh <i>Provisions of Acting Officials (Pj), Plt and Plh</i>
8	Surat Edaran <i>Circular Letter</i>	Honorarium Kepanitiaan <i>Honorarium of The Committee</i>

No.	Ketentuan Policies	Perihal Subject
9	Surat Edaran Circular Letter	Pengelolaan KKWT KKWT Management
10	Surat Edaran Circular Letter	Pengelolaan Outsourcing Outsourcing Management
11	Surat Edaran Circular Letter	Perjalanan Dinas Direksi dan Karyawan Official Travel for Board of Directors and Employees
12	Surat Edaran Circular Letter	Detasering Detachment

3. Membangun Employee Value Propositions

Sasaran dari program ini adalah

- a. Meningkatkan Engagement Karyawan
- b. Branding HR Perusahaan
- c. Sarana Talent Mapping

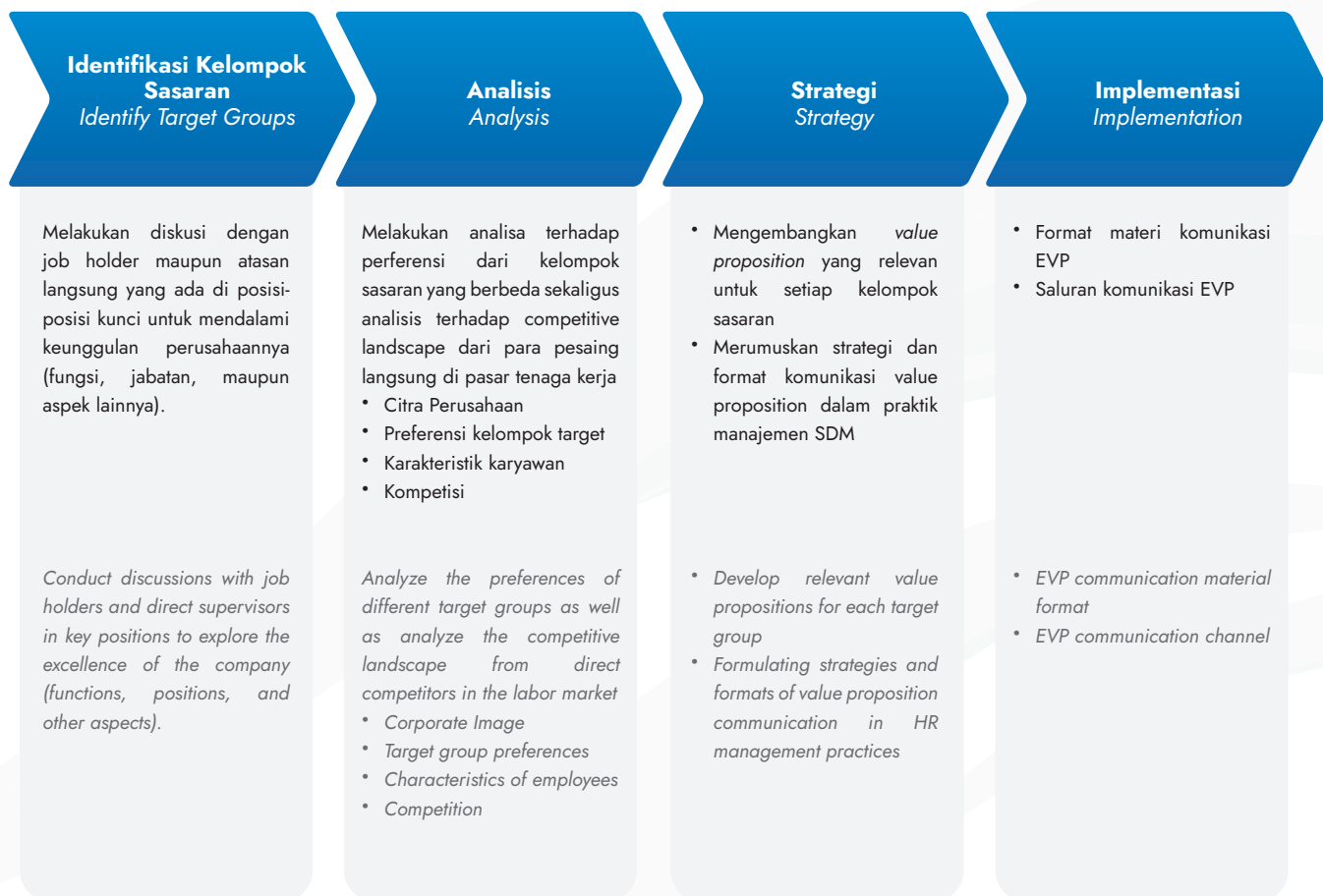
Program ini sejalan dengan SE Kementerian BUMN Nomor : SE-11/MBU/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Employee Value Proporsition dan Employer Branding BUMN. Employee Value Proposition (EVP) meliputi Learn, Grow and Contribute to Indonesia. Sebagai tandak lanjut dari EVP maka Divisi MSDM mengimplementasikan EVP BUMN melalui Employer Branding dalam berbagai kegiatan yang relevan. Berikut adalah rencana strategi pengembangan dan rencana implementasi Employee Value Proposition (EVP):

3. Developing Employee Value Propositions

The objectives of this program are

- a. Improve Employee Engagement
- b. Corporate HR Branding
- c. Talent Mapping Facilities

This program is in line with the Ministry of SOEs Circular Letter Number: SE-11/MBU/08/2020 dated August 26, 2020 concerning Employee Value Proporsition and Employer Branding of SOEs. Employee Value Proposition (EVP) includes Learn, Grow and Contribute to Indonesia. As a follow-up to EVP, HR Management Division implements EVP of SOEs through Employer Branding in various relevant activities. The following of development strategy plan and Employee Value Proposition (EVP) implementation:



4. Mengembangkan Kebijakan dan System Talent Management

Sasaran dari program tersebut adalah Mempersiapkan dan mengembangkan calon pemimpin unit kerja dan Perusahaan sesuai best practice untuk keberlanjutan Perusahaan :

- a. Pengelolaan talent secara sistematis.
- b. Menjaga konsistensi & objektivitas pemilihan talent.
- c. Pengelolaan talent terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, kompetensi & program pengembangan karyawan.
- d. Retensi talent Perusahaan.
- e. Proses pengambilan keputusan promosi dan mutasi lebih efektif dan efisien.

Program yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Pengembangan Aplikasi Integrated Talent Management System
- b. Pembentukan pedoman strategis Aplikasi Integrated Talent Management System

5. Meningkatkan Engagement Karyawan

4. Develop Talent Management Policies and Systems

The objective of this program is to prepare and develop prospective leaders of the work unit and the Company in accordance with best practices for the Company's sustainability:

- a. *Systematic talent management.*
- b. *Maintain consistency & objectivity of talent selection.*
- c. *Talent management is integrated with performance assessment system, competency & employee development program.*
- d. *Retention of the Company's talents.*
- e. *Decision making process on promotion and mutation is more effective and efficient.*

The programs that have been implemented are:

- a. *Integrated Talent Management System Application Development*
- b. *Establishment of strategic guidelines for Integrated Talent Management System Application*

5. Improve Employee Engagement

Sasaran Strategis Strategic Goals	Program Program
Jamkrindo Wealth	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Social Smart Office Space <i>Provision of Social Smart Office Space</i> • Jamkrindo Easy Home → Bantuan Talangan Uang Muka Kepemilikan Rumah <i>Jamkrindo Easy Home → Down Payment Assistance for Home Ownership</i> • Non finansial benefit recognition scheme (Apresiasi Penurunan Berat Badan dan Karyawan Yang tidak Telat) <i>Non financial benefit recognition scheme (Appreciation of Weight Loss and On-Time Employees)</i>
Jamkrindo Health	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Dokter Perusahaan <i>Provision for Corporate Doctors</i> • Implementasi Go Green dengan penyediaan tumbler <i>Implementation of Go Green with tumbler provision</i> • Jaminan kesehatan karyawan melalui Askes Komersial <i>Employee health insurance through Commercial Health Insurance</i>

6. Pengembangan HRIS Lanjutan (Full Cycle)

Sasaran dari program ini adalah:

- a. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan operasional SDM.
- b. Pengelolaan SDM yang terintegrasi dengan sistem lainnya.
- c. Analisis data SDM sesuai kebutuhan bisnis

Adapun program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Dashboard KPI Tahunan
- b. Daily Assignment
- c. Absensi Share Location
- d. ESS Help Desk
- e. Mengintegrasikan HRIS Dengan Sistem Pengelolaan Keuangan
- f. ESS To Do List
- g. ESS Integrasi Absensi

6. Advanced HRIS Development (Full Cycle)

The objectives of this program are:

- a. *Efficiency and effectiveness of HR operational management.*
- b. *Integrated HR management with other systems.*
- c. *Analysis of HR data according to business needs.*

The programs implemented are as follows:

- a. *Annual KPI Dashboard*
- b. *Daily Assignment*
- c. *List of attendance with Share Location*
- d. *ESS Help Desk*
- e. *Integrating HRIS With Financial Management System*
- f. *ESS To Do List*
- g. *ESS Integration of Attendance*



7. Sosialisasi Internalisasi Budaya "AKHLAK"
 - a. Sosialisasi Level Kepala Divisi
Dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2020 dengan peserta Kepala Divisi, Kepala Desk, Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern di Jamkrindo pada Rapat Direksi melalui zoom meeting.
 - b. Sosialisasi Level Pimpinan Wilayah dan Pemimpin Cabang
Dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2020. Sosialisasi kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan Pemimpin Cabang yang dilakukan melalui aplikasi zoom meeting. Pada pelaksanaan Sosialisasi diadakan Game melalui Quizziz guna meningkatkan awareness peserta terhadap core values AKHLAK tersebut.

Adapun setelah dilakukan Sosialisasi kepada seluruh Pimpinan Unit Kerja, maka masing-masing pimpinan Unit Kerja melakukan Sosialisasi terkait "AKHLAK" di masing-masing Unit Kerjanya dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Wilayah I
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Medan, 7 Kantor Cabang, 3 Kantor Unit Pelayanan)
- b. Sosialisasi Wilayah II
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Palembang, 5 Kantor Cabang, 1 Kantor Unit Pelayanan)
- c. Sosialisasi Wilayah III
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Jakarta, 5 Kantor Cabang, 3 Kantor Unit Pelayanan)
- d. Sosialisasi Wilayah IV
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Bandung, 5 Kantor Cabang, 1 Kantor Unit Pelayanan)
- e. Sosialisasi Wilayah V
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Semarang, 6 Kantor Cabang, 2 Kantor Unit Pelayanan)
- f. Sosialisasi Wilayah VI
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Surabaya, 5 Kantor Cabang, 4 Kantor Unit Pelayanan)
- g. Sosialisasi Wilayah VII
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Denpasar, 4 Kantor Cabang)
- h. Sosialisasi Wilayah VIII
Pelaksanaan Sosialisasi "AKHLAK" PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Banjarmasin, 5 Kantor Cabang, 1 Kantor Unit Pelayanan)

7. *Socialization of Cultural Internalization "AKHLAK"*
 - a. *Socialization of Level Head of Division
Held on August 6, 2020 with participants of Division Head, Head of Desk, Corporate Secretary, Internal Audit Unit in Jamkrindo Board of Director's meeting through zoom meeting.*
 - b. *Socialization of Level Head of Regional and Head of Branch
Held on August 13, 2020. Socialization to all Head of Regional and Head of Branch conducted through zoom meeting application. In the implementation of Socialization held Games through Quizziz to increase awareness of participants to the core values "AKHLAK".*

After socialization to all Head of Work Unit, each Head of Work Unit conducts socialization related to "AKHLAK" in each work unit with the following details:

- a. *Socialization of Region I
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Medan Regional Office, 7 Branch Offices, 3 Service Unit Offices)*
- b. *Socialization of Region II
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Palembang Regional Office, 5 Branch Offices, 1 Service Unit Office)*
- c. *Socialization of Region III
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Jakarta Regional Office, 5 Branch Offices, 3 Service Unit Offices)*
- d. *Socialization of Region IV
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Bandung Regional Office, 5 Branch Offices, 1 Service Unit Office)*
- e. *Socialization of Region V
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Semarang Regional Office, 6 Branch Offices, 2 Service Unit Offices)*
- f. *Socialization of Region VI
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Surabaya Regional Office, 5 Branch Offices, 4 Service Unit Offices)*
- g. *Socialization of Region VII
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Denpasar Regional Office, 4 Branch Offices)*
- h. *Socialization of Region VIII
Socialization of "AKHLAK" PT Jamkrindo in Work Unit (1 Banjarmasin Regional Office, 5 Branch Offices, 1 Service Unit Office)*

- i. Sosialisasi Wilayah IX
Pelaksanaan Sosialisasi “AKHLAK” PT Jamkrindo di Unit Kerja (1 Kanwil Makassar, 14 Kantor Cabang, 1 Kantor Unit Pelayanan)

Selain itu, Internalisasi Budaya “AKHLAK” juga dilaksanakan melalui program berikut ini:

- a. Implementasi AKHLAK kepada Kepala Divisi/ Desk melalui pendekatan Sense of Urgency dan Transaksional Burke Litwin Model oleh Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
- b. VLOG – Core Values AKHLAK
- c. Implementasi AKHLAK Core Values Amanah melalui Employee Engagement Self Affirmation Quote oleh Seluruh Karyawan/ti PT Jamkrindo
- d. Cross CEO Talks Implementation Amanah dan Kompeten (seluruh Karyawan/ti Jamkrindo)
- e. Cross CEO Talks terkait Amanah dan Kompeten oleh Bapak Putrama Wahyu Setyawan (Direktur Utama PT Jamkrindo) kepada seluruh Karyawan/ti PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
- f. Internalisasi Core Values AKHLAK “Embrace Millenials Power to Transform” seluruh Karyawan Millenials di Lingkungan IFG
- g. Cross Director of Human Capital Talk terkait Harmonis dan Loyal bagi seluruh Karyawan/ti PT Jamkrindo dan PT Asuransi Jasa Indonesia

8. Mengukur Efektifitas Pengelolaan SDM terhadap Kinerja Perusahaan

Sasaran dari program ini adalah:

- a. Identifikasi logic model HR Investment Scorecard
- b. Pengembangan model analitis untuk HR Investment Scorecard
- c. Pengukuran pencapaian HR Investment Scorecard

Output dari kajian adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya Logic model HR Investment Scorecard
- b. Tersusunnya model analitis untuk HR Investment Scorecard
- c. Tersusunnya alat ukur untuk mendukung analisis yang dibutuhkan dalam HR Investment Scorecard

- i. Socialization of Region IX
Socialization of “AKHLAK” PT Jamkrindo in Work Unit (1 Makassar Regional Office, 14 Branch Offices, 1 Service Unit Office)

In addition, the Internalization of Culture “AKHLAK” is also implemented through the following programs:

- a. Implementation of AKHLAK to Head of Division/ Desk through Burke Litwin Model Sense of Urgency and Transactional approach by Director of HR Management, General and Compliance
- b. VLOG – Core Values AKHLAK
- c. Implementation of AKHLAK Core Values of Trustworthy through Employee Engagement Self Affirmation Quote by All Employees of PT Jamkrindo
- d. Cross CEO Talks Implementation related to Trustworthy and Competence (all Employees of Jamkrindo)
- e. Cross CEO Talks related to Trustworthy and Competence by Mr. Putrama Wahyu Setyawan (President Director of PT Jamkrindo) to all Employees of PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja
- f. Internalization of Core Values AKHLAK “Embrace Millenials Power to Transform” all Millenials Employees within IFG
- g. Cross Director of Human Capital Talk related to Harmonious and Loyal for all Employees of PT Jamkrindo and PT Asuransi Jasa Indonesia

8. Measuring the Effectiveness of HR Management to Company Performance

The objectives of this program are:

- a. Identification of logic model HR Investment Scorecard
- b. Development of analytical models for HR Investment Scorecard
- c. Measurement of HR Investment Scorecard achievement

The output of this study is as follows:

- a. Logic of HR Investment Scorecard model
- b. Analytical model for HR Investment Scorecard
- c. The composition of measuring instruments to support the analysis required in HR Investment Scorecard

Tier 1

Business Results



Tier 2

Key Performance Drivers



Tier 3

Human Capital Capabilities



Tier 4

Human Capital Processes



- Rekrutmen Karyawan**
 Jamkrindo menyadari betapa pentingnya kualitas SDM bagi kinerja operasional, pemasaran, dan keuangan Perusahaan. Karyawan yang andal hanya dapat dibentuk dari orang-orang yang mempunyai integritas, dedikasi, serta loyalitas yang baik. Perusahaan terus mengimbangi pemenuhan kebutuhan SDM baik yang sudah berpengalaman maupun fresh graduate agar selaras dengan perkembangan dan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Perekrutan SDM dilingkungan Jamkrindo dilaksanakan dengan mengacu pada proyeksi kebutuhan karyawan untuk tahun berjalan serta mengacu kepada standar kompetensi dengan memegang teguh Nilai-nilai Perusahaan.

Oleh karena itu, Jamkrindo pada tahap awal perekrutan karyawan senantiasa berupaya untuk mencari dan menempatkan calon-calon karyawan dengan aspek kompetensi dan integritas yang terbaik, berkualitas, dan mumpuni sesuai dengan kebutuhan Perusahaan dalam melayani masyarakat. Jamkrindo tidak hanya menawarkan pekerjaan pada bidang keahlian yang dimiliki masing-masing karyawan maupun calon karyawan, namun juga kepastian jenjang karier bersama Jamkrindo.

Sesuai kompetensi dan untuk menjaga independensi maka seleksi karyawan dilakukan melalui konsultan *independent* yang mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang rekrutmen karyawan.

Proses rekrutmen yang diselenggarakan Jamkrindo senantiasa mengedepankan asas-asas keterbukaan, kewajaran dan kesetaraan berdasarkan kebutuhan, serta kompetensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Jamkrindo juga memberikan peluang seluas-luasnya bagi lulusan perguruan tinggi.

- Employee Recruitment**
 Jamkrindo realizes the importance of the quality of HR is for the Company's operational, marketing and financial performance. Reliable employees can only be formed from people who have integrity, dedication, and good loyalty. The Company continues to balance the fulfillment of the needs of HR with both experienced and fresh graduates to be in line with the development and growth of the Company's business. HR Recruitment in Jamkrindo environment is carried out by referring to projections of employee needs for the current year and referring to competency standards by upholding Company Values.

Therefore, in the early stages of hiring employees, Jamkrindo always strives to find and distribute prospective employees with the best quality, competence, and integrity in accordance with the needs of the Company in serving the community. Jamkrindo not only offers jobs in the areas of expertise owned by each employee and prospective employee but also the certainty of career paths with Jamkrindo.

In accordance with competence and to maintain independence, employee selection is carried out through independent consultants who have competence and experience in the field of employee recruitment.

The recruitment process organized by Jamkrindo always puts forward the principles of openness, fairness, and equality based on the needs, as well as the competencies possessed by prospective employees. Jamkrindo also provides the widest opportunity for college graduates.

Asas Rekrutmen SDM

HR Recruitment Principles

Terbuka
Transparent

Selektif
Selective

Daya Guna dan Hasil Guna
Effective and Efficient

Kebutuhan
Needs

Ruang lingkup pengadaan karyawan meliputi:

- Perencanaan**
 Untuk memperoleh tenaga yang tepat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan termasuk merencanakan kebutuhan profesional dengan kompetensi khusus.
- Pengumuman**
 Untuk memberikan kesempatan bagi angkatan kerja untuk melamar pada Perusahaan.

The scope of employee procurement includes:

- Planning**
 To obtain the appropriate employees according to the needs of the Company, the recruitment must include planning professional needs with special competencies.
- Announcement**
 To provide opportunities for the workforce to apply to the Company.



- c. **Pelamaran**
Untuk menciptakan ketertiban dalam proses penerimaan karyawan.
- d. **Seleksi**
Untuk memilih dan mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- e. **Pengangkatan**
Untuk memberikan status karyawan dan atau jabatan tertentu dalam Perusahaan.

- c. *Application*
To create order in the process of receiving employees.
- d. *Selection*
To choose and acquire employees who are in accordance with the needs of the Company.
- e. *Appointment*
To provide certain employee status and/or position within the Company.

Sumber pengadaan karyawan berasal dari dalam Perusahaan dan atau dari luar Perusahaan apabila dibutuhkan untuk pengisian format tertentu dan atau memerlukan keahlian/keterampilan tertentu. Perusahaan dapat melakukan pengadaan/rekrutmen tenaga kerja berpengalaman/tenaga profesional untuk pengisian posisi tertentu dan/atau untuk kebutuhan keahlian/keterampilan tertentu berupa:

The sources of procurement of employees come from within the Company and/or, if needed, from outside the Company to fill in certain formats and/or require certain skills/capabilities. The company can conduct procurement/recruitment of experienced workforce/professional personnel to fill certain positions and/or for specific skills/capabilities in the form of:

- a. **Karyawan/staf berpengalaman**
Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- b. **Pejabat struktural/fungsional**
Karyawan yang diangkat Perusahaan dengan memperhitungkan pengalaman kerja, masa kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk menduduki jabatan struktural/fungsional.
- c. **Tenaga kerja Waktu Tertentu (entry level hire/KKWT Umum)**
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebagai tenaga pendukung (supporting) yang dipekerjakan di seluruh Unit Kerja Perusahaan yang meliputi bagian operasional dan bisnis Perusahaan.
- d. **Tenaga kerja profesional (Prohire)**
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu yang direkrut berdasarkan pengalaman kerja, keahlian dan kompetensi yang dimilikinya sesuai kualifikasi yang dibutuhkan Perusahaan untuk melakukan pendampingan dan asistensi pada unit kerja terkait atau untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan/ atau dengan target tertentu dan jangka waktu tertentu.

- a. *Experienced employees/staff*
These appointment by the Company takes into account the employees work experience, work period, expertise and competencies according to the qualifications that are in accordance with the needs of the Company.
- b. *Structural/functional officials*
These appointment by the Company takes into account their work experience, years of service, expertise, and competencies according to qualifications that are in accordance with the needs of the company to occupy structural/functional positions.
- c. *Workers with a Specific Period (entry level hire/KKWT General)*
Contract Workers with a Specific Period who recruited under Employee Agreement for a Specific Period (PKWT) as supporting personnel which are employed throughout the Company's Work Unit which includes the Company's operational and business parts.
- d. *Professional workforce (Prohire)*
These are Part-Time Contractors recruited based on their work experience, expertise, and competencies in accordance with the qualifications needed by the Company to provide assistance and aids to the relevant work units or to carry out certain work and/or with specific targets and certain time periods.

Di sepanjang tahun 2020, Perusahaan melakukan rekrutmen sebanyak 54 orang karyawan baru, yang terdiri dari 38 orang karyawan tetap dan 16 orang karyawan tidak tetap (tenaga kontrak). Berikut disampaikan karyawan profesional untuk ditetapkan sebagai pejabat struktural yang memiliki pengalaman sesuai kebutuhan Perusahaan.

Throughout the year 2020, the Company recruited 54 new employees, consisting of 38 permanent employees and 16 non permanent employees (contract employee). The following are submitted by professional employees to be appointed as structural officers who have experience according to the needs of the Company.

Rekrutmen Pejabat Struktural (2019-2020)

Recruitment of Structural Officers (2019-2020)

Rekrutmen Recruitment	2020	2019
Pranata Utama <i>First Class Officer</i>	-	-
Kepala Bagian <i>Unit Head</i>	1	-
Pranata Madya <i>Middle Officer</i>	-	-
Kepala Seksi <i>Section Head</i>	-	-
Jumlah <i>Total</i>	-	-

Selain hal tersebut, pada tahun 2020 Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu professional untuk melakukan pendampingan dan asistensi sebanyak 6 (enam) orang meningkat 50% dibanding tahun 2019 yang sebanyak 4 (empat) orang yang tersebar di beberapa unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Perekrutan tenaga profesional tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja Perusahaan serta *transfer knowledge* kepada karyawan tetap pada unit kerja tersebut.

In addition to this, in 2020 the Company also recruited 6 (six) professional part-time workers to provide assistance and aids. This is an increase of 50% compared to 2019 of 4 (four) people. These workers are distributed across several work units, as shown in the table below. The recruitment of these professionals is expected to help accelerate the achievement of the Company's work programs and the transfer of knowledge to full-time employees in the work unit.

Rekrutmen Recruitment	2020	2019
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Sekretaris Perusahaan <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Corporate Secretary division</i>	2	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Satuan Pengawasan Intern <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Internal Audit Unit</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Perencanaan Strategis <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Strategic Planning Division</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Klaim <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Claims Division</i>	-	2
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Penunjang Bisnis <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Supporting Business Division</i>	1	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Umum <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the General Affairs Division</i>	1	-



Rekrutmen Recruitment	2020	2019
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk mendukung bidang Divisi Hukum & Kepatuhan <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Claims Division</i>	1	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Profesional diperuntukan untuk Kantor Cabang Denpasar <i>Part-Time Professional Contracts (TKWT) recruited to support the Claims Division</i>	1	-
Jumlah <i>Total</i>	16	4

Selain hal tersebut, pada tahun 2020 Perusahaan juga melakukan rekrutmen tenaga kerja waktu tertentu entry-level hire (ELH) dan Umum untuk melakukan supporting operasional unit kerja sebanyak 10 orang menurun 23,07% dibanding tahun 2019 yang sebanyak 13 orang yang tersebar di beberapa unit kerja, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah. Perekrutan tenaga kerja waktu tertentu ELH dan Umum tersebut diharapkan dapat membantu percepatan tercapainya program-program kerja Perusahaan pada unit kerja tersebut.

In addition, in 2020 the Company also recruited part-time employee of entry-level hire (ELH) and General to support the work unit operations as many as 10 people decreased by 23.07% compared to 2019 which was 13 people spread across several work units, as seen in the table below. The recruitment of part-time employee of ELH and General is expected to accelerate the achievement of the Company's work programs in the work unit.

Rekrutmen Recruitment	2020	2019
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Sekretaris Perusahaan <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Corporate Secretary</i>	2	4
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Divisi Bisnis 3 <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Business Division 3</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Divisi MSDM <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH HR Management Division</i>	-	3
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Umum <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH General Affairs Division</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Divisi Akuntansi <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Accounting Division</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Kantor Cabang Jakarta <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Jakarta Branch Office</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Kantor Wilayah IV Bandung <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Bandung Regional Office IV</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) ELH Kantor Wilayah IX Makassar <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Makassar Regional Office IX</i>	-	1
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Kantor Cabang Jayapura hasil Program Perekrutan Bersama (PPB) Papua-Papua Barat 2019 <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Jayapura Branch Office is recruited by Joint Recruitment Program (PPB) of Papua-West Papua 2019</i>	2	-

Rekrutmen Recruitment	2020	2019
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Kantor Cabang Manokwari hasil Program Perekrutan Bersama (PPB) Papua-Papua Barat 2019 <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Manokwari Branch Office is recruited by Joint Recruitment Program (PPB) of Papua-West Papua 2019</i>	3	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (KKWT) Kantor Cabang Sorong hasil Program Perekrutan Bersama (PPB) Papua-Papua Barat 2019 <i>Part-Time Employee Contracts (TKWT) ELH Sorong Branch Office is recruited by Joint Recruitment Program (PPB) of Papua-West Papua 2019</i>	3	-
Jumlah <i>Total</i>	16	4

• **Turnover Karyawan**

Rasio *employee turnover* dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja sebuah perusahaan. Selain itu, tingkat turnover karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Pada tahun 2020, jumlah karyawan yang keluar dari Perusahaan tercatat sebanyak 38 orang atau 3,94% dari jumlah keseluruhan karyawan, meningkat dibandingkan tahun 2019 dengan jumlah 51 orang atau 5,28% dari jumlah keseluruhan karyawan.

Data jumlah karyawan keluar (turnover) pada tahun 2020 dan 2019 terdiri dari pensiun normal, pensiun dini, mengundurkan diri, diberhentikan karena melakukan pelanggaran, dan meninggal dunia.

• **Employee Turnover**

The *employee turnover ratio* can show the productivity of a company's performance. In addition, the *employee turnover rate* is also a reflection of the Company's culture and work system which can be an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment.

In 2020, the number of employees leaving the Company was recorded 38 people or 3,94% of the total number of employees. This is an increase compared to 2019 of 51 people or 5.28% of the total number of employees.

Turnover data in 2020 and 2019 consists of normal retirement, early retirement, resigning, being dismissed for violations, and passed away.

Uraian Description	2020		2019	
	Jumlah Total	Komposisi Composition	Jumlah Total	Komposisi Composition
Pensiun normal <i>Normal retirement</i>	3	7,89%	3	5,88%
Pensiun dini <i>Early retirement</i>	-	-	-	-
Mengundurkan diri <i>Resignation</i>	34	89,47%	46	90,20%
Meninggal dunia <i>Passed away</i>	1	2,63%	2	3,92%
Jumlah <i>Total</i>	38	100,00%	51	100,00%
Jumlah Karyawan <i>Total Employees</i>	965		965	
Tingkat Turnover <i>Turnover Rate</i>	3,94%		5,28%	



• Rotasi dan Mutasi Karyawan

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja diberlakukan dengan maksud memberikan pengalaman menyeluruh kepada setiap karyawan tentang keseluruhan operasional dan bisnis yang dikembangkan Perusahaan. Melalui kebijakan mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja ini, karyawan dapat mengenal prosedur, sistem, kebijakan, hingga kegiatan sehari-hari dan visi yang ingin dicapai Perusahaan.

Mutasi jabatan dan/atau mutasi unit kerja ini dapat diadakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Perusahaan dan pembinaan pegawai, termasuk di dalamnya perencanaan karier. Kewenangan mutasi dan penempatan karyawan dibedakan menjadi 2 (dua):

1. Kantor Pusat
 - a. Mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern Direktorat dapat dilakukan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Divisi yang membidangi SDM.
 - b. Mutasi dan penempatan karyawan antar Direktorat dapat diusulkan oleh Kepala Divisi/setingkat untuk diusulkan kepada Direktur yang membidangi SDM.
2. Kantor Cabang
 - a. Untuk mutasi dan penempatan karyawan di lingkungan intern kantor cabang ditetapkan oleh Kepala Kantor Cabang dengan memperhatikan kompetensi masing-masing karyawan dan kebutuhan Kantor Cabang.
 - b. Khusus untuk penempatan karyawan sebagai kasir agar segera dibuat Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Cabang setempat.

Sebagian besar rotasi dan mutasi karyawan dilakukan dalam rangka memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap Karyawan yang bersangkutan pada jabatan yang lebih tinggi. Ketentuan terkait rotasi dan mutasi karyawan untuk promosi ditetapkan sesuai dengan ketentuan promosi Perusahaan sesuai hasil komite promosi.

Selama tahun 2020 tingkat rotasi dan mutasi karyawan tercatat sebesar 10,78% dibandingkan jumlah keseluruhan karyawan.

• *Employee Rotation and Mutation*

Position mutations and/or mutations of work units are implemented with the intention of providing a thorough experience to each employee about the overall operations and business developed by the Company. Through the policy of transfer of position and/or mutation of the work unit, employees can recognize the position's procedures, systems, policies, and daily activities, as well as the vision that the Company wants to achieve.

Position mutations and/or mutations of the work unit can be held for the benefit of implementing the Company's duties and fostering employees, including career planning. The authority for transfer and distribution of employees is divided into 2 (two):

1. *Head Office*
 - a. *Mutations and distribution of employees in the internal directorate can be carried out by the Head of Division/equivalent accompanied by a proposal to the Division in charge of HR.*
 - b. *Mutation and distribution of employees between directorates can be proposed by the Head of Division/equivalent to the Director in charge of HR.*
2. *Branch Office*
 - a. *The transfer and distribution of employees in the internal branch office are determined by the Head of the Branch Office by paying attention to the competencies of each employee and the needs of the Branch Office.*
 - b. *For the placement of employees as cashiers, a Task Order is immediately made to be signed by the local Branch Head.*

Most rotations and mutations of employees are carried out in order to assign duties and responsibilities to the employees concerned in higher positions. Provisions related to employee rotation and transfer for promotions are determined in accordance with the Company's promotional conditions according to the results of the promotion committee.

In 2020, the rate of rotation and mutation of employees was 10.78% compared to the total number of employees.

Karyawan Mutasi/Rotasi Employee Rotation/Mutation	2020	2019
Januari / January	-	-
Februari / February	-	-
Maret / March	-	-
April / April	-	-
Mei / May	-	28
Juni / June	-	-

Karyawan Mutasi/Rotasi <i>Employee Rotation/Mutation</i>	2020	2019
Juli / July	31	-
Agustus / August	34	29
September / September	8	-
Oktober / October	31	-
November / November	-	-
Desember / December	-	-
Jumlah <i>Total</i>	104	57

• **Pengembangan Karier**

Untuk memastikan *Career Success Factor* (CSF) terpenuhi, maka Perusahaan melaksanakan kegiatan pengembangan karier yang sesuai dengan masing-masing faktor. Upaya ini dilakukan secara optimal agar dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara maksimal. Pengembangan karier dilakukan melalui kenaikan posisi jabatan seorang pegawai ke level yang lebih tinggi dengan program promosi. Program promosi ini dilakukan untuk mendapatkan kandidat yang tepat guna mengisi jabatan pada level yang lebih tinggi sesuai dengan persyaratan secara tepat waktu.

Karyawan yang dinilai berdasarkan sistem penilaian kinerja dan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik, jujur dan dapat dipercaya serta berwibawa dapat diangkat untuk menduduki jabatan struktural. Sistem penilaian kinerja karyawan diadakan untuk menjamin objektivitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan *grade*, serta pengangkatan dalam jabatan struktural tertentu pada perusahaan.

Tahapan kegiatan pengembangan karier melalui kegiatan promosi adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana jenjang karier karyawan berdasarkan:
 - a. Kebijakan perusahaan tentang pengelolaan SDM.
 - b. Peraturan-peraturan perusahaan yang terkait pengelolaan SDM.
 - c. RKAP dan RJPP.
2. Memetakan seluruh formasi karyawan dan evaluasi karyawan berdasarkan:
 - a. Formasi karyawan baru.
 - b. Hasil penilaian kinerja pegawai.
 - c. Hasil *assessment* kompetensi.
 - d. Persyaratan jabatan lainnya.
3. Mengidentifikasi formasi yang akan kosong berdasarkan:
 - a. Hasil pemetaan formasi karyawan dan evaluasi karier karyawan.
 - b. Identifikasi formasi yang akan kosong.
4. Melakukan rencana pengisian formasi melalui promosi dan menyusun persyaratan yang dibutuhkan untuk posisi tersebut.

• **Career Development**

To ensure that the Career Success Factor (CSF) is fulfilled, the Company carries out career development activities in accordance with each factor. This activity is carried out optimally to motivate the employees to work optimally. Career development is done by increasing the position of an employee to a higher level with a promotion program. This promotion program is conducted to get the appropriate candidates to fill the positions at a higher level in accordance with the requirements in a timely manner.

Employees who have been assessed based on a performance appraisal system and have demonstrated good, honest and trustworthy and authoritative work performance can be appointed to occupy structural positions. An employee performance appraisal system is conducted to ensure objectivity in considering and establishing grade, as well as appointments in certain structural positions in the company.

The stages of career development activities through promotions are as follows:

1. *Develop employee career path plans based on:*
 - a. *Company policy regarding HR management.*
 - b. *Company regulations related to HR management.*
 - c. *RKAP and RJPP.*
2. *Map the entire employee formation and employee evaluation based on:*
 - a. *Formation of new employees.*
 - b. *Results of employee performance appraisal.*
 - c. *Competency assessment results.*
 - d. *Other job requirements.*
3. *Identify formations which will be vacant based on:*
 - a. *Results of employee formation mapping and employee career evaluation.*
 - b. *Identify the formation that will be vacant.*
4. *Make a plan to fill out the formation through promotion and arrange the requirements needed for the position.*



5. Mencari kandidat untuk dipromosikan berdasarkan:
 - a. Data kualifikasi karyawan yang kompeten untuk menempatkan posisi yang kosong.
 - b. Seleksi kualifikasi dan kompetensi awal untuk mendapatkan calon kandidat terbatas/*short list candidate*.
 - c. Rekomendasi atasan karyawan jika memiliki kandidat yang memenuhi kualifikasi yang menjadi syarat untuk posisi yang kosong.
6. Menetapkan kandidat yang tepat untuk posisi yang kosong melalui komite promosi.
7. Melakukan proses penggantian posisi karyawan sesuai mekanisme.

Pada tahun 2020, karyawan yang mendapatkan promosi tercatat sebanyak 56 orang, mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sebanyak 66 orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

5. *Look for candidates to be promoted based on:*
 - a. *Data on qualifications of competent employees to fill in the vacant positions.*
 - b. *Selection of initial qualifications and competencies to get the candidates/short-list the candidates.*
 - c. *The recommendation of the employee's supervisor if there are candidates who meet the qualifications required for the vacant position.*
6. *Establish the status of the candidate for the vacant position through the promotion committee.*
7. *Process the replacement of employee positions according to the mechanism.*

In 2020, the number of employees who received promotion was recorded as many as 56 people, which is a decrease compared to 2019 of 66 people. The details can be seen in the table below:

Promosi Promotion	2020	2019
Kepala Divisi/ Setingkat <i>Division Head/Equivalent</i>	2	3
Pemimpin Wilayah/ Wakil Pemimpin Wilayah <i>Head of Regional Office / Deputy Head of Regional Office</i>	-	3
Pemimpin Cabang Tipe A/ B/ C/ D <i>Head of Branch Office Type A/B/C/D</i>	4	16
KaBag Kanpus/ Wil/ KCK/ Cab Tipe A/ B <i>Department Head of Main/Branch Office's Type A/B</i>	17	20
KaBag Kanca Tipe C/ D <i>Unit Head of Branch Office's Type C/D</i>	28	20
Kepala KUP <i>Head of Service Unit Office</i>	5	4
Kasie Pusat/ Wil/ Cab A/ B <i>Section Head of Main/Regional/Branch Office A/B</i>	-	-
Kasubsie Kanca Tipe C <i>Sub-Section Head of Branch Office Type C</i>	-	-
Kasubsie KUP <i>Sub-Section Head of Service Unit Office</i>	-	-
Pranata Utama <i>First Class Officer</i>	-	-
Pranata Muda <i>Junior Officer</i>	-	-
Jumlah <i>Total</i>	56	66

• Pendidikan dan Pelatihan

Dewasa ini persaingan bisnis membutuhkan dukungan dan kehandalan SDM. Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM di seluruh proses bisnis sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja operasional dan keunggulan daya saing berkelanjutan.

Seiring perkembangan perusahaan, Jamkrindo menyesuaikan pengelolaan dan pengembangan pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan terkini dunia bisnis. Komitmen tersebut diimplementasikan melalui program pengembangan kompetensi karyawan yang intensif dan terarah. Kompetensi SDM yang memadai dan desain organisasi yang sesuai akan meningkatkan competitive advantage perusahaan.

Pada tahun 2020, Jamkrindo mengeluarkan biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pekerja sebesar Rp19,11 miliar, mengalami penurunan 0,48% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp28,04 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan keharusan Perusahaan untuk menerapkan kebijakan efisiensi pada berbagai biaya.

• Education and Training

Today business competition requires the support and reliability of human resources. Jamkrindo is committed to improving the quality and competitiveness of human resources throughout the business process so as to encourage improved operational performance and sustainable competitiveness excellence.

Along with the company's development, Jamkrindo adjusts the management and development of workers in order to meet the latest needs of the business industry. The commitment is implemented through an intensive and targeted employee competency development program. Adequate HR competencies and appropriate organizational design will increase the company's competitive advantage.

In 2020, Jamkrindo incurred employee competency development costs of IDR19.11 billion, a decrease of 0.48% compared to 2019 of IDR28.04 billion. This decrease is mainly due to the impact of the COVID-19 pandemic which has led to the Company's need to implement efficiency policies at various costs.

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
1	Penggunaan ERP Modul Financial Management Aplikasi Odoo Utilization of ERP Financial Management Module in Odoo App	L1, L3, L4	91	28 - 29 Desember 2020 December, 28 - 29 2020	Online Training	9
2	Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Legal Aspects in the Management of State-Owned Enterprise (BUMN) Corporations	Dekom, L1	2	15 - 18 Desember 2020 December, 15 - 18 2020	Online Training	1,5
3	Directorship Program "High Performance Boards"	L1, L2	5	15 - 18 Desember 2020 December, 15 - 18 2020	Online Training	2
4	Jamkrindo Executive Development Program Batch 2 Virtual Class Phase 4	L1	10	14 - 15 Desember 2020 December, 14 - 15 2020	Online Training	4
5	Jamkrindo Executive Development Program Batch 1 Virtual Class Phase 4	L1	6	10 - 11 Desember 2020 December, 10 - 11 2020	Online Training	4
6	Integrated Risk-Based Internal Auditing	L1, L3, L4	19	10-11 Desember 2020 December, 10 - 11 2020	Online Training	6,5
7	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Manajerial Managerial Level Qualified Internal Auditor Certification	L1	1	7 - 16 Desember 2020 December, 7 - 16 2020	Online Training	6,5
8	Sales Mastery Batch 3 Modul 5 : Sales Negotiation	L4	26	5 Desember 2020 December, 5 2020	Online Training	4
9	Sales Mastery Batch 2 Modul 5 : Sales Negotiation	L4	25	5 Desember 2020 December, 5 2020	Online Training	4
10	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 4	L3	18	4 Desember 2020 December, 4 2020	Online Training	4



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
11	In House E-Training tentang "Practical Microsoft Excel For Data Analyst and Effective Data Report" <i>In House E-Training about "Practical Microsoft Excel For Data Analyst and Effective Data Report"</i>	L4	9	3-4 Desember 2020 <i>December, 3 - 4 2020</i>	Online Training	6
12	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Training on Procurement of Goods and Services</i>	L2, L4	3	2 - 5 Desember 2020 <i>December, 2 - 5 2020</i>	Online Training	9
13	Sales Mastery Batch 1 Modul 5 : Sales Negotiation	L4	29	28 November 2020 <i>November, 28 2020</i>	Online Training	4
14	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 3 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 3</i>	L3	22	27 November 2020 <i>November, 27 2020</i>	Online Training	4,5
15	Pelatihan dan Uji Serifikasi Kompetensi Pendamping UMKM <i>SME Assistant Training and Competency Certification Test</i>	L4	2	27 November 2020 <i>November, 27 2020</i>	Online Training	9
16	Pelatihan dan Serifikasi Kompetensi Pendamping UMKM <i>SME Assistant Training and Competency Certification</i>	L4	30	23 - 26 November 2020 <i>November, 23 - 26 2020</i>	Online Training	9
17	Certified Corporate Forensic Auditor	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	1	25 November - 1 & 4 Desember 2020 <i>November, 25 - December, 1 & 4 2020</i>	Online Training	3
18	Soft Skills for secretary	L4	2	24 - 26 November 2020 <i>November, 24 - 26 2020</i>	Online Training	2
19	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan <i>Advanced Level Qualified Internal Auditor Certification</i>	L1	1	7 - 16 Desember 2020 <i>December, 7 - 16 2020</i>	Online Training	6,5
20	Webinar Maintaining Physical Distancing Governing Digital Mainstreaming	L3 - L4	2	24 - 26 November 2020 <i>November, 24 - 26 2020</i>	Online Training	7
21	Sales Mastery Batch 3 Modul 4: story selling	L4	31	21 November 2020 <i>November, 21 2020</i>	Online Training	4
22	Business Judgment Rule versus Tindak Pidana Korupsi <i>Business Judgement Rule Versus Corruption Criminal Offence</i>	L4	1	20 November 2020 <i>November, 20 2020</i>	Online Training	6
23	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 2 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 2</i>	L3	21	20 November 2020 <i>November, 20 2020</i>	Online Training	4,5
24	Sales Mastery Batch 2 Modul 4: story selling	L4	27	14 November 2020 <i>November, 14 2020</i>	Online Training	4,5
25	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 1 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 1</i>	L3	24	13 November 2020 <i>November, 13 2020</i>	Online Training	4,5

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
26	Implementasi Penerapan PSAK 73 Untuk Antisipasi Audit Tahunan & Dampaknya Terhadap Pelaporan Ke Regulator dan Pajak <i>Implementation of PSAK 73 to Anticipate Annual Audit & Its Impact on Reporting to Regulators and Tax Officials</i>	L4	2	12 November 2020 <i>November, 12 2020</i>	Online Training	6
27	Update Implementasi & Evaluasi Perhitungan PSAK 72 : Implikasi Terhadap Pendapatan Perusahaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak <i>Updates on the Implementation & Evaluation of PSAK 72 Calculation: Its Implications for Corporate Income, Financial Statements, and Tax Reporting</i>	L4	4	11 November 2020 <i>November, 11 2020</i>	Online Training	4
28	Sales mastery batch I Modul 4: story telling in business	L4	31	7 November 2020 <i>November, 7 2020</i>	Online Training	4
29	Studi Kasus Pengikatan dan Eksekusi Agunan <i>Case Study on Collateral Binding and Execution</i>	L1 - L4	27	7 November 2020 <i>November, 7 2020</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 <i>Multipurpose Room, 10th floor</i>	4
30	Workshop Lelang Agunan dan Eksekusi Agunan <i>Collateral Auction and Execution Workshop</i>	L1 - L4	43	6 November 2020 <i>November, 6 2020</i>	Online Training	4
31	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 8 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 8</i>	L4	20	3 - 4 November 2020 <i>November, 3 - 4 2020</i>	Online Training	4
32	Online Learning Class Internaonal Cerfied Wealth Manager (CWM) Execuve Program 2020 Public Class — Batch 45	L3	1	5 November 2020 - 28 Januari 2021 <i>November, 5 2020 - January, 28 2021</i>	Online Training	6
33	12th Global Peter Drucker Forum 2020	BOD, L1, L3	8	28 - 31 Oktober 2020 <i>October, 28 - 31 2020</i>	Online Training	27,25
34	Invesgasi Forensik <i>Forensic Investigation</i>	Dekom, L3, L4	4	26 - 27 Oktober 2020 <i>October, 26 - 27 2020</i>	Online Training	12
35	Digital Public Training Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN <i>Digital Public Training: Interpretation and Assessor of State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN)</i>	L3, L4	2	21 - 23 Oktober 2020 <i>October, 21 - 23 2020</i>	Online Training	13
36	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 8 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 8</i>	L4	19	3 - 4 November 2020 <i>November, 3 - 4 2020</i>	Online Training	19
37	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 7 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 7</i>	L4	20	22 - 23 Oktober 2020 <i>October, 22-23 2020</i>	Online Training	8
38	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 6 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 6</i>	L4	20	20 - 21 Oktober 2020 <i>October, 20 - 21 2020</i>	Online Training	8



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
39	BMDP - Governance Aspect Series 3: Pengikatan Jaminan dan Eksekusinya <i>BMDP - Governance Aspect Series 3: Insurance Binding and Its Execution</i>	L2	56	16 Oktober 2020 <i>October, 16 2020</i>	Online Training	3
40	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 5 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 5</i>	L4	20	15 - 16 Oktober 2020 <i>October 15 - 16 2020</i>	Online Training	8
41	Penyusunan Perjanjian Utang Piutang & Pengikatan Jaminan Yang Aman Dari Segi Hukum <i>Arrangement of Debt Agreement & Legally Secure Insurance Binding</i>	L4	5	14 - 15 Oktober 2020 <i>October, 14 - 15 2020</i>	Online Training	4
42	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 4 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 4</i>	L4	19	13 - 14 Oktober 2020 <i>October, 13 - 14 2020</i>	Online Training	8
43	Revolutionized Learning in Industry 5.0 <i>Revolutionized Learning in Industry 5.0</i>	L3, L4	6	13 Oktober 2020 <i>October, 13 2020</i>	Online Training	2
44	Sales mastery batch III Modul 3: Winning Conversations	L4	31	10 Oktober 2020	Online Training	4
45	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 3 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 3</i>	L4	20	8 - 9 Oktober 2020 <i>October, 8 - 9 2020</i>	Online Training	8
46	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 2 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 2</i>	L4	20	6 - 7 Oktober 2020 <i>October 6 - 7 2020</i>	Online Training	8
47	Membangun Budaya Risiko dan Kepatuhan di BUMN <i>Developing Risk and Compliance Culture in State-Owned Enterprises</i>	L1, L3	3	7 Oktober 2020 <i>October, 7 2020</i>	Online Training	2
48	Sales mastery batch II Modul 3: Winning Conversations	L4	26	3 Oktober 2020 <i>October, 3 2020</i>	Online Training	4
49	ToT 1 Managing People - Modul 5 Leaders an mentor and Becoming a supermentee (tools : Business Model You, Calling Cards)	L3	23	2 Oktober 2020 <i>October, 2 2020</i>	Online Training	3,5
50	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 1 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 1</i>	L4	19	1 - 2 Oktober 2020 <i>October, 1 - 2 2020</i>	Online Training	8
51	Sales Mastery Batch 1 Modul 3 - Winning Conversations	L4	32	25 September 2020 <i>September, 25 2020</i>	Online Training	4
52	ToT 1 Managing People - Modul 4 Coaching for Performance (Tools : Grow & Care)	L3	21	25 September 2020 <i>September, 25 2020</i>	Online Training	3,5

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
53	Ansipasi Resesi Ekonomi "New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional" <i>Anticipating an Economic Recession "New Business Model for Banking and Business World Amidst the National Economic Recovery"</i>	L1	6	24 September 2020 <i>September, 24 2020</i>	Online Training	2,5
54	ToT 1 Managing People - Modul 3 Situational Leadership II	L3	22	18 September 2020 <i>September, 18 2020</i>	Online Training	3,5
55	Digital Public Training Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN <i>Digital Public Training: Interpretation and Assessor of State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN)</i>	L3, L4	6	16 - 18 September 2020 <i>September, 16 - 18 2020</i>	Online Training	18
56	In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report	Dekom	2	16 - 17 September 2020 <i>September, 16 - 17 2020</i>	Online Training	12
57	Sales Mastery Batch 3 Modul 2 - High Impact Consultative Selling 1	L4	30	16 September 2020 <i>September, 16 2020</i>	Online Training	4
58	Sales Mastery Batch 2 Modul 2 - High Impact Consultative Selling 1	L4	30	16 September 2020 <i>September, 16 2020</i>	Online Training	4
59	ToT 1 Managing People - Modul 2 part 1 Creativity : Problem Solving & Decision Making (Tools : Blue Ocean, New 7 Management Tools, Six Thinking Hats, Scamper)	L3	23	4 & 11 September 2020 <i>September, 4 & 11 2020</i>	Online Training	3,5
60	Akselerasi Internalisasi Budaya Akhlak <i>Acceleration of the Moral Culture Internalization</i>	L3	2	3 September 2020 <i>September, 3 2020</i>	Online Training	1,5
61	Sales Mastery Batch 3 Modul 1 - Mastering the Sales Mindset	L4	32	3 September 2020 <i>September, 3 2020</i>	Online Training	4
62	Sales Mastery Batch 2 Modul 1 - Mastering the Sales Mindset	L4	28	3 September 2020 <i>September, 3 2020</i>	Online Training	4
63	Manajemen Talenta Makro : Kerangka Konseptual dan Perspektif Aplikasi <i>Macro Talent Management: Conceptual Framework and Application Perspective</i>	L3, L4	2	31 Agustus 2020 <i>August, 31 2020</i>	Online Training	1
64	Global Business and Politics				Online Training	32
65	Strategi Menyusun Formula Gugatan yang Jitu <i>Strategies for Developing Accurate Lawsuit Formula</i>	L1, L3, L4	10	28 Agustus 2020 <i>August, 28 2020</i>	Online Training	2
66	BMDP - Governance Aspect Series 2	L2	56	28 Agustus 2020 <i>August, 28 2020</i>	Online Training	3
67	ToT 1 Managing People - Modul 1 Invention Cycle & Imagination : Business Modeling (Tools : Business Model Canvas)	L3	22	28 Agustus 2020 <i>August, 28 2020</i>	Online Training	3,5
68	Risk Management Refreshment Program	BOD, L1	4	26 Agustus 2020 <i>August, 26 2020</i>	Online Training	4
69	BMDP - Governance Aspect Series 2	L2	56	26 Agustus 2020 <i>August, 26 2020</i>	Online Training	3
70	Implementasi Intensif Pajak dalam Rangka COVID-19 <i>Intensive Tax Implementation in the Context of COVID-19</i>	L1, L3, L4	3	26 Agustus 2020 <i>August, 26 2020</i>	Online Training	3,5



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
71	Strategis Cerdas Pengendalian Manajemen Risiko di Era Pandemi COVID-19 <i>Smart Strategies for Risk Management Control in COVID-19 Pandemic Era</i>	BOD, L1	4	26 Agustus 2020 <i>August, 26 2020</i>	Online Training	4
72	Digital Public Training APC (Asesor Preparation Course) KPKU BUMN <i>Digital Public Training: APC (Assessor Preparation Course) on State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN)</i>	L3	2	25 - 27 Agustus 2020 <i>August, 25 - 27 2020</i>	Online Training	18
73	Strategic Marketing Plan That Works	L1	1	24 - 28 Agustus 2020	Online Training	40
74	Pendidikan Khusus Profesi Advokat <i>Advocate Professional Special Education</i>	L4	2	25 Agustus - 6 September 2020 <i>August 25 - September 6 2020</i>	Online Training	144
75	How To Become a Data Scientist	L3, L4	3	23 Agustus 2020 <i>August, 23 2020</i>	Online Training	2
76	BLDP - Coaching	L1, L2	7	19 Agustus 2020 <i>August, 19 2020</i>	Online Training	2,5
77	Workshop pengadaan TI bersertifikasi <i>Certified IT Procurement Workshop</i>	L3, L4	4	18 - 28 Agustus 2020 <i>August, 18 - 28 2020</i>	Online Training	22
78	Jamkrindo Executive Development Progam (DDI) Batch 2 Virtual Class Phase 3: Leading with Global Perspective dan Cultivating Nertwork and Partnership	L1	9	15 - 16 Agustus 2020 <i>August, 15 - 16 2020</i>	Online Training	8
79	BMDP - Governance Aspect Series 1	L1	56	14 Agustus 2020 <i>August, 14 2020</i>	Online Training	3
80	BLDP - Coaching	L1, L2	8	14 Agustus 2020 <i>August, 14 2020</i>	Online Training	2,5
81	Employee Engagement Through	L1, L3	2	13 Agustus 2020 <i>August, 13 2020</i>	Online Training	3
82	Jamkrindo Executive Development Progam (DDI) Batch 1 Virtual Class Phase 3: Leading with Global Perspective dan Cultivating Nertwork and Partnership	L1	9	8 - 9 Agustus 2020 <i>August, 8 - 9 2020</i>	Online Training	8
83	Restrukturisasi Kredit UMKM di Era Pandemi COVID-19 <i>SME Credit Restructurization in COVID-19 Pandemic Era</i>	L4	59	7 - 8 Agustus 2020 <i>August, 7 - 8 2020</i>	Online Training	15
84	BLDP - Coaching	L2, L3	5	6 Agustus 2020 <i>August, 6 2020</i>	Online Training	2,5
85	Machine Learning Modul 5 : Justifying an Organizational ML Approach ToT 2 dan ODP	L3, L4	38	6 Agustus 2020 <i>August, 6 2020</i>	Online Training	4
86	Pelatihan dan Ujian Serfikasi Kurator dan Pengurus Angkatan VI Tahun 2020 <i>Curator and 6th Batch Committee 2020 Training and Certification Test</i>	L4	1	3 - 15 Agustus 2020 <i>August, 3 - 15 2020</i>	Online Training	9,5
87	Business Presentasion Divisi MSDM <i>HRM Division Business Presentation</i>	L3, L4	8	2 - 3 Agustus 2020 <i>August, 2 - 3 2020</i>	Online Training	15
88	Machine Learning Modul 4 Model Productionalization TOT 2 dan ODP	L3	38	30 Juli 2020 <i>July, 30 2020</i>	Online Training	4
89	Asesor Kompetensi <i>Competency Assessor</i>	L1	6	24 Juli 2020 <i>July, 24 2020</i>	Hotel swissbell in kemayoran	14

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
90	Induction for New Manager to Face New Challenges	L4	21	23 Juli 2020 July, 23 2020	Online Training	2
91	Machine Learning Modul 3 : Deep Learning for Business TOT 2 dan ODP	L3	38	23 Juli 2020 July, 23 2020	Online Training	4
92	Asesor Kompetensi Competency Assessor	L1	6	20 - 23 Juli 2020 July, 20 - 23 2020	Hotel swissbell in kemayoran	56
93	BUSINESS PRESENTATION (ODP)	L4	13	20 - 21 Juli 2020 July, 20 - 21 2020	Ruang Pelatihan Lt 8	15
94	Youtube Conversion Formula	L4	3	19 Juli 2020 July, 19 2020	Online Training	2
95	New Normal Selling	L1, L3, L4	36	18 Juli 2020 July, 18 2020	Online Training	9
96	Machine Learning Modul 2 : Measuring and Formulating Model Performance TOT 2 dan ODP	L3	38	16 Juli 2020 July, 16 2020	Online Training	4
97	Understanding How to Prevent Corruption in New Reality	Dekom	1	15 Juli 2020 July, 15 2020	Online Training	2
98	New Normal Selling	L1, L3, L4	74	10 Juli 2020 July, 10 2020	Online Training	4
99	BMDP - Finance for Manager Sesi I: Pengenalan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan <i>BMDP - Finance for Manager Session I: Introduction to the Basics of Financial Statement Arrangement</i>	L2	56	10 Juli 2020 July, 10 2020	Online Training	4
100	Machine Learning Modul 1 : Solving Problem with Machine Learning TOT 2 dan ODP	L3	38	9 Juli 2020 July, 9 2020	Online Training	4
101	Sales Mastery Batch 1 Modul 2 - High Impact Consultative Selling 1	L4	34	4 Juli 2020 July, 4 2020	Online Training	4
102	Machine Learning Modul : Digital Mindset Transformation TOT 2 dan ODP	L3	38	3 Juli 2020 July, 3 2020	Online Training	4
103	BMDP - Finance for Manager Sesi I: Pengenalan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan <i>BMDP - Finance for Manager Session I: Introduction to the Basics of Financial Statement Arrangement</i>	L2	56	3 Juli 2020 July, 3 2020	Online Training	4
104	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Human Capital <i>Training for Human Capital Competency Certification</i>	L1, L3, L4	6	2 Juli 2020 July, 2 2020	Online Training	5
105	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Modul 5 : Justifying an Organizational ML Approach <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Module 5: Justifying an Organizational ML Approach</i>	L1, L2	29	26 Juni 2020 June, 26 2020	Online Training	4
106	BMDP - Finance for Manager Sesi I : Pengenalan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan <i>BMDP - Finance for Manager Session I: Introduction to the Basics of Financial Statement Arrangement</i>	L2	56	26 Juni 2020 June, 26 2020	Online Training	2
107	ToT 1 : Program Machine Learning Modul 5 Justifying an Organizational ML Approach	L3	23	26 Juni 2020 June, 26 2020	Online Training	4



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
108	UMKM Gearing-up Into New-Normal "Solusi Pembiayaan Pemasaran dan Digitalisasi" <i>SMEs Gearing-up Into New Normal "Solution to Marketing Financing and Digitalization"</i>	L1, L2	72	25 Juni 2020 <i>June, 25 2020</i>	Online Training	3,5
109	New Financial Strategy for The New Normal World	L4	184	20 Juni 2020 <i>June, 20 2020</i>	Online Training	1,5
110	ToT 1 Program Machine Learning Modul 4 Model Productionalization	L3	23	19 Juni 2020 <i>June, 19 2020</i>	Online Training	4
111	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Modul 4 : Model Productionalization <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Module 4: Model Productionalization</i>	L1, L2	29	19 Juni 2020 <i>June, 19 2020</i>	Online Training	4
112	Mitigasi Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan <i>Credit Risk Mitigation and Restructuring Through Insurance</i>	L1, L3, L4	38	16 Juni 2020 <i>June, 19 2020</i>	Online Training	2
113	Managing Time Effectively In The New Normal	L3	156	13 Juni 2020 <i>June, 13 2020</i>	Online Training	2
114	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Modul 3 : Deep Learning for Business <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Module 3: Deep Learning for Business</i>	L1, L2	29	12 Juni 2020 <i>June, 13 2020</i>	Online Training	4
115	ToT 1 Program Machine Learning Modul 3 Deep Learning for Business	L3, L4	23	12 Juni 2020 <i>June, 12 2020</i>	Online Training	4
116	Developing Habist in Communication as a Leader	L3, L4	23	11 Juni 2020 <i>June, 11 2020</i>	Online Training	2,5
117	ToT 1 "feedback assignment dan EQ for leaders"	L3, L4	23	10 Juni 2020 <i>June, 10 2020</i>	Online Training	1,5
118	cara cepat baca laporan keuangan komprehensif Kanwil VI Surabaya <i>"Quick Way to Read Comprehensive Financial Statements" Surabaya Regional Office VI</i>	L3, L4	36	10 Juni 2020 <i>June, 10 2020</i>	Online Training	7
119	How to Automate Risk Decisioning : Getting Real with Artificial Intelligence	L3, L4	3	9 Juni 2020 <i>June, 9 2020</i>	Online Training	1
120	Design Thinking for Bankers : Strategy to Face The New Normal	L1, L4	3	9 Juni 2020 <i>June, 9 2020</i>	Online Training	4
121	Digital Awareness IT Devices Batch II	L4	86	8 Juni 2020 <i>June, 8 2020</i>	Online Training	2
122	Digital Awareness IT Devices	L4	84	5 Juni 2020 <i>June, 5 2020</i>	Online Training	2
123	Evaluasi ToT 1 Training Machine Learning <i>ToT Evaluation 1 Machine Learning Training</i>	L3, L4	23	5 Juni 2020 <i>June, 5 2020</i>	Online Training	3,5
124	Modul 2 Measuring and Formating Model Performance	L1, L2	29	3 Juni 2020 <i>June, 3 2020</i>	Online Training	4
125	Program Machine Learning Lanjutan Modul Digital Mindset Leadership <i>Advanced Machine Learning Program Module: Digital Mindset Leadership</i>	L3	23	2 Juni 2020 <i>June, 3 2020</i>	Online Training	4
126	Jurus Closing Dengan Whatsapp Marketing <i>Closing Move with Whatsapp Marketing</i>	L3, L4	44	31 Mei 2020 <i>May, 31 2020</i>	Online Training	1,5

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
127	Training Machine Learning ToT 1 Modul Digital Mindset Transformation	L3, L4	23	29 Mei 2020 May, 29 2020	Online Training	4
128	Sales Mastery	L4	34	28 Mei 2020 May, 28 2020	Online Training	4
129	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Digital Mindset Transformation Modul 1 : Solving Problem With Machine Learning Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Digital Mindset Transformation Module 1: Solving Problem with Machine Learning	L1, L3	29	27 Mei 2020 May, 27 2020	Online Training	4
130	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1, L2	8	26 Mei 2020 May, 26 2020	Online Training	4
131	Sengketa Asuransi di Masa Pandemi COVID-19 "Potensi Sengketa, Antisipasi dan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Insurance Conflict in COVID-19 Pandemic Era "Conflict Potency, Anticipation, and Solution Through Arbitration"	L3, L4	4	20 Mei 2020 May, 20 2020	Online Training	1,5
132	Digital Transformation	L1, L2	29	20 Mei 2020 May, 20 2020	Online Training	4
133	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1, L2	8	20 Mei 2020 May, 20 2020	Online Training	4
134	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1	5	19 Mei 2020 May, 19 2020	Online Training	4
135	ToT 2 Program Basic Finon Part 2	L3	25	19 Mei 2020 May, 19 2020	Online Training	2
136	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1	7	18 Mei 2020 May, 18 2020	Online Training	4
137	ToT 2 Program Basic Finon Part 1	L3	25	18 Mei 2020 May, 18 2020	Online Training	6
138	People Analytics: Mindblowing Concept Poor Practices	L1, L3, L4	3	16 Mei 2020 May, 16 2020	Online Training	2
139	ToT 1 Program Machine Learning	L3, L4	23	15 Mei 2020 May, 15 2020	Online Training	4
140	Webinar PERADI "Keadaan Kahar Akibat COVID-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan" PERADI Webinar "Force Majeure Due to COVID-19 and Its Implementation in Credit/Financing Agreements"	L4	8	15 Mei 2020 May, 15 2020	Online Training	2
141	Webinar Force Majeure dalam Kepailitan & PKPU Force Majeure in Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Webinar	Dekom	1	13 Mei 2020 May, 13 2020	Online Training	2
142	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch III "Quick Way to Read Financial Statements" Batch III	L3, L4	36	13 Mei 2020 May, 13 2020	Online Training	7
143	Dapatkah COVID-19 Dianggap Peristiwa Force Majeure Dalam Kontrak? Can COVID-19 be Considered as Force Majeure Event on Contracts?	L1, L3, L4	20	13 Mei 2020 May, 13 2020	Online Training	2



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
144	Forensic Accounng vs Invesgave Auding	L4	1	11 - 13 Mei 2020 May, 11 - 13 2020	Online Training	12
145	Financial Distress Assets : Menguji Daya Tahan Industri Di Tengah Badai Pandemi <i>Financial Distress Assets: Testing the Industrial Durability Amidst the Pandemic Storm</i>	L1	2	6 Mei 2020 May, 6 2020	Online Training	7
146	OKR : Breaking the rules of traditional PM	L3, L4	3	1 Mei 2020 May, 1 2020	Online Training	2
147	Webinar Perlindungan Hak Normatif Pekerja / Buruh Terkait Dengan Pandemi Covid-19 <i>Webinar on Labor Normative Rights Protection Related to the COVID-19 Pandemic</i>	L1, L3, L4	6	29 April 2020 April, 29 2020	Online Training	3
148	Webinar Digital Leadership Adapting to the New Normal	L1	18	25 April 2020 April, 25 2020	Online Training	1
149	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch II <i>"Quick Way to Read Financial Statements" Batch II</i>	L3, L4	43	24 April 2020 April, 24 2020	Online Training	7
150	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch I <i>"Quick Way to Read Financial Statements" Batch I</i>	L3, L4	44	23 April 2020 April, 23 2020	Online Training	7
151	Internet of Things	L4	54	23 April 2020 April, 23 2020	Online Training	2
152	Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19 <i>Credit Restructurization as a Result of COVID-19</i>	L1, L3, L4	17	21 April 2020 April, 21 2020	Online Training	6
153	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN <i>Corporate Law for Executive, Legal Aspects in State-Owned Enterprise Corporation Management</i>	Dekom	5	26 - 27 Maret 2020 March, 26 - 27 2020	Online Training	18
154	Ujian Sertifikasi MR level 2 <i>Level 2 Risk Management Certification Exam</i>	L2, L3	34	14 Maret 2020 March, 14 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
155	HR Management and Analytics : Unlock The Value of Human Capital	L3, L4	2	12 Maret - 6 Mei 2020 March, 12 - May 6 2020		112
156	Hari Mutu Sharing Knowledge "Investasi Reksadana" <i>Knowledge Sharing Quality Day "Mutual Funds Investment"</i>	L3, L4	18	13 Maret 2020 March, 13 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
157	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 <i>Level 2 Risk Management Certification & Training</i>	L2, L3	32	12 - 13 Maret 2020 March, 12 - 13 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	18
158	Java Programming Full Package	L4	2	9 - 13 Maret 2020 March, 9 - 13 2020		30
159	Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan <i>Employment Technical Guidance</i>	L4	1	4 - 5 Maret 2020 March, 4 - 5 2020	Hotel Oasis Amir	18
160	Ujian Sertifikasi MR level 2 <i>Level 2 Risk Management Certification Exam</i>	L2, L3	25	7 Maret 2020 March, 7 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
161	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 <i>Level 2 Risk Management Training & Certification</i>	L2, L3	25	5 - 6 Maret 2020 March, 5 - 6 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	18
162	IELTS PREPARATION CLASS	L4	9	4 Maret 2020 March, 4 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
163	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 2	L1	11	2 - 4 Maret 2020 March, 2 - 4 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67
164	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 1	L1	9	24 - 26 Februari 2020 February, 24 - 26 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67
165	Ujian Sertifikasi MR level 2 (Batch V) Level 2 Risk Management Certification Exam (Batch V)	L3	24	22 Februari 2020 February, 22 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67
166	Machine Learning	BOD, L3	3	19 Februari - 25 Maret 2020 February, 19 - March, 25 2020		72
167	Business Leaders Development Program Pengembangan L1 - Prasetiya Mulya Business Leaders Development Program on L1 Development- Prasetiya Mulya	L1, L2, L3		19 - 21 Februari 2020 February, 19 - 21 2020	Prasetiya Mulya	21
168	Pembekalan & Sertifikasi MR level 2 untuk Kepala Bagian (Batch V) Level 2 Risk Management Training & Certification for Head of Divisions (Batch V)	L3	22	20 - 21 Februari 2020 February, 20 - 21 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
169	IELTS PREPARATION CLASS	L4	15	19 Februari 2020 February, 19 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
170	Training Penggunaan Aplikasi Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (e-PPT) Training on Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (Electronic Integrated Tax Processing/ e-PPT) App Usage	L3, L4	51	18 Februari 2020 February, 18 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	20
171	Training Penggunaan Aplikasi Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (e-PPT) Training on Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (Electronic Integrated Tax Processing/ e-PPT) App Usage	L3, L4	54	17 Februari 2020 February, 17 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	20
172	Management Information System For Non-IT Background	L3, L4	51	13 - 14 Februari 2020 February, 13 - 14 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	36
173	IELTS PREPARATION CLASS	L3, L4	21	12 Februari 2020 February, 12 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
174	IELTS PREPARATION CLASS	L4	21	5 Februari 2020 February, 5 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
175	Ujian Sertifikasi MR Level 1 (Batch V) Level 1 Risk Management Certification Exam (Batch V)	L3, L4	19	8 Februari 2020 February, 8 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
176	Ujian Sertifikasi MR Level 2 (Batch IV) Level 2 Risk Management Certification Exam (Batch IV)	L3, L4	24	8 Februari 2020 February, 8 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	2



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu Time	Tempat Pelatihan Place	Durasi Pelatihan Training Durations
177	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 1 untuk Kepala Bagian (Batch V) <i>Level 1 Risk Management Training & Certification for Head of Divisions (Batch V)</i>	L3, L4	15	6 - 7 Februari 2020 <i>February, 6 - 7 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	16
178	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 untuk Kepala Bagian (Batch IV) <i>Level 2 Risk Management Training & Certification for Head of Divisions (Batch IV)</i>	L3, L4	24	6 - 7 Februari 2020 <i>February, 6 - 7 2020</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 <i>Multipurpose Room, 10th floor</i>	16
179	"Permasalahan Dan Resiko Penjamin" <i>"Insurer Problems and Risks"</i>	L3, L4	14	31 Januari 2020 <i>January, 31 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	2
180	English Club (Fun Class) "Banking and insurance industries in the world expectations"	L4	10	30 Januari 2020 <i>January, 30 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	2
181	Boot Camp Training of The Trainers Modul 1 (Angkatan 2) - analisa kredit <i>Boot Camp Training of The Trainers Module 1 (Batch 2) – Credit Analysis</i>	L3	25	29 Januari - 2 Februari 2020 <i>January, 29 - February, 2 2020</i>	Hotel Padjadjaran	55
182	Boot Camp Training of The Trainers Modul 2 (Angkatan 1) <i>Boot Camp Training of The Trainers Module 2 (Batch 1)</i>	L3	25	29 Januari - 2 Februari 2020 <i>January, 29 - February, 2 2020</i>	Hotel Padjadjaran	55
183	IELTS PREPARATION CLASS	L4	25	29 Januari 2020 <i>January, 29 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	3
184	English Club (Fun Class) "The importance of reading for our careers"	L3, L4	13	23 Januari 2020 <i>January, 23 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	2
185	Business Leader Development Program - PRASMUL	L1, L2, L3	21	23 - 24 Januari 2020 <i>January, 23 - 24 2020</i>	Jakarta	14
186	IELTS PREPARATION CLASS	L4	27	22 Januari 2020 <i>January, 22 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	3
187	Jamkrindo Executive Development Program Phase 1 Batch 2	L1	9	20 - 27 Januari 2020 <i>January, 20 - 27 2020</i>	Jakarta	48
188	English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"	L3, L4	37	16 Januari 2020 <i>January, 16 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	2
189	IELTS PREPARATION CLASS	L3, L4	21	15 Januari 2020 <i>January, 15 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	3
190	Jamkrindo Executive Development Program Phase 1 Batch 1	L1	9	13 - 17 Januari 2020 <i>January, 13–17 2020</i>	Jakarta	40
191	In House Training Dynamic Business Presentation utk L1	L1	24	9 - 10 Januari 2020 <i>January, 9–10 2020</i>	Jakarta	16
192	English Club (Fun Class) "Getting to Know the World More"	L3, L4	11	9 Januari 2020 <i>January, 9 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	2
193	IELTS PREPARATION CLASS	L3, L4	32	8 Januari 2020 <i>January, 8 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8 <i>Training Room, 8th floor</i>	3

- **Penghargaan Kepada Karyawan**

Di samping memberikan hak-hak remunerasi karyawan, Perusahaan juga memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah bekerja dengan baik sekaligus sebagai stimulus dalam meningkatkan kinerja. Pada tahun 2020, Perusahaan memberikan reward dalam bentuk pemberian jasa produksi dan penghargaan masa kerja.

- **Penilaian Kinerja Karyawan**

Sejak tahun 2018, sesuai Surat Edaran No.14/SE/4/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Pedoman Penerapan KPI Individu sebagai Dasar Penilaian Kinerja Karyawan, penilaian kinerja karyawan menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* berbasis *balanced scorecard*. Penilaian kinerja merupakan bagian dari pengembangan talenta bagi karyawan, dimana setiap karyawan akan mendapatkan evaluasi atas kinerja dari setiap individu.

Penilaian atas kinerja karyawan dilakukan menggunakan *Key Performance Indicator (KPI)* Individu pola *Balance Scorecard* dengan 4 (empat) perspektif penilaian:

1. *Financial*
2. *Customer*
3. *Internal Business Process*
4. *People Development*

Tahap pelaksanaan penilaian kinerja berdasarkan KPI Individu yaitu sebagai berikut:

1. Penetapan target (*goals setting*) masing-masing komponen KPI Individu.
2. Penetapan target individu dilakukan dengan cara *One on One* (diskusi tatap muka) antara atasan dan karyawan yang bersangkutan, dimana atasan memberikan *coaching* dan *mentoring* kepada yang bersangkutan.
3. Penandatanganan KPI Individu oleh atasan langsung, atasan tidak langsung dan karyawan yang bersangkutan.
4. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan agar target kerja yang menjadi KPI Individu dapat tercapai maka perlu dilakukan *Performance Review* setiap 3 (tiga) bulan sekali.
5. Pada akhir tahun dilakukan penilaian akhir kinerja (*Performance Appraisal*) KPI Individu. Penilaian dilakukan menggunakan 2 (dua) variabel sebagai berikut:
 - a. Pencapaian KPI Individu dengan bobot sebesar 90%.
 - b. Budaya kerja dalam bentuk perilaku dengan bobot sebesar 10%.

- **Award to Employees**

In addition to providing the employee with their remuneration rights, the Company also rewards employees who have worked well. This also functions as a stimulus to improve performance. In 2020, the Company provides rewards in the form of providing production services and years of service awards.

- **Employee Performance Assessment**

According to Circular Letter No.14/SE/4/III/2018 dated March 29, 2018, concerning Guidelines for the Implementation of Individual KPIs as the basis for Employee Performance Evaluation, employee performance appraisal uses a balanced scorecard based Key Performance Indicator (KPI). Performance assessment is a part of talent development for employees, in which each employee will get an evaluation of the performance of each individual.

Assessment of employee performance is carried out using the Individual Key Performance Indicator (KPI) Balance Scorecard pattern with 4 (four) valuation perspectives:

1. *Financial*
2. *Customer*
3. *Internal Business Process*
4. *People Development*

The implementation stage of the performance assessment is based on the Individual KPI:

1. *Target setting for each individual KPI component.*
2. *Establishment of individual targets is done by means of one on one (face-to-face discussion) between the supervisor and the employee concerned, in which the superior provides coaching and mentoring to those concerned.*
3. *Signing of individual KPIs by direct supervisors, indirect supervisors, and relevant employees.*
4. *Performance Review was conducted every 3 (three) months to evaluate the implementation of the work so that the work targets that become individual KPIs can be achieved.*
5. *At the end of the year, a final performance assessment (Performance Appraisal) of Individual KPI is conducted. Assessment is carried out using the following 2 (two) variables:*
 - a. *The achievement of Individual KPI with a value of 90%.*
 - b. *Work culture in the form of behavior with a value of 10%.*



6. Penilaian kinerja tersebut akan dilakukan pemeringkatan (*Performance Level*) pada setiap masing-masing tingkat jabatan yang sama.

Berdasarkan penilaian tersebut, Perusahaan dapat menggunakannya sebagai dasar kebijakan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan perhitungan dan pembayaran jasa produksi karyawan.
2. Kebijakan *coaching* dan *mentoring* untuk meningkatkan produktivitas karyawan.
3. Kebijakan pengembangan karyawan
4. Kebijakan *talent management* dan *career planning* karyawan.

Pada tahun 2020, Perusahaan menggunakan hasil penilaian kinerja berdasarkan KPI Individu sebagai dasar untuk perhitungan pembayaran jasa produksi tahun buku 2020.

- Pemenuhan Hak Karyawan

Salah satu bentuk upaya Perusahaan dalam memperhatikan kesejahteraan seluruh pegawai, dengan memberikan remunerasi bagi pegawai yang memiliki kinerja yang baik setiap tahunnya. Jamkrindo menyadari bahwa tuntutan tugas dan tanggung jawab Perusahaan terus meningkat seiring peningkatan skala dan *volume* bisnis Perusahaan. Untuk itu seluruh karyawan dituntut untuk dapat bekerja secara intensif dan optimal sesuai kebutuhan perusahaan. Penggajian karyawan dilakukan berdasarkan *job grade*, kompetensi dan tingkat tanggung jawab jabatannya serta kinerja individu karyawan dan kinerja Perusahaan. Selain hal tersebut, Jamkrindo juga memberikan benefit kepada karyawan berupa Jasa Produksi sebagai bentuk apresiasi Perusahaan atas kinerja tahunannya.

Berikut rincian pendapatan dan rasio gaji tertinggi dan terendah karyawan Jamkrindo:

1. Penggajian karyawan Jamkrindo terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok
 - b. Tunjangan:
 - 1) Tunjangan Jabatan
 - 2) Tunjangan Zona
 - 3) Tunjangan Hari Raya
 - 4) Tunjangan Cuti Tahunan
 - 5) Tunjangan Cuti Besar
 - 6) Tunjangan Uang Makan.
 - c. Fasilitas
 - 1) Fasilitas Cuti
 - 2) Fasilitas program kesehatan
 - 3) Fasilitas program pension

6. *The performance assessment will be carried out with a ranking (Performance Level) at each level of the same position.*

Based on the assessment, the Company can use it as a policy basis for the following matters:

1. *Calculation and payment of employee production services policy.*
2. *Coaching and mentoring policies to increase employee productivity.*
3. *Employee development policy*
4. *Talent management and career planning policies of employees.*

In 2020, the Company used performance assessment results based on Individual KPIs as the basis for the calculation of production service payments for the financial year 2020.

- *Fulfillment of Employee Rights*

One form of the Company's efforts to preserve the welfare of all employees is by providing remuneration for employees who have a good performance every year. Jamkrindo realizes that the demands of the Company's duties and responsibilities continue to increase along with the increase in the scale and volume of the Company's business. For this reason, all employees are required to work intensively and optimally according to the needs of the company. Employee payroll is conducted based on job grade, competence and level of responsibility of his position as well as individual performance of employees and performance of the Company. In addition to this, Jamkrindo also provides benefits to employees in the form of Production Services as a form of the Company's appreciation for their annual performance.

The following is the breakdown of income and the ratio of the highest and lowest salary of the Jamkrindo's employees:

1. *Jamkrindo's employee income consists of:*
 - a. *Basic salary*
 - b. *Allowances:*
 - 1) *Positional allowance.*
 - 2) *Regional allowance.*
 - 3) *Holiday allowance*
 - 4) *Annual Leave Allowance*
 - 5) *Sabbatical Leave Allowance*
 - 6) *Meal Allowance*
 - c. *Facilities*
 - 1) *Leave Facility*
 - 2) *Health program facilities*
 - 3) *Pension program facilities*

- 4) Fasilitas asuransi jiwa
 - 5) Fasilitas rumah jabatan
 - 6) Fasilitas kendaraan jabatan
 - 7) Fasilitas lainnya.
2. Rasio Gaji (Upah) tertinggi dan terendah
- Berikut kami sampaikan Rasio Gaji (Upah) Tertinggi dan Terendah sebagai berikut:
- a. Rasio Gaji Karyawan Tertinggi dan Terendah = 1 : 13,2
 - b. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah = 1 : 1,1
 - c. Rasio Honorarium Dewan Komisaris Tertinggi dan Terendah = 1 : 1,1
 - d. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Karyawan Tertinggi = 1 : 3,1

- 4) Life insurance facilities
 - 5) Home office facilities
 - 6) Vehicle facilities
 - 7) Other facilities.
2. The highest and lowest salary ratio
- The following is the Highest and Lowest Salary Ratios:
- a. Highest and Lowest Employee Salary Ratio = 1: 13.2
 - b. Highest and Lowest Directors Salary Ratio = 1: 1.1
 - c. Lowest and Highest Supervisory Board Honorarium Ratio = 1: 1.1
 - d. Highest Directors Salary and Highest Employee Salary ratio = 1: 3.1

Gaji Salary	Grade Grade	Gaji + Tunjangan Tetap Salary + Fixed Allowance	Jabatan Position
Gaji Tertinggi 2020 Highest Salary 2020	20	Rp60.343.351,-	Pemimpin Wilayah Regional Leader
Gaji Terendah 2020 Lowest Salary 2020	7	Rp4.539.447,-	Pelaksana Executor
Gaji Tertinggi 2019 Highest Salary 2019	16	Rp.46.027.450,-	Pemimpin Wilayah Regional Leader
Gaji Terendah 2019 Lowest Salary 2019	2	Rp.4.368.651,-	Pelaksana Executor

Adapun peningkatan/penurunan remunerasi dan tunjangan serta bonus terhadap karyawan tetap dan kontrak di tahun 2020 dan perbandingannya dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

The increase/decrease in remuneration and benefits and bonuses to permanent and contract employees in 2020 and the comparison with 2019 are as follows:

Remunerasi dan Tunjangan serta Bonus Karyawan Tetap dan Kontrak

Remuneration and Benefits and Bonuses for Permanent Employees and Contracts

Uraian Description	2020 (Rp-juta) (IDR-million)	2019 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-million)	Persentase Percentage
Gaji Salary	99.461	92.435	7.026	7,60% ▲
Tunjangan Transisi Transition allowance	17.672	21.283	(3.611)	-16,97% ▼
Tunjangan Jabatan Positional allowance	37.705	25.574	12.132	47,44% ▲
Tunjangan Konsumsi Meal allowance	220	1.019	(799)	-78,37% ▼



Uraian Description	2020 (Rp-juta) (IDR-million)	2019 (Rp-juta) (IDR-million)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
			Jumlah (Rp-juta) Total (IDR-million)	Persentase Percentage
Tunjangan Wilayah Regional allowance	2.701	6.814	(4.113)	-60,37%
Jumlah Total	157.759	147.125	10.634	7,23%
Bonus Bonus	94.328	92.435	1.893	2,05%

Tunjangan karyawan berdasarkan status kepegawaiannya disajikan dalam tabel di bawah ini.

Employee benefits based on employee status are presented in the table below.

Tunjangan yang Diberikan Kepada Karyawan Tetap, Kontrak, dan Outsource

Benefits Provided to Permanent Employees, Contracts, and Outsourcers

Uraian Description	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contract Employees	Karyawan Outsource Outsource Employees
Tunjangan Transisi Transition Allowance	✓	✗	✗
Tunjangan Jabatan Position Allowance	✓	✗	✗
Tunjangan Wilayah Regional allowance	✓	✗	✗
Tunjangan Konsumsi Meal allowance	✓	✓	✗

✓ = diberikan | ✗ = tidak diberikan
✓ = provided | ✗ = not provided

- Rasio Upah Standar**
 Ketaatan Jamkrindo terhadap ketentuan ketenagakerjaan juga ditunjukkan dengan pembayaran upah karyawan baru yang jumlahnya jauh di atas Upah Minimum Regional (UMR). Upah minimum yang diberikan Jamkrindo untuk karyawan di tingkat terendah adalah sebesar Rp4.539.447,- atau 6% dari UMR di wilayah DKI Jakarta. Kebijakan ini berlaku untuk semua wilayah operasi. Dalam memberikan upah, termasuk remunerasi, Jamkrindo tidak membedakan berdasarkan gender, melainkan berpatokan pada kompetensi karyawan.
- Standard Wage Ratio**
 Jamkrindo's compliance with labor provisions was also indicated by the payment of wages for new employees that are far above the Regional Minimum Wage (UMR). The minimum wage given by Jamkrindo for new employees is IDR4,539,447.- or 6% of Regional Minimum Wage (UMR) in DKI Jakarta. This policy applies to all operating areas. In providing wages, including remuneration, Perum Jamkrindo does not differentiate based on gender but based on employee competency.

• **Imbalan Pasca Kerja**

Sebagai korporasi yang bertanggungjawab, Jamkrindo senantiasa taat dan patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan. Salah satunya berkaitan dengan pemenuhan hak karyawan berkaitan dengan imbalan pasca kerja/program pensiun. Dalam hal ini, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Selain program pensiun imbalan pasti, Perusahaan juga memiliki program iuran pasti dimana Perusahaan membayar iuran yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

Pada tahun 2020, Beban Estimasi Imbalan Pasca Kerja tercatat sebesar Rp8.923.611.480,-, meningkat 191,10% dibanding tahun 2019 yang sebesar Rp. 4.669.715.255,-.

• **Kesehatan dan Keselamatan Kerja: Menciptakan Lingkungan Kerja yang Aman dan Nyaman**

Selain terus berupaya menciptakan kenyamanan dalam bekerja, Perusahaan juga berkomitmen untuk mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan. Dalam hal ini, Perusahaan bertekad untuk menekan angka kecelakaan sehingga tidak terjadi satupun kecelakaan (*zero accident*).

Untuk mewujudkan target tersebut, Perusahaan memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja dengan menyediakan alat keselamatan kerja, seperti jalur evakuasi, sprinkle, hydrant, alat pemadam kebakaran, kotak P3K dan alat keselamatan kerja lainnya di setiap lantai gedung kantor. Selain itu, pelaksanaan program K3 untuk fasilitas kesehatan diwujudkan dengan mengikutsertakan karyawan dan keluarga dalam program asuransi kesehatan BPJS dan Asuransi Mandiri Inhealth.

Selain kesehatan dan keselamatan kerja, Perusahaan juga mengatur mengenai penanganan keadaan darurat, yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 13/Per-Dir/5/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Kebijakan Umum Business Continuity Management (BCM), dan Surat Edaran Direksi No. 132/SE/4/XII/2020 tanggal 30 Desember

• **Post-Employment Benefits**

As an accountable responsible corporation, Jamkrindo has always been obedient and compliant to labor regulations. One of which relates to the fulfillment of employee rights related to post-employment benefits/pension programs. In this case, the Company has included its employees in the pension program, namely the Employee Welfare Insurance Program and the Employee Welfare Program through the Pension Fund Financial Institution (DPLK). In addition to the pension plan, the Company also records defined post-employment benefits for employees in accordance with the Employment Act.

A defined benefit pension plan is a pension plan that determines the number of pension benefits to be provided, usually based on one or more factors such as age, tenure or compensation. In addition to the defined benefit pension plan, the Company also has a defined contribution plan in which the Company pays contributions calculated based on a certain percentage of the employees' basic salary to a pension insurance program held by Pension Funds Financial Institution. Contributions are charged to the income statement when payable.

In 2020, estimated Post-Employment Benefit Expenses amounted to IDR8,923,611,480,-, an increase of 191.10% compared to 2019 of IDR4,669,715,255,-.

• **Occupational Health and Safety: Creating a Safe and Comfortable Working Environment**

In addition to continuing to strive to create comfort in work, the Company is also committed to creating a culture of occupational health and safety for its employees. In this case, the Company is determined to reduce the number of accidents to achieve zero accidents.

To realize this target, the Company provides safety and health protection by providing work safety equipment, such as evacuation route scheme, sprinkle, hydrant, fire extinguishers, first aid kits, and other safety equipment on each floor of the office building. In addition, the implementation of the Occupational and Health Safety (K3) program for health facilities was realized by including employees and families in the BPJS health insurance program and Mandiri Inhealth Insurance.

In addition to occupational health and safety, the Company also regulates the handling of emergencies, which are regulated in Board of Directors Regulation No. 13/Per-Dir/5/IX/2020 dated September 4, 2020 on General Policy of Business Continuity Management (BCM), and Board of Directors Circular Letter No. 132/SE/4/XII/2020 dated



2020 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Langkah konkrit yang dilakukan untuk kedaruratan, antara lain, Perusahaan memberikan pelatihan dan simulasi tanggap Darurat berupa:

- Memutar video prosedur simulasi evakuasi tanggap darurat sebelum memulai rapat/acara.
- Memberikan sosialisasi dan Buku saku tanggap bencana kepada Unit kerja.
- Melaksanakan simulasi tanggap darurat gempa bumi kepada pengguna gedung.
- Melaksanakan simulasi tanggap darurat kebakaran kepada pengguna gedung.
- Memberikan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja kepada karyawan yang ditunjuk.

Dengan berbagai upaya itu, pada tahun pelaporan, Jamkrindo mampu meneruskan pencapaian dalam mewujudkan angka kecelakaan kerja nihil.

- **Sertifikasi Gedung Terkait Keselamatan Karyawan**
Dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan karyawan, maka dilakukan sertifikasi atas perangkat gedung antara lain instalasi proteksi kebakaran, motor diesel (*genset*), instalasi listrik, elevator penumpang (*lift*) dan instalasi penyalur petir. Hal tersebut juga merupakan tindak lanjut dari ke Peraturan Gubernur No.19 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan Penggunaan Pesawat Instalasi, Mesin, Peralatan, Bahan, Barang dan Produk Teknis Lainnya menyatakan setiap perusahaan yang melakukan perencanaan, pembuatan, pemasangan, pemakaian, perubahan teknis, pembongkaran atau pemusnahan pesawat, instalasi mesin, peralatan, bahan, barang dan produk teknis lainnya harus memiliki izin dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Ibukota Jakarta.
- **Ketercakupannya dalam Perjanjian Kerja Bersama**
Karyawan Jamkrindo memiliki wadah untuk berserikat dan berkumpul berupa Serikat Pekerja bernama "Sekarya" (Serikat Karyawan). Anggota serikat pekerja saat ini berjumlah 1.002 orang, yang terdiri dari karyawan permanen dan karyawan Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah. Seluruh anggota Serikat Pekerja (100%) tercakup dan terikat dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak dan kewajiban karyawan dan manajemen Jamkrindo.

December 30, 2020 on Management of Occupational Safety and Health Management System. As a concrete measures to handling the emergency, the Company provides training and simulation of Emergency Response in the form of:

- *Play a video of the emergency response evacuation simulation procedure before starting the meeting/event.*
- *Provide socialization and disaster response handbooks to the work unit.*
- *Perform earthquake emergency response simulations to building users.*
- *Perform fire emergency response simulations to building users.*
- *Provide occupational health and safety training to designated employees.*

With these efforts, in the reporting year, Jamkrindo was able to continue the achievement in realizing zero work accident rate.

- **Building Certification Related to Employee Safety**
In order to maintain the safety and security of employees, the Company certifies building equipment such as fire protection installations, diesel motors (generator sets), electrical installations, passenger elevators (elevators) and lightning distribution installations. It is also a follow-up to Governor Regulation No.19 of 2008 concerning Procedures for Licensing the Use of Installation Aircraft, Machinery, Equipment, Materials, Goods and Other Technical Products stating that every company that conducts planning, manufacture, installation, use, technical change, dismantling or destruction of aircraft, installation of machinery, equipment, materials, goods and other technical products must have a license from the Head of The Office of Manpower and Transmigration of Government DKI Jakarta.
- **Inclusion in Collective Labor Agreements**
Jamkrindo employees are given a place to associate and assemble in the form of a Workers' Union called "Sekarya". Currently, there are 1,002 union members, consisting of permanent employees and assignment of employees to subsidiaries, PT Jamkrindo Syariah. All members of the Workers' Union (or 100%) are included and bound by the Collective Labor Agreement (PKB) which regulates the rights and obligations of employees and management of Jamkrindo.

Jumlah Karyawan yang Menjadi Anggota Serikat Pekerja dan Terikat PKB

Number of Employees who become Members of Workers' Unions and Bound to the Collective Labor Agreement

Tahun Year	Jumlah Karyawan dalam Serikat Pekerja Number of Employees in Workers' Unions	Persentase Percentage
2020	965	100%
2019	965	100%

• Survei Kepuasan Karyawan

Survei kepuasan karyawan dilakukan untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan terhadap Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan karyawan merujuk pada sikap umum seorang karyawan terhadap pekerjaan dan Perusahaan. Tingkat kepuasan dan keterikatan yang tinggi akan menunjukkan sikap yang positif terhadap pekerjaan tersebut. Sebaliknya, ketidakpuasan dan ketidakterikatan karyawan menunjukkan sikap yang kontraproduktif terhadap pekerjaannya.

Dalam menilai program peningkatan tenaga kerja, maka Jamkrindo membuat evaluasi indeks kepuasan karyawan dan engagement karyawan. Program kepuasan karyawan dapat digambarkan sebagai program peningkatan kinerja (performance improvement) secara efektif, dalam hal ini adalah program yang menyesuaikan dengan kebutuhan para karyawan.

Penelitian kepuasan karyawan Jamkrindo ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepuasan karyawan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kanwil, dan KCK Unit Kerja Jamkrindo dengan jumlah responden sebanyak 600 karyawan Jamkrindo dengan rincian 367 karyawan laki-laki dan 233 karyawan perempuan.

Hasil dari survei kepuasan karyawan dengan menggunakan indeks kepuasan karyawan dan engagement karyawan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk lebih meningkatkan kinerjanya.

• Employee Satisfaction Survey

The employee satisfaction survey is conducted to measure the extent of employee satisfaction and engagement with the Company. The level of satisfaction and attachment of employees refers to the general attitude of an employee to their work and the Company. A high level of satisfaction and attachment will show a positive attitude towards the work. Conversely, dissatisfaction and attachment of employees show a counterproductive attitude towards their work.

In assessing the workforce improvement program, Jamkrindo creates an evaluation index of the employee satisfaction and engagement. The employee satisfaction program can be described as an effective performance improvement program, in this case, the program which adjusts to the needs of the employees.

Jamkrindo employee satisfaction research was conducted to find out how employee satisfaction. This research was conducted at the Head Office, 9 (nine) Regional Office, and Jamkrindo KCK Work Unit with the number of respondents of 600 Jamkrindo employees with details 367 male employees and 233 female employees.

The results of the employee satisfaction survey through the use of employee satisfaction and employee engagement index are expected to be utilized by the Company to further improve its performance.

Uraian Description	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction	
	2020	2019
Kantor Pusat / Head Office	79,59	74,90
Wilayah I / Regional I	81,90	81,38
Wilayah II / Regional II	81,65	85,41
Wilayah III / Regional III	80,11	77,41



Uraian Description	Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction	
	2020	2019
Wilayah IV / Regional IV	80,79	76,68
Wilayah V / Regional V	79,33	80,42
Wilayah VI /Regional VI	83,39	84,19
Wilayah VII / Regional VII	83,60	83,56
Wilayah VIII / Regional VIII	79,58	76,85
Wilayah IX / Regional IX	81,51	95,64
Kantor Cabang Khusus / Special Branch Office	81,04	74,08

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan tertinggi terdapat di wilayah VII Denpasar dengan skor 83,60 (kualifikasi "Baik")
2. Indeks kepuasan terendah terdapat di wilayah V Semarang dengan skor 79,33 (kualifikasi "Baik")

Secara keseluruhan, hasil survei kepuasan karyawan Jamkrindo tahun 2020 sebesar 80,94 dan termasuk dalam kategori "Baik". Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 79,24 .

- Survei Keterikatan Karyawan
Jamkrindo telah melaksanakan survei opini pegawai untuk melihat persepsi para pegawai dalam aspek keterikatan mereka terhadap Perusahaan dan persepsi mereka terhadap kebijakan serta program pengelolaan SDM yang dijalankan. Hasil dari survei ini telah disampaikan sebagai management report kepada Direksi dan digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelola SDM dalam rangka terus menerus memperbaiki sistem serta meningkatkan berbagai aspek yang telah dinilai baik dalam pelaksanaan pengelolaan SDM.

Nilai keterikatan dibangun dari 12 (dua belas) pernyataan loyalitas dan emosional karyawan yang dikutip dari teori Gallup. Adapun dalam penelitian ini, klasifikasi kategori keterikatan karyawan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

Based on the data above, the followings can be concluded:

1. *The highest satisfaction index is found in region VII Denpasar with a score of 83.60 (qualification "Good").*
2. *The lowest satisfaction index is found in the region V Semarang with a score of 79.33 (qualification "Good").*

Overall, jamkrindo's 2020 employee satisfaction survey results amounted to 80.94 with the category "Good". This score increased from the previous year by 79.24.

- *Employee Engagement Survey*
Jamkrindo has conducted an employee opinion survey to see the perception of employees in aspects of their engagement to the Company and their perception of human resources management policies and programs. The results of this survey have been submitted as a management report to the Board of Directors and used as input material for HR managers in order to continuously improve the system and improve various aspects that have been assessed well in the implementation of HR management.

The value of engagement is built from 12 (twelve) employee loyalty and emotional statements quoted from Gallup theory. In this study, the classification of employee engagement category is divided into 3 (three), namely:

Indikator Skor Score Indicator	Kategori Keterikatan Engagement Category
Setuju (Skor 3) / Agree (Score 3)	Terikat / Engaged
Ragu-ragu (Skor 2) / Hesitation (Score 2)	Tidak Terikat / Passive
Tidak Setuju (Skor 1) / Disagree (Score 1)	Tidak Terikat Sama Sekali / Disengaged

Berdasarkan hasil penilaian keterikatan karyawan untuk sebanyak 600 responden, maka didapatkan hasil survei keterikatan karyawan tahun 2020 sebesar 88,90 tergolong sebagai kategori "Terikat". Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 84,00.

Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Mekanisme pengaduan perihal K3 dilakukan oleh unit kerja yang langsung disampaikan kepada Divisi Umum dan ditindaklanjuti dengan melibatkan penyedia jasa atau badan pengelola Gedung Jamkrindo. Sementara itu, Perusahaan pun tengah menyusun kepanitiaan untuk mengelola Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Terkait permasalahan ketenagakerjaan, pengaduan dapat disampaikan baik melalui Serikat Pekerja maupun melalui mekanisme internal organisasi.

Di sepanjang tahun 2020, Perusahaan tidak mendapati adanya pengaduan masalah terkait ketenagakerjaan K3 di lingkungan Jamkrindo.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Ketenagakerjaan dan K3

Di tahun 2020 Perusahaan belum mendapatkan penghargaan dan sertifikasi bidang Ketenagakerjaan dan K3.

Biaya dan/atau Investasi Tanggung Jawab Sosial Aspek Ketenagakerjaan dan K3

Pada tahun 2020 Jamkrindo telah mengeluarkan biaya dan investasi dalam mengembangkan ketenagakerjaan dan pengelolaan K3 sebesar Rp227,36 miliar.

Based on the results of the assessment of employee engagement amounted to 600 respondents, the results of the 2020 employee engagement survey amounted to 88.90 classified as the category "Engage". This score increased from the previous year by 84.00.

Complaints on Employment, Occupational Health and Safety Issues

The complaint mechanism regarding K3 is carried out by certain work units to be directly submitted to the General Affairs division and followed up by involving service providers or management bodies of the Jamkrindo Building. The Company is also preparing a committee to manage the Occupational Health and Safety Management System (SMK3).

Related to employment issues, complaints can be submitted either through Worker Unions or through the internal mechanisms.

Throughout 2020, the Company did not find any complaints related to issues of employment and OHS in Jamkrindo.

Awards and Certifications For Employment and OHS

In 2020 the Company has not received awards and certifications for Employment and OHS.

Cost and Investment of Corporate Social Responsibility for Employment, Occupational Health And Safety Aspects

In 2020 Jamkrindo has incurred costs and investments in developing employment and OHS management was amounting to IDR227.36 billion.



Uraian Descriptions	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Penyerapan Anggaran 2020 Budget Absorption 2020 (%)	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) Realization 2019 (%)
	1	2	(1:2)	3	(1:3)
Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development	19.110	21.284	89,79% ▼	28.042	68,15% ▼
Gaji dan tunjangan Salary and benefits	193.013	172.759	111,72% ▲	194.663	99,15% ▲
Program Pensiun Pension Plans	15.233	13.446	113,29% ▲	5.750	264,92% ▲
Pengelolaan K3* OHS Management*	268	300	89,25% ▼	-	-
Jumlah Total	227.356	207.489	109,57% ▲	228.455	99,52% ▲

*) Biaya pengelolaan K3 sehubungan dengan program penanggulangan COVID-19 seperti pembuatan partisi akrilik dan wastafel untuk perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan.

*) OHS management costs in connection with the COVID-19 handling programs such as create of acrylic partitions and sinks for the protection of employee occupational health and safety.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN LINGKUP TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK/JASA SERTA PELANGGAN

Corporate Social Responsibility in the Scope of Responsibility Towards Products and Goods as Well as Consumers



Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Produk/Jasa serta Pelanggan

Commitment and Corporate Social Responsibility Policy on Products/Services and Consumers

Sebagai institusi keuangan yang bergerak di bidang penjaminan kredit, Jamkrindo menekankan pada aspek pelayanan kepada para pelanggan yang membutuhkan fasilitas Penjaminan Kredit. Penguatan mutu pada aspek pelayanan yang prima dan responsif juga terus dilakukan oleh Jamkrindo agar masyarakat dapat terbantu dalam memanfaatkan layanan-layanan yang disediakan. Jamkrindo meyakini hal tersebut tidak hanya berperan sebagai sebuah fasilitas namun juga sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap pelanggan yang telah mempercayai Jamkrindo sebagai institusi penjamin.

As a financial institution engaged in the Guarantee industry, Jamkrindo emphasizes the aspect of service to customers who need a Credit Guarantee facility. Strengthening quality in the aspects of excellent and responsive service is also continuously carried out by Jamkrindo so that the community can be helped in utilizing the services provided. Jamkrindo believes that this does not only act as a facility but also as a form of Corporate Social Responsibility towards consumers who have trusted the Jamkrindo as a guarantor institution.

Salah satu bentuk aktif dari tanggung jawab kepada pelanggan diwujudkan melalui penyediaan sarana komunikasi di beberapa media seperti nomor *hotline* untuk wilayah Jakarta, informasi nomor telepon dan faksimili di setiap Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia, serta kontak *online* yang disediakan pada situs *website* Jamkrindo.

One active form of responsibility towards the consumers was realized through the provision of communication facilities in several media such as the hotline number for the Jakarta area, information on telephone and fax numbers at each Branch Office or Service Unit Office throughout Indonesia, as well as online contacts provided on the Jamkrindo's website.



Pengaduan Langsung : Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan di seluruh Indonesia
Direct Complaints : Branch Offices or Service Unit Offices throughout Indonesia

Kontak Situs Web : <http://www.jamkrindo.co.id/kontak>
Website Contact

Kontak Surel : contact@jamkrindo.co.id
Email

Hotline : (62-21) 6540335

Melalui penyediaan alamat komunikasi tersebut, Jamkrindo telah melakukan penanganan pertanyaan dan keluhan pelanggan terkait layanan yang diberikan oleh Jamkrindo.

Through the provision of these channels, Jamkrindo has handled consumer questions and complaints related to the services provided by Jamkrindo.

Pemetaan Risiko dan Dampak Produk dan Layanan Jasa Perusahaan

Mapping the Risks and Impacts of the Company's Products/Services

Perusahaan memetakan risiko terkait pengetahuan tentang produk dan layanan jasa di bidang penjaminan kredit. Dengan adanya risiko ini, Perusahaan menempatkan edukasi kepada pelanggan tentang produk dan layanan jasa yang dimiliki, termasuk dampak dari penggunaan produk dan layanan jasa Perusahaan kepada pelanggan.

The Company maps risks related to knowledge regarding products and services in the field of credit guarantee. With this risk, the Company places education to customers concerning the products and services owned, including the impact of the use of the Company's products and services to customers.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Target and Objective of Programs and Activities

Jamkrindo terus berupaya untuk memenuhi seluruh ekspektasi pengguna jasa. Secara umum, manajemen secara berkala melakukan evaluasi atas produk dan layanan, termasuk efektivitas produk dan layanan bagi kebutuhan pasar khususnya pengguna jasa. Untuk itu, Jamkrindo secara berkala melakukan Indeks Keterikatan Pelanggan dan Survei Kepuasan Pelanggan untuk mendapatkan evaluasi atas produk dan jasa, serta harapan para pengguna jasa terhadap pengembangan produk dan jasa Jamkrindo yang dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Jamkrindo continuously strives to meet all expectations of service users. In general, management periodically evaluates products and services, including the effectiveness of products and services for market needs, especially service users. Therefore, Jamkrindo periodically conducts Customer Engagement Index and Customer Satisfaction Survey to get evaluation of products and services, as well as the expectations of service users towards the development of Jamkrindo products and services that may meet their needs.

Penerapan Inisiatif: Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Produk dan Layanan Jasa serta Pelanggan

Implementation of Initiatives: Programs and Activities Conducted Related to Corporate Social Responsibility for Products/Services and Consumers

- Inovasi dan Pengembangan Produk dan Jasa
Perusahaan telah membuat kebijakan pedoman standar kualitas layanan Perusahaan sebagai inovasi layanan jasa Penjaminan. Dimana ruang lingkup kebijakan terdiri dari proses dan evaluasi, lingkup proses terdiri atas Pengelolaan Kualitas Layanan, *Contact Center*, Penanganan Pengaduan keluhan Pelanggan, dan standar layanan. Serta lingkup evaluasi melalui pelaksanaan kegiatan *survey* kepuasan pelanggan dan *survey* kualitas layanan. Tujuannya adalah

- *Innovation and Development of Products and Services*
The Company has made a policy guidelines for the company's service quality standards as an innovation of Guarantee services. The scope of the policy consists of process and evaluation, the scope of the process consists of Service Quality Management, Contact Center, Customer Complaint Handling, and service standards. As well as the scope of evaluation through the implementation of customer satisfaction survey activities and service quality surveys. The

untuk menciptakan kesamaan pemahaman pentingnya kualitas layanan sebagai landasan keberlanjutan bisnis penjaminan, sebagai panduan bagi Perusahaan dalam penyusunan strategi pengelolaan standar kualitas layanan, terutama proses dimana terjadi *moment of truth* antara Perusahaan dengan Pelanggan dan Pemangku Kepentingan. *Moment of truth* merupakan saat/momen penting dimana terjadi interaksi pelayanan antara pelanggan dan/atau pemangku kepentingan dengan Perusahaan yang sangat berpengaruh pada persepsi pelanggan dan/atau pemangku kepentingan atas layanan Penjaminan Perusahaan.

aim is to create a common understanding of the importance of service quality as the foundation of business sustainability guarantee, as a guide for the Company in the preparation of service quality standards management strategy, especially the process in which there is a moment of truth between the Company and customers and stakeholders. Moment of truth is an important moment in which there is a service interaction between customers and/or stakeholders with the Company that is very influential on the perception of customers and/or stakeholders on the Company's Guarantee services.

- Privasi Data Pribadi Pelanggan**
Pada kebijakan Pedoman Standar Kualitas Layanan telah diatur mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi pelanggan. Perusahaan memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi Pelanggan, serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh pelanggan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Transparansi penggunaan data pribadi pelanggan wajib mendapatkan persetujuan dari pelanggan terhadap penggunaan dan penyebaran data pribadi.
- Indeks Keterikatan Pelanggan dan Survei Kepuasan Pelanggan**
Jamkrindo senantiasa melakukan survei guna mengetahui tingkat kepuasan dan *engagement* pelanggan. Survei kepuasan pelanggan atas layanan dan produk Jamkrindo pada tahun 2020 melibatkan responden yang merupakan mitra yang dipilih secara *sampling* dari perwakilan beberapa Kantor Cabang di masing-masing Kantor Wilayah. Responden mitra Perusahaan meliputi:

 - Mitra kerja (penerima jaminan) eksisting
 - Calon mitra kerja
 - Mantan mitra kerja

Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang baik. Nilai kepuasan pelanggan Jamkrindo yaitu 85,02%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 84,80%. Sementara itu, indeks keterikatan pelanggan Jamkrindo di tahun 2020 yaitu 86,03%, meningkat dari tahun 2019 yang sebesar 84,00%.

- Customer Data Confidentiality**
In the policy of Service Quality Standards Guidelines have been regulated regarding the confidentiality and security of customer data/information. The Company provides protection, maintains the confidentiality and security of Customer's data and/or information, and only uses it in accordance with the interests and purposes agreed by the customer, unless otherwise provided by applicable laws and regulations. Transparency of the use of customer's personal data must obtain consent from the customer to the use and dissemination of personal data.
- Customer Engagement Index and Customer Satisfaction Survey**
Jamkrindo always conducts surveys to determine the level of customer satisfaction and engagement. The customer satisfaction survey for Jamkrindo services and products in 2020 involved respondents who were sampling selected partners from representatives of several Branch Offices in each Regional Office. Respondents to the Company's partners include:

 - Existing partners (beneficiaries)*
 - Prospective partners*
 - Former partners*

The survey results showed a good level of satisfaction. Jamkrindo's customer satisfaction value is 85.02%, an increase from 84.80% in 2019. Meanwhile, Jamkrindo's customer attachment index in 2020 was 86.03%, an increase from 84.00% in 2019.

Pengaduan Produk/Jasa serta Pelanggan

Perusahaan membuka akses pengaduan apabila terdapat pelanggan yang merasakan ketidakpuasan. Pengaduan dari pelanggan disampaikan oleh petugas pengaduan kepada pejabat penanggungjawab atau unit kerja terkait sesuai dengan materi pengaduan untuk ditindaklanjuti oleh pejabat penanggungjawab atau unit kerja yang bersangkutan. Hasil tindak lanjut pejabat penanggung jawab atau unit kerja disampaikan kembali oleh Perusahaan kepada pemangku kepentingan yang bersangkutan.

Complaint of Product/Services and Customer

The Company opens access to complaints if there are customers who feel dissatisfaction. Complaints from customers are submitted by the complaint officer to the officer in charge or related work unit in accordance with the complaint material to be followed up by the officer in charge or the work unit concerned. The follow-up result of the responsible officer or work unit is re-submitted by the Company to the relevant stakeholders.



Perusahaan telah memberikan peluang dan kesempatan bagi mitra dan instansi terkait dalam hal layanan pengaduan melalui saluran-saluran yang disediakan Perusahaan, baik email, *live chat*, media sosial maupun layanan contact center 1500701. Proses penyelesaian layanan pengaduan dilakukan secara sistematis sesuai dengan kebijakan Perusahaan.

The Company has provided opportunities for partners and related agencies in terms of complaint services through channels provided by the Company, whether email, live chat, social media or contact center services 1500701. The process of resolving complaint services is carried out systematically in accordance with the Company's policy.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Mutu Produk dan Jasa serta Layanan Kepada Pelanggan

Awards and Certifications in the Field of Product and Service Quality as well as Services to Customers

Penghargaan Bidang Mutu Produk dan Jasa serta Layanan Kepada Pelanggan Tahun 2020

Award for Quality of Products and Services and Services to Customers in 2020

European Award for Best Practices 2020

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Gold Category Best Practices
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	European Society Quality Research
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	31 Mei 2020 <i>May 2, 2018</i>

Emerging Stated Owned Enterprise

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Terbaik II
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	BUMNTrack
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	9th Anugerah BUMN 2022
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	9 Juli 2020 <i>July 9, 2020</i>

The Most Promising Company in Strategic Marketing

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Bronze Winner
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	BUMN Marketers Club
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	BUMN Marketers Award 2020
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	16 September 2020 <i>September 16, 2020</i>

Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Gold Winner
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	RRI dan Economics
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	BUMN Brand Award 2020
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	23 September 2020 <i>September 23, 2020</i>

The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	Infobank
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020"
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	3 November 2020 <i>November 3, 2020</i>

Corporate Communication Terbaik *Corporate Communication Terbaik*

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Corporate Communication Terbaik
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	BUMN Track
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	BUMN Branding & Marketing Award 2020
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	5 November 2020 <i>November 5, 2020</i>

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	Businessnews
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	25 November 2020 <i>November 25, 2020</i>



The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	Businessnews
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	25 November 2020 <i>November 25, 2020</i>

Sertifikasi Bidang Mutu Produk dan Jasa serta Layanan Kepada Pelanggan yang Masih Berlaku di Tahun 2020

Certification in the Field of Product and Service Quality and Services to Customers that is Still Valid in 2020

ISO 9001:2015 (Penjaminan dan Layanan Klaim) *ISO 9001:2015 (Guarantee and Claims Services)*

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	<p>Perusahaan telah melaksanakan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup Penjaminan dan Pelayanan Klaim oleh Lembaga Penerbit Sertifikat ISO SUCOFINDO. Tujuan sertifikasi adalah untuk menerapkan manajemen mutu proses penjaminan dan pelayanan klaim guna meningkatkan kualitas penjaminan dan pelayanan klaim melalui jaminan kualitas proses kerja penjaminan dan pelayanan klaim yang terorganisasi dengan baik dan sistematis.</p> <p><i>Certification Description: The Company has carried out ISO 9001:2015 Quality Management System certification with the scope of Guarantee and Claims Service, issued by ISO SUCOFINDO as a Certificate Issuing Agency. The purpose of certification is to implement quality management of the guarantee process and claims services in order to improve the quality of guarantees and claims services through quality assurance of guarantee work processes and well-organized and systematic claims services.</i></p>
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi <i>Issued by</i>	Sucofindo
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Certification Release Date</i>	2 Mei 2018 <i>May 2, 2018</i>
Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period</i>	1 Mei 2021 <i>May 1, 2021</i>

Sertifikasi Pemeringkatan AA+ dari Pefindo *AA+ Rating Certification from Pefindo*

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit <i>Certification of the Company for Credit Risk</i>
Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi <i>Issued by</i>	PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO)
Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Certification Release Date</i>	21 Desember 2020 <i>December 21, 2020</i>
Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period</i>	1 Desember 2021 <i>December 1, 2021</i>

Dampak Kuantitatif: Biaya dan Investasi Bidang Mutu Produk dan Jasa serta Layanan Kepada Pelanggan

Pada tahun 2020 Jamkrindo telah mengeluarkan biaya dan investasi dalam bidang mutu produk dan jasa serta layanan kepada pelanggan sebesar Rp359.075.000.

Quantitative Impact: Cost and Investment for Product and Service Quality and Customer Services

In 2020 Jamkrindo has incurred costs and investments in the quality of products and services to customers amounting to IDR359,075,000.

Uraian Descriptions	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Penyerapan Anggaran 2020 (%) Budget Absorption 2020 (%)	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) Realization 2020 To Realization 2019 (%)
	1	2	(1:2)	3	(1:3)
Surveillance Audit Mutu 9001:2015 Pelayanan Penjaminan dan Klaim Quality Audit Surveillance 9001:2015 Guarantee and Claim Services	75	200	37,54%	75	0,00%
Survei Kepuasan Pelanggan Survei Kualitas Layanan Customer Satisfaction Survey and Service Quality Survey	284	400	71,00%	220	29,09%
Jumlah Total	359	600	59,85%	295	21,69%



TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERKAIT PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Corporate Social Responsibility Related to Social and Community Development

Komitmen dan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

Perwujudan CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilakukan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan program tanggung jawab sosial diselenggarakan dengan melakukan analisis, perencanaan, pelaksanaan program hingga melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Sebagai BUMN, Jamkrindo mendapatkan penugasan untuk melaksanakan PKBL di wilayah kerjanya. Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman, agar menjadi tangguh dan mandiri. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Jamkrindo. Salah satu bentuk bantuan dalam Program Bina Lingkungan adalah bantuan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Rumusan Pengembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk Sosial dan Kemasyarakatan, Isu-isu Sosial, dan Risiko Sosial yang Timbul dari Operasi dan Bisnis Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit, Perusahaan tidak menemukan adanya potensi risiko sosial terkait produk dan layanan jasa serta kegiatan operasi dan bisnis yang dijalankan. Namun demikian, sesuai dengan amanah dari Pemerintah Indonesia sebagai entitas pemilik akhir, Jamkrindo berkewajiban untuk menjadi Agen Pembangunan, khususnya dalam mendorong taraf kehidupan masyarakat melalui berbagai kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan.

Commitment and Corporate Social Responsibility Policy in Social and Community Development

Corporate CSR implementation in the social and community development sector is carried out through the Partnership and Environmental Development Program (PKBL), as stipulated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 on Third Amendment to the Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on partnership programs and environmental development programs of State-Owned Enterprises. Implementation of social responsibility programs is organized by conducting analysis, planning, program implementation up to evaluate the implementation of activities.

As an SOE, Jamkrindo is assigned to implement the Partnership and Community Development Program in its area of operations. The Partnership Program is a program to improve the ability of small businesses in the form of loans to make them become resilient and independent. Whereas the Community Development Program is an empowerment program for the community's social conditions in the form of providing assistance to communities around the working area of Jamkrindo. One form of assistance in the Community Development Program is the assistance funds (grants) to fostered partners (small businesses and cooperatives) to encourage and develop their business activities to become resilient and independent so that they can improve people's lives.

Formulation of Corporate Social Responsibility Development for Social and Community Affairs, Social Issues, and Social Risks that Arise from Company's Operations and Business

As a company engaged in credit guarantee, the Company does not find any potential social risks related to products and services as well as operations and business activities carried out. Nevertheless, in accordance with the mandate of the Government of Indonesia as the ultimate owner entity, Jamkrindo is obliged to become a Development Agent, especially in promoting the standard of life of the community through various social development activities.

Target dan Sasaran Program dan Kegiatan

Jamkrindo telah membuat rencana kerja program CSR Perusahaan di bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Rencana kerja tersebut memuat sasaran, strategi dan anggaran dari kegiatan program yang dicanangkan. Pada tahun 2020 berdasarkan perencanaan yang telah di susun oleh Perusahaan, anggaran untuk kegiatan kemitraan adalah sebesar Rp4,77 miliar. Sedangkan anggaran untuk kegiatan bina lingkungan dianggarkan sebesar Rp11,76 miliar.

- Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Penyaluran Program Kemitraan
 1. Sasaran
 - a. Penyaluran dana program kemitraan di seluruh unit kerja PT Jamkrindo sesuai dengan Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp4.208.000.000
 - b. Distribusi penyaluran ke seluruh kanca PT Jamkrindo
 2. Strategi
 - a. Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - i) Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.
 - ii) Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
 - iii) Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/ solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
 - b. Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh PT Jamkrindo.

Target and Objective of Programs and Activities

Jamkrindo has made a work plan for the Company's CSR program in the field of social and community development that is realized through the implementation of the Partnership and Community Development Program (PKBL). The work plan contains the goals, strategies and budgets of the program activities proclaimed. In 2020 based on the planning that has been compiled by the Company, the budget for partnership activities is IDR4.77 billion. While the budget for environmental development activities is budgeted at IDR11.76 billion.

- Objectives, Policies, and Partnership Program Distribution Strategies
 1. Objectives
 - a. Distribution of partnership program funds in all working units of PT Jamkrindo in accordance with the Work Plan and Budget year 2020 amounting to IDR4,208,000,000
 - b. Distribution to all Branch Offices of PT Jamkrindo
 2. Strategies
 - a. Intensification of Partnership Program by optimizing the implementation of partnership program so that the partners become more resilient and independent, among others:
 - i) Improving management and production capabilities of the assisted partners by participating in management and financial training and providing management consulting assistance in accordance with the capabilities of the company's HR.
 - ii) Increasing marketing access to the production of fostered partners by participating in promotional/exhibition activities as well as making efforts to marketing the products of fostered partners through the role of national-scale companies.
 - iii) Increasing continuous guidance by conducting continuous visits to the business site of fostered partners to evaluate and see the progress of businesses and problems faced, and help provide suggestions/remedial solutions, and intensify collection to fostered partners while taking into account the conditions of the assisted partners.
 - b. Extensification of the Partnership Program by looking for potential, qualified and trained partners who have profitable business prospects through government/private trade and industry organizations or directly by PT Jamkrindo.



- c. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani.
- 3. Kerja sama Penyaluran Program Kemitraan dengan Sesama BUMN
 - a. Kerja sama dalam penyaluran Program Kemitraan dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tertuang dalam Perjanjian Kerja sama No. 37/Jamkrindo/Non-OP/XII/2017/348/PKS/PNM/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Mitra Binaan Kluster Kelompok Usaha Petani Kopi Sri Rejeki Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia di Desa Sabang, Kabupaten Bangli, Bali.
 - b. Kerjasama dalam penyaluran Program Kemitraan dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tertuang dalam Perjanjian Kerja sama No.24/PKS/Non-OP /XII/2018 dan 055/PKS/PNM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Bagi Mitra Binaan Perum Jamkrindo di 5 (Lima) Klaster Usaha Pada Sejumlah Daerah Di Indonesia.
 - c. Kerja sama dalam penyaluran Program Kemitraan dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) tertuang dalam Perjanjian Kerja sama No 66/PKS/Non-OP/XII/2019 dan 156/PKS/PNM/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Bagi Mitra Binaan Perum Jamkrindo di 6 (Enam) Kelompok Usaha Pada Sejumlah Daerah Di Indonesia.
- Sasaran, Kebijakan, Strategi Penyaluran Program Bina Lingkungan
 - 1. Sasaran
Penyaluran dana program bina lingkungan di seluruh unit kerja PT Jamkrindo sesuai dengan Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp11.760.500.000 di sekitar wilayah PT Jamkrindo.
 - 2. Strategi
Penyaluran dana BL dilaksanakan melalui kerja sama dengan sinergi BUMN, pemerintah setempat, yayasan, LSM, atau masyarakat.
- c. *Synergize with other SOEs coaches or other parties in implementing the Partnership Program fund distribution, among others, with PT Permodalan Nasional Madani.*
- 3. *Collaboration in Channeling Partnership Program with Fellow SOEs*
 - a. *Collaboration in channeling partnership program with PT Permodalan Nasional Madani (Persero) is contained in Cooperation Agreement No.37/Jamkrindo/Non-OP/XII/2017/348/PKS/PNM/XII/2017 dated December 22, 2017 concerning Business Capacity Development of Partnership Partner Program of Cluster of Coffee Farmers Sri Rejeki Public Corporates (PERUM) Indonesia Credit Guarantee in Sabang Village, Bangli Regency, Bali.*
 - b. *Collaboration in channeling partnership program with PT Permodalan Nasional Madani (Persero) is contained in Cooperation Agreement No.24/PKS/Non-OP/XII/2018 and 055/PKS/PNM/XII/2018 dated December 27, 2018 concerning Business Capacity Development partnership program for Perum Jamkrindo Partners in 5 (Five) Business Clusters in a Number of Regions in Indonesia.*
 - c. *Collaboration in channeling partnership program with PT Permodalan Nasional Madani (Persero) is contained in Cooperation Agreement No.66/PKS/Non-OP/XII/2019 and 156/PKS/PNM/XII/2019 dated December 27, 2018 concerning Business Capacity Development partnership program for Perum Jamkrindo Partners in 6 (Six) Business Groups in a Number of Regions in Indonesia.*
- *Objectives, Policies, and Community Development Program Distribution Strategies*
 - 1. *Objectives*
The distribution of funds for community development programs in all work units of PT Jamkrindo in accordance with the Work Plan and Budget year 2020 amounted to IDR11,760,500,000 around PT Jamkrindo area.
 - 2. *Strategies*
Carry out Community Development fund distribution through cooperation with Synergy of SOEs, Local Government, Foundations, NGOs and the community.

Penerapan Inisiatif: Program dan Kegiatan yang Dilakukan Terkait Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial Kemasyarakatan

- Pembentukan Organisasi Pengelola Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
Di tahun 2003 pengelolaan unit PKBL Jamkrindo masih dilaksanakan oleh Divisi Pembiayaan Usaha sesuai Surat Keputusan Direksi No.65/DIR/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Struktur Organisasi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, menggantikan Surat Keputusan Direksi No.43/DIR/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dan No.31/KPTS/PKK.2/IX/1995 tanggal 27 September 1995 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Direksi membentuk unit tersendiri yang khusus menangani unit PKBL sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi No.36/DIR/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Pengembangan pada Divisi Pengendalian dan di tahun 2010 terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi No.33/Kep-Dir/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Penjaminan pada Divisi Penjaminan Syariah. Pada tahun 2018 Struktur organisasi Jamkrindo mengalami perubahan, melalui Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama.

Selanjutnya diikuti dengan penempatan Pejabat dan Pegawai, Deskripsi Jabatan dan Analisis Jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo.

Implementation of Initiatives: Programs and Activities carried out related to Corporate Social Responsibility to Social and Community Development

- *Establishment of Partnership and Community Development Program Management Organization*
In 2003 the organizer of PKBL Jamkrindo unit was still operated by the Business Financing Division in accordance with the Board of Directors Decree No.65/DIR/XII/1998 dated December 21, 1998 concerning the Organizational Structure of cooperative financial development, replacing the Decree of the Board of Directors No.43/DIR/I/1998 dated January 5, 1998 and No.31/KPTS/PKK.2/IX/1995 dated September 27, 1995 concerning The Organizational Structure of General Companies for Cooperative Financial Development.

Furthermore, following up on the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, the Board of Directors established a separate unit that specifically handles PKBL units as contained in the Board of Directors Decree No.36/DIR/X/2006 dated October 19, 2006 concerning the Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Units under the Directorate of Development in the Control Division and in 2010 there was a change in the organizational structure contained in the Decision of the Board of Directors No.33/Kep-Dir/VII/2010 dated July 1, 2010 concerning the Organizational Structure of partnership and community development units under the Directorate of Guarantees in sharia division. In 2018 Jamkrindo's organizational structure has changes, through Board of Directors Decree No. 01/KD/1/V/2018 where is the partnership and environmental development program unit became part of the Corporate Secretary who was in the Main Directorate.

Furthermore, followed by the placement of Officials and Employees, Officials Description and Officials Analysis and Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of Jamkrindo Partnership and Community Development Program Unit.

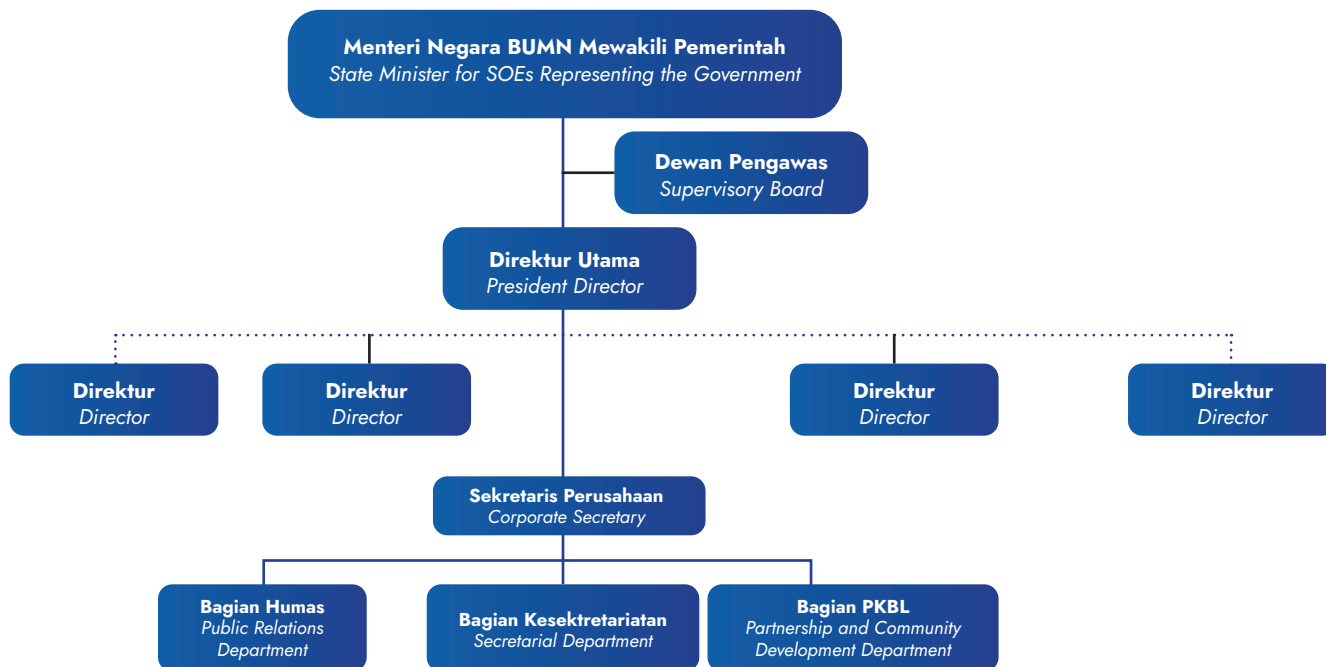


Berikut adalah Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo.

The following is the Organizational Structure of Jamkrindo's Partnership and Community Development Program Unit.

Struktur Organisasi PKBL Jamkrindo

Organizational Structure of PKBL Jamkrindo



Program Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN, Program Kemitraan BUMN dengan usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan.

Tanggung jawab terhadap mitra binaan diwujudkan dalam bentuk pembinaan mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu dana revolving tahun berjalan Program Kemitraan sehingga tidak diambil dari penyisihan laba bersih.

Ketentuan penggunaan dan penyaluran dana untuk Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan, yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
 - a. Pinjaman: diberikan untuk membiayai modal kerja dan (atau) pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman Tambahan: diberikan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

Partnership Program

Based on Minister of SOEs Regulation, the SOE's Partnership Program with Small businesses, hereinafter referred to as the Partnership Program, is a program to improve the capacity of small businesses to become resilient and independent through the utilization of funds from the SOE's profits. Small businesses are small-scale economic activities of the people which meet the criteria of net worth or annual sales proceeds and ownership.

The Company's responsibility for the fostered partners is manifested in the form of fostering partners. The source of funds for fostering partners is the Partnership Program Development Fund, which is a revolving fund for the current year of the Partnership Program so that it is not taken from the allowance for net profit.

The terms of use and disbursement of funds for the Partnership Program are as follows:

1. Partnership Program funds provided in the form of loans, namely:
 - a. Loans; given to finance working capital and or purchase of fixed assets in order to increase production and sales.
 - b. Additional Loans; given to finance the funding needs for short-term business activities of Foster Partners in order to fulfill orders from business partners of Foster Partners

c. **Beban Pembinaan:**

- 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
2. Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Adapun realisasi penyaluran dana terkait Program Kemitraan yang telah disalurkan Jamkrindo sepanjang 2020 adalah sebesar Rp4.372.000.000 kepada 152 mitra binaan, turun 14,80% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5.131.500.000 kepada 121 mitra binaan.

c. **Fostering Expenses:**

- 1) To finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters related to improving the productivity of Partners and for assessment/research related to the Partnership Program;
 - 2) Fostering cost is granted with the amount of at most 20% (twenty percent) of the Partnership Program funds disbursed in the current year;
 - 3) Fostering Expenses can only be given to or for the benefit of fostered partners.
2. The loan amount for each Partner from the Partnership Program is at most IDR200,000,000.00 (two hundred million rupiah).

The realization of funds related to the Partnership Program that has been channeled by Jamkrindo throughout 2020 amounted to IDR4,372,000,000 to 152 partners, down 14.80% compared to the realization in 2019 of IDR5,131,500,000 to 121 partners.

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2019-2020 Berdasarkan Sektor Usaha Mitra Binaan

Realization of Partnership Program Fund Distribution in 2019-2020 based on Partner Business Sector

Uraian Descriptions	2020		2019		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
	MB	Jumlah (Rp-Juta) Total (IDR-Million)	MB	Jumlah (Rp-Juta) Total (IDR-Million)	MB (%)	Jumlah (%) Total (%)
Sektor Industri Industrial Sector	3	60	47	1.932	-93,62%	(96,89%)
Sektor Perdagangan Trade Sector	76	2.452	29	1.059	162,07%	131,54%
Sektor Pertanian Agricultural Sector	21	395	23	1.115	-8,70%	(64,57%)
Sektor Peternakan Livestock Sector	14	420	15	750	-6,67%	(44,00%)
Sektor Perikanan Fishery Sector	11	330	-	-	100%	100%
Sektor Jasa Service Sector	27	715	7	275	285,71%	160,00%
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Fund	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	152	4.372	121	5.132	25,62%	(14,80%)

MB = Mitra Binaan / Partners



- Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah kerja Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba. Hal ini dilakukan berdasarkan atas kesadaran Jamkrindo akan pentingnya keberadaan masyarakat di sekitar lokasi usaha.

Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dengan prosentase sebesar 1,75%. Dana Program Bina Lingkungan digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk bantuan korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dan bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasitas Mitra Binaan Program Kemitraan.

Realisasi penyaluran dana terkait Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan Jamkrindo sepanjang 2020 adalah sebesar Rp11,89 miliar, meningkat 124.23% dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp5,30 miliar.

- Community Development Program

The Community Development Program is a social condition empowerment program around the working area of Jamkrindo, which is organized through the use of funds from the profit section. This is done based on the awareness of Jamkrindo on the importance of the community existence around the Company's business location.

Funds for the Community Development Program come from the allowance of a portion of the net profit of SOEs with a percentage of 1.75%. Community Development Program Funds are used for purposes that provide benefits to the community in SOEs business area in the form of assistance for victims of natural disasters, education and/or training, health improvement, development of public infrastructure and facilities, worship facilities, nature conservation, social society in the framework of poverty alleviation, and educational assistance, training, apprenticeship, marketing, promotion and other forms of assistance related to efforts to increase the capacity of Partnership Program Development Partners.

The realization of funds related to the Community Development Program that has been channeled by Jamkrindo throughout 2020 amounted to IDR11.89 billion, an increase of 124.23% compared to the realization in 2019 of IDR5.30 billion.

Bantuan Program Bina Lingkungan Community Development Program Assistance	2020 (Rp) (IDR)	2019 (Rp) (IDR)	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Assistance to Natural/Non-Natural Disaster Victims	2.697.807.445	237.032.782	1.038,16%
Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and/or Training Assistance	2.029.064.103	1.001.117.503	102,68%
Bantuan Peningkatan Kesehatan dan/atau Sarana Umum Health Improvement Assistance and/or Public Facilities	166.680.000	201.539.566	(17,30%)
Bantuan Pengembangan Prasarana Assistance for the Development of Public Infrastructure	584.710.000	233.414.000	150,50%
Bantuan Sarana Ibadah Assistance of Worship Facilities	1.477.647.000	517.951.600	185,29%
Bantuan Pelestarian Alam Assistance of Nature Conservation	117.750.000	137.793.333	(14,55%)
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Social Community Assistance in the Framework of Poverty Alleviation	4.000.358.220	2.973.553.093	34,53%
Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Karena Wabah Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters Due to Outbreaks	815.610.623	-	100,00%
Jumlah Jumlah	11.889.627.391	5.302.401.877	124,23%

Jamkrindo telah melakukan serangkaian kegiatan program bina lingkungan di tahun 2020. Untuk bidang pendidikan, Jamkrindo telah melakukan serangkaian renovasi bangunan sekolah, antara lain di Ciamis dan Kupang. Sementara di Tarakan, Lampung, dan Pandeglang, Jamkrindo melakukan pendirian tiga Taman Bacaan Sekolah. Untuk program beasiswa, Jamkrindo juga telah melaksanakan di Jakarta dan Sumenep.

Jamkrindo juga memberikan kebahagiaan dengan menyalurkan bantuan program bina lingkungan pada tiga mushola dengan total Rp150 juta di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Penyaluran dana program bina lingkungan untuk tahun 2020 tercatat sebesar Rp11.787.877.391. Apabila dibandingkan dengan RKA tahun 2020 sebesar Rp11.760.500.000, maka realisasi dana Program Bina Lingkungan tercatat sebesar 100,23%.

- Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Pemangku Kepentingan Undang-undang Republik Indonesia menetapkan bahwa membayar atau menawarkan pembayaran atau bahkan menerima suap, *kickback* ataupun bentuk pembayaran lain yang korup adalah suatu tindak pidana yang dapat menjadikan Perusahaan maupun para karyawan secara individu dikenai denda dan/atau hukuman penjara. Undang-Undang Antikorupsi, termasuk Peraturan Praktik Korupsi, menjadikan pembayaran, penawaran atau pemberian segala sesuatu yang bernilai kepada pejabat Perusahaan dengan tujuan mempengaruhi tindakan atau keputusan para pejabat sebagai suatu tindak pidana.

Kebijakan ini dibuat untuk memastikan agar semua karyawan, pejabat dan direktur, serta semua anak perusahaan dan afiliasi Perusahaan patuh terhadap Kebijakan Anti Korupsi Perusahaan dan undang-undang antikorupsi terkait. Berkaitan dengan komitmen antikorupsi, Kementerian BUMN telah meluncurkan *roadmap* BUMN Bersih sebagai aksi antikorupsi di lingkungan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan negara, dan itu juga berlaku bagi Jamkrindo sebagai salah satu perusahaan negara. Atas komitmen itu, pada tahun pelaporan, tidak ada insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil.

Jamkrindo has conducted a series of community development program activities in 2020. For education, Jamkrindo has conducted a series of school building renovations, among others in Ciamis and Kupang. While in Tarakan, Lampung, and Pandeglang, Jamkrindo established three School Reading Parks. For the scholarship program, Jamkrindo has also been implemented in Jakarta and Sumenep.

Jamkrindo also distributes community development programs in three mosques with a total of IDR150 million in various regions in Banyumas Regency, Central Java. The distribution of environmental development program funds for 2020 amounted to IDR11,787,877,391. When compared to RKA in 2020 amounting to IDR11,760,500,000, the realization of Community Development Program funds was recorded at 100.23%.

- *Anti-Corruption Socialization to Stakeholders*
The Law of the Republic of Indonesia stipulates that paying or offering payments or even accepting bribes, kickbacks or other forms of corrupt payments is a criminal offense that can make the Company and individual employees subject to fines and/or prison sentences. The Anti-Corruption Law, including the Regulations for the Practice of Corruption, categorizes payments, offers, or the giving of anything of value to Company officials with the aim of influencing the actions or decisions of officials, as a criminal offense.

This policy was made to ensure that all employees, officials, and directors, as well as all of the Company's subsidiaries and affiliates, adhere to the Company's Anti-Corruption Policy and related anti-corruption laws. With regards to anti-corruption commitments, the Ministry of BUMN has launched a Clean SOEs roadmap as an anti-corruption measure within the Ministry of SOEs and state-owned companies; and that also applies to Jamkrindo as one of the state companies. For that commitment, in this reporting year, there were no proven corruption incidents and actions taken.



Perusahaan belum memiliki kebijakan spesifik terkait sosialisasi anti korupsi kepada pemangku kepentingan eksternal. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan eksternal dilakukan melalui pemasangan media poster dan banner di kantor pusat dan kantor cabang yang berisi larangan pemberian gratifikasi kepada karyawan Jamkrindo, himbauan anti korupsi, maupun sosialisasi pelaporan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan eksternal melalui jalur komunikasi yang telah disediakan.

Kepada seluruh Insan Jamkrindo, di tahun 2020 Perusahaan melakukan beberapa kegiatan sosialisasi anti korupsi, diantaranya adalah:

- Sosialisasi Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) pada unit Kerja;
- Sosialisasi program anti gratifikasi pada unit Kerja;
- Pelatihan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuaapan).

Pengaduan Aspek Sosial

Di sepanjang tahun 2020 Perusahaan tidak menemukan adanya pengaduan atas dampak sosial yang timbul dari kegiatan operasi dan bisnis yang dijalankan Perusahaan.

Penghargaan dan Sertifikasi di Bidang Sosial Kemasyarakatan

Di tahun 2020 Perusahaan belum memiliki sertifikasi bidang sosial kemasyarakatan. Namun demikian, terdapat beberapa apresiasi dari publik berupa penghargaan yang diberikan kepada Perusahaan atas program sosial kemasyarakatan yang telah dilakukan

The Company does not yet have specific policies related to anti-corruption socialization to external stakeholders. Socialization to external stakeholders is conducted through the installation of media posters and banners at the head office and branch offices regarding the prohibition of gratification to Jamkrindo employees, anti-corruption appeals, and socialization of violation reporting that can be done by external stakeholders through the communication channels that have been provided.

To all Jamkrindo people, in 2020 the Company conducted several anti-corruption socialization activities, including:

- *Socialization of Whistleblowing System (WBS) Policy in Work units;*
- *Socialization of anti-gratification programs in work units;*
- *SMAP (Anti-Bribery Management System) training.*

Social Aspects Complaints

Throughout 2020 the Company has not found any complaints over the social impact arising from the Company's operations and businesses.

Awards and Certifications in Social Development

In 2020 the Company does not have a certification in social sector. Nevertheless, there is some appreciation from public in the form of awards given to the Company for social programs that have been conducted.

Penghargaan Bidang Sosial Masyarakat Tahun 2020

Social Developments Awards in 2020

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	Trans Co Indonesia dan Info Brand
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	TOP CSR PKBL of The Year 2020
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	2020

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Deskripsi Sertifikasi <i>Certification Description</i>	The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
Pemberi Penghargaan <i>Issued by</i>	Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
Acara / Kegiatan <i>Event</i>	Tempo Country Contributor Award 2020
Tanggal Diberikan <i>Date of giving</i>	8 Desember 2020 <i>December 8, 2020</i>

Dampak Kuantitatif: Biaya dan Investasi Bidang Sosial Masyarakat

Quantitative Impact: Cost and Investment for Social Development

Pada tahun 2020 Jamkrindo telah mengeluarkan biaya dan investasi dalam bidang pengembangan sosial masyarakat sebesar Rp16,26 miliar.

In 2020 Jamkrindo has spent costs and investments in social development amounting to IDR16.26 billion.

Uraian <i>Descriptions</i>	Realisasi 2020 (Rp-juta) <i>Realization 2020 (IDR-million)</i>	Anggaran 2020 (Rp-juta) <i>Budget 2020 (IDR-million)</i>	Penyerapan Anggaran 2020 (%) <i>Budget Absorption 2020 (%)</i>	Realisasi 2019 (Rp-juta) <i>Realization 2019 (IDR-million)</i>	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%) <i>Realization 2020 To Realization 2019 (%)</i>
	1	2	(1:2)	3	(1:3)
Program Kemitraan <i>Partnership Program</i>	4.372	4.208	103,90%	5.132	85,19%
Program Bina Lingkungan <i>Community Development Program</i>	11.890	11.761	101,10%	5.302	224,25%
Jumlah <i>Total</i>	16.262	15.969	101,83%	10.434	155,86%



REFERENSI SILANG OJK

OJK's Cross Reference

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.





Two horizontal purple bars representing text.



Three horizontal purple bars representing text.



Two horizontal purple bars representing text.

Three horizontal purple bars representing text.



REFERENSI SILANG ARA

ARA's Cross Reference

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
I	Umum GENERAL		
1	Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris <i>The annual report is presented in good and correct Indonesian and also recommended in English</i>		✓
2	Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca <i>Annual reports is printed in good quality and use easy-to-read type and letter sizes</i>		✓
3	Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas <i>The annual report clearly identifies the identity of the company</i>		✓
4	Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di: <i>Name of company and year of annual report shown on:</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampul muka; 2. Samping; 3. Sampul belakang; dan 4. Setiap halaman. <ol style="list-style-type: none"> 1. Front cover; 2. Side; 3. Back cover; and 4. Every page. 	✓
5	Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir. <i>Information on the Company Website including the latest annual report and at least for the last 4 years.</i>		✓
II	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING SUMMARY OF IMPORTANT FINANCIAL DATA		
1	Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Information on business results of the company in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Company's business activities are less than 3 (three) years</i>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjualan/pendapatan usaha; 2. Laba (rugi): <ul style="list-style-type: none"> · Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; · Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; 3. Penghasilan komprehensif periode berjalan : <ul style="list-style-type: none"> · Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; · Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali. 4. Laba (rugi) per saham. <p>Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.</p> <p><i>Information includes among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sales / operating revenues; 2. Profit and loss): <ul style="list-style-type: none"> · Attributed to the owner of the parent; · Attributed to non-controlling interests; 3. Comprehensive income for the current period: <ul style="list-style-type: none"> · Attributed to the owner of the parent; · Attributed to non-controlling interests; 4. Earnings (loss) per share. <p><i>Note: If the company does not have a subsidiary, the company presents the total current profit (loss) and total income for the current year.</i></p>	16-18



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Company's financial position information in the form of comparison for 3 (three) financial years, or since starting business if the Company's business activities are less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi; 2. Jumlah aset; 3. Jumlah liabilitas; dan 4. Jumlah ekuitas. <i>Information includes among others: Amount of investment in associate entity; Total assets; Amount of liabilities; and Total equity.</i>	16-18
3	Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun <i>Financial ratios in the form of comparisons for 3 (three) fiscal years or since the start of business business if the the Company's business activities are less than 3 (three) years</i>	Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan. <i>Information contains 5 (five) financial ratios that are common and relevant to the company's industry.</i>	17
4	Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik <i>Stock price information in tables and graphs</i>	1. Jumlah saham yang beredar; 2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat: · Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; · Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan · Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. 3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang: · Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan · Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan. <i>1. Number of shares outstanding; 2. Information in tabular form which contains: · Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; · The highest, lowest, and closing prices are based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; and · Stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed. 3. Information in graphical form containing at least: · The closing price based on the price at the Stock Exchange where the shares are listed; and · Stock trading volume on the Stock Exchange where the shares are listed.</i> <i>for each quarter for the last 2 (two) fiscal years.</i> <i>Note: if the company does not have market capitalization, stock price information, and stock trading volume, to be disclosed.</i>	20

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
		Informasi memuat: 1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding); 2. Tingkat bunga/imbalan; 3. Tanggal jatuh tempo; dan 4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2019 dan 2020	
	Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.	
5	<i>Information on bonds, sukuk or convertible bonds outstanding in the last 2 (two) fiscal years</i>	<p>Information includes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of bonds / sukuk / bonds of conversion in circulation (outstanding); 2. Interest rate / reward; 3. Due date; and 4. Rating for bonds / sukuk in 2019 dan 2020 <p>Note: if the company does not have bonds / sukuk / convertible bonds, to be disclosed.</p>	21
<p>III LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI <i>BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REPORT</i></p>			
		Memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya; 2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya; 3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan 4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	
1	Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Report</i>	<p>Including the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Assessment of the Board of Directors' performance on the management of the company and scoring basis; 2. A view of the business prospects of the company drawn up by the Board of Directors and the basis for their consideration; 3. The views on the whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and 4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and reasons for the change. 	28-37



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Laporan Direksi <i>Board of Directors Report</i>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain: <ul style="list-style-type: none"> kebijakan strategis; perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya; Analisis tentang prospek usaha; Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya. <p><i>Including the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>An analysis of the company's performance, which includes among others:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>strategic policy;</i> <i>comparison between results achieved and targeted; and</i> <i>constraints faced by the company and its settlement measures;</i> <i>Analysis of business prospects;</i> <i>The development of corporate governance in the fiscal year; and</i> <i>Changes in the composition of the Board of Directors members (if any) and reasons for the change.</i> 	38-49
3	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi <i>Signatures of members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors</i>	<p>Memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. <p><i>Including the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The signature are contained on a separate sheet;</i> <i>A statement that the Board of Commissioners and the Board of Directors are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report;</i> <i>Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors by stating their names and positions; and</i> <i>A written explanation in a separate letter from individuals in the event that there are members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors who do not sign the annual report, or written explanation in separate letters from other members in the absence of written explanation from the concerned.</i> 	50-51
IV	PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE		
1	Nama dan alamat lengkap perusahaan <i>The full name and address of the company</i>	<p>Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan situs web.</p> <p><i>The information includes: name and address, zip code, no. Tel, no. Fax, email, and website.</i></p>	54-55

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Riwayat singkat perusahaan <i>Company brief history</i>	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan <i>Includes: date / year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name.</i> <i>Note: if the company has never changes its name, to disclose it</i>	56-59
3	Bidang usaha <i>Business fields</i>	Uraian mengenai antara lain: 1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir; 2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan 3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan. <i>Description of:</i> 1. <i>Company's business activities according to the latest articles of association;</i> 2. <i>Business activities carried out; and</i> 3. <i>Products and / or services produced.</i>	60-68
4	Struktur Organisasi <i>Organizational structure</i>	Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah direksi. <i>In the form of a chart, including the names and positions, at least up to 1 (one) level below the board of directors.</i>	72-73
5	Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, and Corporate Culture</i>	Mencakup: 1. Visi perusahaan; 2. Misi perusahaan; 3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan 4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan. <i>Includes:</i> 1. <i>Company vision;</i> 2. <i>Company Mission;</i> 3. <i>Information that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Directors / Board of Commissioners in the fiscal year; and</i> 4. <i>Statement about corporate culture owned by the company.</i>	69-71
6	Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris <i>Identity and brief biography of members of the Board of Commissioners</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama; 2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <i>Information includes:</i> 1. <i>Name;</i> 2. <i>Position and term of office (including position in company or other institution);</i> 3. <i>Age;</i> 4. <i>Domicile;</i> 5. <i>Education (Field of Study and Educational Institution);</i> 6. <i>Work experience (Position, Institution, and Period of Service); and</i> 7. <i>The history of appointment (period and position) as a member of the Board of Commissioners in the Company since first appointed.</i>	74-83



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
7	<p>Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi</p> <p><i>Identity and brief biography of members of the Board of Directors</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama; 2. Jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain); 3. Umur; 4. Domisili; 5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan); 6. Pengalaman kerja (jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan 7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk. <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name; 2. Position (including position in company or other institution); 3. Age; 4. Domicile; 5. Education (Field of Study and Educational Institution) 6. Work experience (Position, Institution, and Period of Service); and 7. The history of appointment (period and position) as a member of the Board of Directors in the Company since first appointed. 	84-89
8	<p>Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi</p> <p><i>Number of employees (2 years comparative) and employee competency development data reflecting the opportunities at each level of organization</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi; 2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan; 3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian; 4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan 5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku. <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Number of employees for each level of organization; 2. Number of employees for each level of education; 3. Number of employees by employment status; 4. Data of employee competency development that has been done in the fiscal year consisting of position levels for those who participated in training, type of training, and training objectives; and 5. Employee competency development costs incurred during the fiscal year. 	95-104

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
9	Komposisi Pemegang saham <i>Shareholder Composition</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya; 2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> · Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan · Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%. 3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung. <p>Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.</p> <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Details of the shareholder's name including the 20 largest shareholders and the percentage of ownership;</i> 2. <i>Shareholder details and percentage of ownership include:</i> <ul style="list-style-type: none"> · <i>Name of shareholder owning 5% or more shares; and</i> · <i>Groups of public shareholders with share ownership of less than 5% each.</i> 3. <i>Name of Directors and Commissioners as well as the percentage of ownership of shares directly and indirectly.</i> <p><i>Note: if the Director and Commissioner have no direct and indirect shares to disclose.</i></p>	108-112
10	Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi <i>List of subsidiaries and / or associates</i>	<p>Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi; 2. Persentase kepemilikan saham; 3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/atau entitas asosiasi; dan 4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi). <p><i>In the form of the table containing information, including:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name of subsidiary and / or associate;</i> 2. <i>Percentage of share ownership;</i> 3. <i>Description of the business of the subsidiary and / or associate; and</i> 4. <i>Description of the operating status of the subsidiary and / or associate entity (already in operation or not yet operating).</i> 	113-114
11	Struktur grup perusahaan <i>Company group structure</i>	<p>Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, <i>joint venture</i>, dan <i>special purpose vehicle</i> (SPV).</p> <p><i>The group structure of the company in the form of a chart showing subsidiaries, associates, joint ventures, and special purpose vehicles (SPV).</i></p>	112



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
12	Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/ atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>Chronology of shares issuance (including private placement) and / or stock listing from initial offering up to the end of the fiscal year</i>	Mencakup antara lain: 1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action); 2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan 3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan. <i>Includes:</i> 1. Year of issuance, number of shares, par value of shares, and stock quotation price for each corporate action; 2. Number of shares registered after each corporate action; and 3. The name of the stock where the company's shares are listed. <i>Note: if the company does not have a share listing chronology, it should be disclosed.</i>	115
13	Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku <i>The chronology of the issuance and / or listing of other securities from the initial publication until the end of the fiscal year</i>	Mencakup antara lain: 1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/ imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya; 2. Nilai penawaran efek lainnya; 3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan 4. Peringkat efek. Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan. <i>Includes:</i> 1. Other securities name, other issuance year, other securities interest rate / reward, and maturity date of the securities; 2. The value of other securities offerings; 3. Name of exchange where other securities are listed; and 4. Securities Ranking. <i>Note: if the company does not have a chronology for other securities listing, to be disclosed.</i>	115
14	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang <i>Name and address of supporting institutions and / or professions</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan; 2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan 3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek. <i>Information includes:</i> 1. Name and address of BAE / party administering shares of the company; 2. Name and address of Public Accounting Firm; and 3. Name and address of the rating agency.	115-117
15	Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional <i>Awards received in the last fiscal year and / or certification that is still valid in the last fiscal year both nationally and internationally</i>	Informasi memuat antara lain: 1. Nama penghargaan dan/atau sertifikat; 2. Tahun perolehan; 3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikat; dan 4. Masa berlaku (untuk sertifikasi). <i>Information includes:</i> 1. Name of award and / or certificate; 2. Year of acquisition; 3. Awarding bodies and / or certificates; and 4. Validity period (for certification).	118-121

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
16	<p>Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)</p> <p><i>Names and addresses of subsidiaries and / or branch offices or representative offices (if any)</i></p>	<p>Memuat informasi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan alamat entitas anak; dan 2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and address the subsidiaries; and 2. Name and address of branch offices / representatives. <p><i>Note: if the company does not have subsidiaries / branches / representatives, to be disclosed.</i></p>	122-127
17	<p>Informasi pada Situs Website Perusahaan</p> <p><i>Information on the Company Website</i></p>	<p>Meliputi paling kurang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu; 2. Isi Kode Etik; 3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan; 4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir); 5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan 6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal. <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Shareholder information up to the individual end owner; 2. Code of Ethics Content; 3. General Meeting of Shareholders (GMS) at least includes the agenda items discussed in the GMS, summaries of minutes of the GMS, and important information, namely the date of the GMS announcement, the date of the GMS call, the GMS, the date of the minutes of the GMS; 4. Separate annual financial statements (last 5 years); 5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors; and 6. Board of Commissioners, Directors, Committees, and Internal Audit Unit Charter. 	127

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
18	Education and / or training for the Board of Commissioners, Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit	<p>Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris; 2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi; 3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit; 4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi; 5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya; 6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan 7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan</p> <p><i>Includes at least (types and relevant parties):</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Education and / or training for the Board of Commissioners; 2. Education and / or training for Directors; 3. Education and / or training for the Audit Committee; 4. Education and / or training for the Nomination and Remuneration Committee; 5. Education and / or training for Other Committees; 6. Education and / or training for Corporate Secretary; and 7. Education and / or training for the Internal Audit Unit. which is followed in the book year. <p><i>Note: if there is no education and / or training in the fiscal year, to be disclosed</i></p>	104-108
<p>V ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS ON COMPANY PERFORMANCE</p>			
1	Tinjauan operasi per segmen usaha Overview of operations per business segment	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan masing-masing segmen usaha. 2. Kinerja per segmen usaha, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> · Produksi; · Peningkatan/penurunan kapasitas produksi; · Penjualan/pendapatan usaha; dan · Profitabilitas. <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Explanation of each business segment. 2. Per business segment performance, including: <ul style="list-style-type: none"> · Production; · Increased / decreased production capacity; · Sales / operating revenues; and · Profitability 	145-165

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2	Uraian atas kinerja keuangan perusahaan <i>Description of the company's financial performance</i>	<p>Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; 2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; 3. Ekuitas; 4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain; dan 5. Arus kas. <p><i>Financial performance analysis which includes comparison between financial performance for the year concerned with previous year and reason for increase / decrease (in the form of narration and table), among others concerning:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Current assets, non-current assets, and total assets;</i> 2. <i>Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;</i> 3. <i>Equity;</i> 4. <i>Sales / operating revenue, expenses and profits (loss), other comprehensive income, and total profit (loss) and other comprehensive income; and</i> 5. <i>Cash flow.</i> 	165-188
3	Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan <i>Discussion and analysis of debt ability and collectibility level of the company, by presenting the calculation of relevant ratios according to the type of industrial company</i>	<p>Penjelasan tentang :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan 2. Tingkat kolektibilitas piutang. <p><i>Explanation of :</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The ability to pay the debt, both short-term and long-term; and</i> 2. <i>Collectibility of receivables.</i> 	189-191
4	Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>) <i>Discussion about capital structure and management policy on capital structure policy</i>	<p>Penjelasan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan 2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>); dan 3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal. <p><i>Explanation of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Details of capital structure consisting of interest-based / sukuk and equity debts; and</i> 2. <i>Management policy on capital structure policies; and</i> 3. <i>Basic selection of management policies on capital structure.</i> 	192-193

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
5	<p>Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir</p> <p><i>Discussion of material ties to capital investment (not funding ties) in the last fiscal year</i></p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang melakukan ikatan; 2. Tujuan dari ikatan tersebut; 3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut; 4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan 5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. <p>Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.</p> <p><i>Explanation of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of the party making the bond; 2. The purpose of the bond; 3. Sources of funds expected to fulfill such commitments; 4. Denominated currency; and 5. Measures planned by the company to protect the risk of foreign currency positions. <p><i>Note: if the company does not have capital investment related bonds in the last fiscal year to disclose.</i></p>	193
6	<p>Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir</p> <p><i>Discussion on capital goods investment realized in the last fiscal year</i></p>	<p>Penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis investasi barang modal; 2. Tujuan investasi barang modal; dan 3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.</p> <p><i>Explanation of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Type of investment of capital goods; 2. The purpose of investment of capital goods; and 3. The investment value of capital goods issued in the last fiscal year. <p><i>Note: if there is no realization of investment in capital goods, to disclose.</i></p>	193-194
7	<p>Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk 1 (satu) tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan</p> <p><i>Comparative information between the targets at the beginning of the fiscal year and the results achieved (realization), and the target or projection to be achieved for the coming 1 (one) year for revenue, profits, and others deemed important to the enterprise</i></p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan 2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang. <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Comparison between targets at the beginning of the fiscal year and the results achieved (realization); and 2. Target or projection to be achieved 1 (one) year ahead. 	194-197
8	<p>Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan</p> <p><i>Material information and facts occurring after the date of the accountant's report</i></p>	<p>Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description of important events after the date of the accountant's report including impact on future performance and business risks.</i></p> <p><i>Note: if there are no important events after the date of the accountant's report, to be disclosed.</i></p>	194-195

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
9	Uraian tentang prospek usaha perusahaan <i>A description of the business prospects of the company</i>	Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. <i>Description of the company prospects attributed to industry and the economy in general along with quantitative support data from reliable data sources.</i>	205
10	Uraian tentang aspek pemasaran <i>A description of the marketing aspects</i>	Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar. <i>Description of the marketing aspects of a company's products and / or services, among others, marketing strategy and market share.</i>	142-144
11	Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir <i>Description on dividend policy and amount of cash dividend per share and the amount of dividend per annum announced or paid during the last 2 (two)</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Kebijakan pembagian dividen; 2. Total dividen yang dibagikan; 3. Jumlah dividen kas per saham; 4. Payout ratio; dan 5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun. Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya. <i>Description of:</i> 1. <i>Dividend distribution policy;</i> 2. <i>Total dividends distributed;</i> 3. <i>Amount of cash dividend per share;</i> 4. <i>Payout ratio; and</i> 5. <i>Date of announcement and payment of cash dividend. for each year.</i> <i>Note: if there is no dividend distribution, please disclose the reason.</i>	197-198
12	Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku <i>Company's existing employee and / or management shareholding (ESOP / MSOP) program for the fiscal year</i>	Memuat uraian mengenai: 1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya; 2. Jangka waktu; 3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan 4. Harga exercise. Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan. <i>Description of:</i> 1. <i>Number of shares of ESOP / MSOP and realization;</i> 2. <i>Time period;</i> 3. <i>Eligible employee and / or management requirements; and</i> 4. <i>Exercise price.</i> <i>Note: if it does not have the intended program, to be disclosed.</i>	198



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
13	<p>Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)</p> <p><i>Use of proceeds from the public offering (in case the company is still required to submit a report on the realization of the use of funds)</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total perolehan dana; 2. Rencana penggunaan dana; 3. Rincian penggunaan dana; 4. Saldo dana; dan 5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Total acquisition of funds; 2. Plan for the use of funds; 3. Details of the use of funds; 4. Fund balance; and 5. Date of AGM / RUPO approval on changes in use of funds (if any). <p><i>Note: if no realization information on the use of proceeds from the public offering, to be disclosed.</i></p>	199
14	<p>Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi</p> <p><i>Material transaction information containing conflict of interest and / or transaction with affiliates</i></p>	<p>Memuat uraian mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi; 2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; 3. Alasan dilakukannya transaksi; 4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir; 5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan 6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The name of the transacting party and the nature of the affiliate relationship; 2. Explanation of the fairness of transactions; 3. The reason for the transaction; 4. Actual transactions during the last fiscal year; 5. Company policy related to review mechanism of transaction; and 6. Compliance with relevant rules and regulations. <p><i>Note: if no such transaction, to be disclosed.</i></p>	199-202
15	<p>Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p><i>A description of legislation changes in the last fiscal year</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan 2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The name of the changed legislation; and 2. The impact (quantitative and / or qualitative) on the firm (if significant) or the statement that the impact is insignificant. <p><i>Note: if there is no change in legislation that has any significant effect, to be disclosed.</i></p>	202

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
16	<p>Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir</p> <p><i>A description of the accounting policy changes adopted by the company in the last fiscal year</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan kebijakan akuntansi; 2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan 3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan. <p>Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.</p> <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Changes in accounting policies;</i> 2. <i>Reasons for changes in accounting policies; and</i> 3. <i>The quantitative impact on the financial statements.</i> <p><i>Note: if there is no change in accounting policy in the last fiscal year, to disclose.</i></p>	203
17	<p>Informasi kelangsungan usaha</p> <p><i>Information on business continuity</i></p>	<p>Pengungkapan informasi mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir; 2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan 3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment. <p>Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.</p> <p><i>Information disclosure regarding:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Potential issues significantly affecting the company's business sustainability during the last financial year;</i> 2. <i>Management assessment for issues mentioned above;</i> 3. <i>Basic assumptions used by the management in conducting the assessment.</i> <p><i>Note: if there is no potential issues significantly affecting the company's business sustainability during the last financial year, disclose assumptions as the management basis in believing that there is no potential issues significantly affecting the company's business sustainability during the last financial year.</i></p>	204
VI	<p>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</p> <p><i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i></p>		
1.	<p>Uraian Dewan Komisaris</p> <p><i>Description of the Board of Commissioners</i></p>	<p>Uraian memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris; 2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris). <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Description of the responsibilities of the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Assessment of the performance of each committee under the Board of Commissioners and the basis of its assessment; and</i> 3. <i>Disclosure of Board Charter (Code of Conduct and Board of Commissioners).</i> 	268-289



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
2.	Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris) <i>Independent Commissioners (at least 30% of the total Board of Commissioners)</i>	Meliputi antara lain: 1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan 2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen. <i>Includes:</i> 1. <i>Criteria for determining Independent Commissioners; and</i> 2. <i>Statement on the independence of each Independent Commissioner.</i>	290-292
3.	Uraian Direksi <i>Description of the Board of Directors</i>	Uraian memuat antara lain: 1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; 2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan 3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi). <i>Description of:</i> 1. <i>The scope of work and responsibilities of each member of the Board of Directors;</i> 2. <i>Assessment of the performance of committees under the Board of Directors (if any); and</i> 3. <i>Disclosure of Board Charter (guidelines and work discipline of the Board of Directors).</i>	293-308
4.	Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2020 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi <i>Assessment of GCG Implementation for the fiscal year 2016 covering at least the aspect of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	Mencakup antara lain: 1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian; 2. Pihak yang melakukan penilaian; 3. Skor penilaian masing-masing kriteria; 4. Rekomendasi hasil penilaian; dan 5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi. Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2020, agar diungkapkan. <i>Includes:</i> 1. <i>Criteria used in the assessment;</i> 2. <i>The party conducting the assessment;</i> 3. <i>Scoring scores for each criterion;</i> 4. <i>Recommendation of assessment results; and</i> 5. <i>Reason for not yet / not implementing recommendation.</i> <i>Note: if there is no GCG implementation assessment for the fiscal year 2016, to be disclosed.</i>	228-255

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
	<p>Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi</p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris; 2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi; 3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris; 4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi; 5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan 6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada). <p>Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.</p>	
5.	<p><i>Description of remuneration policy for Board of Commissioners and Board of Directors</i></p>	<p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Disclosure of procedure up to the determination of remuneration of the Board of Commissioners;</i> 2. <i>Disclosure of procedure up to the determination of the remuneration of the Board of Directors;</i> 3. <i>Remuneration structure showing remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners;</i> 4. <i>Remuneration structure showing remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors;</i> 5. <i>Disclosure of indicators for the Board of Directors' remuneration; and</i> 6. <i>Disclosure of performance bonuses, non performance bonuses, and / or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors (if any).</i> <p><i>Note: where there are no performance bonuses, non performance bonuses, and stock options received by each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, to be disclosed.</i></p>	319-326
6.	<p>Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)</p>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal Rapat; 2. Peserta Rapat; dan 3. Agenda Rapat. <p>untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Date of Meeting;</i> 2. <i>Meeting participants; and</i> 3. <i>Meeting agenda.</i> <p><i>for each meeting of the Board of Commissioners, Board of Directors, and joint meetings.</i></p>	327-349

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
7.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu <i>Information on the major and controlling shareholders, either directly or indirectly, to individual owners</i>	<p>Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.</p> <p>Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.</p> <p><i>In the form of schematics or diagrams that separate major shareholders with controlling shareholders.</i></p> <p><i>Note: the major shareholder is a party, directly or indirectly, with at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all voting shares issued by a Company, but not the controlling shareholder.</i></p>	112, 256, 350
8.	Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali <i>Disclosure of affiliate relationships between members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and the Principal and / or controlling Shareholders</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya; 2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; 3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali; 4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan 5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali. <p>Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Affiliation relationships between members of the Board of Directors and other members of the Board of Directors;</i> 2. <i>Affiliation relationships between members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;</i> 3. <i>Affiliation relationships between members of the Board of Directors and the Majority and / or Controlling Shareholders;</i> 4. <i>Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and other members of the Board of Commissioners; and</i> 5. <i>Affiliated relationships between members of the Board of Commissioners and the Majority and / or Controlling Shareholders.</i> <p><i>Note: if it has no such affiliate relationship, it should be disclosed.</i></p>	350-353

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
9.	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan jabatan periode jabatan anggota komite audit; 2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit; 3. Independensi anggota komite audit; 4. Uraian tugas dan tanggung jawab; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan 6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name and position of audit committee members;</i> 2. <i>Education history (Study Field and Educational Institution) and work experience (Position, Institution, and Period of Work) of audit committee members;</i> 3. <i>Independence of audit committee members;</i> 4. <i>Description of duties and responsibilities;</i> 5. <i>Description of the audit committee activities in the fiscal year; and</i> 6. <i>The frequency of meetings and attendance of the audit committee.</i> 	357-365
10.	Komite/Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi <i>Nomination and / or Remuneration Committee Functions</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; 6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan 7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name, position, and brief biography of nomination and / or remuneration committee members;</i> 2. <i>Independence of nomination and / or remuneration committee members;</i> 3. <i>Description of duties and responsibilities;</i> 4. <i>Description of the nomination and / or remuneration committee activities;</i> 5. <i>The frequency of meetings and the attendance of the nomination and / or remuneration committee;</i> 6. <i>Statement of the nomination and / or remuneration committee members guidelines; and</i> 7. <i>Policy on the succession of the Board of Directors.</i> 	366-372
11.	Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan <i>Other Committees under the Board of Commissioners</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain; 2. Independensi komite lain; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; 4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan 5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name, position, and brief biography of committee members;</i> 2. <i>Independence of committees;</i> 3. <i>Description of duties and responsibilities;</i> 4. <i>Description of the implementation of the activities of committees; and</i> 5. <i>The frequency of meetings and the attendance levels of committees.</i> 	373-378

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
12.	Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan <i>Job Description and Function of Corporate Secretary</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan; 2. Domisili; 3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan 4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name, and history of the corporate secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description on execution of the tasks of corporate secretary in the fiscal year. 	379-387
13.	Uraian mengenai unit audit internal <i>Description of the internal audit unit</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama ketua unit audit internal; 2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal; 3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal; 4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan; 5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan 6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name of the head of the internal audit unit; 2. Number of employees (internal auditors) in the internal audit unit; 3. Certification in an internal audit profession; 4. The position of the internal audit unit within the company structure; 5. Description of the internal audit unit activities in the fiscal year; and 6. Parties who appoint and dismiss the chair of the internal audit unit. 	403-413
14.	Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>	<p>Informasi memuat antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir; 3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan 4. Jasa lain yang diberikan akuntan selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.</p> <p><i>Information includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Name and year the public accountant who audited the annual financial statements for the last 5 years; 2. Name and year of the Public Accounting Firm who audited the annual financial statements for the last 5 years; 3. The amount of fee for each type of services provided by the public accountant in the last fiscal year; and 4. Other services provided by the accountant in addition to the annual financial statement audit services in the last fiscal year. <p><i>Note: if no other services are provided, to be disclosed.</i></p>	414-417

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
15.	Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan <i>Description of the company's risk management</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan; 2. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem manajemen risiko; 3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan 4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A description of the company's risk management system; 2. A description of the evaluation of the effectiveness of the risk management system; 3. A description of the risks facing the company; and 4. Efforts to manage those risks. 	418-427
16.	Uraian mengenai sistem pengendalian intern <i>Description of the internal control system</i>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional; 2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan 3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Brief explanation of the internal control system, including financial and operational controls, among others; 2. Explanation of conformity of internal control system with internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and 3. An explanation of the results of reviews conducted on the implementation of the internal control system in the financial year. 	403-413
17.	Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait tatakelola Tanggung jawab sosial <i>A description of corporate social responsibility related to social responsibility governance</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi komitmen pada tanggung jawab sosial 2. Informasi mengenai methoda dan lingkup due diligent terhadap dampak sosial, ekonomi dan lingkungan dari aktifitas perusahaan 3. Informasi tentang stakeholder penting yang terdampak atau berpengaruh pada dampak dari kegiatan perusahaan 4. Informasi tentang isu isu penting sosial ekonomi dan lingkungan terkait dampak kegiatan perusahaan 5. Informasi tentang lingkup tanggung jawab sosial perusahaan baik yang merupakan kewajiban maupun yang melebihi kewajiban 6. Informasi tentang strategi dan program kerja perusahaan dalam menangani isu isu sosial, ekonomi dan lingkungan dalam upaya stakeholders engagement dan meningkatkan value untuk stakeholder dan shareholder 7. Informasi tentang berbagai program yang melebihi tanggung jawab minimal perusahaan yang relevan dengan bisnis yang dijaankan 8. Informasi tentang pembiayaan dan anggaran tanggung jawab sosial <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information on commitment to social responsibility 2. Information on methods and scope of due diligence on the social, economic and environmental impacts from corporate activities 3. Information on important stakeholders affected or influences impacts from corporate activities 4. Information on important socio-economic and environmental issues related to impacts from corporate activities 5. Information about the scope of corporate social responsibility that is both an obligation and beyond obligation 6. Information on the company's strategies and work programs in handling social, economic and environmental issues in stakeholders engagement and increasing value for stakeholders and shareholders 7. Information about various programs that exceeds the company's minimum responsibilities that are relevant to the ongoing business 8. Information about financing and budgeting for social responsibility 	493-501

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
18.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Hak Azasi Manusia</p> <p><i>A description of corporate social responsibility related to core subject of human rights</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject Hak Azasi Manusia 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang Hak Azasi Manusia 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang Hak Azasi Manusia <p><i>1. Information about social responsibility commitments and policies, core subject: Human Rights</i></p> <p><i>2. Information about the company's formulation of the scope of social responsibility, core subject: Human Rights</i></p> <p><i>3. Information about plans for corporate social responsibility in the field of Human Rights</i></p> <p><i>4. Information about implementing CSR initiatives in the field of Human Rights</i></p> <p><i>5. Information about achievements and awards for CSR initiatives in the field of of Human Rights</i></p>	502-504
19.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait core subject Operasi yang adil</p> <p><i>A description of corporate social responsibility related to core subject of fair operations</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan tanggung jawab sosial core subject Operasi yang adil 2. Informasi tentang rumusan perusahaan lingkup tanggung jawab sosial core subject operasi yang adil 3. Informasi tentang perencanaan corporate social responsibility bidang operasi yang adil 4. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil 5. Informasi tentang capaian dan penghargaan inisiatif CSR bidang operasi yang adil <p><i>1. Information about social responsibility commitments and policies, core subject: Fair operation</i></p> <p><i>2. Information about the company's formulation of the scope of social responsibility, core subject: fair operation</i></p> <p><i>3. Information about plans for corporate social responsibility in the field of fair operations</i></p> <p><i>4. Information about implementing CSR initiatives in the field of fair operations</i></p> <p><i>5. Information about achievements and awards for CSR initiatives in the field of fair operations</i></p>	505-507

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
20.	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup.</p> <p><i>A description of corporate social responsibility related to environment</i></p>	<p>Penyampaian informasi tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang komitmen dan kebijakan lingkungan 2. Informasi tentang dampak dan resiko lingkungan penting yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan 3. Informasi tentang target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; 4. Informasi tentang kegiatan yang dilakukan dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan 5. Informasi tentang pelaksanaan inisiatif CSR terkait lingkungan hidup 6. Informasi tentang capaian dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain. 7. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki. <p><i>Information disclosure on:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Information about environmental commitments and policies 2. Information about important environmental impacts and risks that are directly or indirectly related to the company 3. Information about the 2018 target/activity plan determined by the management; 4. Information on activities undertaken and environmental programs related to the company's operations 5. Information about CSR initiative implementation related to the environment 6. Information about the results of quantitative impacts on these activities; such as the use of environmentally-friendly and recycleable materials and energy, the company's waste treatment system, complaint mechanism for environmental issues, consideration of environmental aspects in providing credit to customers, and others. 7. Certification in environmental issues.. 	508-515
21	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja.</p> <p><i>Description of corporate social responsibility related to employment, occupational health and safety.</i></p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject ketenagakerjaan 2. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang ketenagakerjaan 3. Informasi terkait target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang ditetapkan manajemen; dan 4. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut 5. Informasi terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain. <p><i>Includes information about</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate social responsibility policies and commitments to core subject of employments 2. Information on the scope and formulation of social responsibility in the employment sector 3. Information related to targets/activity plans in 2018 determined by management; and 4. Activities carried out and quantitative impact on such activities 5. Information related to employment practices, occupational health, and safety, such as gender equality and employment opportunities, facilities and safety, employee turnover rates, work accident rates, remuneration, employment problem complaint mechanisms, and others. 	516-555

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
22	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen,</p> <p><i>Description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers,</i></p>	<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018 ditetapkan manajemen; dan 2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut 3. Terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain. <p><i>Include among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Targets/activity plans determined by management in 2018; and 2. Activities carried out and the impact of these activities 3. Related to product responsibilities, such as consumer health and safety, product information, facilities, number and consumer complaints handling, etc. 	556-562
23	<p>Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan masyarakatan</p> <p><i>Description of corporate social responsibility related to social and community development</i></p>	<p>Mencakup antara lain informasi tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan komitmen tanggung jawab sosial perusahaan core subject pengembangan sosial dan masyarakatan 2. Informasi tentang isu-isu sosial yang relevan dengan perusahaan 3. Informasi tentang resiko sosial yang dikelola perusahaan 4. Informasi lingkup dan perumusan tanggung jawab sosial bidang pengembangan sosial dan masyarakatan 5. Target/rencana kegiatan pada tahun 2020 yang ditetapkan manajemen; 6. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan 7. Biaya yang dikeluarkan 8. Terkait pengembangan sosial dan masyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain. <p><i>Includes information about:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Corporate social responsibility policies and commitments to core subject of social development 2. Information on social issues relevant to the company 3. Information about the social risks managed by the company 4. Information on the scope and formulation of social responsibility in the social and community development 5. Targets/activity plans in 2020 determined by management; 6. Activities carried out and the impact of such activities; and 7. Expenses incurred 8. Related to social and community development, such as the use of local labor, empowerment of the community around the company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donation, communication on anti-corruption policies and procedures, training on anti-corruption, and others. 	563-572

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
		<p>Mencakup antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok perkara/gugatan; 2. Status penyelesaian perkara/gugatan; 3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan 4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi). 	
24	<p>Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan</p> <p><i>Important matters currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors serving during the annual reporting period</i></p>	<p>Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.</p> <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Principal cases / lawsuits;</i> 2. <i>Court settlement / lawsuit status;</i> 3. <i>Risks facing the company and the value of claims; and</i> 4. <i>Administrative sanctions imposed on corporations, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the relevant authorities (capital market, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that it is not subject to administrative sanctions).</i> <p><i>Note: In the case that a company, subsidiary, member of the Board of Commissioners, and member of the Board of Directors is involved in no important cases, it is disclosed.</i></p>	428-431
25	<p>Akses informasi dan data perusahaan</p> <p><i>Access to company information and data</i></p>	<p>Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui situs web (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, <i>mailing list</i>, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.</p> <p><i>Description of availability of access to information and corporate data for the public, for example through the website (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, meetings with analysts, and so forth.</i></p>	432-439
26	<p>Bahasan mengenai kode etik</p> <p><i>Discussion of codes of conduct</i></p>	<p>Memuat uraian antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokok-pokok kode etik; 2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi; 3. Penyebarluasan kode etik; 4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan 5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Key points of ethics;</i> 2. <i>Disclosure that the code of ethics applies to all levels of the organization;</i> 3. <i>Dissemination of codes of ethics;</i> 4. <i>Sanctions for each type of offense set out in the code of ethics (normative); and</i> 5. <i>Number of code violations and sanctions given in the last fiscal year.</i> <p><i>Note: if there are no violations of the code of ethics in the last fiscal year, to be disclosed</i></p>	459-472



No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
27	Pengungkapan mengenai <i>whistleblowing system</i> <i>Disclosure of the whistleblowing system</i>	<p>Memuat uraian tentang mekanisme <i>whistleblowing system</i> antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian laporan pelanggaran; 2. Perlindungan bagi whistleblower; 3. Penanganan pengaduan; 4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan 5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan 6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku. <p>Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan</p> <p><i>Description of the whistleblowing system mechanism:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Submission of violation reports;</i> 2. <i>Protection for whistleblowers;</i> 3. <i>The handling of complaints;</i> 4. <i>The party managing the complaint; and</i> 5. <i>Number of incoming and processed complaints in the last fiscal year; and</i> 6. <i>Sanctions / follow-up on complaints that have been processed in the fiscal year.</i> <p><i>Note: if there are no incoming complaints in the last fiscal year, to be disclosed</i></p>	475-480
28.	Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Policy on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	<p>Uraian kebijakan Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.</p> <p>Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.</p> <p><i>The Company's policy description on the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors in education (field of study), work experience, age, and gender.</i></p> <p><i>Note: if there is no such policy, to disclose the reasons and considerations.</i></p>	311-312
VII	INFORMASI KEUANGAN <i>FINANCIAL INFORMATION</i>		
1	Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan <i>Letter of the Board of Directors and / or Board of Commissioners on the Responsibility of the Financial Statement</i>	<p>Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.</p> <p><i>Compliance with relevant regulations on Liability to Financial Statements.</i></p>	608
2.	Opini auditor independen atas laporan keuangan <i>Opinion of independent auditors for financial statements</i>		610
3.	Deskripsi Auditor Independen di Opini <i>Description of Independent Auditor for Opinion</i>	<p>Deskripsi memuat tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nama & tanda tangan; 2. Tanggal Laporan Audit; dan 3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik. <p><i>Description of:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Name & signature;</i> 2. <i>Date of Audit Report; and</i> 3. <i>KAP license number and license number of a Public Accountant.</i> 	610

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
4.	Laporan keuangan yang lengkap <i>Complete financial statements</i>	<p>Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan posisi keuangan; 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; 3. Laporan perubahan ekuitas; 4. Laporan arus kas; 5. Catatan atas laporan keuangan; 6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan 7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan). <p><i>Complete financial statements:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Statements of financial position;</i> 2. <i>Income and other comprehensive income statement;</i> 3. <i>Statement of Changes in Equity;</i> 4. <i>Cash flow statement;</i> 5. <i>Notes to the financial statements;</i> 6. <i>Comparative information on previous periods; and</i> 7. <i>The statement of financial position at the beginning of the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or prepares a restatement of financial statement items, or when the entity reclassifies the items in its financial statements (if relevant).</i> 	611-616
5.	Perbandingan tingkat profitabilitas <i>Comparison of profitability levels</i>	<p>Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.</p> <p><i>Comparison of performance / profit (loss) of the current year with the previous year.</i></p>	613-614
6.	Laporan Arus Kas <i>Cash flow statement</i>	<p>Memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan; 2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi; 3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan 4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. <p><i>Meet the following conditions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Grouping into three categories of activities: operations, investments, and financing;</i> 2. <i>The use of direct method to report cash flows from operating activities;</i> 3. <i>Separation of the presentations between cash receipts and / or cash disbursements during the year for operating, investing and financing activities; and</i> 4. <i>Disclosure of non-cash transactions should be included in the notes to the financial statements.</i> 	616
7.	Ikhtisar Kebijakan Akuntansi <i>Summary of Accounting Policies</i>	<p>Meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK; 2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; 3. Pajak penghasilan; 4. Imbalan kerja; dan 5. Instrumen Keuangan. <p><i>Includes:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Statement of compliance with SAK;</i> 2. <i>Basis of measurement and preparation of financial statements;</i> 3. <i>Income tax;</i> 4. <i>Employee benefits; and</i> 5. <i>Financial Instruments.</i> 	619-660

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
8.	Pengungkapan transaksi pihak berelasi <i>Disclosure of related party transactions</i>	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain: Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi; Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.</p> <p><i>Matters expressed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>The names of related parties, as well as the nature and relationship of related parties;</i> <i>The value of the transaction and its percentage of total revenues and related expenses; and</i> <i>Total balance and percentage of total related assets or liabilities.</i> 	694-704
9.	Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan <i>Disclosures related to taxation</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini; Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi; Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020; Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak. <p><i>Matters to be Disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;</i> <i>Explanation of the relationship between tax expense (income) and accounting profit;</i> <i>The statement that the taxable income (LKP) resulted from the reconciliation is used as the basis for filling the Annual Income Tax Return of the Company in 2020;</i> <i>The details of the deferred tax assets and liabilities recognized in the statement of financial position for each presentation period and the total deferred tax expense (income) recognized in the statement of income if the amount is not reflected in the total deferred tax assets or liabilities recognized in the statement of financial position; and</i> <i>Disclosure of no or no tax disputes.</i> 	677-681
10.	Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap <i>Disclosures related to fixed assets</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Metode penyusutan yang digunakan; Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya; Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi. <p><i>Matters to be Disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>Method of depreciation used;</i> <i>A description of the selected accounting policies between the revaluation model and the cost model;</i> <i>Significant methods and assumptions used in estimating the fair value of property, plant and equipment (for revaluation model) or disclosure of fair value of property, plant and equipment (for cost model); and</i> <i>Reconciliation of gross carrying amount and accumulated depreciation of property and equipment at the beginning and end of the period by showing: addition, subtraction and reclassification.</i> 	673-674

No	Kriteria Criteria	Penjelasan Explanation	Halaman Page
11.	Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi* <i>Disclosures related to operating segments *</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan; 2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan; 3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan 4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama. <p><i>Matters to be Disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. General information covering factors used to identify reported segments; 2. Information on reported segment of income, assets, and liabilities; 3. Reconciliation of total segment revenues, reported segment loss, segment assets, segment liabilities, and other segment material items to related amounts in the entity; and 4. Disclosure at the entity level, which includes information about products and / or services, geographic areas and key customers. 	n/a
12.	Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan <i>Disclosures related to Financial Instruments</i>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya; 2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan; 3. Kebijakan manajemen risiko; 4. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan 5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif. <p><i>Matters to be Disclosed:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Details of financial instruments held by their classification; 2. Fair value and hierarchy for each group of financial instruments; 3. Risk management policy; 4. Explanation of risks related to financial instruments: market risk, credit risk and liquidity risk; and 5. The risk analysis associated with financial instruments is quantitative. 	668-671
13.	Penerbitan laporan keuangan <i>Issuance of financial statements</i>	<p>Hal-hal yang diungkapkan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan 2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan. <p><i>Matters expressed include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Date of financial statements authorized for publication; and 2. The party responsible for authorizing the financial statements. 	619

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page is intentionally left blank.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY*
DAHULU/*PREVIOUSLY* PERUM JAMINAN KREDIT
INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

31 DESEMBER/*DECEMBER 2020*

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB
ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG
BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Putrama Wahyu Setyawan
Jabatan : Direktur Utama
Alamat Kantor : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610
2. Nama : I. Rusdonobanu
Jabatan : Direktur Keuangan, Investasi
dan Manajemen Risiko
Alamat Kantor : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Jaminan Kredit Indonesia dan Entitas Anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
AND SUBSIDIARY**

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT AND FOR THE YEARS
ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

We, the undersigned:

1. Name : Putrama Wahyu Setyawan
Title : President Director
Office Address : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6 Kota
Baru, Bandar Kemayoran Jakarta
Pusat, 10610
2. Name : I. Rusdonobanu
Title : Risk Management, Investment,
and Finance Director
Office Address : Jl. Angkasa Blok B-9, Kav.6 Kota
Baru, Bandar Kemayoran Jakarta
Pusat, 10610

Declare that:

1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary;
2. The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. All information in the consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. The consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit material information or facts;
4. We are responsible for PT Jaminan Kredit Indonesia and Subsidiary internal control system.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and behalf of the Directors

Jakarta, 22 November/November 2021



Putrama Wahyu Setyawan
I. Rusdonobanu

Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama/
President Director

I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi,
dan Manajemen Risiko/
Risk Management, Investment
and Finance Director

Kantor Pusat

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kav.6 Kemayoran Jakarta Pusat, 10610
Tel. (62-21) 654 0335, Fax.(62-21) 654 0344/48
www.jamkrindo.co.id



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") dan entitas anaknya (bersama-sama disebut "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Jaminan Kredit Indonesia (the "Company") and its subsidiaries (together as "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at 31 December 2020, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the consolidated financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 - Indonesia,

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Iain Usaha: KEP-04/PM.1/2005

01624/2.1025/AU.1/09/0222-1/1/XI/2021



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Jaminan Kredit Indonesia dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Jaminan Kredit Indonesia and its subsidiaries as at 31 December 2020, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

JAKARTA,
22 November/November 2021

Drs. M. Jusuf Wibisona, M.Ec., CPA
Ijin Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.0222

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/DAN SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

		31 Desember/December		31 Desember/ December 2019	
	Catatan/ Notes	2020	2019 ¹⁾	January 2019 ¹⁾	
ASET					
Kas dan kas di bank	5	101,305	58,614	235,370	Cash on hand and cash in banks
Deposito wajib dan berjangka	6	6,486,249	6,178,594	6,076,437	Statutory and time deposits
Efek efek	7	4,632,456	4,503,096	3,970,269	Marketable securities
Piutang lewat masa penjaminan - bersih	8	2,584,461	1,450,972	1,290,911	Guarantee receivables - net
Piutang penjaminan ulang - bersih	9	402,611	354,845	287,492	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi	10	39,211	66,050	48,895	Investment income receivables
Biaya dibayar dimuka		16,578	32,207	27,925	Prepaid expenses
Aset tetap - bersih	11	320,834	206,588	187,267	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih		38,633	40,141	137	Intangible assets - net
Deposito di bank yang dibekukan penggunaannya	12	1,192,038	716,072	487,379	Restricted deposit in banks
Penjaminan ulang dibayar dimuka	13	987,203	963,291	987,595	Prepaid re-guarantees
Aset pengembalian	14	456,203	331,036	70,814	Reimbursement assets
Biaya akuisisi tangguhan	15	314,721	348,962	319,035	Deferred acquisition cost
Aset penjaminan ulang	16	308,487	238,016	166,245	Re-guarantee assets
Aset pajak tangguhan	20c	1,151,643	1,174,212	998,138	Deferred tax assets
Aset lain-lain	17	10,145	25,513	131,255	Other assets
JUMLAH ASET		19,122,829	16,770,270	15,146,125	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Utang komisi		4,247	14,125	85,934	Claims payable
Utang penjaminan ulang	18	246,645	126,596	125,303	Re-guarantee payables
Akumulasi utang lain-lain	19	1,034,001	910,739	949,304	Accruals and other payables
Utang pajak	20a	143,075	251,542	9,711	Taxes payable
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	21	7,826,967	6,666,285	5,464,470	Liabilities for financial guarantee contracts
Pendapatan komisi ditangguhkan	22	149,930	150,528	84,412	Deferred commission income
Estimasi tanggungan klaim	23	161,567	156,778	79,001	Estimated claim liabilities
Imbal jasa asuransi ditangguhkan	24	632,789	423,100	304,879	Unearned benefit fees
Tuuhkita pihak ketiga	25	84,968	53,104	45,858	Employee benefits liabilities
JUMLAH LIABILITAS		10,265,550	10,692,189	6,729,562	TOTAL LIABILITIES

¹⁾ Dinyatakan sesuai Nota Catatan 9

Revised, see Note 4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF
FINANCIAL POSITION**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ A/note	31 Desember/December		31 Desember/ December 2019		
	2020	2019 ¹⁾	1 Januari/ January 2019 ¹⁾		
EKUITAS				EQUITY	
Ekuitas yang dapat distribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to equity holders of the parent entity	
Modal saham:				Share capital	
- Ser. A Dwwarna - nilai nominal Rp 1.365.160 (nilai penuh) per lembar saham				Class A Dwwarna - nominal - amount Rp 1,365,160 (full amount) of Rp per share	
- Ser. B - nilai nominal Rp 1.000.000 (nilai penuh) per lembar saham				Class B - nominal amount - Rp 1,000,000 (full amount) of Rp per share	
Modal dasar:				Authorized capital:	
- Ser. A Dwwarna - 1 saham				Class A Dwwarna - 1 share	
- Ser. B - 30.000.000 saham				Class B - 30,000,000 shares	
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid:	
- Ser. A Dwwarna - 1 saham				Class A Dwwarna - 1 share	
- Ser. B - 7.636.732 saham	26	7,636,732	-	Class B - 7,636,732 shares	
Penyisihan modal rekening Pensyukuran kembali inbalan pasca kerja		-	7,628,733	7,628,733	The Government's share capital Reversal/offset of post-employment benefits
Keuangan yang belum didistribusi atas surat berharga yang diakui pada interwajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak		(27,494)	(13,928)	(16,316)	Unappropriated losses on marketable securities recognized or to be recognized through other comprehensive income, after tax
Saldo laba yang telah dibelikan penggunaannya		381,644	1,355,205	149,269	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum dibelikan penggunaannya		466,132	198,911	375,000	Unappropriated retained earnings
		8,855,864	8,578,061	8,416,570	
Keuntungan non-pengelola	27	15	14	10	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		8,855,879	8,578,075	8,416,580	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		19,122,829	16,720,270	15,145,126	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

¹⁾ Dengan ketentuan lain: Catatan 4

Revised: 2020-12-16 11:07

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019 ¹⁾	
PENDAPATAN PENJAMINAN				GUARANTEE INCOME
Imbal jasa penjaminan	28	2,826,524	2,313,611	Guarantee fee income
Imbal jasa kafalah bruto	29	500,282	331,501	Gross kafalah fees
Kenaikan imbal jasa kafalah belum merupakan pendapatan	31	(140,126)	(96,315)	Increase in unearned kafalah fees
Fromi penjaminan ulang	30	<u>(553,282)</u>	<u>(434,725)</u>	Re-guarantee premiums
Imbal jasa penjaminan bersih		2,633,398	2,152,072	Net guarantee income
BEBAN PENJAMINAN				GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim				Claim expenses
Beban klaim	32	2,180,243	2,234,814	Claim expenses
Klaim penjaminan ulang	34	(372,971)	(438,432)	Re-guarantee claims
Beban biaya		32,224	25,427	Other expenses
Biaya kafalah lainnya		216	-	Other kafalah expenses
Kenaikan cadangan klaim	33	527,290	435,063	Increase in claim reserves
Pendapatan subrogasi - bersih	35	(516,767)	(534,808)	Subrogation income - net
Pendapatan biaya penjaminan ulang		<u>(17,335)</u>	<u>(14,727)</u>	Re-guarantee other income
Jumlah beban klaim		1,830,400	1,737,658	Total claim expenses
Penjaminan bersih		802,998	414,713	Net guarantee
Komisi - bersih		(27,195)	(48,738)	Commission - net
Pendapatan investasi - bersih	36	799,211	782,810	Investment income - net
Beban usaha	37	(903,870)	(931,759)	Operating expenses
Pendapatan lain-lain	38	<u>51,130</u>	<u>24,812</u>	Other income
LABA SEBELUM PAJAK		722,450	131,638	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak final		(118,307)	(138,747)	Final tax expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		604,143	42,491	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(Beban/manfaat pajak penghasilan)	20b	(148,323)	156,420	Income tax (expense)/benefit
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		455,820	138,611	NET PROFIT FOR THE YEAR

¹⁾ Disajikan kembali, hal 103196-4

Meritama 2020/2019/4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019 ¹	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will not be reclassified to profit or loss:</i>
H pengukuran kembali imbalan kerja	2E	(20,251)	3,184	<i>Remeasurement of post employment benefits</i>
Efek pajak terkait	20c	<u>6,885</u>	<u>(798)</u>	<i>Related tax effect</i>
		<u>(13,366)</u>	<u>2,386</u>	
Kerugian yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		(12,757)	-	<i>Unrealized losses on financial assets measured at fair value through other comprehensive income</i>
Efek pajak terkait		<u>-</u>	<u>-</u>	<i>Related tax effect</i>
		<u>(12,757)</u>	<u>-</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				<i>Items that will be reclassified to profit or loss:</i>
Kaumangan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		133,520	97,461	<i>Unrealized gains on financial assets measured at fair value through other comprehensive income</i>
Efek pajak terkait	20c	<u>(17,757)</u>	<u>2,485</u>	<i>Related tax effect</i>
		<u>115,763</u>	<u>99,946</u>	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		<u>88,480</u>	<u>102,334</u>	<i>Other comprehensive income for the year, net of tax</i>
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>545,613</u>	<u>301,245</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR
LABA TAHUN BERJALAN DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		456,312	188,813	<i>Owner of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali		<u>1</u>	<u>(2)</u>	<i>Non-controlling interest</i>
		<u>456,313</u>	<u>188,811</u>	
LABA KOMPREHENSIF DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		545,612	301,247	<i>Owner of the parent entity</i>
Kepentingan non-pengendali		<u>1</u>	<u>(2)</u>	<i>Non-controlling interest</i>
		<u>545,613</u>	<u>301,245</u>	

¹ Disajikan kembali. Prax Co. 2019 &

Revised, see Note 4

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Salin Babak/interim statements							
	Modal pemberian modal dalam bentuk dividen dan setoran tunai	Pendapatan kumulatif kemudian dikurangi dengan biaya perbaikan aset non-lancar jangka panjang yang tersedia untuk dijual	Kerugian yang belum direalisasi atas instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai instrumen finansial yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selain pajak/corporate income tax	Saldo laba yang belum dibagikan pada awal tahun kegiatan laporan keuangan	Saldo laba yang belum dibagikan pada akhir tahun kegiatan laporan keuangan	Keterlambatan non- keuangan dalam melakukan pengalangan pinjaman	SUMMARY Total	Jumlah ekuitas Total/Totality
	Rp 7.638.733	(4.576)	1830.666	765.559	375.000	16	6.914.570	3.416.556
Saldo 1 Januari 2019								Saldo as at 1 January 2019
Dividen tunai				348.248	348.248			Share dividends
Deduplikasi					(29.794)		(29.794)	Duplicate
Laba bersih tahun berjalan					193.511	121	193.632	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lainnya yang tersedia untuk dijual			96.846				96.846	Other comprehensive income available for sale measurement of loss
Penghasilan komprehensif lainnya yang tersedia untuk dijual		2.382					2.382	Measurement of loss - employment benefits
Saldo 31 Desember 2019	7.638.733	(4.576)	1.830.666	765.559	375.000	16	6.914.570	Balance as at 31 December 2019
Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 58/PMK/2019 tentang Pengalangan Pinjaman		(3.828)	(23.887)	1.005.118	108.541	14	6.665.663	Effect of the new financial instrument available for sale measurement of loss - employment benefits
Saldo 1 Januari 2020 setelah Dampak Peristiwa Keuangan			84.462		123.272		34.190	Balance as at 1 January 2020 after impact of financial instrument
Dampak perantara keuangan		(1.828)	(178.283)	1.035.272	175.638	15	6.710.282	Impact of change in Company's legal entity
Saldo 31 Desember 2020	17.638.733	6.036.733			223.581		6.955.864	Balance as at 31 December 2020
Dividen				(223.361)	(223.361)		(400.000)	Share dividends
Laba bersih tahun berjalan					498.100	1	498.101	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lainnya yang tersedia untuk dijual			103.246				103.246	Other comprehensive income available for sale measurement of loss - employment benefits
Saldo 31 Desember 2020		(13.306)					133.210	Balance as at 31 December 2020
		(27.404)	(73.362)	563.244	456.133	16	6.855.879	Balance as at 31 December 2020

*) Pengalangan pinjaman, rasio capital and The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019^{*)}</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan imbal jasa penjaminan	2.803.781	2.811.560	<i>Receipt from guarantee fee</i>
Pembayaran klaim dari mitra penjaminan ulang	504.954	597.229	<i>Payment from re-guarantee partners</i>
Penerimaan aktivitas operasi lainnya	601.978	137.055	<i>Receipt from other operating activities</i>
Pembayaran imbal jasa penjaminan ulang	(485.850)	(450.507)	<i>Payment of re-guarantee fees</i>
Pembayaran klaim	(1.982.871)	(1.960.739)	<i>Payment of claims</i>
Pembayaran biaya	(219.998)	(440.648)	<i>Payment of expenses</i>
Pembayaran kepada karyawan	(427.386)	(433.870)	<i>Payment to employee</i>
Pembayaran pajak penghasilan	(256.149)	(120.114)	<i>Payment of income tax</i>
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>528.040</u>	<u>9.886</u>	<i>Net cash provided from operating activities</i>
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan hasil investasi	911.311	863.716	<i>Receipt from return of investment</i>
Penempatan investasi yang diperkenankan	(912.436)	(864.578)	<i>Placement of allowed investments</i>
Pembelian aset tetap	(114.924)	(115.205)	<i>Acquisition of fixed assets</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(116.049)</u>	<u>(116.068)</u>	<i>Net cash used in investing activities</i>
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Dividen	(400.000)	(39.764)	<i>Dividend</i>
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(400.000)</u>	<u>(39.764)</u>	<i>Net cash used in financing activities</i>
Kenaikan/(penurunan) kas dan kas di bank	12.481	(116.706)	<i>Increase/(decrease) in cash on hand and cash in banks</i>
KAS DAN KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	<u>88.614</u>	<u>235.370</u>	CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>101.105</u>	<u>68.664</u>	CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

^{*)} Disajikan kembali. (Not Certain)

Retrieved, see item 4

Calatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 bentuk badan hukum Perum Jaminan Kredit Indonesia menjadi perseroan terbatas bernama PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau PT Jamkrindo (Persero) berdasarkan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., No. 26 tanggal 24 Februari 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, anggaran dasar terakhir disahkan oleh Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. No. 02 tanggal 9 April 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0026854.Ah.01.02 tanggal 9 April 2020. Perubahan Anggaran Dasar terakhir ini adalah perubahan struktur pemegang saham akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia dan dalam rangka penambahan penyerahan modal Negara Republik Indonesia pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPU"), dan mengenai nama Perusahaan dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta dan mempunyai 9 kantor wilayah, 1 kantor cabang khusus, 55 kantor cabang dan 16 kantor unit pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia (tidak diaudit).

Sesuai dengan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 2 tanggal 9 April 2020, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah melakukan penjaminan kredit baik bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM), Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Real Gudang, dan Penjaminan lainnya.

1. GENERAL INFORMATION

PT Jaminan Kredit Indonesia (the "Company") was established based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981 under the name Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, previously named Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which is formed by 1970. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 51 Year 1981, which is renewed by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 27 Year 1985, here in after by the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 95 Year 2000 dated 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi was changed by Perum Sarana Pengembangan Usaha. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 41 Year 2008, that was updated with Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 35 Year 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha was changed to Perum Jaminan Kredit Indonesia. Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation Number 11 year 2020, legal form of Perum Jaminan Kredit Indonesia change to limited liability company namely PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) or PT Jamkrindo (Persero) by Notarial Deed No.26 of Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., dated 24 February 2020.

The Company's Articles of Association have been amended several times, with the latest amendment in accordance with Notarial Deed Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. No. 02 dated 9 April 2020 and this deed has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its decree No. AHU-0026854.Ah.01.02 dated 9 April 2020. This amendment regarding and changes in shareholder structure as a result of the transfer of all series B shares of the Republic of Indonesia and in the context of increasing the capital participation of the Republic of Indonesia in PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPU"), and the legal entity's name from a state-owned Company ("Persero") PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) to PT Jaminan Kredit Indonesia.

The Company's head office located at Jalan Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, DKI Jakarta and have 9 regional offices, 1 special branch office, 55 branch offices, and 15 unit service offices which spread over in all Indonesia (unaudited).

Based on Shareholders' Decision Decree of PT Jaminan Kredit Indonesia No.2 dated 9 April 2020, the main business of the Company is to provide credit guarantees for Micro Small Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM), Guarantee For State-Owned Enterprises, Guarantee Receipt System Warehouse, and other guarantees

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**GATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, komposisi Dewan Komisaris, Dewan Direksi, anggota Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

As at 31 December 2020 and 2019, the composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee, and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris	Sri Mulyanto Dah Natalisa Noor Ida Khomsiyah Ari Wahyuni Muhammad Muchlas Rowi	Sri Mulyanto Olsh Natalisa Noor Ida Khomsiyah Ari Wahyuni Muhammad Muchlas Rowi	<i>Board of Commissioners President Commissioner Commissioner Commissioner Commissioner</i>
Dewan Direksi Direktur Utama Direktur Bisnis Penjaminan Direktur Operasional dan Jaringan Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Umum dan Kepatuhan Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	Putrama Wahyu Setyawan ¹⁾ Kadar Wisnuwardana ²⁾ Kadar Wisnuwardana Sulis Jسدكو I. RusdonoBanu	Randi Anto ³⁾ Amin Mas'udi ⁴⁾ Kadar Wisnuwardana Sulis Uedكو I. RusdonoBanu	<i>Board of Directors President Director Business Guarantee Director Operational and Network Director Director of Human Resources, General Affairs and Compliance Finance, Investment and Risk Management Director</i>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Komite Audit Kelua Anggota Anggota Anggota	Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyah Dody Heriawan Priatmoko Fahru Ismaeni ⁵⁾	Sri Mulyanto Noor Ida Khomsiyah Dody Heriawan Priatmoko -	<i>Audit Committee Chairman Member Member Member</i>
¹⁾ diberhentikan dengan hormat sejak tanggal 26 Oktober 2020			dismissed with honour on 26 October 2020 ¹⁾
²⁾ diangkat tanggal 26 Oktober 2020			appointed on 26 October 2020 ²⁾
³⁾ diangkat pada tanggal 7 November 2020 sampai dengan 21 Maret 2021 sebagai Pelaksana Tugas			appointed as acting director on 7 November 2020 until 21 March 2021 ³⁾
⁴⁾ diberhentikan dengan hormat sejak 7 November 2020			dismissed with honour on 7 November 2020 ⁴⁾
⁵⁾ diangkat tanggal 1 Oktober 2020			appointed on 1 October 2020 ⁵⁾

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (tidak diaudit) masing-masing adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2020 and 2019, the number of employees of the Company and subsidiary (unaudited) are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Perusahaan	865	965	The Company
Entitas anak	104	78	Subsidiary
	<u>1.169</u>	<u>1.043</u>	

Entitas anak yang dikonsolidasikan

Consolidated subsidiary

Berikut ini adalah entitas anak yang dikonsolidasi oleh Perusahaan karena mempunyai kepemilikan mayoritas atau hak untuk mengendalikan operasi:

The following is the list of the Company's consolidated Subsidiary in which it has majority ownership or the right to control the operation:

Entitas anak Name of subsidiary	Domisili Country	Jenis usaha/ Type of business	Tanggalnya kegiatan komersial Commencement of commercial operations	Pemeriksaan kepemilikan/Ownership percentage		Jumlah aset (Sesekutu perserta) Total asset (Before eliminations)	
				31 Desember/ 31 December	2019	2020	2019
PT Penjaminan Jaminan Syariah	Indonesia	Penjaminan syariah/ Sharia guarantee	24 September 2018	98.997%	97.997%	1,673,270	1,188,644

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Entitas induk langsung dan entitas induk utama Perusahaan adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak (bersama-sama disebut "Grup") disusun dan disetujui oleh Direksi untuk terbit pada tanggal 22 November 2021.

Kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah seperti yang dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dimana diukur pada nilai wajar. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan kas di bank mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

Pos-pos yang disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang yang sesuai dengan lingkungan ekonomi utama di mana Grup beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Grup adalah Rupiah.

1. GENERAL (continued)

The Company's immediate and ultimate parent is PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), incorporated and domiciled in Indonesia.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The consolidated financial statements of the Company and Subsidiary (together called "Group") were prepared and authorized by the Directors to be issued on 22 November 2021.

The significant accounting policies adopted in the preparation of these consolidated financial statements are set out below:

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards of IAI.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for financial assets measured at fair value through other comprehensive income and at fair value through profit or loss which have been measured at fair value. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on the direct method by classifying cash flow on the basis of operating, investing and financing activities. For the purpose of statement of cash flow, cash on hand and cash in banks include cash on hand and cash in banks which are not restricted and placed as collateral for any borrowings.

Figures in the consolidated financial statements are expressed in million Rupiah, unless otherwise stated.

Items included in the consolidated financial statements of the Group are measured using the currency of the primary economic environment in which the Group operates (the "functional currency"). The functional currency of the Group is Rupiah.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

a. Basis of preparation of the consolidated financial statements (continued)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian dibutuhkan estimas dan asumsi yang mempengaruhi nilai aset dan liabilitas dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian dan jumlah pendapatan dan beban selama periode laporan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik Direksi atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula (lihat Catatan 3).

The preparation of the consolidated financial statements requires the use of estimates and assumptions that affects the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements, and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Although these estimates are based on Director's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates (refer to Note 3).

b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretation of financial accounting standards

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2020.

The followings are financial accounting standards, amendments, and interpretation of financial accounting standards become effective starting 1 January 2020.

- PSAK 71 "Instrumen keuangan";
- PSAK 72 "Pencapaian dari Kontrak dengan pelanggan";
- PSAK 73 "Sewa";
- Amendemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan";
- Amendemen PSAK 15 "Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama";
- Amendemen PSAK 62 "Kontrak asuransi";
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang "Reformasi acuan suku bunga";
- Amendemen PSAK 102 "Akuntansi murabahah";
- Amendemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- PSAK 74 "Kontrak asuransi";
- PSAK 13 "Pencabutan PSAK 45" tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba;
- PSAK 101: "Penyajian laporan keuangan syariah";
- ISAK 35 "Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba";
- ISAK 36 "Interpretasi atas interaksi antara ketentuan mengenai hak atas tanah dalam PSAK 16: Aset tetap dan PSAK 73: Sewa";
- ISAK 101 "Pengakuan pendapatan murabahah tanggung tanpa risiko signifikan terkait kepemilikan persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan nilai piutang murabahah"; dan
- Penyesuaian 2020 "Kerangka konseptual 2019".

- SFAS 71 "Financial instruments";
- SFAS 72 "Revenue from contract with customer";
- SFAS 73 "Leases";
- Amendment of SFAS 1 "Presentation of financial statements";
- Amendment to SFAS 15 "Investment in associates and joint ventures";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance contracts";
- Amendment to SFAS 71, Amendment to SFAS 55 and Amendment to SFAS 60 "Interest rate benchmark reform";
- Amendment to SFAS 102 "Accounting for murabahah";
- Amendment to SFAS 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- SFAS 74 "Insurance contract";
- PSAK 13: "Withdrawal of PSAK 45: Financial reporting of non-profit entities";
- SFAS 101 "Presentation of financial statements endowment entities";
- ISFAS 35 "Presentation of non-profit oriented entities financial statements";
- ISFAS 36 "Interpretation of the interaction between provisions regarding land rights in PSAK 16: Fixed assets and PSAK 73: Leases";
- ISFAS 101 "Recognition of deferred murabahah income without significant inventory ownership risks";
- ISFAS 102 "Impairment of murabahah receivables"; and
- Annual improvement 2020 "Conceptual framework 2019".

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2 KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**b. Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan
(lanjutan)**

PSAK 71 dan 73 di atas memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk PSAK lainnya yang tersebut di atas tidak memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

PSAK 71 "Instrumen Keuangan"

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan memperkenalkan pengaluran baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk ekuitansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Grup memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Grup telah melakukan penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 sebesar Rp 22.272 (bersih setelah pajak) (lihat catatan 43).

Peraturan baru atas ekuitansi lindung nilai tidak berdampak terhadap Grup dimana saat ini, Grup tidak melakukan transaksi yang berkaitan dengan ekuitansi lindung nilai.

Anak Perusahaan menerapkan basis implementasi syariah berdasarkan PSAK No. 110 tentang "Akuntansi Sukuk", yang merupakan pengecualian dari PSAK 71 dan menerapkan pengecualian sementara PSAK 71 karena memenuhi kriteria tertentu seperti terdapat di dalam standar. PSAK 71 akan diterapkan oleh Anak Perusahaan bersamaan dengan penerapan PSAK 74 "Kontrak Asuransi" di masa yang akan datang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**b. Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretation of
financial accounting standards (continued)**

SFAS 71 and 73 had significant effects on the amounts reported for current year and prior years.

Whereas for other SFAS other than mentioned above had no significant effect on the amount reported for current year or prior years.

SFAS 71 "Financial Instruments"

SFAS 71 replaces SFAS 55 'Financial Instruments: Recognition and Measurement' and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairment losses for financial instruments using the expected credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.

In accordance with the transition requirements in SFAS 71, the Group elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate comparative information. The Group has adjusted the beginning 2020 retained earnings amounting to Rp 22,272 (net after tax) (refer to note 43).

The hedge accounting rules in this standard had no impact to the Group as currently the Group did not enter into transactions related to hedge accounting.

The Subsidiary apply sharia implementation basis based on SFAS No. 110 on "Accounting for Sukuk", which is excluded from SFAS 71 and applied the temporary exemption of SFAS 71 (deferral approach) for having met the eligibility requirements for deferral under the standard. SFAS 71 will be adopted by the Subsidiary simultaneously with the implementation of SFAS 74 "Insurance Contracts" in the future.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

**b. Perubahan pada pernyataan standar
akuntansi keuangan dan interpretasi
pernyataan standar akuntansi keuangan**
(lanjutan)

**PSAK 72 "Pendapatan dari kontrak dengan
Pelanggan"**

PSAK 72 mensyaratkan Grup menganalisa pengakuan pendapatan menggunakan lima langkah berdasarkan kontrak dimana pengakuan pendapatan terjadi ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut).

Berdasarkan hasil evaluasi Grup, prinsip dasar dari standar baru ini, terkait pengukuran dan waktu pengakuan pendapatan, telah sesuai dengan model dan praktik bisnis Grup. Oleh karena itu, penerapan PSAK 72 tidak berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

PSAK 73 "Sewa"

Selubungan dengan penerapan PSAK 73, Grup sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai "sewa operasi" berdasarkan prinsip PSAK 30: "Sewa", kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga, Grup juga mempertimbangkan faktor utama berikut: risiko kredit korporat Grup, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran dimuka.

Seuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73 "Sewa", Grup memilih penerapan secara prospektif dengan tidak terlapal dampak kumulatif pada awal penerapan tidak pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020, Grup juga membukukan aset hak-guna dan liabilitas sewa (lihat Catatan 43).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**b. Changes to the statements of financial
accounting standards and interpretation of
financial accounting standards (continued)**

**SFAS 72 "Revenue from contracts with
customers"**

PSAK 72 requires the Group to analyse revenue recognition using five steps based on contracts where revenue is recognised when performance obligation is satisfied by transferring the promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of the goods or services).

Based on the Group's assessment, the underlying principles of the new standard, relating to the measurement of revenue and the timing of recognition, are closely aligned with the Group's current business model and practices. As a result, the adoption of SFAS 72 did not have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

SFAS 73 "Leases"

In relation to the implementation of SFAS 73, the Group as lessee recognised right-of-use assets and leases liabilities related to leases which were previously classified as "operating leases" based on SFAS 30: "Leases", except for short-term leases or leases with low value assets. These lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rates as at 1 January 2020. In determining incremental borrowing, the Group also considers the following main factors: the Group corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into and the currency in which the lease payments are denominated. Right-of-use assets were measured at the amount equal to the lease liabilities, adjusted by the amount of any prepaid.

In accordance with the transition requirements in SFAS 73 "Leases", the Group elected to apply prospectively with none of the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate comparative information. In the consolidated statements of financial position as at 1 January 2020, the Group has also recorded right-of-use assets and lease liabilities (see Note 43).

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

- b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)

PSAK 73 "Sewa" (lanjutan)

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Grup menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa.

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah/ Amount
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	-
Ditambah: komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	73,730
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman antar bank	(27,347)
Dikurangi:	
- komitmen yang tidak memenuhi definisi PSAK 73	-
- sewa jangka pendek	(288)
- aset bernilai rendah	-
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	46,085

c. Prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan suatu entitas ketika Perusahaan terkepos terhadap, atau memiliki hak atas, penembalian variabel dari keterlibatannya terhadap entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut.

Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal pengendalian beralih secara efektif kepada Perusahaan dan tidak lagi dikonsolidasi sejak Perusahaan tidak lagi memiliki kontrol.

Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung atau tidak langsung pada entitas induk.

2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

- b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretation of financial accounting standards (continued)

SFAS 73 "Leases" (continued)

In applying SFAS 73 for the first time, the Group used the practical expedient permitted by the standard in which use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics.

The reconciliation between the operating leases commitments disclosed under SFAS 30 as at 31 December 2019 and the leases liabilities recognised under SFAS 73 as at 1 January 2020 is as follows:

Operating leases commitment disclosed as at 31 December 2019	
Add: operating lease commitments were not disclosed as at 31 December 2019	
Discounted using the interbank borrowing rate	
Less:	
operating lease commitments do not meet SFAS 73's definition	-
short term leases	-
low value assets	-
Leases liabilities recognised as at 1 January 2020	

c. Principle of consolidation

The consolidated financial statements include the accounts of the Company and its subsidiary where the entity has control. The Company controls an entity when the Company is exposed to, or has right to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those return through its power over the entity.

The subsidiary is consolidated from the date on which effective control is transferred to the Company and no longer consolidated from the date when the Company is no longer able to control.

Non-controlling interest represent the equity in a subsidiary not attributable directly or indirectly to the parent.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Prinsip konsolidasian (lanjutan)

c. Principle of consolidation (continued)

Keuntungan non-pengendali atas laba bersih entitas anak disajikan sebagai pengurang dari laba bersih konsolidasian untuk menyajikan jumlah laba yang menjadi hak Perusahaan. Keuntungan non-pengendali atas aset bersih disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Keuntungan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Non-controlling interest in net income of subsidiary is presented as a deduction of consolidated net income in order to present the Company's income. Non-controlling interest in net assets is presented as part of equity. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the parent's equity.

Transaksi, saldo dan keuntungan antar entitas Grup yang belum direalisasi telah dieliminasi. Kerugian yang belum direalisasi juga dieliminasi. Kebijakan akuntansi entitas anak diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan kebijakan akuntansi yang diadopsi Grup.

Intercompany transactions, balances and unrealised gains on transactions between the Group companies are eliminated. Unrealised losses are also eliminated. Accounting policies of subsidiary have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Group.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali bila dinyatakan lain.

The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the subsidiary, unless otherwise stated.

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

d. Financial asset and financial liabilities

i. Aset keuangan

i. Financial assets

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020**

Policy applicable before 1 January 2020

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

The Group classifies its financial assets in the following categories of financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Financial assets at fair value through profit or loss

Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dipertanggungjawabkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh Grup untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

This category comprises two sub-categories: financial assets classified as held for trading and financial assets designated by the Group as at fair value through profit or loss upon initial recognition.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi (lanjutan)

Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short-term profit taking*) yang terkini.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajar/wa pada saat pengakuan awal, biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan instrumen keuangan ini diakui di dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dicatat sebagai "Pendapatan Investasi".

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan yang diperdagangkan termasuk di dalam pendapatan investasi. Pendapatan/(beban) investasi diakui berdasarkan basis akrual. Keuntungan/(kerugian) selisih kurs atas investasi dilaporkan sebagai pendapatan investasi.

Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Grup untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Grup dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- dalam hal Grup mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang dibankan dan piutang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

i. Financial assets (continued)

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

Financial assets at fair value through profit or
loss (continued)

A financial asset is classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term or if it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of (*short-term profit taking*).

Financial instruments included in this category are recognised initially at fair value; transaction costs (if any) are taken directly to the consolidated statement profit or loss. Gains or losses arising from changes in fair value and sales of these financial instruments are included directly in the statement of consolidated statement of profit or loss and are reported as "Investment income".

Interest income on financial instruments held for trading are included in investment income. Investment income/(expense) is recognised on an accrual basis. Foreign exchange gains/(losses) on investments are reported in investment income.

Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- those that the Group intends to sell immediately or in the short-term, which are classified as held for trading and those that the entity upon initial recognition measured as at fair value through profit or loss;
- those that the Group upon initial recognition measured as available-for-sale; and
- those for which the Group may not recover substantially all of its initial investment, other than because of loans and receivables deterioration.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang
(lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang
diberikan dan piutang diakui pada nilai
wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada)
dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan
diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif. Dalam hal terjadi
penurunan nilai, kerugian penurunan nilai
dilaporkan sebagai pengurang dari nilai
tercatat dari aset keuangan dalam kelompok
pinjaman yang diberikan dan piutang dan
diakui di dalam laporan laba rugi
konsolidasian sebagai "Cadangan kerugian
penurunan nilai".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang
diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan
dan piutang dicatat di dalam pendapatan
investasi. Pendapatan bunga diakui dengan
basis akrual. (Kerugian)/keuntungan selisih
kurs dicatat dalam pendapatan investasi.

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh
tempo

Aset keuangan dalam kelompok memiliki
hingga jatuh tempo adalah aset keuangan
non-derivatif dengan pembayaran tetap atau
telah ditentukan, dan jatuh temponya telah
ditetapkan, serta Grup mempunyai intensi
positif dan kemampuan untuk memiliki aset
keuangan tersebut hingga jatuh tempo,
kecuali:

- yang pada saat pengakuan awal
ditetapkan sebagai aset keuangan yang
diukur pada nilai wajar melalui laporan
laba rugi;
- yang ditetapkan oleh Grup dalam
kelompok tersedia untuk dijual; dan
- yang memiliki definisi pinjaman yang
diberikan dan piutang.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

i. Financial assets (continued)

*Policy applicable before 1 January 2020
(continued)*

Loans and receivables (continued)

Loans and receivables are initially
recognised at fair value plus transaction
costs (if any) and subsequently measured at
amortised cost using the effective interest
rate method. In case of impairment, the
impairment loss is reported as a deduction
from the carrying value of the financial assets
classified as loans and receivables and
recognised in the consolidated statement of
profit or loss as "Allowance for impairment
losses".

Interest income on financial assets classified
as loans and receivables is included in the
investment income. Interest income is
recognised on accrual basis. Foreign
exchange (losses)/gains in investments are
recorded in investment income.

Held-to-maturity financial assets

Held-to-maturity financial assets are non-
derivative financial assets with fixed or
determinable payments and fixed maturities
that the Group has the positive intention and
ability to hold to maturity, other than:

- those that the Group upon initial
recognition designates as at fair value
through profit or loss;
- those that the Group designates as
available-for-sale; and
- those that meet the definition of loans
and receivables.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku sebelum tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai (jika ada).

Held-to-maturity financial assets are initially recognised at fair value including transaction costs (if any) and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method less allowance for impairment losses (if any).

Aset keuangan tersedia untuk dijual

Available-for-sale financial assets

Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan untuk dimiliki pada periode tertentu di mana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai asing, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Available-for-sale financial assets are non-derivative financial assets that are intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to the need for liquidity or changes in interest rates, foreign exchange rates, or those that are not classified as loans and receivables, held-to-maturity investments, or financial assets at fair value through profit or loss.

Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya di mana keuntungan atau kerugian diakui sebagai penghasilan komprehensif lain kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain, sekarang diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

Available-for-sale financial assets are initially recognised at fair value plus transaction costs (if any) and measured subsequently at fair value with gains or losses being recognised as other comprehensive income, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses until the financial assets are derecognised. If an available-for-sale financial asset is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognised in other comprehensive income is recognised in the consolidated statement of profit or loss.

Pendapatan bunga diitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter dan diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai pendapatan investasi.

Interest income is calculated using the effective interest rate method and foreign currency gains or losses on monetary assets and classified as available-for-sale are recognised in the consolidated statement of profit or loss as investment income.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah tanggal
1 Januari 2020

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Grup mengklasifikasikan dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

**(a) Aset keuangan diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali tes model bisnis dan tes arus kas kontraktual menunjukkan bahwa aset keuangan tersebut masuk ke dalam klasifikasi yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Instrumen keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal; biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi konsolidasian.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

i. Financial assets (continued)

Policy applicable after 1 January 2020

Starting 1 January 2020, the Group classifies its financial assets in categories financial assets measured at fair value through profit or loss (FVTPL), financial assets measured at amortised cost, and financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI).

Financial assets are classified into those categories based on the business model within which they are held and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

**(a) Financial assets at fair value through
profit or loss**

Financial assets at fair value through profit or loss are financial assets held for trading. A financial asset is classified in this category if acquired principally for the purpose of selling in the short-term.

Financial assets are measured at fair value through profit or loss except business model test and contractual cash flow test show that financial assets are included in the classification that are measured at amortised cost or fair value through other comprehensive income.

Financial instruments classified into this category are recognised at fair value at initial recognition; transaction costs (if any) are recognised directly in the consolidated statement of profit or loss.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku setelah tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable after 1 January 2020
(continued)**

**(a) Aset keuangan diukur pada nilai wajar
melalui laporan laba rugi (lanjutan)**

**(a) Financial assets at fair value through
profit or loss (continued)**

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dari penjualan instrumen keuangan diakui di dalam laporan laba/rugi konsolidasian dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain" dan "Pendapatan investasi - net". Pendapatan bunga dari instrumen keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebagai "Pendapatan bunga".

Gains and losses arising from changes in fair value and sale of financial instruments are recognised in the consolidated statement of profit or loss and are recorded as "Unrealized gain/(losses) on financial assets at fair value through other comprehensive income" and "Investment income - net". Interest income from financial instruments in the group measured at fair value through profit or loss is recorded as "Interest income".

**(b) Aset keuangan diukur pada biaya
perolehan diamortisasi**

**(b) Financial assets are measured at
amortized cost**

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meringkaskan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI") dari jumlah pokok tertuang.

- a. the financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and
- b. its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

**(c) Aset keuangan yang diukur pada nilai
wajar melalui penghasilan komprehensif
lain (FVOCI)**

**(c) Financial assets measured at fair value
through other comprehensive income
(FVOCI)**

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial instruments measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met:

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan

- a. financial assets are managed in a business model whose objectives will be met by obtaining contractual cash flows and selling financial assets; and

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**GATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

d. Financial asset and financial liabilities
(continued)

1. Aset keuangan (lanjutan)

1. Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku setelah tanggal
1 Januari 2020** (lanjutan)

Policy applicable after 1 January 2020
(continued)

(c) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) (lanjutan)

(c) *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income (FVOCI) (continued)*

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi berikut terpenuhi: (lanjutan)

Financial instruments measured at fair value through other comprehensive income if both of the following conditions are met: (continued)

b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memenuhi kriteria SPPI.

b. contractual requirements of financial assets meet the SPPI criteria.

Seluruh aset keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI sebagaimana ketentuan di atas diukur dengan FVTPL.

All financial assets not classified as measured at amortised cost or FVOCI as described above are measured at FVTPL.

Aset dapat dijual dari portofolio *hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghapusan untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

Loss rugi yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai FVOCI ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut dihentikan.

Unrealised gains or losses of financial assets held at FVOCI deferred in other comprehensive income until the asset is derecognised.

Aset keuangan dapat dilapikan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch*.

Financial assets may be designated at FVTPL only if doing so eliminates or reduces accounting mismatch.

Saat pengakuan awal, entitas dapat membuat pilihan yang tak terbatalkan untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain perubahan selanjutnya pada nilai wajar investasi dalam Instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup. Pernyataan itu dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk dipardagangkan maupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

At initial recognition, an entity may make an irrevocable election to present in other comprehensive income subsequent changes in the fair value of an investment in an equity instrument within the scope. This statement and is neither held for trading nor contingent consideration recognised by an acquirer in a business combination.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku setelah tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable after 1 January 2020
(continued)**

Penilaian apakah arus kas kontraktual hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga semata

Assessment of whether contractual cash flows are solely payments of principal and interest

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang tertutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta margin keuntungan.

For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPP, Grup mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

In assessing whether the contractual cash flows are SPP, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Group considers:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur leverage;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan penangguhan fasilitas;
- Kelenturan yang membatasi klaim Grup atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman nonrecourse); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features;
- Prepayment and extension terms;
- Terms that limit the Group's claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and
- Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates).

Penilaian model bisnis

Business model assessment

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Grup. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Group. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

d. Financial asset and financial liabilities
(continued)

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku setelah tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable after 1 January 2020
(continued)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Grup menilai model bisnis pada aset keuangan setidaknya pada tingkat lini bisnis atau pada di mana terdapat variasi mandat/lujuan dalam lini bisnis, pada lini bisnis produk atau pada tingkat desk yang lebih granular (misalnya sub-portofolio atau sub-lini bisnis).

The Group assesses the business model of financial assets at least at business line level or where there are varying mandates or objectives within a business line, at a more granular product business line or desk level (i.e. subportfolios or sub-business lines).

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but is not limited to:

- bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portofolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen;
 - risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan).

- how the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;
- the risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and
- how managers of the business unit are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Grup dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Grup untuk berlaku ketika aset dibeli, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus diperimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Group reasonably expects to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Group did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/conscious.

The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)

d. Financial asset and financial liabilities
(continued)

i. Aset keuangan (lanjutan)

i. Financial assets (continued)

**Kebijakan berlaku setelah tanggal
1 Januari 2020 (lanjutan)**

**Policy applicable after 1 January 2020
(continued)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Business model assessment (continued)

Perubahan pada model bisnis atau
pengenalan model bisnis baru ditentukan
melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

Changes to business models or the
introduction of new business models are
determined through the new business unit
approval process.

Grup dapat mereklasifikasi seluruh aset
keuangan yang terpengaruh jika dan hanya
jika, model bisnis untuk pengelolaan aset
keuangan berubah.

The Group can reclassified all of its financial
assets when and only, its business model for
managing those financial assets changes.

ii. Liabilitas keuangan

ii. Financial liabilities

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangan
dalam kategori liabilitas keuangan yang
diukur dengan biaya perolehan yang
diamortisasi, kecuali untuk kontrak jaminan
keuangan.

The Group classified its financial liabilities in
the category of financial liabilities measured
at amortised costs, except financial
guarantee contract

Liabilitas keuangan yang diukur dengan
biaya perolehan yang diamortisasi

Financial liabilities measured at amortised
costs

Pada saat pengakuan awal, liabilitas
keuangan yang diukur dengan biaya
perolehan yang diamortisasi, diukur pada
nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika
ada). Setelah pengakuan awal, Grup
mengukur seluruh liabilitas keuangan yang
diukur dengan biaya perolehan yang
diamortisasi dengan menggunakan metode
suku bunga efektif.

Financial liabilities measured at amortised
cost are initially recognised at fair value plus
transactions costs (if any). After initial
recognition, the Group measures all financial
liabilities at amortised cost using effective
interest rate method.

Liabilitas keuangan untuk kontrak jaminan
keuangan

Financial liabilities for financial guarantee
contract

Kontrak jaminan keuangan selanjutnya
diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi
antara:

Financial guarantees are subsequently
measured at the higher of:

- (i) Jumlah penyisihan kerugian yang
ditentukan; dan
- (ii) Jumlah yang pertama kali diakui
dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah
kumulatif dari penghasilan yang diakui.

- i) the amount of the loss allowance
determined; and
- ii) the amount initially recognised less,
when appropriate, the cumulative
amount of income recognised

iii. Pengukuran awal

iii. Initial recognition

Pengakuan Grup menggunakan akuntansi
tanggal transaksi untuk kontrak reguler ketika
mencatat transaksi aset keuangan.

The Group uses trade date accounting for
regular contracts when recording financial
assets transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

iv. Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Grup melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

v. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hak yang berkekuatan hukum harus tidak bersifat kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Grup atau pihak lawan.

vi. Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan di mana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

iv. Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all the risks and rewards have not been transferred, the Group evaluates to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

v. Off-setting financial instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amount and there is an intention to settle on a net basis or realise the asset and settle the liability simultaneously.

The legally enforceable rights must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Group or the counterparty.

vi. Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has access at the date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

vi. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri, badan pengawas, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rubah dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikator-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya tercapai beberapa transaksi terkini.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar yang aktif ditentukan berdasarkan kuotasi pasar aktif dari sumber yang dapat dipercaya pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Kuotasi pasar aktif ini termasuk yang berasal dari *Interdealer Market Association* ("IDMA"), *Pentai Harga Efek Indonesia* ("PHCI"), atau harga kuotasi broker untuk obligasi, harga saham dari indeks harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk saham, dan nilai aset bersih untuk reksadana dan reksadana ETF.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai kuotasi harga pasar, estimasi yang wajar ditetapkan dengan mengacu pada nilai pasar terkini instrumen keuangan lain yang secara substansi memiliki karakteristik yang sama atau dihitung berdasarkan estimasi arus kas terdapat aset bersih dan instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vi. Determination of fair value (continued)

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid offer spread and there are few recent transactions.

Fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the consolidated statement of financial position date from credible sources. This includes IDMA's (Interdealer Market Association) quoted market prices, IBPA's (Indonesia Bond Pricing Agency) quoted price or broker's quoted price for bonds, shares price from shares prices indexes at Indonesia Stock Exchange for shares and net assets value for mutual funds and exchange traded funds.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows of the underlying net asset base of the financial instruments.

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair value are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using available inputs at the dates of the consolidated statement of financial position.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vi. Penentuan nilai wajar (lanjutan)

vi. Determination of fair value (continued)

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali rata wajar dan instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau re-packaging) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is proved by comparison with other observable current market transactions for the same instrument (that is, without modification or repackaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.

vii. Penurunan nilai aset keuangan

vii. Impairment of financial assets

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari
2020**

**Accounting policies before 1 January
2020**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

At the end of each reporting period, the Group assesses whether there is objective evidence that a financial asset or Group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is impaired and impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a loss event) and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset keuangan secara individual. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai seperti dijelaskan diatas. Jumlah penurunan nilai dihitung berdasarkan nilai dari estimasi arus kas masa datang (tidak memperhitungkan penurunan nilai di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

The Group assesses impairment of financial assets individually. The Group assesses at each reporting date whether objective evidence of impairment for financial assets exists as described above. The amount of impairment is calculated based on the value of estimated future cash flows (without considering the future impairment that has not yet existed) that are discounted using effective interest rate. The carrying amount of the asset is reduced and the amount of the loss is recognised in the consolidated profit or loss.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

vii. Impairment of financial assets (continued)

**Kebijakan akuntansi sebelum 1 Januari
2020 (lanjutan)**

**Accounting policies before 1 January
2020 (continued)**

Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

If the Group assesses that there is no objective evidence of impairment for financial assets on individual, both for significant and insignificant amount, hence the amount of financial asset will be included in a group of financial asset with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Pada periode selanjutnya, jika jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur), penurunan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

In a subsequent period, if the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in the consolidated profit or loss.

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari
2020**

Accounting policies after 1 January 2020

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("ECL") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (lifetime ECL). Lifetime ECL adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

SFAS 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses ("ECL") or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.

ECL diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *held to collect/held to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVPL.

ECL are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as *held to collect/held to collect and sell* and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognised for equity instruments designated at FVPL.

ECL individu didasarkan pada portofolio kredit per debitur yang telah bermasalah dan diperhitungkan selisih antara nilai bersih kini arus kas diskonto awal total kewajibannya, sedangkan ECL kolektif Grup menggunakan model yang kompleks yang menggunakan matriks probability of default ("PD"), forward looking ("FL"), loss given default ("LGD"), exposure at default ("EAD") dan discount factor ("DF").

Individual ECL are based on non-performing loans portfolio per debtor and account for variance between net present value of discounted cashflow and their total liabilities, whilst the Group's collective ECL uses a complex model that uses a matrix of probability of default ("PD"), forward looking ("FL"), loss given default ("LGD"), exposure at default ("EAD") and discount factor ("DF").

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Probability of default ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar dan bank melakukan klaim jaminan, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (tahap 1) atau sepanjang umur (tahap 2 dan 3) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD destimasi pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Forward looking ("FL")

Grup melakukan proses korelasi antara credit factor dengan kumpulan faktor makroekonomi dengan menggunakan pendekatan *backward stepwise regression* dengan mempertimbangkan berbagai indikator statistik, dan kemampuan ekonomis untuk menyediakan prediksi nilai faktor makroekonomi terpilih.

Loss given default ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari klaim gagal bayar dengan menggabungkan dampak dan asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Grup mengestimasi LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

Exposure at default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak penarikan fasilitas yang *committed* pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vii. Impairment of financial assets (continued)

**Accounting policies after 1 January 2020
(continued)**

Probability of default ("PD")

The probability at a point in time that a counterparty will default and bank claimed for financial guarantee, calibrated over up to 12 months from the reporting date (stage 1) or over the lifetime of the product (stage 2 and 3) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.

Forward looking ("FL")

The Group performs a correlation process between credit factors and a set of macroeconomic factors using the backward stepwise regression approach by considering various statistical indicators, and economic capability to provide predictions for the value of selected macroeconomic factors

Loss given default ("LGD")

The loss that is expected to arise on default claims, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Group expects to receive. The Group estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.

Exposure at default ("EAD")

The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of drawdowns of committed facilities, repayments of principal and interest, amortization and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

vii. Impairment of financial assets (continued)

Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

*Accounting policies after 1 January 2020
(continued)*

Discount factor ("DF")

Discount factor ("DF")

Variabel untuk mendapatkan nilai kini dari hasil perhitungan kredit ekspektasi. Suku bunga DF yang dipakai adalah suku bunga efektif ("EIR") tahunan individual debitur atau kelompok debitur.

The variable to get the present value from the calculation of expected credit. The DF interest rate used is the annual effective interest rate (EIR) for an individual debtor or group of debtors.

Staging criteria

Staging criteria

Aset keuangan harus dialokasikan ke salah satu dari tiga tahap penurunan nilai (tahap 1, tahap 2, tahap 3) dengan menentukan apakah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan atas instrumen keuangan sejak pengakuan awal atau apakah fasilitas tersebut gagal bayar pada setiap tanggal pelaporan.

Financial assets have to be allocated to one of the three impairment stages (stage 1, stage 2, stage 3) by determining whether significant increase in credit risk has occurred on financial instrument since initial recognition or whether the facility is defaulted on the reporting date.

Tahap 1: mencakup instrumen keuangan yang tidak memiliki peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal atau memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan. Untuk aset ini, ECL 12 bulan akan dihitung.

Stage 1: includes financial instruments that have not had a significant increase in credit risk since initial recognition or that have low credit risk at the reporting date. For these assets, 12-month ECL are recognised.

Tahap 2: mencakup instrumen keuangan yang mengalami peningkatan signifikan atas risiko kredit sejak pengakuan awal (kecuali jika memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan), namun tidak memiliki bukti penurunan nilai yang obyektif. Untuk aset ini, ECL *lifetime* dihitung. ECL *lifetime* adalah kerugian kredit yang diharapkan yang dihasilkan dari semua kejadian default yang mungkin terjadi selama perkiraan umur dari instrumen keuangan.

Stage 2: includes financial instruments that have had significant increase in credit risk since initial recognition (unless they have low credit risk at the reporting date) but do not have objective evidence of impairment. For these assets, lifetime ECL are recognised. Lifetime ECL are the expected credit losses that result from all possible default events over the expected life of the financial instrument.

Tahap 3: mencakup instrumen keuangan yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai pada tanggal pelaporan. Tahap ini berisi debitur yang telah impaired (gagal bayar). Faktor utama dalam menentukan apakah instrumen keuangan memerlukan ECL 12 bulan (tahap 1) atau ECL *lifetime* (tahap 2) disebut dengan kriteria Peningkatan Signifikan dalam Risiko Kredit (SICR). SICR memerlukan pengakuan apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan pada setiap tanggal pelaporan.

Stage 3: includes financial instruments that have objective evidence of impairment at the reporting date. This stage has obligors that already are impaired (defaulted). The key factor in determining whether a financial instrument attracts 12-months (stage 1) or lifetime ECL (stage 2) is called by the criteria of Significant Increase in Credit Risk (SICR). SICR criteria involves assessment of whether there has been a significant increase in credit risk of each reporting date.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

**Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari
2020 (lanjutan)**

Untuk aset keuangan, kerugian kredit adalah nilai kini dari selisih antara:

- a. arus kas kontraktual yang jatuh tempo pada Grup di bawah kontrak; dan
- b. arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Grup.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasi untuk kontrak jaminan keuangan adalah pembayaran yang diekspektasi untuk mengganti pemegang jaminan atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diharapkan Grup untuk diterima dari pemegang jaminan, debitur, atau pihak lain.

Grup mengakui perubahan kumulatif atas kerugian kredit ekspektasi sepanjang umurnya sejak pengakuan awal aset keuangan sebagai penyisihan kerugian atas aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk pada saat tanggal pelaporan.

Menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan

Pada setiap tanggal pelaporan Grup menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan. Grup memperluas perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasi. Dalam melakukan penilaian tersebut, Grup membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Grup dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vii. Impairment of financial assets (continued)

**Accounting policies after 1 January 2020
(continued)**

For financial assets, credit losses are the present value of the difference between:

- a. contractual cash flow that matures of the Group under the contract; and
- b. expected cash flow will be received by the Group.

Measurement of expected credit losses for financial guarantee contracts are payments expected to replace the collateral holder for the credit losses incurred less the amount the Group expects to receive from the collateral holder, debtor, or other party.

The Group recognizes cumulative changes in expected credit losses throughout its lifetime from the initial recognition of financial assets as allowance for losses on financial assets purchased or originating from financial assets that worsens at the reporting date.

Determine significantly increased credit risk

At each reporting date the Group assesses whether credit risk on financial instruments has increased significantly. The Group considers changes in default risk that occur over the life of the financial instruments, not changes in the amount of expected credit losses. In carrying out this assessment, the Group compares the risk of default on financial instruments incurred on the reporting date with the risk of default at initial recognition and considers reasonable and supported information available without costs or excessive effort, which is an indication of a significant increase in credit risk since recognition early.

The Group can assume that credit risk on financial instruments has not increased significantly since initial recognition if it was determined that the financial instrument has a low credit risk at the reporting date.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

**d. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

vii. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan akuntansi setelah 1 Januari 2020 (lanjutan)

Menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan (lanjutan)

Jika informasi *forward-looking* yang wajar dan didukung tersedia tanpa perlu mengeluarkan biaya atau upaya berlebihan, Grup tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi, ketika informasi yang lebih *forward-looking* daripada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tersedia dengan biaya atau upaya berlebihan, Grup dapat menggunakan status tunggakan yang dimaksud untuk menentukan ada atau peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara Grup menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat praduga (*rebuttable presumption*) bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Grup dapat menyanggah praduga ini jika Grup memiliki informasi yang wajar dan didukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika Grup menentukan bahwa telah terjadi kenaikan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka praduga (*rebuttable presumption*) tersebut tidak diterapkan.

e. Kas dan kas di bank

Kas dan bank mencakup kas dan kas di bank, yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

**d. Financial asset and financial liabilities
(continued)**

vii. Impairment of financial assets (continued)

*Accounting policies after 1 January 2020
(continued)*

*Determine significantly increased credit
risk (continued)*

If reasonable and supported forward-looking information is available without the need to incur excessive costs or efforts, the Group cannot rely solely on arrears information in determining whether credit risk has increased significantly since initial recognition. However, when information that is more forward-looking than the arrears status (both individually and collectively) is available at excessive cost or effort, the Group can use the arrears status referred to to determine the presence or increase of credit risk significantly since initial recognition. Regardless of the way companies value credit risk increases significantly, there is a presumption (rebuttable presumption) that the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are overdue for more than 30 days. The Group can refute this presumption if the Group has reasonable and supported information, which is available without excessive costs or efforts, which proves that credit risk has not increased significantly since initial recognition, even though contractual payments are overdue for more than 30 days. If the Group determines that there has been a significant increase in credit risk before contractual payments are overdue for more than 30 days, then the rebuttable presumption is not applied.

e. Cash on hand and in banks

Cash and banks include cash on hand and cash in banks, which are not restricted and pledged as collateral for any borrowing.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investasi

f. Investments

Deposito wajib dan berjangka

Statutory and time deposits

Deposito wajib dan berjangka dicatat sebesar nilai nominal.

Statutory and time deposits are stated at nominal value.

Efek-efek

Marketable securities

Efek-efek terdiri dari saham, obligasi, reksadana dan efek beragun aset. Efek-efek diklasifikasikan atas dasar tujuan investasi atau intensi dari Grup.

Marketable securities consist of shares, bonds, mutual funds and asset backed securities. Marketable securities are classified based on the Group's purpose or intention of maintaining such investments.

Efek-efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi klasifikasi aset keuangan.

Marketable securities are classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets are measured at amortised cost and financial assets measured at fair value through other comprehensive income. See Note 2d for the accounting policies of financial assets classification.

Investasi pada sukuk

Investment in sukuk

Investasi sukuk diklasifikasikan berdasarkan mode usaha yang ditentukan oleh Grup berdasarkan klasifikasi sesuai PSAK 110 tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

Investment in sukuk are classified based on business model defined by the Group in accordance with SFAS 110 on "Accounting for Sukuk" as follows:

1. Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskon yang belum diamortisasi. Premi dan diskon diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo.
2. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.
3. Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

1. At cost securities are stated at cost (including transaction costs), adjusted by unamortised premium and/or discount. Premium and discount are amortised over the period until maturity.
2. At fair value through profit or loss securities are stated at fair values. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair values are presented in current year consolidated profit or loss.
3. At fair value through other comprehensive income securities are stated at fair value. Unrealised gains or losses from the increase or decrease in fair value are presented in current year consolidated other comprehensive income.

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 110 (revisi 2014)/ Category as defined by SFAS 110 (revised 2014)	Golongan (ditentukan oleh Grup/ Class (as determined by the Group)	Sub-golongan/ Sub-classes
Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain/At fair value through other comprehensive income	Efek-efek/Marketable securities	Sukuk/Sukuk
Surat berharga diukur pada biaya perolehan/At cost securities	Efek-efek/Marketable securities	Sukuk/Sukuk

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Kontrak jaminan keuangan

Grup menerapkan kontrak jaminan keuangan. Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan orisinal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Imbal jasa penjaminan dan pendapatan ditangguhkan

Imbal jasa penjaminan bruto diakui sejak berlakunya sertifikat penjaminan.

Imbal jasa penjaminan diakui sebesar pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai dengan periode berlakunya sertifikat penjaminan.

Pendapatan ditangguhkan merupakan bagian dari imbal jasa penjaminan yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan. Pendapatan ditangguhkan akan diakui sebagai pendapatan selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan ditangguhkan merupakan imbal penjaminan tahun berjalan dan tahun-tahun lalu dari terjamin kepada Grup yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Premi penjaminan ulang dan penjaminan ulang dibayar di muka

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dibayar di muka dicatat sebagai penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Beban klaim

Klaim diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dan reassured diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial guarantee contract

The Group implement financial guarantee contract. Financial guarantee contract is contract that requires the issuer to make specified payments to reimburse the holder for a loss it incurs because a specified debtor fails to make payment when due in accordance with the original or modified terms of a debt instrument.

Guarantee fee income and deferred income

Gross guarantee fee income is recognise upon inception of guarantee certificate.

Guarantee fee income recognise amounted deferred revenue and amortised over the period upon inception of guarantee certificate.

Deferred income represent portion of the guarantee fee income relating to the unexpired terms of coverage guarantee. Deferred income will be recognised as income during the remaining period of guarantee and allocated based on the issuance month of Guarantee Certificate.

Deferred guarantee is a guarantee fee income for current year and previous years from the guaranteed to the Group which will become income in the coming years.

Re-guarantee premium and prepaid re-guarantee

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as prepaid re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee.

Claim expenses

Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Kontrak Jaminan keuangan (lanjutan)

Beban klaim (lanjutan)

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi konsolidasian menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kontrak/perturunan cadangan klaim.

Liabilitas kontrak jaminan keuangan

Kontrak jaminan keuangan mensyaratkan Grup untuk melakukan pembayaran tertentu untuk mengganti penerima jaminan atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi dari suatu instrumen utang.

Cadangan klaim atas kontrak penjaminan keuangan merupakan estimasi klaim atas kontrak penjaminan keuangan yang akan menjadi tanggungan Grup, yang besarnya diakui dan dicatat pada tanggal laporan. Kontrak jaminan keuangan selanjutnya diukur sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:

- i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan; dan
- ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui.

Grup disyaratkan untuk melakukan pembayaran hanya pada peristiwa gagal bayar dengan debitur/terjamin sesuai dengan persyaratan instrumen yang dijamin.

Kerugian ekspektasian atas risiko yang telah dialihkan ke penjaminan ulang diakui sebagai aset pengembalian dan diukur secara sistematis sesuai dengan pola pengukuran cadangan klaim yang didasari dari selisih antara jumlah saldo kerugian ekspektasian - bruto dan jumlah saldo kerugian ekspektasian - bersih.

Jangka waktu periode estimasi cadangan klaim atas kontrak penjaminan adalah periode kontraktual maksimum dimana Grup memiliki kewajiban kontraktual kini untuk melakukan penjaminan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial guarantee contract (continued)

Claim expenses (continued)

Claim expenses in the consolidated statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in claim reserves.

Liabilities for financial guarantee contracts

Financial guarantee contracts require the Group to make certain payments to reimburse the recipient for losses incurred because certain debtors fail to make payments when due in accordance with the original terms or the modified terms of a debt instrument.

Claims reserve on financial guarantee contracts are estimated claims on financial guarantee contracts that will be borne by the Group, the amount of which is recognized and recorded at the report date. Financial guarantees are subsequently measured at the higher of:

- i. the amount of the loss allowance determined; and
- ii. the amount initially recognized less, when appropriate, the cumulative amount of income recognized

The Group is required to make payments only in the event of default with the debtor/guaranteed in accordance with the terms of the guaranteed instrument.

Expected loss for risks that have been transferred to guarantor are recognised as reimbursement assets and are measured systematically according to the pattern of claim reserve measurement based on the variance between the total expected loss - gross and the total expected loss - net.

The estimated period of the reserve for claims under the guarantee contract is the maximum contractual period during which the Group has a current contractual obligation to provide guarantees.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

g. Kontrak jaminan keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sebelum 1 Januari 2020, perhitungan ekspektasi kerugian dirumuskan sebagai berikut:

a. Probability of claim ("PC")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu yang didapatkan dari observasi kumulatif bulanan atas jumlah debitur yang melakukan klaim terhadap total debitur aktif terjamin. PC diestimasi pada point in time dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi. PC diukur dengan pendekatan Vintage model menggunakan data historis 10 tahun.

b. Loss given default ("LGD")

Grup mengestimasi LGD berdasarkan tingkat pemulihan yang dihitung berdasarkan rasio atas observasi penjumlahan pembayaran subrogasi atas debitur yang diterima yang telah mendapatkan perselujuan klaim terhadap nilai klaim yang disetujui.

c. Exposure at default ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur nilai yang kontrak penjaminan yang aktif pada bulan hitung.

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020

Grup telah membentuk cadangan klaim sesuai dengan PSAK 71 terkait kontrak penjaminan. Sejak 1 Januari 2020, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian ekspektasi sepanjang umur periode kontrak penjaminan diakui sejak pengakuan awal.

Grup telah mengimplementasikan metode perhitungan statistik dengan menggunakan persamaan regresi untuk melihat keterkaitan variabel makroekonomi dengan tingkat pertumbuhan klaim yang terjadi pada Grup selama masa periode observasi. Grup menambahkan elemen Forward Looking yang merupakan hasil regresi dari model peramalan, dari variabel dependen (PC) dan independen (variabel makroekonomi).

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Financial guarantee contract (continued)

Policy applicable before 1 January 2020

Before 1 January 2020, the calculation of the expected loss is formulated as follows:

a. Probability of claim ("PC")

The probability that arises at a time obtained from monthly cumulative observations of the number of debtors who make claims against the total guaranteed active debtors. PC is estimated at a point in time where it fluctuates in line with the economic cycle. PC is measured using the Vintage model approach using 10 years of historical data.

b. Loss given default ("LGD")

The Group estimates LGD based on recovery rate which is calculated based on the ratio of the observed total subrogation payments receipt for debtors who have obtained claim approval to the approved claim amount.

c. Exposure at default ("EAD")

Estimated value of the outstanding guarantee amount exposure in the calculation month.

Policy applicable from 1 January 2020

The Group has established a claim reserve in accordance with PSAK 71 related to guarantee contracts. From 1 January 2020, the Group applies the simplified approach permitted by PSAK 71, which requires expected lifetime losses of guarantee contract period to be recognised from initial recognition.

The Group has implemented a statistical calculation method using a regression equation to see the interest of macroeconomic variables with the growth rate of claims that occurred in the Group during the observation period. The Group adds Forward Looking element that is the result of regression and forecasting models, from the dependent (PC) and independent variables (macroeconomic variable).

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Piutang Imbal Jasa penjaminan

Piutang Imbal Jasa Penjaminan ("IJP") Kredit Usaha Rakyat ("KUR") dan Non KUR diakui ketika Sertifikat Penjaminan ("SP") terbit dan ulang tahun SP.

h. Guarantee income receivables

Kredit Usaha Rakyat ("KUR") and Non KUR guarantee receivables are recognized when guarantee certificate ("SP") issued and the anniversary of the SP.

i. Piutang penjaminan ulang

Pembayaran klaim ke peserta jaminan yang menjadi tanggungan mitra penjamin ulang dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

i. Re-guarantee receivables

Payment of claims to the sole recipient of a guarantee that re-guarantee partners are recorded as a receivable in the settlement.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra penjaminan ulang.

The recognition of receivables in the settlement of claims payments made every occur a dependant partner re-guarantee.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang pada saat mitra mengaksep atau mengakui piutang dalam penyelesaian tersebut sebagai utangnya (sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja sama antara Grup dengan mitra), namun pembayaran belum dilakukan.

Receivables in the settlement are recognized as Receivables in the completion of when partners accept in settlement of the accounts (in accordance with a term of the Agreement of Cooperation between the PT Jamkindo with partners), but payment has not been done.

Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai piutang penjaminan ulang pada saat diterbitkan SOA (Statement of Account), namun pembayaran belum dilakukan.

Receivables in the settlement are recognized as a re-guarantee receivables at the time of the SOA (Statement of Account), but the payment has not been made.

Piutang penjaminan ulang dilakukan cadangan kerugian kredit ekspektasian ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai yang realistis mengenai penggantian pembayaran klaim (pembayaran) penjaminan ulang. Penghapusbukuan atas piutang penjaminan ulang apabila telah harus memperoleh persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Re-guarantee receivables are provided with allowance for expected credit loss when there are no realistic prospects of realistic reimbursement of claims payments from re-guarantee partners. Write-off on re-guarantee receivables if they have to obtain approval in accordance with applicable regulations.

j. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortised over the periods of benefit using straight line method.

k. Aset tetap

Aset tetap diukur menggunakan model harga perolehan, di mana pada tahun sebelumnya menggunakan model revaluasi. Atas perubahan ini, Grup menyajikan kembali laporan keuangan dengan perubahan saldo aset tetap (lihat Catatan 4). Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Biaya akuisisi meliputi semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan aset tersebut.

k. Fixed assets

Fixed asset measured using cost model, where in the prior year using revaluation model. For this change, the Group restated the financial statement with change of fixed asset balances (refer to Note 4). Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation. Acquisition cost covers expenditures that is directly attributable to the acquisitions of the assets.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset tetap (lanjutan)

Biaya-biaya setelah pengakuisi awal diakui sebagai bagian nilai tercatat aset atau sebagai aset yang terpisah, sebagaimana mestinya, hanya jika kemungkinan besar Grup mendapat manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Nilai tercatat dari komponen yang diganti dihapuskan. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke dalam laporan laba rugi konsolidasian dalam periode keuangan ketika biaya-biaya tersebut terjadi.

Aset tetap didepresiasi menggunakan metode garis lurus selama takaran masa manfaat ekonomis dari aset tetap tersebut sebagai berikut:

Jenis aset	Masa manfaat (tahun) Useful life (year)
Bangunan gedung	30
Kendaraan bermotor	5
Inventaris	2-10

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laporan laba rugi konsolidasian di tahun yang sama pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset dikapitalisasi dan disusutkan.

Apabila aset tetap dihentikan penggunaannya atau dijual, harga perolehan dan akumulasi depresiasi yang terkait dengan aset tetap tersebut dihibahkan pengakuannya dari laporan keuangan dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan nilai tertinggi antara harga jual neto dengan nilai pakai.

Berdasarkan PSAK 16, Grup memilih menggunakan metode biaya.

Aset dalam penyelesaian ("ADP") merupakan akumulasi biaya konstruksi bangunan, biaya material, dan biaya lainnya dikapitalisasi sebagai aset dalam penyelesaian. Biaya tersebut diklasifikasi ke akun aset tetap pada saat proses konstruksi atau pemasangan selesai. Penyusutan dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan manajemen.

Beban renovasi gedung sewa, diamortisasi sesuai dengan masa manfaatnya.

2 SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Fixed assets (continued)

Subsequent costs are included in the asset's carrying amount or recognised as a separate asset, as appropriate, only when it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group and the cost of the item can be measured reliably. The carrying amount of replaced part is derecognised. Repairs and maintenance costs are charged to the consolidated profit or loss during the financial period in which they are incurred.

Fixed assets are depreciated using the straight line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

Penyusutan per tahun (%) Depreciation per year (%)	Asset type
3-33	Buildings
20	Vehicles
50-10	Equipment

Repair and maintenance expenses are charged to the consolidated profit or loss in the year which they are incurred. Expenditure which extends the useful lives of the assets or provides further economic benefits are capitalised and depreciated.

When fixed assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements and any resulting gains or losses are recognised in the consolidated profit or loss.

When the carrying amount of an asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined based on the higher of net selling price or value in use.

Under SFAS 16, the Group has chosen the cost model.

Assets in progress ("AIP") is an accumulated costs of the construction of buildings, material costs and other costs are capitalised as construction in progress. These costs are reclassified to fixed assets when the construction or installation is complete. Depreciation is charged from the date the assets are ready for use in the manner intended by management.

Renovation expense of rental building, amortised as per benefit period.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

l. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari piranti lunak yang dimiliki Grup. Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis di masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset takberwujud tersebut dapat diukur dengan andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai, jika ada. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud. Apabila nilai aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus dengan laksanakan masa manfaat ekonomis.

Biaya yang terkait dengan pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Biaya pengembangan yang dapat secara langsung diatribusikan kepada desain dan pengujian produk piranti lunak yang dapat diidentifikasi dan unik yang dikendalikan oleh Grup diakui sebagai aset takberwujud.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian.

m. Sewa

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Sesuai dengan PSAK 30, Grup menentukan suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa berdasarkan substansi perjanjian dan dilakukan evaluasi apakah pemenuhan perjanjian bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu dan perjanjian tersebut membenarkan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

l. Intangible assets

Intangible assets consist of intangible asset from the Group's software. Intangible assets is recognised if the Group have high possibility to get economical benefits in the future from those intangible assets and the cost could be measured reliably.

Intangible assets is recorded based on acquisition cost deducted by accumulated amortisation and impairment if there's any impairment. Intangible assets are amortised based on the estimated useful life. Group estimated the value that can be recovered from intangible assets. If value of intangible assets exceed the recovered estimated value, then the amount that recorded in the asset should be lowered at the recoverable estimated value.

Intangible assets are amortised using straight line method with an estimated economic useful life.

Costs associated with maintenance of computer software programs are recognised as an expense as incurred. Development costs that are directly attributable to the design and testing of identifiable and unique software products controlled by the Group are recognised as intangible assets.

Intangible assets are derecognised when the assets are released or have no future economic benefit. The difference between carrying amount of the asset and net value of its disposal is recognised in the consolidated profit or loss.

m. Leases

Policy applicable before 1 January 2020

In accordance with SFAS 30, the Group determines an arrangement is, or contains, a lease based on the substance of the arrangement and requires an assessment of whether fulfilment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020
(lanjutan)**

Transaksi sewa yang dilakukan Grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika tidak terdapat pengalihan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pembayaran sewa diakui sebagai beban dengan garis lurus selama masa sewa. Seluruh insentif untuk perjanjian sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui sebagai bagian liak terpisah dari imbalan neto yang disepakati untuk menggunakan aset sewaan, terlepas dari sifat atau bentuk insentif atau waktu pembayaran. Grup mengakui manfaat agregat dari insentif sebagai pengurang beban rental selama masa sewa dengan dasar garis lurus.

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari
2020**

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Grup melakukan penerapan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Aset hak-guna kemudian didepresiasi menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Grup sebagai penyewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

**Policy applicable before 1 January 2020
(continued)**

The lease transaction entered by the Group was classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to assets ownership. Leases payment is recognised as an expense on a straight-line basis over the leases term. All incentives for the agreement of a new or renewal operating leases are recognised as an integral part of the net consideration agreed for the use of the leased assets, irrespective of the incentive's nature or form or the timing of payments. The Group recognises the aggregate benefit of incentives as a reduction of rental expense over the leases term, on a straight-line basis.

Policy applicable from 1 January 2020

Since 1 January 2020, the Group has applied SFAS 73, which set the requirement for the recognition of lease liabilities in relation to leases which had been previously classified as 'operating lease'. This policy is applied to contracts entered or changed, on after 1 January 2020.

The right-of-use asset is subsequently depreciated using straight-line method from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

The Group as a lessee

At the inception date of a contract, the Group assesses whether the contract is, or contains, a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for short-term lease.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Sewa (lanjutan)

m. Leases (continued)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020 (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Grup harus menilai apakah:

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- Grup memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi;
- Grup memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi. Grup memiliki hak ini ketika Grup memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya;
- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

- *The Group has the right to obtain substantially all the economic benefits from use of the asset throughout the period of use;*
- *The Group has the right to direct the use of the asset. The Group has this right when it has the decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined;*

- *The Group has the right to operate the asset; and*
- *The Group has designed the asset in a way that predetermined how and for what purpose it will be used.*

Pada tanggal pemulaan sewa, Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal pemulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

At the lease commencement date, the Group recognises a right-of-use asset and a lease liabilities. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the lease liabilities adjusted for any lease payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred and an estimate of costs to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, less any lease incentives received.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal pemulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental.

Lease liabilities are initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that rate cannot be readily determined, using incremental borrowing rate.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Sewa (lanjutan)

m. Leases (continued)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Policy applicable from 1 January 2020 (continued)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

The Group as a lessee (continued)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran berikut ini:

Lease payments included in the measurement of the lease liabilities comprise the following:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi dikurangi dengan piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dengan jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika Grup cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
- penalti karena penghentian awal sewa kecuali jika Grup cukup pasti untuk tidak menghentikan lebih awal.

- fixed payments, including in-substance fixed payments less any lease incentive receivable;
- variable lease payments that depend on an index or a rate, initially measured using the index or rate as at the commencement date;
- amounts expected to be payable under a residual value guarantee;
- the exercise price under a purchase option that the Group is reasonably certain to exercise; and
- penalties for early termination of a lease unless the Group is reasonably certain not to terminate early.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to the profit or loss over the lease period in order to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

Grup menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "aset tetap - bersih" dan liabilitas sewa sebagian dari "akumulasi utang lain-lain" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

The Group presents right-of-use assets as part of "fixed assets - net" and lease liabilities as part of "accrued expenses and other payables" in the consolidated statement of financial position.

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna memprediksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Grup menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the Group by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Group will exercise a purchase option, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Group depreciates the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

m. Sewa (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)

Grup sebagai penyewa (lanjutan)

Sewa jangka pendek

Grup tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa jangka pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Grup mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Modifikasi sewa

Grup mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah jika:

- modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih; dan
- imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, Grup:

- mengukur kembali dan mengakui kembali imbalan kontrak modifikasi;
- menentukan masa sewa dari sewa modifikasi;
- mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisi menggunakan tingkat diskonto revisi berdasarkan sisa umur sewa dan sisa pembayaran sewa dengan melakukan penyesuaian terhadap aset hak-guna. Tingkat diskonto revisi ditentukan sebagai suku bunga efektif Grup pada tanggal efektif modifikasi;
- menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Grup mengakui dalam laba rugi setiap laba rugi yang terkait dengan penghentian sebagian atau sepenuhnya sewa tersebut; dan
- membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Leases (continued)

Policy applicable from 1 January 2020 (continued)

The Group as a lessee (continued)

Short-term leases

The Group has not recognised right-of-use assets and lease liabilities for short-term leases that have a lease term of 12 months or less. The Group recognises the lease payments associated with these leases as an expense on a straight-line basis over the lease term.

Lease modification

The Group account for a lease modification as a separate lease if both:

- the modification increases the scope of the lease by adding the right to use one or more underlying assets; and
- the consideration for the lease increases by an amount commensurate with the stand-alone price for the increase in scope and any appropriate adjustments to that stand-alone price to reflect the circumstances of the particular contract.

For a lease modification that is not accounted for as a separate lease, at the effective date of the lease modification, the Group:

- remeasure and allocate the consideration in the modified contract;
- determine the lease term of the modified lease;
- remeasure the lease liability by discounting the revised lease payments using a revised discount rate on the basis of the remaining lease term and the remaining lease payment with a corresponding adjustment to the right-of-use assets. The revised discount rate is determined as the Group's effective interest rate at the effective date of the modification;
- decrease the carrying amount of the right-of-use asset to reflect the partial or full termination of the lease for lease modifications that decrease the scope of the lease. The Group recognise in profit or loss any gain or loss relating to the partial or full termination of the lease; and
- make a corresponding adjustment to the right-of-use asset for all other lease modifications.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

n. Penurunan nilai aset non-keuangan

Grup menelaah ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aset non-keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian dan kemungkinan penyesuaian ke nilai yang dapat diperoleh kembali apabila terdapat keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai tersebut. Nilai aset yang dapat diperoleh kembali dihitung berdasarkan nilai pakai atau harga jual neto, mana yang lebih tinggi.

Kerugian penurunan nilai diakui jika nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Di lain pihak, reversal penurunan nilai diakui apabila terdapat indikasi bahwa penurunan nilai tersebut tidak lagi terjadi. Penurunan (pemulihan) nilai aset diakui sebagai beban (pendapatan) pada laporan laba rugi konsolidasian tahun berjalan.

o. Perpajakan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui di penghasilan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan. Manajemen mengevaluasi secara periodik implementasi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku terutama yang memerlukan interpretasi lebih lanjut mengenai pelaksanaannya termasuk juga evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak. Lebih lanjut, manajemen membentuk cadangan jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan ke otoritas pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metoda liabilitas untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak penghasilan tangguhan diakui hanya jika besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan waktu yang masih dapat dimanfaatkan.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Impairment of non-financial assets

The Group examines whether there is any indication of impairment of the non-financial assets on the consolidated statement of financial position date and the possible adjustments to the recoverable value if there are circumstances that indicate such impairment. The value of assets that can be recovered is calculated based on the value in use or net selling price, whichever is higher.

Impairment loss is recognised if the carrying amount of the asset exceeds its recoverable value. On the other hand, a reversal of impairment is recognised when there is an indication that the impairment is no longer the case. Impairment (recovery) on the value of the asset is recognised as an expense (income) in the current year consolidated profit or loss.

o. Taxation

Tax expenses comprise of current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in other comprehensive income or directly in equity, respectively.

The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the reporting date. Management periodically evaluates the implementation of prevailing tax regulations especially those that are subject to further interpretation on its implementation, including evaluation on tax assessment letters received from tax authorities. Where appropriate management establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.

Deferred income tax assets are recognised only to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the timing differences can be utilised.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Perpajakan (lanjutan)

Ases dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan langgihan dikenakan oleh entitas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Direksi juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasi akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

p. Utang klaim

Utang klaim merupakan utang Grup kepada pemberi pinjaman yang dijamin oleh Grup. Utang klaim yang tercatat adalah pemohonan pengajuan klaim yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar oleh Grup.

Beban klaim dicatat pada saat klaim telah disetujui oleh Komite Klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

q. Akad penjaminan syariah

Akad yang digunakan dalam penjaminan syariah adalah akad kafalah.

Imbal jasa kafalah (JK)

Imbal jasa kafalah dari terjamin dicatat sebesar nilai bersih, setelah diskonto, sesuai dengan ketentuan pada kontrak.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Taxation (continued)

Deferred income tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred income taxes assets and liabilities related to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities where there is an intention to settle the balances on a net basis.

Correction to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined. The Directors provide provision for future tax liability at the amount that will be payable to the tax office or probable tax exposure, based on assessment as at the date of statement of financial position. Assumption and estimation used in the provisioning calculation may involve element of uncertainty.

p. Claim payables

Claim payables are debts of the Group to the lender guaranteed by the Group. Recorded claim payables are debts that have been processed and approved but not yet paid. Payables are stated at the amount of claim has been authorization dan paid

Claims expense is recorded when the claim has been approved by the Claims Committee. Changes in the amount of claims payable, as a result of further review and the difference between the amount of the claim debt and the claim paid, are recognized in the statement of income in the year of the change.

q. Sharia guarantee contract

The contract used for sharia guarantee contract is kafalah.

Kafalah fees

Kafalah fees from guarantee are accounted for, net of any discounts, in accordance with the terms of contracts.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

q. Sharia guarantee contract (continued)

Imbal jasa kafalah (IJK) (lanjutan)

Kafalah fees (continued)

IJK ditangguhkan merupakan bagian dari IJK yang berkaitan dengan persyaratan belum berakhirnya cakupan penjaminan

Unearned kafalah fees represent portion of the kafalah fee written relating to the unexpired terms of coverage guarantee.

Pembentukan imbal jasa kafalah ditangguhkan dihitung berdasarkan IJK neto sesuai dengan proporsi jumlah hari sempai dengan sertifikat kafalah berakhir (proporsional harian).

Unearned kafalah fees are determined and calculated based on net kafalah fees in proportion to the number of days until the kafalah certificate expires (daily proportion).

Kenaikan atas imbal jasa kafalah yang belum merupakan pendapatan adalah selisih antara IJK belum menjadi hak periode berjalan dan periode lalu.

Increase/decrease in unearned kafalah fees represent the difference between the balance of unearned kafalah fees for current and prior period.

Penyajian imbal jasa kafalah dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah imbal jasa bruto

Presentation of kafalah fees in the profit or loss statement represents gross fees.

Pendapatan ulang penjaminan ulang

Re-guarantee ujarah income

Pendapatan ulang penjaminan ulang merupakan ujarah yang diterima dari mitra penjaminan ulang dengan persentase tertentu dari jumlah premi yang dibayarkan mitra penjaminan ulang.

Re-guarantee ujarah income is ujarah receipt from re-guarantee partner with certain percentage of premium paid to re-guarantee partner.

Ujarah penjaminan ulang dicatat sebagai pendapatan ditangguhkan dan diamortisasi selama jangka waktu penjaminan

Re-guarantee ujarah is recorded as unearned revenue and amortised over the period of the guarantee.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atau terjadi klaim atas pembiayaan yang dijaminan, jumlah pendapatan imbalan jasa kafalah dan pendapatan ujarah penjaminan ulang yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

If there is an accelerated repayment or there is a claim of the guarantee receivables, the amount of kafalah fees and deferred re-guarantee ujarah income are entirely recognised to profit or loss for the current year.

Pendapatan jasa administrasi kafalah

Kafalah administrative service income

Pendapatan jasa administrasi kafalah diakui seluruhnya saat sertifikat kafalah ("SK") diterbitkan.

Kafalah administrative service income is fully recognised when kafalah certificates ("SK") was issued.

Beban ujarah

Ujarah expenses

Ujarah diberikan kepada agen dan penerima jaminan sehubungan dengan penutupan pertanggungan. Beban ujarah biasanya dinyatakan sebagai persentase tertentu dari IJK. Beban ujarah dicatat sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan.

Ujarah given to agents and recipient of the guarantee related to insurance coverage. Ujarah expenses is expressed as a certain percentage of the IJK. Ujarah expenses is recorded as prepaid expenses and amortised over the guarantee period.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

q. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

Premi penjaminan ulang

Premi penjaminan ulang merupakan beban atas premi yang dibayarkan kepada mitra penjaminan ulang guna mengalihkan risiko klaim. Besaran premi penjaminan ulang yang menjadi hak mitra penjaminan ulang ditentukan berdasarkan jenis produk penjaminan.

Premi penjaminan ulang dicatat sebagai aset penjaminan ulang dan diamortisasi sesuai dengan periode penjaminan ulang.

Klaim

Estimasi klaim adalah jumlah yang menjadi tanggungan Entitas Anak sehubungan dengan klaim yang masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan penelaahan secara teknis asuransi.

Klaim meliputi klaim diselesai (settled claims), klaim dalam proses penyelesaian, termasuk estimasi atas klaim yang telah terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR") dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim. Bagian klaim yang diperoleh dari reasurador diakui dan dicatat sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Hak subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi.

Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan jumlah klaim bruto, klaim penjaminan ulang, dan kenaikan/penurunan estimasi klaim. Klaim penjaminan ulang disajikan sebagai pengurang klaim bruto.

Cadangan atas estimasi klaim bruto dibuat berdasarkan taksiran beban klaim yang akan dibayar sesuai dengan klaim yang diterima Entitas Anak sampai dengan tanggal laporan. Pemulihan klaim dari reasurador untuk cadangan atas estimasi klaim bruto dicatat sebagai estimasi klaim penjaminan ulang pada aset penjaminan ulang.

Entitas Anak menetapkan cadangan berdasarkan lini usaha ("LOB"). Ada dua kategori cadangan: cadangan untuk klaim yang sudah dilaporkan dan cadangan untuk klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan ("IBNR").

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Sharia guarantee contract (continued)

Re-guarantee premiums

Re-guarantee premiums are premium expenses paid to re-guarantee company to transfer the claim risk. Amount of re-guarantee premium is defined based on type of product guarantee.

Re-guarantee premiums are recorded as re-guarantee asset and amortised over the period of re-guarantee.

Claims

Estimated claims represent outstanding claims and the Subsidiary's estimate of claims already incurred but not yet reported. This account is stated in the statement of financial position based on the insurance technical review.

Claims consist of settled claims, outstanding claims including claims incurred but not yet reported ("IBNR") and claim settlement expenses. Claims are recognised as expenses when incurred. Re-guarantee claims received from re-guarantee companies are recognised as deduction from claim expenses in the same period as the recognition of claim expenses. Subrogated rights are recognised as deduction from claim expenses upon realisation.

Claim expenses in the statement of profit or loss represent gross claims, re-guarantee claims and increase/decrease in estimated claims. Re-guarantee claims are presented as deduction from gross claims.

Provision for estimated gross claims is made for the full estimated costs of claims to be paid in respect of claims notified to the Subsidiary until the date of the reporting period. Reinsurance recoveries of the provision for estimated gross claims is recorded as estimated re-guarantee claims in re-guarantee assets.

The Subsidiary establishes its reserves by line of business ("LOB"). There are two categories of reserve: reserves for reported losses and reserves for incurred but not yet reported ("IBNR") losses.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Akad penjaminan syariah (lanjutan)

q. Sharia guarantee contract (continued)

Klaim (lanjutan)

Claims (continued)

Cadangan Entitas Anak untuk klaim yang sudah dilaporkan adalah berdasarkan pada estimasi pembayaran di masa mendatang untuk menyelesaikan klaim yang sudah dilaporkan. Entitas Anak membuat estimasi tersebut berdasarkan pada fakta-fakta yang tersedia pada saat cadangan ditetapkan.

The Subsidiary's reserves for reported losses are based on estimates of future payments to settle reported claims. The Subsidiary bases such estimates on the facts available at the time the reserves are established.

Entitas Anak membentuk cadangan IBNR dengan menggunakan metode triangulasi dan metode gabungan (seperti *Bornhuetter-Ferguson*), termasuk asumsi tingkat diskonto, rasio klaim, dan rasio biaya.

The Subsidiary establishes IBNR reserves using triangulation method and hybrid methods (such as *Bornhuetter-Ferguson*), include discount rate assumptions, claim ratio, and expense ratio.

Perubahan jumlah estimasi liabilitas klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Changes in the amount of estimated total claim liabilities as a result of further review and differences between estimated claims and claims paid are recognised in the profit or loss in the period when the changes occur.

r. Imbalan pasca kerja

r. Post employment benefit

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognised when they become due to the employees.

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan imbalan pasca kerja, seperti pensiun, uang pesangon, uang penghargaan, dan imbalan lainnya dihitung berdasarkan Peraturan Perusahaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("UU 13/2003").

Long-term and post employment benefits, such as pension, severance payments, service payments, and other benefits are calculated in accordance with the Company's Regulation and Labor Law No. 13/2003 ("Law 13/2003").

Grup telah mendaftarkan karyawannya ke dalam program pensiun, yaitu program asuransi kesejahteraan karyawan dan program kesejahteraan karyawan melalui dana pensiun lembaga keuangan (DPLK). Selain program pensiun, Perusahaan juga membukukan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sedangkan Entitas Anak menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti.

The Group have registered their employees into pension plan, that is program asuransi kesejahteraan karyawan and program kesejahteraan karyawan through financial institution pension fund (DPLK). Besides pension plan, the Company also recognised defined benefit post employment benefit according to Labor Law, whilst the Subsidiary conduct defined benefits pension plans.

Selain program pensiun imbalan pasti, Grup juga memiliki program iuran pasti dimana Grup membayar iuran yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. iuran dibebankan ke dalam laporan laba rugi pada saat terutang.

In addition to the defined benefit pension plan, the Group also has defined contribution plans in which the Group pays fees calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program held by the pension funds of financial institutions. Contributions are charged to the income statement when due.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

r. Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai: ku liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program dan penyesuaian atas biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang dimana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu seluruhnya diakui secara langsung dalam laba rugi, kecuali perubahan terhadap program pensiun tersebut mensyaratkan karyawan untuk bekerja selama periode waktu tertentu. Dalam hal ini, biaya jasa lalu akan diamortisasi secara garis lurus sepanjang periode tersebut.

Kerugian dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial.

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah/gaji, upah lembur, iuran jaminan sosial dan hari tua, iuran asuransi jiwa dan penggantian biaya perawatan dan pengobatan, cuti jangka pendek, luangangan hari raya dan bonus diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Liabilitas imbalan pensiun

Grup menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dan program pensiun manfaat pasti melalui Grup asuransi yang pesertanya adalah karyawan tetap Grup, iuran pasti dan manfaat pasti kepada Grup asuransi adalah sebesar persentase tertentu dari gaji karyawan yang menjadi peserta program iuran pasti dan manfaat pasti Grup.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Grup memberikan penghargaan tanda jasa dan cuti besar kepada karyawan yang memiliki masa kerja tertentu sesuai ketentuan Grup. Penghargaan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Post employment benefit (continued)

The pension benefit liability represents the present value of the defined benefit liability at the end of the reporting period less the fair value of the plan assets and adjustments to past services costs not yet recognised. The defined benefit liability is calculated annually by the independent actuary using the *projected unit credit method*.

The present value of the defined benefit liability is determined by discounting the estimated future cash flows using the interest rate on long-term government bonds at the end of the reporting period, expressed in Rupiah, in accordance with the currency in which the benefits will be paid and the short-term ones corresponding to the pension benefits liability in question.

All past service costs are recognised directly in the profit or loss, except for changes towards pension programs that impose conditions on the employees to work during a specified period of time. In this case, past service costs will be amortised using the straight line method over that period.

Actuarial gains and losses may arise from adjustments made based on experience and changes in actuarial assumptions.

Short-term employee benefits

Short-term work benefits such as wages/salaries, overtime pay, social security contributions and old age, life insurance contributions and reimbursement for treatment and medical expenses, short-term leave, holiday allowances and bonuses are recognised over the period of service provided. Short-term benefits are calculated at the undiscounted amount.

Retirement benefits liabilities

The Group provides defined contribution pension plans and defined benefit pension plans through insurance companies whose participants are permanent employees of the Group. The defined contribution and defined benefit contributions to insurance companies are a certain percentage of the salaries of employees who are participants in the Group's defined contribution and defined benefit plans.

Other long term employee benefits

The Group provides awards for service and long leave to employees who have a certain period of service in accordance with the Group regulations. The estimated cost of these benefits is reserved over the employee's tenure. This liability is assessed annually by an independent actuary.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

s. Transactions with related parties

Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

The Group entered into transactions with related parties as defined in SFAS 7 "Related Party Disclosures". This transaction is based on the terms agreed by both parties, where these requirements may not be the same as other transactions conducted with unrelated parties. All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup yang memenuhi persyaratan berikut:

A related party is an individual or entity related with the Group that meets the following requirements:

a). Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Grup jika:

a). Person or immediate family member has a relationship with the Group if:

- i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
- ii. memiliki pengaruh signifikan atas Grup, atau
- iii. personil manajemen kunci Grup atau induk Grup.

- i. has control or joint control over the Group;
- ii. has significant influence over the Group; or
- iii. is a key management personnel of the Group or its parent

b). Suatu entitas berelasi dengan Grup jika:

b). An entity is related with the Group if:

- i. entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama;
- ii. entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain;
- iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja;
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a); atau
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas.

- i. the entity and the Group are members of the same business group;
- ii. the entity is an associate or joint venture of another entity;
- iii. both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. the entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of the third entity;
- v. the entity is a post-employment benefit plan;
- vi. the entity is controlled or jointly controlled by person identified in point (a); or
- vii. the person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or the key management personnel of the entity.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 39.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 39.

t. Dividen

t. Dividend

Distribusi dividen kepada pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian Grup pada periode dimana dividen telah disetujui oleh pemegang saham.

Dividend distribution to the Group's shareholder is recognised as a liability in the Group's consolidated financial statements in the period in which dividend are approved by the shareholder

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

u. Kepentingan non-pengendali

Kepentingan non-pengendali adalah ekuitas entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung dan tidak langsung pada entitas anak.

Kepentingan non-pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

2. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Non-controlling interests

Non-controlling interest is the equity of the subsidiary not attributable, directly and indirectly in subsidiary.

Non-controlling interests are presented in equity in the consolidated financial statements, separately from the equity owners of the parent.

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING**

Estimasi dan pertimbangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lain, termasuk ekspektasi peristiwa masa depan yang diyakini wajar berdasarkan kondisi yang ada.

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh standar adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Liabilitas kontrak jaminan keuangan

Liabilitas kontrak jaminan keuangan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan terjamin dan nilai realisasi bersih dan setiap subrogasi.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Kakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan terjamin tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS**

Estimates and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of future events that are believed to be reasonable under the circumstances.

Certain estimates and assumptions are made in the preparation of the financial statements. These often require management judgement in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with standard are best estimates undertaken in accordance with the applicable standard. Estimates and judgements are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from initial estimates.

Key sources of estimation uncertainty:

a. Liabilities for financial guarantee contracts

Liabilities for financial guarantee contract is evaluated individually and is based upon management's best estimate of the present value of the cash flows that are expected to be received. In estimating these cash flows, management makes judgements about the guaranteee's financial situation and the net realizable value of any underlying subrogation.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific guaranteed allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

b. Estimasi klaim

Estimasi klaim Entitas Anak dihitung berdasarkan perhitungan aktuaria dengan menggunakan asumsi aktuaria. Entitas Anak menggunakan teknik pemodelan dan asumsi berdasarkan risiko pemburuan dari *experienced study* secara historis yang dianggap mempengaruhi perhitungan cadangan klaim. Realisasi estimasi dicatat pada perubahan estimasi cadangan klaim. Termasuk dalam cadangan teknis entitas anak adalah estimasi liabilitas klaim dan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan (lihat Catatan 2e).

c. Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaris. Perhitungan aktuaris menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat kewajiban pensiun.

d. Cadangan kerugian penurunan nilai

Grup merevisi piutang secara individual dan kolektif pada setiap akhir periode pelaporan untuk menilai apakah penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi.

Secara khusus, pertimbangan oleh manajemen diperlukan dalam menyesuaikan jumlah dan waktu arus kas di masa mendatang ketika menentukan penurunan nilai.

Estimasi-estimasi ini didasarkan pada asumsi-asumsi tentang sejumlah faktor dan hasil aktual mungkin akan berbeda, yang tercermin dalam perubahan penyisihan penurunan nilai di masa mendatang.

Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, asumsi dibuat untuk menentukan kerugian yang melekat dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan *counterparty* tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

b. Estimated claims

Estimated claims in Subsidiary are calculated based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Subsidiary is using technical modeling and assumptions based on the risk of delinquency from historically experienced studies which are considered affects the calculation of claims reserves. Estimated realisation is recorded in the change in the estimated reserves for claims. Subsidiary technical reserves are included in the estimated claims liabilities and reserves for premiums that have not yet been earned (see Note 2e).

c. Employee benefit liabilities

Employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves making assumptions about discount rate, expected rate of return on investments, future salary increases, mortality rate, resignation rate, and others. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of pension obligations.

d. Allowance for impairment losses

The Group reviews its receivable individually and collectively at each the end of reporting dates to assess whether an impairment loss should be recorded in the income statement.

In particular, judgement by management is required in the estimation of the amount and timing of future cash flows when determining the impairment loss.

These estimates are based on assumptions about a number of factors and actual results may be different, resulting in future changes to the allowance.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

The accuracy of the allowances depends on how well the estimation of future cash flows for specific counterparty allowances and the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI
YANG PENTING (lanjutan)**

Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)

e. Nilai wajar dari instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian termasuk menggunakan model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Dalam mengestimasi arus kas, Grup melakukan penilaian tentang kondisi keuangan, jaminan dan nilai realisasi bersih dari agunan.

f. Aset pengembalian

Aset yang timbul dari kontrak penjaminan ulang sebagai pemulihan cadangan klaim dihitung dengan menggunakan pendekatan gross dan netting-off pemulihan klaim ekspektasi setelah dikurangi ekspektasi pemulihan aset. Pemulihan aset ini dinilai secara periodik untuk memastikan bahwa jumlahnya mencerminkan jumlah yang pada akhirnya akan diterima, memperimbangan faktor-faktor seperti counterparty dan risiko kredit. Penurunan nilai diakui di mana terdapat bukti objektif bahwa Grup tidak dapat menerima jumlah yang terutang untuk itu dan jumlah ini dapat diukur secara andal.

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Manajemen menemukan adanya kesalahan seji pada laporan keuangan konsolidasian terdahulu yang terkait dengan:

1. Kesalahan perhitungan kewajiban imbalan kerja yang disebabkan oleh kesalahan data dan tidak diikutsertakannya beberapa program imbalan kerja, seperti program penghargaan masa kerja dan program cuti besar, pada laporan keuangan konsolidasian sebelumnya sehingga menyebabkan saldo kewajiban imbalan kerja Grup pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018/1 Januari 2019 kurang tercatat masing-masing sebesar Rp 26.358 dan Rp 27.069;

**3. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGEMENTS (continued)**

Key sources of estimation uncertainty:
(continued)

e. Fair value of financial instruments

Where the fair value of financial assets and financial liabilities recorded on the financial position statements cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but where observable market data are not available, judgment is required to establish fair values. In estimating these cash flows, the Group makes judgment about the borrower's financial condition and the net realisable value of collateral.

f. Reimbursement asset

Assets arising from re-guarantee contracts as recovery of reserves for claims are calculated using the gross and netting-off approach of the expected recovery of claims after deducting expected recovery of assets. The recoverability of these assets is assessed on a periodic basis to ensure that the balance is reflecting the amounts that will ultimately be received, taking into consideration factors such as counterparty and credit risk. Impairment is recognised where there is objective evidence that the Group may not receive amounts due to it and those amounts can be reliably measured.

**4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

In the process of preparing the consolidated financial statements as at 31 December 2020, the Management discovered that there were errors in the reports in the previous consolidated financial statements related to:

1. Error in the calculation of employee benefit obligations due to data errors and the exclusion of several employee benefit programs such as long leave award program and long service leave program in the previous consolidated financial statements, resulting in the Group's outstanding balance of employee benefits obligations as at 31 December 2019 and 31 December 2018/1 January 2019 under-recorded amounting to Rp 26,358 and Rp 27,069, respectively;

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, Manajemen menemukan adanya kesalahan saji pada laporan keuangan konsolidasian terdahulu yang terkait dengan: (lanjutan)

2. Kesalahan atas pengukuran pada pencadangan kerugian penurunan nilai atas piutang penjaminan, di mana pada laporan keuangan konsolidasian sebelumnya, Manajemen belum melakukan penilaian yang memadai atas tingkat keteragihan piutang imbal jasa penjaminan dan piutang penjaminan ulang sehingga menyebabkan saldo piutang imbal jasa penjaminan dan piutang penjaminan ulang pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018/1 Januari 2019 lebih catat masing-masing sebesar Rp 1.055.153 dan Rp 1.068.550;
3. Kesalahan dalam metode perhitungan pendapatan imbal jasa penjaminan dan imbal jasa kafalah yang menyebabkan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 kurang catat sebesar Rp 115.878;
4. Kesalahan dalam metode perhitungan liabilitas kontrak jaminan keuangan, imbal jasa penjaminan ditangguhkan, estimasi liabilitas klaim, pendapatan komisi ditangguhkan, imbal jasa kafalah ditangguhkan, penjaminan ulang dibayar dimuka, aset penjaminan ulang, dan aset pengembalian yang menyebabkan saldo liabilitas kontrak jaminan keuangan, imbal jasa penjaminan ditangguhkan, estimasi liabilitas klaim, pendapatan komisi ditangguhkan, imbal jasa kafalah ditangguhkan, penjaminan ulang dibayar dimuka, aset penjaminan ulang, dan aset pengembalian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018/1 Januari 2019 kurang catat masing-masing sebesar Rp 2.497.324 dan Rp 1.857.528;

Selain kesalahan di atas, untuk menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), Manajemen mengubah kebijakan akuntansi terkait dengan tanah dan bangunan di tahun 2020, di mana pada laporan keuangan konsolidasian sebelumnya, Grup menerapkan metode revaluasi, menjadi metode harga perolehan, yang menyebabkan saldo aset tetap untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 lebih catat masing-masing sebesar Rp 311.279 dan Rp 309.080, serta untuk saldo penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 lebih catat masing-masing sebesar Rp 289.433.

**4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

In the process of preparing the consolidated financial statements as at 31 December 2020, the Management discovered that there were errors in the reports in the previous consolidated financial statements related to: (continued)

2. *Errors in the measurement of the allowance for impairment losses on guarantee receivables and re-guarantee receivables, where in the previous consolidated financial statements, Management has not made an adequate assessment of the collectibility of guarantee receivables and re-guarantee receivables, which resulted in overstatement of guarantee receivables and re-guarantee receivables as at 31 December 2019 and 31 December 2018/1 January 2019 was over-recorded amounting to Rp 1,055,153 and Rp 1,068,550, respectively.*
3. *Errors in the method of calculation of gross guarantee fee and gross kafalah fee, which caused the income for the year ended 31 December 2019 to be under recorded amounting to Rp 115,878;*
4. *Errors in the method of calculation of liabilities for financial guarantee contracts, deferred guarantee fees, estimated claim liabilities, deferred commission income, unearned kafalah fee, prepaid re-guarantee, asset reimbursement and re-guarantee asset, which caused liabilities for financial guarantee contracts, deferred guarantee fees, estimated claim liabilities, deferred commission income, unearned kafalah fee, prepaid re-guarantee, asset reimbursement and re-guarantee asset, for the year ended 31 December 2019 and 31 December 2018/1 January 2019 to be under recorded amounting to Rp 2,497,324 and Rp 1,857,528, respectively;*

In addition to those errors, to align with PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)' accounting policy, Management changed its accounting policy, specifically for land and building in 2020, where in the previous consolidated financial statements, the Group applied revaluation method, became cost method, which caused the balance of fixed assets and other comprehensive income for the year ended 31 December 2019 and 2018 to be over-recorded amounting to Rp 311,279 and Rp 309,080 and Rp 289,433, respectively, and for the other comprehensive income for the year ended 31 December 2019 to be over-recorded amounting to Rp 289,433.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN (lanjutan)**

Dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018/ 1 Januari 2019 telah disajikan kembali karena koreksi kesalahan dan dampak dari perubahan kebijakan akuntansi.

Manajemen juga telah menyajikan kembali dan mereklasifikasi akun-akun yang terkait dengan aset, liabilitas dan beban pajak penghasilan sebagai akibat koreksi atas kesalahan-kesalahan tersebut di atas dan perubahan klasifikasi. Tabel berikut merupakan ikhtisar atas dampak dari penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian terdahulu.

**4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

In order to prepare and present the consolidated financial statements as at and for the year ended 31 December 2020, the consolidated financial statements as at and for the years ended 31 December 2019 and 31 December 2018/ 1 January 2019 have been restated due to the correction of errors and impact of changes in accounting policy.

Management has also restated and reclassified accounts related to assets, liabilities and income tax expense as a result of correction of the above errors and changes in classification. The following table is a summary of the effects of restatement of previous consolidated financial statements:

	1 Januari/January 2020 31 Desember/December 2019			
	Sebelum penyajian kembali/Before restatement	penyajian kembali/ Restatement adjustments	Setelah penyajian kembali/After restatement	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
ASET				ASSETS
Kas dan kas di bank	6.140.958	(8.052.344)	68.614	Cash on hand and cash in banks
Deposito wajib dan berjangka	-	6.178.654	6.178.654	Savings and time deposits
Piutang efek	4.666.678	(152.682)	4.513.996	Marketable securities
Piutang (tamb.) jasa penjaminan - bersih	2.890.970	(1.409.986)	1.480.984	Guarantee receivables - net
Piutang penjaminan uang - bersih	421.760	(66.945)	354.815	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi	-	66.060	66.060	Investment income receivables
Biaya dibayar dimuka	39.324	(517)	38.807	Prepaid expenses
Aset tetap - bersih	517.565	(911.276)	306.289	Fixed assets - net
Deposito di bank yang dibatasi jangka panjangnya	-	716.072	716.072	Restricted deposit in banks
Penjaminan uang dibayar dimuka	1.808.903	(625.678)	803.224	Prepaid re-guarantee
Aset pengembalian	-	331.038	331.038	Reimbursement assets
Biaya akuisisi tanggungan	-	348.862	348.862	Deferred acquisition cost
Aset penjaminan piutang	-	238.818	238.818	Re-guarantee assets
Aset pajak tangguhan	211.344	962.060	1.174.212	Deferred tax assets
Aset lain-lain	803.431	(779.818)	23.613	Other assets
Piutang yang diabaikan - bersih	412	(412)	-	Loans - net
Piutang lainnya	215.878	(215.878)	-	Other receivables
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang penjaminan uang	290.119	(124.517)	125.602	Re-guarantee payables
Akumulasi dan utang lain-lain	350.595	150.744	501.339	Accruals and other payables
Utang pajak	21.498	8.504	29.992	Taxes payable
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	-	6.666.285	6.666.285	Liabilities for financial guarantee contracts
Imbal jasa penjaminan ditangguhkan	4.471.814	(4.471.814)	-	Deferred guarantee fees
Pendapatan komisi ditangguhkan	-	130.529	130.529	Deferred commission income
Estimasi liabilitas klaim	446.478	(302.702)	133.776	Estimated claim liabilities
Imbal jasa setelah ditangguhkan	-	423.100	423.100	Unearned claim fees
Liabilitas imbalan kerja	28.748	28.358	57.106	Employee benefits liability

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**GATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) **4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

	1 Januari/January 2020 (lanjutan) 31 Desember/December 2019 (lanjutan)			
	Sebelum penyajian kembali/Before restatement	Penyajian kembali/Restatement adjustments	Setelah penyajian kembali/After restatement	
EKUITAS				EQUITY
Pengukuran kembali				Re-measurement of post-employment benefits
Imbalan pasca kerja	-	(13.928)	(13.928)	Unrealized losses on marketable securities
Kerugian yang belum direalisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(149.405)	(61.455)	(210.860)	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang telah menuliskan penggunaannya	9.553.208	12.468.002	1.085.208	Unappropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	621.808	(422.068)	199.810	Statement of profit or loss and other comprehensive income
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain				Guarantee fee income
Imbal jasa penjaminan	2.529.284	(215.023)	2.313,611	Gross katalah fee
Imbal jasa kebalikan	-	331.801	231,501	Decrease in insurance katalah fee
Perubahan nilai, pas setelah yang belum merupakan pendapatan	-	(68.315)	(68,315)	Re-guarantee premiums
Pran premi/nilai ulang	(360.842)	(5.832)	(366,674)	Guarantee restitution
Resolusi DP	(5.832)	5,832	-	Commission income
Pendapatan komisi	47.598	(42.558)	5,040	Fee based expenses
Beban fee based	(34.743)	34,743	-	Agent fee expenses
Beban fee agen	(65.441)	65,441	-	Claim expenses
Beban klaim	(1.828.284)	(378,522)	(2.206,806)	Re-guarantee claims
Klaim pengalihan utang	-	406,482	406,482	Uraik laporan keuangan
Beban urah	-	(28,427)	(28,427)	increase in claim reserves
Kerugian cadangan	11.887	(447,042)	(435,155)	Re-guarantee claim income
Klaim - bersih	-	14,127	14,127	Commission - net
Pendapatan uah penjaminan utang	-	(48,138)	(48,138)	Operating expenses
Kerugian - bersih	(800,813)	(135,513)	(936,326)	Other expenses
Beban usaha	(800,813)	(135,513)	(936,326)	Final tax expenses
Beban lain-lain	(2.484)	(141,340)	(2.625,324)	Income tax expense/benefit
Beban pajak final	(139,034)	(139,034)	(278,068)	Items that will not be reclassified to profit or loss:
(Beban) manfaat pajak penghasilan	(139,034)	296,354	157,320	Re-measurement of post-employment benefits
Pos-pos yang tidak akan diklasifikasi ke laba rugi:				Amount tax effect
Pengukuran kembali kewajiban imbalan kerja	(4.879)	5,025	3,148	Items that will be reclassified to profit or loss:
Pajak tunggahan terkait	1.223	(2.015)	(792)	Gain in financial assets available for sale
Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi:				Holand tax effect
Keuntungan dari penjualan yang tersedia untuk dijual	86,51	9,310	95,821	
Pajak tunggahan terkait	(24,672)	27,57	2,905	
	1 Januari/January 2019 31 Desember/December 2018			
	Sebelum penyajian kembali/Before restatement	Penyajian kembali/Restatement adjustments	Setelah penyajian kembali/After restatement	
Laporan posisi keuangan konsolidasian				Consolidated statement of financial position
ASET				ASSETS
Kas dan kas di bank	5.156,307	(5.964,937)	235,370	Cash on hand and cash in banks
Deposito wadib dan berjangka	-	6.076,437	6,076,437	Statutory and time deposits
Efek-efer	4.124,057	(103,789)	3,970,268	Marketable securities
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2.688,853	(1.378,042)	1.290,811	Guarantee receivables - net
- bersih	254,807	32,885	287,492	Re-guarantee receivables - net
Piutang penjaminan utang - bersih	-	48,895	48,895	Investment income receivables
Piutang hasil investasi	477,067	(308,680)	168,387	Fixed assets - net
Aset tetap - bersih	-	487,379	487,379	Reserves deposits in banks
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya	-	(67,2091)	667,588	Re-guarantee assets
Penjaminan utang dibayar dimuka	1.284,677	70,814	1,355,491	Deferred acquisition cost
Aset pengembang	-	313,005	313,005	Re-guarantee assets
Biaya akrual tunggahan	-	65,240	65,240	Deferred tax assets
Aset penjaminan utang	-	785,575	785,575	Other assets
Aset pajak tunggahan	231,363	(618,610)	(387,247)	Loans - net
Aset lain-lain	778,385	(658)	777,727	Other receivables
Pinjaman yang diberikan - bersih	658	-	658	
Piutang lain-lain	104,501	(1.04,903)	-	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan) **4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)**

	1 Januari/January 2019 (lanjutan) 31 Desember/December 2018 (lanjutan)			
	Pembetulan Sabelum penyajian kembali/Before restatement	penyajian kembali Restatement adjustment	Setelah penyajian kembali/After restatement	
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang penjaminan utang	188.053	(62.150)	125.903	Ho-guaranteed payables
Akrua dan utang lain-lain	278.614	218.690	613,304	Accruals and other payables
Utang pajak	7.594	2.117	3.711	Taxes payable
Liabilitas kontrak jaminan kejang	-	5,464,470	5,464,470	Liabilities for financial guarantee contracts
Perdapatian komisi langgihan	3,508,675	(3,214,263)	84,412	Deferred commission income
Estimasi liabilitas klaim	456,690	(377,888)	79,001	Estimated claim liabilities
Imbal jasa keifah d langgihan	-	304,878	304,878	Unearned initial fees
Liabilitas imbalan kerja	16,887	27,068	45,956	Employee benefits liability
EKUITAS				EQUITY
Pangiklar kembali milikan usaha keaja	-	(16,316)	(16,316)	Reassessment of post- employee benefits unrealised losses
Kerugian yang belum direalisasi sah surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komersial lain, setelah pajak	(252,422)	(107,384)	(393,606)	Unrealised losses measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	3,193,598	(2,443,838)	749,566	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	387,321	(22,321)	375,000	Unappropriated retained earnings

5. KAS DAN KAS DI BANK

5. CASH ON HAND AND CASH IN BANKS

	2020	2019	
Kas	1,575	1,337	Cash on hand
Bank			Bank
Pihak berelasi:			Related parties
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35,256	24,070	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,989	12,588	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8,136	2,912	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	5,143	8,420	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,713	5,639	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	3,848	1,147	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank BNI Syariah	745	434	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	251	2,319	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	219	125	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
	69,300	57,655	
Pihak ketiga:			Third parties:
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	2,848	3,373	PT Bank Artha Graha Internasional Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	2,750	552	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank CTBC Indonesia	1,350	95	PT Bank CTBC Indonesia
PT Bank Syariah Bukopin	1,348	282	PT Bank Syariah Bukopin
PT Bank OCBC NISP Tbk	435	475	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Permata Tbk	384	372	PT Bank Permata Tbk
Bank Perkraditan Rakyat	339	21	Bank Perkraditan Rakyat
PT Bank Sinarmas Tbk	158	185	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	127	180	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Maybank Indonesia Tbk	101	101	PT Maybank Indonesia Tbk

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

5. KAS DAN KAS DI BANK (lanjutan)

**5. CASH ON HAND AND CASH IN BANKS
(continued)**

	2020	2019	
Bank (lanjutan)			Bank (continued)
Pihak ketiga (lanjutan)			Third parties (continued)
PT Bank BTPN Syariah Tbk	75	56	<i>PT Bank BTPN Syariah Tbk</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	68	69	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk	40	46	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
PT Bank Maybank Indonesia - Unit Syariah	6	-	<i>PT Bank Maybank Indonesia - Sharia Unit</i>
PT Bank Mandiri Taspen	4	4	<i>PT Bank Mandiri Taspen</i>
PT Bank Permata Tbk - Unit Syariah	3	3	<i>PT Bank Permata Tbk - Sharia Unit</i>
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	2	2	<i>PT Bank Kesejahteraan Ekonomi</i>
PT Bank Mega Syariah	1	28	<i>PT Bank Mega Syariah</i>
PT Bank Sinarmas Tbk - Unit Syariah	1	2	<i>PT Bank Sinarmas Tbk - Sharia Unit</i>
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Syariah	-	3	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia Unit</i>
Bank Pembangunan Daerah	20,192	23,775	<i>Bank Pembangunan Daerah</i>
	30,263	28,522	
	99,563	87,277	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai:	(33)	-	<i>Allowance for impairment losses</i>
	101,105	87,277	

Cadangan kerugian penurunan nilai kas di bank dihitung secara kolektif sesuai dengan PSAK 71.

The allowance for impairment losses on cash in banks is calculated based on collective assessment according to SFAS 71.

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito wajib dan berjangka.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of statutory and time deposits.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

6. DEPOSITO WAJIB DAN BERJANGKA

6. STATUTORY AND TIME DEPOSITS

	2020	2019	
Pihak berelasi:			Related parties:
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,359,487	3,297,514	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,344,650	882,315	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	277,150	134,650	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	152,990	106,334	<i>PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	147,144	115,852	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit</i>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	82,554	149,250	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36,410	58,145	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	30,423	59,180	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank BNI Syariah	4,960	3,650	<i>PT Bank BNI Syariah</i>
	5,438,008	4,835,870	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

6. DEPOSITO WAJIB DAN BERJANGKA (lanjutan)

6. STATUTORY AND TIME DEPOSITS (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga:			<i>Third parties:</i>
Bank Perkreditan Rakyat	398,620	573,410	<i>Bank Perkreditan Rakyat</i>
Bank swasta	371,304	405,465	<i>Bank swasta</i>
Bank syariah	<u>291,524</u>	<u>362,849</u>	<i>Bank syariah</i>
	<u>1,061,448</u>	<u>1,341,724</u>	
	<u>6,497,456</u>	<u>6,178,594</u>	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,107)</u>	<u>-</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>6,496,349</u>	<u>6,178,594</u>	

Deposito berjangka memperoleh suku bunga tahunan berkisar 1,00% - 5,00% untuk tahun 2020 (2019: 3,00% - 6,75%).

Time deposit earned annual interest at ranging of 1.00% - 5.00% in 2020 (2019: 3.00% - 6.75%).

Cadangan kerugian penurunan nilai deposito wajib dan berjangka dihitung secara kolektif sesuai dengan PSAK 71

The allowance for impairment losses on statutory and time deposits is calculated based on collective assessment according to SFAS 71.

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito wajib dan berjangka.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of statutory and time deposits.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

7. EFEK-EFEK

7. MARKETABLE SECURITIES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Nilai wajar melalui laba rugi:			<i>Fair value through profit or loss:</i>
- Reksadana	1,594,897	-	<i>Mutual funds -</i>
- Efek beragun aset	<u>45,820</u>	<u>-</u>	<i>Asset backed securities -</i>
	<u>1,640,717</u>	<u>-</u>	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:			<i>Measured at fair value through other comprehensive income:</i>
- Obligasi	1,768,879	1,478,073	<i>Bonds -</i>
- Saham	237,291	266,523	<i>Shares -</i>
- Reksadana	-	684,577	<i>Mutual funds -</i>
- Efek beragun aset	<u>-</u>	<u>29,570</u>	<i>Asset backed securities -</i>
	<u>2,006,670</u>	<u>2,458,743</u>	
Biaya perolehan diamortisasi:			<i>Measured as amortised cost:</i>
- Obligasi	1,021,355	953,008	<i>Bonds -</i>
- Reksadana	-	1,054,861	<i>Mutual funds -</i>
- Efek beragun aset	<u>-</u>	<u>37,384</u>	<i>Asset backed securities -</i>
	<u>1,021,355</u>	<u>2,045,253</u>	
	<u>4,667,742</u>	<u>4,503,996</u>	
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(35,286)</u>	<u>-</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>4,632,456</u>	<u>4,503,996</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Reksadana:		
Penyertaan terbatas	692,870	-
Ekuitas	393,567	-
Ta.protektai	231,804	-
Pendapatan tetap	152,788	-
Campuran	124,068	-
	<u>1,594,897</u>	<u>-</u>
Efek beragun aset:		
Perusahaan milik negara dan anak perusahaan	30,360	-
Perusahaan milik swasta	15,480	-
	<u>45,820</u>	<u>-</u>
Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	<u>1,640,717</u>	<u>-</u>
Dikurangi:		
Cadangan kerugian penurunan nilai	(28,154)	-
	<u>1,612,563</u>	<u>-</u>
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui pengisian komprehensif lain:		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Obligasi:		
Obligasi pemerintah	1,290,481	1,002,883
Obligasi korporasi	306,578	313,788
Sukuk	171,320	161,402
	<u>1,768,379</u>	<u>1,478,073</u>
Saham:		
Perusahaan milik negara dan anak perusahaan	175,007	194,066
Perusahaan milik swasta	62,284	72,457
	<u>237,291</u>	<u>266,523</u>
Reksadana:		
Pendapatan tetap	-	147,595
Ekuitas	-	417,680
Campuran	-	119,322
	<u>-</u>	<u>684,577</u>
Efek beragun aset:		
Perusahaan milik negara dan anak perusahaan	-	29,570
	<u>-</u>	<u>29,570</u>
	<u>2,005,670</u>	<u>2,458,743</u>

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

Marketable securities at fair value through profit or loss consist of the followings:

Mutual funds:
Limited participation
Equity
Protected
Fixed income
Discretionary

Asset backed securities:
State owned enterprises
and subsidiaries
Private owned companies

Marketable securities at fair value through profit or loss

Less:
Allowance for impairment losses

Marketable securities at fair value through other comprehensive income:

Bonds:
Government bonds
Corporate bonds
Sukuk

Shares:
State owned enterprises
and subsidiaries
Privately owned companies

Mutual funds:
Fixed income
Equities
Discretionary

Asset backed securities:
State owned enterprises
and subsidiaries

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain: (lanjutan)

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

Marketable securities at fair value through other comprehensive income: (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,960)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u>2,001,702</u>	<u>2,458,743</u>	
Efek-efek yang diukur pada biaya amortisasi:			Marketable securities measured at amortised cost:
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Obligasi:			Bonds
Obligasi pemerintah	268,355	250,008	Government bonds
Obligasi korporasi	743,000	676,000	Corporate bonds
Sukuk	10,000	27,000	Sukuk
	<u>1,021,355</u>	<u>953,008</u>	
Rekadana:			Mutual funds:
Perusahaan terbatas Terproteksi	-	708,838	Limited participation Protected
	-	<u>346,013</u>	
	-	<u>1,054,851</u>	
Efek beragun aset:			Asset backed securities:
Perusahaan milik negara dan anak perusahaan	-	14,394	State owned enterprises and subsidiaries
Perusahaan milik swasta	-	23,000	Privately owned companies
	-	<u>37,394</u>	
	<u>1,021,355</u>	<u>2,045,253</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(3,164)	-	Less: Allowance for impairment losses
	<u>1,018,191</u>	<u>2,045,253</u>	
Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah:			Movement for impairment losses are as follows:
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal	-	-	Beginning balance
Dampak penerapan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020	1,192	-	Effect on implementation of SFAS 71 on 1 January 2020
Penambahan provisi	24,094	-	Additional provision
Saldo akhir	<u>35,286</u>	<u>-</u>	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2020 and 2019 tidak terdapat efek-efek yang kredikan dana jaminan.

As at 31 December 2020 and 2019, there were no marketable securities provided as statutory funds.

Cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dihitung secara kolektif dan individual sesuai dengan PSAK 71.

The allowance for impairment losses on marketable securities is calculated based on collective and individual assessment according to SFAS 71.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

7. EFEK-EFEK (lanjutan)

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai efek-efek.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

7. MARKETABLE SECURITIES (continued)

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of marketable securities.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

8. PIUTANG IMBAL JASA PENJAMINAN - BERSIH

a. Berdasarkan pihak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pemerintah Republik Indonesia	1,713,475	1,521,520
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,069,232	317,179
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	678,099	575,116
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	112,657	61,946
Bank swasta	56,860	22,383
Bank Pembangunan Daerah	56,074	32,103
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,176	2,989
Lain-lain	<u>4,276</u>	<u>4,158</u>
	<u>3,691,839</u>	<u>2,537,402</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(1,107,378)</u>	<u>(1,056,430)</u>
	<u>2,584,461</u>	<u>1,480,972</u>

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal PSAK 55	1,056,430	859,511
Dampak penerapan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020	-	-
Penambahan provisi	<u>50,948</u>	<u>196,919</u>
Saldo akhir	<u>1,107,378</u>	<u>1,056,430</u>

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak terpagihnya piutang imbal jasa penjaminan.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

8. GUARANTEE RECEIVABLES - NET

a. By parties

The Government of the Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank swasta
Bank Pembangunan Daerah
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Others

Allowance for impairment losses

b. Changes in allowance for impairment are as follows.

Opening balance SFAS 55

Effect on implementation of SFAS 71 on 1 January 2020

Additional provision

Ending balance

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible guarantee receivables.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

8. PIUTANG PENJAMINAN ULANG - BERSIH

9. RE-GUARANTEE RECEIVABLES - NET

a. Berdasarkan pihak

a. By parties

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
PT Igna Asia	541,360	397,585	PT Igna Asia
PT Asuransi Syariah Mubarakah	72,705	72,705	PT Asuransi Syariah Mubarakah
PT Reasuransi Nasional Indonesia	32,394	7,650	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Hexaa Eka Life	30,490	44,620	PT Hexaa Eka Life
PT Freed Dinamika Indonesia	2,852	1,472	PT Freed Dinamika Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia	6,882	12,554	PT BRI Asuransi Indonesia
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2,226	1,107	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT A.I Central Asia Raya	-	25	PT A.I Central Asia Raya
	<u>688,819</u>	<u>537,718</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(196,208)	(182,873)	Allowance for impairment losses
	<u>492,611</u>	<u>354,845</u>	

b. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai :

b. Changes in allowance for impairment are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal PSAK 55	182,873	208,631	Opening balance SFAS 55
Dampak penerapan PSAK 71 pada tanggal 1 Januari 2020	-	-	Effect on implementation of SFAS 71 on 1 January 2020
Penambahan provisi	13,335	(25,158)	Additional provision
Saldo akhir	<u>196,208</u>	<u>182,873</u>	Ending balance

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari liabilitas tertagihnya piutang imbal jasa penjaminan.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible guarantee receivables.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

10. PIUTANG HASIL INVESTASI

10. INVESTMENT INCOME RECEIVABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Obligasi	27,333	15,705	Bonds
Deposito berjangka	8,677	12,594	Time deposits
Sukuk	2,688	1,674	Sukuk
Efekt beragun aset	512	508	Asset backed security
Reksadana	-	35,569	Mutual funds
	<u>39,211</u>	<u>66,050</u>	

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - BERSIH

11. FIXED ASSETS - NET

	2020				Bekas nilai berupa	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers		
Biaya perolehan:						Acquisition cost:
Konstruksi Bangunan						Construction cost:
Tanah	53,213	35,453	-	-	88,706	Land
Bangunan kantor	78,456	12,148	-	52,880	143,481	Office buildings
Renovasi gedung	8,778	211	-	1,781	8,508	Houses
Investasi kantor	114,975	75,168	-	-	140,145	Office equipment
Investasi rumah dinas	3,536	736	-	-	4,291	Houses equipment
Kendaraan bermotor	43,751	140	-	-	43,891	Motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	50,817	6,328	-	24,301	4,425	Assets in progress
	<u>351,136</u>	<u>182,226</u>			<u>433,135</u>	
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan kantor	-	51,693	-	-	51,583	Office buildings
Kendaraan bermotor	-	50,467	-	-	32,487	Motor vehicles
Investasi kantor	-	158	-	-	153	Office equipment
		<u>102,318</u>			<u>84,223</u>	
	<u>351,136</u>	<u>182,226</u>			<u>517,358</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Konstruksi Bangunan						Construction cost:
Bangunan kantor	(32,076)	(3,145)	-	-	(35,154)	Office buildings
Renovasi gedung	(2,147)	(240)	-	-	(2,407)	Houses
Investasi kantor	(73,105)	(17,428)	-	-	(90,433)	Office equipment
Investasi rumah dinas	(2,211)	(504)	-	-	(2,785)	Houses equipment
Kendaraan bermotor	(20,071)	(4,173)	-	-	(24,291)	Motor vehicles
	<u>(128,609)</u>	<u>(25,486)</u>			<u>(154,095)</u>	
Aset hak-guna						Right-of-use assets
Bangunan kantor	-	(13,218)	-	-	(13,218)	Office buildings
Kendaraan bermotor	-	(13,107)	-	-	(13,107)	Motor vehicles
Investasi kantor	-	(382)	-	-	(381)	Office equipment
		<u>(26,707)</u>			<u>(26,706)</u>	
	<u>(128,609)</u>	<u>(26,707)</u>			<u>(154,095)</u>	
Nilai buku bersih	<u>308,596</u>				<u>320,324</u>	Net book value

Termasuk di dalam biaya perolehan aset hak-guna pada 31 Desember 2020 adalah penambahan aset hak-guna terkait dampak penerapan PSAK 73 pada 1 Januari 2020 sebesar Rp 19.917.

included in the cost of leased asset as at 31 December 2020 are additions of leased assets relating to impact of SFAS 73 implementation as at 1 January 2020 amounting to Rp 19,917.

	2019				Bekas nilai Saldo	
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Disposals	Transfer/ Transfers		
Biaya perolehan:						Acquisition cost:
Tanah						Land
Tanah	53,213	-	-	-	53,213	Land
Bangunan kantor	85,813	12,845	-	-	78,456	Office buildings
Renovasi gedung	5,384	216	-	178	8,778	Houses
Investasi kantor	97,750	17,227	-	-	114,977	Office equipment
Investasi rumah dinas	2,756	800	-	-	3,556	Houses equipment
Kendaraan bermotor	43,751	17	(117)	-	43,751	Motor vehicles
Aset dalam penyelesaian	19,528	3,517	-	(173)	50,817	Assets in progress
	<u>289,195</u>	<u>37,405</u>	<u>(117)</u>		<u>326,128</u>	
Akumulasi penyusutan						Accumulated depreciation
Konstruksi Bangunan						Construction cost:
Bangunan kantor	(30,455)	(1,191)	-	-	(32,036)	Office buildings
Renovasi gedung	(1,443)	(201)	-	-	(2,146)	Houses
Investasi kantor	(57,647)	(13,458)	-	-	(73,105)	Office equipment
Investasi rumah dinas	(1,368)	(252)	-	-	(2,280)	Houses equipment
Kendaraan bermotor	(20,240)	(4,172)	6	-	(24,301)	Motor vehicles
	<u>(110,353)</u>	<u>(23,272)</u>	<u>6</u>		<u>(133,619)</u>	
Nilai buku bersih	<u>167,987</u>				<u>192,509</u>	Net book value

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

11. ASET TETAP - BERSIH (lanjutan)

Berdasarkan evaluasi Direksi, tidak terdapat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2020.

Pada tanggal 31 Desember 2020, aset tetap diasuransikan terhadap risiko kebakaran, dan risiko lainnya. Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Pada tanggal 31 Desember 2020 tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan.

Aset hak-guna

Laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2020 telah menyajikan saldo-saldo berikut yang berkaitan dengan sewa:

	<u>1 Januari January 2020</u>	
<u>Aset tetap</u>		<u>Fixed assets</u>
Aset hak-guna - bersih	64,532	Right-of-use assets - net
<u>Akumulasi utang lain-lain</u>		<u>Accruals and other payables</u>
Liabilitas sewa	46,085	Lease liabilities

Penambahan aset hak-guna untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19.817

Additions to the right-of-use assets for the period ended 31 December 2020 is amounting Rp 19,817.

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

The profit or loss shows the following amounts related to leases:

	<u>31 Desember/ December 2020</u>	
<u>Beban umum dan administratif</u>		<u>General and administrative expenses</u>
Depresiasi aset hak-guna	26,358	Depreciation of right-of-use assets
Beban bunga	4,010	Interest expense

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 19.817.

The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2020 is amounting to Rp 19,817.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. DEPOSITO DI BANK YANG DIBATASI
PENGUNAANNYA**

12. RESTRICTED DEPOSIT IN BANKS

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, deposito yang dibatasi penggunaannya oleh Grup adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2020 and 2019, restricted deposits which are held by the Group's are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500,000	500,000	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
PT Bank Syariah Mandiri	167,639	67,639	<i>PT Bank Syariah Mandiri</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	159,000	156,500	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank BRI Syariah Tbk	100,000	-	<i>PT Bank BRI Syariah Tbk</i>
Bank Pembangunan Daerah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	85,200	65,850	<i>Bank Pembangunan Daerah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	75,140	75,140	<i>PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit</i>
PT Bank BTPN Syariah Tbk	73,094	46,943	<i>PT Bank BTPN Syariah Tbk</i>
PT Bank BNI Syariah	30,000	-	<i>PT Bank BNI Syariah</i>
	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	
	<u>1,192,073</u>	<u>716,072</u>	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(24)	-	Less: <i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>1,192,039</u>	<u>716,072</u>	

Dirakal berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai deposito di bank yang dibatasi penggunaannya.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of restricted deposit in banks.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

13. PENJAMINAN ULANG DIBAYAR DI MUKA

13. PREPAID RE-GUARANTEE

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	105,517	33,680	<i>Kredit Usaha Rakyat Consumptive</i>
Produktif	753,314	867,367	<i>Productive</i>
PEN	65,098	77,150	<i>PEN</i>
Suretyship	42,471	-	<i>Suretyship</i>
	<u>3,663</u>	<u>5,057</u>	
	<u>967,263</u>	<u>983,254</u>	

14. ASET PENGEMBALIAN

14. REIMBURSEMENT ASSET

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	210,868	62,801	<i>Kredit Usaha Rakyat Consumptive</i>
Produktif	174,612	197,207	<i>Productive</i>
Suretyship	54,800	55,281	<i>Suretyship</i>
	<u>15,623</u>	<u>15,737</u>	
	<u>456,203</u>	<u>331,036</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

15. BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN

15. DEFERRED ACQUISITION COST

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	296,638	330,399	Kredit Usaha Rakyat Consumptive
Produktif	6,892	8,005	Productive
Suretyship	11,190	10,558	Suretyship
	<u>314,721</u>	<u>348,962</u>	

16. ASET PENJAMINAN ULANG

16. RE-GUARANTEE ASSETS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Entitas anak			Subsidiary
Imbal jasa kafalah ditangguhkan	222,429	162,856	Unearned kafalah fees
IBNR	75,421	81,189	IBNR
Klaim dalam proses penyelesaian	10,607	4,571	Outstanding claims
	<u>308,457</u>	<u>238,616</u>	

17. ASET LAIN-LAIN

17. OTHER ASSETS

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Klaim dalam proses	59,662	67,148	Claim in process
Pinjaman bagi hasil	17,124	17,578	Loans
Obligasi premium	6,696	-	Premium bonds
Lainnya	2,955	26,646	Others
	<u>86,457</u>	<u>111,372</u>	
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(76,312)	(85,859)	Allowance for impairment losses
	<u>10,145</u>	<u>25,513</u>	

Direksi berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset lain-lain.

The Directors believe that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on impairment of other assets.

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

18. UTANG PENJAMINAN ULANG

18. RE-GUARANTEE PAYABLES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak berelasi			Related parties
PT Reasuransi Nasional Indonesia	174,472	50,037	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia	18,319	-	PT Reasuransi Syariah Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	13,835	-	Government of The Republic of Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia	57	735	PT BRI Asuransi Indonesia
PT Asuransi Binagnya Upakara	4	784	PT Asuransi Binagnya Upakara
	<u>206,697</u>	<u>51,556</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Igna Asia	39,182	71,544	PT Igna Asia
PT Freed Dinamika Indonesia	776	2,486	PT Freed Dinamika Indonesia
	<u>39,958</u>	<u>74,040</u>	
	<u>246,645</u>	<u>125,596</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

19. AKRUAL DAN UTANG LAIN-LAIN

19. ACCRUALS AND OTHER PAYABLES

	2020	2019	
IJP belum teridentifikasi	595,123	69,680	Unidentified IJP
Beban pegawai	181,787	177,830	Employee expenses
IJP belum terbit sertifikat	70,808	97,038	Unpublished IJP certificate
Beban operasional	44,997	18,515	Operational expenses
Liabilitas sewa	39,778	-	Lease liabilities
Gebon administrasi dan umum	24,322	59,182	General and administrative expenses
Fee bank	23,357	19,770	Bank fees
Lainnya	53,829	68,714	Others
	<u>1,034,001</u>	<u>510,739</u>	

20. PERPAJAKAN

20. TAXATION

a. Utang pajak

a. Taxes payable

	2020	2019	
Pajak penghasilan badan:			Corporate income tax:
Perusahaan			The Company
PPH Pasal 29			Article 29
Tahun 2020	117,556	-	Year 2020
Tahun 2019	5,867	17,260	Year 2019
	<u>123,423</u>	<u>17,260</u>	
Entitas anak			Subsidiary
PPH Pasal 29			Article 29
Tahun 2020	5,286	-	Year 2020
Tahun 2019	518	518	Year 2019
Tahun 2018	2,118	2,118	Year 2018
	<u>8,922</u>	<u>2,636</u>	
	<u>132,345</u>	<u>19,896</u>	
Pajak lain-lain:			Other taxes:
Perusahaan			The Company
PPn Pasal 21	5,081	5,595	Article 21
Pajak Pertambahan Nilai	1,628	1,811	Value Added Tax
PPn Pasal 23	261	395	Article 23
PPn Pasal 4 (2)	130	527	Article 4 (2)
PPn Pasal 22	23	41	Article 22
PPn Pasal 26	-	36	Article 26
	<u>10,123</u>	<u>9,405</u>	
Entitas anak			Subsidiary
PPH Pasal 21	508	569	Article 21
PPH Pasal 23	83	58	Article 23
PPH Pasal 4 (2)	16	14	Article 4 (2)
	<u>607</u>	<u>641</u>	
	<u>10,732</u>	<u>10,046</u>	
	<u>143,075</u>	<u>29,942</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan

b. Income tax expense

	2020	2019	
Perusahaan			<i>The Company</i>
Kini	137,405	17,447	<i>Current</i>
Tangguhan	8,297	(169,760)	<i>Deferred</i>
	<u>143,702</u>	<u>(152,333)</u>	
Entitas anak			<i>Subsidiary</i>
Kini	8,286	516	<i>Current</i>
Tangguhan	(1,958)	(4,805)	<i>Deferred</i>
	<u>4,327</u>	<u>(4,087)</u>	
Konsolidasian			<i>Consolidated</i>
Kini	143,691	17,965	<i>Current</i>
Tangguhan	4,339	(174,388)	<i>Deferred</i>
	<u>148,029</u>	<u>(156,423)</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan jumlah teoretis beban pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan laba/(rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income tax expense and the theoretical amount of income tax expense is calculated based on profit/(loss) before income tax at the tax rates that apply is as follows:

	2020	2019	
Laba sebelum pajak			<i>Consolidated profit</i>
penghasilan konsolidasian	604,162	42,490	<i>before income tax</i>
Laba sebelum pajak			<i>Profit before income</i>
penghasilan - entitas anak	(49,461)	(13,119)	<i>tax - subsidiary</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	<u>554,701</u>	<u>29,371</u>	<i>Profit before income tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22%(2019: 25%)	122,034	7,349	<i>Taxes calculated at the applicable tax rate of 22% (2019: 25%)</i>
Dampak pajak atas koreksi beda tetap	(110,907)	(18,297)	<i>Tax impact on the correction of permanent differences</i>
Dampak atas perubahan tarif pajak	138,665	-	<i>Impact on changes in tax rate</i>
Akumulasi kerugian fiskal	-	(40,979)	<i>Fiscal losses carry forward</i>
Beban/(manfaat) pajak penghasilan			<i>Income tax expenses/(benefits)</i>
Perusahaan	143,702	(152,333)	<i>The Company</i>
Entitas anak	4,327	(4,087)	<i>Subsidiary</i>
	<u>148,029</u>	<u>(156,423)</u>	

Pajak penghasilan badan dihitung untuk masing-masing entitas sebagai bagian yang terpisah secara hukum.

The corporate income tax is calculated for each entity as a separate legal entity.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

b. Income tax expense (continued)

Taksiran laba kena pajak Perusahaan, dan pajak penghasilan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The Company's estimated taxable income, and income taxes for the years ended 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
Labu sebelum pajak penghasilan konsolidasian	804,162	42,490	Consolidated profit before income tax
Labu sebelum pajak penghasilan - entitas anak	<u>448,451</u>	<u>(13,179)</u>	Profit before income tax - subsidiary
Labu sebelum pajak penghasilan	<u>564,721</u>	<u>29,321</u>	Profit before income tax
Perbedaan waktu:			Temporary differences:
Penyusutan	16,190	31,162	Depreciation
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	78,551	168,436	Allowance for impairment losses
Imbalan kerja jangka panjang	215	9,545	Long-term employee benefits
Atauai jasa produksi	(245)	51,360	Accrued production cost
Provisi kerugian cadangan klaim	(7,415)	744	Estimated claim reserve provision
Kerakan cadangan klaim	<u>514,327</u>	<u>417,672</u>	Increase in reserve claim
	<u>601,672</u>	<u>679,119</u>	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Pendapatan yang dikenakan pajak final dan pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(747,160)	(761,690)	Income subject to final tax and non-taxable income
Beban terkait pendapatan yang dikenakan pajak final - join cost	14,764	22,541	Expenses subject to final tax - join cost
Beban terkait pendapatan yang dikenakan pajak final	4,357	23,742	Expenses subject to final tax
Beban pajak final	107,107	123,176	Final tax expenses
Beban yang tidak dibenarkan	<u>69,145</u>	<u>115,034</u>	Non-deductible expenses
	<u>(531,897)</u>	<u>(477,197)</u>	
Akumulasi kerugian fiskal	-	(161,519)	Accumulated fiscal losses
Labu kena pajak	<u>624,567</u>	<u>69,796</u>	Taxable income
Perusahaan:			The Company:
Beban pajak penghasilan - kini	127,405	17,447	Income tax expenses - current
Diturangi pajak penghasilan dibayar di muka			Less prepaid income taxes:
Pasal 23	(10,549)	-	Article 23
Pasal 25	<u>(9,300)</u>	<u>(182)</u>	Article 25
Liang pajak penghasilan	<u>117,556</u>	<u>17,265</u>	Corporate income tax payable
Entitas anak:			The Subsidiary:
Beban pajak penghasilan - kini	<u>6,286</u>	<u>518</u>	Income tax expenses - current

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada saat Perusahaan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

The corporate income tax calculation for the year ended 31 December 2020 is an estimate made for accounting purposes and is subject to revision when the Company lodges its Annual Corporate Tax Return.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

c. Aset pajak tangguhan

c. Deferred tax assets

	31 Desember/December 2020					31 Desember/ December 2020	
	1 Januari/ January 2020	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/Credited/ (charged) to the profit or loss	Dibebankan/ (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/(charged) to other comprehensive income	Dampak PSAK 74/ Impact of SFAS 71	Dampak penurunan tarif pajak/ Impact on decrement in tax rate		
Perusahaan							The Company
Cadangan kerugian penurunan nilai Provisi atas kerugian klaim Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim	331,290	17,251	-	3,143	(40,132)	311,562	Allowances for impairment losses Provision for claim losses Increase/(decrease) in claim reserves
Kemungkinan yang belum diakuisisi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(3,547)	-	(13,150)	-	-	(16,697)	Unrealized gain on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Liabilitas imbalan kerja	12,760	47	6,500	-	(1,534)	17,695	Employee benefit liabilities
Aset tetap	(1,158)	3,553	-	-	81	2,696	Fixed assets
Jasa produksi	32,673	(54)	-	-	(5,121)	37,498	Bonus
	<u>1,159,171</u>	<u>-32,358</u>	<u>(3,550)</u>	<u>(7,180)</u>	<u>(135,655)</u>	<u>1,138,144</u>	

	31 Desember/December 2020					Saldo akhir/ Ending balance	
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/Credited/ (charged) to the profit or loss	Dibebankan/ (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/(ch arged) to other comprehens ive income	Dampak penurunan tarif pajak/ Impact on changes in tax rate	Saldo awal/ Beginning balance		
Entitas Anak							The Subsidiary
Depresiasi aset tetap	108	(115)	-	(3)	(10)	(10)	Fixed Asset Depreciation
Pembiayaan	13,254	2,840	-	(1,590)	14,504	14,504	Estimated claims
Labi atas imbalan kerja	496	270	55	(60)	751	751	Employee benefit liabilities
Mulawana yang bertang jawab tersedia untuk dijual	(446)	-	(1,509)	54	(1,970)	(1,970)	Fair value on financial asset available for sale
Cadangan bonus	1,528	788	-	(105)	2,193	2,193	Provision for bonus
	<u>16,041</u>	<u>3,763</u>	<u>(1,504)</u>	<u>(1,504)</u>	<u>15,468</u>	<u>15,468</u>	
	<u>1,174,312</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,174,312</u>	

	31 Desember/December 2019				31 Desember/ December 2020	
	1 Januari/ January 2020	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/Credited/ (charged) to the profit or loss	Dibebankan/ (dikreditkan) ke penghasilan komprehensif lain/ Credited/(ch arged) to other comprehens ive income	Dampak penurunan tarif pajak/ Impact on changes in tax rate		
Perusahaan						The Company
Cadangan kerugian penurunan nilai Provisi atas kerugian klaim Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim	293,182	42,108	-	-	335,290	Allowances for impairment losses Provision for claim losses Increase/(decrease) in claim reserves
Kemungkinan yang belum diakuisisi atas aset keuangan tersedia untuk dijual	(7,931)	-	4,381	(2,548)	(6,098)	Unrealized gain on available-for-sale financial assets
Liabilitas imbalan kerja	11,378	2,306	(184)	12,799	12,799	Employee benefit liabilities
Aset tetap	(2,540)	7,792	-	(757)	7,577	Fixed assets
Jasa produksi	25,833	2,640	-	-	28,473	Bonus
	<u>300,920</u>	<u>53,846</u>	<u>(184)</u>	<u>(1,295)</u>	<u>353,287</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. PERPAJAKAN (lanjutan)

20. TAXATION (continued)

c. Aset pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax assets (continued)

	31 Desember/December 2019				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rupi/Credited/ (charged) to the profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain Credited/(cha rged) to other comprehensi ve income	Saldo akhir/ Ending Balance	
Entitas Anak					The Subsidiary
Depresiasi aset tetap	101	(43)	-	109	Fixed Asset Depreciation
Estimasi diam	8.561	4.303	-	13.254	Estimated claims
Liabilitas imbitan kerja	311	197	(12)	496	Employee benefit liabilities
Nilai wajar surat berharga tersedia untuk dijual	1.459	-	(1.899)	119	Fair value on financial asset available for sale
Cadangan bonus	1.480	149	-	1.629	Provision for bonus
	12.911	4.606	(1.911)	15,606	
	<u>896,308</u>			<u>1,274,212</u>	

Direksi berkeyakinan bahwa saldo aset pajak tangguhan di atas dapat digunakan di masa yang akan datang.

Director believes that the deferred tax assets balance above can be recovered.

Pada tanggal 16 Mei 2020, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 yang antara lain menurunkan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020 dan 2021, serta menjadi 20% sejak tahun fiskal 2022. Perusahaan telah memutuskan pengaruh dari perubahan tarif pajak penghasilan badan tersebut pada laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, berupa penurunan aset pajak tangguhan sebesar Rp 140.469.

On 16 May 2020, the Government issued the Republic of Indonesia Law No. 2 Year 2020 which among others reduced the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal years 2020 and 2021, and to 20% since fiscal year 2022 onwards. The Company has recorded the effect of changes in the corporate income tax rate in the financial statements for period ended 31 December 2020, in the form of a decrease in deferred tax assets amounting to Rp 140,469.

d. Administrasi

d. Administration

Berdasarkan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perusahaan menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dapat menelapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terbitnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company submits tax returns on the basis of self-assessment. The Directorate General of Tax ("DGT") may assess or amend taxes within five years of the time the tax becomes due.

21. LIABILITAS KONTRAK JAMINAN KEUANGAN

21. LIABILITIES FOR FINANCIAL GUARANTEE CONTRACTS

	2020	2019	
Kredit Usaha Rakyat	4,907,747	3,509,642	Kredit Usaha Rakyat
Konsumtif	2,309,634	2,537,863	Consumptive
Produktif	400,112	535,408	Productive
PEN	38,047	-	PEN
Suretyship	82,827	83,570	Suretyship
	<u>7,826,367</u>	<u>6,666,283</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

22. PENDAPATAN KOMISI DITANGGUHKAN

22. DEFERRED COMMISSION INCOME

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kredit Usaha Rakyat	18,687	6,052	Kredit Usaha Rakyat
Konsumtif	103,654	107,343	Consumptive
Produktif	11,111	13,553	Productive
PEN	5,435	-	PEN
Suretyship	<u>4,042</u>	<u>3,580</u>	Suretyship
	<u>142,930</u>	<u>130,528</u>	

23. ESTIMASI LIABILITAS KLAIM

23. ESTIMATED CLAIM LIABILITIES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Entitas anak			<i>Subsidiary</i>
Kredit Usaha Rakyat	11,134	10,955	Kredit Usaha Rakyat
Konsumtif	55,586	55,309	Consumptive
PEN	23,493	-	PEN
Produktif	25,979	30,671	Productive
Suretyship	<u>35,765</u>	<u>41,841</u>	Suretyship
	<u>151,957</u>	<u>138,776</u>	

Cadangan klaim pada entitas anak merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

The claim reserves of the subsidiary is the reserve of claims that might occur in the coming years onto the guarantee that has not matured yet.

Cadangan klaim dicatat di laporan posisi keuangan berdasarkan perhitungan aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuarial. Termasuk dalam cadangan klaim adalah klaim dalam proses dan IBNR (Incurred But Not Reported).

Reserves for claims are recorded in the statement of financial position based on actuarial calculations using actuarial assumptions. Included in the reserves for claims are claims in process and IBNR (Incurred But Not Reported).

24. IMBAL JASA KAFALAH DITANGGUHKAN

24. UNEARNED KAFALAH FEES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Entitas Anak			<i>The Subsidiary</i>
Kredit Usaha Rakyat	71,988	26,682	Kredit Usaha Rakyat
Konsumtif	344,011	331,671	Consumptive
Produktif	44,413	59,017	Productive
PEN	129,668	-	PEN
Suretyship	<u>42,719</u>	<u>35,730</u>	Suretyship
	<u>632,799</u>	<u>453,100</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	60,956	34,645	Pension and other postretirement benefits
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>23,973</u>	<u>18,259</u>	Other long-term employee benefits
	<u>84,929</u>	<u>53,104</u>	

Imbalan jangka panjang lainnya dalam bentuk program penghargaan pengabdian gaji dan cuti besar.

Other long-term benefits in the form of dedication rewards program and annual leave.

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Aktuaria dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", sedangkan untuk Entitas Anak, liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuaria Pratugas/Gunayasa, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The liability for employee benefits as at 31 December 2020 and 2019 are calculated by an independent actuary. PT Padma Radya Aktuaria using the "Projected Unit Credit" method, whilst for Subsidiary, the liability for employee benefits as at 31 December 2020 and 2019 are calculated by an independent actuary, PT Jasa Aktuaria Pratugas/Gunayasa, using the "Projected Unit Credit" method, the actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Asumsi finansial:			Financial assumptions:
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	Normal retirement age
Tingkat kenaikan gaji pertahun:			Salary incremental rates:
PT Jaminan Kredit Indonesia	6%	6%	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	7%	8%	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
Tingkat diskonto pertahun			Annual discount rate
PT Jaminan Kredit Indonesia Program Imbalan Pascakerja Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	7%	8%	PT Jaminan Kredit Indonesia Post Employee Benefit
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	6,5%	7,5%	Other Long-Term Employee Benefit
Tingkat pengembalian investasi DPLK	8%	8%	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
PT Jaminan Kredit Indonesia	6%	6%	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	-	-	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Tingkat mortalitas			Mortality rate
PT Jaminan Kredit Indonesia	TMI IV 2019	TMI 2011	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	TMI IV 2019	TMI 2011	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah
Tingkat cacat			Disability rate
PT Jaminan Kredit Indonesia	5%	5%	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	5%	5%	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen, PT Padma Radya Aktuaris dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Sedangkan untuk Entitas Anak Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen PT Jasa Aktuaris Praplasentosa Gunajasa, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit", asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

The liability for employee benefits as at 31 December 2020 and 2019 are calculated by an independent actuary, PT Padma Radya Aktuaris using the "Projected Unit Credit" method. And for Subsidiary's employee benefit liability as at 31 December 2020 and 2019 are calculated by an independent actuary, PT Jasa Aktuaris Praplasentosa Gunajasa, using the "Projected Unit Credit" method, the actuarial valuation was carried out using the following key assumptions: (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Asumsi lainnya: (lanjutan)			Other assumptions: (continued)
Tingkat pengunduran dini PT Jaminan Kredit Indonesia	3%	3%	Turnover rate PT Jaminan Kredit Indonesia
- Usia 20 - 39 tahun	3.0% per tahun/ per year	3.0% per tahun/ per year	20 - 39 years old -
- Usia 40 - 44 tahun	2.0% per tahun/ per year	2.0% per tahun/ per year	40 - 44 years old -
- Usia 45 - 49 tahun	1.0% per tahun/ per year	1.0% per tahun/ per year	45 - 49 years old -
- Usia 50 - 54 tahun	0.0% per tahun/ per year	0.0% per tahun/ per year	50 - 54 years old -
- Usia diatas 54 tahun	0.0% per tahun/ per year	0.0% per tahun/ per year	over 54 years old -
PT Perjanjian Jankrindo Syariah			PT Perjanjian Jankrindo Syariah
- Usia 20 - 39 tahun	5.0% per tahun/ per year	5.0% per tahun/ per year	20 - 39 years old -
- Usia 40 - 44 tahun	3.0% per tahun/ per year	3.0% per tahun/ per year	40 - 44 years old -
- Usia 45 - 49 tahun	2.0% per tahun/ per year	2.0% per tahun/ per year	45 - 49 years old -
- Usia 50 - 54 tahun	1.0% per tahun/ per year	1.0% per tahun/ per year	50 - 54 years old -
- Usia diatas 54 tahun	0.0% per tahun/ per year	0.0% per tahun/ per year	over 54 years old -
Usia pensiun normal	55 tahun	55 tahun	Normal retirement age
Metode penilaian aktuaris	Projected Unit Credit	Projected Unit Credit	Actuarial valuation method
Imbalan pensiun			Pension benefits
Imbalan pensiun yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut.			The pension benefits recognised in the consolidated statement of financial position are as follows:
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Biaya jasa kira	5,438	5,450	Current service cost
Biaya bunga	2,710	2,672	Interest expense
	<u>8,148</u>	<u>8,122</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/DAN SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Mulusi liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Pension benefits (continued)

The movement of post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2020			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations	
Saldo awal tahun	45,657	(11,812)	34,845	Beginning balance
Biaya jasa kini	5,438	-	5,438	Current service cost
Beban/(penghasilan) bunga	3,635	(925)	2,710	Interest expense/(income)
Pengukuran kembali:				Remeasurement
- Imbal hasil atas aset program	-	1,560	1,560	Return on plan assets
- Perubahan asumsi demografi	38	-	38	Change in demographic assumption
- Perubahan asumsi keuangan	5,826	-	5,826	Change in financial assumption
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	12,423	-	12,423	Experience adjustment on obligation
uran	-	(2,288)	(2,288)	Contribution paid
imbalan yang dibayar	(1,739)	1,739	-	Benefit paid
	<u>77,278</u>	<u>(11,706)</u>	<u>60,572</u>	
Kerugian aktuarial	<u>384</u>	<u>-</u>	<u>384</u>	Loss on actuarial
	<u>72,894</u>	<u>(11,706)</u>	<u>60,956</u>	
	2019			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations	
Saldo awal tahun	43,014	(10,598)	32,416	Beginning balance
Biaya jasa kini	5,450	-	5,450	Current service cost
Beban/(penghasilan) bunga	3,567	(695)	2,872	Interest expense/(income)
Pengukuran kembali:				Remeasurement
- Imbal hasil atas aset program	-	827	827	Return on plan assets
- Perubahan asumsi demografi	-	-	-	Change in demographic assumption
- Perubahan asumsi keuangan	1,969	-	1,969	Change in financial assumption
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(5,932)	-	(5,932)	Experience adjustment on obligation
uran	-	(2,510)	(2,510)	Contribution paid
imbalan yang dibayar	(1,364)	1,364	-	Benefit paid
	<u>46,704</u>	<u>(11,812)</u>	<u>34,892</u>	
Keuntungan aktuarial	<u>(47)</u>	<u>-</u>	<u>(47)</u>	Gain on actuarial
	<u>46,657</u>	<u>(11,812)</u>	<u>34,845</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Imbalan pensiun (lanjutan)

Pension benefits (continued)

Jumlah yang diakui pada laba rugi komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in other comprehensive income are as follows.

	2020	2019	
Imbal hasil aset program	1,590	627	Return on plan assets
Perubahan asumsi demografi	38	-	Change in demographic assumption
Perubahan asumsi keuangan	5,826	1,969	Change in financial assumption
Penyesuaian pengalaman kewajiban	12,423	(5,932)	Experience adjustment on obligation
	<u>19,857</u>	<u>(3,336)</u>	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2020 and 2019 are as follows:

	2020	2019	
PT Jaminan Kredit Indonesia	13,89	14,83	PT Jaminan Kredit Indonesia
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	20,78	20,45	PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak didiscountkan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follows:

	2020	2019	
Dalam 1 tahun	4,524	2,260	Within 1 year
Antara 2 sampai 5 tahun	19,239	13,427	Between 2 and 5 years
Antara 6 sampai 10 tahun	68,821	48,852	Between 6 and 10 years
Lebih dari 10 tahun	460,532	397,369	More than 10 years
	<u>553,109</u>	<u>461,908</u>	

Sensitivitas dan kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumption is as follows:

Sensitivitas liabilitas penalaran imbalan pensiun pasti dan pasca kerja lainnya untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit pension and other post employment benefit to changes in the principal actuarial assumptions are as follows:

		31 Desember/December 2020 Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefits obligation			
		Perubahan asumsi/ Changes in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%		66,515	76,770	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji masa depan	1%		80,186	66,052	Future salary increment
		31 Desember/December 2019 Dampak atas kewajiban imbalan pasti/ Impact on defined benefits obligation			
		Perubahan asumsi/ Changes in assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%		42,806	51,244	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji masa depan	1%		51,561	42,341	Future salary increment

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Program imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long term employee benefit program

Liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi konsolidasian terdiri dari:

Post-employment benefit expense recognised in the consolidated statement of profit or loss comprise of:

	2020	2019	
Biaya jasa kini	3,771	3,409	Current services cost
Biaya bunga	1,252	1,093	Interest expense
Pengukuran kembali yang diakui selama tahun berjalan	4,058	293	Remeasurements recognised during the year
	<u>9,111</u>	<u>4,795</u>	

Mutasi liabilitas imbalan pasca kerja di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of post-employment benefits liabilities in the consolidated statement of financial position are as follows:

	2020			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations	
Saldo awal tahun	18,259	-	18,259	Beginning balance
Biaya jasa kini	3,771	-	3,771	Current service cost
Beban bunga	1,252	-	1,251	Interest expense
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Perubahan asumsi demografi	(4)	-	(4)	Change in - demographic assumption
- Perubahan asumsi keuangan	1,298	-	1,298	Change in - financial assumption
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	2,764	-	2,764	Experience adjustment - on obligation
Iuran	-	-	-	Contribution paid
Imbalan yang dibayar	(3,466)	-	(3,466)	Benefit paid
	<u>23,803</u>	<u>-</u>	<u>23,903</u>	
Kerugian aktuarial	70	-	70	Loss on actuarial
	<u>23,973</u>	<u>-</u>	<u>23,973</u>	

	2019			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pasca kerja/ Post-employment benefit obligations	
Saldo awal tahun	13,539	-	13,539	Beginning balance
Biaya jasa kini	3,409	-	3,409	Current service cost
Beban bunga	1,093	-	1,093	Interest expense
Pengukuran kembali:				Remeasurement:
- Perubahan asumsi keuangan	709	-	709	Change in - financial assumption
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(415)	-	(415)	Experience adjustment - on obligation
Imbalan yang dibayar	(76)	-	(76)	Benefit paid
	<u>18,259</u>	<u>-</u>	<u>18,249</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Jaminan Kredit Indonesia	10,70	10,80
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	20,78	20,45

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pensiun yang tidak diskontokan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Dalam 1 tahun	1,538	3,426
Antara 2 sampai 5 tahun	22,672	12,937
Antara 6 sampai 10 tahun	19,806	18,530
Lebih dari 10 tahun	205,524	98,743
	<u>249,538</u>	<u>133,636</u>

Sensitivitas dari kewajiban imbalan pensiun jangka panjang terhadap perubahan asumsi aktuarial utama adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 2020				
Dampak atas kewajiban imbalan pensiun Impact on defined benefits obligation				
	Perubahan asumsi Changes in assumptions	Kenaikan asumsi Increase in assumptions	Penurunan asumsi Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	22.059	25.445	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	25.614	22.483	Future salary increment
31 Desember/December 2019				
Dampak atas kewajiban imbalan pensiun Impact on defined benefits obligation				
	Perubahan asumsi Changes in assumptions	Kenaikan asumsi Increase in assumptions	Penurunan asumsi Decrease in assumptions	
Tingkat diskonto	1%	17,315	19,313	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji di masa depan	1%	19,442	17,194	Future salary increment

25. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES (continued)

Other long term employee benefit program (continued)

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2020 and 2019 are as follow:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Jaminan Kredit Indonesia	10,70	10,80
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	20,78	20,45

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Within 1 year	1,538	3,426
Between 2 and 5 years	22,672	12,937
Between 5 and 10 years	19,806	18,530
More than 10 years	205,524	98,743
	<u>249,538</u>	<u>133,636</u>

The sensitivity of the defined benefit obligation to changes in the weighted principal assumption is as follows:

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

26. EKUITAS

Berikut ini rincian modal ditempatkan dan disetor penuh pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

	31 Desember/December 2020			
	Jenis saham/ Type of shares	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount
Pemerintah Republik Indonesia	Seri A Dwiwarna/ Series A Dwiwarna	1	0.01%	1
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Seri B Series B	7,638,732	99.99%	7,638,732
		<u>7,638,733</u>	<u>100%</u>	<u>7,638,733</u>

Pada tanggal 31 Desember 2019, modal saham ditempatkan dan disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero) Nomor 25 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwa, S.H., M.H., tanggal 24 Februari 2020, badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo berubah menjadi Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0011484.AH.01.01 Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Perubahan ini mengakibatkan susunan saham dari yang sebelumnya tidak terbagi atas saham menjadi sebagai berikut.

1. Sebanyak 1 (satu) lembar saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp 1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
2. Sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp 7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

26. EQUITY

Below are the details of issued and fully paid capital as at 31 December 2020 and 2019:

As at 31 December 2019, share capital is issued and fully paid by The Government of the Republic of Indonesia.

Based on the Deed of Establishment of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero) Number 25 made before Notary Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjarwa, S.H., M.H., dated 24 February 2020, the legal public entity Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo was changed to a Limited Company and has been agreed by Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-0011484.AH.01.01 of 2020 dated 24 February 2020 regarding Ratification of the Establishment of a Limited Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). This change resulted in the composition of the shares from previously not divided into shares to become as follows:

1. Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp 1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;
2. Amounted to 7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp 7,638,732,000,000 (seven billion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) owned by the Republic of Indonesia.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/DAN SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

28. EKUITAS (lanjutan)

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 9 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjawan, S.H., M.H., terjadi pengalihan saham Seri B dari yang sebelumnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia menjadi dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sehingga terjadi perubahan badan hukum dari Persero menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-CC28854.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas serta Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0181758 tanggal 9 April 2020 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0181759 tanggal 9 April 2020. Perubahan ini mengakibatkan susunan saham menjadi sebagai berikut:

1. Sebanyak 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna bernominal Rp 1.365.160 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh enam Rupiah) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia;
2. Sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar Saham Seri B dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000 (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp 7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta Rupiah) dimiliki oleh PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Pembagian dividen

Berdasarkan Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 29 Mei 2019 No S-373/MBU/05/2019 tentang "Persetujuan Laporan Tahun dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Jamkrindo Tahun Buku 2018", pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 39.754 yang berasal dari hasil operasi tahun 2018. Dividen tersebut telah dibayar pada tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan Resolusi Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 15 Juli 2020 No. 6 tentang "Persetujuan Laporan Tahun dan Pengesahan Laporan Keuangan Perum Jamkrindo Tahun Buku 2019", pemegang saham menyetujui pembagian dividen kas sebesar Rp 400.000 yang berasal dari hasil operasi tahun 2019. Dividen tersebut telah dibayar pada tanggal 18 Agustus 2020.

26. EQUITY (lanjutan)

Based on the Deed of Resolution of the Shareholders of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia regarding the Amendment to the Articles of Association Number 2 dated 9 April 2020 which was made before Notary Dr. Isyana Wisnuwardhana Sadjawan, S.H., M.H., there was a transfer of Series B shares from those previously owned by the Republic of Indonesia to be owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) resulting in a change of legal entity from (Persero) to Limited Company. This amendment has been agreed for amendments to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights through the Decree of the Minister of Law and Human Rights Number AHU-CC28854.AH.01.02 of 2020 dated 9 April 2020 regarding Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Company and Letter of Acceptance of Notification of Amendments to Articles of Association Number AHU-AH.01.03-0181758 dated 9 April 2020 and Letter of Acceptance of Notification of Changes in Company Data Number AHU-AH.01.03-0181759 dated 9 April 2020. This change resulted in the composition of the shares to become as follows:

1. Amounted to 1 (one) Series A Dwiwarna Share with a nominal value of Rp 1,365,160 (one million three hundred sixty five thousand one hundred and sixty Rupiah) is owned by the Republic of Indonesia;
2. Amounted to 7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred and thirty two) Series B Shares with each share having a nominal value of Rp 1,000,000 (one million Rupiah), therefore the total is Rp 7,638,732,000,000 (seven billion six hundred thirty eight billion seven hundred thirty two million Rupiah) is owned by PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Dividend distribution

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder on 29 May 2019 No. S-373/MBU/05/2019 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement Perum Jamkrindo Year 2018", the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 39,754 from 2018's operating result. The dividend was paid on 28 June 2019.

Based on the Minutes of Annual General Meeting of Shareholder on 15 July 2020 No. 6 regarding "Approval of Annual Report and Ratification of Financial Statement Perum Jamkrindo Year 2019", the shareholders approved the distribution of cash dividends amounting to Rp 400,000 from 2019's operating result. The dividend was paid on 18 August 2020.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

27. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset bersih entitas anak adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo awal	14	16
Bagian kepentingan non-pengendali atas laba bersih entitas anak	<u>1</u>	<u>(2)</u>
Saldo akhir	<u>15</u>	<u>14</u>

27. NON-CONTROLLING INTEREST

Movements in the non-controlling interests' share in the net asset of the subsidiary are as follows:

Beginning balance
Net income of subsidiary
to non-controlling interests

Ending balance

28. IMBAL JASA PENJAMINAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	1,957,907	1,518,547
Produktif	380,628	401,352
PEN	303,335	301,709
Suretyship	123,965	-
	68,365	97,935
Dikurangi: Restitusi UJ	<u>(7,676)</u>	<u>(5,932)</u>
	<u>2,825,524</u>	<u>2,313,611</u>

28. GUARANTEE FEE INCOME

Kredit Usaha Rakyat
Consumptive
Productive
PEN
Suretyship

Less:
Guarantee restitution

29. IMBAL JASA KAFALAH BRUTO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Entitas Anak		
PEN	184,441	-
Suretyship	115,827	95,320
Konsumtif	101,897	144,974
Kredit Usaha Rakyat	73,759	24,750
Produktif	<u>24,388</u>	<u>55,457</u>
	<u>500,292</u>	<u>331,501</u>

29. GROSS KAFALAH FEE

The Subsidiary

PEN
Suretyship
Consumptive
Kredit Usaha Rakyat
Productive

30. PREMI PENJAMINAN ULANG

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Konsumtif	100,282	226,325
Kredit Usaha Rakyat	130,548	21,307
Produktif	80,643	97,416
PEN	79,476	-
Suretyship	<u>63,338</u>	<u>59,677</u>
	<u>553,297</u>	<u>404,725</u>

30. RE-GUARANTEE PREMIUMS

Consumptive
Kredit Usaha Rakyat
Productive
PEN
Suretyship

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. KENAIKAN JASA KAFALAH YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN			31. INCREASE IN UNEARNED KAFALAH FEE
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Entitas Anak			<i>The Subsidiary</i>
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	36.256	0.263	Kredit Usaha Rakyat Consumptive
Produkif	25.452	55.480	Productive
PEN	(10.517)	19.730	PEN
Suretyship	84.929	-	Suretyship
	<u>4.006</u>	<u>4.842</u>	
	<u>140.126</u>	<u>88.315</u>	
32. BEBAN KLAIM	<u>2020</u>	<u>2019</u>	32. CLAIM EXPENSES
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	1.203.536	1.229.433	Kredit Usaha Rakyat Consumptive
Produkif	485.183	587.463	Productive
PEN	362.865	311.007	PEN
Suretyship	128.659	76.911	Suretyship
	<u>2.180.243</u>	<u>2.204.814</u>	
Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.			Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.
33. KENAIKAN CADANGAN KLAIM	<u>2020</u>	<u>2019</u>	33. INCREASE IN CLAIM RESERVES
Kredit Usaha Rakyat Konsumtif	759.493	181.097	Kredit Usaha Rakyat Consumptive
Produkif	111.372	237.952	Productive
PEN	(266.765)	-	PEN
Suretyship	(130.115)	(7.062)	Suretyship
	<u>55.395</u>	<u>13.085</u>	
	<u>527.230</u>	<u>435.083</u>	
34. KLAIM PENJAMINAN ULANG	<u>2020</u>	<u>2019</u>	34. RE-GUARANTEE CLAIMS
Konsumtif	(193.894)	(277.508)	Consumptive
Suretyship	(53.257)	(27.938)	Suretyship
Produkif	(115.585)	(101.105)	Productive
Kredit Usaha Rakyat	(10.135)	(2.681)	Kredit Usaha Rakyat
	<u>(372.871)</u>	<u>(409.232)</u>	
Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.			Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. PENDAPATAN SUBROGASI - BERSIH

35. SUBROGATION INCOME - NET

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kredit Usaha Rakyat	319,278	327,781	Kredit Usaha Rakyat
Produktif	116,856	97,956	Productive
Konsumtif	54,898	54,453	Consumptive
Suretyship	27,735	24,636	Suretyship
	<u>518,767</u>	<u>509,806</u>	

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

36. PENDAPATAN INVESTASI - BERSIH

36. INVESTMENT INCOME - NET

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pendapatan bunga			Interest income:
Bunga deposito	382,815	486,572	Time deposit interest
Bunga obligasi	199,733	170,000	Bond interest
Pendapatan reksadana	180,236	87,419	Mutual fund income
Pendapatan sukuk	15,704	10,958	Sukuk income
Pendapatan capital gain	14,078	37,528	Income on capital gain
Dividen	6,067	8,360	Dividend
Efek beragun aset	4,929	4,715	Asset backed securities
	<u>803,562</u>	<u>806,552</u>	
Beban investasi	<u>(4,351)</u>	<u>(23,742)</u>	Investment expense
	<u>799,211</u>	<u>782,810</u>	

Lihat Catatan 39 untuk rincian saldo dan transaksi pihak-pihak berelasi.

Refer to Note 39 for details of related parties balances and transactions.

37. BEBAN USAHA

37. OPERATING EXPENSES

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Beban pegawai	452,897	444,202	Employee expenses
Administrasi dan umum	135,555	125,579	General and administrative
Beban cadangan kerugian perurunan nilai	78,551	168,436	Provision for impairment losses
Pemasaran	53,344	82,639	Marketing
Outsourcing	48,594	37,159	Outsourcing
Depresiasi	52,251	24,621	Depreciation
Teknologi, sistem dan pengembangan usaha	28,222	38,702	Technology, system and development
Sewa	17,494	41,220	Rent
Perjalanan dinas	13,549	30,283	Business travel
Kendaraan	13,103	13,376	Transportation
Sosialisasi dan rekonsiliasi	6,882	5,618	Social and reconciliation
Lainnya	5,240	524	Others
	<u>803,670</u>	<u>991,759</u>	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2020
Pendapatan non-operasional	44,334
Pendapatan jasa giro	4,550
Pendapatan jasa administrasi penjaminan	2,178
Pendapatan gedung	57
Beban administrasi BUM	11
	51,130

38. OTHER INCOME

	2019	
	14,566	<i>Non-operational Income</i>
	5,117	<i>Interest Income</i>
	4,925	<i>Administration guarantee income</i>
	-	<i>Building income</i>
	4	<i>Administration expenses BUM</i>
	24,612	

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

BPUI adalah pemegang saham Grup. PT Reasuransi Nasional Indonesia adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan secara tidak langsung oleh BPUI. Grup memiliki transaksi penjaminan ulang dengan PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia

Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang saham utama Grup dan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan. BPUI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) Syariah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Permodalan Nasional Madani Syariah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Danaraksa (Persero), PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waacka Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk,

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows:

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

BPUI is the shareholder of the Group. PT Reasuransi Nasional Indonesia is entity which indirectly owned and controlled by BPUI. The Group has re-guaranteed transaction with PT Reasuransi Nasional Indonesia.

Government of the Republic of Indonesia

Government of Republic of Indonesia is the ultimate shareholder of the Group and State Owned Enterprises and Subsidiaries. BPUI, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank Tabungan Negara Syariah, PT Reasuransi Internasional Indonesia, PT Pegadaian (Persero), PT Reasuransi Syariah Indonesia, PT BRI Asuransi Indonesia, Perum Perumahan Nasional (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asuransi Binagriya Upakara, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero) Syariah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Angkasa Pura I (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT Permodalan Nasional Madani Syariah, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Danaraksa (Persero), PT Semen Gresik (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Waacka Beton Precast Tbk, PT Bukit Asam Tbk,

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/DAN SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (continued)

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT Asuransi Jiwa Al amir, PT AXA Mandiri Financial Service, Bank Indonesia, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana MultiGriya Finansial (Persero), PT Sarana MultiGriya Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT FNM Investment Management, PT PF Presisi Tbk, PT BNI Asas Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, dan PT Barata Indonesia (Persero) adalah entitas yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup memiliki rekening giro, deposito wajib dan berjangka, surat berharga, deposito yang dibatasi penggunaannya, piutang penjaminan, piutang penjaminan ulang, piutang hasil investasi, utang reasuransi, utang klaim, pendapatan imbal jasa penjaminan bruto, imbal jasa kafalah bruto, beban penjaminan ulang, premi penjaminan ulang bruto, beban klaim, klaim penjaminan ulang, beban komisi, pendapatan komisi, pendapatan girah penjaminan ulang, beban girah, pendapatan subrogasi, pendapatan investasi dan beban investasi di entitas-entitas tersebut. Grup memiliki obligasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Grup juga memiliki transaksi investasi pada efek-efek, piutang penjaminan, piutang hasil investasi, utang reasuransi, imbal jasa kafalah bruto, premi penjaminan ulang bruto dan pendapatan investasi dengan Badan Usaha Milik Negara dan Anak Perusahaan.

Manajemen kunci

Manajemen kunci termasuk Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Jumlah kompensasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 46.166 (31 Desember 2019: Rp 39.565).

**39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, PT Pupuk Kujang, PT Mandiri Tunas Finance, PT Asuransi Jiwa Al amir, PT AXA Mandiri Financial Service, Bank Indonesia, Koperasi Warga Jamkrindo Sejahtera, PT Garuda Maintenance Facility Aeroasia Tbk, PT Sarana MultiGriya Finansial (Persero), PT Sarana MultiGriya Infrastruktur (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Asuransi Tugu Pratama Tbk, PT Bank Mandiri Taspen, PT Istaka Karya (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Bahana TCW Investment Management, PT Danareksa (Persero), PT FNM Investment Management, PT PF Presisi Tbk, PT BNI Asas Management, PT Mandiri Manajemen Investasi, and PT Barata Indonesia (Persero) are entities which is owned and controlled by the Government of the Republic of Indonesia. The Group has bank accounts, statutory and time deposits, marketable securities, restricted deposits in banks, guarantee receivables, re-guarantee receivables, investment income receivables, claim payables, gross guarantee income, gross kafalah fees, re-guarantee expenses, gross re-guarantee premiums, gross claims, re-guarantee claims, commission fee expense, commission fee income, re-guarantee commission income, girah expense, subrogation income, investment income and investment expense in those entities. The Group also hold bonds issued by the Government of the Republic of Indonesia. The Group also has transactions in guarantee receivables, investment receivables, re-guarantee payables, gross kafalah fees, re-guarantee expenses, gross re-guarantee premiums, investment income with the State Owned Enterprises and Subsidiaries.

Key management

Key management includes Board of Commissioners and Board of Directors. Total compensation paid to the Group's Board of Commissioners and Board of Directors for the year ended 31 December 2020 amounted to Rp 46,166 (31 December 2019: Rp 39,565).

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

**39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Aset:			Assets:
Kas dan kas di bank			Cash on hand and cash in banks
Bank			Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	35,258	24,070	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	10,989	12,589	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8,136	2,912	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	5,143	2,420	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,713	5,639	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	3,848	1,147	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank BNI Syariah	745	434	PT Bank BNI Syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	251	2,318	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	218	125	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
	<u>68,201</u>	<u>57,605</u>	
Deposito wajib dan berjangka			Statutory and time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,355,487	3,287,514	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,344,950	882,315	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	277,150	134,653	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	152,990	100,334	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	147,144	115,852	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	82,554	149,250	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	36,410	58,115	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	30,423	89,160	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank BNI Syariah	4,930	3,650	PT Bank BNI Syariah
	<u>5,438,030</u>	<u>4,830,970</u>	
Efek-efek			Marketable securities
Obligasi			Bonds
Pemerintah Republik Indonesia	1,430,058	1,432,118	Government of the Republic of Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	300,000	300,000	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	78,437	79,835	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	65,000	51,000	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60,139	69,529	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	50,000	25,000	PT Pegadaian (Persero)
PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)	50,000		PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	35,184	35,051	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	30,331	33,531	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT PP (Persero) Tbk	28,921	26,822	PT PP (Persero) Tbk
PT Kereta Api Indonesia (Persero) Perum Perumnas Nasional (Persero)	25,813	25,382	PT Kereta Api Indonesia (Persero) Perum Perumnas Nasional (Persero)
	25,000	25,000	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

**39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019	
Aset: (lanjutan)			Assets: (continued)
Efektif-eftak (lanjutan)			Marketable securities (continued)
Obligasi (lanjutan)			Bonds (continued)
PT Permodalan Nasional			PT Permodalan Nasional
Madani (Persero)		25,000	Madani (Persero)
PT Mandiri Tunas Finansia	25,000	25,000	PT Mandiri Tunas Finansia
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	20,000	20,000	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	20,000	20,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Danareksa (Persero) Tbk	20,000	20,000	PT Danareksa (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)	15,000	15,000	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	15,192	14,968	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	10,110	10,010	PT Pembangunan Perumahan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	10,000	10,000	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Waskita Beton Precast Tbk	14,878	14,873	PT Waskita Beton Precast Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	10,174	10,170	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Hutama Karya (Persero)	-	12,000	PT Hutama Karya (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	-	10,000	PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
	<u>2,575,756</u>	<u>2,336,022</u>	
Raksadana			Mutual funds
PT Danareksa Investment Management	234,589	234,420	PT Danareksa Investment Management
PT PNM Investment Management	498,831	514,419	PT PNM Investment Management
PT BNI Asset Management	99,281	98,926	PT BNI Asset Management
PT Bahana TCW Investment Management	86,932	81,408	PT Bahana TCW Investment Management
PT Mandiri Manajemen Investasi	5,785	6,203	PT Mandiri Manajemen Investasi
	<u>927,399</u>	<u>935,376</u>	
Saham			Shares
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	24,480	27,701	PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	19,550	19,900	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	14,755	14,280	PT Semen Gresik (Persero) Tbk
PT Bukit Asam (Persero) Tbk	12,364	11,966	PT Bukit Asam (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	11,260	9,840	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	8,987	14,076	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	9,260	10,350	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8,545	10,590	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8,505	10,361	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7,224	8,504	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	6,755	2,923	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	6,510	5,530	PT PP (Persero) Tbk
PT PP Presisi Tbk	6,138	5,617	PT PP Presisi Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	5,760	5,920	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	5,712	6,364	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5,097	12,320	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

**39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019	
Aset: (lanjutan)			Assets: (continued)
Efek-obligasi(lanjutan)			Marketable securities (continued)
Saham (lanjutan)			Shares (continued)
PT Achi Karya (Persero) Tbk	4,590	3,570	PT Achi Karya (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,125	5,410	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya Gedung Tbk	3,840	4,530	PT Wijaya Karya Gedung Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	3,772	3,781	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
	175,038	164,067	
Elek barang aset			Asset backed securities
PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)	13,837	15,334	PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10,270	15,308	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Danareksa (Persero) Tbk	3,632	5,447	PT Danareksa (Persero)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	2,850	7,873	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	30,359	43,361	
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya			Restricted deposits in banks
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500,000	300,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	187,839	87,639	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	159,000	158,300	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	100,000	-	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75,140	75,140	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	70,094	40,841	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Syariah Unit
PT Bank BNI syariah	2,000	2,000	PT Bank BNI syariah
	1,078,873	650,222	
Piutang penjaminan - bersih			Guarantee receivables - net
Pemerintah Republik Indonesia	1,713,475	1,521,520	Government of Republic of Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,068,232	317,178	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	678,089	575,116	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	112,657	61,946	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,176	2,989	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
	3,574,629	2,478,759	
Piutang penjaminan ulang			Re-guarantee receivables
PT Reasuransi Nasional Indonesia	37,384	7,650	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT BHI Asuransi Indonesia	6,992	12,554	PT BHI Asuransi Indonesia
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	2,225	1,107	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
	41,612	21,311	

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019	
Piutang hasil investasi			Investment income receivables
Pemerintah Republik Indonesia	18,632	12,530	Government of Republic of Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	5,539		PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,762	5,957	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,798	2,307	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	704	1,037	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	661	891	PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)	818	239	PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)
PT Bank Tabungan Negara Syariah	534	376	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT PP (Persero) Tbk	457	452	PT PP (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	370	357	PT Mandiri Tunas Finance
PT Bank Rakyat Indonesia Agraria Tbk	364	307	PT Bank Rakyat Indonesia Agraria Tbk
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	351	713	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Waskita Beton Precast Tbk	337	297	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	294	291	PT Pembangunan Perumahan (Persero)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	230	438	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	154	62	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	145	178	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	143	145	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Perum Pembangunan Rumah Nasional	133	133	Perum Pembangunan Rumah Nasional
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	131	79	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	73	64	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	59	392	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Syariah Mandiri	56	91	PT Bank Syariah Mandiri
PT Angkasa Pura II (Persero)	58	71	PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Achi Karya (Persero) Tbk	29	26	PT Achi Karya (Persero) Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	28	29	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	9	215	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT Bank BNI Syariah	6	5	PT Bank BNI Syariah
PT Danareksa Management Investment	-	22,853	PT Danareksa Management Investment
PT Danareksa (Persero)	-	103	PT Danareksa (Persero)
PT PNM Investment Management	-	7,869	PT PNM Investment Management
PT BNI Asset Management	-	1,301	PT BNI Asset Management
PT Bahana TCW Investment Management	-	1,314	PT Bahana TCW Investment Management
PT Bank Mandiri Taspen	-	3	PT Bank Mandiri Taspen
PT Hulera Karya (Persero)	-	3	PT Hulera Karya (Persero)
PT Rajawali Nusantara Indonesia	-	180	PT Rajawali Nusantara Indonesia
	<u>36,638</u>	<u>47,862</u>	
Jumlah aset dengan pihak berelasi	<u>13,843,581</u>	<u>11,592,698</u>	Total assets with related parties
Persentase terhadap jumlah aset	<u>72,92%</u>	<u>69,13%</u>	Percentage of total assets
Liabilitas :			Liabilities:
Utang penjaminan ulang			Re-guaranteed payables
PT Reasuransi Nasional Indonesia	174,472	50,037	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia	18,319	-	PT Reasuransi Syariah Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	13,836	-	Government of Republic of Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia	57	735	PT BRI Asuransi Indonesia
PT Asuransi Binagriya Upakara	4	765	PT Asuransi Binagriya Upakara
	<u>206,687</u>	<u>51,537</u>	
Utang klaim			Claim payables
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1,894	9,580	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut (lanjutan)

	2020	2019
Liabilitas : (lanjutan)		
Utang kecil (lanjutan)		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.205	547
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	717	584
PT Pegadaian (Persero)	376	324
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	85	-
PT Pegadaian (Persero)	-	82
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	744
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	28
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	24
	<u>4.057</u>	<u>12.113</u>
Jumlah liabilitas dengan pihak berelasi	<u>210.744</u>	<u>62.589</u>
Persentase terhadap jumlah liabilitas	<u>2,06%</u>	<u>0,79%</u>
Pendapatan:		
Imbal jasa penjaminan		
Pemerintah Republik Indonesia	1.967.907	1.518.547
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	189.101	87.152
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41.897	14.348
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47.867	25.932
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	76.060	74.306
PT Pegadaian (Persero)	60.590	49.788
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	45.899	68.638
PT Mandiri Tunas Finance	20.853	23.055
PT Pegadaian Syariah (Persero)	17.441	10.024
PT Bank Syariah Mandiri	3.874	4.877
PT Bank Rakyat Indonesia Agronaga Tbk	4.194	2.761
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.030	3.353
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	81	118
PT Bank Tabungan Negara Syariah	4	46
PT Permodalan Nasional Madani syariah	-	8
PT Pupuk Kujang	-	3
	<u>2.468.742</u>	<u>1.884.058</u>
Persentase terhadap jumlah imbal jasa penjaminan	<u>87,27%</u>	<u>81,43%</u>
Pendapatan kafalah:		
Imbal jasa kafalah bruto		
Pemerintah Republik Indonesia	184.442	-
PT Boma Bima Indra (Persero)	707	70
PT Waskita Karya (Persero)	516	-
PT Istaka Karya (Persero)	372	482
PT Barata Indonesia (Persero)	367	34
PT Wijaya Karya Beton Tbk	426	229
Lainnya	285	770
	<u>186.615</u>	<u>1.555</u>
Persentase terhadap jumlah imbal jasa kafalah bruto	<u>32,34%</u>	<u>0,17%</u>

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019
Liabilities: (continued)		
Claims payable (continued)		
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1,205	547
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	717	584
PT Pegadaian (Persero)	376	324
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit	85	-
PT Pegadaian (Persero)	-	82
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	744
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	28
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	24
	<u>4,057</u>	<u>12,113</u>
Total liability with related parties	<u>210,744</u>	<u>62,589</u>
Percentage of total liability	<u>2,06%</u>	<u>0,79%</u>
Income:		
Guarantee fee income		
Government of Republic of Indonesia	1,967,907	1,518,547
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	189,101	87,152
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	41,897	14,348
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	47,867	25,932
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	76,060	74,306
PT Pegadaian (Persero)	60,590	49,788
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	45,899	68,638
PT Mandiri Tunas Finance	20,853	23,055
PT Pegadaian Syariah (Persero)	17,441	10,024
PT Bank Syariah Mandiri	3,874	4,877
PT Bank Rakyat Indonesia Agronaga Tbk	4,194	2,761
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1,030	3,353
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	81	118
PT Bank Tabungan Negara Syariah	4	46
PT Permodalan Nasional Madani syariah	-	8
PT Pupuk Kujang	-	3
	<u>2,468,742</u>	<u>1,884,058</u>
Percentage of total guarantee fee income	<u>87,27%</u>	<u>81,43%</u>
Income:		
Gross kafalah fees		
Government of Republic of Indonesia	184,442	-
PT Boma Bima Indra (Persero)	707	70
PT Waskita Karya (Persero)	516	-
PT Istaka Karya (Persero)	372	482
PT Barata Indonesia (Persero)	367	34
PT Wijaya Karya Beton Tbk	426	229
Others	285	770
	<u>186,615</u>	<u>1,555</u>
Percentage of total gross kafalah income	<u>32,34%</u>	<u>0,17%</u>

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK DAN SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019	
Premi penjaminan ulang			Re-guarantee premiums
PT Reasuransi Nasional Indonesia	300,007	214,572	PT Reasuransi Nasional Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia	40,315	-	Government of Republic of Indonesia
PT Reasuransi Syariah Indonesia	39,182	-	PT Reasuransi Syariah Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	29,492	34,846	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
PT Asuransi Binagriya Upakarya	8,767	8,132	PT Asuransi Binagriya Upakarya
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	3,695	4,488	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
PT BRI Asuransi Indonesia	514	681	PT BRI Asuransi Indonesia
PT AXA Mandiri Financial Services	8	22	PT AXA Mandiri Financial Services
	<u>421,565</u>	<u>262,741</u>	
Persentase terhadap jumlah premi penjaminan ulang	<u>94,17%</u>	<u>92,27%</u>	Percentage of total re-guarantee premiums
Beban klaim			Claim expenses
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	939,116	859,540	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	128,642	164,935	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	123,671	62,522	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111,504	124,803	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	103,913	160,838	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	97,738	58,346	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank Indonesia	41,248	22,725	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Bank of Indonesia
PT Pegadaian Syariah (Persero)	36,263	2,574	PT Pegadaian Syariah (Persero)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	31,862	11,027	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	16,797	28,695	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Mandiri Tuna Finance	3,921	2,893	PT Mandiri Tuna Finance
PT Pupuk Kujang	2,511	38,386	PT Pupuk Kujang
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	2,351	2,351	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
Koperasi Warga Jemberindo Sejahtera	515	515	Koperasi Warga Jemberindo Sejahtera
	<u>208</u>	<u>6</u>	
	<u>1,640,160</u>	<u>1,522,958</u>	
Persentase terhadap jumlah beban klaim	<u>75,23%</u>	<u>69,98%</u>	Percentage of total claim expenses
Klaim penjaminan ulang			Re-guarantee claims
PT Iqra Asia Reinsurance Broker	263,281	341,873	PT Iqra Asia Reinsurance Broker
PT Reasuransi Nasional Indonesia	14,823	42,167	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT BRI Asuransi Indonesia	5,127	9,297	PT BRI Asuransi Indonesia
PT Freed Olanmuka Indonesia	2,342	348	PT Freed Olanmuka Indonesia
	<u>345,573</u>	<u>393,685</u>	
Persentase terhadap jumlah klaim penjaminan ulang	<u>82,69%</u>	<u>98,39%</u>	Percentage of total re-guarantee claim expense

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

**39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019	
Beban komisi:			Commission fee expense:
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	8,828	6,220	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1,349	172	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	37	90	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2	2	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	-	1	PT Bank Syariah Mandiri
	<u>8,214</u>	<u>6,475</u>	
Persentase terhadap jumlah beban komisi	<u>19,27%</u>	<u>21,34%</u>	Percentage of total commission expense
Pendapatan komisi:			Commission fee income:
PT Reasuransi Nasional Indonesia	(26,183)	(22,705)	PT Reasuransi Nasional Indonesia
PT Reasuransi Indonesia Utama	(4,703)	(5,846)	PT Reasuransi Indonesia Utama
PT Asuransi Binagrya Upakara	(1,965)	(1,128)	PT Asuransi Binagrya Upakara
PT BRI Asuransi Indonesia	(78)	(89)	PT BRI Asuransi Indonesia
	<u>(42,104)</u>	<u>(29,678)</u>	
Persentase terhadap jumlah beban komisi	<u>98,75%</u>	<u>98,41%</u>	Percentage of total commission expense
Entitas anak:			Subsidiary:
Pendapatan ujang penjaminan ulang			Re-guarantee ujang income
PT Reasuransi Syariah Indonesia	<u>2,396</u>	<u>-</u>	PT Reasuransi Syariah Indonesia
Persentase terhadap jumlah Pendapatan ujang	<u>92,60%</u>	<u>96,39%</u>	Percentage of total re-guarantee ujang income
Beban ujang			Ujang expense
PT Bank Syariah Mandiri	1,285	889	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk	133	137	PT Bank Negara Indonesia Syariah Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	89	80	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	13	12	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
	<u>1,520</u>	<u>1,118</u>	
Persentase terhadap jumlah beban ujang	<u>4,72%</u>	<u>4,43%</u>	Percentage of total ujang expenses
Pendapatan subrogasi - barang			Subrogation income - net
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	223,897	232,703	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Pegadaian (Persero)	64,108	47,126	PT Pegadaian (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50,475	42,484	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	46,283	43,968	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Mandiri Tunas Finance	19,260	16,539	PT Mandiri Tunas Finance
PT PemdaNasionalMadani	8,838	6,433	PT PemdaNasionalMadani
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7,298	15,563	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	6,125	1,654	PT Bank Syariah Mandiri
PT Pegadaian Syariah (Persero)	4,849	2,135	PT Pegadaian Syariah (Persero)
PT Bank Tabungan Negara Syariah	1,452	690	PT Bank Tabungan Negara Syariah
PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk	812	1,376	PT Garuda Maintenance Facility AeroAsia Tbk

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK DAN SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

**39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)**

Rincian saldo yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019	
Pendapatan subrogasi (lanjutan)			Subrogation income: (continued)
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah	720	274	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
PT Pupuk Kujang	421	-	PT Pupuk Kujang
PT Bank BNI syariah	46	162	PT Bank BNI syariah
PT Bank Rakyat Indonesia Agronaga Tbk	1	-	PT Bank Rakyat Indonesia Agronaga Tbk
	<u>1.188</u>	<u>436</u>	
Persentase terhadap jumlah pendapatan subrogasi	<u>83,76%</u>	<u>61,44%</u>	Persentase of total subrogation income
Pendapatan investasi			Investment income
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	179.138	245.303	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Pemerintah Republik Indonesia	131.292	101.331	Government of Republic of Indonesia
PT PNM Investment Management	87.810	38.378	PT PNM Investment Management
PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk	64.868	55.890	PT Bank Tabungan Negera (Persero) Tbk
PT Danareksa Investment Management	48.830	34.278	PT Danareksa Investment Management
PT Reasuransi Indonesia Utama	26.926	25.748	PT Reasuransi Indonesia Utama
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	18.389	19.903	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Unit Syariah	14.471	9.878	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk - Sharia Unit
PT Bank Rakyat Indonesia Agronaga Tbk	10.340	28.732	PT Bank Rakyat Indonesia Agronaga Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	9.878	8.734	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.138	15.224	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk	8.946	1.763	PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk
PT Bahana TCW Investment Management	6.547	4.664	PT Bahana TCW Investment Management
PT Waskita Karya (Persero)	6.866	7.221	PT Waskita Karya (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5.929	5.881	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)	4.698	1.288	PT Sarana MultiGraha Finansial (Persero)
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	3.484	3.783	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
PT BNI Asset Management Forum Perumahan Nasional (Persero)	3.109	2.186	PT BNI Asset Management Forum Perumahan Nasional (Persero)
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	2.698	2.710	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero)	2.582	2.004	PT Pembangunan Perumahan (Persero)
PT Mandiri Manajemen Investasi	2.454	2.475	PT Mandiri Manajemen Investasi
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)	2.442	320	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	2.259	2.333	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Danareksa (Persero)	2.090	190	PT Danareksa (Persero)
PT Pegadaian (Persero)	2.040	106	PT Pegadaian (Persero)
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	1.926	2.879	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	1.830	2.330	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Waskita Beton Precast Tbk	1.878	814	PT Waskita Beton Precast Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)	1.544	1.570	PT Angkasa Pura I (Persero)
PT Aneka Karya (Persero) Tbk	1.447	1.827	PT Aneka Karya (Persero) Tbk
PT Duet Asam (Persero) Tbk	1.438	226	PT Duet Asam (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk	1.373	2.746	PT PP (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen	909	840	PT Bank Mandiri Taspen
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	890	3.985	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	890	616	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Hulana Karya (Persero)	567	1.143	PT Hulana Karya (Persero)
PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk	402	142	PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk
PT Rajawali Nusantara	276	386	PT Rajawali Nusantara
PT Bank BRI syariah	190	123	PT Bank BRI syariah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	177	109	PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk
PT PP Presisi Tbk	153	473	PT PP Presisi Tbk

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

39. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

Rincian salrin yang signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2020	2019
Pendapatan investasi : (lanjutan)		
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	104	170
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	97	73
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	48	247
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	-	495
	<u>655,473</u>	<u>639,355</u>
Persentase terhadap jumlah Pencapaian investas	<u>81.57%</u>	<u>79.34%</u>
Beban investasi		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	(4,351)	(73,742)
Persentase terhadap Jumlah Beban investasi	<u>100%</u>	<u>100%</u>

39. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

The details of significant balances with related parties as at 31 December 2020 and 2019 were as follows: (continued)

	2020	2019
Investment income: (continued)		
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	170	170
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	73	73
PT Semen Gresik (Persero) Tbk	247	247
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	495	495
	<u>639,355</u>	<u>639,355</u>
Percentage of total investment income	<u>79.34%</u>	<u>79.34%</u>
Investment expense		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	(73,742)	(73,742)
Percentage of total investment expense	<u>100%</u>	<u>100%</u>

40. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN

Risiko utama yang dihadapi Grup dengan kontrak penjaminan adalah kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajibannya. Risiko tersebut dapat dilihat pada besarnya default risk dan tingkat Non-performing financing (NPF) kredit yang dijamin, serta tingkat pengembalian piutang subrogasi. Selain itu, terdapat risiko atas perbedaan antara klaim aktual, pembayaran manfaat dan tanggal klaim dari yang diprediksi sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi, besarnya nilai klaim, nilai klaim yang dibayarkan, dan perkembangan klaim jangka panjang selanjutnya. Oleh karena itu, tujuan Grup adalah untuk memastikan bahwa cadangan cukup dibuat untuk menulupi kewajiban tersebut.

Eksposur risiko yang berkaitan dengan kontrak penjaminan diminimalisir dengan diversifikasi portofolio penjaminan kontrak dan wilayah geografis. Variabilitas risiko juga ditingkatkan dengan risiko seleksi yang bijak dan implementasi pedoman strategi underwriting, serta pengaturan program penjaminan ulang.

Operasional Grup didiversifikasi berdasarkan lini bisnis dan penyebaran geografis risiko. Pendekatan global untuk manajemen risiko memungkinkan Grup melakukan proses identifikasi dan seleksi risiko dalam menjamin kredit dgn exposure risiko yg besar.

40. FINANCIAL GUARANTEE RISK

The principal risk the Group faces under guarantee contracts is the guarantee's failure to fulfill its obligations. This risk can be seen in the amount of default risk and the level of guarantee's non-performing financing (NPF), as well as the rate of return on subrogation receivables. In addition, there is a risk from the difference between actual claims, benefit payments and claim dates from the one predicted previously. This is influenced by the frequency, severity of claims, actual benefits paid and subsequent development of long-term claims. Therefore, the objective of the Group is to ensure that sufficient reserves are made to cover those liabilities.

The risk exposure related to guarantee contracts is mitigated by diversification of guarantee contracts portfolio and geographical areas. The variability of risks is also improved by prudent risks selection and implementation of underwriting strategy guidelines, as well as re-guarantee program arrangements.

The Group's operations are diversified by line of business and the geographic spread of risk. A global approach to risk management allows the Group to underwrite and accept large guarantee accounts.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

Untuk meminimalkan risiko penjaminan, maka pada proses penjaminan kredit dilakukan identifikasi risiko menggunakan 4P, yaitu *Prospect, Productivity, Payment, dan Personality* dan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition dan Collateral*) yang harus diperhatikan. Item yang harus diperhatikan untuk masing-masing aspek tersebut disesuaikan dengan karakteristik kredit yang akan dijamin, dan dijabarkan di dalam sistem dan prosedur penjaminan yang terkait. Hasil dari proses identifikasi risiko kemudian diindaklanjuti dengan penetapan prediksi risiko penjaminan untuk mengetahui besarnya risiko penjaminan. Dalam pelaksanaannya prediksi risiko dapat dilakukan secara kualitatif dan/atau kuantitatif untuk setiap aspek 4P and 5C. Prediksi secara kuantitatif dilakukan dengan sistem scoring. Berdasarkan score ditetapkan prediksi risiko penjaminan masing-masing terjamin atau sekelompok terjamin, atau suatu produk baru.

Selanjutnya, untuk pengambilan keputusan apakah suatu pengajuan penjaminan dapat disetujui atau tidak, dilakukan dalam sebuah rapat komite. Sesuai prinsip kehati-hatian, maka anggota komite tersebut terdiri dari pejabat yang terkait secara langsung dengan kegiatan penjaminan (*risk taker unit*) dan pejabat yang terkait langsung dengan konsekuensi biaya atas potensi risiko (*risk financing unit*). Dengan mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan dua pihak atau lebih dari sisi yang berlainan tersebut, maka diharapkan keputusan menjadi lebih objektif dan potensi risiko karena kesalahan pengambilan keputusan dapat diminimalisasi. Selain digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan penjaminan, hasil analisis risiko yang telah dilakukan juga dijadikan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam melakukan pemantauan terhadap kredit yang sedang berjalan. Untuk kredit yang berisiko tinggi, maka pemantauan terhadap kredit dilakukan secara lebih intensif.

Proses bisnis penjaminan ulang yang dilakukan terkoordinasi oleh Kantor Pusat dilakukan sebagai bentuk transfer risk. Selain itu hal ini juga bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan beban penjaminan ulang. Penjaminan ulang yang digunakan oleh Grup harus memenuhi persyaratan pengalaman di bidang keuangan tertentu dan yang dimasukkan melalui proses rewi keuangan yang ketat agar mendapat persetujuan dari senior manajemen. Akibatnya penjaminan ulang hanya ditempatkan dengan kelompok terjamin hanya dari Grup yang secara finansial paling aman dan berpengalaman dalam industri penjaminan ulang. Pembayaran klaim yang konsisten dan sesuai juga harus dipastikan. Selain kontrol internal, unit operasional Grup dan bidang fungsional akan ditinjau oleh tim audit Grup yang secara teratur melakukan audit operasional.

Exposur Grup terhadap risiko konsentrasi penjaminan ini diatasi dengan beragam portfolio bisnis di berbagai lokasi dan industri.

40. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

To minimise the risk of the guarantee, in the credit guarantee process, risk identification is carried out using the 4Ps, are *Prospect, Productivity, Payment, and Personality* and 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition and Collateral*). The items that must be considered for each of these aspects are adjusted to the characteristics of the credit to be guaranteed, and are described in the related guarantee system and procedures. The results of the risk identification process are then followed up with the determination of the guarantee risk prediction to determine the amount of guarantee risk. In its implementation, risk prediction can be done qualitatively and/or quantitatively for each aspect of the 4Ps. Quantitative prediction is done with a scoring system. Based on the score determined the risk prediction of each guaranteed or a group of guaranteed, or a new product.

Furthermore, to make a decision whether a guarantee application can be approved or not, a committee meeting will be carried out in accordance with the principle of prudence, the committee members consist of officials directly related to the guarantee activity (*risk taker unit*) and officials directly related to the cost consequences of potential risks (*risk financing unit*). With a decision-making mechanism that involves two or more parties from different sides, it is expected that decisions will be more objective and potential risk because decision-making errors can be minimised. Apart from being used to assist the guarantee decision-making process, the results of the risk analysis that have been carried out are also used as a basis for consideration in monitoring ongoing credit. For high-risk credit, credit monitoring is conducted more intensively.

Centrally-coordinated re-guarantee management facilitates appropriate risk transfer and efficient and cost-effective use of external re-guarantee markets. Reinsurers utilised by the Group must fulfil certain financial experience requirements and are put through a stringent financial review process in order to be approved by senior management personnel. As a result of these controls, re-guarantee is placed with a select Company of only the most financially secured and experienced companies in the re-guarantee industry. Consistent approach to reserving practices and the settlement of claims are also ensured. In addition to these internal controls, the Group's operating units and functional areas are subject to review by the corporate audit team that regularly carries out operational audits.

The Group's exposure to concentration of guarantee risk is mitigated by a diverse portfolio of business written across a broad range of locations and industries.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. RISIKO PENJAMINAN KEUANGAN (lanjutan)

ANALISA EKSPOSUR

Pada tahun 2020 dan 2019, risiko penjaminan yang dihadapi oleh Perusahaan diklasifikasikan berdasarkan line of business sebagai berikut:

	2020				
	Beban klaim/ Claim expenses	Klaim penjaminan ulang/ Re-guarantee claims	Kenaikan/ (penurunan) estimasi klaim/ Increase/ (decrease) in estimated claims	Beban klaim - bersih/Claim expenses - net	
Kredit Usaha Rakyat	1.203,538	(10,135)	758,483	1.852,884	Kredit Usaha Rakyat
Konsumtif	485,183	(193,894)	111,372	402,661	Konsumtif
Produktif	362,865	(115,585)	(130,115)	117,165	Produktif
PEN	-	-	(268,765)	(268,765)	PEN
Suretyship	128,658	(53,257)	55,305	130,707	Suretyship
	<u>2.180,243</u>	<u>(372,871)</u>	<u>527,280</u>	<u>2.334,652</u>	
	2019				
	Beban klaim/ Claim expenses	Klaim penjaminan ulang/ Re-guarantee claims	Kenaikan/ (penurunan) estimasi klaim/ Increase/ (decrease) in estimated claims	Beban klaim - bersih/Claim expenses - net	
Kredit Usaha Rakyat	1.229,433	(2,801)	191,097	1.417,849	Kredit Usaha Rakyat
Konsumtif	587,483	(277,809)	237,362	547,937	Konsumtif
Produktif	311,037	(191,105)	(7,052)	202,840	Produktif
Suretyship	76,911	(27,638)	13,085	62,959	Suretyship
	<u>2.204,864</u>	<u>(498,452)</u>	<u>424,492</u>	<u>2.231,465</u>	

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Risiko manajemen modal

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada stakeholders lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

Perusahaan memonitor gearing ratio yang dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.2/POJK.05/2017 tertanggal 11 Januari 2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin. Gearing ratio adalah perbandingan antara total nilai penjaminan yang dilindungi sendiri dengan ekuitas Lembaga Penjamin pada waktu tertentu.

Gearing ratio penjaminan untuk usaha produktif ditetapkan paling tinggi 20 (dua puluh) kali dari ekuitas Perusahaan dan total gearing ratio ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali dari ekuitas Perusahaan.

Perusahaan telah memenuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

40. FINANCIAL GUARANTEE RISK (continued)

EXPOSURE ANALYSIS

In 2020 and 2019, the Group's guarantee risks classified based on class of businesses are as follows:

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

Capital management risk

The Group's objective from managing its capital are to safeguard the Group's going concern ability in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

The Company monitors gearing ratio which is calculated in accordance with Financial Services of Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 2/POJK.05/2017 dated 11 January 2017 regarding Business Operation of Guarantor Institution. Gearing Ratio is the ratio between the total outstanding value of the Guarantee that is borne by itself with the net capital of the Guarantor at a certain time.

Gearing ratio for guarantees for productive businesses are set at a maximum of 20 (twenty) times the equity of the Company and the total gearing ratio is set at no higher than 40 (forty) times of the equity of the Company.

The Company has fulfilled the requirements outlined in the regulation.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan: Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Pandemi virus corona

Covid-19 memberikan dampak kerugian dan diperkirakan akan terus berdampak merugikan bisnis global, kondisi keuangan dan hasil operasional Perusahaan. Dampak akhir akan bergantung pada perkembangan masa depan yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksi termasuk ruang lingkup, tingkat keparahan dan durasi krisis dan keputusan yang diambil oleh pemerintah atas respons terhadap dampak yang ada. Perusahaan akan terus menilai dampak kerugian dan dikarenakan situasi Covid-19 yang terus berkembang, Perusahaan tidak dapat memperkirakan dampak akhir terhadap bisnis, kondisi keuangan dan hasil operasional Perusahaan.

Sampai saat ini, Perusahaan belum dapat memperkirakan sejauh mana dampak dari krisis ini dan akan terus memonitor risiko terhadap bisnis Perusahaan. Perusahaan memiliki eksposur atas risiko instrumen keuangan seperti risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Manajemen risiko keuangan

Aktivitas Perusahaan mengandung berbagai macam risiko keuangan antara lain risiko kredit dan risiko likuiditas. Fungsi utama dan manajemen risiko Perusahaan adalah untuk mengidentifikasi seluruh risiko kunci, mengukur risiko tersebut, mengelola posisi risiko dan menentukan alokasi modal. Perusahaan secara rutin menelaah kebijakan dan sistem manajemen risiko untuk menyesuaikan dengan perubahan di pasar, produk dan praktik pasar terkait.

Tujuan Perusahaan adalah untuk mencapai keseimbangan yang sesuai antara risiko dan tingkat pengembalian dan meminimalisasi potensi efek memburuknya kinerja keuangan Perusahaan. Perusahaan mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian atau laba yang hilang, yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.

Manajemen risiko dilaksanakan dengan kebijakan-kebijakan yang disetujui oleh Direksi. Direksi memberikan kebijakan tertulis atas manajemen risiko secara keseluruhan, termasuk kebijakan tertulis yang mencakup area khusus, seperti risiko nilai tukar, risiko suku bunga, risiko kredit, dan pemanfaatan instrumen keuangan. Risiko yang berasal dari instrumen keuangan yang dihadapi oleh Grup mengandung risiko keuangan, termasuk juga risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas.

(1) Risiko pasar

Perusahaan menghadapi eksposur risiko pasar, yaitu risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga. Risiko pasar berasal dari posisi terbuka yang terkait dengan produk suku bunga, dan ekuitas, yang seluruhnya dipengaruhi oleh pergerakan pasar baik secara spesifik maupun umum, dan perubahan volatilitas tingkat suku bunga pasar atau harga seperti suku bunga, dan produk ekuitas.

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Corona virus pandemic

Covid-19 is adversely affecting and is expected to continue to adversely affect the Company global business, financial condition and results of operations. Its ultimate impact will depend on future developments that are uncertain and cannot be predicted, including the scope, severity and duration of the crisis, and the governmental, legislative and regulatory actions taken and court decisions rendered in response thereto. The Company is continually assessing the impact and due to the evolving and disruptive nature of the Covid-19 crisis, the Company cannot estimate its ultimate impact on the Company business, financial condition and results of operations.

At this time, the Company also cannot estimate the full extent to which the crisis has caused and will continue to cause certain risks to our global business. The Company has exposure to the following risks from financial instruments, such as market risk, credit risk and liquidity risk.

Financial risk management

The Company's activities expose it to a variety of financial risks: credit risk and liquidity risk. The core functions of the Company's risk management are to identify all key risks for the Company, measure these risks, manage the risk positions and determine capital allocations. The Company regularly reviews its risk management policies and systems to reflect changes in market, products and best market practice.

The Company's aim is to achieve an appropriate balance between risk and return and minimise potential adverse effects on the Company's financial performance. The Company defines risk as the possibility of losses or profits foregone, which may be caused by internal or external factors.

Risk management is carried out under policies approved by Directors. The Directors provides written principles for overall risk management, as well as written policies covering specific areas, such as foreign exchange risk, interest rate risk, credit risk, and use of financial instrument. The risk arising from financial instruments to which the Company is exposed are financial risks, which includes market risk, credit risk and liquidity risk.

(1) Market risk

The Company takes on exposure to market risks which is the risk that the fair value of future cash flows of financial instrument will fluctuate because of changes in market prices. Market risk arise from open positions in interest rate, and equity products, all of which are exposed to the general and specific market movements and changes in the level of volatility or market rates or prices such as interest rates, and equity products.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa depan dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan nilai tukar.

Grup tidak mempunyai risiko terhadap nilai tukar mata uang asing karena transaksi utama Grup dilakukan menggunakan mata uang fungsional. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Grup tidak memiliki aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang material. Oleh karena itu perubahan nilai tukar dari mata uang asing terhadap mata uang fungsional pada tanggal pelaporan tidak akan berdampak terhadap laba rugi setelah pajak Grup untuk tahun berjalan.

(ii) Foreign exchange risk

Foreign exchange rate risk is the risk that the fair value or future contractual cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

The Group has no significant foreign exchange risks since the Group's transactions are performed using the Group's functional currency. As at 31 December 2020 and 2019, the Group has no financial assets and financial liabilities denominated in foreign currencies. Therefore, changes in foreign exchange against the Group's functional currency will not impact to the Group's current year profit/loss after tax.

(iii) Risiko tingkat bunga

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko dimana arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Risiko nilai suku bunga wajar adalah risiko dimana nilai dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Perusahaan menghadapi dampak dari fluktuasi suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas. Margin suku bunga bisa meningkat sebagai hasil dari perubahan tersebut namun juga dapat mengurangi kerugian ketika terdapat pergerakan yang tidak diharapkan. Direksi menetapkan batas atas tingkat ketidaksesuaian dan suku bunga repricing dan value at risk yang bisa dilakukan, yang dimonitor secara harian oleh Divisi yang membidangi Investasi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2020, Perusahaan tidak memiliki risiko tingkat suku bunga yang signifikan. Sebagian besar aset keuangan dan liabilitas keuangan Perusahaan tidak dikenakan bunga atau berbunga tetap, sehingga tidak memiliki eksposur yang signifikan terhadap fluktuasi tingkat suku bunga pasar yang berlaku baik atas risiko nilai wajar maupun arus kas.

(iii) Interest rate risk

Cash flow interest rate risk is the risk that the future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. Fair value interest rate risk is the risk that the value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company takes on exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both its fair value and cash flow risks. Interest margins may increase as a result of such changes but may reduce losses in the event that unexpected movements arise. The Directors set limits on the level of mismatch of interest rate repricing and value at risk that may be undertaken, which is monitored daily by Investment Division.

As at 31 December 2020 and 2019, the Company has no significant interest rate risk. Most of the Company's financial assets and financial liabilities are non interest bearing or fixed interest rate, thus no significant exposure to the effects of fluctuations in the prevailing levels of market interest rates on both fair value and cash flow risks.

(iv) Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan. Perusahaan juga menghadapi risiko kredit lainnya yang berasal dari investasi pada efek utang dan reksadana.

(iv) Credit risk

Credit risk is the risk of suffering financial loss, should any of the Company's counterparties fail to fulfill their contractual obligations to the Company. The Company is also exposed to other credit risks arising from investments in debt securities and mutual funds.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iv) Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Credit risk (continued)

Risiko kredit merupakan salah satu risiko terbesar bagi Perusahaan sehingga manajemen melakukan pengelolaan eksposur risiko kredit dengan hati-hati. Manajemen dan pengendalian atas risiko kredit dipusatkan pada tim manajemen risiko kredit yang bertanggung jawab kepada Direksi. Penilaian risiko kredit atas suatu portofolio aset memerlukan estimasi-estimasi seperti kemungkinan terjadinya wanprestasi, rasio kerugian dan korelasi wanprestasi antara lawan transaksi.

Credit risk is the one of the largest risk for the Company's business, therefore management carefully manages its exposure to credit risk. The credit risk management and control are centralised in a credit risk management team which reports to the Directors. The assessment of credit risk of a portfolio of assets entails estimations as to the likelihood of defaults occurring of the associated loss ratios and of default correlations between counterparties.

Cadangan kerugian penurunan nilai yang diakui pada pelaporan keuangan (jika ada) hanyalah kerugian yang telah terjadi pada tanggal laporan keuangan atas posisi keuangan (berdasarkan bukti obyektif atas penurunan nilai).

Impairment allowances (if any) are recognised for financial reporting purposes only for losses that have been incurred at the date of the statement of financial position (based on objective evidence of impairment).

Konsentrasi risiko instrumen keuangan dengan eksposur risiko kredit

Concentration of risks of financial instruments with credit risk exposure

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum Perusahaan terhadap risiko kredit untuk aset keuangan

The following table presents the Company's maximum exposure to credit risk of financial assets:

	2020	2019	
Kas di bank	85,837	81,111	Cash in banks
Deposito wajib dan berjangka	8,087,718	5,681,089	Statutory and time deposits
Eduk-efek	4,461,136	4,342,694	Marketable securities
Piutang imbal jasa penjaminan - bersih	2,547,138	1,479,814	Guarantee receivables - net
Piutang penjaminan utang - bersih	455,927	314,938	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi	35,477	63,181	Investment income receivables
Deposito yang dibatasi penggunaannya	772,606	572,140	Restricted deposit in banks
Aset lain-lain	10,053	25,431	Other assets
	<u>14,436,892</u>	<u>12,557,253</u>	

a) Sektor Industri

a) Industry sectors

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit maksimum Perusahaan pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri.

The following table breaks down the Company's maximum credit exposure at carrying amounts, as categorised by the industry sectors.

	31 Desember/December 2020			
	Pemerintah/ Government	Lembaga keuangan/ Financial institutions	Lain-lain/ Others	Jumlah Total
Kas di bank	-	85,837	-	85,837
Deposito wajib dan berjangka	-	8,087,718	-	8,087,718
Eduk-efek	4,468,898	427,182	2,479,138	7,375,218
Piutang penjaminan - bersih	676,344	1,869,194	-	2,545,538
Piutang penjaminan utang - bersih	-	455,927	-	455,927
Piutang hasil investasi	-	35,477	-	35,477
Deposito yang dibatasi penggunaannya	-	772,606	-	772,606
Aset lain-lain	-	-	10,053	10,053
	<u>5,213,790</u>	<u>10,712,801</u>	<u>2,489,291</u>	<u>18,415,882</u>

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iv) Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Credit risk (continued)

a) Sektor Industri (lanjutan)

a) Industry sectors (continued)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit maksimum Perusahaan pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan sektor industri. (lanjutan)

The following table breaks down the Company's maximum credit exposure at carrying amounts, as categorised by the industry sectors (continued)

	31 Desember/December 2019			Jumlah/ Total	
	Pada/In Government	Lembaga keuangan/ Financial Institution	Lain-lain/ Others		
Kas di bank	-	51,111	-	51,111	Cash in bank
Deposito wajib dan deposito berjangka	-	5,851,400	-	5,851,400	Statutory deposits and time deposits
Bekas/As perjanjian	1,352,756	485,881	2,103,878	4,347,514	Monetable securities
Pinjaman piutang - bersih	451,439	959,379	-	1,410,818	Guaranteed receivables - net
Pinjaman piutang mutiara - bersih	-	314,803	-	314,803	Net guaranteed receivables
Pinjaman hasil investasi	-	52,101	-	52,101	Investment income receivables
Deposito di bank yang dibekali pengjaminannya	-	572,140	-	572,140	Reservated deposits in banks
Aset lain-lain	-	-	25,491	25,491	Other assets
	1,734,196	8,153,644	2,628,269	12,517,253	

Tabel di atas menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Direksi yakin akan kemampuan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum.

The table above represents a worst-case scenario of credit risk exposure to the Group as at 31 December 2020 and 2019. The Directors is confident in its ability to continue to control and sustain minimal exposure of credit risk.

b) Kualitas kredit dari aset keuangan

b) Credit quality of financial assets

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As at 31 December 2020 and 2019, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows:

	31 Desember/December 2020				Jumlah/ Total	
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami perburukan nilai kecuali pada dua sop/Impaired	Telah jatuh tempo atau pada evaluasi penurunan nilai pada dua sop/Not Impaired	Mengalami penurunan nilai Impaired			
Kas di bank	85,837	-	33	85,870	Cash in bank	
Deposito wajib dan tabungan	6,267,716	-	1,107	6,036,629	Statutory and time deposits	
Bekas/As perjanjian	4,401,136	-	312,286	4,496,427	Monetable securities	
Pinjaman piutang perjanjian - bersih	2,547,138	-	1,107,579	3,854,615	Guaranteed receivables - net	
Pinjaman piutang - yang bersih	455,927	-	185,238	659,136	Reservated receivables - net	
Pinjaman hasil investasi	35,477	-	-	35,477	Investment income receivables	
Deposito di bank yang dibekali pengjaminannya	172,606	-	34	172,640	Reservated deposits in banks	
Aset lain-lain	8,628	376	26,239	45,243	Other assets	
	14,436,662	376	1,628,255	16,065,293		
Garansi ke piutang perburukan nilai				(1,415,265)	Allowance for impairment losses	
				14,650,028		

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iv) Risiko kredit (lanjutan)

(iv) Credit risk (continued)

b) Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

b) Credit quality of financial assets (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, eksposur risiko kredit atas aset keuangan terbagi atas: (lanjutan)

As at 31 December 2020 and 2019, credit risk exposure relating to financial assets are divided as follows. (continued)

	31 Desember/December 2019			Jumlah Total	
	Belum jatuh tempo atau telah terpengaruh pemenuhan nilai haknya pada saat diakurasi	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai	Mengalami penurunan nilai		
	Past due but not impaired	Past due but not impaired	Impaired		
Kas di bank	31,11	-	-	31,11	Cash in Banks
Deposito wajib dan deposito berjangka	5.681,093	-	-	5.681,093	Demand deposits and term deposits
Provisi	4.312,084	-	-	4.312,084	Provision expenses
Piutang usaha pada penjaminan - bersih	1.276,814	-	1.268,430	2.953,344	Guarantee receivables - net
Piutang pembayaran manfaat/klaim - bersih	314,803	-	182,373	497,176	Re-guarantee receivables - net
Piutang hasil investasi	85,16	-	-	85,16	Investment income receivables
Deposito di bank yang dibasis pengukurannya	572,140	-	-	572,140	Reservated deposit in banks
Aset lainnya	5,223	20,073	65,859	131,155	Other assets
	<u>12.537,189</u>	<u>20,073</u>	<u>1,326,162</u>	<u>18.883,415</u>	
Cadangan kerugian penurunan nilai				<u>11.325,168</u>	Allowance for impairment losses
				<u>12.657,850</u>	

(v) Risiko likuiditas

(v) Liquidity risk

Risiko likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan Grup memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. Ketidakmampuan Grup memenuhi kewajibannya diakibatkan karena pembayaran manfaat/klaim pemegang polis, kebutuhan kas dari komitmen kontraktual atau arus keluar kas lainnya, seperti utang yang telah jatuh tempo. Arus kas keluar ini akan menghabiskan sumber daya kas yang tersedia untuk aktivitas operasional, perdagangan dan investasi. Dalam suatu keadaan yang ekstrim, kekurangan likuiditas dapat mengarah pada penurunan posisi keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian dan penjualan aset atau ketidakmampuan untuk memenuhi komitmen kepada pemegang polis.

Liquidity risk is the risk that the Group unable to meet its obligations when due as a result of policyholder benefit/claim payment, cash requirements from contractual commitments or other cash outflows, such as debt maturities. Such outflows would deplete available cash resources for operational, trading and investment activities. In extreme circumstances, lack of liquidity could result in reductions in the consolidated financial statement of financial position and sales of assets or inability to fulfil policyholder commitment.

Risiko ini melekat pada semua operasi penjaminan dan bisa dipengaruhi oleh kejadian spesifik secara institusional dan pasar secara luas termasuk, namun tidak terbatas pada, transaksi kredit, aktivitas merger dan akuisisi, guncangan sistemik dan bencana alam. Grup melakukan evaluasi dan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisis serta pengukuran risiko likuiditas berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Risiko Grup.

The risk is inherent in all insurance operations and can be affected by a range of institution-specific and market-wide events including, but not limited to, credit events, merger and acquisition activity, systemic shocks and natural disasters. The Group evaluates and reviews its statements of financial position structure, by analysing and measuring liquidity risk based on its Internal Control Manual and Assets Liabilities Management Guideline from shareholders.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(v) Risiko likuiditas (lanjutan)

(v) Liquidity risk (continued)

Profil jatuh tempo ini didasarkan pada jangka waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo kontrak. Selain itu, jika terdapat kebutuhan akan likuiditas, efek-efek dan aset lancar dapat dijual. Kebijakan Grup sehubungan dengan maturity gap antara aset dan liabilitas moneter adalah menetapkan gap limit yang disesuaikan dengan kemampuan Grup untuk memperoleh likuiditas.

This maturity profile is based on the remaining period to the contractual maturity date. In addition, if the Group encounters liquidity needs, marketable securities and current assets could be liquidated. The Group's policy with regards to the maturity gap between the monetary assets and liabilities is to determine a gap limit which is adjusted to the Group ability to obtain immediate liquidity.

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pada undiscounted cash flows.

The tables below show the remaining contractual maturities of the Group's financial liabilities based on undiscounted cash flows.

31 Desember/December 2020				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year	Tidak mencukupi kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Nilai tercatat/ Carrying value
Utang tetap	4,247	-	-	4,247
Utang jangka panjang yang tidak termasuk jaminan keuangan	246,804	-	-	246,804
Asuransi dan utang lain-lain	1,840,090	5,985,077	-	7,825,167
	<u>1,034,601</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,034,601</u>
	<u>3,125,742</u>	<u>5,985,077</u>	<u>-</u>	<u>9,110,819</u>
				<i>Claim payables Re-guarantee payables Liabilities for financial guarantee contract insured expenses and other payables</i>
31 Desember/December 2019				
	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ Over 1 year	Tidak mencukupi kontrak jatuh tempo/ No contractual maturity	Nilai tercatat/ Carrying value
Utang tetap	4,125	-	-	4,125
Utang jangka panjang yang tidak termasuk jaminan keuangan	125,504	-	-	125,504
Asuransi dan utang lain-lain	2,118,007	4,547,218	-	6,665,225
	<u>5,672,999</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5,672,999</u>
	<u>2,188,526</u>	<u>4,547,218</u>	<u>-</u>	<u>6,735,744</u>
				<i>Claim payables Re-guarantee payables Liabilities for financial guarantee contract insured expenses and other payables</i>

Pada 31 Desember 2020 dan 2019, semua liabilitas Grup tidak mengandung tingkat suku bunga sehingga tidak ada perhitungan arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan.

As at 31 December 2020 and 2019, all the Group's liabilities did not consist of interest rate therefore no disclosure on contractual undiscounted cash flows.

(vi) Manajemen risiko permodalan

(vi) Capital risk management

Tujuan Grup dalam mengelola permodalannya adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat membagikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada stakeholders lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya operasional.

The Group's objectives when managing capital are to safeguard the Group's ability to continue as going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of operation.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri yang sama, Grup memonitor permodalan berdasarkan rasio likuiditas yang dihitung sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SE/OK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Lembaga Penjamin. Jumlah minimum pencapaian rasio likuiditas adalah 120%.

Consistent with others in the industry, the Group monitors capital on the basis of solvency ratio which is calculated in accordance with Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Decree No. 18/SE/OK.05/2018 regarding The Financial Soundness of The Insurance Company and Re-guarantee Company. Minimum solvency ratio is 120%.

Grup telah mematuhi ketentuan dalam peraturan tersebut.

The Group has fulfilled the requirements outline in the regulation.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(vii) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

(vii) Fair value of financial assets and liabilities

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam pinjaman yang diberikan dan piutang dan liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam jangka pendek maka nilai tercatatnya merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya. Nilai wajar untuk aset dan liabilitas yang diukur melalui laporan laba rugi adalah sama dengan dengan nilai tercatatnya.

All financial assets classified as loan and receivables and financial liabilities at amortised cost have a short term maturity, therefore the carrying amount is a reasonable approximate fair value. The fair value of financial assets and liabilities classified at fair value through profit or loss are same with the carrying amount.

- a. Tingkat 1
Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas terkait;
- b. Tingkat 2
Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (unobservable inputs).

- a. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for associated assets or liabilities;
- b. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (such as prices) or indirectly (such as derived from prices); and
- c. Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

Instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar

Financial instruments measured at fair value

Tabel berikut menyajikan aset dan liabilitas keuangan Grup yang diukur sebesar nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The following tables show the Group's financial assets and liabilities that are measured at fair value as at 31 December 2020 and 2019:

	31 Desember/December 2020					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset						Aset
Piutang	3.343.500	237.281	3.106.219	-	3.475.365	Marketable securities
	3.343.500	237.281	3.106.219	-	3.475.365	
	31 Desember/December 2019					
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset						Aset
Piutang	2.384.600	256.523	2.128.077	-	2.644.725	Marketable securities
	2.384.600	256.523	2.128.077	-	2.644.725	

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Financial instruments not measured at fair value

Tabel berikut menyajikan instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

The table below summarises the Group's financial assets and liabilities that are not measured at fair value as at 31 December 2020 and 2019.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(vi) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

(vii) Fair value of financial assets and liabilities

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar (lanjutan)

Financial instruments not measured at fair value (continued)

Tabel berikut menyajikan Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar yang dimiliki oleh Grup pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. (lanjutan)

The table below summarizes the Group's financial assets and liabilities that are not measured at fair value as at 31 December 2020 dan 2019. (continued)

31 Desember/December 2020						
	Nilai wajar/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	65,631	65,631	-	-	65,631	Cash on hand and cash in bank
Deposito wajib dan deposito berjangka	5,067,718	5,067,718	-	-	5,067,718	Statutory deposits and time deposits
Cek-bank	1,011,366	-	711,323	300,043	1,011,366	Bankable deposits
Piutang modal, non diperdagangkan - bank	2,247,138	-	-	2,527,138	2,247,138	Government receivables - not negotiable mortgages - not investment loans receivable
Piutang perjanjian utang - bank	475,997	-	-	455,997	455,997	Regulated mortgages - not investment loans receivable
Piutang hasil investasi	35,437	-	-	35,437	35,437	
Deposito di bank yang dijamin di bawah pengawasan	772,606	772,606	-	-	772,606	Insured deposits in banks
Aset lainnya	10,532	-	-	10,532	10,532	Others
	12,248,312	5,226,361	711,323	3,308,228	12,248,312	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang modal	3,287	-	-	3,287	3,287	Capital liabilities
Utang perjanjian utang	205,114	-	-	205,114	205,114	Regulated mortgages
Liabilitas umum lainnya	7,808,251	-	-	8,226,287	7,808,251	Liabilities for financial guarantee contracts
Akumulasi utang lainnya	588,558	-	-	588,226	588,558	Accumulated expenses and other payables
	9,024,324	-	-	9,024,324	9,024,324	
31 Desember/December 2019						
	Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan						Financial assets
Kas dan setara kas	81,111	81,111	-	-	81,111	Cash on hand and cash in bank
Deposito wajib dan deposito berjangka	5,661,299	5,661,299	-	-	5,661,299	Statutory deposits and time deposits
Cek-bank	1,060,858	-	1,693,268	300,000	1,960,258	Bankable deposits
Piutang modal, non diperdagangkan - bank	1,478,814	-	-	1,475,814	1,478,814	Government receivables - not negotiable mortgages - not investment loans receivable
Piutang perjanjian utang - bank	314,203	-	-	314,203	314,203	Regulated mortgages - not investment loans receivable
Piutang hasil investasi	68,191	-	-	68,191	68,191	
Deposito di bank yang dijamin di bawah pengawasan	572,143	572,143	-	-	572,143	Insured deposits in banks
Aset lainnya	26,431	-	-	26,431	26,431	Others
	10,126,312	6,224,390	1,693,268	2,483,209	10,126,312	
Liabilitas keuangan						Financial liabilities
Utang modal	12,800	-	-	12,800	12,800	Capital liabilities
Utang perjanjian utang	54,272	-	-	91,712	54,272	Regulated mortgages
Liabilitas umum lainnya	8,046,205	-	-	8,368,286	8,046,205	Liabilities for financial guarantee contracts
Akumulasi utang lainnya	485,981	-	-	485,981	485,981	Accumulated expenses and other payables
	7,254,014	-	-	7,254,014	7,254,014	

Semua aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan pinjaman yang diberikan dan piutang serta liabilitas keuangan yang diukur melalui biaya yang diamortisasi mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Aset keuangan yang diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo dan aset yang bukan merupakan aset keuangan mempunyai jatuh tempo dalam kurun waktu lebih dari 12 bulan yang bervariasi sesuai dengan jatuh tempo aset tersebut.

All financial assets classified as financial assets at fair value through profit or loss, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and loans and receivables and financial liabilities at amortised cost have maturities of less than or equals 12 months. Financial assets classified into held-to-maturity financial assets and assets which are not financial assets have maturities of more than 12 months which vary according to the maturity of the asset.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

42. PERIKATAN PENTING

Pada tahun 2021, terdapat perikatan antara Perusahaan dengan pihak terkait sebagai berikut:

1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah Untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional No. PRJ-80/PPR/2021-06/PKS/Non-OP/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Perusahaan memberikan penjaminan Program PEN dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
2. Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) No.80/PPK/DEP.2/IV/2021-11/PKS/Non-OP/IV/2021 tanggal 28 April 2021 yang menerangkan bahwa Perusahaan melakukan kegiatan pomboran penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

Pada tahun 2021 terdapat perikatan antara Perusahaan dengan Bank BUMN sebagai berikut.

1. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tentang Addendum I (Pertama) Penjaminan Pinjaman KUR No.14/PKS/OP-01/III/2021-CEO.MDA/PKS.010/2021 tanggal 09 Maret 2021 yang menerangkan bahwa Perusahaan melakukan kegiatan pemberian penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari PT Bank Mandiri (persero) Tbk.

Pada tahun 2021 terdapat perikatan antara Perusahaan dengan Penjaminan ulang sebagai berikut:

1. PT Reasuransi Nasional Indonesia tentang Perlanggungan Ulang (Reasuransi) Produk Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) No.05/PKS/Non-OP/II/2021-17/DIR/NR/II/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang menerangkan bahwa Perusahaan melakukan kegiatan pemberian penjaminan kredit kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mendapatkan Perlanggungan Ulang (Reasuransi) Produk Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

42. SIGNIFICANT AGREEMENT

In 2021, there were engagements between the Company and related parties as follows:

1. *The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia regarding the implementation of Government Guarantees for the National Economic Recovery Program No. PRJ-80/PPR/2021-06/PKS/Non-OP/III/2021 dated 2 March 2021 which explains that the Company provides guarantees for the PEN Program in in order to implement the Government Regulation regarding the implementation of the National Economic Recovery Program.*
2. *The Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Kredit Usaha Rakyat Guarantee (KUR) No.80/PPK/DEP.2/IV/2021-11/PKS/Non-OP/IV/2021 28 dated April 2021 which explains that the Company conduct guarantee activities credit to micro, small, medium enterprises and cooperatives.*

In 2021, there were engagements between Perusahaan with state-owned banks as follows:

1. *PT Bank Mandiri (Persero) Tbk regarding Addendum of Loan's KUR Guarantee No.14/PKS/OP-01/III/2021-CEO.MDA/PKS.010/2021 dated 9 March 2021 which explains that the Company conducts activities to provide guarantees for Kredit Usaha Rakyat (KUR) from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.*

In 2021, there were engagements between the Company with re-insurance companies as follows:

1. *PT Reasuransi Nasional Indonesia concerning Reinsurance (Reinsurance) for People's Business Credit Guarantee Products (KUR) No.05/PKS/Non-OP/II/2021-17/DIR/NR/II/2021 dated 11 February 2021 which explains that the Company carries out activities of providing credit guarantees to micro, small, medium enterprises and cooperatives to obtain Reinsurance (Reinsurance) for Kredit Usaha Rakyat Guarantee Products (KUR).*

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

43. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN 73

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.0, Grup telah menerapkan PSAK 71 dan 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

43. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 71 AND 73

As described in Note 2.0, the Group has adopted SFAS 71 and 73 as at 1 January 2020, the effect of this transition to SFAS 71 and 73 has had on these consolidated financial statements as at 1 January 2020 are as follows:

		Saldo sebelum penerapan PSAK 71 & 73 Balance before adoption of SFAS 71 & 73	Dampak penerapan PSAK 71/ Impact on implementation of SFAS 71	Dampak penerapan PSAK 73/ Impact on implementation of SFAS 73	Saldo setelah penerapan PSAK 71 & 73 Balance after adoption of SFAS 71 & 73	
	Catatan/ Notes					
ASET						
Kas dan kas di bank	5	85,614	(26)	-	85,588	Cash on hand and cash in banks
Deposito wadib dan berjangka	6	6,178,594	41,330	-	6,177,274	Savings and time deposits
Blok saham	7	4,300,896	34,891	-	4,338,977	Marketable securities
Piutang modal jasa penjaminan - berisk	8	1,486,072	-	-	1,486,072	Guarantee receivables - net
Piutang pemerintah uang - berisk	9	316,290	-	-	316,290	Government receivables - net
Piutang hasil investasi	10	66,050	(85,520)	-	30,530	Investment income receivables
Biaya dibayar dimuka	11	32,807	-	(18,447)	14,360	Prepaid expenses
Aset tetap - berisk	11	208,588	-	64,302	271,118	Fixed assets - net
Aset takberwujud	12	40,141	-	-	40,141	Intangible assets - net
Deposito di bank yang dibatasi penggunaannya	12	716,072	(35)	-	716,037	Restricted deposits in bank
Penarikan uang ditahan dimuka	13	900,294	-	-	900,294	Prepaid re-guarantee
Aset penjabatan	14	331,038	(7,370)	-	323,668	Retirement assets
Biaya akuisisi langgahan	15	345,062	-	-	348,062	Deferred acquisition cost
Aset penjaminan uang	16	238,616	-	-	238,616	Re-guarantee assets
Aset pihak langgahan	20a	1,174,212	(7,880)	-	1,166,332	Deferred fee assets
Aset lain-lain	17	84,067	-	-	84,067	Other assets - net
JUMLAH ASET		16,770,268	(16,227)	46,005	16,800,077	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS						
LIABILITAS						
Utang lain	18	14,124	-	-	14,124	Claim payables
Utang penjaminan uang	18	125,568	-	-	125,568	Re-guarantee payables
Akumulasi utang lain-lain	19	510,738	-	46,085	556,824	Accrual and other payables
Utang pajak	20a	29,847	-	-	28,942	Tax payable
Labitas kontrak jaminan tanggungan	21	6,686,265	(49,487)	-	6,636,788	Liabilities for branch/guarantee contracts
Pendapatan tanpa ditanggung	22	170,570	-	-	130,528	Deferred
Ekstensi labitas lain	23	135,728	-	-	138,778	Guaranteed claim liabilities
Imbal jasa kebawah ditanggung	24	423,100	-	-	423,100	Unearned liability fees
Labitas imbalan kerja	25	53,168	-	-	53,168	Employee benefit liabilities
JUMLAH LIABILITAS		8,982,153	(49,487)	46,085	8,978,812	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS						
Modal ditempatkan dan di bayar penuh	26	7,638,733	-	-	7,638,733	Issued and fully paid-up capital
Pengukuran kembali imbalan pasca kerja		(13,928)	-	-	(13,928)	Re-measurements of post-employment benefits
Keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi atas aset berisiko yang diukur pada nilai wajar melalui perdagangan komersial lain, setelah pajak		(200,060)	51,462	-	(178,598)	Unrealized gain/(loss) on marketable securities measured at fair value through other comprehensive income, after tax
Salah laba		1,384,118	(22,272)	-	1,381,846	Reserve earnings
Keperincian non-pengendali	27	14	-	-	14	Non-controlling interest
JUMLAH EKUITAS		8,628,025	32,190	-	8,710,265	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		16,770,268	(16,227)	-	16,795,261	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**
31 DESEMBER 2020
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**
31 DECEMBER 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Undang-Undang Cipta Kerja

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundangkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja. Grup menilai pada umumnya, peraturan pelaksana tersebut tidak akan memiliki dampak buruk terhadap bisnis dan operasional Grup.

Pada saat laporan keuangan konsolidasian ini diotorisasi, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Grup.

Perubahan anggaran dasar

Pada 10 Februari 2021, terdapat perubahan Anggaran Dasar Perseroan dengan Akta Notaris Hadijah, S.H., No. 13 mengenai perubahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Maret 2021 melalui surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0175918. Berikut adalah perubahan atas modal dasar, modal ditempatkan dan disetor dan kepemilikan saham:

	2021	2020	
Modal ditempatkan dan disetor	10.638.732	7.638.732	Issued and fully paid capital
10 Februari/February 2021			
Pemegang saham	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Total issued and fully paid shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Total
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Pemerintah Republik Indonesia	10.638.732 <u>1</u>	99,99% <u>0,01%</u>	10.638.732 <u>1</u>
	10.638.732	100%	10.638.732

Perubahan susunan dewan direksi

Pada tanggal 22 Maret 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Direksi Perusahaan berdasarkan Keputusan Kementerian BUMN No. SK-93/MBU/03/2021 - No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/03/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan dan telah memenuhi uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-3020/NB.111/2021.

44. SUBSEQUENT EVENTS

Omnibus Law

In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Omnibus Law. The Group assessed that generally there is no potential adverse impact of the Law to the Group's business and operation.

As at the authorization date of this consolidated financial statement, the Group is still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Omnibus Law, as well as the impact on the Group's consolidated financial statements.

The amendment of articles of association

On 10 Februari 2021, there was an amendment to the Company's Articles of Association, notarized by Notarial Deed No. 13 by Hadijah, S.H., regarding the change in authorized capital, issued and fully paid capital, and share ownership. The amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decree No. AHU-AH.01.03-0175918 dated 19 March 2021. Below are the changes of authorized capital, issued and fully paid capital and shareholder ownership:

Changes of board of directors

On 22 March 2021, there are changes in the composition of the Company's Board of Directors based on Decree of the Ministry of State Owned Enterprises No. SK-93/MBU/03/2021 - No 03/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/03/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of the the Company and has met the fit and proper test by the Indonesian Financial Services Authority with No. S-3020/NB.111/2021.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

	<u>22 Maret/ March 2021</u>
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Putra Wahju Setyawan Suharsita
Direktur Bisnis Penjaminan	
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wicnuwarman
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia, Umum dan Kepeluhan	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	Rusdonobaru

Pada tanggal 18 Januari 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-19/MBU/01/2021 - No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/II/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Pada tanggal 2 Juni 2021, terdapat perubahan susunan Dewan Komisaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-182/MBU/06/2021 dan 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Berdasarkan salinan keputusan di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perusahaan menjadi sebagai berikut:

	<u>2 Juni/ June 2021</u>
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Eri Mulyanto
Komisaris	Hening Aius
Komisaris	Desty Ariani
Komisaris	Ar. Wahyuni
Komisaris	Muhammad Muchlas Row

Peralihan Unit Usaha Syariah

Sesuai dengan program kerja dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Perusahaan menutup kegiatan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan cara mengalihkan seluruh portofolio penjaminan syariah dari UUS ke anak perusahaan yaitu PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Peralihan portofolio penjaminan syariah ke anak perusahaan telah dilaksanakan pada 30 September 2021. Sampai dengan tanggal terbitnya laporan keuangan konsolidasian, perjanjian pengalihan portofolio belum diaktakan.

44. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

	<u>31 Desember/ December 2020</u>	
		Board of Directors
Putra Wahju Setyawan	Putra Wahju Setyawan	President Director
Kadar Wicnuwarman	Kadar Wicnuwarman	Business Guarantee Director
		Operational and Network Director
Kadar Wicnuwarman	Kadar Wicnuwarman	Director of Human Resources Management, General Affair and Compliance
Sulis Usdoko	Sulis Usdoko	Finance, Investment and Risk Management Director
I. Rusdonobaru	I. Rusdonobaru	

On 18 January 2021, there are changes in the composition of the Company's Board of Commissioner based on Decree of the Ministry of State Owned Enterprises No. SK-19/MBU/01/2021 - No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/II/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioner of the Company.

On 2 June 2021, there are changes in the composition of the Company's Board of Commissioner based on Decree of the Ministry of State Owned Enterprises No. SK-182/MBU/06/2021 dan 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPU/VI/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioner of the Company.

Based on a copy of the decree above, the composition of the Company's Board of Commissioner is as follows:

	<u>31 Desember/ December 2020</u>	
		Board of Commissioners
Eri Mulyanto	Eri Mulyanto	President Commissioner
Dah Natalisa	Dah Natalisa	Commissioner
Noor Ida Khomsiyat	Noor Ida Khomsiyat	Commissioner
Ar. Wahyuni	Ar. Wahyuni	Commissioner
Muhammad Muchlas Row	Muhammad Muchlas Row	Commissioner

Disposal of Sharia Business Unit

In accordance with the work program in the Company's Long Term Plan, the Company disposed the Sharia Business Unit (UUS) by transferring the entire sharia guarantee portfolio from UUS to its subsidiary, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. The transfer of the sharia guarantee portfolio to the subsidiary has been carried out on 30 September 2021. Until the issuance of this consolidated financial statements, portfolio transfer agreement is not yet notarised.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**44. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(lanjutan)**

Penutupan Unit Usaha Syariah (lanjutan)

sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2021, pada September 2021, Perusahaan telah melakukan penyertaan modal sebesar Rp 155.133.192.192 kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam rangka penutupan kegiatan UUS dimaksud untuk mempertahankan *gearing ratio* PT Penjaminan Jamkrindo Syariah pada kondisi yang sehat sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyertaan modal kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dimaksud telah mendapat persetujuan para pemegang saham. Saat ini proses penutupan Unit Usaha Syariah dalam tahap pengajuan pencabutan ijin ke Otoritas Jasa Keuangan.

**45. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berkala, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

- PSAK 112 "Akuntansi wakaf";
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi bisnis";
- Amandemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amandemen PSAK 55: "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran";
- Amandemen PSAK 60: "Instrumen keuangan: Pengungkapan";
- Amandemen PSAK 62: "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 73: "Sewa tentang Reformasi";
- Amandemen PSAK No. 110 "Akuntansi Sukuk";
- Amandemen PSAK No. 111 "Akuntansi Wa'ad";
- Penyesuaian 2021 PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan";
- Penyesuaian 2021 PSAK 13 "Properti Investasi";
- Penyesuaian 2021 PSAK 48 "Penurunan Nilai Aset";
- Penyesuaian 2021 PSAK 66: "Pengaturan Bersama";
- Penyesuaian 2021 ISAK 16: "Pajak Jasa";

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 dan penerapannya diperbolehkan.

44. SUBSEQUENT EVENTS (continued)

Disposal of Sharia Business Unit (continued)

In accordance with the Company's Working Budget Plan (RKAP) 2021, in September 2021, the Company has made a capital participation of Rp 155,133,192,192 to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in regards of disposal UUS in order to maintain the *gearing ratio* of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah in a healthy condition in accordance with the Indonesian Financial Services Authority's regulation. The share participation in PT Penjaminan Jamkrindo Syariah has been approved by the shareholders. Currently, the process of disposal of the Sharia Business Unit is in the process of filing for the license revocation to the Indonesian Financial Services Authority.

45. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2020 are as follows:

- SFAS 112 "Accounting for endowments";
- Amendment of SFAS 22 "Business combination";
- Amendment of SFAS 71: "Financial instrument";
- Amendment of SFAS 55: "Financial instrument: Recognition and measurement";
- Amendment of SFAS 60: "Financial instrument: Disclosure";
- Amandemen SFAS 62: "Insurance Contract";
- Amandemen SFAS 73: "Interest Rate Benchmark Reform Phase 2";
- Amendment Revision of SFAS 110: "Sukuk Accounting";
- Amendment Revision of SFAS 111: "Wa'ad Accounting";
- Annual improvement 2021 SFAS 1: "Presentation of financial statement";
- Annual improvement 2021 SFAS 13: "Investment properties";
- Annual improvement 2021 SFAS 48: "Impairment of Assets";
- Annual improvement 2021 ISAK 66: "Joint arrangement";
- Annual improvement 2021 ISAK 16: "Service concession arrangement";

The above standards will be effective on 1 January 2021 and early adoption is permitted.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS
31 DECEMBER 2020**
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**45. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN
NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF (lanjutan)**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI") telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut. (lanjutan)

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi, dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- PSAK 69 (Penyesuaian 2020) "Agrikultur";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";
- Penyesuaian tahunan 2020 PSAK 71 "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 73 "Konsesi Sewa terkait COVID-19 setelah 30 Juni 2021"

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperbolehkan.

- Amendemen PSAK 1: "Pernyataan Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas"
- Amendemen PSAK 16: "Aset Tetap Hasil sebelum penggunaan yang diilensikan"
- Revisi PSAK 107: "Akuntansi Ijarah"

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2023 dan penerapan dini diperbolehkan.

- PSAK 74 "Kontrak Asuransi"
- SAK Entitas Privat

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2025 dan penerapan dini diperbolehkan.

46. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN

Informasi berikut pada halaman 6/1 sampai dengan 6/6 adalah informasi keuangan tambahan PT Jaminan Kredit Indonesia, entitas induk saja, yang menyajikan penyertaan Perusahaan pada Anak Perusahaan berdasarkan metode ekuitas.

**45. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT YET
EFFECTIVE (continued)**

Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2020 are as follows (continued)

- Amendment of SFAS 22: "Business combination for reference to conceptual framework";
- Amendment of SFAS 57 "Provision, contingent liabilities, and contingent assets related to onerous contracts - Cost of fulfilling the contracts";
- SFAS 69 "Agriculture";
- Amendment of SFAS 73: "Lease";
- Annual adjustment 2020 SFAS 71 "Financial Instruments";
- Amendment SFAS 73 - Covid-19 related lease concession beyond 30 June 2021

The above standards will be effective on 1 January 2022 and early adoption is permitted.

- Amendment of SFAS No. 1 "Presentation of financial statement" regarding classification of liabilities"
- Amendment of SFAS 16 "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use.
- Revision of SFAS 107. (Ijarah Accounting)

The above standards will be effective on 1 January 2023 and early adoption is permitted.

- SFAS 74 "Insurance Contracts"
- SAK Entitas Privat

The above standards will be effective on 1 January 2025 and early adoption is permitted.

46. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION

The following supplementary financial information of PT Jaminan Kredit Indonesia, the parent company only, on page 6/1 to page 6/6 which presents the Company's investment in Subsidiary under the equity method.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/December</u>		<u>31 Desember/ December 2016</u>	<u>1 Januari/ January 2018</u>	
	2020	2019			
ASET					ASSETS
Kas dan kas di bank	85.837	81.111	196.838		Cash on hand and cash in banks
Deposito awal dan berjangka	8.087.718	5.881.068	5.743.132		Statutory and time deposits
Efektif-efektif	1.451.136	1.012.564	3.831.248		Marketable securities
Pinjaman imbal jasa penjaminan - bersih	2.547.138	1.876.814	1.290.811		Guarantee receivables net
Pinjaman penjaminan utang - bersih	455.927	314.903	270.355		Re-guarantee receivables - net
Pinjaman hasil investasi	35.477	61.161	47.355		Investment income receivables
Biaya dibayar dimuka	15.033	30.834	25.905		Prepaid expenses
Investasi pada entitas asosiasi	549.988	474.988	290.988		Investment in associates
Aset tetap - bersih	251.382	203.566	185.373		Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	39.418	30.390	-		Intangible assets - net
Deposito di bank yang diakasi penggunaannya	772.606	572.140	594.143		Deposited (depos) to banks
Penjaminan utang dibayar dimuka	857.283	983.254	867.583		Prepaid re-guarantee
Aset pengembalian	456.203	331.086	70.814		Reimbursement asset
Biaya akuisisi tangguhan	238.597	281.506	271.732		Deferred acquisition cost
Aset pajak tangguhan	1.136.144	1.159.171	985.791		Deferred tax assets
Aset lain-lain	10.051	25.411	120.359		Other assets
JUMLAH ASET	28.022.940	16.082.000	14.641.493		TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang lain	3.287	-2.500	81.744		Claim payables
Utang penjaminan utang	205.114	84.272	113.284		Re-guarantee payables
Akumulasi utang lain-lain	889.568	480.051	484.721		Accruals and other payables
Utang pajak	133.518	28.545	6.791		Taxes payable
Liabilitas kontrak jaminan keuangan	1.806.387	8.686.388	3.484.470		Liabilities for financial guarantee contracts
Pendapatan komisi ditangguhkan	107.087	104.872	76.018		Deferred commission income
Liabilitas masa arifan	81.324	51.118	46.710		Employee benefits liabilities
JUMLAH LIABILITAS	4.365.265	7.430.674	6.254.238		TOTAL LIABILITIES

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 2020	31 Desember/ December 2019 ¹⁾	31 Desember/ December 2018 1 Januari/ January 2019 ¹⁾	
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to equity holders of the parent entity
Modal saham:				Share capital
- Seri A Dwwarna - nilai nominal Rp 1.355.160 per saham (dalam Rupiah penuh)				Class A Dwwarna - nominal value - Rp 1,355,160 per share (in full Rupiah amount)
- Seri B - nilai nominal Rp 1.000.000 per saham (dalam Rupiah penuh)				Class B - nominal value - Rp 1,000,000 per share (in full Rupiah amount)
Modal dasar:				Authorized capital
- Seri A Dwwarna - 1 saham				Class A Dwwarna - 1 share
- Seri B - 30.000.000 saham				Class B - 30,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh:				Issued and fully paid
- Seri A Dwwarna - 1 saham				Class A Dwwarna - 1 share
- Seri B - 7.538.732 saham				Class B - 7,538,732 shares
Penyertaan modal negara	7.838.733	-	-	The Government's share capital
Pengukuran kembali	-	(7.838.733)	7.838.733	Remeasurement of post-employment benefits
Imbalan pasca kerja	(28.564)	(13.618)	(15.670)	Unrealized losses on derivative securities measured at fair value
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(80.312)	(232.197)	(326.447)	Through other comprehensive income, after tax
Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	813.138	1.090.706	716.458	Appropriated retained earnings
Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya	<u>413.669</u>	<u>181.708</u>	<u>375.000</u>	Unappropriated retained earnings
JUMLAH EKUITAS	8.752.675	8.625.128	8.338.775	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	<u>18.088.240</u>	<u>18.062.770</u>	<u>18.841.483</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

¹⁾ Dengan sumber, awal Oktober 1

Released, see Note 4.1)

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2020	2019 ¹	
PENDAPATAN PENJAMINAN			GUARANTEE INCOME
Imbal jasa penjaminan	2,826,524	2,313,611	Guarantee fee income
Premi penjaminan ulang	<u>(380,486)</u>	<u>(284,742)</u>	Re-guarantee premium
Imbal jasa penjaminan bersih	2,446,038	2,028,869	Net guarantee income
BEBAN PENJAMINAN			GUARANTEE EXPENSES
Beban klaim			Claim expenses
Beban klaim	1,621,665	2,031,820	Claim expenses
Klaim penjaminan ulang	<u>(239,690)</u>	<u>(321,180)</u>	Re-guarantee claims
Kenaikan cadangan klaim	514,377	417,972	Increase in claim reserves
Pendapatan subrogasi - bersih	<u>(478,068)</u>	<u>(172,871)</u>	Subrogation income - net
Jumlah beban klaim	1,715,273	1,865,441	Total claim expenses
Penjaminan bersih	727,765	373,428	Net guarantee
Komisi - bersih	(25,683)	(45,977)	Commission - net
Pendapatan Investasi - bersih	742,781	737,938	Investment income - net
Beban usaha	<u>(836,961)</u>	<u>(106,326)</u>	Operating expenses
Beban lain-lain	53,820	23,483	Other expenses
LABA SEBELUM PAJAK	681,802	152,546	PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak final	<u>(107,101)</u>	<u>(123,173)</u>	Final tax expense
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	574,701	29,373	PROFIT BEFORE INCOME TAX
(Beban)/manfaat pajak penghasilan	<u>(143,702)</u>	152,333	Income tax (expense)/benefit
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	431,000	151,706	NET PROFIT FOR THE YEAR

¹ Disajikan kembali, lihat Catatan 4

Analisis, see Note 4

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020**

(Dinyalakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019¹</u>	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to profit or loss:
Perukuran kembali kewajiban imbalan kerja	(13,806)	3,136	Remeasurement of post-employment benefits
Efek pajak terkait	6,898)	(784)	Related tax effect
	<u>(13,266)</u>	<u>2,352</u>	
Kerugian yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(12,737)	-	Unrealised losses on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Efek pajak terkait	-	-	Related tax effect
	<u>(12,737)</u>	<u>-</u>	
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will be reclassified to profit or loss:
Keuntungan yang belum terealisasi atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	120,311	89,806	Unrealised gains on financial assets measured at fair value through other comprehensive income
Efek pajak terkait	(16,151)	4,362	Related tax effect
	<u>110,160</u>	<u>94,250</u>	
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	<u>34,157</u>	<u>95,602</u>	Other comprehensive income for the year, net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	<u>495,126</u>	<u>278,308</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEAR

¹ Dengan kondisi awal Januari

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Saldo 1 Januari 2019 ¹	Kenyataan modal negara / The Government's share capital	Modal ditempatkan dan disetor penuh / Fully paid capital	Pengeluaran kembali bagian kepemilikan perusahaan / Share repurchase	Keuntungan yang belum direalisasi atas nilai tukar mata uang asing / Foreign exchange gain/loss	Saldo laba yang ditahan / Retained earnings	Saldo 31 Desember 2019 ²
Ekuitas	1.638.733	-	1.638.733	-	1.638.733	329.020	8.265.475
Saldo laba tahun berjalan / Current year profit	-	-	-	-	1.309.713	(39.754)	(39.754)
Perubahan nilai tukar / Exchange rate change	-	-	-	-	181.726	181.726	181.726
Penghasilan komprehensif lainnya / Other comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lainnya / Other comprehensive income	-	-	-	-	94.256	-	94.256
Penghasilan komprehensif lainnya / Other comprehensive income	-	-	-	-	2.362	-	2.362
Saldo 31 Desember 2019 ¹	7.638.733	-	7.638.733	-	1.638.733	1.056.705	8.075.229
Implementasi PSAK 73, angka pada Saldo 1 Januari 2020 / PSAK 73 implementation, amount of Saldo 1 January 2020	-	-	-	-	54.462	(52.272)	32.190
Dampak perubahan saldo tahun / Impact of change in Company's fiscal year	-	-	-	-	177.250	359.458	636.708
Saldo 31 Desember 2020	7.638.733	-	7.638.733	-	1.812.445	1.416.291	8.790.671

1 dan/atau lampiran, lihat Lampiran 4

2 terlampir, refer to annex 4

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
ENTITAS INDIKUPARENT ENTITY

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020

(Dinyalakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2020

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019¹</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan imbal jasa penjaminan	2,267,081	2,454,411	Receipt from guarantee fee
Pembayaran klaim dan imbal jasa penjaminan ulang	325,699	479,561	Payment to re-guarantee partners
Penerimaan aktivitas operasi lainnya	604,227	132,343	Receipt from other operating activities
Pembayaran imbal jasa penjaminan ulang	(279,803)	(419,402)	Payment of fee re-guarantee
Pembayaran klaim	(1,691,478)	(1,782,384)	Payment of claims
Pembayaran biaya	(131,407)	(325,114)	Payment of expenses
Pembayaran kepada karyawan	(402,248)	(401,896)	Payment to employees
Pembayaran pajak penghasilan	(249,854)	(129,895)	Payment of income tax
Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	<u>412,315</u>	<u>13,024</u>	Net cash provided from operating activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI			INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan hasil investasi	318,197	611,998	Receipt from return of investment
Penempatan investasi yang dipasarkan	(770,681)	(749,345)	Placement of allowed investment
Pembelian aset tetap	(116,306)	(161,508)	Acquisition of fixed assets
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(37,590)</u>	<u>(87,855)</u>	Net cash used in investing activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Dividen	430,000	(39,754)	Dividend
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>430,000</u>	<u>(39,754)</u>	Net cash used in financing activities
Kerjakan (penurunan) kas dan kas di bank	4,726	(114,585)	Increase (decrease) in cash and cash in banks
KAS DAN KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	<u>81,111</u>	<u>195,696</u>	CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>85,837</u>	<u>81,111</u>	CASH ON HAND AND CASH IN BANKS AT THE END OF THE YEAR

¹ Dinyalakan kembali dari Catatan 4

Reviewed and Approved by

2020


LAPORAN TAHUNAN
ANNUAL REPORT




A member of **IFG**


Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar - Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

 (021) 6540335

 (021) 6540335

 contact@jamkrindo.co.id

 www.jamkrindo.co.id

